PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO 2026

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6935);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 06);
26. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 1.424.632.629.049,83		
b. belanja	Rp 1.385.107.097.412,50		
surplus/defisit		Rp	39.525.531.637,33
c. pembiayaan			
penerimaan	Rp 14.799.361.336,83		
pengeluaran	Rp 0,00		
pembiayaan netto		Rp	14.799.361.336,83

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp15.891.408.939,17 dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.440.524.037.989,00
   2. realisasi Rp 1.424.632.629.049,83
      selisih Rp 15.891.408.939,17
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp70.215.991.912,50 dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.455.323.089.325,00
   2. realisasi Rp 1.385.107.097.412,50
      selisih Rp 70.215.991.912,50
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar minus Rp54.324.582.973,33 dengan rincian sebagai berikut:
   1. surplus/defisit setelah perubahan (Rp 14.799.051.336,00)
   2. realisasi Rp 39.525.531.637,33
      selisih (Rp 54.324.582.973,33)
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar minus Rp310.000,83 dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 14.799.051.336,00
   2. realisasi Rp 14.799.361.336,83
      selisih (Rp 310.000,83)
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00
   2. realisasi Rp 0,00
      selisih Rp 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebesar minus Rp310.000,83 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	14.799.051.336,00
2.	realisasi	Rp	14.799.361.336,83
	selisih	(Rp	310.000,83)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	14.799.051.336,83
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	14.799.361.336,83
	sub total	(Rp	310.000,00)
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	54.324.892.974,16
	sub total	Rp	54.324.582.974,16
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	310.000,00
e.	saldo anggaran lebih akhir	Rp	54.324.892.974,16

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	jumlah aset	Rp	2.731.411.201.285,23
b.	jumlah kewajiban	Rp	24.843.980.727,33
c.	jumlah ekuitas dana	Rp	2.706.567.220.557,90

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	pendapatan-LO	Rp	1.387.117.299.036,39
b.	beban-LO	Rp	1.235.398.946.126,51
	surplus/defisit dari operasi	Rp	151.718.352.909,88
c.	kegiatan non operasional	Rp	3.230.281.772,71
	surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(Rp	3.230.281.772,71)
d.	surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp	148.488.071.137,17
e.	surplus/defisit-LO	Rp	148.488.071.137,17

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a.	saldo kas awal per 1 Januari tahun 2025	Rp	14.931.433.146,83
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	184.127.061.196,33
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp	144.601.529.559,00)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e.	saldo kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
f.	saldo kas di kas daerah	Rp	48.981.186.250,16
g.	saldo kas di bendahara penerimaan	Rp	0,00
h.	saldo kas di bendahara pengeluaran	Rp	0,00
i.	saldo kas di BLUD	Rp	3.521.177.533,00
j.	saldo kas dana kapitasi JKN pada bendahara FKTP	Rp	90.168.720,00
k.	saldo kas lainnya	Rp	6.102.334,00
l.	saldo kas dana BOSP	Rp	237.841.990,00
m.	saldo kas dana BOK Puskesmas	Rp	1.620.797.957,00
n.	saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2025	Rp	54.457.274.784,16

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp	2.553.212.194.126,89
b.	surplus/defisit-LO	Rp	148.488.071.137,17
c.	koreksi nilai persediaan	(Rp	10.749.353.110,50)
d.	koreksi selisih revaluasi aset tetap	Rp	0,00
e.	lain-lain	Rp	15.616.308.404,34
f.	ekuitas akhir	Rp	2.706.567.220.557,90

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran (LRA);
	Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan perubahan ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan arus kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:

Lampiran XX.1	:	Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2	:	Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 24 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

GELORA KURNIA PUTRA GINTING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2026 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA: (3-82/2026)

Lampiran I.1

Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

LAMPIRAN I.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TA 2025

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
		4	**Pendapatan**	**1.440.524.037.989,00**	**1.424.632.629.049,83**	**(15.891.408.939,17)**	**98,90**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**29.825.318.000,00**	**33.731.543.116,00**	**3.906.225.116,00**	**113,10**
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**27.923.968.000,00**	**31.547.482.544,00**	**3.623.514.544,00**	**112,98**
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**		**Dinas Kesehatan**	**2.287.873.000,00**	**2.569.350.007,00**	**281.477.007,00**	**112,30**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.287.873.000,00	2.569.350.007,00	281.477.007,00	112,30
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.287.873.000,00	2.569.350.007,00	281.477.007,00	112,30
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.287.873.000,00	2.569.350.007,00	281.477.007,00	112,30
1.02	**1.02.0.00.0.00.03.0000**		**Rumah Sakit Umum Daerah**	**25.636.095.000,00**	**28.978.132.537,00**	**3.342.037.537,00**	**113,04**
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	25.636.095.000,00	28.978.132.537,00	3.342.037.537,00	113,04
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.636.095.000,00	28.978.132.537,00	3.342.037.537,00	113,04
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	25.629.745.000,00	28.665.541.140,00	3.035.796.140,00	111,84
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.350.000,00	312.591.397,00	306.241.397,00	4.922,70
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**1.901.350.000,00**	**2.184.060.572,00**	**282.710.572,00**	**114,87**
1.03	**1.03.0.00.0.00.04.0000**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**1.901.350.000,00**	**2.184.060.572,00**	**282.710.572,00**	**114,87**
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.901.350.000,00	2.184.060.572,00	282.710.572,00	114,87
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.901.350.000,00	2.184.060.572,00	282.710.572,00	114,87
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.901.350.000,00	2.184.060.572,00	282.710.572,00	114,87
2			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**8.308.735.000,00**	**7.612.499.624,00**	**(696.235.376,00)**	**91,62**
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**10.000.000,00**	**60.209.664,00**	**50.209.664,00**	**602,10**
2.07	**2.07.2.17.0.00.09.0000**		**Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**	**10.000.000,00**	**60.209.664,00**	**50.209.664,00**	**602,10**
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000,00	60.209.664,00	50.209.664,00	602,10
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000,00	60.209.664,00	50.209.664,00	602,10
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000,00	60.209.664,00	50.209.664,00	602,10
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**186.863.000,00**	**188.778.000,00**	**1.915.000,00**	**101,02**
2.09	**2.09.3.25.0.00.11.0000**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**186.863.000,00**	**188.778.000,00**	**1.915.000,00**	**101,02**
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	186.863.000,00	188.778.000,00	1.915.000,00	101,02
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	186.863.000,00	188.778.000,00	1.915.000,00	101,02
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	186.863.000,00	188.778.000,00	1.915.000,00	101,02
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**2.197.407.000,00**	**1.875.620.000,00**	**(321.787.000,00)**	**85,36**
2.11	**2.11.3.29.0.00.12.0000**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**2.197.407.000,00**	**1.875.620.000,00**	**(321.787.000,00)**	**85,36**
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.197.407.000,00	1.875.620.000,00	(321.787.000,00)	85,36
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.197.407.000,00	1.875.620.000,00	(321.787.000,00)	85,36
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.197.407.000,00	1.875.620.000,00	(321.787.000,00)	85,36
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**2.199.465.000,00**	**2.201.750.000,00**	**2.285.000,00**	**100,10**
2.15	**2.15.0.00.0.00.15.0000**		**Dinas Perhubungan**	**2.199.465.000,00**	**2.201.750.000,00**	**2.285.000,00**	**100,10**
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.199.465.000,00	2.201.750.000,00	2.285.000,00	100,10
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.199.465.000,00	2.201.750.000,00	2.285.000,00	100,10
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.199.465.000,00	2.201.750.000,00	2.285.000,00	100,10
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**3.715.000.000,00**	**3.286.141.960,00**	**(428.858.040,00)**	**88,46**
2.19	**2.22.2.19.3.26.18.0000**		**Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata**	**3.715.000.000,00**	**3.286.141.960,00**	**(428.858.040,00)**	**88,46**
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.715.000.000,00	3.286.141.960,00	(428.858.040,00)	88,46
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.715.000.000,00	3.286.141.960,00	(428.858.040,00)	88,46
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.715.000.000,00	3.286.141.960,00	(428.858.040,00)	88,46
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**4.015.197.000,00**	**2.700.979.100,00**	**(1.314.217.900,00)**	**67,27**
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**175.868.000,00**	**117.450.000,00**	**(58.418.000,00)**	**66,78**
3.27	**3.27.0.00.0.00.20.0000**		**Dinas Pertanian**	**175.868.000,00**	**117.450.000,00**	**(58.418.000,00)**	**66,78**
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	175.868.000,00	117.450.000,00	(58.418.000,00)	66,78
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.868.000,00	117.450.000,00	(58.418.000,00)	66,78
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	175.868.000,00	117.450.000,00	(58.418.000,00)	66,78

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
3.29			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**3.839.329.000,00**	**2.583.529.100,00**	**(1.255.799.900,00)**	**67,29**
3.29	**3.31.3.30.3.29.21.0000**		**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**3.839.329.000,00**	**2.583.529.100,00**	**(1.255.799.900,00)**	**67,29**
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.839.329.000,00	2.583.529.100,00	(1.255.799.900,00)	67,29
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.839.329.000,00	2.583.529.100,00	(1.255.799.900,00)	67,29
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.839.329.000,00	2.583.529.100,00	(1.255.799.900,00)	67,29
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.398.374.787.989,00**	**1.380.587.607.209,83**	**(17.787.180.779,17)**	**98,73**
5.02			**KEUANGAN**	**1.398.374.787.989,00**	**1.380.587.607.209,83**	**(17.787.180.779,17)**	**98,73**
5.02	**5.02.0.00.0.00.25.0000**		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**1.296.421.776.071,00**	**1.290.104.961.917,69**	**(6.316.814.153,31)**	**99,51**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.296.421.776.071,00	1.290.104.961.917,69	(6.316.814.153,31)	99,51
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.243.291.014,00	16.002.001.872,69	3.758.710.858,69	130,70
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.446.458.482,00	3.446.458.482,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.796.832.532,00	12.555.543.390,69	3.758.710.858,69	142,73
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.265.621.122.964,00	1.255.825.821.775,00	(9.795.301.189,00)	99,23
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.170.206.183.978,00	1.169.598.451.826,00	(607.732.152,00)	99,95
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.414.938.986,00	86.227.369.949,00	(9.187.569.037,00)	90,37
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.557.362.093,00	18.277.138.270,00	(280.223.823,00)	98,49
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.557.362.093,00	18.277.138.270,00	(280.223.823,00)	98,49
5.02	**5.02.0.00.0.00.26.0000**		**Badan Pendapatan Daerah**	**101.953.011.918,00**	**90.482.645.292,14**	**(11.470.366.625,86)**	**88,75**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	101.953.011.918,00	90.482.645.292,14	(11.470.366.625,86)	88,75
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.953.011.918,00	90.482.645.292,14	(11.470.366.625,86)	88,75
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.1.01	Pajak Daerah	101.353.011.918,00	89.922.705.301,98	(11.430.306.616,02)	88,72
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	600.000.000,00	559.939.990,16	(40.060.009,84)	93,32
		5	**Belanja**	**1.455.323.089.325,00**	**1.385.107.097.412,50**	**(70.215.991.912,50)**	**95,18**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**786.450.044.194,00**	**757.546.312.806,00**	**(28.903.731.388,00)**	**96,32**
1.01			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**432.123.490.830,00**	**418.608.958.421,00**	**(13.514.532.409,00)**	**96,87**
1.01	**1.01.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pendidikan**	**432.123.490.830,00**	**418.608.958.421,00**	**(13.514.532.409,00)**	**96,87**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	432.123.490.830,00	418.608.958.421,00	(13.514.532.409,00)	96,87
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	385.810.333.707,00	372.531.426.344,00	(13.278.907.363,00)	96,56
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	316.263.943.669,00	305.436.252.977,00	(10.827.690.692,00)	96,58
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.049.827.293,00	49.702.329.557,00	(2.347.497.736,00)	95,49
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	17.496.562.745,00	17.392.843.810,00	(103.718.935,00)	99,41
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	46.313.157.123,00	46.077.532.077,00	(235.625.046,00)	99,49
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.677.566.490,00	18.480.756.363,00	(196.810.127,00)	98,95
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.523.403.797,00	18.454.277.200,00	(69.126.597,00)	99,63
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.112.186.836,00	9.142.498.514,00	30.311.678,00	100,33
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**232.830.247.263,00**	**224.614.284.181,00**	**(8.215.963.082,00)**	**96,47**
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**		**Dinas Kesehatan**	**177.718.377.301,00**	**171.611.787.126,00**	**(6.106.590.175,00)**	**96,56**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	177.718.377.301,00	171.611.787.126,00	(6.106.590.175,00)	96,56
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	161.769.730.976,00	156.108.463.447,00	(5.661.267.529,00)	96,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	92.514.438.566,00	90.154.454.636,00	(2.359.983.930,00)	97,45
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.255.292.410,00	65.954.008.811,00	(3.301.283.599,00)	95,23
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.948.646.325,00	15.503.323.679,00	(445.322.646,00)	97,21
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	844.787.000,00	621.521.401,00	(223.265.599,00)	73,57
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.103.859.325,00	14.881.802.278,00	(222.057.047,00)	98,53
1.02	**1.02.0.00.0.00.03.0000**		**Rumah Sakit Umum Daerah**	**55.111.869.962,00**	**53.002.497.055,00**	**(2.109.372.907,00)**	**96,17**
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	55.111.869.962,00	53.002.497.055,00	(2.109.372.907,00)	96,17
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	53.528.643.174,00	51.615.676.523,00	(1.912.966.651,00)	96,43
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	34.631.421.982,00	32.896.434.030,00	(1.734.987.952,00)	94,99
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.897.221.192,00	18.719.242.493,00	(177.978.699,00)	99,06
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.583.226.788,00	1.386.820.532,00	(196.406.256,00)	87,59
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.583.226.788,00	1.386.820.532,00	(196.406.256,00)	87,59
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**69.703.299.138,00**	**67.323.710.997,00**	**(2.379.588.141,00)**	**96,59**
1.03	**1.03.0.00.0.00.04.0000**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**69.703.299.138,00**	**67.323.710.997,00**	**(2.379.588.141,00)**	**96,59**
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	69.703.299.138,00	67.323.710.997,00	(2.379.588.141,00)	96,59
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	29.245.009.401,00	27.299.519.172,00	(1.945.490.229,00)	93,35
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.491.788.668,00	6.218.206.663,00	(273.582.005,00)	95,79

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.053.220.733,00	19.403.250.371,00	(1.649.970.362,00)	92,16
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.700.000.000,00	1.678.062.138,00	(21.937.862,00)	98,71
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	40.458.289.737,00	40.024.191.825,00	(434.097.912,00)	98,93
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.965.902,00	308.132.500,00	(26.833.402,00)	91,99
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.123.323.835,00	39.716.059.325,00	(407.264.510,00)	98,98
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**16.512.752.194,00**	**15.980.150.738,00**	**(532.601.456,00)**	**96,77**
1.04	**1.04.2.10.0.00.05.0000**		**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**	**16.512.752.194,00**	**15.980.150.738,00**	**(532.601.456,00)**	**96,77**
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	16.512.752.194,00	15.980.150.738,00	(532.601.456,00)	96,77
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.404.756.382,00	15.893.000.738,00	(511.755.644,00)	96,88
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.306.606.748,00	3.190.983.395,00	(115.623.353,00)	96,50
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.098.149.634,00	12.702.017.343,00	(396.132.291,00)	96,98
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	107.995.812,00	87.150.000,00	(20.845.812,00)	80,70
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.995.812,00	87.150.000,00	(20.845.812,00)	80,70
1.05			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**30.157.786.038,00**	**26.229.714.946,00**	**(3.928.071.092,00)**	**86,97**
1.05	**1.05.0.00.0.00.06.0000**		**Satuan Polisi Pamong Praja**	**17.883.102.566,00**	**16.961.762.037,00**	**(921.340.529,00)**	**94,85**
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	17.883.102.566,00	16.961.762.037,00	(921.340.529,00)	94,85
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.791.252.996,00	14.930.712.243,00	(860.540.753,00)	94,55
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.807.028.984,00	5.013.303.355,00	(793.725.629,00)	86,33
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.984.224.012,00	9.917.408.888,00	(66.815.124,00)	99,33
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.091.849.570,00	2.031.049.794,00	(60.799.776,00)	97,09
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.091.849.570,00	2.031.049.794,00	(60.799.776,00)	97,09
1.05	**1.05.0.00.0.00.07.0000**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**12.274.683.472,00**	**9.267.952.909,00**	**(3.006.730.563,00)**	**75,50**
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	12.274.683.472,00	9.267.952.909,00	(3.006.730.563,00)	75,50
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.602.305.805,00	8.695.549.149,00	(2.906.756.656,00)	74,95
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.888.214.163,00	3.688.662.716,00	(199.551.447,00)	94,87
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.376.091.642,00	5.006.886.433,00	(1.369.205.209,00)	78,53
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.338.000.000,00	0,00	(1.338.000.000,00)	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	672.377.667,00	572.403.760,00	(99.973.907,00)	85,13
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	294.676.787,00	284.896.760,00	(9.780.027,00)	96,68
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	287.700.880,00	287.507.000,00	(193.880,00)	99,93
1.06			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**5.122.468.731,00**	**4.789.493.523,00**	**(332.975.208,00)**	**93,50**
1.06	**1.06.0.00.0.00.08.0000**		**Dinas Sosial**	**5.122.468.731,00**	**4.789.493.523,00**	**(332.975.208,00)**	**93,50**
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	5.122.468.731,00	4.789.493.523,00	(332.975.208,00)	93,50
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.990.252.031,00	4.672.227.573,00	(318.024.458,00)	93,63
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.978.888.527,00	2.852.687.679,00	(126.200.848,00)	95,76
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.011.363.504,00	1.819.539.894,00	(191.823.610,00)	90,46
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	132.216.700,00	117.265.950,00	(14.950.750,00)	88,69
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.216.700,00	117.265.950,00	(14.950.750,00)	88,69
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**121.658.122.694,00**	**111.211.539.070,00**	**(10.446.583.624,00)**	**91,41**
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**4.885.462.101,00**	**4.216.548.180,00**	**(668.913.921,00)**	**86,31**
2.07	**2.07.2.17.0.00.09.0000**		**Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**	**4.885.462.101,00**	**4.216.548.180,00**	**(668.913.921,00)**	**86,31**
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	4.885.462.101,00	4.216.548.180,00	(668.913.921,00)	86,31
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.767.341.101,00	4.216.548.180,00	(550.792.921,00)	88,45
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.047.355.362,00	2.830.742.652,00	(216.612.710,00)	92,89
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.719.985.739,00	1.385.805.528,00	(334.180.211,00)	80,57
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	118.121.000,00	0,00	(118.121.000,00)	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.121.000,00	0,00	(118.121.000,00)	0,00
2.08			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**5.685.863.537,00**	**5.210.126.372,00**	**(475.737.165,00)**	**91,63**
2.08	**2.08.2.14.0.00.10.0000**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB**	**5.685.863.537,00**	**5.210.126.372,00**	**(475.737.165,00)**	**91,63**
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	5.685.863.537,00	5.210.126.372,00	(475.737.165,00)	91,63
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.517.816.803,00	5.053.694.072,00	(464.122.731,00)	91,59
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.272.501.486,00	4.019.379.676,00	(253.121.810,00)	94,08
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.245.315.317,00	1.034.314.396,00	(211.000.921,00)	83,06

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	168.046.734,00	156.432.300,00	(11.614.434,00)	93,09
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.046.734,00	156.432.300,00	(11.614.434,00)	93,09
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**6.970.758.522,00**	**6.503.424.780,00**	**(467.333.742,00)**	**93,30**
2.09	**2.09.3.25.0.00.11.0000**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**6.970.758.522,00**	**6.503.424.780,00**	**(467.333.742,00)**	**93,30**
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	6.970.758.522,00	6.503.424.780,00	(467.333.742,00)	93,30
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.844.203.672,00	6.385.776.921,00	(458.426.751,00)	93,30
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.441.030.849,00	5.273.399.449,00	(167.631.400,00)	96,92
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.403.172.823,00	1.112.377.472,00	(290.795.351,00)	79,28
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	126.554.850,00	117.647.859,00	(8.906.991,00)	92,96
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.554.850,00	117.647.859,00	(8.906.991,00)	92,96
2.10			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**503.550.015,00**	**353.542.100,00**	**(150.007.915,00)**	**70,21**
2.10	**1.04.2.10.0.00.05.0000**		**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**	**503.550.015,00**	**353.542.100,00**	**(150.007.915,00)**	**70,21**
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	503.550.015,00	353.542.100,00	(150.007.915,00)	70,21
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	503.550.015,00	353.542.100,00	(150.007.915,00)	70,21
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.550.015,00	353.542.100,00	(150.007.915,00)	70,21
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**27.005.633.382,00**	**24.157.706.244,00**	**(2.847.927.138,00)**	**89,45**
2.11	**2.11.3.29.0.00.12.0000**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**27.005.633.382,00**	**24.157.706.244,00**	**(2.847.927.138,00)**	**89,45**
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	5	BELANJA DAERAH	27.005.633.382,00	24.157.706.244,00	(2.847.927.138,00)	89,45
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	5.1	BELANJA OPERASI	24.938.538.028,00	22.380.404.745,00	(2.558.133.283,00)	89,74
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.465.259.414,00	3.221.299.717,00	(243.959.697,00)	92,96
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.473.278.614,00	19.159.105.028,00	(2.314.173.586,00)	89,22
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.067.095.354,00	1.777.301.499,00	(289.793.855,00)	85,98
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.877.095.354,00	1.587.301.499,00	(289.793.855,00)	84,56
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	100,00
2.12			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**5.203.179.675,00**	**4.583.876.495,00**	**(619.303.180,00)**	**88,10**
2.12	**2.12.0.00.0.00.13.0000**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**5.203.179.675,00**	**4.583.876.495,00**	**(619.303.180,00)**	**88,10**
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	5.203.179.675,00	4.583.876.495,00	(619.303.180,00)	88,10
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.668.850.280,00	4.231.815.495,00	(437.034.785,00)	90,64
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.060.813.577,00	2.746.048.415,00	(314.765.162,00)	89,72
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.608.036.703,00	1.485.767.080,00	(122.269.623,00)	92,40
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	534.329.395,00	352.061.000,00	(182.268.395,00)	65,89
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	534.329.395,00	352.061.000,00	(182.268.395,00)	65,89
2.13			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**8.952.350.719,00**	**8.210.420.667,00**	**(741.930.052,00)**	**91,71**
2.13	**2.13.0.00.0.00.14.0000**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**8.952.350.719,00**	**8.210.420.667,00**	**(741.930.052,00)**	**91,71**
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	8.952.350.719,00	8.210.420.667,00	(741.930.052,00)	91,71
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.692.121.849,00	7.972.786.567,00	(719.335.282,00)	91,72
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.985.374.035,00	3.866.494.664,00	(118.879.371,00)	97,02
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.706.747.814,00	4.106.291.903,00	(600.455.911,00)	87,24
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	5.2	BELANJA MODAL	260.228.870,00	237.634.100,00	(22.594.770,00)	91,32
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.228.870,00	237.634.100,00	(22.594.770,00)	91,32
2.14			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**3.663.885.999,00**	**2.344.992.802,00**	**(1.318.893.197,00)**	**64,00**
2.14	**2.08.2.14.0.00.10.0000**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB**	**3.663.885.999,00**	**2.344.992.802,00**	**(1.318.893.197,00)**	**64,00**
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	3.663.885.999,00	2.344.992.802,00	(1.318.893.197,00)	64,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.464.778.689,00	2.173.275.802,00	(1.291.502.887,00)	62,72
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.464.778.689,00	2.173.275.802,00	(1.291.502.887,00)	62,72
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	199.107.310,00	171.717.000,00	(27.390.310,00)	86,24
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.107.310,00	171.717.000,00	(27.390.310,00)	86,24
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**22.964.948.517,00**	**22.378.024.879,00**	**(586.923.638,00)**	**97,44**
2.15	**2.15.0.00.0.00.15.0000**		**Dinas Perhubungan**	**22.964.948.517,00**	**22.378.024.879,00**	**(586.923.638,00)**	**97,44**
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	22.964.948.517,00	22.378.024.879,00	(586.923.638,00)	97,44
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	19.532.804.936,00	18.983.281.961,00	(549.522.975,00)	97,19
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.384.850.531,00	5.199.725.164,00	(185.125.367,00)	96,56
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.147.954.405,00	13.783.556.797,00	(364.397.608,00)	97,42
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.432.143.581,00	3.394.742.918,00	(37.400.663,00)	98,91
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.859.421.513,00	1.832.784.010,00	(26.637.503,00)	98,57

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	536.417.200,00	527.228.179,00	(9.189.021,00)	98,29
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.036.304.868,00	1.034.730.729,00	(1.574.139,00)	99,85
2.16			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**8.238.749.673,00**	**8.135.432.865,00**	**(103.316.808,00)**	**98,75**
2.16	**2.16.2.20.2.21.16.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**8.238.749.673,00**	**8.135.432.865,00**	**(103.316.808,00)**	**98,75**
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	5	BELANJA DAERAH	8.238.749.673,00	8.135.432.865,00	(103.316.808,00)	98,75
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.424.923.776,00	7.330.443.933,00	(94.479.843,00)	98,73
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.856.283.970,00	2.813.861.454,00	(42.422.516,00)	98,51
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.568.639.806,00	4.516.582.479,00	(52.057.327,00)	98,86
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	813.825.897,00	804.988.932,00	(8.836.965,00)	98,91
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	813.825.897,00	804.988.932,00	(8.836.965,00)	98,91
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**1.832.891.870,00**	**829.887.557,00**	**(1.003.004.313,00)**	**45,28**
2.17	**2.07.2.17.0.00.09.0000**		**Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**	**1.832.891.870,00**	**829.887.557,00**	**(1.003.004.313,00)**	**45,28**
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	1.832.891.870,00	829.887.557,00	(1.003.004.313,00)	45,28
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.832.891.870,00	829.887.557,00	(1.003.004.313,00)	45,28
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.832.891.870,00	829.887.557,00	(1.003.004.313,00)	45,28
2.18			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**5.117.978.250,00**	**4.876.173.354,00**	**(241.804.896,00)**	**95,28**
2.18	**2.18.0.00.0.00.17.0000**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**5.117.978.250,00**	**4.876.173.354,00**	**(241.804.896,00)**	**95,28**
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	5	BELANJA DAERAH	5.117.978.250,00	4.876.173.354,00	(241.804.896,00)	95,28
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.857.953.582,00	4.618.187.154,00	(239.766.428,00)	95,06
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.075.993.089,00	2.939.528.162,00	(136.464.927,00)	95,56
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.781.960.493,00	1.678.658.992,00	(103.301.501,00)	94,20
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	5.2	BELANJA MODAL	260.024.668,00	257.986.200,00	(2.038.468,00)	99,22
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.024.668,00	257.986.200,00	(2.038.468,00)	99,22
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**2.936.763.001,00**	**2.397.025.318,00**	**(539.737.683,00)**	**81,62**
2.19	**2.22.2.19.3.26.18.0000**		**Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata**	**2.936.763.001,00**	**2.397.025.318,00**	**(539.737.683,00)**	**81,62**
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	5	BELANJA DAERAH	2.936.763.001,00	2.397.025.318,00	(539.737.683,00)	81,62
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.936.763.001,00	2.397.025.318,00	(539.737.683,00)	81,62
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.936.763.001,00	2.397.025.318,00	(539.737.683,00)	81,62
2.20			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**378.077.598,00**	**373.630.040,00**	**(4.447.558,00)**	**98,82**
2.20	**2.16.2.20.2.21.16.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**378.077.598,00**	**373.630.040,00**	**(4.447.558,00)**	**98,82**
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	5	BELANJA DAERAH	378.077.598,00	373.630.040,00	(4.447.558,00)	98,82
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	323.746.398,00	321.000.500,00	(2.745.898,00)	99,15
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.746.398,00	321.000.500,00	(2.745.898,00)	99,15
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	54.331.200,00	52.629.540,00	(1.701.660,00)	96,87
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.331.200,00	52.629.540,00	(1.701.660,00)	96,87
2.21			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**56.552.000,00**	**54.443.900,00**	**(2.108.100,00)**	**96,27**
2.21	**2.16.2.20.2.21.16.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**56.552.000,00**	**54.443.900,00**	**(2.108.100,00)**	**96,27**
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	5	BELANJA DAERAH	56.552.000,00	54.443.900,00	(2.108.100,00)	96,27
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	32.399.300,00	30.301.400,00	(2.097.900,00)	93,52
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.399.300,00	30.301.400,00	(2.097.900,00)	93,52
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	24.152.700,00	24.142.500,00	(10.200,00)	99,96
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.152.700,00	24.142.500,00	(10.200,00)	99,96
2.22			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.892.003.212,00**	**1.434.182.891,00**	**(457.820.321,00)**	**75,80**
2.22	**2.22.2.19.3.26.18.0000**		**Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata**	**1.892.003.212,00**	**1.434.182.891,00**	**(457.820.321,00)**	**75,80**
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	5	BELANJA DAERAH	1.892.003.212,00	1.434.182.891,00	(457.820.321,00)	75,80
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.727.031.252,00	1.270.535.831,00	(456.495.421,00)	73,57
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.727.031.252,00	1.270.535.831,00	(456.495.421,00)	73,57
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	164.971.960,00	163.647.060,00	(1.324.900,00)	99,20
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.971.960,00	163.647.060,00	(1.324.900,00)	99,20
2.23			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**15.263.075.358,00**	**15.049.007.071,00**	**(214.068.287,00)**	**98,60**
2.23	**2.23.2.24.0.00.19.0000**		**Dinas Perpustakaan dan Arsip**	**15.263.075.358,00**	**15.049.007.071,00**	**(214.068.287,00)**	**98,60**
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	5	BELANJA DAERAH	15.263.075.358,00	15.049.007.071,00	(214.068.287,00)	98,60
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.016.871.658,00	4.845.680.162,00	(171.191.496,00)	96,59
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.907.187.121,00	3.798.846.081,00	(108.341.040,00)	97,23
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.109.684.537,00	1.046.834.081,00	(62.850.456,00)	94,34
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.246.203.700,00	10.203.326.909,00	(42.876.791,00)	99,58
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.853.700,00	54.688.000,00	(165.700,00)	99,70

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000.000,00	9.957.288.909,00	(42.711.091,00)	99,57
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	191.350.000,00	191.350.000,00	0,00	100,00
2.24			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**106.399.265,00**	**103.093.555,00**	**(3.305.710,00)**	**96,89**
2.24	**2.23.2.24.0.00.19.0000**		**Dinas Perpustakaan dan Arsip**	**106.399.265,00**	**103.093.555,00**	**(3.305.710,00)**	**96,89**
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	5	BELANJA DAERAH	106.399.265,00	103.093.555,00	(3.305.710,00)	96,89
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	5.1	BELANJA OPERASI	106.399.265,00	103.093.555,00	(3.305.710,00)	96,89
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.399.265,00	103.093.555,00	(3.305.710,00)	96,89
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**61.244.820.000,00**	**56.358.031.607,50**	**(4.886.788.392,50)**	**92,02**
3.25			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1.876.535.490,00**	**1.543.900.133,00**	**(332.635.357,00)**	**82,27**
3.25	**2.09.3.25.0.00.11.0000**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**1.876.535.490,00**	**1.543.900.133,00**	**(332.635.357,00)**	**82,27**
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	1.876.535.490,00	1.543.900.133,00	(332.635.357,00)	82,27
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.803.139.490,00	1.471.615.890,00	(331.523.600,00)	81,61
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.803.139.490,00	1.471.615.890,00	(331.523.600,00)	81,61
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	73.396.000,00	72.284.243,00	(1.111.757,00)	98,49
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.396.000,00	72.284.243,00	(1.111.757,00)	98,49
3.26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**17.152.463.144,00**	**15.794.009.333,00**	**(1.358.453.811,00)**	**92,08**
3.26	**2.22.2.19.3.26.18.0000**		**Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata**	**17.152.463.144,00**	**15.794.009.333,00**	**(1.358.453.811,00)**	**92,08**
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	5	BELANJA DAERAH	17.152.463.144,00	15.794.009.333,00	(1.358.453.811,00)	92,08
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.763.271.644,00	12.427.596.099,00	(1.335.675.545,00)	90,30
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.227.797.187,00	4.934.945.005,00	(292.852.182,00)	94,40
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.535.474.457,00	7.492.651.094,00	(1.042.823.363,00)	87,78
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.389.191.500,00	3.366.413.234,00	(22.778.266,00)	99,33
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	320.879.584,00	319.298.920,00	(1.580.664,00)	99,51
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.699.624.000,00	2.679.114.314,00	(20.509.686,00)	99,24
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	368.687.916,00	368.000.000,00	(687.916,00)	99,81
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**28.360.101.702,00**	**26.578.355.341,50**	**(1.781.746.360,50)**	**93,72**
3.27	**3.27.0.00.0.00.20.0000**		**Dinas Pertanian**	**28.360.101.702,00**	**26.578.355.341,50**	**(1.781.746.360,50)**	**93,72**
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	5	BELANJA DAERAH	28.360.101.702,00	26.578.355.341,50	(1.781.746.360,50)	93,72
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	5.1	BELANJA OPERASI	27.858.224.612,00	26.184.050.302,50	(1.674.174.309,50)	93,99
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	15.034.755.557,00	14.104.737.975,00	(930.017.582,00)	93,81
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.823.469.055,00	12.079.312.327,50	(744.156.727,50)	94,20
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	5.2	BELANJA MODAL	501.877.090,00	394.305.039,00	(107.572.051,00)	78,57
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	501.877.090,00	394.305.039,00	(107.572.051,00)	78,57
3.29			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**20.009.265,00**	**2.680.000,00**	**(17.329.265,00)**	**13,39**
3.29	**3.31.3.30.3.29.21.0000**		**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**20.009.265,00**	**2.680.000,00**	**(17.329.265,00)**	**13,39**
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	5	BELANJA DAERAH	20.009.265,00	2.680.000,00	(17.329.265,00)	13,39
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.009.265,00	2.680.000,00	(17.329.265,00)	13,39
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.009.265,00	2.680.000,00	(17.329.265,00)	13,39
3.30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**13.161.973.405,00**	**11.904.283.869,00**	**(1.257.689.536,00)**	**90,44**
3.30	**3.31.3.30.3.29.21.0000**		**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**13.161.973.405,00**	**11.904.283.869,00**	**(1.257.689.536,00)**	**90,44**
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	5	BELANJA DAERAH	13.161.973.405,00	11.904.283.869,00	(1.257.689.536,00)	90,44
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.951.973.405,00	11.694.982.269,00	(1.256.991.136,00)	90,29
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.544.643.425,00	5.084.721.643,00	(459.921.782,00)	91,71
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.407.329.980,00	6.610.260.626,00	(797.069.354,00)	89,24
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	210.000.000,00	209.301.600,00	(698.400,00)	99,67
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.000.000,00	209.301.600,00	(698.400,00)	99,67
3.31			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**673.736.994,00**	**534.802.931,00**	**(138.934.063,00)**	**79,38**
3.31	**3.31.3.30.3.29.21.0000**		**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**673.736.994,00**	**534.802.931,00**	**(138.934.063,00)**	**79,38**
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	5	BELANJA DAERAH	673.736.994,00	534.802.931,00	(138.934.063,00)	79,38
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	578.382.979,00	440.013.931,00	(138.369.048,00)	76,08
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.382.979,00	440.013.931,00	(138.369.048,00)	76,08
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	95.354.015,00	94.789.000,00	(565.015,00)	99,41
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.839.000,00	(161.000,00)	99,68
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.354.015,00	44.950.000,00	(404.015,00)	99,11
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**87.444.293.321,00**	**80.567.533.816,00**	**(6.876.759.505,00)**	**92,14**
4.01			**SEKRETARIAT DAERAH**	**36.710.414.851,00**	**34.094.416.312,00**	**(2.615.998.539,00)**	**92,87**
4.01	**4.01.0.00.0.00.22.0000**		**Sekretariat Daerah**	**36.710.414.851,00**	**34.094.416.312,00**	**(2.615.998.539,00)**	**92,87**

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	5	BELANJA DAERAH	36.710.414.851,00	34.094.416.312,00	(2.615.998.539,00)	92,87
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	5.1	BELANJA OPERASI	31.033.552.361,00	28.809.176.629,00	(2.224.375.732,00)	92,83
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	12.711.542.508,00	12.336.307.275,00	(375.235.233,00)	97,05
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.322.009.853,00	16.472.869.354,00	(1.849.140.499,00)	89,91
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.676.862.490,00	5.285.239.683,00	(391.622.807,00)	93,10
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.676.862.490,00	5.285.239.683,00	(391.622.807,00)	93,10
4.02			**SEKRETARIAT DPRD**	**50.733.878.470,00**	**46.473.117.504,00**	**(4.260.760.966,00)**	**91,60**
4.02	**4.02.0.00.0.00.23.0000**		**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	**50.733.878.470,00**	**46.473.117.504,00**	**(4.260.760.966,00)**	**91,60**
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	5	BELANJA DAERAH	50.733.878.470,00	46.473.117.504,00	(4.260.760.966,00)	91,60
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	5.1	BELANJA OPERASI	45.129.014.492,00	41.595.540.493,00	(3.533.473.999,00)	92,17
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	22.735.158.442,00	21.598.133.289,00	(1.137.025.153,00)	95,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.393.856.050,00	19.997.407.204,00	(2.396.448.846,00)	89,30
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.604.863.978,00	4.877.577.011,00	(727.286.967,00)	87,02
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.604.863.978,00	4.877.577.011,00	(727.286.967,00)	87,02
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**323.999.527.204,00**	**307.711.499.243,00**	**(16.288.027.961,00)**	**94,97**
5.01			**PERENCANAAN**	**7.989.507.859,00**	**7.727.467.346,00**	**(262.040.513,00)**	**96,72**
5.01	**5.01.5.05.0.00.24.0000**		**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**	**7.989.507.859,00**	**7.727.467.346,00**	**(262.040.513,00)**	**96,72**
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	7.989.507.859,00	7.727.467.346,00	(262.040.513,00)	96,72
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.786.892.819,00	7.539.170.046,00	(247.722.773,00)	96,82
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.852.738.391,00	4.759.816.961,00	(92.921.430,00)	98,09
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.934.154.428,00	2.779.353.085,00	(154.801.343,00)	94,72
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.2	BELANJA MODAL	202.615.040,00	188.297.300,00	(14.317.740,00)	92,93
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.615.040,00	188.297.300,00	(14.317.740,00)	92,93
5.02			**KEUANGAN**	**308.214.937.964,00**	**293.136.034.651,00**	**(15.078.903.313,00)**	**95,11**
5.02	**5.02.0.00.0.00.25.0000**		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**297.782.644.723,00**	**283.951.634.959,00**	**(13.831.009.764,00)**	**95,36**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	297.782.644.723,00	283.951.634.959,00	(13.831.009.764,00)	95,36
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.825.882.459,00	7.950.831.108,00	(875.051.351,00)	90,09
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.396.596.406,00	4.241.402.478,00	(155.193.928,00)	96,47
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.429.286.053,00	3.709.428.630,00	(719.857.423,00)	83,75
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	306.469.560,00	191.727.096,00	(114.742.464,00)	62,56
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.469.560,00	117.139.536,00	(14.330.024,00)	89,10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	74.587.560,00	(100.412.440,00)	42,62
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.964.550.812,00	0,00	(2.964.550.812,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.964.550.812,00	0,00	(2.964.550.812,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	285.685.741.892,00	275.809.076.755,00	(9.876.665.137,00)	96,54
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.790.329.192,00	11.790.329.192,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	273.895.412.700,00	264.018.747.563,00	(9.876.665.137,00)	96,39
5.02	**5.02.0.00.0.00.26.0000**		**Badan Pendapatan Daerah**	**10.432.293.241,00**	**9.184.399.692,00**	**(1.247.893.549,00)**	**88,04**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5	BELANJA DAERAH	10.432.293.241,00	9.184.399.692,00	(1.247.893.549,00)	88,04
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.191.163.241,00	8.945.482.054,00	(1.245.681.187,00)	87,78
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.174.255.420,00	5.613.322.406,00	(560.933.014,00)	90,91
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.016.907.821,00	3.332.159.648,00	(684.748.173,00)	82,95
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2	BELANJA MODAL	241.130.000,00	238.917.638,00	(2.212.362,00)	99,08
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	241.130.000,00	238.917.638,00	(2.212.362,00)	99,08
5.03			**KEPEGAWAIAN**	**6.149.150.612,00**	**5.698.866.742,00**	**(450.283.870,00)**	**92,68**
5.03	**5.03.5.04.0.00.27.0000**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**6.149.150.612,00**	**5.698.866.742,00**	**(450.283.870,00)**	**92,68**
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	6.149.150.612,00	5.698.866.742,00	(450.283.870,00)	92,68
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.912.150.262,00	5.484.030.744,00	(428.119.518,00)	92,76
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.134.688.207,00	4.056.453.207,00	(78.235.000,00)	98,11
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.777.462.055,00	1.427.577.537,00	(349.884.518,00)	80,32
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.2	BELANJA MODAL	237.000.350,00	214.835.998,00	(22.164.352,00)	90,65
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.000.350,00	214.835.998,00	(22.164.352,00)	90,65
5.04			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**621.217.235,00**	**270.108.962,00**	**(351.108.273,00)**	**43,48**
5.04	**5.03.5.04.0.00.27.0000**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**621.217.235,00**	**270.108.962,00**	**(351.108.273,00)**	**43,48**
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	621.217.235,00	270.108.962,00	(351.108.273,00)	43,48
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	621.217.235,00	270.108.962,00	(351.108.273,00)	43,48
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	621.217.235,00	270.108.962,00	(351.108.273,00)	43,48

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
5.05			**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**1.024.713.534,00**	**879.021.542,00**	**(145.691.992,00)**	**85,78**
5.05	**5.01.5.05.0.00.24.0000**		**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**	**1.024.713.534,00**	**879.021.542,00**	**(145.691.992,00)**	**85,78**
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	1.024.713.534,00	879.021.542,00	(145.691.992,00)	85,78
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	849.305.773,00	713.883.941,00	(135.421.832,00)	84,05
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.305.773,00	713.883.941,00	(135.421.832,00)	84,05
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.2	BELANJA MODAL	175.407.761,00	165.137.601,00	(10.270.160,00)	94,14
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.407.761,00	165.137.601,00	(10.270.160,00)	94,14
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**8.413.709.648,00**	**8.243.992.151,00**	**(169.717.497,00)**	**97,98**
6.01			**INSPEKTORAT DAERAH**	**8.413.709.648,00**	**8.243.992.151,00**	**(169.717.497,00)**	**97,98**
6.01	**6.01.0.00.0.00.28.0000**		**Inspektorat Daerah**	**8.413.709.648,00**	**8.243.992.151,00**	**(169.717.497,00)**	**97,98**
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5	BELANJA DAERAH	8.413.709.648,00	8.243.992.151,00	(169.717.497,00)	97,98
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.237.117.548,00	8.069.669.651,00	(167.447.897,00)	97,97
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.371.786.305,00	6.283.968.114,00	(87.818.191,00)	98,62
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.865.331.243,00	1.785.701.537,00	(79.629.706,00)	95,73
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.2	BELANJA MODAL	176.592.100,00	174.322.500,00	(2.269.600,00)	98,71
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.592.100,00	174.322.500,00	(2.269.600,00)	98,71
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**57.614.741.961,00**	**55.304.315.001,00**	**(2.310.426.960,00)**	**95,99**
7.01			**KECAMATAN**	**57.614.741.961,00**	**55.304.315.001,00**	**(2.310.426.960,00)**	**95,99**
7.01	**7.01.0.00.0.00.29.0000**		**Kecamatan Kabanjahe**	**10.711.397.724,00**	**10.349.962.793,00**	**(361.434.931,00)**	**96,63**
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5	BELANJA DAERAH	10.711.397.724,00	10.349.962.793,00	(361.434.931,00)	96,63
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.126.871.724,00	7.786.006.137,00	(340.865.587,00)	95,81
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.304.305.239,00	5.073.358.613,00	(230.946.626,00)	95,65
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.822.566.485,00	2.712.647.524,00	(109.918.961,00)	96,11
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.584.526.000,00	2.563.956.656,00	(20.569.344,00)	99,20
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.366.000,00	19.364.000,00	(2.000,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.000.000,00	167.800.000,00	(2.200.000,00)	98,71
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.395.160.000,00	2.376.792.656,00	(18.367.344,00)	99,23
7.01	**7.01.0.00.0.00.30.0000**		**Kecamatan Berastagi**	**8.807.626.169,00**	**8.530.793.323,00**	**(276.832.846,00)**	**96,86**
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5	BELANJA DAERAH	8.807.626.169,00	8.530.793.323,00	(276.832.846,00)	96,86
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.733.266.169,00	5.480.979.584,00	(252.286.585,00)	95,60
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.203.823.004,00	4.058.400.205,00	(145.422.799,00)	96,54
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.529.443.165,00	1.422.579.379,00	(106.863.786,00)	93,01
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.074.360.000,00	3.049.813.739,00	(24.546.261,00)	99,20
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.000.000,00	218.615.739,00	(2.384.261,00)	98,92
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0004	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.853.360.000,00	2.831.198.000,00	(22.162.000,00)	99,22
7.01	**7.01.0.00.0.00.31.0000**		**Kecamatan Barusjahe**	**2.635.314.926,00**	**2.573.902.879,00**	**(61.412.047,00)**	**97,67**
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5	BELANJA DAERAH	2.635.314.926,00	2.573.902.879,00	(61.412.047,00)	97,67
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.619.200.842,00	2.557.807.879,00	(61.392.963,00)	97,66
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.295.858.628,00	2.234.945.997,00	(60.912.631,00)	97,35
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.342.214,00	322.861.882,00	(480.332,00)	99,85
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.2	BELANJA MODAL	16.114.084,00	16.095.000,00	(19.084,00)	99,88
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.114.084,00	16.095.000,00	(19.084,00)	99,88
7.01	**7.01.0.00.0.00.32.0000**		**Kecamatan Tiga Panah**	**2.970.308.213,00**	**2.853.567.225,00**	**(116.740.988,00)**	**96,07**
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5	BELANJA DAERAH	2.970.308.213,00	2.853.567.225,00	(116.740.988,00)	96,07
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.938.841.213,00	2.823.267.225,00	(115.573.988,00)	96,07
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.480.984.067,00	2.385.429.571,00	(95.554.496,00)	96,15
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.857.146,00	437.837.654,00	(20.019.492,00)	95,63
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.2	BELANJA MODAL	31.467.000,00	30.300.000,00	(1.167.000,00)	96,29
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.467.000,00	30.300.000,00	(1.167.000,00)	96,29
7.01	**7.01.0.00.0.00.33.0000**		**Kecamatan Merek**	**2.864.877.387,00**	**2.773.538.544,00**	**(91.338.843,00)**	**96,81**
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5	BELANJA DAERAH	2.864.877.387,00	2.773.538.544,00	(91.338.843,00)	96,81
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.844.580.187,00	2.757.260.644,00	(87.319.543,00)	96,93
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.461.186.949,00	2.389.795.295,00	(71.391.654,00)	97,10
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.393.238,00	367.465.349,00	(15.927.889,00)	95,85
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.297.200,00	16.277.900,00	(4.019.300,00)	80,20
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.297.200,00	16.277.900,00	(4.019.300,00)	80,20
7.01	**7.01.0.00.0.00.34.0000**		**Kecamatan Munte**	**2.318.366.276,00**	**2.270.686.609,00**	**(47.679.667,00)**	**97,94**

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5	BELANJA DAERAH	2.318.366.276,00	2.270.686.609,00	(47.679.667,00)	97,94
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.298.207.776,00	2.250.586.611,00	(47.621.165,00)	97,93
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.918.537.065,00	1.879.888.661,00	(38.648.404,00)	97,99
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.670.711,00	370.697.950,00	(8.972.761,00)	97,64
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.158.500,00	20.099.998,00	(58.502,00)	99,71
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.158.500,00	20.099.998,00	(58.502,00)	99,71
7.01	**7.01.0.00.0.00.35.0000**		**Kecamatan Juhar**	**2.766.744.081,00**	**2.614.880.013,00**	**(151.864.068,00)**	**94,51**
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5	BELANJA DAERAH	2.766.744.081,00	2.614.880.013,00	(151.864.068,00)	94,51
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.743.945.861,00	2.592.081.793,00	(151.864.068,00)	94,47
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.379.352.942,00	2.241.162.389,00	(138.190.553,00)	94,19
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.592.919,00	350.919.404,00	(13.673.515,00)	96,25
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.2	BELANJA MODAL	22.798.220,00	22.798.220,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.798.220,00	22.798.220,00	0,00	100,00
7.01	**7.01.0.00.0.00.36.0000**		**Kecamatan Tiga Binanga**	**3.525.869.367,00**	**3.405.292.470,00**	**(120.576.897,00)**	**96,58**
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5	BELANJA DAERAH	3.525.869.367,00	3.405.292.470,00	(120.576.897,00)	96,58
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.828.071.793,00	2.708.117.594,00	(119.954.199,00)	95,76
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.102.597.898,00	2.001.590.543,00	(101.007.355,00)	95,20
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	725.473.895,00	706.527.051,00	(18.946.844,00)	97,39
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.2	BELANJA MODAL	697.797.574,00	697.174.876,00	(622.698,00)	99,91
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.950.120,00	9.950.120,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	687.847.454,00	687.224.756,00	(622.698,00)	99,91
7.01	**7.01.0.00.0.00.37.0000**		**Kecamatan Lau Baleng**	**2.286.540.041,00**	**2.163.879.216,00**	**(122.660.825,00)**	**94,64**
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5	BELANJA DAERAH	2.286.540.041,00	2.163.879.216,00	(122.660.825,00)	94,64
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.228.209.421,00	2.105.943.284,00	(122.266.137,00)	94,51
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.912.608.391,00	1.796.322.994,00	(116.285.397,00)	93,92
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.601.030,00	309.620.290,00	(5.980.740,00)	98,10
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.2	BELANJA MODAL	58.330.620,00	57.935.932,00	(394.688,00)	99,32
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.330.620,00	57.935.932,00	(394.688,00)	99,32
7.01	**7.01.0.00.0.00.38.0000**		**Kecamatan Mardinding**	**2.154.435.608,00**	**2.038.109.872,00**	**(116.325.736,00)**	**94,60**
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5	BELANJA DAERAH	2.154.435.608,00	2.038.109.872,00	(116.325.736,00)	94,60
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.086.776.808,00	1.973.039.722,00	(113.737.086,00)	94,55
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.785.450.005,00	1.679.148.353,00	(106.301.652,00)	94,05
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.326.803,00	293.891.369,00	(7.435.434,00)	97,53
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.2	BELANJA MODAL	67.658.800,00	65.070.150,00	(2.588.650,00)	96,17
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.658.800,00	65.070.150,00	(2.588.650,00)	96,17
7.01	**7.01.0.00.0.00.39.0000**		**Kecamatan Payung**	**2.000.433.994,00**	**1.867.056.227,00**	**(133.377.767,00)**	**93,33**
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5	BELANJA DAERAH	2.000.433.994,00	1.867.056.227,00	(133.377.767,00)	93,33
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.433.994,00	1.867.056.227,00	(133.377.767,00)	93,33
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.703.229.968,00	1.581.381.958,00	(121.848.010,00)	92,85
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.204.026,00	285.674.269,00	(11.529.757,00)	96,12
7.01	**7.01.0.00.0.00.40.0000**		**Kecamatan Simpang Empat**	**2.959.232.309,00**	**2.836.766.422,00**	**(122.465.887,00)**	**95,86**
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5	BELANJA DAERAH	2.959.232.309,00	2.836.766.422,00	(122.465.887,00)	95,86
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.908.566.909,00	2.787.766.422,00	(120.800.487,00)	95,85
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.506.038.233,00	2.418.215.683,00	(87.822.550,00)	96,50
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.528.676,00	369.550.739,00	(32.977.937,00)	91,81
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.2	BELANJA MODAL	50.665.400,00	49.000.000,00	(1.665.400,00)	96,71
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.665.400,00	49.000.000,00	(1.665.400,00)	96,71
7.01	**7.01.0.00.0.00.41.0000**		**Kecamatan Kutabuluh**	**2.275.301.155,00**	**2.161.397.429,00**	**(113.903.726,00)**	**94,99**
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5	BELANJA DAERAH	2.275.301.155,00	2.161.397.429,00	(113.903.726,00)	94,99
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.183.389.855,00	2.071.277.929,00	(112.111.926,00)	94,87
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.830.253.366,00	1.721.119.897,00	(109.133.469,00)	94,04
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.136.489,00	350.158.032,00	(2.978.457,00)	99,16
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.2	BELANJA MODAL	91.911.300,00	90.119.500,00	(1.791.800,00)	98,05
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.411.300,00	62.619.500,00	(1.791.800,00)	97,22
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00
7.01	**7.01.0.00.0.00.42.0000**		**Kecamatan Dolat Rayat**	**2.045.249.223,00**	**1.991.093.224,00**	**(54.155.999,00)**	**97,35**
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	5	BELANJA DAERAH	2.045.249.223,00	1.991.093.224,00	(54.155.999,00)	97,35
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.045.249.223,00	1.991.093.224,00	(54.155.999,00)	97,35

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.743.400.798,00	1.690.792.514,00	(52.608.284,00)	96,98
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.848.425,00	300.300.710,00	(1.547.715,00)	99,49
7.01	**7.01.0.00.0.00.43.0000**		**Kecamatan Merdeka**	**2.304.232.521,00**	**2.236.259.170,00**	**(67.973.351,00)**	**97,05**
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	5	BELANJA DAERAH	2.304.232.521,00	2.236.259.170,00	(67.973.351,00)	97,05
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.304.232.521,00	2.236.259.170,00	(67.973.351,00)	97,05
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.945.916.489,00	1.921.179.926,00	(24.736.563,00)	98,73
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.316.032,00	315.079.244,00	(43.236.788,00)	87,93
7.01	**7.01.0.00.0.00.44.0000**		**Kecamatan Namanteran**	**2.330.604.628,00**	**2.213.498.443,00**	**(117.106.185,00)**	**94,98**
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	5	BELANJA DAERAH	2.330.604.628,00	2.213.498.443,00	(117.106.185,00)	94,98
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.310.291.972,00	2.195.454.443,00	(114.837.529,00)	95,03
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.975.534.387,00	1.891.594.743,00	(83.939.644,00)	95,75
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.757.585,00	303.859.700,00	(30.897.885,00)	90,77
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.312.656,00	18.044.000,00	(2.268.656,00)	88,83
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.312.656,00	18.044.000,00	(2.268.656,00)	88,83
7.01	**7.01.0.00.0.00.45.0000**		**Kecamatan Tiganderket**	**2.658.208.339,00**	**2.423.631.142,00**	**(234.577.197,00)**	**91,18**
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	5	BELANJA DAERAH	2.658.208.339,00	2.423.631.142,00	(234.577.197,00)	91,18
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.584.130.439,00	2.382.447.142,00	(201.683.297,00)	92,20
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.190.777.339,00	2.038.615.505,00	(152.161.834,00)	93,05
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.353.100,00	343.831.637,00	(49.521.463,00)	87,41
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	5.2	BELANJA MODAL	74.077.900,00	41.184.000,00	(32.893.900,00)	55,60
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.077.900,00	41.184.000,00	(32.893.900,00)	55,60
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**8.497.830.303,00**	**8.163.873.718,00**	**(333.956.585,00)**	**96,07**
8.01			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**8.497.830.303,00**	**8.163.873.718,00**	**(333.956.585,00)**	**96,07**
8.01	**8.01.0.00.0.00.46.0000**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**8.497.830.303,00**	**8.163.873.718,00**	**(333.956.585,00)**	**96,07**
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	5	BELANJA DAERAH	8.497.830.303,00	8.163.873.718,00	(333.956.585,00)	96,07
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.349.155.123,00	8.019.510.868,00	(329.644.255,00)	96,05
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.346.058.264,00	4.232.473.468,00	(113.584.796,00)	97,39
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.951.840.173,00	2.735.780.714,00	(216.059.459,00)	92,68
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.051.256.686,00	1.051.256.686,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	5.2	BELANJA MODAL	148.675.180,00	144.362.850,00	(4.312.330,00)	97,10
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.675.180,00	144.362.850,00	(4.312.330,00)	97,10
Jumlah				**(14.799.051.336,00)**	**39.525.531.637,33**	**54.324.582.973,33**	**(267,08)**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran I.2

Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

LAMPIRAN I.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TA 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.440.524.037.989,00**	**1.424.632.629.049,83**	**98,90**	**1.445.665.730.281,70**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**156.345.552.932,00**	**150.529.669.004,83**	**96,28**	**105.349.287.214,70**
4.1.01	Pajak Daerah	101.353.011.918,00	89.922.705.301,98	88,72	61.540.045.940,28
4.1.02	Retribusi Daerah	42.142.900.000,00	43.732.430.443,00	103,77	33.697.123.306,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.446.458.482,00	3.446.458.482,00	100,00	2.624.980.942,59
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.403.182.532,00	13.428.074.777,85	142,80	7.487.137.025,83
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**156.345.552.932,00**	**150.529.669.004,83**	**96,28**	**105.349.287.214,70**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.265.621.122.964,00**	**1.255.825.821.775,00**	**99,23**	**1.323.732.110.577,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.170.206.183.978,00	1.169.598.451.826,00	99,95	1.257.891.004.053,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.414.938.986,00	86.227.369.949,00	90,37	65.841.106.524,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1.265.621.122.964,00**	**1.255.825.821.775,00**	**99,23**	**1.323.732.110.577,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**18.557.362.093,00**	**18.277.138.270,00**	**98,49**	**16.584.332.490,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.557.362.093,00	18.277.138.270,00	98,49	16.584.332.490,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**18.557.362.093,00**	**18.277.138.270,00**	**98,49**	**16.584.332.490,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.440.524.037.989,00**	**1.424.632.629.049,83**	**98,90**	**1.445.665.730.281,70**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.455.323.089.325,00**	**1.385.107.097.412,50**	**95,18**	**1.524.844.149.888,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.017.025.989.362,00**	**963.428.644.459,50**	**94,73**	**1.017.870.013.586,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	636.648.855.621,00	612.409.535.553,00	96,19	622.939.163.784,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.791.314.310,00	330.896.946.272,50	92,23	343.502.153.763,00
5.1.05	Belanja Hibah	20.247.819.431,00	20.122.162.634,00	99,38	51.428.696.039,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.338.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.017.025.989.362,00**	**963.428.644.459,50**	**94,73**	**1.017.870.013.586,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**149.646.807.259,00**	**145.869.376.198,00**	**97,48**	**214.619.621.202,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.019.777.013,00	42.219.516.658,00	93,78	31.232.923.939,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.543.608.457,00	46.986.998.560,00	98,83	58.916.770.589,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.779.884.953,00	47.329.012.466,00	99,06	114.612.976.924,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.303.536.836,00	9.333.848.514,00	100,33	9.856.949.750,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**149.646.807.259,00**	**145.869.376.198,00**	**97,48**	**214.619.621.202,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.964.550.812,00**	**0,00**	**0,00**	**193.476.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.964.550.812,00	0,00	0,00	193.476.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.964.550.812,00**	**0,00**	**0,00**	**193.476.000,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**285.685.741.892,00**	**275.809.076.755,00**	**96,54**	**292.161.039.100,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.790.329.192,00	11.790.329.192,00	100,00	10.352.188.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	273.895.412.700,00	264.018.747.563,00	96,39	281.808.851.100,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**285.685.741.892,00**	**275.809.076.755,00**	**96,54**	**292.161.039.100,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.455.323.089.325,00**	**1.385.107.097.412,50**	**95,18**	**1.524.844.149.888,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(14.799.051.336,00)**	**39.525.531.637,33**	**(267,08)**	**(79.178.419.606,30)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**14.799.051.336,00**	**14.799.361.336,83**	**100,00**	**93.977.470.943,13**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**14.799.051.336,00**	**14.799.361.336,83**	**100,00**	**96.777.470.943,13**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.799.051.336,00	14.799.361.336,83	100,00	96.777.470.943,13
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**14.799.051.336,00**	**14.799.361.336,83**	**100,00**	**96.777.470.943,13**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	2.800.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**14.799.051.336,00**	**14.799.361.336,83**	**100,00**	**93.977.470.943,13**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**54.324.892.974,16**	**0,00**	**14.799.051.336,83**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran I.3

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Dinas Pendidikan

1.01.0.00.0.00.01.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	432.123.490.830,00	418.608.958.421,00	(13.514.532.409,00)	96,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	318.234.682.180,00	307.367.737.527,00	(10.866.944.653,00)	96,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.945.631,00	16.828.840,00	(116.791,00)	99,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	16.945.631,00	16.828.840,00	(116.791,00)	99,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.945.631,00	16.828.840,00	(116.791,00)	99,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.945.631,00	16.828.840,00	(116.791,00)	99,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	316.632.103.669,00	305.796.012.977,00	(10.836.090.692,00)	96,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	316.263.943.669,00	305.436.252.977,00	(10.827.690.692,00)	96,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	316.263.943.669,00	305.436.252.977,00	(10.827.690.692,00)	96,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	316.263.943.669,00	305.436.252.977,00	(10.827.690.692,00)	96,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	368.160.000,00	359.760.000,00	(8.400.000,00)	97,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	368.160.000,00	359.760.000,00	(8.400.000,00)	97,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.160.000,00	359.760.000,00	(8.400.000,00)	97,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	142.590.000,00	133.434.000,00	(9.156.000,00)	93,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	75.000.000,00	65.934.000,00	(9.066.000,00)	87,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	65.934.000,00	(9.066.000,00)	87,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	65.934.000,00	(9.066.000,00)	87,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	67.590.000,00	67.500.000,00	(90.000,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	67.590.000,00	67.500.000,00	(90.000,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.590.000,00	67.500.000,00	(90.000,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	409.722.880,00	409.219.151,00	(503.729,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	112.325.000,00	112.320.259,00	(4.741,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	112.325.000,00	112.320.259,00	(4.741,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.325.000,00	112.320.259,00	(4.741,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	129.698.780,00	129.657.350,00	(41.430,00)	99,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	129.698.780,00	129.657.350,00	(41.430,00)	99,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.698.780,00	129.657.350,00	(41.430,00)	99,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	12.000.000,00	11.991.000,00	(9.000,00)	99,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.991.000,00	(9.000,00)	99,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.991.000,00	(9.000,00)	99,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	85.699.100,00	85.250.542,00	(448.558,00)	99,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	85.699.100,00	85.250.542,00	(448.558,00)	99,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.699.100,00	85.250.542,00	(448.558,00)	99,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	350.000.000,00	344.732.910,00	(5.267.090,00)	98,50	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	200.000.000,00	197.546.910,00	(2.453.090,00)	98,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	733.138,00	732.810,00	(328,00)	99,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.138,00	732.810,00	(328,00)	99,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	199.266.862,00	196.814.100,00	(2.452.762,00)	98,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.266.862,00	196.814.100,00	(2.452.762,00)	98,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	150.000.000,00	147.186.000,00	(2.814.000,00)	98,12	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	87.801.000,00	(2.199.000,00)	97,56	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	87.801.000,00	(2.199.000,00)	97,56	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	59.385.000,00	(615.000,00)	98,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	59.385.000,00	(615.000,00)	98,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	439.980.000,00	424.300.934,00	(15.679.066,00)	96,44	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	73.800.000,00	67.159.934,00	(6.640.066,00)	91,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.800.000,00	67.159.934,00	(6.640.066,00)	91,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.800.000,00	67.159.934,00	(6.640.066,00)	91,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.000.000,00	29.816.000,00	(184.000,00)	99,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.816.000,00	(184.000,00)	99,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.816.000,00	(184.000,00)	99,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	336.180.000,00	327.325.000,00	(8.855.000,00)	97,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	336.180.000,00	327.325.000,00	(8.855.000,00)	97,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.180.000,00	327.325.000,00	(8.855.000,00)	97,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	243.340.000,00	243.208.715,00	(131.285,00)	99,95	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	75.340.000,00	75.280.415,00	(59.585,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.340.000,00	75.280.415,00	(59.585,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.340.000,00	75.280.415,00	(59.585,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	168.000.000,00	167.928.300,00	(71.700,00)	99,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	168.000.000,00	167.928.300,00	(71.700,00)	99,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.000.000,00	167.928.300,00	(71.700,00)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.1.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	113.598.196.656,00	110.954.411.939,00	(2.643.784.717,00)	97,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	64.777.512.346,00	63.840.092.075,00	(937.420.271,00)	98,55	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	963.478.366,00	962.791.355,00	(687.011,00)	99,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.039.866,00	28.981.175,00	(58.691,00)	99,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.039.866,00	28.981.175,00	(58.691,00)	99,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	934.438.500,00	933.810.180,00	(628.320,00)	99,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	149.903.280,00	(96.720,00)	99,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	784.438.500,00	783.906.900,00	(531.600,00)	99,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004		PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	3.132.515.088,00	3.126.956.205,00	(5.558.883,00)	99,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	147.855.088,00	147.756.905,00	(98.183,00)	99,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.855.088,00	147.756.905,00	(98.183,00)	99,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	2.984.660.000,00	2.979.199.300,00	(5.460.700,00)	99,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.000.000,00	206.016.000,00	(1.984.000,00)	99,05	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.776.660.000,00	2.773.183.300,00	(3.476.700,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005		PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	707.700.000,00	706.875.555,00	(824.445,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.223.488,00	14.223.155,00	(333,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.223.488,00	14.223.155,00	(333,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	693.476.512,00	692.652.400,00	(824.112,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.476.512,00	150.249.600,00	(226.912,00)	99,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	543.000.000,00	542.402.800,00	(597.200,00)	99,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	4.365.346.000,00	4.359.685.835,00	(5.660.165,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	284.880.000,00	284.657.035,00	(222.965,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.880.000,00	284.657.035,00	(222.965,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	4.080.466.000,00	4.075.028.800,00	(5.437.200,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.015.000.000,00	2.012.422.800,00	(2.577.200,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.065.466.000,00	2.062.606.000,00	(2.860.000,00)	99,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	874.281.536,00	873.247.305,00	(1.034.231,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	724.281.536,00	723.344.025,00	(937.511,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	724.281.536,00	723.344.025,00	(937.511,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.903.280,00	(96.720,00)	99,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	149.903.280,00	(96.720,00)	99,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011		REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	939.800.000,00	938.013.805,00	(1.786.195,00)	99,81	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	39.580.000,00	39.579.805,00	(195,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.580.000,00	39.579.805,00	(195,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	900.220.000,00	898.434.000,00	(1.786.000,00)	99,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900.220.000,00	898.434.000,00	(1.786.000,00)	99,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	262.125.405,00	246.725.185,00	(15.400.220,00)	94,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	262.125.405,00	246.725.185,00	(15.400.220,00)	94,12	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.125.405,00	246.725.185,00	(15.400.220,00)	94,12	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	1.569.057.086,00	323.415.989,00	(1.245.641.097,00)	20,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	1.569.057.086,00	323.415.989,00	(1.245.641.097,00)	20,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.569.057.086,00	323.415.989,00	(1.245.641.097,00)	20,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	141.030.715,00	139.630.685,00	(1.400.030,00)	99,01	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	141.030.715,00	139.630.685,00	(1.400.030,00)	99,01	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.030.715,00	139.630.685,00	(1.400.030,00)	99,01	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	37.890.604.090,00	38.502.459.122,00	611.855.032,00	101,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	28.388.585.462,00	28.099.063.036,00	(289.522.426,00)	98,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.074.605.462,00	19.828.405.409,00	(246.200.053,00)	98,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	8.313.980.000,00	8.270.657.627,00	(43.322.373,00)	99,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	9.502.018.628,00	10.403.396.086,00	901.377.458,00	109,49	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.331.787.892,00	3.308.078.472,00	(23.709.420,00)	99,29	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.170.230.736,00	7.095.317.614,00	925.086.878,00	114,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	211.015.715,00	182.163.930,00	(28.851.785,00)	86,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	211.015.715,00	182.163.930,00	(28.851.785,00)	86,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.015.715,00	182.163.930,00	(28.851.785,00)	86,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031		PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR	6.326.446.678,00	6.291.714.425,00	(34.732.253,00)	99,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	252.241.678,00	223.544.725,00	(28.696.953,00)	88,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.241.678,00	223.544.725,00	(28.696.953,00)	88,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	6.074.205.000,00	6.068.169.700,00	(6.035.300,00)	99,90	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	840.000.000,00	838.360.800,00	(1.639.200,00)	99,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.234.205.000,00	5.229.808.900,00	(4.396.100,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	98.597.463,00	92.370.865,00	(6.226.598,00)	93,68	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	5.1	BELANJA OPERASI	98.597.463,00	92.370.865,00	(6.226.598,00)	93,68	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.597.463,00	92.370.865,00	(6.226.598,00)	93,68	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	138.835.007,00	106.512.590,00	(32.322.417,00)	76,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036	5.1	BELANJA OPERASI	138.835.007,00	106.512.590,00	(32.322.417,00)	76,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.835.007,00	106.512.590,00	(32.322.417,00)	76,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	116.658.382,00	101.669.065,00	(14.989.317,00)	87,15	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	5.1	BELANJA OPERASI	116.658.382,00	101.669.065,00	(14.989.317,00)	87,15	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.658.382,00	101.669.065,00	(14.989.317,00)	87,15	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	418.013.495,00	317.640.500,00	(100.372.995,00)	75,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	418.013.495,00	317.640.500,00	(100.372.995,00)	75,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.013.495,00	317.640.500,00	(100.372.995,00)	75,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0041		FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	84.897.252,00	78.297.105,00	(6.600.147,00)	92,23	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	84.897.252,00	78.297.105,00	(6.600.147,00)	92,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.897.252,00	78.297.105,00	(6.600.147,00)	92,23	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043		PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	118.385.207,00	118.109.305,00	(275.902,00)	99,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	118.385.207,00	118.109.305,00	(275.902,00)	99,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.385.207,00	118.109.305,00	(275.902,00)	99,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	1.922.058.698,00	1.919.944.360,00	(2.114.338,00)	99,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	20.058.698,00	19.969.410,00	(89.288,00)	99,55	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.058.698,00	19.969.410,00	(89.288,00)	99,55	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.2	BELANJA MODAL	1.902.000.000,00	1.899.974.950,00	(2.025.050,00)	99,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.902.000.000,00	1.899.974.950,00	(2.025.050,00)	99,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	895.147.500,00	893.226.435,00	(1.921.065,00)	99,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.1	BELANJA OPERASI	895.147.500,00	893.226.435,00	(1.921.065,00)	99,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.147.500,00	893.226.435,00	(1.921.065,00)	99,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0049		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	154.534.382,00	134.709.465,00	(19.824.917,00)	87,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0049	5.1	BELANJA OPERASI	106.561.473,00	104.961.465,00	(1.600.008,00)	98,50	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.561.473,00	104.961.465,00	(1.600.008,00)	98,50	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0049	5.2	BELANJA MODAL	47.972.909,00	29.748.000,00	(18.224.909,00)	62,01	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0049	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.972.909,00	29.748.000,00	(18.224.909,00)	62,01	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	36.008.015,00	36.007.875,00	(140,00)	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	36.008.015,00	36.007.875,00	(140,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.008.015,00	36.007.875,00	(140,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	2.612.017.970,00	2.608.675.320,00	(3.342.650,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	1.092.832.079,00	1.091.173.620,00	(1.658.459,00)	99,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.092.832.079,00	1.091.173.620,00	(1.658.459,00)	99,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	1.519.185.891,00	1.517.501.700,00	(1.684.191,00)	99,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	684.280.000,00	683.626.800,00	(653.200,00)	99,90	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	834.905.891,00	833.874.900,00	(1.030.991,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR	375.890.444,00	375.890.435,00	(9,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1	BELANJA OPERASI	375.890.444,00	375.890.435,00	(9,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.890.444,00	375.890.435,00	(9,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	419.887.852,00	400.179.359,00	(19.708.493,00)	95,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.1	BELANJA OPERASI	187.852,00	187.760,00	(92,00)	99,95	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.852,00	187.760,00	(92,00)	99,95	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2	BELANJA MODAL	419.700.000,00	399.991.599,00	(19.708.401,00)	95,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	419.700.000,00	399.991.599,00	(19.708.401,00)	95,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	42.804.526.800,00	41.275.168.553,00	(1.529.358.247,00)	96,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	678.914.270,00	677.375.346,00	(1.538.924,00)	99,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.719.770,00	30.623.446,00	(96.324,00)	99,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.719.770,00	30.623.446,00	(96.324,00)	99,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	648.194.500,00	646.751.900,00	(1.442.600,00)	99,78	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.000.000,00	122.044.500,00	(955.500,00)	99,22	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	525.194.500,00	524.707.400,00	(487.100,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004		PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	2.109.698.553,00	2.081.487.860,00	(28.210.693,00)	98,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	95.281.365,00	95.100.560,00	(180.805,00)	99,81	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.281.365,00	95.100.560,00	(180.805,00)	99,81	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	2.014.417.188,00	1.986.387.300,00	(28.029.888,00)	98,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.000.000,00	214.274.400,00	(25.725.600,00)	89,28	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.774.417.188,00	1.772.112.900,00	(2.304.288,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006		PEMBANGUNAN LABORATORIUM	1.619.076.146,00	1.536.882.428,00	(82.193.718,00)	94,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	71.279.146,00	71.260.195,00	(18.951,00)	99,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.279.146,00	71.260.195,00	(18.951,00)	99,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.547.797.000,00	1.465.622.233,00	(82.174.767,00)	94,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.000.000,00	216.450.833,00	(38.549.167,00)	84,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.292.797.000,00	1.249.171.400,00	(43.625.600,00)	96,63	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	807.405.000,00	806.143.200,00	(1.261.800,00)	99,84	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	47.405.000,00	47.260.000,00	(145.000,00)	99,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.405.000,00	47.260.000,00	(145.000,00)	99,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	760.000.000,00	758.883.200,00	(1.116.800,00)	99,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	760.000.000,00	758.883.200,00	(1.116.800,00)	99,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	7.350.970.358,00	7.327.411.799,00	(23.558.559,00)	99,68	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	4.001.606.644,00	3.988.660.335,00	(12.946.309,00)	99,68	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.001.606.644,00	3.988.660.335,00	(12.946.309,00)	99,68	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	3.349.363.714,00	3.338.751.464,00	(10.612.250,00)	99,68	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.100.000.000,00	2.097.203.364,00	(2.796.636,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.249.363.714,00	1.241.548.100,00	(7.815.614,00)	99,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017		REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	532.464.630,00	530.526.550,00	(1.938.080,00)	99,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	381.464.630,00	381.009.550,00	(455.080,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.464.630,00	381.009.550,00	(455.080,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	151.000.000,00	149.517.000,00	(1.483.000,00)	99,02	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.000.000,00	149.517.000,00	(1.483.000,00)	99,02	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018		REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM	751.998.009,00	738.515.308,00	(13.482.701,00)	98,21	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	496.998.009,00	496.537.950,00	(460.059,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.998.009,00	496.537.950,00	(460.059,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2	BELANJA MODAL	255.000.000,00	241.977.358,00	(13.022.642,00)	94,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.000.000,00	241.977.358,00	(13.022.642,00)	94,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	611.618.530,00	610.832.450,00	(786.080,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	611.618.530,00	610.832.450,00	(786.080,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	611.618.530,00	610.832.450,00	(786.080,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	800.000.000,00	799.977.602,00	(22.398,00)	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	800.000.000,00	799.977.602,00	(22.398,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000.000,00	799.977.602,00	(22.398,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	500.000.000,00	498.945.000,00	(1.055.000,00)	99,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	498.945.000,00	(1.055.000,00)	99,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	498.945.000,00	(1.055.000,00)	99,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	761.350.000,00	761.349.850,00	(150,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	761.350.000,00	761.349.850,00	(150,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.350.000,00	761.349.850,00	(150,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	361.680.000,00	314.937.634,00	(46.742.366,00)	87,08	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	361.680.000,00	314.937.634,00	(46.742.366,00)	87,08	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.680.000,00	314.937.634,00	(46.742.366,00)	87,08	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	64.040.156,00	45.554.865,00	(18.485.291,00)	71,13	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1	BELANJA OPERASI	64.040.156,00	45.554.865,00	(18.485.291,00)	71,13	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.040.156,00	45.554.865,00	(18.485.291,00)	71,13	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	439.783.095,00	429.005.385,00	(10.777.710,00)	97,55	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	439.783.095,00	429.005.385,00	(10.777.710,00)	97,55	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.783.095,00	429.005.385,00	(10.777.710,00)	97,55	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	107.832.007,00	105.537.374,00	(2.294.633,00)	97,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	107.832.007,00	105.537.374,00	(2.294.633,00)	97,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.832.007,00	105.537.374,00	(2.294.633,00)	97,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	23.032.734.974,00	21.901.825.538,00	(1.130.909.436,00)	95,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	18.058.043.562,00	17.843.252.777,00	(214.790.785,00)	98,81	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.581.220.817,00	11.457.465.974,00	(123.754.843,00)	98,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	6.476.822.745,00	6.385.786.803,00	(91.035.942,00)	98,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	4.974.691.412,00	4.058.572.761,00	(916.118.651,00)	81,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.061.997.312,00	2.033.454.861,00	(28.542.451,00)	98,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.912.694.100,00	2.025.117.900,00	(887.576.200,00)	69,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	210.000.000,00	200.049.915,00	(9.950.085,00)	95,26	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	200.049.915,00	(9.950.085,00)	95,26	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	200.049.915,00	(9.950.085,00)	95,26	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	83.366.863,00	67.146.535,00	(16.220.328,00)	80,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.1	BELANJA OPERASI	83.366.863,00	67.146.535,00	(16.220.328,00)	80,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.366.863,00	67.146.535,00	(16.220.328,00)	80,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	76.185.193,00	62.377.090,00	(13.808.103,00)	81,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	5.1	BELANJA OPERASI	76.185.193,00	62.377.090,00	(13.808.103,00)	81,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.185.193,00	62.377.090,00	(13.808.103,00)	81,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	90.553.956,00	73.951.505,00	(16.602.451,00)	81,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	5.1	BELANJA OPERASI	90.553.956,00	73.951.505,00	(16.602.451,00)	81,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.553.956,00	73.951.505,00	(16.602.451,00)	81,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	726.052.274,00	643.630.480,00	(82.421.794,00)	88,65	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	726.052.274,00	643.630.480,00	(82.421.794,00)	88,65	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.052.274,00	643.630.480,00	(82.421.794,00)	88,65	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0055		PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	106.308.830,00	99.762.685,00	(6.546.145,00)	93,84	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0055	5.1	BELANJA OPERASI	106.308.830,00	99.762.685,00	(6.546.145,00)	93,84	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0055	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.308.830,00	99.762.685,00	(6.546.145,00)	93,84	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0060		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	90.115.000,00	78.480.510,00	(11.634.490,00)	87,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0060	5.1	BELANJA OPERASI	90.115.000,00	78.480.510,00	(11.634.490,00)	87,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0060	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.115.000,00	78.480.510,00	(11.634.490,00)	87,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	518.680.000,00	509.853.334,00	(8.826.666,00)	98,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1	BELANJA OPERASI	25.934.000,00	25.909.780,00	(24.220,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.934.000,00	25.909.780,00	(24.220,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.2	BELANJA MODAL	492.746.000,00	483.943.554,00	(8.802.446,00)	98,21	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	492.746.000,00	483.943.554,00	(8.802.446,00)	98,21	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	373.698.956,00	373.608.310,00	(90.646,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.1	BELANJA OPERASI	5.079.176,00	5.003.950,00	(75.226,00)	98,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.079.176,00	5.003.950,00	(75.226,00)	98,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.2	BELANJA MODAL	368.619.780,00	368.604.360,00	(15.420,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	368.619.780,00	368.604.360,00	(15.420,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	5.125.384.352,00	5.141.615.315,00	16.230.963,00	100,32	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	534.341.073,00	532.016.555,00	(2.324.518,00)	99,56	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.126.523,00	13.445.155,00	(1.681.368,00)	88,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.126.523,00	13.445.155,00	(1.681.368,00)	88,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	519.214.550,00	518.571.400,00	(643.150,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	519.214.550,00	518.571.400,00	(643.150,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD	152.873.215,00	152.852.195,00	(21.020,00)	99,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	152.873.215,00	152.852.195,00	(21.020,00)	99,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.873.215,00	152.852.195,00	(21.020,00)	99,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD	75.455.963,00	75.305.765,00	(150.198,00)	99,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1	BELANJA OPERASI	75.455.963,00	75.305.765,00	(150.198,00)	99,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.455.963,00	75.305.765,00	(150.198,00)	99,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	80.221.763,00	80.221.665,00	(98,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	80.221.763,00	80.221.665,00	(98,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.221.763,00	80.221.665,00	(98,00)	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	492.070.332,00	469.423.705,00	(22.646.627,00)	95,40	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	492.070.332,00	469.423.705,00	(22.646.627,00)	95,40	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.070.332,00	469.423.705,00	(22.646.627,00)	95,40	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	2.980.560.000,00	3.092.787.380,00	112.227.380,00	103,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.929.074.000,00	3.021.315.380,00	92.241.380,00	103,15	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.334.000,00	282.220.000,00	1.886.000,00	100,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	2.648.740.000,00	2.739.095.380,00	90.355.380,00	103,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	51.486.000,00	71.472.000,00	19.986.000,00	138,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.224.000,00	63.409.000,00	41.185.000,00	285,32	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.262.000,00	8.063.000,00	(21.199.000,00)	27,55	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	99.709.208,00	92.671.120,00	(7.038.088,00)	92,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1	BELANJA OPERASI	99.709.208,00	92.671.120,00	(7.038.088,00)	92,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.709.208,00	92.671.120,00	(7.038.088,00)	92,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0023		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	44.848.612,00	44.698.455,00	(150.157,00)	99,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0023	5.1	BELANJA OPERASI	44.848.612,00	44.698.455,00	(150.157,00)	99,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.848.612,00	44.698.455,00	(150.157,00)	99,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0024		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	44.882.456,00	43.881.995,00	(1.000.461,00)	97,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0024	5.1	BELANJA OPERASI	44.882.456,00	43.881.995,00	(1.000.461,00)	97,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.882.456,00	43.881.995,00	(1.000.461,00)	97,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	133.208.267,00	99.386.155,00	(33.822.112,00)	74,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1	BELANJA OPERASI	133.208.267,00	99.386.155,00	(33.822.112,00)	74,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.208.267,00	99.386.155,00	(33.822.112,00)	74,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	59.022.400,00	47.748.040,00	(11.274.360,00)	80,90	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026	5.1	BELANJA OPERASI	59.022.400,00	47.748.040,00	(11.274.360,00)	80,90	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.022.400,00	47.748.040,00	(11.274.360,00)	80,90	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0039		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	65.111.312,00	65.111.100,00	(212,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0039	5.1	BELANJA OPERASI	65.111.312,00	65.111.100,00	(212,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.111.312,00	65.111.100,00	(212,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	9.909.635,00	7.936.500,00	(1.973.135,00)	80,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.627.435,00	0,00	(1.627.435,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.627.435,00	0,00	(1.627.435,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	5.2	BELANJA MODAL	8.282.200,00	7.936.500,00	(345.700,00)	95,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.282.200,00	7.936.500,00	(345.700,00)	95,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK PAUD	326.502.153,00	317.931.750,00	(8.570.403,00)	97,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1	BELANJA OPERASI	167.624.463,00	159.440.400,00	(8.184.063,00)	95,12	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.624.463,00	159.440.400,00	(8.184.063,00)	95,12	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.2	BELANJA MODAL	158.877.690,00	158.491.350,00	(386.340,00)	99,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.877.690,00	158.491.350,00	(386.340,00)	99,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	26.667.963,00	19.642.935,00	(7.025.028,00)	73,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5.1	BELANJA OPERASI	26.667.963,00	19.642.935,00	(7.025.028,00)	73,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.667.963,00	19.642.935,00	(7.025.028,00)	73,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	890.773.158,00	697.535.996,00	(193.237.162,00)	78,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN	32.835.000,00	16.638.600,00	(16.196.400,00)	50,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	32.835.000,00	16.638.600,00	(16.196.400,00)	50,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.835.000,00	16.638.600,00	(16.196.400,00)	50,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	3.921.926,00	3.774.910,00	(147.016,00)	96,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5.1	BELANJA OPERASI	3.921.926,00	3.774.910,00	(147.016,00)	96,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.921.926,00	3.774.910,00	(147.016,00)	96,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	29.042.963,00	21.939.580,00	(7.103.383,00)	75,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1	BELANJA OPERASI	29.042.963,00	21.939.580,00	(7.103.383,00)	75,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.042.963,00	21.939.580,00	(7.103.383,00)	75,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	130.088.499,00	128.637.826,00	(1.450.673,00)	98,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1	BELANJA OPERASI	130.088.499,00	128.637.826,00	(1.450.673,00)	98,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.088.499,00	128.637.826,00	(1.450.673,00)	98,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	248.710.000,00	111.692.000,00	(137.018.000,00)	44,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	202.536.000,00	87.820.000,00	(114.716.000,00)	43,36	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.516.000,00	90.516.000,00	(55.000.000,00)	62,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	57.020.000,00	(2.696.000,00)	(59.716.000,00)	(4,73)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2	BELANJA MODAL	46.174.000,00	23.872.000,00	(22.302.000,00)	51,70	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.174.000,00	9.872.000,00	(36.302.000,00)	21,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0018		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	20.000.000,00	13.219.095,00	(6.780.905,00)	66,10	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0018	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	13.219.095,00	(6.780.905,00)	66,10	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	13.219.095,00	(6.780.905,00)	66,10	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0025		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	7.175.481,00	6.523.805,00	(651.676,00)	90,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0025	5.1	BELANJA OPERASI	7.175.481,00	6.523.805,00	(651.676,00)	90,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.175.481,00	6.523.805,00	(651.676,00)	90,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0026		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	16.356.015,00	12.565.755,00	(3.790.260,00)	76,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0026	5.1	BELANJA OPERASI	16.356.015,00	12.565.755,00	(3.790.260,00)	76,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.356.015,00	12.565.755,00	(3.790.260,00)	76,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	6.700.841,00	4.471.050,00	(2.229.791,00)	66,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1	BELANJA OPERASI	6.700.841,00	4.471.050,00	(2.229.791,00)	66,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.841,00	4.471.050,00	(2.229.791,00)	66,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0030		FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	9.243.481,00	0,00	(9.243.481,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0030	5.1	BELANJA OPERASI	9.243.481,00	0,00	(9.243.481,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.243.481,00	0,00	(9.243.481,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0031		PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	7.176.400,00	6.726.290,00	(450.110,00)	93,73	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0031	5.1	BELANJA OPERASI	7.176.400,00	6.726.290,00	(450.110,00)	93,73	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.176.400,00	6.726.290,00	(450.110,00)	93,73	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0036		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	35.941.333,00	31.746.000,00	(4.195.333,00)	88,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0036	5.2	BELANJA MODAL	35.941.333,00	31.746.000,00	(4.195.333,00)	88,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0036	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.941.333,00	31.746.000,00	(4.195.333,00)	88,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0041		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	173.691.454,00	171.495.000,00	(2.196.454,00)	98,74	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0041	5.1	BELANJA OPERASI	9.950.000,00	7.995.000,00	(1.955.000,00)	80,35	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	7.995.000,00	(1.955.000,00)	80,35	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0041	5.2	BELANJA MODAL	163.741.454,00	163.500.000,00	(241.454,00)	99,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0041	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.741.454,00	163.500.000,00	(241.454,00)	99,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	7.135.426,00	6.911.155,00	(224.271,00)	96,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042	5.1	BELANJA OPERASI	7.135.426,00	6.911.155,00	(224.271,00)	96,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.135.426,00	6.911.155,00	(224.271,00)	96,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	162.754.339,00	161.194.930,00	(1.559.409,00)	99,04	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1	BELANJA OPERASI	162.754.339,00	161.194.930,00	(1.559.409,00)	99,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.754.339,00	161.194.930,00	(1.559.409,00)	99,04	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.1.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	167.681.201,00	166.128.800,00	(1.552.401,00)	99,07	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	167.681.201,00	166.128.800,00	(1.552.401,00)	99,07	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001		PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	98.315.334,00	98.313.365,00	(1.969,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	98.315.334,00	98.313.365,00	(1.969,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.315.334,00	98.313.365,00	(1.969,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002		PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	69.365.867,00	67.815.435,00	(1.550.432,00)	97,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.365.867,00	67.815.435,00	(1.550.432,00)	97,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.365.867,00	67.815.435,00	(1.550.432,00)	97,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.1.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	122.930.793,00	120.680.155,00	(2.250.638,00)	98,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02		PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	122.930.793,00	120.680.155,00	(2.250.638,00)	98,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0001		PENILAIAN KELAYAKAN USUL PERIZINAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	73.533.333,00	73.533.045,00	(288,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.533.333,00	73.533.045,00	(288,00)	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.533.333,00	73.533.045,00	(288,00)	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0003		PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	49.397.460,00	47.147.110,00	(2.250.350,00)	95,44	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.397.460,00	47.147.110,00	(2.250.350,00)	95,44	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.397.460,00	47.147.110,00	(2.250.350,00)	95,44	
				JUMLAH BELANJA	432.123.490.830,00	418.608.958.421,00	(13.514.532.409,00)	96,87	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(432.123.490.830,00)	(418.608.958.421,00)	13.514.532.409,00	96,87	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(432.123.490.830,00)	(418.608.958.421,00)	13.514.532.409,00	96,87	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Kesehatan

1.02.0.00.0.00.02.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.287.873.000,00	2.569.350.007,00	281.477.007,00	112,30	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.287.873.000,00	2.569.350.007,00	281.477.007,00	112,30	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.287.873.000,00	2.569.350.007,00	281.477.007,00	112,30	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.287.873.000,00	2.569.350.007,00	281.477.007,00	112,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	177.718.377.301,00	171.611.787.126,00	(6.106.590.175,00)	96,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.023.415.328,00	91.625.821.261,00	(2.397.594.067,00)	97,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	65.546.200,00	60.272.000,00	(5.274.200,00)	91,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	65.546.200,00	60.272.000,00	(5.274.200,00)	91,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.546.200,00	60.272.000,00	(5.274.200,00)	91,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.546.200,00	60.272.000,00	(5.274.200,00)	91,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	92.792.808.566,00	90.416.564.636,00	(2.376.243.930,00)	97,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	92.514.438.566,00	90.154.454.636,00	(2.359.983.930,00)	97,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	92.514.438.566,00	90.154.454.636,00	(2.359.983.930,00)	97,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	92.514.438.566,00	90.154.454.636,00	(2.359.983.930,00)	97,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	278.370.000,00	262.110.000,00	(16.260.000,00)	94,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	278.370.000,00	262.110.000,00	(16.260.000,00)	94,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.370.000,00	262.110.000,00	(16.260.000,00)	94,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	213.906.062,00	210.566.796,00	(3.339.266,00)	98,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	33.848.362,00	32.626.896,00	(1.221.466,00)	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.848.362,00	32.626.896,00	(1.221.466,00)	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.848.362,00	32.626.896,00	(1.221.466,00)	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	45.602.400,00	45.141.500,00	(460.900,00)	98,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.092.400,00	5.015.000,00	(77.400,00)	98,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.092.400,00	5.015.000,00	(77.400,00)	98,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	40.510.000,00	40.126.500,00	(383.500,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.510.000,00	40.126.500,00	(383.500,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.000.000,00	25.999.800,00	(200,00)	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	25.999.800,00	(200,00)	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	25.999.800,00	(200,00)	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.870.000,00	7.812.000,00	(58.000,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.870.000,00	7.812.000,00	(58.000,00)	99,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.870.000,00	7.812.000,00	(58.000,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	100.585.300,00	98.986.600,00	(1.598.700,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.585.300,00	98.986.600,00	(1.598.700,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.585.300,00	98.986.600,00	(1.598.700,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	892.150.000,00	880.564.945,00	(11.585.055,00)	98,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	58.450.000,00	56.984.945,00	(1.465.055,00)	97,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.450.000,00	56.984.945,00	(1.465.055,00)	97,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.450.000,00	56.984.945,00	(1.465.055,00)	97,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	833.700.000,00	823.580.000,00	(10.120.000,00)	98,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	833.700.000,00	823.580.000,00	(10.120.000,00)	98,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	833.700.000,00	823.580.000,00	(10.120.000,00)	98,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	59.004.500,00	57.852.884,00	(1.151.616,00)	98,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	44.004.500,00	42.852.884,00	(1.151.616,00)	97,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.004.500,00	42.852.884,00	(1.151.616,00)	97,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.004.500,00	42.852.884,00	(1.151.616,00)	97,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	82.049.437.493,00	79.184.111.486,00	(2.865.326.007,00)	96,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.363.127.001,00	21.584.802.304,00	(778.324.697,00)	96,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001		PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	11.598.917.740,00	11.376.550.753,00	(222.366.987,00)	98,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	378.454.500,00	(21.545.500,00)	94,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	378.454.500,00	(21.545.500,00)	94,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	11.198.917.740,00	10.998.096.253,00	(200.821.487,00)	98,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.198.917.740,00	10.998.096.253,00	(200.821.487,00)	98,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.209.600,00	1.209.600,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.209.600,00	1.209.600,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.209.600,00	1.209.600,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0006		PENGEMBANGAN PUSKESMAS	1.308.800.000,00	1.086.019.660,00	(222.780.340,00)	82,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.440.000,00	23.410.000,00	(30.000,00)	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.440.000,00	23.410.000,00	(30.000,00)	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.285.360.000,00	1.062.609.660,00	(222.750.340,00)	82,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	445.360.000,00	222.610.500,00	(222.749.500,00)	49,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	840.000.000,00	839.999.160,00	(840,00)	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	2.605.728.000,00	2.586.981.967,00	(18.746.033,00)	99,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	130.286.415,00	129.800.000,00	(486.415,00)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.286.415,00	129.800.000,00	(486.415,00)	99,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	2.475.441.585,00	2.457.181.967,00	(18.259.618,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.475.441.585,00	2.457.181.967,00	(18.259.618,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	664.400.000,00	661.171.003,00	(3.228.997,00)	99,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	74.900.000,00	74.646.105,00	(253.895,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.900.000,00	74.646.105,00	(253.895,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	589.500.000,00	586.524.898,00	(2.975.102,00)	99,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	589.500.000,00	586.524.898,00	(2.975.102,00)	99,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	200.000.000,00	199.520.000,00	(480.000,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.520.000,00	(480.000,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.520.000,00	(480.000,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020		PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	140.031.000,00	114.842.000,00	(25.189.000,00)	82,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	140.031.000,00	114.842.000,00	(25.189.000,00)	82,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.031.000,00	114.842.000,00	(25.189.000,00)	82,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	5.720.932.661,00	5.435.728.111,00	(285.204.550,00)	95,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	5.720.932.661,00	5.435.728.111,00	(285.204.550,00)	95,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.932.661,00	5.435.728.111,00	(285.204.550,00)	95,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026		DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	123.108.000,00	122.779.210,00	(328.790,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	123.108.000,00	122.779.210,00	(328.790,00)	99,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.108.000,00	122.779.210,00	(328.790,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.541.151.892,00	57.456.093.502,00	(2.085.058.390,00)	96,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	257.978.000,00	232.045.000,00	(25.933.000,00)	89,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	257.978.000,00	232.045.000,00	(25.933.000,00)	89,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.978.000,00	232.045.000,00	(25.933.000,00)	89,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	289.783.000,00	261.475.500,00	(28.307.500,00)	90,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	289.783.000,00	261.475.500,00	(28.307.500,00)	90,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.783.000,00	261.475.500,00	(28.307.500,00)	90,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	1.020.454.000,00	5.400.000,00	(1.015.054.000,00)	0,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.020.454.000,00	5.400.000,00	(1.015.054.000,00)	0,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.454.000,00	5.400.000,00	(1.015.054.000,00)	0,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	575.100.000,00	5.400.000,00	(569.700.000,00)	0,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	575.100.000,00	5.400.000,00	(569.700.000,00)	0,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.100.000,00	5.400.000,00	(569.700.000,00)	0,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	159.800.000,00	27.000.000,00	(132.800.000,00)	16,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	159.800.000,00	27.000.000,00	(132.800.000,00)	16,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.800.000,00	27.000.000,00	(132.800.000,00)	16,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	225.400.000,00	5.400.000,00	(220.000.000,00)	2,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	225.400.000,00	5.400.000,00	(220.000.000,00)	2,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.400.000,00	5.400.000,00	(220.000.000,00)	2,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	1.273.220.400,00	1.273.220.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.273.220.400,00	1.273.220.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.273.220.400,00	1.273.220.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	3.536.088.000,00	36.240.000,00	(3.499.848.000,00)	1,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	3.536.088.000,00	36.240.000,00	(3.499.848.000,00)	1,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.536.088.000,00	36.240.000,00	(3.499.848.000,00)	1,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	200.350.000,00	14.850.000,00	(185.500.000,00)	7,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	200.350.000,00	14.850.000,00	(185.500.000,00)	7,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.350.000,00	14.850.000,00	(185.500.000,00)	7,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1.336.210.000,00	1.111.309.985,00	(224.900.015,00)	83,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.336.210.000,00	1.111.309.985,00	(224.900.015,00)	83,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.336.210.000,00	1.111.309.985,00	(224.900.015,00)	83,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	238.838.000,00	224.949.600,00	(13.888.400,00)	94,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	238.838.000,00	224.949.600,00	(13.888.400,00)	94,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.838.000,00	224.949.600,00	(13.888.400,00)	94,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	711.147.000,00	133.830.000,00	(577.317.000,00)	18,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	711.147.000,00	133.830.000,00	(577.317.000,00)	18,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	711.147.000,00	133.830.000,00	(577.317.000,00)	18,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0022		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	81.800.000,00	0,00	(81.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	81.800.000,00	0,00	(81.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.800.000,00	0,00	(81.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	3.520.236.058,00	1.586.933.442,00	(1.933.302.616,00)	45,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	3.244.736.058,00	1.311.443.441,00	(1.933.292.617,00)	40,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.244.736.058,00	1.311.443.441,00	(1.933.292.617,00)	40,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	275.500.000,00	275.490.001,00	(9.999,00)	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.500.000,00	275.490.001,00	(9.999,00)	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	41.293.493.371,00	50.988.347.075,00	9.694.853.704,00	123,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	41.293.493.371,00	50.988.347.075,00	9.694.853.704,00	123,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.293.493.371,00	50.988.347.075,00	9.694.853.704,00	123,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0027		DETEKSI DINI PENYALAHGUNAAN NAPZA DI FASYANKES DAN SEKOLAH	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	4.792.454.063,00	1.520.892.500,00	(3.271.561.563,00)	31,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	4.792.454.063,00	1.520.892.500,00	(3.271.561.563,00)	31,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.792.454.063,00	1.520.892.500,00	(3.271.561.563,00)	31,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	135.008.600,00	133.965.680,00	(1.042.920,00)	99,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	135.008.600,00	133.965.680,00	(1.042.920,00)	99,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.591.600,00	50.671.280,00	(920.320,00)	98,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.591.600,00	50.671.280,00	(920.320,00)	98,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	83.417.000,00	83.294.400,00	(122.600,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.417.000,00	83.294.400,00	(122.600,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.150.000,00	9.250.000,00	(900.000,00)	91,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA	10.150.000,00	9.250.000,00	(900.000,00)	91,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.150.000,00	9.250.000,00	(900.000,00)	91,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	9.250.000,00	(900.000,00)	91,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	883.316.480,00	613.704.680,00	(269.611.800,00)	69,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	218.352.480,00	80.123.190,00	(138.229.290,00)	36,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0003		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	218.352.480,00	80.123.190,00	(138.229.290,00)	36,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	218.352.480,00	80.123.190,00	(138.229.290,00)	36,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.352.480,00	80.123.190,00	(138.229.290,00)	36,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	664.964.000,00	533.581.490,00	(131.382.510,00)	80,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	664.964.000,00	533.581.490,00	(131.382.510,00)	80,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	664.964.000,00	533.581.490,00	(131.382.510,00)	80,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	664.964.000,00	533.581.490,00	(131.382.510,00)	80,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.2.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	196.448.000,00	80.899.699,00	(115.548.301,00)	41,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	56.870.000,00	6.880.800,00	(49.989.200,00)	12,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	56.870.000,00	6.880.800,00	(49.989.200,00)	12,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.870.000,00	6.880.800,00	(49.989.200,00)	12,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.870.000,00	6.880.800,00	(49.989.200,00)	12,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.05		PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN	19.320.000,00	4.451.700,00	(14.868.300,00)	23,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.05.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN	19.320.000,00	4.451.700,00	(14.868.300,00)	23,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.320.000,00	4.451.700,00	(14.868.300,00)	23,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.320.000,00	4.451.700,00	(14.868.300,00)	23,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06		PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	120.258.000,00	69.567.199,00	(50.690.801,00)	57,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06.0001		PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	120.258.000,00	69.567.199,00	(50.690.801,00)	57,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	120.258.000,00	69.567.199,00	(50.690.801,00)	57,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.258.000,00	69.567.199,00	(50.690.801,00)	57,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	565.760.000,00	107.250.000,00	(458.510.000,00)	18,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01.0001		PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	563.060.000,00	104.550.000,00	(458.510.000,00)	18,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	563.060.000,00	104.550.000,00	(458.510.000,00)	18,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	563.060.000,00	104.550.000,00	(458.510.000,00)	18,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.060.000,00	104.550.000,00	(458.510.000,00)	18,57	
				JUMLAH BELANJA	177.718.377.301,00	171.611.787.126,00	(6.106.590.175,00)	96,56	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(175.430.504.301,00)	(169.042.437.119,00)	6.388.067.182,00	96,36	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(175.430.504.301,00)	(169.042.437.119,00)	6.388.067.182,00	96,36	

Kabanjahe, 24 September 2026

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Rumah Sakit Umum Daerah

1.02.0.00.0.00.03.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	25.636.095.000,00	28.978.132.537,00	3.342.037.537,00	113,04	
	1.02.0.00.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.636.095.000,00	28.978.132.537,00	3.342.037.537,00	113,04	
	1.02.0.00.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	25.629.745.000,00	28.665.541.140,00	3.035.796.140,00	111,84	
	1.02.0.00.0.00.03.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.350.000,00	312.591.397,00	306.241.397,00	4.922,70	
				JUMLAH PENDAPATAN	25.636.095.000,00	28.978.132.537,00	3.342.037.537,00	113,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	55.111.869.962,00	53.002.497.055,00	(2.109.372.907,00)	96,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.833.880.929,00	51.787.224.891,00	(2.046.656.038,00)	96,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	22.847.178.998,00	21.111.202.195,00	(1.735.976.803,00)	92,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	22.691.418.998,00	20.957.920.582,00	(1.733.498.416,00)	92,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.691.418.998,00	20.957.920.582,00	(1.733.498.416,00)	92,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	22.691.418.998,00	20.957.920.582,00	(1.733.498.416,00)	92,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	155.760.000,00	153.281.613,00	(2.478.387,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	155.760.000,00	153.281.613,00	(2.478.387,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.760.000,00	153.281.613,00	(2.478.387,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	204.750.000,00	200.732.000,00	(4.018.000,00)	98,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	204.750.000,00	200.732.000,00	(4.018.000,00)	98,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	204.750.000,00	200.732.000,00	(4.018.000,00)	98,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.750.000,00	200.732.000,00	(4.018.000,00)	98,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.240.858.592,00	3.120.498.561,00	(120.360.031,00)	96,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	428.400.000,00	412.805.256,00	(15.594.744,00)	96,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	428.400.000,00	412.805.256,00	(15.594.744,00)	96,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.400.000,00	412.805.256,00	(15.594.744,00)	96,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.812.458.592,00	2.707.693.305,00	(104.765.287,00)	96,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.805.484.900,00	2.701.743.705,00	(103.741.195,00)	96,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.805.484.900,00	2.701.743.705,00	(103.741.195,00)	96,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0004	5.2	BELANJA MODAL	6.973.692,00	5.949.600,00	(1.024.092,00)	85,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.973.692,00	5.949.600,00	(1.024.092,00)	85,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	84.666.141,00	80.812.366,00	(3.853.775,00)	95,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	84.666.141,00	80.812.366,00	(3.853.775,00)	95,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.666.141,00	80.812.366,00	(3.853.775,00)	95,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.666.141,00	80.812.366,00	(3.853.775,00)	95,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	27.456.427.198,00	27.273.979.769,00	(182.447.429,00)	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	27.456.427.198,00	27.273.979.769,00	(182.447.429,00)	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.577.070.070,00	26.574.695.337,00	(2.374.733,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.940.002.984,00	11.938.513.448,00	(1.489.536,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.637.067.086,00	14.636.181.889,00	(885.197,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	879.357.128,00	699.284.432,00	(180.072.696,00)	79,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	879.357.128,00	699.284.432,00	(180.072.696,00)	79,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.277.989.033,00	1.215.272.164,00	(62.716.869,00)	95,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	845.895.968,00	805.586.500,00	(40.309.468,00)	95,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	845.895.968,00	805.586.500,00	(40.309.468,00)	95,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	149.000.000,00	124.000.000,00	(25.000.000,00)	83,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.000.000,00	124.000.000,00	(25.000.000,00)	83,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	696.895.968,00	681.586.500,00	(15.309.468,00)	97,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	696.895.968,00	681.586.500,00	(15.309.468,00)	97,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	432.093.065,00	409.685.664,00	(22.407.401,00)	94,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	432.093.065,00	409.685.664,00	(22.407.401,00)	94,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	432.093.065,00	409.685.664,00	(22.407.401,00)	94,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.093.065,00	409.685.664,00	(22.407.401,00)	94,81	
				JUMLAH BELANJA	55.111.869.962,00	53.002.497.055,00	(2.109.372.907,00)	96,17	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(29.475.774.962,00)	(24.024.364.518,00)	5.451.410.444,00	81,51	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.0.00.0.00.04.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.0.00.0.00.04.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.901.350.000,00	2.184.060.572,00	282.710.572,00	114,87	
	1.03.0.00.0.00.04.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.901.350.000,00	2.184.060.572,00	282.710.572,00	114,87	
	1.03.0.00.0.00.04.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.901.350.000,00	2.184.060.572,00	282.710.572,00	114,87	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.901.350.000,00	2.184.060.572,00	282.710.572,00	114,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	69.703.299.138,00	67.323.710.997,00	(2.379.588.141,00)	96,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.763.718.424,00	9.127.870.189,00	(635.848.235,00)	93,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.721.221.918,00	6.433.196.663,00	(288.025.255,00)	95,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.491.788.668,00	6.218.206.663,00	(273.582.005,00)	95,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.491.788.668,00	6.218.206.663,00	(273.582.005,00)	95,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.491.788.668,00	6.218.206.663,00	(273.582.005,00)	95,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	229.433.250,00	214.990.000,00	(14.443.250,00)	93,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	229.433.250,00	214.990.000,00	(14.443.250,00)	93,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.433.250,00	214.990.000,00	(14.443.250,00)	93,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	60.480.000,00	54.000.000,00	(6.480.000,00)	89,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	60.480.000,00	54.000.000,00	(6.480.000,00)	89,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.480.000,00	54.000.000,00	(6.480.000,00)	89,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.480.000,00	54.000.000,00	(6.480.000,00)	89,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	891.690.286,00	836.414.424,00	(55.275.862,00)	93,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	22.919.550,00	22.017.500,00	(902.050,00)	96,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.919.550,00	22.017.500,00	(902.050,00)	96,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.919.550,00	22.017.500,00	(902.050,00)	96,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	387.412.387,00	371.084.300,00	(16.328.087,00)	95,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.938.885,00	131.991.800,00	(947.085,00)	99,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.938.885,00	131.991.800,00	(947.085,00)	99,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	254.473.502,00	239.092.500,00	(15.381.002,00)	93,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	254.473.502,00	239.092.500,00	(15.381.002,00)	93,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	84.773.349,00	73.860.200,00	(10.913.149,00)	87,13	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.280.949,00	32.820.200,00	(1.460.749,00)	95,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.280.949,00	32.820.200,00	(1.460.749,00)	95,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	50.492.400,00	41.040.000,00	(9.452.400,00)	81,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.492.400,00	41.040.000,00	(9.452.400,00)	81,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	31.656.000,00	28.877.400,00	(2.778.600,00)	91,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.656.000,00	28.877.400,00	(2.778.600,00)	91,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.656.000,00	28.877.400,00	(2.778.600,00)	91,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	364.929.000,00	340.575.024,00	(24.353.976,00)	93,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	364.929.000,00	340.575.024,00	(24.353.976,00)	93,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.929.000,00	340.575.024,00	(24.353.976,00)	93,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	93,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	93,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	93,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	93,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.034.782.720,00	960.119.880,00	(74.662.840,00)	92,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	61.500.000,00	49.306.600,00	(12.193.400,00)	80,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.500.000,00	49.306.600,00	(12.193.400,00)	80,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000,00	49.306.600,00	(12.193.400,00)	80,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	56.050.000,00	51.650.000,00	(4.400.000,00)	92,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	56.050.000,00	51.650.000,00	(4.400.000,00)	92,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.050.000,00	51.650.000,00	(4.400.000,00)	92,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	917.232.720,00	859.163.280,00	(58.069.440,00)	93,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	917.232.720,00	859.163.280,00	(58.069.440,00)	93,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	917.232.720,00	859.163.280,00	(58.069.440,00)	93,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.025.543.500,00	816.139.222,00	(209.404.278,00)	79,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	69.870.000,00	64.545.947,00	(5.324.053,00)	92,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.870.000,00	64.545.947,00	(5.324.053,00)	92,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.870.000,00	64.545.947,00	(5.324.053,00)	92,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0003		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	955.673.500,00	751.593.275,00	(204.080.225,00)	78,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	955.673.500,00	751.593.275,00	(204.080.225,00)	78,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	955.673.500,00	751.593.275,00	(204.080.225,00)	78,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.3.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.377.698.811,00	6.235.563.323,00	(142.135.488,00)	97,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.377.698.811,00	6.235.563.323,00	(142.135.488,00)	97,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0003		PEMBANGUNAN BENDUNG IRIGASI	1.300.000.000,00	1.260.613.849,00	(39.386.151,00)	96,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.300.000.000,00	1.260.613.849,00	(39.386.151,00)	96,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.300.000.000,00	1.260.613.849,00	(39.386.151,00)	96,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0014		REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	2.388.499.962,00	2.358.254.024,00	(30.245.938,00)	98,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	2.388.499.962,00	2.358.254.024,00	(30.245.938,00)	98,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.388.499.962,00	2.358.254.024,00	(30.245.938,00)	98,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0021		OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	2.689.198.849,00	2.616.695.450,00	(72.503.399,00)	97,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	2.689.198.849,00	2.616.695.450,00	(72.503.399,00)	97,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.689.198.849,00	2.616.695.450,00	(72.503.399,00)	97,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.3.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	992.601.998,00	891.435.498,00	(101.166.500,00)	89,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	992.601.998,00	891.435.498,00	(101.166.500,00)	89,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.0022		PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BUKAN JARINGAN PERPIPAAN	200.000.000,00	199.200.000,00	(800.000,00)	99,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.200.000,00	(800.000,00)	99,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.200.000,00	(800.000,00)	99,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.0025		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	200.000.000,00	199.633.500,00	(366.500,00)	99,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.633.500,00	(366.500,00)	99,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.633.500,00	(366.500,00)	99,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.0026		PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	592.601.998,00	492.601.998,00	(100.000.000,00)	83,13	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	592.601.998,00	492.601.998,00	(100.000.000,00)	83,13	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.601.998,00	492.601.998,00	(100.000.000,00)	83,13	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.3.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.569.978.189,00	4.434.088.950,00	(135.889.239,00)	97,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.569.978.189,00	4.434.088.950,00	(135.889.239,00)	97,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.0023		PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT	4.409.323.000,00	4.392.516.000,00	(16.807.000,00)	99,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	4.409.323.000,00	4.392.516.000,00	(16.807.000,00)	99,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.409.323.000,00	4.392.516.000,00	(16.807.000,00)	99,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.0040		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	60.655.189,00	41.572.950,00	(19.082.239,00)	68,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	60.655.189,00	41.572.950,00	(19.082.239,00)	68,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.655.189,00	41.572.950,00	(19.082.239,00)	68,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.0041		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.3.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	12.530.241.956,00	12.245.344.338,00	(284.897.618,00)	97,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.530.241.956,00	12.245.344.338,00	(284.897.618,00)	97,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0024		PENINGKATAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	4.192.528.729,00	4.178.103.293,00	(14.425.436,00)	99,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0024	5.2	BELANJA MODAL	4.192.528.729,00	4.178.103.293,00	(14.425.436,00)	99,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0024	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.192.528.729,00	4.178.103.293,00	(14.425.436,00)	99,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0028		REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	399.100.000,00	398.603.102,00	(496.898,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	399.100.000,00	398.603.102,00	(496.898,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	399.100.000,00	398.603.102,00	(496.898,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0029		PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	6.004.919.553,00	5.985.051.153,00	(19.868.400,00)	99,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	6.004.919.553,00	5.985.051.153,00	(19.868.400,00)	99,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0029	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.004.919.553,00	5.985.051.153,00	(19.868.400,00)	99,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0030		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	300.000.000,00	50.000.000,00	(250.000.000,00)	16,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	50.000.000,00	(250.000.000,00)	16,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	50.000.000,00	(250.000.000,00)	16,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0031		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	1.633.693.674,00	1.633.586.790,00	(106.884,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	1.633.693.674,00	1.633.586.790,00	(106.884,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.633.693.674,00	1.633.586.790,00	(106.884,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.3.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.911.000.000,00	1.888.580.259,00	(22.419.741,00)	98,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	1.911.000.000,00	1.888.580.259,00	(22.419.741,00)	98,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01.0018		PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.518.121,00	(481.879,00)	99,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.518.121,00	(481.879,00)	99,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.518.121,00	(481.879,00)	99,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01.0021		PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.811.000.000,00	1.789.062.138,00	(21.937.862,00)	98,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	1.811.000.000,00	1.789.062.138,00	(21.937.862,00)	98,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.05	Belanja Hibah	1.700.000.000,00	1.678.062.138,00	(21.937.862,00)	98,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.3.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.452.146.008,00	2.826.967.706,00	(625.178.302,00)	81,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.09.2.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.452.146.008,00	2.826.967.706,00	(625.178.302,00)	81,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.09.2.01.0008		PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA	3.452.146.008,00	2.826.967.706,00	(625.178.302,00)	81,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.052.146.008,00	2.429.467.706,00	(622.678.302,00)	79,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.052.146.008,00	2.429.467.706,00	(622.678.302,00)	79,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	397.500.000,00	(2.500.000,00)	99,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000,00	397.500.000,00	(2.500.000,00)	99,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.3.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	29.780.254.217,00	29.378.917.089,00	(401.337.128,00)	98,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	29.780.254.217,00	29.378.917.089,00	(401.337.128,00)	98,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0029		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0032		PEMBANGUNAN JALAN	15.827.082.224,00	15.708.454.176,00	(118.628.048,00)	99,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	15.827.082.224,00	15.708.454.176,00	(118.628.048,00)	99,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.827.082.224,00	15.708.454.176,00	(118.628.048,00)	99,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0033		REKONSTRUKSI JALAN	3.133.632.462,00	3.103.247.653,00	(30.384.809,00)	99,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	3.133.632.462,00	3.103.247.653,00	(30.384.809,00)	99,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.133.632.462,00	3.103.247.653,00	(30.384.809,00)	99,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0038		PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	200.000.000,00	199.981.200,00	(18.800,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.981.200,00	(18.800,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.981.200,00	(18.800,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0040		PEMBANGUNAN JEMBATAN	3.859.850.738,00	3.729.383.919,00	(130.466.819,00)	96,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	3.859.850.738,00	3.729.383.919,00	(130.466.819,00)	96,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.859.850.738,00	3.729.383.919,00	(130.466.819,00)	96,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0044		REHABILITASI JALAN	2.617.710.167,00	2.596.848.156,00	(20.862.011,00)	99,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2	BELANJA MODAL	2.617.710.167,00	2.596.848.156,00	(20.862.011,00)	99,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.617.710.167,00	2.596.848.156,00	(20.862.011,00)	99,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0046		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	4.041.978.626,00	4.041.001.985,00	(976.641,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	4.041.978.626,00	4.041.001.985,00	(976.641,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.041.978.626,00	4.041.001.985,00	(976.641,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.3.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	325.659.535,00	294.943.645,00	(30.715.890,00)	90,57	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.01		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	73.509.000,00	71.505.150,00	(2.003.850,00)	97,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.01.0007		PENYEBARLUASAN INFORMASI PENATAAN RUANG	73.509.000,00	71.505.150,00	(2.003.850,00)	97,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	73.509.000,00	71.505.150,00	(2.003.850,00)	97,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.509.000,00	71.505.150,00	(2.003.850,00)	97,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	252.150.535,00	223.438.495,00	(28.712.040,00)	88,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	252.150.535,00	223.438.495,00	(28.712.040,00)	88,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	252.150.535,00	223.438.495,00	(28.712.040,00)	88,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.150.535,00	223.438.495,00	(28.712.040,00)	88,61	
				JUMLAH BELANJA	69.703.299.138,00	67.323.710.997,00	(2.379.588.141,00)	96,59	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(67.801.949.138,00)	(65.139.650.425,00)	2.662.298.713,00	96,07	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(67.801.949.138,00)	(65.139.650.425,00)	2.662.298.713,00	96,07	

Kabanjahe, 24 September 2026

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

1.04.2.10.0.00.05.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	16.512.752.194,00	15.980.150.738,00	(532.601.456,00)	96,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.4.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.103.398.513,00	3.948.149.219,00	(155.249.294,00)	96,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.667.413.948,00	3.532.809.595,00	(134.604.353,00)	96,33	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.306.606.748,00	3.190.983.395,00	(115.623.353,00)	96,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.306.606.748,00	3.190.983.395,00	(115.623.353,00)	96,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.306.606.748,00	3.190.983.395,00	(115.623.353,00)	96,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	360.807.200,00	341.826.200,00	(18.981.000,00)	94,74	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	360.807.200,00	341.826.200,00	(18.981.000,00)	94,74	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.807.200,00	341.826.200,00	(18.981.000,00)	94,74	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	279.647.359,00	271.360.974,00	(8.286.385,00)	97,04	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	2.987.600,00	(12.400,00)	99,59	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.987.600,00	(12.400,00)	99,59	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.987.600,00	(12.400,00)	99,59	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	150.533.809,00	143.689.300,00	(6.844.509,00)	95,45	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.109.949,00	56.539.300,00	(570.649,00)	99,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.109.949,00	56.539.300,00	(570.649,00)	99,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	93.423.860,00	87.150.000,00	(6.273.860,00)	93,28	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.423.860,00	87.150.000,00	(6.273.860,00)	93,28	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.659.550,00	12.393.000,00	(266.550,00)	97,89	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.659.550,00	12.393.000,00	(266.550,00)	97,89	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.659.550,00	12.393.000,00	(266.550,00)	97,89	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.200.000,00	4.803.100,00	(396.900,00)	92,37	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	4.803.100,00	(396.900,00)	92,37	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	4.803.100,00	(396.900,00)	92,37	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	104.054.000,00	103.287.974,00	(766.026,00)	99,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	104.054.000,00	103.287.974,00	(766.026,00)	99,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.054.000,00	103.287.974,00	(766.026,00)	99,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	44.930.000,00	36.327.400,00	(8.602.600,00)	80,85	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.000.000,00	21.397.400,00	(8.602.600,00)	71,32	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	21.397.400,00	(8.602.600,00)	71,32	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.397.400,00	(8.602.600,00)	71,32	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	86.657.206,00	82.901.250,00	(3.755.956,00)	95,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	86.657.206,00	82.901.250,00	(3.755.956,00)	95,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.657.206,00	82.901.250,00	(3.755.956,00)	95,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.657.206,00	82.901.250,00	(3.755.956,00)	95,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	10.000.000,00	5.800.000,00	(4.200.000,00)	58,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02.2.02		SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	10.000.000,00	5.800.000,00	(4.200.000,00)	58,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02.2.02.0008		REMBUG WARGA UNTUK MENENTUKAN CALON PENERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	10.000.000,00	5.800.000,00	(4.200.000,00)	58,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	5.800.000,00	(4.200.000,00)	58,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.800.000,00	(4.200.000,00)	58,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.4.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	12.399.353.681,00	12.026.201.519,00	(373.152.162,00)	96,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	12.399.353.681,00	12.026.201.519,00	(373.152.162,00)	96,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0001		PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN	35.269.591,00	0,00	(35.269.591,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.697.639,00	0,00	(20.697.639,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.697.639,00	0,00	(20.697.639,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	14.571.952,00	0,00	(14.571.952,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.571.952,00	0,00	(14.571.952,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	12.289.532.100,00	11.990.411.119,00	(299.120.981,00)	97,57	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.289.532.100,00	11.990.411.119,00	(299.120.981,00)	97,57	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.289.532.100,00	11.990.411.119,00	(299.120.981,00)	97,57	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	74.551.990,00	35.790.400,00	(38.761.590,00)	48,01	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	74.551.990,00	35.790.400,00	(38.761.590,00)	48,01	
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.551.990,00	35.790.400,00	(38.761.590,00)	48,01	
				JUMLAH BELANJA	16.512.752.194,00	15.980.150.738,00	(532.601.456,00)	96,77	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(16.512.752.194,00)	(15.980.150.738,00)	532.601.456,00	96,77	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.512.752.194,00)	(15.980.150.738,00)	532.601.456,00	96,77	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	503.550.015,00	353.542.100,00	(150.007.915,00)	70,21	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	134.080.015,00	100.145.000,00	(33.935.015,00)	74,69	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04.2.01		PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.080.015,00	100.145.000,00	(33.935.015,00)	74,69	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04.2.01.0004		MEDIASI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.558.535,00	43.578.000,00	(30.980.535,00)	58,45	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	74.558.535,00	43.578.000,00	(30.980.535,00)	58,45	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.558.535,00	43.578.000,00	(30.980.535,00)	58,45	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04.2.01.0005		INVENTARISASI KASUS PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.521.480,00	56.567.000,00	(2.954.480,00)	95,04	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	59.521.480,00	56.567.000,00	(2.954.480,00)	95,04	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.521.480,00	56.567.000,00	(2.954.480,00)	95,04	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	369.470.000,00	253.397.100,00	(116.072.900,00)	68,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.05.2.01		PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	369.470.000,00	253.397.100,00	(116.072.900,00)	68,58	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.05.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	369.470.000,00	253.397.100,00	(116.072.900,00)	68,58	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	369.470.000,00	253.397.100,00	(116.072.900,00)	68,58	
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.470.000,00	253.397.100,00	(116.072.900,00)	68,58	
				JUMLAH BELANJA	503.550.015,00	353.542.100,00	(150.007.915,00)	70,21	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(503.550.015,00)	(353.542.100,00)	150.007.915,00	70,21	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(503.550.015,00)	(353.542.100,00)	150.007.915,00	70,21	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.0.00.0.00.06.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	17.883.102.566,00	16.961.762.037,00	(921.340.529,00)	94,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.812.748.920,00	12.001.858.938,00	(810.889.982,00)	93,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.929.188.984,00	5.135.463.355,00	(793.725.629,00)	86,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.807.028.984,00	5.013.303.355,00	(793.725.629,00)	86,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.807.028.984,00	5.013.303.355,00	(793.725.629,00)	86,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.807.028.984,00	5.013.303.355,00	(793.725.629,00)	86,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	122.160.000,00	122.160.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	122.160.000,00	122.160.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.160.000,00	122.160.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	290.203.436,00	288.845.803,00	(1.357.633,00)	99,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	34.684.700,00	34.684.700,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.684.700,00	34.684.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.684.700,00	34.684.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	107.427.971,00	107.104.481,00	(323.490,00)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.174.371,00	60.942.880,00	(231.491,00)	99,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.174.371,00	60.942.880,00	(231.491,00)	99,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	46.253.600,00	46.161.601,00	(91.999,00)	99,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.253.600,00	46.161.601,00	(91.999,00)	99,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	44.910.374,00	44.496.744,00	(413.630,00)	99,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.124.904,00	37.124.904,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.124.904,00	37.124.904,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	7.785.470,00	7.371.840,00	(413.630,00)	94,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.785.470,00	7.371.840,00	(413.630,00)	94,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	55.370.391,00	55.351.900,00	(18.491,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	55.370.391,00	55.351.900,00	(18.491,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.370.391,00	55.351.900,00	(18.491,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	47.810.000,00	47.207.978,00	(602.022,00)	98,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	47.810.000,00	47.207.978,00	(602.022,00)	98,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.810.000,00	47.207.978,00	(602.022,00)	98,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	12.078.500,00	12.078.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	12.078.500,00	12.078.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	12.078.500,00	12.078.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.078.500,00	12.078.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.581.278.000,00	6.565.471.280,00	(15.806.720,00)	99,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	51.220.000,00	49.093.280,00	(2.126.720,00)	95,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.220.000,00	49.093.280,00	(2.126.720,00)	95,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.220.000,00	49.093.280,00	(2.126.720,00)	95,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.520.078.000,00	6.506.398.000,00	(13.680.000,00)	99,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.520.078.000,00	6.506.398.000,00	(13.680.000,00)	99,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.520.078.000,00	6.506.398.000,00	(13.680.000,00)	99,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.5.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.812.395.896,00	1.800.216.186,00	(12.179.710,00)	99,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.779.292.080,00	1.768.137.370,00	(11.154.710,00)	99,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0003		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	4.330.370,00	4.180.370,00	(150.000,00)	96,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.330.370,00	4.180.370,00	(150.000,00)	96,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.330.370,00	4.180.370,00	(150.000,00)	96,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0004		PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	108.024.000,00	100.240.000,00	(7.784.000,00)	92,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	108.024.000,00	100.240.000,00	(7.784.000,00)	92,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.024.000,00	100.240.000,00	(7.784.000,00)	92,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA	16.130.000,00	15.730.000,00	(400.000,00)	97,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.130.000,00	15.730.000,00	(400.000,00)	97,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.130.000,00	15.730.000,00	(400.000,00)	97,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	748.740.910,00	746.534.300,00	(2.206.610,00)	99,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	748.740.910,00	746.534.300,00	(2.206.610,00)	99,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	748.740.910,00	746.534.300,00	(2.206.610,00)	99,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0018		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	902.066.800,00	901.452.700,00	(614.100,00)	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	902.066.800,00	901.452.700,00	(614.100,00)	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	902.066.800,00	901.452.700,00	(614.100,00)	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	30.735.816,00	29.710.816,00	(1.025.000,00)	96,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.0010		SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	9.415.816,00	8.390.816,00	(1.025.000,00)	89,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	9.415.816,00	8.390.816,00	(1.025.000,00)	89,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.415.816,00	8.390.816,00	(1.025.000,00)	89,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.0011		PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	5.345.000,00	5.345.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.345.000,00	5.345.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.345.000,00	5.345.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.0012		PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	15.975.000,00	15.975.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	15.975.000,00	15.975.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.975.000,00	15.975.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.03		PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.03.0006		PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.5.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.257.957.750,00	3.159.686.913,00	(98.270.837,00)	96,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.257.957.750,00	3.159.686.913,00	(98.270.837,00)	96,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0002		PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.170.995.000,00	1.133.442.000,00	(37.553.000,00)	96,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.170.995.000,00	1.133.442.000,00	(37.553.000,00)	96,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.995.000,00	1.133.442.000,00	(37.553.000,00)	96,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0003		PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0017		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	2.036.862.750,00	1.976.144.913,00	(60.717.837,00)	97,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	11.130.750,00	10.707.060,00	(423.690,00)	96,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.130.750,00	10.707.060,00	(423.690,00)	96,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	2.025.732.000,00	1.965.437.853,00	(60.294.147,00)	97,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.025.732.000,00	1.965.437.853,00	(60.294.147,00)	97,02	
				JUMLAH BELANJA	17.883.102.566,00	16.961.762.037,00	(921.340.529,00)	94,85	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(17.883.102.566,00)	(16.961.762.037,00)	921.340.529,00	94,85	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.883.102.566,00)	(16.961.762.037,00)	921.340.529,00	94,85	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.05.0.00.0.00.07.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	12.274.683.472,00	9.267.952.909,00	(3.006.730.563,00)	75,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.276.736.976,00	5.011.869.110,00	(264.867.866,00)	94,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.970.654.163,00	3.768.892.716,00	(201.761.447,00)	94,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.888.214.163,00	3.688.662.716,00	(199.551.447,00)	94,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.888.214.163,00	3.688.662.716,00	(199.551.447,00)	94,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.888.214.163,00	3.688.662.716,00	(199.551.447,00)	94,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	82.440.000,00	80.230.000,00	(2.210.000,00)	97,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	82.440.000,00	80.230.000,00	(2.210.000,00)	97,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.440.000,00	80.230.000,00	(2.210.000,00)	97,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	53.760.000,00	45.445.598,00	(8.314.402,00)	84,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	53.760.000,00	45.445.598,00	(8.314.402,00)	84,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.760.000,00	45.445.598,00	(8.314.402,00)	84,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.760.000,00	45.445.598,00	(8.314.402,00)	84,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	202.719.386,00	186.418.469,00	(16.300.917,00)	91,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.990.808,00	3.904.000,00	(86.808,00)	97,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.990.808,00	3.904.000,00	(86.808,00)	97,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.990.808,00	3.904.000,00	(86.808,00)	97,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	38.436.190,00	37.604.600,00	(831.590,00)	97,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.436.190,00	37.604.600,00	(831.590,00)	97,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.436.190,00	37.604.600,00	(831.590,00)	97,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.099.888,00	7.677.000,00	(422.888,00)	94,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.099.888,00	7.677.000,00	(422.888,00)	94,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.099.888,00	7.677.000,00	(422.888,00)	94,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	33.633.500,00	30.638.400,00	(2.995.100,00)	91,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	33.633.500,00	30.638.400,00	(2.995.100,00)	91,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.633.500,00	30.638.400,00	(2.995.100,00)	91,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	33.056.000,00	30.777.000,00	(2.279.000,00)	93,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	33.056.000,00	30.777.000,00	(2.279.000,00)	93,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.056.000,00	30.777.000,00	(2.279.000,00)	93,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	85.503.000,00	75.817.469,00	(9.685.531,00)	88,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	85.503.000,00	75.817.469,00	(9.685.531,00)	88,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.503.000,00	75.817.469,00	(9.685.531,00)	88,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	288.165.427,00	279.460.610,00	(8.704.817,00)	96,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	134.819.027,00	131.808.060,00	(3.010.967,00)	97,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	134.819.027,00	131.808.060,00	(3.010.967,00)	97,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.819.027,00	131.808.060,00	(3.010.967,00)	97,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	153.346.400,00	147.652.550,00	(5.693.850,00)	96,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.363.850,00	(136.150,00)	98,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.363.850,00	(136.150,00)	98,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	144.846.400,00	139.288.700,00	(5.557.700,00)	96,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.846.400,00	139.288.700,00	(5.557.700,00)	96,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	495.944.000,00	467.427.743,00	(28.516.257,00)	94,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.000.000,00	16.978.452,00	(4.021.548,00)	80,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	16.978.452,00	(4.021.548,00)	80,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	16.978.452,00	(4.021.548,00)	80,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	474.944.000,00	450.449.291,00	(24.494.709,00)	94,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	474.944.000,00	450.449.291,00	(24.494.709,00)	94,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.944.000,00	450.449.291,00	(24.494.709,00)	94,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	265.494.000,00	264.223.974,00	(1.270.026,00)	99,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	175.150.000,00	174.123.975,00	(1.026.025,00)	99,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	175.150.000,00	174.123.975,00	(1.026.025,00)	99,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.150.000,00	174.123.975,00	(1.026.025,00)	99,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	80.244.000,00	79.999.999,00	(244.001,00)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	80.244.000,00	79.999.999,00	(244.001,00)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.244.000,00	79.999.999,00	(244.001,00)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.5.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.997.946.496,00	4.256.083.799,00	(2.741.862.697,00)	60,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	33.638.200,00	30.267.000,00	(3.371.200,00)	89,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.01.0007		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)	33.638.200,00	30.267.000,00	(3.371.200,00)	89,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	33.638.200,00	30.267.000,00	(3.371.200,00)	89,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.638.200,00	30.267.000,00	(3.371.200,00)	89,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	498.343.449,00	442.711.494,00	(55.631.955,00)	88,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0015		PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	28.000.000,00	27.972.000,00	(28.000,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	27.972.000,00	(28.000,00)	99,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.972.000,00	(28.000,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0018		GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	70.338.462,00	66.221.600,00	(4.116.862,00)	94,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	70.338.462,00	66.221.600,00	(4.116.862,00)	94,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.338.462,00	66.221.600,00	(4.116.862,00)	94,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0021		PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA	34.957.057,00	28.394.734,00	(6.562.323,00)	81,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	34.957.057,00	28.394.734,00	(6.562.323,00)	81,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.957.057,00	28.394.734,00	(6.562.323,00)	81,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0026		PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	43.487.770,00	39.129.110,00	(4.358.660,00)	89,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	28.476.410,00	25.329.110,00	(3.147.300,00)	88,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.476.410,00	25.329.110,00	(3.147.300,00)	88,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	15.011.360,00	13.800.000,00	(1.211.360,00)	91,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.011.360,00	13.800.000,00	(1.211.360,00)	91,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0027		PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	321.560.160,00	280.994.050,00	(40.566.110,00)	87,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	321.560.160,00	280.994.050,00	(40.566.110,00)	87,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.560.160,00	280.994.050,00	(40.566.110,00)	87,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	3.176.127.302,00	3.126.011.850,00	(50.115.452,00)	98,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0003		PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	3.126.077.938,00	3.077.638.450,00	(48.439.488,00)	98,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.126.077.938,00	3.077.638.450,00	(48.439.488,00)	98,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.126.077.938,00	3.077.638.450,00	(48.439.488,00)	98,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0009		PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	50.049.364,00	48.373.400,00	(1.675.964,00)	96,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.049.364,00	48.373.400,00	(1.675.964,00)	96,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.049.364,00	48.373.400,00	(1.675.964,00)	96,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	3.289.837.545,00	657.093.455,00	(2.632.744.090,00)	19,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0003		KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	31.556.965,00	21.444.820,00	(10.112.145,00)	67,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.556.965,00	21.444.820,00	(10.112.145,00)	67,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.556.965,00	21.444.820,00	(10.112.145,00)	67,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0008		BIMBINGAN TEKNIS PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA	65.261.100,00	50.961.940,00	(14.299.160,00)	78,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	65.261.100,00	50.961.940,00	(14.299.160,00)	78,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.261.100,00	50.961.940,00	(14.299.160,00)	78,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0010		KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	3.082.385.100,00	497.931.000,00	(2.584.454.100,00)	16,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.704.684.220,00	210.424.000,00	(2.494.260.220,00)	7,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.366.684.220,00	210.424.000,00	(1.156.260.220,00)	15,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.338.000.000,00	0,00	(1.338.000.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0010	5.2	BELANJA MODAL	377.700.880,00	287.507.000,00	(90.193.880,00)	76,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	287.700.880,00	287.507.000,00	(193.880,00)	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0014		PENGUATAN KELEMBAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	40.996.380,00	32.384.775,00	(8.611.605,00)	78,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0014	5.1	BELANJA OPERASI	40.996.380,00	32.384.775,00	(8.611.605,00)	78,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.996.380,00	32.384.775,00	(8.611.605,00)	78,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0015		PENYUSUNAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA) DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA (R3P) KAB/KOTA	69.638.000,00	54.370.920,00	(15.267.080,00)	78,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0015	5.1	BELANJA OPERASI	69.638.000,00	54.370.920,00	(15.267.080,00)	78,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.638.000,00	54.370.920,00	(15.267.080,00)	78,08	
				JUMLAH BELANJA	12.274.683.472,00	9.267.952.909,00	(3.006.730.563,00)	75,50	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(12.274.683.472,00)	(9.267.952.909,00)	3.006.730.563,00	75,50	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.274.683.472,00)	(9.267.952.909,00)	3.006.730.563,00	75,50	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Sosial

1.06.0.00.0.00.08.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ORGANISASI : DINAS SOSIAL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	5.122.468.731,00	4.789.493.523,00	(332.975.208,00)	93,50	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.6.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.973.722.539,00	3.771.764.249,00	(201.958.290,00)	94,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.062.848.527,00	2.935.967.679,00	(126.880.848,00)	95,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.978.888.527,00	2.852.687.679,00	(126.200.848,00)	95,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.978.888.527,00	2.852.687.679,00	(126.200.848,00)	95,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.978.888.527,00	2.852.687.679,00	(126.200.848,00)	95,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	83.960.000,00	83.280.000,00	(680.000,00)	99,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	83.960.000,00	83.280.000,00	(680.000,00)	99,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.960.000,00	83.280.000,00	(680.000,00)	99,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	45.000.000,00	44.250.000,00	(750.000,00)	98,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	45.000.000,00	44.250.000,00	(750.000,00)	98,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.250.000,00	(750.000,00)	98,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.250.000,00	(750.000,00)	98,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	266.325.312,00	253.917.793,00	(12.407.519,00)	95,34	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.489.163,00	4.488.610,00	(553,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.489.163,00	4.488.610,00	(553,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.489.163,00	4.488.610,00	(553,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.181.359,00	30.165.895,00	(15.464,00)	99,95	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.181.359,00	30.165.895,00	(15.464,00)	99,95	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.181.359,00	30.165.895,00	(15.464,00)	99,95	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.135.790,00	14.133.520,00	(2.270,00)	99,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.135.790,00	14.133.520,00	(2.270,00)	99,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.135.790,00	14.133.520,00	(2.270,00)	99,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	25.000.000,00	23.680.000,00	(1.320.000,00)	94,72	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	23.680.000,00	(1.320.000,00)	94,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.680.000,00	(1.320.000,00)	94,72	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	174.939.000,00	166.569.768,00	(8.369.232,00)	95,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	174.939.000,00	166.569.768,00	(8.369.232,00)	95,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.939.000,00	166.569.768,00	(8.369.232,00)	95,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	129.108.700,00	117.265.950,00	(11.842.750,00)	90,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	129.108.700,00	117.265.950,00	(11.842.750,00)	90,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	129.108.700,00	117.265.950,00	(11.842.750,00)	90,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.108.700,00	117.265.950,00	(11.842.750,00)	90,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	223.870.000,00	183.444.592,00	(40.425.408,00)	81,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.760.000,00	16.389.592,00	(13.370.408,00)	55,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.760.000,00	16.389.592,00	(13.370.408,00)	55,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.760.000,00	16.389.592,00	(13.370.408,00)	55,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.550.000,00	7.100.000,00	(5.450.000,00)	56,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.550.000,00	7.100.000,00	(5.450.000,00)	56,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	7.100.000,00	(5.450.000,00)	56,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	181.560.000,00	159.955.000,00	(21.605.000,00)	88,10	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	181.560.000,00	159.955.000,00	(21.605.000,00)	88,10	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.560.000,00	159.955.000,00	(21.605.000,00)	88,10	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	246.570.000,00	236.918.235,00	(9.651.765,00)	96,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	179.700.000,00	170.818.200,00	(8.881.800,00)	95,06	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	179.700.000,00	170.818.200,00	(8.881.800,00)	95,06	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.700.000,00	170.818.200,00	(8.881.800,00)	95,06	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	66.870.000,00	66.100.035,00	(769.965,00)	98,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	66.870.000,00	66.100.035,00	(769.965,00)	98,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.870.000,00	66.100.035,00	(769.965,00)	98,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.6.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	170.837.601,00	155.016.085,00	(15.821.516,00)	90,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.837.601,00	155.016.085,00	(15.821.516,00)	90,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0001		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	27.467.200,00	26.603.170,00	(864.030,00)	96,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.467.200,00	26.603.170,00	(864.030,00)	96,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.467.200,00	26.603.170,00	(864.030,00)	96,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0004		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	143.370.401,00	128.412.915,00	(14.957.486,00)	89,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	143.370.401,00	128.412.915,00	(14.957.486,00)	89,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.370.401,00	128.412.915,00	(14.957.486,00)	89,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.6.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	50,00	0,00	(50,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.03.2.01		PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	50,00	0,00	(50,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.03.2.01.0001		FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	50,00	0,00	(50,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50,00	0,00	(50,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50,00	0,00	(50,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.6.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	365.913.565,00	308.298.585,00	(57.614.980,00)	84,25	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	365.913.565,00	308.298.585,00	(57.614.980,00)	84,25	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	275.024.380,00	229.111.380,00	(45.913.000,00)	83,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	275.024.380,00	229.111.380,00	(45.913.000,00)	83,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.024.380,00	229.111.380,00	(45.913.000,00)	83,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0009		PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	34.939.185,00	32.177.205,00	(2.761.980,00)	92,09	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.939.185,00	32.177.205,00	(2.761.980,00)	92,09	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.939.185,00	32.177.205,00	(2.761.980,00)	92,09	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012		PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	55.950.000,00	47.010.000,00	(8.940.000,00)	84,02	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	55.950.000,00	47.010.000,00	(8.940.000,00)	84,02	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.950.000,00	47.010.000,00	(8.940.000,00)	84,02	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.6.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	117.500.473,00	104.770.140,00	(12.730.333,00)	89,17	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.500.473,00	104.770.140,00	(12.730.333,00)	89,17	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0001		PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.662.353,00	78.265.625,00	(9.396.728,00)	89,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	87.662.353,00	78.265.625,00	(9.396.728,00)	89,28	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.662.353,00	78.265.625,00	(9.396.728,00)	89,28	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	29.838.120,00	26.504.515,00	(3.333.605,00)	88,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.838.120,00	26.504.515,00	(3.333.605,00)	88,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.838.120,00	26.504.515,00	(3.333.605,00)	88,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.6.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	179.494.503,00	168.198.144,00	(11.296.359,00)	93,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	159.523.120,00	152.134.134,00	(7.388.986,00)	95,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001		PENYEDIAAN MAKANAN	39.737.587,00	38.789.440,00	(948.147,00)	97,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.737.587,00	38.789.440,00	(948.147,00)	97,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.737.587,00	38.789.440,00	(948.147,00)	97,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	119.785.533,00	113.344.694,00	(6.440.839,00)	94,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	119.785.533,00	113.344.694,00	(6.440.839,00)	94,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.785.533,00	113.344.694,00	(6.440.839,00)	94,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.02		PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	19.971.383,00	16.064.010,00	(3.907.373,00)	80,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.02.0002		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	19.971.383,00	16.064.010,00	(3.907.373,00)	80,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.971.383,00	16.064.010,00	(3.907.373,00)	80,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.971.383,00	16.064.010,00	(3.907.373,00)	80,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.6.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	315.000.000,00	281.446.320,00	(33.553.680,00)	89,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	315.000.000,00	281.446.320,00	(33.553.680,00)	89,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0001		REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0002		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	281.446.320,00	(18.553.680,00)	93,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	296.892.000,00	281.446.320,00	(15.445.680,00)	94,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.892.000,00	281.446.320,00	(15.445.680,00)	94,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.108.000,00	0,00	(3.108.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.108.000,00	0,00	(3.108.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	5.122.468.731,00	4.789.493.523,00	(332.975.208,00)	93,50	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.122.468.731,00)	(4.789.493.523,00)	332.975.208,00	93,50	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.122.468.731,00)	(4.789.493.523,00)	332.975.208,00	93,50	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.07.2.17.0.00.09.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ORGANISASI : DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.07.2.17.0.00.09.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000,00	60.209.664,00	50.209.664,00	602,10	
	2.07.2.17.0.00.09.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000,00	60.209.664,00	50.209.664,00	602,10	
	2.07.2.17.0.00.09.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000,00	60.209.664,00	50.209.664,00	602,10	
				JUMLAH PENDAPATAN	10.000.000,00	60.209.664,00	50.209.664,00	602,10	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	4.885.462.101,00	4.216.548.180,00	(668.913.921,00)	86,31	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.7.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.026.185.763,00	3.423.458.840,00	(602.726.923,00)	85,03	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.167.475.362,00	2.950.216.652,00	(217.258.710,00)	93,14	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.047.355.362,00	2.830.742.652,00	(216.612.710,00)	92,89	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.047.355.362,00	2.830.742.652,00	(216.612.710,00)	92,89	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.047.355.362,00	2.830.742.652,00	(216.612.710,00)	92,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	120.120.000,00	119.474.000,00	(646.000,00)	99,46	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	120.120.000,00	119.474.000,00	(646.000,00)	99,46	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.120.000,00	119.474.000,00	(646.000,00)	99,46	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	193.509.144,00	185.900.443,00	(7.608.701,00)	96,07	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.995.440,00	6.995.044,00	(396,00)	99,99	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.995.440,00	6.995.044,00	(396,00)	99,99	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.995.440,00	6.995.044,00	(396,00)	99,99	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	38.090.731,00	37.926.835,00	(163.896,00)	99,57	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.090.731,00	37.926.835,00	(163.896,00)	99,57	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.090.731,00	37.926.835,00	(163.896,00)	99,57	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	9.998.699,00	9.993.420,00	(5.279,00)	99,95	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.998.699,00	9.993.420,00	(5.279,00)	99,95	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.998.699,00	9.993.420,00	(5.279,00)	99,95	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.910.944,00	15.809.563,00	(101.381,00)	99,36	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.910.944,00	15.809.563,00	(101.381,00)	99,36	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.910.944,00	15.809.563,00	(101.381,00)	99,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	122.513.330,00	115.175.581,00	(7.337.749,00)	94,01	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	122.513.330,00	115.175.581,00	(7.337.749,00)	94,01	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.513.330,00	115.175.581,00	(7.337.749,00)	94,01	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	118.121.000,00	0,00	(118.121.000,00)	0,00	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	118.121.000,00	0,00	(118.121.000,00)	0,00	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	118.121.000,00	0,00	(118.121.000,00)	0,00	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.121.000,00	0,00	(118.121.000,00)	0,00	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	281.800.000,00	118.831.424,00	(162.968.576,00)	42,17	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.820.000,00	13.171.424,00	(10.648.576,00)	55,30	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.820.000,00	13.171.424,00	(10.648.576,00)	55,30	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.820.000,00	13.171.424,00	(10.648.576,00)	55,30	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	257.980.000,00	105.660.000,00	(152.320.000,00)	40,96	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	257.980.000,00	105.660.000,00	(152.320.000,00)	40,96	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.980.000,00	105.660.000,00	(152.320.000,00)	40,96	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	244.280.257,00	147.510.321,00	(96.769.936,00)	60,39	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.420.000,00	35.938.172,00	(2.481.828,00)	93,54	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.420.000,00	35.938.172,00	(2.481.828,00)	93,54	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.420.000,00	35.938.172,00	(2.481.828,00)	93,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	54.271.000,00	52.413.549,00	(1.857.451,00)	96,58	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.271.000,00	52.413.549,00	(1.857.451,00)	96,58	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.271.000,00	52.413.549,00	(1.857.451,00)	96,58	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	24.832.000,00	9.780.000,00	(15.052.000,00)	39,38	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.832.000,00	9.780.000,00	(15.052.000,00)	39,38	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.832.000,00	9.780.000,00	(15.052.000,00)	39,38	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	126.757.257,00	49.378.600,00	(77.378.657,00)	38,96	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	126.757.257,00	49.378.600,00	(77.378.657,00)	38,96	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.757.257,00	49.378.600,00	(77.378.657,00)	38,96	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.7.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	777.000.000,00	736.519.325,00	(40.480.675,00)	94,79	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	777.000.000,00	736.519.325,00	(40.480.675,00)	94,79	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	777.000.000,00	736.519.325,00	(40.480.675,00)	94,79	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	777.000.000,00	736.519.325,00	(40.480.675,00)	94,79	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	777.000.000,00	736.519.325,00	(40.480.675,00)	94,79	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.7.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	19.058.081,00	18.479.875,00	(578.206,00)	96,97	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.04.2.03		PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	19.058.081,00	18.479.875,00	(578.206,00)	96,97	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.04.2.03.0002		PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	19.058.081,00	18.479.875,00	(578.206,00)	96,97	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.058.081,00	18.479.875,00	(578.206,00)	96,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.058.081,00	18.479.875,00	(578.206,00)	96,97	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.7.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	63.218.257,00	38.090.140,00	(25.128.117,00)	60,25	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.01		PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.456.381,00	7.440.610,00	(15.771,00)	99,79	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	7.456.381,00	7.440.610,00	(15.771,00)	99,79	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.456.381,00	7.440.610,00	(15.771,00)	99,79	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.456.381,00	7.440.610,00	(15.771,00)	99,79	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.761.876,00	30.649.530,00	(25.112.346,00)	54,97	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.02.0001		PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.771.876,00	30.649.530,00	(11.122.346,00)	73,37	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.771.876,00	30.649.530,00	(11.122.346,00)	73,37	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.771.876,00	30.649.530,00	(11.122.346,00)	73,37	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.02.0004		PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.990.000,00	0,00	(13.990.000,00)	0,00	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.990.000,00	0,00	(13.990.000,00)	0,00	
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.990.000,00	0,00	(13.990.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	4.885.462.101,00	4.216.548.180,00	(668.913.921,00)	86,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.875.462.101,00)	(4.156.338.516,00)	719.123.585,00	85,25	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.875.462.101,00)	(4.156.338.516,00)	719.123.585,00	85,25	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
ORGANISASI : DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	1.832.891.870,00	829.887.557,00	(1.003.004.313,00)	45,28	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	4.389.605,00	0,00	(4.389.605,00)	0,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.03.2.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.389.605,00	0,00	(4.389.605,00)	0,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.03.2.01.0004		PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.389.605,00	0,00	(4.389.605,00)	0,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.389.605,00	0,00	(4.389.605,00)	0,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.389.605,00	0,00	(4.389.605,00)	0,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.360.979.359,00	706.454.707,00	(654.524.652,00)	51,91	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.05.2.01		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.360.979.359,00	706.454.707,00	(654.524.652,00)	51,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.05.2.01.0001		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	1.360.979.359,00	706.454.707,00	(654.524.652,00)	51,91	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.360.979.359,00	706.454.707,00	(654.524.652,00)	51,91	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.979.359,00	706.454.707,00	(654.524.652,00)	51,91	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	287.353.501,00	0,00	(287.353.501,00)	0,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.06.2.01		PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	287.353.501,00	0,00	(287.353.501,00)	0,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.06.2.01.0005		PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA	287.353.501,00	0,00	(287.353.501,00)	0,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	287.353.501,00	0,00	(287.353.501,00)	0,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.353.501,00	0,00	(287.353.501,00)	0,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	80.496.545,00	38.658.315,00	(41.838.230,00)	48,02	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	80.496.545,00	38.658.315,00	(41.838.230,00)	48,02	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01.0002		PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO	19.195.110,00	18.243.055,00	(952.055,00)	95,04	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.195.110,00	18.243.055,00	(952.055,00)	95,04	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.195.110,00	18.243.055,00	(952.055,00)	95,04	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01.0003		FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO	21.415.275,00	20.415.260,00	(1.000.015,00)	95,33	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.415.275,00	20.415.260,00	(1.000.015,00)	95,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.415.275,00	20.415.260,00	(1.000.015,00)	95,33	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01.0015		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	39.886.160,00	0,00	(39.886.160,00)	0,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	39.886.160,00	0,00	(39.886.160,00)	0,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.886.160,00	0,00	(39.886.160,00)	0,00	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	99.672.860,00	84.774.535,00	(14.898.325,00)	85,05	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.08.2.01		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	99.672.860,00	84.774.535,00	(14.898.325,00)	85,05	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.08.2.01.0006		PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	99.672.860,00	84.774.535,00	(14.898.325,00)	85,05	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	99.672.860,00	84.774.535,00	(14.898.325,00)	85,05	
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.672.860,00	84.774.535,00	(14.898.325,00)	85,05	
				JUMLAH BELANJA	1.832.891.870,00	829.887.557,00	(1.003.004.313,00)	45,28	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.832.891.870,00)	(829.887.557,00)	1.003.004.313,00	45,28	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.832.891.870,00)	(829.887.557,00)	1.003.004.313,00	45,28	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB

2.08.2.14.0.00.10.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	5.685.863.537,00	5.210.126.372,00	(475.737.165,00)	91,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.8.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.118.151.130,00	4.708.573.852,00	(409.577.278,00)	92,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.444.240.985,00	4.178.098.926,00	(266.142.059,00)	94,01	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.272.501.486,00	4.019.379.676,00	(253.121.810,00)	94,08	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.272.501.486,00	4.019.379.676,00	(253.121.810,00)	94,08	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.272.501.486,00	4.019.379.676,00	(253.121.810,00)	94,08	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	171.739.499,00	158.719.250,00	(13.020.249,00)	92,42	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	171.739.499,00	158.719.250,00	(13.020.249,00)	92,42	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.739.499,00	158.719.250,00	(13.020.249,00)	92,42	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	32.760.000,00	29.250.000,00	(3.510.000,00)	89,29	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	32.760.000,00	29.250.000,00	(3.510.000,00)	89,29	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.760.000,00	29.250.000,00	(3.510.000,00)	89,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.760.000,00	29.250.000,00	(3.510.000,00)	89,29	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	176.893.501,00	141.358.074,00	(35.535.427,00)	79,91	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.534.500,00	1.520.000,00	(14.500,00)	99,06	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.534.500,00	1.520.000,00	(14.500,00)	99,06	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.534.500,00	1.520.000,00	(14.500,00)	99,06	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	57.737.001,00	55.977.000,00	(1.760.001,00)	96,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.337.000,00	46.320.000,00	(1.017.000,00)	97,85	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.337.000,00	46.320.000,00	(1.017.000,00)	97,85	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	10.400.001,00	9.657.000,00	(743.001,00)	92,86	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.400.001,00	9.657.000,00	(743.001,00)	92,86	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.000.000,00	10.332.850,00	(667.150,00)	93,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.332.850,00	(667.150,00)	93,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.332.850,00	(667.150,00)	93,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.862.000,00	1.260.000,00	(602.000,00)	67,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.862.000,00	1.260.000,00	(602.000,00)	67,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.862.000,00	1.260.000,00	(602.000,00)	67,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	104.760.000,00	72.268.224,00	(32.491.776,00)	68,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	104.760.000,00	72.268.224,00	(32.491.776,00)	68,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.760.000,00	72.268.224,00	(32.491.776,00)	68,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	64.908.100,00	63.203.400,00	(1.704.700,00)	97,37	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	64.908.100,00	63.203.400,00	(1.704.700,00)	97,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	64.908.100,00	63.203.400,00	(1.704.700,00)	97,37	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.908.100,00	63.203.400,00	(1.704.700,00)	97,37	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	242.000.000,00	218.199.113,00	(23.800.887,00)	90,16	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.300.000,00	18.195.113,00	(6.104.887,00)	74,88	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.300.000,00	18.195.113,00	(6.104.887,00)	74,88	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	18.195.113,00	(6.104.887,00)	74,88	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	217.700.000,00	200.004.000,00	(17.696.000,00)	91,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	217.700.000,00	200.004.000,00	(17.696.000,00)	91,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.700.000,00	200.004.000,00	(17.696.000,00)	91,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	157.348.544,00	78.464.339,00	(78.884.205,00)	49,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	148.479.504,00	73.419.339,00	(75.060.165,00)	49,45	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	148.479.504,00	73.419.339,00	(75.060.165,00)	49,45	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.479.504,00	73.419.339,00	(75.060.165,00)	49,45	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.869.040,00	5.045.000,00	(3.824.040,00)	56,88	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.869.040,00	5.045.000,00	(3.824.040,00)	56,88	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.869.040,00	5.045.000,00	(3.824.040,00)	56,88	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.8.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	86.027.457,00	70.816.080,00	(15.211.377,00)	82,32	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.01		PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	27.300.500,00	23.854.000,00	(3.446.500,00)	87,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.01.0008		SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN KAB/KOTA	27.300.500,00	23.854.000,00	(3.446.500,00)	87,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	27.300.500,00	23.854.000,00	(3.446.500,00)	87,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.300.500,00	23.854.000,00	(3.446.500,00)	87,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	26.523.200,00	24.454.000,00	(2.069.200,00)	92,20	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.02.0004		SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	26.523.200,00	24.454.000,00	(2.069.200,00)	92,20	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.523.200,00	24.454.000,00	(2.069.200,00)	92,20	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.523.200,00	24.454.000,00	(2.069.200,00)	92,20	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	32.203.757,00	22.508.080,00	(9.695.677,00)	69,89	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	32.203.757,00	22.508.080,00	(9.695.677,00)	69,89	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.203.757,00	22.508.080,00	(9.695.677,00)	69,89	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.203.757,00	22.508.080,00	(9.695.677,00)	69,89	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.8.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	56.287.225,00	46.304.500,00	(9.982.725,00)	82,26	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.03.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.287.225,00	46.304.500,00	(9.982.725,00)	82,26	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.03.2.03.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN SPESIFIK BAGI PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT DAN KONDISI KHUSUS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	56.287.225,00	46.304.500,00	(9.982.725,00)	82,26	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	56.287.225,00	46.304.500,00	(9.982.725,00)	82,26	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.287.225,00	46.304.500,00	(9.982.725,00)	82,26	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.8.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	58.903.620,00	52.784.540,00	(6.119.080,00)	89,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.04.2.01		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.903.620,00	52.784.540,00	(6.119.080,00)	89,61	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.04.2.01.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	31.233.940,00	27.036.540,00	(4.197.400,00)	86,56	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.233.940,00	27.036.540,00	(4.197.400,00)	86,56	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.233.940,00	27.036.540,00	(4.197.400,00)	86,56	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.04.2.01.0003		PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	27.669.680,00	25.748.000,00	(1.921.680,00)	93,05	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.669.680,00	25.748.000,00	(1.921.680,00)	93,05	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.669.680,00	25.748.000,00	(1.921.680,00)	93,05	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.8.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	335.894.603,00	309.214.400,00	(26.680.203,00)	92,06	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	274.595.752,00	255.501.900,00	(19.093.852,00)	93,05	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.01.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	250.056.932,00	236.087.900,00	(13.969.032,00)	94,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	157.318.299,00	152.516.000,00	(4.802.299,00)	96,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.318.299,00	152.516.000,00	(4.802.299,00)	96,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	92.738.633,00	83.571.900,00	(9.166.733,00)	90,12	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.738.633,00	83.571.900,00	(9.166.733,00)	90,12	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	24.538.820,00	19.414.000,00	(5.124.820,00)	79,12	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.538.820,00	19.414.000,00	(5.124.820,00)	79,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.538.820,00	19.414.000,00	(5.124.820,00)	79,12	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	61.298.851,00	53.712.500,00	(7.586.351,00)	87,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	42.553.455,00	38.108.500,00	(4.444.955,00)	89,55	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.553.455,00	38.108.500,00	(4.444.955,00)	89,55	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.553.455,00	38.108.500,00	(4.444.955,00)	89,55	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.02.0003		PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.745.396,00	15.604.000,00	(3.141.396,00)	83,24	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.745.396,00	15.604.000,00	(3.141.396,00)	83,24	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.745.396,00	15.604.000,00	(3.141.396,00)	83,24	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.8.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	30.599.502,00	22.433.000,00	(8.166.502,00)	73,31	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.07.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.768.712,00	16.072.000,00	(6.696.712,00)	70,59	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.07.2.01.0006		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	22.768.712,00	16.072.000,00	(6.696.712,00)	70,59	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.768.712,00	16.072.000,00	(6.696.712,00)	70,59	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.768.712,00	16.072.000,00	(6.696.712,00)	70,59	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.07.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.830.790,00	6.361.000,00	(1.469.790,00)	81,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.07.2.03.0005		PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.830.790,00	6.361.000,00	(1.469.790,00)	81,23	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.07.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.830.790,00	6.361.000,00	(1.469.790,00)	81,23	
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.07.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.830.790,00	6.361.000,00	(1.469.790,00)	81,23	
				JUMLAH BELANJA	5.685.863.537,00	5.210.126.372,00	(475.737.165,00)	91,63	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.685.863.537,00)	(5.210.126.372,00)	475.737.165,00	91,63	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.685.863.537,00)	(5.210.126.372,00)	475.737.165,00	91,63	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	3.663.885.999,00	2.344.992.802,00	(1.318.893.197,00)	64,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	286.254.999,00	95.820.000,00	(190.434.999,00)	33,47	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.01		PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	18.504.999,00	11.970.000,00	(6.534.999,00)	64,69	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.01.0023		PELAKSANAAN RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM BANGGA KENCANA	18.504.999,00	11.970.000,00	(6.534.999,00)	64,69	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	18.504.999,00	11.970.000,00	(6.534.999,00)	64,69	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.504.999,00	11.970.000,00	(6.534.999,00)	64,69	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	267.750.000,00	83.850.000,00	(183.900.000,00)	31,32	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02.0002		PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN	161.400.000,00	55.500.000,00	(105.900.000,00)	34,39	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	161.400.000,00	55.500.000,00	(105.900.000,00)	34,39	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.400.000,00	55.500.000,00	(105.900.000,00)	34,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02.0009		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	0,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	0,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	0,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02.0012		PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.251.671.000,00	1.576.182.802,00	(675.488.198,00)	70,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	742.220.000,00	567.564.952,00	(174.655.048,00)	76,47	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	517.400.000,00	379.138.600,00	(138.261.400,00)	73,28	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	517.400.000,00	379.138.600,00	(138.261.400,00)	73,28	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.400.000,00	379.138.600,00	(138.261.400,00)	73,28	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0011		PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	99.820.000,00	79.339.000,00	(20.481.000,00)	79,48	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	99.820.000,00	79.339.000,00	(20.481.000,00)	79,48	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.820.000,00	79.339.000,00	(20.481.000,00)	79,48	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0012		PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	25.000.000,00	21.251.352,00	(3.748.648,00)	85,01	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	21.251.352,00	(3.748.648,00)	85,01	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.251.352,00	(3.748.648,00)	85,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0014		ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	100.000.000,00	87.836.000,00	(12.164.000,00)	87,84	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	87.836.000,00	(12.164.000,00)	87,84	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	87.836.000,00	(12.164.000,00)	87,84	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.02		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	449.211.000,00	294.201.850,00	(155.009.150,00)	65,49	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.02.0002		PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL PKB/PLKB	218.011.000,00	180.097.000,00	(37.914.000,00)	82,61	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.903.690,00	8.380.000,00	(10.523.690,00)	44,33	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.903.690,00	8.380.000,00	(10.523.690,00)	44,33	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	199.107.310,00	171.717.000,00	(27.390.310,00)	86,24	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.107.310,00	171.717.000,00	(27.390.310,00)	86,24	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.02.0004		PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	231.200.000,00	114.104.850,00	(117.095.150,00)	49,35	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	231.200.000,00	114.104.850,00	(117.095.150,00)	49,35	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.200.000,00	114.104.850,00	(117.095.150,00)	49,35	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	746.640.000,00	532.080.000,00	(214.560.000,00)	71,26	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03.0001		PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	21.200.000,00	10.600.000,00	(10.600.000,00)	50,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.200.000,00	10.600.000,00	(10.600.000,00)	50,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	10.600.000,00	(10.600.000,00)	50,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	713.200.000,00	510.780.000,00	(202.420.000,00)	71,62	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	713.200.000,00	510.780.000,00	(202.420.000,00)	71,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.200.000,00	510.780.000,00	(202.420.000,00)	71,62	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03.0008		PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	12.240.000,00	10.700.000,00	(1.540.000,00)	87,42	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.240.000,00	10.700.000,00	(1.540.000,00)	87,42	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.240.000,00	10.700.000,00	(1.540.000,00)	87,42	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	313.600.000,00	182.336.000,00	(131.264.000,00)	58,14	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.04.0006		PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	313.600.000,00	182.336.000,00	(131.264.000,00)	58,14	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	313.600.000,00	182.336.000,00	(131.264.000,00)	58,14	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.600.000,00	182.336.000,00	(131.264.000,00)	58,14	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.125.960.000,00	672.990.000,00	(452.970.000,00)	59,77	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.125.960.000,00	672.990.000,00	(452.970.000,00)	59,77	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01.0015		PEMBENTUKAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH LANSIA DI KELOMPOK BKL	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01.0024		PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	576.360.000,00	420.090.000,00	(156.270.000,00)	72,89	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	576.360.000,00	420.090.000,00	(156.270.000,00)	72,89	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.360.000,00	420.090.000,00	(156.270.000,00)	72,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01.0026		PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	523.000.000,00	226.300.000,00	(296.700.000,00)	43,27	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	523.000.000,00	226.300.000,00	(296.700.000,00)	43,27	
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.000.000,00	226.300.000,00	(296.700.000,00)	43,27	
				JUMLAH BELANJA	3.663.885.999,00	2.344.992.802,00	(1.318.893.197,00)	64,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.663.885.999,00)	(2.344.992.802,00)	1.318.893.197,00	64,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.663.885.999,00)	(2.344.992.802,00)	1.318.893.197,00	64,00	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

2.09.3.25.0.00.11.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	6.970.758.522,00	6.503.424.780,00	(467.333.742,00)	93,30	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.9.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.252.932.744,00	5.980.647.947,00	(272.284.797,00)	95,65	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.580.009.665,00	5.401.997.327,00	(178.012.338,00)	96,81	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.441.030.849,00	5.273.399.449,00	(167.631.400,00)	96,92	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.441.030.849,00	5.273.399.449,00	(167.631.400,00)	96,92	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.441.030.849,00	5.273.399.449,00	(167.631.400,00)	96,92	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	138.978.816,00	128.597.878,00	(10.380.938,00)	92,53	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	138.978.816,00	128.597.878,00	(10.380.938,00)	92,53	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.978.816,00	128.597.878,00	(10.380.938,00)	92,53	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	47.250.000,00	40.500.000,00	(6.750.000,00)	85,71	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	47.250.000,00	40.500.000,00	(6.750.000,00)	85,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.250.000,00	40.500.000,00	(6.750.000,00)	85,71	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.250.000,00	40.500.000,00	(6.750.000,00)	85,71	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	261.160.057,00	236.529.299,00	(24.630.758,00)	90,57	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.000.000,00	1.987.200,00	(12.800,00)	99,36	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.987.200,00	(12.800,00)	99,36	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.987.200,00	(12.800,00)	99,36	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	120.833.895,00	106.979.739,00	(13.854.156,00)	88,53	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.050.225,00	28.371.880,00	(6.678.345,00)	80,95	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.050.225,00	28.371.880,00	(6.678.345,00)	80,95	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	85.783.670,00	78.607.859,00	(7.175.811,00)	91,63	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.783.670,00	78.607.859,00	(7.175.811,00)	91,63	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	18.323.212,00	17.239.680,00	(1.083.532,00)	94,09	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.823.212,00	15.739.680,00	(1.083.532,00)	93,56	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.823.212,00	15.739.680,00	(1.083.532,00)	93,56	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.178.110,00	18.186.450,00	(1.991.660,00)	90,13	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.178.110,00	18.186.450,00	(1.991.660,00)	90,13	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.178.110,00	18.186.450,00	(1.991.660,00)	90,13	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	99.824.840,00	92.136.230,00	(7.688.610,00)	92,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.824.840,00	92.136.230,00	(7.688.610,00)	92,30	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.824.840,00	92.136.230,00	(7.688.610,00)	92,30	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	38.701.322,00	34.331.980,00	(4.369.342,00)	88,71	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	29.948.762,00	27.386.750,00	(2.562.012,00)	91,45	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.290.882,00	1.086.750,00	(1.204.132,00)	47,44	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.290.882,00	1.086.750,00	(1.204.132,00)	47,44	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	27.657.880,00	26.300.000,00	(1.357.880,00)	95,09	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.657.880,00	26.300.000,00	(1.357.880,00)	95,09	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.752.560,00	6.945.230,00	(1.807.330,00)	79,35	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.752.560,00	6.945.230,00	(1.807.330,00)	79,35	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.752.560,00	6.945.230,00	(1.807.330,00)	79,35	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	238.956.660,00	182.995.503,00	(55.961.157,00)	76,58	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	41.500.000,00	29.945.083,00	(11.554.917,00)	72,16	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.500.000,00	29.945.083,00	(11.554.917,00)	72,16	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	29.945.083,00	(11.554.917,00)	72,16	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.650.000,00	16.480.000,00	(170.000,00)	98,98	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.650.000,00	16.480.000,00	(170.000,00)	98,98	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	16.480.000,00	(170.000,00)	98,98	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	180.806.660,00	136.570.420,00	(44.236.240,00)	75,53	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	169.193.360,00	125.330.420,00	(43.862.940,00)	74,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.193.360,00	125.330.420,00	(43.862.940,00)	74,08	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0004	5.2	BELANJA MODAL	11.613.300,00	11.240.000,00	(373.300,00)	96,79	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.613.300,00	11.240.000,00	(373.300,00)	96,79	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	86.855.040,00	84.293.838,00	(2.561.202,00)	97,05	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.420.000,00	38.417.026,00	(2.974,00)	99,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.420.000,00	38.417.026,00	(2.974,00)	99,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.420.000,00	38.417.026,00	(2.974,00)	99,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	48.435.040,00	45.876.812,00	(2.558.228,00)	94,72	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.435.040,00	45.876.812,00	(2.558.228,00)	94,72	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.435.040,00	45.876.812,00	(2.558.228,00)	94,72	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.9.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	140.099.052,00	0,00	(140.099.052,00)	0,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.02.2.01		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	140.099.052,00	0,00	(140.099.052,00)	0,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.02.2.01.0003		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA	140.099.052,00	0,00	(140.099.052,00)	0,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	140.099.052,00	0,00	(140.099.052,00)	0,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.099.052,00	0,00	(140.099.052,00)	0,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.9.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	441.325.071,00	402.545.462,00	(38.779.609,00)	91,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	107.855.102,00	98.197.330,00	(9.657.772,00)	91,05	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA	43.260.000,00	43.245.000,00	(15.000,00)	99,97	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.260.000,00	43.245.000,00	(15.000,00)	99,97	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.260.000,00	43.245.000,00	(15.000,00)	99,97	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01.0007		PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	27.839.061,00	23.975.446,00	(3.863.615,00)	86,12	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.839.061,00	23.975.446,00	(3.863.615,00)	86,12	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.839.061,00	23.975.446,00	(3.863.615,00)	86,12	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01.0016		PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)	36.756.041,00	30.976.884,00	(5.779.157,00)	84,28	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	36.756.041,00	30.976.884,00	(5.779.157,00)	84,28	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.756.041,00	30.976.884,00	(5.779.157,00)	84,28	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	243.148.055,00	221.193.839,00	(21.954.216,00)	90,97	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02.0002		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN PANGAN LOKAL	39.398.055,00	34.009.370,00	(5.388.685,00)	86,32	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.398.055,00	34.009.370,00	(5.388.685,00)	86,32	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.398.055,00	34.009.370,00	(5.388.685,00)	86,32	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02.0003		PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	194.500.000,00	187.184.469,00	(7.315.531,00)	96,24	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	194.500.000,00	187.184.469,00	(7.315.531,00)	96,24	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.500.000,00	187.184.469,00	(7.315.531,00)	96,24	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02.0004		PEMELIHARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	9.250.000,00	0,00	(9.250.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.250.000,00	0,00	(9.250.000,00)	0,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	0,00	(9.250.000,00)	0,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	90.321.914,00	83.154.293,00	(7.167.621,00)	92,06	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.04.0001		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	35.929.247,00	32.342.286,00	(3.586.961,00)	90,02	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.929.247,00	32.342.286,00	(3.586.961,00)	90,02	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.929.247,00	32.342.286,00	(3.586.961,00)	90,02	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.04.0002		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	54.392.667,00	50.812.007,00	(3.580.660,00)	93,42	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.392.667,00	50.812.007,00	(3.580.660,00)	93,42	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.392.667,00	50.812.007,00	(3.580.660,00)	93,42	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.9.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	38.846.600,00	31.289.442,00	(7.557.158,00)	80,55	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.04.2.01		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	38.846.600,00	31.289.442,00	(7.557.158,00)	80,55	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.04.2.01.0001		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	38.846.600,00	31.289.442,00	(7.557.158,00)	80,55	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.846.600,00	31.289.442,00	(7.557.158,00)	80,55	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.846.600,00	31.289.442,00	(7.557.158,00)	80,55	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.9.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	97.555.055,00	88.941.929,00	(8.613.126,00)	91,17	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.05.2.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.555.055,00	88.941.929,00	(8.613.126,00)	91,17	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.05.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.555.055,00	88.941.929,00	(8.613.126,00)	91,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	97.555.055,00	88.941.929,00	(8.613.126,00)	91,17	
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.555.055,00	88.941.929,00	(8.613.126,00)	91,17	
				JUMLAH BELANJA	6.970.758.522,00	6.503.424.780,00	(467.333.742,00)	93,30	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.970.758.522,00)	(6.503.424.780,00)	467.333.742,00	93,30	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.970.758.522,00)	(6.503.424.780,00)	467.333.742,00	93,30	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.25.0.00.11.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	186.863.000,00	188.778.000,00	1.915.000,00	101,02	
	2.09.3.25.0.00.11.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	186.863.000,00	188.778.000,00	1.915.000,00	101,02	
	2.09.3.25.0.00.11.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	186.863.000,00	188.778.000,00	1.915.000,00	101,02	
				JUMLAH PENDAPATAN	186.863.000,00	188.778.000,00	1.915.000,00	101,02	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	1.876.535.490,00	1.543.900.133,00	(332.635.357,00)	82,27	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	597.390.000,00	406.168.584,00	(191.221.416,00)	67,99	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03.2.01		PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	47.390.000,00	43.606.750,00	(3.783.250,00)	92,01	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	47.390.000,00	43.606.750,00	(3.783.250,00)	92,01	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.390.000,00	43.606.750,00	(3.783.250,00)	92,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.390.000,00	43.606.750,00	(3.783.250,00)	92,01	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03.2.02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	550.000.000,00	362.561.834,00	(187.438.166,00)	65,92	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	550.000.000,00	362.561.834,00	(187.438.166,00)	65,92	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000,00	362.561.834,00	(187.438.166,00)	65,92	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	362.561.834,00	(187.438.166,00)	65,92	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.134.586.939,00	1.007.173.198,00	(127.413.741,00)	88,77	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.02		PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	626.409.946,00	560.276.585,00	(66.133.361,00)	89,44	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	474.322.284,00	421.177.477,00	(53.144.807,00)	88,79	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	474.322.284,00	421.177.477,00	(53.144.807,00)	88,79	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.322.284,00	421.177.477,00	(53.144.807,00)	88,79	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.02.0004		PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	152.087.662,00	139.099.108,00	(12.988.554,00)	91,45	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	152.087.662,00	139.099.108,00	(12.988.554,00)	91,45	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.087.662,00	139.099.108,00	(12.988.554,00)	91,45	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	508.176.993,00	446.896.613,00	(61.280.380,00)	87,94	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0004		PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.500.000,00	33.789.690,00	(2.710.310,00)	92,57	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.500.000,00	33.789.690,00	(2.710.310,00)	92,57	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	33.789.690,00	(2.710.310,00)	92,57	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0009		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	463.076.808,00	405.061.467,00	(58.015.341,00)	87,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	389.680.808,00	332.777.224,00	(56.903.584,00)	85,39	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.680.808,00	332.777.224,00	(56.903.584,00)	85,39	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0009	5.2	BELANJA MODAL	73.396.000,00	72.284.243,00	(1.111.757,00)	98,48	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.396.000,00	72.284.243,00	(1.111.757,00)	98,48	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0010		PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT	8.600.185,00	8.045.456,00	(554.729,00)	93,54	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	8.600.185,00	8.045.456,00	(554.729,00)	93,54	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.185,00	8.045.456,00	(554.729,00)	93,54	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	144.558.551,00	130.558.351,00	(14.000.200,00)	90,31	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.06.2.03		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	144.558.551,00	130.558.351,00	(14.000.200,00)	90,31	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.06.2.03.0001		PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.575.397,00	87.971.365,00	(11.604.032,00)	88,34	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	99.575.397,00	87.971.365,00	(11.604.032,00)	88,34	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.575.397,00	87.971.365,00	(11.604.032,00)	88,34	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.06.2.03.0002		PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.983.154,00	42.586.986,00	(2.396.168,00)	94,67	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.983.154,00	42.586.986,00	(2.396.168,00)	94,67	
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.983.154,00	42.586.986,00	(2.396.168,00)	94,67	
				JUMLAH BELANJA	1.876.535.490,00	1.543.900.133,00	(332.635.357,00)	82,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.689.672.490,00)	(1.355.122.133,00)	334.550.357,00	80,20	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.689.672.490,00)	(1.355.122.133,00)	334.550.357,00	80,20	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Lingkungan Hidup

2.11.3.29.0.00.12.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.3.29.0.00.12.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.197.407.000,00	1.875.620.000,00	(321.787.000,00)	85,36	
	2.11.3.29.0.00.12.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.197.407.000,00	1.875.620.000,00	(321.787.000,00)	85,36	
	2.11.3.29.0.00.12.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.197.407.000,00	1.875.620.000,00	(321.787.000,00)	85,36	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.197.407.000,00	1.875.620.000,00	(321.787.000,00)	85,36	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000		5	BELANJA DAERAH	27.005.633.382,00	24.157.706.244,00	(2.847.927.138,00)	89,45	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.710.832.587,00	9.565.195.136,00	(2.145.637.451,00)	81,68	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.624.168.401,00	3.370.511.217,00	(253.657.184,00)	93,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.465.259.414,00	3.221.299.717,00	(243.959.697,00)	92,96	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.465.259.414,00	3.221.299.717,00	(243.959.697,00)	92,96	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.465.259.414,00	3.221.299.717,00	(243.959.697,00)	92,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	158.908.987,00	149.211.500,00	(9.697.487,00)	93,90	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	158.908.987,00	149.211.500,00	(9.697.487,00)	93,90	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.908.987,00	149.211.500,00	(9.697.487,00)	93,90	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	55.253.098,00	49.390.000,00	(5.863.098,00)	89,39	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	55.253.098,00	49.390.000,00	(5.863.098,00)	89,39	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.253.098,00	49.390.000,00	(5.863.098,00)	89,39	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.253.098,00	49.390.000,00	(5.863.098,00)	89,39	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	215.706.206,00	203.034.950,00	(12.671.256,00)	94,13	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.943.985,00	29.907.000,00	(36.985,00)	99,88	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.943.985,00	29.907.000,00	(36.985,00)	99,88	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.943.985,00	29.907.000,00	(36.985,00)	99,88	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.000.000,00	5.984.000,00	(16.000,00)	99,73	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.984.000,00	(16.000,00)	99,73	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.984.000,00	(16.000,00)	99,73	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	68.000.000,00	65.553.400,00	(2.446.600,00)	96,40	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	65.553.400,00	(2.446.600,00)	96,40	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	65.553.400,00	(2.446.600,00)	96,40	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	111.762.221,00	101.590.550,00	(10.171.671,00)	90,90	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	111.762.221,00	101.590.550,00	(10.171.671,00)	90,90	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.762.221,00	101.590.550,00	(10.171.671,00)	90,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	440.988.190,00	433.367.500,00	(7.620.690,00)	98,27	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	55.228.590,00	53.058.000,00	(2.170.590,00)	96,07	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	55.228.590,00	53.058.000,00	(2.170.590,00)	96,07	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.228.590,00	53.058.000,00	(2.170.590,00)	96,07	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	195.759.600,00	190.309.500,00	(5.450.100,00)	97,22	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	195.759.600,00	190.309.500,00	(5.450.100,00)	97,22	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.759.600,00	190.309.500,00	(5.450.100,00)	97,22	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	389.556.400,00	380.339.362,00	(9.217.038,00)	97,63	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	55.000.000,00	48.229.362,00	(6.770.638,00)	87,69	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	48.229.362,00	(6.770.638,00)	87,69	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	48.229.362,00	(6.770.638,00)	87,69	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.010.000,00	12.000.000,00	(10.000,00)	99,92	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.010.000,00	12.000.000,00	(10.000,00)	99,92	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.010.000,00	12.000.000,00	(10.000,00)	99,92	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	322.546.400,00	320.110.000,00	(2.436.400,00)	99,24	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	322.546.400,00	320.110.000,00	(2.436.400,00)	99,24	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.546.400,00	320.110.000,00	(2.436.400,00)	99,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.985.160.292,00	5.128.552.107,00	(1.856.608.185,00)	73,42	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	6.865.831.292,00	5.022.368.443,00	(1.843.462.849,00)	73,15	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.865.831.292,00	5.022.368.443,00	(1.843.462.849,00)	73,15	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.865.831.292,00	5.022.368.443,00	(1.843.462.849,00)	73,15	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	119.329.000,00	106.183.664,00	(13.145.336,00)	88,98	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.329.000,00	86.783.664,00	(12.545.336,00)	87,37	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.329.000,00	86.783.664,00	(12.545.336,00)	87,37	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.400.000,00	(600.000,00)	97,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.400.000,00	(600.000,00)	97,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	7.660.000,00	7.050.000,00	(610.000,00)	92,04	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.02.2.01		RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	7.660.000,00	7.050.000,00	(610.000,00)	92,04	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.02.2.01.0002		PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA	7.660.000,00	7.050.000,00	(610.000,00)	92,04	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.660.000,00	7.050.000,00	(610.000,00)	92,04	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	7.050.000,00	(610.000,00)	92,04	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	671.621.200,00	578.689.300,00	(92.931.900,00)	86,16	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	551.621.200,00	492.109.300,00	(59.511.900,00)	89,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	117.579.200,00	116.730.000,00	(849.200,00)	99,28	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	117.579.200,00	116.730.000,00	(849.200,00)	99,28	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.579.200,00	116.730.000,00	(849.200,00)	99,28	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	434.042.000,00	375.379.300,00	(58.662.700,00)	86,48	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	379.464.736,00	321.877.300,00	(57.587.436,00)	84,82	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.464.736,00	321.877.300,00	(57.587.436,00)	84,82	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	54.577.264,00	53.502.000,00	(1.075.264,00)	98,03	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.577.264,00	53.502.000,00	(1.075.264,00)	98,03	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.02		PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	120.000.000,00	86.580.000,00	(33.420.000,00)	72,15	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.02.0001		PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	120.000.000,00	86.580.000,00	(33.420.000,00)	72,15	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	120.000,00	0,00	(120.000,00)	0,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	0,00	(120.000,00)	0,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	119.880.000,00	86.580.000,00	(33.300.000,00)	72,22	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.880.000,00	86.580.000,00	(33.300.000,00)	72,22	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	18.998.077,00	18.986.600,00	(11.477,00)	99,94	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	18.998.077,00	18.986.600,00	(11.477,00)	99,94	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.04.2.01.0004		PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	18.998.077,00	18.986.600,00	(11.477,00)	99,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.998.077,00	18.986.600,00	(11.477,00)	99,94	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.998.077,00	18.986.600,00	(11.477,00)	99,94	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	7.500.000,00	6.750.000,00	(750.000,00)	90,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.05.2.01		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	7.500.000,00	6.750.000,00	(750.000,00)	90,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.05.2.01.0002		VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	7.500.000,00	6.750.000,00	(750.000,00)	90,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	6.750.000,00	(750.000,00)	90,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.750.000,00	(750.000,00)	90,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	21.192.800,00	19.620.000,00	(1.572.800,00)	92,58	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.06.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.192.800,00	19.620.000,00	(1.572.800,00)	92,58	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.06.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	13.690.400,00	13.250.000,00	(440.400,00)	96,78	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.690.400,00	13.250.000,00	(440.400,00)	96,78	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.690.400,00	13.250.000,00	(440.400,00)	96,78	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.06.2.01.0007		PENGEMBANGAN KAPASITAS PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	7.502.400,00	6.370.000,00	(1.132.400,00)	84,91	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.502.400,00	6.370.000,00	(1.132.400,00)	84,91	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.502.400,00	6.370.000,00	(1.132.400,00)	84,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	40.000.000,00	39.767.440,00	(232.560,00)	99,42	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.000.000,00	39.767.440,00	(232.560,00)	99,42	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.08.2.01.0002		PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	40.000.000,00	39.767.440,00	(232.560,00)	99,42	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.767.440,00	(232.560,00)	99,42	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.767.440,00	(232.560,00)	99,42	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	71.008.340,00	64.590.200,00	(6.418.140,00)	90,96	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.09.2.01		PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.008.340,00	64.590.200,00	(6.418.140,00)	90,96	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.09.2.01.0001		PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	71.008.340,00	64.590.200,00	(6.418.140,00)	90,96	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	66.930.440,00	60.513.200,00	(6.417.240,00)	90,41	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.930.440,00	60.513.200,00	(6.417.240,00)	90,41	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.09.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.077.900,00	4.077.000,00	(900,00)	99,98	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.09.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.077.900,00	4.077.000,00	(900,00)	99,98	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	42.434.800,00	41.364.600,00	(1.070.200,00)	97,48	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	42.434.800,00	41.364.600,00	(1.070.200,00)	97,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.10.2.01.0004		PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	42.434.800,00	41.364.600,00	(1.070.200,00)	97,48	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	42.434.800,00	41.364.600,00	(1.070.200,00)	97,48	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.434.800,00	41.364.600,00	(1.070.200,00)	97,48	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.414.385.578,00	13.815.692.968,00	(598.692.610,00)	95,85	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	14.414.385.578,00	13.815.692.968,00	(598.692.610,00)	95,85	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0004		PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	154.667.884,00	154.097.920,00	(569.964,00)	99,63	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	154.667.884,00	154.097.920,00	(569.964,00)	99,63	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.667.884,00	154.097.920,00	(569.964,00)	99,63	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	1.843.858.456,00	1.795.223.299,00	(48.635.157,00)	97,36	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	626.286.456,00	624.671.800,00	(1.614.656,00)	99,74	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.286.456,00	624.671.800,00	(1.614.656,00)	99,74	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	1.217.572.000,00	1.170.551.499,00	(47.020.501,00)	96,14	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.217.572.000,00	1.170.551.499,00	(47.020.501,00)	96,14	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0008		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	149.184.000,00	(816.000,00)	99,46	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.184.000,00	(816.000,00)	99,46	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.184.000,00	(816.000,00)	99,46	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0019		PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PENDAURAN ULANG SAMPAH	249.954.280,00	42.959.500,00	(206.994.780,00)	17,19	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	49.954.280,00	42.959.500,00	(6.994.780,00)	86,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.954.280,00	42.959.500,00	(6.994.780,00)	86,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0019	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0019	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0020		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL	12.015.904.958,00	11.674.228.249,00	(341.676.709,00)	97,16	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	12.005.904.958,00	11.664.404.749,00	(341.500.209,00)	97,16	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.005.904.958,00	11.664.404.749,00	(341.500.209,00)	97,16	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.823.500,00	(176.500,00)	98,24	
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.823.500,00	(176.500,00)	98,24	
				JUMLAH BELANJA	27.005.633.382,00	24.157.706.244,00	(2.847.927.138,00)	89,45	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(24.808.226.382,00)	(22.282.086.244,00)	2.526.140.138,00	89,82	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.808.226.382,00)	(22.282.086.244,00)	2.526.140.138,00	89,82	

Kabanjahe, 24 September 2026

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.0.00.0.00.13.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000		5	BELANJA DAERAH	5.203.179.675,00	4.583.876.495,00	(619.303.180,00)	88,10	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.361.262.056,00	3.818.982.470,00	(542.279.586,00)	87,57	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.139.293.577,00	2.824.528.415,00	(314.765.162,00)	89,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.060.813.577,00	2.746.048.415,00	(314.765.162,00)	89,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.060.813.577,00	2.746.048.415,00	(314.765.162,00)	89,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.060.813.577,00	2.746.048.415,00	(314.765.162,00)	89,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	78.480.000,00	78.480.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	78.480.000,00	78.480.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.480.000,00	78.480.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	129.149.617,00	117.085.800,00	(12.063.817,00)	90,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.147.300,00	3.135.000,00	(12.300,00)	99,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.147.300,00	3.135.000,00	(12.300,00)	99,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.147.300,00	3.135.000,00	(12.300,00)	99,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	45.900.080,00	41.188.800,00	(4.711.280,00)	89,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.900.080,00	41.188.800,00	(4.711.280,00)	89,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.900.080,00	41.188.800,00	(4.711.280,00)	89,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.294.362,00	7.375.500,00	(918.862,00)	88,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.294.362,00	7.375.500,00	(918.862,00)	88,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.294.362,00	7.375.500,00	(918.862,00)	88,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.163.875,00	21.769.500,00	(5.394.375,00)	80,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.163.875,00	21.769.500,00	(5.394.375,00)	80,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.163.875,00	21.769.500,00	(5.394.375,00)	80,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.160.000,00	1.200.000,00	(960.000,00)	55,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	1.200.000,00	(960.000,00)	55,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	1.200.000,00	(960.000,00)	55,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	42.484.000,00	42.417.000,00	(67.000,00)	99,84	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	42.484.000,00	42.417.000,00	(67.000,00)	99,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.484.000,00	42.417.000,00	(67.000,00)	99,84	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	360.928.862,00	168.124.000,00	(192.804.862,00)	46,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	63.210.734,00	49.640.000,00	(13.570.734,00)	78,53	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	63.210.734,00	49.640.000,00	(13.570.734,00)	78,53	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.210.734,00	49.640.000,00	(13.570.734,00)	78,53	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	267.718.128,00	118.484.000,00	(149.234.128,00)	44,26	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	267.718.128,00	118.484.000,00	(149.234.128,00)	44,26	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.718.128,00	118.484.000,00	(149.234.128,00)	44,26	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	511.860.000,00	492.156.044,00	(19.703.956,00)	96,15	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.220.000,00	13.336.044,00	(3.883.956,00)	77,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.220.000,00	13.336.044,00	(3.883.956,00)	77,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.220.000,00	13.336.044,00	(3.883.956,00)	77,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.780.000,00	21.820.000,00	(8.960.000,00)	70,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.780.000,00	21.820.000,00	(8.960.000,00)	70,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.780.000,00	21.820.000,00	(8.960.000,00)	70,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	463.860.000,00	457.000.000,00	(6.860.000,00)	98,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	463.860.000,00	457.000.000,00	(6.860.000,00)	98,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.860.000,00	457.000.000,00	(6.860.000,00)	98,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	160.030.000,00	157.088.211,00	(2.941.789,00)	98,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	85.030.000,00	82.888.212,00	(2.141.788,00)	97,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.030.000,00	82.888.212,00	(2.141.788,00)	97,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.030.000,00	82.888.212,00	(2.141.788,00)	97,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	75.000.000,00	74.199.999,00	(800.001,00)	98,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.199.999,00	(800.001,00)	98,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.199.999,00	(800.001,00)	98,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	681.550.919,00	624.085.100,00	(57.465.819,00)	91,57	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	681.550.919,00	624.085.100,00	(57.465.819,00)	91,57	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01.0002		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK	590.639.890,00	539.398.100,00	(51.241.790,00)	91,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	444.217.490,00	407.963.100,00	(36.254.390,00)	91,84	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.217.490,00	407.963.100,00	(36.254.390,00)	91,84	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	146.422.400,00	131.435.000,00	(14.987.400,00)	89,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.422.400,00	131.435.000,00	(14.987.400,00)	89,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01.0004		PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	90.911.029,00	84.687.000,00	(6.224.029,00)	93,15	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.932.896,00	32.185.000,00	(1.747.896,00)	94,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.932.896,00	32.185.000,00	(1.747.896,00)	94,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	56.978.133,00	52.502.000,00	(4.476.133,00)	92,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.978.133,00	52.502.000,00	(4.476.133,00)	92,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	64.047.280,00	62.407.000,00	(1.640.280,00)	97,44	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	64.047.280,00	62.407.000,00	(1.640.280,00)	97,44	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.03.2.01.0001		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	34.703.180,00	33.082.000,00	(1.621.180,00)	95,33	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.703.180,00	33.082.000,00	(1.621.180,00)	95,33	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.703.180,00	33.082.000,00	(1.621.180,00)	95,33	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.03.2.01.0002		PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	29.344.100,00	29.325.000,00	(19.100,00)	99,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.344.100,00	29.325.000,00	(19.100,00)	99,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.344.100,00	29.325.000,00	(19.100,00)	99,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	49.279.140,00	43.724.525,00	(5.554.615,00)	88,73	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.01		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	19.211.700,00	18.804.200,00	(407.500,00)	97,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.01.0001		PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	19.211.700,00	18.804.200,00	(407.500,00)	97,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.211.700,00	18.804.200,00	(407.500,00)	97,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.211.700,00	18.804.200,00	(407.500,00)	97,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	30.067.440,00	24.920.325,00	(5.147.115,00)	82,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.03.0004		PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	14.835.440,00	12.820.325,00	(2.015.115,00)	86,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.835.440,00	12.820.325,00	(2.015.115,00)	86,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.835.440,00	12.820.325,00	(2.015.115,00)	86,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.03.0005		SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	15.232.000,00	12.100.000,00	(3.132.000,00)	79,44	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.232.000,00	12.100.000,00	(3.132.000,00)	79,44	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.232.000,00	12.100.000,00	(3.132.000,00)	79,44	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	47.040.280,00	34.677.400,00	(12.362.880,00)	73,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.05.2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	47.040.280,00	34.677.400,00	(12.362.880,00)	73,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.05.2.01.0002		PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	47.040.280,00	34.677.400,00	(12.362.880,00)	73,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.040.280,00	34.677.400,00	(12.362.880,00)	73,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.040.280,00	34.677.400,00	(12.362.880,00)	73,72	
				JUMLAH BELANJA	5.203.179.675,00	4.583.876.495,00	(619.303.180,00)	88,10	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.203.179.675,00)	(4.583.876.495,00)	619.303.180,00	88,10	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.203.179.675,00)	(4.583.876.495,00)	619.303.180,00	88,10	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.13.0.00.0.00.14.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000		5	BELANJA DAERAH	8.952.350.719,00	8.210.420.667,00	(741.930.052,00)	91,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.876.844.759,00	4.681.023.229,00	(195.821.530,00)	95,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.131.414.035,00	4.007.454.664,00	(123.959.371,00)	97,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.985.374.035,00	3.866.494.664,00	(118.879.371,00)	97,02	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.985.374.035,00	3.866.494.664,00	(118.879.371,00)	97,02	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.985.374.035,00	3.866.494.664,00	(118.879.371,00)	97,02	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	146.040.000,00	140.960.000,00	(5.080.000,00)	96,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	146.040.000,00	140.960.000,00	(5.080.000,00)	96,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.040.000,00	140.960.000,00	(5.080.000,00)	96,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	405.610.037,00	359.778.388,00	(45.831.649,00)	88,70	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.250.000,00	2.211.500,00	(38.500,00)	98,29	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.211.500,00	(38.500,00)	98,29	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.211.500,00	(38.500,00)	98,29	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	297.905.375,00	265.504.900,00	(32.400.475,00)	89,12	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.197.675,00	48.843.800,00	(11.353.875,00)	81,14	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.197.675,00	48.843.800,00	(11.353.875,00)	81,14	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	237.707.700,00	216.661.100,00	(21.046.600,00)	91,15	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.707.700,00	216.661.100,00	(21.046.600,00)	91,15	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.500.000,00	11.710.300,00	(1.789.700,00)	86,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	11.710.300,00	(1.789.700,00)	86,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	11.710.300,00	(1.789.700,00)	86,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.986.662,00	20.584.860,00	(1.401.802,00)	93,62	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.986.662,00	20.584.860,00	(1.401.802,00)	93,62	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.986.662,00	20.584.860,00	(1.401.802,00)	93,62	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.900.000,00	3.600.000,00	(1.300.000,00)	73,47	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.900.000,00	3.600.000,00	(1.300.000,00)	73,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	3.600.000,00	(1.300.000,00)	73,47	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	65.068.000,00	56.166.828,00	(8.901.172,00)	86,32	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	65.068.000,00	56.166.828,00	(8.901.172,00)	86,32	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.068.000,00	56.166.828,00	(8.901.172,00)	86,32	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	245.148.719,00	229.222.500,00	(15.926.219,00)	93,50	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.200.000,00	17.811.500,00	(1.388.500,00)	92,77	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	17.811.500,00	(1.388.500,00)	92,77	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	17.811.500,00	(1.388.500,00)	92,77	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.290.000,00	25.760.000,00	(530.000,00)	97,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.290.000,00	25.760.000,00	(530.000,00)	97,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.290.000,00	25.760.000,00	(530.000,00)	97,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	199.658.719,00	185.651.000,00	(14.007.719,00)	92,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	199.658.719,00	185.651.000,00	(14.007.719,00)	92,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.658.719,00	185.651.000,00	(14.007.719,00)	92,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	66.921.968,00	56.817.677,00	(10.104.291,00)	84,90	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	66.921.968,00	56.817.677,00	(10.104.291,00)	84,90	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	66.921.968,00	56.817.677,00	(10.104.291,00)	84,90	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.921.968,00	56.817.677,00	(10.104.291,00)	84,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.140.087.273,00	2.776.970.485,00	(363.116.788,00)	88,44	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.140.087.273,00	2.776.970.485,00	(363.116.788,00)	88,44	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0001		FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.469.481.736,00	2.369.746.612,00	(99.735.124,00)	95,96	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.469.481.736,00	2.369.746.612,00	(99.735.124,00)	95,96	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.469.481.736,00	2.369.746.612,00	(99.735.124,00)	95,96	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0002		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA	49.066.500,00	25.648.120,00	(23.418.380,00)	52,27	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.066.500,00	25.648.120,00	(23.418.380,00)	52,27	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.066.500,00	25.648.120,00	(23.418.380,00)	52,27	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0003		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	71.998.144,00	37.503.100,00	(34.495.044,00)	52,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	71.998.144,00	37.503.100,00	(34.495.044,00)	52,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.998.144,00	37.503.100,00	(34.495.044,00)	52,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0004		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	136.732.455,00	129.703.783,00	(7.028.672,00)	94,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	136.732.455,00	129.703.783,00	(7.028.672,00)	94,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.732.455,00	129.703.783,00	(7.028.672,00)	94,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0005		PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	133.889.955,00	94.864.560,00	(39.025.395,00)	70,85	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	133.889.955,00	94.864.560,00	(39.025.395,00)	70,85	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.889.955,00	94.864.560,00	(39.025.395,00)	70,85	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0008		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA	90.974.385,00	59.335.430,00	(31.638.955,00)	65,22	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	90.974.385,00	59.335.430,00	(31.638.955,00)	65,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.974.385,00	59.335.430,00	(31.638.955,00)	65,22	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0009		PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	42.697.600,00	0,00	(42.697.600,00)	0,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	42.697.600,00	0,00	(42.697.600,00)	0,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.697.600,00	0,00	(42.697.600,00)	0,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0014		PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD	115.848.498,00	58.199.880,00	(57.648.618,00)	50,24	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	115.848.498,00	58.199.880,00	(57.648.618,00)	50,24	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.848.498,00	58.199.880,00	(57.648.618,00)	50,24	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0018		FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	29.398.000,00	1.969.000,00	(27.429.000,00)	6,70	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	29.398.000,00	1.969.000,00	(27.429.000,00)	6,70	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.398.000,00	1.969.000,00	(27.429.000,00)	6,70	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	935.418.687,00	752.426.953,00	(182.991.734,00)	80,44	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	935.418.687,00	752.426.953,00	(182.991.734,00)	80,44	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	510.000.000,00	361.129.770,00	(148.870.230,00)	70,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	487.478.830,00	340.156.770,00	(147.322.060,00)	69,78	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.478.830,00	340.156.770,00	(147.322.060,00)	69,78	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	22.521.170,00	20.973.000,00	(1.548.170,00)	93,13	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.521.170,00	20.973.000,00	(1.548.170,00)	93,13	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0005		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	31.881.240,00	31.555.400,00	(325.840,00)	98,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.881.240,00	31.555.400,00	(325.840,00)	98,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.881.240,00	31.555.400,00	(325.840,00)	98,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0006		FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	2.410.000,00	0,00	(2.410.000,00)	0,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.410.000,00	0,00	(2.410.000,00)	0,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.410.000,00	0,00	(2.410.000,00)	0,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0007		FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT	29.094.020,00	28.089.000,00	(1.005.020,00)	96,55	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.094.020,00	28.089.000,00	(1.005.020,00)	96,55	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.094.020,00	28.089.000,00	(1.005.020,00)	96,55	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0009		FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	362.033.427,00	331.652.783,00	(30.380.644,00)	91,61	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	362.033.427,00	331.652.783,00	(30.380.644,00)	91,61	
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.033.427,00	331.652.783,00	(30.380.644,00)	91,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	8.952.350.719,00	8.210.420.667,00	(741.930.052,00)	91,71	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.952.350.719,00)	(8.210.420.667,00)	741.930.052,00	91,71	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.952.350.719,00)	(8.210.420.667,00)	741.930.052,00	91,71	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Perhubungan

2.15.0.00.0.00.15.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.15.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.199.465.000,00	2.201.750.000,00	2.285.000,00	100,10	
	2.15.0.00.0.00.15.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.199.465.000,00	2.201.750.000,00	2.285.000,00	100,10	
	2.15.0.00.0.00.15.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.199.465.000,00	2.201.750.000,00	2.285.000,00	100,10	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.199.465.000,00	2.201.750.000,00	2.285.000,00	100,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		5	BELANJA DAERAH	22.964.948.517,00	22.378.024.879,00	(586.923.638,00)	97,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.552.268.576,00	7.263.050.620,00	(289.217.956,00)	96,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.491.815,00	0,00	(2.491.815,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.491.815,00	0,00	(2.491.815,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.491.815,00	0,00	(2.491.815,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.491.815,00	0,00	(2.491.815,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.547.049.236,00	5.361.923.869,00	(185.125.367,00)	96,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.384.850.531,00	5.199.725.164,00	(185.125.367,00)	96,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.384.850.531,00	5.199.725.164,00	(185.125.367,00)	96,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.384.850.531,00	5.199.725.164,00	(185.125.367,00)	96,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	162.198.705,00	162.198.705,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	162.198.705,00	162.198.705,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.198.705,00	162.198.705,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.04		ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	312.000,00	0,00	(312.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.04.0007		PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	312.000,00	0,00	(312.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	312.000,00	0,00	(312.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.000,00	0,00	(312.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	71.650.000,00	69.879.215,00	(1.770.785,00)	97,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	70.000.000,00	69.879.215,00	(120.785,00)	99,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.879.215,00	(120.785,00)	99,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.879.215,00	(120.785,00)	99,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	279.218.641,00	254.338.362,00	(24.880.279,00)	91,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	2.458.282,00	(41.718,00)	98,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.458.282,00	(41.718,00)	98,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.458.282,00	(41.718,00)	98,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	94.047.185,00	92.466.585,00	(1.580.600,00)	98,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.411.385,00	28.308.585,00	(1.102.800,00)	96,25	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.411.385,00	28.308.585,00	(1.102.800,00)	96,25	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	64.635.800,00	64.158.000,00	(477.800,00)	99,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.635.800,00	64.158.000,00	(477.800,00)	99,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	29.938.892,00	29.938.892,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.938.892,00	29.938.892,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.938.892,00	29.938.892,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.705.600,00	50.697.300,00	(8.300,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.705.600,00	50.697.300,00	(8.300,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.705.600,00	50.697.300,00	(8.300,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.556.000,00	2.640.000,00	(916.000,00)	74,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.556.000,00	2.640.000,00	(916.000,00)	74,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.556.000,00	2.640.000,00	(916.000,00)	74,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	98.470.964,00	76.137.303,00	(22.333.661,00)	77,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	98.470.964,00	76.137.303,00	(22.333.661,00)	77,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.470.964,00	76.137.303,00	(22.333.661,00)	77,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	29.479.400,00	28.810.500,00	(668.900,00)	97,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	19.850.000,00	19.314.000,00	(536.000,00)	97,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	19.800.000,00	19.314.000,00	(486.000,00)	97,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.800.000,00	19.314.000,00	(486.000,00)	97,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.629.400,00	9.496.500,00	(132.900,00)	98,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	9.179.400,00	9.046.500,00	(132.900,00)	98,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.179.400,00	9.046.500,00	(132.900,00)	98,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	778.487.335,00	729.725.420,00	(48.761.915,00)	93,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	38.344.705,00	30.109.660,00	(8.235.045,00)	78,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.344.705,00	30.109.660,00	(8.235.045,00)	78,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.344.705,00	30.109.660,00	(8.235.045,00)	78,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.528.000,00	12.155.000,00	(5.373.000,00)	69,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.528.000,00	12.155.000,00	(5.373.000,00)	69,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.528.000,00	12.155.000,00	(5.373.000,00)	69,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	722.614.630,00	687.460.760,00	(35.153.870,00)	95,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	722.614.630,00	687.460.760,00	(35.153.870,00)	95,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.614.630,00	687.460.760,00	(35.153.870,00)	95,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	843.580.149,00	818.373.254,00	(25.206.895,00)	97,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	39.448.112,00	39.358.850,00	(89.262,00)	99,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.448.112,00	39.358.850,00	(89.262,00)	99,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.448.112,00	39.358.850,00	(89.262,00)	99,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	149.602.630,00	149.037.880,00	(564.750,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	149.602.630,00	149.037.880,00	(564.750,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.602.630,00	149.037.880,00	(564.750,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	654.529.407,00	629.976.524,00	(24.552.883,00)	96,25	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	81.057.207,00	66.248.346,00	(14.808.861,00)	81,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.057.207,00	66.248.346,00	(14.808.861,00)	81,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	573.472.200,00	563.728.178,00	(9.744.022,00)	98,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	536.417.200,00	527.228.179,00	(9.189.021,00)	98,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.055.000,00	36.499.999,00	(555.001,00)	98,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15.400.123.205,00	15.102.437.354,00	(297.685.851,00)	98,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	13.627.533.430,00	13.385.926.863,00	(241.606.567,00)	98,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0001		PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	123.752.558,00	115.821.425,00	(7.931.133,00)	93,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.451.758,00	35.297.795,00	(153.963,00)	99,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.451.758,00	35.297.795,00	(153.963,00)	99,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	88.300.800,00	80.523.630,00	(7.777.170,00)	91,19	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.300.800,00	80.523.630,00	(7.777.170,00)	91,19	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	12.939.130.572,00	12.716.555.138,00	(222.575.434,00)	98,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.379.583.504,00	11.169.033.965,00	(210.549.539,00)	98,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.379.583.504,00	11.169.033.965,00	(210.549.539,00)	98,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.559.547.068,00	1.547.521.173,00	(12.025.895,00)	99,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.211.000.000,00	1.199.993.243,00	(11.006.757,00)	99,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	348.547.068,00	347.527.930,00	(1.019.138,00)	99,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0004		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	564.650.300,00	553.550.300,00	(11.100.000,00)	98,03	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	553.550.300,00	553.550.300,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0004	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	553.550.300,00	553.550.300,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.04		PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	335.731.994,00	325.674.925,00	(10.057.069,00)	97,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.04.0001		FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	223.635.521,00	221.423.850,00	(2.211.671,00)	99,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	213.126.916,00	211.048.850,00	(2.078.066,00)	99,02	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.126.916,00	211.048.850,00	(2.078.066,00)	99,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.04.0001	5.2	BELANJA MODAL	10.508.605,00	10.375.000,00	(133.605,00)	98,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.04.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.508.605,00	10.375.000,00	(133.605,00)	98,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.04.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	112.096.473,00	104.251.075,00	(7.845.398,00)	93,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	112.096.473,00	104.251.075,00	(7.845.398,00)	93,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.096.473,00	104.251.075,00	(7.845.398,00)	93,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05		PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	15.228.822,00	12.482.536,00	(2.746.286,00)	81,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0006		IDENTIFIKASI DAN ANALISIS POTENSI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI	10.038.072,00	9.887.896,00	(150.176,00)	98,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.038.072,00	9.887.896,00	(150.176,00)	98,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.038.072,00	9.887.896,00	(150.176,00)	98,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0010		MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	5.190.750,00	2.594.640,00	(2.596.110,00)	49,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.190.750,00	2.594.640,00	(2.596.110,00)	49,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.190.750,00	2.594.640,00	(2.596.110,00)	49,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	1.256.907.603,00	1.236.873.184,00	(20.034.419,00)	98,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0004		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	688.521.940,00	682.186.508,00	(6.335.432,00)	99,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	674.029.940,00	667.786.508,00	(6.243.432,00)	99,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	674.029.940,00	667.786.508,00	(6.243.432,00)	99,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	14.492.000,00	14.400.000,00	(92.000,00)	99,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.492.000,00	14.400.000,00	(92.000,00)	99,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0015		FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	17.235.462,00	10.687.374,00	(6.548.088,00)	62,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1	BELANJA OPERASI	17.235.462,00	10.687.374,00	(6.548.088,00)	62,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.235.462,00	10.687.374,00	(6.548.088,00)	62,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0016		PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	551.150.201,00	543.999.302,00	(7.150.899,00)	98,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1	BELANJA OPERASI	12.492.793,00	11.873.165,00	(619.628,00)	95,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.492.793,00	11.873.165,00	(619.628,00)	95,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0016	5.2	BELANJA MODAL	538.657.408,00	532.126.137,00	(6.531.271,00)	98,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	441.504.908,00	434.973.637,00	(6.531.271,00)	98,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0016	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.152.500,00	97.152.500,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.07		PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	24.540.438,00	24.540.196,00	(242,00)	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.07.0006		PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS ANDALALIN	24.540.438,00	24.540.196,00	(242,00)	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.540.438,00	24.540.196,00	(242,00)	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.540.438,00	24.540.196,00	(242,00)	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08		AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	28.063.810,00	24.198.255,00	(3.865.555,00)	86,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0003		PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN TERMINAL	8.204.352,00	6.000.000,00	(2.204.352,00)	73,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.204.352,00	6.000.000,00	(2.204.352,00)	73,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.204.352,00	6.000.000,00	(2.204.352,00)	73,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0004		PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/KOTA	7.646.390,00	6.290.120,00	(1.356.270,00)	82,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.646.390,00	6.290.120,00	(1.356.270,00)	82,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.646.390,00	6.290.120,00	(1.356.270,00)	82,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0007		PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM	12.213.068,00	11.908.135,00	(304.933,00)	97,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.213.068,00	11.908.135,00	(304.933,00)	97,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.213.068,00	11.908.135,00	(304.933,00)	97,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09		PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.575.720,00	45.292.266,00	(4.283.454,00)	91,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	49.575.720,00	45.292.266,00	(4.283.454,00)	91,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.575.720,00	45.292.266,00	(4.283.454,00)	91,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.575.720,00	45.292.266,00	(4.283.454,00)	91,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.11		PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.541.388,00	47.449.129,00	(15.092.259,00)	75,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.11.0002		PENETAPAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.541.388,00	47.449.129,00	(15.092.259,00)	75,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.541.388,00	47.449.129,00	(15.092.259,00)	75,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.541.388,00	47.449.129,00	(15.092.259,00)	75,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	12.556.736,00	12.536.905,00	(19.831,00)	99,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.08		PENERBITAN IZIN USAHA JASA TERKAIT DENGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	12.556.736,00	12.536.905,00	(19.831,00)	99,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.08.0001		FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN USAHA JASA TERKAIT DENGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	12.556.736,00	12.536.905,00	(19.831,00)	99,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.556.736,00	12.536.905,00	(19.831,00)	99,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.556.736,00	12.536.905,00	(19.831,00)	99,84	
				JUMLAH BELANJA	22.964.948.517,00	22.378.024.879,00	(586.923.638,00)	97,44	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(20.765.483.517,00)	(20.176.274.879,00)	589.208.638,00	97,16	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(20.765.483.517,00)	(20.176.274.879,00)	589.208.638,00	97,16	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Komunikasi dan Informatika

2.16.2.20.2.21.16.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000		5	BELANJA DAERAH	8.238.749.673,00	8.135.432.865,00	(103.316.808,00)	98,75	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.313.483.200,00	5.258.656.065,00	(54.827.135,00)	98,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.971.279.600,00	2.928.857.054,00	(42.422.546,00)	98,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.856.283.970,00	2.813.861.454,00	(42.422.516,00)	98,51	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.856.283.970,00	2.813.861.454,00	(42.422.516,00)	98,51	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.856.283.970,00	2.813.861.454,00	(42.422.516,00)	98,51	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	114.995.630,00	114.995.600,00	(30,00)	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	114.995.630,00	114.995.600,00	(30,00)	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.995.630,00	114.995.600,00	(30,00)	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	51.960.000,00	51.600.000,00	(360.000,00)	99,31	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	51.960.000,00	51.600.000,00	(360.000,00)	99,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.960.000,00	51.600.000,00	(360.000,00)	99,31	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.960.000,00	51.600.000,00	(360.000,00)	99,31	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	322.864.135,00	322.331.042,00	(533.093,00)	99,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	48.193.135,00	48.139.649,00	(53.486,00)	99,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.193.135,00	18.164.650,00	(28.485,00)	99,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.193.135,00	18.164.650,00	(28.485,00)	99,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	29.974.999,00	(25.001,00)	99,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.974.999,00	(25.001,00)	99,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	47.270.000,00	47.270.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	47.270.000,00	47.270.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.270.000,00	47.270.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	12.458.000,00	12.450.000,00	(8.000,00)	99,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.458.000,00	12.450.000,00	(8.000,00)	99,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.458.000,00	12.450.000,00	(8.000,00)	99,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	207.383.000,00	206.911.393,00	(471.607,00)	99,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	207.383.000,00	206.911.393,00	(471.607,00)	99,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.383.000,00	206.911.393,00	(471.607,00)	99,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.891.789.465,00	1.880.303.220,00	(11.486.245,00)	99,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.572.000.000,00	1.571.989.120,00	(10.880,00)	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.572.000.000,00	1.571.989.120,00	(10.880,00)	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.572.000.000,00	1.571.989.120,00	(10.880,00)	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.140.000,00	7.050.000,00	(90.000,00)	98,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.140.000,00	7.050.000,00	(90.000,00)	98,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	7.050.000,00	(90.000,00)	98,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	312.649.465,00	301.264.100,00	(11.385.365,00)	96,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	312.649.465,00	301.264.100,00	(11.385.365,00)	96,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.649.465,00	301.264.100,00	(11.385.365,00)	96,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	75.590.000,00	75.564.749,00	(25.251,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	75.590.000,00	75.564.749,00	(25.251,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.590.000,00	75.564.749,00	(25.251,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.590.000,00	75.564.749,00	(25.251,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.113.328.918,00	1.107.610.985,00	(5.717.933,00)	99,49	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.113.328.918,00	1.107.610.985,00	(5.717.933,00)	99,49	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0014		RELASI MEDIA	530.369.906,00	527.386.000,00	(2.983.906,00)	99,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	496.292.006,00	495.085.000,00	(1.207.006,00)	99,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.292.006,00	495.085.000,00	(1.207.006,00)	99,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	34.077.900,00	32.301.000,00	(1.776.900,00)	94,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.077.900,00	32.301.000,00	(1.776.900,00)	94,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0017		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	305.864.400,00	303.582.285,00	(2.282.115,00)	99,25	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	294.531.067,00	292.260.285,00	(2.270.782,00)	99,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.531.067,00	292.260.285,00	(2.270.782,00)	99,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	11.333.333,00	11.322.000,00	(11.333,00)	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.333.333,00	11.322.000,00	(11.333,00)	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0021		PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	12.500.000,00	12.406.000,00	(94.000,00)	99,25	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	7.387.800,00	7.300.000,00	(87.800,00)	98,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.387.800,00	7.300.000,00	(87.800,00)	98,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	5.112.200,00	5.106.000,00	(6.200,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.112.200,00	5.106.000,00	(6.200,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0022		PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK	201.728.052,00	201.418.200,00	(309.852,00)	99,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	176.728.052,00	176.720.700,00	(7.352,00)	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.728.052,00	176.720.700,00	(7.352,00)	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.697.500,00	(302.500,00)	98,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.697.500,00	(302.500,00)	98,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0023		PENYUSUNAN KONTEN	51.642.560,00	51.594.500,00	(48.060,00)	99,91	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	51.642.560,00	51.594.500,00	(48.060,00)	99,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.642.560,00	51.594.500,00	(48.060,00)	99,91	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0024		PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI PUBLIK	11.224.000,00	11.224.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	11.224.000,00	11.224.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.224.000,00	11.224.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.811.937.555,00	1.769.165.815,00	(42.771.740,00)	97,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.811.937.555,00	1.769.165.815,00	(42.771.740,00)	97,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0015		FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA	199.355.645,00	195.243.446,00	(4.112.199,00)	97,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	60.675.781,00	60.659.199,00	(16.582,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.675.781,00	60.659.199,00	(16.582,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	138.679.864,00	134.584.247,00	(4.095.617,00)	97,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.679.864,00	134.584.247,00	(4.095.617,00)	97,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0020		PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS YANG SESUAI DENGAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH	728.723.754,00	695.118.623,00	(33.605.131,00)	95,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	502.461.654,00	469.512.925,00	(32.948.729,00)	93,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.461.654,00	469.512.925,00	(32.948.729,00)	93,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0020	5.2	BELANJA MODAL	226.262.100,00	225.605.698,00	(656.402,00)	99,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	226.262.100,00	225.605.698,00	(656.402,00)	99,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0021		PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	84.597.712,00	84.597.600,00	(112,00)	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	84.597.712,00	84.597.600,00	(112,00)	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.597.712,00	84.597.600,00	(112,00)	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0023		KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN ATAU KOTA CERDAS	490.000.000,00	487.843.661,00	(2.156.339,00)	99,56	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0023	5.1	BELANJA OPERASI	325.974.000,00	324.007.673,00	(1.966.327,00)	99,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.974.000,00	324.007.673,00	(1.966.327,00)	99,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0023	5.2	BELANJA MODAL	164.026.000,00	163.835.988,00	(190.012,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.026.000,00	163.835.988,00	(190.012,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0024		PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	309.260.444,00	306.362.485,00	(2.897.959,00)	99,06	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	129.925.944,00	128.800.985,00	(1.124.959,00)	99,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.925.944,00	128.800.985,00	(1.124.959,00)	99,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	179.334.500,00	177.561.500,00	(1.773.000,00)	99,01	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0024	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.334.500,00	177.561.500,00	(1.773.000,00)	99,01	
				JUMLAH BELANJA	8.238.749.673,00	8.135.432.865,00	(103.316.808,00)	98,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.238.749.673,00)	(8.135.432.865,00)	103.316.808,00	98,75	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.238.749.673,00)	(8.135.432.865,00)	103.316.808,00	98,75	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000		5	BELANJA DAERAH	378.077.598,00	373.630.040,00	(4.447.558,00)	98,82	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	378.077.598,00	373.630.040,00	(4.447.558,00)	98,82	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	378.077.598,00	373.630.040,00	(4.447.558,00)	98,82	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0009		PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	180.056.340,00	178.807.900,00	(1.248.440,00)	99,31	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	180.056.340,00	178.807.900,00	(1.248.440,00)	99,31	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.056.340,00	178.807.900,00	(1.248.440,00)	99,31	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0010		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	198.021.258,00	194.822.140,00	(3.199.118,00)	98,38	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	143.690.058,00	142.192.600,00	(1.497.458,00)	98,96	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.690.058,00	142.192.600,00	(1.497.458,00)	98,96	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	54.331.200,00	52.629.540,00	(1.701.660,00)	96,87	
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.331.200,00	52.629.540,00	(1.701.660,00)	96,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	378.077.598,00	373.630.040,00	(4.447.558,00)	98,82	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(378.077.598,00)	(373.630.040,00)	4.447.558,00	98,82	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(378.077.598,00)	(373.630.040,00)	4.447.558,00	98,82	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000		5	BELANJA DAERAH	56.552.000,00	54.443.900,00	(2.108.100,00)	96,27	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	56.552.000,00	54.443.900,00	(2.108.100,00)	96,27	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.552.000,00	54.443.900,00	(2.108.100,00)	96,27	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	56.552.000,00	54.443.900,00	(2.108.100,00)	96,27	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.399.300,00	30.301.400,00	(2.097.900,00)	93,52	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.399.300,00	30.301.400,00	(2.097.900,00)	93,52	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	24.152.700,00	24.142.500,00	(10.200,00)	99,96	
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.152.700,00	24.142.500,00	(10.200,00)	99,96	
				JUMLAH BELANJA	56.552.000,00	54.443.900,00	(2.108.100,00)	96,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(56.552.000,00)	(54.443.900,00)	2.108.100,00	96,27	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(56.552.000,00)	(54.443.900,00)	2.108.100,00	96,27	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.0.00.0.00.17.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000		5	BELANJA DAERAH	5.117.978.250,00	4.876.173.354,00	(241.804.896,00)	95,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.285.415.925,00	4.100.943.704,00	(184.472.221,00)	95,70	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.169.113.089,00	3.013.928.162,00	(155.184.927,00)	95,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.075.993.089,00	2.939.528.162,00	(136.464.927,00)	95,56	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.075.993.089,00	2.939.528.162,00	(136.464.927,00)	95,56	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.075.993.089,00	2.939.528.162,00	(136.464.927,00)	95,56	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	93.120.000,00	74.400.000,00	(18.720.000,00)	79,90	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	93.120.000,00	74.400.000,00	(18.720.000,00)	79,90	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.120.000,00	74.400.000,00	(18.720.000,00)	79,90	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	33.062.400,00	30.840.000,00	(2.222.400,00)	93,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	33.062.400,00	30.840.000,00	(2.222.400,00)	93,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.062.400,00	30.840.000,00	(2.222.400,00)	93,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.062.400,00	30.840.000,00	(2.222.400,00)	93,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	318.835.255,00	310.831.762,00	(8.003.493,00)	97,49	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.165.635,00	3.164.000,00	(1.635,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.165.635,00	3.164.000,00	(1.635,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.165.635,00	3.164.000,00	(1.635,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	51.988.047,00	49.669.362,00	(2.318.685,00)	95,54	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.988.047,00	49.669.362,00	(2.318.685,00)	95,54	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.988.047,00	49.669.362,00	(2.318.685,00)	95,54	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.845.788,00	20.814.246,00	(31.542,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.845.788,00	20.814.246,00	(31.542,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.845.788,00	20.814.246,00	(31.542,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	42.796.785,00	37.275.639,00	(5.521.146,00)	87,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.796.785,00	37.275.639,00	(5.521.146,00)	87,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.796.785,00	37.275.639,00	(5.521.146,00)	87,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	200.039.000,00	199.908.515,00	(130.485,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	200.039.000,00	199.908.515,00	(130.485,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.039.000,00	199.908.515,00	(130.485,00)	99,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	271.815.181,00	269.752.200,00	(2.062.981,00)	99,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	13.200.000,00	12.987.000,00	(213.000,00)	98,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	13.200.000,00	12.987.000,00	(213.000,00)	98,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.200.000,00	12.987.000,00	(213.000,00)	98,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	258.615.181,00	256.765.200,00	(1.849.981,00)	99,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.790.513,00	11.766.000,00	(24.513,00)	99,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.790.513,00	11.766.000,00	(24.513,00)	99,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	246.824.668,00	244.999.200,00	(1.825.468,00)	99,26	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246.824.668,00	244.999.200,00	(1.825.468,00)	99,26	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	454.170.000,00	437.171.580,00	(16.998.420,00)	96,26	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.160.000,00	29.056.580,00	(1.103.420,00)	96,34	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.160.000,00	29.056.580,00	(1.103.420,00)	96,34	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.160.000,00	29.056.580,00	(1.103.420,00)	96,34	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.810.000,00	14.800.000,00	(10.000,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.810.000,00	14.800.000,00	(10.000,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.810.000,00	14.800.000,00	(10.000,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	409.200.000,00	393.315.000,00	(15.885.000,00)	96,12	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	409.200.000,00	393.315.000,00	(15.885.000,00)	96,12	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.200.000,00	393.315.000,00	(15.885.000,00)	96,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	122.934.000,00	118.356.400,00	(4.577.600,00)	96,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.02.2.02		PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	122.934.000,00	118.356.400,00	(4.577.600,00)	96,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.02.2.02.0004		PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	122.934.000,00	118.356.400,00	(4.577.600,00)	96,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	122.934.000,00	118.356.400,00	(4.577.600,00)	96,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.934.000,00	118.356.400,00	(4.577.600,00)	96,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	219.840.000,00	188.551.200,00	(31.288.800,00)	85,77	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.03.2.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	219.840.000,00	188.551.200,00	(31.288.800,00)	85,77	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.03.2.01.0002		PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	169.716.000,00	152.391.776,00	(17.324.224,00)	89,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	169.716.000,00	152.391.776,00	(17.324.224,00)	89,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.716.000,00	152.391.776,00	(17.324.224,00)	89,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.03.2.01.0003		PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	50.124.000,00	36.159.424,00	(13.964.576,00)	72,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.124.000,00	36.159.424,00	(13.964.576,00)	72,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.124.000,00	36.159.424,00	(13.964.576,00)	72,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	217.269.000,00	211.664.600,00	(5.604.400,00)	97,42	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	217.269.000,00	211.664.600,00	(5.604.400,00)	97,42	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH	8.749.000,00	3.144.600,00	(5.604.400,00)	35,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.749.000,00	3.144.600,00	(5.604.400,00)	35,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.749.000,00	3.144.600,00	(5.604.400,00)	35,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0007		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	32.012.000,00	32.012.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	32.012.000,00	32.012.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.012.000,00	32.012.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0008		PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	62.508.000,00	62.508.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	62.508.000,00	62.508.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.508.000,00	62.508.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	152.519.325,00	144.619.900,00	(7.899.425,00)	94,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.519.325,00	144.619.900,00	(7.899.425,00)	94,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01.0004		PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	19.081.000,00	17.050.000,00	(2.031.000,00)	89,36	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.081.000,00	17.050.000,00	(2.031.000,00)	89,36	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.081.000,00	17.050.000,00	(2.031.000,00)	89,36	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01.0005		BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	77.053.100,00	74.399.000,00	(2.654.100,00)	96,56	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	77.053.100,00	74.399.000,00	(2.654.100,00)	96,56	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.053.100,00	74.399.000,00	(2.654.100,00)	96,56	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01.0006		PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	56.385.225,00	53.170.900,00	(3.214.325,00)	94,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	56.385.225,00	53.170.900,00	(3.214.325,00)	94,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.385.225,00	53.170.900,00	(3.214.325,00)	94,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	120.000.000,00	112.037.550,00	(7.962.450,00)	93,36	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.06.2.01		PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.000.000,00	112.037.550,00	(7.962.450,00)	93,36	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.06.2.01.0002		PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	120.000.000,00	112.037.550,00	(7.962.450,00)	93,36	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	112.037.550,00	(7.962.450,00)	93,36	
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	112.037.550,00	(7.962.450,00)	93,36	
				JUMLAH BELANJA	5.117.978.250,00	4.876.173.354,00	(241.804.896,00)	95,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.117.978.250,00)	(4.876.173.354,00)	241.804.896,00	95,28	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.117.978.250,00)	(4.876.173.354,00)	241.804.896,00	95,28	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Serta Pariwisata

2.22.2.19.3.26.18.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.22.2.19.3.26.18.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.715.000.000,00	3.286.141.960,00	(428.858.040,00)	88,46	
	2.22.2.19.3.26.18.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.715.000.000,00	3.286.141.960,00	(428.858.040,00)	88,46	
	2.22.2.19.3.26.18.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.715.000.000,00	3.286.141.960,00	(428.858.040,00)	88,46	
				JUMLAH PENDAPATAN	3.715.000.000,00	3.286.141.960,00	(428.858.040,00)	88,46	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000		5	BELANJA DAERAH	1.892.003.212,00	1.434.182.891,00	(457.820.321,00)	75,80	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	815.730.673,00	605.230.126,00	(210.500.547,00)	74,19	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.02.2.01		PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	815.730.673,00	605.230.126,00	(210.500.547,00)	74,19	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.02.2.01.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	815.730.673,00	605.230.126,00	(210.500.547,00)	74,19	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	815.730.673,00	605.230.126,00	(210.500.547,00)	74,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	815.730.673,00	605.230.126,00	(210.500.547,00)	74,19	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	629.977.194,00	406.820.540,00	(223.156.654,00)	64,58	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.03.2.01		PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	629.977.194,00	406.820.540,00	(223.156.654,00)	64,58	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.03.2.01.0001		PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL	629.977.194,00	406.820.540,00	(223.156.654,00)	64,58	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	629.977.194,00	406.820.540,00	(223.156.654,00)	64,58	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.977.194,00	406.820.540,00	(223.156.654,00)	64,58	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	446.295.345,00	422.132.225,00	(24.163.120,00)	94,59	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.01		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	143.031.000,00	129.112.940,00	(13.918.060,00)	90,27	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.01.0002		PENETAPAN CAGAR BUDAYA	143.031.000,00	129.112.940,00	(13.918.060,00)	90,27	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	143.031.000,00	129.112.940,00	(13.918.060,00)	90,27	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.031.000,00	129.112.940,00	(13.918.060,00)	90,27	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.02		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	303.264.345,00	293.019.285,00	(10.245.060,00)	96,62	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.02.0001		PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	303.264.345,00	293.019.285,00	(10.245.060,00)	96,62	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	138.292.385,00	129.372.225,00	(8.920.160,00)	93,55	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.292.385,00	129.372.225,00	(8.920.160,00)	93,55	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	164.971.960,00	163.647.060,00	(1.324.900,00)	99,20	
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.971.960,00	163.647.060,00	(1.324.900,00)	99,20	
				JUMLAH BELANJA	1.892.003.212,00	1.434.182.891,00	(457.820.321,00)	75,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.822.996.788,00	1.851.959.069,00	28.962.281,00	101,59	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.822.996.788,00	1.851.959.069,00	28.962.281,00	101,59	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000		5	BELANJA DAERAH	2.936.763.001,00	2.397.025.318,00	(539.737.683,00)	81,62	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	515.550.190,00	265.675.500,00	(249.874.690,00)	51,53	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	515.550.190,00	265.675.500,00	(249.874.690,00)	51,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01.0011		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA BAGI WIRAUSAHA PEMULA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	122.100.000,00	5.250.000,00	(116.850.000,00)	4,30	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	122.100.000,00	5.250.000,00	(116.850.000,00)	4,30	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.100.000,00	5.250.000,00	(116.850.000,00)	4,30	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01.0014		PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMENUHAN HAK PEMUDA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	329.743.340,00	226.650.200,00	(103.093.140,00)	68,74	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	329.743.340,00	226.650.200,00	(103.093.140,00)	68,74	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.743.340,00	226.650.200,00	(103.093.140,00)	68,74	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01.0015		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN/KOTA	63.706.850,00	33.775.300,00	(29.931.550,00)	53,02	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	63.706.850,00	33.775.300,00	(29.931.550,00)	53,02	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.706.850,00	33.775.300,00	(29.931.550,00)	53,02	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.005.233.652,00	1.726.067.477,00	(279.166.175,00)	86,08	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	250.000.000,00	249.665.932,00	(334.068,00)	99,87	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	250.000.000,00	249.665.932,00	(334.068,00)	99,87	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.665.932,00	(334.068,00)	99,87	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	249.665.932,00	(334.068,00)	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	688.477.329,00	623.129.380,00	(65.347.949,00)	90,51	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.02.0004		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	688.477.329,00	623.129.380,00	(65.347.949,00)	90,51	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	688.477.329,00	623.129.380,00	(65.347.949,00)	90,51	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	688.477.329,00	623.129.380,00	(65.347.949,00)	90,51	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	1.006.731.330,00	799.014.165,00	(207.717.165,00)	79,37	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.03.0007		PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI YANG BERPRESTASI DAN/ATAU BERJASA DALAM MEMAJUKAN OLAHRAGA	398.395.185,00	392.314.265,00	(6.080.920,00)	98,47	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	398.395.185,00	392.314.265,00	(6.080.920,00)	98,47	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.395.185,00	392.314.265,00	(6.080.920,00)	98,47	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.03.0009		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA	608.336.145,00	406.699.900,00	(201.636.245,00)	66,85	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	608.336.145,00	406.699.900,00	(201.636.245,00)	66,85	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.336.145,00	406.699.900,00	(201.636.245,00)	66,85	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.05		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	60.024.993,00	54.258.000,00	(5.766.993,00)	90,39	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.05.0010		PEMASSALAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI YANG BERJENJANG DAN BERKELANJUTAN PADA TINGKAT DAERAH, NASIONAL, DAN INTERNASIONAL	60.024.993,00	54.258.000,00	(5.766.993,00)	90,39	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	60.024.993,00	54.258.000,00	(5.766.993,00)	90,39	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.024.993,00	54.258.000,00	(5.766.993,00)	90,39	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	370.229.159,00	359.532.341,00	(10.696.818,00)	97,11	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	370.229.159,00	359.532.341,00	(10.696.818,00)	97,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	32.509.000,00	32.059.000,00	(450.000,00)	98,62	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.509.000,00	32.059.000,00	(450.000,00)	98,62	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.509.000,00	32.059.000,00	(450.000,00)	98,62	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01.0005		PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	69.538.341,00	68.438.341,00	(1.100.000,00)	98,42	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	69.538.341,00	68.438.341,00	(1.100.000,00)	98,42	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.538.341,00	68.438.341,00	(1.100.000,00)	98,42	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	268.181.818,00	259.035.000,00	(9.146.818,00)	96,59	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	268.181.818,00	259.035.000,00	(9.146.818,00)	96,59	
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.181.818,00	259.035.000,00	(9.146.818,00)	96,59	
				JUMLAH BELANJA	2.936.763.001,00	2.397.025.318,00	(539.737.683,00)	81,62	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.936.763.001,00)	(2.397.025.318,00)	539.737.683,00	81,62	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.936.763.001,00)	(2.397.025.318,00)	539.737.683,00	81,62	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000		5	BELANJA DAERAH	17.152.463.144,00	15.794.009.333,00	(1.358.453.811,00)	92,08	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.334.290.676,00	6.910.451.472,00	(423.839.204,00)	94,22	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.421.837.187,00	5.128.985.005,00	(292.852.182,00)	94,60	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.227.797.187,00	4.934.945.005,00	(292.852.182,00)	94,40	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.227.797.187,00	4.934.945.005,00	(292.852.182,00)	94,40	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.227.797.187,00	4.934.945.005,00	(292.852.182,00)	94,40	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	194.040.000,00	194.040.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	194.040.000,00	194.040.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.040.000,00	194.040.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	334.893.719,00	310.154.405,00	(24.739.314,00)	92,61	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.904.100,00	10.903.428,00	(672,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.904.100,00	10.903.428,00	(672,00)	99,99	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.904.100,00	10.903.428,00	(672,00)	99,99	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	115.190.000,00	114.750.880,00	(439.120,00)	99,62	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.956.300,00	52.780.880,00	(175.420,00)	99,67	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.956.300,00	52.780.880,00	(175.420,00)	99,67	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	62.233.700,00	61.970.000,00	(263.700,00)	99,58	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.233.700,00	61.970.000,00	(263.700,00)	99,58	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.361.330,00	23.615.966,00	(1.745.364,00)	93,12	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.361.330,00	23.615.966,00	(1.745.364,00)	93,12	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.361.330,00	23.615.966,00	(1.745.364,00)	93,12	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.648.000,00	22.634.130,00	(13.870,00)	99,94	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.648.000,00	22.634.130,00	(13.870,00)	99,94	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.648.000,00	22.634.130,00	(13.870,00)	99,94	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.988.000,00	4.968.000,00	(20.000,00)	99,60	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.988.000,00	4.968.000,00	(20.000,00)	99,60	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.988.000,00	4.968.000,00	(20.000,00)	99,60	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	155.802.289,00	133.282.001,00	(22.520.288,00)	85,55	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	155.802.289,00	133.282.001,00	(22.520.288,00)	85,55	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.802.289,00	133.282.001,00	(22.520.288,00)	85,55	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	191.083.232,00	177.754.478,00	(13.328.754,00)	93,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	61.856.132,00	61.378.000,00	(478.132,00)	99,23	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	112.662,00	0,00	(112.662,00)	0,00	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.662,00	0,00	(112.662,00)	0,00	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	61.743.470,00	61.378.000,00	(365.470,00)	99,41	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.743.470,00	61.378.000,00	(365.470,00)	99,41	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	72.774.600,00	72.070.558,00	(704.042,00)	99,03	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.442.250,00	15.345.558,00	(96.692,00)	99,37	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.442.250,00	15.345.558,00	(96.692,00)	99,37	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	57.332.350,00	56.725.000,00	(607.350,00)	98,94	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.332.350,00	56.725.000,00	(607.350,00)	98,94	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	56.452.500,00	44.305.920,00	(12.146.580,00)	78,48	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	12.146.580,00	0,00	(12.146.580,00)	0,00	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.146.580,00	0,00	(12.146.580,00)	0,00	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	44.305.920,00	44.305.920,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.305.920,00	44.305.920,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.093.910.000,00	1.016.691.221,00	(77.218.779,00)	92,94	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	82.920.000,00	48.991.221,00	(33.928.779,00)	59,08	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.920.000,00	48.991.221,00	(33.928.779,00)	59,08	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.920.000,00	48.991.221,00	(33.928.779,00)	59,08	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	24.950.000,00	24.875.000,00	(75.000,00)	99,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.950.000,00	24.875.000,00	(75.000,00)	99,70	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.950.000,00	24.875.000,00	(75.000,00)	99,70	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	986.040.000,00	942.825.000,00	(43.215.000,00)	95,62	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	986.040.000,00	942.825.000,00	(43.215.000,00)	95,62	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	986.040.000,00	942.825.000,00	(43.215.000,00)	95,62	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	292.566.538,00	276.866.363,00	(15.700.175,00)	94,63	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	242.565.200,00	235.624.363,00	(6.940.837,00)	97,14	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	242.565.200,00	235.624.363,00	(6.940.837,00)	97,14	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.565.200,00	235.624.363,00	(6.940.837,00)	97,14	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	50.001.338,00	41.242.000,00	(8.759.338,00)	82,48	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	50.001.338,00	41.242.000,00	(8.759.338,00)	82,48	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.001.338,00	41.242.000,00	(8.759.338,00)	82,48	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.152.605.416,00	4.637.357.479,00	(515.247.937,00)	90,00	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	5.152.605.416,00	4.637.357.479,00	(515.247.937,00)	90,00	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0003		PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	500.000.000,00	497.335.500,00	(2.664.500,00)	99,47	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	497.335.500,00	(2.664.500,00)	99,47	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	497.335.500,00	(2.664.500,00)	99,47	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0004		PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	4.496.605.416,00	4.023.621.264,00	(472.984.152,00)	89,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.428.293.500,00	976.506.950,00	(451.786.550,00)	68,37	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.428.293.500,00	976.506.950,00	(451.786.550,00)	68,37	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	3.068.311.916,00	3.047.114.314,00	(21.197.602,00)	99,31	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.699.624.000,00	2.679.114.314,00	(20.509.686,00)	99,24	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	368.687.916,00	368.000.000,00	(687.916,00)	99,81	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0006		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	156.000.000,00	116.400.715,00	(39.599.285,00)	74,62	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	156.000.000,00	116.400.715,00	(39.599.285,00)	74,62	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	116.400.715,00	(39.599.285,00)	74,62	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.231.004.028,00	2.924.874.032,00	(306.129.996,00)	90,53	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	3.231.004.028,00	2.924.874.032,00	(306.129.996,00)	90,53	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0003		PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	205.264.144,00	205.000.000,00	(264.144,00)	99,87	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	45.264.144,00	45.000.000,00	(264.144,00)	99,42	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.264.144,00	45.000.000,00	(264.144,00)	99,42	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0006		FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	2.688.339.884,00	2.387.474.032,00	(300.865.852,00)	88,81	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.688.339.884,00	2.387.474.032,00	(300.865.852,00)	88,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.688.339.884,00	2.387.474.032,00	(300.865.852,00)	88,81	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0007		PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	337.400.000,00	332.400.000,00	(5.000.000,00)	98,52	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	337.400.000,00	332.400.000,00	(5.000.000,00)	98,52	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.400.000,00	332.400.000,00	(5.000.000,00)	98,52	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.434.563.024,00	1.321.326.350,00	(113.236.674,00)	92,11	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	1.385.010.524,00	1.272.068.400,00	(112.942.124,00)	91,85	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0006		FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	350.185.999,00	320.121.700,00	(30.064.299,00)	91,41	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	350.185.999,00	320.121.700,00	(30.064.299,00)	91,41	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.185.999,00	320.121.700,00	(30.064.299,00)	91,41	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0009		PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA	957.956.419,00	876.076.300,00	(81.880.119,00)	91,45	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	907.956.419,00	826.156.300,00	(81.800.119,00)	90,99	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	907.956.419,00	826.156.300,00	(81.800.119,00)	90,99	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.920.000,00	(80.000,00)	99,84	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.920.000,00	(80.000,00)	99,84	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0010		FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA	76.868.106,00	75.870.400,00	(997.706,00)	98,70	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	76.868.106,00	75.870.400,00	(997.706,00)	98,70	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.868.106,00	75.870.400,00	(997.706,00)	98,70	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.02		PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF	49.552.500,00	49.257.950,00	(294.550,00)	99,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.02.0001		PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF	49.552.500,00	49.257.950,00	(294.550,00)	99,41	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.552.500,00	49.257.950,00	(294.550,00)	99,41	
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.552.500,00	49.257.950,00	(294.550,00)	99,41	
				JUMLAH BELANJA	17.152.463.144,00	15.794.009.333,00	(1.358.453.811,00)	92,08	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(17.152.463.144,00)	(15.794.009.333,00)	1.358.453.811,00	92,08	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.152.463.144,00)	(15.794.009.333,00)	1.358.453.811,00	92,08	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Perpustakaan dan Arsip

2.23.2.24.0.00.19.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
ORGANISASI : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000		5	BELANJA DAERAH	15.263.075.358,00	15.049.007.071,00	(214.068.287,00)	98,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.579.100.498,00	4.428.071.662,00	(151.028.836,00)	96,70	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.010.887.121,00	3.878.966.081,00	(131.921.040,00)	96,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.907.187.121,00	3.798.846.081,00	(108.341.040,00)	97,23	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.907.187.121,00	3.798.846.081,00	(108.341.040,00)	97,23	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.907.187.121,00	3.798.846.081,00	(108.341.040,00)	97,23	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	103.700.000,00	80.120.000,00	(23.580.000,00)	77,26	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	103.700.000,00	80.120.000,00	(23.580.000,00)	77,26	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.700.000,00	80.120.000,00	(23.580.000,00)	77,26	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	112.681.263,00	111.936.854,00	(744.409,00)	99,34	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	909.000,00	909.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	909.000,00	909.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.000,00	909.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	52.347.683,00	52.295.540,00	(52.143,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.347.683,00	52.295.540,00	(52.143,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.347.683,00	52.295.540,00	(52.143,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.924.350,00	6.650.600,00	(273.750,00)	96,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.924.350,00	6.650.600,00	(273.750,00)	96,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.924.350,00	6.650.600,00	(273.750,00)	96,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.966.000,00	3.956.000,00	(10.000,00)	99,75	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.966.000,00	3.956.000,00	(10.000,00)	99,75	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.966.000,00	3.956.000,00	(10.000,00)	99,75	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	48.534.230,00	48.125.714,00	(408.516,00)	99,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	48.534.230,00	48.125.714,00	(408.516,00)	99,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.534.230,00	48.125.714,00	(408.516,00)	99,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	310.731.075,00	298.427.542,00	(12.303.533,00)	96,04	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	44.900.000,00	40.237.542,00	(4.662.458,00)	89,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.900.000,00	40.237.542,00	(4.662.458,00)	89,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.900.000,00	40.237.542,00	(4.662.458,00)	89,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.551.075,00	14.500.000,00	(51.075,00)	99,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.551.075,00	14.500.000,00	(51.075,00)	99,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.551.075,00	14.500.000,00	(51.075,00)	99,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	251.280.000,00	243.690.000,00	(7.590.000,00)	96,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	251.280.000,00	243.690.000,00	(7.590.000,00)	96,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.280.000,00	243.690.000,00	(7.590.000,00)	96,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	144.801.039,00	138.741.185,00	(6.059.854,00)	95,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	144.801.039,00	138.741.185,00	(6.059.854,00)	95,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	144.801.039,00	138.741.185,00	(6.059.854,00)	95,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.801.039,00	138.741.185,00	(6.059.854,00)	95,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.683.974.860,00	10.620.935.409,00	(63.039.451,00)	99,41	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.074.130,00	425.720.300,00	(353.830,00)	99,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0011		PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.320.000,00	55.164.705,00	(155.295,00)	99,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	55.320.000,00	55.164.705,00	(155.295,00)	99,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.320.000,00	55.164.705,00	(155.295,00)	99,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0012		PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	174.849.130,00	174.682.930,00	(166.200,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	83.053.430,00	83.052.930,00	(500,00)	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.053.430,00	83.052.930,00	(500,00)	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	91.795.700,00	91.630.000,00	(165.700,00)	99,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.945.700,00	49.780.000,00	(165.700,00)	99,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0012	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41.850.000,00	41.850.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0016		PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.005.000,00	35.987.000,00	(18.000,00)	99,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	36.005.000,00	35.987.000,00	(18.000,00)	99,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.005.000,00	35.987.000,00	(18.000,00)	99,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0018		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN	159.900.000,00	159.885.665,00	(14.335,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	10.400.000,00	10.385.665,00	(14.335,00)	99,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.385.665,00	(14.335,00)	99,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	149.500.000,00	149.500.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0018	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	149.500.000,00	149.500.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.257.900.730,00	10.195.215.109,00	(62.685.621,00)	99,39	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.02.0008		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.241.730.730,00	10.179.537.109,00	(62.193.621,00)	99,39	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	236.822.730,00	217.340.200,00	(19.482.530,00)	91,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.822.730,00	217.340.200,00	(19.482.530,00)	91,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	10.004.908.000,00	9.962.196.909,00	(42.711.091,00)	99,57	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.02.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.908.000,00	4.908.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.02.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000.000,00	9.957.288.909,00	(42.711.091,00)	99,57	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.02.0009		PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	16.170.000,00	15.678.000,00	(492.000,00)	96,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	16.170.000,00	15.678.000,00	(492.000,00)	96,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.170.000,00	15.678.000,00	(492.000,00)	96,96	
				JUMLAH BELANJA	15.263.075.358,00	15.049.007.071,00	(214.068.287,00)	98,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.263.075.358,00)	(15.049.007.071,00)	214.068.287,00	98,60	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.263.075.358,00)	(15.049.007.071,00)	214.068.287,00	98,60	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
ORGANISASI : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000		5	BELANJA DAERAH	106.399.265,00	103.093.555,00	(3.305.710,00)	96,89	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	106.399.265,00	103.093.555,00	(3.305.710,00)	96,89	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.565.765,00	40.376.945,00	(188.820,00)	99,53	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.01.0001		PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	23.316.220,00	23.127.400,00	(188.820,00)	99,19	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.316.220,00	23.127.400,00	(188.820,00)	99,19	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.316.220,00	23.127.400,00	(188.820,00)	99,19	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.01.0003		PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	17.249.545,00	17.249.545,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.249.545,00	17.249.545,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.249.545,00	17.249.545,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.03		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	65.833.500,00	62.716.610,00	(3.116.890,00)	95,27	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.03.0001		PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN	47.857.730,00	47.057.610,00	(800.120,00)	98,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.857.730,00	47.057.610,00	(800.120,00)	98,33	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.857.730,00	47.057.610,00	(800.120,00)	98,33	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.03.0002		PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.975.770,00	15.659.000,00	(2.316.770,00)	87,11	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.975.770,00	15.659.000,00	(2.316.770,00)	87,11	
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.975.770,00	15.659.000,00	(2.316.770,00)	87,11	
				JUMLAH BELANJA	106.399.265,00	103.093.555,00	(3.305.710,00)	96,89	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(106.399.265,00)	(103.093.555,00)	3.305.710,00	96,89	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(106.399.265,00)	(103.093.555,00)	3.305.710,00	96,89	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Pertanian

3.27.0.00.0.00.20.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
ORGANISASI : DINAS PERTANIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.0.00.0.00.20.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	175.868.000,00	117.450.000,00	(58.418.000,00)	66,78	
	3.27.0.00.0.00.20.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.868.000,00	117.450.000,00	(58.418.000,00)	66,78	
	3.27.0.00.0.00.20.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	175.868.000,00	117.450.000,00	(58.418.000,00)	66,78	
				JUMLAH PENDAPATAN	175.868.000,00	117.450.000,00	(58.418.000,00)	66,78	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000		5	BELANJA DAERAH	28.360.101.702,00	26.578.355.341,50	(1.781.746.360,50)	93,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.913.489.745,00	16.666.483.219,00	(1.247.006.526,00)	93,04	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.215.682.157,00	14.288.087.975,00	(927.594.182,00)	93,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.025.962.157,00	14.104.737.975,00	(921.224.182,00)	93,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.025.962.157,00	14.104.737.975,00	(921.224.182,00)	93,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	15.025.962.157,00	14.104.737.975,00	(921.224.182,00)	93,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	189.720.000,00	183.350.000,00	(6.370.000,00)	96,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	189.720.000,00	183.350.000,00	(6.370.000,00)	96,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.720.000,00	183.350.000,00	(6.370.000,00)	96,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	137.250.000,00	132.495.194,00	(4.754.806,00)	96,54	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	137.250.000,00	132.495.194,00	(4.754.806,00)	96,54	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	137.250.000,00	132.495.194,00	(4.754.806,00)	96,54	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.250.000,00	132.495.194,00	(4.754.806,00)	96,54	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	608.108.607,00	491.418.864,00	(116.689.743,00)	80,81	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	22.684.780,00	22.614.500,00	(70.280,00)	99,69	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.684.780,00	22.614.500,00	(70.280,00)	99,69	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.684.780,00	22.614.500,00	(70.280,00)	99,69	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	362.199.636,00	254.454.589,00	(107.745.047,00)	70,25	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.546.336,00	41.684.550,00	(861.786,00)	97,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.546.336,00	41.684.550,00	(861.786,00)	97,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	319.653.300,00	212.770.039,00	(106.883.261,00)	66,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	319.653.300,00	212.770.039,00	(106.883.261,00)	66,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.382.247,00	8.838.000,00	(1.544.247,00)	85,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.382.247,00	8.838.000,00	(1.544.247,00)	85,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.382.247,00	8.838.000,00	(1.544.247,00)	85,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.766.992,00	25.754.150,00	(12.842,00)	99,95	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.766.992,00	25.754.150,00	(12.842,00)	99,95	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.766.992,00	25.754.150,00	(12.842,00)	99,95	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	187.074.952,00	179.757.625,00	(7.317.327,00)	96,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	187.074.952,00	179.757.625,00	(7.317.327,00)	96,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.074.952,00	179.757.625,00	(7.317.327,00)	96,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.771.158.861,00	1.610.766.709,00	(160.392.152,00)	90,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	117.058.861,00	103.976.709,00	(13.082.152,00)	88,82	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	117.058.861,00	103.976.709,00	(13.082.152,00)	88,82	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.058.861,00	103.976.709,00	(13.082.152,00)	88,82	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.654.100.000,00	1.506.790.000,00	(147.310.000,00)	91,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.654.100.000,00	1.506.790.000,00	(147.310.000,00)	91,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.654.100.000,00	1.506.790.000,00	(147.310.000,00)	91,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	181.290.120,00	143.714.477,00	(37.575.643,00)	79,27	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	96.290.120,00	58.818.728,00	(37.471.392,00)	61,08	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	96.290.120,00	58.818.728,00	(37.471.392,00)	61,08	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.290.120,00	58.818.728,00	(37.471.392,00)	61,08	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	75.000.000,00	74.995.749,00	(4.251,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.995.749,00	(4.251,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.995.749,00	(4.251,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.200.263.079,00	2.930.650.033,00	(269.613.046,00)	91,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	1.053.772.200,00	1.023.875.793,00	(29.896.407,00)	97,16	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	1.053.772.200,00	1.023.875.793,00	(29.896.407,00)	97,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.053.772.200,00	1.023.875.793,00	(29.896.407,00)	97,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.053.772.200,00	1.023.875.793,00	(29.896.407,00)	97,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.02		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	1.757.522.493,00	1.528.249.380,00	(229.273.113,00)	86,95	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.02.0002		PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	274.548.230,00	235.753.150,00	(38.795.080,00)	85,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	274.548.230,00	235.753.150,00	(38.795.080,00)	85,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.548.230,00	235.753.150,00	(38.795.080,00)	85,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.02.0003		PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN	1.482.974.263,00	1.292.496.230,00	(190.478.033,00)	87,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.482.974.263,00	1.292.496.230,00	(190.478.033,00)	87,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.482.974.263,00	1.292.496.230,00	(190.478.033,00)	87,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	388.968.386,00	378.524.860,00	(10.443.526,00)	97,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	388.968.386,00	378.524.860,00	(10.443.526,00)	97,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	388.968.386,00	378.524.860,00	(10.443.526,00)	97,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.968.386,00	378.524.860,00	(10.443.526,00)	97,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.012.093.423,00	4.931.497.777,50	(80.595.645,50)	98,39	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.01		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	154.560.000,00	114.814.900,00	(39.745.100,00)	74,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	154.560.000,00	114.814.900,00	(39.745.100,00)	74,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	154.560.000,00	114.814.900,00	(39.745.100,00)	74,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.560.000,00	114.814.900,00	(39.745.100,00)	74,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	4.667.867.623,00	4.628.247.259,50	(39.620.363,50)	99,15	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02.0003		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	4.272.285.374,00	4.243.305.145,50	(28.980.228,50)	99,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.272.285.374,00	4.243.305.145,50	(28.980.228,50)	99,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.272.285.374,00	4.243.305.145,50	(28.980.228,50)	99,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02.0009		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	200.000.000,00	190.561.152,00	(9.438.848,00)	95,28	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	190.561.152,00	(9.438.848,00)	95,28	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	190.561.152,00	(9.438.848,00)	95,28	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI	195.582.249,00	194.380.962,00	(1.201.287,00)	99,39	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	195.582.249,00	194.380.962,00	(1.201.287,00)	99,39	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.582.249,00	194.380.962,00	(1.201.287,00)	99,39	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.04		PENGEMBANGAN LAHAN PENGGEMBALAAN UMUM	189.665.800,00	188.435.618,00	(1.230.182,00)	99,35	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.04.0002		PENGELOLAAN LAHAN PENGGEMBALAAN UMUM	189.665.800,00	188.435.618,00	(1.230.182,00)	99,35	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	108.433.410,00	107.849.618,00	(583.792,00)	99,46	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.433.410,00	107.849.618,00	(583.792,00)	99,46	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	81.232.390,00	80.586.000,00	(646.390,00)	99,20	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.04.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.232.390,00	80.586.000,00	(646.390,00)	99,20	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	540.409.480,00	501.263.709,00	(39.145.771,00)	92,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.04.2.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	540.409.480,00	501.263.709,00	(39.145.771,00)	92,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.04.2.01.0008		PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	540.409.480,00	501.263.709,00	(39.145.771,00)	92,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	540.409.480,00	501.263.709,00	(39.145.771,00)	92,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	8.793.400,00	0,00	(8.793.400,00)	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.616.080,00	501.263.709,00	(30.352.371,00)	94,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	596.424.796,00	500.830.998,00	(95.593.798,00)	83,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.05.2.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	596.424.796,00	500.830.998,00	(95.593.798,00)	83,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.05.2.01.0001		PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	596.424.796,00	500.830.998,00	(95.593.798,00)	83,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	596.424.796,00	500.830.998,00	(95.593.798,00)	83,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.424.796,00	500.830.998,00	(95.593.798,00)	83,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.097.421.179,00	1.047.629.605,00	(49.791.574,00)	95,46	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	1.097.421.179,00	1.047.629.605,00	(49.791.574,00)	95,46	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	42.758.558,00	35.086.100,00	(7.672.458,00)	82,06	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.758.558,00	35.086.100,00	(7.672.458,00)	82,06	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.758.558,00	35.086.100,00	(7.672.458,00)	82,06	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0002		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	105.250.621,00	104.270.105,00	(980.516,00)	99,07	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.250.621,00	104.270.105,00	(980.516,00)	99,07	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.250.621,00	104.270.105,00	(980.516,00)	99,07	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0005		PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	500.000.000,00	485.841.400,00	(14.158.600,00)	97,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	399.008.600,00	384.892.400,00	(14.116.200,00)	96,46	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.008.600,00	384.892.400,00	(14.116.200,00)	96,46	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	100.991.400,00	100.949.000,00	(42.400,00)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.991.400,00	100.949.000,00	(42.400,00)	99,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0006		PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN	449.412.000,00	422.432.000,00	(26.980.000,00)	94,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	449.412.000,00	422.432.000,00	(26.980.000,00)	94,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.412.000,00	422.432.000,00	(26.980.000,00)	94,00	
				JUMLAH BELANJA	28.360.101.702,00	26.578.355.341,50	(1.781.746.360,50)	93,72	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(28.184.233.702,00)	(26.460.905.341,50)	1.723.328.360,50	93,89	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(28.184.233.702,00)	(26.460.905.341,50)	1.723.328.360,50	93,89	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3.31.3.30.3.29.21.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.31.3.30.3.29.21.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.839.329.000,00	2.583.529.100,00	(1.255.799.900,00)	67,29	
	3.31.3.30.3.29.21.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.839.329.000,00	2.583.529.100,00	(1.255.799.900,00)	67,29	
	3.31.3.30.3.29.21.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.839.329.000,00	2.583.529.100,00	(1.255.799.900,00)	67,29	
				JUMLAH PENDAPATAN	3.839.329.000,00	2.583.529.100,00	(1.255.799.900,00)	67,29	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000		5	BELANJA DAERAH	673.736.994,00	534.802.931,00	(138.934.063,00)	79,38	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	599.520.404,00	465.766.341,00	(133.754.063,00)	77,69	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	599.520.404,00	465.766.341,00	(133.754.063,00)	77,69	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0001		PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	49.333.600,00	27.688.069,00	(21.645.531,00)	56,12	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.333.600,00	27.688.069,00	(21.645.531,00)	56,12	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.333.600,00	27.688.069,00	(21.645.531,00)	56,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	235.023.930,00	216.114.915,00	(18.909.015,00)	91,95	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	139.669.915,00	121.325.915,00	(18.344.000,00)	86,87	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.669.915,00	121.325.915,00	(18.344.000,00)	86,87	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	95.354.015,00	94.789.000,00	(565.015,00)	99,41	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.839.000,00	(161.000,00)	99,68	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.354.015,00	44.950.000,00	(404.015,00)	99,11	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	315.162.874,00	221.963.357,00	(93.199.517,00)	70,43	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	315.162.874,00	221.963.357,00	(93.199.517,00)	70,43	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.162.874,00	221.963.357,00	(93.199.517,00)	70,43	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	74.216.590,00	69.036.590,00	(5.180.000,00)	93,02	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.04.2.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	74.216.590,00	69.036.590,00	(5.180.000,00)	93,02	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.04.2.01.0001		FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	74.216.590,00	69.036.590,00	(5.180.000,00)	93,02	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.216.590,00	69.036.590,00	(5.180.000,00)	93,02	
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.216.590,00	69.036.590,00	(5.180.000,00)	93,02	
				JUMLAH BELANJA	673.736.994,00	534.802.931,00	(138.934.063,00)	79,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.165.592.006,00	2.048.726.169,00	(1.116.865.837,00)	64,72	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	3.165.592.006,00	2.048.726.169,00	(1.116.865.837,00)	64,72	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000		5	BELANJA DAERAH	13.161.973.405,00	11.904.283.869,00	(1.257.689.536,00)	90,44	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.381.623.641,00	8.760.244.228,00	(621.379.413,00)	93,38	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.689.353.005,00	5.229.396.217,00	(459.956.788,00)	91,92	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.544.643.425,00	5.084.721.643,00	(459.921.782,00)	91,71	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.544.643.425,00	5.084.721.643,00	(459.921.782,00)	91,71	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.544.643.425,00	5.084.721.643,00	(459.921.782,00)	91,71	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	144.709.580,00	144.674.574,00	(35.006,00)	99,98	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	144.709.580,00	144.674.574,00	(35.006,00)	99,98	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.709.580,00	144.674.574,00	(35.006,00)	99,98	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100.500.000,00	89.250.000,00	(11.250.000,00)	88,81	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	100.500.000,00	89.250.000,00	(11.250.000,00)	88,81	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.500.000,00	89.250.000,00	(11.250.000,00)	88,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.500.000,00	89.250.000,00	(11.250.000,00)	88,81	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	310.098.626,00	310.035.772,00	(62.854,00)	99,98	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	74.553.626,00	74.501.160,00	(52.466,00)	99,93	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	74.553.626,00	74.501.160,00	(52.466,00)	99,93	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.553.626,00	74.501.160,00	(52.466,00)	99,93	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	16.000.000,00	15.996.070,00	(3.930,00)	99,98	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.996.070,00	(3.930,00)	99,98	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.996.070,00	(3.930,00)	99,98	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	72.800.000,00	72.799.650,00	(350,00)	100,00	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	72.800.000,00	72.799.650,00	(350,00)	100,00	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.800.000,00	72.799.650,00	(350,00)	100,00	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	146.745.000,00	146.738.892,00	(6.108,00)	100,00	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	146.745.000,00	146.738.892,00	(6.108,00)	100,00	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.745.000,00	146.738.892,00	(6.108,00)	100,00	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	210.000.000,00	209.301.600,00	(698.400,00)	99,67	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	110.000.000,00	109.845.600,00	(154.400,00)	99,86	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	110.000.000,00	109.845.600,00	(154.400,00)	99,86	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.000.000,00	109.845.600,00	(154.400,00)	99,86	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	100.000.000,00	99.456.000,00	(544.000,00)	99,46	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.456.000,00	(544.000,00)	99,46	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.456.000,00	(544.000,00)	99,46	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.379.728.010,00	1.262.207.971,00	(117.520.039,00)	91,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	85.984.000,00	40.568.996,00	(45.415.004,00)	47,18	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.984.000,00	40.568.996,00	(45.415.004,00)	47,18	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.984.000,00	40.568.996,00	(45.415.004,00)	47,18	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.293.744.010,00	1.221.638.975,00	(72.105.035,00)	94,43	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.293.744.010,00	1.221.638.975,00	(72.105.035,00)	94,43	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.293.744.010,00	1.221.638.975,00	(72.105.035,00)	94,43	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.691.944.000,00	1.660.052.668,00	(31.891.332,00)	98,12	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	86.000.000,00	85.811.395,00	(188.605,00)	99,78	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.000.000,00	85.811.395,00	(188.605,00)	99,78	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	85.811.395,00	(188.605,00)	99,78	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.944.000,00	5.944.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.944.000,00	5.944.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.944.000,00	5.944.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.600.000.000,00	1.568.297.273,00	(31.702.727,00)	98,02	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000.000,00	1.568.297.273,00	(31.702.727,00)	98,02	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000.000,00	1.568.297.273,00	(31.702.727,00)	98,02	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.405.832.306,00	2.816.736.155,00	(589.096.151,00)	82,70	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.300.000.000,00	2.723.988.455,00	(576.011.545,00)	82,55	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03.2.01.0002		FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.300.000.000,00	2.723.988.455,00	(576.011.545,00)	82,55	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000.000,00	2.723.988.455,00	(576.011.545,00)	82,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000.000,00	2.723.988.455,00	(576.011.545,00)	82,55	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03.2.02		PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	105.832.306,00	92.747.700,00	(13.084.606,00)	87,64	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03.2.02.0001		PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	105.832.306,00	92.747.700,00	(13.084.606,00)	87,64	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	105.832.306,00	92.747.700,00	(13.084.606,00)	87,64	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.832.306,00	92.747.700,00	(13.084.606,00)	87,64	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	261.806.844,00	245.768.276,00	(16.038.568,00)	93,87	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	261.806.844,00	245.768.276,00	(16.038.568,00)	93,87	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0002		PAMERAN DAGANG NASIONAL	103.543.333,00	101.465.270,00	(2.078.063,00)	97,99	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	103.543.333,00	101.465.270,00	(2.078.063,00)	97,99	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.543.333,00	101.465.270,00	(2.078.063,00)	97,99	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0003		PAMERAN DAGANG LOKAL	70.946.084,00	64.187.050,00	(6.759.034,00)	90,47	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.946.084,00	64.187.050,00	(6.759.034,00)	90,47	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.946.084,00	64.187.050,00	(6.759.034,00)	90,47	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0004		MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN	53.883.863,00	52.334.510,00	(1.549.353,00)	97,12	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	53.883.863,00	52.334.510,00	(1.549.353,00)	97,12	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.883.863,00	52.334.510,00	(1.549.353,00)	97,12	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0005		PENINGKATAN CITRA PRODUK EKSPOR	33.433.564,00	27.781.446,00	(5.652.118,00)	83,09	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	33.433.564,00	27.781.446,00	(5.652.118,00)	83,09	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.433.564,00	27.781.446,00	(5.652.118,00)	83,09	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	112.710.614,00	81.535.210,00	(31.175.404,00)	72,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	112.710.614,00	81.535.210,00	(31.175.404,00)	72,34	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	31.853.909,00	31.548.765,00	(305.144,00)	99,04	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.853.909,00	31.548.765,00	(305.144,00)	99,04	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.853.909,00	31.548.765,00	(305.144,00)	99,04	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.06.2.01.0002		PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	80.856.705,00	49.986.445,00	(30.870.260,00)	61,82	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.856.705,00	49.986.445,00	(30.870.260,00)	61,82	
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.856.705,00	49.986.445,00	(30.870.260,00)	61,82	
				JUMLAH BELANJA	13.161.973.405,00	11.904.283.869,00	(1.257.689.536,00)	90,44	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(13.161.973.405,00)	(11.904.283.869,00)	1.257.689.536,00	90,44	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.161.973.405,00)	(11.904.283.869,00)	1.257.689.536,00	90,44	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000		5	BELANJA DAERAH	20.009.265,00	2.680.000,00	(17.329.265,00)	13,39	
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	20.009.265,00	2.680.000,00	(17.329.265,00)	13,39	
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.29.05.2.01		PENATAUSAHAAN IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.009.265,00	2.680.000,00	(17.329.265,00)	13,39	
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.29.05.2.01.0003		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.009.265,00	2.680.000,00	(17.329.265,00)	13,39	
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.29.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.009.265,00	2.680.000,00	(17.329.265,00)	13,39	
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.29.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.009.265,00	2.680.000,00	(17.329.265,00)	13,39	
				JUMLAH BELANJA	20.009.265,00	2.680.000,00	(17.329.265,00)	13,39	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(20.009.265,00)	(2.680.000,00)	17.329.265,00	13,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(20.009.265,00)	(2.680.000,00)	17.329.265,00	13,39	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Sekretariat Daerah

4.01.0.00.0.00.22.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000		5	BELANJA DAERAH	36.710.414.851,00	34.094.416.312,00	(2.615.998.539,00)	92,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.466.441.811,00	32.330.125.102,00	(2.136.316.709,00)	93,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.300.264.538,00	11.940.434.417,00	(359.830.121,00)	97,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.929.161.218,00	11.574.167.418,00	(354.993.800,00)	97,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.929.161.218,00	11.574.167.418,00	(354.993.800,00)	97,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.929.161.218,00	11.574.167.418,00	(354.993.800,00)	97,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	371.103.320,00	366.266.999,00	(4.836.321,00)	98,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	319.128.320,00	314.967.000,00	(4.161.320,00)	98,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.128.320,00	314.967.000,00	(4.161.320,00)	98,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	51.975.000,00	51.299.999,00	(675.001,00)	98,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.975.000,00	51.299.999,00	(675.001,00)	98,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	148.240.200,00	104.790.000,00	(43.450.200,00)	70,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	105.000.000,00	104.790.000,00	(210.000,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	104.790.000,00	(210.000,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	104.790.000,00	(210.000,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	43.240.200,00	0,00	(43.240.200,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	43.240.200,00	0,00	(43.240.200,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.240.200,00	0,00	(43.240.200,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	5.952.669.596,00	5.652.435.352,00	(300.234.244,00)	94,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	120.010.000,14	112.282.000,00	(7.728.000,14)	93,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	120.010.000,14	112.282.000,00	(7.728.000,14)	93,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.010.000,14	112.282.000,00	(7.728.000,14)	93,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	364.245.590,00	354.070.074,00	(10.175.516,00)	97,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	286.245.590,00	285.770.074,00	(475.516,00)	99,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.245.590,00	285.770.074,00	(475.516,00)	99,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	78.000.000,00	68.300.000,00	(9.700.000,00)	87,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.000.000,00	68.300.000,00	(9.700.000,00)	87,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	693.685.760,00	616.410.000,00	(77.275.760,00)	88,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	302.685.760,00	267.600.000,00	(35.085.760,00)	88,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.685.760,00	267.600.000,00	(35.085.760,00)	88,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	391.000.000,00	348.810.000,00	(42.190.000,00)	89,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	391.000.000,00	348.810.000,00	(42.190.000,00)	89,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	80.563.240,00	80.562.690,00	(550,00)	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	80.563.240,00	80.562.690,00	(550,00)	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.563.240,00	80.562.690,00	(550,00)	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.230.000.000,00	2.128.029.466,00	(101.970.534,00)	95,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.230.000.000,00	2.128.029.466,00	(101.970.534,00)	95,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.230.000.000,00	2.128.029.466,00	(101.970.534,00)	95,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	2.464.165.005,86	2.361.081.122,00	(103.083.883,86)	95,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.464.165.005,86	2.361.081.122,00	(103.083.883,86)	95,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.464.165.005,86	2.361.081.122,00	(103.083.883,86)	95,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6.304.467.290,00	5.792.914.478,00	(511.552.812,00)	91,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	3.792.000.000,00	3.617.900.002,00	(174.099.998,00)	95,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.792.000.000,00	3.617.900.002,00	(174.099.998,00)	95,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.792.000.000,00	3.617.900.002,00	(174.099.998,00)	95,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	948.513.090,00	838.921.000,00	(109.592.090,00)	88,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	276.213.200,00	191.453.000,00	(84.760.200,00)	69,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.213.200,00	191.453.000,00	(84.760.200,00)	69,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	672.299.890,00	647.468.000,00	(24.831.890,00)	96,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	672.299.890,00	647.468.000,00	(24.831.890,00)	96,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	320.100.000,00	229.564.798,00	(90.535.202,00)	71,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	320.100.000,00	229.564.798,00	(90.535.202,00)	71,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.100.000,00	229.564.798,00	(90.535.202,00)	71,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.243.854.200,00	1.106.528.678,00	(137.325.522,00)	88,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	778.420.000,00	757.367.000,00	(21.053.000,00)	97,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	778.420.000,00	757.367.000,00	(21.053.000,00)	97,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	465.434.200,00	349.161.678,00	(116.272.522,00)	75,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	465.434.200,00	349.161.678,00	(116.272.522,00)	75,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.823.349.620,00	2.356.743.702,00	(466.605.918,00)	83,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	58.685.000,00	32.571.500,00	(26.113.500,00)	55,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.685.000,00	32.571.500,00	(26.113.500,00)	55,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.685.000,00	32.571.500,00	(26.113.500,00)	55,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.299.403.650,00	1.109.774.202,00	(189.629.448,00)	85,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.299.403.650,00	1.109.774.202,00	(189.629.448,00)	85,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.403.650,00	1.109.774.202,00	(189.629.448,00)	85,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	153.085.970,00	105.363.000,00	(47.722.970,00)	68,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	153.085.970,00	105.363.000,00	(47.722.970,00)	68,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.085.970,00	105.363.000,00	(47.722.970,00)	68,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.312.175.000,00	1.109.035.000,00	(203.140.000,00)	84,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.312.175.000,00	1.109.035.000,00	(203.140.000,00)	84,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.312.175.000,00	1.109.035.000,00	(203.140.000,00)	84,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.499.205.000,00	3.241.309.462,00	(257.895.538,00)	92,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	476.054.620,00	289.384.110,00	(186.670.510,00)	60,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	476.054.620,00	289.384.110,00	(186.670.510,00)	60,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.054.620,00	289.384.110,00	(186.670.510,00)	60,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.033.583.000,00	1.028.446.152,00	(5.136.848,00)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.033.583.000,00	1.028.446.152,00	(5.136.848,00)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.033.583.000,00	1.028.446.152,00	(5.136.848,00)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	107.393.550,00	52.209.000,00	(55.184.550,00)	48,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	107.393.550,00	52.209.000,00	(55.184.550,00)	48,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.393.550,00	52.209.000,00	(55.184.550,00)	48,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.882.173.830,00	1.871.270.200,00	(10.903.630,00)	99,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.882.173.830,00	1.871.270.200,00	(10.903.630,00)	99,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.882.173.830,00	1.871.270.200,00	(10.903.630,00)	99,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	886.381.290,00	865.681.457,00	(20.699.833,00)	97,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	782.381.290,00	762.139.857,00	(20.241.433,00)	97,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	782.381.290,00	762.139.857,00	(20.241.433,00)	97,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	782.381.290,00	762.139.857,00	(20.241.433,00)	97,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	104.000.000,00	103.541.600,00	(458.400,00)	99,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	104.000.000,00	103.541.600,00	(458.400,00)	99,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00	103.541.600,00	(458.400,00)	99,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	2.246.000.000,00	2.118.462.500,00	(127.537.500,00)	94,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	1.150.000.000,00	1.131.878.000,00	(18.122.000,00)	98,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.150.000.000,00	1.131.878.000,00	(18.122.000,00)	98,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000.000,00	1.131.878.000,00	(18.122.000,00)	98,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	880.000.000,00	770.674.500,00	(109.325.500,00)	87,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	880.000.000,00	770.674.500,00	(109.325.500,00)	87,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	880.000.000,00	770.674.500,00	(109.325.500,00)	87,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	216.000.000,00	215.910.000,00	(90.000,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	216.000.000,00	215.910.000,00	(90.000,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.000.000,00	215.910.000,00	(90.000,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	212.689.242,00	204.634.984,00	(8.054.258,00)	96,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	53.650.524,00	52.631.350,00	(1.019.174,00)	98,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.650.524,00	52.631.350,00	(1.019.174,00)	98,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.650.524,00	52.631.350,00	(1.019.174,00)	98,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	61.052.271,00	59.646.580,00	(1.405.691,00)	97,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	61.052.271,00	59.646.580,00	(1.405.691,00)	97,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.052.271,00	59.646.580,00	(1.405.691,00)	97,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0004		MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	66.527.044,00	63.238.154,00	(3.288.890,00)	95,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	66.527.044,00	63.238.154,00	(3.288.890,00)	95,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.527.044,00	63.238.154,00	(3.288.890,00)	95,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	31.459.403,00	29.118.900,00	(2.340.503,00)	92,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.459.403,00	29.118.900,00	(2.340.503,00)	92,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.459.403,00	29.118.900,00	(2.340.503,00)	92,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	93.175.035,00	52.718.750,00	(40.456.285,00)	56,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	34.182.500,00	24.337.950,00	(9.844.550,00)	71,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.182.500,00	24.337.950,00	(9.844.550,00)	71,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.182.500,00	24.337.950,00	(9.844.550,00)	71,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	28.716.218,00	19.052.000,00	(9.664.218,00)	66,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.716.218,00	19.052.000,00	(9.664.218,00)	66,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.716.218,00	19.052.000,00	(9.664.218,00)	66,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	30.276.317,00	9.328.800,00	(20.947.517,00)	30,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.276.317,00	9.328.800,00	(20.947.517,00)	30,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.276.317,00	9.328.800,00	(20.947.517,00)	30,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.072.704.225,00	925.172.680,00	(147.531.545,00)	86,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	545.246.646,00	407.931.060,00	(137.315.586,00)	74,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	132.150.000,00	58.414.001,00	(73.735.999,00)	44,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	104.010.800,00	31.514.000,00	(72.496.800,00)	30,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.010.800,00	31.514.000,00	(72.496.800,00)	30,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	28.139.200,00	26.900.001,00	(1.239.199,00)	95,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.139.200,00	26.900.001,00	(1.239.199,00)	95,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	111.455.646,00	95.535.758,00	(15.919.888,00)	85,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	95.824.846,00	79.935.758,00	(15.889.088,00)	83,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.824.846,00	79.935.758,00	(15.889.088,00)	83,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	15.630.800,00	15.600.000,00	(30.800,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.630.800,00	15.600.000,00	(30.800,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	301.641.000,00	253.981.301,00	(47.659.699,00)	84,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	273.501.800,00	225.881.300,00	(47.620.500,00)	82,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.501.800,00	225.881.300,00	(47.620.500,00)	82,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	28.139.200,00	28.100.001,00	(39.199,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.139.200,00	28.100.001,00	(39.199,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	87.877.234,00	82.186.220,00	(5.691.014,00)	93,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	18.600.350,00	18.218.030,00	(382.320,00)	97,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.600.350,00	18.218.030,00	(382.320,00)	97,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.350,00	18.218.030,00	(382.320,00)	97,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	45.215.684,00	39.907.100,00	(5.308.584,00)	88,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.215.684,00	39.907.100,00	(5.308.584,00)	88,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.215.684,00	39.907.100,00	(5.308.584,00)	88,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	24.061.200,00	24.061.090,00	(110,00)	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.061.200,00	24.061.090,00	(110,00)	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.061.200,00	24.061.090,00	(110,00)	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	439.580.345,00	435.055.400,00	(4.524.945,00)	98,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	118.679.220,00	117.945.500,00	(733.720,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	118.679.220,00	117.945.500,00	(733.720,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.679.220,00	117.945.500,00	(733.720,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	187.077.225,00	186.472.900,00	(604.325,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	187.077.225,00	186.472.900,00	(604.325,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.077.225,00	186.472.900,00	(604.325,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	133.823.900,00	130.637.000,00	(3.186.900,00)	97,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	133.823.900,00	130.637.000,00	(3.186.900,00)	97,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.823.900,00	130.637.000,00	(3.186.900,00)	97,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.171.268.815,00	839.118.530,00	(332.150.285,00)	71,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	365.899.930,00	230.989.628,00	(134.910.302,00)	63,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	30.639.430,00	24.059.020,00	(6.580.410,00)	78,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.639.430,00	24.059.020,00	(6.580.410,00)	78,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.639.430,00	24.059.020,00	(6.580.410,00)	78,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	75.553.000,00	74.973.313,00	(579.687,00)	99,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.553.000,00	74.973.313,00	(579.687,00)	99,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.553.000,00	74.973.313,00	(579.687,00)	99,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMD	259.707.500,00	131.957.295,00	(127.750.205,00)	50,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	259.707.500,00	131.957.295,00	(127.750.205,00)	50,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.707.500,00	131.957.295,00	(127.750.205,00)	50,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	37.518.245,00	37.494.900,00	(23.345,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	3.857.000,00	3.840.000,00	(17.000,00)	99,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.857.000,00	3.840.000,00	(17.000,00)	99,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.857.000,00	3.840.000,00	(17.000,00)	99,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	8.411.245,00	8.405.700,00	(5.545,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.411.245,00	8.405.700,00	(5.545,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.411.245,00	8.405.700,00	(5.545,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	25.250.000,00	25.249.200,00	(800,00)	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.250.000,00	25.249.200,00	(800,00)	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	25.249.200,00	(800,00)	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	724.951.940,00	533.198.002,00	(191.753.938,00)	73,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	584.983.840,00	415.770.002,00	(169.213.838,00)	71,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	491.721.240,00	334.070.000,00	(157.651.240,00)	67,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.721.240,00	334.070.000,00	(157.651.240,00)	67,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	93.262.600,00	81.700.002,00	(11.562.598,00)	87,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.262.600,00	81.700.002,00	(11.562.598,00)	87,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	75.432.500,00	69.800.000,00	(5.632.500,00)	92,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.279.800,00	46.800.000,00	(4.479.800,00)	91,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.279.800,00	46.800.000,00	(4.479.800,00)	91,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	24.152.700,00	23.000.000,00	(1.152.700,00)	95,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.152.700,00	23.000.000,00	(1.152.700,00)	95,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	64.535.600,00	47.628.000,00	(16.907.600,00)	73,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.706.700,00	20.628.000,00	(7.078.700,00)	74,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.706.700,00	20.628.000,00	(7.078.700,00)	74,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	36.828.900,00	27.000.000,00	(9.828.900,00)	73,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.828.900,00	27.000.000,00	(9.828.900,00)	73,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	42.898.700,00	37.436.000,00	(5.462.700,00)	87,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.04.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	21.760.400,00	19.074.000,00	(2.686.400,00)	87,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.760.400,00	19.074.000,00	(2.686.400,00)	87,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.760.400,00	19.074.000,00	(2.686.400,00)	87,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.04.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	21.138.300,00	18.362.000,00	(2.776.300,00)	86,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.138.300,00	18.362.000,00	(2.776.300,00)	86,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.138.300,00	18.362.000,00	(2.776.300,00)	86,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	36.710.414.851,00	34.094.416.312,00	(2.615.998.539,00)	92,87	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.710.414.851,00)	(34.094.416.312,00)	2.615.998.539,00	92,87	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(36.710.414.851,00)	(34.094.416.312,00)	2.615.998.539,00	92,87	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4.02.0.00.0.00.23.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : SEKRETARIAT DPRD
ORGANISASI : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000		5	BELANJA DAERAH	50.733.878.470,00	46.473.117.504,00	(4.260.760.966,00)	91,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.992.210.884,00	32.473.553.546,00	(2.518.657.338,00)	92,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.183.201.442,00	3.030.866.419,00	(152.335.023,00)	95,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.030.561.442,00	2.889.746.419,00	(140.815.023,00)	95,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.030.561.442,00	2.889.746.419,00	(140.815.023,00)	95,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.561.442,00	2.889.746.419,00	(140.815.023,00)	95,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	152.640.000,00	141.120.000,00	(11.520.000,00)	92,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	152.640.000,00	141.120.000,00	(11.520.000,00)	92,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.640.000,00	141.120.000,00	(11.520.000,00)	92,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	400.112.000,00	374.680.532,00	(25.431.468,00)	93,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	91.500.000,00	81.220.000,00	(10.280.000,00)	88,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	91.500.000,00	81.220.000,00	(10.280.000,00)	88,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.500.000,00	81.220.000,00	(10.280.000,00)	88,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	308.612.000,00	293.460.532,00	(15.151.468,00)	95,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	308.612.000,00	293.460.532,00	(15.151.468,00)	95,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.612.000,00	293.460.532,00	(15.151.468,00)	95,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.241.871.502,00	2.664.336.016,00	(577.535.486,00)	82,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	24.998.160,00	23.505.000,00	(1.493.160,00)	94,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.998.160,00	23.505.000,00	(1.493.160,00)	94,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.998.160,00	23.505.000,00	(1.493.160,00)	94,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	739.947.850,00	669.258.890,00	(70.688.960,00)	90,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	223.586.522,00	168.784.290,00	(54.802.232,00)	75,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.586.522,00	168.784.290,00	(54.802.232,00)	75,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	516.361.328,00	500.474.600,00	(15.886.728,00)	96,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	516.361.328,00	500.474.600,00	(15.886.728,00)	96,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.857.041.630,00	1.376.758.400,00	(480.283.230,00)	74,14	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	458.515.980,00	421.641.000,00	(36.874.980,00)	91,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.515.980,00	421.641.000,00	(36.874.980,00)	91,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.398.525.650,00	955.117.400,00	(443.408.250,00)	68,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.398.525.650,00	955.117.400,00	(443.408.250,00)	68,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.781.562,00	13.161.500,00	(10.620.062,00)	55,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.781.562,00	13.161.500,00	(10.620.062,00)	55,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.781.562,00	13.161.500,00	(10.620.062,00)	55,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	32.400.000,00	19.656.000,00	(12.744.000,00)	60,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.400.000,00	19.656.000,00	(12.744.000,00)	60,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	19.656.000,00	(12.744.000,00)	60,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	212.013.300,00	210.388.000,00	(1.625.300,00)	99,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	212.013.300,00	210.388.000,00	(1.625.300,00)	99,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.013.300,00	210.388.000,00	(1.625.300,00)	99,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	351.689.000,00	351.608.226,00	(80.774,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	351.689.000,00	351.608.226,00	(80.774,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.689.000,00	351.608.226,00	(80.774,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.689.998.500,00	3.421.985.011,00	(268.013.489,00)	92,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	2.206.020.000,00	2.109.900.000,00	(96.120.000,00)	95,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.206.020.000,00	2.109.900.000,00	(96.120.000,00)	95,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.206.020.000,00	2.109.900.000,00	(96.120.000,00)	95,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	1.483.978.500,00	1.312.085.011,00	(171.893.489,00)	88,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.500,00	0,00	(21.500,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500,00	0,00	(21.500,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.483.957.000,00	1.312.085.011,00	(171.871.989,00)	88,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.483.957.000,00	1.312.085.011,00	(171.871.989,00)	88,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.289.680.000,00	1.144.897.393,00	(144.782.607,00)	88,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	157.200.000,00	124.627.143,00	(32.572.857,00)	79,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	157.200.000,00	124.627.143,00	(32.572.857,00)	79,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.200.000,00	124.627.143,00	(32.572.857,00)	79,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	76.290.000,00	18.780.250,00	(57.509.750,00)	24,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	76.290.000,00	18.780.250,00	(57.509.750,00)	24,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.290.000,00	18.780.250,00	(57.509.750,00)	24,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.056.190.000,00	1.001.490.000,00	(54.700.000,00)	94,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.056.190.000,00	1.001.490.000,00	(54.700.000,00)	94,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.056.190.000,00	1.001.490.000,00	(54.700.000,00)	94,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	998.159.440,00	853.346.348,00	(144.813.092,00)	85,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	297.120.000,00	181.116.578,00	(116.003.422,00)	60,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	297.120.000,00	181.116.578,00	(116.003.422,00)	60,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.120.000,00	181.116.578,00	(116.003.422,00)	60,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	701.039.440,00	672.229.770,00	(28.809.670,00)	95,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	701.039.440,00	672.229.770,00	(28.809.670,00)	95,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.039.440,00	672.229.770,00	(28.809.670,00)	95,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	20.296.597.000,00	19.187.386.827,00	(1.109.210.173,00)	94,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	19.704.597.000,00	18.708.386.870,00	(996.210.130,00)	94,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.704.597.000,00	18.708.386.870,00	(996.210.130,00)	94,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	19.704.597.000,00	18.708.386.870,00	(996.210.130,00)	94,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	352.000.000,00	286.999.957,00	(65.000.043,00)	81,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	352.000.000,00	286.999.957,00	(65.000.043,00)	81,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.000.000,00	286.999.957,00	(65.000.043,00)	81,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	240.000.000,00	192.000.000,00	(48.000.000,00)	80,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	192.000.000,00	(48.000.000,00)	80,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	192.000.000,00	(48.000.000,00)	80,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	1.892.591.000,00	1.796.055.000,00	(96.536.000,00)	94,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.16.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	20.591.000,00	10.035.000,00	(10.556.000,00)	48,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.591.000,00	10.035.000,00	(10.556.000,00)	48,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.591.000,00	10.035.000,00	(10.556.000,00)	48,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.16.0004		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	1.872.000.000,00	1.786.020.000,00	(85.980.000,00)	95,41	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.872.000.000,00	1.786.020.000,00	(85.980.000,00)	95,41	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.872.000.000,00	1.786.020.000,00	(85.980.000,00)	95,41	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.2.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.741.667.586,00	13.999.563.958,00	(1.742.103.628,00)	88,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	2.604.070.320,00	2.250.692.595,00	(353.377.725,00)	86,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0001		PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	17.514.000,00	13.650.000,00	(3.864.000,00)	77,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.514.000,00	13.650.000,00	(3.864.000,00)	77,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.514.000,00	13.650.000,00	(3.864.000,00)	77,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	2.517.909.260,00	2.203.487.595,00	(314.421.665,00)	87,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.517.909.260,00	2.203.487.595,00	(314.421.665,00)	87,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.517.909.260,00	2.203.487.595,00	(314.421.665,00)	87,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0003		PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.039.800,00	0,00	(13.039.800,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.039.800,00	0,00	(13.039.800,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.039.800,00	0,00	(13.039.800,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0004		FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	50.675.260,00	29.655.000,00	(21.020.260,00)	58,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.675.260,00	29.655.000,00	(21.020.260,00)	58,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.675.260,00	29.655.000,00	(21.020.260,00)	58,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0005		PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD	4.932.000,00	3.900.000,00	(1.032.000,00)	79,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.932.000,00	3.900.000,00	(1.032.000,00)	79,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.932.000,00	3.900.000,00	(1.032.000,00)	79,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	251.251.500,00	229.688.000,00	(21.563.500,00)	91,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0001		PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	84.508.500,00	78.424.000,00	(6.084.500,00)	92,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.508.500,00	78.424.000,00	(6.084.500,00)	92,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.508.500,00	78.424.000,00	(6.084.500,00)	92,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0002		PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	47.148.500,00	41.627.000,00	(5.521.500,00)	88,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.148.500,00	41.627.000,00	(5.521.500,00)	88,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.148.500,00	41.627.000,00	(5.521.500,00)	88,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0003		PEMBAHASAN APBD	36.949.500,00	36.317.000,00	(632.500,00)	98,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.949.500,00	36.317.000,00	(632.500,00)	98,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.949.500,00	36.317.000,00	(632.500,00)	98,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0004		PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	37.740.000,00	36.933.000,00	(807.000,00)	97,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	37.740.000,00	36.933.000,00	(807.000,00)	97,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.740.000,00	36.933.000,00	(807.000,00)	97,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0005		PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	7.385.000,00	0,00	(7.385.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.385.000,00	0,00	(7.385.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.385.000,00	0,00	(7.385.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0006		PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	37.520.000,00	36.387.000,00	(1.133.000,00)	96,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.520.000,00	36.387.000,00	(1.133.000,00)	96,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.520.000,00	36.387.000,00	(1.133.000,00)	96,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	172.317.200,00	59.604.000,00	(112.713.200,00)	34,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0001		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	25.079.600,00	14.861.000,00	(10.218.600,00)	59,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.079.600,00	14.861.000,00	(10.218.600,00)	59,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.079.600,00	14.861.000,00	(10.218.600,00)	59,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0002		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	19.409.600,00	0,00	(19.409.600,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.409.600,00	0,00	(19.409.600,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.409.600,00	0,00	(19.409.600,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0003		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	31.836.000,00	0,00	(31.836.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.836.000,00	0,00	(31.836.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.836.000,00	0,00	(31.836.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0004		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	24.332.000,00	21.656.000,00	(2.676.000,00)	89,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.332.000,00	21.656.000,00	(2.676.000,00)	89,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.332.000,00	21.656.000,00	(2.676.000,00)	89,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0005		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	24.430.000,00	0,00	(24.430.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.430.000,00	0,00	(24.430.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.430.000,00	0,00	(24.430.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0006		PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	13.714.000,00	4.898.000,00	(8.816.000,00)	35,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.714.000,00	4.898.000,00	(8.816.000,00)	35,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.714.000,00	4.898.000,00	(8.816.000,00)	35,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0007		PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0008		PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	20.216.000,00	18.189.000,00	(2.027.000,00)	89,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	20.216.000,00	18.189.000,00	(2.027.000,00)	89,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.216.000,00	18.189.000,00	(2.027.000,00)	89,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	1.832.820.940,00	1.494.285.228,00	(338.535.712,00)	81,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	1.206.341.000,00	1.014.143.228,00	(192.197.772,00)	84,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.206.341.000,00	1.014.143.228,00	(192.197.772,00)	84,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.206.341.000,00	1.014.143.228,00	(192.197.772,00)	84,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0004		PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0007		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	24.735.540,00	10.382.000,00	(14.353.540,00)	41,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.735.540,00	10.382.000,00	(14.353.540,00)	41,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.735.540,00	10.382.000,00	(14.353.540,00)	41,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	160.744.400,00	28.760.000,00	(131.984.400,00)	17,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	160.744.400,00	28.760.000,00	(131.984.400,00)	17,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.744.400,00	28.760.000,00	(131.984.400,00)	17,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	826.288.000,00	551.634.000,00	(274.654.000,00)	66,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	50.000.000,00	49.450.000,00	(550.000,00)	98,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.450.000,00	(550.000,00)	98,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.450.000,00	(550.000,00)	98,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05.0002		PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	13.033.600,00	0,00	(13.033.600,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.033.600,00	0,00	(13.033.600,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.033.600,00	0,00	(13.033.600,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	763.254.400,00	502.184.000,00	(261.070.400,00)	65,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	763.254.400,00	502.184.000,00	(261.070.400,00)	65,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	763.254.400,00	502.184.000,00	(261.070.400,00)	65,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.06		PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	13.996.000,00	0,00	(13.996.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.06.0001		PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD	6.998.000,00	0,00	(6.998.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.998.000,00	0,00	(6.998.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.998.000,00	0,00	(6.998.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.06.0002		PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	6.998.000,00	0,00	(6.998.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.998.000,00	0,00	(6.998.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.998.000,00	0,00	(6.998.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	10.040.923.626,00	9.413.660.135,00	(627.263.491,00)	93,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	9.714.345.706,00	9.347.866.135,00	(366.479.571,00)	96,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.714.345.706,00	9.347.866.135,00	(366.479.571,00)	96,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.714.345.706,00	9.347.866.135,00	(366.479.571,00)	96,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0002		PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	9.273.000,00	6.671.000,00	(2.602.000,00)	71,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.273.000,00	6.671.000,00	(2.602.000,00)	71,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.273.000,00	6.671.000,00	(2.602.000,00)	71,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0003		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	34.595.120,00	19.808.000,00	(14.787.120,00)	57,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.595.120,00	19.808.000,00	(14.787.120,00)	57,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.595.120,00	19.808.000,00	(14.787.120,00)	57,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0004		FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	282.709.800,00	39.315.000,00	(243.394.800,00)	13,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	282.709.800,00	39.315.000,00	(243.394.800,00)	13,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.709.800,00	39.315.000,00	(243.394.800,00)	13,91	
				JUMLAH BELANJA	50.733.878.470,00	46.473.117.504,00	(4.260.760.966,00)	91,60	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(50.733.878.470,00)	(46.473.117.504,00)	4.260.760.966,00	91,60	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(50.733.878.470,00)	(46.473.117.504,00)	4.260.760.966,00	91,60	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

5.01.5.05.0.00.24.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : PERENCANAAN
ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000		5	BELANJA DAERAH	7.989.507.859,00	7.727.467.346,00	(262.040.513,00)	96,72	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.975.967.934,00	5.832.090.926,00	(143.877.008,00)	97,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.009.522.991,00	4.916.601.561,00	(92.921.430,00)	98,15	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.852.738.391,00	4.759.816.961,00	(92.921.430,00)	98,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.852.738.391,00	4.759.816.961,00	(92.921.430,00)	98,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.852.738.391,00	4.759.816.961,00	(92.921.430,00)	98,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	156.784.600,00	156.784.600,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	156.784.600,00	156.784.600,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.784.600,00	156.784.600,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	478.972.902,00	471.028.537,00	(7.944.365,00)	98,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.757.402,00	1.757.402,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.757.402,00	1.757.402,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.757.402,00	1.757.402,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	35.399.544,00	34.416.335,00	(983.209,00)	97,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.399.544,00	34.416.335,00	(983.209,00)	97,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.399.544,00	34.416.335,00	(983.209,00)	97,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.428.784,00	12.428.784,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.428.784,00	12.428.784,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.428.784,00	12.428.784,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.784.302,00	18.127.119,00	(2.657.183,00)	87,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.784.302,00	18.127.119,00	(2.657.183,00)	87,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.784.302,00	18.127.119,00	(2.657.183,00)	87,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	10.723.842,00	6.696.000,00	(4.027.842,00)	62,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.723.842,00	6.696.000,00	(4.027.842,00)	62,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.723.842,00	6.696.000,00	(4.027.842,00)	62,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	397.879.028,00	397.602.897,00	(276.131,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	397.879.028,00	397.602.897,00	(276.131,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.879.028,00	397.602.897,00	(276.131,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	183.608.440,00	169.175.100,00	(14.433.340,00)	92,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	183.608.440,00	169.175.100,00	(14.433.340,00)	92,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.080.800,00	14.418.900,00	(661.900,00)	95,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.080.800,00	14.418.900,00	(661.900,00)	95,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	168.527.640,00	154.756.200,00	(13.771.440,00)	91,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.527.640,00	154.756.200,00	(13.771.440,00)	91,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	104.950.000,00	103.418.800,00	(1.531.200,00)	98,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.000.000,00	11.978.800,00	(21.200,00)	99,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.978.800,00	(21.200,00)	99,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.978.800,00	(21.200,00)	99,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.650.000,00	16.140.000,00	(1.510.000,00)	91,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.650.000,00	16.140.000,00	(1.510.000,00)	91,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.650.000,00	16.140.000,00	(1.510.000,00)	91,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	168.673.601,00	141.626.928,00	(27.046.673,00)	83,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	42.120.000,00	40.886.928,00	(1.233.072,00)	97,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.120.000,00	40.886.928,00	(1.233.072,00)	97,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.120.000,00	40.886.928,00	(1.233.072,00)	97,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	126.553.601,00	100.740.000,00	(25.813.601,00)	79,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	126.553.601,00	100.740.000,00	(25.813.601,00)	79,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.553.601,00	100.740.000,00	(25.813.601,00)	79,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.034.920.875,00	965.190.885,00	(69.729.990,00)	93,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	870.287.075,00	825.369.015,00	(44.918.060,00)	94,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	30.926.280,00	29.596.465,00	(1.329.815,00)	95,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.926.280,00	29.596.465,00	(1.329.815,00)	95,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.926.280,00	29.596.465,00	(1.329.815,00)	95,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	21.484.555,00	20.151.655,00	(1.332.900,00)	93,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.484.555,00	20.151.655,00	(1.332.900,00)	93,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.484.555,00	20.151.655,00	(1.332.900,00)	93,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	42.741.755,00	41.620.885,00	(1.120.870,00)	97,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.741.755,00	41.620.885,00	(1.120.870,00)	97,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.741.755,00	41.620.885,00	(1.120.870,00)	97,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	775.134.485,00	734.000.010,00	(41.134.475,00)	94,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	775.134.485,00	734.000.010,00	(41.134.475,00)	94,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	775.134.485,00	734.000.010,00	(41.134.475,00)	94,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	43.026.190,00	37.017.835,00	(6.008.355,00)	86,04	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.03.0001		KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	43.026.190,00	37.017.835,00	(6.008.355,00)	86,04	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.026.190,00	37.017.835,00	(6.008.355,00)	86,04	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.026.190,00	37.017.835,00	(6.008.355,00)	86,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.04		IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	121.607.610,00	102.804.035,00	(18.803.575,00)	84,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.04.0002		PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	121.607.610,00	102.804.035,00	(18.803.575,00)	84,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	121.607.610,00	102.804.035,00	(18.803.575,00)	84,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.607.610,00	102.804.035,00	(18.803.575,00)	84,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	978.619.050,00	930.185.535,00	(48.433.515,00)	95,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	521.799.333,00	495.609.080,00	(26.190.253,00)	94,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	37.029.882,00	36.452.640,00	(577.242,00)	98,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.029.882,00	36.452.640,00	(577.242,00)	98,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.029.882,00	36.452.640,00	(577.242,00)	98,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	67.612.200,00	60.739.200,00	(6.873.000,00)	89,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	67.612.200,00	60.739.200,00	(6.873.000,00)	89,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.612.200,00	60.739.200,00	(6.873.000,00)	89,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	79.108.803,00	76.668.405,00	(2.440.398,00)	96,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	70.021.403,00	67.777.305,00	(2.244.098,00)	96,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.021.403,00	67.777.305,00	(2.244.098,00)	96,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	9.087.400,00	8.891.100,00	(196.300,00)	97,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.087.400,00	8.891.100,00	(196.300,00)	97,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	338.048.448,00	321.748.835,00	(16.299.613,00)	95,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	313.048.448,00	297.098.835,00	(15.949.613,00)	94,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.048.448,00	297.098.835,00	(15.949.613,00)	94,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.650.000,00	(350.000,00)	98,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.650.000,00	(350.000,00)	98,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	278.961.872,00	260.957.362,00	(18.004.510,00)	93,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	152.575.521,00	137.900.600,00	(14.674.921,00)	90,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	152.575.521,00	137.900.600,00	(14.674.921,00)	90,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.575.521,00	137.900.600,00	(14.674.921,00)	90,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	8.100.000,00	7.840.563,00	(259.437,00)	96,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.100.000,00	7.840.563,00	(259.437,00)	96,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	7.840.563,00	(259.437,00)	96,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	48.472.272,00	48.218.004,00	(254.268,00)	99,48	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	48.472.272,00	48.218.004,00	(254.268,00)	99,48	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.472.272,00	48.218.004,00	(254.268,00)	99,48	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	28.484.000,00	27.443.955,00	(1.040.045,00)	96,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.484.000,00	27.443.955,00	(1.040.045,00)	96,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.484.000,00	27.443.955,00	(1.040.045,00)	96,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	10.313.560,00	9.812.130,00	(501.430,00)	95,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.313.560,00	9.812.130,00	(501.430,00)	95,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.313.560,00	9.812.130,00	(501.430,00)	95,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	31.016.519,00	29.742.110,00	(1.274.409,00)	95,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	31.016.519,00	29.742.110,00	(1.274.409,00)	95,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.016.519,00	29.742.110,00	(1.274.409,00)	95,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	177.857.845,00	173.619.093,00	(4.238.752,00)	97,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	63.369.445,00	62.590.215,00	(779.230,00)	98,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.369.445,00	62.590.215,00	(779.230,00)	98,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.369.445,00	62.590.215,00	(779.230,00)	98,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	66.855.750,00	66.058.485,00	(797.265,00)	98,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	66.855.750,00	66.058.485,00	(797.265,00)	98,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.855.750,00	66.058.485,00	(797.265,00)	98,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	21.415.020,00	20.832.350,00	(582.670,00)	97,28	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.415.020,00	20.832.350,00	(582.670,00)	97,28	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.415.020,00	20.832.350,00	(582.670,00)	97,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	26.217.630,00	24.138.043,00	(2.079.587,00)	92,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	26.217.630,00	24.138.043,00	(2.079.587,00)	92,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.217.630,00	24.138.043,00	(2.079.587,00)	92,07	
				JUMLAH BELANJA	7.989.507.859,00	7.727.467.346,00	(262.040.513,00)	96,72	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.989.507.859,00)	(7.727.467.346,00)	262.040.513,00	96,72	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.989.507.859,00)	(7.727.467.346,00)	262.040.513,00	96,72	

Kabanjahe, 24 September 2026

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000		5	BELANJA DAERAH	1.024.713.534,00	879.021.542,00	(145.691.992,00)	85,78	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.5.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.024.713.534,00	879.021.542,00	(145.691.992,00)	85,78	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	446.529.342,00	362.200.552,00	(84.328.790,00)	81,11	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.01.0012		PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN	446.529.342,00	362.200.552,00	(84.328.790,00)	81,11	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	271.121.581,00	197.062.951,00	(74.058.630,00)	72,68	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.121.581,00	197.062.951,00	(74.058.630,00)	72,68	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	175.407.761,00	165.137.601,00	(10.270.160,00)	94,14	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.407.761,00	165.137.601,00	(10.270.160,00)	94,14	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	578.184.192,00	516.820.990,00	(61.363.202,00)	89,39	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.04.0001		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	578.184.192,00	516.820.990,00	(61.363.202,00)	89,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	578.184.192,00	516.820.990,00	(61.363.202,00)	89,39	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.184.192,00	516.820.990,00	(61.363.202,00)	89,39	
				JUMLAH BELANJA	1.024.713.534,00	879.021.542,00	(145.691.992,00)	85,78	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.024.713.534,00)	(879.021.542,00)	145.691.992,00	85,78	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.024.713.534,00)	(879.021.542,00)	145.691.992,00	85,78	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Badan Keuangan dan Aset Daerah

5.02.0.00.0.00.25.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : KEUANGAN
ORGANISASI : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.296.421.776.071,00	1.290.104.961.917,69	(6.316.814.153,31)	99,51	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.243.291.014,00	16.002.001.872,69	3.758.710.858,69	130,70	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.446.458.482,00	3.446.458.482,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.796.832.532,00	12.555.543.390,69	3.758.710.858,69	142,73	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.265.621.122.964,00	1.255.825.821.775,00	(9.795.301.189,00)	99,23	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.170.206.183.978,00	1.169.598.451.826,00	(607.732.152,00)	99,95	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.414.938.986,00	86.227.369.949,00	(9.187.569.037,00)	90,37	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.557.362.093,00	18.277.138.270,00	(280.223.823,00)	98,49	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.557.362.093,00	18.277.138.270,00	(280.223.823,00)	98,49	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.296.421.776.071,00	1.290.104.961.917,69	(6.316.814.153,31)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		5	BELANJA DAERAH	297.782.644.723,00	283.951.634.959,00	(13.831.009.764,00)	95,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.949.463.471,00	5.484.092.031,00	(465.371.440,00)	92,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.696.000,00	1.190.000,00	(11.506.000,00)	9,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.696.000,00	1.190.000,00	(11.506.000,00)	9,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.696.000,00	1.190.000,00	(11.506.000,00)	9,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.696.000,00	1.190.000,00	(11.506.000,00)	9,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.692.526.406,00	4.537.332.478,00	(155.193.928,00)	96,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.396.596.406,00	4.241.402.478,00	(155.193.928,00)	96,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.396.596.406,00	4.241.402.478,00	(155.193.928,00)	96,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.396.596.406,00	4.241.402.478,00	(155.193.928,00)	96,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	295.930.000,00	295.930.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	295.930.000,00	295.930.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.930.000,00	295.930.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	35.100.000,00	34.440.000,00	(660.000,00)	98,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	35.100.000,00	34.440.000,00	(660.000,00)	98,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.100.000,00	34.440.000,00	(660.000,00)	98,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	34.440.000,00	(660.000,00)	98,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	606.533.865,00	464.378.877,00	(142.154.988,00)	76,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.862.513,00	6.565.027,00	(297.486,00)	95,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.862.513,00	6.565.027,00	(297.486,00)	95,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.862.513,00	6.565.027,00	(297.486,00)	95,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	366.534.951,00	242.627.010,00	(123.907.941,00)	66,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.146.151,00	54.023.454,00	(11.122.697,00)	82,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.146.151,00	54.023.454,00	(11.122.697,00)	82,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	301.388.800,00	188.603.556,00	(112.785.244,00)	62,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.388.800,00	114.015.996,00	(12.372.804,00)	90,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	74.587.560,00	(100.412.440,00)	42,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	18.625.790,00	16.203.185,00	(2.422.605,00)	86,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.059.830,00	16.203.185,00	(1.856.645,00)	89,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.059.830,00	16.203.185,00	(1.856.645,00)	89,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	565.960,00	0,00	(565.960,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	565.960,00	0,00	(565.960,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.421.212,00	45.993.726,00	(4.427.486,00)	91,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.421.212,00	45.993.726,00	(4.427.486,00)	91,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.421.212,00	45.993.726,00	(4.427.486,00)	91,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	164.089.399,00	152.989.929,00	(11.099.470,00)	93,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	164.089.399,00	152.989.929,00	(11.099.470,00)	93,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.089.399,00	152.989.929,00	(11.099.470,00)	93,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	311.100.000,00	298.625.544,00	(12.474.456,00)	95,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.200.000,00	15.725.544,00	(3.474.456,00)	81,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	15.725.544,00	(3.474.456,00)	81,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	15.725.544,00	(3.474.456,00)	81,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	18.460.000,00	14.520.000,00	(3.940.000,00)	78,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.460.000,00	14.520.000,00	(3.940.000,00)	78,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.460.000,00	14.520.000,00	(3.940.000,00)	78,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	273.440.000,00	268.380.000,00	(5.060.000,00)	98,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	273.440.000,00	268.380.000,00	(5.060.000,00)	98,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.440.000,00	268.380.000,00	(5.060.000,00)	98,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	291.507.200,00	148.125.132,00	(143.382.068,00)	50,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	291.507.200,00	148.125.132,00	(143.382.068,00)	50,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	291.507.200,00	148.125.132,00	(143.382.068,00)	50,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.507.200,00	148.125.132,00	(143.382.068,00)	50,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.2.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	291.138.518.094,00	277.824.579.345,00	(13.313.938.749,00)	95,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	1.751.523.579,00	1.361.128.903,00	(390.394.676,00)	77,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	173.846.044,00	163.592.434,00	(10.253.610,00)	94,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	173.846.044,00	163.592.434,00	(10.253.610,00)	94,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.846.044,00	163.592.434,00	(10.253.610,00)	94,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	161.039.852,00	134.383.202,00	(26.656.650,00)	83,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	161.039.852,00	134.383.202,00	(26.656.650,00)	83,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.039.852,00	134.383.202,00	(26.656.650,00)	83,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0003		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	157.912.000,00	133.775.000,00	(24.137.000,00)	84,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	157.912.000,00	133.775.000,00	(24.137.000,00)	84,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.912.000,00	133.775.000,00	(24.137.000,00)	84,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0005		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	305.752.000,00	186.200.000,00	(119.552.000,00)	60,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	305.752.000,00	186.200.000,00	(119.552.000,00)	60,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.752.000,00	186.200.000,00	(119.552.000,00)	60,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	423.996.359,00	307.166.756,00	(116.829.603,00)	72,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	423.996.359,00	307.166.756,00	(116.829.603,00)	72,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.996.359,00	307.166.756,00	(116.829.603,00)	72,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	479.514.340,00	408.221.511,00	(71.292.829,00)	85,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	479.514.340,00	408.221.511,00	(71.292.829,00)	85,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.514.340,00	408.221.511,00	(71.292.829,00)	85,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0009		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	11.042.984,00	0,00	(11.042.984,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.042.984,00	0,00	(11.042.984,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.042.984,00	0,00	(11.042.984,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0013		PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	38.420.000,00	27.790.000,00	(10.630.000,00)	72,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	38.420.000,00	27.790.000,00	(10.630.000,00)	72,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.420.000,00	27.790.000,00	(10.630.000,00)	72,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	162.436.311,00	131.882.218,00	(30.554.093,00)	81,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0001		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	29.029.584,00	27.776.819,00	(1.252.765,00)	95,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.029.584,00	27.776.819,00	(1.252.765,00)	95,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.029.584,00	27.776.819,00	(1.252.765,00)	95,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0005		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	54.068.969,00	40.109.384,00	(13.959.585,00)	74,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	54.068.969,00	40.109.384,00	(13.959.585,00)	74,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.068.969,00	40.109.384,00	(13.959.585,00)	74,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0009		REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	35.034.908,00	34.557.230,00	(477.678,00)	98,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.034.908,00	34.557.230,00	(477.678,00)	98,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.034.908,00	34.557.230,00	(477.678,00)	98,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0011		PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	44.302.850,00	29.438.785,00	(14.864.065,00)	66,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	44.302.850,00	29.438.785,00	(14.864.065,00)	66,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.302.850,00	29.438.785,00	(14.864.065,00)	66,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	574.265.500,00	522.491.469,00	(51.774.031,00)	90,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0002		REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	31.722.809,00	29.147.316,00	(2.575.493,00)	91,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.022.809,00	28.325.916,00	(1.696.893,00)	94,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.022.809,00	28.325.916,00	(1.696.893,00)	94,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.700.000,00	821.400,00	(878.600,00)	48,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.700.000,00	821.400,00	(878.600,00)	48,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0003		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	132.985.047,00	121.377.474,00	(11.607.573,00)	91,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	132.985.047,00	121.377.474,00	(11.607.573,00)	91,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.985.047,00	121.377.474,00	(11.607.573,00)	91,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	159.781.348,00	155.325.791,00	(4.455.557,00)	97,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	159.781.348,00	155.325.791,00	(4.455.557,00)	97,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.781.348,00	155.325.791,00	(4.455.557,00)	97,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	164.185.306,00	145.204.142,00	(18.981.164,00)	88,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	161.370.506,00	142.902.002,00	(18.468.504,00)	88,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.370.506,00	142.902.002,00	(18.468.504,00)	88,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0005	5.2	BELANJA MODAL	2.814.800,00	2.302.140,00	(512.660,00)	81,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.814.800,00	2.302.140,00	(512.660,00)	81,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0011		PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	85.590.990,00	71.436.746,00	(14.154.244,00)	83,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	85.590.990,00	71.436.746,00	(14.154.244,00)	83,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.590.990,00	71.436.746,00	(14.154.244,00)	83,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	288.650.292.704,00	275.809.076.755,00	(12.841.215.949,00)	95,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	273.895.412.700,00	264.018.747.563,00	(9.876.665.137,00)	96,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	273.895.412.700,00	264.018.747.563,00	(9.876.665.137,00)	96,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	273.895.412.700,00	264.018.747.563,00	(9.876.665.137,00)	96,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	2.964.550.812,00	0,00	(2.964.550.812,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.964.550.812,00	0,00	(2.964.550.812,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.964.550.812,00	0,00	(2.964.550.812,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04.0010		PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	11.790.329.192,00	11.790.329.192,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	11.790.329.192,00	11.790.329.192,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.790.329.192,00	11.790.329.192,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.2.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	694.663.158,00	642.963.583,00	(51.699.575,00)	92,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	694.663.158,00	642.963.583,00	(51.699.575,00)	92,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	103.385.108,00	74.189.301,00	(29.195.807,00)	71,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	103.385.108,00	74.189.301,00	(29.195.807,00)	71,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.385.108,00	74.189.301,00	(29.195.807,00)	71,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0005		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	227.406.666,00	219.926.915,00	(7.479.751,00)	96,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	227.406.666,00	219.926.915,00	(7.479.751,00)	96,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.406.666,00	219.926.915,00	(7.479.751,00)	96,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0006		INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	103.658.010,00	94.172.038,00	(9.485.972,00)	90,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	103.658.010,00	94.172.038,00	(9.485.972,00)	90,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.658.010,00	94.172.038,00	(9.485.972,00)	90,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0012		PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	221.930.645,00	217.852.366,00	(4.078.279,00)	98,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	221.930.645,00	217.852.366,00	(4.078.279,00)	98,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.930.645,00	217.852.366,00	(4.078.279,00)	98,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0013		PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	38.282.729,00	36.822.963,00	(1.459.766,00)	96,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	38.282.729,00	36.822.963,00	(1.459.766,00)	96,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.282.729,00	36.822.963,00	(1.459.766,00)	96,19	
				JUMLAH BELANJA	297.782.644.723,00	283.951.634.959,00	(13.831.009.764,00)	95,36	
				SURPLUS / (DEFISIT)	998.639.131.348,00	1.006.153.326.958,69	7.514.195.610,69	100,75	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	14.799.051.336,00	14.799.361.336,83	310.000,83	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.799.051.336,00	14.799.361.336,83	310.000,83	100,00	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.799.051.336,00	14.799.361.336,83	310.000,83	100,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.799.051.336,00	14.799.361.336,83	310.000,83	100,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	14.799.051.336,00	14.799.361.336,83	310.000,83	100,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.013.438.182.684,00	1.020.952.688.295,52	7.514.505.611,52	100,74	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Badan Pendapatan Daerah

5.02.0.00.0.00.26.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : KEUANGAN
ORGANISASI : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	101.953.011.918,00	90.482.645.292,14	(11.470.366.625,86)	88,75	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.953.011.918,00	90.482.645.292,14	(11.470.366.625,86)	88,75	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1.01	Pajak Daerah	101.353.011.918,00	89.922.705.301,98	(11.430.306.616,02)	88,72	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	600.000.000,00	559.939.990,16	(40.060.009,84)	93,32	
				JUMLAH PENDAPATAN	101.953.011.918,00	90.482.645.292,14	(11.470.366.625,86)	88,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		5	BELANJA DAERAH	10.432.293.241,00	9.184.399.692,00	(1.247.893.549,00)	88,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.992.430.539,00	6.396.575.862,00	(595.854.677,00)	91,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.013.580.420,00	5.513.253.906,00	(500.326.514,00)	91,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.863.730.420,00	5.363.459.906,00	(500.270.514,00)	91,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.863.730.420,00	5.363.459.906,00	(500.270.514,00)	91,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.863.730.420,00	5.363.459.906,00	(500.270.514,00)	91,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	149.850.000,00	149.794.000,00	(56.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	149.850.000,00	149.794.000,00	(56.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.850.000,00	149.794.000,00	(56.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	48.720.000,00	47.040.000,00	(1.680.000,00)	96,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	48.720.000,00	47.040.000,00	(1.680.000,00)	96,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.720.000,00	47.040.000,00	(1.680.000,00)	96,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.720.000,00	47.040.000,00	(1.680.000,00)	96,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	402.910.119,00	357.056.289,00	(45.853.830,00)	88,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	126.842.060,00	124.929.139,00	(1.912.921,00)	98,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	122.641.060,00	120.728.139,00	(1.912.921,00)	98,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.641.060,00	120.728.139,00	(1.912.921,00)	98,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.201.000,00	4.201.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.201.000,00	4.201.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	92.044.450,00	90.228.750,00	(1.815.700,00)	98,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	92.044.450,00	90.228.750,00	(1.815.700,00)	98,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.044.450,00	90.228.750,00	(1.815.700,00)	98,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	184.023.609,00	141.898.400,00	(42.125.209,00)	77,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	184.023.609,00	141.898.400,00	(42.125.209,00)	77,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.023.609,00	141.898.400,00	(42.125.209,00)	77,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	447.930.000,00	405.169.155,00	(42.760.845,00)	90,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.200.000,00	15.760.155,00	(3.439.845,00)	82,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	15.760.155,00	(3.439.845,00)	82,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	15.760.155,00	(3.439.845,00)	82,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	32.100.000,00	12.204.000,00	(19.896.000,00)	38,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.100.000,00	12.204.000,00	(19.896.000,00)	38,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	12.204.000,00	(19.896.000,00)	38,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	396.630.000,00	377.205.000,00	(19.425.000,00)	95,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	396.630.000,00	377.205.000,00	(19.425.000,00)	95,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.630.000,00	377.205.000,00	(19.425.000,00)	95,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	79.290.000,00	74.056.512,00	(5.233.488,00)	93,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	79.290.000,00	74.056.512,00	(5.233.488,00)	93,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	79.290.000,00	74.056.512,00	(5.233.488,00)	93,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.290.000,00	74.056.512,00	(5.233.488,00)	93,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.439.862.702,00	2.787.823.830,00	(652.038.872,00)	81,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.439.862.702,00	2.787.823.830,00	(652.038.872,00)	81,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0001		PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	67.100.215,00	66.139.278,00	(960.937,00)	98,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.100.215,00	66.139.278,00	(960.937,00)	98,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.100.215,00	66.139.278,00	(960.937,00)	98,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	166.390.040,00	109.093.633,00	(57.296.407,00)	65,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	166.390.040,00	109.093.633,00	(57.296.407,00)	65,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.390.040,00	109.093.633,00	(57.296.407,00)	65,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	398.920.456,00	356.883.604,00	(42.036.852,00)	89,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	398.920.456,00	356.883.604,00	(42.036.852,00)	89,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.920.456,00	356.883.604,00	(42.036.852,00)	89,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0006		PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	314.816.899,00	301.807.709,00	(13.009.190,00)	95,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	314.816.899,00	301.807.709,00	(13.009.190,00)	95,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.816.899,00	301.807.709,00	(13.009.190,00)	95,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0007		PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	981.161.890,00	949.445.255,00	(31.716.635,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	981.161.890,00	949.445.255,00	(31.716.635,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	981.161.890,00	949.445.255,00	(31.716.635,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0010		PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	21.806.110,00	18.319.985,00	(3.486.125,00)	84,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	21.806.110,00	18.319.985,00	(3.486.125,00)	84,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.806.110,00	18.319.985,00	(3.486.125,00)	84,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0011		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	26.796.995,00	23.949.533,00	(2.847.462,00)	89,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	26.796.995,00	23.949.533,00	(2.847.462,00)	89,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.796.995,00	23.949.533,00	(2.847.462,00)	89,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0013		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	1.462.870.097,00	962.184.833,00	(500.685.264,00)	65,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.225.941.097,00	727.468.195,00	(498.472.902,00)	59,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.01	Belanja Pegawai	310.525.000,00	249.862.500,00	(60.662.500,00)	80,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.416.097,00	477.605.695,00	(437.810.402,00)	52,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	236.929.000,00	234.716.638,00	(2.212.362,00)	99,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	236.929.000,00	234.716.638,00	(2.212.362,00)	99,07	
				JUMLAH BELANJA	10.432.293.241,00	9.184.399.692,00	(1.247.893.549,00)	88,04	
				SURPLUS / (DEFISIT)	91.520.718.677,00	81.298.245.600,14	(10.222.473.076,86)	88,83	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	91.520.718.677,00	81.298.245.600,14	(10.222.473.076,86)	88,83	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5.03.5.04.0.00.27.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : KEPEGAWAIAN
ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000		5	BELANJA DAERAH	6.149.150.612,00	5.698.866.742,00	(450.283.870,00)	92,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.869.362.722,00	4.746.867.447,00	(122.495.275,00)	97,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.254.447.837,00	4.172.560.607,00	(81.887.230,00)	98,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.134.688.207,00	4.056.453.207,00	(78.235.000,00)	98,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.134.688.207,00	4.056.453.207,00	(78.235.000,00)	98,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.134.688.207,00	4.056.453.207,00	(78.235.000,00)	98,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	119.759.630,00	116.107.400,00	(3.652.230,00)	96,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	119.759.630,00	116.107.400,00	(3.652.230,00)	96,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.759.630,00	116.107.400,00	(3.652.230,00)	96,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.240.000,00	25.500.000,00	(4.740.000,00)	84,33	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	30.240.000,00	25.500.000,00	(4.740.000,00)	84,33	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.240.000,00	25.500.000,00	(4.740.000,00)	84,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.240.000,00	25.500.000,00	(4.740.000,00)	84,33	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	252.105.705,00	245.279.232,00	(6.826.473,00)	97,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.718.565,00	30.623.474,00	(95.091,00)	99,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.718.565,00	30.623.474,00	(95.091,00)	99,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.718.565,00	30.623.474,00	(95.091,00)	99,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	29.719.140,00	29.662.100,00	(57.040,00)	99,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.719.140,00	29.662.100,00	(57.040,00)	99,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.719.140,00	29.662.100,00	(57.040,00)	99,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	191.668.000,00	184.993.658,00	(6.674.342,00)	96,52	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	191.668.000,00	184.993.658,00	(6.674.342,00)	96,52	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.668.000,00	184.993.658,00	(6.674.342,00)	96,52	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	235.704.550,00	215.145.998,00	(20.558.552,00)	91,28	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	49.487.350,00	46.342.498,00	(3.144.852,00)	93,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	49.487.350,00	46.342.498,00	(3.144.852,00)	93,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.487.350,00	46.342.498,00	(3.144.852,00)	93,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	186.217.200,00	168.803.500,00	(17.413.700,00)	90,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	337.200,00	310.000,00	(27.200,00)	91,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.200,00	310.000,00	(27.200,00)	91,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	185.880.000,00	168.493.500,00	(17.386.500,00)	90,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.880.000,00	168.493.500,00	(17.386.500,00)	90,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	40.674.630,00	32.349.080,00	(8.325.550,00)	79,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.200.000,00	10.934.080,00	(8.265.920,00)	56,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	10.934.080,00	(8.265.920,00)	56,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	10.934.080,00	(8.265.920,00)	56,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	21.474.630,00	21.415.000,00	(59.630,00)	99,72	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.474.630,00	21.415.000,00	(59.630,00)	99,72	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.474.630,00	21.415.000,00	(59.630,00)	99,72	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	56.190.000,00	56.032.530,00	(157.470,00)	99,72	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.420.000,00	38.392.530,00	(27.470,00)	99,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.420.000,00	38.392.530,00	(27.470,00)	99,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.420.000,00	38.392.530,00	(27.470,00)	99,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	17.770.000,00	17.640.000,00	(130.000,00)	99,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.770.000,00	17.640.000,00	(130.000,00)	99,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.770.000,00	17.640.000,00	(130.000,00)	99,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.3.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.279.787.890,00	951.999.295,00	(327.788.595,00)	74,39	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	204.228.000,00	193.413.480,00	(10.814.520,00)	94,70	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.01.0004		EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN	101.832.000,00	91.462.042,00	(10.369.958,00)	89,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	101.832.000,00	91.462.042,00	(10.369.958,00)	89,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.832.000,00	91.462.042,00	(10.369.958,00)	89,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	102.396.000,00	101.951.438,00	(444.562,00)	99,57	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	102.396.000,00	101.951.438,00	(444.562,00)	99,57	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.396.000,00	101.951.438,00	(444.562,00)	99,57	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	644.817.600,00	386.030.154,00	(258.787.446,00)	59,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	17.345.040,00	16.387.925,00	(957.115,00)	94,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.345.040,00	16.387.925,00	(957.115,00)	94,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.345.040,00	16.387.925,00	(957.115,00)	94,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	26.598.450,00	24.909.275,00	(1.689.175,00)	93,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.598.450,00	24.909.275,00	(1.689.175,00)	93,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.598.450,00	24.909.275,00	(1.689.175,00)	93,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	600.874.110,00	344.732.954,00	(256.141.156,00)	57,37	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	600.874.110,00	344.732.954,00	(256.141.156,00)	57,37	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.874.110,00	344.732.954,00	(256.141.156,00)	57,37	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	199.291.260,00	155.218.461,00	(44.072.799,00)	77,89	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0004		PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	80.613.820,00	67.987.466,00	(12.626.354,00)	84,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	80.613.820,00	67.987.466,00	(12.626.354,00)	84,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.613.820,00	67.987.466,00	(12.626.354,00)	84,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT	94.846.400,00	68.154.985,00	(26.691.415,00)	71,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	93.213.400,00	68.154.985,00	(25.058.415,00)	73,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.213.400,00	68.154.985,00	(25.058.415,00)	73,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.633.000,00	0,00	(1.633.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.633.000,00	0,00	(1.633.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0013		PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ASN	23.831.040,00	19.076.010,00	(4.755.030,00)	80,05	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	23.831.040,00	19.076.010,00	(4.755.030,00)	80,05	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.831.040,00	19.076.010,00	(4.755.030,00)	80,05	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	231.451.030,00	217.337.200,00	(14.113.830,00)	93,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.04.0004		PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	114.973.030,00	104.548.000,00	(10.425.030,00)	90,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	114.973.030,00	104.548.000,00	(10.425.030,00)	90,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.973.030,00	104.548.000,00	(10.425.030,00)	90,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.04.0008		PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	116.478.000,00	112.789.200,00	(3.688.800,00)	96,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	116.478.000,00	112.789.200,00	(3.688.800,00)	96,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.478.000,00	112.789.200,00	(3.688.800,00)	96,83	
				JUMLAH BELANJA	6.149.150.612,00	5.698.866.742,00	(450.283.870,00)	92,68	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.149.150.612,00)	(5.698.866.742,00)	450.283.870,00	92,68	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.149.150.612,00)	(5.698.866.742,00)	450.283.870,00	92,68	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000		5	BELANJA DAERAH	621.217.235,00	270.108.962,00	(351.108.273,00)	43,48	
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	621.217.235,00	270.108.962,00	(351.108.273,00)	43,48	
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.04.02.2.01		PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	25.870.035,00	18.408.955,00	(7.461.080,00)	71,16	
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.04.02.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.870.035,00	18.408.955,00	(7.461.080,00)	71,16	
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.870.035,00	18.408.955,00	(7.461.080,00)	71,16	
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.870.035,00	18.408.955,00	(7.461.080,00)	71,16	
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.04.02.2.02		SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	595.347.200,00	251.700.007,00	(343.647.193,00)	42,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.04.02.2.02.0007		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	595.347.200,00	251.700.007,00	(343.647.193,00)	42,28	
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	595.347.200,00	251.700.007,00	(343.647.193,00)	42,28	
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	595.347.200,00	251.700.007,00	(343.647.193,00)	42,28	
				JUMLAH BELANJA	621.217.235,00	270.108.962,00	(351.108.273,00)	43,48	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(621.217.235,00)	(270.108.962,00)	351.108.273,00	43,48	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(621.217.235,00)	(270.108.962,00)	351.108.273,00	43,48	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Inspektorat Daerah

6.01.0.00.0.00.28.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : INSPEKTORAT DAERAH
ORGANISASI : INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000		5	BELANJA DAERAH	8.413.709.648,00	8.243.992.151,00	(169.717.497,00)	97,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.266.145.052,00	7.164.181.151,00	(101.963.901,00)	98,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.494.456.305,00	6.406.638.114,00	(87.818.191,00)	98,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.371.786.305,00	6.283.968.114,00	(87.818.191,00)	98,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.371.786.305,00	6.283.968.114,00	(87.818.191,00)	98,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.371.786.305,00	6.283.968.114,00	(87.818.191,00)	98,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	122.670.000,00	122.670.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	122.670.000,00	122.670.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.670.000,00	122.670.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	193.234.029,00	188.414.880,00	(4.819.149,00)	97,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	76.680.000,00	76.644.000,00	(36.000,00)	99,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.680.000,00	76.644.000,00	(36.000,00)	99,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.680.000,00	76.644.000,00	(36.000,00)	99,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	116.554.029,00	111.770.880,00	(4.783.149,00)	95,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	116.554.029,00	111.770.880,00	(4.783.149,00)	95,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.554.029,00	111.770.880,00	(4.783.149,00)	95,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	381.531.232,00	378.372.230,00	(3.159.002,00)	99,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	230.435.522,00	227.801.000,00	(2.634.522,00)	98,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.843.422,00	53.478.500,00	(364.922,00)	99,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.843.422,00	53.478.500,00	(364.922,00)	99,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	176.592.100,00	174.322.500,00	(2.269.600,00)	98,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.592.100,00	174.322.500,00	(2.269.600,00)	98,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	38.041.040,00	38.031.500,00	(9.540,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.041.040,00	38.031.500,00	(9.540,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.041.040,00	38.031.500,00	(9.540,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.115.670,00	4.115.670,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.115.670,00	4.115.670,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.115.670,00	4.115.670,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	25.250.000,00	24.801.000,00	(449.000,00)	98,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.250.000,00	24.801.000,00	(449.000,00)	98,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	24.801.000,00	(449.000,00)	98,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	81.890.000,00	81.824.060,00	(65.940,00)	99,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	81.890.000,00	81.824.060,00	(65.940,00)	99,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.890.000,00	81.824.060,00	(65.940,00)	99,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	107.483.486,00	102.537.160,00	(4.946.326,00)	95,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.200.000,00	18.322.160,00	(877.840,00)	95,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	18.322.160,00	(877.840,00)	95,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	18.322.160,00	(877.840,00)	95,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	78.283.486,00	74.215.000,00	(4.068.486,00)	94,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	78.283.486,00	74.215.000,00	(4.068.486,00)	94,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.283.486,00	74.215.000,00	(4.068.486,00)	94,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	89.440.000,00	88.218.767,00	(1.221.233,00)	98,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	89.440.000,00	88.218.767,00	(1.221.233,00)	98,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	89.440.000,00	88.218.767,00	(1.221.233,00)	98,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.440.000,00	88.218.767,00	(1.221.233,00)	98,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	888.001.496,00	833.426.000,00	(54.575.496,00)	93,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	683.583.996,00	632.025.000,00	(51.558.996,00)	92,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	74.997.000,00	74.850.000,00	(147.000,00)	99,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.997.000,00	74.850.000,00	(147.000,00)	99,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.997.000,00	74.850.000,00	(147.000,00)	99,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	250.534.126,00	250.500.000,00	(34.126,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	250.534.126,00	250.500.000,00	(34.126,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.534.126,00	250.500.000,00	(34.126,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	62.457.000,00	61.799.000,00	(658.000,00)	98,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	62.457.000,00	61.799.000,00	(658.000,00)	98,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.457.000,00	61.799.000,00	(658.000,00)	98,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA	97.136.870,00	96.938.000,00	(198.870,00)	99,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	97.136.870,00	96.938.000,00	(198.870,00)	99,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.136.870,00	96.938.000,00	(198.870,00)	99,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0006		KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL	38.980.000,00	38.800.000,00	(180.000,00)	99,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	38.980.000,00	38.800.000,00	(180.000,00)	99,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.980.000,00	38.800.000,00	(180.000,00)	99,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	126.329.000,00	75.988.000,00	(50.341.000,00)	60,15	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	126.329.000,00	75.988.000,00	(50.341.000,00)	60,15	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.329.000,00	75.988.000,00	(50.341.000,00)	60,15	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	204.417.500,00	201.401.000,00	(3.016.500,00)	98,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	55.672.500,00	55.545.000,00	(127.500,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.672.500,00	55.545.000,00	(127.500,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.672.500,00	55.545.000,00	(127.500,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	148.745.000,00	145.856.000,00	(2.889.000,00)	98,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	148.745.000,00	145.856.000,00	(2.889.000,00)	98,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.745.000,00	145.856.000,00	(2.889.000,00)	98,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.1.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	259.563.100,00	246.385.000,00	(13.178.100,00)	94,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.01.0002		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	249.563.100,00	236.385.000,00	(13.178.100,00)	94,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	68.443.100,00	68.400.000,00	(43.100,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	68.443.100,00	68.400.000,00	(43.100,00)	99,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.443.100,00	68.400.000,00	(43.100,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	168.670.000,00	155.535.000,00	(13.135.000,00)	92,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	168.670.000,00	155.535.000,00	(13.135.000,00)	92,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.670.000,00	155.535.000,00	(13.135.000,00)	92,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.0004		PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	8.413.709.648,00	8.243.992.151,00	(169.717.497,00)	97,98	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.413.709.648,00)	(8.243.992.151,00)	169.717.497,00	97,98	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.413.709.648,00)	(8.243.992.151,00)	169.717.497,00	97,98	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Kabanjahe

7.01.0.00.0.00.29.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN KABANJAHE

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000		5	BELANJA DAERAH	10.711.397.724,00	10.349.962.793,00	(361.434.931,00)	96,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.566.773.073,00	6.330.755.537,00	(236.017.536,00)	96,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.592.813.239,00	5.361.838.613,00	(230.974.626,00)	95,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.304.305.239,00	5.073.358.613,00	(230.946.626,00)	95,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.304.305.239,00	5.073.358.613,00	(230.946.626,00)	95,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.304.305.239,00	5.073.358.613,00	(230.946.626,00)	95,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	288.508.000,00	288.480.000,00	(28.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	288.508.000,00	288.480.000,00	(28.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.508.000,00	288.480.000,00	(28.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	45.360.000,00	45.360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	45.360.000,00	45.360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.360.000,00	45.360.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.360.000,00	45.360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	93.451.834,00	93.203.560,00	(248.274,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.481.500,00	3.481.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.481.500,00	3.481.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.481.500,00	3.481.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.212.860,00	50.187.860,00	(25.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.057.060,00	42.033.860,00	(23.200,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.057.060,00	42.033.860,00	(23.200,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	8.155.800,00	8.154.000,00	(1.800,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.155.800,00	8.154.000,00	(1.800,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.393.334,00	8.371.800,00	(21.534,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.393.334,00	8.371.800,00	(21.534,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.393.334,00	8.371.800,00	(21.534,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.057.140,00	7.046.100,00	(11.040,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.057.140,00	7.046.100,00	(11.040,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.057.140,00	7.046.100,00	(11.040,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	24.307.000,00	24.116.300,00	(190.700,00)	99,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.307.000,00	24.116.300,00	(190.700,00)	99,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.307.000,00	24.116.300,00	(190.700,00)	99,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	790.578.000,00	787.110.300,00	(3.467.700,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.000.000,00	8.560.300,00	(3.439.700,00)	71,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	8.560.300,00	(3.439.700,00)	71,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	8.560.300,00	(3.439.700,00)	71,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	775.048.000,00	775.020.000,00	(28.000,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	775.048.000,00	775.020.000,00	(28.000,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	775.048.000,00	775.020.000,00	(28.000,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	44.570.000,00	43.243.064,00	(1.326.936,00)	97,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	44.570.000,00	43.243.064,00	(1.326.936,00)	97,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.570.000,00	43.243.064,00	(1.326.936,00)	97,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.570.000,00	43.243.064,00	(1.326.936,00)	97,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.796.000,00	26.581.000,00	(21.215.000,00)	55,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	20.481.000,00	20.481.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	11.856.000,00	11.856.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.856.000,00	11.856.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.856.000,00	11.856.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	27.315.000,00	6.100.000,00	(21.215.000,00)	22,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	27.315.000,00	6.100.000,00	(21.215.000,00)	22,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.315.000,00	6.100.000,00	(21.215.000,00)	22,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.315.000,00	6.100.000,00	(21.215.000,00)	22,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.067.049.501,00	3.962.847.256,00	(104.202.245,00)	97,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	16.530.000,00	16.530.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	16.530.000,00	16.530.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.530.000,00	16.530.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.530.000,00	16.530.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	4.050.519.501,00	3.946.317.256,00	(104.202.245,00)	97,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	2.859.840.000,00	2.832.922.656,00	(26.917.344,00)	99,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	294.680.000,00	288.330.000,00	(6.350.000,00)	97,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.680.000,00	288.330.000,00	(6.350.000,00)	97,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.565.160.000,00	2.544.592.656,00	(20.567.344,00)	99,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.000.000,00	167.800.000,00	(2.200.000,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.395.160.000,00	2.376.792.656,00	(18.367.344,00)	99,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	1.190.679.501,00	1.113.394.600,00	(77.284.901,00)	93,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.179.469.301,00	1.102.184.600,00	(77.284.701,00)	93,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.179.469.301,00	1.102.184.600,00	(77.284.701,00)	93,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	11.210.200,00	11.210.000,00	(200,00)	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.210.200,00	11.210.000,00	(200,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.779.150,00	25.779.000,00	(150,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	25.779.150,00	25.779.000,00	(150,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	25.779.150,00	25.779.000,00	(150,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.779.150,00	25.779.000,00	(150,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.779.150,00	25.779.000,00	(150,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01.0018		KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	10.711.397.724,00	10.349.962.793,00	(361.434.931,00)	96,63	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(10.711.397.724,00)	(10.349.962.793,00)	361.434.931,00	96,63	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.711.397.724,00)	(10.349.962.793,00)	361.434.931,00	96,63	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Berastagi

7.01.0.00.0.00.30.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN BERASTAGI

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000		5	BELANJA DAERAH	8.807.626.169,00	8.530.793.323,00	(276.832.846,00)	96,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.471.971.245,00	5.271.793.588,00	(200.177.657,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.453.885.763,00	4.296.600.205,00	(157.285.558,00)	96,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.203.823.004,00	4.058.400.205,00	(145.422.799,00)	96,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.203.823.004,00	4.058.400.205,00	(145.422.799,00)	96,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.203.823.004,00	4.058.400.205,00	(145.422.799,00)	96,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	250.062.759,00	238.200.000,00	(11.862.759,00)	95,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	250.062.759,00	238.200.000,00	(11.862.759,00)	95,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.062.759,00	238.200.000,00	(11.862.759,00)	95,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	35.200.000,00	34.440.000,00	(760.000,00)	97,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	35.200.000,00	34.440.000,00	(760.000,00)	97,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.200.000,00	34.440.000,00	(760.000,00)	97,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	34.440.000,00	(760.000,00)	97,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	95.905.482,00	93.804.498,00	(2.100.984,00)	97,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.813.090,00	5.792.670,00	(20.420,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.813.090,00	5.792.670,00	(20.420,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.813.090,00	5.792.670,00	(20.420,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	45.873.098,00	45.705.488,00	(167.610,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.873.098,00	45.705.488,00	(167.610,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.873.098,00	45.705.488,00	(167.610,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.830.494,00	4.821.226,00	(9.268,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.830.494,00	4.821.226,00	(9.268,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.830.494,00	4.821.226,00	(9.268,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.404.000,00	2.313.760,00	(90.240,00)	96,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.404.000,00	2.313.760,00	(90.240,00)	96,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.404.000,00	2.313.760,00	(90.240,00)	96,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.646.000,00	2.642.000,00	(4.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.646.000,00	2.642.000,00	(4.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.646.000,00	2.642.000,00	(4.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	34.338.800,00	32.529.354,00	(1.809.446,00)	94,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.338.800,00	32.529.354,00	(1.809.446,00)	94,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.338.800,00	32.529.354,00	(1.809.446,00)	94,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	221.000.000,00	218.615.739,00	(2.384.261,00)	98,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	90.000.000,00	88.068.639,00	(1.931.361,00)	97,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	90.000.000,00	88.068.639,00	(1.931.361,00)	97,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	88.068.639,00	(1.931.361,00)	97,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	131.000.000,00	130.547.100,00	(452.900,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	131.000.000,00	130.547.100,00	(452.900,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.000.000,00	130.547.100,00	(452.900,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	628.810.000,00	591.207.396,00	(37.602.604,00)	94,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	55.200.000,00	22.852.396,00	(32.347.604,00)	41,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.200.000,00	22.852.396,00	(32.347.604,00)	41,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	22.852.396,00	(32.347.604,00)	41,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.870.000,00	6.410.000,00	(1.460.000,00)	81,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.870.000,00	6.410.000,00	(1.460.000,00)	81,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.870.000,00	6.410.000,00	(1.460.000,00)	81,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	565.740.000,00	561.945.000,00	(3.795.000,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	565.740.000,00	561.945.000,00	(3.795.000,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.740.000,00	561.945.000,00	(3.795.000,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37.170.000,00	37.125.750,00	(44.250,00)	99,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	37.170.000,00	37.125.750,00	(44.250,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.170.000,00	37.125.750,00	(44.250,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.170.000,00	37.125.750,00	(44.250,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	116.367.045,00	96.799.560,00	(19.567.485,00)	83,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	61.247.045,00	61.149.560,00	(97.485,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	14.995.560,00	14.995.560,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.995.560,00	14.995.560,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.995.560,00	14.995.560,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	46.251.485,00	46.154.000,00	(97.485,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.251.485,00	46.154.000,00	(97.485,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.251.485,00	46.154.000,00	(97.485,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	51.620.000,00	32.150.000,00	(19.470.000,00)	62,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	51.620.000,00	32.150.000,00	(19.470.000,00)	62,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.620.000,00	32.150.000,00	(19.470.000,00)	62,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.620.000,00	32.150.000,00	(19.470.000,00)	62,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.03		KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.03.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.158.965.629,00	3.102.192.415,00	(56.773.214,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	3.158.965.629,00	3.102.192.415,00	(56.773.214,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	3.000.000.000,00	2.977.838.000,00	(22.162.000,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	146.640.000,00	146.640.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.640.000,00	146.640.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.853.360.000,00	2.831.198.000,00	(22.162.000,00)	99,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.853.360.000,00	2.831.198.000,00	(22.162.000,00)	99,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	158.965.629,00	124.354.415,00	(34.611.214,00)	78,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	158.965.629,00	124.354.415,00	(34.611.214,00)	78,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.965.629,00	124.354.415,00	(34.611.214,00)	78,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.322.250,00	60.007.760,00	(314.490,00)	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	60.322.250,00	60.007.760,00	(314.490,00)	99,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	60.322.250,00	60.007.760,00	(314.490,00)	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.322.250,00	60.007.760,00	(314.490,00)	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.322.250,00	60.007.760,00	(314.490,00)	99,48	
				JUMLAH BELANJA	8.807.626.169,00	8.530.793.323,00	(276.832.846,00)	96,86	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.807.626.169,00)	(8.530.793.323,00)	276.832.846,00	96,86	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.807.626.169,00)	(8.530.793.323,00)	276.832.846,00	96,86	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Barusjahe

7.01.0.00.0.00.31.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN BARUSJAHE

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000		5	BELANJA DAERAH	2.635.314.926,00	2.573.902.879,00	(61.412.047,00)	97,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.553.478.201,00	2.492.104.129,00	(61.374.072,00)	97,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.340.780.148,00	2.279.825.997,00	(60.954.151,00)	97,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.295.858.628,00	2.234.945.997,00	(60.912.631,00)	97,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.295.858.628,00	2.234.945.997,00	(60.912.631,00)	97,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.295.858.628,00	2.234.945.997,00	(60.912.631,00)	97,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	44.921.520,00	44.880.000,00	(41.520,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.921.520,00	44.880.000,00	(41.520,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.921.520,00	44.880.000,00	(41.520,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	51.517.969,00	51.271.632,00	(246.337,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.258.998,00	1.258.998,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.258.998,00	1.258.998,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.258.998,00	1.258.998,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.552.090,00	12.511.900,00	(40.190,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.552.090,00	12.511.900,00	(40.190,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.552.090,00	12.511.900,00	(40.190,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	9.642.841,00	9.635.600,00	(7.241,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.642.841,00	9.635.600,00	(7.241,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.642.841,00	9.635.600,00	(7.241,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.774.040,00	3.615.650,00	(158.390,00)	95,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.774.040,00	3.615.650,00	(158.390,00)	95,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.774.040,00	3.615.650,00	(158.390,00)	95,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	24.290.000,00	24.249.484,00	(40.516,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.290.000,00	24.249.484,00	(40.516,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.290.000,00	24.249.484,00	(40.516,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	16.114.084,00	16.095.000,00	(19.084,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.114.084,00	16.095.000,00	(19.084,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	16.114.084,00	16.095.000,00	(19.084,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.114.084,00	16.095.000,00	(19.084,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	91.436.000,00	91.281.500,00	(154.500,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.663.500,00	14.561.500,00	(102.000,00)	99,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.663.500,00	14.561.500,00	(102.000,00)	99,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.663.500,00	14.561.500,00	(102.000,00)	99,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	75.352.500,00	75.300.000,00	(52.500,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.352.500,00	75.300.000,00	(52.500,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.352.500,00	75.300.000,00	(52.500,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.662.900,00	43.661.000,00	(1.900,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	19.038.900,00	19.037.000,00	(1.900,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	8.798.900,00	8.797.000,00	(1.900,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.798.900,00	8.797.000,00	(1.900,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.798.900,00	8.797.000,00	(1.900,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	24.624.000,00	24.624.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	24.624.000,00	24.624.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.624.000,00	24.624.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.624.000,00	24.624.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.146.950,00	5.146.000,00	(950,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	5.146.950,00	5.146.000,00	(950,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	5.146.950,00	5.146.000,00	(950,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.146.950,00	5.146.000,00	(950,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.146.950,00	5.146.000,00	(950,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.743.925,00	29.708.800,00	(35.125,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	29.743.925,00	29.708.800,00	(35.125,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	29.743.925,00	29.708.800,00	(35.125,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.743.925,00	29.708.800,00	(35.125,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.743.925,00	29.708.800,00	(35.125,00)	99,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.282.950,00	3.282.950,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.282.950,00	3.282.950,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	1.746.950,00	1.746.950,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.746.950,00	1.746.950,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.746.950,00	1.746.950,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.635.314.926,00	2.573.902.879,00	(61.412.047,00)	97,67	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.635.314.926,00)	(2.573.902.879,00)	61.412.047,00	97,67	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.635.314.926,00)	(2.573.902.879,00)	61.412.047,00	97,67	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Tiga Panah

7.01.0.00.0.00.32.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN TIGA PANAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000		5	BELANJA DAERAH	2.970.308.213,00	2.853.567.225,00	(116.740.988,00)	96,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.799.386.073,00	2.695.183.225,00	(104.202.848,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.523.464.067,00	2.427.909.571,00	(95.554.496,00)	96,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.480.984.067,00	2.385.429.571,00	(95.554.496,00)	96,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.480.984.067,00	2.385.429.571,00	(95.554.496,00)	96,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.480.984.067,00	2.385.429.571,00	(95.554.496,00)	96,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	35.330.720,00	35.310.000,00	(20.720,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	35.330.720,00	35.310.000,00	(20.720,00)	99,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.330.720,00	35.310.000,00	(20.720,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.330.720,00	35.310.000,00	(20.720,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	52.484.911,00	52.099.904,00	(385.007,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.144.670,00	1.144.670,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.144.670,00	1.144.670,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.144.670,00	1.144.670,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.338.295,00	12.129.850,00	(208.445,00)	98,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.338.295,00	12.129.850,00	(208.445,00)	98,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.338.295,00	12.129.850,00	(208.445,00)	98,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.006.426,00	3.992.600,00	(13.826,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.006.426,00	3.992.600,00	(13.826,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.006.426,00	3.992.600,00	(13.826,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.445.520,00	2.437.000,00	(8.520,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.445.520,00	2.437.000,00	(8.520,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.445.520,00	2.437.000,00	(8.520,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	32.550.000,00	32.395.784,00	(154.216,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	32.550.000,00	32.395.784,00	(154.216,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.550.000,00	32.395.784,00	(154.216,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	31.467.000,00	30.300.000,00	(1.167.000,00)	96,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	31.467.000,00	30.300.000,00	(1.167.000,00)	96,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	31.467.000,00	30.300.000,00	(1.167.000,00)	96,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.467.000,00	30.300.000,00	(1.167.000,00)	96,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	44.020.000,00	36.948.150,00	(7.071.850,00)	83,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	11.500.000,00	8.223.150,00	(3.276.850,00)	71,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	8.223.150,00	(3.276.850,00)	71,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	8.223.150,00	(3.276.850,00)	71,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	29.760.000,00	25.965.000,00	(3.795.000,00)	87,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.760.000,00	25.965.000,00	(3.795.000,00)	87,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.760.000,00	25.965.000,00	(3.795.000,00)	87,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	112.619.375,00	112.615.600,00	(3.775,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	45.804.906,00	45.803.600,00	(1.306,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.804.906,00	45.803.600,00	(1.306,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.804.906,00	45.803.600,00	(1.306,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	66.814.469,00	66.812.000,00	(2.469,00)	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	66.814.469,00	66.812.000,00	(2.469,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.814.469,00	66.812.000,00	(2.469,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.604.200,00	87.218.000,00	(1.386.200,00)	98,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	48.604.200,00	47.218.000,00	(1.386.200,00)	97,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	23.886.200,00	23.810.000,00	(76.200,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.886.200,00	23.810.000,00	(76.200,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.886.200,00	23.810.000,00	(76.200,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	24.718.000,00	23.408.000,00	(1.310.000,00)	94,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.718.000,00	23.408.000,00	(1.310.000,00)	94,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.718.000,00	23.408.000,00	(1.310.000,00)	94,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.554.060,00	7.550.000,00	(4.060,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	7.554.060,00	7.550.000,00	(4.060,00)	99,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	7.554.060,00	7.550.000,00	(4.060,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.554.060,00	7.550.000,00	(4.060,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.554.060,00	7.550.000,00	(4.060,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.950.200,00	10.357.000,00	(593.200,00)	94,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.950.200,00	10.357.000,00	(593.200,00)	94,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	10.950.200,00	10.357.000,00	(593.200,00)	94,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.950.200,00	10.357.000,00	(593.200,00)	94,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.950.200,00	10.357.000,00	(593.200,00)	94,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.913.680,00	44.359.000,00	(10.554.680,00)	80,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	54.913.680,00	44.359.000,00	(10.554.680,00)	80,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	54.913.680,00	44.359.000,00	(10.554.680,00)	80,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.913.680,00	44.359.000,00	(10.554.680,00)	80,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.913.680,00	44.359.000,00	(10.554.680,00)	80,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.970.308.213,00	2.853.567.225,00	(116.740.988,00)	96,07	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.970.308.213,00)	(2.853.567.225,00)	116.740.988,00	96,07	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.970.308.213,00)	(2.853.567.225,00)	116.740.988,00	96,07	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Merek

7.01.0.00.0.00.33.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN MEREK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000		5	BELANJA DAERAH	2.864.877.387,00	2.773.538.544,00	(91.338.843,00)	96,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.734.695.387,00	2.645.871.544,00	(88.823.843,00)	96,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.512.946.949,00	2.441.555.295,00	(71.391.654,00)	97,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.461.186.949,00	2.389.795.295,00	(71.391.654,00)	97,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.461.186.949,00	2.389.795.295,00	(71.391.654,00)	97,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.461.186.949,00	2.389.795.295,00	(71.391.654,00)	97,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	51.760.000,00	51.760.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.760.000,00	51.760.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.760.000,00	51.760.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.496.538,00	76.298.649,00	(4.197.889,00)	94,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.974.995,00	1.974.995,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.974.995,00	1.974.995,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.974.995,00	1.974.995,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	38.240.501,00	34.204.340,00	(4.036.161,00)	89,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.240.501,00	34.204.340,00	(4.036.161,00)	89,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.240.501,00	34.204.340,00	(4.036.161,00)	89,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.042.588,00	2.988.680,00	(53.908,00)	98,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.042.588,00	2.988.680,00	(53.908,00)	98,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.042.588,00	2.988.680,00	(53.908,00)	98,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.051.954,00	3.051.954,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.051.954,00	3.051.954,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.051.954,00	3.051.954,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	34.186.500,00	34.078.680,00	(107.820,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.186.500,00	34.078.680,00	(107.820,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.186.500,00	34.078.680,00	(107.820,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	20.641.900,00	16.622.600,00	(4.019.300,00)	80,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.641.900,00	16.622.600,00	(4.019.300,00)	80,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	344.700,00	344.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.700,00	344.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	20.297.200,00	16.277.900,00	(4.019.300,00)	80,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.297.200,00	16.277.900,00	(4.019.300,00)	80,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	65.300.000,00	56.085.000,00	(9.215.000,00)	85,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.300.000,00	7.200.000,00	(100.000,00)	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.300.000,00	7.200.000,00	(100.000,00)	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.200.000,00	(100.000,00)	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.840.000,00	0,00	(2.840.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.840.000,00	0,00	(2.840.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	0,00	(2.840.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	55.160.000,00	48.885.000,00	(6.275.000,00)	88,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	55.160.000,00	48.885.000,00	(6.275.000,00)	88,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.160.000,00	48.885.000,00	(6.275.000,00)	88,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.998.000,00	75.483.000,00	(2.515.000,00)	96,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	49.526.000,00	47.011.000,00	(2.515.000,00)	94,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	18.226.000,00	16.691.000,00	(1.535.000,00)	91,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.226.000,00	16.691.000,00	(1.535.000,00)	91,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.226.000,00	16.691.000,00	(1.535.000,00)	91,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	31.300.000,00	30.320.000,00	(980.000,00)	96,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.300.000,00	30.320.000,00	(980.000,00)	96,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.300.000,00	30.320.000,00	(980.000,00)	96,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	28.472.000,00	28.472.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	28.472.000,00	28.472.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	28.472.000,00	28.472.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.472.000,00	28.472.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.464.000,00	48.464.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	48.464.000,00	48.464.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	48.464.000,00	48.464.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.464.000,00	48.464.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.464.000,00	48.464.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.864.877.387,00	2.773.538.544,00	(91.338.843,00)	96,81	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.864.877.387,00)	(2.773.538.544,00)	91.338.843,00	96,81	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.864.877.387,00)	(2.773.538.544,00)	91.338.843,00	96,81	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Munte

7.01.0.00.0.00.34.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN MUNTE

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000		5	BELANJA DAERAH	2.318.366.276,00	2.270.686.609,00	(47.679.667,00)	97,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.175.073.906,00	2.131.048.609,00	(44.025.297,00)	97,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.965.165.065,00	1.925.868.661,00	(39.296.404,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.918.537.065,00	1.879.888.661,00	(38.648.404,00)	97,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.918.537.065,00	1.879.888.661,00	(38.648.404,00)	97,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.918.537.065,00	1.879.888.661,00	(38.648.404,00)	97,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	46.628.000,00	45.980.000,00	(648.000,00)	98,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.628.000,00	45.980.000,00	(648.000,00)	98,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.628.000,00	45.980.000,00	(648.000,00)	98,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	75.539.261,00	74.169.950,00	(1.369.311,00)	98,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	2.975.000,00	(25.000,00)	99,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.975.000,00	(25.000,00)	99,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.975.000,00	(25.000,00)	99,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.324.261,00	29.158.700,00	(1.165.561,00)	96,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.324.261,00	29.158.700,00	(1.165.561,00)	96,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.324.261,00	29.158.700,00	(1.165.561,00)	96,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.000.000,00	7.988.500,00	(11.500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.988.500,00	(11.500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.988.500,00	(11.500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.800.000,00	4.657.750,00	(142.250,00)	97,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.657.750,00	(142.250,00)	97,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.657.750,00	(142.250,00)	97,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	29.415.000,00	29.390.000,00	(25.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.415.000,00	29.390.000,00	(25.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.415.000,00	29.390.000,00	(25.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	20.969.580,00	20.099.998,00	(869.582,00)	95,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.969.580,00	20.099.998,00	(869.582,00)	95,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	811.080,00	0,00	(811.080,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	811.080,00	0,00	(811.080,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	20.158.500,00	20.099.998,00	(58.502,00)	99,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.158.500,00	20.099.998,00	(58.502,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	61.930.000,00	59.440.000,00	(2.490.000,00)	95,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.000.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	80,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	80,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	80,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.990.000,00	4.900.000,00	(90.000,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.990.000,00	4.900.000,00	(90.000,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	4.900.000,00	(90.000,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	44.940.000,00	44.940.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.940.000,00	44.940.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.940.000,00	44.940.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.510.000,00	35.510.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	35.510.000,00	35.510.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.510.000,00	35.510.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.510.000,00	35.510.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.880.600,00	77.468.000,00	(3.412.600,00)	95,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	45.752.600,00	45.606.000,00	(146.600,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	20.242.000,00	20.160.000,00	(82.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.242.000,00	20.160.000,00	(82.000,00)	99,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.242.000,00	20.160.000,00	(82.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	25.510.600,00	25.446.000,00	(64.600,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.510.600,00	25.446.000,00	(64.600,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.510.600,00	25.446.000,00	(64.600,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	35.128.000,00	31.862.000,00	(3.266.000,00)	90,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	35.128.000,00	31.862.000,00	(3.266.000,00)	90,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.128.000,00	31.862.000,00	(3.266.000,00)	90,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.128.000,00	31.862.000,00	(3.266.000,00)	90,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.342.400,00	11.294.000,00	(48.400,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	11.342.400,00	11.294.000,00	(48.400,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	5.725.400,00	5.700.000,00	(25.400,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.725.400,00	5.700.000,00	(25.400,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.725.400,00	5.700.000,00	(25.400,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	5.617.000,00	5.594.000,00	(23.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.617.000,00	5.594.000,00	(23.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.617.000,00	5.594.000,00	(23.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.160.800,00	13.100.000,00	(60.800,00)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.031.600,00	10.980.000,00	(51.600,00)	99,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	11.031.600,00	10.980.000,00	(51.600,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.031.600,00	10.980.000,00	(51.600,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.031.600,00	10.980.000,00	(51.600,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	2.129.200,00	2.120.000,00	(9.200,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.129.200,00	2.120.000,00	(9.200,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.129.200,00	2.120.000,00	(9.200,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.129.200,00	2.120.000,00	(9.200,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.774.570,00	30.724.000,00	(50.570,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	30.774.570,00	30.724.000,00	(50.570,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	30.774.570,00	30.724.000,00	(50.570,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.774.570,00	30.724.000,00	(50.570,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.774.570,00	30.724.000,00	(50.570,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.134.000,00	7.052.000,00	(82.000,00)	98,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.134.000,00	7.052.000,00	(82.000,00)	98,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	4.220.000,00	4.210.000,00	(10.000,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.220.000,00	4.210.000,00	(10.000,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	4.210.000,00	(10.000,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0018		KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN	2.914.000,00	2.842.000,00	(72.000,00)	97,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.914.000,00	2.842.000,00	(72.000,00)	97,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.914.000,00	2.842.000,00	(72.000,00)	97,53	
				JUMLAH BELANJA	2.318.366.276,00	2.270.686.609,00	(47.679.667,00)	97,94	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.318.366.276,00)	(2.270.686.609,00)	47.679.667,00	97,94	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.318.366.276,00)	(2.270.686.609,00)	47.679.667,00	97,94	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Juhar

7.01.0.00.0.00.35.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN JUHAR

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000		5	BELANJA DAERAH	2.766.744.081,00	2.614.880.013,00	(151.864.068,00)	94,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.669.073.091,00	2.518.841.283,00	(150.231.808,00)	94,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.424.271.942,00	2.286.042.389,00	(138.229.553,00)	94,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.379.352.942,00	2.241.162.389,00	(138.190.553,00)	94,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.379.352.942,00	2.241.162.389,00	(138.190.553,00)	94,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.379.352.942,00	2.241.162.389,00	(138.190.553,00)	94,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	44.919.000,00	44.880.000,00	(39.000,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.919.000,00	44.880.000,00	(39.000,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.919.000,00	44.880.000,00	(39.000,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	59.852.249,00	59.689.578,00	(162.671,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.306.335,00	1.305.600,00	(735,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.306.335,00	1.305.600,00	(735,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.306.335,00	1.305.600,00	(735,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.480.408,00	14.393.865,00	(86.543,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.480.408,00	14.393.865,00	(86.543,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.480.408,00	14.393.865,00	(86.543,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.381.380,00	3.358.200,00	(23.180,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.381.380,00	3.358.200,00	(23.180,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.381.380,00	3.358.200,00	(23.180,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.444.126,00	3.439.913,00	(4.213,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.444.126,00	3.439.913,00	(4.213,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.444.126,00	3.439.913,00	(4.213,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	37.240.000,00	37.192.000,00	(48.000,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	37.240.000,00	37.192.000,00	(48.000,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.240.000,00	37.192.000,00	(48.000,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	23.659.900,00	22.798.220,00	(861.680,00)	96,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	23.659.900,00	22.798.220,00	(861.680,00)	96,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	861.680,00	0,00	(861.680,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	861.680,00	0,00	(861.680,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	22.798.220,00	22.798.220,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.798.220,00	22.798.220,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	104.299.000,00	93.321.217,00	(10.977.783,00)	89,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.000.000,00	9.011.217,00	(2.988.783,00)	75,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	9.011.217,00	(2.988.783,00)	75,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	9.011.217,00	(2.988.783,00)	75,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	90.879.000,00	82.890.000,00	(7.989.000,00)	91,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	90.879.000,00	82.890.000,00	(7.989.000,00)	91,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.879.000,00	82.890.000,00	(7.989.000,00)	91,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.470.000,00	33.469.879,00	(121,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.470.000,00	33.469.879,00	(121,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.470.000,00	33.469.879,00	(121,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.470.000,00	33.469.879,00	(121,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.451.530,00	67.055.000,00	(1.396.530,00)	97,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	34.695.230,00	33.495.000,00	(1.200.230,00)	96,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	14.783.140,00	14.530.000,00	(253.140,00)	98,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.783.140,00	14.530.000,00	(253.140,00)	98,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.783.140,00	14.530.000,00	(253.140,00)	98,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	19.912.090,00	18.965.000,00	(947.090,00)	95,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.912.090,00	18.965.000,00	(947.090,00)	95,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.912.090,00	18.965.000,00	(947.090,00)	95,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	33.756.300,00	33.560.000,00	(196.300,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	33.756.300,00	33.560.000,00	(196.300,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.756.300,00	33.560.000,00	(196.300,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.756.300,00	33.560.000,00	(196.300,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.235.730,00	3.000.000,00	(235.730,00)	92,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.235.730,00	3.000.000,00	(235.730,00)	92,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	3.235.730,00	3.000.000,00	(235.730,00)	92,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.235.730,00	3.000.000,00	(235.730,00)	92,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.235.730,00	3.000.000,00	(235.730,00)	92,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.983.730,00	25.983.730,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	25.983.730,00	25.983.730,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	25.983.730,00	25.983.730,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.983.730,00	25.983.730,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.983.730,00	25.983.730,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.766.744.081,00	2.614.880.013,00	(151.864.068,00)	94,51	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.766.744.081,00)	(2.614.880.013,00)	151.864.068,00	94,51	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.766.744.081,00)	(2.614.880.013,00)	151.864.068,00	94,51	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Tiga Binanga

7.01.0.00.0.00.36.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN TIGA BINANGA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000		5	BELANJA DAERAH	3.525.869.367,00	3.405.292.470,00	(120.576.897,00)	96,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.589.083.557,00	2.487.517.013,00	(101.566.544,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.211.197.898,00	2.109.950.543,00	(101.247.355,00)	95,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.102.597.898,00	2.001.590.543,00	(101.007.355,00)	95,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.102.597.898,00	2.001.590.543,00	(101.007.355,00)	95,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.102.597.898,00	2.001.590.543,00	(101.007.355,00)	95,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	108.600.000,00	108.360.000,00	(240.000,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	108.600.000,00	108.360.000,00	(240.000,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.600.000,00	108.360.000,00	(240.000,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	62.860.939,00	62.762.804,00	(98.135,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.554.870,00	1.527.320,00	(27.550,00)	98,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.554.870,00	1.527.320,00	(27.550,00)	98,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.554.870,00	1.527.320,00	(27.550,00)	98,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.490.715,00	31.447.130,00	(43.585,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.490.715,00	31.447.130,00	(43.585,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.490.715,00	31.447.130,00	(43.585,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.807.870,00	2.807.870,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.807.870,00	2.807.870,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.807.870,00	2.807.870,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.231.000,00	4.231.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.231.000,00	4.231.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.231.000,00	4.231.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	22.776.484,00	22.749.484,00	(27.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	22.776.484,00	22.749.484,00	(27.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.776.484,00	22.749.484,00	(27.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	223.220.000,00	222.998.946,00	(221.054,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	28.000.000,00	27.778.946,00	(221.054,00)	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	27.778.946,00	(221.054,00)	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.778.946,00	(221.054,00)	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	187.920.000,00	187.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	187.920.000,00	187.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.920.000,00	187.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.284.720,00	68.284.720,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	46.940.000,00	46.940.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.940.000,00	46.940.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.940.000,00	46.940.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	21.344.720,00	21.344.720,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.394.600,00	11.394.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.394.600,00	11.394.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	9.950.120,00	9.950.120,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.950.120,00	9.950.120,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.128.700,00	62.444.055,00	(9.684.645,00)	86,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	49.908.700,00	49.854.055,00	(54.645,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	22.329.420,00	22.325.575,00	(3.845,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.329.420,00	22.325.575,00	(3.845,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.329.420,00	22.325.575,00	(3.845,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	27.579.280,00	27.528.480,00	(50.800,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.579.280,00	27.528.480,00	(50.800,00)	99,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.579.280,00	27.528.480,00	(50.800,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	22.220.000,00	12.590.000,00	(9.630.000,00)	56,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	22.220.000,00	12.590.000,00	(9.630.000,00)	56,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.220.000,00	12.590.000,00	(9.630.000,00)	56,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.220.000,00	12.590.000,00	(9.630.000,00)	56,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	808.500.000,00	799.319.642,00	(9.180.358,00)	98,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	808.500.000,00	799.319.642,00	(9.180.358,00)	98,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	711.332.340,00	710.709.642,00	(622.698,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.484.886,00	23.484.886,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.484.886,00	23.484.886,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	687.847.454,00	687.224.756,00	(622.698,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	687.847.454,00	687.224.756,00	(622.698,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	97.167.660,00	88.610.000,00	(8.557.660,00)	91,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	97.167.660,00	88.610.000,00	(8.557.660,00)	91,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.167.660,00	88.610.000,00	(8.557.660,00)	91,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.787.360,00	16.708.760,00	(78.600,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.787.360,00	16.708.760,00	(78.600,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	16.787.360,00	16.708.760,00	(78.600,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.787.360,00	16.708.760,00	(78.600,00)	99,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.787.360,00	16.708.760,00	(78.600,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.369.750,00	39.303.000,00	(66.750,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	39.369.750,00	39.303.000,00	(66.750,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	39.369.750,00	39.303.000,00	(66.750,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.369.750,00	39.303.000,00	(66.750,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.369.750,00	39.303.000,00	(66.750,00)	99,83	
				JUMLAH BELANJA	3.525.869.367,00	3.405.292.470,00	(120.576.897,00)	96,58	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.525.869.367,00)	(3.405.292.470,00)	120.576.897,00	96,58	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.525.869.367,00)	(3.405.292.470,00)	120.576.897,00	96,58	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Lau Baleng

7.01.0.00.0.00.37.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN LAU BALENG

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000		5	BELANJA DAERAH	2.286.540.041,00	2.163.879.216,00	(122.660.825,00)	94,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.177.589.641,00	2.055.926.906,00	(121.662.735,00)	94,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.955.088.391,00	1.838.802.994,00	(116.285.397,00)	94,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.912.608.391,00	1.796.322.994,00	(116.285.397,00)	93,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.912.608.391,00	1.796.322.994,00	(116.285.397,00)	93,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.912.608.391,00	1.796.322.994,00	(116.285.397,00)	93,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	58.029.050,00	53.989.530,00	(4.039.520,00)	93,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.157.860,00	2.157.860,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.157.860,00	2.157.860,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.157.860,00	2.157.860,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.804.370,00	13.733.200,00	(71.170,00)	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.804.370,00	13.733.200,00	(71.170,00)	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.804.370,00	13.733.200,00	(71.170,00)	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.359.740,00	10.330.400,00	(29.340,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.991.720,00	7.962.400,00	(29.320,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.991.720,00	7.962.400,00	(29.320,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	2.368.020,00	2.368.000,00	(20,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.368.020,00	2.368.000,00	(20,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.859.080,00	2.853.000,00	(6.080,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.859.080,00	2.853.000,00	(6.080,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.859.080,00	2.853.000,00	(6.080,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	28.848.000,00	24.915.070,00	(3.932.930,00)	86,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	28.848.000,00	24.915.070,00	(3.932.930,00)	86,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.848.000,00	24.915.070,00	(3.932.930,00)	86,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	56.517.200,00	55.567.932,00	(949.268,00)	98,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	56.517.200,00	55.567.932,00	(949.268,00)	98,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	554.600,00	0,00	(554.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	554.600,00	0,00	(554.600,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	55.962.600,00	55.567.932,00	(394.668,00)	99,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.962.600,00	55.567.932,00	(394.668,00)	99,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	61.045.000,00	60.656.450,00	(388.550,00)	99,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.000.000,00	11.611.450,00	(388.550,00)	96,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.611.450,00	(388.550,00)	96,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.611.450,00	(388.550,00)	96,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	46.205.000,00	46.205.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	46.205.000,00	46.205.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.205.000,00	46.205.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.631.190,00	56.602.000,00	(29.190,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	32.349.190,00	32.320.000,00	(29.190,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	11.613.950,00	11.613.000,00	(950,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.613.950,00	11.613.000,00	(950,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.613.950,00	11.613.000,00	(950,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	20.735.240,00	20.707.000,00	(28.240,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.735.240,00	20.707.000,00	(28.240,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.735.240,00	20.707.000,00	(28.240,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	24.282.000,00	24.282.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	24.282.000,00	24.282.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.282.000,00	24.282.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.282.000,00	24.282.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.565.700,00	8.890.000,00	(675.700,00)	92,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	9.565.700,00	8.890.000,00	(675.700,00)	92,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	9.565.700,00	8.890.000,00	(675.700,00)	92,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.565.700,00	8.890.000,00	(675.700,00)	92,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.565.700,00	8.890.000,00	(675.700,00)	92,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.373.300,00	6.360.000,00	(13.300,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	6.373.300,00	6.360.000,00	(13.300,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.373.300,00	6.360.000,00	(13.300,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.373.300,00	6.360.000,00	(13.300,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.373.300,00	6.360.000,00	(13.300,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.513.210,00	35.279.510,00	(233.700,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	35.513.210,00	35.279.510,00	(233.700,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	35.513.210,00	35.279.510,00	(233.700,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.513.210,00	35.279.510,00	(233.700,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.513.210,00	35.279.510,00	(233.700,00)	99,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	867.000,00	820.800,00	(46.200,00)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	867.000,00	820.800,00	(46.200,00)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	867.000,00	820.800,00	(46.200,00)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	867.000,00	820.800,00	(46.200,00)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	867.000,00	820.800,00	(46.200,00)	94,67	
				JUMLAH BELANJA	2.286.540.041,00	2.163.879.216,00	(122.660.825,00)	94,64	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.286.540.041,00)	(2.163.879.216,00)	122.660.825,00	94,64	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.286.540.041,00)	(2.163.879.216,00)	122.660.825,00	94,64	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

RANTONIUS GINTING

Kecamatan Mardingding

7.01.0.00.0.00.38.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN MARDINGDING

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000		5	BELANJA DAERAH	2.154.435.608,00	2.038.109.872,00	(116.325.736,00)	94,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.043.670.208,00	1.930.387.592,00	(113.282.616,00)	94,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.825.431.005,00	1.719.108.353,00	(106.322.652,00)	94,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.785.450.005,00	1.679.148.353,00	(106.301.652,00)	94,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.785.450.005,00	1.679.148.353,00	(106.301.652,00)	94,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.785.450.005,00	1.679.148.353,00	(106.301.652,00)	94,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	39.981.000,00	39.960.000,00	(21.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.981.000,00	39.960.000,00	(21.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.981.000,00	39.960.000,00	(21.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	54.848.803,00	54.717.392,00	(131.411,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.268.790,00	2.268.790,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.268.790,00	2.268.790,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.268.790,00	2.268.790,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.309.803,00	15.309.803,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.309.803,00	15.309.803,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.309.803,00	15.309.803,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.818.010,00	8.804.399,00	(13.611,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.818.010,00	8.804.399,00	(13.611,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.818.010,00	8.804.399,00	(13.611,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	355.200,00	355.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	355.200,00	355.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.200,00	355.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	28.097.000,00	27.979.200,00	(117.800,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	28.097.000,00	27.979.200,00	(117.800,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.097.000,00	27.979.200,00	(117.800,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	67.658.800,00	65.070.150,00	(2.588.650,00)	96,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	15.000.000,00	13.264.500,00	(1.735.500,00)	88,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	13.264.500,00	(1.735.500,00)	88,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	13.264.500,00	(1.735.500,00)	88,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	52.658.800,00	51.805.650,00	(853.150,00)	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	52.658.800,00	51.805.650,00	(853.150,00)	98,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.658.800,00	51.805.650,00	(853.150,00)	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	46.981.600,00	43.741.697,00	(3.239.903,00)	93,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.400.000,00	11.251.697,00	(3.148.303,00)	78,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	11.251.697,00	(3.148.303,00)	78,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	11.251.697,00	(3.148.303,00)	78,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.760.000,00	2.730.000,00	(30.000,00)	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.760.000,00	2.730.000,00	(30.000,00)	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.730.000,00	(30.000,00)	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	29.821.600,00	29.760.000,00	(61.600,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.821.600,00	29.760.000,00	(61.600,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.821.600,00	29.760.000,00	(61.600,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.470.000,00	33.470.000,00	(1.000.000,00)	97,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	34.470.000,00	33.470.000,00	(1.000.000,00)	97,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.470.000,00	33.470.000,00	(1.000.000,00)	97,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.470.000,00	33.470.000,00	(1.000.000,00)	97,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	71.202.840,00	68.159.720,00	(3.043.120,00)	95,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	52.596.840,00	49.553.720,00	(3.043.120,00)	94,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	12.129.470,00	12.129.470,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.129.470,00	12.129.470,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.129.470,00	12.129.470,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	40.467.370,00	37.424.250,00	(3.043.120,00)	92,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.467.370,00	37.424.250,00	(3.043.120,00)	92,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.467.370,00	37.424.250,00	(3.043.120,00)	92,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	18.606.000,00	18.606.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	18.606.000,00	18.606.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.606.000,00	18.606.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.606.000,00	18.606.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.362.560,00	34.362.560,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	34.362.560,00	34.362.560,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	34.362.560,00	34.362.560,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.362.560,00	34.362.560,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.362.560,00	34.362.560,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.154.435.608,00	2.038.109.872,00	(116.325.736,00)	94,60	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.154.435.608,00)	(2.038.109.872,00)	116.325.736,00	94,60	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.154.435.608,00)	(2.038.109.872,00)	116.325.736,00	94,60	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Payung

7.01.0.00.0.00.39.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN PAYUNG

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000		5	BELANJA DAERAH	2.000.433.994,00	1.867.056.227,00	(133.377.767,00)	93,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.929.022.840,00	1.798.292.227,00	(130.730.613,00)	93,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.743.189.968,00	1.621.341.958,00	(121.848.010,00)	93,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.703.229.968,00	1.581.381.958,00	(121.848.010,00)	92,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.703.229.968,00	1.581.381.958,00	(121.848.010,00)	92,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.703.229.968,00	1.581.381.958,00	(121.848.010,00)	92,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	39.172.872,00	38.859.080,00	(313.792,00)	99,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.383.008,00	3.330.000,00	(53.008,00)	98,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.383.008,00	3.330.000,00	(53.008,00)	98,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.383.008,00	3.330.000,00	(53.008,00)	98,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.573.734,00	8.468.000,00	(105.734,00)	98,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.573.734,00	8.468.000,00	(105.734,00)	98,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.573.734,00	8.468.000,00	(105.734,00)	98,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.906.848,00	4.855.000,00	(51.848,00)	98,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.906.848,00	4.855.000,00	(51.848,00)	98,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.906.848,00	4.855.000,00	(51.848,00)	98,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.465.282,00	1.440.000,00	(25.282,00)	98,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.465.282,00	1.440.000,00	(25.282,00)	98,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.465.282,00	1.440.000,00	(25.282,00)	98,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	20.844.000,00	20.766.080,00	(77.920,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.844.000,00	20.766.080,00	(77.920,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.844.000,00	20.766.080,00	(77.920,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	97.160.000,00	88.597.810,00	(8.562.190,00)	91,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.200.000,00	13.637.810,00	(8.562.190,00)	61,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.200.000,00	13.637.810,00	(8.562.190,00)	61,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	13.637.810,00	(8.562.190,00)	61,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	72.770.000,00	72.770.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	72.770.000,00	72.770.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.770.000,00	72.770.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	36.000.000,00	35.993.379,00	(6.621,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	36.000.000,00	35.993.379,00	(6.621,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	35.993.379,00	(6.621,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.993.379,00	(6.621,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.210.450,00	44.462.000,00	(1.748.450,00)	96,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	27.114.450,00	25.370.000,00	(1.744.450,00)	93,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	11.286.000,00	11.236.000,00	(50.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.286.000,00	11.236.000,00	(50.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.286.000,00	11.236.000,00	(50.000,00)	99,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	15.828.450,00	14.134.000,00	(1.694.450,00)	89,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.828.450,00	14.134.000,00	(1.694.450,00)	89,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.828.450,00	14.134.000,00	(1.694.450,00)	89,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	19.096.000,00	19.092.000,00	(4.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	19.096.000,00	19.092.000,00	(4.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.096.000,00	19.092.000,00	(4.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.096.000,00	19.092.000,00	(4.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.420.704,00	19.202.000,00	(218.704,00)	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	19.420.704,00	19.202.000,00	(218.704,00)	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	19.420.704,00	19.202.000,00	(218.704,00)	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.420.704,00	19.202.000,00	(218.704,00)	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.420.704,00	19.202.000,00	(218.704,00)	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.780.000,00	5.100.000,00	(680.000,00)	88,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.780.000,00	5.100.000,00	(680.000,00)	88,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	5.780.000,00	5.100.000,00	(680.000,00)	88,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.780.000,00	5.100.000,00	(680.000,00)	88,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	5.100.000,00	(680.000,00)	88,24	
				JUMLAH BELANJA	2.000.433.994,00	1.867.056.227,00	(133.377.767,00)	93,33	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.000.433.994,00)	(1.867.056.227,00)	133.377.767,00	93,33	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.000.433.994,00)	(1.867.056.227,00)	133.377.767,00	93,33	

Kabanjahe, 24 September 2026

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Simpang Empat

7.01.0.00.0.00.40.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN SIMPANG EMPAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000		5	BELANJA DAERAH	2.959.232.309,00	2.836.766.422,00	(122.465.887,00)	95,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.850.490.989,00	2.737.164.232,00	(113.326.757,00)	96,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.555.758.233,00	2.467.935.683,00	(87.822.550,00)	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.506.038.233,00	2.418.215.683,00	(87.822.550,00)	96,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.506.038.233,00	2.418.215.683,00	(87.822.550,00)	96,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.506.038.233,00	2.418.215.683,00	(87.822.550,00)	96,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	49.720.000,00	49.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.720.000,00	49.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.720.000,00	49.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	47.040.000,00	43.680.000,00	(3.360.000,00)	92,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	47.040.000,00	43.680.000,00	(3.360.000,00)	92,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.040.000,00	43.680.000,00	(3.360.000,00)	92,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.040.000,00	43.680.000,00	(3.360.000,00)	92,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	110.202.756,00	100.830.990,00	(9.371.766,00)	91,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.500.000,00	1.493.360,00	(6.640,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.493.360,00	(6.640,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.493.360,00	(6.640,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	63.096.356,00	61.305.257,00	(1.791.099,00)	97,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.430.956,00	12.305.257,00	(125.699,00)	98,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.430.956,00	12.305.257,00	(125.699,00)	98,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	50.665.400,00	49.000.000,00	(1.665.400,00)	96,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.665.400,00	49.000.000,00	(1.665.400,00)	96,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.100.000,00	2.098.183,00	(1.817,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.098.183,00	(1.817,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.098.183,00	(1.817,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.756.400,00	6.756.190,00	(210,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.756.400,00	6.756.190,00	(210,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.756.400,00	6.756.190,00	(210,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	36.750.000,00	29.178.000,00	(7.572.000,00)	79,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	36.750.000,00	29.178.000,00	(7.572.000,00)	79,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	29.178.000,00	(7.572.000,00)	79,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	74.020.000,00	61.321.580,00	(12.698.420,00)	82,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.900.000,00	7.631.580,00	(268.420,00)	96,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.900.000,00	7.631.580,00	(268.420,00)	96,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	7.631.580,00	(268.420,00)	96,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.000.000,00	5.720.000,00	(280.000,00)	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.720.000,00	(280.000,00)	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.720.000,00	(280.000,00)	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	60.120.000,00	47.970.000,00	(12.150.000,00)	79,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.120.000,00	47.970.000,00	(12.150.000,00)	79,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.120.000,00	47.970.000,00	(12.150.000,00)	79,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	63.470.000,00	63.395.979,00	(74.021,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	33.470.000,00	33.425.179,00	(44.821,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.470.000,00	33.425.179,00	(44.821,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.470.000,00	33.425.179,00	(44.821,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	30.000.000,00	29.970.800,00	(29.200,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.970.800,00	(29.200,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.970.800,00	(29.200,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.956.600,00	53.402.470,00	(554.130,00)	98,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	23.834.600,00	23.282.470,00	(552.130,00)	97,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	13.100.000,00	12.557.520,00	(542.480,00)	95,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.100.000,00	12.557.520,00	(542.480,00)	95,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	12.557.520,00	(542.480,00)	95,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	10.734.600,00	10.724.950,00	(9.650,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.734.600,00	10.724.950,00	(9.650,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.734.600,00	10.724.950,00	(9.650,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	30.122.000,00	30.120.000,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	30.122.000,00	30.120.000,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.122.000,00	30.120.000,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.122.000,00	30.120.000,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.903.600,00	2.903.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.903.600,00	2.903.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	2.903.600,00	2.903.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.903.600,00	2.903.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.903.600,00	2.903.600,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51.881.120,00	43.296.120,00	(8.585.000,00)	83,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	51.881.120,00	43.296.120,00	(8.585.000,00)	83,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	51.881.120,00	43.296.120,00	(8.585.000,00)	83,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.881.120,00	43.296.120,00	(8.585.000,00)	83,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.881.120,00	43.296.120,00	(8.585.000,00)	83,45	
				JUMLAH BELANJA	2.959.232.309,00	2.836.766.422,00	(122.465.887,00)	95,86	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.959.232.309,00)	(2.836.766.422,00)	122.465.887,00	95,86	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.959.232.309,00)	(2.836.766.422,00)	122.465.887,00	95,86	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Kutabuluh

7.01.0.00.0.00.41.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN KUTABULUH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000		5	BELANJA DAERAH	2.275.301.155,00	2.161.397.429,00	(113.903.726,00)	94,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.152.397.343,00	2.038.591.429,00	(113.805.914,00)	94,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.872.621.166,00	1.763.479.897,00	(109.141.269,00)	94,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.830.253.366,00	1.721.119.897,00	(109.133.469,00)	94,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.830.253.366,00	1.721.119.897,00	(109.133.469,00)	94,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.830.253.366,00	1.721.119.897,00	(109.133.469,00)	94,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	42.367.800,00	42.360.000,00	(7.800,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.367.800,00	42.360.000,00	(7.800,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.367.800,00	42.360.000,00	(7.800,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15.054.537,00	14.280.000,00	(774.537,00)	94,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	15.054.537,00	14.280.000,00	(774.537,00)	94,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.054.537,00	14.280.000,00	(774.537,00)	94,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.054.537,00	14.280.000,00	(774.537,00)	94,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	72.522.540,00	71.757.050,00	(765.490,00)	98,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.405.600,00	1.402.500,00	(3.100,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.405.600,00	1.402.500,00	(3.100,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.405.600,00	1.402.500,00	(3.100,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.885.750,00	14.699.900,00	(185.850,00)	98,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.885.750,00	14.699.900,00	(185.850,00)	98,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.885.750,00	14.699.900,00	(185.850,00)	98,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.501.280,00	11.951.400,00	(549.880,00)	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.501.280,00	11.951.400,00	(549.880,00)	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.501.280,00	11.951.400,00	(549.880,00)	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.006.010,00	2.997.250,00	(8.760,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.006.010,00	2.997.250,00	(8.760,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.006.010,00	2.997.250,00	(8.760,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	40.723.900,00	40.706.000,00	(17.900,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.723.900,00	40.706.000,00	(17.900,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.723.900,00	40.706.000,00	(17.900,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	91.911.300,00	90.119.500,00	(1.791.800,00)	98,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	60.011.300,00	58.219.500,00	(1.791.800,00)	97,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	60.011.300,00	58.219.500,00	(1.791.800,00)	97,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.011.300,00	58.219.500,00	(1.791.800,00)	97,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	55.717.800,00	54.394.081,00	(1.323.719,00)	97,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.700.000,00	15.384.081,00	(1.315.919,00)	92,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.700.000,00	15.384.081,00	(1.315.919,00)	92,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	15.384.081,00	(1.315.919,00)	92,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	29.767.800,00	29.760.000,00	(7.800,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.767.800,00	29.760.000,00	(7.800,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.767.800,00	29.760.000,00	(7.800,00)	99,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	44.570.000,00	44.560.901,00	(9.099,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	44.570.000,00	44.560.901,00	(9.099,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.570.000,00	44.560.901,00	(9.099,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.570.000,00	44.560.901,00	(9.099,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.584.690,00	68.536.000,00	(48.690,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	28.484.690,00	28.436.000,00	(48.690,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	13.060.000,00	13.050.000,00	(10.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.060.000,00	13.050.000,00	(10.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.060.000,00	13.050.000,00	(10.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	15.424.690,00	15.386.000,00	(38.690,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.424.690,00	15.386.000,00	(38.690,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.424.690,00	15.386.000,00	(38.690,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.930.000,00	5.904.000,00	(26.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.930.000,00	5.904.000,00	(26.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	5.930.000,00	5.904.000,00	(26.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.930.000,00	5.904.000,00	(26.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.930.000,00	5.904.000,00	(26.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.209.122,00	34.186.000,00	(23.122,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	34.209.122,00	34.186.000,00	(23.122,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	34.209.122,00	34.186.000,00	(23.122,00)	99,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.209.122,00	34.186.000,00	(23.122,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.209.122,00	34.186.000,00	(23.122,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01.0018		KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.275.301.155,00	2.161.397.429,00	(113.903.726,00)	94,99	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.275.301.155,00)	(2.161.397.429,00)	113.903.726,00	94,99	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.275.301.155,00)	(2.161.397.429,00)	113.903.726,00	94,99	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Dolat Rayat

7.01.0.00.0.00.42.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN DOLAT RAYAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000		5	BELANJA DAERAH	2.045.249.223,00	1.991.093.224,00	(54.155.999,00)	97,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.981.854.223,00	1.928.789.024,00	(53.065.199,00)	97,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.780.960.798,00	1.728.352.514,00	(52.608.284,00)	97,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.743.400.798,00	1.690.792.514,00	(52.608.284,00)	96,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.743.400.798,00	1.690.792.514,00	(52.608.284,00)	96,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.743.400.798,00	1.690.792.514,00	(52.608.284,00)	96,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	37.560.000,00	37.560.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.560.000,00	37.560.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.560.000,00	37.560.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	32.483.425,00	32.390.425,00	(93.000,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.927.715,00	6.927.715,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.927.715,00	6.927.715,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.927.715,00	6.927.715,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.045.510,00	2.045.510,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.045.510,00	2.045.510,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.045.510,00	2.045.510,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.767.200,00	3.767.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.767.200,00	3.767.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.767.200,00	3.767.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	19.743.000,00	19.650.000,00	(93.000,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	19.743.000,00	19.650.000,00	(93.000,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.743.000,00	19.650.000,00	(93.000,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	101.340.000,00	100.976.085,00	(363.915,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.200.000,00	22.836.085,00	(363.915,00)	98,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.200.000,00	22.836.085,00	(363.915,00)	98,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	22.836.085,00	(363.915,00)	98,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.098.200,00	33.007.400,00	(1.090.800,00)	96,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	21.888.800,00	20.798.000,00	(1.090.800,00)	95,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	11.223.000,00	11.223.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.223.000,00	11.223.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.223.000,00	11.223.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	10.665.800,00	9.575.000,00	(1.090.800,00)	89,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.665.800,00	9.575.000,00	(1.090.800,00)	89,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.665.800,00	9.575.000,00	(1.090.800,00)	89,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	12.209.400,00	12.209.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	12.209.400,00	12.209.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.209.400,00	12.209.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.209.400,00	12.209.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.095.800,00	5.095.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	5.095.800,00	5.095.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	5.095.800,00	5.095.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.095.800,00	5.095.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.095.800,00	5.095.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.201.000,00	24.201.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	24.201.000,00	24.201.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	24.201.000,00	24.201.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.201.000,00	24.201.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.201.000,00	24.201.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.045.249.223,00	1.991.093.224,00	(54.155.999,00)	97,35	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.045.249.223,00)	(1.991.093.224,00)	54.155.999,00	97,35	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.045.249.223,00)	(1.991.093.224,00)	54.155.999,00	97,35	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Merdeka

7.01.0.00.0.00.43.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN MERDEKA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000		5	BELANJA DAERAH	2.304.232.521,00	2.236.259.170,00	(67.973.351,00)	97,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.182.109.835,00	2.120.691.857,00	(61.417.978,00)	97,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.000.480.230,00	1.963.539.926,00	(36.940.304,00)	98,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.945.916.489,00	1.921.179.926,00	(24.736.563,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.945.916.489,00	1.921.179.926,00	(24.736.563,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.945.916.489,00	1.921.179.926,00	(24.736.563,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	54.563.741,00	42.360.000,00	(12.203.741,00)	77,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.563.741,00	42.360.000,00	(12.203.741,00)	77,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.563.741,00	42.360.000,00	(12.203.741,00)	77,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	50.937.159,00	48.573.344,00	(2.363.815,00)	95,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.968.790,00	4.966.666,00	(2.124,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.968.790,00	4.966.666,00	(2.124,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.968.790,00	4.966.666,00	(2.124,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.791.357,00	6.786.264,00	(2.005.093,00)	77,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.791.357,00	6.786.264,00	(2.005.093,00)	77,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.791.357,00	6.786.264,00	(2.005.093,00)	77,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.724.232,00	8.515.500,00	(208.732,00)	97,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.724.232,00	8.515.500,00	(208.732,00)	97,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.724.232,00	8.515.500,00	(208.732,00)	97,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.071.690,00	3.071.430,00	(260,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.071.690,00	3.071.430,00	(260,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.071.690,00	3.071.430,00	(260,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	23.197.090,00	23.049.484,00	(147.606,00)	99,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.197.090,00	23.049.484,00	(147.606,00)	99,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.197.090,00	23.049.484,00	(147.606,00)	99,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	77.862.446,00	55.748.808,00	(22.113.638,00)	71,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.000.000,00	7.466.362,00	(7.533.638,00)	49,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	7.466.362,00	(7.533.638,00)	49,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.466.362,00	(7.533.638,00)	49,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	60.022.446,00	45.442.446,00	(14.580.000,00)	75,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.022.446,00	45.442.446,00	(14.580.000,00)	75,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.022.446,00	45.442.446,00	(14.580.000,00)	75,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.510.000,00	35.509.779,00	(221,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	35.510.000,00	35.509.779,00	(221,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.510.000,00	35.509.779,00	(221,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.510.000,00	35.509.779,00	(221,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.296.250,00	50.821.410,00	(6.474.840,00)	88,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	33.356.250,00	26.881.410,00	(6.474.840,00)	80,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	13.579.310,00	10.740.510,00	(2.838.800,00)	79,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.579.310,00	10.740.510,00	(2.838.800,00)	79,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.579.310,00	10.740.510,00	(2.838.800,00)	79,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	19.776.940,00	16.140.900,00	(3.636.040,00)	81,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.776.940,00	16.140.900,00	(3.636.040,00)	81,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.776.940,00	16.140.900,00	(3.636.040,00)	81,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.260.080,00	17.231.793,00	(28.287,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	17.260.080,00	17.231.793,00	(28.287,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	17.260.080,00	17.231.793,00	(28.287,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.260.080,00	17.231.793,00	(28.287,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.260.080,00	17.231.793,00	(28.287,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.525.824,00	11.487.960,00	(37.864,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.788.000,00	4.773.000,00	(15.000,00)	99,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	4.788.000,00	4.773.000,00	(15.000,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.788.000,00	4.773.000,00	(15.000,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.788.000,00	4.773.000,00	(15.000,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	6.737.824,00	6.714.960,00	(22.864,00)	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.737.824,00	6.714.960,00	(22.864,00)	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.737.824,00	6.714.960,00	(22.864,00)	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.737.824,00	6.714.960,00	(22.864,00)	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.541.232,00	32.532.150,00	(9.082,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	32.541.232,00	32.532.150,00	(9.082,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	32.541.232,00	32.532.150,00	(9.082,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.541.232,00	32.532.150,00	(9.082,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.541.232,00	32.532.150,00	(9.082,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.499.300,00	3.494.000,00	(5.300,00)	99,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.499.300,00	3.494.000,00	(5.300,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	3.499.300,00	3.494.000,00	(5.300,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.499.300,00	3.494.000,00	(5.300,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.499.300,00	3.494.000,00	(5.300,00)	99,85	
				JUMLAH BELANJA	2.304.232.521,00	2.236.259.170,00	(67.973.351,00)	97,05	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.304.232.521,00)	(2.236.259.170,00)	67.973.351,00	97,05	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.304.232.521,00)	(2.236.259.170,00)	67.973.351,00	97,05	

Kabanjahe, 24 September 2026

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Naman Teran

7.01.0.00.0.00.44.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN NAMAN TERAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000		5	BELANJA DAERAH	2.330.604.628,00	2.213.498.443,00	(117.106.185,00)	94,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.209.175.859,00	2.106.899.443,00	(102.276.416,00)	95,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.026.542.487,00	1.942.474.743,00	(84.067.744,00)	95,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.975.534.387,00	1.891.594.743,00	(83.939.644,00)	95,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.975.534.387,00	1.891.594.743,00	(83.939.644,00)	95,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.975.534.387,00	1.891.594.743,00	(83.939.644,00)	95,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	51.008.100,00	50.880.000,00	(128.100,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.008.100,00	50.880.000,00	(128.100,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.008.100,00	50.880.000,00	(128.100,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	48.272.616,00	36.178.500,00	(12.094.116,00)	74,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.951.845,00	1.677.000,00	(274.845,00)	85,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.951.845,00	1.677.000,00	(274.845,00)	85,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.951.845,00	1.677.000,00	(274.845,00)	85,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.083.791,00	10.197.700,00	(2.886.091,00)	77,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.083.791,00	10.197.700,00	(2.886.091,00)	77,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.083.791,00	10.197.700,00	(2.886.091,00)	77,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.162.660,00	2.577.000,00	(585.660,00)	81,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.162.660,00	2.577.000,00	(585.660,00)	81,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.162.660,00	2.577.000,00	(585.660,00)	81,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	336.220,00	0,00	(336.220,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	336.220,00	0,00	(336.220,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.220,00	0,00	(336.220,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	29.738.100,00	21.726.800,00	(8.011.300,00)	73,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.738.100,00	21.726.800,00	(8.011.300,00)	73,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.738.100,00	21.726.800,00	(8.011.300,00)	73,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	20.312.656,00	18.044.000,00	(2.268.656,00)	88,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	12.156.856,00	9.890.000,00	(2.266.856,00)	81,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	12.156.856,00	9.890.000,00	(2.266.856,00)	81,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.156.856,00	9.890.000,00	(2.266.856,00)	81,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.155.800,00	8.154.000,00	(1.800,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	8.155.800,00	8.154.000,00	(1.800,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.155.800,00	8.154.000,00	(1.800,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	65.048.100,00	61.252.000,00	(3.796.100,00)	94,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.450.000,00	14.545.000,00	(905.000,00)	94,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.450.000,00	14.545.000,00	(905.000,00)	94,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	14.545.000,00	(905.000,00)	94,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.530.000,00	1.647.000,00	(2.883.000,00)	36,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.530.000,00	1.647.000,00	(2.883.000,00)	36,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.530.000,00	1.647.000,00	(2.883.000,00)	36,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	45.068.100,00	45.060.000,00	(8.100,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	45.068.100,00	45.060.000,00	(8.100,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.068.100,00	45.060.000,00	(8.100,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.500.000,00	35.450.200,00	(49.800,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	35.500.000,00	35.450.200,00	(49.800,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.500.000,00	35.450.200,00	(49.800,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	35.450.200,00	(49.800,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.460.510,00	46.616.500,00	(10.844.010,00)	81,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	36.222.310,00	25.408.500,00	(10.813.810,00)	70,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	8.752.800,00	8.555.000,00	(197.800,00)	97,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.752.800,00	8.555.000,00	(197.800,00)	97,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.752.800,00	8.555.000,00	(197.800,00)	97,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	27.469.510,00	16.853.500,00	(10.616.010,00)	61,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.469.510,00	16.853.500,00	(10.616.010,00)	61,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.469.510,00	16.853.500,00	(10.616.010,00)	61,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	21.238.200,00	21.208.000,00	(30.200,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	21.238.200,00	21.208.000,00	(30.200,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.238.200,00	21.208.000,00	(30.200,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.238.200,00	21.208.000,00	(30.200,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.650.000,00	6.750.000,00	(1.900.000,00)	78,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.650.000,00	6.750.000,00	(1.900.000,00)	78,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	8.650.000,00	6.750.000,00	(1.900.000,00)	78,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.650.000,00	6.750.000,00	(1.900.000,00)	78,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	6.750.000,00	(1.900.000,00)	78,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55.318.259,00	53.232.500,00	(2.085.759,00)	96,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	55.318.259,00	53.232.500,00	(2.085.759,00)	96,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	55.318.259,00	53.232.500,00	(2.085.759,00)	96,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.318.259,00	53.232.500,00	(2.085.759,00)	96,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.318.259,00	53.232.500,00	(2.085.759,00)	96,23	
				JUMLAH BELANJA	2.330.604.628,00	2.213.498.443,00	(117.106.185,00)	94,98	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.330.604.628,00)	(2.213.498.443,00)	117.106.185,00	94,98	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.330.604.628,00)	(2.213.498.443,00)	117.106.185,00	94,98	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Kecamatan Tiganderket

7.01.0.00.0.00.45.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
ORGANISASI : KECAMATAN TIGANDERKET

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000		5	BELANJA DAERAH	2.658.208.339,00	2.423.631.142,00	(234.577.197,00)	91,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.532.145.139,00	2.310.983.241,00	(221.161.898,00)	91,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.245.257.339,00	2.093.095.505,00	(152.161.834,00)	93,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.190.777.339,00	2.038.615.505,00	(152.161.834,00)	93,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.190.777.339,00	2.038.615.505,00	(152.161.834,00)	93,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.190.777.339,00	2.038.615.505,00	(152.161.834,00)	93,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	54.480.000,00	54.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.480.000,00	54.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.480.000,00	54.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	17.380.000,00	17.380.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	17.380.000,00	17.380.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.380.000,00	17.380.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.380.000,00	17.380.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	57.425.000,00	57.299.904,00	(125.096,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.453.020,00	11.433.020,00	(20.000,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.453.020,00	11.433.020,00	(20.000,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.453.020,00	11.433.020,00	(20.000,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.999.900,00	6.994.804,00	(5.096,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.999.900,00	6.994.804,00	(5.096,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.999.900,00	6.994.804,00	(5.096,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.802.080,00	3.802.080,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.802.080,00	3.802.080,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.802.080,00	3.802.080,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	29.110.000,00	29.010.000,00	(100.000,00)	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.110.000,00	29.010.000,00	(100.000,00)	99,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.110.000,00	29.010.000,00	(100.000,00)	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	81.174.400,00	47.614.400,00	(33.560.000,00)	58,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	81.174.400,00	47.614.400,00	(33.560.000,00)	58,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.096.500,00	6.430.400,00	(666.100,00)	90,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.096.500,00	6.430.400,00	(666.100,00)	90,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	74.077.900,00	41.184.000,00	(32.893.900,00)	55,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.077.900,00	41.184.000,00	(32.893.900,00)	55,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	97.438.400,00	64.363.308,00	(33.075.092,00)	66,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.418.400,00	13.703.308,00	(2.715.092,00)	83,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.418.400,00	13.703.308,00	(2.715.092,00)	83,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.418.400,00	13.703.308,00	(2.715.092,00)	83,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	75.300.000,00	44.940.000,00	(30.360.000,00)	59,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.300.000,00	44.940.000,00	(30.360.000,00)	59,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.300.000,00	44.940.000,00	(30.360.000,00)	59,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.470.000,00	31.230.124,00	(2.239.876,00)	93,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.470.000,00	31.230.124,00	(2.239.876,00)	93,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.470.000,00	31.230.124,00	(2.239.876,00)	93,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.470.000,00	31.230.124,00	(2.239.876,00)	93,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.397.400,00	24.278.501,00	(1.118.899,00)	95,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	25.397.400,00	24.278.501,00	(1.118.899,00)	95,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	17.507.600,00	17.462.501,00	(45.099,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.507.600,00	17.462.501,00	(45.099,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.507.600,00	17.462.501,00	(45.099,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	7.889.800,00	6.816.000,00	(1.073.800,00)	86,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.889.800,00	6.816.000,00	(1.073.800,00)	86,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.889.800,00	6.816.000,00	(1.073.800,00)	86,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.624.400,00	22.624.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	22.624.400,00	22.624.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	10.864.400,00	10.864.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.864.400,00	10.864.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.864.400,00	10.864.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.425.800,00	12.423.000,00	(2.800,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.425.800,00	12.423.000,00	(2.800,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	12.425.800,00	12.423.000,00	(2.800,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.425.800,00	12.423.000,00	(2.800,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.425.800,00	12.423.000,00	(2.800,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.335.600,00	53.322.000,00	(13.600,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	53.335.600,00	53.322.000,00	(13.600,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	38.891.800,00	38.889.000,00	(2.800,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.891.800,00	38.889.000,00	(2.800,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.891.800,00	38.889.000,00	(2.800,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.05.2.01.0003		PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	14.443.800,00	14.433.000,00	(10.800,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.443.800,00	14.433.000,00	(10.800,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.443.800,00	14.433.000,00	(10.800,00)	99,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.280.000,00	0,00	(12.280.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.280.000,00	0,00	(12.280.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	12.280.000,00	0,00	(12.280.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.280.000,00	0,00	(12.280.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.280.000,00	0,00	(12.280.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	2.658.208.339,00	2.423.631.142,00	(234.577.197,00)	91,18	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.658.208.339,00)	(2.423.631.142,00)	234.577.197,00	91,18	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.658.208.339,00)	(2.423.631.142,00)	234.577.197,00	91,18	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.0.00.0.00.46.0000

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TA 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
BIDANG URUSAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000		5	BELANJA DAERAH	8.497.830.303,00	8.163.873.718,00	(333.956.585,00)	96,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.949.848.654,00	4.819.796.552,00	(130.052.102,00)	97,37	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.488.618.264,00	4.375.033.468,00	(113.584.796,00)	97,47	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.346.058.264,00	4.232.473.468,00	(113.584.796,00)	97,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.346.058.264,00	4.232.473.468,00	(113.584.796,00)	97,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.346.058.264,00	4.232.473.468,00	(113.584.796,00)	97,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	142.560.000,00	142.560.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	142.560.000,00	142.560.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.560.000,00	142.560.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	261.756.792,00	253.624.299,00	(8.132.493,00)	96,89	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	177.789.462,00	172.279.850,00	(5.509.612,00)	96,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.114.282,00	27.917.000,00	(1.197.282,00)	95,89	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.114.282,00	27.917.000,00	(1.197.282,00)	95,89	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	148.675.180,00	144.362.850,00	(4.312.330,00)	97,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.675.180,00	144.362.850,00	(4.312.330,00)	97,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.442.669,00	1.410.000,00	(32.669,00)	97,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.442.669,00	1.410.000,00	(32.669,00)	97,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.442.669,00	1.410.000,00	(32.669,00)	97,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.926.661,00	10.852.800,00	(73.861,00)	99,32	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.926.661,00	10.852.800,00	(73.861,00)	99,32	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.926.661,00	10.852.800,00	(73.861,00)	99,32	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.799.000,00	900.000,00	(899.000,00)	50,03	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.799.000,00	900.000,00	(899.000,00)	50,03	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.799.000,00	900.000,00	(899.000,00)	50,03	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	69.799.000,00	68.181.649,00	(1.617.351,00)	97,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	69.799.000,00	68.181.649,00	(1.617.351,00)	97,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.799.000,00	68.181.649,00	(1.617.351,00)	97,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	119.953.598,00	111.946.200,00	(8.007.398,00)	93,32	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.000.000,00	7.466.200,00	(4.533.800,00)	62,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	7.466.200,00	(4.533.800,00)	62,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	7.466.200,00	(4.533.800,00)	62,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.200.000,00	13.400.000,00	(800.000,00)	94,37	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.200.000,00	13.400.000,00	(800.000,00)	94,37	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	13.400.000,00	(800.000,00)	94,37	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	93.753.598,00	91.080.000,00	(2.673.598,00)	97,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	93.753.598,00	91.080.000,00	(2.673.598,00)	97,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.753.598,00	91.080.000,00	(2.673.598,00)	97,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	49.520.000,00	49.192.585,00	(327.415,00)	99,34	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	49.520.000,00	49.192.585,00	(327.415,00)	99,34	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.520.000,00	49.192.585,00	(327.415,00)	99,34	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.520.000,00	49.192.585,00	(327.415,00)	99,34	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.1.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	964.419.325,00	911.811.080,00	(52.608.245,00)	94,55	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	964.419.325,00	911.811.080,00	(52.608.245,00)	94,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.02.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	961.529.880,00	909.792.080,00	(51.737.800,00)	94,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	961.529.880,00	909.792.080,00	(51.737.800,00)	94,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	961.529.880,00	909.792.080,00	(51.737.800,00)	94,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.02.2.01.0002		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	2.889.445,00	2.019.000,00	(870.445,00)	69,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.889.445,00	2.019.000,00	(870.445,00)	69,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.889.445,00	2.019.000,00	(870.445,00)	69,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.1.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.088.748.437,00	1.087.148.686,00	(1.599.751,00)	99,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	1.088.748.437,00	1.087.148.686,00	(1.599.751,00)	99,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.03.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	1.088.748.437,00	1.087.148.686,00	(1.599.751,00)	99,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.088.748.437,00	1.087.148.686,00	(1.599.751,00)	99,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.491.751,00	35.892.000,00	(1.599.751,00)	95,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	1.051.256.686,00	1.051.256.686,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.1.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	7.717.333,00	0,00	(7.717.333,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.04.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	7.717.333,00	0,00	(7.717.333,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.04.2.01.0002		PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	7.717.333,00	0,00	(7.717.333,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.717.333,00	0,00	(7.717.333,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.717.333,00	0,00	(7.717.333,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.1.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.260.865.765,00	1.141.380.200,00	(119.485.565,00)	90,52	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	1.260.865.765,00	1.141.380.200,00	(119.485.565,00)	90,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	207.219.090,00	164.987.000,00	(42.232.090,00)	79,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	207.219.090,00	164.987.000,00	(42.232.090,00)	79,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.219.090,00	164.987.000,00	(42.232.090,00)	79,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	980.911.675,00	919.731.200,00	(61.180.475,00)	93,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	980.911.675,00	919.731.200,00	(61.180.475,00)	93,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.911.675,00	919.731.200,00	(61.180.475,00)	93,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	72.735.000,00	56.662.000,00	(16.073.000,00)	77,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	72.735.000,00	56.662.000,00	(16.073.000,00)	77,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.735.000,00	56.662.000,00	(16.073.000,00)	77,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.1.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	226.230.789,00	203.737.200,00	(22.493.589,00)	90,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	226.230.789,00	203.737.200,00	(22.493.589,00)	90,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.06.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	226.230.789,00	203.737.200,00	(22.493.589,00)	90,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	226.230.789,00	203.737.200,00	(22.493.589,00)	90,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.230.789,00	203.737.200,00	(22.493.589,00)	90,06	
				JUMLAH BELANJA	8.497.830.303,00	8.163.873.718,00	(333.956.585,00)	96,07	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.497.830.303,00)	(8.163.873.718,00)	333.956.585,00	96,07	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.497.830.303,00)	(8.163.873.718,00)	333.956.585,00	96,07	

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran I.4

Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

LAMPIRAN I.4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TA 2025

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	679.142.284.472,00	651.746.575.189,00	107.307.759.722,00	105.799.737.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	385.810.333.707,00	372.531.426.344,00	46.313.157.123,00	46.077.532.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	385.810.333.707,00	372.531.426.344,00	46.313.157.123,00	46.077.532.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	317.975.415.318,00	307.111.538.427,00	259.266.862,00	256.199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.945.631,00	16.828.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.945.631,00	16.828.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	316.632.103.669,00	305.796.012.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	316.263.943.669,00	305.436.252.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	368.160.000,00	359.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.590.000,00	133.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000,00	65.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	67.590.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.722.880,00	409.219.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.325.000,00	112.320.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	129.698.780,00	129.657.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.699.100,00	85.250.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.733.138,00	88.533.810,00	259.266.862,00	256.199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	733.138,00	732.810,00	199.266.862,00	196.814.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000,00	87.801.000,00	60.000.000,00	59.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.980.000,00	424.300.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.800.000,00	67.159.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	29.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.180.000,00	327.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.340.000,00	243.208.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.340.000,00	75.280.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.000.000,00	167.928.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	67.544.306.395,00	65.133.078.962,00	46.053.890.261,00	45.821.332.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	35.569.168.906,00	33.792.282.080,00	29.208.343.440,00	30.047.809.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	29.039.866,00	28.981.175,00	934.438.500,00	933.810.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	147.855.088,00	147.756.905,00	2.984.660.000,00	2.979.199.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	14.223.488,00	14.223.155,00	693.476.512,00	692.652.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	284.880.000,00	284.657.035,00	4.080.466.000,00	4.075.028.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	724.281.536,00	723.344.025,00	150.000.000,00	149.903.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	39.580.000,00	39.579.805,00	900.220.000,00	898.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	262.125.405,00	246.725.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.569.057.086,00	323.415.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	141.030.715,00	139.630.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	28.388.585.462,00	28.099.063.036,00	9.502.018.628,00	10.403.396.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	211.015.715,00	182.163.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	252.241.678,00	223.544.725,00	6.074.205.000,00	6.068.169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	98.597.463,00	92.370.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	138.835.007,00	106.512.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	116.658.382,00	101.669.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	418.013.495,00	317.640.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	84.897.252,00	78.297.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	118.385.207,00	118.109.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	20.058.698,00	19.969.410,00	1.902.000.000,00	1.899.974.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	895.147.500,00	893.226.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	106.561.473,00	104.961.465,00	47.972.909,00	29.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	36.008.015,00	36.007.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.092.832.079,00	1.091.173.620,00	1.519.185.891,00	1.517.501.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	375.890.444,00	375.890.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	187.852,00	187.760,00	419.700.000,00	399.991.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.942.697.206,00	26.477.234.821,00	15.861.829.594,00	14.797.933.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	30.719.770,00	30.623.446,00	648.194.500,00	646.751.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	95.281.365,00	95.100.560,00	2.014.417.188,00	1.986.387.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	71.279.146,00	71.260.195,00	1.547.797.000,00	1.465.622.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	47.405.000,00	47.260.000,00	760.000.000,00	758.883.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.001.606.644,00	3.988.660.335,00	3.349.363.714,00	3.338.751.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	381.464.630,00	381.009.550,00	151.000.000,00	149.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	496.998.009,00	496.537.950,00	255.000.000,00	241.977.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	611.618.530,00	610.832.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	800.000.000,00	799.977.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	0,00	500.000.000,00	498.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	761.350.000,00	761.349.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	361.680.000,00	314.937.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	64.040.156,00	45.554.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	439.783.095,00	429.005.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	107.832.007,00	105.537.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	18.058.043.562,00	17.843.252.777,00	4.974.691.412,00	4.058.572.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	210.000.000,00	200.049.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83.366.863,00	67.146.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	76.185.193,00	62.377.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	90.553.956,00	73.951.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	726.052.274,00	643.630.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	106.308.830,00	99.762.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	90.115.000,00	78.480.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	25.934.000,00	25.909.780,00	492.746.000,00	483.943.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	5.079.176,00	5.003.950,00	368.619.780,00	368.604.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.387.523.912,00	4.385.144.065,00	737.860.440,00	756.471.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	15.126.523,00	13.445.155,00	519.214.550,00	518.571.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	152.873.215,00	152.852.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	75.455.963,00	75.305.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	80.221.763,00	80.221.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	492.070.332,00	469.423.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.929.074.000,00	3.021.315.380,00	51.486.000,00	71.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	99.709.208,00	92.671.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	44.848.612,00	44.698.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.882.456,00	43.881.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	133.208.267,00	99.386.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	59.022.400,00	47.748.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	65.111.312,00	65.111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.627.435,00	0,00	8.282.200,00	7.936.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	167.624.463,00	159.440.400,00	158.877.690,00	158.491.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	26.667.963,00	19.642.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	644.916.371,00	478.417.996,00	245.856.787,00	219.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	32.835.000,00	16.638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.921.926,00	3.774.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29.042.963,00	21.939.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	130.088.499,00	128.637.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	202.536.000,00	87.820.000,00	46.174.000,00	23.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20.000.000,00	13.219.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	7.175.481,00	6.523.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	16.356.015,00	12.565.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6.700.841,00	4.471.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.243.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.176.400,00	6.726.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	0,00	35.941.333,00	31.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.950.000,00	7.995.000,00	163.741.454,00	163.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.135.426,00	6.911.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	162.754.339,00	161.194.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	167.681.201,00	166.128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	167.681.201,00	166.128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98.315.334,00	98.313.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	69.365.867,00	67.815.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	122.930.793,00	120.680.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	122.930.793,00	120.680.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	73.533.333,00	73.533.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	49.397.460,00	47.147.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	215.298.374.150,00	207.724.139.970,00	17.531.873.113,00	16.890.144.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Dinas Kesehatan	161.769.730.976,00	156.108.463.447,00	15.948.646.325,00	15.503.323.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	93.982.905.328,00	91.585.694.761,00	40.510.000,00	40.126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.546.200,00	60.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.546.200,00	60.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.792.808.566,00	90.416.564.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92.514.438.566,00	90.154.454.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	278.370.000,00	262.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.396.062,00	170.440.296,00	40.510.000,00	40.126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.848.362,00	32.626.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.092.400,00	5.015.000,00	40.510.000,00	40.126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.000.000,00	25.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.870.000,00	7.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.585.300,00	98.986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	892.150.000,00	880.564.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.450.000,00	56.984.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	833.700.000,00	823.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.004.500,00	57.852.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.004.500,00	42.852.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.141.301.168,00	63.720.914.307,00	15.908.136.325,00	15.463.197.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.813.907.676,00	6.480.389.526,00	15.549.219.325,00	15.104.412.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	400.000.000,00	378.454.500,00	11.198.917.740,00	10.998.096.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.209.600,00	1.209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	23.440.000,00	23.410.000,00	1.285.360.000,00	1.062.609.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	130.286.415,00	129.800.000,00	2.475.441.585,00	2.457.181.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	74.900.000,00	74.646.105,00	589.500.000,00	586.524.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	200.000.000,00	199.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	140.031.000,00	114.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.720.932.661,00	5.435.728.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	123.108.000,00	122.779.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.265.651.892,00	57.180.603.501,00	275.500.000,00	275.490.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	257.978.000,00	232.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	289.783.000,00	261.475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.020.454.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	575.100.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	159.800.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	225.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.273.220.400,00	1.273.220.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.536.088.000,00	36.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200.350.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.336.210.000,00	1.111.309.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	238.838.000,00	224.949.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	711.147.000,00	133.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	81.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.244.736.058,00	1.311.443.441,00	275.500.000,00	275.490.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41.293.493.371,00	50.988.347.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.792.454.063,00	1.520.892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	51.591.600,00	50.671.280,00	83.417.000,00	83.294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	51.591.600,00	50.671.280,00	83.417.000,00	83.294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.150.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	10.150.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	883.316.480,00	613.704.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	218.352.480,00	80.123.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	218.352.480,00	80.123.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.964.000,00	533.581.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.964.000,00	533.581.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	196.448.000,00	80.899.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	56.870.000,00	6.880.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	56.870.000,00	6.880.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	19.320.000,00	4.451.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	19.320.000,00	4.451.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	120.258.000,00	69.567.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	120.258.000,00	69.567.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	565.760.000,00	107.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	563.060.000,00	104.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	563.060.000,00	104.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000		Rumah Sakit Umum Daerah	53.528.643.174,00	51.615.676.523,00	1.583.226.788,00	1.386.820.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.947.550.109,00	51.081.990.859,00	886.330.820,00	705.234.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.847.178.998,00	21.111.202.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.691.418.998,00	20.957.920.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155.760.000,00	153.281.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.750.000,00	200.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	204.750.000,00	200.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.233.884.900,00	3.114.548.961,00	6.973.692,00	5.949.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	428.400.000,00	412.805.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.805.484.900,00	2.701.743.705,00	6.973.692,00	5.949.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.666.141,00	80.812.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.666.141,00	80.812.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	26.577.070.070,00	26.574.695.337,00	879.357.128,00	699.284.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	26.577.070.070,00	26.574.695.337,00	879.357.128,00	699.284.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	581.093.065,00	533.685.664,00	696.895.968,00	681.586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	149.000.000,00	124.000.000,00	696.895.968,00	681.586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	149.000.000,00	124.000.000,00	696.895.968,00	681.586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	432.093.065,00	409.685.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	432.093.065,00	409.685.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.245.009.401,00	27.299.519.172,00	40.458.289.737,00	40.024.191.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	29.245.009.401,00	27.299.519.172,00	40.458.289.737,00	40.024.191.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.428.752.522,00	8.819.737.689,00	334.965.902,00	308.132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.721.221.918,00	6.433.196.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.491.788.668,00	6.218.206.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	229.433.250,00	214.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.480.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.480.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.724.384,00	556.281.924,00	304.965.902,00	280.132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.919.550,00	22.017.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.938.885,00	131.991.800,00	254.473.502,00	239.092.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.280.949,00	32.820.200,00	50.492.400,00	41.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.656.000,00	28.877.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364.929.000,00	340.575.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	30.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	30.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.034.782.720,00	960.119.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.500.000,00	49.306.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.050.000,00	51.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	917.232.720,00	859.163.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.025.543.500,00	816.139.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.870.000,00	64.545.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	955.673.500,00	751.593.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.689.198.849,00	2.616.695.450,00	3.688.499.962,00	3.618.867.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.689.198.849,00	2.616.695.450,00	3.688.499.962,00	3.618.867.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi	0,00	0,00	1.300.000.000,00	1.260.613.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	0,00	2.388.499.962,00	2.358.254.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.689.198.849,00	2.616.695.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	992.601.998,00	891.435.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	992.601.998,00	891.435.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	200.000.000,00	199.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000,00	199.633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	592.601.998,00	492.601.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.569.978.189,00	4.434.088.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.569.978.189,00	4.434.088.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	4.409.323.000,00	4.392.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	60.655.189,00	41.572.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.933.693.674,00	1.683.586.790,00	10.596.548.282,00	10.561.757.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.933.693.674,00	1.683.586.790,00	10.596.548.282,00	10.561.757.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	4.192.528.729,00	4.178.103.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	399.100.000,00	398.603.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	6.004.919.553,00	5.985.051.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.633.693.674,00	1.633.586.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.911.000.000,00	1.888.580.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.911.000.000,00	1.888.580.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.518.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.811.000.000,00	1.789.062.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.052.146.008,00	2.429.467.706,00	400.000.000,00	397.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.052.146.008,00	2.429.467.706,00	400.000.000,00	397.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3.052.146.008,00	2.429.467.706,00	400.000.000,00	397.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.341.978.626,00	4.240.983.185,00	25.438.275.591,00	25.137.933.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	4.341.978.626,00	4.240.983.185,00	25.438.275.591,00	25.137.933.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	0,00	0,00	15.827.082.224,00	15.708.454.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	0,00	0,00	3.133.632.462,00	3.103.247.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	199.981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	3.859.850.738,00	3.729.383.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	0,00	0,00	2.617.710.167,00	2.596.848.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.041.978.626,00	4.041.001.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	325.659.535,00	294.943.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	73.509.000,00	71.505.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	73.509.000,00	71.505.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	252.150.535,00	223.438.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	252.150.535,00	223.438.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.404.756.382,00	15.893.000.738,00	107.995.812,00	87.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	16.404.756.382,00	15.893.000.738,00	107.995.812,00	87.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.009.974.653,00	3.860.999.219,00	93.423.860,00	87.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.667.413.948,00	3.532.809.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.306.606.748,00	3.190.983.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360.807.200,00	341.826.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.223.499,00	184.210.974,00	93.423.860,00	87.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.987.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.109.949,00	56.539.300,00	93.423.860,00	87.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.659.550,00	12.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.200.000,00	4.803.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.054.000,00	103.287.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.930.000,00	36.327.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	21.397.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.657.206,00	82.901.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.657.206,00	82.901.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	10.000.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10.000.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	12.384.781.729,00	12.026.201.519,00	14.571.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	12.384.781.729,00	12.026.201.519,00	14.571.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	20.697.639,00	0,00	14.571.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	12.289.532.100,00	11.990.411.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	74.551.990,00	35.790.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	27.393.558.801,00	23.626.261.392,00	2.764.227.237,00	2.603.453.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	15.791.252.996,00	14.930.712.243,00	2.091.849.570,00	2.031.049.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.746.631.350,00	11.936.246.997,00	66.117.570,00	65.611.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.929.188.984,00	5.135.463.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.807.028.984,00	5.013.303.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.160.000,00	122.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.164.366,00	235.312.362,00	54.039.070,00	53.533.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.684.700,00	34.684.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.174.371,00	60.942.880,00	46.253.600,00	46.161.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.124.904,00	37.124.904,00	7.785.470,00	7.371.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.370.391,00	55.351.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.810.000,00	47.207.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	12.078.500,00	12.078.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	12.078.500,00	12.078.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.581.278.000,00	6.565.471.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.220.000,00	49.093.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.520.078.000,00	6.506.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.812.395.896,00	1.800.216.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.779.292.080,00	1.768.137.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4.330.370,00	4.180.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	108.024.000,00	100.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	16.130.000,00	15.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	748.740.910,00	746.534.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	902.066.800,00	901.452.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30.735.816,00	29.710.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.415.816,00	8.390.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	5.345.000,00	5.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.975.000,00	15.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.232.225.750,00	1.194.249.060,00	2.025.732.000,00	1.965.437.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.232.225.750,00	1.194.249.060,00	2.025.732.000,00	1.965.437.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.170.995.000,00	1.133.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	11.130.750,00	10.707.060,00	2.025.732.000,00	1.965.437.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.602.305.805,00	8.695.549.149,00	672.377.667,00	572.403.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.997.071.549,00	4.740.772.350,00	279.665.427,00	271.096.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.970.654.163,00	3.768.892.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.888.214.163,00	3.688.662.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.440.000,00	80.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.760.000,00	45.445.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53.760.000,00	45.445.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.719.386,00	186.418.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.990.808,00	3.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.436.190,00	37.604.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.099.888,00	7.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.633.500,00	30.638.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.056.000,00	30.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.503.000,00	75.817.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.500.000,00	8.363.850,00	279.665.427,00	271.096.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	134.819.027,00	131.808.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000,00	8.363.850,00	144.846.400,00	139.288.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.944.000,00	467.427.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	16.978.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.944.000,00	450.449.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.494.000,00	264.223.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.150.000,00	174.123.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.244.000,00	79.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.605.234.256,00	3.954.776.799,00	392.712.240,00	301.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	33.638.200,00	30.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	33.638.200,00	30.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	483.332.089,00	428.911.494,00	15.011.360,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	28.000.000,00	27.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	70.338.462,00	66.221.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	34.957.057,00	28.394.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	28.476.410,00	25.329.110,00	15.011.360,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	321.560.160,00	280.994.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.176.127.302,00	3.126.011.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.126.077.938,00	3.077.638.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.049.364,00	48.373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2.912.136.665,00	369.586.455,00	377.700.880,00	287.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	31.556.965,00	21.444.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	65.261.100,00	50.961.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	2.704.684.220,00	210.424.000,00	377.700.880,00	287.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	40.996.380,00	32.384.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	69.638.000,00	54.370.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.990.252.031,00	4.672.227.573,00	132.216.700,00	117.265.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000		Dinas Sosial	4.990.252.031,00	4.672.227.573,00	132.216.700,00	117.265.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.844.613.839,00	3.654.498.299,00	129.108.700,00	117.265.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.062.848.527,00	2.935.967.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.978.888.527,00	2.852.687.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.960.000,00	83.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.325.312,00	253.917.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.489.163,00	4.488.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.181.359,00	30.165.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.135.790,00	14.133.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	23.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.939.000,00	166.569.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	129.108.700,00	117.265.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	129.108.700,00	117.265.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.870.000,00	183.444.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.760.000,00	16.389.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.550.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.560.000,00	159.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.570.000,00	236.918.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.700.000,00	170.818.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.870.000,00	66.100.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	170.837.601,00	155.016.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	170.837.601,00	155.016.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	27.467.200,00	26.603.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	143.370.401,00	128.412.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	365.913.565,00	308.298.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	365.913.565,00	308.298.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	275.024.380,00	229.111.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	34.939.185,00	32.177.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	55.950.000,00	47.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	117.500.473,00	104.770.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	117.500.473,00	104.770.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	87.662.353,00	78.265.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	29.838.120,00	26.504.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	179.494.503,00	168.198.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	159.523.120,00	152.134.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	39.737.587,00	38.789.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	119.785.533,00	113.344.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	19.971.383,00	16.064.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	19.971.383,00	16.064.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	311.892.000,00	281.446.320,00	3.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	311.892.000,00	281.446.320,00	3.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	296.892.000,00	281.446.320,00	3.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	103.188.985.475,00	93.497.281.253,00	18.469.137.219,00	17.714.257.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.767.341.101,00	4.216.548.180,00	118.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000		Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4.767.341.101,00	4.216.548.180,00	118.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.908.064.763,00	3.423.458.840,00	118.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.167.475.362,00	2.950.216.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.047.355.362,00	2.830.742.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.120.000,00	119.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.509.144,00	185.900.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.995.440,00	6.995.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.090.731,00	37.926.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.699,00	9.993.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.910.944,00	15.809.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.513.330,00	115.175.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	118.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	118.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.800.000,00	118.831.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.820.000,00	13.171.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.980.000,00	105.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.280.257,00	147.510.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	35.938.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.271.000,00	52.413.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.832.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.757.257,00	49.378.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	777.000.000,00	736.519.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	777.000.000,00	736.519.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	777.000.000,00	736.519.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	19.058.081,00	18.479.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	19.058.081,00	18.479.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	19.058.081,00	18.479.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	63.218.257,00	38.090.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.456.381,00	7.440.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	7.456.381,00	7.440.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	55.761.876,00	30.649.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.771.876,00	30.649.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	13.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.517.816.803,00	5.053.694.072,00	168.046.734,00	156.432.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	5.517.816.803,00	5.053.694.072,00	168.046.734,00	156.432.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.042.843.029,00	4.635.713.452,00	75.308.101,00	72.860.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.444.240.985,00	4.178.098.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.272.501.486,00	4.019.379.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	171.739.499,00	158.719.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.760.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.760.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.493.500,00	131.701.074,00	10.400.001,00	9.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.534.500,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.337.000,00	46.320.000,00	10.400.001,00	9.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.000.000,00	10.332.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.862.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.760.000,00	72.268.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	64.908.100,00	63.203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	64.908.100,00	63.203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.000.000,00	218.199.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.300.000,00	18.195.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.700.000,00	200.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.348.544,00	78.464.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.479.504,00	73.419.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.869.040,00	5.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	86.027.457,00	70.816.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	27.300.500,00	23.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	27.300.500,00	23.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.523.200,00	24.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.02.0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	26.523.200,00	24.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.203.757,00	22.508.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.203.757,00	22.508.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	56.287.225,00	46.304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.287.225,00	46.304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	56.287.225,00	46.304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	58.903.620,00	52.784.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.903.620,00	52.784.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	31.233.940,00	27.036.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	27.669.680,00	25.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	243.155.970,00	225.642.500,00	92.738.633,00	83.571.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	181.857.119,00	171.930.000,00	92.738.633,00	83.571.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	157.318.299,00	152.516.000,00	92.738.633,00	83.571.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24.538.820,00	19.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	61.298.851,00	53.712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.553.455,00	38.108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.745.396,00	15.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	30.599.502,00	22.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	22.768.712,00	16.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	22.768.712,00	16.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.830.790,00	6.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	7.830.790,00	6.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.844.203.672,00	6.385.776.921,00	126.554.850,00	117.647.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.844.203.672,00	6.385.776.921,00	126.554.850,00	117.647.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.126.377.894,00	5.863.000.088,00	126.554.850,00	117.647.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.580.009.665,00	5.401.997.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.441.030.849,00	5.273.399.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	138.978.816,00	128.597.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.250.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47.250.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.876.387,00	156.421.440,00	87.283.670,00	80.107.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	1.987.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.050.225,00	28.371.880,00	85.783.670,00	78.607.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.823.212,00	15.739.680,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.178.110,00	18.186.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.824.840,00	92.136.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.043.442,00	8.031.980,00	27.657.880,00	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.290.882,00	1.086.750,00	27.657.880,00	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.752.560,00	6.945.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.343.360,00	171.755.503,00	11.613.300,00	11.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.500.000,00	29.945.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.650.000,00	16.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.193.360,00	125.330.420,00	11.613.300,00	11.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.855.040,00	84.293.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	38.417.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.435.040,00	45.876.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	140.099.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	140.099.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	140.099.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	441.325.071,00	402.545.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	107.855.102,00	98.197.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	43.260.000,00	43.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	27.839.061,00	23.975.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	36.756.041,00	30.976.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	243.148.055,00	221.193.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	39.398.055,00	34.009.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	194.500.000,00	187.184.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	90.321.914,00	83.154.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	35.929.247,00	32.342.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	54.392.667,00	50.812.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	38.846.600,00	31.289.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	38.846.600,00	31.289.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	38.846.600,00	31.289.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	97.555.055,00	88.941.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	97.555.055,00	88.941.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.11.0000	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	97.555.055,00	88.941.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	503.550.015,00	353.542.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	503.550.015,00	353.542.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	134.080.015,00	100.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	134.080.015,00	100.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.558.535,00	43.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.521.480,00	56.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	369.470.000,00	253.397.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	369.470.000,00	253.397.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	369.470.000,00	253.397.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	24.938.538.028,00	22.380.404.745,00	2.067.095.354,00	1.777.301.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000		Dinas Lingkungan Hidup	24.938.538.028,00	22.380.404.745,00	2.067.095.354,00	1.777.301.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.249.844.397,00	9.112.427.636,00	460.988.190,00	452.767.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.624.168.401,00	3.370.511.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.465.259.414,00	3.221.299.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.908.987,00	149.211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.253.098,00	49.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55.253.098,00	49.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.706.206,00	203.034.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.943.985,00	29.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	5.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.000.000,00	65.553.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.762.221,00	101.590.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	440.988.190,00	433.367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	55.228.590,00	53.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	195.759.600,00	190.309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.556.400,00	380.339.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00	48.229.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.010.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.546.400,00	320.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.965.160.292,00	5.109.152.107,00	20.000.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.865.831.292,00	5.022.368.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.329.000,00	86.783.664,00	20.000.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	7.660.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	7.660.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	7.660.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	497.163.936,00	438.607.300,00	174.457.264,00	140.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	497.043.936,00	438.607.300,00	54.577.264,00	53.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	117.579.200,00	116.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	379.464.736,00	321.877.300,00	54.577.264,00	53.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	120.000,00	0,00	119.880.000,00	86.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	120.000,00	0,00	119.880.000,00	86.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	18.998.077,00	18.986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	18.998.077,00	18.986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	18.998.077,00	18.986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	7.500.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	7.500.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	7.500.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	21.192.800,00	19.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.192.800,00	19.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	13.690.400,00	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	7.502.400,00	6.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	40.000.000,00	39.767.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.767.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	40.000.000,00	39.767.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	66.930.440,00	60.513.200,00	4.077.900,00	4.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.930.440,00	60.513.200,00	4.077.900,00	4.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	66.930.440,00	60.513.200,00	4.077.900,00	4.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	42.434.800,00	41.364.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	42.434.800,00	41.364.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	42.434.800,00	41.364.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.986.813.578,00	12.635.317.969,00	1.427.572.000,00	1.180.374.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	12.986.813.578,00	12.635.317.969,00	1.427.572.000,00	1.180.374.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	154.667.884,00	154.097.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	626.286.456,00	624.671.800,00	1.217.572.000,00	1.170.551.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	150.000.000,00	149.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	49.954.280,00	42.959.500,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.29.0.00.12.0000	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	12.005.904.958,00	11.664.404.749,00	10.000.000,00	9.823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.668.850.280,00	4.231.815.495,00	534.329.395,00	352.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.668.850.280,00	4.231.815.495,00	534.329.395,00	352.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.030.333.194,00	3.650.858.470,00	330.928.862,00	168.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.139.293.577,00	2.824.528.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.060.813.577,00	2.746.048.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.480.000,00	78.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.149.617,00	117.085.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.147.300,00	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.900.080,00	41.188.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.294.362,00	7.375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.163.875,00	21.769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.484.000,00	42.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	0,00	330.928.862,00	168.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	63.210.734,00	49.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	267.718.128,00	118.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.860.000,00	492.156.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.220.000,00	13.336.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.780.000,00	21.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	463.860.000,00	457.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.030.000,00	157.088.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.030.000,00	82.888.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	74.199.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	478.150.386,00	440.148.100,00	203.400.533,00	183.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	478.150.386,00	440.148.100,00	203.400.533,00	183.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	444.217.490,00	407.963.100,00	146.422.400,00	131.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	33.932.896,00	32.185.000,00	56.978.133,00	52.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	64.047.280,00	62.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	64.047.280,00	62.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	34.703.180,00	33.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	29.344.100,00	29.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	49.279.140,00	43.724.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	19.211.700,00	18.804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	19.211.700,00	18.804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.067.440,00	24.920.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	14.835.440,00	12.820.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.232.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	47.040.280,00	34.677.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	47.040.280,00	34.677.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.13.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	47.040.280,00	34.677.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.692.121.849,00	7.972.786.567,00	260.228.870,00	237.634.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.692.121.849,00	7.972.786.567,00	260.228.870,00	237.634.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.639.137.059,00	4.464.362.129,00	237.707.700,00	216.661.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.131.414.035,00	4.007.454.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.985.374.035,00	3.866.494.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	146.040.000,00	140.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.902.337,00	143.117.288,00	237.707.700,00	216.661.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.250.000,00	2.211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.197.675,00	48.843.800,00	237.707.700,00	216.661.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.500.000,00	11.710.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.986.662,00	20.584.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.900.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.068.000,00	56.166.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.148.719,00	229.222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	17.811.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.290.000,00	25.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.658.719,00	185.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.921.968,00	56.817.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.921.968,00	56.817.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.140.087.273,00	2.776.970.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.140.087.273,00	2.776.970.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.469.481.736,00	2.369.746.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	49.066.500,00	25.648.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	71.998.144,00	37.503.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	136.732.455,00	129.703.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	133.889.955,00	94.864.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	90.974.385,00	59.335.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	42.697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	115.848.498,00	58.199.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	29.398.000,00	1.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	912.897.517,00	731.453.953,00	22.521.170,00	20.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	912.897.517,00	731.453.953,00	22.521.170,00	20.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	487.478.830,00	340.156.770,00	22.521.170,00	20.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	31.881.240,00	31.555.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	29.094.020,00	28.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.14.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	362.033.427,00	331.652.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.464.778.689,00	2.173.275.802,00	199.107.310,00	171.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	3.464.778.689,00	2.173.275.802,00	199.107.310,00	171.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	286.254.999,00	95.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	18.504.999,00	11.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	18.504.999,00	11.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	267.750.000,00	83.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	161.400.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.052.563.690,00	1.404.465.802,00	199.107.310,00	171.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	742.220.000,00	567.564.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	517.400.000,00	379.138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	99.820.000,00	79.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	25.000.000,00	21.251.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100.000.000,00	87.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	250.103.690,00	122.484.850,00	199.107.310,00	171.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	18.903.690,00	8.380.000,00	199.107.310,00	171.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	231.200.000,00	114.104.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	746.640.000,00	532.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.200.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	713.200.000,00	510.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.240.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	313.600.000,00	182.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	313.600.000,00	182.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.125.960.000,00	672.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.125.960.000,00	672.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	576.360.000,00	420.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.10.0000	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	523.000.000,00	226.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.532.804.936,00	18.983.281.961,00	3.432.143.581,00	3.394.742.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		Dinas Perhubungan	19.532.804.936,00	18.983.281.961,00	3.432.143.581,00	3.394.742.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.885.181.176,00	6.606.803.942,00	667.087.400,00	656.246.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.491.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.491.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.547.049.236,00	5.361.923.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.384.850.531,00	5.199.725.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	162.198.705,00	162.198.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.650.000,00	69.879.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70.000.000,00	69.879.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.582.841,00	190.180.362,00	64.635.800,00	64.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.458.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.411.385,00	28.308.585,00	64.635.800,00	64.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.938.892,00	29.938.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.705.600,00	50.697.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.556.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.470.964,00	76.137.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000,00	450.000,00	28.979.400,00	28.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	50.000,00	0,00	19.800.000,00	19.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	450.000,00	450.000,00	9.179.400,00	9.046.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.487.335,00	729.725.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.344.705,00	30.109.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.528.000,00	12.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	722.614.630,00	687.460.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.107.949,00	254.645.076,00	573.472.200,00	563.728.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.448.112,00	39.358.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.602.630,00	149.037.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.057.207,00	66.248.346,00	573.472.200,00	563.728.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.635.067.024,00	12.363.941.114,00	2.765.056.181,00	2.738.496.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.426.135.262,00	11.204.331.760,00	2.201.398.168,00	2.181.595.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	35.451.758,00	35.297.795,00	88.300.800,00	80.523.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.379.583.504,00	11.169.033.965,00	1.559.547.068,00	1.547.521.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	11.100.000,00	0,00	553.550.300,00	553.550.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	325.223.389,00	315.299.925,00	10.508.605,00	10.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	213.126.916,00	211.048.850,00	10.508.605,00	10.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	112.096.473,00	104.251.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.228.822,00	12.482.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	10.038.072,00	9.887.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.190.750,00	2.594.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	703.758.195,00	690.347.047,00	553.149.408,00	546.526.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	674.029.940,00	667.786.508,00	14.492.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	17.235.462,00	10.687.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12.492.793,00	11.873.165,00	538.657.408,00	532.126.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	24.540.438,00	24.540.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	24.540.438,00	24.540.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	28.063.810,00	24.198.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	8.204.352,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	7.646.390,00	6.290.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12.213.068,00	11.908.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.575.720,00	45.292.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	49.575.720,00	45.292.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.541.388,00	47.449.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.541.388,00	47.449.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	12.556.736,00	12.536.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	12.556.736,00	12.536.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.08.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12.556.736,00	12.536.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.424.923.776,00	7.330.443.933,00	813.825.897,00	804.988.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	7.424.923.776,00	7.330.443.933,00	813.825.897,00	804.988.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.283.483.200,00	5.228.681.066,00	30.000.000,00	29.974.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.971.279.600,00	2.928.857.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.856.283.970,00	2.813.861.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.995.630,00	114.995.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.960.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.960.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.864.135,00	292.356.043,00	30.000.000,00	29.974.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.193.135,00	18.164.650,00	30.000.000,00	29.974.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.270.000,00	47.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.458.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.383.000,00	206.911.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.891.789.465,00	1.880.303.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.572.000.000,00	1.571.989.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.140.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.649.465,00	301.264.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.590.000,00	75.564.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.590.000,00	75.564.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.037.805.485,00	1.034.184.485,00	75.523.433,00	73.426.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.037.805.485,00	1.034.184.485,00	75.523.433,00	73.426.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	496.292.006,00	495.085.000,00	34.077.900,00	32.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	294.531.067,00	292.260.285,00	11.333.333,00	11.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	7.387.800,00	7.300.000,00	5.112.200,00	5.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	176.728.052,00	176.720.700,00	25.000.000,00	24.697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	51.642.560,00	51.594.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	11.224.000,00	11.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.103.635.091,00	1.067.578.382,00	708.302.464,00	701.587.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.103.635.091,00	1.067.578.382,00	708.302.464,00	701.587.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	60.675.781,00	60.659.199,00	138.679.864,00	134.584.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	502.461.654,00	469.512.925,00	226.262.100,00	225.605.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	84.597.712,00	84.597.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	325.974.000,00	324.007.673,00	164.026.000,00	163.835.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	129.925.944,00	128.800.985,00	179.334.500,00	177.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.832.891.870,00	829.887.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000		Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.832.891.870,00	829.887.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	4.389.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.389.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	4.389.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.360.979.359,00	706.454.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.360.979.359,00	706.454.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.360.979.359,00	706.454.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	287.353.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	287.353.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	287.353.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	80.496.545,00	38.658.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	80.496.545,00	38.658.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	19.195.110,00	18.243.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	21.415.275,00	20.415.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	39.886.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	99.672.860,00	84.774.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	99.672.860,00	84.774.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.09.0000	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	99.672.860,00	84.774.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.857.953.582,00	4.618.187.154,00	260.024.668,00	257.986.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.857.953.582,00	4.618.187.154,00	260.024.668,00	257.986.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.025.391.257,00	3.842.957.504,00	260.024.668,00	257.986.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.169.113.089,00	3.013.928.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.075.993.089,00	2.939.528.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.120.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.062.400,00	30.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.062.400,00	30.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.835.255,00	310.831.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.165.635,00	3.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.988.047,00	49.669.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.845.788,00	20.814.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.796.785,00	37.275.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.039.000,00	199.908.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.790.513,00	11.766.000,00	260.024.668,00	257.986.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	13.200.000,00	12.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.790.513,00	11.766.000,00	246.824.668,00	244.999.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.170.000,00	437.171.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.160.000,00	29.056.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.810.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	409.200.000,00	393.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	122.934.000,00	118.356.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	122.934.000,00	118.356.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	122.934.000,00	118.356.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	219.840.000,00	188.551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	219.840.000,00	188.551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	169.716.000,00	152.391.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	50.124.000,00	36.159.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	217.269.000,00	211.664.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	217.269.000,00	211.664.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	8.749.000,00	3.144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	32.012.000,00	32.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	62.508.000,00	62.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	152.519.325,00	144.619.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	152.519.325,00	144.619.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	19.081.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	77.053.100,00	74.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	56.385.225,00	53.170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	120.000.000,00	112.037.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	112.037.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.17.0000	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	120.000.000,00	112.037.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.936.763.001,00	2.397.025.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000		Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	2.936.763.001,00	2.397.025.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	515.550.190,00	265.675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	515.550.190,00	265.675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	122.100.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	329.743.340,00	226.650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	63.706.850,00	33.775.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.005.233.652,00	1.726.067.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	249.665.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	250.000.000,00	249.665.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	688.477.329,00	623.129.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	688.477.329,00	623.129.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.006.731.330,00	799.014.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	398.395.185,00	392.314.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	608.336.145,00	406.699.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	60.024.993,00	54.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	60.024.993,00	54.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	370.229.159,00	359.532.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	370.229.159,00	359.532.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	32.509.000,00	32.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	69.538.341,00	68.438.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	268.181.818,00	259.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	323.746.398,00	321.000.500,00	54.331.200,00	52.629.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	323.746.398,00	321.000.500,00	54.331.200,00	52.629.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	323.746.398,00	321.000.500,00	54.331.200,00	52.629.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	323.746.398,00	321.000.500,00	54.331.200,00	52.629.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	180.056.340,00	178.807.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	143.690.058,00	142.192.600,00	54.331.200,00	52.629.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	32.399.300,00	30.301.400,00	24.152.700,00	24.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	32.399.300,00	30.301.400,00	24.152.700,00	24.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	32.399.300,00	30.301.400,00	24.152.700,00	24.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	32.399.300,00	30.301.400,00	24.152.700,00	24.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	32.399.300,00	30.301.400,00	24.152.700,00	24.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.727.031.252,00	1.270.535.831,00	164.971.960,00	163.647.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000		Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	1.727.031.252,00	1.270.535.831,00	164.971.960,00	163.647.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	815.730.673,00	605.230.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	815.730.673,00	605.230.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	815.730.673,00	605.230.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	629.977.194,00	406.820.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	629.977.194,00	406.820.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	629.977.194,00	406.820.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	281.323.385,00	258.485.165,00	164.971.960,00	163.647.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	143.031.000,00	129.112.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	143.031.000,00	129.112.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	138.292.385,00	129.372.225,00	164.971.960,00	163.647.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.3.26.18.0000	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	138.292.385,00	129.372.225,00	164.971.960,00	163.647.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.016.871.658,00	4.845.680.162,00	10.246.203.700,00	10.203.326.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000		Dinas Perpustakaan dan Arsip	5.016.871.658,00	4.845.680.162,00	10.246.203.700,00	10.203.326.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.579.100.498,00	4.428.071.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.010.887.121,00	3.878.966.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.907.187.121,00	3.798.846.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.700.000,00	80.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.681.263,00	111.936.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	909.000,00	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.347.683,00	52.295.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.924.350,00	6.650.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.966.000,00	3.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.534.230,00	48.125.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.731.075,00	298.427.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.900.000,00	40.237.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.551.075,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.280.000,00	243.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.801.039,00	138.741.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.801.039,00	138.741.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	437.771.160,00	417.608.500,00	10.246.203.700,00	10.203.326.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.778.430,00	184.590.300,00	241.295.700,00	241.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.320.000,00	55.164.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	83.053.430,00	83.052.930,00	91.795.700,00	91.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.005.000,00	35.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	10.400.000,00	10.385.665,00	149.500.000,00	149.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	252.992.730,00	233.018.200,00	10.004.908.000,00	9.962.196.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	236.822.730,00	217.340.200,00	10.004.908.000,00	9.962.196.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	16.170.000,00	15.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	106.399.265,00	103.093.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000		Dinas Perpustakaan dan Arsip	106.399.265,00	103.093.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	106.399.265,00	103.093.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	40.565.765,00	40.376.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	23.316.220,00	23.127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	17.249.545,00	17.249.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	65.833.500,00	62.716.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	47.857.730,00	47.057.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.19.0000	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	17.975.770,00	15.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	56.975.001.395,00	52.220.938.491,50	4.269.818.605,00	4.137.093.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.803.139.490,00	1.471.615.890,00	73.396.000,00	72.284.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.803.139.490,00	1.471.615.890,00	73.396.000,00	72.284.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	597.390.000,00	406.168.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	47.390.000,00	43.606.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	47.390.000,00	43.606.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000,00	362.561.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	550.000.000,00	362.561.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.061.190.939,00	934.888.955,00	73.396.000,00	72.284.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	626.409.946,00	560.276.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	474.322.284,00	421.177.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	152.087.662,00	139.099.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	434.780.993,00	374.612.370,00	73.396.000,00	72.284.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.500.000,00	33.789.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	389.680.808,00	332.777.224,00	73.396.000,00	72.284.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	8.600.185,00	8.045.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	144.558.551,00	130.558.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	144.558.551,00	130.558.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.575.397,00	87.971.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.11.0000	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.983.154,00	42.586.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.763.271.644,00	12.427.596.099,00	3.389.191.500,00	3.366.413.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000		Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	13.763.271.644,00	12.427.596.099,00	3.389.191.500,00	3.366.413.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.108.675.236,00	6.686.072.552,00	225.615.440,00	224.378.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.421.837.187,00	5.128.985.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.227.797.187,00	4.934.945.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.040.000,00	194.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.660.019,00	248.184.405,00	62.233.700,00	61.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.904.100,00	10.903.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.956.300,00	52.780.880,00	62.233.700,00	61.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.361.330,00	23.615.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.648.000,00	22.634.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.988.000,00	4.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.802.289,00	133.282.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.701.492,00	15.345.558,00	163.381.740,00	162.408.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	112.662,00	0,00	61.743.470,00	61.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.442.250,00	15.345.558,00	57.332.350,00	56.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.146.580,00	0,00	44.305.920,00	44.305.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.093.910.000,00	1.016.691.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.920.000,00	48.991.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.950.000,00	24.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	986.040.000,00	942.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.566.538,00	276.866.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.565.200,00	235.624.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.001.338,00	41.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.084.293.500,00	1.590.243.165,00	3.068.311.916,00	3.047.114.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.084.293.500,00	1.590.243.165,00	3.068.311.916,00	3.047.114.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000,00	497.335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.428.293.500,00	976.506.950,00	3.068.311.916,00	3.047.114.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	156.000.000,00	116.400.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.185.739.884,00	2.879.874.032,00	45.264.144,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.185.739.884,00	2.879.874.032,00	45.264.144,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	160.000.000,00	160.000.000,00	45.264.144,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.688.339.884,00	2.387.474.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	337.400.000,00	332.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.384.563.024,00	1.271.406.350,00	50.000.000,00	49.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.335.010.524,00	1.222.148.400,00	50.000.000,00	49.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	350.185.999,00	320.121.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	907.956.419,00	826.156.300,00	50.000.000,00	49.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	76.868.106,00	75.870.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	49.552.500,00	49.257.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.2.19.3.26.18.0000	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	49.552.500,00	49.257.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.858.224.612,00	26.184.050.302,50	501.877.090,00	394.305.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000		Dinas Pertanian	27.858.224.612,00	26.184.050.302,50	501.877.090,00	394.305.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.593.836.445,00	16.453.713.180,00	319.653.300,00	212.770.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.215.682.157,00	14.288.087.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.025.962.157,00	14.104.737.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	189.720.000,00	183.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	137.250.000,00	132.495.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	137.250.000,00	132.495.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.455.307,00	278.648.825,00	319.653.300,00	212.770.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.684.780,00	22.614.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.546.336,00	41.684.550,00	319.653.300,00	212.770.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.382.247,00	8.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.766.992,00	25.754.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.074.952,00	179.757.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.771.158.861,00	1.610.766.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.058.861,00	103.976.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.654.100.000,00	1.506.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.290.120,00	143.714.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.290.120,00	58.818.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	74.995.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.200.263.079,00	2.930.650.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.053.772.200,00	1.023.875.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.053.772.200,00	1.023.875.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.757.522.493,00	1.528.249.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	274.548.230,00	235.753.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.482.974.263,00	1.292.496.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	388.968.386,00	378.524.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	388.968.386,00	378.524.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.930.861.033,00	4.850.911.777,50	81.232.390,00	80.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	154.560.000,00	114.814.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	154.560.000,00	114.814.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.667.867.623,00	4.628.247.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.272.285.374,00	4.243.305.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	200.000.000,00	190.561.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	195.582.249,00	194.380.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	108.433.410,00	107.849.618,00	81.232.390,00	80.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	108.433.410,00	107.849.618,00	81.232.390,00	80.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	540.409.480,00	501.263.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	540.409.480,00	501.263.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	540.409.480,00	501.263.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	596.424.796,00	500.830.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	596.424.796,00	500.830.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	596.424.796,00	500.830.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	996.429.779,00	946.680.605,00	100.991.400,00	100.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	996.429.779,00	946.680.605,00	100.991.400,00	100.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	42.758.558,00	35.086.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	105.250.621,00	104.270.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	399.008.600,00	384.892.400,00	100.991.400,00	100.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.20.0000	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	449.412.000,00	422.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.009.265,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.009.265,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	20.009.265,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.009.265,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.29.05.2.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.009.265,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	12.951.973.405,00	11.694.982.269,00	210.000.000,00	209.301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.951.973.405,00	11.694.982.269,00	210.000.000,00	209.301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.171.623.641,00	8.550.942.628,00	210.000.000,00	209.301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.689.353.005,00	5.229.396.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.544.643.425,00	5.084.721.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	144.709.580,00	144.674.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.500.000,00	89.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.500.000,00	89.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.098.626,00	310.035.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.553.626,00	74.501.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.000.000,00	15.996.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.800.000,00	72.799.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.745.000,00	146.738.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	210.000.000,00	209.301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	110.000.000,00	109.845.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	100.000.000,00	99.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.379.728.010,00	1.262.207.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.984.000,00	40.568.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.293.744.010,00	1.221.638.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.691.944.000,00	1.660.052.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.000.000,00	85.811.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.944.000,00	5.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.600.000.000,00	1.568.297.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.405.832.306,00	2.816.736.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.300.000.000,00	2.723.988.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.300.000.000,00	2.723.988.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	105.832.306,00	92.747.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	105.832.306,00	92.747.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	261.806.844,00	245.768.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	261.806.844,00	245.768.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	103.543.333,00	101.465.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	70.946.084,00	64.187.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	53.883.863,00	52.334.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	33.433.564,00	27.781.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	112.710.614,00	81.535.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	112.710.614,00	81.535.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	31.853.909,00	31.548.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	80.856.705,00	49.986.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	578.382.979,00	440.013.931,00	95.354.015,00	94.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	578.382.979,00	440.013.931,00	95.354.015,00	94.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	504.166.389,00	370.977.341,00	95.354.015,00	94.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	504.166.389,00	370.977.341,00	95.354.015,00	94.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	49.333.600,00	27.688.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	139.669.915,00	121.325.915,00	95.354.015,00	94.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	315.162.874,00	221.963.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	74.216.590,00	69.036.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	74.216.590,00	69.036.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.3.29.21.0000	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	74.216.590,00	69.036.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	76.162.566.853,00	70.404.717.122,00	11.281.726.468,00	10.162.816.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	31.033.552.361,00	28.809.176.629,00	5.676.862.490,00	5.285.239.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000		Sekretariat Daerah	31.033.552.361,00	28.809.176.629,00	5.676.862.490,00	5.285.239.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.015.732.721,00	27.247.185.423,00	5.450.709.090,00	5.082.939.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.248.289.538,00	11.889.134.418,00	51.975.000,00	51.299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.929.161.218,00	11.574.167.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	319.128.320,00	314.967.000,00	51.975.000,00	51.299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.240.200,00	104.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	105.000.000,00	104.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.483.669.596,00	5.235.325.352,00	469.000.000,00	417.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.010.000,14	112.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	286.245.590,00	285.770.074,00	78.000.000,00	68.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	302.685.760,00	267.600.000,00	391.000.000,00	348.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.563.240,00	80.562.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.230.000.000,00	2.128.029.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.464.165.005,86	2.361.081.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.374.733.200,00	1.178.384.798,00	4.929.734.090,00	4.614.529.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	3.792.000.000,00	3.617.900.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	276.213.200,00	191.453.000,00	672.299.890,00	647.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320.100.000,00	229.564.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	778.420.000,00	757.367.000,00	465.434.200,00	349.161.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.823.349.620,00	2.356.743.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.685.000,00	32.571.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.299.403.650,00	1.109.774.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.085.970,00	105.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.312.175.000,00	1.109.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.499.205.000,00	3.241.309.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	476.054.620,00	289.384.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.033.583.000,00	1.028.446.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.393.550,00	52.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.882.173.830,00	1.871.270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	886.381.290,00	865.681.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	782.381.290,00	762.139.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	104.000.000,00	103.541.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.246.000.000,00	2.118.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.150.000.000,00	1.131.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	880.000.000,00	770.674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	216.000.000,00	215.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	212.689.242,00	204.634.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	53.650.524,00	52.631.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	61.052.271,00	59.646.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.527.044,00	63.238.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	31.459.403,00	29.118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	93.175.035,00	52.718.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	34.182.500,00	24.337.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	28.716.218,00	19.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	30.276.317,00	9.328.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.000.795.025,00	854.572.678,00	71.909.200,00	70.600.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	473.337.446,00	337.331.058,00	71.909.200,00	70.600.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	104.010.800,00	31.514.000,00	28.139.200,00	26.900.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	95.824.846,00	79.935.758,00	15.630.800,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	273.501.800,00	225.881.300,00	28.139.200,00	28.100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	87.877.234,00	82.186.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	18.600.350,00	18.218.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	45.215.684,00	39.907.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	24.061.200,00	24.061.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	439.580.345,00	435.055.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	118.679.220,00	117.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	187.077.225,00	186.472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	133.823.900,00	130.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.017.024.615,00	707.418.528,00	154.244.200,00	131.700.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	365.899.930,00	230.989.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	30.639.430,00	24.059.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	75.553.000,00	74.973.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	259.707.500,00	131.957.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	37.518.245,00	37.494.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	3.857.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	8.411.245,00	8.405.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	25.250.000,00	25.249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	570.707.740,00	401.498.000,00	154.244.200,00	131.700.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	491.721.240,00	334.070.000,00	93.262.600,00	81.700.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	51.279.800,00	46.800.000,00	24.152.700,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	27.706.700,00	20.628.000,00	36.828.900,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	42.898.700,00	37.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	21.760.400,00	19.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.22.0000	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	21.138.300,00	18.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	45.129.014.492,00	41.595.540.493,00	5.604.863.978,00	4.877.577.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	45.129.014.492,00	41.595.540.493,00	5.604.863.978,00	4.877.577.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.387.346.906,00	27.595.976.535,00	5.604.863.978,00	4.877.577.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.183.201.442,00	3.030.866.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.030.561.442,00	2.889.746.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.640.000,00	141.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.112.000,00	374.680.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	91.500.000,00	81.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	308.612.000,00	293.460.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.326.984.524,00	1.208.744.016,00	1.914.886.978,00	1.455.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.998.160,00	23.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.586.522,00	168.784.290,00	516.361.328,00	500.474.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	458.515.980,00	421.641.000,00	1.398.525.650,00	955.117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.781.562,00	13.161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.400.000,00	19.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	212.013.300,00	210.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351.689.000,00	351.608.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.500,00	0,00	3.689.977.000,00	3.421.985.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	2.206.020.000,00	2.109.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	21.500,00	0,00	1.483.957.000,00	1.312.085.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.289.680.000,00	1.144.897.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.200.000,00	124.627.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.290.000,00	18.780.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.056.190.000,00	1.001.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	998.159.440,00	853.346.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	297.120.000,00	181.116.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	701.039.440,00	672.229.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.296.597.000,00	19.187.386.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	19.704.597.000,00	18.708.386.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	352.000.000,00	286.999.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	240.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.892.591.000,00	1.796.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	20.591.000,00	10.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.872.000.000,00	1.786.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.741.667.586,00	13.999.563.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.604.070.320,00	2.250.692.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	17.514.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.517.909.260,00	2.203.487.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	13.039.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	50.675.260,00	29.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	4.932.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	251.251.500,00	229.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	84.508.500,00	78.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	47.148.500,00	41.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	36.949.500,00	36.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	37.740.000,00	36.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	7.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	37.520.000,00	36.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	172.317.200,00	59.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	25.079.600,00	14.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	19.409.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	31.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24.332.000,00	21.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	24.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	13.714.000,00	4.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	20.216.000,00	18.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.832.820.940,00	1.494.285.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.206.341.000,00	1.014.143.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	24.735.540,00	10.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	160.744.400,00	28.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	826.288.000,00	551.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	50.000.000,00	49.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	13.033.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	763.254.400,00	502.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	13.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	6.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	6.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	10.040.923.626,00	9.413.660.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.714.345.706,00	9.347.866.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	9.273.000,00	6.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	34.595.120,00	19.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.23.0000	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	282.709.800,00	39.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	34.186.611.789,00	30.903.506.855,00	1.162.622.711,00	998.915.633,00	2.964.550.812,00	0,00	285.685.741.892,00	275.809.076.755,00
5.01			PERENCANAAN	7.786.892.819,00	7.539.170.046,00	202.615.040,00	188.297.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.786.892.819,00	7.539.170.046,00	202.615.040,00	188.297.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.807.440.294,00	5.677.334.726,00	168.527.640,00	154.756.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.009.522.991,00	4.916.601.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.852.738.391,00	4.759.816.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156.784.600,00	156.784.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	478.972.902,00	471.028.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.757.402,00	1.757.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.399.544,00	34.416.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.428.784,00	12.428.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.784.302,00	18.127.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.723.842,00	6.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.879.028,00	397.602.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.080.800,00	14.418.900,00	168.527.640,00	154.756.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.080.800,00	14.418.900,00	168.527.640,00	154.756.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.950.000,00	103.418.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	11.978.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.650.000,00	16.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.673.601,00	141.626.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.120.000,00	40.886.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.553.601,00	100.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.034.920.875,00	965.190.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	870.287.075,00	825.369.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	30.926.280,00	29.596.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	21.484.555,00	20.151.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	42.741.755,00	41.620.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	775.134.485,00	734.000.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	43.026.190,00	37.017.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	43.026.190,00	37.017.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	121.607.610,00	102.804.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	121.607.610,00	102.804.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	944.531.650,00	896.644.435,00	34.087.400,00	33.541.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	487.711.933,00	462.067.980,00	34.087.400,00	33.541.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.029.882,00	36.452.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	67.612.200,00	60.739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.021.403,00	67.777.305,00	9.087.400,00	8.891.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	313.048.448,00	297.098.835,00	25.000.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	278.961.872,00	260.957.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	152.575.521,00	137.900.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.100.000,00	7.840.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	48.472.272,00	48.218.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.484.000,00	27.443.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.313.560,00	9.812.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	31.016.519,00	29.742.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	177.857.845,00	173.619.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.369.445,00	62.590.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	66.855.750,00	66.058.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.415.020,00	20.832.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	26.217.630,00	24.138.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	19.017.045.700,00	16.896.313.162,00	547.599.560,00	430.644.734,00	2.964.550.812,00	0,00	285.685.741.892,00	275.809.076.755,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.825.882.459,00	7.950.831.108,00	306.469.560,00	191.727.096,00	2.964.550.812,00	0,00	285.685.741.892,00	275.809.076.755,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.647.508.711,00	5.295.488.475,00	301.954.760,00	188.603.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.696.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.696.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.692.526.406,00	4.537.332.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.396.596.406,00	4.241.402.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	295.930.000,00	295.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.100.000,00	34.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.100.000,00	34.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.579.105,00	275.775.321,00	301.954.760,00	188.603.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.862.513,00	6.565.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.146.151,00	54.023.454,00	301.388.800,00	188.603.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.059.830,00	16.203.185,00	565.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.421.212,00	45.993.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.089.399,00	152.989.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.100.000,00	298.625.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	15.725.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.460.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.440.000,00	268.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.507.200,00	148.125.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.507.200,00	148.125.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.483.710.590,00	2.012.379.050,00	4.514.800,00	3.123.540,00	2.964.550.812,00	0,00	285.685.741.892,00	275.809.076.755,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.751.523.579,00	1.361.128.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	173.846.044,00	163.592.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	161.039.852,00	134.383.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	157.912.000,00	133.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	305.752.000,00	186.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	423.996.359,00	307.166.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	479.514.340,00	408.221.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	11.042.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	38.420.000,00	27.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	162.436.311,00	131.882.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	29.029.584,00	27.776.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	54.068.969,00	40.109.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	35.034.908,00	34.557.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44.302.850,00	29.438.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	569.750.700,00	519.367.929,00	4.514.800,00	3.123.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	30.022.809,00	28.325.916,00	1.700.000,00	821.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	132.985.047,00	121.377.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	159.781.348,00	155.325.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	161.370.506,00	142.902.002,00	2.814.800,00	2.302.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	85.590.990,00	71.436.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.550.812,00	0,00	285.685.741.892,00	275.809.076.755,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.895.412.700,00	264.018.747.563,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.550.812,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790.329.192,00	11.790.329.192,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	694.663.158,00	642.963.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	694.663.158,00	642.963.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	103.385.108,00	74.189.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	227.406.666,00	219.926.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	103.658.010,00	94.172.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	221.930.645,00	217.852.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	38.282.729,00	36.822.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		Badan Pendapatan Daerah	10.191.163.241,00	8.945.482.054,00	241.130.000,00	238.917.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.988.229.539,00	6.392.374.862,00	4.201.000,00	4.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.013.580.420,00	5.513.253.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.863.730.420,00	5.363.459.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149.850.000,00	149.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.720.000,00	47.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48.720.000,00	47.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.709.119,00	352.855.289,00	4.201.000,00	4.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.641.060,00	120.728.139,00	4.201.000,00	4.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.044.450,00	90.228.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.023.609,00	141.898.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.930.000,00	405.169.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	15.760.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.100.000,00	12.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.630.000,00	377.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.290.000,00	74.056.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.290.000,00	74.056.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.202.933.702,00	2.553.107.192,00	236.929.000,00	234.716.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.202.933.702,00	2.553.107.192,00	236.929.000,00	234.716.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	67.100.215,00	66.139.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	166.390.040,00	109.093.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	398.920.456,00	356.883.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	314.816.899,00	301.807.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	981.161.890,00	949.445.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	21.806.110,00	18.319.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	26.796.995,00	23.949.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.225.941.097,00	727.468.195,00	236.929.000,00	234.716.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	5.912.150.262,00	5.484.030.744,00	237.000.350,00	214.835.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.912.150.262,00	5.484.030.744,00	237.000.350,00	214.835.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.633.995.372,00	4.532.031.449,00	235.367.350,00	214.835.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.254.447.837,00	4.172.560.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.134.688.207,00	4.056.453.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.759.630,00	116.107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.240.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.240.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.105.705,00	245.279.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.718.565,00	30.623.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.719.140,00	29.662.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.668.000,00	184.993.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	337.200,00	310.000,00	235.367.350,00	214.835.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	49.487.350,00	46.342.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	337.200,00	310.000,00	185.880.000,00	168.493.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.674.630,00	32.349.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	10.934.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.474.630,00	21.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.190.000,00	56.032.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	38.392.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.770.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.278.154.890,00	951.999.295,00	1.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	204.228.000,00	193.413.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	101.832.000,00	91.462.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	102.396.000,00	101.951.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	644.817.600,00	386.030.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	17.345.040,00	16.387.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	26.598.450,00	24.909.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	600.874.110,00	344.732.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	197.658.260,00	155.218.461,00	1.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	80.613.820,00	67.987.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	93.213.400,00	68.154.985,00	1.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	23.831.040,00	19.076.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	231.451.030,00	217.337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	114.973.030,00	104.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	116.478.000,00	112.789.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	621.217.235,00	270.108.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	621.217.235,00	270.108.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	621.217.235,00	270.108.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	25.870.035,00	18.408.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	25.870.035,00	18.408.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	595.347.200,00	251.700.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.27.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	595.347.200,00	251.700.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	849.305.773,00	713.883.941,00	175.407.761,00	165.137.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	849.305.773,00	713.883.941,00	175.407.761,00	165.137.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	849.305.773,00	713.883.941,00	175.407.761,00	165.137.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	271.121.581,00	197.062.951,00	175.407.761,00	165.137.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	271.121.581,00	197.062.951,00	175.407.761,00	165.137.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	578.184.192,00	516.820.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	578.184.192,00	516.820.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.237.117.548,00	8.069.669.651,00	176.592.100,00	174.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	8.237.117.548,00	8.069.669.651,00	176.592.100,00	174.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000		Inspektorat Daerah	8.237.117.548,00	8.069.669.651,00	176.592.100,00	174.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.089.552.952,00	6.989.858.651,00	176.592.100,00	174.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.494.456.305,00	6.406.638.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.371.786.305,00	6.283.968.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.670.000,00	122.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	193.234.029,00	188.414.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	76.680.000,00	76.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	116.554.029,00	111.770.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.939.132,00	204.049.730,00	176.592.100,00	174.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.843.422,00	53.478.500,00	176.592.100,00	174.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.041.040,00	38.031.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.115.670,00	4.115.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.250.000,00	24.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.890.000,00	81.824.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.483.486,00	102.537.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	18.322.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.283.486,00	74.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.440.000,00	88.218.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.440.000,00	88.218.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	888.001.496,00	833.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	683.583.996,00	632.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74.997.000,00	74.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	250.534.126,00	250.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	62.457.000,00	61.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	97.136.870,00	96.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	38.980.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	126.329.000,00	75.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	204.417.500,00	201.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	55.672.500,00	55.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	148.745.000,00	145.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	259.563.100,00	246.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	249.563.100,00	236.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	68.443.100,00	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	168.670.000,00	155.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	50.784.266.707,00	48.566.445.030,00	6.830.475.254,00	6.737.869.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN	50.784.266.707,00	48.566.445.030,00	6.830.475.254,00	6.737.869.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000		Kecamatan Kabanjahe	6.652.722.423,00	6.395.491.537,00	8.155.800,00	8.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.558.617.273,00	6.322.601.537,00	8.155.800,00	8.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.592.813.239,00	5.361.838.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.304.305.239,00	5.073.358.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	288.508.000,00	288.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.360.000,00	45.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.360.000,00	45.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.296.034,00	85.049.560,00	8.155.800,00	8.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.481.500,00	3.481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.057.060,00	42.033.860,00	8.155.800,00	8.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.393.334,00	8.371.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.057.140,00	7.046.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.307.000,00	24.116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.578.000,00	787.110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	8.560.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	775.048.000,00	775.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.570.000,00	43.243.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.570.000,00	43.243.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.796.000,00	26.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.481.000,00	20.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.856.000,00	11.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	27.315.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.315.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.530.000,00	16.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.530.000,00	16.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.530.000,00	16.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.779.150,00	25.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.779.150,00	25.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.779.150,00	25.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001		Kelurahan Kampung Dalam	304.500.000,00	289.443.000,00	504.000.000,00	498.899.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	304.500.000,00	289.443.000,00	504.000.000,00	498.899.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	304.500.000,00	289.443.000,00	504.000.000,00	498.899.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	37.600.000,00	35.238.000,00	504.000.000,00	498.899.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	266.900.000,00	254.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002		Kelurahan Gung Negeri	416.709.800,00	405.465.600,00	387.770.200,00	385.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	416.709.800,00	405.465.600,00	387.770.200,00	385.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	416.709.800,00	405.465.600,00	387.770.200,00	385.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	127.000.000,00	126.646.000,00	383.000.000,00	380.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	289.709.800,00	278.819.600,00	4.770.200,00	4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003		Kelurahan Padang Mas	324.689.501,00	306.716.000,00	536.110.000,00	531.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	324.689.501,00	306.716.000,00	536.110.000,00	531.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	324.689.501,00	306.716.000,00	536.110.000,00	531.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	42.890.000,00	42.587.000,00	536.110.000,00	531.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.799.501,00	264.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004		Kelurahan Lau Cimba	145.790.000,00	132.336.000,00	631.450.000,00	625.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145.790.000,00	132.336.000,00	631.450.000,00	625.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	145.790.000,00	132.336.000,00	631.450.000,00	625.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	42.790.000,00	42.365.000,00	631.450.000,00	625.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	103.000.000,00	89.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0005		Kelurahan Gung Leto	282.460.000,00	256.554.000,00	517.040.000,00	514.332.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0005	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	282.460.000,00	256.554.000,00	517.040.000,00	514.332.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0005	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	282.460.000,00	256.554.000,00	517.040.000,00	514.332.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0005	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	44.400.000,00	41.494.000,00	510.600.000,00	507.892.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0005	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	238.060.000,00	215.060.000,00	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000		Kecamatan Berastagi	5.427.660.540,00	5.209.985.169,00	221.000.000,00	218.615.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.250.971.245,00	5.053.177.849,00	221.000.000,00	218.615.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.453.885.763,00	4.296.600.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.203.823.004,00	4.058.400.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250.062.759,00	238.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.200.000,00	34.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.200.000,00	34.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.905.482,00	93.804.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.813.090,00	5.792.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.873.098,00	45.705.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.830.494,00	4.821.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.404.000,00	2.313.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.646.000,00	2.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.338.800,00	32.529.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	221.000.000,00	218.615.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	90.000.000,00	88.068.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	131.000.000,00	130.547.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	628.810.000,00	591.207.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.200.000,00	22.852.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.870.000,00	6.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	565.740.000,00	561.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.170.000,00	37.125.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.170.000,00	37.125.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	116.367.045,00	96.799.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61.247.045,00	61.149.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.995.560,00	14.995.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.251.485,00	46.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	51.620.000,00	32.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.620.000,00	32.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.322.250,00	60.007.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.322.250,00	60.007.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60.322.250,00	60.007.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0001		Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	58.061.685,00	49.477.750,00	732.360.000,00	726.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.061.685,00	49.477.750,00	732.360.000,00	726.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	58.061.685,00	49.477.750,00	732.360.000,00	726.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	17.640.000,00	17.640.000,00	732.360.000,00	726.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.421.685,00	31.837.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0002		Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	83.859.334,00	75.352.140,00	705.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83.859.334,00	75.352.140,00	705.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	83.859.334,00	75.352.140,00	705.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	45.000.000,00	45.000.000,00	705.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38.859.334,00	30.352.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0003		Kelurahan Gundaling II	79.649.910,00	70.700.325,00	711.000.000,00	705.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0003	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79.649.910,00	70.700.325,00	711.000.000,00	705.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0003	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	79.649.910,00	70.700.325,00	711.000.000,00	705.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0003	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	39.000.000,00	39.000.000,00	711.000.000,00	705.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0003	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.649.910,00	31.700.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0004		Kelurahan Gundaling I	84.034.700,00	75.464.200,00	705.000.000,00	698.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0004	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	84.034.700,00	75.464.200,00	705.000.000,00	698.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0004	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	84.034.700,00	75.464.200,00	705.000.000,00	698.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0004	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	45.000.000,00	45.000.000,00	705.000.000,00	698.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0004	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39.034.700,00	30.464.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000		Kecamatan Barusjahe	2.619.200.842,00	2.557.807.879,00	16.114.084,00	16.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.537.364.117,00	2.476.009.129,00	16.114.084,00	16.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.340.780.148,00	2.279.825.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.295.858.628,00	2.234.945.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.921.520,00	44.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.517.969,00	51.271.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.258.998,00	1.258.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.552.090,00	12.511.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.642.841,00	9.635.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.774.040,00	3.615.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.290.000,00	24.249.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	16.114.084,00	16.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	16.114.084,00	16.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.436.000,00	91.281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.663.500,00	14.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.352.500,00	75.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.662.900,00	43.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.038.900,00	19.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.798.900,00	8.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24.624.000,00	24.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.624.000,00	24.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.146.950,00	5.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.146.950,00	5.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.146.950,00	5.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.743.925,00	29.708.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.743.925,00	29.708.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	29.743.925,00	29.708.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.282.950,00	3.282.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.282.950,00	3.282.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.746.950,00	1.746.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000		Kecamatan Tiga Panah	2.938.841.213,00	2.823.267.225,00	31.467.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.767.919.073,00	2.664.883.225,00	31.467.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.523.464.067,00	2.427.909.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.480.984.067,00	2.385.429.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.330.720,00	35.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.330.720,00	35.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.484.911,00	52.099.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.144.670,00	1.144.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.338.295,00	12.129.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.006.426,00	3.992.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.445.520,00	2.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.550.000,00	32.395.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	31.467.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	31.467.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.020.000,00	36.948.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000,00	8.223.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.760.000,00	25.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.619.375,00	112.615.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.804.906,00	45.803.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.814.469,00	66.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.604.200,00	87.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48.604.200,00	47.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.886.200,00	23.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.718.000,00	23.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.554.060,00	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.554.060,00	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.554.060,00	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.950.200,00	10.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.950.200,00	10.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.950.200,00	10.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.913.680,00	44.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.913.680,00	44.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	54.913.680,00	44.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000		Kecamatan Merek	2.844.580.187,00	2.757.260.644,00	20.297.200,00	16.277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.714.398.187,00	2.629.593.644,00	20.297.200,00	16.277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.512.946.949,00	2.441.555.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.461.186.949,00	2.389.795.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.760.000,00	51.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.496.538,00	76.298.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.974.995,00	1.974.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.240.501,00	34.204.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.042.588,00	2.988.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.051.954,00	3.051.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.186.500,00	34.078.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344.700,00	344.700,00	20.297.200,00	16.277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	344.700,00	344.700,00	20.297.200,00	16.277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.300.000,00	56.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.300.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.160.000,00	48.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.998.000,00	75.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.526.000,00	47.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.226.000,00	16.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.300.000,00	30.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	28.472.000,00	28.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.472.000,00	28.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.464.000,00	48.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.464.000,00	48.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	48.464.000,00	48.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000		Kecamatan Munte	2.298.207.776,00	2.250.586.611,00	20.158.500,00	20.099.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.154.915.406,00	2.110.948.611,00	20.158.500,00	20.099.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.965.165.065,00	1.925.868.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.918.537.065,00	1.879.888.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.628.000,00	45.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.539.261,00	74.169.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.324.261,00	29.158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	7.988.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.800.000,00	4.657.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.415.000,00	29.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	811.080,00	0,00	20.158.500,00	20.099.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	811.080,00	0,00	20.158.500,00	20.099.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.930.000,00	59.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.990.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.940.000,00	44.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.510.000,00	35.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.510.000,00	35.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.880.600,00	77.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.752.600,00	45.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.242.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.510.600,00	25.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	35.128.000,00	31.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.128.000,00	31.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.342.400,00	11.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.342.400,00	11.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.725.400,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.617.000,00	5.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.160.800,00	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.031.600,00	10.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.031.600,00	10.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.129.200,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.129.200,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.774.570,00	30.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.774.570,00	30.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.774.570,00	30.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.134.000,00	7.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.134.000,00	7.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.220.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.914.000,00	2.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000		Kecamatan Juhar	2.743.945.861,00	2.592.081.793,00	22.798.220,00	22.798.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.646.274.871,00	2.496.043.063,00	22.798.220,00	22.798.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.424.271.942,00	2.286.042.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.379.352.942,00	2.241.162.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.919.000,00	44.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.852.249,00	59.689.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.306.335,00	1.305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.480.408,00	14.393.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.381.380,00	3.358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.444.126,00	3.439.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.240.000,00	37.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	861.680,00	0,00	22.798.220,00	22.798.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	861.680,00	0,00	22.798.220,00	22.798.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.299.000,00	93.321.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	9.011.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.879.000,00	82.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00	33.469.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	33.469.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.451.530,00	67.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.695.230,00	33.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.783.140,00	14.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.912.090,00	18.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	33.756.300,00	33.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.756.300,00	33.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.235.730,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.235.730,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.235.730,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.983.730,00	25.983.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.983.730,00	25.983.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.983.730,00	25.983.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000		Kecamatan Tiga Binanga	2.707.419.247,00	2.596.022.708,00	9.950.120,00	9.950.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.579.133.437,00	2.477.566.893,00	9.950.120,00	9.950.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.211.197.898,00	2.109.950.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.102.597.898,00	2.001.590.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.600.000,00	108.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.860.939,00	62.762.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.554.870,00	1.527.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.490.715,00	31.447.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.807.870,00	2.807.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.231.000,00	4.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.776.484,00	22.749.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.220.000,00	222.998.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.000.000,00	27.778.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.920.000,00	187.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.334.600,00	58.334.600,00	9.950.120,00	9.950.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.940.000,00	46.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.394.600,00	11.394.600,00	9.950.120,00	9.950.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.128.700,00	62.444.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.908.700,00	49.854.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.329.420,00	22.325.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.579.280,00	27.528.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.220.000,00	12.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.220.000,00	12.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.787.360,00	16.708.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.787.360,00	16.708.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.787.360,00	16.708.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.369.750,00	39.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.369.750,00	39.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	39.369.750,00	39.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0001		Kelurahan Tiga Binanga	120.652.546,00	112.094.886,00	687.847.454,00	687.224.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	120.652.546,00	112.094.886,00	687.847.454,00	687.224.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	120.652.546,00	112.094.886,00	687.847.454,00	687.224.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	23.484.886,00	23.484.886,00	687.847.454,00	687.224.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97.167.660,00	88.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000		Kecamatan Lau Baleng	2.228.209.421,00	2.105.943.284,00	58.330.620,00	57.935.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.119.259.021,00	1.997.990.974,00	58.330.620,00	57.935.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.955.088.391,00	1.838.802.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.912.608.391,00	1.796.322.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.661.030,00	51.621.530,00	2.368.020,00	2.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.157.860,00	2.157.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.804.370,00	13.733.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.991.720,00	7.962.400,00	2.368.020,00	2.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.859.080,00	2.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.848.000,00	24.915.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	554.600,00	0,00	55.962.600,00	55.567.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	554.600,00	0,00	55.962.600,00	55.567.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.045.000,00	60.656.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	11.611.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.205.000,00	46.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.631.190,00	56.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.349.190,00	32.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.613.950,00	11.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.735.240,00	20.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24.282.000,00	24.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.282.000,00	24.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.565.700,00	8.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.565.700,00	8.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.565.700,00	8.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.373.300,00	6.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.373.300,00	6.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.373.300,00	6.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.513.210,00	35.279.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.513.210,00	35.279.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.513.210,00	35.279.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	867.000,00	820.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	867.000,00	820.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	867.000,00	820.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000		Kecamatan Mardinding	2.086.776.808,00	1.973.039.722,00	67.658.800,00	65.070.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.976.011.408,00	1.865.317.442,00	67.658.800,00	65.070.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.825.431.005,00	1.719.108.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.785.450.005,00	1.679.148.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.981.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.848.803,00	54.717.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.268.790,00	2.268.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.309.803,00	15.309.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.818.010,00	8.804.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	355.200,00	355.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.097.000,00	27.979.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	67.658.800,00	65.070.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	15.000.000,00	13.264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	52.658.800,00	51.805.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.981.600,00	43.741.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	11.251.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.760.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.821.600,00	29.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.470.000,00	33.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.470.000,00	33.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	71.202.840,00	68.159.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52.596.840,00	49.553.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.129.470,00	12.129.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.467.370,00	37.424.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.606.000,00	18.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.606.000,00	18.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.362.560,00	34.362.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.362.560,00	34.362.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.362.560,00	34.362.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000		Kecamatan Payung	2.000.433.994,00	1.867.056.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.929.022.840,00	1.798.292.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.743.189.968,00	1.621.341.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.703.229.968,00	1.581.381.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.172.872,00	38.859.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.383.008,00	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.573.734,00	8.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.906.848,00	4.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.465.282,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.844.000,00	20.766.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.160.000,00	88.597.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.200.000,00	13.637.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.770.000,00	72.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.000.000,00	35.993.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000,00	35.993.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.210.450,00	44.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.114.450,00	25.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.286.000,00	11.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.828.450,00	14.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.096.000,00	19.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.096.000,00	19.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.420.704,00	19.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.420.704,00	19.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.420.704,00	19.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.780.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.780.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.780.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000		Kecamatan Simpang Empat	2.908.566.909,00	2.787.766.422,00	50.665.400,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.799.825.589,00	2.688.164.232,00	50.665.400,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.555.758.233,00	2.467.935.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.506.038.233,00	2.418.215.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.720.000,00	49.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.040.000,00	43.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47.040.000,00	43.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.537.356,00	51.830.990,00	50.665.400,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.493.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.430.956,00	12.305.257,00	50.665.400,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.100.000,00	2.098.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.756.400,00	6.756.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.750.000,00	29.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.020.000,00	61.321.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.900.000,00	7.631.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.120.000,00	47.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.470.000,00	63.395.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.470.000,00	33.425.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.970.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.956.600,00	53.402.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.834.600,00	23.282.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.100.000,00	12.557.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.734.600,00	10.724.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30.122.000,00	30.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.122.000,00	30.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.903.600,00	2.903.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.903.600,00	2.903.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.903.600,00	2.903.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51.881.120,00	43.296.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	51.881.120,00	43.296.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	51.881.120,00	43.296.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000		Kecamatan Kutabuluh	2.183.389.855,00	2.071.277.929,00	91.911.300,00	90.119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.060.486.043,00	1.948.471.929,00	91.911.300,00	90.119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.872.621.166,00	1.763.479.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.830.253.366,00	1.721.119.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.367.800,00	42.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.054.537,00	14.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.054.537,00	14.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.522.540,00	71.757.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.405.600,00	1.402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.885.750,00	14.699.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.501.280,00	11.951.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.006.010,00	2.997.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.723.900,00	40.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	91.911.300,00	90.119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	60.011.300,00	58.219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.717.800,00	54.394.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.700.000,00	15.384.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.767.800,00	29.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.570.000,00	44.560.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.570.000,00	44.560.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.584.690,00	68.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.484.690,00	28.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.060.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.424.690,00	15.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.930.000,00	5.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.930.000,00	5.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.930.000,00	5.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.209.122,00	34.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.209.122,00	34.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.209.122,00	34.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000		Kecamatan Dolat Rayat	2.045.249.223,00	1.991.093.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.981.854.223,00	1.928.789.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.780.960.798,00	1.728.352.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.743.400.798,00	1.690.792.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.560.000,00	37.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.483.425,00	32.390.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.927.715,00	6.927.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.045.510,00	2.045.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.767.200,00	3.767.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.743.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.340.000,00	100.976.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.200.000,00	22.836.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.098.200,00	33.007.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.888.800,00	20.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.223.000,00	11.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.665.800,00	9.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12.209.400,00	12.209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.209.400,00	12.209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.095.800,00	5.095.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.095.800,00	5.095.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.095.800,00	5.095.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.201.000,00	24.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.201.000,00	24.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24.201.000,00	24.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000		Kecamatan Merdeka	2.304.232.521,00	2.236.259.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.182.109.835,00	2.120.691.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.480.230,00	1.963.539.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.945.916.489,00	1.921.179.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.563.741,00	42.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.937.159,00	48.573.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.968.790,00	4.966.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.791.357,00	6.786.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.724.232,00	8.515.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.071.690,00	3.071.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.197.090,00	23.049.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.862.446,00	55.748.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	7.466.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.022.446,00	45.442.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.510.000,00	35.509.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.510.000,00	35.509.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.296.250,00	50.821.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.356.250,00	26.881.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.579.310,00	10.740.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.776.940,00	16.140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.260.080,00	17.231.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.260.080,00	17.231.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.260.080,00	17.231.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.525.824,00	11.487.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.788.000,00	4.773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.788.000,00	4.773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.737.824,00	6.714.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.737.824,00	6.714.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.541.232,00	32.532.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.541.232,00	32.532.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.541.232,00	32.532.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.499.300,00	3.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.499.300,00	3.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.499.300,00	3.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000		Kecamatan Namanteran	2.310.291.972,00	2.195.454.443,00	20.312.656,00	18.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.188.863.203,00	2.088.855.443,00	20.312.656,00	18.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.026.542.487,00	1.942.474.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.975.534.387,00	1.891.594.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.008.100,00	50.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.272.616,00	36.178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.951.845,00	1.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.083.791,00	10.197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.162.660,00	2.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	336.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.738.100,00	21.726.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	20.312.656,00	18.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	12.156.856,00	9.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	8.155.800,00	8.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.048.100,00	61.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.450.000,00	14.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.530.000,00	1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.068.100,00	45.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.500.000,00	35.450.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.500.000,00	35.450.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.460.510,00	46.616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.222.310,00	25.408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.752.800,00	8.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.469.510,00	16.853.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	21.238.200,00	21.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.238.200,00	21.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.650.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.650.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.650.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55.318.259,00	53.232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.318.259,00	53.232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.44.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55.318.259,00	53.232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000		Kecamatan Tiganderket	2.584.130.439,00	2.382.447.142,00	74.077.900,00	41.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.458.067.239,00	2.269.799.241,00	74.077.900,00	41.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.245.257.339,00	2.093.095.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.190.777.339,00	2.038.615.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.480.000,00	54.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.380.000,00	17.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.380.000,00	17.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.425.000,00	57.299.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.453.020,00	11.433.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.999.900,00	6.994.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.802.080,00	3.802.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.110.000,00	29.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.096.500,00	6.430.400,00	74.077.900,00	41.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.096.500,00	6.430.400,00	74.077.900,00	41.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.438.400,00	64.363.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.418.400,00	13.703.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.300.000,00	44.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00	31.230.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	31.230.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.397.400,00	24.278.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.397.400,00	24.278.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.507.600,00	17.462.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.889.800,00	6.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.624.400,00	22.624.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.624.400,00	22.624.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.864.400,00	10.864.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.425.800,00	12.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.425.800,00	12.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.425.800,00	12.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.335.600,00	53.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.335.600,00	53.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	38.891.800,00	38.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	14.443.800,00	14.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.45.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.349.155.123,00	8.019.510.868,00	148.675.180,00	144.362.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.349.155.123,00	8.019.510.868,00	148.675.180,00	144.362.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.349.155.123,00	8.019.510.868,00	148.675.180,00	144.362.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.801.173.474,00	4.675.433.702,00	148.675.180,00	144.362.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.488.618.264,00	4.375.033.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.346.058.264,00	4.232.473.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142.560.000,00	142.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.081.612,00	109.261.449,00	148.675.180,00	144.362.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.114.282,00	27.917.000,00	148.675.180,00	144.362.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.442.669,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.926.661,00	10.852.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.799.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.799.000,00	68.181.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.953.598,00	111.946.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	7.466.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.200.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.753.598,00	91.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.520.000,00	49.192.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.520.000,00	49.192.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	964.419.325,00	911.811.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	964.419.325,00	911.811.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	961.529.880,00	909.792.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.889.445,00	2.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.088.748.437,00	1.087.148.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.088.748.437,00	1.087.148.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.088.748.437,00	1.087.148.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	7.717.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7.717.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	7.717.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.260.865.765,00	1.141.380.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.260.865.765,00	1.141.380.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	207.219.090,00	164.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	980.911.675,00	919.731.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	72.735.000,00	56.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	226.230.789,00	203.737.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	226.230.789,00	203.737.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.46.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	226.230.789,00	203.737.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				**1.017.025.989.362,00**	**963.428.644.459,50**	**149.646.807.259,00**	**145.869.376.198,00**	**2.964.550.812,00**	**0,00**	**285.685.741.892,00**	**275.809.076.755,00**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran II

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	14.799.051.336,83	96.918.896.827,13
PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	14.799.361.336,83	96.777.470.943,13
SUBTOTAL (1-2)	(310.000,00)	141.425.884,00
SiLPA/(SiKPA)	54.324.892.974,16	14.799.051.336,83
SUBTOTAL (3+4)	54.324.582.974,16	14.940.477.220,83
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	310.000,00	(141.425.884,00)
LAIN-LAIN	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	54.324.892.974,16	14.799.051.336,83

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran III

Laporan Operasional

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	**PENDAPATAN**	**1.387.117.299.036,39**	**1.265.260.478.409,31**	**121.856.820.627,08**	**9,63**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**152.082.798.657,22**	**110.424.613.404,31**	**41.658.185.252,91**	**37,73**
7.1.01	Pajak Daerah-LO	92.366.894.756,98	64.849.132.562,28	27.517.762.194,70	42,43
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	42.884.028.984,00	35.508.829.530,00	7.375.199.454,00	20,77
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	3.446.458.482,00	2.624.980.942,59	821.477.539,41	31,29
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	13.385.416.434,24	7.441.670.369,44	5.943.746.064,80	79,87
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**152.082.798.657,22**	**110.424.613.404,31**	**41.658.185.252,91**	**37,73**
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**1.027.609.786.782,00**	**1.123.629.816.520,00**	**(96.020.029.738,00)**	**(8,55)**
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	982.647.975.112,00	1.049.158.777.053,00	(66.510.801.941,00)	(6,34)
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	0,00	1.036.441.823.053,00	(1.036.441.823.053,00)	(100,00)
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	22.429.523.000,00	(22.429.523.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	752.945.824.000,00	(752.945.824.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	101.278.750.464,00	(101.278.750.464,00)	(100,00)
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	159.787.725.589,00	(159.787.725.589,00)	(100,00)
7.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	24.157.595.000,00	0,00	24.157.595.000,00	100,00
7.2.01.07.01	DBH Pajak-LO	16.510.659.000,00	0,00	16.510.659.000,00	100,00
7.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	4.862.355.000,00	0,00	4.862.355.000,00	100,00
7.2.01.07.03	DBH Lainnya-LO	2.784.581.000,00	0,00	2.784.581.000,00	100,00
7.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	754.341.909.960,00	0,00	754.341.909.960,00	100,00
7.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	649.643.409.733,00	0,00	649.643.409.733,00	100,00
7.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	104.698.500.227,00	0,00	104.698.500.227,00	100,00
7.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	197.479.680.152,00	0,00	197.479.680.152,00	100,00
7.2.01.09.01	DAK Fisik-LO	18.713.218.871,00	0,00	18.713.218.871,00	100,00
7.2.01.09.02	DAK Non Fisik-LO	178.766.461.281,00	0,00	178.766.461.281,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	**975.979.185.112,00**	**1.036.441.823.053,00**	**(60.462.637.941,00)**	**(5,83)**
7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	6.668.790.000,00	12.716.954.000,00	(6.048.164.000,00)	(47,56)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**6.668.790.000,00**	**12.716.954.000,00**	**(6.048.164.000,00)**	**(47,56)**
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	44.961.811.670,00	74.471.039.467,00	(29.509.227.797,00)	(39,63)
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	44.961.811.670,00	70.110.475.646,00	(25.148.663.976,00)	(35,87)
7.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	44.961.811.670,00	70.110.475.646,00	(25.148.663.976,00)	(35,87)
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	4.360.563.821,00	(4.360.563.821,00)	(100,00)
7.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	4.360.563.821,00	(4.360.563.821,00)	(100,00)
	JUMLAHPENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	**44.961.811.670,00**	**74.471.039.467,00**	**(29.509.227.797,00)**	**(39,63)**
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	**1.027.609.786.782,00**	**1.123.629.816.520,00**	**(96.020.029.738,00)**	**(8,55)**
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	**207.424.713.597,17**	**31.206.048.485,00**	**176.218.665.112,17**	**564,69**
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	189.147.575.327,17	14.621.715.995,00	174.525.859.332,17	1.193,61
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	18.277.138.270,00	16.584.332.490,00	1.692.805.780,00	10,21
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**207.424.713.597,17**	**31.206.048.485,00**	**176.218.665.112,17**	**564,69**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.387.117.299.036,39**	**1.265.260.478.409,31**	**121.856.820.627,08**	**9,63**
8	**BEBAN**	**1.235.398.946.126,51**	**1.259.280.271.828,66**	**(23.881.325.702,15)**	**(1,90)**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**971.911.670.334,23**	**1.010.170.303.906,19**	**(38.258.633.571,96)**	**(3,79)**
8.1.01	Beban Pegawai	626.863.135.357,00	616.832.021.667,00	10.031.113.690,00	1,63
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	321.181.214.231,23	334.404.637.669,00	(13.223.423.437,77)	(3,95)
8.1.02.01	Beban Barang	118.317.085.751,40	116.796.950.477,00	1.520.135.274,40	1,30
8.1.02.02	Beban Jasa	126.389.012.586,50	116.255.333.168,00	10.133.679.418,50	8,72
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	18.679.830.784,00	22.267.683.622,00	(3.587.852.838,00)	(16,11)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	33.936.397.461,00	52.907.257.613,00	(18.970.860.152,00)	(35,86)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.299.843.828,00	4.750.463.162,00	(450.619.334,00)	(9,49)
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	17.002.931.551,00	(17.002.931.551,00)	(100,00)

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN	%
8.1.02.89	Beban Barang dan Jasa BOSP	16.076.550.935,00	0,00	16.076.550.935,00	100,00
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	3.482.492.885,33	4.424.018.076,00	(941.525.190,67)	(21,28)
8.1.05	Beban Hibah	20.263.372.634,00	55.141.293.737,00	(34.877.921.103,00)	(63,25)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	3.603.948.112,00	3.792.350.833,19	(188.402.721,19)	(4,97)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**971.911.670.334,23**	**1.010.170.303.906,19**	**(38.258.633.571,96)**	**(3,79)**
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	175.465.476.551,28	162.168.992.822,47	13.296.483.728,81	8,20
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**175.465.476.551,28**	**162.168.992.822,47**	**13.296.483.728,81**	**8,20**
8.3	**BEBAN TRANSFER**	**88.021.799.241,00**	**86.747.499.100,00**	**1.274.300.141,00**	**1,47**
8.3.01	Beban Bagi Hasil	11.790.329.192,00	10.352.188.000,00	1.438.141.192,00	13,89
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	76.231.470.049,00	76.395.311.100,00	(163.841.051,00)	(0,21)
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	**88.021.799.241,00**	**86.747.499.100,00**	**1.274.300.141,00**	**1,47**
8.2	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	**0,00**	**193.476.000,00**	**(193.476.000,00)**	**(100,00)**
8.2.01	Beban Tidak Terduga	0,00	193.476.000,00	(193.476.000,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	**0,00**	**193.476.000,00**	**(193.476.000,00)**	**(100,00)**
	JUMLAH BEBAN	**1.235.398.946.126,51**	**1.259.280.271.828,66**	**(23.881.325.702,15)**	**(1,90)**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**151.718.352.909,88**	**5.980.206.580,65**	**145.738.146.329,23**	**2.437,01**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**	**3.230.281.772,71**	**8.673.708.444,95**	**(5.443.426.672,24)**	**(62,76)**
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	1.667.261.485,71	5.471.777.580,95	(3.804.516.095,24)	(69,53)
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.563.020.287,00	3.201.930.864,00	(1.638.910.577,00)	(51,19)
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**3.230.281.772,71**	**8.673.708.444,95**	**(5.443.426.672,24)**	**(62,76)**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(3.230.281.772,71)**	**(8.673.708.444,95)**	**5.443.426.672,24**	**(62,76)**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**148.488.071.137,17**	**(2.693.501.864,30)**	**151.181.573.001,47**	**(5.612,83)**
POS LUAR BIASA					
8.5	**BEBAN LUAR BIASA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**148.488.071.137,17**	**(2.693.501.864,30)**	**151.181.573.001,47**	**(5.612,83)**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran IV

Laporan Perubahan Ekuitas

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	2.553.212.194.126,89	2.552.268.925.278,66
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	148.488.071.137,17	(2.693.501.864,30)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(10.749.353.110,50)	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	15.616.308.404,34	3.636.770.712,53
EKUITAS AKHIR	2.706.567.220.557,90	2.553.212.194.126,89

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran V

Neraca

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024
1	**ASET**	**2.731.411.201.285,23**	**2.569.862.584.418,50**
1.1	**ASET LANCAR**	**121.481.303.510,35**	**124.407.858.822,43**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	54.457.274.784,16	14.931.433.146,83
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	48.981.186.250,16	11.297.340.907,83
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	33.195.698,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	3.521.177.533,00	1.820.332.198,00
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	90.168.720,00	3.830.105,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	6.102.334,00	1.200,00
1.1.01.10	Kas Dana BOSP	237.841.990,00	249.439.064,00
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	1.620.797.957,00	1.527.293.974,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	47.034.636.158,48	44.590.446.703,48
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	5.338.635.568,00	6.326.814.327,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	309.768.841,66	42.658.343,61
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	16.832.132.800,00	1.366.344.000,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	21.155.189.403,00	62.420.747.682,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(40.675.538.889,55)	(38.757.531.723,99)
1.1.12	Persediaan	17.029.204.844,60	33.486.946.343,50
	JUMLAH ASET LANCAR	121.481.303.510,35	124.407.858.822,43
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	17.137.737.252,00	18.725.757.539,00
1.2.01	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	**3.260.157.252,00**	**3.285.157.252,00**
1.2.01.05	Dana Bergulir	3.260.157.252,00	3.285.157.252,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	3.260.157.252,00	3.285.157.252,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	13.877.580.000,00	15.440.600.287,00
1.2.02.01	Penyertaan Modal	13.877.580.000,00	15.440.600.287,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	13.877.580.000,00	15.440.600.287,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	17.137.737.252,00	18.725.757.539,00
1.3	ASET TETAP	2.545.588.424.944,68	2.377.774.897.237,07
1.3.01	**Tanah**	**637.740.407.594,00**	**639.883.445.532,00**
1.3.02	Peralatan dan Mesin	521.656.762.585,67	486.891.796.904,67
1.3.03	Gedung dan Bangunan	912.129.065.001,70	883.795.231.952,53
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.469.292.002.239,51	2.232.811.830.415,10
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	120.854.286.219,00	111.413.949.841,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.072.648.637,04	1.306.980.147,11
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.145.156.747.332,24)	(1.978.328.337.555,34)
	JUMLAH ASET TETAP	2.545.588.424.944,68	2.377.774.897.237,07
1.5	ASET LAINNYA	33.617.102.078,20	35.367.437.320,00
1.5.01	**Tagihan Jangka Panjang**	**3.012.794.783,00**	**3.012.794.783,00**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	327.798.200,00	279.798.200,00
1.5.04	Aset Lain-lain	127.027.322.250,46	127.559.117.616,37
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(232.389.100,00)	(146.849.280,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(96.518.424.055,26)	(95.410.691.999,37)
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	73.268.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	33.617.102.078,20	35.367.437.320,00
1.6	PROPERTI INVESTASI	13.586.633.500,00	13.586.633.500,00
1.6.01	**Properti Investasi Tanah**	**13.586.633.500,00**	**13.586.633.500,00**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	13.586.633.500,00	13.586.633.500,00
	JUMLAH ASET	2.731.411.201.285,23	2.569.862.584.418,50
2	KEWAJIBAN	24.843.980.727,33	16.650.390.291,61
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**24.843.980.727,33**	**16.650.390.291,61**

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024
2.1.01	**Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**	**77.979.248,00**	**77.979.248,00**
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	1.314.350,00	0,00
2.1.06	Utang Belanja	24.764.687.129,33	16.572.411.043,61
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**24.843.980.727,33**	**16.650.390.291,61**
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**24.843.980.727,33**	**16.650.390.291,61**
3	**EKUITAS**	**2.706.567.220.557,90**	**2.553.212.194.126,89**
3.1	**EKUITAS**	**2.706.567.220.557,90**	**2.553.212.194.126,89**
3.1.01	Ekuitas	2.706.567.220.557,90	2.553.212.194.126,89
	JUMLAH EKUITAS	**2.706.567.220.557,90**	**2.553.212.194.126,89**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.731.411.201.285,23**	**2.569.862.584.418,50**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran VI

Laporan Arus Kas

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Pajak Daerah	89.922.705.301,98	61.540.045.940,28
Penerimaan Retribusi Daerah	43.732.430.443,00	33.697.123.306,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.446.458.482,00	2.624.980.942,59
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	12.160.228.138,85	7.188.618.925,83
Penerimaan Dana Bagi Hasil	0,00	25.748.210.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	0,00	752.945.824.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	101.278.750.464,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0,00	159.787.725.589,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil	23.320.794.200,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	754.341.909.960,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	18.713.218.871,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	178.766.461.281,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	187.787.277.514,00	205.413.540.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	6.668.790.000,00	12.716.954.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	81.866.806.128,00	65.841.106.524,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	4.360.563.821,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	18.277.138.270,00	16.584.332.490,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	**1.423.364.782.410,83**	**1.445.367.212.181,70**
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI		
Pembayaran Pegawai	612.409.535.553,00	622.939.163.784,00
Pembayaran Barang dan Jasa	330.896.946.272,50	343.502.153.763,00
Pembayaran Belanja Hibah	20.122.162.634,00	51.428.696.039,00
Pembayaran Tak Terduga	0,00	193.476.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	11.790.329.192,00	10.352.188.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	264.018.747.563,00	281.808.851.100,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	**1.239.237.721.214,50**	**1.310.224.528.686,00**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**184.127.061.196,33**	**135.142.683.495,70**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.265.996.639,00	0,00
Penjualan Aset Lain-Lain	1.850.000,00	298.518.100,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	**1.267.846.639,00**	**298.518.100,00**
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI		
Perolehan Peralatan dan Mesin	42.219.516.658,00	31.232.923.939,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	46.986.998.560,00	58.916.770.589,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	47.329.012.466,00	114.612.976.924,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.333.848.514,00	9.856.949.750,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	2.800.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	**145.869.376.198,00**	**217.419.621.202,00**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	**(144.601.529.559,00)**	**(217.121.103.102,00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

URAIAN	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	69.176.796.859,25	83.888.364.582,77
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	**69.176.796.859,25**	**83.888.364.582,77**
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	69.176.796.859,25	83.888.364.582,77
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	**69.176.796.859,25**	**83.888.364.582,77**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	**0,00**	**0,00**
Kenaikan/Penurunan Kas	**39.525.531.637,33**	**(81.978.419.606,30)**
Saldo Awal Kas	**14.931.433.146,83**	**97.051.278.637,13**
Koreksi SiLPA	**310.000,00**	**(141.425.884,00)**
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	**14.931.743.146,83**	**96.909.852.753,13**
Saldo Akhir Kas	**54.457.274.784,16**	**14.931.433.146,83**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran VII

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

LAMPIRAN VII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD Kabupaten Karo disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh seluruh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. LKPD digunakan terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

LKPD Kabupaten Karo disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen

   Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam suatu periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antar Generasi

   Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

LKPD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO)

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK)

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.

Melalui LKPD Pemerintah Kabupaten Karo, para pengguna laporan diharapkan memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Pemerintah Kabupaten Karo menyajikan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
2. Informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan terakhir kali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
k. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 02);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo tahun 2024 Nomor 06);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 04);
q. Peraturan Bupati Karo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2014 Nomor 16);
r. Peraturan Bupati Karo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusutan Barang Milik Daerah dan Masa Manfaat Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 61);
s. Peraturan Bupati Karo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Derah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
t. Peraturan Bupati Karo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 53);
u. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 17);
v. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 01);
w. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 02); dan
x. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 03).

1.3Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Anggaran Kinerja APBD

Bab ini memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam penyampaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi tentang entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab ini berisi penjelasan mengenai informasi Non Keuangan.

Bab VII Penutup

Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN ANGGARAN KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan. Kondisi perekonomian daerah dapat digambarkan melalui capaian indikator ekonomi makro seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), *Gini Ratio*, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemisikinan.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan dengan pendekatan produksi (lapangan usaha), pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Nilai PDRB Kabupaten Karo dengan pendekatan produksi (lapangan usaha) atas dasar harga (ADHB) berlaku pada tahun 2025 mencapai Rp30.462,81 miliar. Secara nominal, nilai PDRB tahun 2025 ini mengalami kenaikan sekitar 5,52% atau sebesar Rp1.594,92 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh kategori lapangan usaha. Selain itu, peningkatan nilai PDRB ini juga dipengaruhi oleh perubahan harga. Berdasarkan harga konstan (ADHK) 2010, nilai PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp16.641.17 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp17.345,36 miliar pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Karo mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,23%. Peningkatan tersebut murni disebabkan oleh kenaikan produksi di hampir seluruh kategori lapangan usaha seiring dengan membaiknya keadaan ekonomi, tidak dipengaruhi inflasi. PDRB Kabupaten Karo menunjukkan pertumbuhan yang positif sejak tahun 2023 hingga 2025. Lebih rinci, PDRB Kabupaten Karo menurut lapangan usaha, disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 PDRB Kabupaten Karo Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.193,51	15.312,17	15.909,28	8.767,60	8.990,20	9.268,98
B.	Pertambangan dan Penggalian	53,89	57,87	58,57	36,76	39,00	38,78
C.	Industri Pengolahan	1.007,98	1.076,36	1.158,75	528,43	544,68	560,52
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	17,83	17,71	17,64	15,52	15,93	16,13
E.	Pengadaan Air, Penge-lolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,44	20,45	22,40	12,87	13,25	14,16
F.	Konstruksi	1.849,38	2.038,07	2.054,03	1.051,06	1.126,86	1.127,02
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.000,17	3.244,23	3.594,40	1.725,71	1.813,63	1.973,55
H.	Transportasi dan Pergu-dangan	1.363,86	1.654,90	1.950,33	793,52	864,34	1.000,22
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	650,67	746,75	806,03	418,91	459,64	479,29
J.	Informasi dan Komu-nikasi	215,12	231,13	251,50	181,83	197,15	214,77
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	368,64	399,25	421,82	215,63	228,07	234,50
L.	Real Estate	880,29	947,43	951,49	515,33	542,17	567,81
M,N.	Jasa Perusahaan	53,20	59,02	64,50	30,09	32,00	34,03
O.	Administrasi Pemerin-tahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.409,08	1.622,53	1.636,30	821,52	875,87	864,60
P.	Jasa Pendidikan	616,15	675,52	735,26	435,20	466,58	497,71
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	337,10	357,56	399,71	202,45	206,49	221,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya	372,67	406,94	430,77	214,24	225,32	231,89
	PDRB	**26.408,97**	**28.867,89**	**30.462,81**	**15.966,67**	**16.641,17**	**17.345,36**

Selama tiga tahun terakhir (2023 - 2025) struktur perekonomian Kabupaten Karo didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yakni lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor, Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Transportasi dan Pergudangan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari peran masing-masing kategori terhadap PDRB Kabupaten Karo. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB menurut Lapangan Usaha adalah kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hampir setengah perekonomian Kabupaten Karo ditopang oleh kategori lapangan usaha tersebut, yakni sebesar 52,23%. Selanjutnya, peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 11,80% disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,74% serta lapangan usaha Transportasi dan pergudangan sebesar 6,40%. Berikutnya adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan peran sebesar 5,37% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Karo. Lebih lanjut peranan masing masing sektor Lapangan Usaha dalam membentuk PDRB disajikan pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2. 2 Peranan PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha		Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2023	2024	2025
(1)		(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	53,75	53,04	52,23
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,20	0,20	0,19
C.	Industri Pengolahan	3,82	3,73	3,80

Lapangan Usaha		Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2023	2024	2025
(1)		(5)	(6)	(7)
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07
F.	Konstruksi	7,00	7,06	6,74
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,36	11,24	11,80
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,16	5,73	6,40
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,46	2,59	2,65
J.	Informasi dan Komunikasi	0,81	0,80	0,83
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	1,38	1,38
L.	Real Estate	3,33	3,28	3,12
M,N.	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,21
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,34	5,62	5,37
P.	Jasa Pendidikan	2,33	2,34	2,41
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,24	1,31
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,41	1,41	1,41
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**

Nilai PDRB Kabupaten Karo dengan pendekatan pengeluaran atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2025 mencapai Rp30.462,81 miliar. Sama halnya dengan PDRB ADHB, Nilai PDRB ADHK 2010 juga menunjukkan peningkatan dari Rp14.582,33 miliar tahun 2021 menjadi Rp17.345,36 miliar. Lebih rinci, PDRB Kabupaten Karo menurut pengeluaran, disajikan pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 PDRB Kabupaten Karo Menurut Pengeluaran

Komponen		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.013,36	15.081,57	16.200,76	8.319,69	8.692,01	9.031,13
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	441,38	516,85	546,85	296,39	337,66	349,41
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.117,68	2.161,82	2.069,94	1.147,55	1.152,70	1.074,85
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.631,31	9.289,15	9.738,96	5.061,25	5.292,44	5.377,40
5	Perubahan Inventori	344,78	173,28	-2,91	251,28	71,04	-1,22
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	860,47	1.645,21	1.909,21	890,50	1.095,31	1.513,79
PDRB		**26.408,97**	**28.867,89**	**30.462,81**	**15.966,67**	**16.641,17**	**17.345,36**

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas, konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Mencermati hal tersebut, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Kabupaten Karo sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga, yakni di atas 52,00% dengan kontribusi tertinggi. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada sekitar 6,00% hingga 9,00% dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Sedangkan konsumsi pengeluaran untuk kapital (PMTB) mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sebesar 31,97%. Lebih lanjut distribusi pengeluaran dalam membentuk PDRB disajikan pada Tabel 2.4, berikut :

Tabel 2. 4 Distribusi Pengeluaran Dalam Membentuk PDRB

Komponen		Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2023	2024	2025
(1)		(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53,06	52,24	53,18
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,67	1,79	1,80
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,02	7,49	6,79
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,68	32,18	31,97
5	Perubahan Inventori	1,31	0,60	-0,01
6	*Net* Ekspor Barang dan Jasa	3,26	5,70	6,27
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah. PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB per kapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku dan harga konstan periode 2021 sampai dengan 2025 disajikan pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 5 PDRB Per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Tahun/ *Year*	Harga Berlaku/ *Current Market Prices*		Harga Konstan/ *Constant Market Prices*	
	Nilai/ *Value*	Pertumbuhan/ *Growth*	Nilai/ *Value*	Pertumbuhan/ *Growth*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2021	53,32	2,67	35,63	0,84
2022	57,76	8,33	36,61	2,77
2023	62,75	8,65	37,94	3,63
2024*	67,69	7,86	39,02	2,84
2025**	70,51	4,16	40,15	2,89

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro ekonomi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Karo tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Peningkatan nilai PDRB tersebut disebabkan oleh meningkatnya produksi (tanpa dipengaruhi perubahan harga) di semua kategori lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga konstan tahun 2025 mencapai Rp17.345,36 miliar. Angka tersebut meningkat sebesar Rp704,19 juta dari tahun 2024 sebesar Rp16.641,17 miliar. Dengan kata lain, pada tahun 2025 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,23%.

Berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha, Laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Karo terlihat pada masing masing sektor sebagaimana pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010		
		2023	2024	2025
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,11	2,54	3,10
B.	Pertambangan dan Penggalian	5,31	6,07	-0,57
C.	Industri Pengolahan	4,24	3,07	2,91
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,76	2,68	1,23
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,80	2,95	6,88
F.	Konstruksi	6,35	7,21	0,01
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,56	5,09	8,82
H.	Transportasi dan Pergudangan	11,49	8,92	15,72
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,55	9,72	4,28
J.	Informasi dan Komunikasi	7,59	8,43	8,94
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,89	5,77	2,82
L.	Real Estate	5,11	5,21	4,73
M,N.	Jasa Perusahaan	5,33	6,35	6,35
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,35	6,62	-1,29
P.	Jasa Pendidikan	7,53	7,21	6,67
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,98	2,00	7,22
R,S,T, U.	Jasa Lainnya	5,73	5,17	2,91
PDRB		**5,06**	**4,22**	**4,23**

Sebagian besar kategori lapangan usaha Kabupaten Karo pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan yang positif. Delapan dari tujuh belas lapangan usaha mengalami percepatan. Sementara itu, tujuh lapangan usaha lainnya tercatat mengalami perlambatan, dan dua lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi. Pertumbuhan Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan yang paling tinggi, yakni sebesar 15,72%.

Sedangkan, berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, Laju pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran Kabupaten Karo terlihat pada masing masing sektor sebagaimana pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran

Komponen		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010		
		2023	2024	2025
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,20	4,48	3,90
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	13,82	13,92	3,48
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,40	0,45	-6,75
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,85	4,57	1,61
5	Perubahan Inventori	-	-	-
6	*Net* Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-
PDRB		**5,06**	**4,22**	**4,23**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2025 sebesar 4,23%, berada pada urutan ke-16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan masih di atas rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-

Sumatera Utara tahun 2025 yakni 4,12%. Kabupaten Karo berkontribusi sebesar 2,46% dalam membentuk Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,53% dan berada pada urutan ke-11 Kabupaten/Kota.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo masih berada di bawah tingkat pertumbuhan ekomoni Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,53% namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,11%. Perkembangan pertumbuhan ekononi Pemerintah Kabupaten Karo dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada gambar diagram 2.1 sebagai berikut:

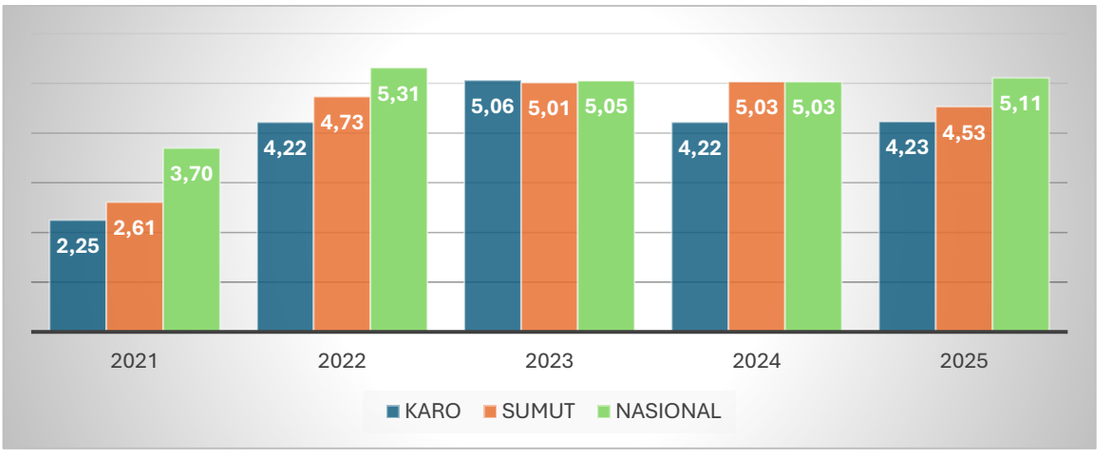

Gambar 2. 1 Diagram Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2021 Sampai Dengan 2025

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Kabupaten Karo terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Kabupaten Karo sudah berada di level "tinggi". Selama tahun 2020– 2025, IPM Kabupaten Karo rata-rata meningkat sebesar 0,71% per tahun, yaitu dari sebesar 75,40% pada tahun 2020 menjadi 78,10% pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara. Pada tahun 2025, Kabupaten Karo berada pada posisi ke-9 dari 33 Kabupaten/Kota. Perkembangan IPM Kabupaten Karo Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar diagram 2.2 berikut:

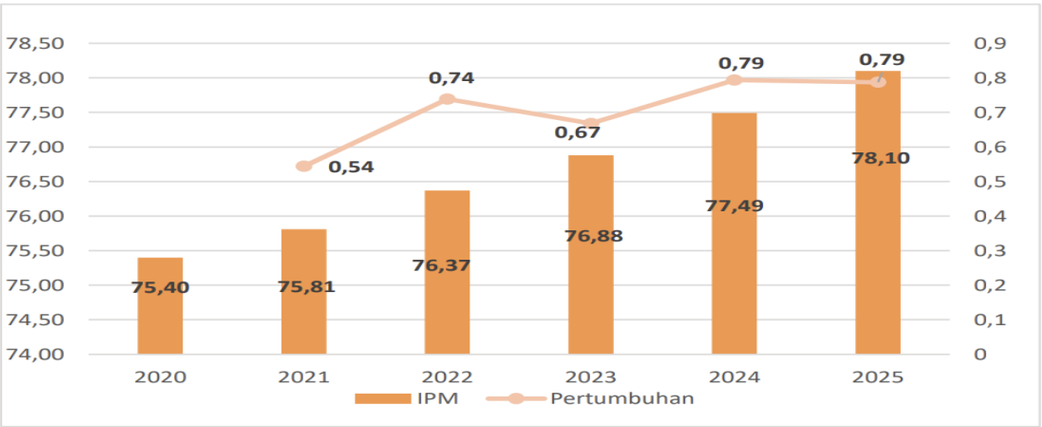

Gambar 2. 2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2025

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator lain yang mengalami pertumbuhan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Lama Sekolah (HLS). Adapun capaian dimensi penyusunan IPM tahun 2021 sampai dengan 2025, disajikan pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2. 8 Dimensi Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2025

No	Komponen IPM Metode Baru	2021	2022	2023	2024	2025
1	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,64	74,14	74,16	74,39	74,71
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,77	12,95	13,25	13,26	13,27
3	Rata Rata Lama Sekolah (RLS)	10	10,02	10,03	10,12	10,3
4	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	12.412	12.554	12.779	13.278	13.583

Peningkatan IPM Kabupaten Karo 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,71 tahun, meningkat 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,26 tahun menjadi 13,27 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,18 tahun dari 10,12 tahun menjadi 10,30 tahun pada tahun 2025. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat Rp305,00 ribu (2,29%) dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.4 *Gini Ratio*

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, maka tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Adapun *Gini Ratio* Kabupaten pada periode tahun 2021 sampai 2025 sebagaimana digambarkan pada grafik 2.3 berikut:

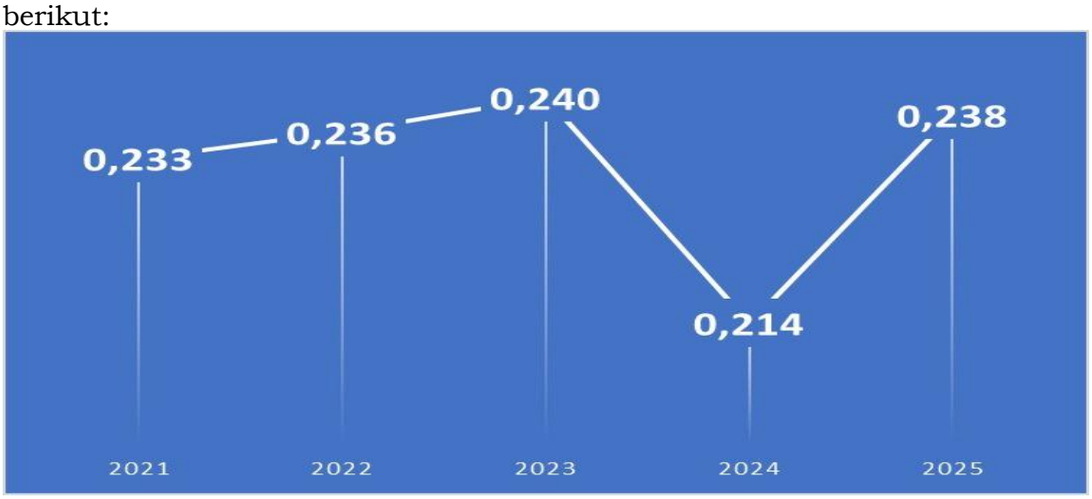

Gambar 2. 3 Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik 2.3 di atas, Tren *Gini Ratio* Kabupaten Karo tahun 2021–2025 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dan cenderung stabil. Nilai *Gini Ratio* bergerak dari 0,233 pada tahun 2021 menjadi 0,236 pada tahun 2022 dan meningkat tipis menjadi 0,240 pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, meskipun masih berada pada kategori ketimpangan rendah karena nilai *Gini Ratio* berada di bawah 0,4. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh belum meratanya pemulihan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah.

Pada tahun 2024, *Gini Ratio* mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 0,214 yang mengindikasikan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata.

Hal ini dapat mencerminkan mulai optimalnya dampak program pembangunan daerah, peningkatan kesempatan kerja, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat. Namun, pada tahun 2025 nilai *Gini Ratio* kembali meningkat menjadi 0,238. Meskipun demikian, angka tersebut masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang tergolong rendah. Secara umum, tren ini menggambarkan bahwa kondisi pemerataan pendapatan di Kabupaten Karo relatif baik, namun tetap diperlukan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja. TPT menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kondisi ketenagakerjaan dan kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan lapangan kerja. Semakin rendah nilai TPT, maka semakin baik kondisi pasar kerja dan penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah.

Adapun perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka pada periode tahun 2021 sampai 2025 pada Kabupaten Karo, disajikan pada grafik 2.4 berikut:

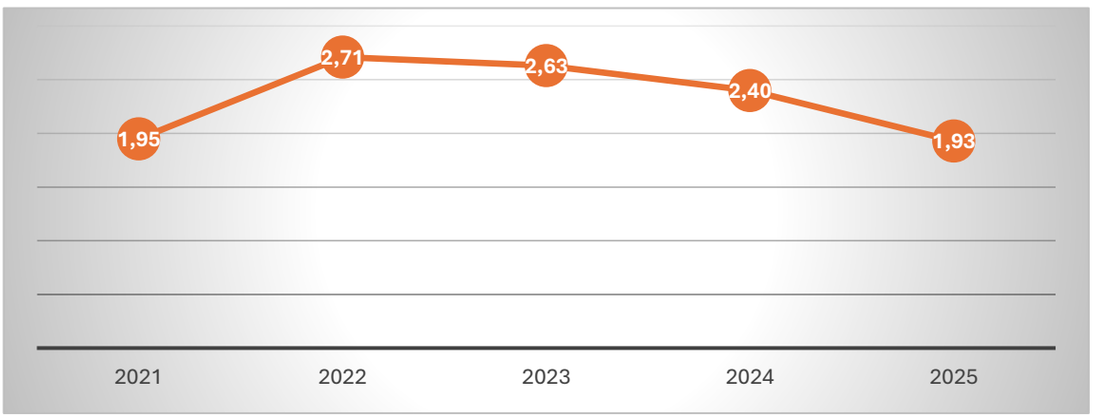

Gambar 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo, 2021-2025

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo menunjukkan tren yang relatif fluktuatif namun cenderung menurun pada akhir periode. Pada tahun 2021, TPT tercatat sebesar 1,95 persen, kemudian meningkat menjadi 2,71 persen pada tahun 2022. Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya stabil sehingga penyerapan tenaga kerja belum optimal. Selanjutnya, TPT mulai mengalami penurunan secara bertahap menjadi 2,63 persen pada tahun 2023 dan 2,40 persen pada tahun 2024, hingga mencapai 1,93 persen pada tahun 2025.

Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Karo semakin membaik dan kemampuan ekonomi daerah dalam menciptakan kesempatan kerja mengalami peningkatan. Rendahnya tingkat pengangguran juga mengindikasikan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap pada berbagai sektor ekonomi, terutama sektor pertanian, perdagangan, dan jasa yang menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Karo. Pemerintah Daerah perlu terus mendorong penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan investasi daerah agar tingkat pengangguran dapat tetap terjaga pada level yang rendah dan stabil.

2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Perkembangan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Karo dari tahun 2021-2025 berlangsung fluktuatif. Secara trend dalam periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan nilai positif dimana persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dari tahun 2021 sebesar 8,79% berangsur-

angsur menurun menjadi 6,66% di tahun 2025. Perkembangan Tingkat Kemiskinan periode tahun 2021 sampai 2025, disajikan pada grafik 2.5 berikut:

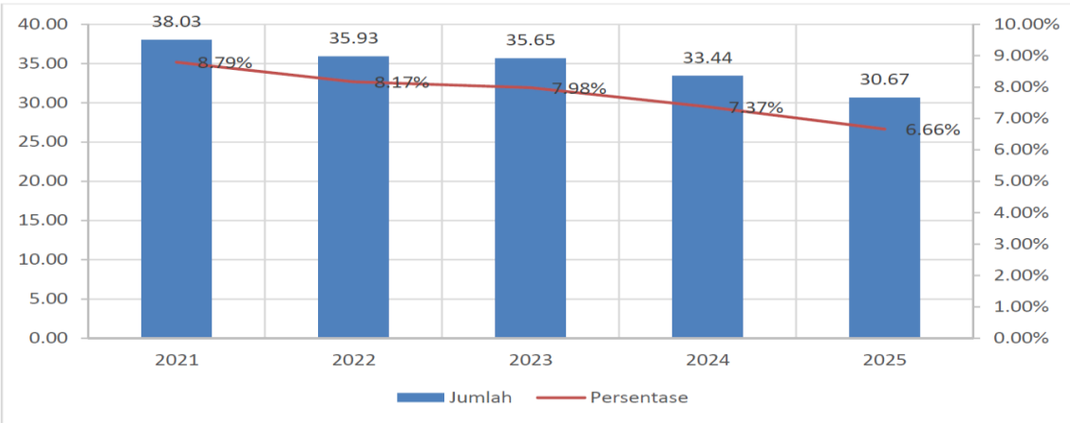

Gambar 2. 5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo Tahun 2021-2025

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu mewujudkan pemerataan pembangunan, memberikan pelayanan publik, menggerakkan aktifitas perekonomian dan menstimulasi peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya. Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan dan pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal) merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi.

Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud telah diatur menurut kewenangan yang diserahkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih pendanaan dan menjamin ketersediaan pendanaan suatu urusan pemerintahan khususnya yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dengan kata lain, keuangan daerah sebagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud diwujudkan dalam APBD setiap tahunnya. Untuk itu, arah kebijakan keuangan daerah yang didalamnya meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, disusun guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun anggaran 2025, pelaksanaan APBD dilakukan melalui:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 20243 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
3. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36); dan
4. Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 25).

Dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, secara umum kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karo tahun anggaran 2025 diarahkan pada:

1. Meningkatkan penerimaan daerah dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial dan strategis;
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran belanja daerah yang berkualitas yang dapat ditempuh dengan mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.
3. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya diutamakan untuk menganggarkan kembali sisa dana yang bersumber dari dana yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya tersebut juga digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah baik yang telah digunakan sebagian pada APBD Induk 2025 dan/atau untuk peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan.

2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah yang akan membentuk tingkat kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pendanaan pembangunan dan aktivitasnya.

Pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD disusun dengan perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Untuk optimalisasi pencapaiannya, arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang;
2. Dana transfer pemerintah pusat dan dana desa dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN TA 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Alokasi Transfer ke Daerah, sedangkan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan pelaksanaan transfer ke daerah;
3. Pengelolaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara terkait Alokasi Bagi Hasil dan/atau Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan tata laksana organisasi, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;

7. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi, peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah pada perangkat daerah penghasil;
8. Meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
9. Dalam upaya peningkatan PAD, mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan; dan
10. Keterlibatan secara aktif seluruh potensi sumberdaya manusia, dalam optimalisasi sumber-sumber keuangan daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik. Sumber-sumber keuangan dimaksud selain berasal dari pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga berasal dari swadaya masyarakat serta kerjasama sinergis dengan dunia swasta.

2.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah dalam APBD Tahun 2025 disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung capaian sasaran pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Karo yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Mendanai 9 (Sembilan) prioritas pembangunan daerah khususnya target "*Major Project*" yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
4. Pendanaan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan usulan musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah melalui penelaahan dan perhitungan kapasitas riil keuangan daerah;
5. Pemenuhan kewajiban daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang bersifat "*mandatory*" atau yang telah ditentukan dan diwajibkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional;
6. Belanja daerah disinkronisasikan dan diharmonisasikan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah;
7. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
8. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;

10. Menganggarkan kembali sisa dana tahun anggaran 2024 yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
11. Belanja Pegawai dianggarkan dengan memperhatikan:
    a. Gaji dan Tunjangan berdasarkan rekonsiliasi perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN dengan memperhatikan rencana kenaikan gaji pokok, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK), *acress* 2,5%, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian;
    b. Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya; dan
    c. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN, Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
12. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan dengan memperhatikan:
    a. Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
    b. Belanja barang dan jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
    c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan;
13. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan belanja hibah pada tahun 2025 diberikan untuk bantuan keuangan Partai Politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Vertikal Daerah yang sifatnya tidak mengikat dan terus menerus serta penganggarannya sudah melekat pada perangkat daerah sesuai urutan penyelenggaraan pemerintah daerah;
14. Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga atau kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan mengikat serta selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial yang telah direncanakan seperti pemberian beasiswa kepada masyarakat miskin, bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena bencana dan bantuan sosial lainnya dianggaran pada perangkat daerah sesuai dengan urusan masing masing dan untuk yang tidak terencana dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga;
15. Belanja Modal dianggarkan dengan memperhatikan:
    a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi, aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa;
    b. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan; dan

c. Dalam rangka penataan dan optimalisasi kendaraan dinas jabatan/kendaraan dinas operasional, tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas jabatan/kendaraan dinas operasional kecuali berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaanya;

16. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
17. Belanja transfer dianggarkan dengan memperhatikan :
    a. Belanja Bagi Hasil ke Pemerintah Desa yang merupakan penganggaran bagi hasil atas pajak dan retribusi daerah sebesar 10% dari penganggaran PDRD; dan
    b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang merupakan penganggaran ADD sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK dan Dana Desa dari APBN.

Selain arah kebijakan belanja daerah dimaksud, melalui pokok-pokok kebijakan fiskal, belanja daerah juga diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktifitas belanja dilakukan dengan memedomani kebijakan transfer ke daerah sesuai dengan kapasitas fiskal, kebutuhan dan prioritas daerah;
2. Pemenuhan belanja wajib pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah;
3. Pengaturan batas maksimal belanja pegawai;
4. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur;
5. Kebijakan *earmarking* atas penggunaan beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Penguatan kesejahteraan masyarakat (*regional well-being*) dilakukan melalui intervensi terhadap pemerataan akses layanan publik daerah melalui penguatan transfer ke daerah *earmarked*, pengurangan kemiskinan melalui penguatan belanja tematik kemiskinan yang selaras dengan kondisi daerah dan perbaikan penyasaran, dan penurunan prevelensi stunting melalui optimalisasi belanja daerah yang tepat sasaran. Dalam rangka pengurangan kemiskinan, aspek utama yang diperhatikan adalah peningkatan pendapatan, perumahan, perluasan lapangan kerja, akses layanan publik, pendidikan dan fungsi perlindungan sosial. Sedangkan penurunan prevelensi stunting yaitu dengan mengedepankan orientasi belanja terhadap pemberian makanan bagi ibu hamil, penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan, gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan bergizi.

2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan dari SiLPA tersebut digunakan dalam tahun anggaran berjalan antara lain untuk:

1. menutupi defisit anggaran;
2. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
3. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
4. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
5. mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Selain kebijakan penerimaan pembiayaan tersebut, penggunaan SILPA juga memperhatikan karakteristik sumber dana. Penggunaan SiLPA yang bersumber dari SILPA atas sumber pendanaan yang ditentukan penggunaanya digunakan kembali sesuai dengan peruntukannya.

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2025 dianggarkan ”NIHIL”.

2.2.4 Kebijakan Umum *Mandatory Spending*

Sejalan dengan kebijakan belanja, pendanaan *mandatory spending* atau belanja wajib/belanja yang ditentukan penggunaannya merupakan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan dan/atau kebijakan fiskal nasional yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan pokok-pokok kebijakan fiskal terhadap pelaksanaan TKD dan pelaksanaan APBD diantarannya berfokus pada pelaksanaan belanja wajib (*mandatory spending*) seperti belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selanjutnya diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, beberapa ketentuan *mandatory spending* yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja wajib pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah, dilakukan dengan mengalokasikan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, mendukung pencapaian SPM pendidikan, dan melakukan budget tracking untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan sesuai dengan KMK Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
2. Pengaturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total belanja daerah, dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa batas maksimal dimaksud paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ditetapkan atau Tahun 2027;
3. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah dengan batasan minimal belanja infrastruktur sebesar 40% dari total belanja daerah dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa batas maksimal dimaksud paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undangundang ditetapkan atau Tahun 2027. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk penguatan monitoring dan evaluasi pemenuhan belanja infrastruktur dilakukan *budget tracking* yang digunakan untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja infrastruktur sesuai dengan KMK Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
4. Kebijakan *earmarking* atas penggunaan beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah antara lain:
   a. PKB dan opsen PKB minimal 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
   b. Pajak barang jasa tertentu atas tenaga listrik minimal 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum (PJU) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk PJU;
   c. Pajak rokok minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Dari 50% tersebut, minimal sebesar 75% untuk penganggaran iuran pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah dalam kepesertaan program JKN maupun bantuan iuran dan kontribusi iuran peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK); dan

d. Pajak air tanah minimal 10% untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kuantitas dan kualitas air tanah;

5. Bagi hasil atas pajak dan retribusi daerah sebesar 10% dari penganggaran PDRD; dan
6. Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK dan Dana Desa dari APBN.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Anggaran Kinerja Keuangan

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem penganggaran yang mengutamakan pencapaian keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja tersebut, APBD disusun dalam rangka pencapaian sasaran tertentu yang hendak diwujudkan dalam satu tahun anggaran.

Tema Pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2025 adalah "PEMANTAPAN DAYA SAING MENUJU KARO YANG MAJU DI SEKTOR PARIWISATA DAN PERTANIAN". Tema tersebut memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan;
4. Peningkatan iklim investasi yang kondusif;
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
6. Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Agar program dan kegiatan APBD lebih fokus dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, disusunlah indikator kinerja kegiatan, yaitu indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Terdapat 35 indikator kinerja utama perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada lampiran 1.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.424.632.629.049,83 atau 98,90% yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp150.529.669.004,83 atau 96,28%, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.255.825.821.775,00 atau 99,23% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp18.277.138.270,00 atau 98,49% dari nilai pagu yang telah dianggarkan;
2. Belanja Daerah sebesar Rp1.385.107.097.412,50 atau 95,18% yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp963.428.644.459,50 atau 94,73%, Belanja Modal sebesar Rp145.869.376.198,00 atau 97,48%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00% dan Belanja Transfer sebesar Rp275.809.076.755,00 atau 96,54% dari nilai pagu yang telah dianggarkan; dan
3. Pembiayaan Daerah sebesar Rp14.799.361.336,83 yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp14.799.361.336,83 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp54.324.892.974,16.

Secara garis besar ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dilihat pada lampiran 2.

Selanjutnya dalam rangka pengukuran kinerja keuangan, beberapa aspek yang dapat diukur antara lain :

1. Rasio kemandirian daerah
   Rasio kemandirian daerah adalah indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai operasional, proyek pembangunan dan layanan publik dari sumber pendapatan lokal, seperti pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah yang juga mencakup

transfer dari pemerintah pusat atau daerah lain. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Formulasi :

PAD / Total Pendapatan Daerah x 100%

Hasil Pengukuran :

$$\frac{150.529.669.004,83}{1.424.632.629.049,83}\ x\ 100\% = \ 10,57\%$$

2. Rasio efektivitas PAD (realisasi terhadap anggaran)

   Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif jika rasio efektivitas yang dicapai minimal 100% dan semakin tinggi semakin baik.

   Formulasi :

   Realisasi penerimaan PAD / Target penerimaan PAD x 100%

   Hasil Pengukuran :

$$\frac{150.529.669.004,83}{156.345.552.932,00}\ x\ 100\% = \ 96,28\%$$

3. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah

   Formulasi:

   Realisasi belanja pegawai/ Total belanja daerah x 100%

$$\frac{612.409.535.553,00}{1.385.107.097.412,50}\ x\ 100\% = \ 44,21\%$$

4. Belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah

   Formulasi:

   Realisasi belanja barang dan jasa/ Total belanja daerah x 100%

$$\frac{330.896.946.272,50}{1.385.107.097.412,50}\ x\ 100\% = \ 23,89\%$$

5. Rasio belanja hibah terhadap total belanja daerah

   Formulasi:

   Realisasi belanja hibah/ Total belanja daerah x 100%

$$\frac{20.122.162.634,00}{1.385.107.097.412,50}\ x\ 100\% = \ 1,45\%$$

6. Rasio belanja bantuan sosial terhadap total belanja daerah

   Formulasi:

   Realisasi belanja bantuan sosial/ Total belanja daerah x 100%

$$\frac{0,00}{1.385.107.097.412,50}\ x\ 100\% = \ 0,00\%$$

7. Rasio belanja tidak terduga terhadap total belanja daerah

   Formulasi:

   Realisasi belanja tidak terduga/ Total belanja daerah x 100%

$$\frac{0,00}{1.385.107.097.412,50} x\ 100\% = 0,00\%$$

8. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah
   Formulasi:
   Realisasi belanja modal/ Total belanja daerah x 100%

$$\frac{145.869.376.198,00}{1.385.107.097.412,50} x\ 100\% = 10,53\%$$

9. Rasio transfer/bagi hasil ke desa terhadap total belanja daerah
   Formulasi:
   Realisasi belanja bagi hasil/ Total belanja daerah x 100%

$$\frac{11.790.329.192,00}{1.385.107.097.412,50} x\ 100\% = 0,85\%$$

10. Rasio transfer/bantuan keuangan terhadap total belanja dan transfer
    Formulasi:
    Realisasi belanja bantuan keuangan/ Total belanja daerah x 100%

$$\frac{264.018.747.563,00}{1.385.107.097.412,50} x\ 100\% = 19,06\%$$

11. Pembiayaan
    Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp14.799.361.336,83 berasal dari SiLPA daerah tahun 2024 sebesar Rp14.799.361.336,83 dan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp0,00.
    Realisasi pembiayaan netto tahun 2025 sebesar Rp14.799.361.336,83 berasal dari realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp14.799.361.336,83 dikurangi pengeluaran pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp0,00.

12. Rasio SiLPA terhadap total penerimaan pembiayaan
    Formulasi:
    SiLPA tahun sebelumnya/ Total penerimaan pembiayaan x 100%

$$\frac{14.799.361.336,83}{14.799.361.336,83} x\ 100\% = 100,00\%$$

13. Rasio penyertaan modal pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pembiayaan
    Formulasi:
    Penyertaan modal pemerintah daerah/ Total pengeluaran pembiayaan x 100%

$$\frac{0,00}{0,00} x\ 100\% = 0,00\%$$

Selain itu, pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga menjadi fokus dan unsur yang terkait dalam menilai kinerja keuangan. Adapun capaian pemenuhan *mandatory spending* dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Fungsi Pendidikan
   Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah. Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, alokasi belanja fungsi pendidikan yang dihitung berdasarkan penandaan subkegiatan fungsi pendidikan sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 35/MK/PK/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yakni sebesar 31,13% atau sebesar Rp453.084.943.583,00 dari total APBD sebesar Rp1.455.323.089.325,00. Apabila dihitung dari realisasi, realisasi belanja fungsi pendidikan sebesar 31,54% atau sebesar Rp436.839.928.141,00 dari total realisasi belanja APBD sebesar Rp1.385.107.097.412,50. Adapun belanja fungsi pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada lampiran 3.

2. Belanja infrastruktur

   Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Selain itu, juga termasuk belanja operasional penggunaan fasilitas pelayanan publik dan belanja yang menghasilkan keluaran untuk menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik yang dianggarkan pada APBD TA berkenaan. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

   Berdasarkan Penandaan Subkegiatan Belanja Infrastruktur sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/MK/PK/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 porsi belanja infrastruktur yakni 27,15% atau Rp317.562.199.927,00 dari total belanja setelah dikurangan bagi hasil/transfer ke desa sebesar Rp1.169.637.347.433,00. Apabila dihitung dari realisasi, realisasi belanja infrastruktur sebesar 26,30% atau sebesar Rp291.743.560.347,50 dari total realisasi belanja APBD setelah dikurangkan realisasi bagi hasil/transfer ke desa sebesar Rp1.109.298.020.657,50.

   Mencermati porsi tersebut, Kabupaten Karo belum mampu memenuhi 40,00% belanja Infrastruktur. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pemenuhan porsi belanja infrastruktur paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang tersebut ditetapkan atau paling lambat tahun 2027. Lebih lanjut, uraian subkegiatan untuk belanja infrastruktur dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada lampiran 4.

3. Belanja Pegawai

   Berdasarkan ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Adapun alokasi belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1 Belanja Pegawai dalam APBD TA 2025

Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah	1.455.323.089.325,00	1.385.107.097.412,50	95,18%
Belanja Pegawai	636.648.855.621,00	612.409.535.553,00	96,19%

Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	95.849.535.900,00	92.618.519.400,00	96,63%
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	94.603.117.900,00	90.318.519.400,00	95,47%
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.246.418.000,00	2.300.000.000,00	184,53%
Total Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	540.799.319.721,00	519.791.016.153,00	96,12%
% Terhadap Total Belanja APBD (Max 30%)	**37,16%**	**37,53%**	

Mencermati tabel diatas, porsi belanja pegawai belum dapat memenuhi ketentuan maksimal 30%. pemenuhan batas maksimal porsi belanja pegawai paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut ditetapkan atau paling lambat tahun 2027.

4. Alokasi Dana Desa
   Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, sedangkan DBH merupakan seluruh jenis DBH selain DBH-CHT, DBH-SDA kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA perkebunan sawit, dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus. Adapun Alokasi Dana Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3. 2 Alokasi Dana Desa dalam APBD TA 2025

Uraian	Anggaran (Rp)
Total Dana Transfer Umum (DTU)	766.632.419.000,00
Pengurang :	
- DBH-CHT	1.527.771.000,00
- DBH Sawit	2.784.581.000,00
Dasar Perhitungan	762.320.067.000,00
Alokasi Dana Desa	76.232.006.700,00
Persentase	10%

5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
   Pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 900.1.13.1/214/Keuda perihal Penjelasan terkait Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dijelaskan bahwa Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Retribusi Daerah dikecualikan untuk retribusi yang disetor ke kas BLUD. Adapun Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3. 3 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerinah Desa dalam APBD TA 2025

Uraian	Anggaran (Rp)
Total Rencana Pajak dan Retribusi Daerah	143.495.911.918,00

Uraian	Anggaran (Rp)
Pengurang :	
- Retribusi pada BLUD	25.629.745.000,00
Dasar Perhitungan	117.866.166.918,00
Alokasi Dana Desa	11.790.329.192,00
Persentase	10%

6. Belanja Wajib yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang Telah Ditentukan Penggunaannya

   Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya. Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditetapkan penandaan subkegiatan untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

   Rincian penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya diuraikan sebagai berikut:

   a. Opsen PKB

      Penggunaan atas hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

      Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 porsi belanja wajib dari penerimaan Opsen PKB yakni 11,10% atau Rp2.433.901.777,00 dari rencana penerimaan sebesar Rp21.928.235.089,00. Apabila dihitung dari realisasi, realisasi belanja belanja wajib dari penerimaan Opsen PKB sebesar 14,11% atau sebesar Rp2.433.901.777,00 dari realisasi penerimaan sebesar Rp17.254.448.571,00. Adapun belanja wajib yang bersumber dari opsen PKB dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3. 4 Belanja Wajib yang Bersumber dari Opsen PKB dalam APBD TA 2025

Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan	1.941.611.277,00	1.941.611.277,00	100,00%
1.03.10.2.01.0044 - Rehabilitasi Jalan	492.290.500,00	492.290.500,00	100,00%
Alokasi Penggunaan Opsen PKB	2.433.901.777,00	2.433.901.777,00	100,00%
Pendapatan Opsen PKB	21.928.235.089,00	17.254.448.571,00	78,69%
% Alokasi Opsen PKB (Min 10%)	11,10%	14,11%	

   b. PBJT atas Tenaga Listrik

      Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

      Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 porsi belanja wajib dari penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik yakni 44,81% atau Rp 10.800.000.000,00 dari rencana penerimaan sebesar Rp24.100.000.000,00. Apabila dihitung dari realisasi, realisasi belanja belanja wajib dari penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar 51,08% atau sebesar Rp10.591.480.248,00 dari realisasi penerimaan sebesar Rp20.734.343.715,00. Adapun belanja wajib yang

bersumber dari PBJT atas tenaga listrik dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3. 5 Belanja Wajib yang Bersumber dari PBJT atas Tenaga Listrik dalam APBD TA 2025

Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Perhubungan			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.800.000.000,00	10.591.480.248,00	98,07%
Alokasi Penggunaan PBJT-Listrik	10.800.000.000,00	10.591.480.248,00	98,07%
Pendapatan PBJT-Listrik	24.100.000.000,00	20.734.343.715,00	86,03%
% Alokasi PBJT-TL (Min 10%)	44,81%	51,08%	

c. Pajak Air Tanah (PAT)

Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 porsi belanja wajib dari penerimaan PAT yakni 38,60% atau Rp1.235.258.456,00 dari rencana penerimaan sebesar Rp3.200.000.000,00. Apabila dihitung dari realisasi, realisasi belanja belanja wajib dari penerimaan PAT sebesar 36,87% atau sebesar Rp1.187.911.499,00 dari realisasi penerimaan sebesar Rp3.221.544.457,00. Adapun belanja wajib yang bersumber dari PAT dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3. 6 Belanja Wajib yang Bersumber dari PAT dalam APBD TA 2025

Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.235.258.456,00	1.187.911.499,00	96,17%
Alokasi Penggunaan PAT	1.235.258.456,00	1.187.911.499,00	96,17%
Pendapatan PAT	3.200.000.000,00	3.221.544.457,00	100,67%
% Alokasi PAT (Min 10%)	38,60%	36,87%	

d. Pajak Rokok

Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 porsi belanja wajib dari penerimaan Pajak Rokok yakni 79,73% atau Rp19.731.441.878,00 dari rencana penerimaan sebesar Rp 24.746.501.955,00. Apabila dihitung dari realisasi, realisasi belanja belanja wajib dari penerimaan Pajak Rokok sebesar 84,69% atau sebesar Rp 19.695.223.722,00 dari realisasi penerimaan sebesar Rp23.256.622.267,00. Adapun belanja wajib yang bersumber dari pajak rokok dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3. 7 Belanja Wajib yang Bersumber dari Pajak Rokok dalam APBD Tahun Anggaran 2025

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan		19.391.189.878,00	19.367.806.058,00	99,88%
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1.000.000.000,00	983.416.500,00	98,34%
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	200.000.000,00	199.520.000,00	99,76%
3	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	409.505.600,00	409.505.600,00	100,00%
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.400.000,00	-	0,00%
15	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%
16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.658.692.678,00	17.658.692.678,00	100,00%
17	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%
18	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	51.591.600,00	50.671.280,00	98,22%
19	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%
Rumah Sakit Umum				
1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	334.907.000,00	322.072.664,00	
Satuan Polisi Pamong Praja				
1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	5.345.000,00	5.345.000,00	
Alokasi Penggunaan Pajak Rokok		19.731.441.878,00	19.695.223.722,00	99,82%
Pendapatan Pajak Rokok		24.746.501.955,00	23.256.622.267,00	93,98%
% Alokasi Pajak Rokok (Min 50%)		79,73%	84,69%	

3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Ikhtisar realisasi pencapaian kinerja program pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 meliputi urusan, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan, dapat dilihat pada lampiran 5.

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Anggaran

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian anggaran kinerja Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 antara lain:

a. Regulasi terkait arahan penggunaan belanja daerah seringkali diperoleh setelah APBD di tetapkan sehingga diperlukan waktu untuk melakukan penyesuaian anggaran;

b. Belum terbangunnya budaya kerja yang kolaboratif antar para pelaksana dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksana dalam pengelolaan barang;

c. Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM yang berjalan dengan lambat;

d. Sikap/etos kerja para pelaksana yang belum mengindahkan penerapan disiplin fiskal sebagaimana rencana pelaksanaan dan penyerapan belanja dan masih terindikasi cenderung menunda pekerjaan;

e. Proses bisnis pengelolaan pajak dan retribusi daerah masih didominasi oleh metode konvensional/manual, belum didukung oleh sistem informasi dan aplikasi perpajakan daerah yang memadai;

f. Tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi yang masih perlu ditingkatkan;

g. Adanya perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan sehingga diperlukan adaptasi dalam pelaksanaannya;

h. Masa adaptasi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) yang notabene merupakan aplikasi baru dan selalu diperbaharui;

i. Belum optimalnya pengelolaan keuangan pada perangkat daerah yang memiliki unit kerja yang luas;

j. Perencanaan kegiatan yang belum tepat dan kesalahan dalam penyusunan anggaran sehingga mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan/atau ditunda untuk dilaksanakan;

k. Informasi alokasi transfer yang diperoleh setelah APBD di tetapkan sehingga pada beberapa sumber transfer daerah baru disesuaikan pada saat Perubahan APBD yang mengakibatkan waktu efektif pelaksanaan kegiatannya terbatas;

l. Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa serta penyelesaian dokumen kontrak belum berjalan optimal sesuai waktu yang direncanakan;

m. Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan penatausahaan barang; dan

n. Pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi belum disalurkan sepenuhnya sesuai dengan besaran alokasi yang sudah ditetapkan.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Karo yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah dan 1 (satu) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selaku entitas akuntansi.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo maka Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor dan Kecamatan. Adapun entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Karo dapat dilihat pada lampiran 6.

4.2 Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Karo menetapkan kebijakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Buletin Teknis SAP berbasis akrual seperti diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Karo yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karo.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupataen Karo yaitu:

1. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas; dan
2. Basis Akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.2.2 Dasar Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (perolehan). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Periode pembukuan adalah laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember 2025. Pelaksanaan pembukuan menganut azas bruto sehingga tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Daerah sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Bendahara Pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

   LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

   a) Pendapatan-LRA;

   b) Belanja;

   c) Surplus/Defisit-LRA;

   d) Pembiayaan; dan

   e) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

   LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

   Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan LRA sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

   a) SAL awal;

   b) Penggunaan SAL;

   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

   d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

   e) Lain-lain; dan

   f) SAL akhir.

Di samping itu, Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CaLK. Format LPSAL mengacu pada contoh format perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, namun demikian format tersebut dapat diubah sesuai kebutuhan apabila ada transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format laporan tersebut.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a) Kas dan setara kas;

b) Investasi jangka pendek;

c) Piutang;

d) Persediaan;

e) Investasi jangka panjang;

f) Aset tetap;

g) Aset lainnya

h) Kewajiban jangka pendek;

i) Kewajiban jangka panjang; dan

j) Ekuitas.

Format Neraca mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format neraca dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format neraca tersebut.

4. Laporan Operasional

LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos tidak terduga, pos tidak terduga dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

LO dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam LO harus diidentifikasikan secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

b) Cakupan entitas pelaporan;

c) Periode yang dicakup;

d) Mata uang pelaporan; dan

e) Satuan angka yang digunakan.

LO menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

b) Beban dari kegiatan operasional;

c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;

d) Kegiatan Non Operasional;

e) Surplus/defisit sebelum Pos Tidak Terduga;

f) Pos Tidak Terduga; dan

g) Surplus/defisit-LO.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE.

Format LO mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format tersebut.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

a) Aktivitas Operasi

(1) Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

(2) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:

(a) Penerimaan PAD;

(b) Penerimaan pendapatan transfer;

(c) Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan

(d) Penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa.

(3) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

(a) Belanja pegawai;

(b) Belanja barang;

(c) Bunga;

(d) Subsidi;

(e) Hibah;

(f) Bantuan Sosial;

(g) Belanja tak terduga; dan

(h) Transfer keluar.

b) Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang

bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Pencairan dana cadangan;

(b) Penjualan aset tetap;

(c) Penjualan aset lainnya;

(d) Penerimaan dari divestasi; dan

(e) Penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Pembentukan dana cadangan;

(b) Perolehan aset tetap;

(c) Perolehan aset lainnya;

(d) Penyertaan modal pemerintah daerah; dan

(e) Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas.

c) Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(a) Penerimaan utang dalam negeri;

(b) Penerimaan dari utang obligasi;

(c) Penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

(d) Penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Daerah.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

(a) Pembayaran pokok utang dalam negeri;

(b) Pembayaran pokok utang obligasi;

(c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

(d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada Perusahaan Daerah.

d) Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Format LAK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang tidak terakomodir dalam format tersebut.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

   LPE menyajikan pos-pos:

   a) Ekuitas awal;

   b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

   c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

      (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

      (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

   d) Ekuitas akhir

   Format LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

   Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK disajikan dengan susunan sebagai berikut:

   a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

   b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

   c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;

   d) Kebijakan akuntansi yang penting:

      1) Entitas akuntansi/pelaporan;

      2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

      3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

      4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan pernyataan SAP oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan

      5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

   e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan memuat tentang:

      1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan; dan

      2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

   f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah;

   g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-hal berikut ini:

1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam CaLK meliputi akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1) Pengakuan pendapatan-LRA;
2) Pengakuan pendapatan-LO;
3) Pengakuan belanja;
4) Pengakuan beban;
5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
6) Investasi;
7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
8) Kontrak-kontrak konstruksi;
9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
10) Kemitraan dengan fihak ketiga;
11) Biaya penelitian dan pengembangan;
12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
13) Dana cadangan; dan
14) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Format laporan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan pada SAP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Terhadap Aset Tetap sudah dilakukan penyusutan dan pada Tahun 2024 telah disusun Peraturan Bupati Karo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusutan Barang Milik Daerah dan masa Manfaat Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Karo untuk mengganti Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, terhadap Piutang dan Investasi Dana Bergulir telah dilakukan Penyisihan sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 53 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Terakhir untuk Aset Properti Investasi disusun Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.5 Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)

Penjelasan kebijakan akuntansi laporan realisasi anggaran dan laporan operasional Kabupaten Karo disajikan sebagai berikut:

4.5.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8).

Pendapatan–LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau Pendapatan–LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
c. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

4.5.2 Kebijakan Akuntansi Belanja-LRA dan Beban-LO

Belanja adalah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Sedangkan beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

4.5.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

4.5.4 Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus atau Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4.5.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Defenisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi

3. Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
   - Penerimaan Pembiayaan

     Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi Perusahaan Daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
   - Pengeluaran Pembiayaan

     Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

6. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
7. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penyajian Di Laporan Keuangan

8. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pengungkapan

9. Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:
   - Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   - Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
   - Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5.6 Kebijakan Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Neraca

Neraca mencantumkan pos-pos berikut:

a. Aset Lancar:
   - Kas dan Setara Kas;
   - Piutang;
   - Persediaan;
   - Investasi Jangka Pendek;
   - Investasi Jangka Panjang;

b. Aset Tetap;

c. Aset Lainnya;

d. Kewajiban:
   - Kewajiban Jangka Pendek;
   - Kewajiban Jangka Panjang;

e. Ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor: (a) sifat, likuiditas, dan materialitas aset; (b) fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan (c) jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

4.6.1 Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Defenisi

1. Definisi kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam Neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
2. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut Setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi

3. Kas dan setara kas pada Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya Bendahara Pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari:
   a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada Bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas; dan
   b) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

   Adapun kelompok, sub kelompok dan jenis kas dan setara kas dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Kelompok, Sub Kelompok dan Jenis Kas dan Setara Kas

Kelompok	Sub Kelompok	Jenis
Kas		
	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD

Kelompok	Sub Kelompok	Jenis
Setara Kas		
	Deposito	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	(kurang dari 3 bulan)	
	Surat Utang Negara /Obligasi	Surat Utang Negara /Obligasi
	(kurang dari 3 bulan)	(kurang dari 3 bulan)

Pengukuran

4. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian

5. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

   Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan

6. Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

   a) Rincian kas dan setara kas;

   b) Kebijakan manajemen setara kas; dan

   c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

b) Piutang

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat surat ketetapan/dokumen dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi; atau
4. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang; dan
5. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan; dan
4. Kualitas Piutang Macet.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment);*

   Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

   a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
      - Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
      - Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
      - Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
      - Wajib Pajak likuid; dan/atau
      - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

   b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
      - Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
      - Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
      - Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
      - Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

   c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
      - Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
      - Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
      - Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
      - Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

   d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
      - Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
      - Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
      - Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
      - Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure).*

2. Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment).*

   Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

   a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
      - Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
      - Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
      - Wajib Pajak likuid; dan/atau
      - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

   b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
      - Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

- Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
- Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure).*

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan Tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,50%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penghentian Pengakuan Piutang

1. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
2. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan

aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang dengan kualitas lancar;
b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Retribusi, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang dengan kualitas lancar;
b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak dan retribusi, ditetapkan sebesar:

a. 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang dengan kualitas lancar;
b. 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
d. 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
e. Perlakuan Piutang Tak Tertagih untuk Transfer (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi) tidak termasuk hal yang diatur didalam Kebijakan Akuntansi ini dan agar mempedomani Peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

c) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sistem Pencatatan Persediaan

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Karo mengatur bahwa persediaan dinilai berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama. Sedangkan untuk pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual dan metode periodik.

a. Metode perpetual
   Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama dan membutuhkan pengendalian yang kuat berupa persediaan bahan/material, yang terdiri atas:
   1. Persediaan bahan bangunan;
   2. Persediaan bahan, benih, bibit tanaman;
   3. Persediaan bibit hewan;
   4. Persediaan bahan obat-obatan, alat kontrasepsi;
   5. Persediaan bahan kimia;
   6. Persediaan bahan makanan; dan
   7. Persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga.
b. Metode periodik
   Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir akan diketahui dengan melakukan perhitungan fisik *(stock opname)* pada akhir periode. Digunakan untuk mencatat persediaan yang sifatnya sebagai pendukung berupa bahan pakai habis, yang terdiri atas:

   1. Persediaan alat tulis kantor;
   2. Persediaan blanko dokumen;
   3. Persediaan alat listrik dan elektronik;
   4. Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya;
   5. Persediaan perlatan kebersihan dan bahan pembersih;
   6. Persediaan bahan bakar minyak/gas;
   7. Persediaan isi tabung pemadam kebakaran; dan
   8. Persediaan isi tabung gas.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.6.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi

1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan da Irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada Tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

2. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
3. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
4. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Berwujud;
   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
   f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
   g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

5. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
6. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi defenisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

7. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
8. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
9. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

   Komponen biaya perolehan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya pembelian atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

10. Biaya perolehan di luar harga beli aset dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

11. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

13. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

14. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

15. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

16. Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

17. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Berikut adalah simulasi penghitungan harga barang secara gabungan.

Pertukaran Aset

18. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

19. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi

20. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan

21. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

22. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

23. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran, pengadaan baru atau pemeliharaan untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan

c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi.

24. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap *(capital expenditure)* terhadap aset perbaikan ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Pengeluaran atas aset perbaikan pemeliharaan untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi.

Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

25. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

26. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu Penyusutan Pertahun adalah nila perolehan dibagi masa manfaat.

27. Perhitungan penyusutan telah dapat dihitung sejak 2 (dua) hari barang diperoleh/dicatat dan telah terhitung masa manfaatnya selama 1 (satu) tahun.

28. Penghitungan beban penyusutan adalah harga perolehan dibagi masa manfaat.

29. Sesuai Peraturan Bupati Karo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusutan Barang Milik Daerah dan Masa Manfaat Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Karo, perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap dapat dilihat pada lampiran 7.

Penghentian dan Pelepasan

30. Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

31. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

32. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyajian

33. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca.

Pengungkapan

34. Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
    a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount);*
    b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
        1) Penambahan;
        2) Pelepasan;
        3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
        4) Mutasi aset tetap lainnya.
35. Informasi penyusutan, meliputi:
    a. Nilai penyusutan;
    b. Metode penyusutan yang digunakan;
    c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
36. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
    a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
    b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
    c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
    d. Jumlah komitmen untuk akui sisi aset tetap.

4.6.3 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b) Dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
    a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
    b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa pemerintah daerah akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah daerah mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjasinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

5. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
6. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
7. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
8. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

9. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
10. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
11. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
12. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional

Alih Guna

13. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
    a) Dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
    b) Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
    c) Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan
    d) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
14. Karena pemerintah daerah menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

Pelepasan

15. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau Ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
16. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
17. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus/defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
18. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih

antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

19. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
20. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Penyajian Properti Investasi

21. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
22. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan

23. Entitas mengungkapkan:
    a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
    b) Metode penyusutan yang digunakan;
    c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
    e) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
        i. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
        ii. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
        iii. Pelepasan;
        iv. Penyusutan;
        v. Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
        vi. Perubahan lain.
    f) Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal – hal sebagai berikut:
        i. Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
        ii. Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
        iii. Tanggal efektif penilaian kembali;
        iv. Nilai tercatat sebelum revaluasi
        v. Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
        vi. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
    g) Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, pemerintah daerah perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
    h) Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
    i) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar

apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh pemerintah derah) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

j) Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independent, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

k) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
   i. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
   ii. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
   iii. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

l) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

m) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain

4.6.4 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Klasifikasi

Dalam bagan akun standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Klasifikasi Aset Lainnya

Kelompok	Jenis
Tagihan Jangka Panjang	Tagihan penjualan angsuran
	Tuntutan ganti kerugian daerah
Kemitraan dengan pihak ketiga	Sewa
	Kerjasama pemanfaatan
	Bangun guna serah
	Bangun serah guna
Aset Tak Berwujud	Goodwill
	Hak paten dan hak cipta
	Royalti
	Software
	Lisensi
	Hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
	Aset tak berwujud lainnya
	Aset tak berwujud dalam pengerjaan
Aset lain-lain	Aset lain-lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

a) Tagihan jangka panjang;
b) Kemitraan dengan pihak ketiga; dan
c) Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

a) Aset tidak berwujud; dan
b) Aset lain-lain.

Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

Tagihan jangka panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a) Tagihan Penjualan Angsuran

   Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah kepada pegawai.

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

   Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa
   Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
   Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama pemanfaatan (KSP).
c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)
   Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang

diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna–BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

e) Lisensi

Lisensi adalah ijin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset–work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
   1. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
   2. biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
   3. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
b. Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari;
c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi defenisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa

manfaatnya.
Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca.

Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. besaran dan rincian aset lainnya;
b. kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;
c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG); dan
d. informasi lainnya yang penting.

4.6.5 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Klasifikasi Kewajiban

Kelompok	Jenis
Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya

Kelompok	Jenis
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*).
   Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)
   Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
c) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
   Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.
d) Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
   Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemerintah Daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran

Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utangjangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
   Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b) Pengukuran Utang Transfer
   Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c) Pengukuran Utang Bunga
   Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
   Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
e) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   Bagian lancar utangjangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
f) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
   Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat Laporan Keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

a) Utang yang tidak diperjualbelikan
   Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
b) Utang yang diperjualbelikan
   Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam Neraca disisi pasiva.

Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

a) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b) jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
c) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
d) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
e) perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
   1) pengurangan pinjaman;
   2) modifikasi persyaratan utang;
   3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
   4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
   5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
   6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

Biaya pinjaman:

a) perlakuan biaya pinjaman;
b) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
c) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.7 Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris .

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktvitas operasi.

4.7.1 Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas, apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.7.2 Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

4.7.3 Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

4.7.4 Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Keterangan	Realisasi (Rp)
1	**Pendapatan Daerah**	**1.424.632.629.049,83**
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	150.529.669.004,83
	Pendapatan Transfer	1.255.825.821.775,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.277.138.270,00
2	**Belanja Daerah**	**1.385.107.097.412,50**
	Belanja Operasi	963.428.644.459,50
	Belanja Modal	145.869.376.198,00
	Belanja Tidak Terduga	0,00
	Belanja Transfer	275.809.076.755,00
3	**Surplus/(Defisit)**	**39.525.531.637,33**
4	**Pembiayaan Daerah**	**14.799.361.336,83**
	Penerimaan Pembiayaan	**14.799.361.336,83**
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
5	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**	**54.324.892.974,16**

Tabel 5. 2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Keterangan	Realisasi (Rp)
1	**Pendapatan Daerah**	**1.445.665.730.281,70**
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	105.349.287.214,70
	Pendapatan Transfer	1.323.732.110.577,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.584.332.490,00
2	**Belanja Daerah**	**1.524.844.149.888,00**
	Belanja Operasi	1.017.870.013.586,00
	Belanja Modal	214.619.621.202,00
	Belanja Tidak Terduga	193.476.000,00
	Belanja Transfer	292.161.039.100,00
3	**Surplus/(Defisit)**	**(79.178.419.606,30)**
4	**Pembiayaan Daerah**	**93.977.470.943,13**
	Penerimaan Pembiayaan	96.777.470.943,13
	Pengeluaran Pembiayaan	2.800.000.000,00
5	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**	**14.799.051.336,83**

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp1.424.632.629.049,83	**Rp1.445.665.730.281,70**

Pendapatan atau penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.440.524.037.989,00 dengan realisasi sebesar Rp1.424.632.629.049,83 atau 98,90%. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.033.101.231,87 atau minus 1,45% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp1.445.665.730.281,70 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	156.345.552.932,00	150.529.669.004,83	96,28	105.349.287.214,70
2	Pendapatan Transfer	1.265.621.122.964,00	1.255.825.821.775,00	99,23	1.323.732.110.577,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.557.362.093,00	18.277.138.270,00	98,49	16.584.332.490,00
Jumlah		**1.440.524.037.989,00**	**1.424.632.629.049,83**	**98,90**	**1.445.665.730.281,70**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**Rp150.529.669.004,83**	**Rp105.349.287.214,70**

PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp156.345.552.932,00 dengan realisasi sebesar Rp150.529.669.004,83 atau 96,28%. Realisasi PAD TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp45.180.381.790,13 atau 42,89% dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp105.349.287.214,70 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	101.353.011.918,00	89.922.705.301,98	88,72	61.540.045.940,28
2	Retribusi Daerah	42.142.900.000,00	43.732.430.443,00	103,77	33.697.123.306,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.446.458.482,00	3.446.458.482,00	100,00	2.624.980.942,59
4	Lain-lain PAD yang Sah	9.403.182.532,00	13.428.074.777,85	142,80	7.487.137.025,83
Jumlah		**156.345.552.932,00**	**150.529.669.004,83**	**96,28**	**105.349.287.214,70**

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pajak Daerah	**Rp89.922.705.301,98**	**Rp61.540.045.940,28**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan teknis pemungutan Pajak Daerah tertuang pada Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp101.353.011.918,00 dengan realisasi sebesar Rp89.922.705.301,98 atau 88,72%. Realisasi Pajak Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.382.659.361,70 atau 46,12% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp61.540.045.940,28. Adapun perincian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	10.183.523.769,28
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	9.079.441.676,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	4.152.683.737,00
4	Pajak Reklame	1.100.000.000,00	2.016.109.754,00	183,28	1.193.814.127,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	20.436.077.813,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	271.448.000,00
7	Pajak Air Tanah	3.200.000.000,00	3.221.544.457,00	100,67	2.703.262.753,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000.000,00	423.481.732,00	56,46	1.135.591.881,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.100.000.000,00	7.086.451.037,00	99,81	5.782.252.016,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.000.000.000,00	8.230.251.952,00	117,58	6.601.950.168,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	50.850.000.000,00	42.637.229.794,98	83,85	0,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	21.928.235.089,00	17.254.448.571,00	78,69	0,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.424.776.829,00	9.053.188.004,00	96,06	0,00
Jumlah		**101.353.011.918,00**	**89.922.705.301,98**	**88,72**	**61.540.045.940,28**

Perubahan nomenklatur dan kodefikasi rekening pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir yang di *mapping* pada kode rekening PBJT TA 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur pula perubahan nomenklatur dan kodefikasi rekening PAD.

1. Pajak Hotel
   Realisasi Pajak Hotel di *mapping* pada kode rekening PBJT-Jasa Perhotelan yang dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah, sehingga Pajak Hotel TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp10.183.523.769,28 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Pajak Hotel TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel-Hotel Bintang 5	0,00	5.748.618.852,00
2	Pajak Hotel-Hotel Bintang 4	0,00	2.782.920.960,00
3	Pajak Hotel-Hotel Bintang 3	0,00	536.833.633,00
4	Pajak Hotel-Hotel Bintang 2	0,00	634.883.832,00
5	Pajak Hotel-Hotel Melati 3	0,00	408.678.459,28
6	Pajak Hotel-Losmen	0,00	71.588.033,00
Jumlah		**0,00**	**10.183.523.769,28**

a. Pajak Hotel-Hotel Bintang 5
Realisasi Pajak Hotel-hotel bintang 5 TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp5.748.618.852,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Pajak Hotel-Hotel Bintang 5 TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Mikie Holiday Resort & Hotel	0,00	3.649.662.125,00
2	Grand Mutiara Hotel	0,00	2.098.956.727,00
Jumlah		**0,00**	**5.748.618.852,00**

b. Pajak Hotel-Hotel Bintang 4
Realisasi Pajak Hotel-hotel bintang 4 TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp2.782.920.960,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 8 Pajak Hotel-Hotel Bintang 4 TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Sinabung Hotel	0,00	1.214.342.480,00
2	Hotel Sibayak Internasional	0,00	990.241.637,00
3	Green Garden Hotel	0,00	59.616.728,00
4	Taman Resort Simalem	0,00	518.720.115,00
Jumlah		**0,00**	**2.782.920.960,00**

c. Pajak Hotel-Hotel Bintang 3
Realisasi Pajak Hotel-hotel bintang 3 TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp536.833.633,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 9 Pajak Hotel-Hotel Bintang 3 TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Rudang Hotel & Resort	0,00	139.591.000,00
2	Brastagi Cottage	0,00	397.242.633,00
Jumlah		**0,00**	**536.833.633,00**

d. Pajak Hotel-Hotel Bintang 2
Realisasi Pajak Hotel-hotel bintang 2 TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp634.883.832,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Pajak Hotel-Hotel Bintang 2 TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Grand Orri Berastagi	0,00	270.808.920,00
2	Danau Toba International Cottage	0,00	56.542.377,00
3	Bukit Kubu Hotel	0,00	278.950.830,00
4	Hotel Grand Pinus	0,00	28.581.705,00
Jumlah		**0,00**	**634.883.832,00**

e. Pajak Hotel-Hotel Melati 3

Realisasi Pajak Hotel-hotel melati 3 TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp408.678.459,28 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 11 Pajak Hotel-Hotel Melati 3 TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dien Karona Hotel	0,00	5.842.000,00
2	Losmen Kalang Ulu	0,00	148.540.004,00
3	Uluna Hotel	0,00	85.830.636,28
4	Hotel Melati "Ginsata"	0,00	900.000,00
5	Guest House Simole	0,00	86.723.908,00
6	Hotel Suite Pakar	0,00	24.000.000,00
7	Villa Grand Orri	0,00	19.828.086,00
8	3 Berastagi Hotel	0,00	1.350.000,00
9	Villa Takasima Berastagi	0,00	27.413.825,00
10	Penginapan Arihta	0,00	2.250.000,00
11	Hotel Juma Eluk	0,00	6.000.000,00
Jumlah		**0,00**	**408.678.459,28**

f. Pajak Hotel-Losmen

Realisasi Pajak Hotel-losmen TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp71.588.033,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 8.

2. Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran di *mapping* pada kode rekening PBJT-Makanan dan/atau Minuman yang dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah, sehingga Pajak Restoran TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp9.079.441.676,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 12 Pajak Restoran TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Restoran-Restoran	0,00	4.863.520.047,00
2	Pajak Restoran-Rumah Makan	0,00	3.482.972.530,00
3	Pajak Restoran-Kafetaria	0,00	720.732.099,00
4	Pajak Restoran-Kedai Kopi	0,00	12.217.000,00
Jumlah		**0,00**	**9.079.441.676,00**

a. Pajak Restoran-Restoran

Realisasi Pajak Restoran-restoran TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp4.863.520.047,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 13 Pajak Restoran-Restoran TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Kabanjahe	0,00	131.424.892,00
2	Kecamatan Berastagi	0,00	4.204.551.042,00
3	Kecamatan Tiga Panah	0,00	36.569.295,00
4	Kecamatan Merek	0,00	490.974.818,00
Jumlah		**0,00**	**4.863.520.047,00**

b. Pajak Restoran-Rumah Makan

Realisasi Pajak Restoran-rumah makan TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp3.482.972.530,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 14 Pajak Restoran-Rumah Makan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Kabanjahe	0,00	104.721.383,00
2	Kecamatan Berastagi	0,00	1.625.145.196,00
3	Kecamatan Barusjahe	0,00	7.250.000,00
4	Kecamatan Tiga Panah	0,00	8.850.000,00
5	Kecamatan Merek	0,00	1.700.000,00
6	Kecamatan Munte	0,00	4.570.000,00
7	Kecamatan Tiga Binanga	0,00	10.365.000,00
8	Kecamatan Lau Baleng	0,00	3.380.000,00
9	Kecamatan Mardinding	0,00	680.000,00
10	Kecamatan Simpang Empat	0,00	50.000,00
11	Kecamatan Dolat Rayat	0,00	3.490.000,00
12	Kecamatan Tiganderket	0,00	35.000,00
13	Rumah Makan SKPD	0,00	1.712.735.951,00
Jumlah		**0,00**	**3.482.972.530,00**

c. Pajak Restoran-Kafetaria

Realisasi Pajak Restoran-kafetaria TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp720.732.099,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 15 Pajak Restoran-Kafetaria TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Kabanjahe	0,00	16.315.000,00
2	Kecamatan Berastagi	0,00	429.324.447,00
3	Kecamatan Tiga Panah	0,00	203.410.136,00
4	Kecamatan Merek	0,00	58.092.481,00
5	Kecamatan Simpang Empat	0,00	2.350.000,00
6	Kecamatan Dolat Rayat	0,00	9.840.035,00
7	Kecamatan Merdeka	0,00	1.400.000,00
Jumlah		**0,00**	**720.732.099,00**

d. Pajak Restoran-Kedai Kopi

Realisasi Pajak Restoran-kedai kopi TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp12.217.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 16 Pajak Restoran-Kedai Kopi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Kabanjahe	0,00	2.590.000,00
2	Kecamatan Berastagi	0,00	3.482.000,00
3	Kecamatan Barusjahe	0,00	330.000,00
4	Kecamatan Tiga Panah	0,00	1.435.000,00
5	Kecamatan Munte	0,00	280.000,00
6	Kecamatan Tiga Binanga	0,00	375.000,00
7	Kecamatan Lau Baleng	0,00	400.000,00
8	Kecamatan Mardinding	0,00	400.000,00
9	Kecamatan Payung	0,00	70.000,00
10	Kecamatan Simpang Empat	0,00	215.000,00
11	Kecamatan Dolat Rayat	0,00	90.000,00
12	Kecamatan Merdeka	0,00	2.400.000,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
13	Kecamatan Namanteran	0,00	50.000,00
14	Kecamatan Tiganderket	0,00	100.000,00
Jumlah		**0,00**	**12.217.000,00**

1. Pajak Hiburan
   Realisasi Pajak Hiburan di *mapping* pada kode rekening PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan yang dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah, sehingga Pajak Hiburan TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp4.152.683.737,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 17 Pajak Hiburan TA 2025 dan 2024

No	Nama Wajib Pajak	Badan Usaha	Tahun 2025	Tahun 2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Kecamatan Kabanjahe			***0,00***	***4.500.000,00***
1	Eron Ginting	Kolam Renang Milala	0,00	2.100.000,00
2	Hariatik	Karaoke Suite Pakar	0,00	2.400.000,00
Kecamatan Berastagi			***0,00***	***4.148.183.737,00***
4	Hariatik	Kolam Renang Suite Pakar	0,00	5.750.000,00
5	Andrew Rusli	Ketangkasan Mikie Holiday	0,00	4.114.148.123,00
6	Abu Djaja Bunjamin	Karaoke Grand Mutiara	0,00	6.158.447,00
8	Mustika Akbar, S.Sos. MAP	Bar/Kolam Renang Sibayak	0,00	19.631.813,00
9	Anita Irma Tambunan	Bar Brastagi Cottage	0,00	2.495.354,00
Jumlah			**0,00**	**4.152.683.737,00**

2. Pajak Reklame
   Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame yang dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.016.109.754,00 atau 183,28%. Realisasi Pajak Reklame TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp822.295.627,00 atau 68,88% dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp1.193.814.127,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 9.

3. Pajak Penerangan Jalan
   Realisasi Pajak Penerangan Jalan di *mapping* pada kode rekening PBJT-Tenaga Listrik yang dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah, sehingga Pajak Penerangan Jalan TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp20.436.077.813,00. Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN bersamaan dengan pembayaran listrik bulanan oleh wajib pajak. Pajak yang tertagih disetorkan oleh PLN ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap bulan. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang menjadi dasar laporan pajak daerah TA 2024 tidak lengkap sehingga rincian penerimaan data Pajak Penerangan Jalan tidak dapat disajikan.

4. Pajak Parkir
   Realisasi Pajak Parkir di *mapping* pada kode rekening PBJT-Jasa Parkir yang dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah, sehingga Pajak Parkir TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp271.448.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 18 Pajak Parkir TA 2025 dan 2024

No	Nama Wajib Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PT Sumber Alfaria (Alfamart)	0,00	77.275.000,00
2	PT Indomarco (Indomaret)	0,00	151.800.000,00
3	PT Putra Indo Mandiri Sejahtera	0,00	42.098.000,00
4	PT Indomarco (Kecamatan Dolat Rayat)	0,00	275.000,00
Jumlah		**0,00**	**271.448.000,00**

5. Pajak Air Tanah (PAT)
   PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah yang dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah. PAT Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.221.544.457,00 atau 100,67%. Realisasi PAT TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp518.281.704,00 atau 19,17% dibandingkan dengan realisasi PAT TA 2024 sebesar Rp2.703.262.753,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 10.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
   Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara yang dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah. Pajak MBLB Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp423.481.732,00 atau 56,46%. Realisasi Pajak MBLB TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp712.110.149,00 atau minus 62,71% dibandingkan dengan realisasi Pajak MBLB TA 2024 sebesar Rp1.135.591.881,00. Penurunan yang signifikan atas penerimaan Pajak MBLB dari TA 2024 sebesar minus 62,71% dikarenakan adanya efisiensi belanja di Kabupaten Karo yang mengakibatkan berkurangnya belanja fisik yang merupakan sumber terbesar dari penerimaan Pajak MBLB, hal ini juga disebabkan karena adanya Opsen Pajak MBLB yang diserahkan kepada Provinsi Sumatera Utara sebesar 25,00% dari pajak terutang. Adapun Pajak MBLB dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5. 19 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Pasir dan Kerikil	350.000.000,00	134.939.110,00	38,55	433.018.096,00
2	Pajak MBLB Lainnya	400.000.000,00	288.542.622,00	72,14	702.573.785,00
Jumlah		**750.000.000,00**	**423.481.732,00**	**56,46**	**1.135.591.881,00**

   a. Pajak Pasir dan Kerikil
      Pajak Pasir dan Kerikil Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp134.939.110,00 atau 38,55%. Realisasi Pajak Pasir dan Kerikil TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp298.078.986,00 atau minus 68,84% dibandingkan dengan realisasi Pajak Pasir dan Kerikil TA 2024 sebesar Rp433.018.096,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 11.

   b. Pajak MBLB Lainnya
      Pajak MBLB Lainnya Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp288.542.622,00 atau 72,14%. Realisasi Pajak MBLB Lainnya TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp414.031.163,00 atau minus 58,93%

dibandingkan dengan realisasi Pajak MBLB Lainnya TA 2024 sebesar Rp702.573.785,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 12.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp7.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.086.451.037,00 atau 99,81%. Realisasi PBB-P2 TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.304.199.021,00 atau 22,56% dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 TA 2024 sebesar Rp5.782.252.016,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 20 PBB-P2 Per Kecamatan TA 2025 dan 2024

No	Kecamatan	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Mardingding	93.004.647,00	88.383.521,00
2	Tiga Binanga	199.118.767,00	164.154.796,00
3	Juhar	116.285.083,00	94.943.129,00
4	Munte	205.119.643,00	187.941.492,00
5	Kutabuluh	77.622.903,00	73.230.914,00
6	Payung	52.493.284,00	34.650.325,00
7	Simpang Empat	118.377.727,00	114.936.828,00
8	Kabanjahe	1.939.272.378,00	1.416.408.696,00
9	Tiga Panah	492.992.281,00	348.028.366,00
10	Barusjahe	135.725.202,00	113.715.375,00
11	Lau Baleng	98.467.576,00	88.453.638,00
12	Berastagi	2.107.312.359,00	1.769.816.855,00
13	Merek	490.477.243,00	387.803.270,00
14	Tiganderket	109.724.221,00	111.480.837,00
15	Naman Teran	44.874.575,00	43.976.479,00
16	Merdeka	328.532.032,00	323.906.680,00
17	Dolat Rayat	477.051.116,00	420.420.815,00
Jumlah		**7.086.451.037,00**	**5.782.252.016,00**

8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BPHTB adalah pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan yang merupakan hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan yang dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah. BPHTB Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.230.251.952,00 atau 117,58%. Realisasi BPHTB TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.628.301.784,00 atau 24,66% dibandingkan dengan realisasi BPHTB TA 2024 sebesar Rp6.601.950.168,00.

9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan yang dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah. PBJT Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp50.850.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.637.229.794,98 atau 83,85%. Realisasi PBJT TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp42.637.229.794,98 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi PBJT TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 21 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PBJT Restoran	10.400.000.000,00	8.983.148.274,45	86,38	0,00
2	PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	24.100.000.000,00	20.734.343.715,00	86,03	0,00
3	PBJT Hotel	11.500.000.000,00	9.032.865.629,53	78,55	0,00
4	PBJT Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	250.000.000,00	289.849.500,00	115,94	0,00
5	PBJT Permainan Ketangkasan	4.600.000.000,00	3.597.022.676,00	78,20	0,00
Jumlah		**50.850.000.000,00**	**42.637.229.794,98**	**83,85**	**0,00**

a. PBJT Restoran

PBJT Restoran adalah pajak atas fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran. Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp10.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.983.148.274,45 atau 86,38%. Realisasi PBJT Restoran TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.983.148.274,45 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi PBJT-Restoran TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 22 PBJT-Restoran TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PBJT Restoran-Restoran	4.175.990.218,00	0,00
2	PBJT Restoran-Rumah Makan	3.717.077.387,45	0,00
3	PBJT Restoran-Kafetaria	1.072.512.669,00	0,00
4	PBJT Restoran-Kedai Kopi	17.568.000,00	0,00
Jumlah		**8.983.148.274,45**	**0,00**

- PBJT Restoran-Restoran

  Realisasi PBJT Restoran-restoran TA2025 dan 2024 sebesar Rp4.175.990.218,00 dan Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 23 PBJT Restoran-Restoran TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Kabanjahe	125.744.023,00	0,00
2	Kecamatan Berastagi	3.610.017.904,00	0,00
3	Kecamatan Tiga Panah	1.245.800,00	0,00
4	Kecamatan Merek	438.982.491,00	0,00
Jumlah		**4.175.990.218,00**	**0,00**

- PBJT Restoran-Rumah Makan

  Realisasi PBJT Restoran-rumah makan TA 2025 dan 2024 sebesar Rp3.717.077.387,45 dan Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 24 PBJT Restoran-Rumah Makan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Kabanjahe	108.371.763,00	0,00
2	Kecamatan Berastagi	1.604.997.634,45	0,00
3	Kecamatan Barusjahe	8.400.000,00	0,00
4	Kecamatan Tiga Panah	11.480.000,00	0,00
5	Kecamatan Merek	5.740.000,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
6	Kecamatan Munte	4.200.000,00	0,00
7	Kecamatan Tiga Binanga	21.180.000,00	0,00
8	Kecamatan Lau Baleng	3.500.000,00	0,00
9	Kecamatan Mardinding	910.000,00	0,00
10	Kecamatan Dolat Rayat	9.835.000,00	0,00
11	Rumah Makan SKPD	1.938.462.990,00	0,00
Jumlah		**3.717.077.387,45**	**0,00**

- PBJT Restoran-Kafetaria
  Realisasi PBJT Restoran-kafetaria TA 2025 dan 2024 sebesar Rp1.072.512.699,00 dan Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 25 PBJT Restoran-Kafetaria TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Kabanjahe	23.900.000,00	0,00
2	Kecamatan Berastagi	407.587.467,00	0,00
3	Kecamatan Tiga Panah	555.367.132,00	0,00
4	Kecamatan Merek	62.526.760,00	0,00
5	Kecamatan Simpang Empat	4.050.000,00	0,00
6	Kecamatan Dolat Rayat	7.591.310,00	0,00
7	Kecamatan Merdeka	11.490.000,00	0,00
Jumlah		**1.072.512.669,00**	**0,00**

- PBJT Restoran-Kedai Kopi
  Realisasi PBJT Restoran-kedai kopi TA 2025 dan 2024 sebesar Rp17.568.000,00 dan Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 26 PBJT Restoran-Kedai Kopi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Kabanjahe	5.640.000,00	0,00
2	Kecamatan Berastagi	4.925.000,00	0,00
3	Kecamatan Tiga Panah	1.480.000,00	0,00
4	Kecamatan Munte	508.000,00	0,00
5	Kecamatan Tiga Binanga	1.740.000,00	0,00
6	Kecamatan Merdeka	2.700.000,00	0,00
7	Kecamatan Namanteran	575.000,00	0,00
Jumlah		**17.568.000,00**	**0,00**

b. PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang di distribusikan untuk bermacam peralatan listrik. PBJT atas Tenaga Listrik dipungut oleh PLN bersamaan dengan pembayaran listrik bulanan oleh wajib pajak. Pajak yang tertagih disetorkan oleh PLN ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap bulan. PBJT atas Tenaga Listrik Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp24.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.734.343.715,00 atau 86,03%. Realisasi PBJT atas Tenaga Listrik TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.734.343.715,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi PBJT atas Tenaga Listrik TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 27 PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah Pelanggan	Tahun 2025	Tahun 2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Golongan Industri, Pertambangan, Minyak Bumi dan Gas Alam	1.097	692.076.942,00	0,00
2	Rumah Tangga	1.386.235	13.439.024.002,00	0,00
3	Bisnis	57.057	5.799.769.002,00	0,00
4	Sosial dan Pemerintahan	33.039	460.184.201,00	0,00
5	Tenaga Listrik Dihasilkan Sendiri	100	287.365.440,00	0,00
6	Multi Guna	11	55.922.146,00	0,00
7	Curah	4	1.982,00	0,00
Jumlah		**1.477.543**	**20.734.343.715,00**	**0,00**

c. PBJT Hotel

PBJT Hotel adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran uang, mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah kos dan sejenisnya. PBJT Hotel Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp11.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.032.865.629,53 atau 78,55%. Realisasi PBJT Hotel TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.032.865.629,53 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi PBJT Hotel TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 28 PBJT Hotel TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PBJT Hotel-Hotel Bintang 5	5.157.111.286,00	0,00
2	PBJT Hotel-Hotel Bintang 4	2.270.108.378,00	0,00
3	PBJT Hotel-Hotel Bintang 3	490.609.734,00	0,00
4	PBJT Hotel-Hotel Bintang 2	511.283.166,00	0,00
5	PBJT Hotel-Hotel Melati 3	416.923.460,53	0,00
6	PBJT Hotel-Losmen	186.829.605,00	0,00
Jumlah		**9.032.865.629,53**	**0,00**

- PBJT Hotel-Hotel Bintang 5

  Realisasi PBJT Hotel-hotel bintang 5 TA 2025 dan 2024 sebesar Rp5.157.111.286,00 dan Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 29 PBJT Hotel-Hotel Bintang 5 TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Mikie Holiday Resort & Hotel	3.432.025.706,00	0,00
2	Grand Mutiara Hotel	1.725.085.580,00	0,00
Jumlah		**5.157.111.286,00**	**0,00**

- PBJT Hotel-Hotel Bintang 4

  Realisasi PBJT Hotel-hotel bintang 4 TA 2025 dan 2024 sebesar Rp2.270.108.378,00 dan Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 30 PBJT Hotel-Hotel Bintang 4 TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Sinabung Hotel	1.097.084.606,00	0,00
2	Hotel Sibayak Internasional	704.843.611,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Green Garden Hotel	46.514.545,00	0,00
4	Taman Resort Simalem	421.665.616,00	0,00
Jumlah		**2.270.108.378,00**	**0,00**

- PBJT Hotel-Hotel Bintang 3
  Realisasi PBJT Hotel-hotel bintang 3 TA 2025 dan 2024 sebesar Rp490.609.734,00 dan Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 31 PBJT Hotel-Hotel Bintang 3 TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Rudang Hotel & Resort	132.822.000,00	0,00
2	Brastagi Cottage	357.787.734,00	0,00
Jumlah		**490.609.734,00**	**0,00**

- PBJT Hotel-Hotel Bintang 2
  Realisasi PBJT Hotel-hotel bintang 2 TA 2025 dan 2024 sebesar Rp511.283.166,00 dan Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 32 PBJT Hotel-Hotel Bintang 2 TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Grand Orri Berastagi	166.407.511,00	0,00
2	Danau Toba International Cottage	79.308.362,00	0,00
3	Bukit Kubu Hotel	245.074.816,00	0,00
4	Hotel Grand Pinus	20.492.477,00	0,00
Jumlah		**511.283.166,00**	**0,00**

- PBJT Hotel-Hotel Melati 3
  Realisasi PBJT Hotel-hotel melati 3 TA 2025 dan 2024 sebesar Rp416.923.460,53 dan Rp0,00 dengan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 33 PBJT Hotel-Hotel Melati 3 TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dien Karona Hotel	5.025.000,00	0,00
2	Losmen Kalang Ulu	138.300.000,00	0,00
3	Uluna Hotel	117.171.726,53	0,00
4	Hotel Melati "Ginsata"	1.800.000,00	0,00
5	Guest House Simole	77.932.999,00	0,00
6	Hotel Suite Pakar	23.500.000,00	0,00
7	Villa Grand Orri	17.378.985,00	0,00
8	3 Berastagi Hotel	1.050.000,00	0,00
9	Villa Takasima Berastagi	27.764.750,00	0,00
10	Penginapan Arihta	1.000.000,00	0,00
11	Hotel Juma Eluk	6.000.000,00	0,00
Jumlah		**416.923.460,53**	**0,00**

- PBJT Hotel-Losmen
  Realisasi PBJT Hotel-losmen TA 2025 dan 2024 sebesar Rp186.829.605,00 dan Rp0,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 13.

d. PBJT Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
PBJT Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. PBJT Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp289.849.500,00 atau 115,94%. Realisasi PBJT Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp289.849.500,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi PBJT Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 34 PBJT Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PT Sumber Alfaria (Alfamart)	58.850.000,00	0,00
2	PT Indomarco (Indomaret)	188.375.000,00	0,00
3	PT Putra Indo Mandiri Sejahtera	26.674.500,00	0,00
4	PT Sumber Alfaria (Alfamart) Kelurahan Gundaling I	3.025.000,00	0,00
5	PT Sumber Alfaria (Alfamart) Desa Raya	3.025.000,00	0,00
6	PT Sumber Alfaria (Alfamart) Kel. Gung Leto	3.025.000,00	0,00
7	PT Sumber Alfaria (Alfamart) Desa Samura	3.025.000,00	0,00
8	PT Sumber Alfaria (Alfamart) Desa Tiga Panah	2.475.000,00	0,00
9	PT Sumber Alfaria (Alfamart) Desa Dokan	1.375.000,00	0,00
Jumlah		**289.849.500,00**	**0,00**

e. PBJT Permainan Ketangkasan

PBJT Permainan Ketangkasan adalah bagian dari jasa kesenian dan hiburan yang merupakan jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati. PBJT Permainan Ketangkasan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.597.022.676,00 atau 78,20%. Realisasi PBJT Permainan Ketangkasan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.597.022.676,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi PBJT Permainan Ketangkasan TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 35 PBJT Permainan Ketangkasan TA 2025 dan 2024

No	Nama Wajib Pajak	Badan Usaha	Tahun 2025	Tahun 2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Kecamatan Kabanjahe			***3.400.000,00***	***0,00***
1	Eron Ginting	Kolam Renang Milala	1.000.000,00	0,00
2	Hariatik	Karaoke Suite Pakar	2.400.000,00	0,00
Kecamatan Berastagi			***3.593.622.676,00***	***0,00***
1	Hariatik	Kolam Renang Suite Pakar	3.750.000,00	0,00
2	Andrew Rusli	Ketangkasan Mikie Holiday	3.547.596.820,00	0,00
3	Abu Djaja Bunjamin	Karaoke Grand Mutiara	6.167.462,00	0,00
4	Mustika Akbar, S.Sos. MAP	Bar/Kolam Renang Sibayak	26.821.815,00	0,00
5	Anita Irma Tambunan	Bar Brastagi Cottage	2.630.708,00	0,00
6	Ica Silviany Br Bukit	Billiard JABU	6.655.871,00	0,00
Jumlah			**3.597.022.676,00**	**0,00**

10. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah. Opsen PKB Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp21.928.235.089,00 dengan realisasi sebesar

Rp17.254.448.571,00 atau 78,69%. Realisasi Opsen PKB TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.254.448.571,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Opsen PKB TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian Opsen PKB berdasarkan unit pelayanan yang dapat dilihat pada lampiran 14.

Adapun perincian Opsen PKB berdasarkan saluran *(channel)* bayar TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 36 Perincian Saluran (Channel) Bayar Opsen PKB TA 2025 dan 2024

No	Saluran (Channel) Bayar	Realisasi (Rp)
1	Tunai	16.310.429.817,00
2	Qris	138.878.360,00
3	EDC	129.665.333,00
4	Signal	216.803.299,00
5	E-Samsat	458.671.762,00
Jumlah		**17.254.448.571,00**

11. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
    Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah. Opsen BBNKB Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp9.424.776.829,00 dengan realisasi sebesar Rp9.053.188.004,00 atau 96,06%. Realisasi Opsen BBNKB TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.053.188.004,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Opsen BBNKB TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 37 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2025 dan 2024

No	Unit Pelayanan	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kabanjahe	3.709.200,00	0,00
2	Medan Utara	9.049.478.804,00	0,00
Jumlah		**9.053.188.004,00**	**0,00**

Adapun perincian Opsen BBNKB berdasarkan saluran *(channel)* bayar TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 38 Perincian Saluran (Channel) Bayar Opsen BBNKB TA 2025 dan 2024

No	Saluran (Channel) Bayar	Realisasi (Rp)
1	Tunai	9.041.065.272,00
2	EDC	12.122.732,00
Jumlah		**9.053.188.004,00**

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp43.732.430.443,00	**Rp33.697.123.306,00**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah

tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan teknis pemungutan retribusi daerah tertuang pada Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp42.142.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp43.732.430.443,00 atau 103,77%. Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.035.307.137,00 atau 29,78% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp33.697.123.306,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 39 Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	35.653.819.000,00	37.393.790.247,00	104,88	27.577.857.918,00
2	Retribusi Jasa Usaha	5.241.581.000,00	4.626.519.960,00	88,27	4.590.687.152,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.247.500.000,00	1.712.120.236,00	137,24	1.528.578.236,00
Jumlah		**42.142.900.000,00**	**43.732.430.443,00**	**103,77**	**33.697.123.306,00**

Perubahan nomenklatur dan kodefikasi rekening pada Retribusi Jasa Usaha dengan kode rekening sub rincian objek Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan yang di *mapping* pada Retribusi Jasa Umum dengan kode rekening sub rincian objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan pada Retribusi Jasa Usaha dengan kode rekening sub rincian objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur pula perubahan nomenklatur dan kodefikasi rekening PAD.

1. Retribusi Jasa Umum
   Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp35.653.819.000,00 dengan realisasi sebesar Rp37.393.790.247,00 atau 104,88%. Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.815.932.329,00 atau 35,59% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 sebesar Rp27.577.857.918,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 40 Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	27.917.618.000,00	31.234.891.147,00	111,88	22.810.724.618,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.798.095.000,00	2.313.706.000,00	82,69	1.843.050.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.699.465.000,00	1.699.750.000,00	100,02	1.276.600.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.238.641.000,00	2.145.443.100,00	66,25	1.647.483.300,00
Jumlah		**35.653.819.000,00**	**37.393.790.247,00**	**104,88**	**27.577.857.918,00**

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang terkait langsung dengan pelayanan kesehatan pemerintahan. Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi Jasa Umum pelayanan kesehatan yang dianggarkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp27.917.618.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.234.891.147,00 atau 111,88%. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.424.166.529,00 atau 36,93% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 sebesar Rp22.810.724.618,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 41 Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.287.873.000,00	2.569.350.007,00	112,30	2.308.595.165,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	25.629.745.000,00	28.665.541.140,00	111,84	20.502.129.453,00
Jumlah		**27.917.618.000,00**	**31.234.891.147,00**	**111,88**	**22.810.724.618,00**

- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

  Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas merupakan retribusi pelayanan kesehatan dari 19 (sembilan belas) Puskesmas atau FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.287.873.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.569.350.007,00 atau 112,30%. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp260.754.842,00 atau 11,29% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2024 sebesar Rp2.308.595.165,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 42 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2025 dan 2024

No	Puskesmas / FKTP	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Barusjahe	112.788.000,00	78.172.500,00	69,31	72.930.000,00
2	Berastagi	111.343.500,00	91.390.000,00	82,08	61.660.500,00
3	Dolat Rayat	45.594.000,00	48.795.000,00	107,02	47.260.000,00
4	Juhar	67.653.000,00	80.395.000,00	118,83	83.572.500,00
5	Kabanjahe	216.385.000,00	152.395.000,00	70,43	158.534.000,00
6	Korpri	110.043.000,00	50.570.000,00	45,95	51.230.000,00
7	Kutabuluh	58.374.000,00	44.410.000,00	76,08	40.970.000,00
8	Lau Baleng	146.093.700,00	154.985.000,00	106,09	138.058.000,00
9	Mardingding	92.115.000,00	73.245.000,00	79,51	78.631.500,00
10	Merdeka	71.932.500,00	67.645.000,00	94,04	65.962.500,00
11	Merek	106.524.000,00	127.110.000,00	119,33	134.079.000,00
12	Munte	105.651.000,00	91.090.000,00	86,22	98.080.000,00
13	Naman Teran	67.198.500,00	62.450.000,00	92,93	63.985.000,00
14	Payung	56.173.500,00	54.280.000,00	96,63	55.590.000,00
15	Simpang Empat	97.812.000,00	96.395.000,00	98,55	89.635.000,00
16	Singa	38.172.000,00	40.060.000,00	104,95	36.715.000,00
17	Tiga Binanga	102.613.500,00	137.300.000,00	133,80	147.522.500,00
18	Tiganderket	101.892.300,00	131.325.000,00	128,89	137.980.000,00
19	Tiga Panah	129.514.500,00	166.615.000,00	128,65	146.855.000,00

No	Puskesmas / FKTP	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
20	BPJS Persalinan	450.000.000,00	820.722.507,00	182,38	599.344.665,00
Jumlah		**2.287.873.000,00**	**2.569.350.007,00**	**112,30**	**2.308.595.165,00**

- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
  Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan pendapatan BLUD dari pelayanan kesehatan yang berasal dari pasien JKN dan pasien umum. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp25.629.745.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.665.541.140,00 atau 111,84%. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.163.411.687,00 atau 39,82% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah TA 2024 sebesar Rp20.502.129.453,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 43 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pasien JKN	24.155.569.678,86	27.131.471.316,00	112,32	18.960.791.920,00
2	Pasien Umum	1.474.175.321,14	1.534.069.824,00	104,06	1.513.293.410,00
3	Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	28.044.123,00
Jumlah		**25.629.745.000,00**	**28.665.541.140,00**	**111,84**	**20.502.129.453,00**

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
   Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan masuk kedalam kategori Retribusi Pelayanan Kebersihan yang dianggarkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.798.095.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.313.706.000,00 atau 82,69%. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp470.656.000,00 atau 25,54% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2024 sebesar Rp1.843.050.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 44 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	2.197.407.000,00	1.875.620.000,00	85,36	1.843.050.000,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	600.688.000,00	438.086.000,00	72,93	0,00
Jumlah		**2.798.095.000,00**	**2.313.706.000,00**	**82,69**	**1.843.050.000,00**

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.197.407.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.875.620.000,00 atau 85,36%. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp32.570.000,00 atau 1,77% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2024 sebesar Rp1.843.050.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 45 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Kabanjahe	823.310.000,00	878.860.000,00
2	Kecamatan Berastagi	694.660.000,00	705.640.000,00
3	Kecamatan Juhar	12.300.000,00	9.570.000,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
4	Kecamatan Merdeka	18.180.000,00	8.590.000,00
5	Kecamatan Merek	45.180.000,00	69.075.000,00
6	Kecamatan Munte	7.850.000,00	0,00
7	Kecamatan Payung	5.470.000,00	11.855.000,00
8	Kecamatan Tiga Binanga	71.340.000,00	15.425.000,00
9	Kecamatan Tiganderket	5.980.000,00	11.275.000,00
10	Kecamatan Tiga Panah	111.640.000,00	36.650.000,00
11	Kecamatan Kutabuluh	3.800.000,00	810.000,00
12	Kecamatan Lau Baleng	1.680.000,00	630.000,00
13	Kecamatan Barusjahe	28.120.000,00	65.395.000,00
14	Kecamatan Simpang Empat	16.660.000,00	15.485.000,00
15	Kecamatan Dolat Rayat	6.150.000,00	13.250.000,00
16	Kecamatan Naman Teran	23.300.000,00	540.000,00
Jumlah		**1.875.620.000,00**	**1.843.050.000,00**

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan retribusi pemakaian kamar mandi di wilayah pasar. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp600.688.000,00 dengan realisasi sebesar Rp438.086.000,00 atau 72,93%. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp438.086.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 46 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pusat Pasar Kabanjahe	220.000.000,00	0,00
2	Pusat Pasar Berastagi	94.000.000,00	0,00
3	Pasar Roga Berastagi	760.000,00	0,00
4	Pasar Tiga Binanga	33.200.000,00	0,00
5	Pasar Tiganderket	9.726.000,00	0,00
6	Pasar Lau Baleng	19.850.000,00	0,00
7	Pasar Mardingding	15.260.000,00	0,00
8	Pasar Tiga Panah	34.600.000,00	0,00
9	Pasar Barusjahe	5.570.000,00	0,00
10	Pasar Munte	5.120.000,00	0,00
Jumlah		**438.086.000,00**	**0,00**

c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan pada Dinas Perhubungan. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.699.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.699.750.000,00 atau 100,02%. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp423.150.000,00 atau 33,15% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2024 sebesar Rp1.276.600.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 47 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025
		Realisasi (Rp)
1	Zona 1 Kabanjahe	1.043.000.000,00
2	Zona 2 Berastagi	616.500.000,00

No	Uraian	Tahun 2025
		Realisasi (Rp)
3	Zona 3 Kecamatan	40.250.000,00
Jumlah		**1.699.750.000,00**

Sesuai dengan Keputusan Bupati Karo Nomor 500.11.33/1098/PHB/2024 Tentang Penetapan Titik Lokasi Parkir di Kabupaten Karo. Titik lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum terdiri dari:

- Zona 1 Kabanjahe: Jalan Kapten Bangsi Sembiring, Jalan Suka Raja Munte, Jalan Bambu Runcing, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Kapten Pala Bangun, Jalan Veteran, Jalan Letnan Abdul Kadir, Jalan Kristen, Jalan Upah Tendi Sebayang, Jalan Letnan Rata Perangin-angin, Jalan Pahlawan, Jalan Padang Mas I, Jalan Padang Mas II (Pasar Baru), Jalan Perwira, Jalan Mariam Ginting, dan Jalan Wagimin;

- Zona 2 Berastagi: Jalan Jamin Ginting, Jalan Veteran, Gundaling, Pusat Pasar Berastagi, Peceren, Penatapan Berastagi, Simpang Desa Lau Gendek, Jalan Perniagaan, Jalan Mesjid, Jalan Penghasilan, Jalan Dagang, Jalan Pasar, Jalan Jaranguda, Jalan Udara, Jalan Kenangan, Jalan Perwira, Jalan Kolam Renang;

- Zona 3 Kecamatan: Lokasi Pasar Tiganderket, Lokasi Pasar Merek, Lokasi Pasar Tigabinanga, Lokasi Pasar Lau Baleng, Lokasi Pasar Mardinding, Lokasi Pasar Dolat Rayat, Lokasi Pasar Kutabuluh, Lokasi Pasar Tigapanah; dan

- Zona 4 Parkir Insidentil: Lokasi Kegiatan Acara Suka Cita, Lokasi Pertandingan Olahraga, Lokasi Acara Pertunjukan Seni Budaya dan Lokasi yang Menyelenggarakan Acara Keramaian Lainnya.

d. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Retribusi Pelayanan Pasar terdiri atas Retribusi Pelataran, Retribusi Los dan Retribusi Kios. Retribusi Pelayanan Pasar Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.238.641.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.145.443.100,00 atau 66,25%. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp497.959.800,00 atau 30,23% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 sebesar Rp1.647.483.300,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 48 Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelataran	598.452.000,00	617.743.000,00	103,22	528.700.000,00
2	Retribusi Los	712.852.000,00	649.417.000,00	91,10	570.939.000,00
3	Retribusi Kios	1.927.337.000,00	878.283.100,00	45,57	547.844.300,00
Jumlah		**3.238.641.000,00**	**2.145.443.100,00**	**66,25**	**1.647.483.300,00**

- Retribusi Pelataran

  Retribusi Pelataran merupakan pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas pelataran atau lahan yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. Pembayaran ini termasuk bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang pembayarannya dilakukan harian/bulanan melalui karcis/alat kutip dengan tarif bervariasi berdasarkan luas objek. Retribusi Pelataran Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp598.452.000,00 dengan realisasi sebesar Rp617.743.000,00 atau 103,22%. Realisasi Retribusi Pelataran TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp89.043.000,00 atau 16,84% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelataran TA 2024 sebesar Rp528.700.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 49 Retribusi Pelataran TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pusat Pasar Kabanjahe	171.730.000,00	156.335.000,00
2	Pasar Singa Kabanjahe	25.300.000,00	24.245.000,00
3	Pusat Pasar Berastagi	134.642.000,00	74.420.000,00
4	Pasar Roga Berastagi	78.877.000,00	74.842.000,00
5	Pasar Buah Berastagi	11.523.000,00	8.034.000,00
6	Pasar Tiga Binanga	32.500.000,00	33.925.000,00
7	Pasar Tiganderket	10.406.000,00	10.119.000,00
8	Pasar Lau Baleng	13.420.000,00	14.525.000,00
9	Pasar Mardingding	9.736.000,00	9.169.000,00
10	Pasar Kutabuluh	1.875.000,00	1.604.000,00
11	Pasar Merek	1.080.000,00	1.245.000,00
12	Pasar Dolat Rayat	17.105.000,00	15.920.000,00
13	Pasar Tiga Panah	85.730.000,00	80.682.000,00
14	Pasar Barusjahe	10.539.000,00	10.715.000,00
15	Pasar Munte	3.720.000,00	3.690.000,00
16	Pasar Hewan Suka	9.560.000,00	9.230.000,00
Jumlah		**617.743.000,00**	**528.700.000,00**

- Retribusi Los
  Retribusi Los merupakan pembayaran atas penggunaan fasilitas los yang wajib dibayar pedagang sebagai imbalan langsung atas penggunaan tempat usaha tersebut. Pembayaran ini termasuk bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang pembayarannya dilakukan harian/bulanan melalui karcis/alat kutip dengan tarif bervariasi berdasarkan luas objek. Retribusi Los Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp712.852.000,00 dengan realisasi sebesar Rp649.417.000,00 atau 91,10%. Realisasi Retribusi Los TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp78.478.000,00 atau 13,75% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Los TA 2024 sebesar Rp570.939.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 50 Retribusi Los TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pusat Pasar Kabanjahe	79.325.000,00	49.859.000,00
2	Pasar Singa Kabanjahe	60.950.000,00	58.610.000,00
3	Pusat Pasar Berastagi	23.388.000,00	19.405.000,00
4	Pasar Roga Berastagi	83.764.000,00	74.076.000,00
5	Pasar Buah Berastagi	58.001.000,00	24.929.000,00
6	Pasar Tiga Binanga	72.650.000,00	70.850.000,00
7	Pasar Tiganderket	25.913.000,00	26.674.000,00
8	Pasar Lau Baleng	57.411.000,00	62.580.000,00
9	Pasar Mardingding	47.320.000,00	47.145.000,00
10	Pasar Kutabuluh	1.865.000,00	1.753.000,00
11	Pasar Merek	1.230.000,00	1.320.000,00
12	Pasar Tiga Panah	105.510.000,00	102.868.000,00
13	Pasar Barusjahe	15.100.000,00	15.320.000,00
14	Pasar Munte	16.990.000,00	15.550.000,00
Jumlah		**649.417.000,00**	**570.939.000,00**

- Retribusi Kios
  Retribusi Kios merupakan pembayaran atas penggunaan fasilitas kios/tempat usaha milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang wajib dibayar pengguna kios sebagai imbalan langsung atas penggunaan tempat usaha tersebut. Pembayaran ini termasuk bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang pembayarannya dilakukan harian/bulanan melalui karcis/alat

kutip dengan tarif bervariasi berdasarkan luas objek. Retribusi Kios Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.927.337.000,00 dengan realisasi sebesar Rp878.283.100,00 atau 45,57%. Realisasi Retribusi Kios TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp330.438.800,00 atau 60,32% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Kios TA 2024 sebesar Rp547.844.300,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 51 Retribusi Kios TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pusat Pasar Kabanjahe	308.747.800,00	189.625.400,00
2	Pusat Pasar Berastagi	190.672.800,00	110.793.400,00
3	Pasar Buah Berastagi	120.568.000,00	33.815.000,00
4	Pasar Tigabinanga	69.138.000,00	53.348.500,00
5	Pasar Tiganderket	50.376.000,00	47.544.000,00
6	Pasar Laubaleng	51.126.000,00	50.224.000,00
7	Pasar Mardingding	13.272.000,00	13.092.000,00
8	Pasar Kutabuluh	7.231.000,00	7.705.000,00
9	Pasar Merek	2.200.500,00	1.008.000,00
10	Pasar Tigapanah	50.220.000,00	27.648.000,00
11	Pasar Barusjahe	9.111.000,00	10.071.000,00
12	Pasar Munte	5.620.000,00	2.970.000,00
Jumlah		**878.283.100,00**	**547.844.300,00**

2. Retribusi Jasa Usaha

   Retribusi Jasa Usaha merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta yang meliputi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp5.241.581.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.626.519.960,00 atau 88,27%. Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp35.832.808,00 atau 0,78% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 sebesar Rp4.590.687.152,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 52 Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	3.500.000,00	70,00	1.188.440.000,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	495.000.000,00	498.500.000,00	100,71	450.000.000,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	166.768.000,00	108.350.000,00	64,97	97.560.000,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.415.000.000,00	3.129.991.960,00	91,65	2.737.835.652,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	186.863.000,00	188.778.000,00	101,02	116.851.500,00
6	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	972.950.000,00	697.400.000,00	71,68	0,00
Jumlah		**5.241.581.000,00**	**4.626.519.960,00**	**88,27**	**4.590.687.152,00**

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

   Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.500.000,00 atau 70,00%. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.184.940.000,00 atau minus 99,71% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah TA 2024 sebesar Rp1.188.440.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 53 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	494.140.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	3.500.000,00	70,00	694.300.000,00
Jumlah		**5.000.000,00**	**3.500.000,00**	**70,00**	**1.188.440.000,00**

- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
  Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan TA 2025 tidak dianggarkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena di *mapping* pada kode rekening Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sedangkan pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata di *mapping* pada kode rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Realisasi Penyewaan Tanah dan Bangunan TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp494.140.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 54 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan TA 2025 dan 2024

Perangkat Daerah	Restribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perincian :				
	1. Kamar Mandi	0,00	0,00	0,00	381.590.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.590.000,00**
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	Perincian :				
	1. Pemakaian Tanah untuk Usaha Taman Mejuah-juah	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
	2. Pemakaian Tanah Objek Wisata Air Terjun Sipiso-piso	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	3. Pemakaian Gedung di Area Luar/Dalam Taman Mejuah-juah (Souvenir)	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	4. Pemakaian Gedung Restoran Objek Wisata Air Terjun Sipiso-piso Tongging	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Pemakaian Open Stage Taman Mejuah-juah	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	6. Pemakaian Lapangan Samura	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	7. Kamar Mandi TIC	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00
	8. Kamar Mandi Lapangan Parkir Taman Mejuah-juah	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00
	9. Pemakain Gazebo Gundaling	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.550.000,00**
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.140.000,00**

- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
  Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor TA 2025 dianggarkan pada Dinas Perhubungan yang merupakan retribusi atas pemakaian bus roda enam sedangkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak dianggarkan karena di *mapping* pada kode rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.500.000,00 atau 70,00%. Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp690.800.000,00 atau minus 99,50% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian

Kendaraan Bermotor TA 2024 sebesar Rp694.300.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 55 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor TA 2025 dan 2024

Perangkat Daerah	Restribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Perincian:				
	1.Alat Berat Excavator	0,00	0,00	0,00	138.600.000,00
	2.Alat Berat Buldozer	0,00	0,00	0,00	37.400.000,00
	3.Alat Berat Motor Grader	0,00	0,00	0,00	46.250.000,00
	4.Alat Berat Backhoe Loader	0,00	0,00	0,00	153.600.000,00
	5.Alat Berat Mesin Gilas	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00
	6.Alat Berat Vibromax	0,00	0,00	0,00	67.150.000,00
	7.Alat Berat Trado	0,00	0,00	0,00	224.000.000,00
Dinas Perhubungan	1.Sewa Kendaraan Bus Roda 6 (Ayo Naik Bis)	5.000.000,00	3.500.000,00	70,00	0,00
Total		**5.000.000,00**	**3.500.000,00**	**70,00**	**694.300.000,00**

b. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir masuk kedalam kategori Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang dianggarkan pada Dinas Perhubungan. Retribusi Tempat Khusus Parkir Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp495.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp498.500.000,00 atau 100,71%. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp48.500.000,00 atau 10,78% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2024 sebesar Rp450.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 56 Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025
		Realisasi (Rp)
1	Lokasi Objek Wisata	281.000.000,00
2	Lokasi Tempat Pelelangan	217.500.000,00
Jumlah		**498.500.000,00**

Sesuai dengan Keputusan Bupati Karo Nomor 500.11.33/1098/PHB/2024 Tentang Penetapan Titik Lokasi Parkir di Kabupaten Karo. Titik lokasi parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan terdiri dari:

- Lokasi Objek Wisata: Gundaling, Sipiso-piso, Tongging, Perkemahan Danau Lau Kawar dan Taman Mejuah-Juah;
- Lokasi Tempat Pelelangan: Dolat Rayat, Tiga Singa Kabanjahe, Tigapanah, Tiga Binanga, Mardinding, Lau Baleng, Tiganderket, Merek, Suka, Pasar Sayur Mayur Roga Berastagi, Tiga Jumpa, Tongging dan Munte; dan
- Lokasi Area Terminal Tipe C Kabanjahe.

c. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan masuk kedalam kategori retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang dianggarkan pada Dinas Pertanian. Jumlah rumah potong hewan di Kabupaten Karo sebanyak 2 unit yang terletak di Kabanjahe dan Berastagi. Adapun jenis hewan ternak yang dipotong di rumah potong hewan Kabanjahe adalah sapi dan kerbau dengan rata-rata jumlah hewan yang dipotong sebanyak 3 ekor per hari. Sedangkan pada rumah potong hewan Berastagi jenis ternak yang dipotong adalah sapi, kerbau dan babi dengan rata-rata jumlah hewan sapi dan kerbau yang

dipotong sebanyak 3 ekor per minggu dan babi sebanyak 3 ekor per hari. Biaya retribusi untuk sapi dan kerbau yang disembelih sebesar Rp50.000,00/ekor sedangkan untuk babi sebesar Rp40.000,00/ekor. Retribusi Rumah Potong Hewan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp166.768.000,00 dengan realisasi sebesar Rp108.350.000,00 atau 64,97%. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.790.000,00 atau 11,06% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2024 sebesar Rp97.560.000,00.

d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga masuk kedalam kategori Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang dianggarkan pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.415.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.129.991.960,00 atau 91,65%. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp392.156.308,00 atau 14,32% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024 sebesar Rp2.737.835.652,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 57 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Gundaling	1.056.000.000,00	981.894.138,00	92,98	1.024.941.570,00
2	Tongging/ Air Terjun Sipiso-Piso	915.000.000,00	895.737.822,00	97,89	854.774.082,00
3	LAG Sibayak/ Lau Debuk-Debuk	1.257.000.000,00	870.000.000,00	69,21	760.265.000,00
4	LAG Sipiso-Piso	47.000.000,00	10.700.000,00	22,77	10.805.000,00
5	Lau Kawar	140.000.000,00	371.660.000,00	265,47	87.050.000,00
Jumlah		**3.415.000.000,00**	**3.129.991.960,00**	**91,65**	**2.737.835.652,00**

e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah masuk kedalam kategori Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang dianggarkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan hasil dari penjualan benih ikan nila dan ikan mas yang berasal dari proses budidaya dan diproduksi di Balai Benih Ikan Lokal Singgamanik. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp186.863.000,00 dengan realisasi sebesar Rp188.778.000,00 atau 101,02%. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp71.926.500,00 atau 61,55% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2024 sebesar Rp116.851.500,00.

f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah masuk kedalam kategori retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dianggarkan pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Pertanian. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp972.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp697.400.000,00 atau 71,68%. Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp697.400.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 58 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata		***300.000.000,00***	***156.150.000,00***	***52,05***	***0,00***
1	Pemakaian Tanah untuk Usaha TMJJ	30.000.000,00	16.550.000,00	55,17	0,00
2	Gazebo Gundaling	20.000.000,00	13.800.000,00	69,00	0,00
3	Pemakaian Tanah OW. AT. Sipiso-Piso	30.000.000,00	28.700.000,00	95,67	0,00
4	Pemakaian Gedung di Area Luar/ Dalam TMJJ (Souvenir)	140.000.000,00	50.000.000,00	35,71	0,00
5	Pemakaian Open Stage TMJJ/ Gedung Kesenian	20.000.000,00	3.000.000,00	15,00	0,00
6	Pemakaian Lapangan Samura	20.000.000,00	4.000.000,00	20,00	0,00
7	Kamar Mandi TIC	20.000.000,00	20.450.000,00	102,25	0,00
8	Kamar Mandi Lapangan Parkir TMJJ	20.000.000,00	19.650.000,00	98,25	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		***663.850.000,00***	***532.150.000,00***	***80,16***	***0,00***
1	Pemakaian Alat Berat Excavator	99.000.000,00	96.800.000,00	97,78	0,00
2	Pemakaian Alat Berat Buldozer	39.600.000,00	67.100.000,00	169,44	0,00
3	Pemakaian Alat Berat Motor Grader	62.500.000,00	25.000.000,00	40,00	0,00
4	Pemakaian Alat Berat Backhoe Loader	143.650.000,00	144.000.000,00	100,24	0,00
5	Pemakaian Alat Berat Mesin Gilas	46.800.000,00	14.950.000,00	31,94	0,00
6	Pemakaian Alat Berat Vibromax	32.300.000,00	32.300.000,00	100,00	0,00
7	Pemakaian Alat Berat Trado	240.000.000,00	152.000.000,00	63,33	0,00
Dinas Pertanian		***9.100.000,00***	***9.100.000,00***	***100,00***	***0,00***
1	Pemakaian Tanah Pengembangan Ternak di Nodi, Desa Mbal-mbal Petarum, Kecamatan Lau Baleng	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**972.950.000,00**	**697.400.000,00**	**71,68**	**0,00**

3. Retribusi Perizinan Tertentu

   Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang meliputi persetujuan bangunan Gedung (PBG) dan penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.247.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.712.120.236,00 atau 137,24%. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp183.542.000,00 atau 12,01% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 sebesar Rp1.528.578.236,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 59 Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi PBG	1.237.500.000,00	1.651.910.572,00	133,49	1.509.994.976,00
2	Retribusi Penggunaan TKA	10.000.000,00	60.209.664,00	602,10	18.583.260,00
Jumlah		**1.247.500.000,00**	**1.712.120.236,00**	**137,24**	**1.528.578.236,00**

a. Retribusi PBG

Retribusi PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung yang dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Retribusi PBG Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.237.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.651.910.572,00 atau 133,49%. Realisasi Retribusi PBG TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp141.915.596,00 atau 9,40% dibandingkan dengan realisasi Retribusi PBG TA 2024 sebesar Rp1.509.994.976,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 60 Retribusi PBG TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025
		Realisasi (Rp)
1	Hunian Sederhana	24.197.180,00
2	Hunian Tidak Sederhana	118.221.295,00
3	Hunian Kolektif	40.161.707,00
4	Usaha	765.903.712,00
5	Usaha UMKM	500.951.817,00
6	Prasarana	38.803.000,00
7	Sosial Budaya	146.194.804,00
8	Keagamaan	845.000,00
9	Campuran	16.632.057,00
Jumlah		**1.651.910.572,00**

b. Retribusi Penggunaan TKA

Retribusi Penggunaan TKA adalah dana kompensasi penggunaan TKA atas pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA yang dianggarkan pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Retribusi Penggunaan TKA Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp60.209.664,00 atau 602,10%. Realisasi Retribusi Penggunaan TKA TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp41.626.404,00 atau 224,00% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggunaan TKA TA 2024 sebesar Rp18.583.260,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 61 Retribusi Penggunaan TKA TA 2025

No	Nama Perusahaan	Jumlah/ Nama TKA	Nilai Ketetapan Retribusi	Nilai Setor di RKUD
				Realisasi (Rp)
1	PT Merk Indah Lestari	1 Orang/ Tay Kim Hock	20.335.572,00	20.335.680,00
2	PT Ultra Sumatera Dairy Farm	1 Orang/ Brendan Stephen Wikins	20.230.656,00	20.230.656,00
3	PT Ultra Sumatera Dairy Farm	1 Orang/ Leo Marion Delina Estrada	19.643.328,00	19.643.328,00
Jumlah			**60.209.556,00**	**60.209.664,00**

Retribusi Penggunaan TKA pada perusahaan PT Merk Indah Lestari sejumlah 1 orang a.n Tay Kim Hock terdapat kelebihan setor ke RKUD dari nilai retribusi yang telah ditetapkan sebesar Rp108,00. Atas kelebihan setor tersebut tidak dijadikan sebagai kompensasi pembayaran Retribusi Penggunaan TKA tahun berikutnya.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2025	Tahun 2024
	3.446.458.482,00	**Rp2.624.980.942,59**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karo merupakan laba atau dividen tunai sebesar 85,00% atas penyertaan modal pada PT Bank Sumut Tahun Buku 2024 berdasarkan

Lampiran 1 Surat Direksi PT Bank Sumut Nomor 118.1/Dir/SP-SPr/Psh/2025 tanggal 21 Maret 2025. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.446.458.482,00 dengan realisasi sebesar Rp3.446.458.482,00 atau 100,00%. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp821.477.539,41 atau 31,29% dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp2.624.980.942,59.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2025	Tahun 2024
	13.428.074.777,85	**Rp7.487.137.025,83**

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Perda. Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp9.403.182.532,00 dengan realisasi sebesar Rp13.428.074.777,85 atau 142,80%. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.940.937.752,02 atau 79,35% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp7.487.137.025,83 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 62 Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	956.361.700,00	1.267.846.639,00	132,57	298.518.100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	38.561.000,00	77,12	205.893.000,00
3	Jasa Giro	900.000.000,00	1.120.825.476,18	124,54	1.454.601.702,00
4	Pendapatan Bunga	600.000.000,00	653.604.195,00	108,93	1.128.846.260,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.800.000,00	15.800.000,00	100,00	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.439.698.663,00	4.270.518.489,51	296,63	3.885.019.135,83
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	600.000.000,00	559.939.990,16	93,32	233.089.997,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	4.834.611.432,00	5.163.394.091,00	106,80	279.833.331,00
9	Pendapatan BLUD	6.350.000,00	312.591.397,00	4.922,70	0,00
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	360.737,00	24.993.500,00	6.928,45	1.335.500,00
Jumlah		**9.403.182.532,00**	**13.428.074.777,85**	**142,80**	**7.487.137.025,83**

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
   Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp956.361.700,00 dengan realisasi sebesar Rp1.267.846.639,00 atau 132,57%. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp969.328.539,00 atau 324,71% dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp298.518.100,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 63 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	954.361.700,00	1.265.996.639,00	132,65	0,00
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	2.000.000,00	1.850.000,00	92,50	298.518.100,00
Jumlah		**956.361.700,00**	**1.267.846.639,00**	**132,57**	**298.518.100,00**

a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Hasil Penjualan Aset Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Kendaraan Bermotor Penumpang. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp954.361.700,00 dengan realisasi sebesar Rp1.265.996.639,00 atau 132,65%. Realisasi Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.265.996.639,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 64 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin TA 2025

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai Wajar/ Nilai Limit	Nilai Setor di RKUD Tahun 2025	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	RKUD
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penjualan Aset Kendaraan Bermotor Perorangan BK 1157 S (BK 7 S) Tanpa Lelang	121.570.426,00	121.570.426,00	SUMUT
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penjualan Aset Kendaraan Bermotor Perorangan BK 1156 S (BK 8 S) Tanpa Lelang	127.879.453,00	127.879.453,00	SUMUT
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penjualan Aset Kendaraan Bermotor Perorangan BK 1158 S (BK 3 S) Tanpa Lelang	128.455.252,00	128.455.252,00	SUMUT
4	Sekretariat Daerah	Penjualan Aset Kendaraan Bermotor Perorangan BK 1099 S Tanpa Lelang	130.326.308,00	130.326.308,00	SUMUT
5	Sekretariat Daerah	Penjualan Aset Kendaraan Bermotor Perorangan BK 1108 S Tanpa Lelang	42.925.200,00	42.925.200,00	SUMUT
6	Dinas Kesehatan/ Rumah Sakit Umum Daerah/ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan KB/ Sekretariat Daerah/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Badan Perencanaan Pembangungan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Penjualan Aset Kendaraan Dinas Operasional Dalam Paket (8 Unit) Melalui Lelang	550.739.000,00	550.709.000,00	BRI
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penjualan Aset Kendaraan Dinas Operasional BK 8279 S Melalui Lelang	54.830.000,00	54.830.000,00	BRI

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai Wajar/ Nilai Limit	Nilai Setor di RKUD Tahun 2025	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	RKUD
8	Dinas Kesehatan/ Sekretariat Daerah/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penjualan Aset Kendaraan Dinas Operasional Dalam Paket (10 Unit) Melalui Lelang	67.520.000,00	67.520.000,00	BRI
9	Sekretariat Daerah	Penjualan Aset Kendaraan Dinas Operasional BK 1017 S Melalui Lelang	41.781.000,00	41.781.000,00	BRI
Jumlah			**1.266.026.639,00**	**1.265.996.639,00**	

Terdapat selisih sebesar Rp30.000,00 antara nilai wajar/nilai limit dengan nilai penyetoran ke RKUD dikarenakan biaya RTGS/ *RTGS fee* pada penjualan aset kendaraan dinas operasional dalam paket (8 unit) melalui lelang.

b. Hasil Penjualan Aset Lain-lain

Hasil Penjualan Aset Lain-lain merupakan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari hasil penjualan aset lain-lain berupa aset rusak berat/usang. Hasil Penjualan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.850.000,00 atau 92,50%. Realisasi Hasil Penjualan Aset Lain-lain TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp296.668.100,00 atau minus 99,38% dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Lain-lain TA 2024 sebesar Rp298.518.100,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 65 Hasil Penjualan Aset Lain-lain TA 2025 dan 2024

No	Perangkat Daerah	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Lelang 1 (Satu) Paket Limbah Padat/ Scrap Eks. Kendaraan Dinas Operasional dan Sisa Bongkaran	0,00	298.518.100,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Aset Peralatan dan Mesin yang Rusak Berat	400.000,00	0,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Aset Peralatan dan Mesin yang Rusak Berat	800.000,00	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Aset Peralatan dan Mesin yang Rusak Berat	650.000,00	0,00
Jumlah			**1.850.000,00**	**298.518.100,00**

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp38.561.000,00 atau 77,12%. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp167.332.000,00 atau minus 81,27% dibandingkan dengan realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp205.893.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 66 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	30.000.000,00	38.561.000,00	128,54	205.893.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**50.000.000,00**	**38.561.000,00**	**77,12**	**205.893.000,00**

a. Hasil Sewa BMD

Hasil Sewa BMD merupakan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari hasil sewa kantin dan sewa lahan. Hasil Sewa BMD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp38.561.000,00 atau 128,54%. Realisasi Hasil Sewa BMD TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp167.332.000,00 atau minus 81,27% dibandingkan dengan realisasi Hasil Sewa BMD TA 2024 sebesar Rp205.893.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 67 Hasil Sewa BMD TA 2025 dan 2024

No	Perangkat Daerah	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Sewa Kantin pada Dinas Pendidikan	6.447.000,00	27.000,00
2	Sekretariat Daerah	Sewa Kantin pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	0,00	24.552.000,00
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sewa Kantin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.293.000,00	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Sewa Kantin pada Dinas Lingkungan Hidup	3.597.000,00	0,00
5	Sekretariat Daerah	Sewa Lahan dan Ruang ATM Bank Sumut KC Kabanjahe di Area Kantor Bupati pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	0,00	66.672.000,00
6	Sekretariat Daerah	Sewa Lahan dan Ruang ATM Bank BRI KC Kabanjahe di Area Kantor Bupati pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	22.224.000,00	22.224.000,00
7	Dinas Pertanian	Sewa Lahan Pemerintah Kabupaten Karo di Desa Nagara Kecamatan Merek an. Wahyudi Rahman	0,00	92.418.000,00
Jumlah			**38.561.000,00**	**205.893.000,00**

b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00.

3. Jasa Giro

Jasa Giro dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jasa Giro Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.120.825.476,18 atau 124,54%. Realisasi Jasa Giro TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp333.776.225,82 atau minus 22,95% dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro TA2024 sebesar Rp1.454.601.702,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 68 Jasa Giro TA 2025 dan 2024

No	Jasa Giro pada RKUD	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bank Sumut - 25001020025000	920.864.251,00	1.285.931.938,00
2	Bank Rakyat Indonesia (BRI) - 014401000011304	197.204.749,00	168.579.661,00
3	Bank Mandiri - 1050008002028	2.756.476,18	90.103,00
Jumlah		**1.120.825.476,18**	**1.454.601.702,00**

4. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga merupakan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan

Bunga Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp653.604.195,00 atau 108,93%. Realisasi Pendapatan Bunga TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp475.242.065,00 atau minus 42,10% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga TA 2024 sebesar Rp1.128.846.260,00.

5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
   Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan penerimaan pembayaran ganti kerugian atas hilangnya kendaraan roda dua/ sepeda motor Yamaha Aerox 155 VVA BK 6946 S pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 175/DP3AP2KB/III/2025 dan slip setor Bank Sumut KC Kabanjahe Nomor b280600025 250 b2806 tanggal 27 Februari 2025 sebesar Rp15.800.000,00. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp15.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.800.000,00 atau 100,00%. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.800.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2024 sebesar Rp0,00.

6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
   Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.439.698.663,00 dengan realisasi sebesar Rp4.270.518.489,51 atau 296,63%. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp385.499.353,68 atau 9,92% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 sebesar Rp3.885.019.135,83.

7. Pendapatan Denda Pajak Daerah
   Pendapatan Denda Pajak Daerah dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan Denda Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp559.939.990,16 atau 93,32%. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp326.849.993,16 atau 140,22% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp233.089.997,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 69 Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	11.170.689,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	13.719.495,00
3	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	185.000.000,00	222.900.999,00	120,49	208.199.813,00
4	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	15.000.000,00	26.948.098,16	179,65	0,00
5	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	400.000.000,00	310.013.586,00	77,50	0,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
6	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	77.307,00	0,00	0,00
Jumlah		**600.000.000,00**	**559.939.990,16**	**93,32**	**233.089.997,00**

a. Pendapatan Denda Pajak Hotel
Pendapatan Denda Pajak Hotel tidak dianggarkan, realisasi TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp11.170.689,00.

b. Pendapatan Denda Pajak Restoran
Pendapatan Denda Pajak Restoran tidak dianggarkan, realisasi TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp13.719.495,00.

c. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pendapatan Denda PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp185.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp222.900.999,00 atau 120,49%. Realisasi Pendapatan Denda PBB-P2 TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.701.186,00 atau 7,06% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda PBB-P2 TA 2024 sebesar Rp208.199.813,00.

d. Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Pendapatan Denda PBJT Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.948.098,16 atau 179,65%. Realisasi Pendapatan Denda PBJT TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp26.948.098,16 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda PBJT TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 70 Pendapatan Denda PBJT TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	3.000.000,00	3.669.411,00	122,31	0,00
2	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	12.000.000,00	23.278.687,16	193,99	0,00
Jumlah		**15.000.000,00**	**26.948.098,16**	**179,65**	**0,00**

e. Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pendapatan Denda Opsen PKB Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp310.013.586,00 atau 77,50%. Realisasi Pendapatan Denda Opsen PKB TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp310.013.586,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Opsen PKB TA 2024 sebesar Rp0,00.

f. Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Pendapatan Denda Opsen BBNKB tidak dianggarkan, realisasi TA 2025 dan 2024 sebesar Rp77.307,00 dan Rp0,00.

8. Pendapatan dari Pengembalian
Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan dari Pengembalian Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.834.611.432,00 dengan realisasi sebesar Rp5.163.394.091,00 atau 106,80%. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.883.560.760,00 atau 1.745,17% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 sebesar Rp279.833.331,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 71 Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	25.442.300,00	20.442.300,00	80,35	120.096.500,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	110.782.506,00	219.402.712,00	198,05	33.552.831,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	25.000.000,00	24.791.775,00	99,17	121.761.500,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	4.422.500,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	14.587.500,00	39.695.000,00	272,12	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.658.799.126,00	4.859.062.304,00	104,30	0,00
Jumlah		**4.834.611.432,00**	**5.163.394.091,00**	**106,80**	**279.833.331,00**

a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp25.442.300,00 dengan realisasi sebesar Rp20.442.300,00 atau 80,35%. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp99.654.200,00 atau minus 82,98% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp120.096.500,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 72 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	20.442.300,00	20.442.300,00	100,00	120.096.500,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**25.442.300,00**	**20.442.300,00**	**80,35**	**120.096.500,00**

b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp110.782.506,00 dengan realisasi sebesar Rp219.402.712,00 atau 198,05%. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp185.849.881,00 atau 553,90% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 sebesar Rp33.552.831,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 73 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	90.782.506,00	201.950.530,00	222,46	13.243.399,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00	0,00	2.284.260,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	0,00	0,00	15.997.412,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	20.000.000,00	17.452.182,00	87,26	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	0,00	0,00	2.027.760,00
Jumlah		**110.782.506,00**	**219.402.712,00**	**198,05**	**33.552.831,00**

c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.791.775,00 atau 99,17%. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp96.969.725,00 atau minus 79,64% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 sebesar Rp121.761.500,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 74 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.000.000,00	3.960.000,00	79,20	121.761.500,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	20.000.000,00	20.831.775,00	104,16	0,00
Jumlah		**25.000.000,00**	**24.791.775,00**	**99,17**	**121.761.500,00**

d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tidak dianggarkan, realisasi TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp4.422.500,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 75 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	4.175.000,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	247.500,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.422.500,00**

e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp14.587.500,00 dengan realisasi sebesar Rp39.695.000,00 atau 272,12%. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp39.695.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa TA 2024 sebesar Rp0,00.

f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.658.799.126,00 dengan realisasi sebesar Rp4.859.062.304,00 atau

104,30%. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.859.062.304,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp0,00.

9. Pendapatan BLUD
   Pendapatan BLUD merupakan pendapatan dari bunga/jasa giro dari kas di BLUD pada rekening giro di bank dan pendapatan dari komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD yang dianggarkan pada Rumah Sakit Umum Daerah. Pendapatan BLUD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp6.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp312.591.397,00 atau 4.922,70%. Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp312.591.397,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan BLUD TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 76 Pendapatan BLUD TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	6.350.000,00	15.206.381,00	239,47	0,00
2	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	0,00	297.385.016,00	0,00	0,00
Jumlah		**6.350.000,00**	**312.591.397,00**	**4.922,70**	**0,00**

10. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
    Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp360.737,00 dengan realisasi sebesar Rp24.993.500,00 atau 6.928,45%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp23.658.000,00 atau 1.771,47% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2024 sebesar Rp1.335.500,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.255.825.821.775,00	**Rp1.323.732.110.577,00**

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.265.621.122.964,00 dengan realisasi sebesar Rp1.255.825.821.775,00 atau 99,23%. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp67.906.288.802,00 atau minus 5,13% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp1.323.732.110.577,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 77 Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.170.206.183.978,00	1.169.598.451.826,00	99,95	1.257.891.004.053,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.414.938.986,00	86.227.369.949,00	90,37	65.841.106.524,00
Jumlah		**1.265.621.122.964,00**	**1.255.825.821.775,00**	**99,23**	**1.323.732.110.577,00**

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.169.598.451.826,00	**Rp1.257.891.004.053,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.170.206.183.978,00 dengan realisasi sebesar Rp1.169.598.451.826,00 atau 99,95%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp88.292.552.227,00 atau minus 7,02% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp1.257.891.004.053,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 78 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	965.873.987.978,00	975.142.384.312,00	100,96	1.039.760.510.053,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	204.332.196.000,00	194.456.067.514,00	95,17	218.130.494.000,00
Jumlah		**1.170.206.183.978,00**	**1.169.598.451.826,00**	**99,95**	**1.257.891.004.053,00**

5.1.1.2.1.1 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp975.142.384.312,00	**Rp1.039.760.510.053,00**

Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp965.873.987.978,00 dengan realisasi sebesar Rp975.142.384.312,00 atau 100,96%. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp64.618.125.741,00 atau minus 6,21% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.039.760.510.053,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 79 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.039.760.510.053,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	24.157.595.000,00	23.320.794.200,00	96,54	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	742.474.824.000,00	754.341.909.960,00	101,60	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	199.241.568.978,00	197.479.680.152,00	99,12	0,00
Jumlah		**965.873.987.978,00**	**975.142.384.312,00**	**100,96**	**1.039.760.510.053,00**

Perubahan nomenklatur dan kodefikasi rekening pada Dana Perimbangan yang di *mapping* pada kode rekening DBH, DAU dan DAK tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.1.2.1.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp1.039.760.510.053,00**

Dana Perimbangan tidak dianggarkan, realisasi TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp1.039.760.510.053,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 80 Dana Perimbangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	25.748.210.000,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	752.945.824.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	101.278.750.464,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	159.787.725.589,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.039.760.510.053,00**

5.1.1.2.1.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum-DBH	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp25.748.210.000,00**

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) di *mapping* pada kode rekening Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga tidak dianggakan. Realisasi TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp25.748.210.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 81 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.437.085.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	8.338.887.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	727.354.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	1.367.524.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	1.173.751.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	35.662.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	109.612.000,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	2.125.919.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	305.347.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.120.498.000,00
11	DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	7.006.571.000,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.748.210.000,00**

5.1.1.2.1.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Umum-DAU	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp752.945.824.000,00**

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) di *mapping* pada kode rekening Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga tidak dianggarkan. Realisasi TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp752.945.824.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 82 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAU	0,00	0,00	0,00	599.218.385.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	12.999.600.000,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	94.122.727.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	25.800.051.000,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	18.805.061.000,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**752.945.824.000,00**

5.1.1.2.1.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp101.278.750.464,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di *mapping* pada kode rekening DAK Fisik sehingga tidak dianggarkan. Realisasi TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp101.278.750.464,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 83 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	377.184.790,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	14.961.887.782,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	11.216.425.602,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	87.728.700,00
5	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	625.889.886,00
6	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.859.494.840,00
7	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.059.918.320,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	37.777.781.942,00
9	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	15.045.312.736,00
10	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.328.158.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	10.077.147.866,00
12	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	0,00	0,00	0,00	1.861.820.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.278.750.464,00**

5.1.1.2.1.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp159.787.725.589,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di *mapping* pada kode rekening DAK Non Fisik sehingga tidak dianggarkan. Realisasi TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp159.787.725.589,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 84 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	59.414.749.137,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	2.085.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	68.047.375.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.425.418.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	2.829.506.920,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	289.703.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	7.055.480.693,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	3.889.571.220,00
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	606.688.678,00
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	1.110.839.200,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	742.358.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	550.053.193,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	10.740.982.548,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.787.725.589,00**

5.1.1.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH)	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp23.320.794.200,00	**Rp0,00**

DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DBH Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp24.157.595.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.320.794.200,00 atau 96,54%. Realisasi DBH TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp23.320.794.200,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi DBH TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 85 Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH Pajak	16.510.659.000,00	15.319.870.200,00	92,79	0,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	4.862.355.000,00	5.216.343.000,00	107,28	0,00
3	DBH Lainnya	2.784.581.000,00	2.784.581.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**24.157.595.000,00**	**23.320.794.200,00**	**96,54**	**0,00**

5.1.1.2.1.1.2.1 DBH Pajak

DBH Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp15.319.870.200,00	**Rp0,00**

DBH Pajak dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DBH Pajak Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp16.510.659.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.319.870.200,00 atau 92,79%. Realisasi DBH Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.319.870.200,00 atau 100,00%

dibandingkan dengan realisasi DBH Pajak TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 86 DBH Pajak TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH PBB	4.298.961.000,00	4.127.126.900,00	96,00	0,00
2	DBH PPh Pasal 21	10.683.927.000,00	9.003.626.100,00	84,27	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	617.024.200,00	0,00	0,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.527.771.000,00	1.572.093.000,00	102,90	0,00
Jumlah		**16.510.659.000,00**	**15.319.870.200,00**	**92,79**	**0,00**

5.1.1.2.1.1.2.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA)

DBH SDA	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp5.216.343.000,00	**Rp0,00**

DBH SDA dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DBH SDA Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.862.355.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.216.343.000,00 atau 107,28%. Realisasi DBH SDA TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.216.343.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi DBH SDA TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 87 DBH Sumber Daya Alam (SDA) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH SDA Minyak Bumi	0,00	52.769.000,00	0,00	0,00
2	DBH SDA Gas Bumi	58.695.000,00	5.926.000,00	10,10	0,00
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	119.464.000,00	134.860.000,00	112,89	0,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	3.750.264.000,00	4.088.855.000,00	109,03	0,00
5	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	82.756.000,00	82.757.000,00	100,00	0,00
6	DBH SDA Perikanan	851.176.000,00	851.176.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**4.862.355.000,00**	**5.216.343.000,00**	**107,28**	**0,00**

5.1.1.2.1.1.2.3 DBH Lainnya

DBH Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp2.784.581.000,00	**Rp0,00**

DBH Lainnya merupakan DBH Sawit yang dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DBH Lainnya Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.784.581.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.784.581.000,00 atau 100,00%. Realisasi DBH Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.784.581.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi DBH SDA TA 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU)	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp754.341.909.960,00	**Rp0,00**

DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. DAU dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DAU Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp742.474.824.000,00 dengan realisasi sebesar Rp754.341.909.960,00 atau 101,60%. Realisasi DAU TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp754.341.909.960,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 88 Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	635.247.750.000,00	649.643.409.733,00	102,27	0,00
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	107.227.074.000,00	104.698.500.227,00	97,64	0,00
Jumlah		**742.474.824.000,00**	**754.341.909.960,00**	**101,60**	**0,00**

5.1.1.2.1.1.3.1 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp649.643.409.733,00	**Rp0,00**

DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp635.247.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp649.643.409.733,00 atau 102,27%. Realisasi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp649.643.409.733,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.1.2.1.1.3.2 DAU yang Ditentukan Penggunaannya

DAU yang Ditentukan Penggunaannya	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp104.698.500.227,00	**Rp0,00**

DAU yang Ditentukan Penggunaannya dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp107.227.074.000,00 dengan realisasi sebesar Rp104.698.500.227,00 atau 97,64%. Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp104.698.500.227,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 89 DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	4.646.275.000,00	2.117.701.227,00	45,58	0,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	72.799.072.000,00	72.799.072.000,00	100,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	27.781.727.000,00	27.781.727.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**107.227.074.000,00**	**104.698.500.227,00**	**97,64**	**0,00**

5.1.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK)	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp197.479.680.152,00	**Rp0,00**

DAK adalah baian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DAK Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp199.241.568.978,00 dengan realisasi sebesar Rp197.479.680.152,00 atau 99,12%. Realisasi DAK TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp197.479.680.152,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 90 Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik	19.060.542.000,00	18.713.218.871,00	98,18	0,00
2	DAK Non Fisik	180.181.026.978,00	178.766.461.281,00	99,21	0,00
Jumlah		**199.241.568.978,00**	**197.479.680.152,00**	**99,12**	**0,00**

5.1.1.2.1.1.4.1 DAK Fisik

DAK Fisik	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp18.713.218.871,00	**Rp0,00**

DAK Fisik dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DAK Fisik Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp19.060.542.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.713.218.871,00 atau 98,18%. Realisasi DAK Fisik TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.713.218.871,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi DAK Fisik TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 91 DAK Fisik TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	518.680.000,00	509.853.334,00	98,30	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.409.323.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan	10.000.000.000,00	9.957.288.909,00	99,57	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	3.914.528.000,00	3.673.001.628,00	93,83	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	218.011.000,00	180.097.000,00	82,61	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	0,00	4.392.978.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**19.060.542.000,00**	**18.713.218.871,00**	**98,18**	**0,00**

5.1.1.2.1.1.4.2 DAK Non Fisik

DAK Non Fisik	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp178.766.461.281,00	**Rp0,00**

DAK Non Fisik dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DAK Non Fisik Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp180.181.026.978,00 dengan realisasi sebesar Rp178.766.461.281,00 atau 99,21%. Realisasi DAK Non Fisik tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp178.766.461.281,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi DAK Non Fisik tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 92 DAK Non Fisik TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	58.703.900.000,00	58.436.752.323,00	99,54	0,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.970.000.000,00	1.970.000.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	92.302.568.000,00	90.276.737.200,00	97,81	0,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.216.250.000,00	2.300.000.000,00	189,11	0,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.875.560.000,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	248.710.000,00	248.695.000,00	99,99	0,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	177.128.000,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	449.412.000,00	449.412.000,00	100,00	0,00
9	DAK Non Fisik-PK2UMK	1.154.650.820,00	1.154.650.820,00	100,00	0,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	2.850.538.380,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.410.857.258,00	9.373.321.258,00	99,60	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	177.128.000,00	0,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.397.040.026,00	10.254.275.426,00	98,63	0,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
15	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.169.950.874,00	1.169.950.874,00	100,00	0,00
Jumlah		**180.181.026.978,00**	**178.766.461.281,00**	**99,21**	**0,00**

5.1.1.2.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp194.456.067.514,00	**Rp218.130.494.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp204.332.196.000,00 dengan realisasi sebesar Rp194.456.067.514,00 atau 95,17%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.674.426.486,00 atau minus 10,85% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2024 sebesar Rp218.130.494.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 93 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Desa	197.663.406.000,00	187.787.277.514,00	95,00	205.413.540.000,00
2	Insentif Fiskal	6.668.790.000,00	6.668.790.000,00	100,00	12.716.954.000,00
Jumlah		**204.332.196.000,00**	**194.456.067.514,00**	**95,17**	**218.130.494.000,00**

5.1.1.2.1.2.1 Dana Desa

Dana Desa	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp187.787.277.514,00	**Rp205.413.540.000,00**

Dana Desa dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dana Desa Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp197.663.406.000,00 dengan realisasi sebesar Rp187.787.277.514,00 atau 95,00%. Realisasi Dana Desa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.626.262.486,00 atau minus 8,58% dibandingkan dengan realisasi Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp205.413.540.000,00.

5.1.1.2.1.2.2 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp6.668.790.000,00	**Rp12.716.954.000,00**

Insentif Fiskal dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Insentif Fiskal Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp6.668.790.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.668.790.000,00 atau 100,00%. Realisasi Insentif Fiskal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.048.164.000,00 atau minus 47,56% dibandingkan dengan realisasi Insentif Fiskal tahun 2024 sebesar Rp12.716.954.000,00.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp86.227.369.949,00	**Rp65.841.106.524,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp95.414.938.986,00 dengan realisasi sebesar Rp86.227.369.949,00 atau 90,37%. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.386.263.425,00 atau 30,96% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 sebesar Rp65.841.106.524,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 94 Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	91.054.375.165,00	81.866.806.128,00	89,91	65.841.106.524,00
2	Bantuan Keuangan	4.360.563.821,00	4.360.563.821,00	100,00	0,00
Jumlah		**95.414.938.986,00**	**86.227.369.949,00**	**90,37**	**65.841.106.524,00**

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp81.866.806.128,00	**Rp65.841.106.524,00**

Pendapatan Bagi Hasil merupakan bagi hasil pajak daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Karo sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/231/KPTS/2026 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan Tahun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada kabupaten/Kota Tahun 2023 yang dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp91.054.375.165,00 dengan realisasi sebesar Rp81.866.806.128,00 atau 89,91%. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.025.699.604,00 atau 24,34% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil tahun 2024 sebesar Rp65.841.106.524,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 95 Pendapatan Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.106.468.014,00	18.106.468.014,00	100,00	8.611.902.826,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.264.087.427,00	11.264.087.427,00	100,00	8.284.070.839,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.810.562.615,00	27.515.796.800,00	81,38	22.871.489.378,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.126.755.154,00	1.723.831.620,00	55,13	1.268.956.442,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	24.746.501.955,00	23.256.622.267,00	93,98	24.804.687.039,00
Jumlah		**91.054.375.165,00**	**81.866.806.128,00**	**89,91**	**65.841.106.524,00**

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp4.360.563.821,00	Rp0,00

Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Karo yang dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.360.563.821,00 dengan realisasi sebesar Rp4.360.563.821,00 atau 100,00%. Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.360.563.821,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp18.277.138.270,00	Rp16.584.332.490,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp18.557.362.093,00 dengan realisasi sebesar Rp18.277.138.270,00 atau 98,49%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.692.805.780,00 atau 10,21% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 sebesar Rp16.584.332.490,00.

5.1.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp18.277.138.270,00	Rp16.584.332.490,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp18.557.362.093,00 dengan realisasi sebesar Rp18.277.138.270,00 atau 98,49%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.692.805.780,00 atau 10,21% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan tahun 2024 sebesar Rp16.584.332.490,00.

5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.385.107.097.412,50	Rp1.524.844.149.888,00

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karo meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.455.323.089.325,00 dengan

realisasi sebesar Rp1.385.107.097.412,50 atau 95,18%. Realisasi Belanja Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp139.737.052.475,50 atau minus 9,16% dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah tahun 2024 sebesar Rp1.524.844.149.888,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 96 Belanja Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.017.025.989.362,00	963.428.644.459,50	94,73	1.017.870.013.586,00
2	Belanja Modal	149.646.807.259,00	145.869.376.198,00	97,48	214.619.621.202,00
3	Belanja Tidak Terduga	2.964.550.812,00	0,00	0,00	193.476.000,00
4	Belanja Transfer	285.685.741.892,00	275.809.076.755,00	96,54	292.161.039.100,00
Jumlah		**1.455.323.089.325,00**	**1.385.107.097.412,50**	**95,18**	**1.524.844.149.888,00**

5.1.2.1 Belanja Operasi

	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Operasi	**Rp963.428.644.459,50**	**Rp1.017.870.013.586,00**

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karo meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah. Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.017.025.989.362,00 dengan realisasi sebesar Rp963.428.644.459,50 atau 94,73%. Realisasi Belanja Operasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp54.441.369.126,50 atau minus 5,35% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2024 sebesar Rp1.017.870.013.586,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 97 Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	636.648.855.621,00	612.409.535.553,00	96,19	622.939.163.784,00
2	Belanja Barang dan Jasa	358.791.314.310,00	330.896.946.272,50	92,23	343.502.153.763,00
3	Belanja Hibah	20.247.819.431,00	20.122.162.634,00	99,38	51.428.696.039,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.338.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**1.017.025.989.362,00**	**963.428.644.459,50**	**94,73**	**1.017.870.013.586,00**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Pegawai	**Rp612.409.535.553,00**	**Rp622.939.163.784,00**

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Karo meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BOSP dan Belanja Pegawai BLUD. Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp636.648.855.621,00 dengan realisasi sebesar Rp612.409.535.553,00 atau 96,19%. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.529.628.231,00 atau minus 1,69% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp622.939.163.784,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 98 Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	400.554.136.990,00	387.266.905.627,00	96,68	397.069.594.193,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	203.236.755.142,00	193.435.314.012,00	95,18	102.970.691.366,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	97.283.905.821,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.477.797.000,00	18.526.406.870,00	95,12	14.544.960.501,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	613.363.505,00	460.545.596,00	75,09	481.926.060,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	826.800.000,00	781.850.000,00	94,56	548.710.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	11.940.002.984,00	11.938.513.448,00	99,99	10.039.375.843,00
Jumlah		**636.648.855.621,00**	**612.409.535.553,00**	**96,19**	**622.939.163.784,00**

Perubahan nomenklatur dan kodefikasi rekening pada Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang di *mapping* pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
   Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp400.554.136.990,00 dengan realisasi sebesar Rp387.266.905.627,00 atau 96,68%. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.802.688.566,00 atau minus 2,47% dibandingkan dengan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2024 sebesar Rp397.069.594.193,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 99 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	297.952.682.203,20	290.959.849.431,00	97,65	300.762.224.269,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	27.995.208.456,00	27.024.147.821,00	96,53	27.523.265.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.343.282.544,00	7.008.869.950,00	95,45	7.338.199.800,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.615.220.818,00	22.658.337.642,00	95,95	23.523.546.950,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.885.661.530,00	1.726.829.500,00	91,58	1.748.945.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.822.655.946,82	15.139.087.005,00	95,68	15.448.097.964,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.425.618.149,00	1.007.881.596,00	70,70	835.304.066,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.380.131,00	3.758.243,00	50,92	3.706.190,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.511.914.795,00	19.345.961.252,00	94,32	17.410.681.152,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	663.564.558,98	598.047.566,00	90,13	618.293.600,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.945.175.817,00	1.794.135.621,00	92,24	1.857.330.202,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.385.772.041,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**400.554.136.990,00**	**387.266.905.627,00**	**96,68**	**397.069.594.193,00**

a. Belanja Gaji Pokok ASN

Belanja Gaji Pokok ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp297.952.682.203,20 dengan realisasi sebesar Rp290.959.849.431,00 atau 97,65%. Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.802.374.838,00 atau minus 3,26% dibandingkan dengan realisasi Belanja Gaji Pokok ASN tahun 2024 sebesar Rp300.762.224.269,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 100 Belanja Gaji Pokok ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	235.360.399.142,02	230.509.351.290,00	97,94	247.262.265.338,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	62.592.283.061,18	60.450.498.141,00	96,58	53.499.958.931,00
Jumlah		**297.952.682.203,20**	**290.959.849.431,00**	**97,65**	**300.762.224.269,00**

b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Belanja Tunjangan Keluarga ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp27.995.208.456,00 dengan realisasi sebesar Rp27.024.147.821,00 atau 96,53%. Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp499.117.179,00 atau minus 1,81% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN tahun 2024 sebesar Rp27.523.265.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 101 Belanja Tunjangan Keluarga ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	22.144.119.232,00	21.519.182.780,00	97,18	22.819.644.532,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.851.089.224,00	5.504.965.041,00	94,08	4.703.620.468,00
Jumlah		**27.995.208.456,00**	**27.024.147.821,00**	**96,53**	**27.523.265.000,00**

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Belanja Tunjangan Jabatan ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp7.343.282.544,00 dengan realisasi sebesar Rp7.008.869.950,00 atau 95,45%. Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp329.329.850,00 atau minus 4,49% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN tahun 2024 sebesar Rp7.338.199.800,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 102 Belanja Tunjangan Jabatan ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.339.282.544,00	7.008.869.950,00	95,50	7.338.199.800,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**7.343.282.544,00**	**7.008.869.950,00**	**95,45**	**7.338.199.800,00**

d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Belanja Tunjangan Fungsional ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp23.615.220.818,00 dengan realisasi sebesar Rp22.658.337.642,00 atau 95,95%. Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp865.209.308,00 atau minus 3,68% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN tahun 2024 sebesar Rp23.523.546.950,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 103 Belanja Tunjangan Fungsional ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.310.014.040,00	16.582.782.642,00	95,80	17.949.944.950,00
2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.305.206.778,00	6.075.555.000,00	96,36	5.573.602.000,00
Jumlah		**23.615.220.818,00**	**22.658.337.642,00**	**95,95**	**23.523.546.950,00**

e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.885.661.530,00 dengan realisasi sebesar Rp1.726.829.500,00 atau 91,58%. Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.115.500,00 atau minus 1,26% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN tahun 2024 sebesar Rp1.748.945.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 104 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.770.154.098,00	1.660.299.500,00	93,79	1.748.945.000,00
2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	115.507.432,00	66.530.000,00	57,60	0,00
Jumlah		**1.885.661.530,00**	**1.726.829.500,00**	**91,58**	**1.748.945.000,00**

f. Belanja Tunjangan Beras ASN

Belanja Tunjangan Beras ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp15.822.655.946,82 dengan realisasi sebesar Rp15.139.087.005,00 atau 95,68%. Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp309.010.959,00 atau minus 2,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN tahun 2024 sebesar Rp15.448.097.964,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 105 Belanja Tunjangan Beras ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.881.751.068,98	11.417.586.150,00	96,09	12.204.623.424,00
2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.940.904.877,84	3.721.500.855,00	94,43	3.243.474.540,00
Jumlah		**15.822.655.946,82**	**15.139.087.005,00**	**95,68**	**15.448.097.964,00**

g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.425.618.149,00 dengan realisasi sebesar Rp1.007.881.596,00 atau 70,70%. Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp172.577.530,00 atau 20,66% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN tahun 2024 sebesar Rp835.304.066,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 106 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.421.368.101,00	1.007.881.596,00	70,91	835.304.066,00
2	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	4.250.048,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**1.425.618.149,00**	**1.007.881.596,00**	**70,70**	**835.304.066,00**

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN

Belanja Pembulatan Gaji ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp7.380.131,00 dengan realisasi sebesar Rp3.758.243,00 atau 50,92%. Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp52.053,00 atau 1,40% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN tahun 2024 sebesar Rp3.706.190,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 107 Belanja Pembulatan Gaji ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.339.473,00	2.916.010,00	54,61	3.226.862,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.040.658,00	842.233,00	41,27	479.328,00
Jumlah		**7.380.131,00**	**3.758.243,00**	**50,92**	**3.706.190,00**

i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp20.511.914.795,00 dengan realisasi sebesar Rp19.345.961.252,00 atau 94,32%. Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.935.280.100,00 atau 11,12% dibandingkan dengan realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN tahun 2024 sebesar Rp17.410.681.152,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 108 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.712.331.118,00	16.681.589.545,00	94,18	15.222.283.906,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.799.583.677,00	2.664.371.707,00	95,17	2.188.397.246,00
Jumlah		**20.511.914.795,00**	**19.345.961.252,00**	**94,32**	**17.410.681.152,00**

j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp663.564.558,98 dengan realisasi sebesar Rp598.047.566,00 atau 90,13%. Realisasi Belanja Iuran Jaminan

Kecelakaan Kerja ASN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20.246.034,00 atau minus 3,27% dibandingkan dengan realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN tahun 2024 sebesar Rp618.293.600,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 109 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	527.735.006,00	472.863.368,00	89,60	506.986.326,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	135.829.552,98	125.184.198,00	92,16	111.307.274,00
Jumlah		**663.564.558,98**	**598.047.566,00**	**90,13**	**618.293.600,00**

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.945.175.817,00 dengan realisasi sebesar Rp1.794.135.621,00 atau 92,24%. Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp63.194.581,00 atau minus 3,40% dibandingkan dengan realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN tahun 2024 sebesar Rp1.857.330.202,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 110 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.544.571.649,00	1.418.598.470,00	91,84	1.523.422.270,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	400.604.168,00	375.537.151,00	93,74	333.907.932,00
Jumlah		**1.945.175.817,00**	**1.794.135.621,00**	**92,24**	**1.857.330.202,00**

l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN tahun 2025 dan 2024 tidak ada/nihil dari anggaran sebesar Rp1.385.772.041,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 111 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.035.194.819,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	350.577.222,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**1.385.772.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp203.236.755.142,00 dengan realisasi sebesar Rp193.435.314.012,00 atau 95,18%. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp90.464.622.646,00 atau 87,85% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2024 sebesar Rp102.970.691.366,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 112 Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	102.323.823.707,00	97.056.154.131,00	94,85	100.544.952.816,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.703.820.000,00	1.958.835.975,00	72,45	2.410.738.550,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.209.111.435,00	94.420.323.906,00	96,14	0,00
Jumlah		**203.236.755.142,00**	**193.435.314.012,00**	**95,18**	**102.970.691.366,00**

a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp102.323.823.707,00 dengan realisasi sebesar Rp97.056.154.131,00 atau 94,85%. Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.488.798.685,00 atau minus 3,47% dibandingkan dengan realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN tahun 2024 sebesar Rp100.544.952.816,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 113 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	96.743.384.962,00	92.122.400.225,00	95,22	95.742.322.572,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.580.438.745,00	4.933.753.906,00	88,41	4.802.630.244,00
Jumlah		**102.323.823.707,00**	**97.056.154.131,00**	**94,85**	**100.544.952.816,00**

b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.703.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.958.835.975,00 atau 72,45%. Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp451.902.575,00 atau minus 18,75% dibandingkan dengan realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN tahun 2024 sebesar Rp2.410.738.550,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 114 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.579.220.000,00	1.835.036.975,00	71,15	2.287.028.550,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	124.600.000,00	123.799.000,00	99,36	123.710.000,00
Jumlah		**2.703.820.000,00**	**1.958.835.975,00**	**72,45**	**2.410.738.550,00**

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN merupakan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS tidak dianggarkan, realisasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp15.000.000,00.

d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp98.209.111.435,00 dengan realisasi sebesar Rp94.420.323.906,00 atau 96,14%. Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp94.420.323.906,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 115 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	41.250.000,00	41.025.417,00	99,46	0,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	120.000.000,00	119.183.333,00	99,32	0,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28.125.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	221.875.000,00	164.298.438,00	74,05	0,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	262.500.000,00	261.428.125,00	99,59	0,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.003.125.000,00	748.247.659,00	74,59	0,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	78.807.016,00	78.109.602,00	99,12	0,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	118.919.038,00	70.042.348,00	58,90	0,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	72.227.262,00	72.227.262,00	100,00	0,00
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	137.642.242,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	21.250.000,00	21.037.500,00	99,00	0,00
12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	7.474.390,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	136.600.000,00	136.600.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	9.343.150,00	9.343.150,00	100,00	0,00
15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	57.234.375,00	57.234.375,00	100,00	0,00
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	42.703.062,00	23.027.297,00	53,92	0,00
18	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	94.603.117.900,00	90.318.519.400,00	95,47	0,00
19	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.246.418.000,00	2.300.000.000,00	184,53	0,00
Jumlah		**98.209.111.435,00**	**94.420.323.906,00**	**96,14**	**0,00**

Berdasarkan pada tabel 5.115 di atas terdapat realisasi melebihi anggaran pada Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp.1.053.582.000,00 atau 184,53% dikarenakan permintaan penambahan permohonan tambahan dana DAK Non Fisik Tamsil Guru ASN tahun 2025 dengan Surat Bupati Karo Nomor 420/1481/disdik/2025 tanggal 27 Mei 2025 Perihal Permohonan Tambahan Dana DAK Non Fisik Tamsil Guru ASN TA 2025. Surat ditujukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia terkait dengan *carry over* tahun 2024 bagi guru ASN yang belum bersertifikat dan belum dibayarkan di tahun tersebut. Dasar penganggaran awal tamsil ini sebesar Rp1.246.418.000,00 disesuaikan dengan anggaran alokasi sesuai lampiran PMK DAK Non Fisik Tahun 2025 sebesar Rp1.216.250.000,00 ditambah dengan SiLPA tahun lalu sebesar Rp30.168.000,00.

3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

   Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN di *mapping* menjadi bagian dari pada kode rekening Belanja Tambahan Penghasilan ASN sehingga tidak dianggarkan. Realisasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp97.283.905.821,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 116 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.189.315.324,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	344.476.609,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	85.829.561.388,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.396.847.500,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	889.021.000,00
6	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	6.631.530.000,00
7	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	3.154.000,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.283.905.821,00**

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

   Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp19.477.797.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.526.406.870,00 atau 95,12%. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.981.446.369,00 atau 27,37% dibandingkan dengan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2024 sebesar Rp14.544.960.501,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 117 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	885.990.000,00	99,29	794.535.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	97.000.000,00	83.603.100,00	86,19	68.138.700,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	118.500.000,00	99.070.560,00	83,60	84.803.820,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	90.000.000,00	76.482.000,00	84,98	69.247.500,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.295.000.000,00	1.284.685.500,00	99,20	1.152.075.750,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	155.000.000,00	97.013.700,00	62,59	85.092.525,00
7	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00	5.040.000.000,00	100,00	2.740.500.000,00
8	Belanja Tunjangan Reses DPRD	840.000.000,00	808.500.000,00	96,25	163.800.000,00
9	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.500.000,00	688.058,00	45,87	555.534,00
10	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.187.071.600,00	3.872.873.952,00	92,50	3.543.051.672,00
11	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.642.000.000,00	6.277.500.000,00	94,51	5.508.000.000,00
12	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	119.435.400,00	0,00	0,00	335.160.000,00
Jumlah		**19.477.797.000,00**	**18.526.406.870,00**	**95,12**	**14.544.960.501,00**

Berdasarkan pada tabel 5.117 di atas apabila dibandingkan realisasi tahun 2025 dan 2024 terdapat kenaikan yang signifikan dikarenakan bertambahnya jumlah anggota DPRD sejak Oktober 2024 dari 35 orang anggota dewan pada periode 2019-2024 menjadi 40 orang anggota dewan untuk periode 2024-2029 dan naiknya kemampuan keuangan daerah (KKD) Kabupaten Karo yang menyebabkan meningkatnya komponen gaji DPRD seperti Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses. Adapun kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Uang Representasi DPRD

   Belanja Uang Representasi DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp892.290.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp885.990.000,00 atau 99,29%. Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp91.455.000,00 atau 11,51% dibandingkan dengan realisasi Belanja Uang Representasi DPRD tahun 2024 sebesar Rp794.535.000,00.

b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp97.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp83.603.100,00 atau 86,19%. Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.464.400,00 atau 22,70% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD tahun 2024 sebesar Rp68.138.700,00.

c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
Belanja Tunjangan Beras DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp118.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp99.070.560,00 atau 83,60%. Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.266.740,00 atau 16,82% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD tahun 2024 sebesar Rp84.803.820,00.

d. Belanja Uang Paket DPRD
Belanja Uang Paket DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp76.482.000,00 atau 84,98%. Realisasi Belanja Uang Paket DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.234.500,00 atau 10,45% dibandingkan dengan realisasi Belanja Uang Paket DPRD tahun 2024 sebesar Rp69.247.500,00.

e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.295.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.284.685.500,00 atau 99,20%. Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp132.609.750,00 atau 11,51% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tahun 2024 sebesar Rp1.152.075.750,00.

f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp155.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp97.013.700,00 atau 62,59%. Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.921.175,00 atau 14,01% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD tahun 2024 sebesar Rp85.092.525,00.

g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp5.040.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.040.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.299.500.000,00 atau 83,91% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2024 sebesar Rp2.740.500.000,00.

h. Belanja Tunjangan Reses DPRD
Belanja Tunjangan Reses DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp840.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp808.500.000,00 atau 96,25%. Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp644.700.000,00 atau 393,59%

dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD tahun 2024 sebesar Rp163.800.000,00.

i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp688.058,00 atau 45,87%. Realisasi Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp132.524,00 atau 23,86% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2024 sebesar Rp555.534,00.

j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.187.071.600,00 dengan realisasi sebesar Rp3.872.873.952,00 atau 92,50%. Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp329.822.280,00 atau 9,31% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2024 sebesar Rp3.543.051.672,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 118 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	97.571.600,00	91.531.680,00	93,81	68.403.912,00
2	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.500.000,00	1.835.568,00	73,42	1.661.940,00
3	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.000.000,00	5.506.704,00	78,67	4.985.820,00
4	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.080.000.000,00	3.774.000.000,00	92,50	3.468.000.000,00
Jumlah		**4.187.071.600,00**	**3.872.873.952,00**	**92,50**	**3.543.051.672,00**

k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp6.642.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.277.500.000,00 atau 94,51%. Realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp769.500.000,00 atau 13,97% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tahun 2024 sebesar Rp5.508.000.000,00.

l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp119.435.400,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp335.160.000,00 atau minus 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD tahun 2024 sebesar Rp335.160.000,00.

5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp613.363.505,00 dengan realisasi sebesar Rp460.545.596,00 atau 75,09%. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.380.464,00 atau minus 4,44% dibandingkan dengan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp481.926.060,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 119 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	73.180.552,00	63.060.414,00	86,17	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.212.000,00	6.984.000,00	75,81	3.024.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	91.260.000,00	92,86	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.091.040,00	6.831.600,00	75,15	4.055.520,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	799.400,00	445.817,00	55,77	653.567,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	16.770,00	1.160,00	6,92	2.160,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.287.280,00	5.598.000,00	76,82	5.345.280,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	308.400,00	112.320,00	36,42	112.320,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	686.400,00	336.960,00	49,09	336.960,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	310.525.000,00	249.862.500,00	80,46	218.267.746,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	103.976.663,00	36.052.825,00	34,67	97.248.507,00
Jumlah		**613.363.505,00**	**460.545.596,00**	**75,09**	**481.926.060,00**

a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp73.180.552,00 dengan realisasi sebesar Rp63.060.414,00 atau 86,17%. Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.460.414,00 atau 15,50% dibandingkan dengan realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp54.600.000,00.

b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp9.212.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.984.000,00 atau 75,81%. Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.960.000,00 atau 130,95% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp3.024.000,00.

c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp98.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp91.260.000,00 atau 92,86%. Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.020.000,00 atau minus 7,14% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp98.280.000,00.

d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp9.091.040,00 dengan realisasi sebesar Rp6.831.600,00 atau 75,15%. Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.776.080,00 atau

68,45% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp4.055.520,00.

e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp799.400,00 dengan realisasi sebesar Rp445.817,00 atau 55,77%. Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp207.750,00 atau minus 31,79% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp653.567,00.

f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp16.770,00 dengan realisasi sebesar Rp1.160,00 atau 6,92%. Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.000,00 atau minus 46,30% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp2.160,00.

g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp7.287.280,00 dengan realisasi sebesar Rp5.598.000,00 atau 76,82%. Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp252.720,00 atau 4,73% dibandingkan dengan realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp5.345.280,00.

h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp308.400,00 dengan realisasi sebesar Rp112.320,00 atau 36,42%. Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH tahun 2025 sama dengan tahun 2024 sebesar Rp112.320,00.

i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp686.400,00 dengan realisasi sebesar Rp336.960,00 atau 49,09%. Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH tahun 2025 sama dengan tahun 2024 sebesar Rp336.960,00.

j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp310.525.000,00 dengan realisasi sebesar Rp249.862.500,00 atau 80,46%. Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp31.594.754,00 atau 14,48% dibandingkan dengan realisasi Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp218.267.746,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 120 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	57.177.450,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	52.907.012,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	25.563.656,00
4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	8.053.331,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.237.500,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	18.000.000,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.625.000,00	0,00	0,00	1.539.648,00
8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.525.000,00	14.643.750,00	75,00	14.577.603,00
9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	39.211.546,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	200.625.000,00	150.468.750,00	75,00	0,00
Jumlah		**310.525.000,00**	**249.862.500,00**	**80,46**	**218.267.746,00**

k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp103.976.663,00 dengan realisasi sebesar Rp36.052.825,00 atau 34,67%. Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp61.195.682,00 atau minus 62,93% dibandingkan dengan realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp97.248.507,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 121 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	13.086.634,00	13.086.634,00	100,00	66.508.030,00
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.505.160,00	0,00	0,00	12.360.414,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.745.988,00	12.745.988,00	100,00	8.437.500,00
4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	24.289.808,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.489.438,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	3.750.000,00	3.712.500,00	99,00	2.812.500,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.319.010,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	34.150.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	4.640.625,00	4.640.625,00	100,00	4.640.625,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.489.438,00	1.867.078,00	34,01	0,00
Jumlah		**103.976.663,00**	**36.052.825,00**	**34,67**	**97.248.507,00**

6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

   Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp826.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp781.850.000,00 atau 94,56%. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp233.140.000,00 atau 42,49% dibandingkan dengan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp548.710.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 122 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000,00	181.980.000,00	80,24	86.720.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	599.870.000,00	99,98	461.990.000,00
Jumlah		**826.800.000,00**	**781.850.000,00**	**94,56**	**548.710.000,00**

a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp226.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp181.980.000,00 atau 80,24%. Realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp95.260.000,00 atau 109,85% dibandingkan dengan realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tahun 2024 sebesar Rp86.720.000,00.

b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp599.870.000,00 atau 99,98%. Realisasi Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp137.880.000,00 atau 29,84% dibandingkan dengan realisasi Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp461.990.000,00.

7. Belanja Pegawai BLUD
Belanja Pegawai BLUD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp11.940.002.984,00 dengan realisasi sebesar Rp11.938.513.448,00 atau 99,99%. Realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.899.137.605,00 atau 18,92% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2024 sebesar Rp10.039.375.843,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 123 Belanja Pegawai BLUD TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Jasa Pelayanan pasien BPJS	6.973.694.586,00	7.758.777.668,00	111,26	5.845.826.809,00
2	Tunggakan Jasa Pelayanan Pasien BPJS	2.319.229.453,00	2.280.450.771,00	98,33	2.067.634.360,00
3	Jasa Pelayanan Obat Kronis Pasien BPJS	601.000.000,00	0,00	0,00	259.441.413,00
4	Tunggakan Jasa Pelayanan Obat Kronis Pasien BPJS	410.907.451,00	411.556.662,00	100,16	185.395.734,00
5	Jasa Pelayanan Pasien Umum	825.000.000,00	761.482.500,00	92,30	665.820.400,00
6	Tunggakan Jasa Pelayanan Pasien Umum	220.075.000,00	220.075.000,00	100,00	87.057.500,00
7	Honorarium non ASN untuk Dokter Spesialis	300.000.000,00	248.500.000,00	82,83	180.000.000,00
8	Tunggakan Honorarium non ASN untuk Dokter Spesialis	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
9	Honorarium Tim SPI (Satuan Pengawas Internal)	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
10	Tunggakan Honorarium Tim SPI (Satuan Pengawas Internal)	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
11	Jasa Pelayanan Pemeriksaan TB MDR/ TB RO	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Tunggakan Jasa Pelayanan Pemeriksaan TB MDR/ TB RO	26.021.000,00	26.886.000,00	103,32	42.900.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
13	Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) PPU 4% dari komponen Jasa Pelayanan	85.000.000,00	69.709.353,00	82,01	23.546.057,00
14	Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) PPU 4% dari komponen Jasa Pelayanan	68.075.494,00	68.075.494,00	100,00	82.836.284,00
15	Tunggakan Jasa Pelayanan Covid-19 Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	550.917.286,00
Jumlah		**11.940.002.984,00**	**11.938.513.448,00**	**99,99**	**10.039.375.843,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp330.896.946.272,50	**Rp343.502.153.763,00**

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOSP dan Belanja Barang dan Jasa BLUD. Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp358.791.314.310,00 dengan realisasi sebesar Rp330.896.946.272,50 atau 92,23%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.605.207.490,50 atau minus 3,67% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp343.502.153.763,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 124 Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	85.703.083.814,54	73.295.726.577,00	85,52	78.960.677.930,00
2	Belanja Jasa	144.845.238.561,60	141.291.099.068,50	97,55	124.468.292.044,00
3	Belanja Pemeliharaan	39.617.831.927,00	36.695.136.371,00	92,62	38.122.247.602,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	37.293.138.321,86	29.020.351.156,00	77,82	52.966.361.539,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.613.278.320,00	4.299.843.828,00	93,21	4.767.863.162,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	32.506.212.280,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	32.081.676.279,00	31.658.607.383,00	98,68	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.637.067.086,00	14.636.181.889,00	99,99	11.710.499.206,00
Jumlah		**358.791.314.310,00**	**330.896.946.272,50**	**92,23**	**343.502.153.763,00**

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang

Belanja Barang	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp73.295.726.577,00	**Rp78.960.677.930,00**

Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp85.703.083.814,54 dengan realisasi sebesar Rp73.295.726.577,00 atau 85,52%.

Realisasi Belanja Barang tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.664.951.353,00 atau minus 7,17% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang tahun 2024 sebesar Rp78.960.677.930,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 125 Belanja Barang TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	85.351.574.826,54	72.972.344.404,00	85,50	76.995.868.730,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	100.718.475,00	99.815.173,00	99,10	102.989.200,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	250.790.513,00	223.567.000,00	89,14	1.861.820.000,00
Jumlah		**85.703.083.814,54**	**73.295.726.577,00**	**85,52**	**78.960.677.930,00**

1. Belanja Barang Pakai Habis
   Belanja Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp85.351.574.826,54 dengan realisasi sebesar Rp72.972.344.404,00 atau 85,50%. Realisasi Belanja Barang Pakai Habis tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.023.524.326,00 atau minus 5,23% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Pakai Habis tahun 2024 sebesar Rp76.995.868.730,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 15.

2. Belanja Barang Tak Habis Pakai
   Belanja Barang Tak Habis Pakai Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp100.718.475,00 dengan realisasi sebesar Rp99.815.173,00 atau 99,10%. Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.174.027,00 atau minus 3,08% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai tahun 2024 sebesar Rp102.989.200,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 126 Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	90.242.827,00	89.419.973,00	99,09	92.567.300,00
2	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	0,00	0,00	336.000,00
3	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	9.323.700,00
4	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	10.475.648,00	10.395.200,00	99,23	762.200,00
Jumlah		**100.718.475,00**	**99.815.173,00**	**99,10**	**102.989.200,00**

3. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
   Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp250.790.513,00 dengan realisasi sebesar Rp223.567.000,00 atau 89,14%. Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.638.253.000,00 atau minus 87,99% dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi tahun 2024 sebesar Rp1.861.820.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 127 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	1.861.820.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11.790.513,00	11.766.000,00	99,79	0,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	149.000.000,00	124.000.000,00	83,22	0,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	90.000.000,00	87.801.000,00	97,56	0,00
Jumlah		**250.790.513,00**	**223.567.000,00**	**89,14**	**1.861.820.000,00**

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

Belanja Jasa	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp141.291.099.068,50	**Rp124.468.292.044,00**

Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp144.845.238.561,60 dengan realisasi sebesar Rp141.291.099.068,50 atau 97,55%. Realisasi Belanja Jasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.822.807.024,50 atau 13,52% dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa tahun 2024 sebesar Rp124.468.292.044,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 128 Belanja Jasa TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	107.214.491.041,60	106.000.774.863,00	98,87	94.933.472.753,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.797.819.214,00	24.616.253.713,00	99,27	15.038.301.443,00
3	Belanja Sewa Tanah	3.213.166.000,00	3.161.757.250,00	98,40	3.291.378.210,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.143.293.796,00	907.394.260,00	79,37	1.225.473.375,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.071.360.000,00	835.642.000,00	78,00	1.122.366.690,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	95.905.500,00	69.935.000,00	72,92	50.102.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.764.491.526,00	3.883.183.078,00	81,50	7.551.763.016,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	458.313.747,00	331.801.536,50	72,40	14.900.000,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.778.797.737,00	1.241.013.618,00	69,77	1.025.136.000,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	307.600.000,00	243.343.750,00	79,11	215.398.557,00
Jumlah		**144.845.238.561,60**	**141.291.099.068,50**	**97,55**	**124.468.292.044,00**

1. Belanja Jasa Kantor
   Belanja Jasa Kantor Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp107.214.491.041,60 dengan realisasi sebesar Rp106.000.774.863,00 atau 98,87%. Realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.067.302.110,00 atau 11,66% dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa

Kantor tahun 2024 sebesar Rp94.933.472.753,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 16.

Berdasarkan pada lampiran 16, terdapat realisasi melebihi anggaran pada Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp33.542.523.775,00 atau 126,03% dari anggaran sebesar Rp26.615.257.621,00. Kelebihan realisasi Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp6.927.266.154,00 disebabkan oleh akun Belanja Jasa JKN dan Belanja Jasa BOK masing-masing terdapat pada satu akun (satu program, satu kegiatan dan satu sub rincian objek).

2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp24.797.819.214,00 dengan realisasi sebesar Rp24.616.253.713,00 atau 99,27%. Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.577.952.270,00 atau 63,69% dibandingkan dengan realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2024 sebesar Rp15.038.301.443,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 129 Belanja Iuran/Jaminan Asuransi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.469.481.736,00	2.369.746.612,00	95,96	2.136.055.280,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.740.677.878,00	20.700.048.600,00	99,80	0,00
3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.564.416.000,00	1.529.567.200,00	97,77	1.688.803.200,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	11.197.038.738,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.703.600,00	7.838.578,00	73,23	5.615.129,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12.540.000,00	9.052.723,00	72,19	10.789.096,00
Jumlah		**24.797.819.214,00**	**24.616.253.713,00**	**99,27**	**15.038.301.443,00**

3. Belanja Sewa Tanah

Belanja Sewa Tanah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.213.166.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.161.757.250,00 atau 98,40%. Realisasi Belanja Sewa Tanah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp129.620.960,00 atau minus 3,94% dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa Tanah tahun 2024 sebesar Rp3.291.378.210,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 130 Belanja Sewa Tanah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Tanah Pertanian	3.055.500.000,00	3.024.000.750,00	98,97	2.970.618.210,00
3	Belanja Sewa Tanah Kampung	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
4	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	146.166.000,00	126.256.500,00	86,38	200.760.000,00
Jumlah		**3.213.166.000,00**	**3.161.757.250,00**	**98,40**	**3.291.378.210,00**

4. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.143.293.796,00 dengan realisasi sebesar Rp907.394.260,00 atau 79,37%. Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp318.079.115,00 atau minus 25,96% dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp1.225.473.375,00 dengan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 131 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	79.165.800,00	79.082.900,00	99,90	111.262.900,00
2	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	26.649.000,00	21.790.000,00	81,77	39.754.000,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	333.053.900,00	231.693.800,00	69,57	150.864.800,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.414.800,00	3.000.000,00	67,95	0,00
5	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
6	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00
7	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	178.080.000,00	173.080.000,00	97,19	384.900.500,00
8	Belanja Sewa Mebel	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	40.590.000,00
9	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.500.000,00	0,00	0,00	745.000,00
10	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	195.784.060,00	195.684.060,00	99,95	297.342.075,00
11	Belanja Sewa Peralatan Umum	318.246.236,00	200.663.500,00	63,05	182.294.100,00
Jumlah		**1.143.293.796,00**	**907.394.260,00**	**79,37**	**1.225.473.375,00**

5. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.071.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp835.642.000,00 atau 78,00%. Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp286.724.690,00 atau minus 25,55% dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp1.122.366.690,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 132 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	64.214.690,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	876.480.000,00	661.950.000,00	75,52	984.250.000,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	105.280.000,00	91.412.000,00	86,83	38.772.000,00
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	73.100.000,00	65.780.000,00	89,99	25.630.000,00
6	Belanja Sewa Pagar	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**1.071.360.000,00**	**835.642.000,00**	**78,00**	**1.122.366.690,00**

6. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
   Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya merupakan Belanja Sewa Alat Musik. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp95.905.500,00 dengan realisasi sebesar Rp69.935.000,00 atau 72,92%. Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp19.833.000,00 atau 39,59% dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp50.102.000,00.

7. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi
   Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.764.491.526,00 dengan realisasi sebesar Rp3.883.183.078,00 atau 81,50%. Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.668.579.938,00 atau minus 48,58% dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi tahun 2024 sebesar Rp7.551.763.016,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 133 Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	49.977.750,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.165.231.327,00	687.457.455,00	59,00	525.885.201,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	100.000.000,00	0,00	0,00	52.350.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.408.900,00	99.526.000,00	99,12	1.410.694.167,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	891.705.675,00	706.523.862,00	79,23	1.812.352.500,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.245.433.401,00	1.179.009.561,00	94,67	1.791.814.278,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.120.412.223,00	1.070.628.600,00	95,56	1.513.198.200,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	128.100.000,00	127.217.100,00	99,31	395.490.920,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	13.200.000,00	12.820.500,00	97,13	0,00
Jumlah		**4.764.491.526,00**	**3.883.183.078,00**	**81,50**	**7.551.763.016,00**

8. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi
   Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp458.313.747,00 dengan realisasi sebesar Rp331.801.536,50 atau 72,40%. Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp316.901.536,50 atau 2.126,86% dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi tahun 2024 sebesar Rp14.900.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 134 Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	250.313.747,00	232.567.536,50	92,91	14.900.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000,00	99.234.000,00	99,23	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**458.313.747,00**	**331.801.536,50**	**72,40**	**14.900.000,00**

9. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

   Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.778.797.737,00 dengan realisasi sebesar Rp1.241.013.618,00 atau 69,77%. Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp215.877.618,00 atau 21,06% dibandingkan dengan realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2024 sebesar Rp1.025.136.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 135 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	608.545.737,00	299.263.618,00	49,18	263.996.000,00
2	Belanja Bimbingan Teknis	1.170.252.000,00	941.750.000,00	80,47	761.140.000,00
Jumlah		**1.778.797.737,00**	**1.241.013.618,00**	**69,77**	**1.025.136.000,00**

10. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

    Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp307.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp243.343.750,00 atau 79,11%. Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.945.193,00 atau 12,97% dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp215.398.557,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 136 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	38.118.300,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	35.271.341,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	17.042.438,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	5.368.888,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	825.000,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	12.000.000,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.750.000,00	0,00	0,00	1.026.432,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	113.600.000,00	86.531.250,00	76,17	86.140.385,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	19.605.773,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],	133.750.000,00	100.312.500,00	75,00	0,00
Jumlah		**307.600.000,00**	**243.343.750,00**	**79,11**	**215.398.557,00**

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp36.695.136.371,00	**Rp38.122.247.602,00**

Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp39.617.831.927,00 dengan realisasi sebesar Rp36.695.136.371,00 atau 92,62%. Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.427.111.231,00 atau minus 3,74% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp38.122.247.602,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 137 Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.763.495.000,00	1.011.644.350,00	57,37	866.454.950,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.871.896.435,00	7.049.255.635,00	79,46	7.036.938.549,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.618.628.836,00	16.306.070.885,00	98,12	16.991.494.959,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.358.628.462,00	12.322.985.501,00	99,71	13.227.359.144,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.183.194,00	5.180.000,00	99,94	0,00
Jumlah		**39.617.831.927,00**	**36.695.136.371,00**	**92,62**	**38.122.247.602,00**

1. Belanja Pemeliharaan Tanah
   Belanja Pemeliharaan Tanah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.763.495.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.011.644.350,00 atau

57,37%. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp145.189.400,00 atau 16,76% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah tahun 2024 sebesar Rp866.454.950,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 138 Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan	603.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	248.700.000,00	247.982.100,00	99,71	6.000.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	911.795.000,00	763.662.250,00	83,75	810.454.950,00
Jumlah		**1.763.495.000,00**	**1.011.644.350,00**	**57,37**	**866.454.950,00**

2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

   Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp8.871.896.435,00 dengan realisasi sebesar Rp7.049.255.635,00 atau 79,46%. Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp12.317.086,00 atau 0,18% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp7.036.938.549,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 139 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	150.000.000,00	34.325.175,00	22,88	149.765.750,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	650.000.000,00	566.953.775,00	87,22	1.110.970.658,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	10.330.000,00	1.580.000,00	15,30	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.908.517.620,00	3.514.623.305,00	89,92	3.631.655.289,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	705.116.800,00	704.756.700,00	99,95	36.706.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.166.420.000,00	699.835.439,00	60,00	793.255.975,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	184.200.000,00	156.911.880,00	85,19	137.813.127,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	214.500.000,00	145.295.625,00	67,74	214.052.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	54.498.250,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	145.000.000,00	143.710.250,00	99,11	131.149.500,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	340.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	311.902.000,00	301.145.636,00	96,55	259.490.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	578.741.075,00	422.771.250,00	73,05	516.372.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	435.168.940,00	285.346.600,00	65,57	0,00
Jumlah		**8.871.896.435,00**	**7.049.255.635,00**	**79,46**	**7.036.938.549,00**

3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

   Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp16.618.628.836,00 dengan realisasi sebesar Rp16.306.070.885,00 atau 98,12%. Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp685.424.074,00 atau minus 4,03% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp16.991.494.959,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 140 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.522.148.623,00	5.317.448.110,00	96,29	2.777.506.468,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.486.136.713,00	7.476.490.900,00	99,87	13.087.234.176,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	200.000.000,00	199.704.832,00	99,85	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2.667.000.000,00	2.597.118.793,00	97,38	771.198.315,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	463.343.500,00	447.932.450,00	96,67	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	200.000.000,00	199.905.000,00	99,95	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	30.000.000,00	29.970.800,00	99,90	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	355.556.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	50.000.000,00	37.500.000,00	75,00	0,00
Jumlah		**16.618.628.836,00**	**16.306.070.885,00**	**98,12**	**16.991.494.959,00**

4. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

   Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp12.358.628.462,00 dengan realisasi sebesar Rp12.322.985.501,00 atau 99,71%. Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp904.373.643,00 atau minus 6,84% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 sebesar Rp13.227.359.144,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 141 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	4.041.978.626,00	4.041.001.985,00	99,98	6.674.862.950,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	4.011.185.883,00	4.001.257.519,00	99,75	1.600.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	200.000.000,00	199.981.200,00	99,99	199.518.200,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.813.198.849,00	1.812.167.617,00	99,94	1.396.115.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	170.000.000,00	169.850.000,00	99,91	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	2.122.265.104,00	2.098.727.180,00	98,89	3.356.862.994,00
Jumlah		**12.358.628.462,00**	**12.322.985.501,00**	**99,71**	**13.227.359.144,00**

5. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
   Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya merupakan Belanja Pemeliharaan Tanaman. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp5.183.194,00 dengan realisasi sebesar Rp5.180.000,00 atau 99,94%. Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.180.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp29.020.351.156,00	**Rp52.966.361.539,00**

Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp37.293.138.321,86 dengan realisasi sebesar Rp29.020.351.156,00 atau 77,82%. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.946.010.383,00 atau minus 45,21% dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp52.966.361.539,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 142 Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.293.138.321,86	29.020.351.156,00	77,82	52.727.394.641,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	238.966.898,00
Jumlah		**37.293.138.321,86**	**29.020.351.156,00**	**77,82**	**52.966.361.539,00**

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
   Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp37.293.138.321,86 dengan realisasi sebesar Rp29.020.351.156,00 atau 77,82%. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.707.043.485,00 atau minus 44,96% dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tahun 2024 sebesar Rp52.727.394.641,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 143 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.153.295.948,86	21.204.536.156,00	91,58	37.313.168.641,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.033.043.373,00	6.761.579.000,00	51,88	11.311.470.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.106.799.000,00	1.054.236.000,00	95,25	3.883.706.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	219.050.000,00
Jumlah		**37.293.138.321,86**	**29.020.351.156,00**	**77,82**	**52.727.394.641,00**

2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
   Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 tidak dianggarkan, realisasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp238.966.898,00.

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp4.299.843.828,00	**Rp4.767.863.162,00**

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.613.278.320,00 dengan realisasi sebesar Rp4.299.843.828,00 atau 93,21%. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp468.019.334,00 atau minus 9,82% dibandingkan dengan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp4.767.863.162,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 144 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.544.074.000,00	2.464.814.000,00	96,88	3.553.090.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.069.204.320,00	1.835.029.828,00	88,68	1.214.773.162,00
Jumlah		**4.613.278.320,00**	**4.299.843.828,00**	**93,21**	**4.767.863.162,00**

1. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
   Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.544.074.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.464.814.000,00 atau 96,88%. Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.088.276.000,00 atau minus 30,63% dibandingkan dengan realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp3.553.090.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 145 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	764.814.000,00	714.714.000,00	93,45	813.672.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	510.260.000,00	497.000.000,00	97,40	377.420.000,00
3	Belanja Beasiswa	1.269.000.000,00	1.253.100.000,00	98,75	2.360.990.000,00
4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	392.000,00
5	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	336.000,00
6	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Jumlah		**2.544.074.000,00**	**2.464.814.000,00**	**96,88**	**3.553.090.000,00**

2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
   Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.069.204.320,00 dengan realisasi sebesar Rp1.835.029.828,00 atau 88,68%. Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp620.256.666,00 atau 51,06% dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp1.214.773.162,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 146 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.942.204.320,00	1.808.029.828,00	93,09	536.773.162,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	127.000.000,00	27.000.000,00	21,26	678.000.000,00
Jumlah		**2.069.204.320,00**	**1.835.029.828,00**	**88,68**	**1.214.773.162,00**

5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp32.506.212.280,00**

Perubahan nomenklatur dan kodefikasi rekening pada Belanja Barang dan Jasa BOS yang di *mapping* pada Belanja Barang dan Jasa BOSP tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp32.506.212.280,00.

5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BOSP

Belanja Barang dan Jasa BOSP	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp31.658.607.383,00	**Rp0,00**

Belanja Barang dan Jasa BOSP Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp32.081.676.279,00 dengan realisasi sebesar Rp31.658.607.383,00 atau 98,68%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp31.658.607.383,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 147 Belanja Barang dan Jasa BOSP TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	30.580.829.820,00	30.343.874.827,00	99,23	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.074.996.459,00	941.996.556,00	87,63	0,00
3	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	265.334.000,00	267.220.000,00	100,71	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	145.516.000,00	90.516.000,00	62,20	0,00
Jumlah		**32.081.676.279,00**	**31.658.607.383,00**	**98,68**	**0,00**

Penjelasan tabel 5.147 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp30.343.874.827,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. SD Negeri sebesar Rp19.202.933.553,00; dan
   b. SMP Negeri sebesar Rp11.140.941.274,00;
2. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp941.996.556,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. SD Negeri sebesar Rp625.471.856,00;
   b. SMP Negeri sebesar Rp308.642.700,00; dan
   c. SiLPA BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp7.882.000,00;
3. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler sebesar 267.220.000,00 pada PAUD Negeri;
4. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja sebesar Rp15.000.000,00 pada PAUD Negeri; dan
5. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebesar Rp90.516.000,00 pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri.

Terdapat realisasi melebihi anggaran pada Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler sebesar Rp267.220.000,00 atau 100,71% dari anggaran sebesar Rp265.334.000,00. Kelebihan realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler sebesar Rp1.886.000,00 disebabkan karena anggaran di ARKAS oleh Satuan Pendidikan tidak dihimpun sesuai dengan alokasi per jenis belanja untuk dicatatkan ke DPA Perubahan Dinas Pendidikan.

5.1.2.1.2.8 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp14.636.181.889,00	**Rp11.710.499.206,00**

Belanja Barang dan Jasa BLUD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp14.637.067.086,00 dengan realisasi sebesar

Rp14.636.181.889,00 atau 99,99%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.925.682.683,00 atau 24,98% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp11.710.499.206,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 17.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp20.122.162.634,00	**Rp51.428.696.039,00**

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Karo meliputi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Hibah BOSP. Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp20.247.819.431,00 dengan realisasi sebesar Rp20.122.162.634,00 atau 99,38%. Realisasi Belanja Hibah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.306.533.405,00 atau minus 60,87% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2024 sebesar Rp51.428.696.039,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 148 Belanja Hibah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	32.404.030.590,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.700.000.000,00	1.678.062.138,00	98,71	18.042.659.122,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	14.790.802.745,00	14.656.444.430,00	99,09	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.051.256.686,00	1.051.256.686,00	100,00	982.006.327,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	2.705.760.000,00	2.736.399.380,00	101,13	0,00
Jumlah		**20.247.819.431,00**	**20.122.162.634,00**	**99,38**	**51.428.696.039,00**

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
   Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat tidak dianggarkan, realisasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp32.404.030.590,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 149 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hibah Uang Kepada Komando Distrik Militer 0205 Tanah Karo dalam Kegiatan Pilkada Serentak Tahun 2024. (Pengamanan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2024).	0,00	0,00	0,00	867.360.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Hibah Uang Kepada Kepolisian Resor Tanah Karo dalam Kegiatan Pilkada Serentak Tahun 2024. (Pengamanan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2024).	0,00	0,00	0,00	4.468.254.000,00
3	Belanja Hibah Uang Kepada Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo dalam Kegiatan Pilkada Serentak Tahun 2024. (Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2024)	0,00	0,00	0,00	7.527.279.600,00
4	Belanja Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo dalam Kegiatan Pilkada Serentak Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	19.541.136.990,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.404.030.590,00**

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

   Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.678.062.138,00 atau 98,71%. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.364.596.984,00 atau minus 90,70% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2024 sebesar Rp 18.042.659.122,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 150 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.700.000.000,00	1.678.062.138,00	98,71	296.549.999,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	42.740.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	17.703.369.123,00
Jumlah		**1.700.000.000,00**	**1.678.062.138,00**	**98,71**	**18.042.659.122,00**

a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.700.000.000,00 dengan realisasi Rp1.678.062.138,00 atau 98,71%. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.381.512.139,00 atau 465,86% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2024 sebesar Rp296.549.999,00.

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tidak dianggarkan. Realisasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp42.740.000,00.

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di *mapping* pada kode rekening Belanja Hibah Dana BOS dan Belanja Hibah Dana BOSP sehingga tidak dianggarkan tahun 2025. Realisasi tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp17.703.369.123,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 151 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Sekolah Swasta				
1	BOSP, BOP Kesetaraan dan BOP PAUD	0,00	0,00	17.703.369.123,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**17.703.369.123,00**

3. Belanja Hibah Dana BOS
Belanja Hibah Dana BOS merupakan belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh satdiknas swasta yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan. Belanja Hibah Dana BOS Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp14.790.802.745,00 dengan realisasi sebesar Rp14.656.444.430,00 atau 99,09%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.656.444.430,00 atau 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Dana BOS tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Belanja Hibah BOS Reguler tahap I SD dan SMP Swasta sebesar Rp7.059.331.215,00;
   b. Belanja Hibah BOS Kinerja tahap I SD dan SMP Swasta sebesar Rp537.500.000,00;
   c. Belanja Hibah BOS Reguler tahap II SD dan SMP Swasta sebesar Rp7.003.578.415,00; dan
   d. Belanja Hibah BOS Reguler tahap II terlambat salur SD dan SMP Swasta sebesar Rp56.034.800,00.

4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.051.256.686,00 dengan realisasi sebesar Rp1.051.256.686,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp69.250.359,00 atau 7,05% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2024 sebesar Rp982.006.327,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 152 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kabupaten Karo untuk Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Karo	0,00	0,00	0,00	41.446.287,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kabupaten Karo untuk Partai Perindo Kabupaten Karo	43.109.127,00	43.109.127,00	100,00	50.917.547,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kabupaten Karo untuk Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Karo	69.497.474,00	69.497.474,00	100,00	87.421.503,00
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kabupaten Karo untuk Partai Gerindra Kabupaten Karo	141.918.775,00	141.918.775,00	100,00	117.485.420,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kabupaten Karo untuk PDI Perjuangan Kabupaten Karo	270.248.452,00	270.248.452,00	100,00	246.272.377,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kabupaten Karo untuk Partai Golkar Kabupaten Karo	111.322.519,00	111.322.519,00	100,00	110.068.460,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kabupaten Karo untuk Partai Demokrat Kabupaten Karo	67.802.301,00	67.802.301,00	100,00	82.688.183,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kabupaten Karo untuk Partai Nasdem Kabupaten Karo	143.826.422,00	143.826.422,00	100,00	140.161.245,00
9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kabupaten Karo untuk Partai Amanat Nasional Kabupaten Karo	61.695.983,00	61.695.983,00	100,00	70.086.397,00
10	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kabupaten Karoo untuk Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karo	40.591.772,00	40.591.772,00	100,00	10.147.943,00
11	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kabupaten Karo untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Karo	77.192.728,00	77.192.728,00	100,00	19.298.182,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
12	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kabupaten Karo untuk Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karo	24.051.133,00	24.051.133,00	100,00	6.012.783,00
Jumlah		**1.051.256.686,00**	**1.051.256.686,00**	**100,00**	**982.006.327,00**

5. Belanja Hibah Dana BOSP
   Belanja Hibah Dana BOSP dianggarkan pada Dinas Pendidikan. Belanja Hibah Dana BOSP Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.705.760.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.736.399.380,00 atau 101,13%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.736.399.380,00 atau 100% dibandingkan dengan Belanja Hibah Dana BOSP tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 153 Belanja Hibah Dana BOSP TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.648.740.000,00	2.624.214.380,00	99,07	0,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	57.020.000,00	112.185.000,00	196,75	0,00
Jumlah		**2.705.760.000,00**	**2.736.399.380,00**	**101,13**	**0,00**

a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD
   Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.648.740.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.624.214.380,00 atau 99,07%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.624.214.380,00 atau 100% dibandingkan dengan Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD tahun 2024 sebesar Rp0,00.

b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan
   Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp57.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp112.185.000,00 atau 196,75%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp112.185.000,00 atau 100% dibandingkan dengan Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp0,00**

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.338.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp145.869.376.198,00	**Rp214.619.621.202,00**

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karo meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan

dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp149.646.807.259,00 dengan realisasi sebesar Rp145.869.376.198,00 atau 97,48%. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp68.750.245.004,00 atau minus 32,03% dibandingkan dengan Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp214.619.621.202,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 154 Belanja Modal TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.019.777.013,00	42.219.516.658,00	93,78	31.232.923.939,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.543.608.457,00	46.986.998.560,00	98,83	58.916.770.589,00
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.779.884.953,00	47.329.012.466,00	99,06	114.612.976.924,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.303.536.836,00	9.333.848.514,00	100,33	9.856.949.750,00
Jumlah		**149.646.807.259,00**	**145.869.376.198,00**	**97,48**	**214.619.621.202,00**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp42.219.516.658,00	**Rp31.232.923.939,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp45.019.777.013,00 dengan realisasi sebesar Rp42.219.516.658,00 atau 93,78%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.986.592.719,00 atau 35,18% dibandingkan dengan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp31.232.923.939,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 155 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	195.850.000,00	109.475.250,00	55,90	2.750.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	8.914.592.000,00	8.587.371.501,00	96,33	846.900.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	299.471.962,00	281.715.598,00	94,07	33.714.476,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	243.770.442,00	216.000.100,00	88,61	8.912.710,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.666.064.389,00	12.669.933.662,00	92,71	12.524.590.020,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	792.129.590,00	721.759.199,00	91,12	165.422.400,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	471.553.408,00	462.930.001,00	98,17	862.728.700,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.961.823.470,00	3.896.530.813,00	98,35	5.132.618.178,00
9	Belanja Modal Komputer	5.391.458.963,00	4.908.992.973,00	91,05	1.667.024.450,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2.694.660.000,00	2.441.099.286,00	90,59	3.871.340.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	50.284.000,00	38.744.000,00	77,05	0,00
12	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.796.578.457,00	1.770.865.510,00	98,57	90.321.600,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.623.736.344,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.462.183.204,00	5.414.814.333,00	99,13	0,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	879.357.128,00	699.284.432,00	79,52	399.865.061,00
Jumlah		**45.019.777.013,00**	**42.219.516.658,00**	**93,78**	**31.232.923.939,00**

1. Belanja Modal Alat Besar

   Belanja Modal Alat Besar Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp195.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp109.475.250,00 atau 55,90%. Realisasi Belanja Modal Alat Besar tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp106.725.250,00 atau 3.880,92% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Besar tahun 2024 sebesar Rp2.750.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 156 Belanja Modal Alat Besar TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	115.000.000,00	103.674.000,00	90,15	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	80.850.000,00	5.801.250,00	7,18	2.750.000,00
Jumlah		**195.850.000,00**	**109.475.250,00**	**55,90**	**2.750.000,00**

   a. Belanja Modal Alat Besar Darat

      Belanja Modal Alat Besar Darat Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp115.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp103.674.000,00 atau 90,15%. Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp103.674.000,00 atau 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat tahun 2024 sebesar Rp0,00.

   b. Belanja Modal Alat Bantu

      Belanja Modal Alat Bantu Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp80.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.801.250,00 atau 7,18%. Realisasi Belanja Modal Alat Bantu tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.051.250,00 atau 110,95% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Bantu tahun 2024 sebesar Rp2.750.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 157 Belanja Modal Alat Bantu TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Electric Generating Set	79.350.000,00	4.301.250,00	5,42	0,00
2	Belanja Modal Pompa	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
Jumlah		**80.850.000,00**	**5.801.250,00**	**7,18**	**2.750.000,00**

2. Belanja Modal Alat Angkutan

   Belanja Modal Alat Angkutan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp8.914.592.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.587.371.501,00 atau 96,33%. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.740.471.501,00 atau 913,98% dibandingkan dengan

realisasi Belanja Modal Alat Angkutan tahun 2024 sebesar Rp846.900.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 158 Belanja Modal Alat Angkutan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.914.592.000,00	8.587.371.501,00	96,33	838.900.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Jumlah		**8.914.592.000,00**	**8.587.371.501,00**	**96,33**	**846.900.000,00**

a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp8.914.592.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.587.371.501,00 atau 96,33%. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.748.471.501,00 atau 923,65% dibandingkan dengan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor tahun 2024 sebesar Rp838.900.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 159 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.998.020.000,00	5.727.800.002,00	95,49	0,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.102.572.000,00	1.066.877.499,00	96,76	754.500.000,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	84.400.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.814.000.000,00	1.792.694.000,00	98,83	0,00
Jumlah		**8.914.592.000,00**	**8.587.371.501,00**	**96,33**	**838.900.000,00**

b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor tidak dianggarkan, realisasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp8.000.000,00.

3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp299.471.962,00 dengan realisasi sebesar Rp281.715.598,00 atau 94,07%. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp248.001.122,00 atau 735,59% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur tahun 2024 sebesar Rp33.714.476,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 160 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	61.041.810,00	46.998.960,00	76,99	1.388.802,00
2	Belanja Modal Alat Ukur	238.430.152,00	234.716.638,00	98,44	32.325.674,00
Jumlah		**299.471.962,00**	**281.715.598,00**	**94,07**	**33.714.476,00**

a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin

Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp61.041.810,00 dengan realisasi sebesar Rp46.998.960,00 atau 76,99%. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp45.610.158,00 atau 3.284,14% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 2024 sebesar Rp1.388.802,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 161 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	13.218.750,00	10.100.000,00	76,41	1.388.802,00
2	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*	391.060,00	391.060,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	47.432.000,00	36.507.900,00	76,97	0,00
Jumlah		**61.041.810,00**	**46.998.960,00**	**76,99**	**1.388.802,00**

b. Belanja Modal Alat Ukur

Belanja Modal Alat Ukur Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp238.430.152,00 dengan realisasi sebesar Rp234.716.638,00 atau 98,44%. Realisasi Belanja Modal Alat Ukur tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp202.390.964,00 atau 626,10% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Ukur tahun 2024 sebesar Rp32.325.674,00.

4. Belanja Modal Alat Pertanian

Belanja Modal Alat Pertanian merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan. Belanja Modal Alat Pertanian Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp243.770.442,00 dengan realisasi sebesar Rp216.000.100,00 atau 88,61%. Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp207.087.390,00 atau 2.323,51% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Pertanian tahun 2024 sebesar Rp8.912.710,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 162 Belanja Modal Pertanian TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	72.424.100,00	70.637.300,00	97,53	8.312.800,00
2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	181.692,00	177.600,00	97,75	0,00
3	Belanja Modal Alat Pasca Panen	33.392.000,00	8.667.000,00	25,96	0,00
4	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	30.816.280,00	30.806.600,00	99,97	0,00
5	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	106.956.370,00	105.711.600,00	98,84	599.910,00
Jumlah		**243.770.442,00**	**216.000.100,00**	**88,61**	**8.912.710,00**

a. Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp72.424.100,00 dengan realisasi sebesar Rp70.637.300,00 atau 97,53%. Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman tahun 2024 sebesar Rp8.312.800,00.

b. Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp181.692,00 dengan realisasi sebesar Rp177.600,00 atau 97,75%. Realisasi Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak tahun 2024 sebesar Rp0,00.

c. Belanja Modal Alat Pasca Panen
Belanja Modal Alat Pasca Panen Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp33.392.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.667.000,00 atau 25,95%. Realisasi Belanja Modal Alat Pasca Panen tahun 2024 sebesar Rp0,00.

d. Belanja Modal Alat-Alat Peternakan
Belanja Modal Alat-Alat Peternakan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp30.816.280,00 dengan realisasi sebesar Rp30.806.600,00 atau 99,96%. Realisasi Belanja Modal Alat-Alat Peternakan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

e. Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp106.956.370,00 dengan realisasi sebesar Rp105.711.600,00 atau 98,84%. Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya tahun 2024 sebesar Rp599.910,00.

5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp13.666.064.389,00 dengan realisasi sebesar Rp12.669.933.662,00 atau 92,71%. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 145.343.642,00 atau 1,16% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2024 sebesar Rp12.524.590.020,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 163 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor	409.776.400,00	348.530.389,00	85,05	63.155.000,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.227.493.929,00	10.490.309.764,00	93,43	12.385.835.020,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.028.794.060,00	1.831.093.509,00	90,26	75.600.000,00
Jumlah		**13.666.064.389,00**	**12.669.933.662,00**	**92,71**	**12.524.590.020,00**

a. Belanja Modal Alat Kantor
Belanja Modal Alat Kantor Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp409.776.400,00 dengan realisasi sebesar Rp348.530.389,00 atau 85,05%. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 285.375.389,00 atau 451,87% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp63.155.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 164 Belanja Modal Alat Kantor TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.998.100,00	2.055.000,00	68,54	675.000,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	20.319.410,00	20.200.000,00	99,41	0,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	386.458.890,00	326.275.389,00	84,43	62.480.000,00
Jumlah		**409.776.400,00**	**348.530.389,00**	**85,05**	**63.155.000,00**

b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Rumah Tangga Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp11.227.493.929,00 dengan realisasi sebesar Rp10.490.309.764,00 atau 93,43%. Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.895.525.256,00 atau minus 15,30% dibandingkan dengan Belanja Modal Alat Rumah Tangga tahun 2024 sebesar Rp12.385.835.020,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 165 Belanja Modal Alat Rumah Tangga TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Mebel	9.700.188.726,00	9.433.694.556,00	97,25	11.757.720.985,00
2	Belanja Modal Alat Pembersih	3.396.000,00	2.454.210,00	72,27	0,00
3	Belanja Modal Alat Pendingin	40.000.000,00	38.600.000,00	96,50	0,00
4	Belanja Modal Alat Dapur	209.170.913,00	172.891.600,00	82,66	53.848.280,00
5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.274.738.290,00	842.669.398,00	66,11	548.304.400,00
6	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	25.961.355,00
Jumlah		**11.227.493.929,00**	**10.490.309.764,00**	**93,43**	**12.385.835.020,00**

c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.028.794.060,00 dengan realisasi sebesar Rp1.831.093.509,00 atau 90,26%. Realisasi Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat pejabat tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.755.493.509,00 atau 2.322,08% dibandingkan dengan Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat tahun 2024 sebesar Rp75.600.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 166 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1.644.652.952,00	1.467.046.509,00	89,20	37.800.000,00
2	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	28.311.833,00	27.972.000,00	98,80	11.900.000,00
3	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	175.829.275,00	160.695.000,00	91,39	25.900.000,00
4	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	180.000.000,00	175.380.000,00	97,43	0,00
Jumlah		**2.028.794.060,00**	**1.831.093.509,00**	**90,26**	**75.600.000,00**

6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp792.129.590,00 dengan realisasi sebesar Rp721.759.199,00 atau 91,12%. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 556.336.799,00 atau 336,31% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar tahun 2024 sebesar Rp165.422.400,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 167 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Studio	379.329.590,00	309.229.199,00	81,52	123.107.400,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	412.800.000,00	412.530.000,00	99,93	42.315.000,00
Jumlah		**792.129.590,00**	**721.759.199,00**	**91,12**	**165.422.400,00**

a. Belanja Modal Alat Studio

Belanja Modal Alat Studio Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp379.329.590,00 dengan realisasi sebesar Rp309.229.199,00 atau 81,52%. Realisasi Belanja Modal Alat Studio tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp186.121.799,00 atau 151,19% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Studio tahun 2024 sebesar Rp123.107.400,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 168 Belanja Modal Alat Studio TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	122.538.200,00	106.794.600,00	87,15	58.157.400,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	6.636.570,00	6.636.000,00	99,99	0,00
3	Belanja Modal Peralatan Cetak	28.610.400,00	28.200.000,00	98,57	0,00
4	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	221.544.420,00	167.598.599,00	75,65	64.950.000,00
Jumlah		**379.329.590,00**	**309.229.199,00**	**81,52**	**123.107.400,00**

b. Belanja Modal Alat Komunikasi

Belanja Modal Alat Komunikasi Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp412.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp412.530.000,00 atau 99,93%. Realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp370.215.000,00 atau 874,90% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi tahun 2024 sebesar Rp42.315.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 169 Belanja Modal Alat Komunikasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	120.000.000,00	119.880.000,00	99,90	42.315.000,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	292.800.000,00	292.650.000,00	99,95	0,00
Jumlah		**412.800.000,00**	**412.530.000,00**	**99,93**	**42.315.000,00**

7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp 471.553.408,00 dengan realisasi sebesar Rp462.930.001,00 atau 98,17%. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp399.798.699,00 atau minus 46,34% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp862.728.700,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 170 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	275.500.000,00	275.490.001,00	100,00	87.728.700,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	196.053.408,00	187.440.000,00	95,61	775.000.000,00
Jumlah		**471.553.408,00**	**462.930.001,00**	**98,17**	**862.728.700,00**

a. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp275.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp275.490.001,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran Umum tahun 2024 sebesar Rp87.728.700,00.

b. Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp196.053.408,00 dengan realisasi sebesar Rp187.440.000,00 atau 95,61%. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi tahun 2024 sebesar Rp775.000.000,00.

8. Belanja Modal Alat Laboratorium
Belanja Modal Alat Laboratorium Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.961.823.470,00 dengan realisasi sebesar Rp3.896.530.813,00 atau 98,35%. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.236.087.365,00 atau minus 24,08% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium tahun 2024 sebesar Rp5.132.618.178,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 171 Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.841.943.470,00	3.809.950.813,00	99,17	4.953.618.178,00
2	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	119.880.000,00	86.580.000,00	72,22	179.000.000,00
Jumlah		**3.961.823.470,00**	**3.896.530.813,00**	**98,35**	**5.132.618.178,00**

a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.841.943.470,00 dengan realisasi sebesar Rp3.809.950.813,00 atau 99,17%. Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.143.667.365,00 atau minus 23,09% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah tahun 2024 sebesar Rp4.953.618.178,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 172 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	0,00	0,00	310.760.178,00
2	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	158.877.690,00	158.491.350,00	99,76	127.610.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	3.683.065.780,00	3.651.459.463,00	99,14	4.515.248.000,00
Jumlah		**3.841.943.470,00**	**3.809.950.813,00**	**99,17**	**4.953.618.178,00**

b. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica merupakan Belanja Modal Peralatan Umum. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp119.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp86.580.000,00 atau 72,22%. Realisasi Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp92.420.000,00 atau minus 51,63% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica tahun 2024 sebesar Rp179.000.000,00.

9. Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Komputer Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp5.391.458.963,00 dengan realisasi sebesar Rp4.908.992.973,00 atau 91,05%. Realisasi Belanja Modal Komputer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.241.968.523,00 atau 194,48% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Komputer tahun 2024 sebesar Rp1.667.024.450,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 173 Belanja Modal Komputer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Komputer Unit	4.302.749.810,00	4.035.216.900,00	93,78	1.103.421.050,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.088.709.153,00	873.776.073,00	80,26	563.603.400,00
Jumlah		**5.391.458.963,00**	**4.908.992.973,00**	**91,05**	**1.667.024.450,00**

a. Belanja Modal Komputer Unit

Belanja Modal Komputer Unit merupakan belanja modal *personal computer*. Belanja Modal Komputer Unit Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.302.749.810,00 dengan realisasi sebesar Rp4.035.216.900,00 atau 93,78%. Realisasi Belanja Modal Komputer Unit tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.931.795.850,00 atau 265,70% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Komputer Unit tahun 2024 sebesar Rp1.103.421.050,00.

b. Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanja Modal Peralatan Komputer Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.088.709.153,00 dengan realisasi sebesar Rp873.776.073,00 atau 80,26%. Realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp310.172.673,00 atau 55,03% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer tahun 2024 sebesar Rp563.603.400,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 174 Belanja Modal Peralatan Komputer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Mainframe	33.916.000,00	26.112.950,00	76,99	15.090.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	790.622.733,00	691.959.474,00	87,52	353.184.500,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	Belanja Modal Peralatan Jaringan	241.263.600,00	137.396.999,00	56,95	190.828.900,00
4	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22.906.820,00	18.306.650,00	79,92	4.500.000,00
Jumlah		**1.088.709.153,00**	**873.776.073,00**	**80,26**	**563.603.400,00**

10. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
    Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian merupakan Belanja Modal Sumur Pemboran. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.694.660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.441.099.286,00 atau 90,59%. Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.430.240.714,00 atau minus 36,94% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian tahun 2024 sebesar 3.871.340.000,00.

11. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
    Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp50.284.000,00 dengan realisasi sebesar Rp38.744.000,00 atau 77,05%. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp38.744.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan kerja tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 175 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	48.940.000,00	37.400.000,00	76,42	0,00
2	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	1.344.000,00	1.344.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**50.284.000,00**	**38.744.000,00**	**77,05**	**0,00**

12. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
    Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi tahun 2025 dan 2024 tidak ada realisasi/nihil dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00.

13. Belanja Modal Rambu-Rambu
    Belanja Modal Rambu-Rambu merupakan belanja rambu-rambu lalu lintas darat. Belanja Modal Rambu-Rambu Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.796.578.457,00 dengan realisasi sebesar Rp1.770.865.510,00 atau 98,57%. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.680.543.910,00 atau 1.860,62% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu tahun 2024 sebesar Rp90.321.600,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 176 Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	585.578.457,00	570.872.267,00	97,49	15.321.600,00
2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.211.000.000,00	1.199.993.243,00	99,09	75.000.000,00
Jumlah		**1.796.578.457,00**	**1.770.865.510,00**	**98,57**	**90.321.600,00**

14. Belanja Modal Peralatan Olahraga
    Belanja Modal Peralatan Olahraga merupakan belanja peralatan permainan tidak dianggarkan, realisasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp3.000.000,00.

15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
    Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS di *mapping* ke kode rekening Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sehingga tidak dianggarkan tahun 2025. Realisasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp5.623.736.344,00.

16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP
    Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp5.462.183.204,00 dengan realisasi sebesar Rp5.414.814.333,00 atau 99,13%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.414.814.333,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 177 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	5.163.313.663,00	5.089.934.212,00	98,58	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	230.471.541,00	251.599.121,00	109,17	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	22.224.000,00	41.287.000,00	185,78	0,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	46.174.000,00	31.994.000,00	69,29	0,00
Jumlah		**5.462.183.204,00**	**5.414.814.333,00**	**99,13**	**0,00**

17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
    Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp879.357.128,00 dengan realisasi sebesar Rp699.284.432,00 atau 79,52%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp299.419.371,00 atau 74,88% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD tahun 2024 sebesar Rp399.865.061,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 178 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat kesehatan/alat kedokteran - tensimeter, termometer	200.000.000,00	10.134.200,00	5,07	197.051.800,00
2	Tunggakan Alat kesehatan/alat kedokteran	479.357.128,00	479.357.128,00	100,00	0,00
3	Pengadaan personal komputer - komputer dan printer	100.000.000,00	98.151.750,00	98,15	27.400.000,00
4	Pengadaan Meubeleur - kursi rapat	50.000.000,00	43.290.000,00	86,58	0,00
5	Alat elektronik	0,00	0,00	0,00	31.383.400,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
6	Peralatan dan Mesin BLUD-lainnya (mesin suur, dispenser, exhaoustvan, atap gedung dan talang aiar)	50.000.000,00	68.351.354,00	136,70	144.029.861,00
Jumlah		**879.357.128,00**	**699.284.432,00**	**79,52**	**399.865.061,00**

5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp46.986.998.560,00	**Rp58.916.770.589,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Karo meliputi Belanja Modal Bangunan Gedung dan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp47.543.608.457,00 dengan realisasi sebesar Rp46.986.998.560,00 atau 98,83%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 11.929.772.029,00 atau minus 20,25% dibandingkan dengan Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar 58.916.770.589,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 179 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	44.721.634.337,00	44.378.975.114,00	99,23	44.583.758.665,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.821.974.120,00	2.608.023.446,00	92,42	14.333.011.924,00
Jumlah		**47.543.608.457,00**	**46.986.998.560,00**	**98,83**	**58.916.770.589,00**

1. Belanja Modal Bangunan Gedung
   Belanja Modal Bangunan Gedung merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp 44.721.634.337,00 dengan realisasi sebesar Rp44.378.975.114,00 atau 99,23%. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp204.783.551,00 atau minus 0,46% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung tahun 2024 sebesar Rp44.583.758.665,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 180 Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	25.103.859.325,00	24.839.091.187,00	98,95	10.410.328.499,00
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.702.527.600,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.523.403.797,00	18.454.277.200,00	99,63	30.316.520.244,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi / Pasar	45.354.015,00	44.950.000,00	99,11	594.229.887,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
6	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan	459.017.200,00	451.008.727,00	98,26	1.479.999.999,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.000.000,00	399.648.000,00	99,91	80.152.436,00
Jumlah		**44.721.634.337,00**	**44.378.975.114,00**	**99,23**	**44.583.758.665,00**

2. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
   Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti merupakan belanja modal tugu/tanda batas. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.821.974.120,00 dengan realisasi sebesar Rp2.608.023.446,00 atau 92,42%. Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.724.988.478,00 atau minus 81,80% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti tahun 2024 sebesar Rp14.333.011.924,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 181 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	170.000.000,00	167.800.000,00	98,71	0,00
2	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	2.099.624.000,00	2.079.856.314,00	99,06	0,00
3	Belanja Modal Pagar	377.350.120,00	285.779.572,00	75,73	14.333.011.924,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	175.000.000,00	74.587.560,00	42,62	0,00
Jumlah		**2.821.974.120,00**	**2.608.023.446,00**	**92,42**	**14.333.011.924,00**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp47.329.012.466,00	**Rp114.612.976.924,00**

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Karo meliputi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air dan Belanja Modal Jaringan. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp47.779.884.953,00 dengan realisasi sebesar Rp47.329.012.466,00 atau 99,06%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp67.283.964.458,00 atau minus 58,71% dibandingkan dengan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 sebesar Rp114.612.976.924,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 182 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	28.666.425.317,00	28.349.454.217,00	98,89	86.726.367.431,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	18.464.462.568,00	18.332.030.319,00	99,28	27.222.454.093,00
3	Belanja Modal Jaringan	648.997.068,00	647.527.930,00	99,77	664.155.400,00
Jumlah		**47.779.884.953,00**	**47.329.012.466,00**	**99,06**	**114.612.976.924,00**

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

   Belanja Modal Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp28.666.425.317,00 dengan realisasi sebesar Rp28.349.454.217,00 atau 98,89%. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp58.376.913.214,00 atau minus 67,31% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan tahun 2024 sebesar Rp86.726.367.431,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 183 Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	24.843.156.689,00	24.656.812.408,00	99,25	83.837.022.437,00
2	Belanja Modal Jembatan	3.823.268.628,00	3.692.641.809,00	96,58	2.889.344.994,00
Jumlah		**28.666.425.317,00**	**28.349.454.217,00**	**98,89**	**86.726.367.431,00**

a. Belanja Modal Jalan

   Belanja Modal Jalan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp24.843.156.689,00 dengan realisasi sebesar Rp24.656.812.408,00 atau 99,25%. Realisasi Belanja Modal Jalan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp59.180.210.029,00 atau minus 70,59% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan tahun 2024 sebesar Rp83.837.022.437,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 184 Belanja Modal Jalan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	22.791.667.217,00	22.621.169.651,00	99,25	80.393.666.896,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	786.614.472,00	782.292.257,00	99,45	1.563.555.541,00
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.264.875.000,00	1.253.350.500,00	99,09	1.879.800.000,00
Jumlah		**24.843.156.689,00**	**24.656.812.408,00**	**99,25**	**83.837.022.437,00**

b. Belanja Modal Jembatan

   Belanja Modal Jembatan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.823.268.628,00 dengan realisasi sebesar Rp3.692.641.809,00 atau 96,58%. Realisasi Belanja Modal Jembatan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp803.296.815,00 atau 27,80% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jembatan tahun 2024 sebesar Rp2.889.344.994,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 185 Belanja Modal Jembatan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	3.815.158.628,00	3.684.691.809,00	96,58	2.889.344.994,00
2	Belanja Modal Jembatan Lainnya	8.110.000,00	7.950.000,00	98,03	0,00
Jumlah		**3.823.268.628,00**	**3.692.641.809,00**	**96,58**	**2.889.344.994,00**

2. Belanja Modal Bangunan Air

   Belanja Modal Bangunan Air Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp18.464.462.568,00 dengan realisasi sebesar Rp18.332.030.319,00 atau 99,28%. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.890.423.774,00 atau minus 32,66% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Bangunan Air tahun 2024 sebesar 27.222.454.093,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 186 Belanja Modal Bangunan Air TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.688.499.962,00	3.618.867.873,00	98,11	14.356.625.193,00
2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.270.840.880,00	1.264.079.000,00	99,47	99.475.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	368.687.916,00	368.000.000,00	99,81	119.220.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	13.136.433.810,00	13.081.083.446,00	99,58	12.647.133.900,00
Jumlah		**18.464.462.568,00**	**18.332.030.319,00**	**99,28**	**27.222.454.093,00**

a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi merupakan Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.688.499.962,00 dengan realisasi sebesar Rp3.618.867.873,00 atau 98,11%. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.737.757.320,00 atau minus 74,79% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi tahun 2024 sebesar Rp14.356.625.193,00.

b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.270.840.880,00 dengan realisasi sebesar Rp1.264.079.000,00 atau 99,47%. Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.164.604.000,00 atau 1.170,75% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2024 sebesar 99.475.000,00.

c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp368.687.916,00 dengan realisasi sebesar Rp368.000.000,00 atau 99,81%. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp248.780.000,00 atau 208,67% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku tahun 2024 sebesar Rp119.220.000,00.

d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor
Belanja Modal Bangunan Air Kotor Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp13.136.433.810,00 dengan realisasi sebesar Rp13.081.083.446,00 atau 99,58%. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Kotor tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp433.949.546,00 atau 3,43% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Bangunan Air Kotor tahun 2024 sebesar Rp12.647.133.900,00.

3. Belanja Modal Jaringan
Belanja Modal Jaringan merupakan Belanja Modal Jaringan Listrik. Belanja Modal Jaringan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp648.997.068,00 dengan realisasi sebesar Rp647.527.930,00 atau 99,77%. Realisasi Belanja Modal Jaringan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.627.470,00 atau minus 2,50% dibandingkan dengan realisasi Belanja

Modal Jaringan tahun 2024 sebesar Rp664.155.400,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 187 Belanja Modal Jaringan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jaringan Transmisi	300.450.000,00	300.000.000,00	99,85	280.000.000,00
2	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	348.547.068,00	347.527.930,00	99,71	384.155.400,00
Jumlah		**648.997.068,00**	**647.527.930,00**	**99,77**	**664.155.400,00**

a. Belanja Modal Jalan Transmisi
Belanja Modal Jalan Transmisi Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp300.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau 99,58%. Realisasi Belanja Modal Jalan Transmisi tahun 2024 sebesar Rp280.000.000,00.

b. Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp348.547.068,00 dengan realisasi sebesar Rp347.527.930,00 atau 99,71%. Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya tahun 2024 sebesar Rp384.155.400,00.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp 9.333.848.514,00	**Rp9.856.949.750,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Karo meliputi Belanja Modal Bahan Perpustakaan, Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Belanja Modal Tanaman, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp9.303.536.836,00 dengan realisasi sebesar Rp9.333.848.514,00 atau 100,33%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp523.101.236,00 atau minus 5,31% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp9.856.949.750,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 188 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	191.350.000,00	191.350.000,00	100,00	785.850.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00	0,00	19.970.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	9.051.129.750,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	9.112.186.836,00	9.142.498.514,00	100,33	0,00
Jumlah		**9.303.536.836,00**	**9.333.848.514,00**	**100,33**	**9.856.949.750,00**

1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp191.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp191.350.000,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan

tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp594.500.000,00 atau minus 75,65% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan tahun 2024 sebesar Rp785.850.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 189 Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	191.350.000,00	191.350.000,00	100,00	740.862.500,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	44.987.500,00
Jumlah		**191.350.000,00**	**191.350.000,00**	**100,00**	**785.850.000,00**

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp191.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp191.350.000,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 549.512.500,00 atau minus 74,17% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak tahun 2024 sebesar 740.862.500,00.

b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro tidak dianggarkan, realisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp44.987.500,00.

2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tidak dianggarkan, realisasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp19.970.000,00.

3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS di *mapping* ke kode rekening Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sehingga tidak dianggarkan tahun 2025. Realisasi tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp9.051.129.750,00.
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp9.112.186.836,00 dengan realisasi sebesar Rp9.142.498.514,00 atau 100,33%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.142.498.514,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp193.476.000,00**

Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Karo dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.964.550.812,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp193.476.000,00 atau minus 100,00% dibandingkan dengan Belanja Tidak Terduga tahun 2024 sebesar 193.476.000,00.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp275.809.076.755,00	**Rp292.161.039.100,00**

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Karo dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp285.685.741.892,00 dengan realisasi sebesar Rp275.809.076.755,00 atau 96,54%. Realisasi Belanja Transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.351.962.345,00 atau minus 5,60% dibandingkan dengan Belanja Transfer tahun 2024 sebesar Rp292.161.039.100,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 190 Belanja Transfer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	11.790.329.192,00	11.790.329.192,00	100,00	10.352.188.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	273.895.412.700,00	264.018.747.563,00	96,39	281.808.851.100,00
Jumlah		**285.685.741.892,00**	**275.809.076.755,00**	**96,54**	**292.161.039.100,00**

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp11.790.329.192,00	**Rp10.352.188.000,00**

Belanja Bagi Hasil merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa. Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp11.790.329.192,00 dengan realisasi sebesar Rp11.790.329.192,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.438.141.192,00 atau 13,89% dibandingkan dengan Belanja Bagi Hasil tahun 2024 sebesar Rp10.352.188.000,00.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp264.018.747.563,00	**Rp281.808.851.100,00**

Belanja Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp273.895.412.700,00 dengan realisasi sebesar Rp264.018.747.563,00 atau 96,39%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.790.103.537,00 atau minus 6,31% dibandingkan dengan Belanja Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp281.808.851.100,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 191 Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	197.663.406.000,00	187.787.277.514,00	95,00	205.413.540.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	76.232.006.700,00	76.231.470.049,00	100,00	76.395.311.100,00
Jumlah		**273.895.412.700,00**	**264.018.747.563,00**	**96,39**	**281.808.851.100,00**

5.1.3 Surplus/(Defisit)

	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit)	**Rp39.525.531.637,33**	**(Rp79.178.419.606,30)**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus atau Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Karo mengalami Surplus sebesar Rp39.525.531.637,33 dan tahun 2024 mengalami Defisit sebesar Rp79.178.419.606,30 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 192 Surplus/(Defisit) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.440.524.037.989,00	1.424.632.629.049,83	98,90	1.445.665.730.281,70
2	Belanja Daerah	1.455.323.089.325,00	1.385.107.097.412,50	95,18	1.524.844.149.888,00
Surplus/(Defisit)		**(14.799.051.336,00)**	**39.525.531.637,33**	**(267,08)**	**(79.178.419.606,30)**

5.1.4 Pembiayaan Daerah

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembiayaan Daerah	**Rp14.799.361.336,83**	**Rp93.977.470.943,13**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp14.799.361.336,83 dan Rp93.977.470.943,13 atau 100,00% dari anggaran Rp14.799.051.336,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 193 Pembiayaan Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	14.799.051.336,00	14.799.361.336,83	100,00	96.777.470.943,13
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	2.800.000.000,00
Jumlah		**14.799.051.336,00**	**14.799.361.336,83**	**100,00**	**93.977.470.943,13**

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp14.799.361.336,83	**Rp96.777.470.943,13**

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp14.799.051.336,00 dengan realisasi sebesar Rp14.799.361.336,83 atau 100,00%. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp81.978.109.606,30 atau minus 84,71% dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp96.777.470.943,13 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 194 Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	14.799.051.336,00	14.799.051.336,83	100,00	96.918.896.827,13
2	Sisa Dana BOS	0,00	310.000,00	0,00	(141.425.884,00)
Jumlah		**14.799.051.336,00**	**14.799.361.336,83**	**100,00**	**96.777.470.943,13**

Terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp310.000,00 pada 2 satuan pendidikan yaitu TK Negeri Pembina Tiganderket sebesar Rp100.000,00 dan TK Satu Atap Pertibi Tembe sebesar Rp210.000,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp2.800.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karo tidak dianggarkan tahun 2025. Realisasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp2.800.000.000,00.

5.1.4.3 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp14.799.361.336,83	**Rp93.977.470.943,13**

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Karo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp14.799.051.336,00 dengan realisasi sebesar Rp14.799.361.336,83. Realisasi Pembiayaan Netto tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp79.178.109.606,30 atau minus 84,25% dibandingkan dengan Pembiayaan Netto tahun 2024 sebesar Rp93.977.470.943,13.

5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)-LRA

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp54.324.892.974,16	**Rp14.799.051.336,83**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 sebesar Rp54.324.892.974,16 dan mengalami kenaikan sebesar Rp39.525.841.637,33 atau 267,08% dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp14.799.051.336,83.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menggambarkan jumlah saldo anggaran lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan serta Saldo Anggaran Lebih Akhir yang akan menjadi Penerimaan Pembiayaan tahun berikutnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain dalam penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih di tahun pelaporan 2025, menyajikan kondisi SiLPA/SiKPA TA 2024 dan nilai penggunaannya per 31 Desember 2025. Selanjutnya diakumulasikan dengan kondisi SiLPA/SiKPA TA berjalan (per 31 Desember 2025) maupun koreksi/ penyesuaian kesalahan sebelumnya sehingga membentuk nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun pelaporan.

5.2.1 Sisa Anggaran Lebih Awal

Sisa Anggaran Lebih Awal	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp14.799.051.336,83	**Rp96.918.896.827,13**

Sisa Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 sebesar Rp14.799.051.336,83 diperoleh dari keberadaan nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2024. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Anggaran Lebih Awal tahun 2025 (sisa anggaran akhir tahun 2024) merupakan hasil perhitungan antara Pendapatan Daerah (2024) sebesar Rp1.445.665.730.281,70 dikurangi Belanja Daerah (2024) sebesar Rp1.524.844.149.888,00 ditambah Penerimaan Pembiayaan (2024) sebesar Rp96.777.470.943,13 dan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan (2024) sebesar Rp2.800.000.000,00.

Apabila dilakukan perbandingan *year over year* (*yoy*), nilai Sisa Anggaran Lebih Awal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp82.119.845.490,30 dari Sisa Anggaran Lebih Awal tahun 2024 sebesar Rp96.918.896.827,13.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp14.799.361.336,83	**Rp96.777.470.943,13**

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun 2025 sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp14.799.361.336,83. Penerimaan Pembiayaan dimaksud bersumber dari SiLPA TA sebelumnya sebesar Rp14.799.361.336,83. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih tersebut, digunakan untuk menutupi Defisit APBD, pembayaran kewajiban jangka pendek/pihak ketiga, dan tambahan alokasi anggaran program/kegiatan/subkegiatan dan belanja daerah.

Perbandingan *year over year* (*yoy*), penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp81.978.109.606,30 apabila dibandingkan dengan penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun 2024 sebesar Rp96.777.470.943,13.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp54.324.892.974,16	Rp14.799.051.336,83

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun 2025 yang dibentuk sebagaimana yang tersaji dalam LRA sebesar Rp54.324.892.974,16. Nilai tersebut tersaji akibat perhitungan Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp1.424.632.629.049,83 dikurangi dengan Belanja Daerah tahun 2025 sebesar Rp1.385.107.097.412,50 dan ditambah dengan Penerimaan Pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp14.799.361.336,83.

Perbandingan *year over year* (*yoy*), Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp39.525.841.637,33 dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar Rp14.799.051.336,83.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp310.000,00	(Rp141.425.884,00)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp310.000,00 dan minus Rp141.425.884,00. Terdapat koreksi saldo awal tahun 2025 sebesar Rp310.000,00 pada 2 satuan pendidikan yaitu TK Negeri Pembina Tiganderket sebesar Rp100.000,00 dan TK Satu Atap Pertibi Tembe sebesar Rp210.000,00.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp54.324.892.974,16	Rp14.799.051.336,83

Saldo Anggaran Lebih Akhir berasal dari nilai Saldo Anggaran Lebih Awal dikurang nilai Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dan ditambah dengan nilai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) kemudian ditambah dengan nilai Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan juga saldo Lain-lain. Saldo Anggaran Lebih Akhir dimaksud sesuai dengan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada LRA tahun 2025.

Perbandingan *year over year* (*yoy*), Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2025 sebesar Rp54.324.892.974,16 mengalami kenaikan sebesar Rp39.525.841.637,33 dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2024 sebesar Rp14.799.051.336,83.

5.3 Neraca

Neraca Kabupaten Karo merupakan neraca gabungan dari Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

5.3.1 Aset

Aset	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp2.731.411.201.285,23	Rp2.569.862.584.418,50

Aset Pemerintah Kabupaten Karo terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Properti Investasi. Aset tahun 2025 dan 2024

sebesar Rp2.731.411.201.285,23 dan Rp2.569.862.584.418,50 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 195 Aset TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aset Lancar	121.481.303.510,35	124.407.858.822,43	(2.926.555.312,08)
2	Investasi Jangka Panjang	17.137.737.252,00	18.725.757.539,00	(1.588.020.287,00)
3	Aset Tetap	2.545.588.424.944,68	2.377.774.897.237,07	167.813.527.707,61
4	Aset Lainnya	33.617.102.078,20	35.367.437.320,00	(1.750.335.241,80)
5	Properti Investasi	13.586.633.500,00	13.586.633.500,00	0,00
Jumlah		**2.731.411.201.285,23**	**2.569.862.584.418,50**	**161.548.616.866,73**

5.3.1.1 Aset Lancar

	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Lancar	**Rp121.481.303.510,35**	**Rp124.407.858.822,43**

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Karo terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Antar Daerah, Penyisihan Piutang dan Persediaan. Aset Lancar tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp121.481.303.510,35 dan Rp124.407.858.822,43 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 196 Aset Lancar TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kas dan Setara Kas	54.457.274.784,16	14.931.433.146,83	39.525.841.637,33
2	Piutang Pajak Daerah	47.034.636.158,48	44.590.446.703,48	2.444.189.455,00
3	Piutang Retribusi Daerah	5.338.635.568,00	6.326.814.327,00	(988.178.759,00)
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	309.768.841,66	42.658.343,61	267.110.498,05
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	16.832.132.800,00	1.366.344.000,00	15.465.788.800,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	21.155.189.403,00	62.420.747.682,00	(41.265.558.279,00)
7	Penyisihan Piutang	(40.675.538.889,55)	(38.757.531.723,99)	(1.918.007.165,56)
8	Persediaan	17.029.204.844,60	33.486.946.343,50	(16.457.741.498,90)
Jumlah		**121.481.303.510,35**	**124.407.858.822,43**	**(2.926.555.312,08)**

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas dan Setara Kas	**Rp54.457.274.784,16**	**Rp14.931.433.146,83**

Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Karo terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP dan Kas Dana BOK Puskesmas. Saldo Kas Dan Setara Kas tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp54.457.274.784,16 dan Rp14.931.433.146,83 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 197 Kas dan Setara Kas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	48.981.186.250,16	11.297.340.907,83	37.683.845.342,33
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	33.195.698,00	(33.195.698,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	3.521.177.533,00	1.820.332.198,00	1.700.845.335,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	90.168.720,00	3.830.105,00	86.338.615,00
6	Kas Lainnya	6.102.334,00	1.200,00	6.101.134,00
7	Kas Dana BOSP	237.841.990,00	249.439.064,00	(11.597.074,00)
8	Kas Dana BOK Puskesmas	1.620.797.957,00	1.527.293.974,00	93.503.983,00
Jumlah		**54.457.274.784,16**	**14.931.433.146,83**	**39.525.841.637,33**

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp48.981.186.250,16 dan Rp11.297.340.907,83 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 198 Kas di Kas Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD):				
1	Bank Sumut (RKUD) - 25001020025000	47.919.777.622,48	11.297.340.907,33	36.622.436.715,15
2	BRI (Rekening Operasional Penerimaan Daerah) - 014401000011304	284.309.531,50	0,50	284.309.531,00
3	Bank Mandiri (Rekening Operasional Penerimaan Daerah) - 1050008002028	671.538.298,18	0,00	671.538.298,18
4	Bank Sumut (Rekening Operasional Penerimaan Daerah) - 25001020000106	105.560.798,00	0,00	105.560.798,00
Jumlah		**48.981.186.250,16**	**11.297.340.907,83**	**37.683.845.342,33**

Penetapan rekening tersebut di atas melalui Keputusan Bupati Karo Nomor 900/1122/BKAD/2023 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Operasional Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo. Rekening Operasional Penerimaan Daerah tersebut seluruhnya harus disetor ke RKUD Pemerintah Kabupaten Karo per 31 Desember 2025, tetapi sampai dengan berakhirnya periode tersebut saldo di Rekening Operasional Penerimaan Daerah masih belum bersaldo nihil.

Selanjutnya per 31 Desember 2025 masih ditemukan rekening Satuan Pendidikan, rekening Perangkat Daerah dan Koordinator Wilayah (Korwil) yang masih aktif tetapi tidak digunakan dalam operasional daerah tahun 2025. Rekening tersebut sebelumnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Karo Nomor 900/397/BPKPAD/2020 tanggal 9 November 2020 yakni sebanyak 173 rekening, diantara sebagian rekening dimaksud masih terdapat sisa kas dengan total sebesar Rp32.726.471,27 yang belum pernah disajikan pada laporan tahun sebelumnya. Penutupan rekening dan penyetoran sisa kas ke RKUD baru akan dilakukan di TA 2026.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp33.195.698,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 199 Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kas Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	15.695.698,00	(15.695.698,00)
2	Kas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)
Jumlah		**0,00**	**33.195.698,00**	**(33.195.698,00)**

Per 31 Desember 2025 terdapat rekening milik Dinas Kesehatan Kabupaten Karo pada Bank Sumut dengan nomor rekening 25001020024850 dengan saldo sebesar Rp134.303.600,00 yang tidak disajikan pada Kas di Bendahara Penerimaan. Saldo tersebut merupakan penerimaan atas pembayaran klaim BPJS Kesehatan tahun 2025 namun sudah dipindahbukukan pada tanggal 9 Februari 2026 dan telah dicatatkan sebagai pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas tahun 2026.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.521.177.533,00 dan Rp1.820.332.198,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai Laporan Auditor Independen KAP M. Lian Dalimunthe dan Rekan Nomor 00155/2.1342/AU.5/12/1695-1/1/IV/2026 tanggal 13 Maret 2026 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 200 Kas di BLUD TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kas di Bank Sumut No. 25001020046206	3.021.082.337,00	1.715.637.009,00	1.305.445.328,00
2	Kas di Bank Sumut No. 25001020030530	500.095.196,00	2.706.916,00	497.388.280,00
3	Kas di BRI No. 014401002527301	0,00	4.870.915,00	(4.870.915,00)
4	Kas di BRI No. 014401002529303	0,00	1.112.818,00	(1.112.818,00)
5	Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	96.004.540,00	(96.004.540,00)
Jumlah		**3.521.177.533,00**	**1.820.332.198,00**	**1.700.845.335,00**

Perincian penambahan dan pengurangan Kas di BLUD terdiri dari:

Tabel 5. 201 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Kas di BLUD TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
Saldo Awal		**1.820.332.198,00**	**3.467.942.855,00**
Mutasi Tambah:		***28.978.132.537,00***	***20.502.129.453,00***
1	Pendapatan BLUD	28.978.132.537,00	20.502.129.453,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
Mutasi Kurang:		***27.277.287.202,00***	***22.149.740.110,00***
1	Belanja Pegawai BLUD	11.938.513.448,00	22.149.740.110,00
2	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.636.181.888,00	0,00
3	Belanja Modal BLUD	699.284.432,00	0,00
4	Kas Lainnya - Kelebihan Pembayaran ke Penyedia	3.307.434,00	0,00
Saldo Akhir		**3.521.177.533,00**	**1.820.332.198,00**

5.3.1.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp90.168.720,00 dan Rp3.830.105,00. Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan selisih dari pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP yang dianggarkan di Badan Keuangan dan Aset Daerah, dikurangi realisasi belanja pada Dinas Kesehatan di 19 Puskesmas/FKTP yang dapat dilihat pada lampiran 18 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 202 Kas Dana Kapitasi pada FKTP TA 2025 dan 2024

No	Nama Puskesmas/FKTP	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	UPTD Kec. Kabanjahe	88.744.689,00	745.257,00	87.999.432,00
2	UPTD Kec. Merdeka	11.175,00	19.113,00	(7.938,00)
3	UPTD Kec.Berastagi	70.663,00	239.762,00	(169.099,00)
4	UPTD Kec. Dolat Rayat	1.472,00	7.856,00	(6.384,00)
5	UPTD Kec. Merek	60.342,00	12.759,00	47.583,00
6	UPTD Kec. Naman Teran	51.093,00	608,00	50.485,00
7	UPTD Kec. Mardingding	85.180,00	18.874,00	66.306,00
8	UPTD Kec.Lau Baleng	96.961,00	141.352,00	(44.391,00)
9	UPTD Kec. Tiga Binanga	875,00	1.531,00	(656,00)
10	UPTD Kec.Juhar	81.589,00	218.340,00	(136.751,00)
11	UPTD Kec. Munte	40.356,00	113.128,00	(72.772,00)
12	UPTD Kec.Kutabuluh	56.307,00	10.707,00	45.600,00
13	UPTD Kec.Payung	164.146,00	25.224,00	138.922,00
14	UPTD Kec. Barusjahe	109.909,00	67.826,00	42.083,00
15	UPTD Kec. Simpang Empat	25.495,00	425.176,00	(399.681,00)
16	UPTD Korpri Kec. Berastagi	70.302,00	123,00	70.179,00
17	UPTD Kec.Tiganderket	270.385,00	233.011,00	37.374,00
18	UPTD Kec. Tiga Panah	145.437,00	1.490.944,00	(1.345.507,00)
19	UPTD Singa Kec.Tiga Panah	82.344,00	58.514,00	23.830,00
Jumlah		**90.168.720,00**	**3.830.105,00**	**86.338.615,00**

Adapun Perincian penambahan dan pengurangan Kas Dana Kapitasi pada FKTP terdiri dari:

Tabel 5. 203 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Kas Dana Kapitasi pada FKTP TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
Saldo Awal		**3.830.105,00**	**3.922.829,00**
Mutasi Tambah:		***18.277.138.270,00***	***16.584.332.490,00***
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.277.138.270,00	16.584.332.490,00
Mutasi Kurang:		***18.190.799.655,00***	***16.584.425.214,00***
1	Belanja Pegawai (Jasa)	10.896.818.464,00	9.918.053.542,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
2	Belanja Barang dan Jasa	6.805.854.495,00	6.011.527.479,00
3	Belanja Modal	498.998.437,00	654.844.193,00
Saldo Akhir		**90.168.720,00**	**3.830.105,00**

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp6.102.334,00 dan Rp1.200,00. Kas Lainnya tahun 2025 terdapat pada RSUD sebesar Rp3.307.434,00 terdiri dari kurang setor STS TU oleh bendahara pengeluaran sebesar Rp1,00 dan kelebihan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa sebesar Rp3.307.433,00 sesuai Laporan Auditor Independen KAP M. Lian Dalimunthe dan Rekan Nomor 00155/2.1342/AU.5/12/1695-1/1/IV/2026 tanggal 13 Maret 2026. Sedangkan Kas Lainnya tahun 2025 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.794.900,00 merupakan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas. Perincian Kas Lainnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 204 Kas Lainnya TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	RSUD	3.307.434,00	1.200,00	3.306.234,00
2	Dinas Pendidikan	2.794.900,00	0,00	2.794.900,00
Jumlah		**6.102.334,00**	**1.200,00**	**6.101.134,00**

Perincian lebih lanjut atas Kas Lainnya tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 19.

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOSP

Kas dana BOSP tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp237.841.990,00 dan Rp249.439.064,00 yang dapat dilihat pada lampiran 20 dan lampiran 21.

5.3.1.1.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo Kas Dana BOK puskesmas merupakan selisih pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas yang dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, dikurangi realisasi belanja pada Dinas Kesehatan di 19 Puskesmas/FKTP. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.620.797.957,00 dan Rp1.527.293.974,00 yang dapat dilihat pada lampiran 22 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 205 Kas Dana BOK Puskesmas TA 2025 dan 2024

No	Nama Puskesmas/BOK	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	UPTD Kec. Barusjahe	12.300.005,00	60.657.496,00	(48.357.491,00)
2	UPTD Kec. Berastagi	75.654.777,00	158.202.466,00	(82.547.689,00)
3	UPTD Kec. Dolat Rayat	104.860.400,00	9.099.620,00	95.760.780,00
4	UPTD Kec. Juhar	57.161.226,00	152.829.429,00	(95.668.203,00)
5	UPTD Kec. Kabanjahe	198.148.802,00	129.042.042,00	69.106.760,00
6	UPTD Korpri Kec. Berastagi	56.280.589,00	1.190.815,00	55.089.774,00
7	UPTD Kec. Kutabuluh	116.549.810,00	50.288.232,00	66.261.578,00
8	UPTD Kec. Lau Baleng	96.084.855,00	57.725.331,00	38.359.524,00
9	UPTD Kec. Mardingding	113.242.716,00	83.809.935,00	29.432.781,00
10	UPTD Kec. Merdeka	34.548.000,00	7.427.000,00	27.121.000,00
11	UPTD Kec. Merek	99.636.872,00	126.100.455,00	(26.463.583,00)

No	Nama Puskesmas/BOK	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
12	UPTD Kec. Munte	84.832.561,00	111.201.370,00	(26.368.809,00)
13	UPTD Kec. Naman Teran	25.828.461,00	27.075.388,00	(1.246.927,00)
14	UPTD Kec. Payung	36.514.386,00	58.571.705,00	(22.057.319,00)
15	UPTD Kec. Simpang Empat	250.518.939,00	171.774.953,00	78.743.986,00
16	UPTD Singa Kec. Tiga Panah	32.461.740,00	35.276.554,00	(2.814.814,00)
17	UPTD Kec. Tiga Binanga	99.585.453,00	137.429.000,00	(37.843.547,00)
18	UPTD Kec. Tiganderket	75.108.765,00	66.656.183,00	8.452.582,00
19	UPTD Kec. Tiga Panah	51.479.600,00	82.936.000,00	(31.456.400,00)
Jumlah		**1.620.797.957,00**	**1.527.293.974,00**	**93.503.983,00**

Adapun Perincian penambahan dan pengurangan Kas Dana BOK Puskesmas terdiri dari:

Tabel 5. 206 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Kas Dana BOK TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
Saldo Awal		**1.527.293.974,00**	**0,00**
Koreksi Saldo Awal (Reklas Sisa Dana BOK Puskesmas dari Kas Lainnya)		**0,00**	**3.527.337.452,00**
Mutasi Tambah:		***10.254.275.426,00***	***10.740.982.548,00***
1	Pendapatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.254.275.426,00	10.740.982.548,00
Mutasi Kurang:		***10.160.771.443,00***	***12.741.026.026,00***
1	Realisasi Belanja Dana BOK Puskesmas	10.160.771.443,00	12.741.026.026,00
Saldo Akhir		**1.620.797.957,00**	**1.527.293.974,00**

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2025 sebesar Rp1.620.797.957,00, yang terdapat pada rekening Puskesmas sebesar Rp1.570.913.941,00 dan kelebihan transfer yang terdapat pada rekening rekanan dan pegawai Puskesmas sebesar Rp49.884.016,00. Adapun saldo kelebihan transfer yang terdapat pada rekening rekanan dan pegawai Puskesmas sudah dikembalikan ke rekening Puskesmas tahun 2026, dengan perincian sebagai berikut:

1. Puskesmas Korpri Kec. Berastagi sebesar Rp1.715.188,00 dikembalikan pada tanggal 21 Januari 2026;
2. Puskesmas Kec. Tiga Panah sebesar Rp.42.736.799,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dikembalikan pada tanggal 7 Januari 2026 sebesar Rp38.351.800,00; dan
   b. Dikembalikan pada tanggal 22 Januari 2026 sebesar Rp4.384.999,00;
3. Puskesmas Kec. Merek sebesar Rp5.432.029,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dikembalikan pada tanggal 6 Januari 2026 sebesar Rp5.432.026,00; dan
   b. Dikembalikan pada tanggal 22 Januari 2026 sebesar Rp3,00.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp47.034.636.158,48	**Rp44.590.446.703,48**

Piutang Pajak Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp47.034.636.158,48 dan Rp44.590.446.703,48 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 207 Piutang Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	19.845.000,00	19.845.000,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	388.508.162,00	388.508.162,00	0,00
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	46.626.282.996,48	44.182.093.541,48	2.444.189.455,00
Jumlah		**47.034.636.158,48**	**44.590.446.703,48**	**2.444.189.455,00**

1. Piutang Pajak Hotel
   Piutang Pajak Hotel merupakan piutang pajak losmen pada Badan Pendapatan Daerah. Piutang Pajak Hotel tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp19.845.000,00 dan Rp19.845.000,00 yang dapat dilihat pada lampiran 23.

2. Piutang Pajak Restoran
   Piutang Pajak Restoran merupakan piutang pajak rumah makan dan sejenisnya pada Badan Pendapatan Daerah. Piutang Pajak Restoran tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp388.508.162,00 dan Rp388.508.162,00 yang dapat dilihat pada lampiran 24.

3. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
   Piutang PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp46.626.282.996,48 dan Rp44.182.093.541,48, dengan perincian penambahan dan pengurangan Piutang Pajak PBB-P2 sebagai berikut:

Tabel 5. 208 Perincian Penambahan dan Pengurangan Piutang PBB-P2 TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
Saldo Awal		**44.182.093.541,48**	**40.873.006.919,48**
Mutasi Tambah:		***3.899.731.925,00***	***4.053.987.076,00***
1	Penambahan Piutang PBB-P2	3.899.731.925,00	4.053.987.076,00
Mutasi Kurang:		***1.455.542.470,00***	***744.900.454,00***
1	Pelunasan Piutang PBB-P2	1.455.542.470,00	744.900.454,00
Saldo Akhir		**46.626.282.996,48**	**44.182.093.541,48**

Perincian lebih lanjut Daftar Rekapitulasi Piutang PBB-P2 tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 25.

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp5.338.635.568,00	**Rp6.326.814.327,00**

Piutang Retribusi Daerah merupakan Piutang Retribusi Jasa Umum tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp5.338.635.568,00 dan Rp6.326.814.327,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 209 Piutang Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.671.339.318,00	5.552.223.277,00	(880.883.959,00)
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	667.296.250,00	774.591.050,00	(107.294.800,00)
Jumlah		**5.338.635.568,00**	**6.326.814.327,00**	**(988.178.759,00)**

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
   Piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp4.671.339.318,00 dan Rp5.552.223.277,00. Piutang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan yang berupa layanan kesehatan untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 26. Selain itu perincian penambahan dan pengurangan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 27.

2. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
   Piutang Retribusi Pelayanan Pasar merupakan piutang retribusi kios pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp667.296.250,00 dan Rp774.591.050,00, dengan perincian penambahan dan pengurangan piutang retribusi pelayanan pasar sebagai berikut:

Tabel 5. 210 Perincian Penambahan dan Pengurangan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo Awal		**774.591.050,00**	**885.972.650,00**
Mutasi Tambah:		*0,00*	*0,00*
1	Penambahan Piutang Retribusi Kios	0,00	0,00
Mutasi Kurang:		*107.294.800,00*	*111.381.600,00*
1	Pelunasan Piutang Retribusi Kios	107.294.800,00	111.381.600,00
Saldo Akhir		**667.296.250,00**	**774.591.050,00**

Perincian lebih lanjut Piutang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 28.

5.3.1.1.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp309.768.841,66	**Rp42.658.343,61**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 merupakan piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain atas temuan kurang volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp309.768.841,66 dan Rp42.658.343,61, dengan perincian penambahan dan pengurangan piutang sebagai berikut:

Tabel 5. 211 Perincian Penambahan dan Pengurangan Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo Awal		**42.658.343,61**	**0,00**
Mutasi Tambah:		***309.768.841,66***	***42.658.343,61***
1	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan di BKAD (Atas Pekerjaan pada Dinas PUTR)	0,00	42.658.343,61
2	Temuan Kurang Volume Pekerjaan	309.768.841,66	0,00
Mutasi Kurang:		***42.658.343,61***	***0,00***
1	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan di BKAD (Atas Pekerjaan pada Dinas PUTR)	42.658.343,61	0,00
Saldo Akhir		**309.768.841,66**	**42.658.343,61**

Perincian Piutang Penerimaan atas Tututan Ganti Kerugian Daerah pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang serta Dinas Perpustakaan dan Arsip tahun 2025 sebesar Rp309.768.841,66 dapat dilihat pada lampiran 29. Selain itu, perincian Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 sebesar Rp42.658.343,61 dapat dilihat pada lampiran 30.

5.3.1.1.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp16.832.132.800,00	**Rp1.336.344.000,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan piutang dana perimbangan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp16.832.132.800,00 dan Rp1.366.344.000,00, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 212 Piutang Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	3.548.031.100,00	599.438.000,00	2.948.593.100,00
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	7.349.893.900,00	0,00	7.349.893.900,00
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.189.905.800,00	11.883.000,00	1.178.022.800,00
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	472.063.000,00	102.953.000,00	369.110.000,00
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	104.301.000,00	20.874.000,00	83.427.000,00
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	4.165.221.000,00	631.196.000,00	3.534.025.000,00
Jumlah		**16.832.132.800,00**	**1.366.344.000,00**	**15.465.788.800,00**

Perincian penambahan dan pengurangan Piutang Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

Tabel 5. 213 Perincian Penambahan dan Pengurangan Piutang Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi Saldo Awal	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan						
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	599.438.000,00	2.776.759.000,00	429.896.100,00	258.062.000,00	3.548.031.100,00
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	0,00	6.349.491.000,00	1.000.402.900,00	0,00	7.349.893.900,00
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	11.883.000,00	1.115.149.000,00	67.989.800,00	5.116.000,00	1.189.905.800,00

No	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi Saldo Awal	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	102.953.000,00	413.432.000,00	0,00	44.322.000,00	472.063.000,00
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	20.874.000,00	92.413.000,00	0,00	8.986.000,00	104.301.000,00
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	631.196.000,00	3.805.759.000,00	0,00	271.734.000,00	4.165.221.000,00
Jumlah Piutang		**1.366.344.000,00**	**14.555.720.000,00**	**1.498.288.800,00**	**588.220.000,00**	**16.832.132.800,00**

5.3.1.1.6 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp21.155.189.403,00	**Rp62.420.747.682,00**

Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp21.155.189.403,00 dan Rp62.420.747.682,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 214 Piutang Transfer Antar Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Piutang Bagi Hasil	21.155.189.403,00	58.060.183.861,00	(36.904.994.458,00)
2	Piutang Bantuan Keuangan	0,00	4.360.563.821,00	(4.360.563.821,00)
Jumlah		**21.155.189.403,00**	**62.420.747.682,00**	**(41.265.558.279,00)**

1. Piutang Bagi Hasil
   Piutang Bagi Hasil merupakan piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/231/KPTS/2026 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan Tahun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada kabupaten/Kota Tahun 2023. Piutang Bagi Hasil tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp21.155.189.403,00 dan Rp58.060.183.861,00, dengan perincian penambahan dan pengurangan piutang bagi hasil pajak sebagai berikut:

Tabel 5. 215 Piutang Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak					
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.106.468.014,00	58.773.978,00	18.106.468.014,00	58.773.978,00

No	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.264.087.427,00	100.612.039,00	11.264.087.427,00	100.612.039,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.965.796.800,00	19.209.780.406,00	27.515.796.800,00	18.659.780.406,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.723.831.620,00	2.336.022.980,00	1.723.831.620,00	2.336.022.980,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	23.256.622.267,00	23.256.622.267,00	0,00
Jumlah Piutang		**58.060.183.861,00**	**44.961.811.670,00**	**81.866.806.128,00**	**21.155.189.403,00**

2. Piutang Bantuan Keuangan
   Piutang Bantuan Keuangan merupakan piutang bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp4.360.563.821,00, dengan perincian penambahan dan pengurangan Piutang Bantuan Keuangan sebagai berikut:

Tabel 5. 216 Perincian Penambahan dan Pengurangan Piutang Bantuan Keuangan Tahun 2025

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**4.360.563.821,00**
Mutasi Tambah:		**0,00**
Mutasi Kurang:		***4.360.563.821,00***
1	Pembayaran Penerimaan Transfer Antar Daerah	4.360.563.821,00
Saldo Akhir		**0,00**

5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang

	Tahun 2025	Tahun 2024
Penyisihan Piutang	**(Rp40.675.538.889,55)**	**(Rp38.757.531.723,99)**

Saldo Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp40.675.538.889,55 dan minus Rp38.757.531.723,99 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 217 Penyisihan Piutang Pendapatan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(33.850.734.705,31)	(32.090.111.226,46)	(1.760.623.478,85)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.917.995.141,22)	(1.581.515.957,52)	(336.479.183,70)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.260.157.252,00)	(3.285.370.543,72)	25.213.291,72
4	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	(1.540.875.844,00)	(376.409.600,00)	(1.164.466.244,00)
5	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(105.775.947,02)	(1.424.124.396,29)	1.318.348.449,27
Jumlah		**(40.675.538.889,55)**	**(38.757.531.723,99)**	**(1.918.007.165,56)**

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah
   Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp33.850.734.705,31 dan minus Rp32.090.111.226,46 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 218 Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Losmen	(19.845.000,00)	(19.845.000,00)	0,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Rumah Makan dan Sejenisnya	(388.508.162,00)	(388.508.162,00)	0,00
3	Penyisihan Piutang PBBP2	(33.442.381.543,31)	(31.681.758.064,46)	(1.760.623.478,85)
Jumlah		**(33.850.734.705,31)**	**(32.090.111.226,46)**	**(1.760.623.478,85)**

   a. Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Losmen
      Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Losmen pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp19.845.000,00 dan minus Rp19.845.000,00. Perincian Penyisihan Pajak Hotel-Losmen dapat dilihat pada lampiran 31.

   b. Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Rumah Makan dan Sejenisnya
      Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Rumah Makan dan Sejenisnya pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp388.508.162,00 dan minus Rp388.508.162,00. Perincian Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Rumah Makan dan Sejenisnya dapat dilihat pada lampiran 32.

   c. Penyisihan Piutang PBB-P2
      Penyisihan Piutang PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp33.442.381.543,31 dan minus Rp31.681.758.064,46. Perincian Penyisihan Piutang PBB-P2 tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 33.

2. Penyisihan Piutang Retribusi
   Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp1.917.995.141,22 dan minus Rp1.581.515.957,52 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 219 Penyisihan Piutang Retribusi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(1.250.698.891,22)	(856.159.357,52)	(394.539.533,70)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios	(667.296.250,00)	(725.356.600,00)	58.060.350,00
Jumlah		**(1.917.995.141,22)**	**(1.581.515.957,52)**	**(336.479.183,70)**

   a. Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
      Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp1.250.698.891,22 dan minus Rp856.159.357,52. Perincian Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan

Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 34.

b. Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp667.296.250,00 dan minus Rp725.356.600,00. Perincian Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 35.

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp3.260.157.252,00 dan minus Rp3.285.370.543,72 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 220 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	(213.291,72)	213.291,72
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	(3.260.157.252,00)	(3.285.157.252,00)	25.000.000,00
Jumlah		**(3.260.157.252,00)**	**(3.285.370.543,72)**	**25.213.291,72**

a. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan minus Rp213.291,72.

b. Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp3.260.157.252,00 dan minus Rp3.285.157.252,00. Perincian Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 36.

4. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan penyisihan piutang dana perimbangan tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp1.540.875.844,00 dan minus Rp376.409.600,00, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 221 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB	(313.962.980,50)	(299.719.000,00)	(14.243.980,50)
2	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PPh Pasal 21	(639.951.114,50)	0,00	(639.951.114,50)
3	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	(112.531.549,00)	(1.188.300,00)	(111.343.249,00)
4	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH CHT	(47.206.300,00)	(10.295.300,00)	(36.911.000,00)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	(10.430.100,00)	(2.087.400,00)	(8.342.700,00)
6	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	(271.700,00)	0,00	(271.700,00)
7	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	(416.522.100,00)	(63.119.600,00)	(353.402.500,00)
Jumlah		**(1.540.875.844,00)**	**(376.409.600,00)**	**(1.164.466.244,00)**

Perincian Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 37.

5. Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp105.775.947,02 dan minus Rp1.424.124.396,29 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 222 Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penyisihan Piutang Bagi Hasil	(105.775.947,02)	(1.402.321.577,18)	1.296.545.630,16
2	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	0,00	(21.802.819,11)	21.802.819,11
Jumlah		**(105.775.947,02)**	**(1.424.124.396,29)**	**1.318.348.449,27**

a. Penyisihan Piutang Bagi Hasil

Penyisihan Piutang Bagi Hasil tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp105.775.947,02 dan minus Rp1.402.321.577,18, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 223 Penyisihan Piutang Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	(293.869,89)	(139.340.508,22)	139.046.638,33
2	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(503.060,20)	(193.587.084,93)	193.084.024,73
3	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(93.298.902,03)	(1.055.964.954,36)	962.666.052,33
4	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	(11.680.114,90)	(13.429.029,67)	1.748.914,77
Jumlah		**(105.775.947,02)**	**(1.402.321.577,18)**	**1.296.545.630,16**

Perincian Penyisihan Piutang Bagi Hasil tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 38.

b. Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan minus Rp21.802.819,11.

5.3.1.1.8 Persediaan

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp17.029.204.844,60	**Rp33.486.946.343,50**

Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 menghitung Persediaan dengan menggunakan aplikasi Persediaan dari Kementerian Keuangan yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Persediaan yang disajikan tahun 2025 dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) per 31 Desember 2025. Jumlah Persediaan tersebut merupakan saldo persediaan bahan pakai habis, persediaan bahan/material, persediaan cetak dan penggandaan, persediaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga berdasarkan hasil *stock opname (Physical/Periodikal Inventory)*.

Persediaan Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp17.029.204.844,60 dan Rp33.486.946.343,50 yang terdiri atas persediaan yang berasal dari sisa persediaan yang tidak habis digunakan yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran 2025 dari belanja operasi, belanja BOS yang dibelanjakan untuk menambah persediaan di sekolah-sekolah pada Dinas Pendidikan maupun hibah dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan kelompok masyarakat/perorangan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 224 Persediaan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
Barang Pakai Habis:				
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	866.600,00	(866.600,00)
2	Bahan Kimia	89.956.156,00	150.022.751,00	(60.066.595,00)
3	Bahan Lainnya	172.760.286,00	736.797.386,00	(564.037.100,00)
4	Suku Cadang Lainnya	6.021.750,00	0,00	6.021.750,00
5	Alat Tulis Kantor	39.623.372,00	74.705.194,00	(35.081.822,00)
6	Kertas dan Cover	46.212.875,00	57.135.340,00	(10.922.465,00)
7	Bahan Cetak	162.161.088,00	187.942.030,00	(25.780.942,00)
8	Benda Pos	1.300.000,00	1.740.000,00	(440.000,00)
9	Bahan Komputer	796.840.470,00	800.636.300,00	(3.795.830,00)
10	Perabot Kantor	63.142.392,00	8.397.366,00	54.745.026,00
11	Alat Listrik	16.838.800,00	485.000,00	16.353.800,00
12	Perlengkapan Dinas	76.560.000,00	76.560.000,00	0,00
13	Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.501.400,00	4.427.000,00	2.074.400,00
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39.075.108,00	1.304.821.081,00	(1.265.745.973,00)
15	Obat	9.341.911.562,00	10.204.617.096,00	(862.705.534,00)
16	Obat-obatan Lainnya	2.133.814.674,60	2.577.916.846,00	(444.102.171,40)
17	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	3.308.784.305,00	14.572.062.757,50	(11.263.278.452,50)
18	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	2.189.342.209,00	(2.189.342.209,00)
19	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	723.862.356,00	536.677.887,00	187.184.469,00
20	Pakan	3.838.250,00	1.793.500,00	2.044.750,00
Jumlah		**17.029.204.844,60**	**33.486.946.343,50**	**(16.457.741.498,90)**

Perincian Persediaan pada Perangkat Daerah tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada lampiran 39. Selain itu, perincian Persediaan per sub rincian objek pada Perangkat Daerah tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada lampiran 40.

Persediaan ATK, alat listrik dan elektronik (lampu pijar dan *battery* kering), perangko, materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan kimia, barang yang diserahkan kepada masyarakat, bahan cetak, bahan material pendukung merupakan sisa persediaan yang diperuntukkan bagi kebutuhan Perangkat Daerah maupun pelayanan kesehatan masyarakat seperti persediaan obat-obatan selain yang berasal dari dana APBD, Hibah, JKN, dan BLUD.

Berdasarkan tabel 5.224 dan lampiran 39 terdapat penurunan saldo persediaan sebesar Rp16.457.741.498,90 yang merupakan akumulasi dari koreksi tambah saldo awal sebesar Rp43.429.060,00, koreksi kurang saldo awal sebesar Rp688.341.058,50, mutasi tambah sebesar Rp111.854.996.798,60 dan mutasi kurang sebesar Rp127.667.826.299,00.

Uraian koreksi tambah saldo awal sebesar Rp43.429.060,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan sebesar Rp14.290.048,00; dan
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp29.139.012,00.

Uraian koreksi kurang saldo awal sebesar Rp688.341.058,50 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

Uraian mutasi tambah persediaan tahun 2025 sebesar Rp111.854.996.798,60 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 41. Penjelasan perincian pada lampiran 41 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. LRA APBD (barang pakai habis) sebesar Rp72.972.344.404,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 42;
2. LRA APBD (barang tak habis pakai) sebesar Rp99.815.173,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp18.503.520,00;
   b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp6.424.500,00;
   c. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp26.751.953,00;
   d. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp34.410.000,00;
   e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp436.800,00;
   f. Dinas Pertanian sebesar Rp9.958.400,00; dan
   g. Sekretariat DPRD sebesar Rp3.330.000,00;
3. LRA APBD (aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi) sebesar Rp223.567.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp11.766.000,00;
   b. Dinas Pendidikan sebesar Rp87.801.000,00*;* dan
   c. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp124.000.000,00;
4. LRA BLUD sebesar Rp6.626.154.485,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
5. BOSP Reguler sebesar Rp14.991.168.236,00 pada Dinas Pendidikan;
6. BOP PAUD Reguler sebesar Rp190.226.800,00 pada Dinas Pendidikan;
7. BOP Kesetaraan Reguler sebesar Rp38.251.000,00 pada Dinas Pendidikan;
8. BOSP Kinerja sebesar Rp354.560.313,00 pada Dinas Pendidikan;
9. BOP PAUD Kinerja sebesar Rp7.850.099,00 pada Dinas Pendidikan;
10. JKN sebesar Rp2.267.503.323,00 pada Dinas Kesehatan;
11. Hibah sebesar Rp7.460.054.303,00 dengan perincian sebagai berkut:
    a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.885.000,00;
    b. Dinas Kesehatan sebesar Rp6.962.772.201,00; dan
    c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp493.397.102,00;

12. Utang pihak ketiga BLUD sebesar Rp4.406.944.386,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp851.004.507,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Kesehatan sebesar Rp280.343.704,00; dan
    b. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp570.660.803,00;
14. Perolehan lainnya pihak ketiga (Perorangan) sebesar Rp8.371.200,00 pada Dinas Perhubungan;
15. Koreksi dari belanja modal JKN (alat rumah tangga lainnya) sebesar Rp16.430.225,00 pada Dinas Kesehatan;
16. Koreksi dari belanja modal JKN (personal komputer) sebesar Rp1.355.000,00 pada Dinas Kesehatan;
17. Koreksi dari obat-obatan lainnya sebesar Rp94.117.123,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB;
18. Koreksi dari belanja kursus singkat sebesar Rp193.200,00 pada Dinas Sosial;
19. Koreksi dari perabot kantor sebesar Rp7.700.254,00 pada Dinas Sosial;
20. Koreksi dari natura dan pakan natura sebesar Rp35.075.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Koreksi dari belanja modal alat peraga praktik sebesar Rp1.936.980,00 pada Dinas Pendidikan;
22. Koreksi dari alat peraga praktik sekolah lainnya sebesar Rp160.368.513,00 pada Dinas Pendidikan;
23. Koreksi dari belanja modal alat-alat peternakan sebesar Rp30.806.600,00 pada Dinas Pertanian;
24. Koreksi dari belanja modal alat pengolahan tanah dan tanaman sebesar Rp45.016.800,00 pada Dinas Pertanian;
25. Koreksi dari belanja modal alat pengolahan lainnya sebesar Rp25.125.600,00 pada Dinas Pertanian;
26. Koreksi dari aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp500.000,00 pada Kecamatan Tiga Panah;
27. Koreksi dari alat tulis kantor (kapitalisasi biaya umum) sebesar Rp5.337.650,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
28. Koreksi dari kertas dan cover (kapitalisasi biaya umum) sebesar Rp791.600,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
29. Koreksi dari bahan cetak (kapitalisasi biaya umum) sebesar Rp14.509.700,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
30. Koreksi dari makanan dan minuman rapat (kapitalisasi biaya umum) sebesar Rp19.386.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
31. Koreksi dari pipa-pipa lainnya (kapitalisasi biaya umum) sebesar Rp436.800,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
32. Koreksi dari honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp3.600.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
33. Koreksi dari perjalanan dinas dalam kota (kapitalisasi biaya umum) sebesar Rp35.500.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
34. Koreksi dari perabot kantor (kapitalisasi biaya umum) sebesar Rp27.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
35. Koreksi dari jasa konsultasi arsitektur sebesar Rp180.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
36. Koreksi penyesuaian pemeriksaan BPK sebesar Rp678.967.324,60 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Kesehatan sebesar Rp36.441.632,00; dan
    b. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp642.525.692,60.

Uraian mutasi kurang Persediaan tahun 2025 sebesar Rp127.667.826.299,00 dengan perincian yang dilihat pada lampiran 43. Penjelasan perincian pada lampiran 43 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemakaian sebesar Rp61.362.151.101,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 44;
2. Pemakain JKN sebesar Rp2.290.230.235,00 pada Dinas Kesehatan;
3. Pemakaian BLUD sebesar Rp6.249.229.971,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Pemakaian utang pihak ketiga BLUD sebesar Rp2.643.504.936,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
5. Pemakaian dari BOSP Reguler sebesar Rp15.013.618.392,00 pada Dinas Pendidikan;
6. Pemakaian BOP PAUD Reguler sebesar Rp190.226.800,00 pada Dinas Pendidikan;
7. Pemakaian BOP Kesetaraan Reguler sebesar Rp38.251.000,00 pada Dinas Pendidikan;
8. Pemakaian BOSP Kinerja sebesar Rp354.560.313,00 pada Dinas Pendidikan;
9. Pemakaian BOP PAUD Kinerja sebesar Rp7.850.099,00 pada Dinas Pendidikan;
10. Rusak/usang sebesar Rp330.598.314,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Kesehatan sebesar Rp65.774.120,00; dan
    b. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp264.824.194,00;
11. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp851.004.507,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp281.853.256,00; dan
    b. Dinas Kesehatan sebesar Rp569.151.251,00;
12. Koreksi ke aset tetap peralatan dan mesin alat angkutan darat tak bermotor sebesar Rp2.777.600,00 pada Dinas Sosial;
13. Koreksi ke aset tetap peralatan dan mesin alat pengolahan tanah dan tanaman sebesar Rp27.972.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Koreksi ke aset tetap peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya *(home use)* sebesar Rp71.776.950,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp8.363.850,00;
    b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp9.113.100,00;
    c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp1.800.000,00; dan
    d. Sekretariat Daerah sebesar Rp52.500.000,00;
15. Koreksi ke aset tetap peralatan dan mesin meubelair sebesar Rp265.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;
16. Koreksi ke aset tetap peralatan dan mesin alat dapur lainnya sebesar Rp51.750.000,00 pada Sekretariat Daerah;
17. Koreksi ke aset tetap peralatan dan mesin peralatan personal komputer sebesar Rp123.543.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp23.976.000,00;
    b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sau Pintu sebesar Rp11.766.000,00; dan
    c. Dinas Pendidikan sebesar Rp87.801.000,00;
18. Koreksi ke aset tetap peralatan dan mesin alat pembersih sebesar Rp24.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;
19. Koreksi ke aset tetap peralatan dan mesin alat pendingin sebesar Rp17.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;
20. Koreksi ke aset tetap peralatan dan mesin peralatan studio audio sebesar Rp3.126.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
21. Koreksi ke aset tetap peralatan dan mesin alat kedokteran umum sebesar Rp904.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Kesehatan sebesar Rp780.000.000,00; dan
    b. Rumas Sakit Umum Daerah sebesar Rp124.000.000,00;
22. Koreksi ke aset tetap peralatan dan mesin *electric generating set* sebesar Rp6.800.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB;

23. Koreksi ke persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat sebesar Rp136.892.377,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp35.075.000,00;
    b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp94.117.123,00; dan
    c. Dinas Sosial sebesar Rp7.700.254,00;
24. Koreksi ke persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya sebesar Rp40.052.150,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
25. Koreksi ke aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp487.394.494,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp398.194.494,00; dan
    b. Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp89.200.000,00;
26. Kapitalisasi biaya umum ke aset tetap sebesar Rp166.319.526,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Pendidikan sebesar Rp154.879.716,00; dan
    b. Dinas Perhubungan sebesar Rp11.439.810,00;
27. Kapitalisasi biaya umum ke aset tetap yang diserahkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp25.611.185,00 pada Dinas Perhubungan;
28. Pelunasan utang 2024 sebesar Rp1.380.563.056,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp492.601.998,00; dan
    b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp887.961.058,00;
29. Hibah swasta sebesar Rp160.368.513,00 pada Dinas Pendidikan;
30. Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya sebesar Rp6.822.631.159,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
31. Persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat sebesar Rp17.507.126.789,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp512.168.309,00;
    b. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp20.116.840,00;
    c. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp275.651.460,00;
    d. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp654.201.000,00;
    e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.280.724.962,00;
    f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp94.117.123,00;
    g. Dinas Pendidikan sebesar Rp159.440.400,00;
    h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp73.562.857,00;
    i. Dinas Pertanian sebesar Rp3.464.583.028,00;
    j. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp10.571.745.341,00;
    k. Dinas Sosial sebesar Rp385.327.469,00;
    l. Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp14.816.000,00;dan
    m. Kecamatan Mardinding sebesar Rp672.000,00;
32. Koreksi penyesuaian pemeriksaan BPK sebesar Rp10.111.895.832,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp10.104.441.112,00; dan
    b. Dinas Perhubungan sebesar Rp7.454.720,00.

Adapun perincian penambahan dan pengurangan saldo persediaan tahun 2025 sebesar Rp17.029.204.844,60 dapat dilihat pada lampiran 45.

Selain itu, perincian persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tahun 2025 sebesar Rp3.308.784.305,00 dapat dilihat pada lampiran 46, sedangkan perincian persediaan usang atau kadaluarsa tahun 2025 sebesar Rp330.598.314,00 dapat dilihat pada lampiran 47.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp17.137.737.252,00	**Rp18.725.757.539,00**

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Karo terdiri atas Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dan Investasi Jangka Panjang Permanen. Saldo Investasi Jangka Panjang tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp17.137.737.252,00 dan Rp18.725.757.539,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 225 Investasi Jangka Panjang-Neraca TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.260.157.252,00	3.285.157.252,00	(25.000.000,00)
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	13.877.580.000,00	15.440.600.287,00	(1.563.020.287,00)
Jumlah		**17.137.737.252,00**	**18.725.757.539,00**	**(1.588.020.287,00)**

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp3.260.157.252,00	**Rp3.285.157.252,00**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Kabupaten Karo merupakan investasi pada dana bergulir yang diberikan sebagai pinjaman modal kerja kepada koperasi dan usaha mikro kecil menengah secara bergulir yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karo.

Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo pada dana bergulir dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo pada Lampiran XIII di Sub Bab Kebijakan Akuntansi Investasi bahwa besarnya penyisihan penyertaan dana bergulir tidak tertagih ditentukan berdasarkan kualitas sesuai jatuh temponya (*aging schedule*) dengan kategori umur dana bergulir pada yang disajikan secara periodik mencerminkan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*.

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.260.157.252,00 dan Rp3.285.157.252,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 48.

Berdasarkan lampiran 48, saldo investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir) tahun 2025 berkurang sebesar Rp25.000.000,00 dikarenakan adanya pembayaran/pelunasan dana bergulir melalui rekening pengirim RPL 123 KPKNL MEDAN-6600100012 nomor referensi 20250505164045953069 dengan biaya yang dibebankan kepada penerima sebesar Rp6.500,00 sehingga diterima pada RKUD Kabupaten Karo nomor rekening BRI-014401000011304 sebesar Rp24.993.500,00.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp13.877.580.000,00	**Rp15.440.600.287,00**

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karo kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Bank Sumut dan PDAM Tirta Malem. Saldo Investasi Jangka Panjang tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp13.877.580.000,00 dan Rp15.440.600.287,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 226 Investasi Jangka Panjang Permanen TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penyertaan Modal di PT Bank Sumut	13.877.580.000,00	13.877.580.000,00	0,00
2	Penyertaan Modal di PDAM Tirta Malem	0,00	1.563.020.287,00	(1.563.020.287,00)
Jumlah		**13.877.580.000,00**	**15.440.600.287,00**	**(1.563.020.287,00)**

1. Penyertaan Modal di PT Bank Sumut
   Penyertaan Modal di PT Bank Sumut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karo Ke Dalam PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Penyertaan modal di PT Bank Sumut tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp13.877.580.000,00 dan Rp13.877.580.000,00 dengan jumlah saham sebanyak 55.510.320 lembar saham. Penyertaan Modal yang disajikan berdasarkan metode biaya merupakan metode pencatatan dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan (semua biaya yang dikeluarkan untuk melakukan investasi tersebut dan nilai investasi tidak berubah oleh laba/rugi atas investasi tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 227 Penyertaan Modal di PT Bank Sumut TA 2025

No	Tahun Buku	Setoran Modal
		(Rp)
1	2001	761.200.000,00
2	2002	100.000.000,00
3	2004	784.620.000,00
4	2006	1.159.170.000,00
5	2009	1.000.000.000,00
6	2010	2.000.000.000,00
7	2016	747.340.000,00
8	2018	2.237.666.289,00
9	2019	894.965.042,00
10	2020	529.665.775,00
11	2021	862.945.120,00
12	2024	2.800.000.000,00
13	Pembulatan	7.774,00
Jumlah		**13.877.580.000,00**

Terdapat selisih lebih sebesar Rp7.774,00 atas Investasi Jangka Panjang penyertaan modal pada PT Bank Sumut sesuai dengan Surat Direksi No.256/Dir/SP-Spr/Psh/2023 tanggal 16 Agustus 2023. Dewan Komisaris dan Direksi telah menerbitkan penggantian sertifikat kolektif Saham Seri A yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham dari nominal Rp10.000,00 per lembar saham menjadi Rp250,00 per lembar saham. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat pembulatan jumlah lembar saham Pemerintah Kabupaten

Karo sehingga jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Karo Tahun 2025 sebesar Rp13.877.580.000,00 dengan 55.510.320 lembar saham. Dengan total penyertaan modal dimaksud, persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Karo pada PT Bank Sumut sebesar 0,54% sesuai dengan hasil Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tahun 2025 *Audited*.

2. Penyertaan Modal di PDAM Tirta Malem
   Penyertaan modal di PDAM Tirta Malem berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem dan Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem. Penyertaan modal di PDAM Tirta Malem tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp1.563.020.287,00 merupakan penyertaan modal yang disajikan berdasarkan metode ekuitas yaitu dengan mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah/dikurangi sebesar bagian laba/rugi pemerintah setelah tanggal perolehan (investasi diakumulasikan dengan laba/rugi). Di Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan nilai modal sebesar Rp1.563.020.287,00. Penurunan nilai modal dimaksud akibat terjadinya nilai rugi sebesar Rp1.725.437.809,00,00 berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Syamsul Bahri, MM, Ak & Rekan atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem Kabupaten Karo untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 Nomor 00055/2.0658/AU.2/04/0022-2/1/IV/2026.
   Dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karo, penyertaan modal pada PDAM Tirta Malem sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 228 Penyertaan Modal di PDAM Tirta Malem TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Penyertaan Pemerintah Pusat Ditetapkan Statusnya	2.596.982.532,00	2.596.982.532,00
2	Penyertaan Pemerintah Pusat Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
3	Kekayaan Asal Anggaran Belanja Daerah	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00
4	Kekayaan Asal Dana Pembangunan Daerah	851.120.817,00	851.120.817,00
5	Dana Hibah	47.657.802.540,00	47.458.902.540,00
6	Saldo Laba Ditahan	(49.168.653.613,00)	(45.913.972.206,00)
7	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(1.725.437.809,00)	(3.201.930.864,00)
Total Modal dan Cadangan		**2.381.814.467,00**	**3.961.102.819,00**
1	Penyertaan Pemerintah Pusat	(2.596.982.532,00)	(2.596.982.532,00)
2	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten	0,00	198.900.000,00
Perhitungan Penyertaan Modal Pemkab pada PDAM		**(215.168.065,00)**	**1.563.020.287,00**
Pengakuan Penyertaan Modal Pemkab pada PDAM		**0,00**	**1.563.020.287,00**

5.3.1.3 Aset Tetap

	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Tetap	**Rp2.545.588.424.944,68**	**Rp2.377.774.897.237,07**

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karo terdiri atas Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan. Aset Tetap tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.545.588.424.944,68 dan Rp2.377.774.897.237,07 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 229 Aset Tetap TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah	637.740.407.594,00	639.883.445.532,00	(2.143.037.938,00)
2	Peralatan dan Mesin	521.656.762.585,67	486.891.796.904,67	34.764.965.681,00
3	Gedung dan Bangunan	912.129.065.001,70	883.795.231.952,53	28.333.833.049,17
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.469.292.002.239,51	2.232.811.830.415,10	236.480.171.824,41
5	Aset Tetap Lainnya	120.854.286.219,00	111.413.949.841,00	9.440.336.378,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.072.648.637,04	1.306.980.147,11	27.765.668.489,93
7	Akumulasi Penyusutan	(2.145.156.747.332,24)	(1.978.328.337.555,34)	(166.828.409.776,90)
Jumlah		**2.545.588.424.944,68**	**2.377.774.897.237,07**	**167.813.527.707,61**

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Karo memedomani Kebijakan Akuntansi Penyusutan atas Aset Tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Karo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusutan Barang Milik Daerah dan Masa Manfaat Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Karo, dan Peraturan Bupati Karo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Penyusutan Aset Tetap diberlakukan untuk aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta Properti Investasi.

5.3.1.3.1 Tanah

Tanah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp637.740.407.594,00	**Rp639.883.445.532,00**

Tanah Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp637.740.407.594,00 dan Rp639.883.445.532,00 dengan perincian sebagai berikut

Tabel 5. 230 Tanah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	10.276.348.090,00	24.367.875.090,00	(14.091.527.000,00)
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	37.396.517.940,00	37.396.517.940,00	0,00
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	176.513.301.140,00	163.101.716.140,00	13.411.585.000,00
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	10.197.000.000,00	10.197.000.000,00	0,00
5	Tanah Persil Lainnya	381.270.000,00	347.270.000,00	34.000.000,00
6	Tanah Basah	419.256.000,00	419.256.000,00	0,00
7	Tanah Kering	1.489.800.000,00	1.489.800.000,00	0,00
8	Tanah Hutan	37.791.335.000,00	37.861.035.000,00	(69.700.000,00)
9	Tanah Pertanian	41.766.751.000,00	44.625.051.000,00	(2.858.300.000,00)
10	Tanah Non Persil Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
11	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	2.913.876.112,00	2.913.876.112,00	0,00
12	Tanah untuk Jalan	305.295.006.562,00	303.864.102.500,00	1.430.904.062,00
13	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00
14	Tanah untuk Makam	12.033.729.750,00	12.033.729.750,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
15	Tanah untuk Latihan	180.432.000,00	180.432.000,00	0,00
16	Tanah Kampung	10.784.000,00	10.784.000,00	0,00
Jumlah		**637.740.407.594,00**	**639.883.445.532,00**	**(2.143.037.938,00)**

Adapun perincian Tanah Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 49.

Berdasarkan pada tabel 5.230 dan lampiran 49, terdapat penurunan nilai Tanah sebesar Rp2.143.037.938,00 yang merupakan akumulasi dari mutasi tambah sebesar Rp1.395.962.062,00 dan mutasi kurang sebesar Rp3.539.000.000,00.

Uraian mutasi tambah nilai Tanah tahun 2025 sebesar Rp1.395.962.062,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 231 Mutasi Penambahan Nilai Tanah TA 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Mutasi Tambah:		
1	Mutasi antar Perangkat Daerah	611.000.000,00
2	Hibah dari Masyarakat	34.000.000,00
3	Hibah dari Pengembang	161.536.480,00
4	Koreksi Kurang Catat atas Pemeriksaan BPK	2.840.582,00
5	Kurang Catat/ Hasil Inventarisasi Baru Ditemukan	586.585.000,00
Jumlah		**1.395.962.062,00**

Penjelasan tabel 5.231 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp611.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp305.500.000,00; dan
   b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp305.500.000,00;
2. Hibah dari masyarakat sebesar Rp34.000.000,00 pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata;
3. Hibah dari pengembang sebesar Rp161.536.480,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
4. Koreksi kurang catat atas pemeriksaan BPK sebesar Rp2.840.582,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; dan
5. Kurang catat/ hasil inventarisasi baru ditemukan sebesar Rp586.585.000,00 pada Dinas Kesehatan.

Uraian mutasi kurang nilai Tanah tahun 2025 sebesar Rp3.539.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 232 Mutasi Pengurangan Nilai Tanah TA 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Mutasi Kurang:		
1	Mutasi antar Perangkat Daerah	611.000.000,00
2	Koreksi Luasan Tanah Agropolitan	2.520.000.000,00
3	Koreksi Hasil Inventarisasi Tercatat Ganda	408.000.000,00
Jumlah		**3.539.000.000,00**

Penjelasan tabel 5.232 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp611.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp305.500.000,00; dan
   b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp305.500.000,00;

2. Koreksi luasan tanah agropolitan sebesar Rp2.520.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
3. Koreksi hasil inventarisasi tercatat ganda sebesar Rp408.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun perincian penambahan dan pengurangan nilai Tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 233 Perincian Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah TA 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal		**639.883.445.532,00**
Mutasi Tambah		***1.395.962.062,00***
1	Mutasi antar Perangkat Daerah	611.000.000,00
2	Hibah dari Masyarakat	34.000.000,00
3	Hibah dari Pengembang	161.536.480,00
4	Koreksi Kurang Catat atas Pemeriksaan BPK	2.840.582,00
5	Kurang Catat/ Hasil Inventarisasi Baru Ditemukan	586.585.000,00
Mutasi Kurang		***3.539.000.000,00***
1	Mutasi antar Perangkat Daerah	611.000.000,00
2	Koreksi Luasan Tanah Agropolitan	2.520.000.000,00
3	Koreksi Hasil Inventarisasi Tercatat Ganda	408.000.000,00
Saldo Akhir		**637.740.407.594,00**

Aset tanah Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 sebanyak 1.420 bidang tanah senilai Rp637.740.407.594,00 yang terdiri dari 845 bidang tanah bersertifikat yang dapat dilihat pada lampiran 50 dan 575 bidang tanah belum bersertifikat yang dapat dilihat pada lampiran 51.

Dari 1.420 bidang tanah diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 30 bidang tanah bermasalah karena masih dikuasai oleh pihak lain dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 52. Dari 30 bidang tanah bermasalah terdapat 2 bidang tanah yaitu Eks. Rumah Dinas Bupati yang tercatat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo yang saat ini sedang dalam proses perkara hukum di Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Tanah Kawasan Arboretum Merek yang tercatat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo yang saat ini masih bermasalah dengan pihak yang mengklaim menguasai lahan tersebut. Langkah-langkah yang telah ditempuh untuk penyelamatan dua bidang Tanah tersebut dapat dilihat pada lampiran 53 dan lampiran 54.

2. Terdapat Tanah yang berasal dari Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum, perlu dilakukan penyerahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Sampai dengan tahun 2025 pengembang telah menyerahkan 5 bidang tanah dan telah tercatat pada aset Pemerintah Kabupaten Karo dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 234 Rincian Tanah PSU TA 2025

No	Tahun	Uraian	Luasan (m^2)	Nilai	Keterangan
1	2021	Perumahan Villa Regaji	1.938,00	199.614.000,00	Telah Memiliki Sertifikat
2	2021	Perumahan Nuansa Asri I	1.579,00	315.800.000,00	Telah Memiliki Sertifikat
3	2021	Perumahan Nuansa Asri II	3.091,00	751.113.000,00	Telah Memiliki Sertifikat

No	Tahun	Uraian	Luasan (m²)	Nilai	Keterangan
4	2025	Perumahan Montana Residence I	562,68	27.008.640,00	Luasan Sementara, Belum Memiliki Sertifikat
5	2025	Perumahan Genting Ersinalsal	1.333,67	137.368.422,00	Luasan Sementara, Belum Memiliki Sertifikat
Total			**8.504,35**	**1.430.904.062,00**	

Tahun 2025 terdapat sebanyak 45 bidang tanah yang akan diserahkan pengembang namun masih dalam tahap belum memenuhi persyaratan penyerahan PSU oleh Tim Pemerintah Kabupaten Karo dengan rincian yang dapat dilihat pada lampiran 55.

Dari 575 bidang tanah belum bersertifikat terdapat 54 bidang tanah dalam proses usulan permohonan untuk penerbitan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo dengan rincian yang dapat dilihat pada lampiran 56.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp521.656.762.585,67	**Rp486.891.796.904,67**

Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp521.656.762.585,67 dan Rp486.891.796.904,67. Rincian Peralatan dan Mesin per sub rincian objek dapat dilihat pada lampiran 57, sedangkan rincian Peralatan dan Mesin setiap perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 58.

Berdasarkan lampiran 57 dan lampiran 58, terdapat kenaikan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.764.965.681,00 yang merupakan akumulasi dari koreksi tambah saldo awal sebesar Rp46.417.120,00, koreksi kurang saldo awal sebesar Rp46.417.120,00, mutasi tambah sebesar Rp58.279.852.618,00 dan mutasi kurang sebesar Rp23.514.886.937,00.

Uraian koreksi tambah dan koreksi kurang saldo awal Peralatan dan Mesin sebesar Rp46.417.120,00 pada Kecamatan Tiga Panah merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan sub rincian objek barang.

Uraian mutasi tambah Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp58.279.852.618,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 235 Mutasi Penambahan Peralatan dan Mesin TA 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin:		
1	LRA APBD	36.105.417.893,00
2	LRA BLUD	699.284.432,00
3	LRA BOSP	5.341.533.333,00
4	LRA BOP	73.281.000,00
5	Reklasifikasi dari KIB C (Gedung dan Bangunan)	344.584.693,00
6	JKN	500.120.937,00
7	Mutasi antar Perangkat Daerah	3.213.244.750,00
8	Mutasi antar Perangkat Daerah (Penghapusan/Rusak Berat)	4.101.807.000,00
9	Hibah dari Kementerian	624.216.573,00
10	Jasa Konsultan Perencanaan	40.447.778,00
11	Jasa Konsultan Pengawasan	54.220.000,00
12	Hibah dari Pemprov DKI Jakarta	1.796.623.000,00
13	Hibah PT Inalum 2025	190.093.692,00
14	Hibah PT Inalum 2024	200.000.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
15	Koreksi dari Biaya Pemeliharaan	51.770.647,00
16	Kurang Catat	4.800.000,00
17	Reklasifikasi dari KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi)	3.399.116.380,00
18	Kapitalisasi Biaya Umum yang Diperhitungkan Menambah Nilai Perolehan	41.544.960,00
19	Koreksi dari Belanja Aset tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	11.766.000,00
20	Koreksi dari Persediaan	1.485.979.550,00
Jumlah		**58.279.852.618,00**

Penjelasan perincian pada tabel 5.235 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. LRA APBD sebesar Rp36.105.417.893,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 59;
2. LRA BLUD sebesar Rp699.284.432,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
3. LRA BOSP sebesar Rp5.341.533.333,00 pada Dinas Pendidikan;
4. LRA BOP sebesar Rp73.281.000,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Reklasifikasi dari KIB C (Gedung dan Bangunan) sebesar Rp344.584.693,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Kesehatan sebesar Rp125.130.879,00;
   b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp44.950.000,00; dan
   c. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp174.503.814,00;
6. JKN sebesar Rp500.120.937,00 pada Dinas Kesehatan;
7. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp3.213.244.750,00 dengan perincian sebagai berikut:
   b. Sekretariat Daerah sebesar Rp690.328.250,00;
   c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp331.710.000,00;
   d. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.475.316.500,00;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp272.400.000,00; dan
   f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp443.490.000,00;
8. Mutasi antar Perangkat Daerah (Penghapusan/Rusak Berat) sebesar Rp4.101.807.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Hibah dari Kementerian sebesar Rp624.216.573,00 pada Dinas Perhubungan;
10. Jasa konsultan perencanaan sebesar Rp40.447.778,00 dengan perincian sebagai berikut:
    b. Dinas Kesehatan sebesar Rp9.970.000,00; dan
    c. Dinas Pendidikan sebesar Rp30.477.778,00;
11. Jasa konsultan pengawasan sebesar Rp54.220.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
    b. Dinas Kesehatan sebesar Rp13.440.000,00; dan
    c. Dinas Pendidikan sebesar Rp40.780.000,00;
12. Hibah dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp1.796.623.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Hibah PT Inalum 2025 sebesar Rp190.093.692,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
14. Hibah PT Inalum 2024 sebesar Rp200.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
15. Koreksi dari biaya pemeliharaan sebesar Rp51.770.647,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp48.770.647,00; dan
    b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.000.000,00;
16. Kurang catat sebesar Rp4.800.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Reklasifikasi dari KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi) sebesar Rp3.399.116.380,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 60;
18. Kapitalisasi biaya umum yang diperhitungkan menambah nilai perolehan sebesar Rp41.544.960,00 dengan perincian sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah sebesar Rp21.224.000,00; dan
b. Dinas Perhubungan sebesar Rp20.320.960,00;

19. Koreksi dari belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp11.766.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Koreksi dari persediaan sebesar Rp1.485.979.550,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah sebesar Rp410.250.000,00;
    b. Dinas Kesehatan sebesar Rp780.000.000,00;
    c. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp124.000.000,00;
    d. Dinas Pendidikan sebesar Rp87.801.000,00;
    e. Dinas Sosial sebesar Rp2.777.600,00;
    f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp6.800.000,00;
    g. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp1.800.000,00;
    h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp12.239.100,00;
    i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp36.335.850,00; dan
    j. Dinas Komunikasi dan Infrmatika sebesar Rp23.976.000,00.

Uraian mutasi kurang nilai Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp23.514.886.937,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 236 Mutasi Pengurangan Peralatan dan Mesin TA 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin:		
1	Mutasi antar Perangkat Daerah	3.193.244.750,00
2	Mutasi antar Perangkat Daerah (Penghapusan/Rusak Berat)	4.101.807.000,00
3	Ekstrakomptabel (APBD)	1.773.846.494,00
4	Ekstrakomptabel (BOP)	7.384.000,00
5	Ekstrakomptabel (BOSP)	1.046.512.975,00
6	Reklasifikasi ke KIB B (Ekstrakomptabel)	5.400.000,00
7	Reklasifikasi ke KIB C (Gedung dan Bangunan)	335.595.192,00
8	Utang 2024 (Jasa Konsultan Pengawasan)	3.180.000,00
9	Koreksi Kesalahan Pencatatan Aset	30.920.000,00
10	Reklasifikasi ke KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi)	1.669.547.743,00
11	Reklasifikasi ke KIB E (Aset Tetap Lainnya)	21.193.704,00
12	Utang Pihak Ketiga (BK Prov)	97.152.500,00
13	Penghapusan 2025	4.101.807.000,00
14	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	479.357.128,00
15	Perubahan Kondisi Barang (Rusak Berat)	6.306.008.733,00
16	Koreksi ke Aset Tak Berwujud	48.000.000,00
17	Diserahkan ke Masyarakat	11.210.000,00
18	Koreksi ke Persediaan	281.039.718,00
19	Koreksi ke Jasa	1.680.000,00
Jumlah		**23.514.886.937,00**

Penjelasan perincian pada tabel 5.236 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp3.193.244.750,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.532.356.500,00;
    b. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp992.300.000,00;
    c. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp222.000.000,00;
    d. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp231.228.250,00;
    e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp211.960.000,00; dan

f. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp3.400.000,00;

2. Mutasi antar Perangkat Daerah (penghapusan/rusak berat) sebesar Rp4.101.807.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Sekretarian DPRD sebesar Rp1.933.800.000,00;
   b. Sekretariat Daerah sebesar Rp785.500.000,00;
   c. Dinas Kesehatan sebesar Rp404.650.000,00; dan
   d. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp977.857.000,00;
3. Ekstrakomptabel (APBD) sebesar Rp1.773.846.494,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 237 Mutasi Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin karena Ekstrakomptabel (APBN) TA 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	30.386.612,00
2	Sekretariat Daerah	78.263.178,00
3	Dinas Kesehatan	1.200.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	3.113.550,00
5	Dinas Pendidikan	1.198.253.212,00
6	Dinas Sosial	18.981.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk danKB	8.277.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.233.600,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.950.000,00
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.242.090,00
11	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	391.060,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	1.344.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	380.251.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5.960.192,00
Jumlah		**1.773.846.494,00**

4. Ekstrakomptabel (BOP) sebesar Rp7.384.000,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Ekstrakomptabel (BOSP) sebesar Rp1.046.512.975,00 pada Dinas Pendidikan;
6. Reklas ke KIB B (ekstrakomptabel) sebesar Rp5.400.000,00 pada Dinas Sosial;
7. Reklas ke KIB C (gedung dan bangunan) sebesar Rp335.595.192,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah sebesar Rp20.000.000,00;
   b. Dinas Perhubungan sebesar Rp237.642.258,00;
   c. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp57.952.934,00; dan
   d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp20.000.000,00;
8. Utang 2024 (jasa konsultan pengawasan) sebesar Rp3.180.000,00 pada Dinas Pendidikan;
9. Koreksi kesalahan pencatatan aset sebesar Rp30.920.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Kecamatan Namanteran sebesar Rp14.920.000,00;
   b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp10.000.000,00; dan
   c. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp6.000.000,00;
10. Reklas ke KIB D (jalan, jaringan dan irigasi) sebesar Rp1.669.547.743,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp469.554.500,00; dan
    b. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.199.993.243,00;
11. Reklas ke KIB E (aset tetap lainnya) sebesar Rp21.193.704,00 pada Dinas Pendidikan;
12. Utang pihak ketiga (BK Prov) sebesar Rp97.152.500,00 pada Dinas Perhubungan;

13. Penghapusan 2025 sebesar Rp4.101.807.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
14. Pembayaran utang pihak ketiga sebesar Rp479.357.128,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
15. Perubahan kondisi barang (rusak berat) sebesar Rp6.306.008.733,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Sekretariat DPRD sebesar Rp4.486.370.998,00;
    b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp36.240.000,00;
    c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp30.574.570,00;
    d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp773.673.765,00; dan
    e. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp979.149.400,00;
16. Koreksi ke aset tak berwujud sebesar Rp48.000.000,00 pada Dinas Perhubungan;
17. Diserahkan ke masyarakat sebesar Rp11.210.000,00 pada Kecamatan Kabanjahe;
18. Koreksi ke persediaan sebesar Rp281.039.718,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Kesehatan sebesar Rp17.785.225,00;
    b. Dinas Pendidikan sebesar Rp162.305.493,00;
    c. Dinas Pertanian sebesar Rp100.949.000,00; dan
19. Koreksi ke jasa sebesar Rp1.680.000,00 pada Sekretariat DPRD.

Perincian penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 61.

Berdasarkan hasil inventarisasi barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 terdapat 15 kendaraan yang hilang dan akan diproses sesuai dengan ketentuan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 238 Perincian Daftar Kendaraan Dinas Operasional Hilang TA 2025

No	Perangkat Daerah	Merk Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Tindak Lanjut
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Mitsubishi	MHMF74P57K004455	4D34TC00253	BK 8181 S	Sudah di Laporkan ke Polres Tanah Karo dan Sudah Ada Laporan Hilang dengan Nomor: STPL/ 972/XII/2015/SU/RES T. KARO tanggal 1 Desember 2015
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Honda	MH1JB811BAK566198	JB81E-1561501	BK 6545 S	Sudah di Laporkan ke Polres Tanah Karo dan Sudah Ada Laporan Hilang dengan Nomor STFL-C/713/XII/20111/SU/ RES T. KARO tanggal 15 Desember 2011
3	Puskesmas Berastagi	Yamaha	MH3SE9010G1216938	E3R4E-0284884	BK 6696 S	Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 1.2.879/Dinkes/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 yang ditujukan kepada Bupati Karo Perihal Penyampaian Laporan Kendaraan Dinas Operasional (Sepeda Motor) Hilang
4	Puskesmas Korpri	Honda	MH1HB311X5K109450	HB31E1102134	BK 6319 S	Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 1.2.879/Dinkes/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 yang ditujukan kepada Bupati Karo Perihal Penyampaian Laporan Kendaraan Dinas Operasional (Sepeda Motor) Hilang

No	Perangkat Daerah	Merk Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Tindak Lanjut
5	Puskesmas Payung	Honda	-	-	BK 4378 S	Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 1.2.879/Dinkes/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 yang ditujukan kepada Bupati Karo Perihal Penyampaian Laporan Kendaraan Dinas Operasional (Sepeda Motor) Hilang
6	Puskesmas Payung	Yamaha	MH34D72038J174191	4D71174175	BK 6484 S	Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 1.2.879/Dinkes/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 yang ditujukan kepada Bupati Karo Perihal Penyampaian Laporan Kendaraan Dinas Operasional (Sepeda Motor) Hilang
7	Puskesmas Tiganderket	Yamaha	MH3SE9010G1222946	E3R4E-0291708	BK 6700 S	Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 1.2.879/Dinkes/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 yang ditujukan kepada Bupati Karo Perihal Penyampaian Laporan Kendaraan Dinas Operasional (Sepeda Motor) Hilang
8	Puskesmas Naman Teran	Yamaha-Vega R	MH34ST2105K042167	4ST1407243	BK 6386 S	Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 1.2.879/Dinkes/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 yang ditujukan kepada Bupati Karo Perihal Penyampaian Laporan Kendaraan Dinas Operasional (Sepeda Motor) Hilang
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mitsubishi-L300	MHMLOPU39FK184680	4D56CL06170	BK 8288 S	Surat Sekretaris Daerah Kab. Karo Nomor 900/2940/BKAD/2023 tanggal 7 November 2023 Perihal Penyelesaian Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Suzuki-FU 150 SCD2A-Satria *Black Fire Edition*	MH8BG41EAEJ-366786	G427-ID-366864	BK 6627 S	Sudah di Ganti Rugi dan Sudah di Buat Permohonan Penghapusan ke Bupati
11	Satuan Polisi Pamong Praja	Honda-CRF	MH1KD1113JK049364	KD11E1048694	BK 2027 S	1. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ke Bupati Karo Nomor 900/1630/Satpol-PP/2026 tanggal 24 November 2025 Perihal Laporan Kehilangan BMD 1 Unit Sepeda Motor (BK 2027 S) 2. Surat Kepala Satuan Polisi pamong Praja ke Pengelola Barang Nomor 900/070/Satpol-PP/2026 tanggal 15 Januari 2026 (BK 2027 S)
12	Dinas Pertanian	Honda-NF12A1CM/T	JBF11XBK011520	JBF1E1011216	BK 6564 S	Telah di Surati ke Samsat dan Nilai Ganti Rugi (TGR) Terlalu Besar Sehingga Pihak Pemegang Kendaraan Tersebut Meminta untuk Pengurangan Nilai Ganti Rugi.
13	Dinas Pertanian	Suzuki-Shogun	MH8BF45CABJ154877	F4961D275258	B 6250 SQR	
14	Dinas Pertanian	Yamaha-256 Jupiter-MX	MH32S60017K170549	3S6170716	BK 6344 S	

No	Perangkat Daerah	Merk Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Tindak Lanjut
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Honda	MH1JF6115CK442224	JF61E1436650	BK 6577 S	1. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12/897/Disdukcapil/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Deddy Santara Surbakti Perihal Konfirmasi Penyelesaian Kehilangan Kendaraan Dinas 2. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12/210/Disdukcapil/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang ditujukan kepada Deddy Santara Surbakti Perihal Konfirmasi Penyelesaian Kehilangan Kendaraan Dinas

Dinas Pendidikan Kabupaten Karo menerima revitalisasi aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp697.600.984,00 yang terdapat pada 2 TK Negeri dan 2 SMP Negeri namun belum dicatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Karo karena belum ada BAST, dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 62.

Selanjutnya terdapat Aset Digitalisasi atau *Interactive Flat Panel* (IFP) pada Dinas Pendidikan yang di hibahkan oleh Kemendikdasmen ke 425 satuan pendidikan yang terdiri dari 80 PAUD, 274 Sekolah Dasar dan 71 Sekolah Menengah Pertama dimana BAST dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan belum diserahkan sampai dengan laporan ini diterbitkan. Selain itu, Satuan Pendidikan juga belum mengetahui nilai aset yang dihibahkan oleh Kemendikdasmen. Rincian Satuan Pendidikan penerima IFP pada Dinas Pendidikan tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 63.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp912.129.065.001,70	**Rp883.795.231.952,53**

Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp912.129.065.001,70 dan Rp883.795.231.952,53. Perincian Gedung dan Bangunan per sub rincian objek dapat dilihat pada lampiran 64, sedangkan perincian Gedung dan Bangunan setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 65.

Berdasarkan lampiran 64 dan lampiran 65, terdapat kenaikan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.333.833.049,17 yang merupakan akumulasi dari mutasi tambah sebesar Rp71.130.161.523,00 dan mutasi kurang sebesar Rp42.796.328.473,83.

Uraian mutasi tambah nilai Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp71.130.161.523,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 239 Mutasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan TA 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan:		
1	LRA APBD	46.986.998.560,00
2	Mutasi antar Perangkat Daerah	2.425.099.609,00
3	Kurang Catat	56.305.000,00
4	Kapitalisasi Biaya Umum yang Diperhitungkan Menambah Nilai Perolehan	297.408.216,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
5	Mutasi antar Perangkat daerah (Penghapusan Rusak Berat)	1.548.260.000,00
6	Reklasifikasi dari KIB B (Peralatan dan Mesin)	315.595.192,00
7	Biaya Pemeliharaan	15.847.161.065,00
8	Revitalisasi	80.097.000,00
9	Jasa Konsultan Perencanaan	790.099.501,00
10	Jasa Konsultan Pengawasan	1.577.060.181,00
11	Koreksi Kurang Catat atas Temuan BPK 2024	822.273.000,00
12	Reklasifikasi dari KIB D	186.224.199,00
13	Koreksi dari Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	197.580.000,00
Jumlah		**71.130.161.523,00**

Penjelasan perincian pada tabel 5.239 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. LRA APBD sebesar Rp46.986.998.560,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp167.800.000,00;
   b. Kecamatan Tiga Binanga sebesar Rp9.950.120,00;
   c. Dinas Perhubungan sebesar Rp527.228.179,00;
   d. Dinas Kesehatan sebesar Rp14.881.802.278,00;
   e. Dinas Pendidikan sebesar Rp18.454.277.200,00;
   f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp44.950.000,00;
   g. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp74.587.560,00;
   h. Dinas Lingkungan hidup sebesar Rp190.000.000,00;
   i. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp2.679.114.314,00; dan
   j. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp9.957.288.909,00;
2. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp2.425.099.609,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah sebesar Rp293.088.425,00;
   b. Dinas Pertanian sebesar Rp74.199.999,00;
   c. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp489.513.912,00; dan
   d. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.568.297.273,00;
3. Kurang catat sebesar Rp56.305.000,00 pada Dinas Kesehatan;
4. Kapitalisasi biaya umum yang diperhitungkan menambah nilai perolehan sebesar Rp297.408.216,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Perhubungan sebesar Rp51.974.035,00;
   b. Dinas Pendidikan sebesar Rp198.449.881,00;
   c. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp25.350.000,00;
   d. Dinas Kebudayaan, Pemudan dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp900.000,00; dan
   e. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp20.734.300,00;
5. Mutasi antar Perangkat Daerah (penghapusan/rusak berat) sebesar Rp1.548.260.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Reklasifikasi dari KIB B (peralatan dan mesin) sebesar Rp315.595.192,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah sebesar Rp20.000.000,00;
   b. Dinas Perhubungan sebesar Rp237.642.258,00; dan
   c. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp57.952.934,00;
7. Biaya pemeliharaan sebesar Rp15.847.161.065,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 240 Mutasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan karena Biaya Pemeliharaan TA 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	592.694.770,00
2	Sekretariat Daerah	1.602.710.600,00
3	Kecamatan Simpang Empat	29.970.800,00

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
4	Kecamatan Tiga Panah	66.812.000,00
5	Dinas Kesehatan	184.720.000,00
6	Dinas Pendidikan	7.636.424.200,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	109.550.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74.199.999,00
9	Dinas Pertanian	67.872.749,00
10	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	49.378.600,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.085.916.066,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	100.740.000,00
13	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	986.727.282,00
14	Badan Penangulangan Bencana Daerah	79.999.999,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	179.444.000,00
Jumlah		**15.847.161.065,00**

8. Revitalisasi sebesar Rp80.097.000,00 pada Dinas Pendidikan;
9. Jasa konsultan perencanaan sebesar Rp790.099.501,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp5.100.000,00;
   b. Dinas Kesehatan sebesar Rp82.035.530,00;
   c. Dinas Pendidikan sebesar Rp554.400.000,00;
   d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp3.280.000,00;
   e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp101.438.862,00;
   f. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp30.940.684,00; dan
   g. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp12.904.425,00;
10. Jasa konsultan pengawasan sebesar Rp1.577.060.181,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp8.390.000,00;
   b. Dinas Kesehatan sebesar Rp475.462.075,00;
   c. Dinas Pendidikan sebesar Rp659.748.900,00;
   d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp5.475.000,00;
   e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp160.980.800,00;
   f. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp79.890.706,00; dan
   g. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp187.112.700,00;
11. Koreksi kurang catat atas temuan BPK 2024 sebesar Rp822.273.000,00 pada Dinas Pendidikan;
12. Reklas dari KIB D (jalan, jaringan dan irigasi) sebesar Rp186.224.199,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp149.724.200,00;
   b. Dinas Pehubungan sebesar Rp36.499.999,00; dan
13. Koreksi dari belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan sebesar Rp197.580.000,00 pada Dinas Perhubungan.

Uraian mutasi kurang nilai Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp42.796.328.473,83 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 241 Mutasi Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan TA 2025

No	Uraian	(Rp)
Mutasi Kurang:		
1	Mutasi antar Perangkat Daerah	2.425.099.609,00
2	Mutasi antar Perangkat Daerah (Penghapusan/Rusak Berat)	1.548.260.000,00

No	Uraian	(Rp)
3	Penghapusan	1.548.260.000,00
4	Koreksi Pengurangan Revitalisasi	80.097.000,00
5	Ekstrakompabel	9.950.120,00
6	Reklas ke KIB B (Peralatan dan Mesin)	344.584.693,00
7	Reklas ke KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi)	6.575.937.759,00
8	Utang Pihak Ketiga	793.316.000,00
9	TGR 2025	68.712.919,83
10	Reklasifikasi ke KDP	29.125.350.373,00
11	Utang 2024 Jasa Konsultan Perencanaan	120.080.000,00
12	Utang 2024 Jasa Konsultan Pengawasan	156.680.000,00
Jumlah		**42.796.328.473,83**

Penjelasan perincian pada tabel 5.241 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp2.425.099.609,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Perhubungan sebesar Rp489.513.912,00;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp74.199.999,00;
   c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.568.297.273,00;
   d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp100.740.000,00; dan
   e. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp192.348.425,00;
2. Mutasi antar Perangkat Daerah (penghapusan/rusak berat) sebesar Rp1.548.260.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
3. Penghapusan sebesar Rp1.548.260.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Koreksi pengurangan revitalisasi sebesar Rp80.097.000,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Ekstrakomptabel sebesar Rp9.950.120,00 pada Kecamatan Tiga Binanga;
6. Reklasifikasi ke KIB B (Peralatan dan Mesin) sebesar Rp344.584.693,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Kesehatan sebesar Rp125.130.879,00;
   b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp44.950.000,00; dan
   c. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp174.503.814,00;
7. Reklasifikasi ke KIB D (jalan, jaringan dan irigasi) sebesar Rp6.575.937.759,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp2.079.856.314,00;
   b. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.331.773.200,00;
   c. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.539.251.540,00; dan
   d. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp625.056.705,00;
8. Utang pihak ketiga sebesar Rp793.316.000,00 pada Dinas Pendidikan;
9. TGR 2025 sebesar Rp68.712.919,83 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Kesehatan sebesar Rp10.529.875,03; dan
   b. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp58.183.044,80;
10. Reklasifikasi ke KDP sebesar Rp29.125.350.373,00 pada Dinas Kesehatan;
11. Utang 2024 jasa konsultan perencanaan sebesar Rp120.080.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Pendidikan sebesar Rp98.780.000,00; dan
    b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp21.300.000,00;
12. Utang 2024 jasa konsultan pengawasan sebesar Rp156.680.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Pendidikan sebesar Rp121.930.000,00; dan
    b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp34.750.000,00.

Perincian penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 66.

Dinas Pendidikan Kabupaten Karo menerima revitalisasi aset Gedung dan Bangunan dari Kemendikdasmen namun belum dicatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Karo karena belum ada BAST sebesar Rp4.607.847.806,00 yang terdapat pada 3 TK Negeri, 2 SD Negeri dan 3 SMP Negeri, dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 67.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp2.469.292.002.239,51	**Rp2.232.811.830.415,10**

Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.469.292.002.239,51 dan Rp2.232.811.830.415,10. Perincian Jalan, Jaringan dan Irigasi per sub rincian objek dapat dilihat pada lampiran 68, sedangkan perincian Jalan, Jaringan dan Irigasi setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 69.

Berdasarkan lampiran 68 dan lampiran 69 terdapat kenaikan nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp236.480.171.824,41 yang merupakan akumulasi dari mutasi tambah sebesar Rp244.136.753.122,28 dan mutasi kurang sebesar Rp7.656.581.297,87.

Uraian mutasi tambah nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp244.136.753.122,28 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 242 Mutasi Penambahan Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025

No	Uraian	(Rp)
Mutasi Tambah:		
1	LRA APBD	47.329.012.466,00
2	Hibah Kementrian	180.399.036.102,00
3	Mutasi antar Perangkat Daerah	398.194.494,00
4	Kurang Catat	1.350.700.000,00
5	Koreksi dari Belanja Pemeliharaan	258.218.100,00
6	Jasa Konsultan Perencanaan	332.738.607,00
7	Jasa Konsultan Pengawasan	469.096.362,00
8	Koreksi dari Persediaan	487.394.494,00
9	Reklasifikasi dari KIB B (Peralatan dan Mesin)	1.669.547.743,00
10	Reklasifikasi dari KIB C (Gedung dan Bangunan)	6.575.937.759,00
11	Koreksi dari Aset Non Operasional	758.376.430,00
12	Koreksi Kurang Catat Temuan BPK Tahun 2024	289.536.000,00
13	Koreksi dari KDP 2024	1.306.980.147,11
14	Hibah dari Pengembang	33.970.711,80
15	Koreksi Kurang Catat atas Pemeriksaan BPK Tahun 2025	572.378.096,37
16	Kapitalisasi Biaya Umum yang Diperhitungkan Menambah Nilai Perolehan	1.905.635.610,00
Jumlah		**244.136.753.122,28**

Penjelasan perincian pada tabel 5.242 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. LRA APBD sebesar Rp47.329.012.466,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp2.376.792.656,00;
   b. Kecamatan Berastagi sebesar Rp2.831.198.000,00;
   c. Kecamatan Tiga Binanga sebesar Rp687.224.756,00;
   d. Kecamatan Kutabuluh sebesar Rp27.500.000,00;
   e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp39.716.059.325,00;
   f. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.034.730.729,00;
   g. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp368.000.000,00; dan
   h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp287.507.000,00;

2. Hibah Kementerian sebesar Rp180.399.036.102,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp178.426.098.783,00; dan
   b. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.972.937.319,00;
3. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp398.194.494,00 pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata;
4. Kurang catat sebesar Rp1.350.700.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
5. Koreksi dari belanja pemeliharaan sebesar Rp258.218.100,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp88.368.100,00; dan
   b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp169.850.000,00;
6. Jasa konsultan perencanaan sebesar Rp332.738.607,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp70.386.000,00;
   b. Kecamatan Berastagi sebesar Rp73.320.000,00;
   c. Kecamatan Tiga Binanga sebesar Rp11.800.000,00;
   d. Dinas Kesehatan sebesar Rp11.266.500,00;
   e. Dinas Pendidikan sebesar Rp70.222.222,00;
   f. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp83.222.816,00; dan
   g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp12.521.069,00;
7. Jasa konsultan pengawasan sebesar Rp469.096.362,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp114.617.000,00;
   b. Kecamatan Berastagi sebesar Rp73.320.000,00;
   c. Kecamatan Tiga Binanga sebesar Rp11.684.886,00;
   d. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp50.000.000,00;
   e. Dinas Kesehatan sebesar Rp19.036.500,00;
   f. Dinas Pendidikan sebesar Rp84.557.200,00;
   g. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp95.881.776,00; dan
   h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp19.999.000,00;
8. Koreksi dari persediaan sebesar Rp487.394.494,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp89.200.000,00;dan
   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp398.194.494,00;
9. Reklasifikasi dari KIB B (peralatan dan mesin) sebesar Rp1.669.547.743,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp469.554.500,00; dan
   b. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.199.993.243,00;
10. Reklasifikasi dari KIB C (gedung dan bangunan) sebesar Rp6.575.937.759,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.539.251.540,00;
    b. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.331.773.200,00;
    c. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp2.079.856.314,00; dan
    d. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp625.056.705,00;
11. Koreksi dari aset non operasional sebesar Rp758.376.430,00 pada Kecamatan Tiga Binanga;
12. Koreksi kurang catat temuan BPK tahun 2024 sebesar Rp289.536.000,00 pada Dinas Pendidikan;
13. Koreksi dari KDP 2024 sebesar Rp1.306.980.147,11 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
14. Hibah dari pengembang sebesar Rp33.970.711,80 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;

15. Koreksi kurang catat atas pemeriksaan BPK tahun 2025 sebesar Rp572.378.096,37 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
16. Kapitalisasi biaya umum yang diperhitungkan menambah nilai perolehan sebesar Rp1.905.635.610,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.858.155.775,00;
    b. Dinas Pendidikan sebesar Rp45.679.835,00; dan
    c. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp1.800.000,00.

Uraian mutasi kurang nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp7.656.581.297,87,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 243 Mutasi Pengurangan Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025

No	Uraian	(Rp)
Mutasi Kurang:		
1	Mutasi antar Perangkat Daerah	398.194.494,00
2	Reklasifikasi ke KIB B (Peralatan dan Mesin)	3.393.716.380,00
3	Reklasifikasi ke KIB C (Gedung dan Bangunan)	186.224.199,00
4	Utang 2024 (Jasa Konsultan Perencanaan)	28.000.000,00
5	Utang 2024 (Jasa Konsultan Pengawasan)	23.600.000,00
6	Reklasifikasi ke KIB B (Ekstrakomptabel)	5.400.000,00
7	Utang Pihak Ketiga	3.294.642.039,00
8	Pengembalian TGR 2025	188.354.185,87
9	Diserahkan ke Masyarakat	130.000.000,00
10	Koreksi ke Barang dan Jasa	8.450.000,00
Jumlah		**7.656.581.297,87**

Penjelasan perincian pada tabel 5.243 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp398.194.494,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Reklasifikasi ke KIB B (peralatan dan mesin) sebesar Rp3.393.716.380,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 70;
3. Reklasifikasi ke KIB C (gedung dan bangunan) sebesar Rp186.224.199,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp149.724.200,00; dan
    b. Dinas Perhubungan sebesar Rp36.499.999,00;
4. Utang 2024 (jasa konsultan perencanaan) sebesar Rp28.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Utang 2024 (jasa konsultan pengawasan) sebesar Rp23.600.000,00 pada Dinas Pendidikan;
6. Reklasifikasi ke KIB B (ekstrakomptabel) sebesar Rp5.400.000,00 pada Dinas Sosial;
7. Utang pihak ketiga sebesar Rp3.294.642.039,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp2.741.091.739,00; dan
    b. Dinas Perhubungan sebesar Rp553.550.300,00;
8. Pengembalian TGR 2025 sebesar Rp188.354.185,87 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp181.031.337,68; dan
    b. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp7.322.848,19;
9. Diserahkan ke masyarakat sebesar Rp130.000.000,00 pada Kecamatan Kabanjahe;
10. Koreksi ke barang dan jasa sebesar Rp8.450.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp7.950.000,00; dan
    b. Kecamatan Tiga Panah sebesar Rp500.000,00.

Perincian penambahan dan pengurangan nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 71.

Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp2.469.292.002.239,51 diantaranya berupa Jalan, Jaringan dan irigasi yang berasal dari Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum, perlu dilakukan penyerahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Perincian PSU Jalan, Jaringan dan Irigasi yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karo dapat dilihat pada lampiran 72.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp120.854.286.219,00	**Rp111.413.949.841,00**

Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp120.854.286.219,00 dan Rp111.413.949.841,00. Perincian Aset Tetap Lainnya per sub rincian objek dapat dilihat pada lampiran 73.

Berdasarkan pada lampiran 73, pada tahun 2025 terdapat penambahan Aset Tetap Dalam Renovasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp85.294.160,00 yang merupakan pemeliharaan Sapo Angin yang terletak di Berastagi melalui program CSR PT Bank Sumut sesuai dengan BAST Hasil Pekerjaan Nomor 1011/PPK-BGBK/PUTR/2025 tanggal 31 Desember 2025 sehingga total Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp2.345.990.505,00. Aset tersebut berdiri di atas jalan nasional yang dikuasai oleh Balai Jalan Nasional.

Adapun perincian Aset Tetap Lainnya setiap perangkat daerah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5. 244 Perincian Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024

No	Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sekretariat DPRD	105.650.220,00	105.650.220,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	254.478.375,00	254.478.375,00	0,00
3	Kecamatan Kabanjahe	13.921.000,00	13.921.000,00	0,00
4	Kecamatan Munte	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.345.990.505,00	2.260.696.345,00	85.294.160,00
6	Dinas Kesehatan	4.268.000,00	4.268.000,00	0,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah	7.375.000,00	7.375.000,00	0,00
8	Dinas Pendidikan	115.440.727.167,00	106.277.034.949,00	9.163.692.218,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.900.900,00	3.900.900,00	0,00
10	Dinas Pertanian	22.015.400,00	22.015.400,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	113.480.000,00	113.480.000,00	0,00
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
13	Inspektorat Daerah	43.158.935,00	43.158.935,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	549.562.800,00	549.562.800,00	0,00
15	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	152.636.135,00	152.636.135,00	0,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.005.000,00	49.005.000,00	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.724.856.782,00	1.533.506.782,00	191.350.000,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Jumlah		**120.854.286.219,00**	**111.413.949.841,00**	**9.440.336.378,00**

Berdasarkan pada lampiran 73 dan tabel 5.244, terdapat kenaikan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.440.336.378,00 yang merupakan akumulasi dari mutasi tambah dengan perincian sebagai berikut:

1. LRA APBD sebesar Rp191.350.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip;
2. LRA BOSP sebesar Rp9.142.498.514,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Program *Coorporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp85.294.160,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
4. Reklasifikasi ke KIB B (Peralatan dan Mesin) Sebesar Rp21.193.704,00 Pada Dinas Pendidikan.

Perincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5. 245 Perincian Kenaikan Aset Tetap Lainnya TA 2025

No	Uraian	(Rp)
Saldo Awal		**111.413.949.841,00**
Mutasi Tambah		***9.440.336.378,00***
1	LRA APBD	191.350.000,00
2	LRA BOSP	9.142.498.514,00
3	Program Coorporate Social Responsibility (CSR)	85.294.160,00
4	Reklas ke KIB B	21.193.704,00
Mutasi Kurang		***0,00***
Saldo Akhir		**120.854.286.219,00**

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, pada saat pemeriksaan pada Satuan Pendidikan ditemukan bahwa terdapat buku yang sudah tidak lagi digunakan dalam operasional pembelajaran dikerenakan perbedaan kurikulum pembelajaran. Atas kondisi tersebut, tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Karo akan melakukan inventarisasi buku yang sudah tidak lagi digunakan dalam operasional pembelajaran untuk memastikan kondisi dan/atau pemanfaatannya dalam rangka penertiban Aset Tetap Lainnya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mengadakan pembelian induk ikan guna meningkatkan produktivitas benih ikan unggul yang dihasilkan oleh UPTD Balai Benih Ikan Singgamanik. Berdasarkan informasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, diketahui bahwa sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2025 sering terjadi kematian ikan massal yang disebabkan oleh bakteri *stretococcus.* Atas kondisi tersebut, sampai dengan saat ini penyesuaian saldo Aset Tetap Lainnya atas kematian ikan tersebut belum dilakukan. Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Karo akan melakukan inventarisasi kembali untuk memastikan jumlah ikan yang masih hidup.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp29.072.648.637,04	**Rp1.306.980.147,11**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp29.072.648.637,04 dan Rp1.306.980.147,11 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 246 Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	29.072.648.637,04	0,00	29.072.648.637,04

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	1.306.980.147,11	(1.306.980.147,11)
Jumlah		**29.072.648.637,04**	**1.306.980.147,11**	**27.765.668.489,93**

Berdasarkan pada tabel 5.246 di atas terdapat kenaikan nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp27.765.668.489,93 yang merupakan akumulasi dari mutasi tambah sebesar Rp29.125.350.373,00 dan mutasi kurang sebesar Rp1.359.681.883,07.

Uraian mutasi tambah sebesar Rp29.125.350.373,00 merupakan reklasifikasi dari KIB C (gedung dan bangunan) dengan perincian sebagai berikut:

1. Ruang Poli Rawat Jalan sebesar Rp9.576.273.182,00 pada Dinas Kesehatan;
2. Ruang IGD sebesar Rp9.150.874.691,00 pada Dinas Kesehatan; dan
3. Ruang Poli Rawat Inap sebesar Rp10.398.202.500,00 pada Dinas Kesehatan.

Uraian mutasi kurang sebesar Rp1.359.681.883,07 dengan perincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke jalan kabupaten sebesar Rp1.306.980.147,11 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
2. TGR sebesar Rp52.701.735,96 pada Dinas Kesehatan.

Perincian penambahan dan pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5. 247 Perincian Penambahan dan Pengurangan Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan TA 2025

No	Uraian	(Rp)
Saldo Awal		**1.306.980.147,11**
Mutasi Tambah		***29.125.350.373,00***
1	Reklasifikasi dari KIB C (Gedung dan Bangunan)	29.125.350.373,00
Mutasi Kurang		***1.359.681.883,07***
1	Reklasifikasi ke Jalan Kabupaten	1.306.980.147,11
1	TGR	52.701.735,96
Saldo Akhir		**29.072.648.637,04**

Perincian Konstruksi Dalam Pengerjaan setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 74.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp2.145.156.747.332,24)	**(Rp1.978.328.337.555,34)**

Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp2.145.156.747.332,24 dan minus Rp1.978.328.337.555,34 dengan perincian sebagai berikut ini:

Tabel 5. 248 Akumulasi Penyusutan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(445.438.527.737,23)	(416.959.899.397,80)	(28.478.628.339,43)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(254.316.007.304,99)	(236.980.149.301,86)	(17.335.858.003,13)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.445.402.212.290,02)	(1.324.388.288.855,68)	(121.013.923.434,34)
Jumlah		**(2.145.156.747.332,24)**	**(1.978.328.337.555,34)**	**(166.828.409.776,90)**

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp445.438.527.737,23)	**(Rp416.959.899.397,80)**

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp445.438.527.737,23 dan minus Rp416.959.899.397,80. Perincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per sub rincian objek dapat dilihat pada lampiran 75, sedangkan perincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 76.

Berdasarkan lampiran 75 dan lampiran 76, terdapat penurunan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar minus Rp28.478.628.339,43 yang merupakan akumulasi dari koreksi tambah saldo awal tahun 2024 sebesar minus Rp2.219.752.548,25 dan koreksi kurang saldo awal tahun 2024 sebesar Rp1.856.860.233,61 serta mutasi tambah sebesar minus Rp5.631.335.186,16, mutasi kurang sebesar Rp13.534.000.847,32 dan beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar minus Rp36.018.401.685,95.

Uraian koreksi tambah saldo awal tahun 2024 dan mutasi tambah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 249 Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2025

No	Uraian	(Rp)
Koreksi Tambah Saldo Awal:		***(2.219.752.548,25)***
1	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.219.752.548,25)
Mutasi Tambah:		***(5.631.335.186,16)***
1	Mutasi antar SKPD	(2.871.459.035,71)
2	Penyusutan Hibah	(14.285.714,00)
3	Kurang Catat	(4.800.000,00)
4	Hibah dari Pemprov. DKI Jakarta	(1.796.623.000,00)
5	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(760.814.678,00)
6	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5.005.235,16)
7	Hibah dari Kementerian	(178.347.523,29)
Jumlah		**(7.851.087.734,41)**

Penjelasan tabel 5.249 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koreksi tambah saldo awal karena reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp2.219.752.548,25 dapat dilihat pada lampiran 77;
2. Mutasi antar SKPD sebesar minus Rp2.871.459.035,71 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah sebesar minus Rp690.328.250,00;
   b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar minus Rp331.710.000,00;
   c. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar minus Rp1.133.530.785,71;
   d. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar minus Rp272.400.000,00; dan

e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar minus Rp443.490.000,00;
3. Penyusutan hibah sebesar minus Rp14.285.714,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
4. Kurang Catat sebesar minus Rp4.800.000,00 pada Badan Penangulangan Bencana Daerah;
5. Hibah dari Pemprov DKI Jakarta sebesar minus Rp1.796.623.0000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar minus Rp760.814.678,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 78;
7. Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar minus Rp5.005.235,16 pada Dinas Kesehatan; dan
8. Hibah dari Kementerian sebesar minus Rp178.347.523,29 pada Dinas Perhubungan.

Uraian mutasi kurang akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp13.534.000.847,32 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 250 Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2025

No	Uraian	(Rp)
Koreksi Kurang pada Saldo Awal		***1.856.860.233,61***
1	Koreksi Masa Manfaat atas Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.856.860.233,61
Mutasi Kurang:		***13.534.000.847,32***
1	Mutasi antar SKPD	2.871.459.035,71
2	Mutasi antar SKPD (Penghapusan)	3.549.292.714,29
3	Koreksi Kesalahan Pencatatan Aset	30.920.000,00
4	Koreksi ke Aset Tak Berwujud	48.000.000,00
5	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00
6	Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	469.554.500,00
7	Ekstrakomptabel (Koreksi Pencatatan)	389.526.000,00
8	Perubahan Kondisi Barang (Rusak Berat)	6.155.248.597,32
Jumlah		**15.390.861.080,93**

Penjelasan tabel 5.250 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koreksi kurang saldo awal karena koreksi masa manfaat atas reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.856.860.233,61 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah sebesar Rp9.800.000,00;
   b. Kecamatan Berastagi sebesar Rp1.877.310,00;
   c. Dinas Perhubungan sebesar Rp352.500,00;
   d. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.531.371.379,74;
   e. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp86.030.100,99;
   f. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp0,01;
   g. Inspektorat Daerah sebesar Rp186.385.714,29;
   h. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp4.391.550,00;
   i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp23.600.000,00;
   j. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp2.748.428,58;
   k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.385.000,00; dan
   l. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp7.918.250,00;
2. Mutasi antar SKPD sebesar Rp2.871.459.035,71 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.190.570.785,71;

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp992.300.000,00;
c. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp222.000.000,00;
d. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp231.228.250,00;
e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp211.960.000,00;
f. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp3.400.000,00; dan
g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp20.000.000,00.

3. Mutasi antar SKPD (Penghapusan) sebesar Rp3.549.292.714,29 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Sekretariat DPRD sebesar Rp1.381.285.714,29;
   b. Sekretariat Daerah sebesar Rp785.500.000,00;
   c. Dinas Kesehatan sebesar Rp404.650.000,00; dan
   d. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 977.857.000,00;
4. Koreksi kesalahan pencatatan aset sebesar Rp30.920.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Kecamatan Namanteran sebesar Rp14.920.000,00;
   b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp10.000.000,00; dan
   c. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp6.000.000,00.
5. Koreksi ke aset tak berwujud sebesar Rp48.000.000,00 pada Dinas Perhubungan;
6. Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;
7. Reklasifikasi ke akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp469.554.500,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
8. Ekstrakomptabel (koreksi pencatatan) sebesar Rp 389.526.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Sosial sebesar Rp1.775.000,00;
   b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp7.500.000,00; dan
   c. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp380.251.000,00;
9. Perubahan kondisi barang (rusak berat) sebesar Rp6.155.248.597,32 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Sekretariat DPRD sebesar Rp4.337.482.886,00;
   b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp36.240.000,00;
   c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp30.012.070,00;
   d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp772.364.241,32; dan
   e. Dinas Komunkasi dan Informatika sebesar Rp979.149.400,00.

Perincian penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5. 251 Perincian Penurunan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal		**(416.959.899.397,80)**
Koreksi Tambah pada Saldo Awal		***(2.219.752.548,25)***
Koreksi Kurang pada Saldo Awal		***1.856.860.233,61***
Mutasi Tambah:		***(5.631.335.186,16)***
1	Mutasi antar SKPD	(2.871.459.035,71)
2	Penyusutan Hibah	(14.285.714,00)
3	Kurang Catat	(4.800.000,00)
4	Hibah dari Pemprov. DKI Jakarta	(1.796.623.000,00)
5	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(760.814.678,00)

No	Uraian	Nilai (Rp)
6	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5.005.235,16)
7	Hibah dari Kementrian	(178.347.523,29)
Mutasi Kurang:		***13.534.000.847,32***
1	Mutasi antar SKPD	2.871.459.035,71
2	Mutasi antar SKPD (Penghapusan)	3.549.292.714,29
3	Koreksi Kesalahan Pencatatan Aset	30.920.000,00
4	Koreksi ke Aset Tak Berwujud	48.000.000,00
5	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00
6	Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	469.554.500,00
7	Ekstrakomptabel (Koreksi Pencatatan)	389.526.000,00
8	Perubahan Kondisi Barang (Rusak Berat)	6.155.248.597,32
Penyusutan Tahun Berjalan		***(36.018.401.685,95)***
Saldo Akhir		**(445.438.527.737,23)**

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp254.316.007.304,99)	**(Rp236.980.149.301,86)**

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp254.316.007.304,99 dan minus Rp236.980.149.301,86. Perincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per sub rincian objek dapat dilihat pada lampiran 79, sedangkan perincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 80.

Berdasarkan pada lampiran 79 dan lampiran 80, terdapat terdapat kenaikan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar minus Rp17.335.858.003,13 yang merupakan akumulasi dari koreksi tambah saldo awal tahun 2024 sebesar minus Rp3.378.300,00 dan koreksi kurang saldo awal tahun 2024 sebesar Rp11.749.821,32 serta mutasi tambah sebesar Rp1.007.611.826,50, mutasi kurang sebesar Rp2.245.643.092,64, dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar minus Rp18.582.260.790,59.

Uraian koreksi tambah saldo awal tahun 2024 dan mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 252 Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi Tambah Saldo Awal		***(3.378.300,00)***
Mutasi Tambah:		***(1.007.611.826,50)***
1	Koreksi ke Rumah Negara Daerah Gol I	(78.582.582,82)
2	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	(29.944.840,00)
3	Tuntutan Ganti Rugi	(1.374.258,39)
4	Koreksi Beban Penyusutan 2025	(582.737.239,84)
5	Kurang Pencatatan	(314.972.905,45)
JUMLAH		***(1.010.990.126,50)***

Penjelasan mutasi penambahan sebagaimana tersaji pada tabel 5.252 di atas, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Koreksi tambah saldo awal sebesar Rp3.378.300,00 karena penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berupa rumah dinas dokter pada Dinas Kesehatan tahun 2022 sampai dengan 2024;
2. Koreksi ke rumah negara daerah gol I pada Dinas Kesehatan sebesar minus Rp78.582.582,82;

3. Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan sebesar minus Rp29.944.840,00;
4. Tuntutan Ganti Rugi sebesar minus Rp1.374.258,39 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Kesehatan sebesar minus Rp210.597,50; dan
   b. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar minus Rp1.163.660,89;
5. Koreksi Beban Penyusutan 2025 pada Dinas Kesehatan sebesar minus Rp582.737.239,84; dan
6. Kurang Pencatatan pada Dinas Pendidikan sebesar minus Rp314.972.905,45.

Selanjutnya, uraian koreksi kurang saldo awal 2024 dan mutasi kurang akumulasi penyusutan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 253 Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi Kurang pada Saldo Awal		***11.749.821,32***
Mutasi Kurang:		***2.245.643.092,64***
1	Mutasi Antar Perangkat Daerah (Penghapusan)	433.512.800,00
2	Koreksi Pencatatan	1.096.612.214,81
3	Koreksi Penyusutan	617.944.943,46
4	Koreksi Ke gedung Tempat Tinggal Lainnya	71.312.430,98
5	Koreksi Ke Pagar	4.353.441,56
6	Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.005.235,16
7	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	2.916.710,28
8	Tuntutan Ganti Rugi	1.374.258,39
9	Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.611.058,00
Jumlah		***2.257.392.913,96***

Penjelasan mutasi pengurangan sebagaimana tersaji pada tabel 5.253 di atas, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Koreksi kurang saldo awal sebesar Rp11.749.821,32 merupakan koreksi atas penghapusan pagar tahun 2023 pada Kecamatan Mardingding karena sudah dikapitalisasi ke aset induk pagar tahun 2018;
2. Mutasi Antar SKPD (Penghapusan) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp433.512.800,00;
3. Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.096.612.214,81 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Sekretariat DPRD sebesar Rp733.120.411,43; dan
   b. Dinas Kesehatan sebesar Rp363.491.803,38;
7. Koreksi Penyusutan sebesar Rp617.944.943,46 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp35.437.936,00; dan
   b. Dinas Kesehatan Rp582.507.007,46;
8. Koreksi Ke Gedung Tempat Tinggal Lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp71.312.430,98;
9. Koreksi Ke Pagar pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.353.441,56;
10. Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.005.235,16;
11. Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.916.710,28;
12. Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp1.374.258,39 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Dinas Kesehatan sebesar Rp210.597,50;

b. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp1.163.660,89; dan

13. Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp12.611.058,00.

Perincian penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5. 254 Perincian Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal		**(236.980.149.301,86)**
Koreksi Tambah pada Saldo Awal		***(3.378.300,00)***
Koreksi Kurang pada Saldo Awal		***11.749.821,32***
Mutasi Tambah:		***(1.007.611.826,50)***
1	Koreksi ke Rumah Negara Daerah Gol I	(78.582.582,82)
2	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(29.944.840,00)
3	Tuntutan Ganti Rugi	(1.374.258,39)
4	Koreksi Beban Penyusutan 2025	(582.737.239,84)
5	Kurang Pencatatan	(314.972.905,45)
Mutasi Kurang:		***2.245.643.092,64***
1	Mutasi Antar Perangkat Daerah (Penghapusan)	433.512.800,00
2	Koreksi Pencatatan	1.096.612.214,81
3	Koreksi Penyusutan	617.944.943,46
4	Koreksi ke Gedung Tempat Tinggal Lainnya	71.312.430,98
5	Koreksi Ke Pagar	4.353.441,56
6	Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.005.235,16
7	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	2.916.710,28
8	Tuntutan Ganti Rugi	1.374.258,39
9	Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.611.058,00
Penyusutan Tahun Berjalan		***(18.582.260.790,59)***
Saldo Akhir		**(254.316.007.304,99)**

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Neraca

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp1.445.402.212.290,02)	**(Rp1.324.388.288.855,68)**

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp1.445.402.212.290,02 dan minus Rp1.324.388.288.855,68. Perincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per sub rincian objek dapat dilihat pada lampiran 81, sedangkan perincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 82.

Berdasarkan lampiran 81 dan lampiran 82, terdapat kenaikan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar minus Rp121.013.923.434,34 dikarenakan adanya koreksi tambah saldo awal sebesar minus Rp50.444.232,00, mutasi tambah sebesar minus Rp1.072.106.269,80, mutasi kurang sebesar Rp950.901.322,20 dan beban penyusutan tahun berjalan sebesar minus Rp120.842.274.254,74.

Uraian koreksi tambah saldo awal tahun 2024 dan mutasi tambah akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi Tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 255 Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi Tambah pada Saldo Awal		***(50.444.232,00)***
Mutasi Tambah:		***(1.072.106.269,80)***
1	Kurang Pencatatan	(115.814.400,00)
2	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(469.554.500,00)
3	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(12.611.058,00)
4	Koreksi dari Aset Non Operasional	(455.025.857,60)
5	Tuntutan Ganti Rugi	(19.100.454,20)
Jumlah		**(1.122.550.501,80)**

Penjelasan tabel 5.255 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koreksi tambah saldo awal sebesar Rp50.444.232,00 merupakan koreksi reklasifikasi dari gedung dan bangunan yaitu bangunan rumah negara golongan I ke jalan, jaringan dan irigasi pada Dinas Kesehatan;
2. Kurang Pencatatan pada Dinas Pendidikan sebesar minus Rp115.814.400,00;
3. Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar minus Rp469.554.500,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
4. Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar minus Rp12.611.058,00 pada Dinas Kesehatan;
5. Koreksi dari aset non operasional sebesar minus Rp455.025.857,60 pada Kecamatan Tiga Binanga; dan
6. Tuntutan Ganti Rugi sebesar minus Rp19.100.454,20 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar minusRp18.368.169,38; dan
   b. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar minus Rp732.284,82.

Uraian mutasi kurang akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi Tahun 2025 sebesar Rp950.901.322,20 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 256 Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Mutasi Kurang:		
1	Koreksi Ke Persediaan	175.000,00
2	Koreksi Penyusutan	140.866.350,00
3	Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.719.840,00
4	Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	759.039.678,00
5	TGR	19.100.454,20
Jumlah		**950.901.322,20**

Penjelasan tabel 5.256 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koreksi ke Persediaan sebesar 175.000,00 pada Kecamatan Tigapanah;
2. Koreksi Penyusutan sebesar Rp140.866.350,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
3. Reklasifikasi ke akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp31.719.840,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
4. Reklasifikasi ke akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp759.039.678,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 83; dan
5. Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp19.100.454,20 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp18.368.169,38; dan
   b. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp732.284,82.

Perincian penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5. 257 Perincian Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal		**(1.324.388.288.855,68)**
Koreksi Tambah pada Saldo Awal		***(50.444.232,00)***
Mutasi Tambah:		***(1.072.106.269,80)***
1	Kurang Pencatatan	(115.814.400,00)
2	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(469.554.500,00)
3	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(12.611.058,00)
4	Koreksi dari Aset Non Operasional	(455.025.857,60)
5	Tuntutan Ganti Rugi	(19.100.454,20)
Mutasi Kurang:		***950.901.322,20***
1	Koreksi Ke Persediaan	175.000,00
2	Koreksi Penyusutan	140.866.350,00
3	Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.719.840,00
4	Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	759.039.678,00
5	Tuntutan Ganti Rugi	19.100.454,20
Penyusutan Tahun Berjalan		***(120.842.274.254,74)***
Saldo Akhir		**(1.445.402.212.290,02)**

5.3.1.4 Aset Lainnya

	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Lainnya	**Rp33.617.102.078,20**	**Rp35.367.437.320,00**

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Karo terdiri atas Tagihan Jangka Panjang, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF). Aset Lainnya tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp33.617.102.078,20 dan Rp35.367.437.320,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 258 Aset Lainnya TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	3.012.794.783,00	3.012.794.783,00	0,00
2	Aset Tidak Berwujud	327.798.200,00	279.798.200,00	48.000.000,00
3	Aset Lain-lain	127.027.322.250,46	127.559.117.616,37	(531.795.365,91)
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(232.389.100,00)	(146.849.280,00)	(85.539.820,00)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(96.518.424.055,26)	(95.410.691.999,37)	(1.107.732.055,89)
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	73.268.000,00	(73.268.000,00)
Jumlah		**33.617.102.078,20**	**35.367.437.320,00**	**(1.750.335.241,80)**

Lebih lanjut, perincian Aset Lainnya tahun 2025 pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 84.

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp3.012.794.783,00	**Rp3.012.794.783,00**

Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Karo merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.012.794.783,00 dan Rp3.012.794.783,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 259 Tagihan Jangka Panjang TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	2.794.712.993,00	2.794.712.993,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	218.081.790,00	218.081.790,00	0,00
Jumlah		**3.012.794.783,00**	**3.012.794.783,00**	**0,00**

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
   Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara sebesar Rp2.794.712.993,00 dapat dirincikan sebagai berikut:
   a. Pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.604.782.693,00 merupakan reklas mutasi kurang dari aset lancar dikarenakan koreksi BPK RI atas LKPD Kabupaten Karo tahun anggaran 2019 atas ketekoran kas sesuai LHP BPK atas LKPD Kabupaten Karo tahun anggaran 2018 yang terdiri dari kas di BLUD sebesar Rp2.526.803.445,00 yang belum dipertanggungjawabkan dan kas lainnya Rp77.979.248,00 atas pajak yang belum di setor oleh bendahara pengeluaran tahun anggaran 2010 sampai 22 Agustus 2018 a.n EG yang saat ini telah terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Akte Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkama Agung RI Nomor 5755 K /Pid.Sus/2023 Jo Nomor 20/Pid.Sus-TPK/PTMdn Jo. 90/Pid.Sus/Tpk/ 2022/PN Mdn. tanggal 10 Januari 2024.

   b. Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp189.930.300,00 merupakan sisa tambahan uang persediaan yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran a.n HRB yang saat ini telah terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2018 PN Mdn. tanggal 1 November 2018

2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

   Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (bukan pegawai negeri) tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp218.081.790,00 yaitu pada Sekretariat DPRD.

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp327.798.200,00	**Rp279.798.200,00**

Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Karo berupa *software* Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp327.798.200,00 dan Rp279.798.200,00. Perincian Aset Tidak Berwujud tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp221.318.200,00;
2. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.580.000,00;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp53.900.000,00; dan
4. Dinas Perhubungan sebesar Rp48.000.000,00.

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp127.027.322.250,46	**Rp127.559.117.616,37**

Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp127.027.322.250,46 dan Rp127.559.117.616,37 dengan perincian sebagai berikut ini:

Tabel 5. 260 Aset Lain-lain TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	111.563.472.253,46	110.208.251.490,46	1.355.220.763,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	15.463.849.997,00	17.350.866.125,91	(1.887.016.128,91)
Jumlah		**127.027.322.250,46**	**127.559.117.616,37**	**(531.795.365,91)**

1. Aset Rusak Berat/Usang
   Aset Rusak Berat/Usang tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp111.563.472.253,46 dan Rp110.208.251.490,46 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 85.
   Berdasarkan lampiran 85 tersebut, terdapat kenaikan Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp1.355.220.763,00 yang merupakan akumulasi dari mutasi tambah Aset Rusak Berat/Usang Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.000.940.583,00 dan mutasi kurang sebesar Rp4.645.719.820,00.

   Uraian mutasi tambah sebesar Rp6.000.940.583,00 dapat dirincikan sebagai berikut:
   a. Sekretariat DPRD sebesar Rp4.486.370.998,00;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp36.240.000,00;
   c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp30.574.570,00;
   d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp468.605.615,00; dan
   e. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp979.149.400,00;

   Uraian mutasi kurang sebesar Rp4.645.719.820,00 dapat dirincikan sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp2.465.000.000,00;
   b. Dinas Kesehatan sebesar Rp883.230.000,00;
   c. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp220.000.000,00;
   d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp553.520.000,00;
   e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp392.290.000,00; dan
   f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp131.679.820,00.

   Perincian penambahan dan pengurangan nilai Aset Rusak Berat/ Usang terdiri dari:

Tabel 5. 261 Perincian Penambahan dan Pengurangan Aset Rusak Berat/ Usang TA 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**110.208.251.490,46**
Mutasi Tambah:	***6.000.940.583,00***

Uraian		Nilai (Rp)
1	**6.000.940.583,00**	**6.306.008.733,00**
Mutasi Kurang:		***4.645.719.820,00***
1	4.645.719.820,00	4.950.787.970,00
Saldo Akhir		**111.563.472.253,46**

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
   Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp15.463.849.997,00 dan Rp17.350.866.125,91 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 262 Perincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah TA 2025 dan 2024

No.	Perangkat Daerah	Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Aset yang akan Di Serahkan ke Masyarakat/ Pihak Lain (Jalan Desa)	6.291.160.000,00	6.291.160.000,00	0,00
2	Kecamatan Tigabinanga	Aset yang akan Di Serahkan ke Masyarakat/ Pihak Lain (Jalan Kelurahan)	0,00	758.376.430,00	(758.376.430,00)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset yang akan Di Serahkan ke Masyarakat/ Pihak Lain (Jalan Desa)	8.760.659.132,00	8.760.659.132,00	0,00
4	Dinas Pendidikan	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	15.000.000,00	85.491.974,77	(70.491.974,77)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	98.124.000,00	1.092.576.028,11	(994.452.028,11)
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 21 Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditanggung Pemerintah selama TA 2007 (Sekretariat DPRD Rp203.349.365,00 + Panjar Kerja Dinas Perhubungan TA 2005 Rp95.00.000,00))	298.349.365,00	362.045.061,03	(63.695.696,03)
7	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	557.500,00	557.500,00	0,00
Jumlah			**15.463.849.997,00**	**17.350.866.125,91**	**(1.887.016.128,91)**

5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp232.389.100,00)	**(Rp146.849.280,00)**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp232.389.100,00 dan minus Rp146.849.280,00 dengan perincian sebagai berikut ini:

Tabel 5. 263 Perincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2025 dan 2024

No.	Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan) / Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan	(125.909.100,00)	(88.827.280,00)	37.081.820,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(53.900.000,00)	(53.900.000,00)	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	(4.580.000,00)	(4.122.000,00)	458.000,00
4	Dinas Perhubungan	(48.000.000,00)	(0,00)	(48.000.000,00)
Jumlah		**(232.389.100,00)**	**(146.849.280,00)**	**(85.539.820,00)**

Dari perincian tabel 5.263 di atas terdapat kenaikan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar minus Rp85.539.820,00. Perincian penambahan dan pengurangan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud terdiri dari:

Tabel 5. 264 Perincian Penambahan dan Pengurangan Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2025

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**(146.849.280,00)**
Mutasi Tambah:		***(85.539.820,00)***
1	Koreksi dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(85.539.820,00)
Mutasi Kurang:		***0,00***
Penyusutan Tahun Berjalan:		***0,00***
Saldo Akhir		**(232.389.100,00)**

5.3.1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp96.518.424.055,26)	**(Rp95.410.691.999,37)**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Karo merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang Tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp96.518.424.055,26 dan minus Rp95.410.691.999,37 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 86.

Berdasarkan lampiran 86 tersebut, terdapat kenaikan akumulasi penyusutan aset lainnya-aset rusak berat/usang sebesar minus Rp1.107.732.055,89 yang merupakan akumulasi dari mutasi tambah aset rusak berat/usang peralatan dan mesin sebesar minus Rp5.850.180.447,32 dan mutasi kurang sebesar Rp4.742.448.391,43.

Uraian mutasi tambah sebesar Rp5.850.180.447,32 dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Sekretariat DPRD sebesar minus Rp4.337.482.886,00;
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar minus Rp36.240.000,00;
c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar minus Rp30.012.070,00;
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar minus Rp467.296.091,32; dan
e. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar minus Rp979.149.400,00.

Uraian mutasi kurang sebesar Rp4.742.448.391,43 dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp2.465.000.000,00;
b. Dinas Kesehatan sebesar Rp883.230.000,00;
c. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp220.000.000,00;
d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp553.520.000,00;
e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp392.290.000,00;
f. Dinas Lingungan Hidup sebesar Rp96.728.571,43; dan
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp131.679.820,00.

Perincian penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5. 265 Perincian Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang TA 2025

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**(95.410.691.999,37)**
Mutasi Tambah:		***(5.850.180.447,32)***
1	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang Peralatan dan Mesin	(5.850.180.447,32)
Mutasi Kurang:		***4.742.448.391,43***
1	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	4.742.448.391,43
Saldo Akhir		**(96.518.424.055,26)**

5.3.1.4.6 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer *Treasury Desposit Facility* (TDF)	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp73.268.000,00**

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Kabupaten Karo merupakan Dana Bagi Hasil TDF tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp73.268.000,00 dengan perincian sebagai berikut ini:

Tabel 5. 266 Perincian Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty	0,00	66.857.000,00	(66.857.000,00)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	6.410.000,00	(6.410.000,00)
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	1.000,00	(1.000,00)
Jumlah		**0,00**	**73.268.000,00**	**(73.268.000,00)**

5.3.1.5 Properti Investasi

Properti Investasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp13.586.633.500,00	**Rp13.586.633.500,00**

Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Karo merupakan Properti Investasi Tanah per tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp13.586.633.500,00 dan

Rp13.586.633.500,00. Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Karo sampai dengan tahun 2025 hanya berupa Tanah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 267 Properti Investasi Tanah Perangkat Daerah TA 2025 dan 2024

No.	Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.261.629.000,00	1.261.629.000,00	0,00
2	Dinas Pertanian	12.254.000.000,00	12.254.000.000,00	0,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	71.004.500,00	71.004.500,00	0,00
Jumlah		**13.586.633.500,00**	**13.586.633.500,00**	**0,00**

Perincian Properti Investasi Tanah setiap Perangkat Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 268 Perincian Properti Investasi Tanah Setiap Perangkat Daerah TA 2025

No	Perangkat Daerah	Properti Investasi Tanah	Luas (m^2)	Nilai (Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tanah Kampung	8.126	219.402.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tanah Kampung	31.904	861.408.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tanah Kampung	6.697	180.819.000,00
4	Dinas Pertanian	Tanah Usaha	240.200	12.092.000.000,00
5	Dinas Pertanian	Tanah Padang Alang Alang	5.751	162.000.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	8.103	52.500.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	5.264	18.504.500,00
Jumlah				**13.586.633.500,00**

Selanjutnya penjelasan terkait Properti Investasi Tanah Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp13.586.633.500,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lahan yang tercatat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp1.261.629.000,00 merupakan 3 bidang tanah yang berlokasi di Desa Perbulan Kecamatan Laubaleng sebagai lahan pertanian termasuk properti investasi berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/0404/BKAD/2026 tanggal 6 Februari 2026 perihal Permohonan Penilaian Barang Milik Daerah dalam Bentuk Pemanfaatan Sewa yang mana surat masih dalam proses permohonan kepada KPKNL Medan;

2. Lahan pertanian yang tercatat pada Dinas Pertanian sebesar Rp12.092.000.000,00 merupakan tanah di Desa Nagara Kecamatan Merek termasuk properti investasi berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Lahan antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Sdr. Wahyudi Rahman,S.H.,S.I.K.,M.M. Nomor 900/0687/BKAD/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Sewa Lahan Desa Nagara pada Dinas Pertanian dan berakhir pada tanggal 26 Februari 2027;

3. Lahan pada Dinas Pertanian sebesar Rp162.000.000,00 merupakan tanah padang alang-alang di Desa Salit Kecamatan Tigapanah yang disewakan sebagai lahan pertanian termasuk properti investasi berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Karo Nomor 900/4702/BKAD/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Persetujuan Hasil Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan saat ini Surat Keputusan Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Karo masih dalam proses dan belum ada perjanjian serta belum permohonan sewa; dan

4. Lahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp71.004.500,00 merupakan tanah tambak/empang/kolam ikan/akuarium termasuk properti investasi berdasarkan Surat Bupati Karo Nomor 900/0852/BKAD/2026 tanggal 25 Maret 2026 perihal Persetujuan Hasil Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa Tanah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan saat ini masih dalam tahap proses persetujuan.

Selain itu, adapun aset Tanah serta Gedung dan Bangunan yang direncanakan untuk diajukan menjadi Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Karo, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp575.000,00 merupakan sebagian tanah usaha Kawasan Relokasi Siosar di Desa Sukameriah Kecamatan Tiga Panah yang disewakan peruntukannya untuk tower Telkomsel termasuk properti investasi berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Karo Nomor 900/4702/BKAD/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Persetujuan Hasil Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan saat ini Surat Keputusan Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Karo masih dalam proses dan belum ada perjanjian serta belum permohonan sewa;

2. Lahan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.061.452.640,00 merupakan tanah lapangan penimbunan pembuangan yang disewakan sebagai lahan pertanian termasuk properti investasi berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Karo Nomor 900/4702/BKAD/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Persetujuan Hasil Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan saat ini Surat Keputusan Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Karo masih dalam proses dan belum ada perjanjian serta belum permohonan sewa;

3. Lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp70.000.000,00 merupakan pembangunan Sirkuit Motor Cross Siosar termasuk properti investasi berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor 900/171/BKAD/2026 tentang Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah pada Lahan Pembangunan Sirkuit Motor Cross pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo dan belum ada perjanjian serta belum permohonan sewa;

4. Lahan pada Dinas Pertanian sebesar Rp69.700.000,00 dan bangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp759.926,00 merupakan tanah dan bangunan yang terletak pada satu lokasi yang sama di Desa Simolop Kecamatan Tiga Binanga sebagai sewa lahan dan sewa gedung termasuk properti investasi berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/0404/BKAD/2026 perihal Permohonan Penilaian Barang Milik Daerah dalam bentuk Pemanfaatan Sewa dan masih dalam proses permohonan kepada KPKNL Medan;

5. Lahan pada Dinas Pertanian sebanyak 2 bidang tanah merupakan tanah bangunan kantor yang berada di Desa Tigapancur Kecamatan Simpang Empat sebesar Rp166.708.719,00 dan yang berada di Perjalangan Kawat Desa Guru Benua Kecamatan Munte sebesar Rp24.039.000,00 termasuk properti investasi berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/0997/BKAD/2026 perihal Permohonan Penilaian Barang Milik Daerah dalam Bentuk Pemanfaatan Sewa dan masih dalam proses permohonan kepada KPKNL Medan;

6. Bangunan pada Dinas Kesehatan sebanyak 15 unit merupakan sewa bangunan 1 unit gedung koperasi pegawai kesehatan sebesar Rp25.150.000,00 dan sewa bangunan 14 unit perumahan sebesar Rp1.167.487.600,00 termasuk properti investasi berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Karo Nomor 900/4702/BKAD/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Persetujuan Hasil Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan saat ini Surat Keputusan Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Karo masih dalam proses dan belum ada perjanjian serta belum permohonan sewa;

7. Bangunan pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp3.160.209.800,00 merupakan 30 unit kios di Air Terjun Sipiso-piso termasuk properti investasi berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Karo Nomor 900/4702/BKAD/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Persetujuan Hasil Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan saat ini Surat Keputusan Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Karo masih dalam proses dan belum ada perjanjian serta belum permohonan sewa; dan

8. Bangunan pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata merupakan 28 unit kios di Objek Wisata Taman Mejuah-juah termasuk properti investasi dan saat ini masih dalam proses usulan Surat Permohonan Penilaian Barang Milik Daerah dalam Bentuk Pemanfaatan Sewa oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sehingga besaran nilainya belum ditetapkan.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp24.843.980.727,33	**Rp16.650.390.291,61**

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp24.843.980.727,33 dan Rp16.650.390.291,61 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 269 Kewajiban TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	24.843.980.727,33	16.650.390.291,61	8.193.590.435,72
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**24.843.980.727,33**	**16.650.390.291,61**	**8.193.590.435,72**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp24.843.980.727,33	**Rp16.650.390.291,61**

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp24.843.980.727,33 dan Rp16.650.390.291,61 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 270 Kewajiban Jangka Pendek TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	77.979.248,00	77.979.248,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.314.350,00	0,00	1.314.350,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	Utang Belanja	24.764.687.129,33	16.572.411.043,61	8.192.276.085,72
Jumlah		**24.843.980.727,33**	**16.650.390.291,61**	**8.193.590.435,72**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang (PFK)	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp77.979.248,00	**Rp77.979.248,00**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp77.979.248,00 dan Rp77.979.248,00. Utang PFK Tahun 2025 merupakan utang pajak pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan Bendahara Pengeluaran Sdr. EG yang saat ini telah terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Akte Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 5755 K/Pid.Sus/2023 Jo Nomor 20/Pid.Sus-TPK/PTMdn Jo. 90/Pid.Sus/Tpk/ 2022/PN.Mdn. tanggal 10 Januari 2024. Utang pajak tersebut terdiri dari:

Tabel 5. 271 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Utang PPh 21	20.996.813,00	20.996.813,00	0,00
2	Utang PPh 22	10.334.422,00	10.334.422,00	0,00
3	Utang PPN Pusat	46.648.013,00	46.648.013,00	0,00
Jumlah		**77.979.248,00**	**77.979.248,00**	**0,00**

Perincian Utang PFK tahun 2025 sebesar Rp77.979.248,00 dapat dilihat pada lampiran 87.

Berdasarkan Lampiran II Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 400.5.7/936/Keuda Perihal Penyelesaian Kewajiban atas Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan tanggal 23 Februari 2026, Pemerintah Kabupaten Karo memiliki kewajiban atas tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional sebesar Rp450.953.742,00 yang terdiri atas tunggakan Iuran Wajib Pemda sebesar Rp440.860.422,00 dan Iuran Kepala Desa 4% sebesar Rp10.093.320,00. Angka tersebut masih merupakan proyeksi kewajiban/utang atas tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional Pemerintah Kabupaten Karo sehingga belum dapat dicatatkan karena belum terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi Rampung Iuran Wajib Tahun 2025 antara KPPN Sidikalang, Pemerintah Kabupaten Karo dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.314.350,00	**Rp0,00**

Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.314.350,00 dan Rp0,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 merupakan kelebihan pembayaran setoran pengembalian denda atas keterlambatan pekerjaan belanja modal personal komputer pada sub kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk yang disetorkan tanggal 31 Desember 2025 ke RKUD nomor 25001020025000 oleh PT Trikreasindo Mandiri Sentosa dan sudah dikembalikan pada tanggal 9 Januari 2026.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp24.764.687.129,33	**Rp16.572.411.043,61**

Utang Belanja tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp24.764.687.129,33 dan Rp16.572.411.043,61. Utang Belanja tahun 2025 merupakan Utang atas Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa Dan Utang Belanja Modal yang terutang pada beberapa Perangkat Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran 88 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 272 Utang Belanja TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	18.399.349.265,00	3.995.461.248,00	14.403.888.017,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.365.337.864,33	7.975.801.092,50	(1.610.463.228,17)
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	479.357.128,00	(479.357.128,00)
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	793.316.000,00	(793.316.000,00)
5	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	3.328.475.575,11	(3.328.475.575,11)
Jumlah		**24.764.687.129,33**	**16.572.411.043,61**	**8.192.276.085,72**

1. Utang Belanja Pegawai
   Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp18.399.349.265,00 dan Rp3.995.461.248,00. Perincian Utang Belanja Pegawai per sub rincian objek dapat dilihat pada lampiran 89, sedangkan perincian utang belanja pegawai setiap perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 273 Perincian Utang Belanja Pegawai Perangkat Daerah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecamatan Tiganderket	283.135,00	2.519.629,00	(2.236.494,00)
2	Kecamatan Merek	0,00	10.298.254,00	(10.298.254,00)
3	Kecamatan Merdeka	0,00	15.505.600,00	(15.505.600,00)
4	Kecamatan Naman Teran	0,00	19.042.489,00	(19.042.489,00)
5	Dinas Perhubungan	12.946.018,00	7.886.275,00	5.059.743,00
6	Dinas Kesehatan	129.921.917,00	15.899.343,00	114.022.574,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah	2.857.717.118,00	3.144.702.984,00	(286.985.866,00)
8	Dinas Pendidikan	15.259.985.700,00	761.122.824,00	14.498.862.876,00
9	Dinas Pertanian	82.248.977,00	16.319.128,00	65.929.849,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	2.164.722,00	(2.164.722,00)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	56.246.400,00	0,00	56.246.400,00
Jumlah		**18.399.349.265,00**	**3.995.461.248,00**	**14.403.888.017,00**

Berdasarkan pada lampiran 89 dan tabel 5.273 terdapat peningkatan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp14.403.888.017,00 yang merupakan akumulasi dari mutasi tambah sebesar Rp18.388.249.192,00 dan mutasi kurang sebesar Rp3.984.361.175,00 dengan perincian penambahan dan pengurangan Utang Belanja Pegawai sebagai berikut:

Tabel 5. 274 Perincian Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal		**3.995.461.248,00**
Mutasi Tambah:		***18.388.249.192,00***
1	Penambahan Utang	18.379.614.192,00
2	Koreksi Utang pada RSUD	8.635.000,00
Mutasi Kurang:		***3.984.361.175,00***
1	Pelunasan Utang	3.934.649.388,00
2	Koreksi Utang pada RSUD	49.711.787,00
Saldo Akhir		**18.399.349.265,00**

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

   Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp6.365.337.864,33 dan Rp7.975.801.092,50 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 275 Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.734.400,00	1.209.600,00	4.524.800,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	685.015.280,00	685.015.280,00	0,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	887.961.058,50	(887.961.058,50)
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	492.601.998,00	(492.601.998,00)
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	1.440.000,00	(1.440.000,00)
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	578.990.000,00	471.274.295,00	107.715.705,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	3.773.600,00	263.500,00	3.510.100,00
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	12.128.518,00	11.058.861,00	1.069.657,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	889.390,00	(889.390,00)
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	0,00	430.000,00	(430.000,00)
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	8.584.500,00	(8.584.500,00)
13	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	3.200.400,00	(3.200.400,00)
14	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	29.100.000,00	126.780.000,00	(97.680.000,00)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
15	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	148.710.000,00	(148.710.000,00)
16	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	24.241.700,00	(24.241.700,00)
17	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	68.090.000,00	(68.090.000,00)
18	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.050.596.066,33	5.039.650.510,00	10.945.556,33
Jumlah		**6.365.337.864,33**	**7.975.801.092,50**	**(1.610.463.228,17)**

Adapun perincian Utang Belanja Barang dan Jasa setiap perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 276 Perincian Utang Belanja Barang dan Jasa Perangkat Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecamatan Barusjahe	790.500,00	263.500,00	527.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	492.601.998,00	(492.601.998,00)
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	0,00	887.961.058,50	(887.961.058,50)
4	Dinas Kesehatan	591.181.994,00	531.903.495,00	59.278.499,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	5.735.611.346,33	5.775.632.790,00	(40.021.443,67)
6	Dinas Pendidikan	29.100.000,00	275.490.000,00	(246.390.000,00)
7	Dinas Pertanian	6.503.100,00	11.058.861,00	(4.555.761,00)
8	Satuan Polisi Pamong Praja	2.150.924,00	889.390,00	1.261.534,00
Jumlah		**6.365.337.864,33**	**7.975.801.092,50**	**(1.610.463.228,17)**

Dari perincian tabel 5.275 dan tabel 5.276 di atas terdapat penurunan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.610.463.228,17 yang merupakan akumulasi dari mutasi tambah sebesar Rp5.723.645.310,00 dan mutasi kurang sebesar Rp7.334.108.538,17 dengan perincian Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5. 277 Perincian Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal		**7.975.801.092,50**
Mutasi Tambah:		***5.723.645.310,00***
1	Penambahan Utang	5.723.645.310,00
Mutasi Kurang:		***7.334.108.538,17***
1	Pelunasan Utang	7.268.178.116,00
2	Koreksi Utang	65.930.422,17
Saldo Akhir		**6.365.337.864,33**

3. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp479.357.128,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 278 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	39.850.002,00	(39.850.002,00)
2	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	0,00	71.599.999,00	(71.599.999,00)
3	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	364.652.052,00	(364.652.052,00)
4	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	3.255.075,00	(3.255.075,00)
Jumlah		**0,00**	**479.357.128,00**	**(479.357.128,00)**

Dari perincian tabel 5.278 di atas terdapat penurunan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp479.357.128,00 yang merupakan akumulasi dari pelunasan utang 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan perincian penambahan dan pengurangan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 5. 279 Perincian Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal		**479.357.128,00**
Mutasi Tambah:		***0,00***
1	Penambahan Utang	0,00
Mutasi Kurang:		***479.357.128,00***
1	Pelunasan Utang	479.357.128,00
Saldo Akhir		**0,00**

4. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
   Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp793.316.000,00. Terdapat penurunan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp793.316.000,00 yang merupakan akumulasi dari pelunasan utang 2024 dengan perincian penambahan dan pengurangan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5. 280 Perincian Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal		**793.316.000,00**
Mutasi Tambah:		***0,00***
1	Penambahan Utang	0,00
Mutasi Kurang:		***793.316.000,00***
1	Pelunasan Utang	793.316.000,00
Saldo Akhir		**0,00**

5. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi
   Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp3.328.475.575,11 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 281 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	657.495.613,11	(657.495.613,11)
2	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	588.499.962,00	(588.499.962,00)
3	Utang Belanja ModalBangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	2.082.480.000,00	(2.082.480.000,00)
Jumlah		**0,00**	**3.328.475.575,11**	**(3.328.475.575,11)**

Adapun perincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 282 Perincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Perangkat Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	2.677.772.775,11	(2.677.772.775,11)
2	Dinas Perhubungan	0,00	650.702.800,00	(650.702.800,00)
Jumlah		**0,00**	**3.328.475.575,11**	**(3.328.475.575,11)**

Dari perincian tabel 5.281 dan tabel 5.282 di atas terdapat penurunan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.328.475.575,11 yang merupakan akumulasi dari pelunasan utang 2024, dengan perincian penambahan dan pengurangan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. 283 Perincian Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal		**3.328.475.575,11**
Mutasi Tambah:		***0,00***
1	Penambahan Utang	0,00
Mutasi Kurang:		***3.328.475.575,11***
1	Pelunasan Utang	3.328.475.575,11
Saldo Akhir		**0,00**

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp0,00**

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp2.706.567.220.557,90	**Rp2.553.212.194.126,89**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.706.567.220.557,90 dan Rp2.553.212.194.126,89**.** Adapun perincian

perhitungan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas. Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 284 Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset		**2.731.411.201.285,23**	**2.569.862.584.418,50**	**161.548.616.866,73**
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Kas dan Setara Kas)	54.457.274.784,16	14.931.433.146,83	39.525.841.637,33
2	Piutang Pendapatan	90.670.362.771,14	114.747.011.056,09	(24.076.648.284,95)
3	Penyisihan Piutang	(40.675.538.889,55)	(38.757.531.723,99)	(1.918.007.165,56)
4	Persediaan	17.029.204.844,60	33.486.946.343,50	(16.457.741.498,90)
5	Investasi Jangka Panjang	17.137.737.252,00	18.725.757.539,00	(1.588.020.287,00)
6	Aset Tetap	2.545.588.424.944,68	2.377.774.897.237,07	167.813.527.707,61
7	Aset Lainnya	33.617.102.078,20	35.367.437.320,00	(1.750.335.241,80)
8	Properti Investasi	13.586.633.500,00	13.586.633.500,00	0,00
Kewajiban		**24.843.980.727,33**	**16.650.390.291,61**	**8.193.590.435,72**
9	Kewajiban Jangka Pendek	24.843.980.727,33	16.650.390.291,61	8.193.590.435,72
Jumlah Ekuitas		**2.706.567.220.557,90**	**2.553.212.194.126,89**	**169.742.207.302,45**

5.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Karo merupakan konsolidasi dari Laporan Operasional seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Karo.

5.4.1 Pendapatan

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan	**Rp1.387.117.299.036,39**	**Rp1.265.260.478.409,31**

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan yaitu penjumlahan Pendapatan LRA dengan Piutang Pendapatan sampai dengan tahun berjalan (tahun laporan akuntansi) dikurang piutang tahun-tahun sebelumnya dan dikurangi dengan koreksi. Koreksi dapat berupa Pendapatan Diterima Dimuka, Koreksi Piutang, koreksi lebih atau *double* bayar, koreksi pemindahan akun dan sebagainya.

Pendapatan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.387.117.299.036,39 dan Rp1.265.260.478.409,31 mengalami kenaikan sebesar Rp121.856.820.627,08 atau 9,63% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO. Pendapatan dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 285 Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	152.082.798.657,22	110.424.613.404,31	41.658.185.252,91	37,73
2	Pendapatan Transfer-LO	1.027.609.786.782,00	1.123.629.816.520,00	(96.020.029.738,00)	(8,55)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	207.424.713.597,17	31.206.048.485,00	176.218.665.112,17	564,69
Jumlah		**1.387.117.299.036,39**	**1.265.260.478.409,31**	**121.856.820.627,08**	**9,63**

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp152.082.798.657,22	**Rp110.424.613.404,31**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah Pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Karo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PAD-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp152.082.798.657,22 dan Rp110.424.613.404,31 mengalami kenaikan sebesar Rp41.658.185.252,91 atau 37,73% yang terdiri dari Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 286 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pajak Daerah-LO	92.366.894.756,98	64.849.132.562,28	27.517.762.194,70	42,43
2	Retribusi Daerah-LO	42.884.028.984,00	35.508.829.530,00	7.375.199.454,00	20,77
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	3.446.458.482,00	2.624.980.942,59	821.477.539,41	31,29
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	13.385.416.434,24	7.441.670.369,44	5.943.746.064,80	79,87
Jumlah		**152.082.798.657,22**	**110.424.613.404,31**	**41.658.185.252,91**	**37,73**

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp92.366.894.756,98	**Rp64.849.132.562,28**

Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp92.366.894.756,98 dan Rp64.849.132.562,28 mengalami kenaikan sebesar Rp27.517.762.194,70 atau 42,43% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 287 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pajak Hotel-LO	0,00	10.183.523.769,28	(10.183.523.769,28)	(100,00)
2	Pajak Restoran–LO	0,00	9.079.441.676,00	(9.079.441.676,00)	(100,00)
3	Pajak Hiburan-LO	0,00	4.152.683.737,00	(4.152.683.737,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame-LO	2.016.109.754,00	1.193.814.127,00	822.295.627,00	68,88
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	20.436.077.813,00	(20.436.077.813,00)	(100,00)
6	Pajak Parkir-LO	0,00	271.448.000,00	(271.448.000,00)	(100,00)
7	Pajak Air Tanah-LO	3.221.544.457,00	2.703.262.753,00	518.281.704,00	19,17

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	423.481.732,00	1.135.591.881,00	(712.110.149,00)	(62,71)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	9.530.640.492,00	9.091.338.638,00	439.301.854,00	4,83
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	8.230.251.952,00	6.601.950.168,00	1.628.301.784,00	24,66
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	42.637.229.794,98	0,00	42.637.229.794,98	100,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	17.254.448.571,00	0,00	17.254.448.571,00	100,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	9.053.188.004,00	0,00	9.053.188.004,00	100,00
Jumlah		**92.366.894.756,98**	**64.849.132.562,28**	**27.517.762.194,70**	**42,43**

1. Pajak Hotel-LO

   Pajak Hotel-LO di *mapping* pada kode rekening PBJT-Jasa Perhotelan-LO. Pajak Hotel-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp10.183.523.769,28 mengalami penurunan sebesar Rp10.183.523.769,28 atau minus 100,00%.

   Pajak Hotel-LO tahun 2025 sebesar Rp0,00 berasal dari Pajak Hotel LRA sebesar Rp0,00 ditambah Piutang Pajak Hotel tahun berjalan sebesar Rp19.845.000,00 dan dikurang dengan Piutang Pajak Hotel tahun sebelumnya sebesar Rp19.845.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 288 Perbandingan Pajak Hotel LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Piutang Tahun Berjalan	Piutang Tahun Sebelumnya	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5=(2+3-4)
1	Pajak Hotel	0,00	19.845.000,00	19.845.000,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**19.845.000,00**	**19.845.000,00**	**0,00**

2. Pajak Restoran-LO

   Pajak Restoran-LO di *mapping* pada kode rekening PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO. Pajak Restoran-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp9.079.441.676,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.079.441.676,00 atau minus 100%.

   Pajak Restoran-LO tahun 2025 sebesar Rp0,00 berasal dari Pajak Restoran LRA sebesar Rp0,00 ditambah Piutang Pajak Restoran tahun berjalan sebesar Rp388.508.162,00 dan dikurang dengan Piutang Pajak Restoran tahun sebelumnya sebesar Rp388.508.162,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 289 Perbandingan Pajak Restoran LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Piutang Tahun Berjalan	Piutang Tahun Sebelumnya	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5=(2+3-4)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	388.508.162,00	388.508.162,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**388.508.162,00**	**388.508.162,00**	**0,00**

3. Pajak Hiburan-LO

   Pajak Hiburan-LO di *mapping* pada kode rekening PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO. Pajak Hiburan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp4.152.683.737,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.152.683.737,00 atau minus 100,00%.

4. Pajak Reklame-LO
   Pajak Reklame-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.016.109.754,00 dan Rp1.193.814.127,00 mengalami kenaikan sebesar Rp822.295.627,00 atau 68,88%.
   Pajak Reklame pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp2.016.109.754,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 290 Perbandingan Pajak Reklame LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	2.016.109.754,00	0,00	2.016.109.754,00
Jumlah		**2.016.109.754,00**	**0,00**	**2.016.109.754,00**

5. Pajak Penerangan Jalan-LO
   Pajak Penerangan Jalan-LO di *mapping* pada kode rekening PBJT-Tenaga Listrik-LO. Pajak Penerangan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp20.436.077.813,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.436.077.813,00 atau minus 100,00%.

6. Pajak Parkir-LO
   Pajak Parkir-LO di *mapping* pada kode rekening PBJT-Jasa Parkir-LO. Pajak Parkir-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp271.448.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp271.448.000,00 atau minus 100,00%.

7. Pajak Air Tanah-LO
   Pajak Air Tanah-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.221.544.457,00 dan Rp2.703.262.753,00 mengalami kenaikan sebesar Rp518.281.704,00 atau 19,17%.
   Pajak Air Tanah pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp3.221.544.457,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 291 Perbandingan Pajak Air Tanah LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pajak Air Tanah	3.221.544.457,00	0,00	3.221.544.457,00
Jumlah		**3.221.544.457,00**	**0,00**	**3.221.544.457,00**

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp423.481.732,00 dan Rp1.135.591.881,00 mengalami penurunan sebesar Rp712.110.149,00 atau minus 62,71% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 292 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	134.939.110,00	433.018.096,00	(298.078.986,00)	(68,84)
2	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	288.542.622,00	702.573.785,00	(414.031.163,00)	(58,93)
Jumlah		**423.481.732,00**	**1.135.591.881,00**	**(712.110.149,00)**	**(62,71)**

   a. Pajak Pasir dan Kerikil-LO
      Pajak Pasir dan Kerikil-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp134.939.110,00 dan Rp433.018.096,00 mengalami penurunan sebesar Rp298.078.986,00 atau minus 68,84%.

Pajak Pasir dan Kerikil pada LO sama dengan LRA sebesar Rp134.939.110,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 293 Perbandingan Pajak Pasir dan Kerikil LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pajak Pasir dan Kerikil	134.939.110,00	0,00	134.939.110,00
Jumlah		**134.939.110,00**	**0,00**	**134.939.110,00**

b. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp288.542.622,00 dan Rp702.573.785,00 mengalami penurunan sebesar Rp414.031.163,00 atau minus 58,93%.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya pada LO sama dengan LRA sebesar Rp288.542.622,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 294 Perbandingan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	288.542.622,00	0,00	288.542.622,00
Jumlah		**288.542.622,00**	**0,00**	**288.542.622,00**

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO

Pajak PBB-P2-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp9.530.640.492,00 dan Rp9.091.338.638,00 mengalami kenaikan sebesar Rp439.301.854,00 atau 4,83%.

Pajak PBB-P2-LO tahun 2025 sebesar Rp9.530.640.492,00 berasal dari Pajak PBB-P2 LRA sebesar Rp7.086.451.037,00 ditambah piutang PBB-P2 tahun berjalan sebesar Rp46.626.282.996,48 dan dikurangi dengan piutang PBB-P2 tahun sebelumnya sebesar Rp44.182.093.541,48 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 295 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Piutang Tahun Berjalan	Piutang Tahun Sebelumnya	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5=(2+3-4)
1	PBBP2	7.086.451.037,00	46.626.282.996,48	44.182.093.541,48	9.530.640.492,00
Jumlah		**7.086.451.037,00**	**46.626.282.996,48**	**44.182.093.541,48**	**9.530.640.492,00**

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

BPHTB-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp8.230.251.952,00 dan Rp6.601.950.168,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.628.301.784,00 atau 24,66%.

BPHTB pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp8.230.251.952,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 296 Perbandingan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	8.230.251.952,00	0,00	8.230.251.952,00
Jumlah		**8.230.251.952,00**	**0,00**	**8.230.251.952,00**

11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO

PBJT-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp42.637.229.794,98 dan 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp42.637.229.794,98 atau 100,00% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 297 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	8.983.148.274,45	0,00	8.983.148.274,45	100,00
2	PBJT-Tenaga Listrik-LO	20.734.343.715,00	0,00	20.734.343.715,00	100,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	9.032.865.629,53	0,00	9.032.865.629,53	100,00
4	PBJT-Jasa Parkir-LO	289.849.500,00	0,00	289.849.500,00	100,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	3.597.022.676,00	0,00	3.597.022.676,00	100,00
Jumlah		**42.637.229.794,98**	**0,00**	**42.637.229.794,98**	**100,00**

a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO

PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp8.983.148.274,45 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.983.148.274,45 atau 100,00%.

PBJT-Makanan dan/atau Minuman pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp8.983.148.274,45 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 298 Perbandingan PBJT-Makanan dan/atau Minuman LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PBJT-Restoran	8.983.148.274,45	0,00	8.983.148.274,45
Jumlah		**8.983.148.274,45**	**0,00**	**8.983.148.274,45**

b. PBJT-Tenaga Listrik-LO

PBJT-Tenaga Listrik-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp20.734.343.715,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.734.343.715,00 atau 100,00%.

PBJT- Tenaga Listrik pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp20.734.343.715,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 299 Perbandingan PBJT-Tenaga Listrik LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	20.734.343.715,00	0,00	20.734.343.715,00
Jumlah		**20.734.343.715,00**	**0,00**	**20.734.343.715,00**

c. PBJT-Jasa Perhotelan-LO

PBJT-Jasa Perhotelan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp9.032.865.629,53 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.032.865.629,53 atau 100,00%.

PBJT-Jasa Perhotelan pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp9.032.865.629,53 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 300 PBJT-Jasa Perhotelan LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PBJT-Hotel	9.032.865.629,53	0,00	9.032.865.629,53
Jumlah		**9.032.865.629,53**	**0,00**	**9.032.865.629,53**

d. PBJT-Jasa Parkir-LO

PBJT-Jasa Parkir-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp289.849.500,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp289.849.500,00 atau 100,00%.

PBJT-Jasa Parkir pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp289.849.500,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 301 Perbandingan PBJT-Jasa Parkir LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	289.849.500,00	0,00	289.849.500,00
Jumlah		**289.849.500,00**	**0,00**	**289.849.500,00**

e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO

PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.597.022.676,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp Rp3.597.022.676,00 atau 100,00%.

PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp3.597.022.676,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 302 Perbandingan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PBJT-Permainan Ketangkasan	3.597.022.676,00	0,00	3.597.022.676,00
Jumlah		**3.597.022.676,00**	**0,00**	**3.597.022.676,00**

12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Opsen PKB-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp17.254.448.571,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.254.448.571,00 atau 100,00%.

Opsen PKB pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp17.254.448.571,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 303 Perbandingan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Opsen PKB	17.254.448.571,00	0,00	17.254.448.571,00
Jumlah		**17.254.448.571,00**	**0,00**	**17.254.448.571,00**

13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO

Opsen BBNKB-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp9.053.188.004,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.053.188.004,00 atau 100,00%.

Opsen BBNKB pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp9.053.188.004,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 304 Perbandingan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Opsen BBNKB	9.053.188.004,00	0,00	9.053.188.004,00
Jumlah		**9.053.188.004,00**	**0,00**	**9.053.188.004,00**

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp42.884.028.984,00	**Rp35.508.829.530,00**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp42.884.028.984,00 dan Rp35.508.829.530,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.375.199.454,00 atau 20,77% yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum-LO, Retribusi Jasa Usaha-LO dan Retribusi Perizinan Tertentu-LO dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 305 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Retribusi Jasa Umum-LO	36.545.388.788,00	29.389.564.142,00	7.155.824.646,00	24,35
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	4.626.519.960,00	4.590.687.152,00	35.832.808,00	0,78
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	1.712.120.236,00	1.528.578.236,00	183.542.000,00	12,01
Jumlah		**42.884.028.984,00**	**35.508.829.530,00**	**7.375.199.454,00**	**20,77**

1. Retribusi Jasa Umum-LO
   Retribusi Jasa Umum-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp36.545.388.788,00 dan Rp29.389.564.142,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.155.824.646,00 atau 24,35% dengan rimcian sebagai berikut:

Tabel 5. 306 Retribusi Jasa Umum–LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	30.493.784.488,00	24.733.812.442,00	5.759.972.046,00	23,29
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	2.313.706.000,00	1.843.050.000,00	470.656.000,00	25,54
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.699.750.000,00	1.276.600.000,00	423.150.000,00	33,15
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.038.148.300,00	1.536.101.700,00	502.046.600,00	32,68
Jumlah		**36.545.388.788,00**	**29.389.564.142,00**	**7.155.824.646,00**	**24,35**

   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
      Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp30.493.784.488,00 dan Rp24.733.812.442,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.759.972.046,00 atau 23,29%.
      Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO tahun 2025 sebesar Rp30.493.784.488,00 berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan LRA sebesar Rp31.234.891.147,00 ditambah dengan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun berjalan sebesar Rp4.671.339.318,00 dikurang dengan Piutang Pelayanan Kesehatan tahun sebelumnya sebesar Rp5.552.223.227,00 dan dikurang Koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebesar minus Rp139.777.300,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 307 Perbandingan Retribusi Pelayanan Kesehatan LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Piutang Retribusi Tahun Berjalan	Piutang Retribusi Tahun Sebelumnya	Koreksi Piutang	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5	6=(2+3-4-5)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	2.569.350.007,00	0,00	0,00	0,00	2.569.350.007,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	28.665.541.140,00	4.671.339.318,00	5.552.223.277,00	(139.777.300,00)	27.924.434.481,00
Jumlah		**31.234.891.147,00**	**4.671.339.318,00**	**5.552.223.277,00**	**(139.777.300,00)**	**30.493.784.488,00**

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.313.706.000,00 dan Rp1.843.050.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp470.656.000,00 atau 25,54%.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp2.313.706.000,00 dan tidak terdapat selisih dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 308 Perbandingan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	2.313.706.000,00	0,00	2.313.706.000,00
Jumlah		**2.313.706.000,00**	**0,00**	**2.313.706.000,00**

c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.699.750.000,00 dan Rp1.276.600.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp423.150.000,00 atau 33,15%.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp1.699.750.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 309 Perbandingan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum LRA dengan LO Tahun2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.699.750.000,00	0,00	1.699.750.000,00
Jumlah		**1.699.750.000,00**	**0,00**	**1.699.750.000,00**

d. Retribusi Pelayanan Pasar-LO

Retribusi Pelayanan Pasar-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.038.148.300,00 dan Rp1.536.101.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp502.046.600,00 atau 32,68%.

Retribusi Pelayanan Pasar-LO tahun 2025 sebesar Rp2.038.148.300,00 berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar LRA sebesar Rp2.145.443.100,00 ditambah dengan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar tahun berjalan sebesar Rp667.296.250,00 dikurang dengan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar tahun sebelumnya sebesar Rp774.591.050,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 310 Perbandingan Retribusi Pelayanan Pasar LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Piutang Retribusi Tahun Berjalan	Piutang Retribusi Tahun Sebelumnya	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	6=(2+3-4-5)
1	Retribusi Pelataran-LO	617.743.000,00	0,00	0,00	617.743.000,00
2	Retribusi Los-LO	649.417.000,00	0,00	0,00	649.417.000,00
3	Retribusi Kios-LO	878.283.100,00	667.296.250,00	774.591.050,00	770.988.300,00
Jumlah		**2.145.443.100,00**	**667.296.250,00**	**774.591.050,00**	**2.038.148.300,00**

2. Retribusi Jasa Usaha-LO

   Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp4.626.519.960,00 dan Rp4.590.687.152,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 35.832.808,00 atau 0,78% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 311 Retribusi Jasa Usaha–LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.500.000,00	1.188.440.000,00	(1.184.940.000,00)	(99,71)
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	498.500.000,00	450.000.000,00	48.500.000,00	10,78
3	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	108.350.000,00	97.560.000,00	10.790.000,00	11,06
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	3.129.991.960,00	2.737.835.652,00	392.156.308,00	14,32
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	188.778.000,00	116.851.500,00	71.926.500,00	61,55
6	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	697.400.000,00	0,00	697.400.000,00	100,00
Jumlah		**4.626.519.960,00**	**4.590.687.152,00**	**35.832.808,00**	**0,78**

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

   Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.500.000,00 dan Rp1.188.440.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.184.940.000,00 atau minus 99,71%.

   Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp3.500.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 312 Perbandingan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Jumlah		**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**

b. Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO

   Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp498.500.000,00 dan Rp450.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp48.500.000,00 atau 10,78%.

Retribusi Tempat Khusus Parkir pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp498.500.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 313 Perbandingan Retribusi Tempat Khusus Parkir LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	498.500.000,00	0,00	498.500.000,00
Jumlah		**498.500.000,00**	**0,00**	**498.500.000,00**

c. Retribusi Rumah Potong Hewan-LO

Retribusi Rumah Potong Hewan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp108.350.000,00 dan Rp97.560.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.790.000,00 atau 11,06%.

Retribusi Rumah Potong Hewan pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp108.350.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 314 Perbandingan Retribusi Rumah Potong Hewan LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	108.350.000,00	0,00	108.350.000,00
Jumlah		**108.350.000,00**	**0,00**	**108.350.000,00**

d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.129.991.960,00 dan Rp2.737.835.652,00 mengalami kenaikan sebesar Rp392.156.308,00 atau 14,32%.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada LO sama dengan LRA tahun 2025 Rp3.129.991.960,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 315 Perbandingan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	3.129.991.960,00	0,00	3.129.991.960,00
Jumlah		**3.129.991.960,00**	**0,00**	**3.129.991.960,00**

e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp188.778.000,00 dan Rp116.851.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp71.926.500,00 atau 61,55%.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada LO sama dengan LRA tahun 2025 Rp3.129.991.960,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 316 Perbandingan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	188.778.000,00	0,00	188.778.000,00
Jumlah		**188.778.000,00**	**0,00**	**188.778.000,00**

f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp697.400.000,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp697.400.000,00 atau 100,00%.

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp697.400.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 317 Perbandingan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	697.400.000,00	0,00	697.400.000,00
Jumlah		**697.400.000,00**	**0,00**	**697.400.000,00**

3. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Retribusi Perizinan Tertentu-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.712.120.236,00 dan Rp1.528.578.236,00 mengalami kenaikan sebesar Rp183.542.000,00 atau 12,01%.

Retribusi Perizinan Tertentu pada LO sama dengan LRA tahun 2025 Rp1.712.120.236,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 318 Perbandingan Retribusi Perizinan Tertentu LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.651.910.572,00	0,00	1.651.910.572,00
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	60.209.664,00	0,00	60.209.664,00
Jumlah		**1.712.120.236,00**	**0,00**	**1.712.120.236,00**

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp3.446.458.482,00	**Rp2.624.980.942,59**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.446.458.482,00 dan Rp2.624.980.942,59 mengalami kenaikan sebesar Rp821.477.539,41 atau 31,29%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO yaitu berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp3.446.458.482,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 319 Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	3.446.458.482,00	0,00	3.446.458.482,00
Jumlah		**3.446.458.482,00**	**0,00**	**3.446.458.482,00**

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp13.385.416.434,24	**Rp 7.441.670.369,44**

Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp13.385.416.434,24 dan Rp7.441.670.369,44 mengalami kenaikan sebesar Rp5.943.746.064,80 atau 79,87% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 320 Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.267.846.639,00	298.518.100,00	969.328.539,00	324,71
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	38.561.000,00	205.893.000,00	(167.332.000,00)	(81,27)
3	Jasa Giro-LO	1.120.825.476,18	1.454.601.702,00	(333.776.225,82)	(22,95)
4	Pendapatan Bunga-LO	653.604.195,00	1.128.846.260,00	(475.242.065,00)	(42,10)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	4.227.860.145,90	3.839.552.479,44	388.307.666,46	10,11
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	559.939.990,16	233.089.997,00	326.849.993,16	140,22
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	5.163.394.091,00	279.833.331,00	4.883.560.760,00	1.745,17
9	Pendapatan dari BLUD-LO	312.591.397,00	0,00	312.591.397,00	0,00
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	24.993.500,00	1.335.500,00	23.658.000,00	1.771,47
Jumlah		**13.385.416.434,24**	**7.441.670.369,44**	**5.943.746.064,80**	**79,87**

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
   Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.267.846.639,00 dan Rp298.518.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp969.328.539,00 atau 324,71%.
   Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp1.267.846.639,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 321 Perbandingan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.265.996.639,00	0,00	1.265.996.639,00
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
Jumlah		**1.267.846.639,00**	**0,00**	**1.267.846.639,00**

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp38.561.000,00 dan Rp205.893.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp167.332.000,00 atau minus 81,27%.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp38.561.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 322 Perbandingan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Hasil Sewa BMD	38.561.000,00	0,00	38.561.000,00
Jumlah		**38.561.000,00**	**0,00**	**38.561.000,00**

3. Jasa Giro-LO

Jasa Giro-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.120.825.476,18 dan Rp1.454.601.702,00 mengalami penurunan sebesar Rp333.776.225,82 atau minus 22,95%.

Jasa Giro-LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp1.120.825.476,18 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 323 Perbandingan Jasa Giro LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.120.825.476,18	0,00	1.120.825.476,18
Jumlah		**1.120.825.476,18**	**0,00**	**1.120.825.476,18**

4. Pendapatan Bunga-LO

Pendapatan Bunga-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp653.604.195,00 dan Rp1.128.846.260,00 mengalami penurunan sebesar Rp475.242.065,00 atau minus 42,10%.

Pendapatan Bunga-LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp653.604.195,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 324 Perbandingan Pendapatan Bunga LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	653.604.195,00	0,00	653.604.195,00
Jumlah		**653.604.195,00**	**0,00**	**653.604.195,00**

5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp15.800.000,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.800.000,00 atau 100,00%.

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp15.800.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 325 Perbandingan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00
Jumlah		**15.800.000,00**	**0,00**	**15.800.000,00**

6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp4.227.860.145,90 dan Rp3.839.552.479,44 mengalami kenaikan sebesar Rp388.307.666,46 atau 10,11%.
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada LO sebesar Rp4.227.860.145,90 berasal dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada LRA sebesar Rp4.270.518.489,51 dikurangi dengan Piutang tahun sebelumnya sebesar Rp42.658.343,61 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 326 Perbandingan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	4.270.518.489,51	42.658.343,61	4.227.860.145,90
Jumlah		**4.270.518.489,51**	**42.658.343,61**	**4.227.860.145,90**

7. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp559.939.990,16 dan Rp233.089.997,00 mengalami kenaikan sebesar Rp326.849.993,16 atau 140,22% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 327 Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0,00	11.170.689,00	(11.170.689,00)	(100,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	0,00	13.719.495,00	(13.719.495,00)	(100,00)
3	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	222.900.999,00	208.199.813,00	14.701.186,00	7,06
4	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	26.948.098,16	0,00	26.948.098,16	100,00
5	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	310.013.586,00	0,00	310.013.586,00	100,00
6	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	77.307,00	0,00	77.307,00	100,00
Jumlah		**559.939.990,16**	**233.089.997,00**	**326.849.993,16**	**140,22**

a. Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp11.170.689,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.170.689,00 atau minus 100,00%.

b. Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO
Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp13.719.495,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.719.495,00 atau minus 100,00%.

c. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO
Pendapatan Denda PBB-P2-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp222.900.999,00 dan Rp208.199.813,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.701.186,00 atau 7,06%.

Pendapatan Denda PBB-P2 pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp222.900.999,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 328 PerbandinganPendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Denda PBBP2-LO	222.900.999,00	0,00	222.900.999,00
Jumlah		**222.900.999,00**	**0,00**	**222.900.999,00**

d. Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
Pendapatan PBJT-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp26.948.098,16 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.948.098,16 atau 100,00%.
Pendapatan PBJT pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp26.948.098,16 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 329 Perbandingan Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO	3.669.411,00	0,00	3.669.411,00
2	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO	23.278.687,16		23.278.687,16
Jumlah		**26.948.098,16**	**0,00**	**26.948.098,16**

e. Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
Pendapatan Denda Opsen PKB-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp310.013.586,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp310.013.586,00 atau 100,00%.
Pendapatan Denda Opsen PKB pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp310.013.586,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 330 Perbandingan Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Denda Opsen PKB-LO	310.013.586,00	0,00	310.013.586,00
Jumlah		**310.013.586,00**	**0,00**	**310.013.586,00**

f. Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
Pendapatan Denda Opsen BBNKB-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp77.307,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp77.307,00 atau 100,00%.
Pendapatan Denda Opsen BBNKB pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp77.307,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 331 Perbandingan Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Denda Opsen BBNKB-LO	77.307,00	0,00	77.307,00
Jumlah		**77.307,00**	**0,00**	**77.307,00**

8. Pendapatan dari Pengembalian-LO

Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp5.163.394.091,00 dan Rp279.833.331,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.883.560.760,00 atau 1.745,17% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 332 Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	20.442.300,00	120.096.500,00	(99.654.200,00)	(82,98)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	219.402.712,00	33.552.831,00	185.849.881,00	553,90
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO	24.791.775,00	121.761.500,00	(96.969.725,00)	(79,64)
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	0,00	4.422.500,00	(4.422.500,00)	100,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	39.695.000,00	0,00	39.695.000,00	100,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-LO	4.859.062.304,00	0,00	4.859.062.304,00	100,00
Jumlah		**5.163.394.091,00**	**279.833.331,00**	**4.883.560.760,00**	**1.745,17**

a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp20.442.300,00 dan Rp120.096.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp99.654.200,00 atau minus 82,98%.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada LO sama dengan tahun 2025 sebesar Rp20.442.300,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 333 Perbandingan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	20.442.300,00	0,00	20.442.300,00
Jumlah		**20.442.300,00**	**0,00**	**20.442.300,00**

b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp219.402.712,00 dan Rp33.552.831,00 mengalami kenaikan sebesar Rp185.849.881,00 atau 553,90%.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp 219.402.712,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 334 Perbandingan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	201.950.530,00	0,00	201.950.530,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS-LO	17.452.182,00	0,00	17.452.182,00
Jumlah		**219.402.712,00**	**0,00**	**219.402.712,00**

c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp24.791.775,00 dan Rp121.761.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp96.969.725,00 atau minus 79,64%.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp24.791.775,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 335 Perbandingan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-LO	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-LO	20.831.775,00	0,00	20.831.775,00
Jumlah		**24.791.775,00**	**0,00**	**24.791.775,00**

d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp4.422.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.422.500,00 atau minus 100,00%.

e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp39.695.000,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.695.000,00 atau 100,00%.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp39.695.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 336 Perbandingan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-LO	39.695.000,00	0,00	39.695.000,00
Jumlah		**39.695.000,00**	**0,00**	**39.695.000,00**

f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp4.859.062.304,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.859.062.304,00 atau 100,00%.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp4.859.062.304,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 337 Perbandingan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat-LO	4.859.062.304,00	0,00	4.859.062.304,00
Jumlah		**4.859.062.304,00**	**0,00**	**4.859.062.304,00**

9. Pendapatan dari BLUD-LO

Pendapatan dari BLUD-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp312.591.397,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp312.591.397,00 atau 100,00%.

Pendapatan dari BLUD pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp312.591.397,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 338 Perbandingan Pendapatan dari BLUD LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga-LO	15.206.381,00	0,00	15.206.381,00
2	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD-LO	297.385.016,00	0,00	297.385.016,00
Jumlah		**312.591.397,00**	**0,00**	**312.591.397,00**

10. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO

Pendapatan hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp24.993.500,00 dan Rp1.335.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.658.000,00 atau 1.771,47%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp24.993.500,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 339 Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	24.993.500,00	0,00	24.993.500,00
Jumlah		**24.993.500,00**	**0,00**	**24.993.500,00**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.027.609.786.782,00	**Rp1.123.629.816.520,00**

Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kabupaten merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu.

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.027.609.786.782,00 dan Rp1.123.629.816.520,00 mengalami penurunan sebesar Rp96.020.029.738,00 atau minus 8,55% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 340 Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	982.647.975.112,00	1.049.158.777.053,00	(66.510.801.941,00)	(6,34)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	44.961.811.670,00	74.471.039.467,00	(29.509.227.797,00)	(39,63)
Jumlah		**1.027.609.786.782,00**	**1.123.629.816.520,00**	**(96.020.029.738,00)**	**(8,55)**

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 sebesar Rp1.027.609.786.782,00 berasal dari Pendapatan Transfer LRA sebesar Rp1.255.825.821.775,00 dikurang dengan koreksi Piutang tahun berjalan sebesar Rp14.555.720.000,00 dikurang penyaluran TDF Tahun 2024 sebesar Rp73.268.000,00 dikurang Piutang tahun sebelumnya sebesar Rp63.787.091.682,00 ditambah dengan Piutang tahun berjalan sebesar Rp37.987.322.203,00 dan dikurang Dana Desa sebesar minus Rp187.787.277.514,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 341 Perbandingan Pendapatan Transfer LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Koreksi Piutang Tahun Berjalan	Penyaluran TDF 2024	Piutang Tahun Sebelumnya	Piutang Tahun Berjalan	Dana Desa	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8=(2-3-4-5+6+7)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		**1.169.598.451.826,00**	**14.555.720.000,00**	**73.268.000,00**	**1.366.344.000,00**	**16.832.132.800,00**	**(187.787.277.514,00)**	**982.647.975.112,00**
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	975.142.384.312,00	14.555.720.000,00	73.268.000,00	1.366.344.000,00	16.832.132.800,00	0,00	975.979.185.112,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	194.456.067.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(187.787.277.514,00)	6.668.790.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		**86.227.369.949,00**	**0,00**	**0,00**	**62.420.747.682,00**	**21.155.189.403,00**	**0,00**	**44.961.811.670,00**
1	Pendapatan Bagi Hasil	81.866.806.128,00	0,00	0,00	58.060.183.861,00	**21.155.189.403,00**	0,00	**44.961.811.670,00**
2	Bantuan Keuangan	4.360.563.821,00	0,00	0,00	4.360.563.821,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**1.255.825.821.775,00**	**14.555.720.000,00**	**73.268.000,00**	**63.787.091.682,00**	**37.987.322.203,00**	**(187.787.277.514,00)**	**1.027.609.786.782,00**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp982.647.975.112,00	**Rp1.049.158.777.053,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp982.647.975.112,00 dan sebesar Rp1.049.158.777.053,00 mengalami penurunan sebesar Rp66.510.801.941,00 atau minus 6,34%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 342 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	975.979.185.112,00	1.036.441.823.053,00	(60.462.637.941,00)	(5,83)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	6.668.790.000,00	12.716.954.000,00	(6.048.164.000,00)	(47,56)
Jumlah		**982.647.975.112,00**	**1.049.158.777.053,00**	**(66.510.801.941,00)**	**(6,34)**

5.4.1.2.1.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp975.979.185.112,00	**Rp1.036.441.823.053,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp975.979.185.112,00 dan Rp1.036.441.823.053,00 mengalami penurunan sebesar Rp60.462.637.941,00 atau minus 5,83% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 343 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dana Perimbangan-LO	0,00	1.036.441.823.053,00	(1.036.441.823.053,00)	(100,00)
2	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	24.157.595.000,00	0,00	24.157.595.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	754.341.909.960,00	0,00	754.341.909.960,00	100,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	197.479.680.152,00	0,00	197.479.680.152,00	100,00
Jumlah		**975.979.185.112,00**	**1.036.441.823.053,00**	**(60.462.637.941,00)**	**(5,83)**

5.4.1.2.1.1.1 Dana Perimbangan-LO

Dana Perimbangan-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp1.036.441.823.053,00**

Dana Perimbangan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar 0,00 dan Rp1.036.441.823.053,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.036.441.823.053,00 atau minus 100,00% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 344 Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%Naik/ Turun
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	22.429.523.000,00	(22.429.523.000,00)	(100,00)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	752.945.824.000,00	(752.945.824.000,00)	100,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	101.278.750.464,00	(101.278.750.464,00)	100,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	159.787.725.589,00	(159.787.725.589,00)	100,00
	Jumlah	**0,00**	**1.036.441.823.053,00**	**(1.036.441.823.053,00)**	**(100,00)**

5.4.1.2.1.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Dana Transfer Umum-DBH	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp22.429.523.000,00**

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO di *mapping* pada kode rekening Dana Bagi Hasil (DBH)-LO. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar 0,00 dan Rp22.429.523.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.429.523.000,00 atau minus 100,00% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 345 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%Naik/ Turun
1	DBH PBB-LO	0,00	2.638.851.000,00	(2.638.851.000,00)	(100,00)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	0,00	6.859.310.000,00	(6.859.310.000,00)	(100,00)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	0,00	473.302.000,00	(473.302.000,00)	(100,00)
4	DBH CHT-LO	0,00	1.252.261.000,00	(1.252.261.000,00)	(100,00)
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	0,00	1.162.031.000,00	(1.162.031.000,00)	(100,00)
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	0,00	35.662.000,00	(35.662.000,00)	(100,00)
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	0,00	72.237.000,00	(72.237.000,00)	(100,00)
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	0,00	1.503.453.000,00	(1.503.453.000,00)	(100,00)
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	0,00	305.347.000,00	(305.347.000,00)	(100,00)
10	DBH SDA Perikanan-LO	0,00	1.120.498.000,00	(1.120.498.000,00)	(100,00)
11	DBH Sawit-LO	0,00	7.006.571.000,00	(7.006.571.000,00)	(100,00)
Jumlah		**0,00**	**22.429.523.000,00**	**(22.429.523.000,00)**	**(100,00)**

5.4.1.2.1.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Dana Transfer Umum-DAU	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp752.945.824.000,00**

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO di *mapping* pada kode rekening Dana Alokasi Umum (DAU)-LO. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp752.945.824.000,00

mengalami penurunan sebesar Rp752.945.824.000,00 atau minus 100,00% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 346 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	DAU-LO	0,00	599.218.385.000,00	(599.218.385.000,00)	(100,00)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	0,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	0,00	12.999.600.000,00	(12.999.600.000,00)	(100,00)
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	0,00	94.122.727.000,00	(94.122.727.000,00)	(100,00)
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	0,00	25.800.051.000,00	(25.800.051.000,00)	(100,00)
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	0,00	18.805.061.000,00	(18.805.061.000,00)	(100,00)
Jumlah		**0,00**	**752.945.824.000,00**	**(752.945.824.000,00)**	**(100,00)**

5.4.1.2.1.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp101.278.750.464,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik-LO di *mapping* pada kode rekening Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp101.278.750.464,00 mengalami penurunan sebesar Rp101.278.750.464,00 atau minus 100,00% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 347 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	0,00	377.184.790,00	(377.184.790,00)	(100,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	0,00	14.961.887.782,00	(14.961.887.782,00)	(100,00)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	0,00	11.216.425.602,00	(11.216.425.602,00)	(100,00)
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	87.728.700,00	(87.728.700,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	0,00	625.889.886,00	(625.889.886,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	2.859.494.840,00	(2.859.494.840,00)	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	0,00	2.059.918.320,00	(2.059.918.320,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	37.777.781.942,00	(37.777.781.942,00)	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	0,00	15.045.312.736,00	(15.045.312.736,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	0,00	4.328.158.000,00	(4.328.158.000,00)	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	10.077.147.866,00	(10.077.147.866,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO	0,00	1.861.820.000,00	(1.861.820.000,00)	(100,00)
Jumlah		**0,00**	**101.278.750.464,00**	**(101.278.750.464,00)**	**(100,00)**

5.4.1.2.1.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp159.787.725.589,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik-LO di *mapping* pada kode rekening Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp159.787.725.589,00 mengalami penurunan sebesar Rp159.787.725.589,00 atau minus 100,00% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 348 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	0,00	59.414.749.137,00	(59.414.749.137,00)	(100,00)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	0,00	2.085.000.000,00	(2.085.000.000,00)	(100,00)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	0,00	68.047.375.000,00	(68.047.375.000,00)	(100,00)
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	2.425.418.000,00	(2.425.418.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	2.829.506.920,00	(2.829.506.920,00)	(100,00)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	289.703.000,00	(289.703.000,00)	(100,00)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	0,00	7.055.480.693,00	(7.055.480.693,00)	(100,00)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	0,00	3.889.571.220,00	(3.889.571.220,00)	(100,00)
9	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	606.688.678,00	(606.688.678,00)	(100,00)
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO	0,00	1.110.839.200,00	(1.110.839.200,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	742.358.000,00	(742.358.000,00)	(100,00)
12	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	550.053.193,00	(550.053.193,00)	(100,00)
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	0,00	10.740.982.548,00	(10.740.982.548,00)	(100,00)
Jumlah		**0,00**	**159.787.725.589,00**	**(159.787.725.589,00)**	**(100,00)**

5.4.1.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Dana Bagi Hasil (DBH)	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp24.157.595.000,00	**Rp0,00**

DBH-LO dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DBH-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp24.157.595.000,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.157.595.000,00 atau 100,00% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 349 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	DBH Pajak-LO	16.510.659.000,00	0,00	16.510.659.000,00	100,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	4.862.355.000,00	0,00	4.862.355.000,00	100,00
3	DBH Lainnya-LO	2.784.581.000,00	0,00	2.784.581.000,00	100,00
Jumlah		**24.157.595.000,00**	**0,00**	**24.157.595.000,00**	**100,00**

5.4.1.2.1.1.2.1 DBH Pajak-LO

DBH Pajak-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp16.510.659.000,00	**Rp0,00**

DBH Pajak-LO dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DBH pajak-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp16.510.659.000,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.510.659.000,00 atau 100,00%.

DBH Pajak-LO tahun 2025 sebesar Rp16.510.659.000,00 berasal dari DBH pajak-LRA sebesar Rp15.319.870.200,00 ditambah piutang tahun berjalan sebesar Rp12.559.893.800,00 dikurang piutang tahun sebelumnya sebesar Rp714.274.000,00 dan dikurang koreksi piutang tahun berjalan sebesar Rp10.654.831.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 350 Perbandingan DBH Pajak LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Piutang Tahun Berjalan	Piutang Tahun Sebelumnya	Koreksi Piutang Tahun Berjalan	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5	6=(2+3-4-5)
1	DBH PBB-LO	4.127.126.900	3.548.031.100,00	599.438.000,00	2.776.759.000,00	4.298.961.000,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	9.003.626.100,00	7.349.893.900,00	0,00	6.349.491.000,00	10.004.029.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	617.024.200,00	1.189.905.800,00	11.883.000,00	1.115.149.000,00	679.898.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	1.572.093.000,00	472.063.000,00	102.953.000,00	413.432.000,00	1.527.771.000,00
Jumlah		**15.319.870.200,00**	**12.559.893.800,00**	**714.274.000,00**	**10.654.831.000,00**	**16.510.659.000,00**

5.4.1.2.1.1.2.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
DBH SDA	**Rp4.862.355.000,00**	**Rp0,00**

DBH SDA-LO dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DBH SDA-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp4.862.355.000,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.862.355.000,00 atau 100,00%.

DBH SDA-LO tahun 2025 sebesar Rp4.862.355.000,00 berasal dari DBH SDA-LRA sebesar Rp5.216.343.000,00 ditambah piutang tahun sebesar Rp4.272.239.000,00 dikurang piutang tahun sebelumnya sebesar Rp652.070.000,00 dikurang koreksi piutang tahun berjalan sebesar Rp3.900.889.000,00 dan dikurang penyaluran TDF 2024 sebesar Rp73.268.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 351 Perbandingan DBH Sumber Daya Alam (SDA) LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Piutang Tahun Berjalan	Piutang Tahun Sebelumnya	Koreksi Piutang Tahun Berjalan	Penyaluran TDF 2024	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5	6	7=(2+3-4-5-6)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	52.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.769.000,00
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	5.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926.000,00
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	134.860.000,00	104.301.000,00	20.874.000,00	92.413.000,00	6.410.000,00	119.464.000,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	4.088.855.000,00	4.167.938.000,00	631.196.000,00	3.808.476.000,00	66.857.000,00	3.750.264.000,00
5	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	82.757.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	82.756.000,00
6	DBH SDA Perikanan-LO	851.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.176.000,00
Jumlah		**5.216.343.000,00**	**4.272.239.000,00**	**652.070.000,00**	**3.900.889.000,00**	**73.268.000,00**	**4.862.355.000,00**

5.4.1.2.1.1.2.3 DBH Lainnya-LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
DBH Lainnya	**Rp2.784.581.000,00**	**Rp0,00**

DBH Lainnya-LO dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DBH Lainnya-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.784.581.000,00 00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.784.581.000,00 atau 100,00%.

DBH Lainnya pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp2.784.581.000,00 dan tidak terdapat penambahan maupun pengurangan piutang tahun berjalan dan piutang tahun sebelumnya dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 352 Perbandingan DBH Lainnya LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DBH Sawit-LO	2.784.581.000,00	0,00	2.784.581.000,00
Jumlah		**2.784.581.000,00**	**0,00**	**2.784.581.000,00**

5.4.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp754.341.909.960,00	**Rp0,00**

DAU-LO dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DAU-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp754.341.909.960,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp754.341.909.960,00 atau 100,00% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 353 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	649.643.409.733,00	0,00	649.643.409.733,00	100,00
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	104.698.500.227,00	0,00	104.698.500.227,00	100,00
Jumlah		**754.341.909.960,00**	**0,00**	**754.341.909.960,00**	**100,00**

5.4.1.2.1.1.3.1 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO

DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaanya-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp649.643.409.733,00	**Rp0,00**

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya-LO dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp649.643.409.733,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp649.643.409.733,00 atau 100,00%.

DBH yang Tidak Ditentukan Penggunaannya pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp649.643.409.733,00 dan tidak terdapat penambahan maupun pengurangan piutang tahun berjalan dan piutang tahun sebelumnya dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 354 Perbandingan DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DAU-LO	649.643.409.733,00	0,00	649.643.409.733,00
Jumlah		**649.643.409.733,00**	**0,00**	**649.643.409.733,00**

5.4.1.2.1.1.3.2 DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO

DAU yang Ditentukan Penggunaanya-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp104.698.500.227,00	**Rp0,00**

DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp104.698.500.227,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.698.500.227,00 atau 100,00%.

DAU yang Ditentukan Penggunaannya pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp104.698.500.227,00 dan tidak terdapat penambahan maupun pengurangan piutang tahun berjalan dan piutang tahun sebelumnya dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 355 Perbandingan DAU yang Ditentukan Penggunaannya LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	2.117.701.227,00	0,00	2.117.701.227,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	72.799.072.000,00	0,00	72.799.072.000,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	27.781.727.000,00	0,00	27.781.727.000,00
Jumlah		**104.698.500.227,00**	**0,00**	**104.698.500.227,00**

5.4.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp197.479.680.152,00	**Rp0,00**

DAK-LO dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DAK-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp197.479.680.152,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp197.479.680.152,00 atau 100,00% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 356 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	DAK Fisik-LO	18.713.218.871,00	0,00	18.713.218.871,00	100,00
2	DAK Non Fisik-LO	178.766.461.281,00	0,00	178.766.461.281,00	100,00
Jumlah		**197.479.680.152,00**	**0,00**	**197.479.680.152,00**	**100,00**

5.4.1.2.1.1.4.1 DAK Fisik-LO

DAK Fisik-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp18.713.218.871,00	**Rp0,00**

DAK Fisik-LO dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DAK fisik-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp18.713.218.871,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.713.218.871,00 atau 100,00%.

DAK Fisik pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp18.713.218.871,00 dan tidak terdapat penambahan maupun pengurangan piutang tahun berjalan dan piutang tahun sebelumnya dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 357 Perbandingan DAK Fisik LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	509.853.334,00	0,00	509.853.334,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan-LO	9.957.288.909,00	0,00	9.957.288.909,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	3.673.001.628,00	0,00	3.673.001.628,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana-LO	180.097.000,00	0,00	180.097.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM-LO	4.392.978.000,00	0,00	4.392.978.000,00
Jumlah		**18.713.218.871,00**	**0,00**	**18.713.218.871,00**

5.4.1.2.1.1.4.2 DAK Non Fisik-LO

DAK Non Fisik-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp178.766.461.281,00	**Rp0,00**

DAK Non Fisik-LO dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. DAK Non Fisik-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp178.766.461.281,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp178.766.461.281,00 atau 100,00%.

DAK Non Fisik pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp178.766.461.281,00 dan tidak terdapat penambahan maupun pengurangan piutang tahun berjalan dan piutang tahun sebelumnya dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 358 Perbandingan DAK Non Fisik LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	58.436.752.323,00	0,00	58.436.752.323,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.970.000.000,00	0,00	1.970.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	90.276.737.200,00	0,00	90.276.737.200,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.300.000.000,00	0,00	2.300.000.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	248.695.000,00	0,00	248.695.000,00
6	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	449.412.000,00	0,00	449.412.000,00
7	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	1.154.650.820,00	0,00	1.154.650.820,00
8	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	2.850.538.380,00	0,00	2.850.538.380,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	9.373.321.258,00	0,00	9.373.321.258,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO	177.128.000,00	0,00	177.128.000,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
12	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	10.254.275.426,00	0,00	10.254.275.426,00
13	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO	1.169.950.874,00	0,00	1.169.950.874,00
Jumlah		**178.766.461.281,00**	**0,00**	**178.766.461.281,00**

5.4.1.2.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp6.668.790.000,00	**Rp12.716.954.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya mencakup berbagai jenis dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan salah satunya yaitu Insentif Fiskal-LO. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp6.668.790.000,00 dan Rp12.716.954.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.048.164.000,00 atau minus 47,56%.

5.4.1.2.1.2.1 Insentif Fiskal-LO

Insentif Fiskal-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp6.668.790.000,00	**Rp12.716.954.000,00**

Insentif Fiskal-LO merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah otonom berdasarkan kriteria tertentu untuk mendorong perbaikan kinerja di berbagai bidang. Insentif Fiskal-LO terdiri dari Insentif Fiskal-LO berupa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO. Insentif Fiskal-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp6.668.790.000,00 dan Rp12.716.954.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.048.164.000,00 atau minus 47,56% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 359 Insentif Fiskal–LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Insentif Fiskal-LO	0,00	12.716.954.000,00	(12.716.954.000,00)	(100,00)
2	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	6.668.790.000,00	0,00	6.668.790.000,00	100,00
Jumlah		**6.668.790.000,00**	**12.716.954.000,00**	**(6.048.164.000,00)**	**(47,56)**

Insentif Fiskal pada LO sama dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp6.668.790.000,00 dan tidak terdapat penambahan maupun pengurangan piutang tahun berjalan dan piutang tahun sebelumnya dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 360 Perbandingan Insentif Fiskal LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Insentif Fiskal-LO	0,00	0,00	0,00
2	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	6.668.790.000,00	0,00	6.668.790.000,00
Jumlah		**6.668.790.000,00**	**0,00**	**6.668.790.000,00**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp44.961.811.670,00	**Rp74.471.039.467,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp44.961.811.670,00 dan sebesar Rp74.471.039.467,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.509.227.797,00 atau minus 39,63%. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil-LO dan Bantuan Keuangan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 361 Pendapatan Transfer Antar Daerah–LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	44.961.811.670,00	70.110.475.646,00	(25.148.663.976,00)	(35,87)
2	Bantuan Keuangan	0,00	4.360.563.821,00	(4.360.563.821,00)	(100,00)
Jumlah		**44.961.811.670,00**	**74.471.039.467,00**	**(29.509.227.797,00)**	**(39,63)**

5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil-LO

Pendapatan Bagi Hasil-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp44.961.811.670,00	**Rp70.110.475.646,00**

Pendapatan Bagi Hasil-LO merupakan bagi hasil pajak daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Karo yang dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan Bagi Hasil-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp44.961.811.670,00 dan Rp70.110.475.646,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.148.663.976,00 atau minus 35,87%.

5.4.1.2.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp44.961.811.670,00	**Rp70.110.475.646,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp44.961.811.670,00 dan Rp70.110.475.646,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.148.663.976,00 atau minus 35,87% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 362 Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	58.773.978,00	17.592.697.823,00	(17.533.923.845,00)	(99,67)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	100.612.039,00	9.819.175.345,00	(9.718.563.306,00)	(98,98)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	19.209.780.406,00	17.269.628.691,00	1.940.151.715,00	11,23
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	2.336.022.980,00	1.673.201.393,00	662.821.587,00	39,61
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	23.256.622.267,00	23.755.772.394,00	(499.150.127,00)	(2,10)
Jumlah		**44.961.811.670,00**	**70.110.475.646,00**	**(25.148.663.976,00)**	**(35,87)**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2025 sebesar Rp44.961.811.670,00 berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA sebesar Rp81.866.806.128,00 ditambah Piutang Bagi Hasil Pajak tahun berjalan sebesar Rp21.155.189.403,00 dan dikurang Piutang Bagi Hasil Pajak tahun sebelumnya sebesar Rp58.060.183.861,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 363 Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Piutang Tahun Berjalan	Piutang Tahun Sebelumnya	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5=(2+3-4)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.106.468.014,00	58.773.978,00	18.106.468.014,00	58.773.978,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.264.087.427,00	100.612.039,00	11.264.087.427,00	100.612.039,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.515.796.800,00	18.659.780.406,00	26.965.796.800,00	19.209.780.406,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.723.831.620,00	2.336.022.980,00	1.723.831.620,00	2.336.022.980,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.256.622.267,00	0,00	0,00	23.256.622.267,00
	Jumlah	**81.866.806.128,00**	**21.155.189.403,00**	**58.060.183.861,00**	**44.961.811.670,00**

5.4.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp4.360.563.821,00**

Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Karo yang dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bantuan Keuangan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp4.360.563.821,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.360.563.821,00 atau minus 100,00%.

5.4.1.2.2.2.1 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp4.360.563.821,00**

Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp4.360.563.821,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.360.563.821,00 atau minus 100,00%.

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi tahun 2025 sebesar Rp0,00 berasal dari Bantuan Keuangan LRA sebesar Rp4.360.563.821,00 ditambah piutang bantuan keuangan tahun berjalan sebesar Rp0,00 dan dikurang piutang bantuan keuangan tahun sebelumnya sebesar Rp4.360.563.821,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 364 Perbandingan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Pusat LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Piutang Tahun Berjalan	Piutang Tahun Sebelumnya	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5=(2+3-4)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.360.563.821,00	0,00	4.360.563.821,00	0,00
Jumlah		**4.360.563.821,00**	**0,00**	**4.360.563.821,00**	**0,00**

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp207.424.713.597,17	**Rp31.206.048.485,00**

Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan pendapatan di luar PAD. Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO terdiri dari Pendapatan Hibah-LO dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO.

Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp207.424.713.597,17 dan Rp31.206.048.485,00 mengalami kenaikan sebesar Rp176.218.665.112,17 atau 564,69% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 365 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Hibah-LO	189.147.575.327,17	14.621.715.995,00	174.525.859.332,17	1.193,61
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	18.288.010.011,00	16.584.332.490,00	1.703.677.521,00	10,27
Jumlah		**207.424.713.597,17**	**31.206.048.485,00**	**176.218.665.112,17**	**564,69**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp189.147.575.327,17	**Rp14.621.715.995,00**

Pendapatan Hibah-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp189.147.575.327,17 dan Rp14.621.715.995,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 174.525.859.332,17 atau 1.193,61%.

Pendapatan Hibah pada LO tahun 2025 sebesar Rp189.147.575.327,17 sedangkan pada LRA sebesar Rp0,00. Terdapat selisih sebesar Rp189.147.575.327,17 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 366 Perbandingan Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Hibah Jalan dan Jembatan ke Dinas PUTR, APJ dan PJU ke DISHUB	Hibah alat dan obat kontrasepsi dari BKKBN ke DP3AP2KB, Obat-obatan dan Vaksin ke DINKES, dan Barang Logistik ke BPBD	Hibah Tanah ke DKPOP dan DPKPP, Hibah Karcis ke DISHUB	Hibah Peralatan dan Mesin ke DLH dan Hibah Sapo Angin ke PUTR, dan Hibah PSU ke PERKIMTAN	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5	6	7=(2+3+4+5+6)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	180.399.036.102,00	0,00	0,00	0,00	180.399.036.102,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Hibah Jalan dan Jembatan ke Dinas PUTR, APJ dan PJU ke DISHUB	Hibah alat dan obat kontrasepsi dari BKKBN ke DP3AP2KB, Obat-obatan dan Vaksin ke DINKES, dan Barang Logistik ke BPBD	Hibah Tanah ke DKPOP dan DPKPP, Hibah Karcis ke DISHUB	Hibah Peralatan dan Mesin ke DLH dan Hibah Sapo Angin ke PUTR, dan Hibah PSU ke PERKIMTAN	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5	6	7=(2+3+4+5+6)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	0,00	7.460.054.303,00	0,00	0,00	7.460.054.303,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	0,00	203.907.680,00	0,00	203.907.680,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.577.242,17	1.084.577.242,17
Jumlah		**0,00**	**180.399.036.102,00**	**7.460.054.303,00**	**203.907.680,00**	**1.084.577.242,17**	**189.147.575.327,17**

Khusus Pendapatan Hibah-LO perolehan nilai LO berasal dari lain-lain Pendapatan Hibah LRA ditambah hibah barang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah LRA sebesar Rp0,00;
2. Pendapatan Hibah barang dan tanah sebesar Rp189.147.575.327,17 terdiri dari:
   a. Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Jalan dan Jembatan sebesar Rp178.426.098.783,00 yang terdiri dari jalan kabupaten sebesar Rp171.340.654.568,00 dan jembatan pada jalan kabupaten sebesar Rp7.085.444.215,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 216/BAST/Bb2/2025 Tanggal 21 Agustus 2025;
   b. Hibah BMN dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) ke Dinas Perhubungan berupa Penerangan Jalan umum sebesar Rp1.972.937.319,00 yang terdiri dari APJ hemat energi sebanyak 100 unit sebesar Rp257.494.980,00 dan PJU TS sebanyak 106 unit sebesar Rp1.715.442.339,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 1047/BAST/BN.07/KPB/2025 Tanggal 3 Desember 2025;
   c. Hibah persediaan obat-obatan lainnya berupa alat dan obat kontrasepsi dari BKKBN Provinsi Sumatera Utara ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp493.397.102,00;
   d. Hibah obat-obatan dan vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ke Dinas Kesehatan sebesar Rp6.962.772.201,00 yang terdiri dari sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 000.2.3.1/DINKES/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025;
   e. Hibah barang diserahkan ke masyarakat berupa logistik (kantong mayat) sebanyak 25 lembar dari BPBD Provinsi Sumatera Utara ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.885.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 704/Bid.II/BPBD/VII/2025 Tanggal 4 Juli 2025;
   f. Hibah tanah dari kelompok masyarakat untuk pembangunan Juma Jokowi ke Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp34.000.000,00 sesuai dengan surat keterangan hibah tanah/bangunan Nomor 04/JJ-LMD/2025 Tanggal 27 Agustus 2025;
   g. Hibah karcis retribusi parkir dari pihak ketiga ke Dinas Perhubungan sebesar Rp8.371.200,00 dengan jumlah sebanyak 1.308 blok sesuai dengan surat kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor 500.7/537/PHB/2025 tanggal 11 Agustus 2025 yang berada dalam Berita Acara Serah Terima Tanggal 28 Agustus 2025;
   h. Hibah peralatan dan mesin dari PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ke Dinas Lingkungan Hidup berupa kendaraan bermotor sebesar

Rp390.093.692,00 yang terdiri dari 2 unit kendaraan bermotor pengangkut sampah dan 1 unit bin container sampah sebesar Rp200.000.000,00 sesuai dengan surat serah terima bantuan tanggal 1 Oktober 2024 dan 4 unit motor roda tiga HTM gajah 200 DP 2.0 baktor buka sebesar Rp190.093.692,00 sesuai dengan dengan surat serah terima bantuan tanggal 15 September 2025;

i. Hibah pemeliharaan Sapo Angin yang terletak di Berastagi melalui program CSR PT Bank Sumut ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp85.294.160,00 sesuai dengan BAST Hasil Pekerjaan Nomor 1011/PPK-BGBK/PUTR/2025 tanggal 31 Desember 2025;
j. Hibah PSU perumahan berupa Tanah dari Pengembang ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp609.189.390,17; dan
k. Hibah tanah untuk jalan khusus komplek dari pengembang ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp161.536.480,00 sesuai dengan surat keterangan hibah tanah/bangunan tanggal 10 Juni 2025.

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan-LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp18.277.138.270,00	**Rp16.584.332.490,00**

Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp18.277.138.270,00 dan Rp16.584.332.490,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.692.805.780,00 atau 10,21%.

Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO sama dengan LRA tahun 2025 yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD sebesar Rp18.277.138.270,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 367 Perbandingan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LRA dengan LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO (Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP)	18.277.138.270,00	0,00	18.277.138.270,00
	Jumlah	**18.277.138.270,00**	**0,00**	**18.277.138.270,00**

5.4.2 Beban

Beban	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.235.398.946.126,51	**Rp1.259.280.271.828,66**

Beban tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.235.398.946.126,51 dan Rp1.259.280.271.828,66 terjadi penurunan sebesar Rp23.881.325.702,15 atau minus 1,90% yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, dan Beban Tidak Terduga dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 368 Beban Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Operasi	971.911.670.334,23	1.010.170.303.906,19	(38.258.633.571,96)	(3,79)
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	175.465.476.551,28	162.168.992.822,47	13.296.483.728,81	8,20
3	Beban Transfer	88.021.799.241,00	86.747.499.100,00	1.274.300.141,00	1,47
4	Beban Tidak Terduga	0,00	193.476.000,00	(193.476.000,00)	(100,00)
Jumlah		**1.235.398.946.126,51**	**1.259.280.271.828,66**	**(23.881.325.702,15)**	**(1,90)**

5.4.2.1 Beban Operasi

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Operasi	**Rp971.911.670.334,23**	**Rp1.010.170.303.906,19**

Beban Operasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp971.911.670.334,23 dan Rp1.010.170.303.906,19 terjadi penurunan sebesar Rp38.258.633.571,96 atau minus 3,79% yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah dan Beban Penyisihan Piutang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 369 Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pegawai	626.863.135.357,00	616.832.021.667,00	10.031.113.690,00	1,63
2	Beban Barang dan Jasa	321.181.214.231,23	334.404.637.669,00	(13.223.423.437,77)	(3,95)
3	Beban Hibah	20.263.372.634,00	55.141.293.737,00	(34.877.921.103,00)	(63,25)
4	Beban Penyisihan Piutang	3.603.948.112,00	3.792.350.833,19	(188.402.721,19)	(4,97)
Jumlah		**971.911.670.334,23**	**1.010.170.303.906,19**	**(38.258.633.571,96)**	**(3,79)**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pegawai	**Rp626.863.135.357,00**	**Rp616.832.021.667,00**

Beban Pegawai tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp626.863.135.357,00 dan Rp616.832.021.667,00 terjadi kenaikan sebesar Rp10.031.113.690,00 atau 1,63% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 370 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	386.734.108.530,00	396.886.438.205,00	(10.152.329.675,00)	(2,56)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	193.490.577.752,00	102.641.945.366,00	90.848.632.386,00	88,51
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.259.985.700,00	91.498.016.921,00	(76.238.031.221,00)	(83,32)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	18.526.406.870,00	14.544.960.501,00	3.981.446.369,00	27,37
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	460.545.596,00	481.926.060,00	(21.380.464,00)	(4,44)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	781.850.000,00	548.710.000,00	233.140.000,00	42,49
7	Beban Pegawai BLUD	11.609.660.909,00	10.230.024.614,00	1.379.636.295,00	13,49
Jumlah		**626.863.135.357,00**	**616.832.021.667,00**	**10.031.113.690,00**	**1,63**

1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

   Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp386.734.108.530,00 dan Rp396.886.438.205,00 terjadi penurunan sebesar Rp10.152.329.675,00 atau minus 2,56%.

   Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 sebesar Rp386.734.108.530,00 berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LRA sebesar Rp387.266.905.627,00 ditambah Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun berjalan sebesar Rp317.961.167,00 dan dikurang Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun sebelumnya sebesar Rp850.758.264,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 371 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN LRA dengan Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Berjalan	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Sebelumnya	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5=(2+3-4)
1	Beban Gaji Pokok PNS	230.509.351.290,00	144.541.004,00	51.498.221,00	230.602.394.073,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK	60.450.498.141,00	27.566.167,00	0,00	60.478.064.308,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	21.519.182.780,00	7.731.062,00	2.635.254,00	21.524.278.588,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	5.504.965.041,00	549.064,00	549.064,00	5.504.965.041,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.008.869.950,00	8.000.000,00	3.055.000,00	7.013.814.950,00
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	16.582.782.642,00	7.000.000,00	0,00	16.589.782.642,00
7	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	6.075.555.000,00	540.000,00	0,00	6.076.095.000,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.299.500,00	2.960.000,00	2.000.000,00	1.661.259.500,00
9	BebanTunjangan Fungsional Umum PPPK	66.530.000,00	7.095.000,00	0,00	73.625.000,00
10	BebanTunjangan Beras PNS	11.417.586.150,00	4.779.720,00	1.303.560,00	11.421.062.310,00
11	BebanTunjangan Beras PPPK	3.721.500.855,00	1.665.660,00	1.231.140,00	3.721.935.375,00
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.007.881.596,00	568.624,00	89.290,00	1.008.360.930,00
13	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.916.010,00	2.173,00	220,00	2.917.963,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Berjalan	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Sebelumnya	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5=(2+3-4)
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	842.233,00	384,00	0,00	842.617,00
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.681.589.545,00	81.649.765,00	762.490.793,00	16.000.748.517,00
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.664.371.707,00	22.463.965,00	25.638.997,00	2.661.196.675,00
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	472.863.368,00	167.672,00	66.681,00	472.964.359,00
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	125.184.198,00	44.473,00	0,00	125.228.671,00
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.418.598.470,00	503.021,00	200.044,00	1.418.901.447,00
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	375.537.151,00	133.413,00	0,00	375.670.564,00
Jumlah		**387.266.905.627,00**	**317.961.167,00**	**850.758.264,00**	**386.734.108.530,00**

2. Beban Tambahan Penghasilan ASN

   Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp193.490.577.752,00 dan Rp102.641.945.366,00 terjadi kenaikan sebesar Rp 90.848.632.386,00 atau 88,51%.

   Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO tahun 2025 sebesar sebesar Rp193.490.577.752,00 berasal dari Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LRA sebesar Rp193.435.314.012,00 ditambah dengan Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun berjalan sebesar Rp55.263.740,00 dan koreksi Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp1.300.000,00 serta dikurang dengan Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun sebelumnya sebesar Rp1.300.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 372 Perbandingan Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Berjalan	Koreksi Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Sebelumnya	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5	6=(2+3+4-5)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	92.122.400.225,00	3.700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	92.126.100.225,00
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.933.753.906,00	51.563.740,00	0,00	0,00	4.985.317.646,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.835.036.975,00	0,00	0,00	0,00	1.835.036.975,00
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	123.799.000,00	0,00	0,00	0,00	123.799.000,00
5	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	41.025.417,00	0,00	0,00	0,00	41.025.417,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Berjalan	Koreksi Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Sebelumnya	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5	6=(2+3+4-5)
6	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	119.183.333,00	0,00	0,00	0,00	119.183.333,00
7	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	164.298.438,00	0,00	0,00	0,00	164.298.438,00
8	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	261.428.125,00	0,00	0,00	0,00	261.428.125,00
9	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	748.247.659,00	0,00	0,00	0,00	748.247.659,00
10	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	78.109.602,00	0,00	0,00	0,00	78.109.602,00
11	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	70.042.348,00	0,00	0,00	0,00	70.042.348,00
12	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	72.227.262,00	0,00	0,00	0,00	72.227.262,00
13	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	21.037.500,00	0,00	0,00	0,00	21.037.500,00
14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	136.600.000,00	0,00	0,00	0,00	136.600.000,00
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	9.343.150,00	0,00	0,00	0,00	9.343.150,00
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	57.234.375,00	0,00	0,00	0,00	57.234.375,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Berjalan	Koreksi Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Sebelumnya	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5	6=(2+3+4-5)
17	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	23.027.297,00	0,00	0,00	0,00	23.027.297,00
18	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	90.318.519.400,00	0,00	0,00	0,00	90.318.519.400,00
19	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00
Jumah		**193.435.314.012,00**	**55.263.740,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**193.490.577.752,00**

3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

   Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp15.259.985.700,00 dan Rp91.498.016.921,00 terjadi penurunan sebesar Rp76.238.031.221,00 atau minus 88,32%.

   Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO tahun 2025 sebesar Rp15.259.985.700,00 berasal dari Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp0,00 ditambah dengan Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp15.259.985.700,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 90.

4. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

   Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp18.526.406.870,00 dan Rp14.544.960.501,00 terjadi kenaikan sebesar Rp3.981.446.369,00 atau 27,37%.

   Beban Gaji dan Tunjangan DPRD sama dengan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2025 yaitu sebesar Rp18.526.406.870,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 373 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dengan Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)		(Rp)
1	Beban Uang Representasi DPRD	885.990.000,00	0,00	885.990.000,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	83.603.100,00	0,00	83.603.100,00
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	99.070.560,00	0,00	99.070.560,00
4	Beban Uang Paket DPRD	76.482.000,00	0,00	76.482.000,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.284.685.500,00	0,00	1.284.685.500,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.013.700,00	0,00	97.013.700,00
7	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00	0,00	5.040.000.000,00
8	Beban Tunjangan Reses DPRD	808.500.000,00	0,00	808.500.000,00
9	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	688.058,00	0,00	688.058,00
10	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	91.531.680,00	0,00	91.531.680,00
11	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.835.568,00	0,00	1.835.568,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025 (Rp)	Selisih	LO Tahun 2025 (Rp)
12	Beban Jaminan Kematian DPRD	5.506.704,00	0,00	5.506.704,00
13	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	3.774.000.000,00	0,00	3.774.000.000,00
14	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.277.500.000,00	0,00	6.277.500.000,00
Jumlah		**18.526.406.870,00**	**0,00**	**18.526.406.870,00**

5. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO

   Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp460.545.596,00 dan Rp481.926.060,00 terjadi penurunan sebesar Rp21.380.464,00 atau minus 4,44%.

   Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO sama dengan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LRA tahun 2025 yaitu sebesar Rp460.545.596,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 374 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dengan Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025 (Rp)	Selisih (Rp)	LO Tahun 2025 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	63.060.414,00	0,00	63.060.414,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.984.000,00	0,00	6.984.000,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000,00	0,00	91.260.000,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.831.600,00	0,00	6.831.600,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	445.817,00	0,00	445.817,00
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.160,00	0,00	1.160,00
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.598.000,00	0,00	5.598.000,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	112.320,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	336.960,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
12	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.643.750,00	0,00	14.643.750,00
13	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00
14	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	150.468.750,00	0,00	150.468.750,00
15	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	13.086.634,00	0,00	13.086.634,00
16	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.745.988,00	0,00	12.745.988,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
17	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	3.712.500,00	0,00	3.712.500,00
18	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	4.640.625,00	0,00	4.640.625,00
19	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.867.078,00	0,00	1.867.078,00
Jumlah		**460.545.596,00**	**0,00**	**460.545.596,00**

6. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
   Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp781.850.000,00 dan Rp548.710.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp233.140.000,00 atau 42,49%.
   Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO sama dengan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LRA tahun 2025 yaitu sebesar Rp781.850.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 375 Perbandingan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dengan Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)		(Rp)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	181.980.000,00	0,00	181.980.000,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	599.870.000,00	0,00	599.870.000,00
Jumlah		**781.850.000,00**	**0,00**	**781.850.000,00**

7. Beban Pegawai BLUD
   Beban Pegawai BLUD tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp11.609.660.909,00 dan Rp10.230.024.614,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.379.636.295,00 atau 13,49%.
   Beban Pegawai BLUD tahun 2025 sebesar Rp11.609.660.909,00 berasal dari Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp11.938.513.448,00 ditambah Utang Belanja Pegawai BLUD tahun berjalan sebesar Rp2.766.138.658,00 dan ditambah koreksi Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp48.411.787,00 serta dikurang dengan Utang Belanja Pegawai BLUD tahun sebelumnya sebesar Rp3.143.402.984,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 376 Perbandingan Belanja Pegawai BLUD dengan Beban Pegawai BLUD Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun Berjalan	Koreksi Utang Belanja Pegawai BLUD	Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun Sebelumnya	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5-6)
1	Beban Pegawai BLUD	11.938.513.448,00	2.766.138.658,00	48.411.787,00	3.143.402.984,00	11.609.660.909,00
Jumlah		**11.938.513.448,00**	**2.766.138.658,00**	**48.411.787,00**	**3.143.402.984,00**	**11.609.660.909,00**

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp321.181.214.231,23	**Rp334.404.637.669,00**

Beban Barang dan Jasa tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp321.181.214.231,23 dan Rp334.404.637.669,00 terjadi penurunan sebesar Rp13.223.423.437,77 atau minus 3,95% yang terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan,

Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BOSP dan Beban Barang dan Jasa BLUD dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 377 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Barang	118.317.085.751,40	116.796.950.477,00	1.520.135.274,40	1,30
2	Beban Jasa	126.389.012.586,50	116.255.333.168,00	10.133.679.418,50	8,72
3	Beban Pemeliharaan	18.679.830.784,00	22.267.683.622,00	(3.587.852.838,00)	(16,11)
4	Beban Perjalanan Dinas	33.936.397.461,00	52.907.257.613,00	(18.970.860.152,00)	(35,86)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.299.843.828,00	4.750.463.162,00	(450.619.334,00)	(9,49)
6	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	17.002.931.551,00	(17.002.931.551,00)	(100,00)
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	16.076.550.935,00	0,00	16.076.550.935,00	100,00
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	3.482.492.885,33	4.424.018.076,00	(941.525.190,67)	21,28
Jumlah		**321.181.214.231,23**	**334.404.637.669,00**	**(13.223.423.437,77)**	**(3,95)**

5.4.2.1.2.1 Beban Barang

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Barang	**Rp118.317.085.751,40**	**Rp116.796.950.477,00**

Beban Barang tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp118.317.085.751,40 dan Rp116.796.950.477,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.520.135.274,40 atau minus 1,30%. Beban Barang terdiri dari Beban Barang Pakai Habis, Beban Barang Tak Habis Pakai dan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 378 Beban Barang Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Barang Pakai Habis	115.770.390.789,40	114.385.361.640,00	1.385.029.149,40	1,21
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	96.252.373,00	2.411.588.837,00	(2.315.336.464,00)	(96,01)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.450.442.589,00	0,00	2.450.442.589,00	100,00
Jumlah		**118.317.085.751,40**	**116.796.950.477,00**	**1.520.135.274,40**	**1,30**

1. Beban Barang Pakai Habis

   Beban Barang Pakai Habis tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp115.770.390.789,40 dan sebesar Rp114.385.361.640,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.385.029.149,40 atau 1,21%.

   Beban Barang Pakai Habis tahun 2025 sebesar Rp115.770.390.789,40 merupakan akumulasi dari Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp72.972.344.404,00 dengan mutasi tambah sebesar Rp74.064.528.379,00 dan mutasi kurang sebesar Rp31.266.481.993,60 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 91.

2. Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban Barang Tak Habis Pakai tahun 2025 sebesar Rp96.252.373,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.411.588.837,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.315.336.464,00 atau minus 96,01%.

Beban Barang Tak Habis Pakai tahun 2025 sebesar Rp96.252.373,00 berasal dari Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp99.815.173,00 dikurang dengan kapitalisasi belanja persediaan bahan untuk kegiatan kantor lainnya dan komponen peralatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp3.126.000,00 dan kapitalisasi biaya umum ke persediaan yang dijual/diserahkan lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp436.800,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 379 Perbandingan Belanja Barang Tak Habis Pakai dengan Beban Barang Barang Tak Habis Pakai Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Kapitalisasi Belanja Persediaan Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Komponen Peralatan pada BAPPEDALITBANG	Kapitalisasi Biaya Umum ke persediaan yang dijual/diserahkan lainnya pada Dinas PUTR	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=(3-4-5)
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	89.419.973,00	3.126.000,00	0,00	86.293.973,00
2	Beban Pipa-Pipa Lainnya	10.395.200,00	0,00	436.800,00	9.958.400,00
Jumlah		**99.815.173,00**	**3.126.000,00**	**436.800,00**	**96.252.373,00**

3. Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.450.442.589,00 dan sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.450.442.589,00 atau 100,00%.

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi tahun 2025 sebesar Rp2.450.442.589,00 berasal dari Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp223.567.000,00 ditambah dengan ekstrakomptabel sebesar Rp1.180.131.160,00 ditambah mutasi antar aset tetap sebesar Rp1.319.093.027,00 ditambah koreksi mutasi antar aset tetap sebesar Rp1.242.090,00 ditambah belanja modal non kapitalisasi sebesar Rp9.950.120,00 ditambah koreksi atas pencatatan ekstrakomtabel dari alat kantor lainnya sebesar Rp5.960.192,00 dan dikurang dengan reklas antar aset tetap sebesar Rp289.501.000,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 92.

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp126.389.012.586,50	**Rp116.255.333.168,00**

Beban Jasa tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp126.389.012.586,50 dan Rp116.255.333.168,00 terjadi kenaikan sebesar Rp10.133.679.418,50 atau 8,72%. Beban Jasa terdiri dari Beban Jasa Kantor, Beban Iuran Jaminan/Asuransi, Beban Sewa Tanah, Beban Sewa Peralatan dan Mesin, Beban Sewa Gedung dan Bangunan, Beban Sewa Aset Tetap Lainnya, Beban Jasa Konsultasi Konstruksi, Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi, Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan, Dan Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 380 Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Jasa Kantor	94.488.014.410,00	92.401.896.181,00	2.086.118.229,00	2,26
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	24.613.053.313,00	15.041.501.843,00	9.571.551.470,00	63,63
3	Beban Sewa Tanah	3.161.757.250,00	320.760.000,00	2.840.997.250,00	885,71
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	909.074.260,00	1.225.473.375,00	(316.399.115,00)	(25,82)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	835.642.000,00	1.122.366.690,00	(286.724.690,00)	(25,55)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	69.935.000,00	50.102.000,00	19.833.000,00	39,59
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	495.570.649,00	4.837.798.522,00	(4.342.227.873,00)	(89,76)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	331.801.536,50	14.900.000,00	316.901.536,50	2.126,86
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.240.820.418,00	1.025.136.000,00	215.684.418,00	21,04
10	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	243.343.750,00	215.398.557,00	27.945.193,00	12,97
Jumlah		**126.389.012.586,50**	**116.255.333.168,00**	**10.133.679.418,50**	**8,72**

1. Beban Jasa Kantor

   Beban Jasa Kantor tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp94.488.014.410,00 dan Rp92.401.896.181,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.086.118.229,00 atau 2,26%.

   Beban Jasa Kantor tahun 2025 sebesar Rp94.488.014.410,00 merupakan akumulasi dari Belanja Jasa Kantor sebesar Rp106.000.774.863,00 ditambah dengan Utang Belanja Jasa Kantor tahun berjalan sebesar Rp594.892.118,00 ditambah koreksi Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp20.047.118,00 dikurang Utang Belanja Jasa Kantor tahun sebelumnya sebesar Rp496.900.546,00 dikurang kapitalisasi sebesar Rp201.180.000,00 dikurang reklas atas beban tenaga kesehatan sebesar Rp 8.730.853.803,00 dan dikurang koreksi ke persediaan (bahan pakai habis) sebesar Rp2.698.765.340,00 dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 93.
2. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

   Beban Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 24.613.053.313,00 dan Rp15.041.501.843,00 terjadi kenaikan sebesar Rp9.571.551.470,00 atau 63,63%.

   Beban Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2025 sebesar Rp24.613.053.313,00 yang berasal dari Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp24.616.253.713,00 dikurang dengan Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi tahun sebelumnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.200.400,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 381 Perbandingan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-LRA dengan Beban Iuran Jaminan/Asuransi-LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Sebelumnya pada DINKES	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.369.746.612,00	0,00	2.369.746.612,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Sebelumnya pada DINKES	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.700.048.600,00	0,00	20.700.048.600,00
3	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.529.567.200,00	3.200.400,00	1.526.366.800,00
4	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.838.578,00	0,00	7.838.578,00
5	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.052.723,00	0,00	9.052.723,00
Jumlah		**24.616.253.713,00**	**3.200.400,00**	**24.613.053.313,00**

3. Beban Sewa Tanah

   Beban Sewa Tanah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.161.757.250,00 dan Rp320.760.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.840.997.250,00 atau 885,71%.

   Beban Sewa Tanah sama dengan Belanja Sewa Tanah tahun 2025 yaitu sebesar Rp3.161.757.250,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 382 Perbandingan Belanja Sewa Tanah dengan Beban Sewa Tanah Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
2	Beban Sewa Tanah Kampung	3.024.000.750,00	0,00	3.024.000.750,00
3	Beban Sewa Lapangan Lainnya	126.256.500,00	0,00	126.256.500,00
Jumlah		**3.161.757.250,00**	**0,00**	**3.161.757.250,00**

4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

   Beban Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp909.074.260,00 dan Rp1.225.473.375,00 terjadi penurunan sebesar Rp316.399.115,00 atau minus 25,82%.

   Beban Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp909.074.260,00 yang berasal dari Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp907.394.260,00 ditambah dengan koreksi Belanja Modal (mebel) dan koreksi pencatatan belanja aset mebel pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.680.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 383 Perbandingan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-LRA dengan Beban Sewa Peralatan dan Mesin-LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Koreksi Belanja Modal (Mebel) dan Koreksi Pencatatan Belanja Aset Mebel pada Sekretariat DPRD	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5=(3+4)**
1	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	79.082.900,00	0,00	79.082.900,00
2	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	21.790.000,00	0,00	21.790.000,00
3	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	231.693.800,00	0,00	231.693.800,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Koreksi Belanja Modal (Mebel) dan Koreksi Pencatatan Belanja Aset Mebel pada Sekretariat DPRD	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)
4	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	173.080.000,00	0,00	173.080.000,00
6	Beban Sewa Mebel	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
7	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	195.684.060,00	0,00	195.684.060,00
8	Beban Sewa Peralatan Umum	200.663.500,00	1.680.000,00	202.343.500,00
Jumlah		**907.394.260,00**	**1.680.000,00**	**909.074.260,00**

5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

   Beban Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp835.642.000,00 dan Rp1.122.366.690,00 terjadi penurunan sebesar Rp286.724.690,00 atau minus 25,55%.

   Beban Sewa Gedung dan Bangunan sama dengan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2025 yaitu sebesar Rp835.642.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 384 Perbandingan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dengan Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	661.950.000,00	0,00	661.950.000,00
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	91.412.000,00	0,00	91.412.000,00
3	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	65.780.000,00	0,00	65.780.000,00
4	Beban Sewa Pagar	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	Jumlah	**835.642.000,00**	**0,00**	**835.642.000,00**

6. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

   Beban Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp69.935.000,00 dan Rp50.102.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp19.833.000,00 atau 39,59%. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya yaitu berupa Beban Sewa Alat Musik.

   Beban Sewa Aset Tetap Lainnya sama dengan Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2025 yaitu sebesar Rp69.935.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 385 Perbandingan Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya dengan Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Sewa Alat Musik	69.935.000,00	0,00	69.935.000,00
Jumlah		**69.935.000,00**	**0,00**	**69.935.000,00**

7. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp495.570.649,00 dan Rp4.837.798.522,00 terjadi penurunan sebesar Rp4.342.227.873,00 atau minus 89,76%.

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2025 sebesar Rp495.570.649,00 yang berasal dari Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebesar Rp3.883.183.078,00 ditambah dengan Utang Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi tahun berjalan sebesar Rp29.100.000,00 dan ditambah dengan koreksi Utang Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi tahun berjalan sebesar minus Rp29.100.000,00 serta dikurang dengan Utang Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi tahun berjalan sebesar Rp275.490.000,00 dikurang dengan kapitalisasi sebesar Rp3.094.367.429,00 dikurang dengan aset tetap akhir tahun 2025 dan mutasi antar aset tetap sebesar Rp17.755.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 386 Perbandingan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dengan Beban Jasa Konsultasi Konstruksi Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Sebelumnya	Kapitalisasi	Aset Tetap Akhir Tahun 2025 dan Mutasi antar Aset Tetap	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(3-4-5-6)
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	687.457.455,00	0,00	335.359.955,00	3.280.000,00	348.817.500,00
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	99.526.000,00	0,00	90.286.000,00	9.000.000,00	240.000,00
3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	706.523.862,00	126.780.000,00	577.279.931,00	0,00	2.463.931,00
4	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.179.009.561,00	0,00	1.169.522.943,00	5.475.000,00	4.011.618,00
5	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.070.628.600,00	148.710.000,00	921.918.600,00	0,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	127.217.100,00	0,00	0,00	0,00	127.217.100,00
7	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	12.820.500,00	0,00	0,00	0,00	12.820.500,00
Jumlah		**3.883.183.078,00**	**275.490.000,00**	**3.094.367.429,00**	**17.755.000,00**	**495.570.649,00**

8. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

   Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp331.801.536,50 dan Rp14.900.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp316.901.536,50 atau 2.126,86%.

   Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi sama dengan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2025 yaitu sebesar Rp331.801.536,50 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 387 Perbandingan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi dengan Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	232.567.536,50	0,00	232.567.536,50
2	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	99.234.000,00	0,00	99.234.000,00
Jumlah		**331.801.536,50**	**0,00**	**331.801.536,50**

9. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

   Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.240.820.418,00 dan Rp1.025.136.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp 215.684.418,00 atau 21,04%.

   Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2025 sebesar Rp1.240.820.418,00 yang berasal dari Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp1.241.013.618,00 dikurang dengan mutasi beban kursus singkat ke beban natura dan beban perabot kantor ke beban barang yang diserahkan ke masyarakat pada Dinas Sosial sebesar Rp193.200,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 388 Perbandingan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dengan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Mutasi Beban Kursus Singkat ke Beban Natura dan Beban Perabot Kantor ke Beban Barang yang diserahkan ke Masyarakat Pada Dinas Sosial	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	299.263.618,00	193.200,00	299.070.418,00
2	Beban Bimbingan Teknis	941.750.000,00	0,00	941.750.000,00
Jumlah		**1.241.013.618,00**	**193.200,00**	**1.240.820.418,00**

10. Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN

Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp243.343.750,00 dan Rp215.398.557,00 terjadi kenaikan sebesar Rp27.945.193,00 atau 12,97%.

Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN sama dengan Belanja Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN tahun 2025 yaitu sebesar Rp243.343.750,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 389 Perbandingan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dengan Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	86.531.250,00	0,00	86.531.250,00
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	100.312.500,00	0,00	100.312.500,00
Jumlah		**243.343.750,00**	**0,00**	**243.343.750,00**

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp18.679.830.784,00	**Rp22.267.683.622,00**

Beban Pemeliharaan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp18.679.830.784,00 dan Rp22.267.683.622,00 terjadi penurunan sebesar Rp3.587.852.838,00 atau minus 16,11%. Beban Pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Tanah, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 390 Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Tanah	1.011.644.350,00	806.159.950,00	205.484.400,00	25,49
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.997.484.988,00	7.016.092.049,00	(18.607.061,00)	(0,27)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	458.909.820,00	1.863.799.894,00	(1.404.890.074,00)	(75,38)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.206.611.626,00	12.581.631.729,00	(2.375.020.103,00)	(18,88)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00	100,00
Jumlah		**18.679.830.784,00**	**22.267.683.622,00**	**(3.587.852.838,00)**	**(16,11)**

1. Beban Pemeliharaan Tanah
   Beban Pemeliharaan Tanah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.011.644.350,00 dan Rp806.159.950,00 terjadi kenaikan sebesar Rp205.484.400,00 atau 25,49%. Beban Pemeliharaan Tanah sama dengan Belanja Pemeliharaan Tanah tahun 2025 yaitu sebesar Rp1.011.644.350,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 391 Perbandingan Belanja Pemeliharaan Tanah dengan Beban Pemeliharaan Tanah Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	247.982.100,00	0,00	247.982.100,00
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	763.662.250,00	0,00	763.662.250,00
Jumlah		**1.011.644.350,00**	**0,00**	**1.011.644.350,00**

2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
   Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp6.997.484.988,00 dan Rp7.016.092.049,00 terjadi penurunan sebesar Rp18.607.061,00 atau minus 0,27%.
   Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp6.997.484.988,00 yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.049.255.635,00 dikurang dengan reklasifikasi belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.000.000,00 dan mutasi antar aset tetap dan kapitalisasi belanja pemeliharaan alat rumah tangga pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp48.770.647,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 392 Perbandingan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Reklasifikasi Belanja Barjas yang dikapitalisasi ke Aset Tetap pada BPBD	Mutasi antar Aset tetap dan Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga pada BAPENDA	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=(3-4-5)
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	34.325.175,00	0,00	0,00	34.325.175,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	566.953.775,00	0,00	0,00	566.953.775,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Reklasifikasi Belanja Barjas yang dikapitalisasi ke Aset Tetap pada BPBD	Mutasi antar Aset tetap dan Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga pada BAPENDA	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=(3-4-5)
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.514.623.305,00	0,00	0,00	3.514.623.305,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	704.756.700,00	0,00	0,00	704.756.700,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	699.835.439,00	0,00	0,00	699.835.439,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	156.911.880,00	0,00	0,00	156.911.880,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	145295625,00	0,00	0,00	145.295.625,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	143.710.250,00	0,00	0,00	143.710.250,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	301.145.636,00	3.000.000,00	48.770.647,00	249.374.989,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Reklasifikasi Belanja Barjas yang dikapitalisasi ke Aset Tetap pada BPBD	Mutasi antar Aset tetap dan Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga pada BAPENDA	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=(3-4-5)
12	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	422.771.250,00	0,00	0,00	422.771.250,00
13	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	285.346.600,00	0,00	0,00	285.346.600,00
Jumlah		**7.049.255.635,00**	**3.000.000,00**	**48.770.647,00**	**6.997.484.988,00**

3. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

   Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp458.909.820,00 dan Rp1.863.799.894,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.404.890.074,00 minus 75,38%.

   Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp458.909.820,00 yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.306.070.885,00 dikurang dengan biaya pemeliharaan sebesar Rp624.321.508,00 dan dikurang dengan kapitalisasi sebesar Rp9.218.380.667,00 serta dikurang dengan mutasi antar aset tetap sebesar Rp6.004.458.890,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 393 Perbandingan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Biaya Pemeliharaan	Kapitalisasi	Mutasi Antar Aset Tetap	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(3-4-5-6)
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.317.448.110,00	481.321.508,00	4.534.566.782,00	0,00	301.559.820,00
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.476.490.900,00	143.000.000,00	1.329.032.010,00	6.004.458.890,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	199.704.832,00	0,00	199.704.832,00	0,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar	2.597.118.793,00	0,00	2.597.118.793,00	0,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	447.932.450,00	0,00	328.082.450,00	0,00	119.850.000,00
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	199.905.000,00	0,00	199.905.000,00	0,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	29.970.800,00	0,00	29.970.800,00	0,00	0,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Biaya Pemeliharaan	Kapitalisasi	Mutasi Antar Aset Tetap	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(3-4-5-6)
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00
Jumlah		**16.306.070.885,00**	**624.321.508,00**	**9.218.380.667,00**	**6.004.458.890,00**	**458.909.820,00**

4. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

   Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp10.206.611.626,00 dan Rp12.581.631.729,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.375.020.103,00 minus 18,88%.

   Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp10.206.611.626,00 yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp12.322.985.501,00 dikurang dengan kapitalisasi jasa konsultan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.946.523.875,00 dan biaya pemeliharaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp169.850.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 394 Perbandingan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Kapitaliasasi Jasa Konsultan pada Dinas PUTR	Biaya Pemeliharaan pada BPBD	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=(3-4-5)
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	4.041.001.985,00	1.658.174.575,00	0,00	2.382.827.410,00
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	4.001.257.519,00	0,00	0,00	4.001.257.519,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	199.981.200,00	199.981.200,00	0,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.812.167.617,00	0,00	0,00	1.812.167.617,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	169.850.000,00	0,00	169.850.000,00	0,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Kapitaliasasi Jasa Konsultan pada Dinas PUTR	Biaya Pemeliharaan pada BPBD	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=(3-4-5)
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	2.098.727.180,00	88.368.100,00	0,00	2.010.359.080,00
Jumlah		**12.322.985.501,00**	**1.946.523.875,00**	**169.850.000,00**	**10.206.611.626,00**

5. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

   Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp5.180.000,00 dan Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp5.180.000,00 atau 100,00%.

   Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sama dengan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2025 yaitu sebesar Rp5.180.000,00.

Tabel 5. 395 Perbandingan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00
Jumlah		**5.180.000,00**	**0,00**	**5.180.000,00**

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp33.936.397.461,00	**Rp52.907.257.613,00**

Beban Perjalanan Dinas tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp33.936.397.461,00 dan Rp52.907.257.613,00 terjadi penurunan sebesar Rp18.970.860.152,00 atau minus 35,86%. Beban Perjalanan Dinas terdiri dari Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Beban Perjalanan Dinas tahun 2025 sebesar Rp33.936.397.461,00 yang berasal dari Belanja Perjalanan Dinas yaitu sebesar Rp29.020.351.156,00 ditambah dengan nilai Reklas atas Beban Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.238.380.305,00 serta dikurang dengan utang belanja perjalanan dinas tahun sebelumnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp92.331.700,00, kapitalisasi sebesar Rp205.427.299,00 dan lebih bayar belanja perjalanan dinas biasa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp24.575.001,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 396 Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025

Uraian	LRA Tahun 2025	Reklas atas Beban Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun sebelumnya pada Dinas Kesehatan	Kapitalisasi	Jurnal Koreksi pada Dinas Pendidikan	LO Tahun 2025
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(2+3-4-5-6)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	*29.020.351.156,00*	*5.238.380.305,00*	*92.331.700,00*	*205.427.299,00*	*24.575.001,00*	*33.936.397.461,00*
Beban Perjalanan Dinas Biasa	21.204.536.156,00	5.400.000,00	24.241.700,00	41.958.300,00	0,00	21.143.736.156,00

Uraian	LRA Tahun 2025	Reklas atas Beban Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun sebelumnya pada Dinas Kesehatan	Kapitalisasi	Jurnal Koreksi pada Dinas Pendidikan	LO Tahun 2025
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(2+3-4-5-6)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.761.579.000,00	5.232.980.305,00	68.090.000,00	163.468.999,00	24.575.001,00	11.738.425.305,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.054.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.236.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**29.020.351.156,00**	**5.238.380.305,00**	**92.331.700,00**	**205.427.299,00**	**24.575.001,00**	**33.936.397.461,00**

5.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa	Tahun 2025	Tahun 2024
Untuk Diberikan kepada PihakKetiga/PihakLain/ Masyarakat	**Rp4.299.843.828,00**	**Rp4.750.463.162,00**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp4.299.843.828,00 dan Rp4.750.463.162,00 terjadi penurunan sebesar Rp450.619.334,00 atau minus 9,49% yang terdiri dari Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada LO sama dengan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada LRA tahun 2025 yaitu sebesar Rp4.299.843.828,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 397 Perbandingan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	*Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat*	*2.464.814.000,00*	*0,00*	*2.464.814.000,00*
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	714.714.000,00	0,00	714.714.000,00
	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	497.000.000,00	0,00	497.000.000,00
	Beban Beasiswa	1.253.100.000,00	0,00	1.253.100.000,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	*1.835.029.828,00*	*0,00*	*1.835.029.828,00*

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.808.029.828,00	0,00	1.808.029.828,00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
Jumlah		**4.299.843.828,00**	**0,00**	**4.299.843.828,00**

5.4.2.1.2.6 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp17.002.931.551,00**

Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp17.002.931.551,00 terjadi penurunan sebesar Rp17.002.931.551,00 atau minus 100,00%.

Beban Barang dan Jasa BOS sama dengan Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2025 yaitu sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.2.7 Beban Barang dan Jasa BOSP

Beban Barang dan Jasa BOSP	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp16.076.550.935,00	**Rp17.002.931.551,00**

Beban Barang dan Jasa BOSP tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp16.076.550.935,00 dan Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp16.076.550.935,00 atau 100,00%. Beban Barang dan Jasa BOSP terdiri dari Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS, Beban Barang dan Jasa BOSP-PAUD dan Beban Barang dan Jasa BOSP-Kesetaraan.

Beban Barang dan Jasa BOSP tahun 2025 sebesar Rp16.076.550.935,00 berasal dari belanja Beban Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp31.658.607.383,00 dikurangi dengan koreksi Belanja Barang dan Jasa BOSP ke Belanja Barang Pakai Habis (Persediaan) sebesar Rp15.582.056.448,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 398 Perbandingan Belanja Barang dan Jasa BOSP dengan Beban Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Koreksi Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Barang Pakai Habis (Persediaan)	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	*Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS*	*31.285.871.383,00*	*15.345.728.549,00*	*15.940.142.834,00*
	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	30.343.874.827,00	14.991.168.236,00	15.352.706.591,00
	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	941.996.556,00	354.560.313,00	587.436.243,00
2	*Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD*	*282.220.000,00*	198.076.899,00	*84.143.101,00*
	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	267.220.000,00	190.226.800,00	76.993.200,00
	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	7.850.099,00	7.149.901,00
3	*Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan*	*90.516.000,00*	38.251.000,00	*52.265.000,00*
	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	90.516.000,00	38.251.000,00	52.265.000,00
Jumlah		**31.658.607.383,00**	**15.582.056.448,00**	**16.076.550.935,00**

5.4.2.1.2.8 Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp3.482.492.885,33	**Rp4.424.018.076,00**

Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.482.492.885,33 dan Rp4.424.018.076,00 terjadi penurunan sebesar Rp941.525.190,67 atau minus 21,28%.

Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 sebesar Rp3.482.492.885,33 yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA sebesar Rp14.636.181.888,00 ditambah dengan utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun berjalan sebesar Rp5.096.478.670,00 dan koreksi atas lebih catat kas lainnya sebesar Rp1,00 serta dikurang dengan utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun sebelumnya sebesar Rp5.039.650.510,00 dan reklas Beban Barang dan Jasa BLUD ke Persediaan sebesar Rp11.167.194.438,00 serta koreksi atas lebih catat Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp43.322.725,67 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 399 Perbandingan Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025

Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Berjalan	koreksi atas lebih catat kas lainnya	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun sebelumnya	Reklas Beban Barang dan Jasa BLUD ke Persediaan	Koreksi atas lebih catat belanja barang dan jasa BLUD	LO Tahun 2025
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=(2+3+4-5-6-7)
Beban Barang dan Jasa BLUD	14.636.181.888,00	5.096.478.670,00	1,00	5.039.650.510,00	11.167.194.438,00	43.322.725,67	3.482.492.885,33
Jumlah	**14.636.181.888,00**	**5.096.478.670,00**	**1,00**	**5.039.650.510,00**	**11.167.194.438,00**	**43.322.725,67**	**3.482.492.885,33**

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp20.263.372.634,00	**Rp55.141.293.737,00**

Beban Hibah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp20.263.372.634,00 dan Rp55.141.293.737,00 terjadi penurunan sebesar Rp34.877.921.103,00 atau minus 63,25%. Beban Hibah terdiri dari Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat, Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Beban Hibah Dana BOS, Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Beban Hibah Dana BOSP dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 400 Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	32.404.030.590,00	(32.404.030.590,00)	(100,00)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.819.272.138,00	21.755.256.820,00	(19.935.984.682,00)	(91,64)
3	Beban Hibah Dana BOS	14.656.444.430,00	0,00	14.656.444.430,00	100,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.051.256.686,00	982.006.327,00	69.250.359,00	7,05

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5	Beban Hibah Dana BOSP	2.736.399.380,00	0,00	2.736.399.380,00	100,00
Jumlah		**20.263.372.634,00**	**55.141.293.737,00**	**(34.877.921.103,00)**	**(63,25)**

1. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat
   Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp32.404.030.590,00 terjadi penurunan sebesar Rp32.404.030.590,00 atau minus 100,00% yaitu berupa Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat sama dengan belanja hibah kepada pemerintah pusat-LRA tahun 2025 yaitu sebesar Rp0,00.

2. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
   Beban hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.819.272.138,00 dan Rp21.755.256.820,00 terjadi penurunan sebesar Rp19.935.984.682,00 atau minus 91,64%.
   Beban hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia tahun 2025 sebesar Rp1.819.272.138,00 yang berasal dari belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia-LRA sebesar Rp1.678.062.138,00 ditambah hibah peralatan dan mesin berupa *speaker portable bluetooth* dan *megaphone portable* sebesar Rp11.210.000,00 dan hibah jaringan transmisi berupa lampu jalan sebesar Rp130.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 401 Perbandingan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Hibah berupa peralatan dan mesin dari Kec. Kabanjahe ke Masyarakat	Hibah berupa Jaringan Transmisi dari Kec. Kabanjahe ke Masyarakat	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.678.062.138,00	0,00	0,00	1.678.062.138,00
2	Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	11.210.000,00	130.000.000,00	141.210.000,00
Jumlah		**1.678.062.138,00**	**11.210.000,00**	**130.000.000,00**	**1.819.272.138,00**

3. Beban Hibah Dana BOS

   Beban Hibah Dana BOS tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp14.656.444.430,00 dan Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp14.656.444.430,00 atau 100,00%. Beban Hibah Dana BOS terdiri dari Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima

oleh satdikdas swasta dan Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta.

Beban Hibah Dana BOS sama dengan Belanja Hibah Dana BOS tahun 2025 yaitu sebesar Rp14.656.444.430,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 402 Perbandingan Belanja Hibah dengan Beban Hibah Dana BOS Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Mutasi dari Satdikdas Swasta ke Satdikmen Swasta	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	14.656.444.430,00	(3.320.295.000,00)	11.336.149.430,00
2	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	3.320.295.000,00	3.320.295.000,00
Jumlah		**14.656.444.430,00**	**0,00**	**14.656.444.430,00**

4. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
   Beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.051.256.686,00 dan Rp982.006.327,00 terjadi penurunan sebesar Rp69.250.359,00 atau 7,05%.
   Beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik-LO sama dengan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik-LRA tahun 2025 yaitu sebesar Rp1.051.256.686,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 403 Perbandingan Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik-LRA dengan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik-LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.051.256.686,00	0,00	1.051.256.686,00
Jumlah		**1.051.256.686,00**	**0,00**	**1.051.256.686,00**

5. Beban Hibah Dana BOSP
   Beban Hibah Dana BOSP tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.736.399.380,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.736.399.380,00 atau 100,00% yang terdiri dari beban hibah dana BOSP-BOP PAUD dan beban hibah dana BOSP-BOP kesetaraan.
   Beban hibah dana BOSP-LO sama dengan belanja hibah dana BOSP-LRA tahun 2025 yaitu sebesar Rp2.736.399.380,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 404 Perbandingan Belanja Hibah Dana BOSP-LRA dengan Beban Hibah Dana BOSP-LO Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Selisih	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.555.466.380,00	0,00	2.555.466.380,00
2	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	180.933.000,00	0,00	180.933.000,00
Jumlah		**2.736.399.380,00**	**0,00**	**2.736.399.380,00**

5.4.2.1.4 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp3.603.948.112,00	**Rp3.792.350.833,19**

Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.603.948.112,00 dan Rp3.792.350.833,19 terjadi penurunan sebesar Rp188.402.721,19 atau minus 4,97% yang terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dan Beban Transfer Pemerintah Daerah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 405 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.918.962.478,95	2.012.155.298,88	(93.192.819,93)	(4,63)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	394.539.533,70	237.068.883,52	157.470.650,18	66,42
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	213.291,72	(213.291,72)	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.164.466.244,00	366.113.925,70	798.352.318,30	218,06
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	125.979.855,35	1.176.799.433,37	(1.050.819.578,02)	(89,29)
Jumlah		**3.603.948.112,00**	**3.792.350.833,19**	**(188.402.721,19)**	**(4,97)**

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah
   Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.918.962.478,95 dan Rp2.012.155.298,88 terjadi penurunan sebesar Rp93.192.819,93 atau minus 4,63% yaitu berupa Beban Penyisihan Piutang PBB-P2.
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
   Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp394.539.533,70 dan Rp237.068.883,52 terjadi kenaikan sebesar Rp157.470.650,18 atau 66,42% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 406 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	394.539.533,70	200.494.845,52	194.044.688,18	96,78
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	0,00	36.574.038,00	(36.574.038,00)	(100,00)
Jumlah		**394.539.533,70**	**237.068.883,52**	**157.470.650,18**	**66,42**

3. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
   Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp213.291,72 terjadi penurunan sebesar Rp213.291,72 atau minus 100,00% yaitu berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

4. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Beban penyisihan piutang transfer pemerintah pusat tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.164.466.244,00 dan Rp366.113.925,70 terjadi kenaikan sebesar Rp798.352.318,30 atau 218,06% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 407 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB	14.243.980,50	299.718.769,00	(285.474.788,50)	(95,25)
2	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	639.951.114,50	0,00	639.951.114,50	100,00
3	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	111.343.249,00	1.188.230,30	110.155.018,70	9.270,51
4	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	36.911.000,00	0,00	36.911.000,00	100,00
5	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	8.342.700,00	2.087.326,40	6.255.373,60	299,68
6	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	353.674.200,00	63.119.600,00	290.554.600,00	460,32
Jumlah		**1.164.466.244,00**	**366.113.925,70**	**798.352.318,30**	**218,06**

5. Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp125.979.855,35 dan Rp1.176.799.433,37 terjadi penurunan sebesar Rp1.050.819.578,02 atau minus 89,29% yang terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil dan Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 408 Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	*Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil*	*125.979.855,35*	*1.154.996.614,26*	*(1.029.016.758,91)*	*(89,09)*
	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	293.869,89	96.280.994,09	(95.987.124,20)	(99,69)
	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	503.060,20	146.463.200,78	(145.960.140,58)	(99,66)
	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	96.048.902,03	905.168.171,93	(809.119.269,90)	(89,39)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	11.680.114,90	7.084.247,46	4.595.867,44	64,87
	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok	17.453.908,33	0,00	17.453.908,33	100,00
2	*Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan*	*0,00*	*21.802.819,11*	*(21.802.819,11)*	*(100,00)*
	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	21.802.819,11	(21.802.819,11)	(100,00)
Jumlah		**125.979.855,35**	**1.176.799.433,37**	**(1.050.819.578,02)**	**(89,29)**

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp175.465.476.551,28	**Rp162.168.992.822,47**

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp175.465.476.551,28 dan Rp162.168.992.822,47 terjadi kenaikan sebesar Rp13.296.483.728,81 atau 8,20% yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 409 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.018.401.685,95	36.803.556.603,71	(785.154.917,76)	(2,13)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.582.260.790,59	18.547.760.818,13	34.499.972,46	0,19
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	120.842.274.254,74	106.795.135.580,63	14.047.138.674,11	13,15
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	22.539.820,00	22.539.820,00	0,00	0,00
Jumlah		**175.465.476.551,28**	**162.168.992.822,47**	**13.296.483.728,81**	**8,20**

5.4.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp36.018.401.685,95	**Rp36.803.556.603,71**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp36.018.401.685,95 dan Rp36.803.556.603,71 terjadi penurunan sebesar Rp785.154.917,76 atau minus 2,13% dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 94.

5.4.2.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp18.582.260.790,59	**Rp18.547.760.818,13**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp18.582.260.790,59 dan Rp18.547.760.818,13 terjadi kenaikan sebesar Rp34.499.972,46 atau 0,19% dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 95.

5.4.2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp120.842.274.254,74	**Rp106.795.135.580,63**

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp120.842.274.254,74 dan Rp106.795.135.580,63 terjadi kenaikan sebesar Rp14.047.138.674,11 atau 13,15% dengan perincian yang dapat dilihat pada lampiran 96.

5.4.2.2.4 Beban Penyusutan Amortisasi Aset Lainnya

Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp22.539.820,00	**Rp22.539.820,00**

Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp22.539.820,00 dan Rp22.539.820,00 yaitu berupa Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-*Software*.

5.4.2.3 Beban Transfer

Beban Transfer	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp88.021.799.241,00	**Rp86.747.499.100,00**

Beban Transfer tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp88.021.799.241,00 dan Rp86.747.499.100,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.274.300.141,00 atau 1,47% yang terdiri dari beban bagi hasil dan beban bantuan keuangan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 410 Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Bagi Hasil	11.790.329.192,00	10.352.188.000,00	1.438.141.192,00	13,89
2	Beban Bantuan Keuangan	76.231.470.049,00	76.395.311.100,00	(163.841.051,00)	(0,21)
Jumlah		**88.021.799.241,00**	**86.747.499.100,00**	**1.274.300.141,00**	**1,47**

5.4.2.3.1 Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp11.790.329.192,00	**Rp10.352.188.000,00**

Beban Bagi Hasil tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp11.790.329.192,00 dan Rp10.352.188.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.438.141.192,00 atau 13,89% yaitu berupa Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa.

5.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp76.231.470.049,00	**Rp76.395.311.100,00**

Beban Bantuan Keuangan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp76.231.470.049,00 dan sebesar Rp76.395.311.100,00 terjadi penurunan sebesar Rp163.841.051,00 atau minus 0,21% yaitu berupa Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa.

5.4.2.4 Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp193.476.000,00**

Beban Tidak Terduga tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp193.476.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp193.476.000,00 atau minus 100,00%.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp151.718.352.909,88	**Rp5.980.206.580,65**

Surplus/Defisit dari operasi tahun 2025 dan 2024 surplus sebesar Rp151.718.352.909,88 dan Surplus sebesar Rp5.980.206.580,65 terjadi kenaikan sebesar Rp145.738.146.329,23 atau 2.437,01%.

5.4.4 Defisit Non Operasional-LO

Defisit Non Operasional-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp3.230.281.772,71	**Rp8.673.708.444,95**

Defisit Non Operasional-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.230.281.772,71 dan Rp8.673.708.444,95 terjadi penurunan sebesar Rp5.443.426.672,24 atau minus 62,76% dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5. 411 Defisit Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	1.667.261.485,71	5.471.777.580,95	(3.804.516.095,24)	(69,53)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.563.020.287,00	3.201.930.864,00	(1.638.910.577,00)	(51,19)
Jumlah		**3.230.281.772,71**	**8.673.708.444,95**	**(5.443.426.672,24)**	**(62,76)**

5.4.4.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.667.261.485,71	**Rp5.471.777.580,95**

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.667.261.485,71 dan Rp5.471.777.580,95 terjadi penurunan sebesar Rp3.804.516.095,24 atau minus 69,53%.

Tabel 5. 412 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO	552.514.285,71	0,00	552.514.285,71	100,00
2	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	0,00	446.358.537,05	(446.358.537,05)	(100,00)
3	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO	0,00	2.747.445.920,00	(2.747.445.920,00)	(100,00)
4	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO	1.114.747.200,00	1.587.168.055,00	(472.420.855,00)	(29,77)
5	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO	0,00	38.888.888,90	(38.888.888,90)	(100,00)
6	Defisit Penghapusan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO	0,00	187.767.820,00	(187.767.820,00)	(100,00)
7	Defisit Penghapusan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO	0,00	464.148.360,00	(464.148.360,00)	(100,00)
Jumlah		**1.667.261.485,71**	**5.471.777.580,95**	**(3.804.516.095,24)**	**(69,53)**

5.4.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.563.020.287,00	**Rp3.201.930.864,00**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.563.020.287,00 dan Rp3.201.930.864,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.638.910.577,00 atau minus 51,19%.

5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp148.488.071.137,17	**(Rp2.693.501.864,30)**

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp148.488.071.137,17 dan minus Rp2.693.501.864,30 terjadi kenaikan sebesar Rp151.181.573.001,47 atau minus 5.612,83%. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa merupakan hasil perhitungan antara surplus/defisit dari kegiatan operasi dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

5.4.6 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp0,00**

Beban luar biasa tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau 0,00%.

5.4.7 Surplus Defisit-LO

Surplus/Defisit	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp148.488.071.137,17	**(Rp2.693.501.864,30)**

Surplus/Defisit-LO tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp148.488.071.137,17 dan minus Rp2.693.501.864,30 terjadi kenaikan sebesar Rp151.181.573.001,47 atau minus 5.612,83%. Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban-LO.

5.5 Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp184.127.061.196,33	**Rp135.142.683.495,70**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp184.127.061.196,33 dan Rp135.142.683.495,70. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 berasal dari arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.423.364.782.410,83 dikurangi arus keluar kas aktivitas operasi sebesar Rp1.239.237.721.214,50.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi TA 2025 sebesar Rp1.423.364.782.410,83 mengalami penurunan sebesar Rp22.002.429.770,87 jika dibandingkan dengan arus masuk kas dari aktivitas operasi TA 2024 sebesar Rp1.445.367.212.181,70 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 413 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA.2025	TA.2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	89.922.705.301,98	61.540.045.940,28	28.382.659.361,70	46,12
2	Penerimaan Retribusi Daerah	43.732.430.443,00	33.697.123.306,00	10.035.307.137,00	29,78
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.446.458.482,00	2.624.980.942,59	821.477.539,41	31,29
4	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	12.160.228.138,85	7.188.618.925,83	4.971.609.213,02	69,16
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	0,00	25.748.210.000,00	(25.748.210.000,00)	(100,00)
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	0,00	752.945.824.000,00	(752.945.824.000,00)	(100,00)
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	101.278.750.464,00	(101.278.750.464,00)	(100,00)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0,00	159.787.725.589,00	(159.787.725.589,00)	(100,00)
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil	23.320.794.200,00	0,00	23.320.794.200,00	0,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum	754.341.909.960,00	0,00	754.341.909.960,00	0,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	18.713.218.871,00	0,00	18.713.218.871,00	0,00
12	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	178.766.461.281,00	0,00	178.766.461.281,00	0,00

No.	Uraian	TA.2025	TA.2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
13	Penerimaan Dana Desa	187.787.277.514,00	205.413.540.000,00	(17.626.262.486,00)	(8,58)
14	Penerimaan Insentif Fiskal	6.668.790.000,00	12.716.954.000,00	(6.048.164.000,00)	(47,56)
15	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	81.866.806.128,00	65.841.106.524,00	16.025.699.604,00	24,34
	Penerimaan Bantuan Keuangan	4.360.563.821,00	0,00	4.360.563.821,00	0,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	18.277.138.270,00	16.584.332.490,00	1.692.805.780,00	10,21
	Jumlah Arus Kas Masuk Aktifitas Operasi	**1.423.364.782.410,83**	**1.445.367.212.181,70**	**(22.002.429.770,87)**	**(1,52)**

Arus keluar kas dari aktivitas operasi TA 2025 Rp1.239.237.721.214,50 dan mengalami penurunan sebesar Rp70.986.807.471,50 jika dibandingkan dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi per TA 2024 sebesar Rp1.310.224.528.686,00.

Tabel 5. 414 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA.2025	TA.2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pembayaran Pegawai	612.409.535.553,00	622.939.163.784,00	(10.529.628.231,00)	(1,69)
2	Pembayaran Barang dan Jasa	330.896.946.272,50	343.502.153.763,00	(12.605.207.490,50)	(3,67)
3	Pembayaran Belanja Hibah	20.122.162.634,00	51.428.696.039,00	(31.306.533.405,00)	(60,87)
4	Pembayaran Tak Terduga	0,00	193476000,00	(193.476.000,00)	(100,00)
5	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	11.790.329.192,00	10.352.188.000,00	1.438.141.192,00	13,89
6	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	264.018.747.563,00	281.808.851.100,00	(17.790.103.537,00)	(6,31)
Jumlah		**1.239.237.721.214,50**	**1.310.224.528.686,00**	**(70.986.807.471,50)**	**(5,42)**

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp144.601.529.559,00)	**(Rp217.121.103.102,00)**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar minus Rp144.601.529.559,00 dan minus Rp217.121.103.102,00.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi TA 2025 berasal dari arus masuk kas dari aktivitas investasi sebesar Rp1.267.846.639,00 yang dikurangi arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp145.869.376.198,00.

Arus masuk kas aktivitas investasi TA 2025 sebesar Rp1.267.846.639,00 mengalami kenaikan sebesar Rp969.328.539,00 jika dibandingkan dengan arus masuk kas dari aktivitas investasi TA 2024 sebesar Rp298.518.100,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 415 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.265.996.639,00	0,00	1.265.996.639,00	0,00
2	Penjualan Aset Lain-Lain	1.850.000,00	298.518.100,00	(296.668.100,00)	(99,38)
Jumlah		**1.267.846.639,00**	**298.518.100,00**	**969.328.539,00**	**324,71**

Arus keluar kas dari aktivitas investasi TA 2025 sebesar Rp145.869.376.198,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp71.550.245.004,00 jika dibandingkan dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi TA 2024 sebesar Rp217.419.621.202,00.

Tabel 5. 416 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Perolehan Peralatan dan Mesin	42.219.516.658,00	31.232.923.939,00	10.986.592.719,00	35,18
2	Perolehan Gedung dan Bangunan	46.986.998.560,00	58.916.770.589,00	(11.929.772.029,00)	(20,25)
3	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	47.329.012.466,00	114.612.976.924,00	(67.283.964.458,00)	(58,71)
4	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.333.848.514,00	9.856.949.750,00	(523.101.236,00)	(5,31)
5	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	2.800.000.000,00	(2.800.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**145.869.376.198,00**	**217.419.621.202,00**	**(71.550.245.004,00)**	**(32,91)**

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp0,00)	(Rp0,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan berasal dari Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan dikurang Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp0,00)	(Rp0,00)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari arus masuk kas aktivitas transitoris dikurang arus keluar kas aktivitas transitoris.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris TA 2025 sebesar Rp69.176.796.859,25 dan mengalami penurunan sebesar Rp14.711.567.723,52 jika dibandingkan dengan arus masuk kas dari aktivitas transitoris TA 2024 sebesar Rp83.888.364.582,77. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 417 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
1	Iuran Wajib Pegawai	23.187.987.664,74	24.295.903.031,77	(1.107.915.367,03)	(4,56)
2	Iuran jaminan kesehatan	14.711.332.373,00	16.049.912.017,00	(1.338.579.644,00)	(8,34)
3	JKK	597.442.485,00	610.874.021,00	(13.431.536,00)	(2,20)
4	JKM	1.792.320.308,00	1.832.613.825,00	(40.293.517,00)	(2,20)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5	PPh Pasal 21	3.724.077.411,40	9.497.173.564,00	(5.773.096.152,60)	(60,79)
6	PPh Pasal 22	1.055.636.626,38	636.103.974,43	419.532.651,95	65,95
7	PPh Pasal 23	361.607.517,04	231.600.744,14	130.006.772,90	56,13
8	PPh Pasal 4 (2)	2.203.860.368,00	3.654.598.295,00	(1.450.737.927,00)	(39,70)
9	PPN Pusat	21.542.532.105,69	27.079.585.110,43	(5.537.053.004,74)	(20,45)
Jumlah		**69.176.796.859,25**	**83.888.364.582,77**	**(14.711.567.723,52)**	**(17,54)**

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris TA 2025 sebesar Rp69.176.796.859,25 dan mengalami penurunan sebesar Rp14.711.567.723,52 jika dibandingkan dengan arus keluar kas dari aktivitas transitoris TA 2024 sebesar Rp83.888.364.582,77. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris merupakan pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 418 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
1	Iuran Wajib Pegawai	23.187.987.664,74	24.295.903.031,77	(1.107.915.367,03)	(4,56)
2	Iuran jaminan kesehatan	14.711.332.373,00	16.049.912.017,00	(1.338.579.644,00)	(8,34)
3	JKK	597.442.485,00	610.874.021,00	(13.431.536,00)	(2,20)
4	JKM	1.792.320.308,00	1.832.613.825,00	(40.293.517,00)	(2,20)
5	PPh Pasal 21	3.724.077.411,40	9.497.173.564,00	(5.773.096.152,60)	(60,79)
6	PPh Pasal 22	1.055.636.626,38	636.103.974,43	419.532.651,95	65,95
7	PPh Pasal 23	361.607.517,04	231.600.744,14	130.006.772,90	56,13
8	PPh Pasal 4 (2)	2.203.860.368,00	3.654.598.295,00	(1.450.737.927,00)	(39,70)
9	PPN Pusat	21.542.532.105,69	27.079.585.110,43	(5.537.053.004,74)	(20,45)
Jumlah		**69.176.796.859,25**	**83.888.364.582,77**	**(14.711.567.723,52)**	**(17,54)**

5.5.5 Saldo Kas

	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Kas	**Rp54.457.274.784,16**	**Rp14.931.433.146,83**

Saldo Akhir Kas pada rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Karo untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 Rp54.457.274.784,16 dan Rp14.931.433.146,83 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 419 Perincian Saldo Kas Akhir TA 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	**39.525.531.637,33**	**(81.978.419.606,30)**	121.503.951.243,63	**(148,21)**
Saldo Awal Kas	**14.931.433.146,83**	**97.051.278.637,13**	(82.119.845.490,30)	**(84,61)**
Koreksi SiLPA	**310.000,00**	**(141.425.884,00)**	141.735.884,00	**0,00**
Saldo Akhir Kas	**54.457.274.784,16**	**14.931.433.146,83**	39.525.841.637,33	**264,72**
Saldo Kas di Kas Daerah	48.981.186.250,16	11.297.340.907,83	37.683.845.342,33	333,56
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	33.195.698,00	(33.195.698,00)	0,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Kas di BLUD	3.521.177.533,00	1.820.332.198,00	1.700.845.335,00	93,44

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP	90.168.720,00	3.830.105,00	86.338.615,00	2.254,21
Saldo Kas Lainnya	6.102.334,00	1.200,00	6.101.134,00	508.427,83
Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	1.620.797.957,00	1.527.293.974,00	93.503.983,00	0,00
Saldo Kas Dana BOSP	237.841.990,00	249.439.064,00	(11.597.074,00)	0,00
Saldo Akhir Kas	**54.457.274.784,16**	**14.931.433.146,83**	**39.525.841.637,33**	**264,72**

Saldo awal kas sebesar Rp14.931.433.146,83 ditambah kenaikan bersih kas selama tahun 2025 sebesar Rp39.525.531.637,33. Kenaikan bersih kas tersebut merupakan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi sebesar Rp184.127.061.196,33 ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp144.601.529.559,00 ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 dan ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 sehingga saldo akhir kas menjadi Rp54.457.274.784,16.

Terdapat perbedaan antara saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas TA 2025 dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2025. Saldo akhir kas-LAK sebesar Rp54.457.274.784,16. dan SiLPA-LRA sebesar Rp54.324.892.974,16 dengan nilai selisih sebesar Rp132.381.810,00 merupakan utang PFK pada Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2018 sebesar Rp77.979.248,00 dan koreksi kas BOS TA 2023 sebesar Rp54.402.562,00.

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.1 Ekuitas Awal

	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	**Rp2.553.212.194.126,89**	**Rp2.552.268.925.278,66**

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.553.212.194.126,89 dan Rp2.552.268.925.278,66, mengalami kenaikan sebesar Rp943.268.848,23 dari Ekuitas Awal tahun 2024.

5.6.2 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional

	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	**Rp148.488.071.137, 17**	**(Rp2.693.501.864,30)**

Surplus/(defisit) laporan operasional Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar surplus Rp148.488.071.137,17 dan defisit Rp2.693.501.864,30 ini merupakan selisih antara pendapatan–LO dengan beban-LO.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5.6.3.1 Koreksi Persediaan

	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Persediaan	**(Rp10.749.353.110,50)**	**Rp0,00**

Koreksi Persediaan Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp10.749.353.110,50 dan Rp0,00 merupakan koreksi saldo awal persediaan Obat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp29.139.012,00 dan Bahan Cetak pada Dinas Perhubungan sebesar Rp14.290.048,00. Terdapat persediaan untuk

dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar minus Rp10.104.441.112,00 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar minus Rp688.341.058,50.

5.6.3.2 Lain-lain

Lain-lain	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp15.616.308.404,34	**Rp3.636.770.712,53**

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Koreksi ekuitas lain-lain tahun 2025 dan 2024 sebesar minus Rp15.616.308.404,34 dan Rp3.636.770.712,53. Koreksi ekuitas tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 97.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp2.706.567.220.557,90	**Rp2.553.212.194.126,89**

Ekuitas akhir Kabupaten Karo merupakan konsolidasi dari ekuitas akhir semua SKPD merupakan akumulasi dari ekuitas awal, surplus/defisit – LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas tahun sebelumnya, koreksi ekuitas tahun berjalan dan koreksi ekuitas Antar SKPD. Ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.706.567.220.557,90 dan Rp2.553.212.194.126,89 mengalami kenaikan sebesar Rp153.355.026.431,01 dari Ekuitas Akhir Tahun 2024.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Keadaan Umum

Pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Karo berkedudukan di Kecamatan Kabanjahe, dibentuk Tanggal 24 November 1956 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara.

6.1.1 Letak Geografis

Secara geografis letak Kabupaten Karo merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara berada di antara 2.500–3.190 Lintang Utara dan 97.550–98.380 Bujur Timur dengan luas 2.206,88 km² atau 2,97 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Batas Administrasi Kabupaten Karo berdasarkan RTRW Kabupaten Karo 2022-2042 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

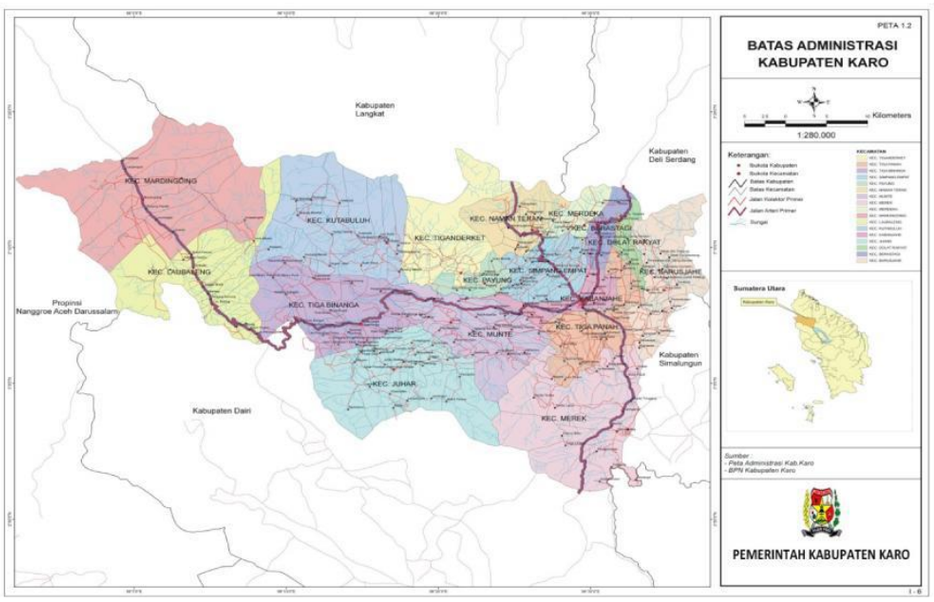

Gambar 6. 1 Peta Administrasi Kabupaten Karo

Wilayah Kabupaten Karo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Potensi pengembangan wilayah meliputi pengembangan kawasan agroindustri, pengolahan hasil pertanian, pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan barang dan jasa, pusat pemerintahan kecamatan, pengembangan destinasi pariwisata, pengolahan hasil perkebunan, pemukiman perdesaan, pengolahan hasil budidaya kehutanan dan pusat cagar budaya. Sementara itu, terdapat juga wilayah rawan bencana gempa vulkanik karena memiliki dua gunung berapi yang aktif yaitu Gunung Sinabung dan Sibayak.

Wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian 200-1500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Karo mempunyai Elevansi terendah ± 77 m di atas permukaan laut berada di Paya Lah-Lah (Kecamatan Mardingding) dan tertinggi ±

2.447 m di atas permukaan laut (Gunung Sinabung). Kabupaten Karo berada di dataran tinggi dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang serta banyak ditemui lembah-lembah dan alur-alur sungai yang dalam dan lereng bukit yang curam/ terjal.

Kabupaten Karo beriklim tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Januari dan musim kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli.

Kondisi geologis Kabupaten Karo ditandai dengan adanya potensi pertambangan dan energi. Potensi pertambangan meliputi mineral bukan logam berupa belerang, fosfat maupun batuan berupa batu gamping, dolomit, kalsit, lempung, marmer, sirtu, trass, andesit, feldspar dan granit. Sampai saat ini, pertambangan batuan yang sudah dieksploitasi terbatas pada dolomit yakni Kecamatan Kutabuluh dan Tiganderket. Sementara itu, sumberdaya energi yang berpotensi untuk dikembangkan adalah energi panas bumi. Energi panas bumi yang telah dikembangkan adalah panas bumi Gunung Sibayak yang terdapat di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka, dengan cadangan terduga sebesar 68 MW yang dieksploitasi oleh PT Pertamina (Persero). Energi panas bumi lainnya yang potensial adalah panas bumi Gunung Sinabung yang terdapat di Kecamatan Payung namun belum dieksploitasi.

Secara hidrologis, Kabupaten Karo merupakan bagian dari 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang besar yakni DAS Wampu dan DAS Lawe Alas (Renun). Sungai Wampu bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Renun bermuara ke Samudera Hindia. Selain DAS terdapat juga potensi air permukaan yakni Danau Lau Kawar pada Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba pada Kecamatan Merek.

Secara Administratif, Wilayah Pemerintahan Kabupaten Karo sejak Tanggal 29 Desember 2006 resmi berubah dari 13 Kecamatan menjadi 17 Kecamatan dan 259 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Tigapanah yaitu sebanyak 29 desa sedangkan Kecamatan Payung dan Dolat Rayat merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu hanya memiliki 7 desa.

Luas Kabupaten Karo dihitung sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi, Pemerintahan, dan Pulau (Disahkan 09 November 2022). Kepmendagri tersebut sesuai dengan Keputusan PPBW BIG No B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 03 Oktober 2022. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Karo berdasarkan luas wilayah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Persentase thd Luas Kab. (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kel./Desa
1	Mardingding	325,3	14,74	12	-	12
2	Laubaleng	184,16	8,34	15	-	15
3	Tigabinanga	176,44	7,99	19	1	20
4	Juhar	220,02	9,97	25	-	25
5	Munte	140,63	6,37	22	-	22
6	Kutabuluh	259,38	11,75	16	-	16
7	Payung	31,36	1,42	7	-	7
8	Tiganderket	67,17	3,04	17	-	17
9	Simpang Empat	65,13	2,95	17	-	17
10	Naman Teran	121,89	5,52	12	-	12
11	Merdeka	42,45	1,92	9	-	9
12	Kabanjahe	34,31	1,55	8	5	13

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Persentase thd Luas Kab. (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kel./Desa
13	Berastagi	33,76	1,53	6	4	10
14	Tigapanah	127,04	5,76	29	-	29
15	Dolat Rayat	22,85	1,04	7	-	7
16	Merek	229,36	10,39	19	-	19
17	Barusjahe	125,63	5,69	19	-	19
Jumlah		**2.206,88**	**100**	**259**	**10**	**269**

Sumber: Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi, Pemerintahan, dan Pulau.

Tabel 6. 2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo

Kode	Kecamatan	Jumlah
010	Mardingding	12
020	Laubaleng	15
030	Tigabinanga	20
040	Juhar	25
050	Munte	22
060	Kutabuluh	16
070	Payung	7
071	Tiganderket	17
080	Simpang Empat	17
081	Naman Teran	12
082	Merdeka	9
090	Kabanjahe	13
100	Berastagi	10
110	Tigapanah	29
111	Dolat Rayat	7
120	Merek	19
130	Barusjahe	19
Jumlah		**269**

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2025

6.1.2 Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2025 adalah 429.954 jiwa berdasarkan hasil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kabanjahe. Laju Pertumbuhan Penduduk Karo adalah sebesar 1,02 persen per tahun. Laju pertumbuhan tertinggi berada di kecamatan merek dengan angka 1,03. Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Karo tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. 3 Jumlah Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2025

No	Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa / Km2)	Rasio Jenis Kelamin (%)
1	Mardingding	20.328	1,02	4,73	62,49	99,80
2	Laubaleng	20.767	1,01	4,83	112,77	96,27
3	Tigabinanga	23.418	1,02	5,45	132,73	96,64
4	Juhar	15.458	1,01	3,60	70,26	97,07

No	Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa / Km2)	Rasio Jenis Kelamin (%)
5	Munte	24.445	1,02	5,69	173,82	95,42
6	Kutabuluh	12.949	1,01	3,01	49,92	96,85
7	Payung	11.630	1,01	2,70	370,85	94,35
8	Tiganderket	15.504	1,01	3,61	230,82	95,44
9	Simpang Empat	24.241	1,01	5,64	372,19	96,36
10	Naman Teran	14.436	1,02	3,36	118,43	96,78
11	Merdeka	16.553	1,01	3,85	389,94	97,41
12	Kabanjahe	78.196	1,02	18,19	2.279,10	97,22
13	Berastagi	51.701	1,02	12,02	1.531,43	99,90
14	Tigapanah	39.098	1,02	9,09	307,76	95,17
15	Dolat Rayat	10.231	1,02	2,38	447,75	96,94
16	Merek	25.526	1,03	5,94	111,29	99,56
17	Barusjahe	25.473	1,01	5,92	202,76	93,99
Jumlah		**429.954**	**1,02**	**100,00**	**194,82**	**97,01**

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2025

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Kabanjahe, dengan kepadatan penduduk sebanyak 2.279,10 jiwa/km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Berastagi sebanyak 1.531,43 jiwa/km². Kepadatan penduduk kedua kecamatan ini disebabkan karena Kecamatan Kabanjahe sebagai ibukota kabupaten yang merupakan pusat kegiatan jasa dan perdagangan di wilayah Kabupaten Karo, kemudian Kecamatan Berastagi sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara, serta banyaknya kegiatan jasa dan perhotelan, sehingga banyak masyarakat berdomisili untuk melakukan aktivitas kegiatan bidang pariwisata.

Jumlah penduduk Kabupaten Karo Tahun 2024 sebanyak 429.954 jiwa, dengan perincian laki-laki sebanyak 214.413 jiwa dan perempuan sebanyak 217.636 jiwa. Angka tersebut dapat disimpulkan bahwa *sex ratio* penduduk Kabupaten Karo adalah 97,21 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat ±97 penduduk laki-laki. Nilai *sex ratio* terbesar terdapat di Kecamatan Mardingding, Berastagi dan Merek yakni sebesar ≥100 sedangkan yang terkecil terdapat di Kecamatan Payung yakni 94,35.

6.1.3 Sumber Daya Manusia

6.1.3.1 Sektor Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Karo dipimpin oleh Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG.,M.Kes. sebagai Bupati, dan Komando Tarigan, S.P. sebagai Wakil Bupati serta Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM. selaku Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Peraturan Bupati Karo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

a. Sekretaris Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian, yaitu:

- Staf Ahli:
  1. Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
  2. Staf Ahli Bupati Karo Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  3. Staf Ahli Bupati Karo Bidang Politik dan Pemerintahan
- Bagian:
  1. Bagian Pemerintahan
  2. Bagian Hukum
  3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
  4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
  5. Bagian Administrasi Pembangunan
  6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  7. Bagian Umum
  8. Bagian Organinasi
  9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  10. Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat Daerah;
d. Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Rumah Sakit Umum Daerah;
f. Dinas Daerah, yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5. Dinas Sosial
6. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
16. Dinas Perpustakaan dan Arsip
17. Dinas Pertanian
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

g. Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Kabanjahe

   1.1.Kelurahan Gung Leto

1.2.Kelurahan Gung Negeri

1.3.Kelurahan Kampung Dalam

1.4.Kelurahan Lau Cimba

1.5.Kelurahan Padang Mas

2. Kecamatan Berastagi

2.1. Kelurahan Gundaling I

2.2. Kelurahan Gundaling II

2.3. Kelurahan Tambak Lau Mulgap I

2.4. Kelurahan Tambak Lau Mulgap II

3. Kecamatan Tigapanah
4. Kecamatan Dolat Rayat
5. Kecamatan Merek
6. Kecamatan Barusjahe
7. Kecamatan Simpang Empat
8. Kecamatan Naman Teran
9. Kecamatan Merdeka
10. Kecamatan Payung
11. Kecamatan Tiganderket
12. Kecamatan Kutabuluh
13. Kecamatan Munte
14. Kecamatan Juhar
15. Kecamatan Tigabinanga

15.1. Kelurahan Tigabinanga

16. Kecamatan Laubaleng
17. Kecamatan Mardingding

h. Badan Daerah, yang terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Badan Pendapatan Daerah

6.1.3.2 Data Pegawai Menurut Golongan dan Jabatan

Data pegawai Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 menurut golongan dan jabatan sebagai berikut:

Tabel 6. 4 Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 menurut Golongan

GOLONGAN/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	0	0	0	5	0	5
Golongan IV/c	0	22	1	0	161	1	185

GOLONGAN/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/b	0	8	36	3	252	6	305
Golongan IV/a	0	4	72	49	195	25	345
Golongan III/d	0	0	52	237	631	55	975
Golongan III/c	0	0	0	139	295	38	472
Golongan III/b	0	0	0	50	787	109	946
Golongan III/a	0	0	0	0	102	188	290
Golongan II/d	0	0	0	0	95	131	226
Golongan II/c	0	0	0	0	13	92	105
Golongan II/b	0	0	0	0	32	17	49
Golongan II/a	0	0	0	0	4	9	13
Golongan I/d	0	0	0	0	0	9	9
Golongan I/c	0	0	0	0	0	3	3
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0
PPPK	0	0	0	0	1287	147	1434
Jumlah	**0**	**34**	**161**	**478**	**3859**	**830**	**5362**

6.1.3.3 Sektor Pendidikan

Sektor Pendidikan merupakan salah satu pilar yang mendukung program pembangunan daerah, disamping sektor pertanian dan kesehatan.

Pada tingkat pendidikan sekolah dasar tahun ajaran 2025/2026 ada sebanyak 275 sekolah, 2.727 tenaga pengajar dan 41.414 siswa. Ditingkat SMP ada 71 sekolah dan ada sebanyak 1.267 tenaga pengajar dan 19.524 siswa. Pada tingkat SMA ada 26 sekolah dan 13.084 siswa serta tenaga pengajar berjumlah 774 orang di Kabupaten Karo. Hampir semua kecamatan terdapat Sekolah SMA kecuali Kecamatan Payung, Naman Teran, Merdeka, dan Dolat Rayat. Sementara pada tingkat SMK, terdapat 12 sekolah di Kabupaten Karo, dengan 361 guru dan 5.293 murid.

Sumber/*Source* : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganji/*Ministry of Educations and Culture, Odd Semester Data*

Gambar 6. 2 Perbandingan Jumlah Satuan Pendidikan dengan Jumlah Murid

6.1.3.4 Sektor Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor untuk perbaikan kualitas hidup tahun 2025, terdapat 4 rumah sakit di kabupaten karo, 2 berada di kecamatan berastagi dan 2 berada di kecamatan kabanjahe. Setiap kecamatan juga memiliki 1 puskesmas, kecuali kecamatan berastagi dan tigapanah yang memiliki

2 puskesmas. Untuk tenaga medis, kabupaten karo memiliki 54 Dokter, 24 Dokter Gigi, Tenaga Keperawatan 154, Tenaga Kebidanan 504, Tenaga Kefarmasian 47, Tenaga Kesehatan Masyarakat 37, Tenaga Kesehatan Lingkungan 16, Tenaga Gizi 38, Ahli Teknologi Laboratorium Medik 25 yang tersebar di semua kecamatan.

Tabel 6. 5 Jumlah Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025

Kode	Kecamatan	Tenaga Kesehatan			
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan
010	Mardingding	3	2	6	27
020	Laubaleng	2	1	11	31
030	Tigabinanga	4	1	11	30
040	Juhar	3	2	7	31
050	Munte	3	1	6	36
060	Kutabuluh	2	1	8	23
070	Payung	2	1	4	15
071	Tiganderket	2	1	9	24
080	Simpang Empat	4	2	9	29
081	Naman Teran	3	1	4	16
082	Merdeka	2	1	5	13
090	Kabanjahe	5	2	15	48
100	Berastagi	9	3	13	51
110	Tigapanah	6	2	22	52
111	Dolat Rayat	2	1	7	17
120	Merek	3	1	9	29
130	Barusjahe	3	1	8	32
Jumlah		**58**	**24**	**154**	**504**

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2025

6.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tabel 6. 6 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karo

No	Partai Politik	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Nasional Demokrat	4	1	5
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	3	10
3	Partai Golongan Karya	3	1	4
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	2	5
5	Partai Demokrat	2	2	4
6	Partai Amanat Nasional	3	0	3
7	Partai Hati Nurani Rakyat	2	0	2
8	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3	0	3
9	Partai Persatuan Indonesia	1	0	1
10	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	2
11	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	1
Jumlah		**31**	**9**	**40**

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2025

6.3 Agama dan Sosial Lainnya

Jumlah penganut agama yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Karo terdiri dari 117.434 Islam, 247.594 Protestan, 63.005 Katolik, 97 Hindu, 1.485 Budha, dan 1 Khonghucu.

Tabel 6. 7 Jumlah Agama dan Sosial Lainnya di Kabupaten Karo Tahun 2025

Kode	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu
010	Mardingding	4.775	12.257	3.265	8	0	0
020	Laubaleng	6.073	12.241	2.426	0	0	0
030	Tigabinanga	8.127	11.626	3.628	3	0	1
040	Juhar	2.280	8.743	4.392	18	0	0
050	Munte	6.094	14.554	3.740	0	5	0
060	Kutabuluh	3.067	8.332	1.505	27	1	0
070	Payung	3.313	5.825	2.479	0	1	0
071	Tiganderket	6.088	8.307	1.098	3	0	0
080	Simpang Empat	6.166	16.158	1.901	0	1	0
081	Naman Teran	6.586	6.927	914	0	0	0
082	Merdeka	6.091	8.592	1.859	0	5	0
090	Kabanjahe	24.528	43.258	9.631	29	720	0
100	Berastagi	21.855	24.233	4.881	1	695	0
110	Tigapanah	5.560	25.916	7.576	4	32	0
111	Dolat Rayat	2.396	6.488	1.326	2	18	0
120	Merek	1.826	18.743	4.936	1	7	0
130	Barusjahe	2.609	15.394	7.448	1	0	0
Jumlah		**117.434**	**247.594**	**63.005**	**97**	**1.485**	**1**

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2025

Jumlah Rumah Ibadah yang tesebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karo terdiri dari 234 Mesjid, 725 Gereja Protestan, 147 Gereja Katolik, 6 Pura, 4 Vihara, dan 1 Klenteng

Tabel 6. 8 Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Karo Tahun 2025

Kode	Kecamatan	Mesjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Klenteng
010	Mardingding	17	54	10	1	0	0
020	Laubaleng	13	54	14	1	0	0
030	Tigabinanga	19	41	7	0	0	0
040	Juhar	8	32	15	1	0	0
050	Munte	20	62	16	1	0	0
060	Kutabuluh	14	42	10	1	0	0
070	Payung	7	22	4	0	0	0
071	Tiganderket	16	37	6	1	0	0
080	Simpang Empat	16	38	7	0	0	0
081	Naman Teran	11	25	4	0	0	0
082	Merdeka	12	21	3	0	0	0
090	Kabanjahe	25	72	7	0	1	0
100	Berastagi	20	34	4	0	2	1

Kode	Kecamatan	Mesjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Klenteng
110	Tigapanah	13	71	11	0	0	0
111	Dolat Rayat	5	19	2	0	1	0
120	Merek	2	45	11	0	0	0
130	Barusjahe	16	56	16	0	0	0
Jumlah		**234**	**725**	**147**	**6**	**4**	**1**

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2025

6.4 Pengelolaan APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Pada TA 2025 terdapat pengelolaan dana APBD yang diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1) Pengeluaran untuk dana kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dimana proses pengelolaan dana tersebut baik penerimaan dan pengeluaran tidak melalui Rekening Kas Daerah, tetapi langsung ke rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Puskesmas di Kabupaten Karo;

2) Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Karo yang diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, dengan ketentuan dana BLUD dikelola secara terpisah dari Rekening Kas Daerah. Pemerintah Kabupaten Karo memiliki Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu RSU Kabanjahe sebagai RSUD Kabupaten Karo beralamat di Jalan Kapten Selamat Ketaren Kabanjahe dan telah mendapat sertifikat Penetapan Kelas Rumah Sakit sebagai Kelas C sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No : KH.02.03/I/2000/2014. RSUD Kabupaten Karo telah ditetapkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor : 900/192/RSU/2014, tanggal 17 Juli 2014 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Karo.
   Nilai aset tetap RSUD Kabupaten Karo mengalami penurunan sejak tahun 2018, hal ini dikarenakan status kepemilikan tanah dan bangunan di RSUD Kabupaten Karo. Tanah dan sebagian bangunan RSUD Kabupaten Karo di lahan jalan Selamat Ketaren Kabanjahe merupakan milik GBKP. RSUD Kabupaten Karo melaksanakan kegiatan operasionalnya di tanah milik GBKP sesuai dengan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan antara Moderamen GBKP dengan Pemkab Karo Nomor 1952/I.8.2/2018 dan Nomor 119/3584/atela/2018. Setelah berakhirnya Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan di tahun 2022, RSUD Kabupaten Karo membayar sewa tanah dan bangunan kepada Moderamen GBKP berdasarkan Surat Perjanjian antara GBKP dengan Pemerintah Kabupaten Karo tentang Sewa Menyewa Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik GBKP Nomor : 0945/I9.5/2024 dan Nomor : 119/174/PEM/2024 jangka waktu sewa tanah sampai dengan 31 Desember 2024 dan perjanjian tersebut akan diperbaharui setiap tahunnya.
   Nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan yang ada di laporan keuangan ini merupakan bangunan yang di bangun di tanah milik GBKP yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Karo, bangunan tersebut merupakan bangunan untuk ruang rawat jalan (poliklinik), rekam medis, gedung IGD, Kantor, UTDRS dan gedung genset;

3) Pengelolaan dana BOSP SD dan SMP diatur dalam dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

4) Pengelolaan Dana Desa diatur dalam dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

5) Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas diatur secara khusus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah, dengan ketentuan bahwa proses pengelolaan dana tersebut baik penerimaan dan pengeluaran, tidak melalui Rekening Kas Daerah, melainkan langsung kepada rekening Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 19 (sembilan belas) puskesmas di Kabupaten Karo; dan

6) Pengelolaan Tunjangan Penghasilan Guru diatur pada Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan bagi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND). Terdapat 2024 guru penerima tunjangan ini.

BAB VII
PENUTUP

Demikian materi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai wujud pemenuhan ketentuan dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Materi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 ini pada dasarnya memuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta kinerja keuangan.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan maka pengelolaan keuangan daerah dapat lebih meningkatkan kinerja, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas supaya tertib administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik dan mendorong terciptanya keterbukaan sebagai salah satu pilar pencapaian ***Good Governance.***

Kabanjahe, 24 September 2026

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran Laporan Keuangan

Capaian Indikator Kinerja Utama Perjanjian
TA 2025

No	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase
1	***2***	***3***	***4***	***5=4/3*100***
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	69,9	72,4	103,58
2	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,6	3,71	103,06
3	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	63	60,36	95,81
4	Indeks Integritas (Angka)	77	77,67	100,87
5	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Opini)	WTP	WTP	100
6	Nilai SAKIP Kabupaten (Nilai)	61	61,39	100,64
7	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3,7	3,67	99,19
8	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75,7	79,14	104,54
9	Persentase Pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (%)	96	96	100
10	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan (%)	45	50	111,11
11	Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun	73	74,71	102,34
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.90-5.27	4,23	86,33
13	Tingkat Kemiskinan (%)	6,20-6,53	6,66	107,42
14	Rasio Gini (Rasio)	0,214	0,238	89,92
15	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	2,59	2,46	94,98
16	PDRB Per Kapita (Rp Juta Per Tahun)	75.24-75.51	70,508	93,71
17	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	82,28	82,09	107,42
18	Tingkat Inflasi (%)	3	3,15	95,24
19	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	76.90-77.40	78,1	101,56
20	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (Tahun)	10.13-10.25	10,3	101,68
21	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.27-13.37	13,27	100
22	Indeks Pembangunan Keluarga (%)	59,9	53,3	88,98
23	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,303	0,304	99,67
24	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri (%)	3,9	7,7	197,44
25	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.38-2.07	1,93	123,32
26	Rasio Kewirausahaan Daerah (Rasio)	4,11	13,41	326,28
27	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	1,95	1,95	100
28	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Angka)	65	65	100
29	Penurunan Emisi GRK (TON CO2 EQ)	130.888	353.184,37	269,84
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	79,23	74,33	93,82
31	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	103	124,69	82,6
32	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,49	0,57	116,33
33	Indeks SPBE/Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Angka)	03.04	3,29	108,22
34	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Angka)	40	43,15	107,88
35	Tingkat Pencapaian Indikator Makro Bersama (*Shared Development Indicators*) Pusat-Daerah (%)	82	80	97,56

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo
TA 2025 dan 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	2025 (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.440.524.037.989,00**	**1.424.632.629.049,83**	**98,90**	**1.445.665.730.281,70**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**156.345.552.932,00**	**150.529.669.004,83**	**96,28**	**105.349.287.214,70**
4.1.01	Pajak Daerah	101.353.011.918,00	89.922.705.301,98	88,72	61.540.045.940,28
4.1.02	Retribusi Daerah	42.142.900.000,00	43.732.430.443,00	103,77	33.697.123.306,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.446.458.482,00	3.446.458.482,00	100,00	2.624.980.942,59
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.403.182.532,00	13.428.074.777,85	142,80	7.487.137.025,83
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**156.345.552.932,00**	**150.529.669.004,83**	**96,28**	**105.349.287.214,70**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.265.621.122.964,00**	**1.255.825.821.775,00**	**99,23**	**1.323.732.110.577,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.170.206.183.978,00	1.169.598.451.826,00	99,95	1.257.891.004.053,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.414.938.986,00	86.227.369.949,00	90,37	65.841.106.524,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**18.557.362.093,00**	**18.277.138.270,00**	**98,49**	**16.584.332.490,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.557.362.093,00	18.277.138.270,00	98,49	16.584.332.490,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.440.524.037.989,00**	**1.424.632.629.049,83**	**98,90**	**1.445.665.730.281,70**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.455.323.089.325,00**	**1.385.107.097.412,50**	**95,18**	**1.524.844.149.888,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.017.025.989.362,00**	**963.428.644.459,50**	**94,73**	**1.017.870.013.586,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	636.648.855.621,00	612.409.535.553,00	96,19	622.939.163.784,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.791.314.310,00	330.896.946.272,50	92,23	343.502.153.763,00
5.1.05	Belanja Hibah	20.247.819.431,00	20.122.162.634,00	99,38	51.428.696.039,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.338.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.017.025.989.362,00**	**963.428.644.459,50**	**94,73**	**1.017.870.013.586,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**149.646.807.259,00**	**145.869.376.198,00**	**97,48**	**214.619.621.202,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.019.777.013,00	42.219.516.658,00	93,78	31.232.923.939,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.543.608.457,00	46.986.998.560,00	98,83	58.916.770.589,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.779.884.953,00	47.329.012.466,00	99,06	114.612.976.924,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.303.536.836,00	9.333.848.514,00	100,33	9.856.949.750,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**149.646.807.259,00**	**145.869.376.198,00**	**97,48**	**214.619.621.202,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.964.550.812,00**	**0,00**	**0,00**	**193.476.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.964.550.812,00	0,00	0,00	193.476.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.964.550.812,00**	**0,00**	**0,00**	**193.476.000,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**285.685.741.892,00**	**275.809.076.755,00**	**96,54**	**292.161.039.100,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.790.329.192,00	11.790.329.192,00	100,00	10.352.188.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	273.895.412.700,00	264.018.747.563,00	96,39	281.808.851.100,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**285.685.741.892,00**	**275.809.076.755,00**	**96,54**	**292.161.039.100,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.455.323.089.325,00**	**1.385.107.097.412,50**	**95,18**	**1.524.844.149.888,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**-14.799.051.336,00**	**39.525.531.637,33**	**-267,08**	**-79.178.419.606,30**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**14.799.051.336,00**	**14.799.361.336,83**	**100,00**	**93.977.470.943,13**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**14.799.051.336,00**	**14.799.361.336,83**	**100,00**	**96.777.470.943,13**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.799.051.336,00	14.799.361.336,83	100,00	96.777.470.943,13
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**14.799.051.336,00**	**14.799.361.336,83**	**100,00**	**96.777.470.943,13**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	2.800.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**14.799.051.336,00**	**14.799.361.336,83**	**100,00**	**93.977.470.943,13**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**54.324.892.974,16**	**0,00**	**14.799.051.336,83**

Lampiran 3

Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD
TA 2025

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	**Dinas Pendidikan**	**430.152.752.319,00**	**416.677.473.871,00**	**96,87%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	316.263.943.669,00	305.436.252.977,00	96,58%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	963.478.366,00	962.791.355,00	99,93%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3.132.515.088,00	3.126.956.205,00	99,82%
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	707.700.000,00	706.875.555,00	99,88%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.365.346.000,00	4.359.685.835,00	99,87%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	874.281.536,00	873.247.305,00	99,88%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00%
	Pengadaan Mebel Sekolah	939.800.000,00	938.013.805,00	99,81%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	262.125.405,00	246.725.185,00	94,12%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.569.057.086,00	323.415.989,00	20,61%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	141.030.715,00	139.630.685,00	99,01%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	37.890.604.090,00	38.502.459.122,00	101,61%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	211.015.715,00	182.163.930,00	86,33%
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	6.326.446.678,00	6.291.714.425,00	99,45%
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	98.597.463,00	92.370.865,00	93,68%
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	138.835.007,00	106.512.590,00	76,72%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	116.658.382,00	101.669.065,00	87,15%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	418.013.495,00	317.640.500,00	75,99%
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	84.897.252,00	78.297.105,00	92,23%
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	118.385.207,00	118.109.305,00	99,77%
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.922.058.698,00	1.919.944.360,00	99,89%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	895.147.500,00	893.226.435,00	99,79%
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	154.534.382,00	134.709.465,00	87,17%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	36.008.015,00	36.007.875,00	100,00%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.612.017.970,00	2.608.675.320,00	99,87%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	375.890.444,00	375.890.435,00	100,00%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	419.887.852,00	400.179.359,00	95,31%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	678.914.270,00	677.375.346,00	99,77%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.109.698.553,00	2.081.487.860,00	98,66%
	Pembangunan Laboratorium	1.619.076.146,00	1.536.882.428,00	94,92%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	807.405.000,00	806.143.200,00	99,84%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.350.970.358,00	7.327.411.799,00	99,68%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	532.464.630,00	530.526.550,00	99,64%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	751.998.009,00	738.515.308,00	98,21%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	611.618.530,00	610.832.450,00	99,87%
	Pengadaan Mebel Sekolah	800.000.000,00	799.977.602,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	500.000.000,00	498.945.000,00	99,79%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	761.350.000,00	761.349.850,00	100,00%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	361.680.000,00	314.937.634,00	87,08%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	64.040.156,00	45.554.865,00	71,13%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	439.783.095,00	429.005.385,00	97,55%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	107.832.007,00	105.537.374,00	97,87%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	23.032.734.974,00	21.901.825.538,00	95,09%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	210.000.000,00	200.049.915,00	95,26%
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83.366.863,00	67.146.535,00	80,54%
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	76.185.193,00	62.377.090,00	81,88%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	90.553.956,00	73.951.505,00	81,67%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	726.052.274,00	643.630.480,00	88,65%
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	106.308.830,00	99.762.685,00	93,84%
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	90.115.000,00	78.480.510,00	87,09%
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	518.680.000,00	509.853.334,00	98,30%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	373.698.956,00	373.608.310,00	99,98%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	534.341.073,00	532.016.555,00	99,56%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	152.873.215,00	152.852.195,00	99,99%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	75.455.963,00	75.305.765,00	99,80%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	80.221.763,00	80.221.665,00	100,00%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	492.070.332,00	469.423.705,00	95,40%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.980.560.000,00	3.092.787.380,00	103,77%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	99.709.208,00	92.671.120,00	92,94%
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	44.848.612,00	44.698.455,00	99,67%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.882.456,00	43.881.995,00	97,77%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	133.208.267,00	99.386.155,00	74,61%
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	59.022.400,00	47.748.040,00	80,90%
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	65.111.312,00	65.111.100,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	9.909.635,00	7.936.500,00	80,09%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	326.502.153,00	317.931.750,00	97,38%
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	26.667.963,00	19.642.935,00	73,66%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	32.835.000,00	16.638.600,00	50,67%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.921.926,00	3.774.910,00	96,25%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29.042.963,00	21.939.580,00	75,54%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	130.088.499,00	128.637.826,00	98,88%
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	248.710.000,00	111.692.000,00	44,91%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20.000.000,00	13.219.095,00	66,10%
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	7.175.481,00	6.523.805,00	90,92%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	16.356.015,00	12.565.755,00	76,83%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6.700.841,00	4.471.050,00	66,72%
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.243.481,00	-	0,00%
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.176.400,00	6.726.290,00	93,73%
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	35.941.333,00	31.746.000,00	88,33%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	173.691.454,00	171.495.000,00	98,74%
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.135.426,00	6.911.155,00	96,86%
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	162.754.339,00	161.194.930,00	99,04%
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98.315.334,00	98.313.365,00	100,00%
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	69.365.867,00	67.815.435,00	97,76%
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	73.533.333,00	73.533.045,00	100,00%
	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	49.397.460,00	47.147.110,00	95,44%
2	**Dinas Kesehatan**	**766.110.000,00**	**122.100.000,00**	**15,94%**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200.350.000,00	14.850.000,00	7,41%
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	563.060.000,00	104.550.000,00	18,57%
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**60.655.189,00**	**41.572.950,00**	**68,54%**
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	60.655.189,00	41.572.950,00	68,54%
4	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**33.638.200,00**	**30.267.000,00**	**89,98%**
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	33.638.200,00	30.267.000,00	89,98%
5	**Dinas Sosial**	**275.024.380,00**	**229.111.380,00**	**83,31%**
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	275.024.380,00	229.111.380,00	83,31%
6	**Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**	**816.886.160,00**	**736.519.325,00**	**90,16%**
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	777.000.000,00	736.519.325,00	94,79%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	39.886.160,00	-	0,00%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
7	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB**	**458.828.009,00**	**418.239.872,00**	**91,15%**
	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	27.300.500,00	23.854.000,00	87,38%
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	26.523.200,00	24.454.000,00	92,20%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.203.757,00	22.508.080,00	69,89%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	31.233.940,00	27.036.540,00	86,56%
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	27.669.680,00	25.748.000,00	93,05%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	250.056.932,00	236.087.900,00	94,41%
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	25.000.000,00	21.251.352,00	85,01%
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.240.000,00	10.700.000,00	87,42%
	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00%
8	**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**1.185.010.131,00**	**930.883.875,00**	**78,55%**
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	550.000.000,00	362.561.834,00	65,92%
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	474.322.284,00	421.177.477,00	88,80%
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	152.087.662,00	139.099.108,00	91,46%
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	8.600.185,00	8.045.456,00	93,55%
9	**Dinas Lingkungan Hidup**	**314.667.884,00**	**280.445.360,00**	**89,12%**
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	120.000.000,00	86.580.000,00	72,15%
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	40.000.000,00	39.767.440,00	99,42%
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	154.667.884,00	154.097.920,00	99,63%
10	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**850.712.838,00**	**573.529.640,00**	**67,42%**
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	133.889.955,00	94.864.560,00	70,85%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	90.974.385,00	59.335.430,00	65,22%
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	115.848.498,00	58.199.880,00	50,24%
	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	510.000.000,00	361.129.770,00	70,81%
11	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**77.053.100,00**	**74.399.000,00**	**96,56%**
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	77.053.100,00	74.399.000,00	96,56%
12	**Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata**	**6.296.711.131,00**	**5.147.314.874,00**	**81,75%**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	122.100.000,00	5.250.000,00	4,30%
	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	329.743.340,00	226.650.200,00	68,74%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	63.706.850,00	33.775.300,00	53,02%
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	250.000.000,00	249.665.932,00	99,87%
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	688.477.329,00	623.129.380,00	90,51%
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	398.395.185,00	392.314.265,00	98,47%
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	608.336.145,00	406.699.900,00	66,85%
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	60.024.993,00	54.258.000,00	90,39%
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	32.509.000,00	32.059.000,00	98,62%
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	69.538.341,00	68.438.341,00	98,42%
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	268.181.818,00	259.035.000,00	96,59%
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	815.730.673,00	605.230.126,00	74,19%
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	629.977.194,00	406.820.540,00	64,58%
	Penetapan Cagar Budaya	143.031.000,00	129.112.940,00	90,27%
	Pelindungan Cagar Budaya	303.264.345,00	293.019.285,00	96,62%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	156.000.000,00	116.400.715,00	74,62%
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	350.185.999,00	320.121.700,00	91,41%
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	957.956.419,00	876.076.300,00	91,45%
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	49.552.500,00	49.257.950,00	99,41%
13	**Dinas Perpustakaan dan Arsip**	**10.683.974.860,00**	**10.620.935.409,00**	**99,41%**
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.320.000,00	55.164.705,00	99,72%
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	174.849.130,00	174.682.930,00	99,90%
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.005.000,00	35.987.000,00	99,95%
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	159.900.000,00	159.885.665,00	99,99%
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.241.730.730,00	10.179.537.109,00	99,39%
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	16.170.000,00	15.678.000,00	96,96%
14	**Dinas Pertanian**	**500.000.000,00**	**485.841.400,00**	**97,17%**
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000,00	485.841.400,00	97,17%
15	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**	**446.529.342,00**	**362.200.552,00**	**81,11%**
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	446.529.342,00	362.200.552,00	81,11%
16	**Badan Pendapatan Daerah**	**166.390.040,00**	**109.093.633,00**	**65,57%**
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	166.390.040,00	109.093.633,00	65,57%
	JUMLAH	**453.084.943.583,00**	**436.839.928.141,00**	**96,41%**
	TOTAL BELANJA DAERAH	**1.455.323.089.325,00**	**1.385.107.097.412,50**	
	% Belanja Fungsi Pendidikan	**31,13%**	**31,54%**	

Belanja Infrastuktur dalam APBD
TA 2025

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	**Dinas Pendidikan**	**41.350.950.514,00**	**40.192.743.969,00**	**97,20%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.945.631,00	16.828.840,00	99,31%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.325.000,00	112.320.259,00	100,00%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	874.281.536,00	112.320.259,00	12,85%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	129.698.780,00	129.657.350,00	99,97%
	Pengadaan Mebel	200.000.000,00	197.546.910,00	98,77%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	147.186.000,00	98,12%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	73.800.000,00	67.159.934,00	91,00%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	29.816.000,00	99,39%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.180.000,00	327.325.000,00	97,37%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	75.340.000,00	75.280.415,00	99,92%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.000.000,00	167.928.300,00	99,96%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	963.478.366,00	962.791.355,00	99,93%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3.132.515.088,00	3.126.956.205,00	99,82%
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	707.700.000,00	706.875.555,00	99,88%
	Pembangunan Sarana	4.365.346.000,00	4.359.685.835,00	99,87%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00%
	Pengadaan Mebel Sekolah	939.800.000,00	938.013.805,00	99,81%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	141.030.715,00	139.630.685,00	99,01%
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	6.326.446.678,00	6.291.714.425,00	99,45%
	Pembinaan Penggunaan Teknologi	98.597.463,00	92.370.865,00	93,68%
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	138.835.007,00	106.512.590,00	76,72%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	116.658.382,00	101.669.065,00	87,15%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana	895.147.500,00	893.226.435,00	99,79%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.612.017.970,00	2.608.675.320,00	99,87%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	419.887.852,00	400.179.359,00	95,31%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	678.914.270,00	677.375.346,00	99,77%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.109.698.553,00	2.081.487.860,00	98,66%
	Pembangunan Laboratorium	1.619.076.146,00	1.536.882.428,00	94,92%
	Pembangunan Sarana	807.405.000,00	806.143.200,00	99,84%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.350.970.358,00	7.327.411.799,00	99,68%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	532.464.630,00	530.526.550,00	99,64%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	751.998.009,00	738.515.308,00	98,21%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana	611.618.530,00	610.832.450,00	99,87%
	Pengadaan Mebel Sekolah	800.000.000,00	799.977.602,00	100,00%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	500.000.000,00	498.945.000,00	99,79%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	107.832.007,00	105.537.374,00	97,87%
	Pembinaan Penggunaan Teknologi	83.366.863,00	67.146.535,00	80,54%
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	76.185.193,00	62.377.090,00	81,88%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	90.553.956,00	73.951.505,00	81,67%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	373.698.956,00	373.608.310,00	99,98%
	Pembangunan Sarana	534.341.073,00	532.016.555,00	99,56%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	492.070.332,00	469.423.705,00	95,40%
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	44.848.612,00	44.698.455,00	99,67%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.882.456,00	43.881.995,00	97,77%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	326.502.153,00	317.931.750,00	97,38%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	130.088.499,00	128.637.826,00	98,88%
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	7.175.481,00	6.523.805,00	90,92%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	16.356.015,00	12.565.755,00	76,83%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana	173.691.454,00	171.495.000,00	98,74%
2	**Dinas Kesehatan**	**22.591.220.465,00**	**18.805.173.188,00**	**83,24%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.546.200,00	60.272.000,00	91,95%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.848.362,00	32.626.896,00	96,39%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.602.400,00	45.141.500,00	98,99%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.000.000,00	25.999.800,00	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	7.870.000,00	7.812.000,00	99,26%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	58.450.000,00	56.984.945,00	97,49%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	833.700.000,00	823.580.000,00	98,79%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	44.004.500,00	42.852.884,00	97,38%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	11.598.917.740,00	11.376.550.753,00	98,08%
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.209.600,00	1.209.600,00	100,00%
	Pengembangan Puskesmas	1.308.800.000,00	1.086.019.660,00	82,98%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.605.728.000,00	2.586.981.967,00	99,28%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	664.400.000,00	661.171.003,00	99,51%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	200.000.000,00	199.520.000,00	99,76%
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	140.031.000,00	114.842.000,00	82,01%
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%
	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.792.454.063,00	1.520.892.500,00	31,74%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	135.008.600,00	133.965.680,00	99,23%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C	10.150.000,00	9.250.000,00	91,13%
3	**Rumah Sakit Umum Daerah**	**31.627.847.899,00**	**31.280.877.196,00**	**98,90%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi	428.400.000,00	412.805.256,00	96,36%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.812.458.592,00	2.707.693.305,00	96,27%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	84.666.141,00	80.812.366,00	95,45%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	27.456.427.198,00	27.273.979.769,00	99,34%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	845.895.968,00	805.586.500,00	95,23%
4	**1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**62.533.748.670,00**	**60.473.921.810,00**	**96,71%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	387.412.387,00	371.084.300,00	95,79%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.773.349,00	73.860.200,00	87,13%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.656.000,00	28.877.400,00	91,22%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	28.000.000,00	93,33%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	61.500.000,00	49.306.600,00	80,17%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.050.000,00	51.650.000,00	92,15%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	917.232.720,00	859.163.280,00	93,67%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	69.870.000,00	64.545.947,00	92,38%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	955.673.500,00	751.593.275,00	78,65%
	Pembangunan Bendung Irigasi	1.300.000.000,00	1.260.613.849,00	96,97%
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.388.499.962,00	2.358.254.024,00	98,73%
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.689.198.849,00	2.616.695.450,00	97,30%
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	200.000.000,00	199.200.000,00	99,60%
	Penyusunan Rencana	200.000.000,00	199.633.500,00	99,82%
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	592.601.998,00	492.601.998,00	83,13%
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	4.409.323.000,00	4.392.516.000,00	99,62%
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	60.655.189,00	41.572.950,00	68,54%
	Penyusunan Rencana	100.000.000,00	-	0,00%
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	4.192.528.729,00	4.178.103.293,00	99,66%
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	399.100.000,00	398.603.102,00	99,88%
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.004.919.553,00	5.985.051.153,00	99,67%
	Penyusunan Rencana	300.000.000,00	50.000.000,00	16,67%
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.633.693.674,00	1.633.586.790,00	99,99%
	Pemeliharaan	100.000.000,00	99.518.121,00	99,52%
	Pembangunan	1.811.000.000,00	1.789.062.138,00	98,79%
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya	3.452.146.008,00	2.826.967.706,00	81,89%
	Penyusunan Rencana	100.000.000,00	-	0,00%
	Pembangunan Jalan	15.827.082.224,00	15.708.454.176,00	99,25%
	Rekonstruksi Jalan	3.133.632.462,00	3.103.247.653,00	99,03%
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	199.981.200,00	99,99%
	Pembangunan Jembatan	3.859.850.738,00	3.729.383.919,00	96,62%
	Rehabilitasi Jalan	2.617.710.167,00	2.596.848.156,00	99,20%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.041.978.626,00	4.041.001.985,00	99,98%
	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	73.509.000,00	71.505.150,00	97,27%
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	252.150.535,00	223.438.495,00	88,61%
5	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**	**13.207.084.261,00**	**12.664.057.669,00**	**95,89%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.533.809,00	143.689.300,00	95,45%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.659.550,00	12.393.000,00	97,89%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.200.000,00	4.803.100,00	92,37%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	30.000.000,00	21.397.400,00	71,32%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.930.000,00	14.930.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	86.657.206,00	82.901.250,00	95,67%
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	35.269.591,00	-	0,00%
	Penyediaan Prasarana	12.289.532.100,00	11.990.411.119,00	97,57%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana	74.551.990,00	35.790.400,00	48,01%
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.558.535,00	43.578.000,00	58,45%
	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.521.480,00	56.567.000,00	95,04%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	369.470.000,00	253.397.100,00	68,58%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
6	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**10.961.089.786,00**	**10.845.642.518,00**	**98,95%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.427.971,00	107.104.481,00	99,70%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.910.374,00	44.496.744,00	99,08%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.370.391,00	55.351.900,00	99,97%
	Pengadaan Mebel	12.078.500,00	12.078.500,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	51.220.000,00	49.093.280,00	95,85%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.980.000,00	9.980.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.520.078.000,00	6.506.398.000,00	99,79%
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	902.066.800,00	901.452.700,00	99,93%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.170.995.000,00	1.133.442.000,00	96,79%
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	50.100.000,00	50.100.000,00	100,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan	2.036.862.750,00	1.976.144.913,00	97,02%
7	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**7.962.306.179,00**	**5.212.047.632,00**	**65,46%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.436.190,00	37.604.600,00	97,84%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.099.888,00	7.677.000,00	94,78%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.633.500,00	30.638.400,00	91,09%
	Pengadaan Mebel	134.819.027,00	131.808.060,00	97,77%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.346.400,00	147.652.550,00	96,29%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	21.000.000,00	16.978.452,00	80,85%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.944.000,00	450.449.291,00	94,84%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	175.150.000,00	174.123.975,00	99,41%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.100.000,00	10.100.000,00	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.244.000,00	79.999.999,00	99,70%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	28.000.000,00	27.972.000,00	99,90%
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	70.338.462,00	66.221.600,00	94,15%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	43.487.770,00	39.129.110,00	89,98%
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	321.560.160,00	280.994.050,00	87,38%
	Pencarian	3.126.077.938,00	3.077.638.450,00	98,45%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.049.364,00	48.373.400,00	96,65%
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	3.082.385.100,00	497.931.000,00	16,15%
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	40.996.380,00	32.384.775,00	78,99%
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	69.638.000,00	54.370.920,00	78,08%
8	**Dinas Sosial**	**996.417.232,00**	**894.318.522,00**	**89,75%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.181.359,00	30.165.895,00	99,95%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.880.000,00	14.880.000,00	100,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.135.790,00	14.133.520,00	99,98%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	2.700.000,00	-	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.108.700,00	117.265.950,00	90,83%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	29.760.000,00	16.389.592,00	55,07%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.550.000,00	7.100.000,00	56,57%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.560.000,00	159.955.000,00	88,10%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	179.700.000,00	170.818.200,00	95,06%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.870.000,00	66.100.035,00	98,85%
	Koordinasi	19.971.383,00	16.064.010,00	80,44%
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	15.000.000,00	-	0,00%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	300.000.000,00	281.446.320,00	93,82%
9	**Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**	**834.388.953,00**	**440.766.583,00**	**52,83%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.090.731,00	37.926.835,00	99,57%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.699,00	9.993.420,00	99,95%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.910.944,00	15.809.563,00	99,36%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.121.000,00	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	23.820.000,00	13.171.424,00	55,30%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.980.000,00	105.660.000,00	40,96%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	38.420.000,00	35.938.172,00	93,54%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	54.271.000,00	52.413.549,00	96,58%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.832.000,00	9.780.000,00	39,38%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.757.257,00	49.378.600,00	38,96%
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	19.058.081,00	18.479.875,00	96,97%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	7.456.381,00	7.440.610,00	99,79%
	Produksi dan Pengolahan	99.672.860,00	84.774.535,00	85,05%
10	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB**	**1.677.101.721,00**	**1.173.463.302,00**	**69,97%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.737.001,00	55.977.000,00	96,95%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.000.000,00	10.332.850,00	93,94%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	1.862.000,00	1.260.000,00	67,67%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.908.100,00	63.203.400,00	97,37%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	24.300.000,00	18.195.113,00	74,88%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.700.000,00	200.004.000,00	91,87%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	148.479.504,00	73.419.339,00	49,45%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.869.040,00	5.045.000,00	56,88%
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	27.669.680,00	25.748.000,00	93,05%
	Pengembangan Komunikasi	18.745.396,00	15.604.000,00	83,24%
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	161.400.000,00	55.500.000,00	34,39%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	78.000.000,00	-	0,00%
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	517.400.000,00	379.138.600,00	73,28%
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam)	99.820.000,00	79.339.000,00	79,48%
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	218.011.000,00	180.097.000,00	82,61%
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.200.000,00	10.600.000,00	50,00%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
11	**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**1.424.056.816,00**	**1.120.736.444,00**	**78,70%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.833.895,00	106.979.739,00	88,53%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.323.212,00	17.239.680,00	94,09%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.178.110,00	18.186.450,00	90,13%
	Pengadaan Mebel	29.948.762,00	27.386.750,00	91,45%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.752.560,00	6.945.230,00	79,35%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	41.500.000,00	29.945.083,00	72,16%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.650.000,00	16.480.000,00	98,98%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.806.660,00	136.570.420,00	75,53%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	38.420.000,00	38.417.026,00	99,99%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	48.435.040,00	45.876.812,00	94,72%
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	140.099.052,00	-	0,00%
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	97.555.055,00	88.941.929,00	91,17%
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	47.390.000,00	43.606.750,00	92,02%
	Pemberian Pendampingan	152.087.662,00	139.099.108,00	91,46%
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	463.076.808,00	405.061.467,00	87,47%
12	**Dinas Lingkungan Hidup**	**22.077.215.038,00**	**19.602.151.017,00**	**88,79%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.943.985,00	29.907.000,00	99,88%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	5.984.000,00	99,73%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.000.000,00	65.553.400,00	96,40%
	Pengadaan Mebel	55.228.590,00	53.058.000,00	96,07%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.759.600,00	190.309.500,00	97,22%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	55.000.000,00	48.229.362,00	87,69%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.010.000,00	12.000.000,00	99,92%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.546.400,00	320.110.000,00	99,24%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	6.865.831.292,00	5.022.368.443,00	73,15%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.329.000,00	106.183.664,00	88,98%
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	7.660.000,00	7.050.000,00	92,04%
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	18.998.077,00	18.986.600,00	99,94%
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	7.500.000,00	6.750.000,00	90,00%
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	13.690.400,00	13.250.000,00	96,78%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.843.858.456,00	1.795.223.299,00	97,36%
	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	249.954.280,00	42.959.500,00	17,19%
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	12.015.904.958,00	11.674.228.249,00	97,16%
13	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**1.116.337.179,00**	**888.902.055,00**	**79,63%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.900.080,00	41.188.800,00	89,74%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.294.362,00	7.375.500,00	88,92%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.163.875,00	21.769.500,00	80,14%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	2.160.000,00	1.200.000,00	55,56%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pengadaan Mebel	63.210.734,00	49.640.000,00	78,53%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	267.718.128,00	118.484.000,00	44,26%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	17.220.000,00	13.336.044,00	77,45%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.780.000,00	21.820.000,00	70,89%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	463.860.000,00	457.000.000,00	98,52%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	85.030.000,00	82.888.212,00	97,48%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	74.199.999,00	98,93%
14	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**724.770.868,00**	**624.943.337,00**	**86,23%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	297.905.375,00	265.504.900,00	89,12%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.500.000,00	11.710.300,00	86,74%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.986.662,00	20.584.860,00	93,62%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	4.900.000,00	3.600.000,00	73,47%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	19.200.000,00	17.811.500,00	92,77%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.290.000,00	25.760.000,00	97,98%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.658.719,00	185.651.000,00	92,98%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	66.921.968,00	56.817.677,00	84,90%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	71.998.144,00	37.503.100,00	52,09%
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.410.000,00	-	0,00%
15	**Dinas Perhubungan**	**17.222.091.105,00**	**16.848.853.554,00**	**97,83%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.491.815,00	-	0,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.047.185,00	92.466.585,00	98,32%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.938.892,00	29.938.892,00	100,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.705.600,00	50.697.300,00	99,98%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	3.556.000,00	2.640.000,00	74,24%
	Pengadaan Mebel	19.850.000,00	19.314.000,00	97,30%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.629.400,00	9.496.500,00	98,62%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	38.344.705,00	30.109.660,00	78,52%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.528.000,00	12.155.000,00	69,35%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	722.614.630,00	687.460.760,00	95,14%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	39.448.112,00	39.358.850,00	99,77%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	149.602.630,00	149.037.880,00	99,62%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	654.529.407,00	629.976.524,00	96,25%
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	123.752.558,00	115.821.425,00	93,59%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.939.130.572,00	12.716.555.138,00	98,28%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	564.650.300,00	553.550.300,00	98,03%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	223.635.521,00	221.423.850,00	99,01%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	112.096.473,00	104.251.075,00	93,00%
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	688.521.940,00	682.186.508,00	99,08%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	17.235.462,00	10.687.374,00	62,01%
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	551.150.201,00	543.999.302,00	98,70%
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	24.540.438,00	24.540.196,00	100,00%
	Pelaksanaan Inspeksi	8.204.352,00	6.000.000,00	73,13%
	Pelaksanaan Inspeksi	12.213.068,00	11.908.135,00	97,50%
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	49.575.720,00	45.292.266,00	91,36%
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.541.388,00	47.449.129,00	75,87%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12.556.736,00	12.536.905,00	99,84%
16	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**4.316.969.753,00**	**4.256.077.373,00**	**98,59%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.193.135,00	48.139.649,00	99,89%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.270.000,00	47.270.000,00	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	1.572.000.000,00	1.571.989.120,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.140.000,00	7.050.000,00	98,74%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.649.465,00	301.264.100,00	96,36%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	75.590.000,00	75.564.749,00	99,97%
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	199.355.645,00	195.243.446,00	97,94%
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	728.723.754,00	695.118.623,00	95,39%
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	84.597.712,00	84.597.600,00	100,00%
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	490.000.000,00	487.843.661,00	99,56%
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	309.260.444,00	306.362.485,00	99,06%
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	180.056.340,00	178.807.900,00	99,31%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	198.021.258,00	194.822.140,00	98,38%
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	56.552.000,00	54.443.900,00	96,27%
17	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**1.114.035.801,00**	**1.079.140.577,00**	**96,87%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.988.047,00	49.669.362,00	95,54%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.845.788,00	20.814.246,00	99,85%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.796.785,00	37.275.639,00	87,10%
	Pengadaan Mebel	13.200.000,00	12.987.000,00	98,39%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.615.181,00	256.765.200,00	99,28%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	30.160.000,00	29.056.580,00	96,34%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.810.000,00	14.800.000,00	99,93%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	409.200.000,00	393.315.000,00	96,12%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	38.420.000,00	38.420.000,00	100,00%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	114.000.000,00	114.000.000,00	100,00%
	Pengolahan	120.000.000,00	112.037.550,00	93,36%
18	**Dinas Kebudayaan**	**7.957.571.823,00**	**5.676.136.696,00**	**71,33%**
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan	250.000.000,00	249.665.932,00	99,87%
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	32.509.000,00	32.059.000,00	98,62%
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	268.181.818,00	259.035.000,00	96,59%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.190.000,00	-	0,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.361.330,00	-	0,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.648.000,00	-	0,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	4.988.000,00	-	0,00%
	Pengadaan Mebel	61.856.132,00	-	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.774.600,00	-	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.452.500,00	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	82.920.000,00	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.950.000,00	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	986.040.000,00	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	242.565.200,00	-	0,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.001.338,00	-	0,00%
	Pelindungan Cagar Budaya	303.264.345,00	293.019.285,00	96,62%
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000,00	497.335.500,00	99,47%
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.496.605.416,00	4.023.621.264,00	89,48%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	156.000.000,00	116.400.715,00	74,62%
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota	205.264.144,00	205.000.000,00	99,87%
19	**Dinas Perpustakaan dan Arsip**	**11.150.570.007,00**	**11.069.341.276,00**	**99,27%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.347.683,00	52.295.540,00	99,90%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.924.350,00	6.650.600,00	96,05%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	3.966.000,00	3.956.000,00	99,75%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	44.900.000,00	40.237.542,00	89,62%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.551.075,00	14.500.000,00	99,65%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.280.000,00	243.690.000,00	96,98%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	144.801.039,00	138.741.185,00	95,82%
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.320.000,00	55.164.705,00	99,72%
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	174.849.130,00	174.682.930,00	99,90%
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	159.900.000,00	159.885.665,00	99,99%
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat	10.241.730.730,00	10.179.537.109,00	99,39%
20	**Dinas Pertanian**	**8.399.868.844,00**	**7.978.748.167,50**	**94,99%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	362.199.636,00	254.454.589,00	70,25%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.382.247,00	8.838.000,00	85,13%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.766.992,00	25.754.150,00	99,95%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	117.058.861,00	103.976.709,00	88,82%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.654.100.000,00	1.506.790.000,00	91,09%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	96.290.120,00	58.818.728,00	61,08%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	74.995.749,00	99,99%
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	388.968.386,00	378.524.860,00	97,32%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	154.560.000,00	114.814.900,00	74,29%
	Pembangunan	4.272.285.374,00	4.243.305.145,50	99,32%
	Pembangunan	200.000.000,00	190.561.152,00	95,28%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	195.582.249,00	194.380.962,00	99,39%
	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	189.665.800,00	188.435.618,00	99,35%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	42.758.558,00	35.086.100,00	82,06%
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	105.250.621,00	104.270.105,00	99,07%
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000,00	485.841.400,00	97,17%
21	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**7.375.585.505,00**	**3.241.572.385,00**	**43,95%**
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.009.265,00	2.680.000,00	13,39%
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.300.000.000,00	2.723.988.455,00	82,55%
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	105.832.306,00	92.747.700,00	87,64%
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	33.433.564,00	27.781.446,00	83,09%
	Pelaksanaan Metrologi Legal	31.853.909,00	31.548.765,00	99,04%
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	80.856.705,00	49.986.445,00	61,82%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.553.626,00	-	0,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.000.000,00	-	0,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.800.000,00	-	0,00%
	Pengadaan Mebel	110.000.000,00	-	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	85.984.000,00	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.293.744.010,00	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	86.000.000,00	-	0,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.944.000,00	-	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.600.000.000,00	-	0,00%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	49.333.600,00	27.688.069,00	56,12%
	Koordinasi	235.023.930,00	216.114.915,00	91,95%
	Fasilitasi Pengumpulan	74.216.590,00	69.036.590,00	93,02%
22	**Sekretariat Daerah**	**14.558.876.887,00**	**13.064.083.162,00**	**89,73%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	364.245.590,00	354.070.074,00	97,21%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	693.685.760,00	616.410.000,00	88,86%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.563.240,00	80.562.690,00	100,00%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.792.000.000,00	3.617.900.002,00	95,41%
	Pengadaan Mebel	948.513.090,00	838.921.000,00	88,45%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320.100.000,00	229.564.798,00	71,72%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.243.854.200,00	1.106.528.678,00	88,96%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	1.299.403.650,00	1.109.774.202,00	85,41%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.085.970,00	105.363.000,00	68,83%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.312.175.000,00	1.109.035.000,00	84,52%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	476.054.620,00	289.384.110,00	60,79%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	1.033.583.000,00	1.028.446.152,00	99,50%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.393.550,00	52.209.000,00	48,61%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.882.173.830,00	1.871.270.200,00	99,42%
	Monitoring	66.527.044,00	63.238.154,00	95,06%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	31.459.403,00	29.118.900,00	92,56%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	3.857.000,00	3.840.000,00	99,56%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	25.250.000,00	25.249.200,00	100,00%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	584.983.840,00	415.770.002,00	71,07%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	75.432.500,00	69.800.000,00	92,53%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	64.535.600,00	47.628.000,00	73,80%
23	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	**8.650.418.582,00**	**7.499.063.542,00**	**86,69%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	739.947.850,00	669.258.890,00	90,45%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.857.041.630,00	1.376.758.400,00	74,14%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.781.562,00	13.161.500,00	55,34%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	32.400.000,00	19.656.000,00	60,67%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.206.020.000,00	2.109.900.000,00	95,64%
	Pengadaan Mebel	1.483.978.500,00	1.312.085.011,00	88,42%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	157.200.000,00	124.627.143,00	79,28%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.290.000,00	18.780.250,00	24,62%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.056.190.000,00	1.001.490.000,00	94,82%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	297.120.000,00	181.116.578,00	60,96%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	701.039.440,00	672.229.770,00	95,89%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	19.409.600,00	-	0,00%
24	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**3.022.416.198,00**	**2.800.021.471,00**	**92,64%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.399.544,00	34.416.335,00	97,22%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.428.784,00	12.428.784,00	100,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.784.302,00	18.127.119,00	87,22%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	183.608.440,00	169.175.100,00	92,14%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	12.000.000,00	11.978.800,00	99,82%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.650.000,00	16.140.000,00	91,44%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.300.000,00	75.300.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	42.120.000,00	40.886.928,00	97,07%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.553.601,00	100.740.000,00	79,60%
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	775.134.485,00	734.000.010,00	94,69%
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	43.026.190,00	37.017.835,00	86,04%
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	121.607.610,00	102.804.035,00	84,54%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD	37.029.882,00	36.452.640,00	98,44%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	67.612.200,00	60.739.200,00	89,83%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD	79.108.803,00	76.668.405,00	96,92%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	338.048.448,00	321.748.835,00	95,18%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD	152.575.521,00	137.900.600,00	90,38%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.100.000,00	7.840.563,00	96,80%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	48.472.272,00	48.218.004,00	99,48%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD	28.484.000,00	27.443.955,00	96,35%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.313.560,00	9.812.130,00	95,14%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	31.016.519,00	29.742.110,00	95,89%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD	63.369.445,00	62.590.215,00	98,77%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	66.855.750,00	66.058.485,00	98,81%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD	21.415.020,00	20.832.350,00	97,28%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	26.217.630,00	24.138.043,00	92,07%
	Penelitian	578.184.192,00	516.820.990,00	89,39%
25	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**1.420.232.558,00**	**1.103.686.513,00**	**77,71%**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.696.000,00	1.190.000,00	9,37%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	366.534.951,00	242.627.010,00	66,19%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.625.790,00	16.203.185,00	86,99%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.421.212,00	45.993.726,00	91,22%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	19.200.000,00	15.725.544,00	81,90%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.460.000,00	14.520.000,00	78,66%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.440.000,00	268.380.000,00	98,15%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	291.507.200,00	148.125.132,00	50,81%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	227.406.666,00	219.926.915,00	96,71%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	103.658.010,00	94.172.038,00	90,85%
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	38.282.729,00	36.822.963,00	96,19%
26	**Badan Pendapatan Daerah**	**746.106.510,00**	**694.383.556,00**	**93,07%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.842.060,00	124.929.139,00	98,49%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.044.450,00	90.228.750,00	98,03%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	19.200.000,00	15.760.155,00	82,08%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.100.000,00	12.204.000,00	38,02%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.630.000,00	377.205.000,00	95,10%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	79.290.000,00	74.056.512,00	93,40%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
27	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**495.402.885,00**	**465.764.620,00**	**94,02%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.718.565,00	30.623.474,00	99,69%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.719.140,00	29.662.100,00	99,81%
	Pengadaan Mebel	49.487.350,00	46.342.498,00	93,65%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.217.200,00	168.803.500,00	90,65%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	19.200.000,00	10.934.080,00	56,95%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.474.630,00	21.415.000,00	99,72%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	38.420.000,00	38.392.530,00	99,93%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.770.000,00	17.640.000,00	99,27%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	102.396.000,00	101.951.438,00	99,57%
28	**Inspektorat Daerah**	**471.314.718,00**	**462.503.097,00**	**98,13%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.435.522,00	227.801.000,00	98,86%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.041.040,00	38.031.500,00	99,97%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.115.670,00	4.115.670,00	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	1.799.000,00	1.799.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	19.200.000,00	18.322.160,00	95,43%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.283.486,00	74.215.000,00	94,80%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	89.440.000,00	88.218.767,00	98,63%
29	**Kecamatan Kabanjahe**	**900.811.334,00**	**895.959.124,00**	**99,46%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.212.860,00	50.187.860,00	99,95%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.393.334,00	8.371.800,00	99,74%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.057.140,00	7.046.100,00	99,84%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	12.000.000,00	8.560.300,00	71,34%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.530.000,00	3.530.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	775.048.000,00	775.020.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	44.570.000,00	43.243.064,00	97,02%
	Kelurahan Kampung Dalam	**541.600.000,00**	**534.137.898,00**	98,62%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	541.600.000,00	534.137.898,00	98,62%
	Kelurahan Gung Negeri	**510.000.000,00**	**507.336.000,00**	99,48%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	510.000.000,00	507.336.000,00	99,48%
	Kelurahan Padang Mas	**579.000.000,00**	**574.337.000,00**	99,19%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	579.000.000,00	574.337.000,00	99,19%
	Kelurahan Lau Cimba	**674.240.000,00**	**667.725.500,00**	99,03%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	674.240.000,00	667.725.500,00	99,03%
	Kelurahan Gung Leto	**555.000.000,00**	**549.386.258,00**	98,99%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	555.000.000,00	549.386.258,00	98,99%
30	**Kecamatan Berastagi**	**943.587.592,00**	**903.289.359,00**	**95,73%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.873.098,00	45.705.488,00	99,63%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.830.494,00	4.821.226,00	99,81%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.404.000,00	2.313.760,00	96,25%
	Pengadaan Mebel	90.000.000,00	88.068.639,00	97,85%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.000.000,00	130.547.100,00	99,65%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	55.200.000,00	22.852.396,00	41,40%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.870.000,00	6.410.000,00	81,45%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	565.740.000,00	561.945.000,00	99,33%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	37.170.000,00	37.125.750,00	99,88%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
31	**Kelurahan Tambak Lau Mulgap II**	**750.000.000,00**	**744.240.000,00**	**99,23%**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000,00	744.240.000,00	99,23%
32	**Kelurahan Tambak Lau Mulgap I**	**750.000.000,00**	**745.000.000,00**	**99,33%**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000,00	745.000.000,00	99,33%
33	**Kelurahan Gundaling II**	**750.000.000,00**	**744.682.000,00**	**99,29%**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000,00	744.682.000,00	99,29%
34	**Kelurahan Gundaling I**	**750.000.000,00**	**743.916.000,00**	**99,19%**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000,00	743.916.000,00	99,19%
35	**Kecamatan Barusjahe**	**166.989.055,00**	**166.609.650,00**	**99,77%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.552.090,00	12.511.900,00	99,68%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.642.841,00	9.635.600,00	99,92%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.774.040,00	3.615.650,00	95,80%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.114.084,00	16.095.000,00	99,88%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	14.663.500,00	14.561.500,00	99,30%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.352.500,00	75.300.000,00	99,93%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	33.470.000,00	33.470.000,00	100,00%
36	**Kecamatan Tiga Panah**	**206.896.616,00**	**198.423.200,00**	**95,90%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.338.295,00	12.129.850,00	98,31%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.006.426,00	3.992.600,00	99,65%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.445.520,00	2.437.000,00	99,65%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.467.000,00	30.300.000,00	96,29%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	11.500.000,00	8.223.150,00	71,51%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.760.000,00	2.760.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.760.000,00	25.965.000,00	87,25%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	45.804.906,00	45.803.600,00	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.814.469,00	66.812.000,00	100,00%
37	**Kecamatan Merek**	**163.746.943,00**	**146.422.574,00**	**89,42%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.240.501,00	34.204.340,00	89,45%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.042.588,00	2.988.680,00	98,23%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.051.954,00	3.051.954,00	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.641.900,00	16.622.600,00	80,53%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	7.300.000,00	7.200.000,00	98,63%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000,00	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.160.000,00	48.885.000,00	88,62%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	33.470.000,00	33.470.000,00	100,00%
38	**Kecamatan Munte**	**161.533.841,00**	**156.854.948,00**	**97,10%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.324.261,00	29.158.700,00	96,16%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	7.988.500,00	99,86%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.800.000,00	4.657.750,00	97,04%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.969.580,00	20.099.998,00	95,85%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	12.000.000,00	9.600.000,00	80,00%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.990.000,00	4.900.000,00	98,20%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.940.000,00	44.940.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	35.510.000,00	35.510.000,00	100,00%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
39	**Kecamatan Juhar**	**182.734.814,00**	**170.781.294,00**	**93,46%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.480.408,00	14.393.865,00	99,40%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.381.380,00	3.358.200,00	99,31%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.444.126,00	3.439.913,00	99,88%
	Pengadaan Mebel	23.659.900,00	22.798.220,00	96,36%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	12.000.000,00	9.011.217,00	75,09%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.879.000,00	82.890.000,00	91,21%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	33.470.000,00	33.469.879,00	100,00%
40	**Kecamatan Tiga Binanga**	**330.034.305,00**	**329.769.666,00**	**99,92%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.490.715,00	31.447.130,00	99,86%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.807.870,00	2.807.870,00	100,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.231.000,00	4.231.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	28.000.000,00	27.778.946,00	99,21%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.920.000,00	187.920.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	46.940.000,00	46.940.000,00	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.344.720,00	21.344.720,00	100,00%
	Kelurahan Tiga Binanga	**711.332.340,00**	**710.709.642,00**	99,91%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	711.332.340,00	710.709.642,00	99,91%
41	**Kecamatan Lau Baleng**	**178.055.390,00**	**176.610.982,00**	**99,19%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.804.370,00	13.733.200,00	99,48%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.359.740,00	10.330.400,00	99,72%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.859.080,00	2.853.000,00	99,79%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.517.200,00	55.567.932,00	98,32%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	12.000.000,00	11.611.450,00	96,76%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000,00	2.840.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.205.000,00	46.205.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	33.470.000,00	33.470.000,00	100,00%
42	**Kecamatan Mardinding**	**173.593.413,00**	**166.751.249,00**	**96,06%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.309.803,00	15.309.803,00	100,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.818.010,00	8.804.399,00	99,85%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	355.200,00	355.200,00	100,00%
	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	13.264.500,00	88,43%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.658.800,00	51.805.650,00	98,38%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	14.400.000,00	11.251.697,00	78,14%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.760.000,00	2.730.000,00	98,91%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.821.600,00	29.760.000,00	99,79%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	34.470.000,00	33.470.000,00	97,10%
43	**Kecamatan Payung**	**148.105.864,00**	**139.354.189,00**	**94,09%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.573.734,00	8.468.000,00	98,77%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.906.848,00	4.855.000,00	98,94%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.465.282,00	1.440.000,00	98,27%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	22.200.000,00	13.637.810,00	61,43%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,00	2.190.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.770.000,00	72.770.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	36.000.000,00	35.993.379,00	99,98%
44	**Kecamatan Simpang Empat**	**209.442.756,00**	**194.877.189,00**	**93,05%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.096.356,00	61.305.257,00	97,16%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.100.000,00	2.098.183,00	99,91%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.756.400,00	6.756.190,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	7.900.000,00	7.631.580,00	96,60%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	5.720.000,00	95,33%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.120.000,00	47.970.000,00	79,79%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	33.470.000,00	33.425.179,00	99,87%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.970.800,00	99,90%
45	**Kecamatan Kutabuluh**	**222.592.140,00**	**218.723.032,00**	**98,26%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.885.750,00	14.699.900,00	98,75%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.501.280,00	11.951.400,00	95,60%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.006.010,00	2.997.250,00	99,71%
	Pengadaan Mebel	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.011.300,00	58.219.500,00	97,01%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	16.700.000,00	15.384.081,00	92,12%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.250.000,00	9.250.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.767.800,00	29.760.000,00	99,97%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	44.570.000,00	44.560.901,00	99,98%
46	**Kecamatan Dolat Rayat**	**147.550.425,00**	**147.186.510,00**	**99,75%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.927.715,00	6.927.715,00	100,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.045.510,00	2.045.510,00	100,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.767.200,00	3.767.200,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	23.200.000,00	22.836.085,00	98,43%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000,00	2.840.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.300.000,00	75.300.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	33.470.000,00	33.470.000,00	100,00%
47	**Kecamatan Merdeka**	**136.143.725,00**	**111.815.781,00**	**82,13%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.791.357,00	6.786.264,00	77,19%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.724.232,00	8.515.500,00	97,61%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.071.690,00	3.071.430,00	99,99%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	2.184.000,00	2.184.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	15.000.000,00	7.466.362,00	49,78%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000,00	2.840.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.022.446,00	45.442.446,00	75,71%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	35.510.000,00	35.509.779,00	100,00%
48	**Kecamatan Namanteran**	**137.443.427,00**	**127.520.900,00**	**92,78%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.083.791,00	10.197.700,00	77,94%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.162.660,00	2.577.000,00	81,48%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	336.220,00	-	0,00%
	Pengadaan Mebel	12.156.856,00	9.890.000,00	81,35%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.155.800,00	8.154.000,00	99,98%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	15.450.000,00	14.545.000,00	94,14%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.530.000,00	1.647.000,00	36,36%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.068.100,00	45.060.000,00	99,98%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	35.500.000,00	35.450.200,00	99,86%
49	**Kecamatan Tiganderket**	**234.337.800,00**	**165.437.736,00**	**70,60%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.453.020,00	11.433.020,00	99,83%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.999.900,00	6.994.804,00	99,93%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.802.080,00	3.802.080,00	100,00%

No	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.174.400,00	47.614.400,00	58,66%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	16.418.400,00	13.703.308,00	83,46%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.720.000,00	5.720.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.300.000,00	44.940.000,00	59,68%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	33.470.000,00	31.230.124,00	93,31%
50	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**361.431.390,00**	**346.581.435,00**	**95,89%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.789.462,00	172.279.850,00	96,90%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.442.669,00	1.410.000,00	97,74%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.926.661,00	10.852.800,00	99,32%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	1.799.000,00	900.000,00	50,03%
	Penyediaan Jasa Komunikasi	12.000.000,00	7.466.200,00	62,22%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.200.000,00	13.400.000,00	94,37%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.753.598,00	91.080.000,00	97,15%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	49.520.000,00	49.192.585,00	99,34%
	Grand Total	**317.562.199.927,00**	**291.743.560.347,50**	**91,87%**
	TOTAL BELANJA DAERAH	**1.455.323.089.325,00**	**1.385.107.097.412,50**	
	Belanja Transfer ke Desa	**285.685.741.892,00**	**275.809.076.755,00**	
	Dasar Perhitungan	**1.169.637.347.433,00**	**1.109.298.020.657,50**	
	% Belanja Infrastruktur	**27,15%**	**26,30%**	

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Karo
TA 2025

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	786.450.044.194,00	757.546.312.806,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	432.123.490.830,00	418.608.958.421,00
	Dinas Pendidikan	432.123.490.830,00	418.608.958.421,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	318.234.682.180,00	307.367.737.527,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.945.631,00	16.828.840,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.945.631,00	16.828.840,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	316.632.103.669,00	305.796.012.977,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	316.263.943.669,00	305.436.252.977,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	368.160.000,00	359.760.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.590.000,00	133.434.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000,00	65.934.000,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	67.590.000,00	67.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.722.880,00	409.219.151,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.325.000,00	112.320.259,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	129.698.780,00	129.657.350,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.991.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.699.100,00	85.250.542,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.000.000,00	344.732.910,00
	Pengadaan Mebel	200.000.000,00	197.546.910,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	147.186.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.980.000,00	424.300.934,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.800.000,00	67.159.934,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	29.816.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.180.000,00	327.325.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.340.000,00	243.208.715,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.340.000,00	75.280.415,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.000.000,00	167.928.300,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	113.598.196.656,00	110.954.411.939,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	64.777.512.346,00	63.840.092.075,00
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	963.478.366,00	962.791.355,00
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3.132.515.088,00	3.126.956.205,00
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	707.700.000,00	706.875.555,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.365.346.000,00	4.359.685.835,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	874.281.536,00	873.247.305,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3.180.000,00	3.180.000,00
	Pengadaan Mebel Sekolah	939.800.000,00	938.013.805,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	262.125.405,00	246.725.185,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.569.057.086,00	323.415.989,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	141.030.715,00	139.630.685,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	37.890.604.090,00	38.502.459.122,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	211.015.715,00	182.163.930,00
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	6.326.446.678,00	6.291.714.425,00
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	98.597.463,00	92.370.865,00
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	138.835.007,00	106.512.590,00
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	116.658.382,00	101.669.065,00
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	418.013.495,00	317.640.500,00
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	84.897.252,00	78.297.105,00
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	118.385.207,00	118.109.305,00
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.922.058.698,00	1.919.944.360,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	895.147.500,00	893.226.435,00
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	154.534.382,00	134.709.465,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	36.008.015,00	36.007.875,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.612.017.970,00	2.608.675.320,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	375.890.444,00	375.890.435,00
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	419.887.852,00	400.179.359,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	42.804.526.800,00	41.275.168.553,00
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	678.914.270,00	677.375.346,00
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.109.698.553,00	2.081.487.860,00
	Pembangunan Laboratorium	1.619.076.146,00	1.536.882.428,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	807.405.000,00	806.143.200,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.350.970.358,00	7.327.411.799,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	532.464.630,00	530.526.550,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	751.998.009,00	738.515.308,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	611.618.530,00	610.832.450,00
	Pengadaan Mebel Sekolah	800.000.000,00	799.977.602,00
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	500.000.000,00	498.945.000,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	761.350.000,00	761.349.850,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	361.680.000,00	314.937.634,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	64.040.156,00	45.554.865,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	439.783.095,00	429.005.385,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	107.832.007,00	105.537.374,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	23.032.734.974,00	21.901.825.538,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	210.000.000,00	200.049.915,00
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83.366.863,00	67.146.535,00
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	76.185.193,00	62.377.090,00
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	90.553.956,00	73.951.505,00
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	726.052.274,00	643.630.480,00
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	106.308.830,00	99.762.685,00
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	90.115.000,00	78.480.510,00
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	518.680.000,00	509.853.334,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	373.698.956,00	373.608.310,00
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.125.384.352,00	5.141.615.315,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	534.341.073,00	532.016.555,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	152.873.215,00	152.852.195,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	75.455.963,00	75.305.765,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	80.221.763,00	80.221.665,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	492.070.332,00	469.423.705,00
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.980.560.000,00	3.092.787.380,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	99.709.208,00	92.671.120,00
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	44.848.612,00	44.698.455,00
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.882.456,00	43.881.995,00
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	133.208.267,00	99.386.155,00
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	59.022.400,00	47.748.040,00
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	65.111.312,00	65.111.100,00
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	9.909.635,00	7.936.500,00
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	326.502.153,00	317.931.750,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	26.667.963,00	19.642.935,00
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	890.773.158,00	697.535.996,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	32.835.000,00	16.638.600,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.921.926,00	3.774.910,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29.042.963,00	21.939.580,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	130.088.499,00	128.637.826,00
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	248.710.000,00	111.692.000,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20.000.000,00	13.219.095,00
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	7.175.481,00	6.523.805,00
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	16.356.015,00	12.565.755,00
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6.700.841,00	4.471.050,00
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.243.481,00	0,00
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.176.400,00	6.726.290,00
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	35.941.333,00	31.746.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	173.691.454,00	171.495.000,00
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.135.426,00	6.911.155,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	162.754.339,00	161.194.930,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	167.681.201,00	166.128.800,00
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	167.681.201,00	166.128.800,00
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98.315.334,00	98.313.365,00
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	69.365.867,00	67.815.435,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	122.930.793,00	120.680.155,00
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	122.930.793,00	120.680.155,00
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	73.533.333,00	73.533.045,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	49.397.460,00	47.147.110,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	232.830.247.263,00	224.614.284.181,00
	Dinas Kesehatan	177.718.377.301,00	171.611.787.126,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.023.415.328,00	91.625.821.261,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.546.200,00	60.272.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.546.200,00	60.272.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.792.808.566,00	90.416.564.636,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92.514.438.566,00	90.154.454.636,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	278.370.000,00	262.110.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.906.062,00	210.566.796,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.848.362,00	32.626.896,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.602.400,00	45.141.500,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.000.000,00	25.999.800,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.870.000,00	7.812.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.585.300,00	98.986.600,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	892.150.000,00	880.564.945,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.450.000,00	56.984.945,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	833.700.000,00	823.580.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.004.500,00	57.852.884,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.004.500,00	42.852.884,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	82.049.437.493,00	79.184.111.486,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.363.127.001,00	21.584.802.304,00
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	11.598.917.740,00	11.376.550.753,00
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.209.600,00	1.209.600,00
	Pengembangan Puskesmas	1.308.800.000,00	1.086.019.660,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.605.728.000,00	2.586.981.967,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	664.400.000,00	661.171.003,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	200.000.000,00	199.520.000,00
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	140.031.000,00	114.842.000,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.720.932.661,00	5.435.728.111,00
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	123.108.000,00	122.779.210,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.541.151.892,00	57.456.093.502,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	257.978.000,00	232.045.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.400.000,00	5.400.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	289.783.000,00	261.475.500,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.020.454.000,00	5.400.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	575.100.000,00	5.400.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.400.000,00	5.400.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	159.800.000,00	27.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.400.000,00	5.400.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.400.000,00	5.400.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	225.400.000,00	5.400.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.273.220.400,00	1.273.220.400,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.700.000,00	2.700.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.536.088.000,00	36.240.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200.350.000,00	14.850.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.336.210.000,00	1.111.309.985,00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	238.838.000,00	224.949.600,00
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	711.147.000,00	133.830.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	81.800.000,00	0,00
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.520.236.058,00	1.586.933.442,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41.293.493.371,00	50.988.347.075,00
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	4.500.000,00	4.500.000,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.792.454.063,00	1.520.892.500,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	135.008.600,00	133.965.680,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	135.008.600,00	133.965.680,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.150.000,00	9.250.000,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	10.150.000,00	9.250.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	883.316.480,00	613.704.680,00
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	218.352.480,00	80.123.190,00
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	218.352.480,00	80.123.190,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.964.000,00	533.581.490,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.964.000,00	533.581.490,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	196.448.000,00	80.899.699,00
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	56.870.000,00	6.880.800,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	56.870.000,00	6.880.800,00
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	19.320.000,00	4.451.700,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	19.320.000,00	4.451.700,00
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	120.258.000,00	69.567.199,00
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	120.258.000,00	69.567.199,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	565.760.000,00	107.250.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.700.000,00	2.700.000,00
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.700.000,00	2.700.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	563.060.000,00	104.550.000,00
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	563.060.000,00	104.550.000,00
	Rumah Sakit Umum Daerah	55.111.869.962,00	53.002.497.055,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.833.880.929,00	51.787.224.891,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.847.178.998,00	21.111.202.195,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.691.418.998,00	20.957.920.582,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155.760.000,00	153.281.613,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.750.000,00	200.732.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	204.750.000,00	200.732.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.240.858.592,00	3.120.498.561,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	428.400.000,00	412.805.256,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.812.458.592,00	2.707.693.305,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.666.141,00	80.812.366,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.666.141,00	80.812.366,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	27.456.427.198,00	27.273.979.769,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	27.456.427.198,00	27.273.979.769,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.277.989.033,00	1.215.272.164,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	845.895.968,00	805.586.500,00
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	845.895.968,00	805.586.500,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	432.093.065,00	409.685.664,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	432.093.065,00	409.685.664,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	69.703.299.138,00	67.323.710.997,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	69.703.299.138,00	67.323.710.997,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.763.718.424,00	9.127.870.189,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.721.221.918,00	6.433.196.663,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.491.788.668,00	6.218.206.663,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	229.433.250,00	214.990.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.480.000,00	54.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.480.000,00	54.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	891.690.286,00	836.414.424,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.919.550,00	22.017.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	387.412.387,00	371.084.300,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.773.349,00	73.860.200,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.656.000,00	28.877.400,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364.929.000,00	340.575.024,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	28.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	28.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.034.782.720,00	960.119.880,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.500.000,00	49.306.600,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.050.000,00	51.650.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	917.232.720,00	859.163.280,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.025.543.500,00	816.139.222,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.870.000,00	64.545.947,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	955.673.500,00	751.593.275,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.377.698.811,00	6.235.563.323,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.377.698.811,00	6.235.563.323,00
	Pembangunan Bendung Irigasi	1.300.000.000,00	1.260.613.849,00
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.388.499.962,00	2.358.254.024,00
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.689.198.849,00	2.616.695.450,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	992.601.998,00	891.435.498,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	992.601.998,00	891.435.498,00
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	200.000.000,00	199.200.000,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000,00	199.633.500,00
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	592.601.998,00	492.601.998,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.569.978.189,00	4.434.088.950,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.569.978.189,00	4.434.088.950,00
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	4.409.323.000,00	4.392.516.000,00
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	60.655.189,00	41.572.950,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	12.530.241.956,00	12.245.344.338,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.530.241.956,00	12.245.344.338,00
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	4.192.528.729,00	4.178.103.293,00
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	399.100.000,00	398.603.102,00
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.004.919.553,00	5.985.051.153,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	50.000.000,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.633.693.674,00	1.633.586.790,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.911.000.000,00	1.888.580.259,00
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.911.000.000,00	1.888.580.259,00
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.518.121,00
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.811.000.000,00	1.789.062.138,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.452.146.008,00	2.826.967.706,00
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.452.146.008,00	2.826.967.706,00
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3.452.146.008,00	2.826.967.706,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	29.780.254.217,00	29.378.917.089,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	29.780.254.217,00	29.378.917.089,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000,00	0,00
	Pembangunan Jalan	15.827.082.224,00	15.708.454.176,00
	Rekonstruksi Jalan	3.133.632.462,00	3.103.247.653,00
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	199.981.200,00
	Pembangunan Jembatan	3.859.850.738,00	3.729.383.919,00
	Rehabilitasi Jalan	2.617.710.167,00	2.596.848.156,00
	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.041.978.626,00	4.041.001.985,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	325.659.535,00	294.943.645,00
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	73.509.000,00	71.505.150,00
	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	73.509.000,00	71.505.150,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	252.150.535,00	223.438.495,00
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	252.150.535,00	223.438.495,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.512.752.194,00	15.980.150.738,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	16.512.752.194,00	15.980.150.738,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.103.398.513,00	3.948.149.219,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.667.413.948,00	3.532.809.595,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.306.606.748,00	3.190.983.395,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360.807.200,00	341.826.200,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.750.000,00	24.750.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.750.000,00	24.750.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.647.359,00	271.360.974,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.987.600,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.533.809,00	143.689.300,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.659.550,00	12.393.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.200.000,00	4.803.100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000,00	4.200.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.054.000,00	103.287.974,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.930.000,00	36.327.400,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	21.397.400,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.930.000,00	14.930.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.657.206,00	82.901.250,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.657.206,00	82.901.250,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	10.000.000,00	5.800.000,00
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10.000.000,00	5.800.000,00
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000,00	5.800.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	12.399.353.681,00	12.026.201.519,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	12.399.353.681,00	12.026.201.519,00
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	35.269.591,00	0,00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	12.289.532.100,00	11.990.411.119,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	74.551.990,00	35.790.400,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	30.157.786.038,00	26.229.714.946,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	17.883.102.566,00	16.961.762.037,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.812.748.920,00	12.001.858.938,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.929.188.984,00	5.135.463.355,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.807.028.984,00	5.013.303.355,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.160.000,00	122.160.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.203.436,00	288.845.803,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.684.700,00	34.684.700,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.427.971,00	107.104.481,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.910.374,00	44.496.744,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.370.391,00	55.351.900,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.810.000,00	47.207.978,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.078.500,00	12.078.500,00
	Pengadaan Mebel	12.078.500,00	12.078.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.581.278.000,00	6.565.471.280,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.220.000,00	49.093.280,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.980.000,00	9.980.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.520.078.000,00	6.506.398.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.812.395.896,00	1.800.216.186,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.779.292.080,00	1.768.137.370,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4.330.370,00	4.180.370,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	108.024.000,00	100.240.000,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	16.130.000,00	15.730.000,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	748.740.910,00	746.534.300,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	902.066.800,00	901.452.700,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30.735.816,00	29.710.816,00
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.415.816,00	8.390.816,00
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	5.345.000,00	5.345.000,00
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.975.000,00	15.975.000,00
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	2.368.000,00	2.368.000,00
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2.368.000,00	2.368.000,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.257.957.750,00	3.159.686.913,00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.257.957.750,00	3.159.686.913,00
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.170.995.000,00	1.133.442.000,00
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	50.100.000,00	50.100.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.036.862.750,00	1.976.144.913,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.274.683.472,00	9.267.952.909,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.276.736.976,00	5.011.869.110,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.970.654.163,00	3.768.892.716,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.888.214.163,00	3.688.662.716,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.440.000,00	80.230.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.760.000,00	45.445.598,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53.760.000,00	45.445.598,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.719.386,00	186.418.469,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.990.808,00	3.904.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.436.190,00	37.604.600,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.099.888,00	7.677.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.633.500,00	30.638.400,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.056.000,00	30.777.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.503.000,00	75.817.469,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	288.165.427,00	279.460.610,00
	Pengadaan Mebel	134.819.027,00	131.808.060,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.346.400,00	147.652.550,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.944.000,00	467.427.743,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	16.978.452,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.944.000,00	450.449.291,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.494.000,00	264.223.974,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.150.000,00	174.123.975,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.100.000,00	10.100.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.244.000,00	79.999.999,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.997.946.496,00	4.256.083.799,00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	33.638.200,00	30.267.000,00
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	33.638.200,00	30.267.000,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	498.343.449,00	442.711.494,00
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	28.000.000,00	27.972.000,00
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	70.338.462,00	66.221.600,00
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	34.957.057,00	28.394.734,00
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	43.487.770,00	39.129.110,00
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	321.560.160,00	280.994.050,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.176.127.302,00	3.126.011.850,00
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.126.077.938,00	3.077.638.450,00
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.049.364,00	48.373.400,00
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	3.289.837.545,00	657.093.455,00
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	31.556.965,00	21.444.820,00
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	65.261.100,00	50.961.940,00
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	3.082.385.100,00	497.931.000,00
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	40.996.380,00	32.384.775,00
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	69.638.000,00	54.370.920,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.122.468.731,00	4.789.493.523,00
	Dinas Sosial	5.122.468.731,00	4.789.493.523,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.973.722.539,00	3.771.764.249,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.062.848.527,00	2.935.967.679,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.978.888.527,00	2.852.687.679,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.960.000,00	83.280.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000,00	44.250.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000,00	44.250.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.325.312,00	253.917.793,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.489.163,00	4.488.610,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.181.359,00	30.165.895,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.880.000,00	14.880.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.135.790,00	14.133.520,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	23.680.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.939.000,00	166.569.768,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.108.700,00	117.265.950,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.108.700,00	117.265.950,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.870.000,00	183.444.592,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.760.000,00	16.389.592,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.550.000,00	7.100.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.560.000,00	159.955.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.570.000,00	236.918.235,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.700.000,00	170.818.200,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.870.000,00	66.100.035,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	170.837.601,00	155.016.085,00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	170.837.601,00	155.016.085,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	27.467.200,00	26.603.170,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	143.370.401,00	128.412.915,00
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	50,00	0,00
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	50,00	0,00
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	50,00	0,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	365.913.565,00	308.298.585,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	365.913.565,00	308.298.585,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	275.024.380,00	229.111.380,00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	34.939.185,00	32.177.205,00
	Pemberian Layanan Rujukan	55.950.000,00	47.010.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	117.500.473,00	104.770.140,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	117.500.473,00	104.770.140,00
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	87.662.353,00	78.265.625,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	29.838.120,00	26.504.515,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	179.494.503,00	168.198.144,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	159.523.120,00	152.134.134,00
	Penyediaan Makanan	39.737.587,00	38.789.440,00
	Penyediaan Sandang	119.785.533,00	113.344.694,00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	19.971.383,00	16.064.010,00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	19.971.383,00	16.064.010,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	315.000.000,00	281.446.320,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	315.000.000,00	281.446.320,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	300.000.000,00	281.446.320,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	121.658.122.694,00	111.211.539.070,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.885.462.101,00	4.216.548.180,00
	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4.885.462.101,00	4.216.548.180,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.026.185.763,00	3.423.458.840,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.167.475.362,00	2.950.216.652,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.047.355.362,00	2.830.742.652,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.120.000,00	119.474.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.000.000,00	21.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.509.144,00	185.900.443,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.995.440,00	6.995.044,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.090.731,00	37.926.835,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.699,00	9.993.420,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.910.944,00	15.809.563,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.513.330,00	115.175.581,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.121.000,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.121.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.800.000,00	118.831.424,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.820.000,00	13.171.424,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.980.000,00	105.660.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.280.257,00	147.510.321,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	35.938.172,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.271.000,00	52.413.549,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.832.000,00	9.780.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.757.257,00	49.378.600,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	777.000.000,00	736.519.325,00
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	777.000.000,00	736.519.325,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	777.000.000,00	736.519.325,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	19.058.081,00	18.479.875,00
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	19.058.081,00	18.479.875,00
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	19.058.081,00	18.479.875,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	63.218.257,00	38.090.140,00
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.456.381,00	7.440.610,00
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	7.456.381,00	7.440.610,00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	55.761.876,00	30.649.530,00
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.771.876,00	30.649.530,00
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	13.990.000,00	0,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.685.863.537,00	5.210.126.372,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	5.685.863.537,00	5.210.126.372,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.118.151.130,00	4.708.573.852,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.444.240.985,00	4.178.098.926,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.272.501.486,00	4.019.379.676,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	171.739.499,00	158.719.250,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.760.000,00	29.250.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.760.000,00	29.250.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.893.501,00	141.358.074,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.534.500,00	1.520.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.737.001,00	55.977.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.000.000,00	10.332.850,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.862.000,00	1.260.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.760.000,00	72.268.224,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.908.100,00	63.203.400,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.908.100,00	63.203.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.000.000,00	218.199.113,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.300.000,00	18.195.113,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.700.000,00	200.004.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.348.544,00	78.464.339,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.479.504,00	73.419.339,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.869.040,00	5.045.000,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	86.027.457,00	70.816.080,00
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	27.300.500,00	23.854.000,00
	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	27.300.500,00	23.854.000,00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.523.200,00	24.454.000,00
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	26.523.200,00	24.454.000,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.203.757,00	22.508.080,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.203.757,00	22.508.080,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	56.287.225,00	46.304.500,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.287.225,00	46.304.500,00
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	56.287.225,00	46.304.500,00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	58.903.620,00	52.784.540,00
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.903.620,00	52.784.540,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	31.233.940,00	27.036.540,00
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	27.669.680,00	25.748.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	335.894.603,00	309.214.400,00
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	274.595.752,00	255.501.900,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	250.056.932,00	236.087.900,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24.538.820,00	19.414.000,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	61.298.851,00	53.712.500,00
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.553.455,00	38.108.500,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.745.396,00	15.604.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	30.599.502,00	22.433.000,00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	22.768.712,00	16.072.000,00
	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	22.768.712,00	16.072.000,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.830.790,00	6.361.000,00
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	7.830.790,00	6.361.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.970.758.522,00	6.503.424.780,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.970.758.522,00	6.503.424.780,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.252.932.744,00	5.980.647.947,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.580.009.665,00	5.401.997.327,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.441.030.849,00	5.273.399.449,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	138.978.816,00	128.597.878,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.250.000,00	40.500.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47.250.000,00	40.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.160.057,00	236.529.299,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	1.987.200,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.833.895,00	106.979.739,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.323.212,00	17.239.680,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.178.110,00	18.186.450,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.824.840,00	92.136.230,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.701.322,00	34.331.980,00
	Pengadaan Mebel	29.948.762,00	27.386.750,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.752.560,00	6.945.230,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.956.660,00	182.995.503,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.500.000,00	29.945.083,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.650.000,00	16.480.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.806.660,00	136.570.420,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.855.040,00	84.293.838,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	38.417.026,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.435.040,00	45.876.812,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	140.099.052,00	0,00
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	140.099.052,00	0,00
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	140.099.052,00	0,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	441.325.071,00	402.545.462,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	107.855.102,00	98.197.330,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	43.260.000,00	43.245.000,00
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	27.839.061,00	23.975.446,00
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	36.756.041,00	30.976.884,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	243.148.055,00	221.193.839,00
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	39.398.055,00	34.009.370,00
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	194.500.000,00	187.184.469,00
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	9.250.000,00	0,00
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	90.321.914,00	83.154.293,00
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	35.929.247,00	32.342.286,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	54.392.667,00	50.812.007,00
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	38.846.600,00	31.289.442,00
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	38.846.600,00	31.289.442,00
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	38.846.600,00	31.289.442,00
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	97.555.055,00	88.941.929,00
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	97.555.055,00	88.941.929,00
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	97.555.055,00	88.941.929,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	503.550.015,00	353.542.100,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	503.550.015,00	353.542.100,00
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	134.080.015,00	100.145.000,00
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	134.080.015,00	100.145.000,00
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.558.535,00	43.578.000,00
	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.521.480,00	56.567.000,00
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	369.470.000,00	253.397.100,00
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	369.470.000,00	253.397.100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	369.470.000,00	253.397.100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	27.005.633.382,00	24.157.706.244,00
	Dinas Lingkungan Hidup	27.005.633.382,00	24.157.706.244,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.710.832.587,00	9.565.195.136,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.624.168.401,00	3.370.511.217,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.465.259.414,00	3.221.299.717,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.908.987,00	149.211.500,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.253.098,00	49.390.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55.253.098,00	49.390.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.706.206,00	203.034.950,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.943.985,00	29.907.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	5.984.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.000.000,00	65.553.400,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.762.221,00	101.590.550,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	440.988.190,00	433.367.500,00
	Pengadaan Mebel	55.228.590,00	53.058.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.759.600,00	190.309.500,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.556.400,00	380.339.362,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00	48.229.362,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.010.000,00	12.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.546.400,00	320.110.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.985.160.292,00	5.128.552.107,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.865.831.292,00	5.022.368.443,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.329.000,00	106.183.664,00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	7.660.000,00	7.050.000,00
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	7.660.000,00	7.050.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	7.660.000,00	7.050.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	671.621.200,00	578.689.300,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	551.621.200,00	492.109.300,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	117.579.200,00	116.730.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	434.042.000,00	375.379.300,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	120.000.000,00	86.580.000,00
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	120.000.000,00	86.580.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	18.998.077,00	18.986.600,00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	18.998.077,00	18.986.600,00
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	18.998.077,00	18.986.600,00
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	7.500.000,00	6.750.000,00
	Penyimpanan sementara Limbah B3	7.500.000,00	6.750.000,00
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	7.500.000,00	6.750.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	21.192.800,00	19.620.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.192.800,00	19.620.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	13.690.400,00	13.250.000,00
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	7.502.400,00	6.370.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	40.000.000,00	39.767.440,00
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.767.440,00
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	40.000.000,00	39.767.440,00
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	71.008.340,00	64.590.200,00
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.008.340,00	64.590.200,00
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	71.008.340,00	64.590.200,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	42.434.800,00	41.364.600,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	42.434.800,00	41.364.600,00
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	42.434.800,00	41.364.600,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.414.385.578,00	13.815.692.968,00
	Pengelolaan Sampah	14.414.385.578,00	13.815.692.968,00
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	154.667.884,00	154.097.920,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.843.858.456,00	1.795.223.299,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	150.000.000,00	149.184.000,00
	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	249.954.280,00	42.959.500,00
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	12.015.904.958,00	11.674.228.249,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.203.179.675,00	4.583.876.495,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.203.179.675,00	4.583.876.495,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.361.262.056,00	3.818.982.470,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.139.293.577,00	2.824.528.415,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.060.813.577,00	2.746.048.415,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.480.000,00	78.480.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000,00	60.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.149.617,00	117.085.800,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.147.300,00	3.135.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.900.080,00	41.188.800,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.294.362,00	7.375.500,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.163.875,00	21.769.500,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00	1.200.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.484.000,00	42.417.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	360.928.862,00	168.124.000,00
	Pengadaan Mebel	63.210.734,00	49.640.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	267.718.128,00	118.484.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.860.000,00	492.156.044,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.220.000,00	13.336.044,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.780.000,00	21.820.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	463.860.000,00	457.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.030.000,00	157.088.211,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.030.000,00	82.888.212,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	74.199.999,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	681.550.919,00	624.085.100,00
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	681.550.919,00	624.085.100,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	590.639.890,00	539.398.100,00
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90.911.029,00	84.687.000,00
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	64.047.280,00	62.407.000,00
	Pelayanan Pencatatan Sipil	64.047.280,00	62.407.000,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	34.703.180,00	33.082.000,00
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	29.344.100,00	29.325.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	49.279.140,00	43.724.525,00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	19.211.700,00	18.804.200,00
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	19.211.700,00	18.804.200,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.067.440,00	24.920.325,00
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	14.835.440,00	12.820.325,00
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.232.000,00	12.100.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	47.040.280,00	34.677.400,00
	Penyusunan Profil Kependudukan	47.040.280,00	34.677.400,00
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	47.040.280,00	34.677.400,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.952.350.719,00	8.210.420.667,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.952.350.719,00	8.210.420.667,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.876.844.759,00	4.681.023.229,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.131.414.035,00	4.007.454.664,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.985.374.035,00	3.866.494.664,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	146.040.000,00	140.960.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.750.000,00	27.750.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.750.000,00	27.750.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.610.037,00	359.778.388,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.250.000,00	2.211.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	297.905.375,00	265.504.900,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.500.000,00	11.710.300,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.986.662,00	20.584.860,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.900.000,00	3.600.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.068.000,00	56.166.828,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.148.719,00	229.222.500,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	17.811.500,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.290.000,00	25.760.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.658.719,00	185.651.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.921.968,00	56.817.677,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.921.968,00	56.817.677,00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.140.087.273,00	2.776.970.485,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.140.087.273,00	2.776.970.485,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.469.481.736,00	2.369.746.612,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	49.066.500,00	25.648.120,00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	71.998.144,00	37.503.100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	136.732.455,00	129.703.783,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	133.889.955,00	94.864.560,00
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	90.974.385,00	59.335.430,00
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	42.697.600,00	0,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	115.848.498,00	58.199.880,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	29.398.000,00	1.969.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	935.418.687,00	752.426.953,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	935.418.687,00	752.426.953,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	510.000.000,00	361.129.770,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	31.881.240,00	31.555.400,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.410.000,00	0,00
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	29.094.020,00	28.089.000,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	362.033.427,00	331.652.783,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.663.885.999,00	2.344.992.802,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	3.663.885.999,00	2.344.992.802,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	286.254.999,00	95.820.000,00
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	18.504.999,00	11.970.000,00
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	18.504.999,00	11.970.000,00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	267.750.000,00	83.850.000,00
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	161.400.000,00	55.500.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	78.000.000,00	0,00
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	28.350.000,00	28.350.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.251.671.000,00	1.576.182.802,00
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	742.220.000,00	567.564.952,00
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	517.400.000,00	379.138.600,00
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	99.820.000,00	79.339.000,00
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	25.000.000,00	21.251.352,00
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100.000.000,00	87.836.000,00
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	449.211.000,00	294.201.850,00
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	218.011.000,00	180.097.000,00
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	231.200.000,00	114.104.850,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	746.640.000,00	532.080.000,00
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.200.000,00	10.600.000,00
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	713.200.000,00	510.780.000,00
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.240.000,00	10.700.000,00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	313.600.000,00	182.336.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	313.600.000,00	182.336.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.125.960.000,00	672.990.000,00
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.125.960.000,00	672.990.000,00
	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	26.600.000,00	26.600.000,00
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	576.360.000,00	420.090.000,00
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	523.000.000,00	226.300.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	22.964.948.517,00	22.378.024.879,00
	Dinas Perhubungan	22.964.948.517,00	22.378.024.879,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.552.268.576,00	7.263.050.620,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.491.815,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.491.815,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.547.049.236,00	5.361.923.869,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.384.850.531,00	5.199.725.164,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	162.198.705,00	162.198.705,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	312.000,00	0,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	312.000,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.650.000,00	69.879.215,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70.000.000,00	69.879.215,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.650.000,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.218.641,00	254.338.362,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.458.282,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.047.185,00	92.466.585,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.938.892,00	29.938.892,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.705.600,00	50.697.300,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.556.000,00	2.640.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.470.964,00	76.137.303,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.479.400,00	28.810.500,00
	Pengadaan Mebel	19.850.000,00	19.314.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.629.400,00	9.496.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.487.335,00	729.725.420,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.344.705,00	30.109.660,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.528.000,00	12.155.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	722.614.630,00	687.460.760,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	843.580.149,00	818.373.254,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.448.112,00	39.358.850,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.602.630,00	149.037.880,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	654.529.407,00	629.976.524,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15.400.123.205,00	15.102.437.354,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.627.533.430,00	13.385.926.863,00
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	123.752.558,00	115.821.425,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.939.130.572,00	12.716.555.138,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	564.650.300,00	553.550.300,00
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	335.731.994,00	325.674.925,00
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	223.635.521,00	221.423.850,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	112.096.473,00	104.251.075,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.228.822,00	12.482.536,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	10.038.072,00	9.887.896,00
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.190.750,00	2.594.640,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.256.907.603,00	1.236.873.184,00
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	688.521.940,00	682.186.508,00
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	17.235.462,00	10.687.374,00
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	551.150.201,00	543.999.302,00
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	24.540.438,00	24.540.196,00
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	24.540.438,00	24.540.196,00
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	28.063.810,00	24.198.255,00
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	8.204.352,00	6.000.000,00
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	7.646.390,00	6.290.120,00
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12.213.068,00	11.908.135,00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.575.720,00	45.292.266,00
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	49.575.720,00	45.292.266,00
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.541.388,00	47.449.129,00
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.541.388,00	47.449.129,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	12.556.736,00	12.536.905,00
	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	12.556.736,00	12.536.905,00
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12.556.736,00	12.536.905,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.238.749.673,00	8.135.432.865,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.238.749.673,00	8.135.432.865,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.313.483.200,00	5.258.656.065,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.971.279.600,00	2.928.857.054,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.856.283.970,00	2.813.861.454,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.995.630,00	114.995.600,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.960.000,00	51.600.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.960.000,00	51.600.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.864.135,00	322.331.042,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.193.135,00	48.139.649,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.270.000,00	47.270.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.560.000,00	7.560.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.458.000,00	12.450.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.383.000,00	206.911.393,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.891.789.465,00	1.880.303.220,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.572.000.000,00	1.571.989.120,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.140.000,00	7.050.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.649.465,00	301.264.100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.590.000,00	75.564.749,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.590.000,00	75.564.749,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.113.328.918,00	1.107.610.985,00
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.113.328.918,00	1.107.610.985,00
	Relasi Media	530.369.906,00	527.386.000,00
	Pelayanan Informasi Publik	305.864.400,00	303.582.285,00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.500.000,00	12.406.000,00
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	201.728.052,00	201.418.200,00
	Penyusunan Konten	51.642.560,00	51.594.500,00
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	11.224.000,00	11.224.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.811.937.555,00	1.769.165.815,00
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.811.937.555,00	1.769.165.815,00
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	199.355.645,00	195.243.446,00
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	728.723.754,00	695.118.623,00
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	84.597.712,00	84.597.600,00
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	490.000.000,00	487.843.661,00
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	309.260.444,00	306.362.485,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.832.891.870,00	829.887.557,00
	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.832.891.870,00	829.887.557,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	4.389.605,00	0,00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.389.605,00	0,00
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	4.389.605,00	0,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.360.979.359,00	706.454.707,00
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.360.979.359,00	706.454.707,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.360.979.359,00	706.454.707,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	287.353.501,00	0,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	287.353.501,00	0,00
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	287.353.501,00	0,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	80.496.545,00	38.658.315,00
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	80.496.545,00	38.658.315,00
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	19.195.110,00	18.243.055,00
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	21.415.275,00	20.415.260,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	39.886.160,00	0,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	99.672.860,00	84.774.535,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	99.672.860,00	84.774.535,00
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	99.672.860,00	84.774.535,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.117.978.250,00	4.876.173.354,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.117.978.250,00	4.876.173.354,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.285.415.925,00	4.100.943.704,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.169.113.089,00	3.013.928.162,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.075.993.089,00	2.939.528.162,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.120.000,00	74.400.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.062.400,00	30.840.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.062.400,00	30.840.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.835.255,00	310.831.762,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.165.635,00	3.164.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.988.047,00	49.669.362,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.845.788,00	20.814.246,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.796.785,00	37.275.639,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.039.000,00	199.908.515,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	271.815.181,00	269.752.200,00
	Pengadaan Mebel	13.200.000,00	12.987.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.615.181,00	256.765.200,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.170.000,00	437.171.580,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.160.000,00	29.056.580,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.810.000,00	14.800.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	409.200.000,00	393.315.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.420.000,00	38.420.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.420.000,00	38.420.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	122.934.000,00	118.356.400,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	122.934.000,00	118.356.400,00
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	122.934.000,00	118.356.400,00
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	219.840.000,00	188.551.200,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	219.840.000,00	188.551.200,00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	169.716.000,00	152.391.776,00
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	50.124.000,00	36.159.424,00
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	217.269.000,00	211.664.600,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	217.269.000,00	211.664.600,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	8.749.000,00	3.144.600,00
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	114.000.000,00	114.000.000,00
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	32.012.000,00	32.012.000,00
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	62.508.000,00	62.508.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	152.519.325,00	144.619.900,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	152.519.325,00	144.619.900,00
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	19.081.000,00	17.050.000,00
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	77.053.100,00	74.399.000,00
	Pengawasan Penanaman Modal	56.385.225,00	53.170.900,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	120.000.000,00	112.037.550,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	112.037.550,00
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	120.000.000,00	112.037.550,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.936.763.001,00	2.397.025.318,00
	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	2.936.763.001,00	2.397.025.318,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.750.000,00	45.750.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.750.000,00	45.750.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.750.000,00	45.750.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	515.550.190,00	265.675.500,00
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	515.550.190,00	265.675.500,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	122.100.000,00	5.250.000,00
	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	329.743.340,00	226.650.200,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	63.706.850,00	33.775.300,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.005.233.652,00	1.726.067.477,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	249.665.932,00
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	250.000.000,00	249.665.932,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	688.477.329,00	623.129.380,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	688.477.329,00	623.129.380,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.006.731.330,00	799.014.165,00
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	398.395.185,00	392.314.265,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	608.336.145,00	406.699.900,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	60.024.993,00	54.258.000,00
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	60.024.993,00	54.258.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	370.229.159,00	359.532.341,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	370.229.159,00	359.532.341,00
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	32.509.000,00	32.059.000,00
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	69.538.341,00	68.438.341,00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	268.181.818,00	259.035.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	378.077.598,00	373.630.040,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	378.077.598,00	373.630.040,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	378.077.598,00	373.630.040,00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	378.077.598,00	373.630.040,00
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	180.056.340,00	178.807.900,00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	198.021.258,00	194.822.140,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	56.552.000,00	54.443.900,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	56.552.000,00	54.443.900,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	56.552.000,00	54.443.900,00
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.552.000,00	54.443.900,00
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	56.552.000,00	54.443.900,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.892.003.212,00	1.434.182.891,00
	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	1.892.003.212,00	1.434.182.891,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	815.730.673,00	605.230.126,00
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	815.730.673,00	605.230.126,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	815.730.673,00	605.230.126,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	629.977.194,00	406.820.540,00
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	629.977.194,00	406.820.540,00
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	629.977.194,00	406.820.540,00
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	446.295.345,00	422.132.225,00
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	143.031.000,00	129.112.940,00
	Penetapan Cagar Budaya	143.031.000,00	129.112.940,00
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	303.264.345,00	293.019.285,00
	Pelindungan Cagar Budaya	303.264.345,00	293.019.285,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	15.263.075.358,00	15.049.007.071,00
	Dinas Perpustakaan dan Arsip	15.263.075.358,00	15.049.007.071,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.579.100.498,00	4.428.071.662,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.010.887.121,00	3.878.966.081,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.907.187.121,00	3.798.846.081,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.700.000,00	80.120.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.681.263,00	111.936.854,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	909.000,00	909.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.347.683,00	52.295.540,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.924.350,00	6.650.600,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.966.000,00	3.956.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.534.230,00	48.125.714,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.731.075,00	298.427.542,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.900.000,00	40.237.542,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.551.075,00	14.500.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.280.000,00	243.690.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.801.039,00	138.741.185,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.801.039,00	138.741.185,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.683.974.860,00	10.620.935.409,00
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	426.074.130,00	425.720.300,00
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.320.000,00	55.164.705,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	174.849.130,00	174.682.930,00
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.005.000,00	35.987.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	159.900.000,00	159.885.665,00
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.257.900.730,00	10.195.215.109,00
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.241.730.730,00	10.179.537.109,00
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	16.170.000,00	15.678.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	106.399.265,00	103.093.555,00
	Dinas Perpustakaan dan Arsip	106.399.265,00	103.093.555,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	106.399.265,00	103.093.555,00
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	40.565.765,00	40.376.945,00
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	23.316.220,00	23.127.400,00
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	17.249.545,00	17.249.545,00
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	65.833.500,00	62.716.610,00
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	47.857.730,00	47.057.610,00
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	17.975.770,00	15.659.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	61.244.820.000,00	56.358.031.607,50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.876.535.490,00	1.543.900.133,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.876.535.490,00	1.543.900.133,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	597.390.000,00	406.168.584,00
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	47.390.000,00	43.606.750,00
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	47.390.000,00	43.606.750,00
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000,00	362.561.834,00
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	550.000.000,00	362.561.834,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.134.586.939,00	1.007.173.198,00
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	626.409.946,00	560.276.585,00
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	474.322.284,00	421.177.477,00
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	152.087.662,00	139.099.108,00
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	508.176.993,00	446.896.613,00
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.500.000,00	33.789.690,00
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	463.076.808,00	405.061.467,00
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	8.600.185,00	8.045.456,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	144.558.551,00	130.558.351,00
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	144.558.551,00	130.558.351,00
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.575.397,00	87.971.365,00
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.983.154,00	42.586.986,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	17.152.463.144,00	15.794.009.333,00
	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	17.152.463.144,00	15.794.009.333,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.334.290.676,00	6.910.451.472,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.421.837.187,00	5.128.985.005,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.227.797.187,00	4.934.945.005,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.040.000,00	194.040.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.893.719,00	310.154.405,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.904.100,00	10.903.428,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.190.000,00	114.750.880,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.361.330,00	23.615.966,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.648.000,00	22.634.130,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.988.000,00	4.968.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.802.289,00	133.282.001,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191.083.232,00	177.754.478,00
	Pengadaan Mebel	61.856.132,00	61.378.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.774.600,00	72.070.558,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.452.500,00	44.305.920,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.093.910.000,00	1.016.691.221,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.920.000,00	48.991.221,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.950.000,00	24.875.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	986.040.000,00	942.825.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.566.538,00	276.866.363,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.565.200,00	235.624.363,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.001.338,00	41.242.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.152.605.416,00	4.637.357.479,00
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.152.605.416,00	4.637.357.479,00
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000,00	497.335.500,00
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.496.605.416,00	4.023.621.264,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	156.000.000,00	116.400.715,00
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.231.004.028,00	2.924.874.032,00
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.231.004.028,00	2.924.874.032,00
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	205.264.144,00	205.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.688.339.884,00	2.387.474.032,00
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	337.400.000,00	332.400.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.434.563.024,00	1.321.326.350,00
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.385.010.524,00	1.272.068.400,00
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	350.185.999,00	320.121.700,00
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	957.956.419,00	876.076.300,00
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	76.868.106,00	75.870.400,00
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	49.552.500,00	49.257.950,00
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	49.552.500,00	49.257.950,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	28.360.101.702,00	26.578.355.341,50
	Dinas Pertanian	28.360.101.702,00	26.578.355.341,50
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.913.489.745,00	16.666.483.219,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.215.682.157,00	14.288.087.975,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.025.962.157,00	14.104.737.975,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	189.720.000,00	183.350.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	137.250.000,00	132.495.194,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	137.250.000,00	132.495.194,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.108.607,00	491.418.864,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.684.780,00	22.614.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	362.199.636,00	254.454.589,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.382.247,00	8.838.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.766.992,00	25.754.150,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.074.952,00	179.757.625,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.771.158.861,00	1.610.766.709,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.058.861,00	103.976.709,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.654.100.000,00	1.506.790.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.290.120,00	143.714.477,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.290.120,00	58.818.728,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.900.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	74.995.749,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.200.263.079,00	2.930.650.033,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.053.772.200,00	1.023.875.793,00
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.053.772.200,00	1.023.875.793,00
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.757.522.493,00	1.528.249.380,00
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	274.548.230,00	235.753.150,00
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.482.974.263,00	1.292.496.230,00
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	388.968.386,00	378.524.860,00
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	388.968.386,00	378.524.860,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.012.093.423,00	4.931.497.777,50
	Pengembangan Prasarana Pertanian	154.560.000,00	114.814.900,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	154.560.000,00	114.814.900,00
	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.667.867.623,00	4.628.247.259,50
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.272.285.374,00	4.243.305.145,50
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	200.000.000,00	190.561.152,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	195.582.249,00	194.380.962,00
	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	189.665.800,00	188.435.618,00
	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	189.665.800,00	188.435.618,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	540.409.480,00	501.263.709,00
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	540.409.480,00	501.263.709,00
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	540.409.480,00	501.263.709,00
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	596.424.796,00	500.830.998,00
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	596.424.796,00	500.830.998,00
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	596.424.796,00	500.830.998,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.097.421.179,00	1.047.629.605,00
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.097.421.179,00	1.047.629.605,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	42.758.558,00	35.086.100,00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	105.250.621,00	104.270.105,00
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000,00	485.841.400,00
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	449.412.000,00	422.432.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.009.265,00	2.680.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.009.265,00	2.680.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	20.009.265,00	2.680.000,00
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.009.265,00	2.680.000,00
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.009.265,00	2.680.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	13.161.973.405,00	11.904.283.869,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.161.973.405,00	11.904.283.869,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.381.623.641,00	8.760.244.228,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.689.353.005,00	5.229.396.217,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.544.643.425,00	5.084.721.643,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	144.709.580,00	144.674.574,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.500.000,00	89.250.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.500.000,00	89.250.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.098.626,00	310.035.772,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.553.626,00	74.501.160,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.000.000,00	15.996.070,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.800.000,00	72.799.650,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.745.000,00	146.738.892,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.000.000,00	209.301.600,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Mebel	110.000.000,00	109.845.600,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	99.456.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.379.728.010,00	1.262.207.971,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.984.000,00	40.568.996,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.293.744.010,00	1.221.638.975,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.691.944.000,00	1.660.052.668,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.000.000,00	85.811.395,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.944.000,00	5.944.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.600.000.000,00	1.568.297.273,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.405.832.306,00	2.816.736.155,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.300.000.000,00	2.723.988.455,00
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.300.000.000,00	2.723.988.455,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	105.832.306,00	92.747.700,00
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	105.832.306,00	92.747.700,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	261.806.844,00	245.768.276,00
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	261.806.844,00	245.768.276,00
	Pameran Dagang Nasional	103.543.333,00	101.465.270,00
	Pameran Dagang Lokal	70.946.084,00	64.187.050,00
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	53.883.863,00	52.334.510,00
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	33.433.564,00	27.781.446,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	112.710.614,00	81.535.210,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	112.710.614,00	81.535.210,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	31.853.909,00	31.548.765,00
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	80.856.705,00	49.986.445,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	673.736.994,00	534.802.931,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	673.736.994,00	534.802.931,00
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	599.520.404,00	465.766.341,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	599.520.404,00	465.766.341,00
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	49.333.600,00	27.688.069,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	235.023.930,00	216.114.915,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	315.162.874,00	221.963.357,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	74.216.590,00	69.036.590,00
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	74.216.590,00	69.036.590,00
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	74.216.590,00	69.036.590,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	87.444.293.321,00	80.567.533.816,00
	SEKRETARIAT DAERAH	36.710.414.851,00	34.094.416.312,00
	Sekretariat Daerah	36.710.414.851,00	34.094.416.312,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.466.441.811,00	32.330.125.102,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.300.264.538,00	11.940.434.417,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.929.161.218,00	11.574.167.418,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	371.103.320,00	366.266.999,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.240.200,00	104.790.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	105.000.000,00	104.790.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.240.200,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.952.669.596,00	5.652.435.352,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.010.000,14	112.282.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	364.245.590,00	354.070.074,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	693.685.760,00	616.410.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.563.240,00	80.562.690,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.230.000.000,00	2.128.029.466,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.464.165.005,86	2.361.081.122,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.304.467.290,00	5.792.914.478,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.792.000.000,00	3.617.900.002,00
	Pengadaan Mebel	948.513.090,00	838.921.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320.100.000,00	229.564.798,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.243.854.200,00	1.106.528.678,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.823.349.620,00	2.356.743.702,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.685.000,00	32.571.500,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.299.403.650,00	1.109.774.202,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.085.970,00	105.363.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.312.175.000,00	1.109.035.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.499.205.000,00	3.241.309.462,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	476.054.620,00	289.384.110,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.033.583.000,00	1.028.446.152,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.393.550,00	52.209.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.882.173.830,00	1.871.270.200,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	886.381.290,00	865.681.457,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	782.381.290,00	762.139.857,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	104.000.000,00	103.541.600,00
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.246.000.000,00	2.118.462.500,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.150.000.000,00	1.131.878.000,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	880.000.000,00	770.674.500,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	216.000.000,00	215.910.000,00
	Penataan Organisasi	212.689.242,00	204.634.984,00
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	53.650.524,00	52.631.350,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	61.052.271,00	59.646.580,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.527.044,00	63.238.154,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	31.459.403,00	29.118.900,00
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	93.175.035,00	52.718.750,00
	Fasilitasi Keprotokolan	34.182.500,00	24.337.950,00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	28.716.218,00	19.052.000,00
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	30.276.317,00	9.328.800,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.072.704.225,00	925.172.680,00
	Administrasi Tata Pemerintahan	545.246.646,00	407.931.060,00
	Penataan Administrasi Pemerintahan	132.150.000,00	58.414.001,00
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	111.455.646,00	95.535.758,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	301.641.000,00	253.981.301,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	87.877.234,00	82.186.220,00
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	18.600.350,00	18.218.030,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	45.215.684,00	39.907.100,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	24.061.200,00	24.061.090,00
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	439.580.345,00	435.055.400,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	118.679.220,00	117.945.500,00
	Fasilitasi Bantuan Hukum	187.077.225,00	186.472.900,00
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	133.823.900,00	130.637.000,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.171.268.815,00	839.118.530,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	365.899.930,00	230.989.628,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	30.639.430,00	24.059.020,00
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	75.553.000,00	74.973.313,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	259.707.500,00	131.957.295,00
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	37.518.245,00	37.494.900,00
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	3.857.000,00	3.840.000,00
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	8.411.245,00	8.405.700,00
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	25.250.000,00	25.249.200,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	724.951.940,00	533.198.002,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	584.983.840,00	415.770.002,00
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	75.432.500,00	69.800.000,00
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	64.535.600,00	47.628.000,00
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	42.898.700,00	37.436.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	21.760.400,00	19.074.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	21.138.300,00	18.362.000,00
	SEKRETARIAT DPRD	50.733.878.470,00	46.473.117.504,00
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	50.733.878.470,00	46.473.117.504,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.992.210.884,00	32.473.553.546,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.183.201.442,00	3.030.866.419,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.030.561.442,00	2.889.746.419,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.640.000,00	141.120.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.112.000,00	374.680.532,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	91.500.000,00	81.220.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	308.612.000,00	293.460.532,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.241.871.502,00	2.664.336.016,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.998.160,00	23.505.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	739.947.850,00	669.258.890,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.857.041.630,00	1.376.758.400,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.781.562,00	13.161.500,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.400.000,00	19.656.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	212.013.300,00	210.388.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351.689.000,00	351.608.226,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.689.998.500,00	3.421.985.011,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.206.020.000,00	2.109.900.000,00
	Pengadaan Mebel	1.483.978.500,00	1.312.085.011,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.289.680.000,00	1.144.897.393,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.200.000,00	124.627.143,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.290.000,00	18.780.250,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.056.190.000,00	1.001.490.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	998.159.440,00	853.346.348,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	297.120.000,00	181.116.578,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	701.039.440,00	672.229.770,00
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.296.597.000,00	19.187.386.827,00
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	19.704.597.000,00	18.708.386.870,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	352.000.000,00	286.999.957,00
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	240.000.000,00	192.000.000,00
	Layanan Administrasi DPRD	1.892.591.000,00	1.796.055.000,00
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	20.591.000,00	10.035.000,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.872.000.000,00	1.786.020.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.741.667.586,00	13.999.563.958,00
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.604.070.320,00	2.250.692.595,00
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	17.514.000,00	13.650.000,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.517.909.260,00	2.203.487.595,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	13.039.800,00	0,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	50.675.260,00	29.655.000,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	4.932.000,00	3.900.000,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	251.251.500,00	229.688.000,00
	Pembahasan KUA dan PPAS	84.508.500,00	78.424.000,00
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	47.148.500,00	41.627.000,00
	Pembahasan APBD	36.949.500,00	36.317.000,00
	Pembahasan APBD Perubahan	37.740.000,00	36.933.000,00
	Pembahasan Laporan Semester	7.385.000,00	0,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	37.520.000,00	36.387.000,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	172.317.200,00	59.604.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	25.079.600,00	14.861.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	19.409.600,00	0,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	31.836.000,00	0,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24.332.000,00	21.656.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	24.430.000,00	0,00
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	13.714.000,00	4.898.000,00
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	13.300.000,00	0,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	20.216.000,00	18.189.000,00
	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.832.820.940,00	1.494.285.228,00
	Pendalaman Tugas DPRD	1.206.341.000,00	1.014.143.228,00
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	105.000.000,00	105.000.000,00
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	336.000.000,00	336.000.000,00
	Penyusunan Program Kerja DPRD	24.735.540,00	10.382.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	160.744.400,00	28.760.000,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	826.288.000,00	551.634.000,00
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	50.000.000,00	49.450.000,00
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	13.033.600,00	0,00
	Pelaksanaan Reses	763.254.400,00	502.184.000,00
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	13.996.000,00	0,00
	Penyusunan Kode Etik DPRD	6.998.000,00	0,00
	Pengawasan Kode Etik DPRD	6.998.000,00	0,00
	Fasilitasi Tugas DPRD	10.040.923.626,00	9.413.660.135,00
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.714.345.706,00	9.347.866.135,00
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	9.273.000,00	6.671.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	34.595.120,00	19.808.000,00
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	282.709.800,00	39.315.000,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	323.999.527.204,00	307.711.499.243,00
	PERENCANAAN	7.989.507.859,00	7.727.467.346,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.989.507.859,00	7.727.467.346,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.975.967.934,00	5.832.090.926,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.009.522.991,00	4.916.601.561,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.852.738.391,00	4.759.816.961,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156.784.600,00	156.784.600,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.240.000,00	30.240.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.240.000,00	30.240.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	478.972.902,00	471.028.537,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.757.402,00	1.757.402,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.399.544,00	34.416.335,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.428.784,00	12.428.784,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.784.302,00	18.127.119,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.723.842,00	6.696.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.879.028,00	397.602.897,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.608.440,00	169.175.100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	183.608.440,00	169.175.100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.950.000,00	103.418.800,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	11.978.800,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.650.000,00	16.140.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.300.000,00	75.300.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.673.601,00	141.626.928,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.120.000,00	40.886.928,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.553.601,00	100.740.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.034.920.875,00	965.190.885,00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	870.287.075,00	825.369.015,00
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	30.926.280,00	29.596.465,00
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	21.484.555,00	20.151.655,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	42.741.755,00	41.620.885,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	775.134.485,00	734.000.010,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	43.026.190,00	37.017.835,00
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	43.026.190,00	37.017.835,00
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	121.607.610,00	102.804.035,00
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	121.607.610,00	102.804.035,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	978.619.050,00	930.185.535,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	521.799.333,00	495.609.080,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.029.882,00	36.452.640,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	67.612.200,00	60.739.200,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	79.108.803,00	76.668.405,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	338.048.448,00	321.748.835,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	278.961.872,00	260.957.362,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	152.575.521,00	137.900.600,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.100.000,00	7.840.563,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	48.472.272,00	48.218.004,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.484.000,00	27.443.955,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.313.560,00	9.812.130,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	31.016.519,00	29.742.110,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	177.857.845,00	173.619.093,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.369.445,00	62.590.215,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	66.855.750,00	66.058.485,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.415.020,00	20.832.350,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	26.217.630,00	24.138.043,00
	KEUANGAN	308.214.937.964,00	293.136.034.651,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	297.782.644.723,00	283.951.634.959,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.949.463.471,00	5.484.092.031,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.696.000,00	1.190.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.696.000,00	1.190.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.692.526.406,00	4.537.332.478,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.396.596.406,00	4.241.402.478,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	295.930.000,00	295.930.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.100.000,00	34.440.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.100.000,00	34.440.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.533.865,00	464.378.877,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.862.513,00	6.565.027,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	366.534.951,00	242.627.010,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.625.790,00	16.203.185,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.421.212,00	45.993.726,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.089.399,00	152.989.929,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.100.000,00	298.625.544,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	15.725.544,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.460.000,00	14.520.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.440.000,00	268.380.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.507.200,00	148.125.132,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.507.200,00	148.125.132,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	291.138.518.094,00	277.824.579.345,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.751.523.579,00	1.361.128.903,00
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	173.846.044,00	163.592.434,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	161.039.852,00	134.383.202,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	157.912.000,00	133.775.000,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	305.752.000,00	186.200.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	423.996.359,00	307.166.756,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	479.514.340,00	408.221.511,00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	11.042.984,00	0,00
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	38.420.000,00	27.790.000,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	162.436.311,00	131.882.218,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	29.029.584,00	27.776.819,00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	54.068.969,00	40.109.384,00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	35.034.908,00	34.557.230,00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44.302.850,00	29.438.785,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	574.265.500,00	522.491.469,00
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	31.722.809,00	29.147.316,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	132.985.047,00	121.377.474,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	159.781.348,00	155.325.791,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	164.185.306,00	145.204.142,00
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	85.590.990,00	71.436.746,00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	288.650.292.704,00	275.809.076.755,00
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	273.895.412.700,00	264.018.747.563,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.964.550.812,00	0,00
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	11.790.329.192,00	11.790.329.192,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	694.663.158,00	642.963.583,00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	694.663.158,00	642.963.583,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyusunan Standar Harga	103.385.108,00	74.189.301,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	227.406.666,00	219.926.915,00
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	103.658.010,00	94.172.038,00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	221.930.645,00	217.852.366,00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	38.282.729,00	36.822.963,00
	Badan Pendapatan Daerah	10.432.293.241,00	9.184.399.692,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.992.430.539,00	6.396.575.862,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.013.580.420,00	5.513.253.906,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.863.730.420,00	5.363.459.906,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149.850.000,00	149.794.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.720.000,00	47.040.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48.720.000,00	47.040.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.910.119,00	357.056.289,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.842.060,00	124.929.139,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.044.450,00	90.228.750,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.023.609,00	141.898.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.930.000,00	405.169.155,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	15.760.155,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.100.000,00	12.204.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.630.000,00	377.205.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.290.000,00	74.056.512,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.290.000,00	74.056.512,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.439.862.702,00	2.787.823.830,00
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.439.862.702,00	2.787.823.830,00
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	67.100.215,00	66.139.278,00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	166.390.040,00	109.093.633,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	398.920.456,00	356.883.604,00
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	314.816.899,00	301.807.709,00
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	981.161.890,00	949.445.255,00
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	21.806.110,00	18.319.985,00
	Penagihan Pajak Daerah	26.796.995,00	23.949.533,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.462.870.097,00	962.184.833,00
	KEPEGAWAIAN	6.149.150.612,00	5.698.866.742,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.149.150.612,00	5.698.866.742,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.869.362.722,00	4.746.867.447,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.254.447.837,00	4.172.560.607,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.134.688.207,00	4.056.453.207,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.759.630,00	116.107.400,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.240.000,00	25.500.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.240.000,00	25.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.105.705,00	245.279.232,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.718.565,00	30.623.474,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.719.140,00	29.662.100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.668.000,00	184.993.658,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	235.704.550,00	215.145.998,00
	Pengadaan Mebel	49.487.350,00	46.342.498,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.217.200,00	168.803.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.674.630,00	32.349.080,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	10.934.080,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.474.630,00	21.415.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.190.000,00	56.032.530,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	38.392.530,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.770.000,00	17.640.000,00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.279.787.890,00	951.999.295,00
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	204.228.000,00	193.413.480,00
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	101.832.000,00	91.462.042,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	102.396.000,00	101.951.438,00
	Mutasi dan Promosi ASN	644.817.600,00	386.030.154,00
	Pengelolaan Mutasi ASN	17.345.040,00	16.387.925,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	26.598.450,00	24.909.275,00
	Pengelolaan Promosi ASN	600.874.110,00	344.732.954,00
	Pengembangan Kompetensi ASN	199.291.260,00	155.218.461,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	80.613.820,00	67.987.466,00
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	94.846.400,00	68.154.985,00
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	23.831.040,00	19.076.010,00
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	231.451.030,00	217.337.200,00
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	114.973.030,00	104.548.000,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	116.478.000,00	112.789.200,00
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	621.217.235,00	270.108.962,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	621.217.235,00	270.108.962,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	621.217.235,00	270.108.962,00
	Pengembangan Kompetensi Teknis	25.870.035,00	18.408.955,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	25.870.035,00	18.408.955,00
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	595.347.200,00	251.700.007,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	595.347.200,00	251.700.007,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.024.713.534,00	879.021.542,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.024.713.534,00	879.021.542,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.024.713.534,00	879.021.542,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	446.529.342,00	362.200.552,00
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	446.529.342,00	362.200.552,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	578.184.192,00	516.820.990,00
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	578.184.192,00	516.820.990,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.413.709.648,00	8.243.992.151,00
	INSPEKTORAT DAERAH	8.413.709.648,00	8.243.992.151,00
	Inspektorat Daerah	8.413.709.648,00	8.243.992.151,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.266.145.052,00	7.164.181.151,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.494.456.305,00	6.406.638.114,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.371.786.305,00	6.283.968.114,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.670.000,00	122.670.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	193.234.029,00	188.414.880,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	76.680.000,00	76.644.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	116.554.029,00	111.770.880,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.531.232,00	378.372.230,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.435.522,00	227.801.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.041.040,00	38.031.500,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.115.670,00	4.115.670,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.799.000,00	1.799.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.250.000,00	24.801.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.890.000,00	81.824.060,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.483.486,00	102.537.160,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	18.322.160,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.283.486,00	74.215.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.440.000,00	88.218.767,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.440.000,00	88.218.767,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	888.001.496,00	833.426.000,00
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	683.583.996,00	632.025.000,00
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74.997.000,00	74.850.000,00
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	250.534.126,00	250.500.000,00
	Reviu Laporan Kinerja	62.457.000,00	61.799.000,00
	Reviu Laporan Keuangan	33.150.000,00	33.150.000,00
	Pengawasan Desa	97.136.870,00	96.938.000,00
	Kerja Sama Pengawasan Internal	38.980.000,00	38.800.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	126.329.000,00	75.988.000,00
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	204.417.500,00	201.401.000,00
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	55.672.500,00	55.545.000,00
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	148.745.000,00	145.856.000,00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	259.563.100,00	246.385.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Pendampingan dan Asistensi	249.563.100,00	236.385.000,00
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	68.443.100,00	68.400.000,00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	168.670.000,00	155.535.000,00
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12.450.000,00	12.450.000,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	57.614.741.961,00	55.304.315.001,00
	KECAMATAN	57.614.741.961,00	55.304.315.001,00
	Kecamatan Kabanjahe	6.660.878.223,00	6.403.645.537,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.566.773.073,00	6.330.755.537,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.592.813.239,00	5.361.838.613,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.304.305.239,00	5.073.358.613,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	288.508.000,00	288.480.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.360.000,00	45.360.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.360.000,00	45.360.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.451.834,00	93.203.560,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.481.500,00	3.481.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.212.860,00	50.187.860,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.393.334,00	8.371.800,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.057.140,00	7.046.100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.307.000,00	24.116.300,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.578.000,00	787.110.300,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	8.560.300,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.530.000,00	3.530.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	775.048.000,00	775.020.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.570.000,00	43.243.064,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.570.000,00	43.243.064,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.796.000,00	26.581.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.481.000,00	20.481.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.856.000,00	11.856.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.625.000,00	8.625.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	27.315.000,00	6.100.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.315.000,00	6.100.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.530.000,00	16.530.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.530.000,00	16.530.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.530.000,00	16.530.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.000.000,00	2.000.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.779.150,00	25.779.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.779.150,00	25.779.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.779.150,00	25.779.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000,00	2.000.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Kelurahan Kampung Dalam	808.500.000,00	788.342.898,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	808.500.000,00	788.342.898,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	808.500.000,00	788.342.898,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	541.600.000,00	534.137.898,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	266.900.000,00	254.205.000,00
	Kelurahan Gung Negeri	804.480.000,00	790.925.600,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	804.480.000,00	790.925.600,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	804.480.000,00	790.925.600,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	510.000.000,00	507.336.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294.480.000,00	283.589.600,00
	Kelurahan Padang Mas	860.799.501,00	838.466.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	860.799.501,00	838.466.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	860.799.501,00	838.466.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	579.000.000,00	574.337.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.799.501,00	264.129.000,00
	Kelurahan Lau Cimba	777.240.000,00	757.696.500,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	777.240.000,00	757.696.500,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	777.240.000,00	757.696.500,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	674.240.000,00	667.725.500,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	103.000.000,00	89.971.000,00
	Kelurahan Gung Leto	799.500.000,00	770.886.258,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	799.500.000,00	770.886.258,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	799.500.000,00	770.886.258,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	555.000.000,00	549.386.258,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	244.500.000,00	221.500.000,00
	Kecamatan Berastagi	5.648.660.540,00	5.428.600.908,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.471.971.245,00	5.271.793.588,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.453.885.763,00	4.296.600.205,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.203.823.004,00	4.058.400.205,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250.062.759,00	238.200.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.200.000,00	34.440.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.200.000,00	34.440.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.905.482,00	93.804.498,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.813.090,00	5.792.670,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.873.098,00	45.705.488,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.830.494,00	4.821.226,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.404.000,00	2.313.760,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.646.000,00	2.642.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.338.800,00	32.529.354,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	221.000.000,00	218.615.739,00
	Pengadaan Mebel	90.000.000,00	88.068.639,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.000.000,00	130.547.100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	628.810.000,00	591.207.396,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.200.000,00	22.852.396,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.870.000,00	6.410.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	565.740.000,00	561.945.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.170.000,00	37.125.750,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.170.000,00	37.125.750,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	116.367.045,00	96.799.560,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61.247.045,00	61.149.560,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.995.560,00	14.995.560,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.251.485,00	46.154.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	51.620.000,00	32.150.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.620.000,00	32.150.000,00
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	3.500.000,00	3.500.000,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.500.000,00	3.500.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.322.250,00	60.007.760,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.322.250,00	60.007.760,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60.322.250,00	60.007.760,00
	Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	790.421.685,00	776.077.750,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	790.421.685,00	776.077.750,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	790.421.685,00	776.077.750,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000,00	744.240.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.421.685,00	31.837.750,00
	Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	788.859.334,00	775.352.140,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	788.859.334,00	775.352.140,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	788.859.334,00	775.352.140,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000,00	745.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38.859.334,00	30.352.140,00
	Kelurahan Gundaling II	790.649.910,00	776.382.325,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	790.649.910,00	776.382.325,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	790.649.910,00	776.382.325,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000,00	744.682.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.649.910,00	31.700.325,00
	Kelurahan Gundaling I	789.034.700,00	774.380.200,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	789.034.700,00	774.380.200,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	789.034.700,00	774.380.200,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000,00	743.916.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39.034.700,00	30.464.200,00
	Kecamatan Barusjahe	2.635.314.926,00	2.573.902.879,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.553.478.201,00	2.492.104.129,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.340.780.148,00	2.279.825.997,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.295.858.628,00	2.234.945.997,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.921.520,00	44.880.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.160.000,00	20.160.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.160.000,00	20.160.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.517.969,00	51.271.632,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.258.998,00	1.258.998,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.552.090,00	12.511.900,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.642.841,00	9.635.600,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.774.040,00	3.615.650,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.290.000,00	24.249.484,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.114.084,00	16.095.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.114.084,00	16.095.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.436.000,00	91.281.500,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.663.500,00	14.561.500,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.420.000,00	1.420.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.352.500,00	75.300.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00	33.470.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	33.470.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.662.900,00	43.661.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.038.900,00	19.037.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.240.000,00	10.240.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.798.900,00	8.797.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24.624.000,00	24.624.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.624.000,00	24.624.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.146.950,00	5.146.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.146.950,00	5.146.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.146.950,00	5.146.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.743.925,00	29.708.800,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.743.925,00	29.708.800,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	29.743.925,00	29.708.800,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.282.950,00	3.282.950,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.282.950,00	3.282.950,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.746.950,00	1.746.950,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.536.000,00	1.536.000,00
	Kecamatan Tiga Panah	2.970.308.213,00	2.853.567.225,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.799.386.073,00	2.695.183.225,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.523.464.067,00	2.427.909.571,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.480.984.067,00	2.385.429.571,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.480.000,00	42.480.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.330.720,00	35.310.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.330.720,00	35.310.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.484.911,00	52.099.904,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.144.670,00	1.144.670,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.338.295,00	12.129.850,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.006.426,00	3.992.600,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.445.520,00	2.437.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.550.000,00	32.395.784,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.467.000,00	30.300.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.467.000,00	30.300.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.020.000,00	36.948.150,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000,00	8.223.150,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.760.000,00	2.760.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.760.000,00	25.965.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.619.375,00	112.615.600,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.804.906,00	45.803.600,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.814.469,00	66.812.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.604.200,00	87.218.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48.604.200,00	47.218.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.886.200,00	23.810.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.718.000,00	23.408.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.554.060,00	7.550.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.554.060,00	7.550.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.554.060,00	7.550.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.950.200,00	10.357.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.950.200,00	10.357.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.950.200,00	10.357.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.913.680,00	44.359.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.913.680,00	44.359.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	54.913.680,00	44.359.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.900.000,00	8.900.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.900.000,00	8.900.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.900.000,00	8.900.000,00
	Kecamatan Merek	2.864.877.387,00	2.773.538.544,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.734.695.387,00	2.645.871.544,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.512.946.949,00	2.441.555.295,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.461.186.949,00	2.389.795.295,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.760.000,00	51.760.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.840.000,00	21.840.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.840.000,00	21.840.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.496.538,00	76.298.649,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.974.995,00	1.974.995,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.240.501,00	34.204.340,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.042.588,00	2.988.680,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.051.954,00	3.051.954,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.186.500,00	34.078.680,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.641.900,00	16.622.600,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.641.900,00	16.622.600,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.300.000,00	56.085.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.300.000,00	7.200.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.160.000,00	48.885.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00	33.470.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	33.470.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.998.000,00	75.483.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.526.000,00	47.011.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.226.000,00	16.691.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.300.000,00	30.320.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	28.472.000,00	28.472.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.472.000,00	28.472.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.720.000,00	3.720.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.720.000,00	3.720.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.720.000,00	3.720.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.464.000,00	48.464.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.464.000,00	48.464.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	48.464.000,00	48.464.000,00
	Kecamatan Munte	2.318.366.276,00	2.270.686.609,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.175.073.906,00	2.131.048.609,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.965.165.065,00	1.925.868.661,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.918.537.065,00	1.879.888.661,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.628.000,00	45.980.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.960.000,00	15.960.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.960.000,00	15.960.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.539.261,00	74.169.950,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.975.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.324.261,00	29.158.700,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	7.988.500,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.800.000,00	4.657.750,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.415.000,00	29.390.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.969.580,00	20.099.998,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.969.580,00	20.099.998,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.930.000,00	59.440.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	9.600.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.990.000,00	4.900.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.940.000,00	44.940.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.510.000,00	35.510.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.510.000,00	35.510.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.880.600,00	77.468.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.752.600,00	45.606.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.242.000,00	20.160.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.510.600,00	25.446.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	35.128.000,00	31.862.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.128.000,00	31.862.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.342.400,00	11.294.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.342.400,00	11.294.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.725.400,00	5.700.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.617.000,00	5.594.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.160.800,00	13.100.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.031.600,00	10.980.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.031.600,00	10.980.000,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.129.200,00	2.120.000,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.129.200,00	2.120.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.774.570,00	30.724.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.774.570,00	30.724.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.774.570,00	30.724.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.134.000,00	7.052.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.134.000,00	7.052.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.220.000,00	4.210.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.914.000,00	2.842.000,00
	Kecamatan Juhar	2.766.744.081,00	2.614.880.013,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.669.073.091,00	2.518.841.283,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.424.271.942,00	2.286.042.389,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.379.352.942,00	2.241.162.389,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.919.000,00	44.880.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.520.000,00	23.520.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.520.000,00	23.520.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.852.249,00	59.689.578,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.306.335,00	1.305.600,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.480.408,00	14.393.865,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.381.380,00	3.358.200,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.444.126,00	3.439.913,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.240.000,00	37.192.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.659.900,00	22.798.220,00
	Pengadaan Mebel	23.659.900,00	22.798.220,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.299.000,00	93.321.217,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	9.011.217,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.420.000,00	1.420.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.879.000,00	82.890.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00	33.469.879,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	33.469.879,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.451.530,00	67.055.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.695.230,00	33.495.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.783.140,00	14.530.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.912.090,00	18.965.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	33.756.300,00	33.560.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.756.300,00	33.560.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.235.730,00	3.000.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.235.730,00	3.000.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.235.730,00	3.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.983.730,00	25.983.730,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.983.730,00	25.983.730,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.983.730,00	25.983.730,00
	Kecamatan Tiga Binanga	2.717.369.367,00	2.605.972.828,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.589.083.557,00	2.487.517.013,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.211.197.898,00	2.109.950.543,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.102.597.898,00	2.001.590.543,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.600.000,00	108.360.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.520.000,00	23.520.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.520.000,00	23.520.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.860.939,00	62.762.804,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.554.870,00	1.527.320,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.490.715,00	31.447.130,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.807.870,00	2.807.870,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.231.000,00	4.231.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.776.484,00	22.749.484,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.220.000,00	222.998.946,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.000.000,00	27.778.946,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000,00	7.300.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.920.000,00	187.920.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.284.720,00	68.284.720,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.940.000,00	46.940.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.344.720,00	21.344.720,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.128.700,00	62.444.055,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.908.700,00	49.854.055,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.329.420,00	22.325.575,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.579.280,00	27.528.480,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.220.000,00	12.590.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.220.000,00	12.590.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.787.360,00	16.708.760,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.787.360,00	16.708.760,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.787.360,00	16.708.760,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.369.750,00	39.303.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.369.750,00	39.303.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	39.369.750,00	39.303.000,00
	Kelurahan Tiga Binanga	808.500.000,00	799.319.642,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	808.500.000,00	799.319.642,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	808.500.000,00	799.319.642,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	711.332.340,00	710.709.642,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97.167.660,00	88.610.000,00
	Kecamatan Lau Baleng	2.286.540.041,00	2.163.879.216,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.177.589.641,00	2.055.926.906,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.955.088.391,00	1.838.802.994,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.912.608.391,00	1.796.322.994,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.480.000,00	42.480.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.440.000,00	13.440.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.440.000,00	13.440.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.029.050,00	53.989.530,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.157.860,00	2.157.860,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.804.370,00	13.733.200,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.359.740,00	10.330.400,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.859.080,00	2.853.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.848.000,00	24.915.070,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.517.200,00	55.567.932,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.517.200,00	55.567.932,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.045.000,00	60.656.450,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	11.611.450,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000,00	2.840.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.205.000,00	46.205.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00	33.470.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	33.470.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.631.190,00	56.602.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.349.190,00	32.320.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.613.950,00	11.613.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.735.240,00	20.707.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24.282.000,00	24.282.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.282.000,00	24.282.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.565.700,00	8.890.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.565.700,00	8.890.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.565.700,00	8.890.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.373.300,00	6.360.000,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.373.300,00	6.360.000,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.373.300,00	6.360.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.513.210,00	35.279.510,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.513.210,00	35.279.510,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.513.210,00	35.279.510,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	867.000,00	820.800,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	867.000,00	820.800,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	867.000,00	820.800,00
	Kecamatan Mardinding	2.154.435.608,00	2.038.109.872,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.043.670.208,00	1.930.387.592,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.825.431.005,00	1.719.108.353,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.785.450.005,00	1.679.148.353,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.981.000,00	39.960.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.280.000,00	14.280.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.280.000,00	14.280.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.848.803,00	54.717.392,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.268.790,00	2.268.790,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.309.803,00	15.309.803,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.818.010,00	8.804.399,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	355.200,00	355.200,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.097.000,00	27.979.200,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.658.800,00	65.070.150,00
	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	13.264.500,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.658.800,00	51.805.650,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.981.600,00	43.741.697,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	11.251.697,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.760.000,00	2.730.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.821.600,00	29.760.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.470.000,00	33.470.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.470.000,00	33.470.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	71.202.840,00	68.159.720,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52.596.840,00	49.553.720,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.129.470,00	12.129.470,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.467.370,00	37.424.250,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.606.000,00	18.606.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.606.000,00	18.606.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.360.000,00	3.360.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.360.000,00	3.360.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.360.000,00	3.360.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.362.560,00	34.362.560,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.362.560,00	34.362.560,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.362.560,00	34.362.560,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.840.000,00	1.840.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.840.000,00	1.840.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	920.000,00	920.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	920.000,00	920.000,00
	Kecamatan Payung	2.000.433.994,00	1.867.056.227,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.929.022.840,00	1.798.292.227,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.743.189.968,00	1.621.341.958,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.703.229.968,00	1.581.381.958,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.960.000,00	39.960.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000,00	13.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.172.872,00	38.859.080,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.383.008,00	3.330.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.573.734,00	8.468.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.906.848,00	4.855.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.465.282,00	1.440.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.844.000,00	20.766.080,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.160.000,00	88.597.810,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.200.000,00	13.637.810,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,00	2.190.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.770.000,00	72.770.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.000.000,00	35.993.379,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000,00	35.993.379,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.210.450,00	44.462.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.114.450,00	25.370.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.286.000,00	11.236.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.828.450,00	14.134.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.096.000,00	19.092.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.096.000,00	19.092.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.420.704,00	19.202.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.420.704,00	19.202.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.420.704,00	19.202.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.780.000,00	5.100.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.780.000,00	5.100.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.780.000,00	5.100.000,00
	Kecamatan Simpang Empat	2.959.232.309,00	2.836.766.422,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.850.490.989,00	2.737.164.232,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.555.758.233,00	2.467.935.683,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.506.038.233,00	2.418.215.683,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.720.000,00	49.720.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.040.000,00	43.680.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47.040.000,00	43.680.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.202.756,00	100.830.990,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.493.360,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.096.356,00	61.305.257,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.100.000,00	2.098.183,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.756.400,00	6.756.190,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.750.000,00	29.178.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.020.000,00	61.321.580,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.900.000,00	7.631.580,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	5.720.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.120.000,00	47.970.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.470.000,00	63.395.979,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.470.000,00	33.425.179,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.970.800,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.956.600,00	53.402.470,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.834.600,00	23.282.470,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.100.000,00	12.557.520,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.734.600,00	10.724.950,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30.122.000,00	30.120.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.122.000,00	30.120.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.903.600,00	2.903.600,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.903.600,00	2.903.600,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.903.600,00	2.903.600,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51.881.120,00	43.296.120,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	51.881.120,00	43.296.120,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	51.881.120,00	43.296.120,00
	Kecamatan Kutabuluh	2.275.301.155,00	2.161.397.429,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.152.397.343,00	2.038.591.429,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.872.621.166,00	1.763.479.897,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.830.253.366,00	1.721.119.897,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.367.800,00	42.360.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.054.537,00	14.280.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.054.537,00	14.280.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.522.540,00	71.757.050,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.405.600,00	1.402.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.885.750,00	14.699.900,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.501.280,00	11.951.400,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.006.010,00	2.997.250,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.723.900,00	40.706.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.911.300,00	90.119.500,00
	Pengadaan Mebel	4.400.000,00	4.400.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.011.300,00	58.219.500,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.500.000,00	27.500.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.717.800,00	54.394.081,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.700.000,00	15.384.081,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.250.000,00	9.250.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.767.800,00	29.760.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.570.000,00	44.560.901,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.570.000,00	44.560.901,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.584.690,00	68.536.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.484.690,00	28.436.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.060.000,00	13.050.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.424.690,00	15.386.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.100.000,00	40.100.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.100.000,00	40.100.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.170.000,00	5.170.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.170.000,00	5.170.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.170.000,00	5.170.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.930.000,00	5.904.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.930.000,00	5.904.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.930.000,00	5.904.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.209.122,00	34.186.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.209.122,00	34.186.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.209.122,00	34.186.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.010.000,00	9.010.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.010.000,00	9.010.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	9.010.000,00	9.010.000,00
	Kecamatan Dolat Rayat	2.045.249.223,00	1.991.093.224,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.981.854.223,00	1.928.789.024,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.780.960.798,00	1.728.352.514,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.743.400.798,00	1.690.792.514,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.560.000,00	37.560.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.600.000,00	33.600.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.600.000,00	33.600.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.483.425,00	32.390.425,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.927.715,00	6.927.715,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.045.510,00	2.045.510,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.767.200,00	3.767.200,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.743.000,00	19.650.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.340.000,00	100.976.085,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.200.000,00	22.836.085,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000,00	2.840.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.300.000,00	75.300.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00	33.470.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	33.470.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.098.200,00	33.007.400,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.888.800,00	20.798.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.223.000,00	11.223.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.665.800,00	9.575.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12.209.400,00	12.209.400,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.209.400,00	12.209.400,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.095.800,00	5.095.800,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.095.800,00	5.095.800,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.095.800,00	5.095.800,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.201.000,00	24.201.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.201.000,00	24.201.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24.201.000,00	24.201.000,00
	Kecamatan Merdeka	2.304.232.521,00	2.236.259.170,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.182.109.835,00	2.120.691.857,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.480.230,00	1.963.539.926,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.945.916.489,00	1.921.179.926,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.563.741,00	42.360.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.320.000,00	17.320.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.320.000,00	17.320.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.937.159,00	48.573.344,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.968.790,00	4.966.666,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.791.357,00	6.786.264,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.724.232,00	8.515.500,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.071.690,00	3.071.430,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.184.000,00	2.184.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.197.090,00	23.049.484,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.862.446,00	55.748.808,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	7.466.362,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000,00	2.840.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.022.446,00	45.442.446,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.510.000,00	35.509.779,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.510.000,00	35.509.779,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.296.250,00	50.821.410,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.356.250,00	26.881.410,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.579.310,00	10.740.510,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.776.940,00	16.140.900,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	23.940.000,00	23.940.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.940.000,00	23.940.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.260.080,00	17.231.793,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.260.080,00	17.231.793,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.260.080,00	17.231.793,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.525.824,00	11.487.960,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.788.000,00	4.773.000,00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.788.000,00	4.773.000,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.737.824,00	6.714.960,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.737.824,00	6.714.960,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.541.232,00	32.532.150,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.541.232,00	32.532.150,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.541.232,00	32.532.150,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.499.300,00	3.494.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.499.300,00	3.494.000,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.499.300,00	3.494.000,00
	Kecamatan Namanteran	2.330.604.628,00	2.213.498.443,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.209.175.859,00	2.106.899.443,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.026.542.487,00	1.942.474.743,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.975.534.387,00	1.891.594.743,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.008.100,00	50.880.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000,00	13.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.272.616,00	36.178.500,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.951.845,00	1.677.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.083.791,00	10.197.700,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.162.660,00	2.577.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	336.220,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.738.100,00	21.726.800,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.312.656,00	18.044.000,00
	Pengadaan Mebel	12.156.856,00	9.890.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.155.800,00	8.154.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.048.100,00	61.252.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.450.000,00	14.545.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.530.000,00	1.647.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.068.100,00	45.060.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.500.000,00	35.450.200,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.500.000,00	35.450.200,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.460.510,00	46.616.500,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.222.310,00	25.408.500,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.752.800,00	8.555.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.469.510,00	16.853.500,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	21.238.200,00	21.208.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.238.200,00	21.208.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.650.000,00	6.750.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.650.000,00	6.750.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.650.000,00	6.750.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55.318.259,00	53.232.500,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.318.259,00	53.232.500,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55.318.259,00	53.232.500,00
	Kecamatan Tiganderket	2.658.208.339,00	2.423.631.142,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.532.145.139,00	2.310.983.241,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.245.257.339,00	2.093.095.505,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.190.777.339,00	2.038.615.505,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.480.000,00	54.480.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.380.000,00	17.380.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.380.000,00	17.380.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.425.000,00	57.299.904,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.880.000,00	2.880.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.453.020,00	11.433.020,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.999.900,00	6.994.804,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.802.080,00	3.802.080,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.180.000,00	3.180.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.110.000,00	29.010.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.174.400,00	47.614.400,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.174.400,00	47.614.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.438.400,00	64.363.308,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.418.400,00	13.703.308,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.720.000,00	5.720.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.300.000,00	44.940.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00	31.230.124,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.470.000,00	31.230.124,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.397.400,00	24.278.501,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.397.400,00	24.278.501,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.507.600,00	17.462.501,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.889.800,00	6.816.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.624.400,00	22.624.400,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.624.400,00	22.624.400,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.864.400,00	10.864.400,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.760.000,00	11.760.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.425.800,00	12.423.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.425.800,00	12.423.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.425.800,00	12.423.000,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.335.600,00	53.322.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.335.600,00	53.322.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	38.891.800,00	38.889.000,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	14.443.800,00	14.433.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.280.000,00	0,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.280.000,00	0,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.280.000,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.497.830.303,00	8.163.873.718,00
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.497.830.303,00	8.163.873.718,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.497.830.303,00	8.163.873.718,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.949.848.654,00	4.819.796.552,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.488.618.264,00	4.375.033.468,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.346.058.264,00	4.232.473.468,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142.560.000,00	142.560.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00	30.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.756.792,00	253.624.299,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.789.462,00	172.279.850,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.442.669,00	1.410.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.926.661,00	10.852.800,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.799.000,00	900.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.799.000,00	68.181.649,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.953.598,00	111.946.200,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	7.466.200,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.200.000,00	13.400.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.753.598,00	91.080.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.520.000,00	49.192.585,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.520.000,00	49.192.585,00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	964.419.325,00	911.811.080,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	964.419.325,00	911.811.080,00
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	961.529.880,00	909.792.080,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.889.445,00	2.019.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.088.748.437,00	1.087.148.686,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.088.748.437,00	1.087.148.686,00
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.088.748.437,00	1.087.148.686,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	7.717.333,00	0,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7.717.333,00	0,00
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	7.717.333,00	0,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.260.865.765,00	1.141.380.200,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.260.865.765,00	1.141.380.200,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	207.219.090,00	164.987.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	980.911.675,00	919.731.200,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	72.735.000,00	56.662.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	226.230.789,00	203.737.200,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	226.230.789,00	203.737.200,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	226.230.789,00	203.737.200,00
Jumlah		**1.455.323.089.325,00**	**1.385.107.097.412,50**

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karo
Tahun 2025

NO.	SKPD
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperkim)
6	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
8	Dinas Sosial (Dinsos)
9	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DKKUKM)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
12	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
15	Dinas Perhubungan (Dishub)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
18	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar)
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip (DPA)
20	Dinas Pertanian (Distan)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
22	Sekretariat Daerah
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
27	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
28	Inspektorat Daerah
29	Kecamatan Kabanjahe
30	Kecamatan Merek
31	Kecamatan Munte
32	Kecamatan Juhar
33	Kecamatan Tigabinanga
34	Kecamatan Laubaleng
35	Kecamatan Mardingding
36	Kecamatan Payung
37	Kecamatan Simpang Empat
38	Kecamatan Kutabuluh
39	Kecamatan Dolat Rayat
40	Kecamatan Namanteran
41	Kecamatan Tiganderket
42	Kecamatan Berastagi
43	Kecamatan Barusjahe
44	Kecamatan Tigapanah
45	Kecamatan Merdeka
46	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik (Bakesbangpol)

Perkiraan Masa Manfaat untuk Setiap Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**			**ASET TETAP**	
1	**3**	**2**		**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	22	Alat Kedokteran	5
1	3	2	23	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	24	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	27	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	28	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	29	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya	10
1	3	2	30	Alat Laboratorium Lingkaungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Laser	10
1	3	2	33	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	34	Komputer	4
1	3	2	35	Peralatan Komputer	4
1	3	2	36	Alat Eksplorasi Tofografi	5
1	3	2	37	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	38	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	39	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	40	Sumur	10
1	3	2	41	Produksi	10
1	3	2	42	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	43	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	44	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	45	Alat Deteksi	5
1	3	2	46	Alat Pelindung	5
1	3	2	47	Alat SAR	2
1	3	2	48	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	49	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	50	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	51	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	52	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	53	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	54	Peralatan Olah Raga	3
1	**3**	**3**		**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	4	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	5	Tugu/Tanda Batas	50
1	**3**	**4**		**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan pada Jalan Nasional	50
1	3	4	3	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	4	Bangunan Pengembangan Rawadan Polder	25
1	3	4	5	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	6	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	12	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	14	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	15	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	17	Instalasi Gas	30
1	3	4	18	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	19	Instalasi Lain	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	**3**	**5**		**ASET TETAP LAINNYA**	
1	3	5	1	Barang Bercorak Kesenian	4
1	3	5	2	Alat Musik	4
1	3	5	3	Pahatan	4
1	3	5	4	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Benda Bersejarah	4
1	3	5	5	Tanda Penghargaan Bidang Olah raga	4
1	3	5	6	Hewan Pengaman	4
1	3	5	7	Ternak Potong	4
1	3	5	8	Ikan	4
1	3	5	9	Crustea (udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya)	4
1	3	5	10	Hewan Koleksi	4
1	3	5	11	Aset Tetap Dalam Renovasi	5
1	**3**	**6**		**ASET LAINNYA**	
				Tagihan Jangka Panjang	10
				Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10
				Aset Tak Berwujud	10
				Aset lain-lain	10

Rincian Pajak Hotel-Losmen
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Losmen Sempurna	0,00	60.000,00
2	Losmen "Tokyo"	0,00	720.000,00
3	Penginapan Permata Ivana	0,00	13.500.000,00
4	Penginapan Rumah Page	0,00	1.550.000,00
5	Losmen Shohwa	0,00	3.200.000,00
6	Bungalaw Kaliaga	0,00	2.105.000,00
7	Villa Rose	0,00	1.000.000,00
8	Penginapan "Serdika Pavilion"	0,00	700.000,00
9	Penginapan Sopo Bona	0,00	600.000,00
10	Rest House "Sapo Karo"	0,00	3.000.000,00
11	Villa Sigantang Sira	0,00	330.000,00
12	Penginapan Sapo Rumbia	0,00	1.650.000,00
13	Wisma Dieng	0,00	500.000,00
14	W Sibayak Guest House	0,00	720.000,00
15	Panorama Resto	0,00	630.000,00
16	UV Homestay & Coffe	0,00	2.050.000,00
17	Penginapan Saphota	0,00	1.400.000,00
18	Hotel Raya	0,00	2.100.000,00
19	Nachelle Homestay	0,00	950.000,00
20	Smiley Homestay	0,00	800.000,00
21	Penginapan Mawar Hitam	0,00	800.000,00
22	Ai' Rangga Homestay Syariah	0,00	500.000,00
23	Ron's Guest House	0,00	300.000,00
24	Penginapan Cantigi	0,00	450.000,00
25	Penginapan Harapan Baru	0,00	100.000,00
26	Villa Kamina	0,00	300.000,00
27	Losmen Lestari	0,00	600.000,00
28	Penginapan Mandiri	0,00	900.000,00
29	Hotel Pelindung	0,00	500.000,00
30	Alam Baru	0,00	540.000,00
31	Kala Guest House	0,00	1.050.000,00
32	Hotel Pelawi	0,00	50.000,00
33	Wisma Ingan Malem	0,00	240.000,00
34	Hotel Enasti	0,00	1.000.000,00
35	Bungalow Latersia	0,00	360.000,00
36	Bungalow Bangkit Nan Jaya	0,00	50.000,00
37	Penginapan Arihta	0,00	50.000,00
38	Penginapan Sejahtera	0,00	300.000,00
39	Penginapan BNJ	0,00	500.000,00
40	Penginapan Alam Pesona	0,00	500.000,00
41	Penginapan Tamora Sibayak	0,00	600.000,00
42	Penginapan Anugrah	0,00	250.000,00
43	Penginapan Pariban	0,00	4.800.000,00
44	Penginapan Ginting	0,00	900.000,00
45	Penginapan Mitra Sibayak	0,00	500.000,00
46	Penginapan Tanda Budget Hotel	0,00	200.000,00
47	Penginapan Karona Family	0,00	80.000,00
48	Penginapan Zeoin	0,00	1.650.000,00
49	Penginapan Nagaya	0,00	200.000,00
50	Penginapan Pink Princes	0,00	200.000,00
51	Penginapan Puncak DP2	0,00	600.000,00
52	Penginapan Giok Bukit	0,00	850.000,00
53	Penginapan Pancur Tebu	0,00	300.000,00
54	Penginapan Rake Do	0,00	300.000,00
55	Penginapan Nira Manis	0,00	100.000,00
56	Penginapan Singarimbun	0,00	200.000,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
57	Home Stay Sapo Juma	0,00	5.596.000,00
58	Villa Armina	0,00	500.000,00
59	Bungalaw Romansinasi	0,00	750.000,00
60	Anugrah Tongging Hotel	0,00	700.000,00
61	Tongging Beach Hotel	0,00	1.700.000,00
62	Penginapan Eko Residencia	0,00	600.000,00
63	Penginapan Gabe	0,00	450.000,00
64	Penginapan Liberty	0,00	100.000,00
65	Losmen Gundaling	0,00	500.000,00
66	Pondok Madu Efi	0,00	1.947.033,00
67	Penginapan Gintribu	0,00	360.000,00
Jumlah		**0,00**	**71.588.033,00**

Rincian Pajak Reklame
TA 2025 dan 2024

No	Nama Wajib Pajak	Badan Usaha	Tahun 2025	Tahun 2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Evalisa	Bali Jaya	182.500,00	91.250,00
2	Handoko Kandiawan	Bali Photo	0,00	136.875,00
3	Khiki Fitri Wahyuni	Bank BTPN	0,00	1.752.000,00
4	Tjia Tjeng Kiat	Bintang Medan Service	0,00	2.190.000,00
5	Anita Irma Tambunan	Brastagi Cottage	0,00	1.011.561,00
6	Irwan Tan	Bread Time	0,00	1.825.000,00
7	Bung Hwa	Cahaya Tani	359.297,00	205.313,00
8	Drs. Mesti Tarigan	CU Unam Berastagi	0,00	367.700,00
9	Jack Ricardo Pa	CV J&M	303.467.063,00	380.299.500,00
10	Edison Siahaan	CV Abang Adek Sejahtera	1.613.300,00	1.613.300,00
11	Lidya Purnamasari S.	CV Anaya Berkat Pratama	1.613.300,00	1.613.300,00
12	Bersihta Tarigan	CV Bersinar	1.613.300,00	1.613.300,00
13	Irma Septiarti	CV Beruang Mas Putra	13.413.750,00	8.869.500,00
14	Usman Rambe	CV Boga Amanda	4.790.625,00	2.190.000,00
15	Ari Ricardo Ginting	CV Dalongta Mart	1.613.300,00	1.613.300,00
16	Chairil	CV Dwicakrawala Utama	15.968.750,00	7.300.000,00
17	Stella Maris Br Tarigan	CV Energi Bangun Batukarang	1.613.300,00	1.613.300,00
18	Johanna	CV Evolution Advertising	6.387.500,00	3.034.063,00
19	Dr. Fadli Armanto Karo-Karo,M.Kes	CV Flora Niaga Indonesia	1.613.300,00	1.613.300,00
20	Maria	CV Garuda	1.613.300,00	1.613.300,00
21	Suyento Wijaya	CV Garuda Mas Laubaleng	1.613.300,00	1.613.300,00
22	Suyento Wijaya	CV Garuda Mas Siosar	1.613.300,00	1.613.300,00
23	Suyento Wijaya	CV Garuda Tugu Wijaya	1.613.300,00	1.613.300,00
24	Kiki Rizki Amelia	CV Ginting Jaya Singuda	1.613.300,00	1.613.300,00
25	Muthi'ullah	CV Golden Bakery & Cake Shop	7.605.118,00	8.668.750,00
26	Afheria Clara Br Sembiring	CV Gurky Makmur	1.613.300,00	1.613.300,00
27	Magdalena Br Sukatendel	CV Haga	1.613.300,00	1.613.300,00
28	Della Gladys Suryani Meliala	CV Hilari Chantika Rilla	1.613.300,00	1.613.300,00
29	Seno Imanuel Sitepu	CV Indo Saudara	1.613.300,00	1.613.300,00
30	Agung Purnomo	CV Karya Tehnik Indonesia	19.641.563,00	1.095.000,00
31	Inggriawan Suheru	CV Klika	14.218.750,00	18.250.000,00
32	Suranta Eka Putra Surbakti, SP	CV Kuda Troya Mas	3.226.600,00	3.226.600,00
33	Martin Ledanto Sinulingga	CV Mulia Maret	1.613.300,00	1.613.300,00
34	Kalam Br Purba	CV Mutiara Ringroad	1.613.300,00	1.613.300,00
35	Ir. Pintamuli Tarigan	CV Putra Bakti	1.613.300,00	1.613.300,00
36	Julius Ketaren, SE	CV Putra Jeka Bersama	1.613.300,00	1.613.300,00
37	Budi Wijaya Tarigan Sibero	CV Reka Citra Jaya	1.613.300,00	1.613.300,00
38	Dedek Perangin-Angin	CV Restu Indah Sentosa	1.613.300,00	1.613.300,00
39	Rahman Sitepu	CV Rudang Mayang	1.613.300,00	1.613.300,00
40	Ng. Lina	CV Selamat	1.613.300,00	1.613.300,00
41	Setia Putra Ginting, SH	CV Setia Putra	1.613.300,00	1.613.300,00
42	Jasmen Parningotan Simbolon	CV Simta	1.613.300,00	1.613.300,00
43	Simson Purba	CV Simulih Karaben	1.613.300,00	1.613.300,00
44	Arnold Napitupulu	CV Takaromart	3.226.600,00	3.226.600,00
45	Tiasarah Aretha Br Sitepu	CV Terang Bakti	1.613.300,00	1.613.300,00
46	Hertyoso Nursasongko	CV Tetra Niaga Indonesia	1.613.300,00	1.613.300,00
47	Muhammad Helmi Kamal Lubis	CV Tiga Mitra Karya Wisata	1.613.300,00	1.613.300,00
48	Suriyono	CV Youlanda Berkah Lestari	0,00	5.475.000,00
49	Risinta Junaidy	CV Yun Utama Nius	0,00	1.460.000,00
50	Hendra	Garuda Baru	3.193.750,00	1.460.000,00
51	William	Garuda Baru Bakery	0,00	1.314.000,00
52	Ferensus Pasaribu	Hotel Sinabung Hills Berastagi	0,00	4.380.000,00
53	Lo Peng Hong	Indo Motor	479.063,00	730.000,00
54	Tjin Jaw Jan	Japan Teknik	497.063,00	547.500,00
55	Rita	Karya Service	1.916.250,00	1.642.500,00
56	Sri Dewi	Kindo Asia Tama	0,00	1.460.000,00
57	Dr. Fedrick Tanta Purba	Klinik Pratama Rawat Jalan Mitra Keluarga	378.459,00	288.350,00
58	Andreas Hermanto Tarigan	KSU Mitra Artha Dana Mandiri	0,00	2.044.000,00
59	Edisa Putra Ginting, SKM, M.Kes	Laboratorium Klinik Anugerah	3.193.750,00	1.460.000,00
60	Kamsen Sembiring	Losmen Tokyo	845.545,00	644.225,00
61	Rizki Fachru Rahman	Momoyo - Ice Cream & Fruit Tea	0,00	1.095.000,00
62	Hansen Pannta	Mutiara Jaya	1.437.188,00	821.250,00
63	Chandra	National Electronic & Perabot	0,00	821.250,00
64	Arifin	Panglong Setia Budi	0,00	2.682.750,00
65	Dr. Syahrizal M. Poerba	Panorama Guest House & Villa	0,00	321.200,00
66	Tjin Jaw Jan	Polytron	0,00	1.095.000,00
67	Dr. Soesilawati Foead	Praktek Mandiri	934.172,00	448.950,00
68	Bambang Irmanto	PT Adira Dinamika Multi Finance	2.395.313,00	2.190.000,00
69	Neni Nuraeni Fatah	PT Aksan Penta Jaya	0,00	716.315,00
70	Firman	PT Apotek Karunia Berastagi	0,00	82.200,00
71	H. Ruslan	PT Astha Beribis Grafika	0,00	113.179.200,00
72	Julianto Stephanus Dede	PT Astra International, Tbk	0,00	2.281.250,00
73	Deden Hidayat	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	766.500,00	350.400,00
74	Andri Antoni	PT Bank Mandiri, Tbk	27.146.875,00	12.410.000,00
75	Nora Elisabeth M Siregar	PT Bank Negara Indonesia, Tbk	60.681.251,00	14.235.000,00
76	Anas Khoerunnas	PT Bank Permata, Tbk	4.145.488,00	1.895.080,00
77	Jesayas Budiman Surbakti	PT Bank Sumut, Tbk	44.872.188,00	20.717.400,00
78	Andrew Rusli	PT Berastagi Bintang Asia	28.035.616,00	21.138.282,00
79	Arbie Warahardes Ginting	PT BFI Finance Indonesia, Tbk	2.418.125,00	2.190.000,00
80	Johannes	PT Bhakti Idola Tama	0,00	7.008.000,00

No	Nama Wajib Pajak	Badan Usaha	Tahun 2025	Tahun 2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
81	Adi Junianto	PT BPR Logo Karo Asri	1.037.969,00	919.800,00
82	Budi Mt Purba	PT BPR Nusantara Bona Pasogit 15	17.548.858,00	9.198.000,00
83	Michael	PT Daya Indah Yasa	0,00	60.379.906,00
84	Nerlileng Purba	PT Eigerindo Multi Produk Industri	3.592.969,00	3.477.000,00
85	Yonanta Kusuma	PT Indomarco Prismatama	30.652.700,00	32.266.000,00
86	Simson Tambunan	PT Multi Grafindo Mandiri	9.581.250,00	4.380.000,00
87	Alex Pratama	PT Nusa Indojaya Sukses	432.753.125,00	547.500,00
88	Harry Putra Harahap	PT Pelangi Ditra Promosi	0,00	297.840.000,00
89	Indra Irawan	PT PNM	0,00	1.752.000,00
90	Oktorius Nainggolan	PT Ria Indah Mandiri	5.589.062,00	1.642.500,00
91	Hanky Bayugiri Taufan G.	PT Ruang Raya Indonesia	2.283.531,00	1.043.900,00
92	Gelora Br Ginting	PT Saymara Rumbane Adhyaksa	1.613.300,00	1.613.300,00
93	Jisman Tarigan	PT Sheniju Mulia	1.613.300,00	1.613.300,00
94	Maju Ricardo Lumbanbatu	PT Sumo Internusa Indonesia	118.696.400,00	2.098.000,00
95	Ferrial Paesha Sirait, SE, MSc	PT Tunas Jaya Energy	1.613.300,00	1.613.300,00
96	Ferrial Paesha Sirait, SE, MSc	PT Tunas Jaya Niaga	1.613.300,00	1.613.300,00
97	Febeto Johannes Hutabarat	PT Wahana Ottomitra Multiartha (PT Wom, Tbk)	5.797.296,00	1.825.000,00
98	Deni Sutiadi	PT Yakult Indonesia Persada	7.345.625,00	4.015.000,00
99	Gustiadi Prakoso	PT Zinove Investama Indonesia	1.613.300,00	1.613.300,00
100	Moch Kayat	Quality Fried Chicken	1.836.407,00	784.750,00
101	Rivan Lee	Restoran Asia Berastagi	0,00	3.285.000,00
102	A. Peng	RM Bonaris	335.344,00	255.500,00
103	Eko Aprianto	RM Cindelaras	5.256.000,00	5.840.000,00
104	Rivan Lee	RM Sehat	0,00	417.998,00
105	Atan Giman	Rumah Makan Eropah	838.359,00	91.250,00
106	Ang Jen Siu	Selera Sama	0,00	346.750,00
107	Hengky Fendy Edison	Sentral Utama	0,00	448.950,00
108	David	Setia Motor	0,00	16.060.000,00
109	Viktor Harry	Sumber Indah	0,00	1.277.500,00
110	Rivan Lee	Tapin	0,00	1.000.337,00
111	Andre Kandiawan	Toko 777	0,00	206.000,00
112	Jones Irwanto	Toko Bandung	0,00	191.625,00
113	Suanty	Toko Fanglong Jaya	0,00	127.750,00
114	Wijaya Kusuma	Toko Roti Bread One	0,00	5.748.750,00
115	Alwandy	Toko Samudera Bakery	0,00	730.000,00
116	Julyana	Toko Sehat	0,00	325.800,00
117	Robinson	Toko Sentosa	0,00	273.750,00
118	Abdullah Lathif Manjorang	UD Serasi	0,00	578.297,00
119	Apiu	Uluna Hotel	0,00	876.000,00
120	Marbun Tanuddin	Usaha Giat	6.387.500,00	2.920.000,00
121	Rihwan	Villa / Penginapan Taman Sibayak	0,00	182.500,00
122	Suparman	Warung Wajik Bahagia	0,00	730.000,00
123	Johan Kosiadi	Zonria	0,00	2.555.000,00
124	Binkasta	Bingxue	1.601.250,00	0,00
125	Kalsen Nolata Harefa	Bank Mandiri (Persero)	4.353.575,00	0,00
126	Adi Junianto	CV Garuda Wijaya	1.613.300,00	0,00
127	Roy Hermanto	CV Radityo Cipta Niaga	4.380.000,00	0,00
128	Linda Wijaya	CV Sinar Logam (Erafone)	43.574.810,00	0,00
129	Faisal Reza Lubis	CV Zaahira Anugerah Gemilang	6.860.176,00	0,00
130	Yuliana	Mixue	3.912.344,00	0,00
131	Rery Yohana Manik	PT Bank Central Asia, Tbk	4.475.242,00	0,00
132	Khiki Fitri Wahyuni	PT Bank Smbs Indonesia, Tbk	6.395.484,00	0,00
133	Denny Boy Dps Hasugian	PT Bank Tabungan Negara	12.767.500,00	0,00
134	Anita Irma Tambunan	PT Brastagi Cottage	1.327.674,00	0,00
135	Rinaldi Bernandus Barus	PT Djarum	174.698.125,00	0,00
136	Imam Santoso	PT Goodyear Indonesia, Tbk	46.149.688,00	0,00
137	Mulyono	PT Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk	30.340.625,00	0,00
138	Oktofian	PT Klik Delta Advertising	39.921.875,00	0,00
139	Mulya Dwija Wiyana	PT Midi Utama Indonesia, Tbk	43.331.204,00	0,00
140	Titin Agustina, Skm	PT Prodia Widyahusada, Tbk	1.314.000,00	0,00
141	Triana Sri Indah Maranatha S	PT SMS Finance	6.113.750,00	0,00
142	Dede Jaya Wardhana	PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	279.843.262,00	0,00
143	Alwandy	Samudra Bakery	958.125,00	0,00
144	Ferensus	Sinabung Hills Berastagi	9.581.250,00	0,00
145	Ramon Henry	Sinar Surya	2.395.313,00	0,00
146	Jem Trias Tambun	Tenun Trias Tambun	6.387.500,00	0,00
147	Sumanto Lim	Toko Setia	730.000,00	0,00
148	Eldiwan	Toko Surbakti (Dana Paint)	2.874.375,00	0,00
Jumlah			**2.016.109.754,00**	**1.193.814.127,00**

Rincian Pajak Air Tanah (PAT)
TA 2025 dan 2024

No	Nama Wajib Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PT Berastagi Cottage	24.021.636,00	28.691.508,00
2	Hotel Sibayak	30.204.516,00	31.166.628,00
3	PT PIMS	5.730.768,00	4.707.504,00
4	PT Hotel Rudang	5.246.052,00	10.587.072,00
5	Hotel Green Garden	25.911.180,00	8.658.960,00
6	Grand Mutiara Hotel	41.703.864,00	56.955.003,00
7	PT Berastagi Bintang Asia	383.380.728,00	282.407.772,00
8	PT Bukit Kubu Indah	17.079.300,00	10.811.268,00
9	Hotel Sinabung	87.703.896,00	32.653.248,00
10	Home Stay Kalang Ulu	13.542.768,00	10.788.456,00
11	RS Efarina Etaham	22.154.532,00	25.202.532,00
12	Suite Pakar Hotel	13.207.392,00	1.498.644,00
13	PT Selektani Induk Usaha	39.601.216,00	10.794.432,00
14	PT Horti Jaya Lestari	34.459.504,00	61.401.184,00
15	PT Usaha Giat	3.006.802,00	2.405.296,00
16	PT Lau Segar Mulia	50.979.200,00	48.153.880,00
17	PT BRI, Tbk	2.154.600,00	2.860.032,00
18	PT BNI, Tbk	9.110.124,00	11.156.388,00
19	PT Bank Sumut, Tbk	1.693.356,00	2.527.260,00
20	PT Bavinka SPBU Halilintar	2.920.680,00	6.352.044,00
21	PT Sora Erdilo Energi	4.379.640,00	6.467.880,00
22	PT Indojaya Agrinusa	212.323.600,00	188.711.200,00
23	PT Horti Jaya Lestari	12.533.424,00	4.825.008,00
24	PT Mahakarta Farm Sukses	12.240,00	19.584,00
25	PT Tirta Sibayakindo	1.466.216.351,00	1.528.874.374,00
26	CV Bukti Pratama	8.190.816,00	26.221.248,00
27	PT HM Sampoerna, Tbk	1.233.708,00	1.115.604,00
28	PT Mitra Tata Usaha Bersama	20.363.220,00	17.132.216,00
29	PT Agroniaga Globalindo	3.081.828,00	3.725.812,00
30	PT Niaga Tama Kencana	5.940.312,00	5.054.532,00
31	PT Tamora Stekindo	349.688.064,00	134.548.108,00
32	PT Ultra Sumatera Dairy Farm	13.679.424,00	14.245.232,00
33	Uluna Hotel	2.353.856,00	2.323.776,00
34	PT Sayur Segar Nusantara	2.325.984,00	1.023.264,00
35	PT Bibit Baru	16.243.200,00	25.450.208,00
36	PT Amanda Mitra Husada	18.799.812,00	13.888.380,00
37	PT Sabarita Perkasa Abadi	2.590.308,00	9.952.464,00
38	PT Tamora Stekindo	265.214.976,00	69.904.752,00
39	RS Mina Husada	2.561.580,00	0,00
Jumlah		**3.221.544.457,00**	**2.703.262.753,00**

Rincian Pajak Pasir dan Kerikil
TA 2025 dan 2024

No	Nama Wajib Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	CV Abigael Wigata Mandiri	8.681.695,00	7.800.337,00
2	CV Agung Perkasa	0,00	20.576.851,00
3	CV Agung Sriwijaya	203.934,00	0,00
4	CV Ameera Miqaila Salsabila	458.032,00	0,00
5	CV Amena	0,00	316.492,00
6	CV Amena	629.986,00	1.158.890,00
7	CV Angkasa Bersama	781.704,00	5.443.433,00
8	CV Annisa Graha	205.688,00	0,00
9	CV Arca Kencana	825.575,00	184.942,00
10	CV Ariel Egripa Utama	0,00	26.612.176,00
11	CV Artahsasta	0,00	874.908,00
12	CV Azka Sang Pejuang	0,00	2.037.283,00
13	CV Bangun Dongoran Persada	726.974,00	3.380.163,00
14	CV Bangun Jaya Abadi	0,00	420.278,00
15	CV Bangun Jaya Cemerlang	2.240.135,00	0,00
16	CV Barus Jaya	152.750,00	482.073,00
17	CV Barus Jaya Utama	4.801.252,00	0,00
18	CV Basita	241.792,00	5.285.986,00
19	CV Batu Garut	2.867.281,00	211.941,00
20	CV Bintang Sabungan	0,00	3.327.102,00
21	CV Brena	0,00	552.353,00
22	CV Bukit Permai	2.036.038,00	0,00
23	CV Cipta Karya Nusantara	0,00	370.574,00
24	CV Citra	2.394.704,00	35.196.908,00
25	CV Citra Karya Mandiri	3.840.771,00	1.345.581,00
26	CV Citra Perdana Nusantara	0,00	23.208.862,00
27	CV Colleague Uruk Tekky	3.030.071,00	0,00
28	CV Davin Haga	455.830,00	0,00
29	CV De Who	14.642.113,00	39.538.643,00
30	CV Doruli	3.280.225,00	0,00
31	CV Eltar Abadi	869.217,00	1.909.885,00
32	CV Eureka Lasada	0,00	212.475,00
33	CV Ewa Bintang Mas	6.222.287,00	1.972.040,00
34	CV Eya Luna	1.032.952,00	0,00
35	CV Fariz Pratama	0,00	3.209.821,00
36	CV Gading Mas	676.959,00	0,00
37	CV Gantari Bakti Konstruksi	117.189,00	0,00
38	CV Gapura Alam Persada	0,00	277.792,00
39	CV Guna Karya	0,00	26.585.394,00
40	CV Guna Utama	2.796.909,00	16.710.646,00
41	CV Gung Pantar	317.062,00	347.054,00
42	CV Gunung Hermon	215.214,00	0,00
43	CV Hagana Persada	1.057.264,00	1.422.598,00
44	CV Harapan Persada Mandiri	921.686,00	0,00
45	CV Intek Jpk	1.006.661,00	0,00
46	CV Jaya Utama Pillar Konstruksi Indonesia	0,00	226.027,00
47	CV Jegg Bintang Mas	2.685.314,00	1.423.342,00
48	CV Joresilangit	633.498,00	1.656.685,00
49	CV Jovan Mandiri	0,00	3.901.465,00
50	CV Karya Mora Mandiri	0,00	12.261.818,00
51	CV Karya Natama	0,00	3.457.772,00
52	CV Kata Hati Kita	6.578.858,00	15.827.160,00
53	CV Kata Kita	5.961.536,00	5.056.578,00
54	CV Kawar Jaya	1.219.092,00	3.151.088,00
55	CV Kokoh Arih Ersada	594.103,00	0,00
56	CV Kurwa	1.108.350,00	3.732.078,00
57	CV Lae Angkat	0,00	234.744,00
58	CV Latersia	0,00	2.244.334,00
59	CV Lotus Jaya	290.538,00	0,00
60	CV Makmur Jaya	274.932,00	34.628,00
61	CV Mubuh	0,00	15.247.962,00
62	CV Neosoft Art	837.415,00	600.485,00
63	CV Partonggo Pulo Pembaharuan	0,00	956.444,00
64	CV Paya Pitu Merga	3.562.500,00	0,00
65	CV Pegeheysha	0,00	130.732,00
66	CV Pelawi Jaya	0,00	532.923,00

No	Nama Wajib Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
67	CV Poema Djaya Utama	570.446,00	0,00
68	CV Poetra Bahagia	1.305.179,00	603.115,00
69	CV Pola Harapenta	439.138,00	2.614.304,00
70	CV Pratama Agung Perkasa	5.185.236,00	76.988.379,00
71	CV Prima Kata Kita	4.896.861,00	0,00
72	CV Purtan Perkasa	0,00	193.176,00
73	CV Putra Jaya	0,00	5.627.230,00
74	CV Qorry	1.088.436,00	0,00
75	CV Requel Hfs	22.988,00	0,00
76	CV Rheagina Garneta Tamsar	8.385.000,00	0,00
77	CV Ronatama	36.383,00	0,00
78	CV Roritheva	50.060,00	246.808,00
79	CV Ruma Juluan Mandiri	2.250.000,00	0,00
80	CV S. Pelawi	0,00	77.015,00
81	CV Sanop Kreasi	0,00	4.531.455,00
82	CV Shepeta	0,00	868.067,00
83	CV Sumber Mandiri	517.388,00	903.973,00
84	CV Surya Sejahtera Perkasa	18.381,00	0,00
85	CV Tangga Batu	0,00	4.180.084,00
86	CV Tarigan Tua	416.013,00	0,00
87	CV Tepayana	2.645.328,00	0,00
88	CV Texas Jaya	381.779,00	4.693.602,00
89	CV Titian Berkah	160.916,00	0,00
90	CV Torgan Balalaika	0,00	290.438,00
91	CV Trio	7.205.214,00	4.076.763,00
92	CV Tugan Silencang	0,00	316.399,00
93	CV Wirasena Mandiri	406.320,00	2.643.667,00
94	CV Zidane Wijaya Sakti	177.732,00	142.497,00
95	Ewa Bintang Mas	0,00	1.852.551,00
96	Jengki Munthe	0,00	6.750.000,00
97	Kata Hati Kita	0,00	158.756,00
98	Kata Kita	0,00	136.670,00
99	PT Ariel Egripa Utama	0,00	1.494.514,00
100	PT Batu Garut	0,00	76.172,00
101	PT Dameri Dyandra Utama	375.234,00	0,00
102	PT Gagah Perkasa Indojaya	0,00	1.067.236,00
103	PT Jaya Utama Pilar Konstruksi Indonesia	0,00	474.377,00
104	PT Tunggal Karunia Perkasa	0,00	4.819.347,00
105	Torgan Balalaika	0,00	52.423,00
106	Tps Ksm Abadi	638.672,00	0,00
107	Tps Ksm Arih Ersada	0,00	203.858,00
108	Tps Ksm Buluhnaman Simalem	611.253,00	0,00
109	Tps Ksm Bunga Ncole	625.382,00	0,00
110	Tps Ksm Ersuli	638.672,00	0,00
111	Tps Ksm Jabijabi	630.936,00	0,00
112	Tps Ksm Jumpa Litna	0,00	228.525,00
113	Tps Ksm Kutasima	627.781,00	0,00
114	Tps Ksm La Nogan	0,00	1.504.705,00
115	Tps Ksm Lau Angkat	0,00	1.249.105,00
116	Tps Ksm Lau Piale	624.038,00	0,00
117	Tps Ksm Makmur	638.672,00	0,00
118	Tps Ksm Mediate	624.307,00	0,00
119	Tps Ksm Padang Sambo	0,00	1.349.477,00
120	Tps Ksm Sada Arih	639.716,00	0,00
121	Tps Ksm Sangapta Ras	0,00	953.662,00
122	Tps Ksm Simarinte	629.563,00	0,00
Jumlah		**134.939.110,00**	**433.018.096,00**

Pajak MBLB Lainnya
TA 2025 dan 2024

No	Nama Wajib Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	CV Abigael Wigata Mandiri	1.002.240,00	28.424.088,00
2	CV Agung Perkasa	0,00	16.224.656,00
3	CV Agung Sriwijaya	41.565,00	0,00
4	CV Ameera Miqaila Salsabila	552.418,00	0,00
5	CV Amena	1.541.617,00	780.854,00
6	CV Amena	0,00	10.345.856,00
7	CV Angkasa Bersama	669.867,00	4.017.896,00
8	CV Annisa Graha	174.096,00	0,00
9	CV Arca Kencana	0,00	720.864,00
10	CV Ariel Egripa Utama	0,00	101.352.423,00
11	CV Artahsasta	0,00	238.464,00
12	CV Azka Sang Pejuang	0,00	1.732.474,00
13	CV Bangun Dongoran Persada	1.064.203,00	3.123.399,00
14	CV Bangun Jaya Abadi	0,00	307.116,00
15	CV Bangun Jaya Cemerlang	10.657.680,00	0,00
16	CV Barus Jaya	8.640.000,00	130.160,00
17	CV Barus Jaya Utama	5.179.581,00	0,00
18	CV Basita	298.404,00	19.480.470,00
19	CV Batu Garut	1.447.834,00	0,00
20	CV Bintang Sabungan	0,00	18.299.404,00
21	CV Brena	0,00	431.424,00
22	CV Bukit Permai	11.649.608,00	0,00
23	CV Cipta Karya Nusantara	0,00	6.417.111,00
24	CV Citra	3.686.077,00	52.160.501,00
25	CV Citra Karya Mandiri	8.319.763,00	3.340.695,00
26	CV Citra Perdana Nusantara	0,00	24.762.819,00
27	CV Colleague Uruk Tekky	163.800,00	0,00
28	CV Davin Haga	420.826,00	0,00
29	CV De Who	41.181.622,00	56.010.134,00
30	CV Doruli	9.891.960,00	0,00
31	CV Eltar Abadi	4.535.410,00	3.448.630,00
32	CV Eureka Lasada	0,00	132.742,00
33	CV Ewa Bintang Mas	6.732.659,00	3.663.353,00
34	CV Eya Luna	907.546,00	0,00
35	CV Fariz Pratama	0,00	16.329.543,00
36	CV Gading Mas	1.503.830,00	0,00
37	CV Gapura Alam Persada	0,00	435.946,00
38	CV Guna Karya	0,00	10.611.196,00
39	CV Guna Utama	5.474.366,00	12.548.097,00
40	CV Gung Pantar	380.534,00	189.432,00
41	CV Gunung Hermon	350.093,00	0,00
42	CV Hagana Persada	1.240.243,00	394.086,00
43	CV Harapan Persada Mandiri	4.414.003,00	0,00
44	CV Intek Jpk	4.033.843,00	0,00
45	CV Jaya Utama Pillar Konstruksi Indonesia	0,00	200.088,00
46	CV Jegg Bintang Mas	13.972.923,00	819.159,00
47	CV Joresilangit	928.036,00	4.048.128,00
48	CV Jovan Mandiri	0,00	23.011.563,00
49	CV Karo Persada Abadi	36.000.000,00	0,00
50	CV Karya Mora Mandiri	0,00	88.795.162,00
51	CV Karya Natama	0,00	5.642.497,00
52	CV Kata Hati Kita	8.518.871,00	33.781.888,00
53	CV Kata Kita	11.486.381,00	6.527.669,00
54	CV Kawar Jaya	278.784,00	6.257.800,00
55	CV Kokoh Arih Ersada	748.889,00	0,00
56	CV Kurwa	206.892,00	5.192.833,00
57	CV Lae Angkat	0,00	756.360,00
58	CV Latersia	0,00	2.691.800,00
59	CV Lotus Jaya	418.349,00	0,00
60	CV Makmur Jaya	313.128,00	0,00
61	CV Mubuh	0,00	14.051.421,00

No	Nama Wajib Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
62	CV Neosoft Art	1.290.648,00	589.057,00
63	CV Partonggo Pulo Pembaharuan	0,00	1.240.387,00
64	CV Pegeheysha	0,00	161.143,00
65	CV Pelawi Jaya	0,00	557.619,00
66	CV Poema Djaya Utama	1.305.257,00	0,00
67	CV Poetra Bahagia	350.093,00	1.796.224,00
68	CV Pola Harapenta	358.164,00	0,00
69	CV Pratama Agung Perkasa	17.692.750,00	20.087.981,00
70	CV Prima Kata Kita	10.376.007,00	0,00
71	CV Prima Mineral Utama	23.400.000,00	0,00
72	CV Purtan Perkasa	0,00	208.449,00
73	CV Putra Jaya	0,00	10.283.343,00
74	CV Qorry	168.624,00	0,00
75	CV Roritheva	0,00	385.723,00
76	CV Sanop Kreasi	0,00	2.815.057,00
77	CV Shepeta	0,00	508.896,00
78	CV Sumber Mandiri	661.320,00	496.985,00
79	CV Tangga Batu	0,00	33.668.867,00
80	CV Tarigan Tua	456.732,00	0,00
81	CV Tepayana	1.133.700,00	0,00
82	CV Texas Jaya	319.407,00	2.943.360,00
83	CV Torgan Balalaika	0,00	248.148,00
84	CV Trio	5.770.002,00	7.074.883,00
85	CV Tugan Silencang	0,00	204.091,00
86	CV Wirasena Mandiri	1.615.334,00	4.286.880,00
87	CV Zidane Wijaya Sakti	156.564,00	100.094,00
88	Ewa Bintang Mas	0,00	3.827.502,00
89	Kata Hati Kita	0,00	88.560,00
90	Kata Kita	0,00	175.392,00
91	Koperasi Teger Genting Mulia	14.100.000,00	0,00
92	PT Ariel Egripa Utama	0,00	1.844.809,00
93	PT Batu Garut	0,00	172.282,00
94	PT Dameri Dyandra Utama	360.079,00	0,00
95	PT Gagah Perkasa Indojaya	0,00	7.406.996,00
96	PT Jaya Utama Pilar Konstruksi Indonesia	0,00	658.368,00
97	PT Tunggal Karunia Perkasa	0,00	12.118.904,00
98	Tps Ksm Arih Ersada	0,00	14.184,00
99	Tps Ksm Jumpa Litna	0,00	68.328,00
100	Tps Ksm Lau Angkat	0,00	255.600,00
101	Tps Ksm Padang Sambo	0,00	267.984,00
102	Tps Ksm Sangapta Ras	0,00	187.488,00
Jumlah		**288.542.622,00**	**702.573.785,00**

Rincian PBJT Hotel-Losmen
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Losmen Sempurna	360.000,00	0,00
2	Losmen "Tokyo"	720.000,00	0,00
3	Penginapan Permata Ivana	9.000.000,00	0,00
4	Penginapan Rumah Page	900.000,00	0,00
5	Losmen Shohwa	2.000.000,00	0,00
6	Bungalaw Kaliaga	1.200.000,00	0,00
7	Wisma Singgasana	2.652.000,00	0,00
8	Villa Rose	1.200.000,00	0,00
9	Penginapan "Serdika Pavilion"	800.000,00	0,00
10	Rest House "Sapo Karo"	3.600.000,00	0,00
11	Homestay KAESA	550.000,00	0,00
12	Villa Sigantang Sira	180.000,00	0,00
13	Penginapan Sapo Rumbia	1.600.000,00	0,00
14	Wisma Dieng	700.000,00	0,00
15	W. Sibayak Guest House	780.000,00	0,00
16	Panorama Resto	830.000,00	0,00
17	UV Homestay & Coffe	900.000,00	0,00
18	Hotel Raya	3.450.000,00	0,00
19	Nachelle Homestay	350.000,00	0,00
20	Penginapan Mawar Hitam	1.800.000,00	0,00
21	Ai'Rangga Homestay Syariah	1.100.000,00	0,00
22	Ron's Guest House	390.000,00	0,00
23	Penginapan Cantigi	600.000,00	0,00
24	Penginapan Harapan Baru	500.000,00	0,00
25	Villa Kamina	1.200.000,00	0,00
26	Penginapan Red Dorz	930.000,00	0,00
27	PenginapanTigan homestay	611.000,00	0,00
28	M2 Home Stay	961.500,00	0,00
29	Berastagi Mountain View	1.000.000,00	0,00
30	Ulina Homestay	800.000,00	0,00
31	Penginapan Namesiro-E	100.000,00	0,00
32	Penginapan Ulu Lau	300.000,00	0,00
33	Karyawan Sinulingga	50.000,00	0,00
34	Penginapan Ring Pandiata	120.000,00	0,00
35	Losmen Lestari	600.000,00	0,00
36	Penginapan Mandiri	1.400.000,00	0,00
37	Hotel Pelindung	800.000,00	0,00
38	Alam Baru	720.000,00	0,00
39	Kala Guest House	2.250.000,00	0,00
40	Hotel Pelawi	500.000,00	0,00
41	Wisma Ingan Malem	300.000,00	0,00
42	Hotel Enasti	1.100.000,00	0,00
43	Bungalow Latersia	360.000,00	0,00
44	Bungalow Bangkit Nan Jaya	150.000,00	0,00
45	Penginapan Arihta	1.000.000,00	0,00
46	Penginapan Sejahtera	270.000,00	0,00
47	Penginapan BNJ	300.000,00	0,00
48	Losmen Kalincayo	1.200.000,00	0,00
49	Penginapan Alam Pesona	1.200.000,00	0,00
50	Losmen Pariama	1.800.000,00	0,00
51	Penginapan Tamora Sibayak	1.600.000,00	0,00
52	Penginapan Lamegogo	2.050.000,00	0,00
53	Penginapan Makabrena	900.000,00	0,00
54	Penginapan Rindu Alam	2.800.000,00	0,00
55	Penginapan Anugrah	950.000,00	0,00
56	Penginapan Green Suta	1.000.000,00	0,00
57	Penginapan Pariban	22.900.000,00	0,00
58	Penginapan Ginting	1.650.000,00	0,00
59	Penginapan Mitra Sibayak	2.900.000,00	0,00
60	Penginapan Tanda Budget Hotel	50.000,00	0,00
61	Penginapan Karona Family	1.200.000,00	0,00
62	Penginapan ZEOIN	1.800.000,00	0,00
63	Penginapan Nagaya	600.000,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
64	Penginapan Pink Princes	450.000,00	0,00
65	Penginapan Puncak DP2	1.250.000,00	0,00
66	Penginapan Giok Bukit	840.000,00	0,00
67	Penginapan Pancur Tebu	1.000.000,00	0,00
68	Penginapan Rake Do	1.200.000,00	0,00
69	Penginapan Nira Manis	300.000,00	0,00
70	Penginapan Singarimbun	880.000,00	0,00
71	Penginapan Ulu Lau	4.850.000,00	0,00
72	Penginapan Bunga Pancur	1.500.000,00	0,00
73	Penginapan Daun Paris	9.000.000,00	0,00
74	Penginapan Bersama Sibayak	650.000,00	0,00
75	Penginapan Sejoli	450.000,00	0,00
76	Penginapan Rudang Sibayak	50.000,00	0,00
77	Penginapan Biring Yora	750.000,00	0,00
78	Penginapan LAU GARA	880.000,00	0,00
79	Villa Prenggan	1.220.000,00	0,00
80	Penginapan Berkah Sibayak	200.000,00	0,00
81	Penginapan Imanuel	440.000,00	0,00
82	Penginapan Gindo	300.000,00	0,00
83	Penginapan Alam Sibayak	800.000,00	0,00
84	Home Stay Sapo Juma	9.836.250,00	0,00
85	Penginapan Sitopsi	400.000,00	0,00
86	Bungalaw Romansinasi	825.000,00	0,00
87	Anugrah Tongging Hotel	700.000,00	0,00
88	Tongging Beach Hotel	2.400.000,00	0,00
89	Penginapan Eko Residencia	1.400.000,00	0,00
90	Penginapan Gabe	4.700.000,00	0,00
91	Penginapan Liberty	1.550.000,00	0,00
92	Penginapan Juma Bakal	3.700.000,00	0,00
93	Loken Resort	8.036.355,00	0,00
94	Vhi - Vhi Resto	400.000,00	0,00
95	Penginapan FAMILY	600.000,00	0,00
96	Gunari Hotel	200.000,00	0,00
97	Losmen Gundaling	500.000,00	0,00
98	Pondok Madu Efi	102.500,00	0,00
99	Penginapan Gintribu	360.000,00	0,00
100	Villa Bali Dolat Indah	13.950.000,00	0,00
101	Dear Rose Villa	11.100.000,00	0,00
102	Jeri Sembiring	1.800.000,00	0,00
103	Elisa Saparingga	600.000,00	0,00
104	Dibrena Anggita C	75.000,00	0,00
Jumlah		**186.829.605,00**	**0,00**

Rincian Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berdasarkan Unit Pelayanan
TA 2025 dan 2024

No	Unit Pelayanan	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Badan Pendapatan Sumatera Utara UPTD Pependa	675.475.061,00	0,00
2	Aek Kanopan	23.450.775,00	0,00
3	Balige	7.136.823,00	0,00
4	Binjai	421.214.782,00	0,00
5	Dolok Sanggul	15.265.333,00	0,00
6	Gunung Sitoli	4.853.816,00	0,00
7	Gunumg Tua	6.826.111,00	0,00
8	Kabanjahe	11.864.357.937,00	0,00
9	Kisaran	55.287.954,00	0,00
10	Kota Pinang	32.984.579,00	0,00
11	Lima Puluh	29.818.538,00	0,00
12	Lubuk Pakam	81.413.268,00	0,00
13	Medan Selatan	336.811.144,00	0,00
14	Medan Utara	2.255.639.174,00	0,00
15	Natal	7.008.590,00	0,00
16	Padang Sidempuan Kota	15.710.315,00	0,00
17	Pandan	11.133.819,00	0,00
18	Pangkalan Brandan	53.428.961,00	0,00
19	Pangururan	15.113.593,00	0,00
20	Pematang Siantar	500.569.494,00	0,00
21	Penyabungan	5.511.573,00	0,00
22	Rantau Prapat	35.370.072,00	0,00
23	Salak	2.335.312,00	0,00
24	Sai Rampah	35.124.342,00	0,00
25	Sibolga	5.340.223,00	0,00
26	Sibuhuan	4.303.698,00	0,00
27	Sidikalang	51.704.477,00	0,00
28	Simalungun	514.226.692,00	0,00
29	Sipirok	5.599.528,00	0,00
30	Stabat	102.684.451,00	0,00
31	Tanjung Balai	25.385.795,00	0,00
32	Tarutung	14.679.922,00	0,00
33	Tebing Tinggi	35.227.368,00	0,00
34	Teluk Dalam	3.455.051,00	0,00
Jumlah		**17.254.448.571,00**	**0,00**

Rincian Belanja Barang Pakai Habis
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	777.592.040,00	702.635.000,00	90,36	125.633.700,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	36.944.400,00	36.896.400,00	99,87	24.141.000,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.168.202.925,00	4.208.265.095,00	81,43	4.902.730.283,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	43.829.809,00	43.114.000,00	98,37	40.010.000,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	258.396.781,00	207.373.760,00	80,25	222.702.534,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	6.525.000,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	12.957.600,00	12.784.050,00	98,66	11.642.400,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	313.591.180,00	296.355.190,00	94,50	98.518.282,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.056.690.721,00	3.876.762.910,00	54,94	3.159.332.056,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	99.988.579,00	99.898.682,00	99,91	30.579.416,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	2.144.000,00	544.000,00	25,37	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	104.210.954,00	95.793.653,00	91,92	7.088.600,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	831.340.620,00	474.893.018,00	57,12	586.686.000,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.647.236.098,00	1.529.616.973,00	92,86	2.066.872.851,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.111.820.520,00	1.017.218.718,00	91,49	1.264.328.838,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.592.441.547,00	3.916.856.537,00	85,29	4.010.678.640,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	110.895.730,00	105.228.000,00	94,89	135.302.100,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.220.713.369,00	1.119.810.396,00	91,73	1.428.799.654,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	553.735.572,40	526.065.554,00	95,00	555.301.844,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	858.325.851,14	845.785.529,00	98,54	1.071.313.236,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	195.511.111,00	158.666.158,00	81,15	93.387.200,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	475.799.973,00	449.518.987,00	94,48	669.878.050,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	486.770.080,00	460.490.000,00	94,60	152.820.040,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.771.826.719,00	3.627.094.981,00	96,16	4.169.389.057,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.398.185.047,00	7.002.849.878,00	94,66	3.978.937.486,00
27	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	86.054.366,00	51.293.471,00	59,61	340.539.981,00
28	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21.024.497.266,00	19.018.280.878,00	90,46	10.200.891.943,00
29	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.983.446.998,00	4.866.301.998,00	97,65	18.963.699.238,00
30	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	277.411.826,00	252.075.007,00	90,87	41.234.960,00
31	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	29.632.911,00	26.791.800,00	90,41	7.237.900,00
32	Belanja Natura dan Pakan-Natura	36.755.862,00	35.347.538,00	96,17	0,00
33	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	202.077.110,00	163.285.723,00	80,80	136.999.800,00
34	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.934.635.188,00	11.415.767.477,00	76,44	14.091.548.451,00
35	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.653.362.852,00	2.526.958.468,00	95,24	959.595.600,00
36	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	170.998.000,00	170.996.000,00	100,00	397.548.000,00
37	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	27.500.000,00	27.499.981,00	100,00	60.000.000,00
38	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	866.448.000,00	841.467.000,00	97,12	1.515.757.000,00
39	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	104.000.000,00	103.541.600,00	99,56	0,00
40	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	352.000.000,00	286.999.957,00	81,53	302.000.000,00
41	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	118.492.000,00
42	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.830.084.657,00	1.756.249.037,00	95,97	111.234.000,00
43	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	286.876.284,00	272.569.000,00	95,01	333.933.750,00
44	Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	24.480.000,00
45	Belanja Pakaian Batik Tradisional	180.180.000,00	176.120.000,00	97,75	147.000.000,00
46	Belanja Pakaian Olahraga	173.462.280,00	163.282.000,00	94,13	431.077.840,00
Jumlah		**85.351.574.826,54**	**72.972.344.404,00**	**85,50**	**76.995.868.730,00**

Rincian Belanja Jasa Kantor
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	204.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.802.352.892,00	2.860.219.700,00	75,22	2.922.031.000,00
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.885.925.000,00	2.319.480.000,00	80,37	2.163.660.000,00
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	126.100.000,00	124.270.000,00	98,55	42.100.000,00
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.879.452.000,00	1.187.232.000,00	63,17	856.855.000,00
6	Honorarium Rohaniwan	15.400.000,00	10.400.000,00	67,53	3.600.000,00
7	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	204.400.000,00	113.400.000,00	55,48	52.000.000,00
8	Honorarium Penyelenggara Ujian	45.320.000,00	22.320.000,00	49,25	6.355.000,00
9	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	13.000.000,00
10	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.124.800.000,00	925.400.000,00	82,27	999.025.000,00
11	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.424.900.000,00	1.113.900.000,00	78,17	1.086.100.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.323.600.000,00	85.200.000,00	6,44	292.695.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	26.615.257.621,00	33.542.523.775,00	126,03	33.867.119.914,00
14	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	272.628.000,00	260.463.699,00	95,54	123.648.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.839.884.110,00	1.712.443.518,00	93,07	1.513.826.400,00
16	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.097.785.000,00	4.059.385.000,00	99,06	4.898.080.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	681.892.000,00	659.520.000,00	96,72	0,00
18	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	199.840.000,00	192.775.000,00	96,46	221.980.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	422.319.000,00	409.624.000,00	96,99	251.640.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	184.500.000,00	155.900.000,00	84,50	174.696.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	131.560.000,00	123.970.000,00	94,23	151.800.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	396.613.082,00	196.700.000,00	49,59	215.177.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.263.075.000,00	1.039.910.000,00	82,33	1.259.165.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.621.745.000,00	3.326.950.000,00	91,86	4.132.705.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.188.496.000,00	5.114.854.250,00	98,58	4.964.159.500,00
26	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.735.692.780,00	3.326.305.532,00	89,04	889.858.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.092.236.300,00	6.857.158.400,00	96,69	6.578.630.740,00
28	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.064.185.000,00	1.006.455.000,00	94,58	1.116.770.000,00
29	Belanja Jasa Tenaga Supir	999.905.000,00	969.175.000,00	96,93	1.121.465.000,00
30	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	153.050.000,00	153.050.000,00	100,00	155.580.000,00
31	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	126.038.440,00	124.479.000,00	98,76	143.182.000,00
32	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	165.960.000,00	153.960.000,00	92,77	242.420.000,00
33	Belanja Jasa Tata Rias	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.385.360.000,00	1.245.910.000,00	89,93	1.287.160.000,00
35	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	150.000.000,00	149.550.000,00	99,70	5.600.000,00
36	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	30.000.000,00
37	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	352.147.100,00	352.125.000,00	99,99	315.590.000,00
38	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	19.966.500,00	19.966.500,00	100,00	0,00
39	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	388.801.800,00	381.446.839,00	98,11	199.250.000,00
40	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	82.300.000,00
41	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	14.679.089,00	36,70	0,00
42	Belanja Jasa Kalibrasi	84.432.000,00	62.322.000,00	73,81	29.352.000,00
43	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.938.705.090,60	6.663.912.450,00	96,04	7.086.560.773,00
44	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	247.080.000,00	178.000.000,00	72,04	55.000.000,00
45	Belanja Tagihan Telepon	136.213.010,00	133.030.008,00	97,66	12.007.224,00
46	Belanja Tagihan Air	165.163.380,00	106.630.224,00	64,56	91.259.307,00
47	Belanja Tagihan Listrik	1.934.661.971,00	1.623.158.843,00	83,90	12.201.603.155,00
48	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	168.246.906,00	146.539.000,00	87,10	144.233.000,00
49	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.761.371.890,00	2.523.117.743,00	91,37	2.649.085.896,00
50	Belanja Paket/Pengiriman	111.111.800,00	50.477.100,00	45,43	13.631.600,00
51	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	595.769.200,00	418.932.052,00	70,32	181.516.244,00
52	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	10.800.000.000,00	10.591.480.248,00	98,07	0,00
53	Belanja Lembur	636.006.610,00	636.000.000,00	100,00	0,00
54	Belanja Medical Check Up	240.000.000,00	192.000.000,00	80,00	90.000.000,00
55	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.478.432.759,00	5.316.770.613,00	97,05	0,00
56	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	937.704.520,00	762.074.000,00	81,27	0,00
57	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	90.560.000,00	90.560.000,00	100,00	0,00
58	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	790.290.000,00	786.620.000,00	99,54	0,00
59	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	172.495.000,00	163.640.000,00	94,87	0,00
60	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	578.399.280,00	564.134.280,00	97,53	0,00
61	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	199.820.000,00	193.495.000,00	96,83	0,00
62	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	472.540.000,00	440.280.000,00	93,17	0,00
	Jumlah	**107.214.491.041,60**	**106.000.774.863,00**	**98,87**	**94.933.472.753,00**

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bahan Kimia/Reagen/BHP untuk Kebutuhan Laboratorium dan UTD	400.000.000,00	410.590.752,00	102,65	460.597.893,00
2	Belanja Obat-obatan dan BMHP	5.456.332.456,00	5.821.585.807,00	106,69	5.854.164.482,00
3	Belanja Pengganti Pengelolaan Darah	87.120.000,00	74.520.000,00	85,54	77.400.000,00
4	Belanja Logistik untuk Plastik Obat, Styrofoam, Wrapping dan Bahan Pembersih	120.000.000,00	109.776.463,00	91,48	105.474.305,00
5	Belanja Bahan Makanan Pasien	638.000.000,00	706.065.652,00	110,67	596.191.880,00
6	Belanja Susu Pasien	38.500.000,00	24.081.000,00	62,55	32.757.000,00
7	Belanja Pengisian Tabung LPG	55.000.000,00	52.164.000,00	94,84	51.695.000,00
8	Belanja Makan dan Minum Rapat	110.000.000,00	114.590.000,00	104,17	207.508.000,00
9	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	107.273.133,00	107,27	56.028.135,00
10	Belanja Cetakan Form, Spanduk, dan Cetakan Lainnya	100.000.000,00	150.525.624,00	150,53	78.074.239,00
11	Belanja Fotocopy	5.000.000,00	3.025.250,00	60,51	10.034.300,00
12	Belanja Alat-alat dan Komponen Listrik	50.000.000,00	29.102.019,00	58,20	80.721.272,00
13	Belanja Alat-alat Rumah Tangga	20.000.000,00	16.090.809,00	80,45	20.082.133,00
14	Belanja Perlengkapan Pendukung Kantor	30.000.000,00	25.074.250,00	83,58	6.629.000,00
15	Belanja Perlengkapan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan	50.000.000,00	28.462.953,00	56,93	11.937.680,00
16	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan	30.000.000,00	10.140.059,00	33,80	32.786.025,00
17	Belanja Surat Kabar dan Majalah	12.000.000,00	10.116.500,00	84,30	8.357.000,00
18	Belanja Pengiriman Berkas / Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Bahan Bakar Minyak Ambulance/Genset	50.000.000,00	28.350.108,00	56,70	93.710.000,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah	50.000.000,00	70.880.883,00	141,76	220.612.326,00
21	Belanja Sertifikasi dan Pelatihan Pegawai	50.000.000,00	36.825.000,00	73,65	159.744.398,00
22	Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk Jasa Audit LK	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00	17.945.000,00
23	Belanja Pemeriksaan Kualitas Air, Udara dan Mikroorganisme di Lingkungan RSUD	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pelayanan Kesehatan Lainnya-Operasi Katarak	528.000.000,00	693.000.000,00	131,25	375.100.000,00
25	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Diagnostik Lainnya	100.000.000,00	104.284.032,00	104,28	20.593.183,00
26	Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk Jaringan Internet di RS	0,00	0,00	0,00	10.206.480,00
27	Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk Jasa Pengelolaan Limbah Medis	180.000.000,00	133.146.936,00	73,97	106.635.578,00
28	Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk Jasa Keamanan di Rumah Sakit	470.000.000,00	391.325.145,00	83,26	330.916.138,00
29	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor di Rumah Sakit	150.000.000,00	50.739.184,00	33,83	52.382.837,00
30	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	300.000.000,00	9.435.000,00	3,15	408.150.330,00
33	Belanja Kaliberasi Alat Kesehatan	50.000.000,00	56.014.000,00	112,03	43.180.000,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya di Rumah Sakit	30.000.000,00	9.504.375,00	31,68	94.064.550,00
35	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Ambulance)	38.000.000,00	30.021.563,00	79,00	28.205.337,00
36	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air	45.000.000,00	37.510.657,00	83,36	43.660.735,00
37	Belanja Pemeliharaan Komputer, Personal Komputer dan Printer	35.000.000,00	8.945.000,00	25,56	35.708.191,00
38	Belanja Maintenance/Pemeliharaan SIMRS	137.964.120,00	197.091.600,00	142,86	136.379.040,00
39	Belanja Sewa Lahan RSUD Kab. Karo/Perpindahan Barang	0,00	0,00	0,00	246.666.666,00
40	Belanja Retribusi Iuran Sampah	1.800.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
41	Tunggakan Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.039.650.510,00	5.032.102.635,00	99,85	1.594.760.073,00
42	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (Ambulance, Kendaraan Dinas Operasional, dan Lainnya)	11.200.000,00	9.200.000,00	82,14	0,00
43	Belanja sewa ambulance	2.500.000,00	2.121.500,00	84,86	0,00
Jumlah		**14.637.067.086,00**	**14.636.181.889,00**	**99,99**	**11.710.499.206,00**

Lampiran 18

Rincian Kas Dana Kapitasi Pada FKTP
Tahun 2025

No.	Puskesmas	Saldo Awal	Pendapatan	Realisasi Belanja			Total Realisasi Belanja	Saldo Akhir
				Belanja Pegawai/Jasa (Rp)	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Belanja Modal (Rp)		
1	UPTD Kec. Mardingding	18.874,00	1.049.664.780,00	629.798.868,00	399.009.606,00	20.790.000,00	1.049.598.474,00	85.180,00
2	UPTD Kec. Lau Baleng	141.352,00	848.294.790,00	508.976.873,00	337.802.308,00	1.560.000,00	848.339.181,00	96.961,00
3	UPTD Kec. Tiga Binanga	1.531,00	1.224.888.618,00	734.938.956,00	446.189.416,00	43.760.902,00	1.224.889.274,00	875,00
4	UPTD Kec. Juhar	218.340,00	943.364.580,00	565.231.776,00	338.324.555,00	39.945.000,00	943.501.331,00	81.589,00
5	UPTD Kec. Munte	113.128,00	922.121.806,00	553.273.084,00	364.061.494,00	4.860.000,00	922.194.578,00	40.356,00
6	UPTD Kec. Kutabuluh	10.707,00	611.987.849,00	367.642.203,00	219.551.236,00	24.748.810,00	611.942.249,00	56.307,00
7	UPTD Kec. Payung	25.224,00	664.527.419,00	380.095.100,00	280.743.397,00	3.550.000,00	664.388.497,00	164.146,00
8	UPTD Kec. Tiganderket	233.011,00	753.235.478,00	452.179.053,00	279.726.551,00	21.292.500,00	753.198.104,00	270.385,00
9	UPTD Kec. Simpang Empat	425.176,00	1.175.417.630,00	705.250.580,00	447.166.731,00	23.400.000,00	1.175.817.311,00	25.495,00
10	UPTD Kec. Naman Teran	608,00	824.000.459,00	494.237.076,00	308.586.398,00	21.126.500,00	823.949.974,00	51.093,00
11	UPTD Kec. Merdeka	19.113,00	628.541.731,00	377.125.038,00	198.706.560,00	52.718.071,00	628.549.669,00	11.175,00
12	UPTD Kec. Kabanjahe	745.257,00	2.093.475.027,00	1.256.365.374,00	726.285.495,00	22.824.726,00	2.005.475.595,00	88.744.689,00
13	UPTD Kec. Berastagi	239.762,00	1.468.055.972,00	881.079.580,00	555.081.075,00	42.120.992,00	1.478.281.647,00	(9.985.913,00)
14	UPTD Korpri Kec. Berastagi	123,00	339.594.750,00	203.713.098,00	119.104.897,00	6.650.000,00	329.467.995,00	10.126.878,00
15	UPTD Kec. Tigapanah	1.490.944,00	1.525.741.795,00	920.714.494,00	538.141.872,00	68.230.936,00	1.527.087.302,00	145.437,00
16	UPTD Singa Kec. Tigapanah	58.514,00	429.283.022,00	257.563.617,00	152.275.575,00	19.420.000,00	429.259.192,00	82.344,00
17	UPTD Kec. Dolat Rayat	7.856,00	416.855.266,00	250.116.550,00	152.505.100,00	14.240.000,00	416.861.650,00	1.472,00
18	UPTD Kec. Merek	12.759,00	1.265.357.937,00	759.214.766,00	453.965.588,00	52.130.000,00	1.265.310.354,00	60.342,00
19	UPTD Kec. Barusjahe	67.826,00	1.092.729.361,00	599.302.378,00	477.754.900,00	15.630.000,00	1.092.687.278,00	109.909,00
	Total	**3.830.105,00**	**18.277.138.270,00**	**10.896.818.464,00**	**6.794.982.754,00**	**498.998.437,00**	**18.190.799.655,00**	**90.168.720,00**

Lampiran 19

Rincian Kas Lainnya
TA 2025

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
	Rumah Sakit Umum Daerah				
1	Kas Lainnya	1.200,00	3.307.434,00	1.200,00	3.307.434,00
	Dinas Pendidikan				
2	Kas Lainnya	0,00	2.794.900,00	0,00	2.794.900,00
	JUMLAH	**1.200,00**	**6.102.334,00**	**1.200,00**	**6.102.334,00**

Lampiran 20

Rincian Kas Dana BOSP
Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Awal BOSP	Koreksi Saldo Awal BOP PAUD	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah						Total Mutasi Tambah	Mutasi Kurang											Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir BOSP
					Uraian	Penerimaan BOS Reguler	Uraian	Penerimaan BOS Kinerja	Uraian	Penerimaan BOS PAUD		Uraian	Belanja BOSP Reguler	Uraian	Belanja BOSP Kinerja	Uraian	Belanja BOP PAUD	Uraian	Belanja Hibah Dana BOS	SIPD	Uraian	Setor ke RKUD (Sekolah Tutup)		
1	Realisasi BOSP 2025	174.057.064,00	0,00	174.057.064,00	Tahap I SD SMP Negeri	22.213.866.200,00	Kinerja SD Negeri	1.012.500.000,00	BOP PAUD Reguler	2.850.538.380,00		Belanja Barjas BOSP Reguler SD SMP Negeri	30.343.874.827,00	Belanja Barjas BOSP Kinerja SD Negeri	625.471.856,00	Belanja Barjas BOP PAUD Negeri Reguler	267.220.000,00	Belanja Hibah BOS Reguler Tahap I SD SMP Swasta	0,00	0,00	SD Negeri 040474 Tiga Serangkai	14.128.737,00		
2	Realisasi SiLPA Kinerja	75.382.000,00	0,00	75.382.000,00	Tahap II SD SMP Negeri	21.504.835.073,00	Kinerja SMP Negeri	420.000.000,00	BOP PAUD Kinerja	105.000.000,00		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Reguler SD SMP Negeri	5.089.934.212,00	Belanja Barjas BOSP Kinerja SMP Negeri	308.642.700,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOP PAUD Negeri Reguler	41.287.000,00	Belanja Hibah BOS Kinerja Tahap I SD SMP Swasta	0,00					
3	BOP PAUD	0,00	310.000,00	310.000,00	Terlambat Salur Tahap II SD SMP Negeri	599.106.620,00	Kinerja SD SMP Swasta	537.500.000,00	BOP Pendidikan Kesetaraan	248.695.000,00		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Reguler SD SMP Negeri	8.888.719.514,00	Belanja Barjas BOSP Kinerja (SiLPA Kinerja)	7.882.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOP PAUD Negeri Reguler	8.063.000,00	Belanja Hibah BOS Reguler Tahap II SD SMP Swasta	0,00					
4					Tahap I SD SMP Swasta	7.059.331.215,00						BOSP Reguler SD Swasta	7.978.157.627,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Kinerja SD Negeri	251.599.121,00	Belanja Barjas BOP PAUD Negeri Kinerja	15.000.000,00	Belanja Hibah BOS Reguler Tahap II Terlambat Salur SD SMP Swasta	0,00					
5					Tahap II SD SMP Swasta	7.003.578.415,00						BOSP Reguler SMP Swasta	6.140.786.803,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Kinerja SD Negeri	120.362.000,00	Belanja Barjas BOP-Kesetaraan Reguler Negeri	90.516.000,00	Belanja Hibah Dana BOP PAUD Reguler dan Kinerja	0,00					
6					Terlambat Salur Tahap II SD SMP Swasta	56.034.800,00								Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Kinerja SMP Negeri	111.354.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOP-Kesetaraan Negeri	31.994.000,00	Belanja Hibah Dana BOP Kesetaraan	0,00					
7														BOSP Kinerja SD Swasta	245.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOP Kesetaraan Negeri	14.000.000,00							
8														BOSP Kinerja SMP Swasta	292.500.000,00	BOP PAUD Reguler Swasta	2.534.214.380,00							
9																BOP PAUD Kesetaraan Swasta	112.185.000,00							
10																BOP PAUD Kinerja Swasta	90.000.000,00							
Jumlah		**249.439.064,00**	**310.000,00**	**249.749.064,00**		**58.436.752.323,00**		**1.970.000.000,00**		**3.204.233.380,00**	**63.610.985.703,00**		**58.441.472.983,00**		**1.962.811.677,00**		**3.204.479.380,00**		**0,00**	**0,00**		**14.128.737,00**	**63.622.892.777,00**	**237.841.990,00**

Rincian Penerimaan dan Realisasi BOSP
Tahun 2025

No	Nama Satuan Pendidikan	Saldo Awal BOSP	Penerimaan BOSP	Rekap Realisasi Belanja BOSP Reguler 2025	Rekap Realisasi Belanja BOSP Kinerja 2025	Total Realisasi Reguler + Kinerja	Sisa Anggaran	Kas BOSP (Reguler 2025 + Kinerja 2025 + SiLPA Kinerja 2024) per 31 Desember 2025	Setor Kas BOSP ke RKUD	Saldo Akhir BOSP
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH			Jumlah		
A. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)										
SD NEGERI										
1	SD NEGERI 040445 KABANJAHE	317.697,00	211.282.303,00	211.230.228,00	-	211.230.228,00	369.772,00	369.772,00		369.772,00
2	SD NEGERI BERTINGKAT BERASTAGI	558.500,00	185.281.500,00	185.714.900,00	-	185.714.900,00	125.100,00	125.100,00		125.100,00
3	SD NEGERI 040506 MUNTE	-	139.840.000,00	139.840.000,00	-	139.840.000,00	-	-		-
4	SD NEGERI 040533 MEREK	156,00	103.039.844,00	103.039.816,00	-	103.039.816,00	184,00	184,00		184,00
5	SD NEGERI 040447 KABANJAHE	21.000,00	233.659.000,00	233.580.000,00	-	233.580.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
6	SD NEGERI 040572 TIGABINANGA	-	103.960.000,00	103.960.000,00	-	103.960.000,00	-	-		-
7	SD NEGERI 043935 SIMPANG KATEPUL	-	126.040.000,00	126.040.000,00	-	126.040.000,00	-	-		-
8	SD NEGERI 047176 SIRUMBIA	-	33.120.000,00	33.120.000,00	-	33.120.000,00	-	-		-
9	SD NEGERI 046581 TANJUNG PAMAH	19.631.120,00	66.426.200,00	86.057.320,00	-	86.057.320,00	-	-		-
10	SD NEGERI 040451 KABANJAHE	-	315.980.000,00	293.480.000,00	22.500.000,00	315.980.000,00	-	-		-
11	SD NEGERI 040470 LINGGA JULU	2.806.000,00	125.994.000,00	128.430.875,00	-	128.430.875,00	369.125,00	369.125,00		369.125,00
12	SD NEGERI 048472 KUTAMBELIN	-	116.840.000,00	116.840.000,00	-	116.840.000,00	-	-		-
13	SD NEGERI 044828 KABAN	279.724,00	95.400.276,00	95.322.392,00	-	95.322.392,00	357.608,00	357.608,00		357.608,00
14	SD NEGERI 044863 LIMANG	87.288,00	126.872.712,00	126.555.526,00	-	126.555.526,00	404.474,00	404.474,00		404.474,00
15	SD NEGERI 046573 BERASTAGI	23.700.000,00	176.360.000,00	173.760.383,00	-	173.760.383,00	26.299.617,00	26.299.617,00		26.299.617,00
16	SD NEGERI 040487 TIGANDERKET	-	131.560.000,00	131.560.000,00	-	131.560.000,00	-	-		-
17	SD NEGERI 048099 PAYAMBELANG	-	121.440.000,00	121.440.000,00	-	121.440.000,00	-	-		-
18	SD NEGERI 040483 PAYUNG	-	141.680.000,00	141.680.000,00	-	141.680.000,00	-	-		-
19	SD NEGERI 044830 CINTA RAKYAT	-	57.040.000,00	57.040.000,00	-	57.040.000,00	-	-		-
20	SD NEGERI 040531 DOKAN	27.000,00	269.033.000,00	246.253.100,00	16.180.744,00	262.433.844,00	6.626.156,00	6.626.156,00		6.626.156,00
21	SD NEGERI 040538 SAMPUN	-	160.080.000,00	160.080.000,00	-	160.080.000,00	-	-		-
22	SD NEGERI 040542 SUKA	252,00	136.159.748,00	136.160.000,00	-	136.160.000,00	-	-		-
23	SD NEGERI 040574 BUNGABARU	-	51.520.000,00	51.520.000,00	-	51.520.000,00	-	-		-
24	SD NEGERI 040576 TIGABINANGA	150.000,00	58.730.000,00	58.880.000,00	-	58.880.000,00	-	-		-
25	SD NEGERI 045957 SUKA	222.800,00	50.377.200,00	50.596.800,00	-	50.596.800,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00
26	SD NEGERI 040454 PECEREN	235.500,00	146.044.500,00	146.179.000,00	-	146.179.000,00	101.000,00	101.000,00		101.000,00
27	SD NEGERI 045964 BULUH BELANGKE	-	55.200.000,00	55.200.000,00	-	55.200.000,00	-	-		-
28	SD NEGERI 040456 BERASTAGI	-	307.280.000,00	307.278.823,00	-	307.278.823,00	1.177,00	1.177,00		1.177,00
29	SD NEGERI 047165 SIMPANG NAGARA	150.000,00	155.330.000,00	155.468.000,00	-	155.468.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00
30	SD NEGERI 046577 MUNTE	135.000,00	209.125.000,00	186.557.000,00	22.485.744,00	209.042.744,00	217.256,00	217.256,00		217.256,00
31	SD NEGERI 044848 AJIJAHE	2.852,00	85.057.148,00	62.559.854,00	22.500.000,00	85.059.854,00	146,00	146,00		146,00
32	SD NEGERI 043951 SURBAKTI	341.199,00	118.338.801,00	118.680.000,00	-	118.680.000,00	-	-		-
33	SD NEGERI 040448 KABANJAHE	1.396.824,00	354.143.176,00	332.771.552,00	22.500.000,00	355.271.552,00	268.448,00	268.448,00		268.448,00
34	SD NEGERI 040479 PERTEGUHEN	91.892,00	56.028.108,00	55.941.316,00	-	55.941.316,00	178.684,00	178.684,00		178.684,00
35	SD NEGERI 045963 PERBULAN	-	122.360.000,00	122.360.000,00	-	122.360.000,00	-	-		-
36	SD NEGERI 040575 KUTABANGUN	861.919,00	130.698.081,00	131.141.000,00	-	131.141.000,00	419.000,00	419.000,00		419.000,00
37	SD NEGERI 044845 PAYANDERKET	-	260.360.000,00	260.360.000,00	-	260.360.000,00	-	-		-
38	SD NEGERI 044847 KUTA MALE	-	57.040.000,00	57.040.000,00	-	57.040.000,00	-	-		-
39	SD NEGERI 040513 BUNGANCOLE	-	79.120.000,00	79.120.000,00	-	79.120.000,00	-	-		-
40	SD NEGERI 040485 GURUKINAYAN	-	44.160.000,00	44.160.000,00	-	44.160.000,00	-	-		-
41	SD NEGERI 046422 DOLAT RAYAT	-	87.400.000,00	87.400.000,00	-	87.400.000,00	-	-		-

No	Nama Satuan Pendidikan	Saldo Awal BOSP	Penerimaan BOSP	Rekap Realisasi Belanja BOSP Reguler 2025	Rekap Realisasi Belanja BOSP Kinerja 2025	Total Realisasi Reguler + Kinerja	Sisa Anggaran	Kas BOSP (Reguler 2025 + Kinerja 2025 + SiLPA Kinerja 2024) per 31 Desember 2025	Setor Kas BOSP ke RKUD	Saldo Akhir BOSP
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH			Jumlah		
42	SD NEGERI 043953 SINGGAMANIK	492.400,00	72.187.600,00	72.391.700,00	-	72.391.700,00	288.300,00	288.300,00		288.300,00
43	SD NEGERI 044851 AJINEMBAH	12.000,00	91.988.000,00	91.810.000,00	-	91.810.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00
44	SD NEGERI 040497 PENAMPEN	20.000,00	93.320.000,00	70.840.000,00	20.166.000,00	91.006.000,00	2.334.000,00	2.334.000,00		2.334.000,00
45	SD NEGERI 040489 TANJUNG MERAWA	-	115.920.000,00	115.920.000,00	-	115.920.000,00	-	-		-
46	SD NEGERI 040503 PERBAJI	73.372,00	39.486.628,00	39.559.900,00	-	39.559.900,00	100,00	100,00		100,00
47	SD NEGERI 045953 SELAKKAR	-	57.040.000,00	57.040.000,00	-	57.040.000,00	-	-		-
48	SD NEGERI 046578 KUTABANGUN	-	93.840.000,00	93.840.000,00	-	93.840.000,00	-	-		-
49	SD NEGERI 040461 BERASTAGI	1.504.984,00	200.895.016,00	201.923.467,00	-	201.923.467,00	476.533,00	476.533,00		476.533,00
50	SD NEGERI 040546 KINANGKONG	-	122.360.000,00	122.360.000,00	-	122.360.000,00	-	-		-
51	SD NEGERI 043940 PERBESI	-	200.560.000,00	199.885.000,00	-	199.885.000,00	675.000,00	675.000,00		675.000,00
52	SD NEGERI 040549 PERBULAN	-	225.400.000,00	225.350.000,00	-	225.350.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
53	SD NEGERI 043952 SUKARAMAI	-	131.060.000,00	108.560.000,00	22.500.000,00	131.060.000,00	-	-		-
54	SD NEGERI 040496 TANJUNG	-	109.480.000,00	109.480.000,00	-	109.480.000,00	-	-		-
55	SD NEGERI 040515 TIGAJUMPA	-	121.440.000,00	121.440.000,00	-	121.440.000,00	-	-		-
56	SD NEGERI 044842 BERTAH	-	105.800.000,00	105.800.000,00	-	105.800.000,00	-	-		-
57	SD NEGERI 040570 TIGABINANGA	309.196,00	267.410.804,00	263.060.300,00	-	263.060.300,00	4.659.700,00	4.659.700,00		4.659.700,00
58	SD NEGERI 040527 TIGAPANAH	1.802.419,00	218.077.581,00	219.880.000,00	-	219.880.000,00	-	-		-
59	SD NEGERI 043945 PERNANTIN	100.000,00	116.740.000,00	116.814.000,00	-	116.814.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00
60	SD NEGERI 040517 TIGAJUMPA	1.012.300,00	111.227.700,00	111.366.520,00	-	111.366.520,00	873.480,00	873.480,00		873.480,00
61	SD NEGERI 045961 BATU RONGKAM	-	122.360.000,00	122.360.000,00	-	122.360.000,00	-	-		-
62	SD NEGERI 040472 BEGANDING	116.334,00	143.403.666,00	143.520.000,00	-	143.520.000,00	-	-		-
63	SD NEGERI 047175 SIMACEM BEKERAH	642.000,00	126.318.000,00	126.532.500,00	-	126.532.500,00	427.500,00	427.500,00		427.500,00
64	SD NEGERI 040512 SARIMUNTE	-	65.320.000,00	65.320.000,00	-	65.320.000,00	-	-		-
65	SD NEGERI 046579 LAU PERANGGUNEN	-	62.060.000,00	39.560.000,00	22.500.000,00	62.060.000,00	-	-		-
66	SD NEGERI 045954 NANGBELAWAN	-	108.060.000,00	85.560.000,00	22.500.000,00	108.060.000,00	-	-		-
67	SD NEGERI 045952 GURUSINGA	220.047,00	149.739.953,00	149.876.971,00	-	149.876.971,00	83.029,00	83.029,00		83.029,00
68	SD NEGERI 043939 KUTAGALUH	61.962,00	53.298.038,00	53.360.000,00	-	53.360.000,00	-	-		-
69	SD NEGERI 047171 BASAM TONGKOH	-	37.720.000,00	37.720.000,00	-	37.720.000,00	-	-		-
70	SD NEGERI 046415 BATUKARANG	-	137.080.000,00	137.080.000,00	-	137.080.000,00	-	-		-
71	SD NEGERI 040563 SUGIHEN	117.628,00	68.882.372,00	68.870.000,00	-	68.870.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00
72	SD NEGERI 040493 SUKATENDEL	162.000,00	78.958.000,00	79.120.000,00	-	79.120.000,00	-	-		-
73	SD NEGERI 040459 BERASTAGI	334.000,00	296.826.000,00	295.836.291,00	-	295.836.291,00	1.323.709,00	1.323.709,00		1.323.709,00
74	SD NEGERI 047173 CIMBANG UJUNG	-	48.760.000,00	48.760.000,00	-	48.760.000,00	-	-		-
75	SD NEGERI 040486 GURUKINAYAN	-	36.800.000,00	36.800.000,00	-	36.800.000,00	-	-		-
76	SD NEGERI 044855 PARSAORAN	-	45.080.000,00	45.080.000,00	-	45.080.000,00	-	-		-
77	SD NEGERI 040530 BUNURAYA	-	122.360.000,00	122.360.000,00	-	122.360.000,00	-	-		-
78	SD NEGERI 048002 KEMKEM	-	51.520.000,00	51.520.000,00	-	51.520.000,00	-	-		-
79	SD NEGERI 040501 BINTANG MERIAH	-	155.900.000,00	133.400.000,00	22.500.000,00	155.900.000,00	-	-		-
80	SD NEGERI 040508 SARINEMBAH	13.000,00	153.127.000,00	130.520.000,00	22.405.744,00	152.925.744,00	214.256,00	214.256,00		214.256,00
81	SD NEGERI 043941 LAU KAPUR	-	30.360.000,00	30.360.000,00	-	30.360.000,00	-	-		-
82	SD NEGERI 040467 LINGGA	-	188.600.000,00	188.600.000,00	-	188.600.000,00	-	-		-
83	SD NEGERI 040516 TIGAJUMPA	-	90.160.000,00	90.065.700,00	-	90.065.700,00	94.300,00	94.300,00		94.300,00
84	SD NEGERI 044864 GUNUNG	79.787,00	14.640.213,00	14.720.000,00	-	14.720.000,00	-	-		-
85	SD NEGERI 040488 TIGANDERKET	7.966,00	75.432.034,00	75.439.061,00	-	75.439.061,00	939,00	939,00		939,00
86	SD NEGERI 040495 JANDIMERIAH	-	126.040.000,00	126.040.000,00	-	126.040.000,00	-	-		-
87	SD NEGERI 045955 UJUNG TERAN	-	104.380.000,00	81.880.000,00	22.500.000,00	104.380.000,00	-	-		-
88	SD NEGERI 040535 PANGAMBATAN	-	152.720.000,00	152.720.000,00	-	152.720.000,00	-	-		-
89	SD NEGERI 040540 SIBOLANGIT	47.000,00	67.113.000,00	67.092.000,00	-	67.092.000,00	68.000,00	68.000,00		68.000,00

No	Nama Satuan Pendidikan	Saldo Awal BOSP	Penerimaan BOSP	Rekap Realisasi Belanja BOSP Reguler 2025	Rekap Realisasi Belanja BOSP Kinerja 2025	Total Realisasi Reguler + Kinerja	Sisa Anggaran	Kas BOSP (Reguler 2025 + Kinerja 2025 + SiLPA Kinerja 2024) per 31 Desember 2025	Setor Kas BOSP ke RKUD	Saldo Akhir BOSP
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH			Jumlah		
90	SD NEGERI 043949 LAUBULUH	-	48.760.000,00	48.760.000,00	-	48.760.000,00	-	-		-
91	SD NEGERI 043944 JUHAR	-	88.320.000,00	88.320.000,00	-	88.320.000,00	-	-		-
92	SD NEGERI 040564 KERIAHEN	-	82.800.000,00	82.800.000,00	-	82.800.000,00	-	-		-
93	SD NEGERI 044861 PERGENDANGEN	-	97.940.000,00	75.440.000,00	22.500.000,00	97.940.000,00	-	-		-
94	SD NEGERI 044862 KUTA BUARA	3.000,00	7.357.000,00	7.360.000,00	-	7.360.000,00	-	-		-
95	SD NEGERI 046419 SERDANG	234.654,00	67.345.346,00	45.030.709,00	22.500.000,00	67.530.709,00	49.291,00	49.291,00		49.291,00
96	SD NEGERI 047181 SEMBAHBALA	100.000,00	84.540.000,00	84.640.000,00	-	84.640.000,00	-	-		-
97	SD NEGERI 044853 SIMPANG MULAWARI	76.530,00	62.483.470,00	62.412.315,00	-	62.412.315,00	147.685,00	147.685,00		147.685,00
98	SD NEGERI 044840 TALIMBARU	1.004.312,00	50.515.688,00	51.520.000,00	-	51.520.000,00	-	-		-
99	SD NEGERI 040458 BERASTAGI	-	176.640.000,00	176.481.600,00	-	176.481.600,00	158.400,00	158.400,00		158.400,00
100	SD NEGERI 040554 LINGGA MUDA	30.600,00	82.269.400,00	59.792.200,00	22.500.000,00	82.292.200,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00
101	SD NEGERI 047172 GUNUNG MERLAWAN (T	-	23.000.000,00	11.490.000,00	-	11.490.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00		11.510.000,00
102	SD NEGERI 047159 KETAREN	-	83.220.000,00	60.660.000,00	22.500.000,00	83.160.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
103	SD NEGERI 040494 SUSUK	-	105.800.000,00	105.800.000,00	-	105.800.000,00	-	-		-
104	SD NEGERI 048233 TIGABINANGA	-	52.440.000,00	52.377.900,00	-	52.377.900,00	62.100,00	62.100,00		62.100,00
105	SD NEGERI 044857 MARDINGDING	-	107.640.000,00	107.640.000,00	-	107.640.000,00	-	-		-
106	SD NEGERI 040557 JUHAR	-	136.160.000,00	136.160.000,00	-	136.160.000,00	-	-		-
107	SD NEGERI 044824 RUMAH KABANJAHE	-	56.120.000,00	56.120.000,00	-	56.120.000,00	-	-		-
108	SD NEGERI 044849 KUBUCOLIA	92.000,00	149.868.000,00	149.785.000,00	-	149.785.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00
109	SD NEGERI 040565 KIDUPEN	-	59.800.000,00	59.800.000,00	-	59.800.000,00	-	-		-
110	SD NEGERI 044859 KETAWAREN	-	56.120.000,00	56.120.000,00	-	56.120.000,00	-	-		-
111	SD NEGERI 040541 SUKA	307.826,00	83.412.174,00	83.709.664,00	-	83.709.664,00	10.336,00	10.336,00		10.336,00
112	SD NEGERI 047179 KUTA GERAT	-	44.160.000,00	44.160.000,00	-	44.160.000,00	-	-		-
113	SD NEGERI 044831 GUNG PINTO	-	72.680.000,00	72.680.000,00	-	72.680.000,00	-	-		-
114	SD NEGERI 040518 PERTUMBUKEN	7.470.400,00	94.149.600,00	78.411.106,00	22.500.000,00	100.911.106,00	708.894,00	708.894,00		708.894,00
115	SD NEGERI 047168 KACINAMBUN	234,00	182.159.766,00	182.159.914,00	-	182.159.914,00	86,00	86,00		86,00
116	SD NEGERI 048072 KABANJAHE	-	177.980.000,00	155.264.000,00	22.500.000,00	177.764.000,00	216.000,00	216.000,00		216.000,00
117	SD NEGERI 043942 MBAL MBAL PETARUM	-	82.800.000,00	82.800.000,00	-	82.800.000,00	-	-		-
118	SD NEGERI 040471 KAMPUNG MERDEKA	-	117.760.000,00	116.482.300,00	-	116.482.300,00	1.277.700,00	1.277.700,00		1.277.700,00
119	SD NEGERI 040484 PAYUNG	-	94.260.000,00	71.760.000,00	22.500.000,00	94.260.000,00	-	-		-
120	SD NEGERI 040463 SUMBUL	-	186.760.000,00	186.118.132,00	-	186.118.132,00	641.868,00	641.868,00		641.868,00
121	SD NEGERI 040464 KANDIBATA	309.000,00	192.391.000,00	170.200.000,00	22.500.000,00	192.700.000,00	-	-		-
122	SD NEGERI 040469 SURBAKTI	20.058,00	136.559.942,00	113.988.426,00	22.500.000,00	136.488.426,00	91.574,00	91.574,00		91.574,00
123	SD NEGERI 040526 BARUSJAHE	-	61.640.000,00	61.640.000,00	-	61.640.000,00	-	-		-
124	SD NEGERI 040556 JUHAR	-	132.480.000,00	132.480.000,00	-	132.480.000,00	-	-		-
125	SD NEGERI 043946 SUKANALU	-	131.560.000,00	131.554.000,00	-	131.554.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
126	SD NEGERI 043936 MEREK SITUNGGALING	1.164.200,00	418.355.800,00	417.499.750,00	-	417.499.750,00	2.020.250,00	2.020.250,00		2.020.250,00
127	SD NEGERI 044852 BUKIT	-	108.560.000,00	108.560.000,00	-	108.560.000,00	-	-		-
128	SD NEGERI 040536 PARTIBI LAMA	267.000,00	266.533.000,00	266.455.113,00	-	266.455.113,00	344.887,00	344.887,00		344.887,00
129	SD NEGERI 046583 LAUGARUT	-	162.840.000,00	162.840.000,00	-	162.840.000,00	-	-		-
130	SD NEGERI 044832 LINGGA	3.394,00	81.876.606,00	81.880.000,00	-	81.880.000,00	-	-		-
131	SD NEGERI 044860 JANDI	-	35.880.000,00	35.880.000,00	-	35.880.000,00	-	-		-
132	SD NEGERI 040566 LAULINGGA	10.000,00	43.230.000,00	43.240.000,00	-	43.240.000,00	-	-		-
133	SD NEGERI 047177 UJUNG DELENG	-	85.560.000,00	85.560.000,00	-	85.560.000,00	-	-		-
134	SD NEGERI 040475 TIGA SERANGKAI	-	46.000.000,00	46.000.000,00	-	46.000.000,00	-	-		-
135	SD NEGERI 047163 AJIJULU	-	55.200.000,00	55.200.000,00	-	55.200.000,00	-	-		-
136	SD NEGERI 047732 KUTA KENDIT POLA TEE	-	161.000.000,00	160.980.000,00	-	160.980.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
137	SD NEGERI 046420 SINGA	-	140.760.000,00	140.760.000,00	-	140.760.000,00	-	-		-

No	Nama Satuan Pendidikan	Saldo Awal BOSP	Penerimaan BOSP	Rekap Realisasi Belanja BOSP Reguler 2025	Rekap Realisasi Belanja BOSP Kinerja 2025	Total Realisasi Reguler + Kinerja	Sisa Anggaran	Kas BOSP (Reguler 2025 + Kinerja 2025 + SiLPA Kinerja 2024) per 31 Desember 2025	Setor Kas BOSP ke RKUD	Saldo Akhir BOSP
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH			Jumlah		
138	SD NEGERI 040529 AJIBUHARA	605.978,00	191.674.022,00	191.946.500,00	-	191.946.500,00	333.500,00	333.500,00		333.500,00
139	SD NEGERI 045958 MARDINGDING	-	51.520.000,00	51.520.000,00	-	51.520.000,00	-	-		-
140	SD NEGERI 046421 KUBU SIMBELANG	57.630,00	51.462.370,00	51.520.000,00	-	51.520.000,00	-	-		-
141	SD NEGERI 048475 GALUNGGUNG	-	148.540.000,00	126.040.000,00	22.500.000,00	148.540.000,00	-	-		-
142	SD NEGERI 045965 PECEREN	472.586,00	108.087.414,00	107.863.386,00	-	107.863.386,00	696.614,00	696.614,00		696.614,00
143	SD NEGERI 040539 SEBERAYA	39.282,00	88.280.718,00	88.310.904,00	-	88.310.904,00	9.096,00	9.096,00		9.096,00
144	SD NEGERI 040505 MUNTE	-	39.560.000,00	39.560.000,00	-	39.560.000,00	-	-		-
145	SD NEGERI 040551 LAUPAKAM	-	103.419.900,00	103.419.900,00	-	103.419.900,00	-	-		-
146	SD NEGERI 044841 KUTAMBARU	-	128.300.000,00	105.800.000,00	22.500.000,00	128.300.000,00	-	-		-
147	SD NEGERI 047162 SUKA	131.869,00	145.228.131,00	145.341.436,00	-	145.341.436,00	18.564,00	18.564,00		18.564,00
148	SD NEGERI 045956 SUKAMAJU	45.800,00	75.394.200,00	75.440.000,00	-	75.440.000,00	-	-		-
149	SD NEGERI 044844 GURUBENUA	487.100,00	113.592.900,00	113.693.350,00	-	113.693.350,00	386.650,00	386.650,00		386.650,00
150	SD NEGERI 046412 NAGERI	100,00	82.299.900,00	59.800.000,00	20.080.744,00	79.880.744,00	2.419.256,00	2.419.256,00		2.419.256,00
151	SD NEGERI 040534 MANUK MULIA	303.900,00	35.576.100,00	35.846.000,00	-	35.846.000,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00
152	SD NEGERI 043948 SIABANG ABANG	-	43.240.000,00	43.147.748,00	-	43.147.748,00	92.252,00	92.252,00		92.252,00
153	SD NEGERI 046417 NAMAN	404.140,00	144.035.860,00	144.293.636,00	-	144.293.636,00	146.364,00	146.364,00		146.364,00
154	SD NEGERI 043947 TANJUNG BARUS	-	103.040.000,00	103.040.000,00	-	103.040.000,00	-	-		-
155	SD NEGERI 040544 DOLAT RAYAT	600.000,00	172.360.000,00	172.960.000,00	-	172.960.000,00	-	-		-
156	SD NEGERI 044839 BULANJAHE	950.000,00	85.530.000,00	86.280.000,00	-	86.280.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
157	SD NEGERI 040550 MARDINGDING	-	262.200.000,00	262.200.000,00	-	262.200.000,00	-	-		-
158	SD NEGERI 040514 KINEPPEN	-	154.560.000,00	154.560.000,00	-	154.560.000,00	-	-		-
159	SD NEGERI 040455 BERASTAGI	417.857,00	284.282.143,00	261.703.570,00	22.500.000,00	284.203.570,00	496.430,00	496.430,00		496.430,00
160	SD NEGERI 046411 DOULU	-	95.680.000,00	93.602.000,00	-	93.602.000,00	2.078.000,00	2.078.000,00		2.078.000,00
161	SD NEGERI 040562 KUTAGUGUNG	-	61.640.000,00	61.640.000,00	-	61.640.000,00	-	-		-
162	SD NEGERI 047164 SEBERAYA	190.540,00	146.089.460,00	145.327.613,00	-	145.327.613,00	952.387,00	952.387,00		952.387,00
163	SD NEGERI 040523 SUKANALU	191.445,00	136.388.555,00	114.076.891,00	22.500.000,00	136.576.891,00	3.109,00	3.109,00		3.109,00
164	SD NEGERI 040478 SIGARANG-GARANG	316.000,00	253.604.000,00	253.913.500,00	-	253.913.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00
165	SD NEGERI 044865 KUTAMBARU PUNTI	25.179.000,00	94.760.000,00	94.760.000,00	-	94.760.000,00	25.179.000,00	25.179.000,00		25.179.000,00
166	SD NEGERI 040460 BERASTAGI	740.279,00	197.979.721,00	198.720.000,00	-	198.720.000,00	-	-		-
167	SD NEGERI 043938 TIGANDERKET (TUTUP)	-	10.120.000,00	3.737.000,00	-	3.737.000,00	6.383.000,00	6.383.000,00		6.383.000,00
168	SD NEGERI 046413 BARUNGKERSAP	200.000,00	139.640.000,00	139.804.200,00	-	139.804.200,00	35.800,00	35.800,00		35.800,00
169	SD NEGERI 047166 SUKADAME	116.832,00	212.823.168,00	190.335.982,00	22.500.000,00	212.835.982,00	104.018,00	104.018,00		104.018,00
170	SD NEGERI 048098 KUTAMBELIN	-	63.480.000,00	63.480.000,00	-	63.480.000,00	-	-		-
171	SD NEGERI 040577 KUTAGERAT	-	132.900.000,00	110.400.000,00	22.500.000,00	132.900.000,00	-	-		-
172	SD NEGERI 040500 JINABUN	-	80.040.000,00	80.040.000,00	-	80.040.000,00	-	-		-
173	SD NEGERI 040450 KABANJAHE	-	164.680.000,00	164.600.000,00	-	164.600.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00
174	SD NEGERI 040499 KUTABULUH	5.040.000,00	114.560.000,00	119.600.000,00	-	119.600.000,00	-	-		-
175	SD NEGERI 040466 LAUSIMOMO	-	133.820.000,00	111.320.000,00	22.500.000,00	133.820.000,00	-	-		-
176	SD NEGERI 040545 DURIN RUGUN	-	80.960.000,00	80.960.000,00	-	80.960.000,00	-	-		-
177	SD NEGERI 045962 BULUH PANCUR	-	104.380.000,00	81.880.000,00	22.500.000,00	104.380.000,00	-	-		-
178	SD NEGERI 040449 KABANJAHE	170.500,00	227.069.500,00	226.801.870,00	-	226.801.870,00	438.130,00	438.130,00		438.130,00
179	SD NEGERI 044834 RIMOKAYU	-	51.520.000,00	51.520.000,00	-	51.520.000,00	-	-		-
180	SD NEGERI 044854 TONGGING	338.265,00	107.301.735,00	107.157.119,00	-	107.157.119,00	482.881,00	482.881,00		482.881,00
181	SD NEGERI 044825 GUNDALING I BERASTA(	804.877,00	156.515.123,00	156.207.577,00	-	156.207.577,00	1.112.423,00	1.112.423,00		1.112.423,00
182	SD NEGERI 040548 LAU BALENG	-	138.000.000,00	138.000.000,00	-	138.000.000,00	-	-		-
183	SD NEGERI 044846 BUAH RAYA	-	68.500.000,00	46.000.000,00	22.500.000,00	68.500.000,00	-	-		-
184	SD NEGERI 040492 BATUKARANG	-	112.240.000,00	112.075.000,00	-	112.075.000,00	165.000,00	165.000,00		165.000,00
185	SD NEGERI 047174 KUTARAYAT	503.000,00	367.917.000,00	345.749.625,00	22.500.000,00	368.249.625,00	170.375,00	170.375,00		170.375,00

No	Nama Satuan Pendidikan	Saldo Awal BOSP	Penerimaan BOSP	Rekap Realisasi Belanja BOSP Reguler 2025	Rekap Realisasi Belanja BOSP Kinerja 2025	Total Realisasi Reguler + Kinerja	Sisa Anggaran	Kas BOSP (Reguler 2025 + Kinerja 2025 + SiLPA Kinerja 2024) per 31 Desember 2025	Setor Kas BOSP ke RKUD	Saldo Akhir BOSP
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH			Jumlah		
186	SD NEGERI 040537 RAWANG	2.245.000,00	256.275.000,00	256.120.000,00	-	256.120.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00
187	SD NEGERI 044838 TANGKIDIK	-	34.960.000,00	34.960.000,00	-	34.960.000,00	-	-		-
188	SD NEGERI 046414 TANJUNG MERAHE	1.146.151,00	119.373.849,00	120.512.000,00	-	120.512.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00
189	SD NEGERI 040480 SUKANDEBI	298.632,00	198.421.368,00	198.513.676,00	-	198.513.676,00	206.324,00	206.324,00		206.324,00
190	SD NEGERI 044850 KUTAKEPAR SALIT	35.200,00	112.624.800,00	90.160.000,00	22.500.000,00	112.660.000,00	-	-		-
191	SD NEGERI 046575 KUTABULUH GUGUNG	-	52.860.000,00	30.360.000,00	22.500.000,00	52.860.000,00	-	-		-
192	SD NEGERI 046582 LAUSOLU	-	116.840.000,00	116.840.000,00	-	116.840.000,00	-	-		-
193	SD NEGERI 044829 SUKANALU (TUTUP)	25.460.000,00	4.140.000,00	-	-	-	29.600.000,00	29.600.000,00		29.600.000,00
194	SD NEGERI 040559 BIAKNAMPE	49.604,00	88.270.396,00	88.296.000,00	-	88.296.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00
195	SD NEGERI 040482 GAJAH	637.660,00	199.002.340,00	199.640.000,00	-	199.640.000,00	-	-		-
196	SD NEGERI 040568 TIGABINANGA	53.250,00	81.826.750,00	81.880.000,00	-	81.880.000,00	-	-		-
197	SD NEGERI 040519 TANJUNG BARUS	60.554,00	87.339.446,00	87.224.700,00	-	87.224.700,00	175.300,00	175.300,00		175.300,00
198	SD NEGERI 046423 PERBESI SIMBELANG	-	129.220.000,00	106.720.000,00	22.500.000,00	129.220.000,00	-	-		-
199	SD NEGERI 040481 CINTA RAKYAT	-	207.920.000,00	203.684.000,00	-	203.684.000,00	4.236.000,00	4.236.000,00		4.236.000,00
200	SD NEGERI 045960 LAUKASUMPAT	-	88.320.000,00	88.320.000,00	-	88.320.000,00	-	-		-
201	SD NEGERI 044833 NARI GUNUNG	-	103.040.000,00	103.040.000,00	-	103.040.000,00	-	-		-
202	SD NEGERI 040547 LAUBALENG	-	114.080.000,00	113.880.000,00	-	113.880.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
203	SD NEGERI 044826 SAMURA	-	58.880.000,00	58.880.000,00	-	58.880.000,00	-	-		-
204	SD NEGERI 047169 REGAJI	162.600,00	49.517.400,00	49.263.512,00	-	49.263.512,00	416.488,00	416.488,00		416.488,00
205	SD NEGERI 047167 KODON-KODON	12.000,00	16.548.000,00	16.536.000,00	-	16.536.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00
206	SD NEGERI 048473 NDESKATI	-	76.360.000,00	76.360.000,00	-	76.360.000,00	-	-		-
207	SD NEGERI 040443 KABANJAHE	-	246.560.000,00	246.560.000,00	-	246.560.000,00	-	-		-
208	SD NEGERI 040521 SINAMAN	316.105,00	108.663.895,00	86.372.024,00	22.500.000,00	108.872.024,00	107.976,00	107.976,00		107.976,00
209	SD NEGERI 044856 LAU PENGULU	-	45.080.000,00	45.080.000,00	-	45.080.000,00	-	-		-
210	SD NEGERI 040462 BERASTAGI	-	207.000.000,00	207.000.000,00	-	207.000.000,00	-	-		-
211	SD NEGERI 040525 PENAMPEN B	-	62.560.000,00	62.560.000,00	-	62.560.000,00	-	-		-
212	SD NEGERI 048474 BATU MAMAK	214.000,00	53.146.000,00	51.512.500,00	-	51.512.500,00	1.847.500,00	1.847.500,00		1.847.500,00
213	SD NEGERI 040446 KABANJAHE	461.832,00	304.478.168,00	279.481.049,00	22.500.000,00	301.981.049,00	2.958.951,00	2.958.951,00		2.958.951,00
214	SD NEGERI 048291 TIGAPANAH	92.240,00	61.967.760,00	39.510.000,00	22.500.000,00	62.010.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
215	SD NEGERI 043934 KABANJAHE	-	202.400.000,00	202.400.000,00	-	202.400.000,00	-	-		-
216	SD NEGERI 046574 SADAPERARIH	-	162.840.000,00	162.839.000,00	-	162.839.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
217	SD NEGERI 040510 KUTAMBARU	-	148.120.000,00	148.120.000,00	-	148.120.000,00	-	-		-
218	SD NEGERI 040473 BEGANDING	-	83.720.000,00	83.679.402,00	-	83.679.402,00	40.598,00	40.598,00		40.598,00
219	SD NEGERI 040452 KABANJAHE	98.314,00	196.781.686,00	196.631.780,00	-	196.631.780,00	248.220,00	248.220,00		248.220,00
220	SD NEGERI 040491 BATUKARANG	-	100.700.000,00	78.200.000,00	21.130.001,00	99.330.001,00	1.369.999,00	1.369.999,00		1.369.999,00
221	SD NEGERI 046580 AEK NAULI	-	46.000.000,00	46.000.000,00	-	46.000.000,00	-	-		-
222	SD NEGERI PERTIBI TEMBE	2.594.800,00	80.205.200,00	82.800.000,00	-	82.800.000,00	-	-		-
223	SD NEGERI 040578 AEK HOTANG	-	202.820.000,00	180.320.000,00	22.500.000,00	202.820.000,00	-	-		-
224	SD NEGERI 040474 TIGA SERANGKAI (TUTU	4.928.737,00	9.200.000,00	-	-	-	14.128.737,00	14.128.737,00	14.128.737,00	-
225	SD NEGERI 047170 BULAN JULU	-	34.960.000,00	34.960.000,00	-	34.960.000,00	-	-		-
226	SD NEGERI 040457 BERASTAGI	2.253,00	254.837.747,00	254.799.176,00	-	254.799.176,00	40.824,00	40.824,00		40.824,00
227	SD NEGERI 044627 BULUH PANCUR	-	133.400.000,00	133.400.000,00	-	133.400.000,00	-	-		-
228	SD NEGERI 047160 BERASTAGI	-	281.020.000,00	258.520.000,00	22.500.000,00	281.020.000,00	-	-		-
229	SD NEGERI 044843 PERTUMBUNGEN	-	63.480.000,00	63.480.000,00	-	63.480.000,00	-	-		-
230	SD NEGERI 043943 LAUMULGAP	-	137.080.000,00	137.080.000,00	-	137.080.000,00	-	-		-
231	SD NEGERI 040528 SUKADAME	-	144.440.000,00	144.440.000,00	-	144.440.000,00	-	-		-
232	SD NEGERI 043950 SIGARANG-GARANG (TU	27.760.000,00	-	-	-	-	27.760.000,00	27.760.000,00		27.760.000,00
233	SD NEGERI 048232 KABANJAHE	82.000,00	233.098.000,00	210.680.000,00	19.984.000,00	230.664.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00		2.516.000,00

No	Nama Satuan Pendidikan	Saldo Awal BOSP	Penerimaan BOSP	Rekap Realisasi Belanja BOSP Reguler 2025	Rekap Realisasi Belanja BOSP Kinerja 2025	Total Realisasi Reguler + Kinerja	Sisa Anggaran	Kas BOSP (Reguler 2025 + Kinerja 2025 + SiLPA Kinerja 2024) per 31 Desember 2025	Setor Kas BOSP ke RKUD	Saldo Akhir BOSP
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH			Jumlah		
234	SD NEGERI 048100 PKMT KUTA KENDIT	-	125.120.000,00	125.120.000,00	-	125.120.000,00	-	-		-
235	SD NEGERI 040520 TANJUNG BARUS	-	48.760.000,00	48.710.000,00	-	48.710.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
236	SD NEGERI PERCONTOHAN KABANJAHE	307.552,00	353.392.448,00	330.868.268,00	22.500.000,00	353.368.268,00	331.732,00	331.732,00		331.732,00
237	SD NEGERI 040522 TAMBUNAN	637.900,00	140.122.100,00	140.709.400,00	-	140.709.400,00	50.600,00	50.600,00		50.600,00
238	SD NEGERI 040490 BATUKARANG	-	40.480.000,00	40.480.000,00	-	40.480.000,00	-	-		-
239	SD NEGERI 040552 SAMPERAYA	-	236.440.000,00	236.440.000,00	-	236.440.000,00	-	-		-
240	SD NEGERI 040553 BANDAR PURBA	-	16.560.000,00	16.560.000,00	-	16.560.000,00	-	-		-
241	SD NEGERI 044835 KUTAMBARU	1.402.400,00	85.497.600,00	64.400.000,00	22.500.000,00	86.900.000,00	-	-		-
242	SD NEGERI 044858 SUKABABO	-	65.320.000,00	65.320.000,00	-	65.320.000,00	-	-		-
243	SD NEGERI 040444 KABANJAHE	-	224.900.000,00	202.400.000,00	22.500.000,00	224.900.000,00	-	-		-
244	SD N 047182 LAU PAKAM (TUTUP)	-	11.040.000,00	5.500.000,00	-	5.500.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00		5.540.000,00
245	SD NEGERI 048000 KUTAKEPAR	-	11.960.000,00	11.960.000,00	-	11.960.000,00	-	-		-
SMP NEGERI			-			-	-			
1	SMP NEGERI 3 BARUSJAHE	-	225.970.000,00	190.970.000,00	35.000.000,00	225.970.000,00	-	-		-
2	SMP NEGERI 1 TIGABINANGA	1.722.110,00	861.567.890,00	826.542.275,00	35.000.000,00	861.542.275,00	1.747.725,00	1.747.725,00		1.747.725,00
3	SMP NEGERI 2 TIGABINANGA	181.000,00	239.379.000,00	239.560.000,00	-	239.560.000,00	-	-		-
4	SMP NEGERI 2 LAUBALENG	-	293.800.000,00	293.800.000,00	-	293.800.000,00	-	-		-
5	SMP NEGERI 3 TIGABINANGA	881.300,00	153.928.700,00	154.810.000,00	-	154.810.000,00	-	-		-
6	SMP NEGERI 1 TIGAPANAH	6.321.526,00	808.408.474,00	814.730.000,00	-	814.730.000,00	-	-		-
7	SMP NEGERI 3 JUHAR	150.000,00	111.720.000,00	111.870.000,00	-	111.870.000,00	-	-		-
8	SMP NEGERI SATU ATAP 1 DOLAT RAYAT	4.821,00	144.635.179,00	144.609.979,00	-	144.609.979,00	30.021,00	30.021,00		30.021,00
9	SMP NEGERI 1 KUTABULUH	-	465.560.000,00	465.207.820,00	-	465.207.820,00	352.180,00	352.180,00		352.180,00
10	SMP NEGERI 2 SIMPANGEMPAT	-	437.310.000,00	437.310.000,00	-	437.310.000,00	-	-		-
11	SMP NEGERI 1 KABANJAHE	1.009.574,00	1.143.680.426,00	1.144.690.000,00	-	1.144.690.000,00	-	-		-
12	SMP NEGERI 2 BARUSJAHE	-	162.720.000,00	162.720.000,00	-	162.720.000,00	-	-		-
13	SMP NEGERI 2 JUHAR	-	126.560.000,00	126.560.000,00	-	126.560.000,00	-	-		-
14	SMP NEGERI 2 MARDINGDING	-	496.070.000,00	496.070.000,00	-	496.070.000,00	-	-		-
15	SMP NEGERI 2 BERASTAGI	1.911.175,00	992.488.825,00	982.922.236,00	-	982.922.236,00	11.477.764,00	11.477.764,00		11.477.764,00
16	SMP NEGERI 3 MARDINGDING	-	319.790.000,00	319.790.000,00	-	319.790.000,00	-	-		-
17	SMP NEGERI 1 NAMAN TERAN	-	275.690.000,00	240.690.000,00	34.996.700,00	275.686.700,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00
18	SMP NEGERI 1 PAYUNG	1.263.747,00	515.116.253,00	481.378.200,00	35.000.000,00	516.378.200,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00
19	SMP NEGERI SATU ATAP 2 KUTABULUH	-	50.850.000,00	50.850.000,00	-	50.850.000,00	-	-		-
20	SMP NEGERI 3 KABANJAHE	-	689.270.000,00	654.270.000,00	35.000.000,00	689.270.000,00	-	-		-
21	SMP NEGERI 1 SIMPANGEMPAT	30.000,00	155.910.000,00	155.924.350,00	-	155.924.350,00	15.650,00	15.650,00		15.650,00
22	SMP NEGERI 1 TIGANDERKET	2.800,00	606.807.200,00	606.810.000,00	-	606.810.000,00	-	-		-
23	SMP NEGERI 1 MUNTE	-	335.610.000,00	335.610.000,00	-	335.610.000,00	-	-		-
24	SMP NEGERI 4 KABANJAHE	15.258.000,00	380.214.000,00	387.590.000,00	7.882.000,00	395.472.000,00	-	-		-
25	SMP NEGERI 3 BERASTAGI	1.172.154,00	1.060.997.846,00	1.026.670.000,00	35.000.000,00	1.061.670.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
26	SMP NEGERI 1 BERASTAGI	8.100.000,00	932.030.000,00	901.890.000,00	35.000.000,00	936.890.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00		3.240.000,00
27	SMP NEGERI 1 MARDINGDING	443.273,00	275.276.727,00	275.649.766,00	-	275.649.766,00	70.234,00	70.234,00		70.234,00
28	SMP NEGERI 2 KABANJAHE	3.415.360,00	879.084.640,00	843.408.850,00	35.000.000,00	878.408.850,00	4.091.150,00	4.091.150,00		4.091.150,00
29	SMP NEGERI SATU ATAP 5 KUTABULUH	-	107.320.000,00	72.320.000,00	35.000.000,00	107.320.000,00	-	-		-
30	SMP NEGERI 2 MUNTE	776.840,00	158.553.160,00	158.696.100,00	-	158.696.100,00	633.900,00	633.900,00		633.900,00
31	SMP NEGERI SATU ATAP 2 PAYUNG	-	67.770.000,00	32.770.000,00	35.000.000,00	67.770.000,00	-	-		-
32	SMP NEGERI SATU ATAP 4 BARUSJAHE	-	79.100.000,00	79.100.000,00	-	79.100.000,00	-	-		-
33	SMP NEGERI 1 JUHAR	336.300,00	262.953.700,00	262.567.324,00	-	262.567.324,00	722.676,00	722.676,00		722.676,00
34	SMP NEGERI 1 LAUBALENG	7.612.592,00	678.267.408,00	649.052.000,00	35.000.000,00	684.052.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00		1.828.000,00
35	SMP NEGERI SATU ATAP 2 MEREK	-	384.170.000,00	349.170.000,00	35.000.000,00	384.170.000,00	-	-		-

No	Nama Satuan Pendidikan	Saldo Awal BOSP	Penerimaan BOSP	Rekap Realisasi Belanja BOSP Reguler 2025	Rekap Realisasi Belanja BOSP Kinerja 2025	Total Realisasi Reguler + Kinerja	Sisa Anggaran	Kas BOSP (Reguler 2025 + Kinerja 2025 + SiLPA Kinerja 2024) per 31 Desember 2025	Setor Kas BOSP ke RKUD	Saldo Akhir BOSP
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH			Jumlah		
36	SMP NEGERI 1 BARUSJAHE	-	355.950.000,00	355.950.000,00	-	355.950.000,00	-	-		-
37	SMP NEGERI 2 TIGAPANAH	-	332.220.000,00	332.220.000,00	-	332.220.000,00	-	-		-
38	SMP NEGERI 3 TIGAPANAH	-	233.910.000,00	233.910.000,00	-	233.910.000,00	-	-		-
39	SMP NEGERI 1 MEREK	22.242.402,00	636.547.598,00	633.228.935,00	-	633.228.935,00	25.561.065,00	25.561.065,00		25.561.065,00
	JUMLAH	**249.439.064,00**	**45.750.307.893,00**	**44.322.528.553,00**	**1.425.311.677,00**	**45.747.840.230,00**	**251.906.727,00**	**251.906.727,00**	**14.128.737,00**	**237.777.990,00**
B. BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)										
	TK NEGERI PEMBINA JUHAR	-	21.820.000,00	6.820.000,00	15.000.000,00	21.820.000,00	-	-		-
	TK NEGERI SATU ATAP LAU SIMOMO	-	16.120.000,00	16.120.000,00	-	16.120.000,00	-	-		-
	TK NEGERI PEMBINA TIGANDERKET	100.000,00	38.340.000,00	38.440.000,00	-	38.440.000,00	-	-		-
	TK NEGERI PEMBINA KABANJAHE	-	103.540.000,00	103.540.000,00	-	103.540.000,00	-	-		-
	TK NEGERI SATU ATAP AJIBUHARA	-	13.640.000,00	13.640.000,00	-	13.640.000,00	-	-		-
	TK SATU ATAP KUTABANGUN	-	8.680.000,00	8.680.000,00	-	8.680.000,00	-	-		-
	TK NEGERI PEMBINA BARUSJAHE	-	37.820.000,00	37.820.000,00	-	37.820.000,00	-	-		-
	TK NEGERI SATU ATAP MUNTE	-	28.520.000,00	28.520.000,00	-	28.520.000,00	-	-		-
	TK SATU ATAP PERTIBI TEMBE	210.000,00	8.904.000,00	9.050.000,00	-	9.050.000,00	64.000,00	64.000,00		64.000,00
	TK NEGERI SATU ATAP GAJAH	-	22.940.000,00	22.940.000,00	-	22.940.000,00	-	-		-
	TK NEGERI SATU ATAP JANDIMERIAH	-	9.920.000,00	9.920.000,00	-	9.920.000,00	-	-		-
	SPNF SKB KAB KARO PAUD	-	21.080.000,00	21.080.000,00	-	21.080.000,00	-	-		-
	JUMLAH	**310.000,00**	**331.324.000,00**	**316.570.000,00**	**15.000.000,00**	**331.570.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**-**	**64.000,00**
B. BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN										
	SPNF SKB KABUPATEN KARO (Kesetaraan)		**136.510.000,00**	136.510.000,00		136.510.000,00	-	-		-
TOTAL (A+B+C)		**249.749.064,00**	**46.218.141.893,00**	**44.775.608.553,00**	**1.440.311.677,00**	**46.215.920.230,00**	**251.970.727,00**	**251.970.727,00**	**14.128.737,00**	**237.841.990,00**

Lampiran 22

Rincian Kas Dana BOK Puskesmas
Tahun 2025

No	Puskesmas	Pagu RK	Saldo Awal	Penambahan (Total Penerimaan)	Pengurangan (Total Realisasi)	Saldo Akhir
1	Mardingding	636.587.800,00	83.809.935	552.777.865,00	523.345.084,00	113.242.716,00
2	Lau Baleng	639.422.250,00	57.725.331	581.696.919,00	543.337.395,00	96.084.855,00
3	Tiga Binanga	800.496.000,00	137.429.000	663.067.000,00	700.910.547,00	99.585.453,00
4	Juhar	617.690.000,00	152.829.429,00	464.860.571,00	560.528.774,00	57.161.226,00
5	Munte	606.367.500,00	111.201.370	495.166.130,00	521.534.939,00	84.832.561,00
6	Kutabuluh	602.407.000,00	50.288.232	552.118.768,00	485.857.190,00	116.549.810,00
7	Payung	414.622.000,00	58.571.705	356.050.295,00	378.107.614,00	36.514.386,00
8	Tiganderket	510.974.000,00	66.656.183	444.317.817,00	435.865.235,00	75.108.765,00
9	Simpang Empat	716.139.150,00	171.774.953	544.364.197,00	465.620.211,00	250.518.939,00
10	Naman Teran	625.204.000,00	27.075.388	598.128.612,00	599.375.539,00	25.828.461,00
11	Merdeka	665.046.250,00	7.427.000	657.619.250,00	630.498.250,00	34.548.000,00
12	Kabanjahe	954.891.500,00	129.042.042	825.849.458,00	756.742.698,00	198.148.802,00
13	Berastagi	597.257.000,00	158.202.466	439.054.534,00	521.602.223,00	75.654.777,00
14	Korpri	493.489.400,00	1.190.815	492.298.585,00	437.208.811,00	56.280.589,00
15	Tigapanah	739.846.000,00	82.936.000	656.910.000,00	688.366.400,00	51.479.600,00
16	Singa	493.837.750,00	35.276.554	458.561.196,00	461.376.010,00	32.461.740,00
17	Dolat Rayat	475.882.000,00	9.099.620	324.017.780,00	228.257.000,00	104.860.400,00
18	Merek	627.216.000,00	126.100.455	501.115.545,00	527.579.128,00	99.636.872,00
19	Barusjahe	706.958.400,00	60.657.496	646.300.904,00	694.658.395,00	12.300.005,00
Total		**11.924.334.000,00**	**1.527.293.974,00**	**10.254.275.426,00**	**10.160.771.443,00**	**1.620.797.957,00**

Lampiran 23

Rincian Piutang Pajak Hotel-Losmen
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Kecamatan	Saldo Awal					Mutasi Kurang					Total Piutang
		2013	2014	2015	2016	Jumlah	2013	2014	2015	2016	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13=(7-12)
1	Kabanjahe	0,00	420.000,00	500.000,00	1.360.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00
2	Berastagi	0,00	300.000,00	250.000,00	880.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
3	Merdeka	1.025.000,00	6.240.000,00	5.750.000,00	1.160.000,00	14.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175.000,00
4	Merek	50.000,00	200.000,00	750.000,00	960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
Jumlah		**1.075.000,00**	**7.160.000,00**	**7.250.000,00**	**4.360.000,00**	**19.845.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.845.000,00**

Lampiran 24

Rincian Piutang Pajak Restoran-Rumah Makan dan Cafetaria
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Kecamatan	Saldo Awal								Mutasi Kurang								Total Piutang
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(3+4+5+6+7+8+9)	11	12	13	14	15	16	17	18=(11+12+13+14+15+16+17)	19=(10-18)
1	Kabanjahe	2.920.000,00	22.475.000,00	11.725.000,00	2.043.000,00	15.160.000,00	17.785.000,00	21.963.000,00	94.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.071.000,00
2	Berastagi	0,00	0,00	0,00	0,00	17.025.162,00	11.070.000,00	22.890.000,00	50.985.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.985.162,00
3	Tiga Panah	0,00	2.140.000,00	0,00	155.000,00	5.160.000,00	2.245.000,00	3.110.000,00	12.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810.000,00
4	Tiga Binanga	0,00	0,00	1.755.000,00	980.000,00	9.730.000,00	10.685.000,00	6.845.000,00	29.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.995.000,00
5	Merek	0,00	1.582.000,00	0,00	4.030.000,00	9.520.000,00	9.350.000,00	10.630.000,00	35.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112.000,00
6	Merdeka	0,00	0,00	3.185.000,00	1.065.000,00	7.590.000,00	1.545.000,00	365.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750.000,00
7	Dolat Rayat	0,00	0,00	3.460.000,00	290.000,00	5.940.000,00	1.560.000,00	1.665.000,00	12.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915.000,00
8	Simpang Empat	0,00	0,00	0,00	30.000,00	140.000,00	1.410.000,00	1.100.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
9	Lau Baleng	0,00	3.225.000,00	950.000,00	2.760.000,00	7.600.000,00	2.380.000,00	4.380.000,00	21.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.000,00
10	Mardingding	0,00	1.670.000,00	2.725.000,00	1.510.000,00	2.605.000,00	3.065.000,00	3.450.000,00	15.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025.000,00
11	Tiganderket	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.000,00	5.260.000,00	2.245.000,00	10.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845.000,00
12	Barusjahe	0,00	0,00	20.000,00	1.550.000,00	6.845.000,00	2.665.000,00	1.530.000,00	12.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610.000,00
13	Naman Teran	0,00	0,00	0,00	790.000,00	785.000,00	805.000,00	1.150.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.000,00
14	Juhar	0,00	80.000,00	0,00	2.120.000,00	8.230.000,00	8.605.000,00	7.625.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.660.000,00
15	Kutabuluh	0,00	0,00	20.000,00	970.000,00	3.930.000,00	2.910.000,00	8.850.000,00	16.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680.000,00
16	Payung	0,00	1.290.000,00	2.440.000,00	3.235.000,00	5.330.000,00	6.655.000,00	2.830.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780.000,00
17	Munte	0,00	1.970.000,00	265.000,00	440.000,00	3.150.000,00	1.060.000,00	880.000,00	7.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765.000,00
Jumlah		**2.920.000,00**	**34.432.000,00**	**26.545.000,00**	**21.968.000,00**	**112.080.162,00**	**89.055.000,00**	**101.508.000,00**	**388.508.162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.508.162,00**

Lampiran 25

Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Kecamatan	Realisasi Objek Pajak Baru	MUTASI TAMBAH 2025				Mutasi Kurang							Realisasi Denda Piutang							Total Penerimaan 2025
			DHKP	Realisasi		Piutang	2024	2023	2022	2021	2020	≤2019	Jumlah	2024	2023	2022	2021	2020	≤2019	Jumlah	
				Pokok	Denda																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Mardingding	1.854.978,00	91.069.112,00	85.701.615,00	47.370,00	5.367.497,00	5.300.225,00	-	24.650,00	-	68.768,00	54.411,00	5.448.054,00	-	-	11.832,00	-	33.009,00	26.118,00	70.959,00	**93.122.976,00**
2	Tiga Binanga	9.117.474,00	238.346.045,00	177.298.028,00	309.443,00	61.048.017,00	2.831.192,00	1.723.746,00	1.899.074,00	1.015.071,00	772.103,00	4.462.079,00	12.703.265,00	209.423,00	522.964,00	596.265,00	326.746,00	253.506,00	1.951.943,00	3.860.847,00	**203.289.057,00**
3	Juhar	2.138.315,00	130.997.230,00	111.729.187,00	100.308,00	19.268.043,00	2.043.264,00	15.756,00	15.756,00	15.756,00	-	327.049,00	2.417.581,00	142.103,00	-	-	-	-	4.590,00	146.693,00	**116.532.084,00**
4	Munte	11.714.938,00	217.470.980,00	186.982.795,00	61.827,00	30.488.185,00	912.555,00	577.850,00	562.581,00	520.942,00	439.091,00	3.408.891,00	6.421.910,00	45.689,00	154.831,00	169.022,00	133.925,00	103.932,00	1.046.713,00	1.654.112,00	**206.835.582,00**
5	Kutabuluh	425.847,00	96.765.177,00	75.794.821,00	47.303,00	20.970.356,00	109.223,00	68.570,00	123.940,00	186.304,00	93.059,00	821.139,00	1.402.235,00	6.676,00	1.300,00	18.376,00	18.376,00	30.616,00	81.600,00	156.944,00	**77.827.150,00**
6	Payung	2.124.075,00	87.929.459,00	45.820.650,00	68.025,00	42.108.809,00	3.535.618,00	62.538,00	100.399,00	102.771,00	55.805,00	691.428,00	4.548.559,00	23.184,00	15.603,00	33.877,00	33.540,00	18.442,00	331.885,00	456.531,00	**53.017.840,00**
7	Simpang Empat	10.460.385,00	209.161.068,00	91.240.686,00	214.986,00	117.920.382,00	5.088.217,00	3.151.211,00	2.589.310,00	1.268.276,00	900.054,00	3.679.588,00	16.676.656,00	266.744,00	705.139,00	630.004,00	440.111,00	289.976,00	1.097.552,00	3.429.526,00	**122.022.239,00**
8	Kabanjahe	125.445.650,00	3.112.809.913,00	1.158.142.476,00	4.491.796,00	1.954.667.437,00	171.551.122,00	65.690.491,00	55.186.465,00	45.926.345,00	36.567.605,00	280.762.224,00	655.684.252,00	10.140.395,00	15.648.005,00	13.091.401,00	10.278.924,00	7.473.559,00	38.679.847,00	95.312.131,00	**2.039.076.305,00**
9	Tiga Panah	68.756.571,00	602.311.217,00	360.889.740,00	240.403,00	241.421.477,00	25.130.880,00	10.149.278,00	8.175.469,00	3.530.584,00	2.168.751,00	14.191.008,00	63.345.970,00	1.219.054,00	1.784.333,00	1.450.602,00	941.585,00	787.682,00	4.929.673,00	11.112.929,00	**504.345.613,00**
10	Barusjahe	7.136.892,00	172.751.200,00	115.660.503,00	81.095,00	57.090.697,00	3.469.863,00	1.984.774,00	2.121.332,00	484.537,00	511.641,00	4.355.660,00	12.927.807,00	133.216,00	257.090,00	295.606,00	72.342,00	140.450,00	1.395.035,00	2.293.739,00	**138.100.036,00**
11	Lau Baleng	3.630.073,00	101.657.868,00	93.339.073,00	16.838,00	8.318.795,00	115.192,00	112.974,00	79.642,00	104.142,00	198.698,00	887.782,00	1.498.430,00	3.909,00	16.252,00	4.982,00	16.742,00	-	318.777,00	360.662,00	**98.845.076,00**
12	Berastagi	63.486.217,00	2.489.579.195,00	1.581.802.889,00	785.402,00	907.776.306,00	118.299.415,00	76.997.006,00	69.501.927,00	37.115.654,00	12.965.971,00	147.143.280,00	462.023.253,00	4.681.982,00	7.804.948,00	6.659.041,00	6.301.559,00	4.661.726,00	39.252.913,00	69.362.169,00	**2.177.459.930,00**
13	Merek	24.089.432,00	519.632.609,00	374.416.192,00	354.208,00	145.216.417,00	36.926.780,00	15.857.904,00	15.570.802,00	6.358.204,00	4.334.530,00	12.923.399,00	91.971.619,00	891.612,00	2.039.757,00	1.117.955,00	935.731,00	779.944,00	2.062.960,00	7.827.959,00	**498.659.410,00**
14	Tiganderket	2.299.013,00	144.118.544,00	106.784.059,00	166.651,00	37.334.485,00	123.419,00	36.251,00	40.000,00	50.493,00	20.000,00	370.986,00	641.149,00	7.684,00	15.190,00	20.070,00	25.107,00	9.600,00	178.074,00	255.725,00	**110.146.597,00**
15	Naman Teran	12.250,00	52.881.477,00	44.590.357,00	-	8.291.120,00	105.743,00	49.203,00	-	27.723,00	27.723,00	61.576,00	271.968,00	12.465,00	16.000,00	-	7.138,00	7.138,00	23.388,00	66.129,00	**44.940.704,00**
16	Merdeka	9.730.096,00	355.395.286,00	305.211.844,00	346.189,00	50.183.442,00	5.682.538,00	1.300.394,00	1.452.825,00	1.536.189,00	866.901,00	2.751.245,00	13.590.092,00	382.576,00	275.598,00	433.111,00	321.169,00	373.451,00	907.783,00	2.693.688,00	**331.571.909,00**
17	Dolat Rayat	26.810.811,00	538.531.095,00	346.270.635,00	365.029,00	192.260.460,00	34.026.949,00	16.593.253,00	11.265.098,00	5.833.856,00	4.112.073,00	32.138.441,00	103.969.670,00	1.921.917,00	4.252.683,00	2.139.640,00	1.592.149,00	892.444,00	5.344.550,00	16.143.383,00	**493.559.528,00**
	Jumlah	**369.233.017,00**	**9.161.407.475,00**	**5.261.675.550,00**	**7.696.873,00**	**3.899.731.925,00**	**415.252.195,00**	**194.371.199,00**	**168.709.270,00**	**104.076.847,00**	**64.102.773,00**	**509.030.186,00**	**1.455.542.470,00**	**20.088.629,00**	**33.509.693,00**	**26.671.784,00**	**21.445.144,00**	**15.855.475,00**	**97.633.401,00**	**215.204.126,00**	**7.309.352.036,00**

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	2020	≤2019	Jumlah
Saldo Awal 2025		4.053.987.076,00	2.884.388.720,00	2.758.350.301,00	2.538.320.293,00	2.255.800.348,00	29.691.246.803,48	**44.182.093.541,48**
Mutasi Kurang 2025		415.252.195,00	194.371.199,00	168.709.270,00	104.076.847,00	64.102.773,00	509.030.186,00	**1.455.542.470,00**
Piutang		3.638.734.881,00	2.690.017.521,00	2.589.641.031,00	2.434.243.446,00	2.191.697.575,00	29.182.216.617,48	**42.726.551.071,48**
Mutasi Tambah 2025 Perkotaan dan Pedesaan	3.899.731.925,00							**3.899.731.925,00**
Total Piutang								**46.626.282.996,48**

Lampiran 26

Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun	Saldo Awal	Penambahan Piutang	Pembayaran Piutang	Koreksi Pencatatan Piutang	Saldo Akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+5-6-7)	
1	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Nopember	2020	3.975.000,00	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	
2	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Desember	2020	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
3	Klaim pelayanan pasien Covid-19	2020	404.080.900,00	0,00	0,00	0,00	404.080.900,00	
4	Klaim rawat inap dan rawat jalan pasien BPJS - kasus pending	2020	530.751.313,00	0,00	0,00	0,00	530.751.313,00	
5	Klaim pelayanan ambulance pasien BPJS bulan Desember	2020	719.800,00	0,00	0,00	0,00	719.800,00	
6	Klaim Obat Kronis pasien BPJS pendingan/susulan	2020	153.846.154,00	0,00	0,00	0,00	153.846.154,00	
7	Klaim pelayanan pemeriksaan TB-MDR TW IV 2020	2020	1.780.750,00	0,00	0,00	0,00	1.780.750,00	
8	Klaim pelayanan pasien Covid-19	2021	191.165.920,00	0,00	0,00	0,00	191.165.920,00	
9	Klaim Obat Kronis pasien BPJS pendingan/susulan	2021	25.006.287,00	0,00	0,00	0,00	25.006.287,00	
10	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Desember 2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Klaim Obat Kronis pasien BPJS bulan Desember	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Klaim pelayanan ambulance pasien BPJS bulan Desember	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Klaim Pending rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Juli-Desember 2023	2023	61.931.150,00	0,00	0,00	0,00	61.931.150,00	
14	Klaim pelayanan pasien covid	2023	350.317.000,00	0,00	350.317.000,00	0,00	0,00	
15	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Nopember	2024	1.464.164.200,00	0,00	1.464.164.200,00	0,00	0,00	
16	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Desember	2024	1.252.004.550,00	0,00	1.252.004.550,00	0,00	0,00	
17	Klaim pending rawat inap dan jalan	2024	825.848.000,00	0,00	686.070.700,00	139.777.300,00	0,00	Lebih catat karena pada saat pencatatan piutang berdasarkan nilai BA pengajuan dan belum rekon klaim dengan BPJS (klaim Juni, Oktober-Desember 2024)
18	Klaim Obat Kronis pasien BPJS bulan Desember	2024	247.127.806,00	0,00	247.127.806,00	0,00	0,00	
19	Klaim pending pelayanan obat kronis pasien BPJS	2024	2.589.047,00	0,00	2.589.047,00	0,00	0,00	
20	Klaim pelayanan ambulance pasien BPJS bulan Desember	2024	7.861.500,00	0,00	7.861.500,00	0,00	0,00	
21	Klaim kantong darah pasien BPJS	2024	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	0,00	0,00	
22	Klaim pelayanan pemeriksaan TB-MDR dan TB RO	2024	20.771.000,00	0,00	20.771.000,00	0,00	0,00	
23	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Desember	2025	0,00	2.107.296.600,00	0,00	0,00	2.107.296.600,00	
24	Klaim pending rawat inap dan jalan bulan Juli s.d Desember	2025	0,00	852.544.150,00	0,00	0,00	852.544.150,00	
25	Klaim Obat Kronis pasien BPJS bulan Desember	2025	0,00	311.196.394,00	0,00	0,00	311.196.394,00	
26	Klaim pelayanan ambulance pasien BPJS bulan Desember	2025	0,00	27.042.000,00	0,00	0,00	27.042.000,00	
Total Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan			**5.552.223.277,00**	**3.298.079.144,00**	**4.039.185.803,00**	**139.777.300,00**	**4.671.339.318,00**	

Rincian Penambahan dan Pengurangan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo Awal		**5.552.223.277,00**	**0,00**
Koreksi Saldo Awal (Reklas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Piutang Pendapatan BLUD Jasa Layanan)		**0,00**	**3.629.135.453,00**
Mutasi Tambah :		***3.298.079.144,00***	***3.828.646.103,00***
1	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Nopember	0,00	1.464.164.200,00
2	Klaim pending rawat inap dan jalan bulan Juli s.d Desember	852.544.150,00	0,00
3	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Desember	2.107.296.600,00	1.252.004.550,00
4	Klaim pending rawat inap dan jalan	0,00	825.848.000,00
5	Klaim Obat Kronis pasien BPJS bulan Desember	311.196.394,00	247.127.806,00
6	Klaim pending pelayanan obat kronis pasien BPJS	0,00	2.589.047,00
7	Klaim pelayanan ambulance pasien BPJS bulan Desember	27.042.000,00	7.861.500,00
8	Klaim kantong darah pasien BPJS	0,00	8.280.000,00
9	Klaim pelayanan pemeriksaan TB-MDR dan TB RO	0,00	20.771.000,00
Mutasi Kurang :		***4.178.963.103,00***	***1.905.558.279,00***
1	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Desember 2023	0,00	1.410.287.100,00
2	Klaim pelayanan pasien covid	350.317.000,00	0,00
3	Klaim Pending rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Juli-Desember 2023	0,00	310.978.600,00
4	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Nopember	1.464.164.200,00	0,00
5	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Desember	1.252.004.550,00	0,00
6	Klaim pending rawat inap dan jalan	686.070.700,00	0,00
7	Klaim Obat Kronis pasien BPJS bulan Desember	247.127.806,00	179.232.579,00
8	Klaim pending pelayanan obat kronis pasien BPJS	2.589.047,00	0,00
9	Klaim pelayanan ambulance pasien BPJS bulan Desember	7.861.500,00	5.060.000,00
10	Klaim kantong darah pasien BPJS	8.280.000,00	0,00
11	Klaim pelayanan pemeriksaan TB-MDR dan TB RO	20.771.000,00	0,00
12	Koreksi pencatatan piutang 2024	139.777.300,00	0,00
Total Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		**4.671.339.318,00**	**5.552.223.277,00**

Lampiran 28

Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios
Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo
Tahun 2025

No.	Nama Pasar	Saldo Awal															Jumlah Saldo Awal
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17
1	Kabanjahe	19.788.400,00	20.704.000,00	11.188.000,00	11.004.000,00	16.310.000,00	15.243.800,00	15.504.000,00	20.157.800,00	28.570.000,00	27.642.000,00	16.392.000,00	15.841.400,00	27.121.200,00	0,00	0,00	245.466.600,00
2	Berastagi	9.169.500,00	12.166.000,00	6.060.000,00	4.488.000,00	14.378.000,00	27.199.400,00	11.645.600,00	20.837.200,00	29.463.400,00	57.952.700,00	24.222.700,00	27.149.000,00	44.919.200,00	0,00	0,00	289.650.700,00
3	Tiga Binanga	10.128.000,00	15.957.000,00	7.150.500,00	8.574.000,00	8.955.000,00	8.116.500,00	11.123.500,00	4.465.500,00	4.270.500,00	3.856.500,00	7.290.000,00	11.136.250,00	12.244.500,00	0,00	0,00	113.267.750,00
4	Tiganderket	6.636.000	10.116.000,00	11.460.000,00	3.564.000,00	2.268.000,00	1.728.000,00	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	936.000,00	0,00	0,00	38.652.000,00
5	Lau Baleng	7.272.000,00	3.132.000,00	2.682.000,00	4.500.000,00	2.010.000,00	603.000,00	828.000,00	1.295.000,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.953.000,00
6	Mardingding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kutabuluh	384.000,00	912.000,00	306.000,00	846.000,00	648.000,00	0,00	324.000,00	648.000,00	324.000,00	648.000,00	1.583.000,00	2.670.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	12.821.000,00
8	Merek	4.140.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630.000,00
9	Tiga Panah	792.000,00	2.928.000,00	3.360.000,00	2.400.000,00	1.440.000,00	1.680.000,00	2.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	15.492.000,00
10	Barusjahe	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	126.000,00	1.080.000,00	648.000,00	0,00	72.000,00	0,00	324.000,00	756.000,00	0,00	0,00	3.258.000,00
11	Munte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.000,00	4.680.000,00	6.912.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00
Total		**58.309.900,00**	**70.865.000,00**	**42.206.500,00**	**35.376.000,00**	**46.261.000,00**	**54.696.700,00**	**44.225.100,00**	**48.051.500,00**	**63.258.900,00**	**93.969.200,00**	**54.437.700,00**	**64.464.650,00**	**98.468.900,00**	**0,00**	**0,00**	**774.591.050,00**

N0.	Nama Pasar	Mutasi Kurang															Jumlah Realisasi	Total Piutang
		Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025		
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34=(19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)	35=(18-34)
1	KABANJAHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	1.116.000,00	3.018.000,00	3.468.000,00	3.780.000,00	5.841.400,00	11.341.400,00	0,00	0,00	28.996.800,00	216.469.800,00
2	BERASTAGI	324.000,00	0,00	80.000,00	112.000,00	0,00	584.000,00	715.200,00	2.216.000,00	4.325.300,00	7.278.200,00	10.748.500,00	14.238.800,00	24.896.000,00	0,00	0,00	65.518.000,00	224.132.700,00
3	TIGABINANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.267.750,00
4	TIGANDERKET	288.000,00	864.000	1.944.000,00	288.000,00	1.332.000,00	1.296.000,00	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	8.460.000,00	30.192.000,00
5	LAUBALENG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.953.000,00
6	MARDINGDING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	KUTABULUH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.821.000,00
8	MEREK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630.000,00
9	TIGAPANAH	288.000	1.296.000	480.000,00	672.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888.000,00	11.604.000,00
10	BARUSJAHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.000,00
11	MUNTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	22.968.000,00
Total		**900.000,00**	**2.160.000,00**	**2.504.000,00**	**1.072.000,00**	**1.332.000,00**	**1.880.000,00**	**3.811.200,00**	**3.332.000,00**	**7.343.300,00**	**10.746.200,00**	**14.528.500,00**	**20.080.200,00**	**37.605.400,00**	**0,00**	**0,00**	**107.294.800,00**	**667.296.250,00**

Lampiran 29

Rincian Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
Pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain						
1	Dinas Kesehatan	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	63.231.610,99	0,00	63.231.610,99
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	181.031.337,68	0,00	181.031.337,68
3	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	65.505.892,99	0,00	65.505.892,99
Total Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain			**0,00**	**309.768.841,66**	**0,00**	**309.768.841,66**

Lampiran 30

Rincian Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan						
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	CV Guna Utama	7.565.080,07	0,00	7.565.080,07	0,00
2		CV Pratama Agung Perkasa	11.881.637,93	0,00	11.881.637,93	0,00
3		PT Empat Pilar	17.769.021,00	0,00	17.769.021,00	0,00
4		CV Arca Kencana	1.919.770,00	0,00	1.919.770,00	0,00
5		CV Kata Hati Kita	676.549,61	0,00	676.549,61	0,00
6		Faris Pratama	2.846.285,00	0,00	2.846.285,00	0,00
Total Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			**42.658.343,61**	**0,00**	**42.658.343,61**	**0,00**

Lampiran 31

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Losmen
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Uraian	Kualitas Piutang					Kualitas Penyisihan Piutang					Jumlah Piutang Bersih
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
		Umur Piutang 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang >1-2 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang >2-5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang >5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Jumlah Piutang	Umur Piutang 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp) (0.50%)	Umur Piutang >1-2 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp) (10%)	Umur Piutang >2-5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp) (50%)	Umur Piutang >5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp) (100%)	Jumlah Penyisihan Piutang	
1	Piutang Losmen	0,00	0,00	0,00	19.845.000,00	19.845.000,00	0,00	0,00	0,00	19.845.000,00	19.845.000,00	0,00

Lampiran 32

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Rumah Makan dan Sejenisnya
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Uraian	Kualitas Piutang					Kualitas Penyisihan Piutang					Jumlah Piutang Bersih
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
		Umur Piutang 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang >1-2 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang >2-5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang >5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Jumlah Piutang	Umur Piutang 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp) (0.50%)	Umur Piutang >1-2 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp) (10%)	Umur Piutang >2-5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp) (50%)	Umur Piutang >5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp) (100%)	Jumlah Penyisihan Piutang	
1	Piutang Rumah Makan dan Cafetaria	0,00	0,00	0,00	388.508.162,00	388.508.162,00	0,00	0,00	0,00	388.508.162,00	388.508.162,00	0,00

Lampiran 33

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Uraian	Kualitas Piutang					Kualitas Penyisihan Piutang					Jumlah Piutang Bersih
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah Piutang	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah Penyisihan Piutang	
		Umur Piutang <1 Tahun (Rp)	Umur Piutang ≥1 s/d <2 Tahun (Rp)	Umur Piutang ≥2 s/d <5 Tahun (Rp)	Umur Piutang ≥ 5 Tahun (Rp)		Umur Piutang 1 Tahun (Rp) (0.5%)	Umur Piutang 1 - 2 Tahun (Rp) (10%)	Umur Piutang 3 - 5 Tahun (Rp) (50%)	Umur Piutang Diatas 5 Tahun (Rp) (100%)		
1	Piutang PBBP2	3.899.731.925,00	6.328.752.402,00	7.215.582.052,00	29.182.216.617,48	46.626.282.996,48	19.498.659,63	632.875.240,20	3.607.791.026,00	29.182.216.617,48	33.442.381.543,31	13.183.901.453,17

Lampiran 34

Rincian Penyisihan Piutang Pelayanan Kesehatan
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Jenis Piutang	Kualitas Piutang				Jumlah Piutang	Kualitas Penyisihan				Koreksi	Jumlah Penyisihan Piutang	Jumlah Piutang Bersih
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
		Umur Piutang Kurang dari 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang 1 s/d 2 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang 2 s/d 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang diatas 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)		Umur Piutang Kurang dari 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp) (0.50%)	Umur Piutang 1 s/d 2 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp) (10%)	Umur Piutang 2 s/d 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp) (50%)	Umur Piutang diatas 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp) (100%)			
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14=(7-13)
	Piutang Retribusi Jasa Umum (Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah)												
1	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Nopember Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	0,00	3.975.000,00	0,00
2	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Desember Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3	Klaim pelayanan pasien Covid-19, Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	404.080.900,00	404.080.900,00	0,00	0,00	0,00	404.080.900,00	0,00	404.080.900,00	0,00
4	Klaim rawat inap dan rawat jalan pasien BPJS - kasus pending Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	530.751.313,00	530.751.313,00	0,00	0,00	0,00	530.751.313,00	0,00	530.751.313,00	0,00
5	Klaim pelayanan ambulance pasien BPJS bulan Desember Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	719.800,00	719.800,00	0,00	0,00	0,00	719.800,00	0,00	719.800,00	0,00
6	Klaim Obat Kronis pasien BPJS pendingan/susulan Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	153.846.154,00	153.846.154,00	0,00	0,00	0,00	153.846.154,00	0,00	153.846.154,00	0,00
7	Klaim pelayanan pemeriksaan TB-MDR TW IV 2020	0,00	0,00	0,00	1.780.750,00	1.780.750,00	0,00	0,00	0,00	1.780.750,00	0,00	1.780.750,00	0,00
8	Klaim pelayanan pasien Covid-19 Tahun 2021	0,00	0,00	191.165.920,00	0,00	191.165.920,00	0,00	0,00	95.582.960,00	0,00	0,00	95.582.960,00	95.582.960,00
9	Klaim Obat Kronis pasien BPJS pendingan/susulan Tahun 2021	0,00	0,00	25.006.287,00	0,00	25.006.287,00	0,00	0,00	12.503.143,50	0,00	0,00	12.503.143,50	12.503.143,50
10	Klaim Pending rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Juli-Desember 2023	0,00	0,00	61.931.150,00	0,00	61.931.150,00	0,00	0,00	30.965.575,00	0,00	0,00	30.965.575,00	30.965.575,00
11	Klaim pelayanan pasien covid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Nopember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Klaim pending rawat inap dan jalan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Klaim Obat Kronis pasien BPJS bulan Desember	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Klaim pending pelayanan obat kronis pasien BPJS 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Klaim pelayanan ambulance pasien BPJS bulan Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Klaim kantong darah pasien BPJS 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Klaim pelayanan pemeriksaan TB-MDR dan TB RO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Klaim rawat inap dan jalan pasien BPJS bulan Desember	2.107.296.600,00	0,00	0,00	0,00	2.107.296.600,00	10.536.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.536.483,00	2.096.760.117,00
21	Klaim pending rawat inap dan jalan bulan Juli s.d Desember	852.544.150,00	0,00	0,00	0,00	852.544.150,00	4.262.720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262.720,75	848.281.429,25
22	Klaim Obat Kronis pasien BPJS bulan Desember	311.196.394,00	0,00	0,00	0,00	311.196.394,00	1.555.981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.981,97	309.640.412,03
23	Klaim pelayanan ambulance pasien BPJS bulan Desember	27.042.000,00	0,00	0,00	0,00	27.042.000,00	135.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.210,00	26.906.790,00
Total Penyisihan Piutang Pelayanan Kesehatan		**3.298.079.144,00**	**0,00**	**278.103.357,00**	**1.095.156.817,00**	**4.671.339.318,00**	**16.490.395,72**	**0,00**	**139.051.678,50**	**1.095.156.817,00**	**0,00**	**1.250.698.891,22**	**3.420.640.426,78**

Lampiran 35

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios
Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Uraian	Kualitas Piutang					Kualitas Penyisihan Piutang					Jumlah Piutang Bersih
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah Piutang	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah Penyisihan Piutang	
		Umur Piutang Kurang dari 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo	Umur Piutang 1 s/d 2 Tahun sejak tanggal jatuh tempo	Umur Piutang 2 s/d 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo	Umur Piutang diatas 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo		Umur Piutang Kurang dari 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (0,50%)	Umur Piutang 1 s/d 2 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (10%)	Umur Piutang 2 s/d 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (50 %)	Umur Piutang diatas 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (100 %)		
1	Piutang Retribusi Kios	0,00	0,00	0,00	667.296.250,00	667.296.250,00	0,00	0,00	0,00	667.296.250,00	667.296.250,00	0,00

Skedul Pencatatan Umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir
Pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
I.	**Penyaluran TA. 2006**									
	A. Usaha Kecil									
1	Gelora Ginting	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
2	Wandi Pinem	18/12/2006	20/12/2012	7.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	7.000.000,00	-
3	Amrin S. Kembaren	18/12/2006	20/12/2012	10.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	10.000.000,00	-
4	Suherni	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
5	Inam Tarigan	18/12/2006	20/12/2012	10.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	10.000.000,00	-
6	Darna Karo-Karo	18/12/2006	20/12/2012	10.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	10.000.000,00	-
7	Penembahen Perangin-angin	18/12/2006	20/12/2012	8.500.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	8.500.000,00	-
8	Jarden Damanik	18/12/2006	20/12/2012	10.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	10.000.000,00	-
9	Daneri Tarigan	18/12/2006	20/12/2012	9.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	9.000.000,00	-
10	Osaka Hendra Ginting	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
11	Bujur Sinuhaji	18/12/2006	20/12/2012	10.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	10.000.000,00	-
12	Elias Ginting	18/12/2006	20/12/2012	10.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	10.000.000,00	-
13	Prinsip Tarigan	18/12/2006	20/12/2012	6.500.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	6.500.000,00	-
14	Usaha Ginting	18/12/2006	20/12/2012	9.750.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	9.750.000,00	-
15	Lester Br Ginting	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
16	Marina Fransiska Tarigan	18/12/2006	20/12/2012	8.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	8.000.000,00	-
17	Ingan Muli Br Tarigan	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
18	Hotman Br Haloho	18/12/2006	20/12/2012	5.107.300,00	41.263	4.394	Macet	100,00	5.107.300,00	-
19	Ramayanto	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
20	Armen Ginting	18/12/2006	20/12/2012	10.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	10.000.000,00	-
21	Musa Sitepu	18/12/2006	20/12/2012	10.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	10.000.000,00	-
22	Prayatno Bangun, ST	18/12/2006	20/12/2012	10.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	10.000.000,00	-
23	Sejahtera Ginting	18/12/2006	20/12/2012	7.500.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	7.500.000,00	-
24	Manumpal Simbolon	18/12/2006	20/12/2012	8.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	8.000.000,00	-
25	Martin Luter Surbakti	18/12/2006	20/12/2012	9.250.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	9.250.000,00	-
26	Ralim Tarigan	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
27	Aprida S. Br Ginting	18/12/2006	20/12/2012	8.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	8.000.000,00	-
28	Nurlela Br Barus	18/12/2006	20/12/2012	9.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	9.000.000,00	-
29	Sempurna Ginting	18/12/2006	20/12/2012	10.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	10.000.000,00	-
30	Suhardi Tarigan	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
31	Marulak Simbolon	18/12/2006	20/12/2012	8.550.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	8.550.000,00	-
32	Guna Tarigan	18/12/2006	20/12/2012	10.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	10.000.000,00	-

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
33	Mirza Kurniawan	18/12/2006	20/12/2012	6.349.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	6.349.000,00	-
34	Junedy HP Silalahi	18/12/2006	20/12/2012	9.675.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	9.675.000,00	-
35	Lasnawaty Manik	18/12/2006	20/12/2012	8.500.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	8.500.000,00	-
36	Marika Simanulang	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
	JUMLAH USAHA KECIL			**238.681.300,00**					**238.681.300,00**	**-**
	B. KOPERASI									
1	KPN Karya Bina	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
2	KPN Diknas	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
3	KPN RSU	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
4	KPN DKR	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
5	KPN Anta Kupa	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
6	KPN Adiguna Merim	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
7	KUD Singalor Lau	18/12/2006	20/12/2012	21.250.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	21.250.000,00	-
8	KSU Sekata Tuhu	18/12/2006	20/12/2012	19.375.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	19.375.000,00	-
9	KUD Anjangsana	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
10	KSP Mitra Sejati	18/12/2006	20/12/2012	18.750.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	18.750.000,00	-
11	Kopkar Tirta Malem	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
12	KUD Sumarame	18/12/2006	20/12/2012	15.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	15.000.000,00	-
13	KUD Aji Siempat	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
14	KUP Gong 2000	18/12/2006	20/12/2012	25.000.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	25.000.000,00	-
15	KSU Bintang Tani Jaya	18/12/2006	20/12/2012	22.125.000,00	41.263	4.394	Macet	100,00	22.125.000,00	-
16	Kopkar UKA	18/12/2006	20/12/2012	-	41.263	4.394	Macet	100,00	-	-
	JUMLAH KOPERASI			**121.500.000,00**					**121.500.000,00**	**-**
	TOTAL PENYALURAN TA. 2006			**360.181.300,00**					**360.181.300,00**	**-**
II.	**Penyaluran TA. 2007**									
	A. USAHA KECIL									
1	Salmon Karo-Karo	24/09/2007	20/09/2013	8.500.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	8.500.000,00	-
2	Ir. Sahala Saragih	24/09/2007	20/09/2013	10.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	10.000.000,00	-
3	Kaisar Tarigan	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
4	Nurita Erna Br Saragih	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
5	Gelir Tarigan	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
6	Drs. Ahmat Jhon Sikumbang	24/09/2007	20/09/2013	9.250.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.250.000,00	-
7	Tuah Bastari Barus	24/09/2007	20/09/2013	7.500.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	7.500.000,00	-
8	Gembira Kaban	24/09/2007	20/09/2013	8.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	8.000.000,00	-
9	Tambarta Kabrena Br. K	24/09/2007	20/09/2013	9.750.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.750.000,00	-
10	Masmur Purba	24/09/2007	20/09/2013	7.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	7.000.000,00	-
11	Esterlina Ginting	24/09/2007	20/09/2013	9.250.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.250.000,00	-
12	Lilik Sumaryati	24/09/2007	20/09/2013	9.250.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.250.000,00	-
13	Herman Munte	24/09/2007	20/09/2013	9.750.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.750.000,00	-
14	Sahat Tambun	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
15	Persadaan Ginting	24/09/2007	20/09/2013	9.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.000.000,00	-
16	Madris	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
17	Sarifah Ginting	24/09/2007	20/09/2013	9.500.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.500.000,00	-
18	Berry Guano Tarigan	24/09/2007	20/09/2013	8.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	8.000.000,00	-
19	Tramuli Girsang	24/09/2007	20/09/2013	9.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.000.000,00	-
20	Karten Br Sembiring	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
21	Rosmina Br Purba	24/09/2007	20/09/2013	9.750.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.750.000,00	-
22	Pendy Karo-Karo	24/09/2007	20/09/2013	4.700.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	4.700.000,00	-
23	Salter A. Ginting, S.Kom	24/09/2007	20/09/2013	10.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	10.000.000,00	-
24	Sigiono Sajad	24/09/2007	20/09/2013	9.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.000.000,00	-
25	Seh Ate Br Tarigan	24/09/2007	20/09/2013	5.500.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.500.000,00	-
26	Juita Jenny	24/09/2007	20/09/2013	5.500.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.500.000,00	-
27	Jaman Ginting	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
28	Jhosep Rikky Sembiring	24/09/2007	20/09/2013	5.500.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.500.000,00	-
29	Salmon Ginting	24/09/2007	20/09/2013	9.750.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.750.000,00	-
30	Duplimery Tarigan	24/09/2007	20/09/2013	9.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.000.000,00	-
31	Riawati Br Ginting	24/09/2007	20/09/2013	10.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	10.000.000,00	-
32	Imanuel Perangin-angin	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
33	Iman Anata Bukit	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
	JUMLAH USAHA KECIL			**202.450.000,00**					**202.450.000,00**	**-**
	B. USAHA MIKRO									
1	Dina Sari Br Brahmana	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
2	Philip Tarigan	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
3	Sehat Sembiring, SH	24/09/2007	20/09/2013	5.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.000.000,00	-
4	Berlison Pelawi	24/09/2007	20/09/2013	4.250.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	4.250.000,00	-
5	Jenny Br Nasution	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
6	Jusuf Nopiandy Tarigan	24/09/2007	20/09/2013	5.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.000.000,00	-
7	Muraiman Sembiring	24/09/2007	20/09/2013	4.875.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	4.875.000,00	-
8	Terpinta Br Pinem	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
9	Nelson Sembiring	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
10	Muslim Surbakti	24/09/2007	20/09/2013	5.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.000.000,00	-
11	Davit Cristian Sitepu	24/09/2007	20/09/2013	5.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.000.000,00	-
12	Mason Sembiring	24/09/2007	20/09/2013	4.500.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	4.500.000,00	-
13	Ir. Johana Siregar	24/09/2007	20/09/2013	5.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.000.000,00	-
14	Imanuel Sembiring, SE	24/09/2007	20/09/2013	2.250.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	2.250.000,00	-
15	Sauttua P. Manihuruk	24/09/2007	20/09/2013	5.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.000.000,00	-
16	Mimbar Pencawan, SE	24/09/2007	20/09/2013	5.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.000.000,00	-
17	Paulus Ginting Suka	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
18	Syafril SK	24/09/2007	20/09/2013	5.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.000.000,00	-
19	Estepanus Surbakti	24/09/2007	20/09/2013	5.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.000.000,00	-
20	Irawati Br Ginting	24/09/2007	20/09/2013	5.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.000.000,00	-
21	Rahmat Lubis	24/09/2007	20/09/2013	5.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	5.000.000,00	-
	JUMLAH USAHA MIKRO			**70.875.000,00**					**70.875.000,00**	**-**
	C. KOPERASI									

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
1	KPN Diksar Kec. Kabanjahe	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
2	KPN Guru2 SD T. Binanga	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
3	KPN Pertanian	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
4	KPN Ikhlas Beramal	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
5	KPRI SMK 2 Berastagi	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
6	KPN Dispenda	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
7	KPN SMPN 2 Simpang IV	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
8	KPN Serbaguna Citra SMP 2 K.	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
9	KSU Bhakti Usaha	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
10	KUD Sada Kata	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
11	KUD Sugihen	24/09/2007	20/09/2013	20.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	20.000.000,00	-
12	Koppas Berastagi	24/09/2007	20/09/2013	18.465.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	18.465.000,00	-
13	KSU Wanita Mandiri	24/09/2007	20/09/2013	23.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	23.000.000,00	-
14	KSU Ora Et Labora	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
15	KUP Maju Jaya	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
16	Kopkar Sibayakindo	24/09/2007	20/09/2013	11.940.060,00	41.537	4.120	Macet	100,00	11.940.060,00	-
17	Kop. Adianta Progra	24/09/2007	20/09/2013	25.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	25.000.000,00	-
18	KSU Bunga Kapias	24/09/2007	20/09/2013	21.250.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	21.250.000,00	-
19	KSU Giat Bekerja	24/09/2007	20/09/2013	24.375.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	24.375.000,00	-
20	KSU Buah Leweh	24/09/2007	20/09/2013	23.750.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	23.750.000,00	-
21	Kop. Tani Karya Sipituhuta	24/09/2007	20/09/2013	9.750.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.750.000,00	-
22	KSU Mburak Sirobah	24/09/2007	20/09/2013	9.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.000.000,00	-
23	KSU Tiga Binanga	24/09/2007	20/09/2013	9.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	9.000.000,00	-
24	KSU Manise	24/09/2007	20/09/2013	10.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	10.000.000,00	-
25	KPN Karya Sadar	24/09/2007	20/09/2013	25.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	25.000.000,00	-
26	Primkoppol Polres	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
27	KPN Bupati Karo	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
28	KSU Raskita Jaya	24/09/2007	20/09/2013	25.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	25.000.000,00	-
29	KSU Jumanta Sadakata	24/09/2007	20/09/2013	23.750.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	23.750.000,00	-
30	Primkoptama	24/09/2007	20/09/2013	17.500.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	17.500.000,00	-
31	KUD Baru Munte	24/09/2007	20/09/2013	25.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	25.000.000,00	-
32	Kopdit Serayaan	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
33	KSU Iyan Permana	24/09/2007	20/09/2013	25.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	25.000.000,00	-
34	Kospin Namtari	24/09/2007	20/09/2013	13.750.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	13.750.000,00	-
35	KSU Garuda Merah Putih	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
36	KSU Adi Pura	24/09/2007	20/09/2013	10.000.000,00	41.537	4.120	Macet	100,00	10.000.000,00	-
37	KSU Maju Jaya	24/09/2007	20/09/2013	-	41.537	4.120	Macet	100,00	-	-
	JUMLAH KOPERASI			**370.530.060,00**					**370.530.060,00**	**-**
	TOTAL PENYALURAN TA. 2007			**643.855.060,00**						
III.	**PENYALURAN TA. 2008**									
	A. USAHA KECIL									
1	Suranta Girsang	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
2	Muhtar Ginting	10/09/2008	20/09/2014	9.500.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	9.500.000,00	-
3	Kasiyem, SE	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
4	Iperaim Sitepu	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
5	Joni Adasom Sebayang	10/09/2008	20/09/2014	8.500.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	8.500.000,00	-
6	Artonius S.	10/09/2008	20/09/2014	9.500.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	9.500.000,00	-
7	Selamat Tarigan	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
8	M. Hanyadni P. G	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
9	Sondang Manik	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
10	Jeremia Ginting	10/09/2008	20/09/2014	9.750.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	9.750.000,00	-
11	Resep Sitepu	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
12	Astati Br Tarigan	10/09/2008	20/09/2014	9.750.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	9.750.000,00	-
13	Bincar Kaban	10/09/2008	20/09/2014	8.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	8.000.000,00	-
14	Andromeda Tarigan	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
15	Timbas Ginting	10/09/2008	20/09/2014	2.888.892,00	41.902	3.755	Macet	100,00	2.888.892,00	-
16	Zakaria Barus	10/09/2008	20/09/2014	9.500.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	9.500.000,00	-
17	Sentosa Sembiring	10/09/2008	20/09/2014	7.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	7.000.000,00	-
18	M. Lindung Sinambela	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
19	Junedi Munthe	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
20	Edison Jayanta Ginting	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
21	Ksatria Ginting	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
22	Budiman Sinulingga	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
23	Perry Sembiring Brahmana	10/09/2008	20/09/2014	9.500.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	9.500.000,00	-
24	Sri Ulina Br Depari	10/09/2008	20/09/2014	6.500.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	6.500.000,00	-
25	Robinson Purba	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
26	Ponijan	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
27	Rifian Donari Tarigan	10/09/2008	20/09/2014	9.500.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	9.500.000,00	-
28	Berlin Kemit	10/09/2008	20/09/2014	9.750.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	9.750.000,00	-
29	Elia Edison S	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
30	Ir. Jeraya Sinulingga	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
31	Rhyka Andhyna GM	10/09/2008	20/09/2014	9.750.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	9.750.000,00	-
32	Reantina Br Purba	10/09/2008	20/09/2014	9.750.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	9.750.000,00	-
33	Iwanta Purba	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
34	Elfian Zuhri Nasution	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
35	Basman Sinulingga	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
36	Warta Bangun	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
37	Usdan Ginting	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
38	Harmonis Br Sembiring	10/09/2008	20/09/2014	9.500.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	9.500.000,00	-
39	Imanuel Barus, SE	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
40	Eva Ikafloren Br Tarigan	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
41	Ngadep Tarigan	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
42	Perdata Ginting	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
43	Adian Bangun	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
	JUMLAH USAHA KECIL			**338.638.892,00**					**338.638.892,00**	**-**

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
	B. USAHA MIKRO									
1	Supratman Surbakti	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
2	Agustinus Milala	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
3	Rencti Br Ginting	10/09/2008	20/09/2014	4.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	4.000.000,00	-
4	Kamsin Ginting	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
5	CH. Eduard Barus	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
6	Makmur Sitanggang	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
7	Ramli Barus	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
8	Tri Wiki H	10/09/2008	20/09/2014	4.250.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	4.250.000,00	-
9	Roberto Liasta Tarigan	10/09/2008	20/09/2014	4.625.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	4.625.000,00	-
10	Josep Surbakti	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
11	Eka Sri Ida Br Karo	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
12	Parman Sinurat	10/09/2008	20/09/2014	3.250.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	3.250.000,00	-
13	Aman Perangin-angin	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
14	Andri Hendriawan	10/09/2008	20/09/2014	4.500.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	4.500.000,00	-
15	Patria Karo-karo	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
16	R. Numpur Bangun	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
17	Nimawati Zebua	10/09/2008	20/09/2014	4.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	4.000.000,00	-
18	Sutarni	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
19	Matang Purba	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
20	Jhon Fredy Karo-Karo	10/09/2008	20/09/2014	4.750.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	4.750.000,00	-
21	Cahaya Hati Br Sinuraya	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
22	Belit Ginting	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
23	Riahna Br Ginting	10/09/2008	20/09/2014	2.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	2.000.000,00	-
24	Eddy Candra P	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
25	Elmando Sitompul, S.Com	10/09/2008	20/09/2014	2.900.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	2.900.000,00	-
26	Firdaus Sembiring	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
27	Marlon Tarigan	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
28	Marlina S	10/09/2008	20/09/2014	4.875.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	4.875.000,00	-
29	Nipat Br Baris	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
30	Manase Ginting	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
31	Bunga Anna Br Purba	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
32	Julia Ginting	10/09/2008	20/09/2014	4.250.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	4.250.000,00	-
33	Eron Ginting	10/09/2008	20/09/2014	3.250.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	3.250.000,00	-
34	Persatuan G.	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
35	Sumarni Br Brahmana	10/09/2008	20/09/2014	2.137.500,00	41.902	3.755	Macet	100,00	2.137.500,00	-
36	Vera Santi Br Sinulingga	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
37	Adil Ginting	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
38	Thomas Purba	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
39	Sempa Mitha Br Milala	10/09/2008	20/09/2014	4.875.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	4.875.000,00	-
40	Alemida Br Keliat	10/09/2008	20/09/2014	4.625.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	4.625.000,00	-
41	Hendrik Ginting	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
42	Brenmalem Br Sembiring	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
43	Kontesa Br Ginting	10/09/2008	20/09/2014	3.919.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	3.919.000,00	-
44	Markasta Sinulingga	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
45	Anita Apulina Br Sebayang	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
46	Dema Yahtuti	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
47	Roslina Br Butar-butar	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
48	Herman G. Sembiring	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
49	Syarifah Hanum Nasution	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
50	Neriwati Br Sembiring	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
51	Frida Br Sitepu	10/09/2008	20/09/2014	2.250.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	2.250.000,00	-
52	Artanus Sinukaban	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
53	Edy Kumar Sembiring	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
54	Bosi Sinukaban	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
55	Jhon Philip Pinem	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
56	Mulia Sembiring	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
57	Lahir Br Tarigan	10/09/2008	20/09/2014	5.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.000.000,00	-
58	Netty Br Ginting	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
59	Zaherman Sikumbang	10/09/2008	20/09/2014	3.750.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	3.750.000,00	-
60	Ferison Ginting	10/09/2008	20/09/2014	4.625.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	4.625.000,00	-
	JUMLAH USAHA MIKRO			**217.831.500,00**					**217.831.500,00**	**-**
	C. KOPERASI									
1	Primkopad Yonif 125 Si'mbisa	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
2	KPN Tat Twam Asi	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
3	KPN Wargawana Simalem	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
4	Primkopad Kodim 0205 TK	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
5	KPN Dinas Pasar Kab. Karo	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
6	KSU Harapan Jaya	10/09/2008	20/09/2014	23.750.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	23.750.000,00	-
7	Koperasi Wanita Karya	10/09/2008	20/09/2014	23.125.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	23.125.000,00	-
8	Kopwan Wahana Keluarga Man	10/09/2008	20/09/2014	25.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	25.000.000,00	-
9	KPN Wardilak	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
10	KPN Serbaguna MTSN/MAN	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
11	Koppas Karinagora Berastagi	10/09/2008	20/09/2014	16.750.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	16.750.000,00	-
12	Koperasi Maju Bersama Sugihe	10/09/2008	20/09/2014	23.750.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	23.750.000,00	-
13	Koperasi Bukit Maju Bersama	10/09/2008	20/09/2014	23.125.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	23.125.000,00	-
14	Kopdit CU. Sondang Nauli	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
15	KPN Guru-Guru SD Payung	10/09/2008	20/09/2014	5.625.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	5.625.000,00	-
16	KPN SMP N.1 Laubaleng	10/09/2008	20/09/2014	3.240.500,00	41.902	3.755	Macet	100,00	3.240.500,00	-
17	KSU Mergasilima	10/09/2008	20/09/2014	25.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	25.000.000,00	-
18	Kopwan Laugarut Simalem	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
19	KSU Maju Karina	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
20	KSU Rakyat	10/09/2008	20/09/2014	25.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	25.000.000,00	-
21	Koperasi Wanita Usaha Bersam	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
22	Koperasi Wanita Setia Bersama	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
23	Koperasi Wanita Maju Bersama	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
24	Koperasi Gapoktan Ersinalsal	10/09/2008	20/09/2014	9.750.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	9.750.000,00	-
25	KSU Arih Ersada Deleng Simole	10/09/2008	20/09/2014	8.500.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	8.500.000,00	-
26	Kopwan Srikandi	10/09/2008	20/09/2014	7.500.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	7.500.000,00	-
27	KSU Mulia	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
28	Koperasi Usaha Bersama Bulul	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
29	KSU Radu Sikelengen	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
30	KSU Pesikap Kutanta	10/09/2008	20/09/2014	8.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	8.000.000,00	-
31	Koperasi Lau Long-Long Simale	10/09/2008	20/09/2014	10.000.000,00	41.902	3.755	Macet	100,00	10.000.000,00	-
32	Koperasi Bunga Jadi Buah	10/09/2008	20/09/2014	-	41.902	3.755	Macet	100,00	-	-
	JUMLAH KOPERASI			**258.115.500,00**					**258.115.500,00**	**-**
	TOTAL PENYALURAN TA. 2008			**814.585.892,00**						
IV.	**PENYALURAN TA. 2009**									
	A. USAHA KECIL									
1	Jhohari Perangin-angin	23/10/2009	23/10/2015	10.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	10.000.000,00	-
2	Pedoman Ginting	23/10/2009	23/10/2015	10.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	10.000.000,00	-
3	Anne Surbakti	23/10/2009	23/10/2015	9.250.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	9.250.000,00	-
4	Iskandar Wijaya Ginting	23/10/2009	23/10/2015	10.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	10.000.000,00	-
5	Hendri Desanta Sebayang	23/10/2009	23/10/2015	5.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	5.000.000,00	-
6	Asli Purba	23/10/2009	23/10/2015	6.500.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	6.500.000,00	-
7	Ida Hernalia Simanungkalit	23/10/2009	23/10/2015	10.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	10.000.000,00	-
8	Ernamelita Bangun	23/10/2009	23/10/2015	10.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	10.000.000,00	-
9	Evalia Sembiring	23/10/2009	23/10/2015	9.050.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	9.050.000,00	-
10	Rasmi Sembiring	23/10/2009	23/10/2015	9.250.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	9.250.000,00	-
11	Rouly Br Manalu	23/10/2009	23/10/2015	4.500.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	4.500.000,00	-
12	Hotman Kacaribu	23/10/2009	23/10/2015	6.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	6.000.000,00	-
13	Jhony Aries Tarigan	23/10/2009	23/10/2015	9.250.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	9.250.000,00	-
14	Olakisat Purba	23/10/2009	23/10/2015	-	42.300	3.357	Macet	100,00	-	-
15	Erika Sinuraya	23/10/2009	23/10/2015	10.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	10.000.000,00	-
	JUMLAH USAHA KECIL			**118.800.000,00**					**118.800.000,00**	**-**
	B. USAHA MIKRO									
1	Malemta Tarigan	23/10/2009	23/10/2015	4.500.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	4.500.000,00	-
2	Litmalem Br Sembiring	23/10/2009	23/10/2015	-	42.300	3.357	Macet	100,00	-	-
3	Betty Casvary Sitepu	23/10/2009	23/10/2015	2.250.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	2.250.000,00	-
4	Suasana Br Karo	23/10/2009	23/10/2015	5.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	5.000.000,00	-
5	Ummi Salamah Br Tarigan	23/10/2009	23/10/2015	2.750.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	2.750.000,00	-
6	Erik Sitepu	23/10/2009	23/10/2015	5.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	5.000.000,00	-
7	Johanes Sembiring	23/10/2009	23/10/2015	-	42.300	3.357	Macet	100,00	-	-
8	Selamat Niar Sitepu	23/10/2009	23/10/2015	5.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	5.000.000,00	-
9	Nambrut Ginting	23/10/2009	23/10/2015	5.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	5.000.000,00	-
10	Wahyudin Simarmata	23/10/2009	23/10/2015	5.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	5.000.000,00	-

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
	JUMLAH USAHA MIKRO			**34.500.000,00**					**34.500.000,00**	**-**
	C. KOPERASI									
1	KUD Sadakata	23/10/2009	23/10/2015	-	42.300	3.357	Macet	100,00	-	-
2	KSU Bhakti Usaha	23/10/2009	23/10/2015	-	42.300	3.357	Macet	100,00	-	-
3	Koperasi Alpha Omega	23/10/2009	23/10/2015	-	42.300	3.357	Macet	100,00	-	-
4	KSP Namtari	23/10/2009	23/10/2015	46.250.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	46.250.000,00	-
5	Koppas Berastagi	23/10/2009	23/10/2015	50.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	50.000.000,00	-
6	KSU Ora Et Labora	23/10/2009	23/10/2015	-	42.300	3.357	Macet	100,00	-	-
7	KSU Sada Arih	23/10/2009	23/10/2015	17.500.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	17.500.000,00	-
8	Koperasi Maranatha	23/10/2009	23/10/2015	-	42.300	3.357	Macet	100,00	-	-
9	KSU Pijer PODI	23/10/2009	23/10/2015	25.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	25.000.000,00	-
10	KSU Gapoktan Damai Sejahtera	23/10/2009	23/10/2015	23.125.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	23.125.000,00	-
11	KSU Jeruk Paribun	23/10/2009	23/10/2015	14.650.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	14.650.000,00	-
12	Koperasi Damai Sejahtera	23/10/2009	23/10/2015	7.500.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	7.500.000,00	-
13	KUD Anjangsana	23/10/2009	23/10/2015	9.500.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	9.500.000,00	-
14	Koperasi Mega Gotong Royong I	23/10/2009	23/10/2015	23.125.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	23.125.000,00	-
15	Koperasi Wanita Karya	23/10/2009	23/10/2015	25.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	25.000.000,00	-
16	Kospin Mburak Sirobah	23/10/2009	23/10/2015	25.000.000,00	42.300	3.357	Macet	100,00	25.000.000,00	-
	JUMLAH KOPERASI			**266.650.000,00**					**266.650.000,00**	**-**
	TOTAL PENYALURAN TA. 2009			**419.950.000,00**						
V.	**PENYALURAN TA. 2010**									
	A. USAHA KECIL									
1	Murriya Tarigan	28/12/2010	20/12/2016	10.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	10.000.000,00	-
2	Perdata Tarigan	28/12/2010	20/12/2016	-	42.724	2.933	Macet	100,00	-	-
3	Maksum Ginting	28/12/2010	20/12/2016	10.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	10.000.000,00	-
4	Sion Ginting	28/12/2010	20/12/2016	10.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	10.000.000,00	-
5	Sastra Kemit	28/12/2010	20/12/2016	9.250.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	9.250.000,00	-
6	Pionirta Depari	28/12/2010	20/12/2016	10.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	10.000.000,00	-
7	Ajis Karo Sekali	28/12/2010	20/12/2016	10.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	10.000.000,00	-
8	Paskalius Karo Sekali	28/12/2010	20/12/2016	10.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	10.000.000,00	-
9	Frenki Badia Gurusinga	28/12/2010	20/12/2016	9.750.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	9.750.000,00	-
10	Sabarita Br Sinulingga	28/12/2010	20/12/2016	9.750.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	9.750.000,00	-
11	Jeninta Br Sembiring	28/12/2010	20/12/2016	10.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	10.000.000,00	-
12	Sumardi Sembiring	28/12/2010	20/12/2016	10.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	10.000.000,00	-
13	Dosen Perangin-angin	28/12/2010	20/12/2016	10.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	10.000.000,00	-
	JUMLAH USAHA KECIL			**118.750.000,00**					**118.750.000,00**	**-**
	B. USAHA MIKRO									
1	Minar Tarigan	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
2	Yedija Ginting	28/12/2010	20/12/2016	4.875.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	4.875.000,00	-
3	Elieser Ginting	28/12/2010	20/12/2016	4.875.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	4.875.000,00	-
4	Marlin Br Tarigan	28/12/2010	20/12/2016	4.500.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	4.500.000,00	-

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
5	Roy Sembiring	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
6	Kamista Sinuraya	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
7	Ajaren Ginting	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
8	Edi Karia Ginting	28/12/2010	20/12/2016	4.500.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	4.500.000,00	-
9	Armento Karo Sekali	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
10	Panca Ginting	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
11	Bancilit Karo Sekali	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
12	Dalanngit Karo Sekali	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
13	Durahmin Depari	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
14	David Dwi Kora S Depari	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
15	Andarear Ginting	28/12/2010	20/12/2016	4.875.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	4.875.000,00	-
16	Sopan Sinulingga	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
17	Jonatan Ginting	28/12/2010	20/12/2016	4.875.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	4.875.000,00	-
18	Derta Tarigan	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
19	Helberd Sitepu	28/12/2010	20/12/2016	4.875.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	4.875.000,00	-
20	Elviana Br Ginting	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
21	Marlon Ginting	28/12/2010	20/12/2016	4.500.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	4.500.000,00	-
22	Melam Br Ginting	28/12/2010	20/12/2016	4.875.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	4.875.000,00	-
23	Abdi Tarigan	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
24	Nando Tarigan	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
25	Dona Arifin Tarigan	28/12/2010	20/12/2016	5.000.000,00	42.724	2.933	Macet	100,00	5.000.000,00	-
	JUMLAH USAHA MIKRO			**122.750.000,00**					**122.750.000,00**	**-**
	TOTAL PENYALURAN TA. 2010			**241.500.000,00**						
VI.	**PERGULIRAN TA. 2008**									
	A. USAHA KECIL									
1	Dian Ramayani Nainggolan	04/01/2008	20/01/2014	5.000.000,00	41.659	3.998	Macet	100,00	5.000.000,00	-
	JUMLAH USAHA KECIL			**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**-**
	B. USAHA MIKRO									
1	Moh. Kayat	04/01/2008	20/01/2014	5.000.000,00	41.659	3.998	Macet	100,00	5.000.000,00	-
2	Bersih P.	04/01/2008	20/01/2014	5.000.000,00	41.659	3.998	Macet	100,00	5.000.000,00	-
3	Eddy SK Syahputra	04/01/2008	20/01/2014	5.000.000,00	41.659	3.998	Macet	100,00	5.000.000,00	-
	JUMLAH USAHA MIKRO			**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**-**
	TOTAL PERGULIRAN 2008			**20.000.000,00**						
VII.	**PERGULIRAN TA. 2009**									
USAHA KECIL TAHUN 2009 (Maret)										
1	Diana Br Sitepu	10/03/2009	20/03/2015	10.000.000,00	42.083	3.574	Macet	100,00	10.000.000,00	-
USAHA KECIL TAHUN 2009 (November)										
1	Lea Oktaviani Pinem	10/11/2009	20/11/2015	5.200.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.200.000,00	-
2	J.U. Bastanta Barus	10/11/2009	20/11/2015	10.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	10.000.000,00	-
3	Repelita Untung Ginting	10/11/2009	20/11/2015	10.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	10.000.000,00	-
4	Elitasari Sebayang	10/11/2009	20/11/2015	9.500.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	9.500.000,00	-

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
5	Sabar Simanjorang	10/11/2009	20/11/2015	10.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	10.000.000,00	-
6	Endang Matari Sebayang	10/11/2009	20/11/2015	9.250.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	9.250.000,00	-
	JUMLAH USAHA KECIL			**63.950.000,00**					**63.950.000,00**	**-**
USAHA MIKRO TAHUN 2009 (Maret)										
1	Lompoh Br Pinem	10/03/2009	20/03/2015	5.000.000,00	42.083	3.574	Macet	100,00	5.000.000,00	-
USAHA MIKRO TAHUN 2009 (November)										
1	Rela Meliala	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
2	Apulina Ginting	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
3	Rianta Sembiring	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
4	T. Rini Srimeka	16/11/2009	20/11/2015	-	42.328	3.329	Macet	100,00	-	-
5	Audra Elouissie Stephanie	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
6	Roslianna Bangun	16/11/2009	20/11/2015	2.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	2.000.000,00	-
7	Firman Sembiring	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
8	Pelita Manik	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
9	Andriani Tarigan	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
10	Reza Harison Sitepu	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
11	Karona Sejati Sitepu	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
12	Andreas Tarigan	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
13	Sastra Perangin-Angin	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
14	Imanuel Sembiring	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
15	Kenop Tarigan	16/11/2009	20/11/2015	-	42.328	3.329	Macet	100,00	-	-
16	Natanael Bangun	16/11/2009	20/11/2015	4.500.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	4.500.000,00	-
17	Theresia Tarigan	16/11/2009	20/11/2015	4.500.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	4.500.000,00	-
18	Juna Darmi Ginting	16/11/2009	20/11/2015	4.500.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	4.500.000,00	-
19	Herta Br Hombing	16/11/2009	20/11/2015	2.750.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	2.750.000,00	-
20	Sastra Tarigan	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
21	Dewi Girsang	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
22	Asmah Purba	16/11/2009	20/11/2015	4.625.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	4.625.000,00	-
23	Jasoptel Simanjorang	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
24	Rasidun Lubis	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
25	M.Z. Sidik	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
26	Jopen Maha	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
27	Manase S. Kembaren	16/11/2009	20/11/2015	4.500.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	4.500.000,00	-
28	Bahagianta Surbakti	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
29	Tarba Tarigan	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
30	Julius Girsang	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
31	Eviklan Sitanggang	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
32	Persada Ginting	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
33	Mbuahpage Sitepu	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
34	Liberti Ginting	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
35	Erwin Perangin-angin	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
36	Basmi Bangun	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
37	Carles Bangun	16/11/2009	20/11/2015	5.000.000,00	42.328	3.329	Macet	100,00	5.000.000,00	-
38	Norma Marpaung	16/11/2009	20/11/2015	-	42.328	3.329	Macet	100,00	-	-
39	Rosnah Damanik	16/11/2009	20/11/2015	-	42.328	3.329	Macet	100,00	-	-
	JUMLAH USAHA MIKRO			**172.375.000,00**					**172.375.000,00**	**-**
	TOTAL PERGULIRAN TA. 2009			**236.325.000,00**						
VIII	**PERGULIRAN TA. 2011**									
	A. USAHA KECIL									
1	Ngolu Sinaga	28/11/2011	20/11/2017	8.300.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	8.300.000,00	-
2	Nurlina Br Karo	28/11/2011	20/11/2017	9.250.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	9.250.000,00	-
3	Rosida Br Sembiring	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
4	Dasri Purwanto	28/11/2011	20/11/2017	9.500.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	9.500.000,00	-
5	Basdi Purba	28/11/2011	20/11/2017	9.750.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	9.750.000,00	-
6	Benyamin S. Milala	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
7	Ade Haryanto	28/11/2011	20/11/2017	9.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	9.000.000,00	-
8	Sabar M Sihombing	28/11/2011	20/11/2017	-	43.059	2.598	Macet	100,00	-	-
9	Hema Malini Br Barus	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
10	Moning Ginting	28/11/2011	20/11/2017	9.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	9.000.000,00	-
11	Arlando Sembiring, SE	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
12	Apinton Pirdaus Perangin-Angin	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
13	Sastrawan Sembiring, B.Sc	28/11/2011	20/11/2017	-	43.059	2.598	Macet	100,00	-	-
14	Irwan Syah Ginting Suka	28/11/2011	20/11/2017	2.500.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	2.500.000,00	-
15	Joi Ananta Sembiring	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
16	Ir. Rejeki Ginting	28/11/2011	20/11/2017	2.250.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	2.250.000,00	-
17	Agustinus Tarigan	28/11/2011	20/11/2017	-	43.059	2.598	Macet	100,00	-	-
18	Prianus Sitepu	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
19	Usman	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
20	Drs. Darwin E. Hutagalung	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
21	Rodeanna Br Bangun	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
22	Berlin Ginting	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
23	Ruslan Tarigan	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
24	Ulingena Br Sembiring	28/11/2011	20/11/2017	7.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	7.000.000,00	-
25	Linda Oktavia Br Sipayung	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
26	Eva Riani Br Ginting	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
27	Muliana Br Sitepu	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
28	Layasita Sembiring	28/11/2011	20/11/2017	6.035.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	6.035.000,00	-
29	Heslina Suriati Saragih	28/11/2011	20/11/2017	-	43.059	2.598	Macet	100,00	-	-
30	Bona Josefa Bangun	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
31	Evintariana Br Ginting	28/11/2011	20/11/2017	10.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	10.000.000,00	-
32	Risboy Nainggolan	28/11/2011	20/11/2017	5.500.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.500.000,00	-
33	Tenang DL. Br Tarigan	28/11/2011	20/11/2017	6.250.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	6.250.000,00	-
	JUMLAH USAHA KECIL			**249.335.000,00**					**249.335.000,00**	**-**
	B. USAHA MIKRO									

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
1	Prisman Sitepu	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
2	Biston Tamba	28/11/2011	20/11/2017	4.500.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	4.500.000,00	-
3	Jeffrison Ginting, SE	28/11/2011	20/11/2017	4.875.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	4.875.000,00	-
4	Juniati Br Tarigan	28/11/2011	20/11/2017	2.500.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	2.500.000,00	-
5	Benyamin Edikusura Barus	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
6	Jamen Munte	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
7	Herlina Br Perangin-angin	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
8	Juli Fitri Yana Br Sinulingga	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
9	Rahmad Br Perangin-anging	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
10	Pasman, SE	28/11/2011	20/11/2017	4.500.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	4.500.000,00	-
11	Banta Ngena Br Sitepu	28/11/2011	20/11/2017	2.500.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	2.500.000,00	-
12	Sri Suranta Br Tarigan	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
13	Yahya Perangin-angin	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
14	Daniel Sembiring	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
15	Sutamto	28/11/2011	20/11/2017	-	43.059	2.598	Macet	100,00	-	-
16	Dina Mariana Br Gurusinga	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
17	Jenny Sura Br Purba	28/11/2011	20/11/2017	4.625.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	4.625.000,00	-
18	Berin Ginting	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
19	Sokrates Ginting	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
20	Erwin Sinulingga	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
21	Herlina Br Ginting	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
22	Lamhot Situmorang	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
23	Kristina Br Simbolon	28/11/2011	20/11/2017	3.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	3.000.000,00	-
24	Kalvin Ginting, S.Kep	28/11/2011	20/11/2017	5.000.000,00	43.059	2.598	Macet	100,00	5.000.000,00	-
	JUMLAH USAHA MIKRO			**106.500.000,00**					**106.500.000,00**	**-**
	TOTAL PERGULIRAN TA. 2011			**355.835.000,00**						
IX.	**PERGULIRAN/PENAMBAHAN 2011**									
	A. USAHA KECIL									
1	Gelora Ginting	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
2	Suherni	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
3	Lester Br Ginting	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
4	Ingan Muli Br Ginting	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
5	Hotman Br Haloho	07/12/2011	20/12/2017	10.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	10.000.000,00	-
6	Kaisar Tarigan	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
7	Pendy Karo-Karo	07/12/2011	20/12/2017	9.250.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	9.250.000,00	-
8	Nelson Sembiring	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
9	Imanuel Perangin-angin	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
10	Iman Anata Bukit	07/12/2011	20/12/2017	9.250.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	9.250.000,00	-
11	Jenny Br Nasution	07/12/2011	20/12/2017	5.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	5.000.000,00	-
12	Kasiyem, SE	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
13	Iperaim Sitepu	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
14	Edison Jayanta Ginting	07/12/2011	20/12/2017	4.825.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	4.825.000,00	-

No	Debitur	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Hari)	Kategori Piutang	Penyisihan	Penyisihan Piutang	NRV
15	Sri Ulina Br Sembiring	07/12/2011	20/12/2017	10.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	10.000.000,00	-
16	Robinson Purba	07/12/2011	20/12/2017	10.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	10.000.000,00	-
17	Ponijan	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
18	Usden Ginting	07/12/2011	20/12/2017	7.800.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	7.800.000,00	-
19	Ngadep Tarigan	07/12/2011	20/12/2017	4.400.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	4.400.000,00	-
20	Josep Surbakti	07/12/2011	20/12/2017	9.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	9.000.000,00	-
21	Sutarni	07/12/2011	20/12/2017	2.250.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	2.250.000,00	-
22	Nipat Br Barus	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
23	Vera Santi Br Sinulingga	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
24	Syarifah Hanum Nasution	07/12/2011	20/12/2017	4.400.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	4.400.000,00	-
25	Neriwati Br Sembiring	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
26	Anne Surbakti	07/12/2011	20/12/2017	10.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	10.000.000,00	-
27	Rasmi Sembiring	07/12/2011	20/12/2017	10.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	10.000.000,00	-
28	Jhony Aries Tarigan	07/12/2011	20/12/2017	10.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	10.000.000,00	-
29	Litmalem Br Sembiring	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
30	Betty Casvary Sitepu	07/12/2011	20/12/2017	7.500.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	7.500.000,00	-
31	Johanes Sembiring	07/12/2011	20/12/2017	3.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	3.000.000,00	-
32	Roslianna Bangun	07/12/2011	20/12/2017	7.250.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	7.250.000,00	-
33	Kenop Tarigan	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
34	Herta Br Hombing	07/12/2011	20/12/2017	9.250.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	9.250.000,00	-
	JUMLAH USAHA KECIL GULIR 2011			**143.175.000,00**					**143.175.000,00**	**-**
	B. USAHA MIKRO									
1	Philip Tarigan	07/12/2011	20/12/2017	2.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	2.000.000,00	-
2	Eron Ginting	07/12/2011	20/12/2017	5.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	5.000.000,00	-
3	Kontesa Br Ginting	07/12/2011	20/12/2017	5.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	5.000.000,00	-
4	Ummi Salamah Br Tarigan	07/12/2011	20/12/2017	5.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	5.000.000,00	-
5	Lea Oktaviani Pinem	07/12/2011	20/12/2017	2.750.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	2.750.000,00	-
6	T. Rini Srimeka	07/12/2011	20/12/2017	-	43.089	2.568	Macet	100,00	-	-
7	Asma Purba	07/12/2011	20/12/2017	5.000.000,00	43.089	2.568	Macet	100,00	5.000.000,00	-
	JUMLAH USAHA MIKRO GULIR 2011			**24.750.000,00**					**24.750.000,00**	**-**
	TOTAL GULIR 2011			**167.925.000,00**						
NILAI INVESTASI				**3.260.157.252,00**						
JUMLAH KATEGORI YANG MACET									**3.260.157.252,00**	**-**
JUMLAH KATEGORI YANG DIRAGUKAN									**-**	**-**
JUMLAH KATEGORI YANG KURANG LANCAR										
JUMLAH KATEGORI YANG LANCAR									**-**	**-**
TOTAL PENYISIHAN									**3.260.157.252,00**	**-**

Lampiran 37

Rincian Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Jenis Piutang	Kualitas Piutang				Jumlah Piutang	Kualitas Penyisihan				Koreksi	Jumlah Penyisihan Piutang	Jumlah Piutang Bersih
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
		Umur Piutang Kurang dari 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang 1 s/d 2 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang 2 s/d 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang diatas 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)		Umur Piutang Kurang dari 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang 1 s/d 2 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang 2 s/d 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang diatas 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)			
							(0.50%)	(10%)	(50%)	(100%)			
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14=(7-13)
	Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat												
1	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PBB	429.896.100,00	3.118.135.000,00	0,00	0,00	3.548.031.100,00	2.149.480,50	311.813.500,00	0,00	0,00	0,00	313.962.980,50	3.234.068.119,50
2	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PPh Pasal 21	1.000.402.900,00	6.349.491.000,00	0,00	0,00	7.349.893.900,00	5.002.014,50	634.949.100,00	0,00	0,00	0,00	639.951.114,50	6.709.942.785,50
3	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PPh Pasal 25/29	67.989.800,00	1.121.916.000,00	0,00	0,00	1.189.905.800,00	339.949,00	112.191.600,00	0,00	0,00	0,00	112.531.549,00	1.077.374.251,00
4	Piutang Dana Transfer Umum - DBH CHT	0,00	472.063.000,00	0,00	0,00	472.063.000,00	0,00	47.206.300,00	0,00	0,00	0,00	47.206.300,00	424.856.700,00
5	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00	104.301.000,00	0,00	0,00	104.301.000,00	0,00	10.430.100,00	0,00	0,00	0,00	10.430.100,00	93.870.900,00
6	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Mineral dan Batubara - Landrent	0,00	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00	0,00	271.700,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	2.445.300,00
7	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalty	0,00	4.165.221.000,00	0,00	0,00	4.165.221.000,00	0,00	416.522.100,00	0,00	0,00	0,00	416.522.100,00	3.748.698.900,00
Total Penyisihan Transfer Pusat		**1.498.288.800,00**	**15.333.844.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.832.132.800,00**	**7.491.444,00**	**1.533.384.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540.875.844,00**	**15.291.256.956,00**

Lampiran 38

Rincian Penyisihan Piutang Bagi Hasil
Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Jenis Piutang	Kualitas Piutang				Jumlah Piutang	Kualitas Penyisihan				Koreksi	Jumlah Penyisihan Piutang	Jumlah Piutang Bersih
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
		Umur Piutang Kurang dari 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang 1 s/d 2 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang 2 s/d 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang diatas 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)		Umur Piutang Kurang dari 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang 1 s/d 2 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang 2 s/d 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)	Umur Piutang diatas 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo (Rp)			
							(0.50%)	(10%)	(50%)	(100%)			
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14=(7-13)
	Piutang Bagi Hasil Pajak												
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	58.773.978,00	0,00	0,00	0,00	58.773.978,00	293.869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	293.869,89	58.480.108,11
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	100.612.039,00	0,00	0,00	0,00	100.612.039,00	503.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	503.060,20	100.108.978,80
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.659.780.406,00	0,00	0,00	0,00	18.659.780.406,00	93.298.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93.298.902,03	18.566.481.503,97
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.336.022.980,00	0,00	0,00	0,00	2.336.022.980,00	11.680.114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680.114,90	2.324.342.865,10
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak		**21.155.189.403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.155.189.403,00**	**105.775.947,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.775.947,02**	**21.049.413.455,98**

Rincian Persediaan Pada Perangkat Daerah
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan	73.044.984,00	95.839.535,00	(22.794.551,00)
2	Dinas Kesehatan	7.205.671.474,00	10.923.914.120,00	(3.718.242.646,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	4.235.732.449,60	3.782.114.385,00	453.618.064,60
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	859.600,00	2.190.633.709,00	(2.189.774.109,00)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	779.800,00	689.520.958,50	(688.741.158,50)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.871.375,00	65.185,00	1.806.190,00
7	Badan Penanggulan Bencana Daerah	3.169.542.152,00	13.730.202.573,00	(10.560.660.421,00)
8	Dinas Sosial	56.941.908,00	60.456.006,00	(3.514.098,00)
9	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	595.265,00	474.900,00	120.365,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	239.779.127,00	122.236.404,00	117.542.723,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	896.976.729,00	707.501.273,00	189.475.456,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	172.768.418,00	181.187.860,00	(8.419.442,00)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	866.090.700,00	921.144.800,00	(55.054.100,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.353.100,00	7.189.150,00	(4.836.050,00)
15	Dinas Perhubungan	31.606.754,00	1.100.110,00	30.506.644,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	339.350,00	423.700,00	(84.350,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	299.000,00	603.100,00	(304.100,00)
18	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	16.499.740,00	21.716.717,00	(5.216.977,00)
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	651.850,00	977.775,00	(325.925,00)
20	Dinas Pertanian	3.915.000,00	3.574.500,00	340.500,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.317.850,00	4.346.045,00	(3.028.195,00)
22	Sekretariat Daerah	1.670.910,00	1.986.500,00	(315.590,00)
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	295.000,00	179.400,00	115.600,00
24	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.273.750,00	2.643.545,00	(369.795,00)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	129.870,00	119.630,00	10.240,00
26	Badan Pendapatan Daerah	32.955.500,00	18.513.600,00	14.441.900,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.610,00	60.000,00	(32.390,00)
28	Inspektorat Daerah	3.536.000,00	4.630.900,00	(1.094.900,00)
29	Kecamatan Kabanjahe	1.549.850,00	2.603.575,00	(1.053.725,00)
30	Kecamatan Barusjahe	581.500,00	738.900,00	(157.400,00)
31	Kecamatan Merek	683.800,00	703.800,00	(20.000,00)
32	Kecamatan Munte	915.000,00	923.500,00	(8.500,00)
33	Kecamatan Juhar	239.200,00	299.000,00	(59.800,00)
34	Kecamatan Tigabinanga	598.150,00	299.075,00	299.075,00
35	Kecamatan Lau Baleng	876.500,00	665.100,00	211.400,00
36	Kecamatan Mardinding	742.149,00	498.779,00	243.370,00
37	Kecamatan Payung	476.000,00	312.000,00	164.000,00
38	Kecamatan Simpang Empat	135.225,00	625.704,00	(490.479,00)
39	Kecamatan Kutabuluh	478.400,00	595.000,00	(116.600,00)
40	Kecamatan Dolatrayat	585.200,00	308.000,00	277.200,00
41	Kecamatan Naman Teran	300.000,00	2.346.390,00	(2.046.390,00)
42	Kecamatan Tiganderket	130.370,00	364.400,00	(234.030,00)
43	Kecamatan Berastagi	741.225,00	462.280,00	278.945,00
44	Kecamatan Tigapanah	706.900,00	940.110,00	(233.210,00)
45	Kecamatan Merdeka	497.110,00	609.350,00	(112.240,00)
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	443.000,00	295.000,00	148.000,00
Jumlah		**17.029.204.844,60**	**33.486.946.343,50**	**(16.457.741.498,90)**

Lampiran 40

Rincian Persediaan Per Sub Rincian Objek Pada Perangkat Daerah
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Bahan Kimia	Bahan Lainnya	Suku Cadang Lainnya	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Perabot Kantor	Alat Listrik	Perlengkapan Dinas	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Alat dan Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Obat Obatan lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	Pakan	Saldo Akhir
1	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	60.000,00				27.610,00																27.610,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	295.000,00					443.000,00															443.000,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	119.630,00					129.870,00															129.870,00
4	Badan Penanggulan Bencana Daerah	13.730.202.573,00					299.000,00											3.169.243.152,00				3.169.542.152,00
5	Badan Pendapatan Daerah	18.513.600,00						32.955.500,00														32.955.500,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	2.643.545,00				1.655.005,00	429.445,00	189.300,00														2.273.750,00
7	Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Serta Pariwisata	21.716.717,00				2.885.175,00	1.761.485,00	10.845.080,00		1.008.000,00												16.499.740,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	921.144.800,00					3.314.000,00	82.454.000,00		780.322.700,00												866.090.700,00
9	Dinas Kesehatan	10.923.914.120,00				5.288.625,00	977.355,00	1.080.000,00		692.640,00						7.197.632.854,00						7.205.671.474,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	707.501.273,00		167.376.386,00		24.420,00	640.525,00	576.562,00		658.230,00										723.862.356,00	3.838.250,00	896.976.729,00
11	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM	474.900,00				595.265,00																595.265,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	423.700,00				40.350,00	299.000,00															339.350,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	181.187.860,00						12.917.418,00					76.560.000,00					83.291.000,00				172.768.418,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.190.633.709,00					859.600,00															859.600,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.189.150,00					420.000,00			1.933.100,00												2.353.100,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan KB	122.236.404,00					234.000,00										239.545.127,00					239.779.127,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	603.100,00					299.000,00															299.000,00
18	Dinas Pendidikan	95.839.535,00	1.868.500,00	400.000,00		20.957.017,00	21.105.705,00	1.216.000,00	410.000,00	10.250.800,00	8.928.562,00	595.000,00		6.501.400,00		812.000,00						73.044.984,00
19	Dinas Perhubungan	1.100.110,00					156.426,00	15.206.528,00				16.243.800,00										31.606.754,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.346.045,00				67.850,00	1.250.000,00															1.317.850,00
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	977.775,00					651.850,00															651.850,00
22	Dinas Pertanian	3.574.500,00					357.000,00	3.558.000,00														3.915.000,00
23	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	689.520.958,50				181.800,00	598.000,00															779.800,00
24	Dinas Sosial	60.456.006,00				235.460,00	456.295,00											56.250.153,00				56.941.908,00
25	Inspektorat Daerah	4.630.900,00				112.000,00	1.825.000,00			1.599.000,00												3.536.000,00
26	Kecamatan Barusjahe	738.900,00				162.900,00	418.600,00															581.500,00
27	Kecamatan Berastagi	462.280,00				558.715,00	182.510,00															741.225,00
28	Kecamatan Dolat Rayat	308.000,00						585.200,00														585.200,00
29	Kecamatan Juhar	299.000,00					239.200,00															239.200,00
30	Kecamatan Kabanjahe	2.603.575,00					699.850,00		850.000,00													1.549.850,00
31	Kecamatan Kutabuluh	595.000,00					478.400,00															478.400,00
32	Kecamatan Lau Baleng	665.100,00					299.000,00	577.500,00														876.500,00

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Bahan Kimia	Bahan Lainnya	Suku Cadang Lainnya	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Perabot Kantor	Alat Listrik	Perlengkapan Dinas	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Alat dan Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Obat Obatan lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	Pakan	Saldo Akhir
33	Kecamatan Mardingding	498.779,00				116.445,00	625.704,00															742.149,00
34	Kecamatan Merdeka	609.350,00				94.110,00	403.000,00															497.110,00
35	Kecamatan Merek	703.800,00					683.800,00															683.800,00
36	Kecamatan Munte	923.500,00					915.000,00															915.000,00
37	Kecamatan Namanteran	2.346.390,00				260.000,00			40.000,00													300.000,00
38	Kecamatan Payung	312.000,00					476.000,00															476.000,00
39	Kecamatan Simpang Empat	625.704,00				135.225,00																135.225,00
40	Kecamatan Tiga Binanga	299.075,00					598.150,00															598.150,00
41	Kecamatan Tiganderket	364.400,00					130.370,00															130.370,00
42	Kecamatan Tiga Panah	940.110,00				236.950,00	309.600,00				160.350,00											706.900,00
43	Rumah Sakit Umum Daerah	3.782.114.385,00	88.087.656,00	4.983.900,00	6.021.750,00	5.523.200,00	251.100,00				54.053.480,00				39.075.108,00	2.143.466.708,00	1.894.269.547,60					4.235.732.449,60
44	Satuan Polisi Pamong Praja	65.185,00					1.495.375,00			376.000,00												1.871.375,00
45	Sekretariat Daerah	1.986.500,00				465.250,00	1.205.660,00															1.670.910,00
46	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	179.400,00					295.000,00															295.000,00
Jumlah		**33.486.946.343,50**	**89.956.156,00**	**172.760.286,00**	**6.021.750,00**	**39.623.372,00**	**46.212.875,00**	**162.161.088,00**	**1.300.000,00**	**796.840.470,00**	**63.142.392,00**	**16.838.800,00**	**76.560.000,00**	**6.501.400,00**	**39.075.108,00**	**9.341.911.562,00**	**2.133.814.674,60**	**3.308.784.305,00**	**0,00**	**723.862.356,00**	**3.838.250,00**	**17.029.204.844,60**

Rincian Mutasi Tambah Persediaan
Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	LRA APBD (Barang Pakai Habis)	72.972.344.404,00
2	LRA APBD (Barang Tak Habis Pakai)	99.815.173,00
3	LRA APBD (Aset yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi)	223.567.000,00
4	LRA BLUD	6.626.154.485,00
5	BOSP Reguler	14.991.168.236,00
6	BOP PAUD Reguler	190.226.800,00
7	BOP Kesetaraan Reguler	38.251.000,00
8	BOSP Kinerja	354.560.313,00
9	BOP PAUD Kinerja	7.850.099,00
10	JKN	2.267.503.323,00
11	Hibah	7.460.054.303,00
12	Utang Pihak Ketiga BLUD	4.406.944.386,00
13	Mutasi antar Perangkat Daerah	851.004.507,00
14	Perolehan Linnya Pihak Ketiga (Perorangan)	8.371.200,00
15	Koreksi dari Belanja Modal JKN (Alat Rumah Tangga Lainnya)	16.430.225,00
16	Koreksi dari Belanja Modal JKN (Personal Komputer)	1.355.000,00
17	Koreksi dari Obat-obatan Lainnya	94.117.123,00
18	Koreksi dari Belanja Kursus Singkat	193.200,00
19	Koreksi daeri Perabot Kantor	7.700.254,00
20	Koreksi dari Natura dan Pakan Natura	35.075.000,00
21	Koreksi dari Belanja Modal Alat Peraga/Praktik	1.936.980,00
22	Koreksi dari Belanja Modal Alat Peraga/Praktik Lainnya	160.368.513,00
23	Koreksi dari Belanja Modal Alat-alat Peternakan	30.806.600,00
24	Koreksi dari Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	45.016.800,00
25	Koreksi dari Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	25.125.600,00
26	Koreksi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	500.000,00
27	Koreksi dari Alat Tulis Kantor (Kapitalisasi Biaya Umum)	5.337.650,00
28	Koreksi dari Kertas dan Cover (Kapitalisasi Biaya Umum)	791.600,00
29	Koreksi dari bahan Cetak (Kapitalisasi Biaya Umum)	14.509.700,00
30	Koreksi dari Makanan dan Minuman Rapat (Kapitalisasi Biaya Umum)	19.386.000,00
31	Koreksi dari Pipa-Pipa Lainnya (Kapitalisasi Biaya Umum)	436.800,00
32	Koreksi dari Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (Kapitalisasi Biaya Umum)	3.600.000,00
33	Koreksi dari Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kapitalisasi Biaya Umum)	35.500.000,00
34	Koreksi dari Perabot Kantor (Kapitalisasi Biaya Umum)	27.200,00
35	Koreksi dari Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur (Kapitalisasi Biaya Umum)	180.000.000,00
36	Koreksi Penyesuaian Pemeriksaan BPK	678.967.324,60
	Jumlah	**111.854.996.798,60**

Rincian Mutasi Tambah Persediaan Pada LRA APBD (Barang Pakai Habis)
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	361.981.886,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.099.698.880,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	874.411.683,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	479.808.577,00
5	Badan Pendapatan Daerah	688.223.374,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	924.915.919,00
7	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	1.792.602.504,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	615.025.225,00
9	Dinas Kesehatan	9.686.154.503,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.805.805.711,00
11	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.022.606.459,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	738.282.665,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	5.788.024.859,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.129.514.304,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	880.820.218,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	623.224.234,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.816.697,00
18	Dinas Pendidikan	3.023.250.234,00
19	Dinas Perhubungan	1.287.297.185,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	585.498.017,00
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	297.834.377,00
22	Dinas Pertanian	4.736.320.976,00
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	11.642.120.329,00
24	Dinas Sosial	656.604.099,00
25	Inspektorat Daerah	241.942.770,00
26	Kecamatan Barusjahe	125.380.898,00
27	Kecamatan Berastagi	281.362.879,00
28	Kecamatan Dolat Rayat	108.644.625,00
29	Kecamatan Juhar	136.856.308,00
30	Kecamatan Kabanjahe	1.033.068.860,00
31	Kecamatan Kutabuluh	163.082.050,00
32	Kecamatan Lau Baleng	148.098.770,00
33	Kecamatan Mardinding	138.140.472,00
34	Kecamatan Merdeka	150.327.619,00
35	Kecamatan Merek	184.971.669,00
36	Kecamatan Munte	200.417.950,00
37	Kecamatan Namanteran	118.920.700,00
38	Kecamatan Payung	101.880.379,00
39	Kecamatan Simpang Empat	162.335.180,00
40	Kecamatan Tiga Binanga	202.369.235,00
41	Kecamatan Tiganderket	162.782.205,00
42	Kecamatan Tiga Panah	198.741.720,00
43	Rumah Sakit Umum Daerah	524.698.735,00
44	Satuan Polisi Pamong Praja	966.724.930,00
45	Sekretariat Daerah	6.669.124.788,00
46	Sekretariat DPRD	3.911.628.747,00
Jumlah		**72.972.344.404,00**

Rincian Mutasi Pengurangan Persediaan
Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pemakaian	61.362.151.101,00
2	Pemakaian JKN	2.290.230.235,00
3	Pemakaian BLUD	6.249.229.971,00
4	Pemakaian Utang Pihak Ketiga BLUD	2.643.504.936,00
5	Pemakaian BOSP Reguler	15.013.618.392,00
6	Pemakaian BOP PAUD Reguler	190.226.800,00
7	Pemakaian BOP Kesetaraan Reguler	38.251.000,00
8	Pemakaian BOSP Kinerja	354.560.313,00
9	Pemakaian BOP PAUD Kinerja	7.850.099,00
10	Rusak/Usang	330.598.314,00
11	Mutasi antar Perangkat Daerah	851.004.507,00
12	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.777.600,00
13	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	27.972.000,00
14	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	71.776.950,00
15	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Meubelair	265.000.000,00
16	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Dapur Lainnya	51.750.000,00
17	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Personal Komputer	123.543.000,00
18	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pembersih	24.000.000,00
19	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pendingin	17.000.000,00
20	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Studio Audio	3.126.000,00
21	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran Umum	904.000.000,00
22	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Electric Generating Set	6.800.000,00
23	Koreksi ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	136.892.377,00
24	Koreksi ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	40.052.150,00
25	Koreksi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	487.394.494,00
26	Kapitalisasi Biaya Umum ke Aset Tetap	166.319.526,00
27	Kapitalisasi Biaya Umum ke Aset Tetap yang Diserahkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah	25.611.185,00
28	Pelunasan Utang 2024	1.380.563.056,00
29	Hibah Swasta	160.368.513,00
30	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	6.822.631.159,00
31	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	17.507.126.789,00
32	Koreksi Penyesuaian Pemeriksaan BPK	10.111.895.832,00
Jumlah		**127.667.826.299,00**

Rincian Mutasi Kurang Persediaan Karena Pemakaian
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	362.014.276,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.099.550.880,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	874.401.443,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	391.408.727,00
5	Badan Pendapatan Daerah	692.284.994,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	919.471.114,00
7	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	1.777.702.641,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	670.079.325,00
9	Dinas Kesehatan	19.293.226.640,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.614.530.255,00
11	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	746.834.634,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	741.142.968,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	5.176.653.301,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	545.109.400,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	885.656.268,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	616.308.234,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	301.120.797,00
18	Dinas Pendidikan	2.711.211.493,00
19	Dinas Perhubungan	1.234.946.074,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	514.963.355,00
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	298.160.302,00
22	Dinas Pertanian	1.382.304.848,00
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	182.814.030,00
24	Dinas Sosial	272.206.328,00
25	Inspektorat Daerah	243.037.670,00
26	Kecamatan Barusjahe	125.538.298,00
27	Kecamatan Berastagi	281.083.934,00
28	Kecamatan Dolat Rayat	108.367.425,00
29	Kecamatan Juhar	136.916.108,00
30	Kecamatan Kabanjahe	930.106.585,00
31	Kecamatan Kutabuluh	163.198.650,00
32	Kecamatan Lau Baleng	147.887.370,00
33	Kecamatan Mardinding	137.225.102,00
34	Kecamatan Merdeka	150.439.859,00
35	Kecamatan Merek	184.991.669,00
36	Kecamatan Munte	200.426.450,00
37	Kecamatan Namanteran	120.967.090,00
38	Kecamatan Payung	101.716.379,00
39	Kecamatan Simpang Empat	162.825.659,00
40	Kecamatan Tiga Binanga	202.070.160,00
41	Kecamatan Tiganderket	163.016.235,00
42	Kecamatan Tiga Panah	199.474.930,00
43	Rumah Sakit Umum Daerah	3.159.806.936,00
44	Satuan Polisi Pamong Praja	964.918.740,00
45	Sekretariat Daerah	6.259.190.378,00
46	Sekretariat DPRD	3.914.843.147,00
	Jumlah	**61.362.151.101,00**

Lampiran 45

Rincian Penambahan Dan Pengurangan Saldo Persediaan
Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal		**33.486.946.343,50**
Koreksi Tambah Saldo Awal		**43.429.060,00**
Koreksi Kurang Saldo Awal		**688.341.058,50**
Mutasi Tambah		***111.854.996.798,60***
1	LRA APBD (Barang Pakai Habis)	72.972.344.404,00
2	LRA APBD (Barang Tak Habis Pakai)	99.815.173,00
3	LRA APBD (Aset yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi)	223.567.000,00
4	LRA BLUD	6.626.154.485,00
5	BOSP Reguler	14.991.168.236,00
6	BOP PAUD Reguler	190.226.800,00
7	BOP Kesetaraan Reguler	38.251.000,00
8	BOSP Kinerja	354.560.313,00
9	BOP PAUD Kinerja	7.850.099,00
10	JKN	2.267.503.323,00
11	Hibah	7.460.054.303,00
12	Utang Pihak Ketiga BLUD	4.406.944.386,00
13	Mutasi antar Perangkat Daerah	851.004.507,00
14	Perolehan Linnya Pihak Ketiga (Perorangan)	8.371.200,00
15	Koreksi dari Belanja Modal JKN (Alat Rumah Tangga Lainnya)	16.430.225,00
16	Koreksi dari Belanja Modal JKN (Personal Komputer)	1.355.000,00
17	Koreksi dari Obat-obatan Lainnya	94.117.123,00
18	Koreksi dari Belanja Kursus Singkat	193.200,00
19	Koreksi daeri Perabot Kantor	7.700.254,00
20	Koreksi dari Natura dan Pakan Natura	35.075.000,00
21	Koreksi dari Belanja Modal Alat Peraga/Praktik	1.936.980,00
22	Koreksi dari Belanja Modal Alat Peraga/Praktik Lainnya	160.368.513,00
23	Koreksi dari Belanja Modal Alat-alat Peternakan	30.806.600,00
24	Koreksi dari Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	45.016.800,00
25	Koreksi dari Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	25.125.600,00
26	Koreksi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	500.000,00
27	Koreksi dari Alat Tulis Kantor (Kapitalisasi Biaya Umum)	5.337.650,00
28	Koreksi dari Kertas dan Cover (Kapitalisasi Biaya Umum)	791.600,00
29	Koreksi dari bahan Cetak (Kapitalisasi Biaya Umum)	14.509.700,00
30	Koreksi dari Makanan dan Minuman Rapat (Kapitalisasi Biaya Umum)	19.386.000,00
31	Koreksi dari Pipa-Pipa Lainnya (Kapitalisasi Biaya Umum)	436.800,00
32	Koreksi dari Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (Kapitalisasi Biaya Umum)	3.600.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
33	Koreksi dari Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kapitalisasi Biaya Umum)	35.500.000,00
34	Koreksi dari Perabot Kantor (Kapitalisasi Biaya Umum)	27.200,00
35	Koreksi dari Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur (Kapitalisasi Biaya Umum)	180.000.000,00
36	Koreksi Penyesuaian Pemeriksaan BPK	678.967.324,60
Mutasi Kurang		***127.667.826.299,00***
1	Pemakaian	61.362.151.101,00
2	Pemakaian JKN	2.290.230.235,00
3	Pemakaian BLUD	6.249.229.971,00
4	Pemakaian Utang Pihak Ketiga BLUD	2.643.504.936,00
5	Pemakaian BOSP Reguler	15.013.618.392,00
6	Pemakaian BOP PAUD Reguler	190.226.800,00
7	Pemakaian BOP Kesetaraan Reguler	38.251.000,00
8	Pemakaian BOSP Kinerja	354.560.313,00
9	Pemakaian BOP PAUD Kinerja	7.850.099,00
10	Rusak/Usang	330.598.314,00
11	Mutasi antar Perangkat Daerah	851.004.507,00
12	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.777.600,00
13	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	27.972.000,00
14	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	71.776.950,00
15	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Meubelair	265.000.000,00
16	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Dapur Lainnya	51.750.000,00
17	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Personal Komputer	123.543.000,00
18	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pembersih	24.000.000,00
19	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pendingin	17.000.000,00
20	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Studio Audio	3.126.000,00
21	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran Umum	904.000.000,00
22	Koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Electric Generating Set	6.800.000,00
23	Koreksi ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	136.892.377,00
24	Koreksi ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	40.052.150,00
25	Koreksi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	487.394.494,00
26	Kapitalisasi Biaya Umum ke Aset Tetap	166.319.526,00
27	Kapitalisasi Biaya Umum ke Aset Tetap yang Diserahkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah	25.611.185,00
28	Pelunasan Utang 2024	1.380.563.056,00
29	Hibah Swasta	160.368.513,00
30	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	6.822.631.159,00
31	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	17.507.126.789,00
32	Koreksi Penyesuaian Pemeriksaan BPK	10.111.895.832,00
Saldo Akhir		**17.029.204.844,60**

Rincian Persediaan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Total (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Karung	2017	485	4.992,00	2.421.120,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Sarung BNPB RI 2024 A 83250	2024	21	83.250,00	1.748.250,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Peralatan Mandi BNPB RI 2024 A 450000	2024	1	450.000,00	450.000,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Karung BNPB RI 2024 B 10000	2024	100	10.000,00	1.000.000,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Hygiene Kit BNPB RI 2024 B 811000	2024	126	811.000,00	102.186.000,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Kantong Mayat BPBD Provsu 2025 A	2025	24	155.400,00	3.729.600,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pembangunan Jalan Akses Masuk ke Hamparan Ndokum Siroga Ture-ture	2020	1	370.649.833,00	370.649.833,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pembuatan Drainase dan Gorong-gorong di Hamparan Ndokum Siroga Ture-ture	2020	1	152.186.744,00	152.186.744,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Penataan Lingkungan di Hamparan Ndokum Siroga Ture-ture	2020	1	241.641.221,00	241.641.221,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pengadaan Arus Listrik dan Instalasi Dalam Rumah di Hamparan Ndokum Siroga Ture-ture	2020	1	232.418.017,00	232.418.017,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pembuatan Septictank di Hamparan Ndokum Siroga Ture-ture	2020	1	502.993.571,00	502.993.571,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pembuatan Komunal di Hamparan Ndokum Siroga Ture-ture	2020	1	100.082.400,00	100.082.400,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pengadaan Air Bersih di Hamparan Ndokum Siroga Ture-ture	2020	1	218.018.559,00	218.018.559,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pembangunan Jalan Akses Masuk ke Hamparan Ndokum Siroga SMP	2020	1	357.542.137,00	357.542.137,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pembuatan Drainase dan Gorong-gorong di Hamparan Ndokum Siroga SMP	2020	1	85.608.000,00	85.608.000,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Penataan Lingkungan di Hamparan Ndokum Siroga SMP	2020	1	137.210.700,00	137.210.700,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pengadaan Arus Listrik dan Instalasi Dalam Rumah di Hamparan Ndokum Siroga SMP	2020	1	93.909.200,00	93.909.200,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pembuatan Septictank di Hamparan Ndokum Siroga SMP	2020	1	181.565.000,00	181.565.000,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pembuatan Komunal di Hamparan Ndokum Siroga SMP	2020	1	99.975.700,00	99.975.700,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pengadaan Air Bersih di Hamparan Ndokum Siroga SMP	2020	1	134.895.200,00	134.895.200,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Penataan Lingkungan di Hamparan Ndokum Siroga GBKP	2020	1	26.268.000,00	26.268.000,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pengadaan Arus Listrik dan Instalasi Dalam Rumah di Hamparan Ndokum Siroga GBKP	2020	1	26.930.900,00	26.930.900,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pembuatan Septictank di Hamparan Ndokum Siroga GBKP	2020	1	57.413.000,00	57.413.000,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Pengadaan Arus Listrik dan Instalasi Dalam Rumah di Hamparan Simpang Nangbelawan	2020	1	38.400.000,00	38.400.000,00
2	Dinas Sosial	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Baskom	2025	11	72.800,00	800.800,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Baskom	2025	20	72.800,00	1.456.000,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Beras	2025	450	14.450,00	6.502.500,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Ceret Stainles	2025	16	113.190,00	1.811.040,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Dandang uk.5 kg	2025	20	220.626,00	4.412.520,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Ember kecil uk. 30 L	2025	23	29.333,00	674.659,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Gelas Melamin	2025	60	7.074,00	424.440,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Gelas Melamin	2025	468	7.074,00	3.310.632,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Gula Pasir	2025	24	19.040,00	456.960,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Gula pasir	2025	51	19.040,00	971.040,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Kain panjang	2025	24	84.892,00	2.037.408,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Kain Sarung	2025	19	67.200,00	1.276.800,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Kuali 1	2025	2	156.667,00	313.334,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Kuali 2	2025	24	156.667,00	3.760.008,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Mangkok melamin	2025	38	18.865,00	716.870,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Minyak Goreng	2025	30	23.520,00	705.600,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Minyak Goreng	2025	47	23.520,00	1.105.440,00

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Total (Rp)
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Piring melamin sedang	2025	5	145.600,00	728.000,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Piring melamin sedang	2025	15	145.600,00	2.184.000,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Sabun Mandi	2025	29	7.840,00	227.360,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Sabun Mandi	2025	268	7.840,00	2.101.120,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Sapu Plastik	2025	6	62.254,00	373.524,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Sapu Plastik	2025	14	62.254,00	871.556,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Selimut	2025	18	242.400,00	4.363.200,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Sendok goreng	2025	15	28.000,00	420.000,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Sendok goreng	2025	15	28.000,00	420.000,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Sendok makan	2025	6	91.840,00	551.040,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Sendok makan	2025	26	82.667,00	2.149.342,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Susu kental manis	2025	60	25.760,00	1.545.600,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Susu kental manis	2025	96	25.760,00	2.472.960,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Tikar	2025	7	263.200,00	1.842.400,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Tikar	2025	20	263.200,00	5.264.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada Masyarakat	Drum Air 200 L	2024	298	279.500,00	83.291.000,00
Total					**3000**	**3.062.091.297,00**	**3.308.784.305,00**

Lampiran 47

Rincian Persediaan Usang Atau Kadaluarsa
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nama Barang	Expired Date	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Nilai Total	Berita Acara Perubahan Fisik		Keterangan
									Nomor	Tanggal	
1	Rumah Sakit Umum Daerah	Obat	ROVIVELL0644 IX 23	Februari 2025	10	AMP	Rp 97.902,00	Rp 979.020,00	RSUD/III/2025	31 Maret 2025	
		Obat	GLISERIL TRINITRAT INJ 1MG/ML -VII 2024 0381	Mei 2025	10	AMP	Rp 41.000,00	Rp 410.000,00	2475/RSUD/IX/2025	31 Desember 2025	
		Obat	Ethionamide 250 mg -2024 (OBAT PROGRAM)	Januari 2025	782	tab	Rp 1.493,00	Rp 1.167.526,00			
		Obat	Ethambutol 400 mg -2024 (OBAT PROGRAM)	Agustus 2024	2554	tab	Rp 669,00	Rp 1.708.626,00			
		Obat	Tenofovir 300mg+Lamivudine 300mg+dolutegravir 50mg - III 2025 (OP)	Juni 2025	967	btl	Rp 2.860,00	Rp 2.765.620,00			
		Obat	Dolutegravir 50mg - III 2025 (OP)	Juni 2025	7	tab	Rp 13.333,00	Rp 93.331,00			
		Obat	Ethionamide 250mg - III 2025 (OP)	Januari 2025	1300	tab	Rp 1.400,00	Rp 1.820.000,00			
		Obat-Obatan Lainnya	I-STAT G3+CARTRIDGE -T X 2024 1043	17 Desember 2024	2	box	Rp 4.945.050,00	Rp 9.890.100,00			
		Obat-Obatan Lainnya	I-STAT CK MB CARTRIDGE -T X 2024 1043	5 Oktober 2024	2	box	Rp 12.404.250,00	Rp 24.808.500,00			
		Obat-Obatan Lainnya	Genrul sars-cov-2 antigen test kit (xi-2021)	6 Juni 2022	60	box	Rp 1.563.655,00	Rp 93.819.300,00			
		Obat-Obatan Lainnya	RUNMEI SINGLE USE SAMPLERS (XII-2021)	1 Juni 2021	40	pcs	Rp 1.748.770,00	Rp 69.950.800,00			
		Obat	Rapid HBsAG VI	September 2025	250	TEST	Rp 6.163,00	Rp 1.540.750,00			
		Obat	AMIODARONE HCL INJ 5AMP 3ML	Agustus 2025	5	AMPUL	Rp 11.799,00	Rp 58.995,00			
		Obat	HALOPERIDOL 5MG	Juli 2025	75	TABLET	Rp 190,00	Rp 14.250,00			
		Obat	METRONIDAZOLE SYR 60ML	Juli 2025	4	BOTOL	Rp 10.100,00	Rp 40.400,00			
		Obat	PANTOCAIN 2% 50GR	Agustus 2025	8	TABLET	Rp 13.237,00	Rp 105.896,00			
		Obat-Obatan Lainnya	Becefort kaplet (xii	September 2025	34680	TABLET	Rp 1.316,00	Rp 45.638.880,00			
		Obat-Obatan Lainnya	FEEDING TUBE 3.5 TERUMO	Maret 2025	205	BUAH	Rp 48.840,00	Rp 10.012.200,00			
2	Dinas Kesehatan	Obat	Gentamicin Injeksi	31 Mei 2025	40	Ampul	Rp 2.689,00	Rp 107.560,00	440.5.1/VI/GFK/2025	30 Juni 2025	
		Obat	Amoxicillin 250 mg	31 Mei 2025	67000	Kapsul	Rp 395,00	Rp 26.465.000,00			
		Obat	Difenhidramin Injeksi 10 mg / 2,5 ml	31 Mei 2025	4000	Ampul	Rp 1.600,00	Rp 6.400.000,00			
		Obat	Vitamin B Komplek	31 Mei 2025	392900	Tablet	Rp 62,00	Rp 24.359.800,00			
		Obat	Retinol (Vit. A) 200.000 IU	30 Juni 2025	6000	Kapsul	Rp 935,00	Rp 5.610.000,00			
		Obat	Bisoprolol fumarat tablet 5 mg	30 Juni 2025	15400	Tablet	Rp 167,00	Rp 2.571.800,00			
		Obat	Ethambutol 400 mg	30 Juni 2025	388	Tablet	Rp 670,00	Rp 259.960,00			
Total					**526.689**			**Rp 330.598.314,00**			

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	**Pembiayaan**			
	a. Tahun 2006	910.000.000,00	910.000.000,00	0,00
	b. Tahun 2007	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	0,00
	c. Tahun 2008	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00	0,00
	d. Tahun 2009	725.000.000,00	725.000.000,00	0,00
	e. Tahun 2010	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00
	Jumlah 1	**4.910.000.000,00**	**4.910.000.000,00**	**0,00**
2	**Pengguliran Kembali**			
	a. Tahun 2008	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	b. Tahun 2009	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
	c. Tahun 2011 Tahap I	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
	d. Tahun 2012 Tahap II	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00
	Jumlah 2	**1.115.000.000,00**	**1.115.000.000,00**	**0,00**
3	**Jumlah Pengguliran Dana (1 + 2)**	**6.025.000.000,00**	**6.025.000.000,00**	**0,00**
4	**Pengembalian dari Masyarakat**			
	a. Untuk Pengguliran Tahun 2006	519.968.700,00	519.968.700,00	0,00
	b. Untuk Pengguliran Tahun 2007	826.350.000,00	826.350.000,00	0,00
	c. Untuk Pengguliran Tahun 2008	611.412.275,00	611.412.275,00	0,00
	d. Untuk Pengguliran Tahun 2009	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00
	e. Untuk Pengguliran Tahun 2010	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
	f. Untuk Pengguliran Kembali Tahun 2008	0,00	0,00	0,00
	g. Untuk Pengguliran Kembali Tahun 2009	27.125.000,00	27.125.000,00	0,00
	h. Untuk Pengguliran Kembali Tahun 2011 Tahap I	38.375.000,00	38.375.000,00	0,00
	i. Untuk Pengguliran Kembali Tahun 2011 Tahap II	69.125.000,00	69.125.000,00	0,00
	j. Penyetor Tidak Teridentifikasi	14.372.440,00	14.372.440,00	0,00
	k. Pengembalian Pokok TA 2015 dan TA 2016 di Setor TA 2016	202.750.000,00	202.750.000,00	0,00
	l. Pengembalian Pokok di Setor TA 2017	45.756.750,00	45.756.750,00	0,00
	m. Pengembalian Pokok di Setor TA 2018	28.065.250,00	28.065.250,00	0,00
	n. Pengembalian Pokok di Setor TA 2019	64.350.000,00	64.350.000,00	0,00
	o. Pengembalian Pokok di Setor TA 2020	2.625.500,00	2.625.500,00	0,00
	p. Pengembalian Pokok di Setor TA 2021	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
	q. Pengembalian Pokok di Setor TA 2022	48.465.000,00	48.465.000,00	0,00
	r. Pengembalian Pokok di Setor TA 2023	26.976.833,00	26.976.833,00	0,00
	s. Pengembalian Pokok di Setor TA 2024	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00
	t. Pengembalian Pokok di Setor TA 2025	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	Jumlah 4	**2.764.842.748,00**	**2.739.842.748,00**	**25.000.000,00**
5	**Saldo Dana Bergulir TA. 2022 (3 – 4)**	**3.260.157.252,00**	**3.285.157.252,00**	**(25.000.000,00)**

Rincian Tanah Perangkat Daerah
Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sekretariat DPRD	1.993.617.090,00	1.993.617.090,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	21.459.408.000,00	21.459.408.000,00	0,00
3	Kecamatan Kabanjahe	12.844.090.000,00	12.844.090.000,00	0,00
4	Kecamatan Berastagi	324.145.000,00	324.145.000,00	0,00
5	Kecamatan Simpang Empat	500.160.000,00	500.160.000,00	0,00
6	Kecamatan Payung	98.784.000,00	98.784.000,00	0,00
7	Kecamatan Tiganderket	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00
8	Kecamatan Munte	192.528.000,00	192.528.000,00	0,00
9	Kecamatan Tiga Binanga	287.081.000,00	287.081.000,00	0,00
10	Kecamatan Juhar	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00
11	Kecamatan Lau Baleng	71.680.000,00	71.680.000,00	0,00
12	Kecamatan Barusjahe	673.200.000,00	673.200.000,00	0,00
13	Kecamatan Tiga Panah	215.400.000,00	215.400.000,00	0,00
14	Kecamatan Kutabuluh	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
15	Kecamatan Merek	618.000.000,00	618.000.000,00	0,00
16	Kecamatan Mardinding	131.400.000,00	131.400.000,00	0,00
17	Kecamatan Merdeka	134.209.000,00	134.209.000,00	0,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	308.095.566.500,00	308.095.566.500,00	0,00
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	7.595.094.284,00	7.430.717.222,00	164.377.062,00
20	Dinas Perhubungan	2.978.850.000,00	2.978.850.000,00	0,00
21	Dinas Kesehatan	7.504.599.488,00	6.918.014.488,00	586.585.000,00
22	Rumah Sakit Umum Daerah	6.143.757.325,00	6.143.757.325,00	0,00
23	Dinas Pendidikan	92.321.511.326,00	92.321.511.326,00	0,00
24	Dinas Sosial	6.721.963.000,00	6.721.963.000,00	0,00
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	842.400.000,00	842.400.000,00	0,00
26	Dinas Pertanian	26.397.699.000,00	26.397.699.000,00	0,00
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	419.256.000,00	419.256.000,00	0,00
28	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.656.312.000,00	3.656.312.000,00	0,00
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35.458.652.941,00	35.458.652.941,00	0,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.537.150.000,00	9.537.150.000,00	0,00
31	Dinas Lingkungan Hidup	4.625.752.640,00	5.033.752.640,00	(408.000.000,00)
32	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	46.554.401.000,00	46.520.401.000,00	34.000.000,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.485.500.000,00	39.005.500.000,00	(2.520.000.000,00)
34	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.449.920.000,00	2.449.920.000,00	0,00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00
Jumlah		**637.740.407.594,00**	**639.883.445.532,00**	**(2.143.037.938,00)**

Lampiran 50

Rincian Aset Tanah yang Sudah Bersertifikat
Tahun 2025

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
1	Sekretariat Daerah	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	01/09/1991	4255	Jl. Veteran Kel.Gung Leto Kec.Kabanjahe	Hak Pakai	13/07/2010	BH 834107	Rumah Dinas Bupati Karo	Hibah		1991
2	Sekretariat Daerah	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	28/01/1972	3317	Jl. Kartini Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	28/10/2024	NIB.02.06.00000138 0.0	Eks Rumah Dinas Bupati Karo	Hibah		1972
3	Sekretariat Daerah	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	28/01/1972	2747	Jl. Kartini Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	28/10/2024	NIB.02.06.00000138 5.0	Eks Rumah Dinas Sekda Karo	Hibah		1972
4	Sekretariat DPRD	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	25/09/1985	1682	Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara	Hak Pakai	16/02/2021	32	Rumah Ketua DPRD	Pembelian	Rumah Ketua DPRD	1985
5	Sekretariat DPRD	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	18/09/2013	460	Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara	Hak Pakai	30/06/2022	55	Rumah Dinas Wakil I Ketua DPRD	Pembelian	Rumah Dinas Wakil I Ketua DPRD	2013
6	Sekretariat DPRD	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	18/09/2013	451	Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara	Hak Pakai	04/07/2022	58	Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD	Pembelian	Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD Kab. Karo	2013
7	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	31/12/2008	235	Desa Naman Kec. Namanteran	Hak Pakai	19/10/2023	4	Rumah Dinas Dokter	Hibah	Rumah Dinas Dokter ABJ526855	2008
8	Sekretariat Daerah	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asram a	22/09/1996	2426	Jl. Veteran Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	13/07/2010	BH 834102	Rumah Dinas Wakil Bupati Karo	Hibah		1996
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah LP	08/12/1982	17407	Komp. Perum Korpri Desa Gurusinga Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	8/12	Uptd Workshop	Hibah	AAV961259/AAV96 1439	1982
10	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	14/12/2014	15660	Desa Bandar Tongging Kec. Merek	Hak Pakai	03/12/2019	AAH934327	Sub terminal agribisnis	Hibah		2014
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	01/01/1984	6000	Desa Bandar Tongging Kec. Merek (Sertifikat AAH934327)	Hak Pakai	03/12/2019	2	Sentra IKM	Hibah		1984
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	31/12/1976	17961	Jl.Kapten Bangsi Sembiring Kel.Padang Mas Kec.Kabanjahe	Hak Pakai	29/12/2022	41	Pasar Kabanjahe	Pembelian		1976

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	06/10/2001	5811	Jl. Gundaling Kel. Gundaling I Kec. Berastagi	Hak Pakai	26/01/2022	24	PASAR BUNGA DAN BUAH	Pembelian		2001
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	08/10/2001	176	Jl.Perhubungan/Termi nal Berastagi Kel.Tambak Laumulgap II Kec.Berastagi (Sertipikat BX 409661)	Hak Pakai	10/03/2017	2	Pasar/Pajak Bunga	Pembelian		2001
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	08/10/2001	2261	Jl.Pusat Pasar Berastagi/Losd Jahe-jahe Kel.Tambak Laumulgab II Kec.Berastagi (Sertipikat BX 409669)	Hak Pakai	10/03/2017	3	Losd Jahe-jahe	Pembelian		2001
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	07/10/2001	8521	Jl.Pusat Pasar Berastagi Kel. Tambak Laumulgab II Kec.Berastagi (Sertipikat BX 409670)	Hak Pakai	10/03/2017	5	Kios /Lokasi Pusat Pasar Berastagi	Pembelian		2001
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	19/08/2020	215	Gg. Merek Kelurahan Tambak Lau Mulgap II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo	Hak Pakai	11/04/2023	16	Pasar Losd Cabe Berastagi	Guna Usaha		2020
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	07/10/2001	5752	Jl.Tigapanah-Siantar Desa Tigapanah Kec.Tigapanah (Sertipikat BX 409662)	Hak Pakai	10/03/2017	3	Pasar Tigapanah	Pembelian		2001
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	07/10/1970	5431	Jl.Rakoetta S Brahmana Desa Tigabinanga Kec.Tigabinanga (Sertipikat BX 409650)	Hak Pakai	10/03/2017	4	Pasar Tigabinanga	Pembelian		1970
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	07/10/1980	9590	Jl. Juhar Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga (Sertipikat BX 409668)	Hak Pakai	10/03/2017	3	Pasar Tigabinanga	Pembelian		1980
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	31/12/1980	738	Desa Tongging Kec.Merek (AAH 934328)	Hak Pakai	25/01/2019	AAH 934328	Pasar Tongging	Hibah		1980
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	07/10/2001	4014	Daerah Tigajumpa Kec. Barusjahe (Akte Pernyataan Kepemilikan No. 12 Tgl. 02 September 2016)	Hak Pakai	15/01/2021	5	Pasar Barusjahe	Pembelian		2001
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	07/10/2001	8554	Desa Laubaleng Kec. Laubaleng (Berita Acara Pembebasan Tanah Tanggal : 22 April 1976)	Hak Pakai	28/12/2020	6	Kantor UPTD dan Pasar Laubaleng	Hibah		2001

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	31/12/1981	14930	Kec. Mardinding	Hak Pakai	28/12/2020	5	Kantor UPTD dan Pasar Mardinding	Hibah		1981
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	30/09/1970	4469	Jl.Perniagaan Desa Munte Kec.Munte (Sertipikat BX 409644)	Hak Pakai	10/03/2017	7	Pasar Munte	Hibah		1970
26	Dinas Perhubungan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PER USAHAAN	Tanah Bangunan Terminal Darat	15/10/1950	5247	Jl. Veteran Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	15/01/2021	31	Terminal Bawah Tiga Baru	Hibah		1950
27	Dinas Perhubungan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/10/1984	2010	JALAN KOTACANE NO. 403 DESA LAUCIMBA KECAMATAN KABANJAHE	Hak Pakai	28/12/2016	1	Kantor Dinas Perhubungan	Pembelian		1984
28	Kecamatan Merdeka	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	18/10/2021	1303	Jln. Pendidikan No.1 Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka	Hak Pakai	26/01/2022	AAW037615	Kantor Camat Merdeka	Pembelian		2021
29	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/1979	2252	Jl. Veteran No. 54 Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/11/2020	12	Kantor Dinas Pendidikan Kabanjahe	Hibah	(Sertipikat AAR840498)	1979
30	Kecamatan Kutabuluh	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	28/10/1980	1141	Jl. Laubuluh Desa Laubuluh Kec. Kutabuluh (Akte Pernyataan Kepemilikan No. 309 Tgl. 22 November	Hak Pakai	26/11/2020	4	Kantor dan Rumah Dinas	Hibah		1980
31	Kecamatan Merek	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/1982	3414	Jl. Besar Kabanjahe-Merek Desa Garingging Kec. Merek (Surat Perjanjian Penyerahan Pertapakan Kantor Camat Merek Kab. Karo Tanggal : 05 Oktober 2015)	Hak Pakai	28/12/2020	3	Kantor Camat Merek	Hibah	Sertifikat AAR840795	1982
32	Sekretariat Daerah	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22/09/1974	14037	Jl. Jamin Ginting No. 17 Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	07/04/2011	BH 900579	Kantor Bupati	Hibah		1974
33	Sekretariat Daerah	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22/09/1996	599	Jl. Pahlawan Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	20/05/2010	BE 718743	Dipinjam Pakaikan ke BNN	Hibah		1996
34	Kecamatan Kabanjahe	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15/10/2009	527	Jl.Veteran No. 20 Kel.Kampung Dalam Kec. Kampung Dalam	Hak Pakai	25/05/2010	BE718744	Kantor Lurah Kampung Dalam dan Kantor Lurah Padang Mas	Pembelian	Koreksi dari Tanah Bangunan Rumah Penjaga	2009
35	Kecamatan Berastagi	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	24/12/1999	479	Jl. Kantor Camat No. 1 Kel. Gundaling I Kec. Berastagi	Hak Pakai	29/03/2022	25	Kantor Camat	Hibah	Kantor Kelurahan Gundaling II	1999
36	Kecamatan Berastagi	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	19/10/2014	1518	Komp. Perum Korpri Desa Gurusinga Kec. Berastagi	Hak Pakai	04/11/2024	02.06.000001371.0	Kantor Camat	Hibah	Kantor Camat Berastagi	2014

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
37	Kecamatan Berastagi	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/07/2023	55	Jalan Udara Lingkungan I Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi	Hak Pakai	28/03/2024	15	Kantor Kelurahan Gundaling II Kec. Berastagi	Hibah	Kantor Kelurahan Gundaling I dan Kantor Kelurahan T.L.Mulgab I	2023
38	Kecamatan Simpang Empat	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15/10/1986	3019	Jl. Pemerintahan No. 1 Desa Ndokumsiroga Kec. Simpang Empat (Sertipikat BX 409655)	Hak Pakai	10/03/2017	5	Kantor Camat Simpang Empat	Hibah	(Sertipikat BX 409655)	1986
39	Kecamatan Payung	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20/07/2008	1031	Jl. Rumah Kuta No. 1 Desa Payung Kec. Payung	Hak Pakai	30/04/2019	2	Kantor Camat Payung	Hibah		2008
40	Kecamatan Tiganderket	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22/10/1980	2445	Jl. Kutabuluh No. 299 Desa Tiganderket Kec. Tiganderket	Hak Pakai	10/03/2017	4	Kantor dan Rumah Dinas Camat Tiganderket	Hibah		1980
41	Kecamatan Munte	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	17/08/1974	1204	Desa Munte Kec. Munte (Sertipikat BX 409667)	Hak Pakai	10/03/2017	6	Kantor Camat Munte	Hibah		1974
42	Kecamatan Munte	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	29/09/2015	4097	Desa Munte Kec. Munte	Hak Pakai	10/03/2017	8	Kantor Camat Munte	Pembelian		2015
43	Kecamatan Munte	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	04/08/2016	379	Desa Munte Kec. Munte	Hak Pakai	10/03/2017	5	Rumah Dinas Camat Munte	Pembelian		2016
44	Kecamatan Tigabinanga	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	27/10/1952	1401	Jl. Kutacane Desa Kuala Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	17/12/2020	7	Perumahan Dinas Camat Tigabinanga	Hibah		1952
45	Kecamatan Tigabinanga	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	27/10/1952	983	Jl. Lingkar Kel. Tigabinanga Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	26/11/2020	6	Rumah Dinas Camat Tigabinanga	Hibah		1952
46	Kecamatan Tigabinanga	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	27/10/1961	619	Jl. Lingkar Kel. Tigabinanga Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	17/12/2020	8	Kantor Lurah dan Kantor UPT Dinas Pendidikan	Hibah		1961
47	Kecamatan Lau Baleng	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	24/10/1985	2400	Jl. Rakoetta S. Brahmana No. 33 Desa Lau Baleng Kec. Lau Baleng	Hak Pakai	09/04/2020	3	Kantor Camat Lau Baleng dan Rumah Dinas Camat	Hibah		1985
48	Kecamatan Barus Jahe	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	29/12/1972	2571	Jl. Gotong Royong No. 1 Desa Barusjahe Kec. Barusjahe	Hak Pakai	10/03/2017	5	Kantor Camat Barusjahe	Hibah		1972
49	Kecamatan Tigapanah	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/08/1974	2387	Jl. Sukanalu No. 24 Desa Tigapanah Kec. Tigapanah.	Hak Pakai	10/03/2017	2	Kantor dan rumah Dinas Camat Tigapanah	Hibah		1974
50	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	29/12/1950	20193	Jl. Selamat Ketaren No.9 Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	30/06/2022	51,52,56,59,61,54	Tanah Bangunan Kantor Dinas Kesehatan	Hibah		1950
51	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	29/12/1950	3922	Jl. Selamat Ketaren Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	30/06/2022	60	Tanah Bangunan Kantor Dinas Kesehatan	Hibah	(Kantor Dinas Kesehatan bagian Utama)	1950

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
52	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/1992	147	Dusun Gurisen Desa Sarimanis Kec. Barusjahe	Hak Pakai	08/09/2020	2	Pustu Dusun Gurisen	Pembelian	Pustu Dusun Gurisen Desa Sarimanis (Koreksi Pencatatan dari Puskesmas Tiga Jumpa)	1992
53	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/07/1997	19230	Jl. Medan-Kutacane Desa Buluh Pancur Kecamatan Laubaleng	Hak Pakai	09/04/2020	AAP797381	Tanah BPP Desa Buluh Pancur	Hibah		1997
54	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/2009	3524	Jl. Jamin Jamin Ginting Eks. Komplek Cikditiro Desa Ketaren Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	09/06/2021	AAV961269	kantor BPP Kabanjahe	Hibah		2009
55	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/2009	961	Bekas kantor kepala desa jl. Juhar Desa Juhar Perangin-angin Kec. Juhar	Hak Pakai	09/04/2020	AAP797378	kantor BPP Juhar	Hibah		2009
56	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	29/10/2009	820	Desa Sukanalu Kec. Barusjahe	Hak Pakai	15/01/2021	AAR840797	Tanah BPP Barusjahe Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe	Hibah		2009
57	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/2009	817	Jl. Kutabuluh-Buahraya Desa Kutabuluh Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	20/05/2019	AAJ194132)	kantor BPP Kutabuluh	Hibah		2009
58	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/2010	5748	Jl. Medan-Kutacane Desa Lausolu Kec. Mardingding	Hak Pakai	09/04/2020	AAP797344	kantor BPP Mardingding	Hibah		2010
59	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/07/1997	17370	Jl. Tiga panah seberaya desa tigapanah kecamatan tiga panah	Hak Pakai	26/01/2022	AAW037552	Tanah BPP Tigapanah Desa tigapanah	Hibah		1997
60	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/07/1980	10722	Jl. Veteran No. 24 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	13/07/2010	BH 834106	Kantor Dinas Pertanian	Pembelian		1980
61	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11/09/2009	732	Desa Melas Kecamatan Dolat Rayat	Hak Pakai	19/01/2021	AAR840799	Tanah BPP Desa Melas Kecamatan Dolat Rayat	Hibah		2009
62	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12/10/2009	796	Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka	Hak Pakai	13/09/2013	BO 214146	Tanah BPP Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka	Hibah		2009
63	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/07/1997	6676	Desa Jandi meriah Kecamatan Tiganderket	Hak Pakai	13/03/2019	AAJ194141)	Tanah BPP Sinabung Desa Jandi Meriah	Hibah		1997
64	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/2003	987	Jl. Jamin Ginting No 108 Kec. Kabanjahe (Sertipikat AJ149390)	Hak Pakai	20/03/1997	AJ149390	Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan	Hibah	BKKBN (Sertipikat AJ149390)	2003

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
65	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/1987	3652	Desa Bunga Baru Kec. Tigabinanga (Sertifikat AA 766752)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD.040574 Bunga Baru	Hibah	(Sertifikat AA 766752)	1987
66	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/1951	2022	Jl. Medan-Kutacane Desa Durinrugun Kec. Laubaleng (Sertifikat AG 833721)	Hak Pakai	21/09/1995	1	SDN 040545 Durin Rugun	Hibah	(Sertifikat AG 833721)	1951
67	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/1983	1969	Jl. Tanjongbale Desa Kinangkong Kec. Laubaleng (Sertifikat AG 833731)	Hak Pakai	21/09/1995	1	SD. 040546 Kinangkong	Hibah	(Sertifikat AG 833731)	1983
68	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/1950	2368	Jl. Kutacane Desa Laubaleng Kec. Laubaleng (bergabung dengan SDN 040548 Laubaleng) (Sertifikat BW 038512)	Hak Pakai	13/02/2017	1	SD. 040547 Lau Baleng	Hibah	(bergabung dengan SDN 040548 Laubaleng) (Sertifikat BW 038512)	1950
69	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/1984	6020	Jl. Kutacane Desa Perbulan Kec. Laubaleng (dahulu bernama SDN 040559 Perbulan) (Sertifikat A 1420751)	Hak Pakai	31/03/1989	3	SD. 040549 Perbulan	Hibah	(dahulu bernama SDN 040559 Perbulan) (Sertifikat A 1420751)	1984
70	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/1993	768	Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	17/12/2020	5	Upt Kutabuluh	Hibah	Sertipikat AAR840747	1993
71	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/1987	9394	Dusun Payambelang Desa Pintu Angin Kec. Laubaleng	Hak Pakai	20/05/1996	2	SD. 048099 Payambelang Pintu Angin	Hibah	(Sertipikat AI 005856)	1987
72	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/1980	5344	Jl. Tiganderket Desa Surbakti Kec. Simpang Empat (Sertipikat BW 038508)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD.040469 SURBAKTI	Hibah	(Sertipikat BW 038508)	1980
73	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/1975	1399	Jl. Katepul No. 42 B Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe (Sertifikat BE 718742)	Hak Pakai	20/05/2010	31	SDN 043935 Simpang Ketepul	Hibah	(Sertifikat BE 718742) Plank	1975
74	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/1951	2473	Jl. Veteran No. 33 Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe (bergabung dengan SDN 040452 Kabanjahe) (Sertipikat BX 790219)	Hak Pakai	13/02/2017	2	SD. 040446 Kabanjahe	Hibah	Sertifikat (bergabung dengan SDN 040452 Kabanjahe) (Sertipikat BX 790219) Plank	1951
75	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/2004	3825	Jl. Selamat Ketaren Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	05/07/2022	57	SD. Percontohan	Hibah	SERTIFIKAT ABE 367261	2004
76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	08/12/1982	5544	Jl. Jamin Ginting Desa Ketaren Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	13/07/2010	BH 834109	Kantor PU,Dishut,KLH,D insos	Pinjam	BH 834109	1982
77	Dinas Lingkungan Hidup	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	09/04/1990	11560	Jl.Jamin Ginting Gg. Cikditiro Kabanjahe	Hak Pakai	08/06/2021	17	Bangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Hibah		1990

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
78	Dinas Lingkungan Hidup	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	08/08/2000	500	Jl. Jamin Ginting Km. 4 Desa Sumbul Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	21/05/1987	B 4714752		Hibah		2000
79	Dinas Lingkungan Hidup	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	08/08/2000	963	Jl. Jamin Ginting Km. 24 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/12/2024	02.06.0000001815.0	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Hibah		2000
80	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11/10/1957	1254	Jl. Pahlawan Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	13/02/2017	6	Kantor Dinas Koperasi	Pembelian		1957
81	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	24/12/1980	254	Kel. Gundaling I Kec. Berastagi (Sertipikat BX 409665)	Hak Pakai	10/03/2017	5	UPTD Disbudpar	Pembelian		1980
82	Dinas Komunikasi dan Informatika	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	02/03/2004	1292	Desa Kacinambun Kec. Tigapanah Puncak 2000	Hak Pakai	15/01/2021	Hak Pakai No.3	tempat bangunan Menara	Pembelian		2004
83	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1980	14270	Jl. Senatorium Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	30/06/2022	53	Bangunan Akademi Kebidanan	Hibah	Sertipikat	1980
84	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1959	1351	Desa Doulu Kec. Berastagi (Sertifikat A 1420747)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD. 040453 Doulu	Hibah	(Sertifikat A 1420747) Plank	1959
85	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1990	2712	Jl. Jamin Ginting Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi (bergabung dengan SDN 040460 Berastagi dan SDN 046573 Berastagi) (Sertipikat BW 038491)	Hak Pakai	08/02/2017	5	SDN 040455 Berastagi	Hibah	(bergabung dengan SDN 040460 Berastagi dan SDN 046573 Berastagi) (Sertipikat BW 038491)	1990
86	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1959	4641	Jl. Jamin Ginting Desa Raya Kec. Berastagi (bergabung dengan SDN Bertingkat Raya) (Sertipikat BW 038521)	Hak Pakai	28/12/2016	2	SD 040456 Berastagi	Hibah	(bergabung dengan SDN Bertingkat Raya) (Sertipikat BW 038521) Plank	1959
87	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	4530	Jl. Abdi Kel. Gundaling I Kec. Berastagi (bergabung dengan SDN 040461 Berastagi dan SDN 047160 Berastagi) (Sertipikat BW 038499)	Hak Pakai	28/12/2016	2	SD Negeri 040457 Berastagi	Hibah	(bergabung dengan SDN 040461 Berastagi dan SDN 047160 Berastagi) (Sertipikat BW 038499) Plank	1989
88	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	2737	Jl. Udara Kel. Gundaling II Kec. Berastagi (bergabung dengan SDN 040462 Berastagi) (Sertipikat BW 038509)	Hak Pakai	28/12/2016	3	SD. 040458 Berastagi	Hibah	(bergabung dengan SDN 040462 Berastagi) (Sertipikat BW 038509) Plank	1989

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
89	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1952	3179	Jl. Kolam Renang No. 65 Kel. Gundaling I Kec. Berastagi (bergabung dengan SDN 044825 Gundaling) (Sertipikat BW 038493)	Hak Pakai	28/12/2016	3	SD. 040459 Berastagi	Hibah	(bergabung dengan SDN 044825 Gundaling) (Sertipikat BW 038493) Plank	1952
90	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1990	1275	Desa Gurusinga Kec. Berastagi (Sertifikat A 1420723)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SDN 045952 Gurusinga	Hibah	(Sertifikat A 1420723) Plank	1990
91	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1987	2639	Desa Sempajaya Kec. Berastagi (bergabung dengan SDN 040454 Peceren) (Sertifikat BX 409713)	Hak Pakai	06/06/2017	1	SD No. 045965 Peceren	Hibah	(bergabung dengan SDN 040454 Peceren) (Sertifikat BX 409713)	1987
92	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1993	8215	Jl. Jamin Ginting Desa Raya Kec. Berastagi (SERTIPIKAT AAR840126)	Hak Pakai	23/11/2020	9	SKB KARO	Hibah	Surat Pelepasan Hak Tanah No. 210/1369/6/1994, (SERTIPIKAT AAR840126)	1993
93	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01/09/1983	3526	Desa Tigapanah Kec. Tigapanah (Sertifikat A 1420734)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD. 040527 TIGAPANAH	Hibah	(Sertifikat A 1420734)	1983
94	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1963	5229	Desa Sukadame Kec. Tigapanah (bergabung dengan SDN 047166 Sukadame) (Sertipikat BW 038498)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD. 040528 SUKADAME	Hibah	(bergabung dengan SDN 047166 Sukadame) (Sertipikat BW 038498)	1963
95	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1930	4357,8	Desa Ajibuhara Kec. Tigapanah (Sertifikat A 1420736)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD. 040529 AJIBUHARA	Hibah	(Sertifikat A 1420736)	1930
96	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/01/1989	5266	Desa Bunuraya Kec. Tigapanah (Sertifikat A 1420737)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD. 040530 BUNURAYA	Hibah	(Sertifikat A 1420737)	1989
97	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	28/09/1990	2413	Jl. Lingkungan Desa Seberaya Kec. Tigapanah (SDN 043937 telah tutup dan bergabung ke SDN 040539 Seberaya) (Sertifikat AB 204571)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD 040539 Seberaya	Hibah	(SDN 043937 telah tutup dan bergabung ke SDN 040539 Seberaya) (Sertifikat AB 204571)	1990
98	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1990	1678	Jl. Lingkungan Desa Seberaya Kec. Tigapanah (Sertifikat AB 204603)	Hak Pakai	31/05/1991	2	SD. 040539 SEBERAYA	Hibah	(Sertifikat AB 204603)	1990
99	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1947	4974	Desa Manuk Mulia Kec. Tigapanah (semula SDN 040543 Manuk Mulia berubah menjadi SDN 040534 Manuk Mulia) (Sertifikat AF 397916)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SD. 040534 MANUKMULIA	Hibah	(semula SDN 040543 Manuk Mulia berubah menjadi SDN 040534 Manuk Mulia) (Sertifikat AF 397916)	1947
100	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1998	3132	Desa Ajijahe Kec. Tigapanah (Sertifikat AB 204570)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 044848 AJIJAHE	Hibah	(Sertifikat AB 204570)	1998

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
101	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1991	2828	Desa Suka Kec. Tigapanah (Sertifikat AB 204582)	Hak Pakai	31/05/1991	2	SD. 040541 SUKA	Hibah	(Sertifikat AB 204582)	1991
102	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/01/1991	1847	Desa Suka Kec. Tigapanah (Sertifikat AB 204581)	Hak Pakai	31/05/1991	4	SD. 040542 SUKA	Hibah	(Sertifikat AB 204581)	1991
103	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1979	2760	Desa Suka Kec. Tigapanah (Sertifikat AB 204583)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD Negeri 045957 Suka	Hibah	(Sertifikat AB 204583)	1979
104	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1978	5040	Desa Kutakepar Kec. Tigapanah (Sertifikat AB 204579)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 044850 KUTAKEPAR	Hibah	(Sertifikat AB 204579)	1978
105	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	2023,5	Jl. Kabanjahe-Merek Simpang Desa Mulawari Kec. Tigapanah (Sertifikat A 1420735)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD. 044853 SP. MULAWARI	Hibah	(Sertifikat A 1420735)	1989
106	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1978	2110	Desa Ajijulu Kec. Tigapanah (Sertifikat AB 204573)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 047163 AJIJULU	Hibah	(Sertifikat AB 204573)	1978
107	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1978	3047	Desa Seberaya Kec. Tigapanah (Sertifikat AF 397913)	Hak Pakai	21/06/1994	3	SD. 047164 SEBERAYA	Hibah	(Sertifikat AF 397913)	1978
108	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1997	8561	Desa Suka Maju Kec. Tigapanah	Hak Pakai	21/01/2022	3	SD. 045956 SUKAMAJU	Hibah	Sertifikat AAW037618	1997
109	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1982	9625	Desa Kacinambun Kec. Tigapanah (Sertifikat AF 397915)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SD. 047168 Kacinambun	Hibah	(Sertifikat AF 397915)	1982
110	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1981	11993	Desa Singa Kec. Tigapanah (Sertifikat AF 397914)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SD. 046420 Singa	Hibah	(Sertifikat AF 397914)	1981
111	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1991	6407	Desa Kubusimbelang Kec. Tigapanah (semula SDN 040532 Kubusimbelang berubah menjadi SDN 046421 Kubusimbelang) (Sertifikat AF 397912)	Hak Pakai	21/06/1994	2	SD. 046421 Kubusimbelang	Hibah	(semula SDN 040532 Kubusimbelang berubah menjadi SDN 046421 Kubusimbelang) (Sertifikat AF 397912)	1991
112	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1991	6768	Desa Kubusimbelang Kec. Tigapanah (bekas SDN 040532 Kubusimbelang) (Sertifikat AB 204572)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD 046421 Kubusimbelang	Hibah	(bekas SDN 040532 Kubusimbelang) (Sertifikat AB 204572)	1991
113	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	1825	Jl. Jamin Ginting Desa Sumbul Kec. Kabanjahe (Sertifikat A 1420722)	Hak Pakai	31/03/1989	2	SD N 040463 Sumbul	Hibah	(Sertifikat A 1420722) (Plank)	1989
114	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	4649	Desa Kandibata Kec. Kabanjahe (Sertifikat A 1420728)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD. 040464 Kandibata	Hibah	(Sertifikat A 1420728) Plank	1989

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
115	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	1840	Desa Lausimomo Kec. Kabanjahe (Sertifikat A 1420746)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD. 040466 Lausimomo	Hibah	Semula SD No. 040465 menjadi SD No. 040466 Lau Simomo (Sertifikat A 1420746) Plank	1989
116	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1975	1994	Desa Kacaribu Simpang Singa Kec. Kabanjahe (Sertifikat A 1420738)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SDN 043934 Simpang Singa	Hibah	(Sertifikat A 1420738) Plank	1975
117	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	2473	Jl. Let. Mumah Purba Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe (bergabung dengan SD 040449 Kabanjahe) (Sertipikat BW 038492)	Hak Pakai	28/12/2016	7	SDN 040447 KABANJAHE	Hibah	(bergabung dengan SD 040449 Kabanjahe dan SD 048072 Kabanjahe) (Sertipikat BW 038492) Plank	1989
118	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	2109	Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe (Sertifikat A 1420726)	Hak Pakai	31/03/1989	3	SD N 040448 Kabanjahe	Hibah	(Sertifikat A 1420726) Plank	1989
119	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1976	2270	Jl. Kartini Desa Gung Leto Kec. Kabanjahe (Sertifikat BO 214147)	Hak Pakai	26/08/2013	6	TK Pembina Kabanjahe	Hibah	(Sertifikat BO 214147) Plank	1976
120	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	6896	Jl. Jamin Ginting Desa Ketaren Kec. Kabanjahe (Sertifikat A 1420719)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD. 040443 Kabanjahe	Hibah	(Sertifikat A 1420719)/ Plank	1989
121	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1925	1509	Jl. Pahlawan No. 1 B Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe (Sertifikat A 1420745)	Hak Pakai	31/03/1989	4	SD N 040445 Kabanjahe	Hibah	(Sertifikat A 1420745) Plank	1925
122	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1951	8982	Jl. Jamin Ginting No. 60 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe (Sertifikat BH 834103)	Hak Pakai	13/07/2010	33	SMP 1 Kabanjahe	Hibah	(Sertifikat BH 834103) Plank	1951
123	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1956	6073	Jl. Jamin Ginting Desa Ketaren Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	15/09/2020	6	SMP NEGERI 2 Kabanjahe	Hibah	Sertipikat AAR830239 (Plank)	1956
124	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1983	10100	Jl. Kutacane Desa Kandibata Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/10/2020	2	SMP. 3 Kabanjahe	Hibah	Sertipikat AAR840140(Plank)	1983
125	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1958	5883	Jl. Perwira No. 157 Kel. Gundaling I Kec. Berastagi (Sertipikat AAR840710)	Hak Pakai	17/12/2020	6	SMP 1 Berastagi	Hibah	Sertipikat AAR840710 (Plank)	1958
126	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1969	2920	Jl. Kolam Renang Kel. Gundaling I Kec. Berastagi (Akte Pernyataan Kepemilikan No. 89 Tgl. 15 Desember 2015)	Hak Pakai	08/09/2021	23	SMP 2 Berastagi	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 89 Tgl. 15 Desember 2015) Sertipikat AAP963041	1969
127	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	2347,8	Desa Rumah Kabanjahe Kec. Kabanjahe (Sertifikat A 1420729)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SDN 044824 Rumah Kabanjahe	Hibah	(Sertifikat A 1420729) Plank	1989

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
128	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	2604	Desa Samura Kec. Kabanjahe (Sertifikat A 1420721)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD N 044826 Samura	Hibah	(Sertifikat A 1420721)	1989
129	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	2379	Desa Kaban Kec. Kabanjahe (Sertifikat A 1420730)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD No. 044828 Kaban	Hibah	(Sertifikat A 1420730) Plank	1989
130	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	2322	Desa Ketaren Kec. Kabanjahe (Sertifikat A 1420731)	Hak Pakai	31/03/1989	2	SD. 047159 Ketaren	Hibah	(Sertifikat A 1420731) Plank	1989
131	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	951	Jl. Jamin Ginting Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe (Sertifikat A 1420719)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD. 048232 Kabanjahe	Hibah	(Sertifikat A 1420719) Plank	1989
132	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1980	251	Jl. Tiganderket Desa Surbakti Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	26/01/2022	4	Rumah Dinas Sekolah SDN 040469 Surbakti	Hibah	Sertipikat AAW037643	1980
133	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1952	3414	Desa Perteguhen Kec. Simpang Empat (Sertifikat AB 204594)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 040479 PERTEGUHEN	Hibah	(Sertifikat AB 204594)	1952
134	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1935	1696	Desa Beganding Kec. Simpang Empat (Sertipikat AB 204598)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD.040472 BEGANDING	Hibah	(Sertipikat AB 204598)	1935
135	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1991	10651	Desa Beganding Kec. Simpang Empat (Sertifikat AB 204599)	Hak Pakai	31/05/1991	2	SD.040473 BEGANDING	Hibah	(Sertifikat AB 204599)	1991
136	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1991	3175	Desa Suka Kec. Tigapanah (Sertipikat AB 204580)	Hak Pakai	31/05/1991	3	SD 047162 Suka	Hibah	(Sertipikat AB 204580)	1991
137	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1987	4921	Jl. Kacinambun Desa Kutambelin Kec. Tigapanah (SertipikatAAJ194146)	Hak Pakai	13/03/2019	1	SD. 048098 Kuta Mbelin	Hibah	(Sertipikat AAJ194146)	1987
138	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1997	2701	Desa Tigapanah Kec. Tigapanah (Sertifikat AAJ194148)	Hak Pakai	29/05/2019	7	SD. 048291 Tigapanah	Hibah	(Sertifikat AAJ194148)	1997
139	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1982	2799	Desa Barusjahe Kec. Barusjahe	Hak Pakai	02/01/1900	(17/SD/BA/VIII/2007)	TK Pembina Barusjahe	Hibah	Fotocopy Surat Serah Terima NO. 17/SD/BA/VIII/2007/ Plank	1982
140	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1930	6272	Desa Sukajulu Kec. Barusjahe bergabung dengan SDN 040516 Tigajumpa dan SDN 040517 Tigajumpa (Sertipikat AAR 829416)	Hak Pakai	19/06/2020	3	SDN 040515 Tigajumpa	Hibah	(Sertipikat AAR 829416) Plank	1930
141	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1990	2836	Desa Pertumbuken Kec. Barusjahe (Sertifikat AC 728898)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD. 040518 Pertumbukan	Hibah	Plank (Sertifikat AC 728898)	1990

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
142	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1920	8411	Desa Tanjung Barus Kec. Barusjahe	Hak Pakai	30/04/2020	2	SDN 040519 TANJUNG BARUS	Hibah	Plank (Sertipikat AAP797343)	1920
143	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1992	6512	Dusun Ujung Bandar Desa Persadanta Kec. Barusjahe (Sertifikat AC 728891)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD. 040520 Tanjung Barus	Hibah	Plank (Sertifikat AC 728891)	1992
144	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1985	2425	Desa Sinaman Kec. Barusjahe (Sertifikat AC 728889)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SDN. 040521 Sinaman	Hibah	(Sertifikat AC 728889)/ Plank	1985
145	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1958	2732	Dusun Tambunan Desa Rumamis-Tambunan Kec. Barusjahe (Sertifikat AC 728897)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SDN. 040522 Tambunan	Hibah	(Sertifikat AC 728897)/ Plank	1958
146	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1927	6271	Desa Penampen B Kec. Barusjahe (Sertifikat AA 766782)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD.040525 PENAMPEN B.	Hibah	(Sertifikat AA 766782)/ Plank	1927
147	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1974	5840	Desa Barusjahe Kec. Barusjahe (Sertipikat BX 409677)	Hak Pakai	10/03/2017	4	SD. 040526 Barusjahe	Hibah	(Sertipikat BX 409677) Plank	1974
148	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1978	3161	Desa Bulanjahe Kec. Barusjahe (Sertifikat AAJ194135)	Hak Pakai	29/05/2019	2	SD. 044839 BULANJAHE	Hibah	(Sertifikat AAJ194135) Plank	1978
149	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1977	2139	Desa Rumamis Tambunan Kec. Barusjahe (Sertifikat AC 728895)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD. 044837 Rumamis Tambunan	Hibah	(Sertifikat AC 728895) Plank	1977
150	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1977	3009	Desa Tangkidik Kec. Barusjahe (Sertifikat AC 728896)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SDN 044838 Tangkidik	Hibah	(Sertifikat AC 728896) / Plank	1977
151	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1978	4366	Desa Buluh Belangke Kec. Barusjahe (Sertifikat AA 766781)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SDN 045964 Buluh Belangke	Hibah	(Sertifikat AA 766781) / Plank	1978
152	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1982	1509	Desa Serdang Kec. Barusjahe (Sertipikat BW 038513)	Hak Pakai	28/12/2016	2	SD. 046419 SERDANG	Hibah	(Sertipikat BW 038513) / Plank	1982
153	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1982	2246	Desa Serdang Kec. Barusjahe (Sertipikat BW 038515)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD 046419 Serdang Rumah Dinas	Hibah	(Sertipikat BW 038515)	1982
154	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01/01/2004	4923	Desa Bulanjulu Kec. Barusjahe	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 047170 Bulanjulu	Hibah	(Sertifikat AA 766783) Plank	2004
155	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1997	4598	Desa Talimbaru Kec. Barusjahe (Sertifikat AA 766784)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 044840 Talimbaru	Hibah	(Sertifikat AA 766784) / Plank	1997
156	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1980	6957	Jl. Sukanalu-Tigapanah Desa Sukanalu Kec. Barusjahe bergabung dengan SDN 043946 Sukanalu (Sertipikat AAJ194149)	Hak Pakai	07/08/2019	1	SD. 040523 SUKANALU	Hibah	Bergabung dengan SDN 043946 Sukanalu(Sertifikat AAJ194149)Plank	1980

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
157	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1951	3475	Jl. Teratai Desa Munte Kec. Munte (Sertifikat AF 397910)	Hak Pakai	21/06/1994	3	SDN 040505 Munte	Hibah	(Sertifikat AF 397910)	1951
158	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1921	3454	Jl. Protokol Desa Munte Kec. Munte (Sertifikat AF 397909)	Hak Pakai	21/06/1994	2	SDN 040506 Munte	Hibah	(Sertifikat AF 397909)	1921
159	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1951	3169	Desa Lingga Julu Kec. Simpang Empat (Sertifikat AB 204596)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD.040470 LINGGA JULU	Hibah	(Sertifikat AB 204596)	1951
160	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1988	2782	Desa Lingga Kec. Simpang Empat (Sertifikat AB 204589)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD 040832 LINGGA	Hibah	(Sertifikat AB 204589)	1988
161	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1984	2512	Desa Gamber Kec. Simpang Empat (Sertifikat AB 204600)	Hak Pakai	31/05/1991	2	SD. 040474 Tigaserangkai	Hibah	(Sertifikat AB 204600)	1984
162	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1992	1006	Desa Tiga Serangkai Kec. Simpang Empat (Sertifikat AB 204601)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SDN 040475 TIGA SERANGKAI	Hibah	(Sertifikat AB 204601)	1992
163	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1974	2988	Desa Gajah Kec. Simpang Empat (bergabung dengan TK Negeri Satu Atap Simpang Empat) (Sertifikat AB 204584)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SDN 040482 GAJAH	Hibah	(bergabung dengan TK Negeri Satu Atap Simpang Empat) (Sertifikat AB 204584)	1974
164	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1991	1294	Desa Berastepu Kec. Simpang Empat (dahulu bernama SDN 040476 Berastepu) (Sertifikat AB 204602)	Hak Pakai	31/05/1991	2	SD. 046416 BERASTEPU	Hibah	(dahulu bernama SDN 040476 Berastepu) (Sertifikat AB 204602)	1991
165	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1983	2174	Desa Sirumbia Kec. Simpang Empat (Sertifikat AB 204590)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 047176 SIRUMBIA	Hibah	(Sertifikat AB 204590)	1983
166	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1978	2379	Desa Nangbelawan Kec. Simpang Empat (Sertifikat AB 204575)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 045954 NANGBELAWAN	Hibah	(Sertifikat AB 204575)	1978
167	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1920	2199	Jl. Sibayak-Lingga Desa Lingga Kec. Simpang Empat (Sertipikat BX 409681)	Hak Pakai	10/03/2017	2	SD. 040467 LINGGA	Hibah	(Sertipikat BX 409681)	1920
168	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	10534	Desa Mardingding Kec. Mardingding (Sertifikat A 1420755)	Hak Pakai	31/03/1989	2	SD. 040550 Mardingding	Hibah	(Sertifikat A 1420755)	1989
169	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1963	3800	Desa Laupakam Kec. Mardingding (Sertifikat AG833726)	Hak Pakai	21/09/1995	2	SD. 040551 Lau Pakam	Hibah	(Sertifikat AG833726)	1963

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
170	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1969	2242	Desa Bandar Purba Kec. Mardingding (Sertifikat AG 833727)	Hak Pakai	21/09/1995	1	SD. 040553 Bandar Purba	Hibah	(Sertifikat AG 833727)	1969
171	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1975	8745	Desa Laumulgap Kec. Mardingding (Sertifikat A 1420753)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SDN 043943 Lau Mulgap	Hibah	(Sertifikat A 1420753)	1975
172	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1988	17569	Desa Parsaoran Kec. Mardingding (Sertifikat AA 766769)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 044855 Parsaoran	Hibah	(Sertifikat AA 766769)	1988
173	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1978	2431	Desa Laupengulu Kec. Mardingding (Sertifikat AG 833724)	Hak Pakai	21/09/1995	1	SD. 044856 Lau Pengulu	Hibah	(Sertifikat AG 833724)	1978
174	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	4628	Desa Mardingding Kec. Mardingding (Sertifikat A 1420752)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD. 044857 Mardingding	Hibah	(Sertifikat A 1420752)	1989
175	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1979	4995	Desa Laukesumpat Kec. Mardingding (Sertifikat AG 833723)	Hak Pakai	21/09/1995	1	SD. 045960 Lau Kesumpat	Hibah	(Sertifikat AG 833723)	1979
176	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1998	4312	Desa Sembahbala Kec. Mardingding (Sertifikat AG 833905)	Hak Pakai	23/04/1996	3	SD 047181 Sembahbala	Hibah	(Sertifikat AG 833905)	1998
177	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1995	2700	Desa Tanjung Pamah Kec. Mardingding (Sertifikat AG 833725)	Hak Pakai	21/09/1995	1	SD. 046581 Tanjung Pamah	Hibah	(Sertifikat AG 833725)	1995
178	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1991	5592	Desa Laugarut Kec. Mardingding (Sertifikat AA 766768)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SDN 046583 Lau Garut	Hibah	(Sertifikat AA 766768)	1991
179	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1993	9297	Desa Aek Nauli Kec. Mardingding (Sertifikat AG 833722)	Hak Pakai	21/09/1995	2	SD. 046580 Aek Nauli	Hibah	(Sertifikat AG 833722)	1993
180	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1981	4521	Desa Lausolu Kec. Mardingding (Sertifikat A 1420754)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD. 046582 Lau Solu	Hibah	(Sertifikat A 1420754)	1981
181	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1986	8008	Dusun Kutakendit Desa Kutapengkih Kec. Mardingding (Surat Perjanjian Penyerahan Hak/Ganti Rugi Tanggal : 01 Maret 1986)	Hak Pakai	04/03/2024	3	SD. 047732 Kuta Kendit	Hibah	Sertifikat ABN542375	1986

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
182	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1998	10560	Dusun Kutakendit Desa Kutapengkih Kec. Mardinding (Surat Keterangan Nomor : 420/106/SD.16/01/2013 Tanggal : 22 Oktober 2013)	Hak Pakai	03/04/2024	2	SD. 048100 Kuta Kendit	Hibah	Sertifikat ABN542376 (Surat Keterangan Nomor : 420/106/SD.16/01/2013 Tanggal : 22 Oktober 2013)	1998
183	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1972	1338	Desa Kutabuluh Kec. Kutabuluh (Sertifikat AC 728911)	Hak Pakai	31/03/1992	3	SDN. 040498 Kutabuluh	Hibah	(Sertifikat AC 728911)	1972
184	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1951	1439	Desa Kutabuluh Kec. Kutabuluh (Sertifikat AC 728919)	Hak Pakai	31/03/1992	AC 728919	SDN. 040499 Kutabuluh	Hibah	(Sertifikat AC 728919)	1951
185	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1987	1296	Desa Bintang Meriah Kec. Kutabuluh (Sertipikat AAJ194140)	Hak Pakai	20/03/2019	1	SDN. 040501 Bintang Meriah	Hibah	(Sertipikat AAJ194140)	1987
186	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1964	3425	Desa Jinabun Kec. Kutabuluh (Sertifikat AC 728913)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SDN. 040500 Jinabun	Hibah	(Sertifikat AC 728913)	1964
187	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1974	1950	Desa Bintang Meriah Kec. Kutabuluh (Sertipikat AAJ194128)	Hak Pakai	12/11/2019	2	SD. 040504 Bintang Meriah	Hibah	(Sertipikat AAJ194128)	1974
188	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1975	2817	Desa Siabang-abang Kec. Kutabuluh (Sertipikat AAJ194139)	Hak Pakai	13/03/2019	1	SDN 043948 Siabang - abang	Hibah	(Sertipikat AAJ194139)	1975
189	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1976	1423	Desa Laubuluh Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	06/09/2024	28/HP/BPN-12-06/IX/2024	SDN. 043949 Laubuluh	Hibah	Sertifikat AO632599	1976
190	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1978	2046	Desa Buahraya Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	20/09/2023	3	SD. 044846 Buah Raya	Hibah	SERTIPIKAT ABJ525416	1978
191	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1981	1925	Desa Kutabuluh Gugung Kec. Kutabuluh (Sertipikat AAJ194138)	Hak Pakai	13/03/2019	4	SDN. 046575 Kutabuluh Gugung	Hibah	(Sertipikat AAJ194138)	1981
192	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1990	1540	Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga (dahulu bernama SDN 040588 Tigabinanga) (Sertifikat AA 766758)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 040568 Tigabinanga	Hibah	(dahulu bernama SDN 040588 Tigabinanga) (Sertifikat AA 766758)	1990
193	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1950	2424	Jl. Juhar-Tigabinanga Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga (bergabung dengan SDN 040571 Tigabinanga) (Sertifikat AA 766760)	Hak Pakai	17/04/1990	3	SD. 040570 Tigabinanga	Hibah	(bergabung dengan SDN 040571 Tigabinanga) (Sertifikat AA 766760)	1950

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
194	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1956	5129	Jl. Juhar-Tigabinanga Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga(bergabung dengan SDN 040569 Tigabinanga) (Sertipikat BW 038514)	Hak Pakai	28/12/2016	2	SD. 040572 Tigabinanga	Hibah	(bergabung dengan SDN 040569 Tigabinanga) (Sertipikat BW 038514)	1956
195	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1974	3525	Jl. Pasar Baru Desa Munte Kec. Munte (bergabung dengan SDN 046577 Munte) (Sertipikat BW 038516)	Hak Pakai	13/02/2017	1	SDN. 040507 Munte	Hibah	(bergabung dengan SDN 046577 Munte) (Sertipikat BW 038516)	1974
196	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1993	7357	Jl. Kabanjahe-Tigabinanga Desa Sarinembah Kec. Munte (Sertifikat AF 397902)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SDN 040508 Sarinembah	Hibah	(Sertifikat AF 397902)	1993
197	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1979	5602	Desa Kutambaru Kec. Munte (Sertifikat AF 397906)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SD. 040510 Kutambaru	Hibah	(Sertifikat AF 397906)	1979
198	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1979	3029	Jl. Kabanjahe-Kutacane Desa Buluh Naman Kec. Munte (bergabung dengan SDN 044842 Bertah) (Sertipikat BW 038500)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD. 040511 Bertah	Hibah	(bergabung dengan SDN 044842 Bertah) (Sertipikat BW 038500)	1979
199	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1963	8367	Jl. Sarimunte Desa Kutambaru Kec. Munte (Sertifikat AF 397901)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SD. 040512 Sarimunte	Hibah	(Sertifikat AF 397901)	1963
200	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1954	10823	Desa Kineppen Kec. Munte (bergabung dengan SDN 047178 Kineppen) (Sertipikat BW 038495)	Hak Pakai	13/02/2017	1	SDN 040514 Kineppen	Hibah	(bergabung dengan SDN 047178 Kineppen) (Sertipikat BW 038495)	1954
201	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1975	4866	Jl. Sukaramai-Barungkersap Desa Bandar Meriah Kec. Munte (Sertifikat A 1420743)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD. 043952 Sukaramai	Hibah	(Sertifikat A 1420743)	1975
202	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2005	10446	Desa Singgamanik Kec. Munte (Sertifikat B 8854795)	Hak Pakai	06/02/1988	286	SD. 043953 Singgamanik	Hibah	(Sertifikat B 8854795)	2005
203	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1977	5083	Desa Kutambaru Kec. Munte (Sertifikat AF 397907)	Hak Pakai	21/06/1994	2	SD. 044841 Kutambaru	Hibah	(Sertifikat AF 397907)	1977
204	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1979	3758	Desa Pertumbuken Kec. Munte (Sertifikat AK 365992)	Hak Pakai	05/11/1998	1	SD. 044843 Pertumbungen	Hibah	(Sertifikat AK 365992)	1979

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
205	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2005	3557	Desa Gurubenua Kec. Munte (Sertifikat AF 397905)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SD. 044844 Gurubenua	Hibah	(Sertifikat AF 397905)	2005
206	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1980	4325	Desa Selakkar Kec. Munte (Sertifikat AK 365985)	Hak Pakai	05/11/1998	1	SDN. 045953 Selakkar	Hibah	(Sertifikat AK 365985)	1980
207	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1980	9000	Desa Barung Kersap Kec. Munte (Sertifikat AF 397904)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SD. 046413 Barungkersap	Hibah	(Sertifikat AF 397904)	1980
208	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1981	2205	Desa Nageri Kec. Munte (Sertifikat AF 397903)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SDN 046412 Nageri	Hibah	(Sertifikat AF 397903)	1981
209	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1950	1265	Desa Juhar Perangin-angin Kec. Juhar (Sertipikat BW 038504)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD. 040555 JUHAR	Hibah	(Sertipikat BW 038504)	1950
210	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2005	1583	Desa Juhar Kec. Juhar (Sertifikat AA 766773)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 040556 JUHAR	Hibah	(Sertifikat AA 766773)	2005
211	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1990	7905	Desa Juhar Kec. Juhar (bergabung dengan TK Negeri Pembina Juhar) (Sertipikat BX 790220)	Hak Pakai	13/02/2017	1	SDN 040557 Juhar	Hibah	(bergabung dengan TK Negeri Pembina Juhar) (Sertipikat BX 790220)	1990
212	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1976	2391	Desa Juhar Ginting Kec. Juhar(Sertipikat AAJ194144)	Hak Pakai	16/04/2019	2	SD. 043944 JUHAR	Hibah	(Sertipikat AAJ194144)	1976
213	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1992	924	Desa Keriahen Kec. Juhar (Sertifikat AM 540784)	Hak Pakai	05/11/1998	1	SD. 040564 KERIAHEN	Hibah	(Sertifikat AM 540784)	1992
214	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2005	4952	Desa Kidupen Kec. Juhar (Sertifikat AA 766770)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 040565 KIDUPEN	Hibah	(Sertifikat AA 766770)	2005
215	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1977	2364	Desa Jandi Kec. Juhar (Sertipikat BW 038503)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD.044860 JANDI	Hibah	(Sertipikat BW 038503)	1977
216	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1977	1937	Desa Ketawaren Kec. Juhar (Sertifikat AK 365993)	Hak Pakai	05/11/1998	1	SD. 044859 KETAWAREN	Hibah	(Sertifikat AK 365993)	1977
217	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1958	1813	Desa Kutagugung Kec. Juhar (Sertifikat AA 766778)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 040562 KUTAGUGUNG	Hibah	(Sertifikat AA 766778)	1958
218	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2005	9450	Desa Nageri Kec. Juhar (Sertifikat AA 766775)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 040559 BIAKNAMPE	Hibah	(Sertifikat AA 766775)	2005
219	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1977	3307	Desa Sukababo Kec. Juhar (Sertifikat AK 365991)	Hak Pakai	05/11/1998	1	SD.044858 SUKABABO	Hibah	(Sertifikat AK 365991)	1977
220	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1984	936	Desa Sugihen Kec. Juhar (Sertifikat AAP796761)	Hak Pakai	27/12/2019	1	SD. 040563 SUGIHEN	Hibah	(Sertifikat AAP796761)	1984
221	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1975	4310	Desa Pernantin Kec. Juhar (Sertifikat AM 559041)	Hak Pakai	05/11/1998	1	SD. 043945 PERNANTIN	Hibah	(Sertifikat AM 559041)	1975

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
222	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	30/12/2011	4250	Desa Juhar Kec. Juhar (sekolah tutup) (Sertifikat AA 766776)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD N 040461 Juhar (Tutup)	Hibah	(sekolah tutup) (Sertifikat AA 766776)	2011
223	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	5969	Desa Dokan Kec. Merek (Sertifikat A 1420732)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD. 040531 DOKAN	Hibah	(Sertifikat A 1420732) Plank	1989
224	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1994	8331	Desa Garingging Kec. Merek (bergabung dengan TK Negeri Satu Atap Merek dan SDN 047165 Simpang Nagara) (Sertipikat BW 038505)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD.040533 MEREK	Hibah	(bergabung dengan TK Negeri Satu Atap Merek dan SDN 047165 Simpang Nagara) (Sertipikat BW 038505)	1994
225	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2005	5519	Desa Pangambatan Kec. Merek (Sertifikat AF 397918)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SD. 040535 PENGAMBATEN	Hibah	(Sertifikat AF 397918) Plank	2005
226	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1963	1337	Desa Sibolangit Kec. Merek (Sertifikat AF 397919)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SD.040540 SIBOLANGIT	Hibah	(Sertifikat AF 397919)	1963
227	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1960	3775	Desa Partibi Lama Kec. Merek (Sertifikat AF 397920)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SD. 040536 PERTIBI LAMA	Hibah	(Sertifikat AF 397920) Plank	1960
228	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1994	1514	Desa Tongging Kec. Merek (Sertifikat AF 397923)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SD. 044854 TONGGING	Hibah	(Sertifikat AF 397923)	1994
229	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1970	3800	Desa Rawang/Pancur Batu Kec. Merek (Sertipikat BW 038507)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD. 040537 Rawang	Hibah	(Sertipikat BW 038507)	1970
230	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1983	4192	Desa Regaji Kec. Merek (Sertifikat AF 397917)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SD. 047169 REGAJI	Hibah	(Sertifikat AF 397917) Plank	1983
231	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1988	3415	Desa Partibi Tembe Kec. Merek (bergabung dengan TK Negeri 2 Satu Atap Merek) (Sertifikat AAJ194150)	Hak Pakai	20/05/2019	2	SDN Partibi tembe	Hibah	(bergabung dengan TK Negeri 2 Satu Atap Merek) (Sertifikat AAJ194150)	1988
232	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1983	2457	Desa Sikodon-kodon Kec. Merek (Sertifikat AAR840497)	Hak Pakai	26/11/2020	1	SD.047167 KODON-KODON	Hibah	(Sertifikat AAR840497)	1983
233	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1991	8437	Desa Ajinembah Kec. Merek (Sertifikat AB 204574)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 044851 AJINEMBAH	Hibah	(Sertifikat AB 204574)	1991
234	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	30/09/2008	4899	Dusun Aek Hotang Desa Pangambatan Kec. Merek (Sertifikat BO 214144)	Hak Pakai	13/09/2013	1	SD. AEK HOTANG	Hibah	(Sertifikat BO 214144) Plank	2008
235	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	30/12/1993	1485	Desa Tongging Kec. Merek (sekolah tutup) (Sertifikat AF 397924)	Hak Pakai	21/06/1994	2	SD.040543 TONGGING (TUTUP)	Hibah	(sekolah tutup) (Sertifikat AF 397924)	1993

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
236	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	30/12/2011	136	Jl. Kutabuluh Desa Payung Kec. Payung	Hak Pakai	19/10/2022	ABH699794	Kantor UPT Kec. Tiganderket	Hibah	Sertifikat ABH699794	2011
237	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1967	6578	Jl. Kiras Bangun No. 3 Desa Payung Kec. Payung (bergabung dengan SDN 040483 Payung) (Sertipikat BW 038511)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD. 040484 PAYUNG	Hibah	(bergabung dengan SDN 040483 Payung) (Sertipikat BW 038511)	1967
238	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1977	2687	Desa Rimokayu Kec. Payung (Sertifikat AC 728904)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD. 044834 RIMO KAYU	Hibah	(Sertifikat AC 728904)	1977
239	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1991	629	Desa Batu Karang Kec. Payung (Sertifikat AC 728909)	Hak Pakai	31/03/1992	2	SDN 040492 BATU KARANG	Hibah	(Sertifikat AC 728909 Ruang belajar kls 1,2,3 dan rumah dinas guru SDN 040492 Batu karang) ruang kelas lainya bergabung dengan SDN 040490 Batukarang dan SDN 040491 Batu karang	1991
240	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1990	3424	Desa Batu Karang Kec. Payung (bergabung dengan SDN 040491 Batu Karang) (Sertipikat BW 038497)	Hak Pakai	28/12/2016	3	SD. 040490 BATUKARANG	Hibah	(bergabung dengan SDN 040491 Batu Karang) (Sertipikat BW 038497)	1990
241	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2005	5671	Jl. Suka Meriah Desa Gurukinayan Kec. Payung (bergabung dengan SDN 040486 Gurukinayan dan SDN 0444836 Gurukinayan) (Sertifikat AC 728890)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD.040485 GURUKINAYAN	Hibah	(bergabung dengan SDN 040486 Gurukinayan dan SDN 0444836 Gurukinayan) (Sertifikat AC 728890)	2005
242	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1982	1979	Desa Cimbang Kec. Payung (Sertifikat AC 728912)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD.047173 CIMBANG UJUNG	Hibah	(Sertifikat AC 728912)	1982
243	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1981	1985	Desa Batu Karang Kec. Payung (Sertifikat AC 728894)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD. 046415 BATUKARANG	Hibah	(Sertifikat AC 728894)	1981
244	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1950	1667	Desa Tanjung Merawa Kec. Tiganderket (Sertifikat AC 728916)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD 040489 Tj. Merawa	Pembelian	(Sertifikat AC 728916)	1950
245	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1975	2074	Desa Temburun Kec. Tigandereket (Sertifikat AC 728903)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD.043938 TEMBURUN	Hibah	(Sertifikat AC 728903)	1975

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
246	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2005	1805	Desa Kutambaru Kec. Tiganderket (Sertifikat AC 728915)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD.044835 KUTAMBARU	Hibah	(Sertifikat AC 728915)	2005
247	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1992	730	Desa Sukatendel Kec. Tiganderket (Sertifikat AC 728918)	Hak Pakai	31/03/1992	2	SD. 040493 SUKATENDEL	Hibah	(Sertifikat AC 728918)	1992
248	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1992	1337	Desa Sukatendel Kec. Tiganderket (Sertipikat BW 038496)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD. 040493 SUKATENDEL	Hibah	(Sertipikat BW 038496)	1992
249	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1974	2258	Desa Perbaji Kec. Tiganderket (Sertipikat AC 728905)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD. 040503 PERBAJI	Hibah	Sertipikat AC 728905	1974
250	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1983	1831	Desa Susuk Kec. Tiganderket (Sertifikat AC 728910)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD.040494 Susuk	Hibah	(Sertifikat AC 728910)	1983
251	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2005	2882	Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket (Sertipikat AC 728901)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD. 040495 JANDI MERIAH	Hibah	Sertipikat AC 728901 (Bergabung dgn TKN Satu Atap Tiganderket)	2005
252	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1978	3974	Desa Narigunung II Kec. Tiganderket (Sertifikat AC 728902)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD.044833 NARI GUNUNG	Hibah	(Sertifikat AC 728902)	1978
253	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1998	2592	Desa Tanjung Kec. Tiganderket (Sertipikat BW 038501)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD. 040496 TANJUNG	Hibah	(Sertipikat BW 038501)	1998
254	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1982	3228	Desa Kutagaluh Kec. Tiganderket (Sertifikat AC 728907)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD. 043939 KUTAGALUH	Hibah	(Sertifikat AC 728907)	1982
255	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1991	1701	Desa Penampen Kec. Tiganderket (Sertifikat AC 728914)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD.040497 PENAMPEN	Hibah	(Sertifikat AC 728914)	1991
256	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1950	2643	Dusun Gunung Meriah Desa Susuk Kec. Payung (Sertifikat AC 728920)	Hak Pakai	31/03/1992	2	SD. 047172 GUNMER SUSUK	Hibah	(Sertifikat AC 728920)	1950
257	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1986	1810	Desa Kutakepar Kec. Tiganderket (Sertifikat AK 365987)	Hak Pakai	23/09/1998	1	SD. 048000 KUTAKEPAR	Hibah	(Sertifikat AK 365987)	1986
258	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1979	7200	Desa Mardingding Kec. Tiganderket (Surat Keterangan Nomor : 69/SK/05/06 Tanggal : 30 Mei 2006)	Hak Pakai		69/SK/05/06	SD. 045958 MARDINGDING	Hibah	(Surat Keterangan Nomor : 69/SK/05/06 Tanggal : 30 Mei 2006)	1979

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
259	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1972	2870	Desa Tiganderket Kec. Tiganderket (bergabung dengan SDN 040488 Tiganderket) (Sertifikat AC 728899)	Hak Pakai	31/03/1992	1	SD 040487 Tiganderket	Hibah	(bergabung dengan SDN 040488 Tiganderket) (Sertifikat AC 728899)	1972
260	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1974	2634	Desa Kampung Merdeka Kec. Merdeka(Sertipikat AB 204597)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD 040471 Kp Merdeka	Hibah	Sertipikat AB 204597 (Plank)	1974
261	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1953	2290	Desa Cintarayat Kec. Merdeka (Sertipikat BW 038517)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD.040481 CINTA RAYAT	Hibah	(Sertipikat BW 038517) (Plank)	1953
262	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1998	7954	Desa Samperaya Kec. Laubaleng (Sertifikat AK 365989)	Hak Pakai	05/11/1998	1	SD. 040552 Samperaya	Hibah	(Sertifikat AK 365989)	1998
263	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1996	13536	Desa Buluhpancur Kec. Laubaleng (Sertipikat BW 038494)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD No.044627 Buluh Pancur	Hibah	(Sertipikat BW 038494)	1996
264	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01/01/1986	3528	Desa Buluh Pancur Kec. Laubaleng (bergabung dengan SDN 045962 Buluhpandur) (Sertifikat BW 038494)	Hak Pakai	20/05/1996	1	SD No.044627 Buluh Pancur	Hibah	(bergabung dengan SDN 045962 Buluhpandur) (Sertifikat , BW 038494)	1986
265	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2008	5228	Jl. Medan-Kutacane Desa Lingga Muda Kec. Laubaleng (Surat Keterangan Nomor : 230/IV/LM/2013 Tanggal : 03 April 2013)	Hak Pakai	09/04/2020	1	SD. 040554 Lingga Muda	Hibah	(Sertipikat AAP797349)	2008
266	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2004	10579	Desa Mbal-mbal Petarum Kec. Laubaleng (Sertifikat A 1420750)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SDN 043942 Mabalbal Petarum	Hibah	(Sertifikat A 1420750)	2004
267	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1981	5622	Desa Baturongkam Kec. Laubaleng (Sertifikat AA 766767)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD 045961 Baturongkam	Hibah	(Sertifikat AA 766767)	1981
268	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1987	2794	Desa Kutaraya Kec. Tigabinanga (Sertifikat AA 766761)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 040576 Tigabinanga	Hibah	(Sertifikat AA 766761)	1987
269	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1975	3641	Desa Perbesi Kec. Tigabinanga (Sertifikat AA 766765)	Hak Pakai	17/04/1990	2	SD. 043940 Perbesi	Hibah	(Sertifikat AA 766765)	1975
270	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1976	4240	Desa Laukapur Kec. Tigabinanga (Sertifikat AA 766755)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 043941 Lau Kapur	Hibah	(Sertifikat AA 766755)	1976

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
271	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1997	1698	Desa Pergendangen Kec. Tigabinanga (Sertifikat AA 766764)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD 044861 Pergendangan	Hibah	(Sertifikat AA 766764)	1997
272	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1990	1667	Desa Kuala Kec. Tigabinanga (Sertifikat AA 766762)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 044862 Kuala	Hibah	(Sertifikat AA 766762)	1990
273	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1990	2887	Desa Limang Kec. Tigabinanga (Sertifikat AA 766753)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 044863 Limang	Hibah	(Sertifikat AA 766753)	1990
274	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1977	1683	Desa Gunung Kec. Tigabinanga (Sertifikat AA 766763)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 044864 Gunung	Hibah	(Sertifikat AA 766763)	1977
275	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1978	1624	Desa Cintarayat Kec. Merdeka (Sertifikat AB 204585)	Hak Pakai	31/05/1991	2	SD. 044830 CINTA RAYAT	Hibah	(Sertifikat AB 204585) Plank	1978
276	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1977	2253	Desa Ujungteran Kec. Merdeka (Sertipikat AAR840139)	Hak Pakai	23/10/2020	2	SD. 045955 UJUNG TERAN	Hibah	(Sertipikat AAR840139) Plank	1977
277	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1981	1736	Desa Sadaperarih Kec. Merdeka (Sertipikat AB 204586)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 046574 SADAPERARIH	Hibah	(Sertipikat AB 204586) Plank	1981
278	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1952	3825	Desa Sukandebi Kec. Namanteran	Hak Pakai	20/04/2020	2	SD. 040480 SUKANDEBI	Hibah	(Sertipikat AAP 797505 tanggal 20 April 2020)	1952
279	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	30/04/2020	858	Desa Sukandebi Kecamatan Namanteran	Hak Pakai	30/04/2020	1	SD Negeri 040480 Sukandebi	Pembelian	Sertifikat AAP 797347 Hak Pakai Nomor 1 Tanggal 30 April 2020 (Berita Acara Kurang Catat Aset Tetap Tanah Nomor 420/ 7129 /Sek.1/2021)	2020
280	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1977	2330	Desa Sukanalu Kec. Namanteran (Sertifikat AB 204566)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 044829 SUKANALU	Hibah	(Sertifikat AB 204566)	1977
281	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1979	1526	Desa Gung Pinto Kec. Namanteran (Sertifikat AB 204595)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 044831 GUNG PINTO	Hibah	(Sertifikat AB 204595)	1979
282	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1925	2170	Desa Sigarang-garang Kec. Namanteran (Sertifikat AB 204569)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 040478 SIGARANG-GARANG	Hibah	(Sertifikat AB 204569) Plank	1925
283	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1975	5679	Desa Sigarang-garang Kec. Namanteran (Sertifikat AB 204593)	Hak Pakai	31/05/1991	2	SD. 043950 SIGARANGGARANG	Hibah	(Sertifikat AB 204593)	1975

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
284	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1997	1770	Desa Kutambelin Kec. Namanteran (Sertifikat AB 204567)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 046417 NAMAN	Hibah	Sertifikat AB 204567	1997
285	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	28/09/1990	2509	Desa Naman Kec. Namanteran (sekolah tutup)	Hak Pakai	31/05/1991	2	SD. 046417 NAMAN	Hibah	(sekolah tutup) Sertipikat (AB 204565)	1990
286	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1982	1369	Desa Simacem Kec. Namanteran (Sertifikat AB 204568)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 047175 SIMACEM	Hibah	(Sertifikat AB 204568)	1982
287	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1984	3290	Desa Kutarayat Kec. Namanteran (Sertifikat AB 204587)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 047174 KUTARAKYAT	Hibah	(Sertifikat AB 204587)	1984
288	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1985	2274	Desa Kutatonggal Kec. Namanteran (Sertifikat AB 204588)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 048001 KUTA TONGGAL	Hibah	(Sertifikat AB 204588)	1985
289	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1992	2317	Desa Kutambelin Kec. Namanteran (Sertipikat BW 038510)	Hak Pakai	28/12/2016	2	SD. 048472 KUTAMBELIN	Hibah	(Sertipikat BW 038510)	1992
290	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1993	3511	Desa Ndeskati Kec. Namanteran (Sertifikat AK 365994)	Hak Pakai	05/11/1998	1	SD. 048473 NDESKATI	Hibah	(Sertifikat AK 365994)	1993
291	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1999	1872	Desa Lingga Kec. Namanteran (Sertifikat A 1420739)	Hak Pakai	31/03/1989	1	SD 040468 Lingga	Hibah	(Sertifikat A 1420739)	1999
292	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1998	3091	Desa Sampun Kec. Dolatrayat (bergabung dengan SMPN 1 Satu Atap Dolatrayat) (Sertipikat BW 038502)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD. 040538 Sampun	Hibah	(bergabung dengan SMPN 1 Satu Atap Dolatrayat) (Sertipikat BW 038502)	1998
293	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/01/1991	2315	Desa Bukit Kec. Dolatrayat (Sertifikat AB 204576)	Hak Pakai	31/05/1991	1	SD. 044852 Bukit	Hibah	(Sertifikat AB 204576) Plank	1991
294	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1974	6834	Desa Dolatrayat Kec. Dolatrayat (bergabung dengan SDN 046422 Dolatrayat) (Sertipikat BW 038518)	Hak Pakai	28/12/2016	1	SD 040544 Dolatrayat	Hibah	(bergabung dengan SDN 046422 Dolatrayat) (Sertipikat BW 038518)	1974
295	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1977	2096	Desa Kubucolia Kec. Dolatrayat (Sertifikat AF 397911)	Hak Pakai	21/06/1994	1	SD 044849 Kubucolia	Hibah	(Sertifikat AF 397911) Plank	1977
296	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1981	2752	Desa Perbulan Kec. Laubaleng Sertipikat AAP797376	Hak Pakai	30/04/2020	3	SD. 045963 Perbulan	Hibah	Surat Keterangan Nomor : 359/741/PBL/2013 Tanggal : 10 Desember 2013 (Sertipikat AAP797376)	1981

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
297	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1997	2390	Jl. Medan-Kutacane Desa Lauperanggunen Kec. Laubaleng (Sertifikat AG 833730)	Hak Pakai	21/09/1995	1	SD. 046579 Lau Peranggunen	Hibah	(Sertifikat AG 833730)	1997
298	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1977	5466	Desa Kutambarupunti Kec. Tigabinanga (Sertifikat AA 766754)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 44865 Kutambarupunti	Hibah	(Sertifikat AA 766754)	1977
299	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2005	7179	Jl. Medan-Kutacane Desa Perbesi Simbelang Kec. Tigabinanga bergabung dengan SDN 040573 Perbesi Sertifikat AA 766756	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 046423 Perbesi	Hibah	bergabung dengan SDN 040573 Perbesi (Sertifikat AA 766756)	2005
300	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1997	9260	Desa Kutabangun Kec. Tigabinanga (Sertipikat AAP 797354)	Hak Pakai	09/04/2020	3	SD. 046578 Kutabangun	Hibah	(Sertipikat AAP 797354)	1997
301	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1983	1396	Desa Kutagerat Kec. Tigabinanga (Sertifikat AA 766757)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 047179 Kutagerat	Hibah	(Sertifikat AA 766757)	1983
302	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1985	2593	Desa Kem-kem Kec. Tigabinanga (Sertifikat AA 766766)	Hak Pakai	17/04/1990	1	SD. 048002 Kem-Kem	Hibah	(Sertifikat AA 766766)	1985
303	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1998	4490	Desa Batumamak Kec. Tigabinanga (Sertipikat AAP 797352 tanggal 09 april 2020)	Hak Pakai	09/04/2020	1	SD. 048474 BATU MAMAK	Hibah	(Sertipikat AAP 797352)	1998
304	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1962	11402	Jl. Jamin Ginting No. 199 Desa Raya Kec. Berastagi (Sertipikat BX 409646)	Hak Pakai	10/03/2017	5	SMP 3 Berastagi	Hibah	(Sertipikat BX 409646)	1962
305	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1979	9243	Jl. Laukawar Desa Surbakti Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	13/03/2019	8	SMP 2 Simpang Empat	Hibah	(Sertipikat AAJ194137)	1979
306	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1989	6726	Desa Tiganderket Kec. Tiganderket	Hak Pakai	23/10/2020	6	SMP 1 Tiganderket	Hibah	(Sertipikat AAR840130)	1989
307	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1971	5395	Desa Sukajulu Daerah Tigajumpa Kec. Barusjahe (Sertipikat BX 409678)	Hak Pakai	10/03/2017	2	SMPN 1 Barusjahe	Hibah	(Sertipikat BX 409678) (Plank)	1971
308	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1981	9786	Desa Sinaman Kec. Barusjahe	Hak Pakai	20/03/2019	3	SMP 2 Barusjahe	Hibah	(Sertipikat AAJ194116) Plank	1981
309	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1996	7102	Desa Sukanalu Kec. Barusjahe	Hak Pakai	26/11/2020	3	SMP 3 Barusjahe	Pembelian	Sertipikat AAR840506 (Plank)	1996
310	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1957	3910	Desa Batukarang Kec. Payung	Hak Pakai	18/01/1994	4	SMP 1 Payung	Hibah	(Sertifikat AE 419495)	1957

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
311	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1976	6368	Jl. Pestap Desa Munte Kec. Munte	Hak Pakai	09/05/2019	11	SMP 1 Munte	Hibah	(Sertifika AAJ194129)	1976
312	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2005	10272	Jl. Rakoetta S. Brahmana Desa Sarinembah Kec. Munte (Sertipikat BX 409676)	Hak Pakai	10/03/2017	3	SMPN 2 Munte	Hibah	(Sertipikat BX 409676)	2005
313	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2004	7418	Jl. Renun Kec. Laubaleng	Hak Pakai	15/09/2020	5	SMP 1 Laubaleng	Hibah	(Sertipikat AAR830242)	2004
314	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1958	6958	Jl. Juhar-Tigabinanga Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	26/11/2020	1	SMP 1 TIGABINANGA	Hibah	Sertipikat AAR840500	1958
315	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1986	12846	Desa Perbesi Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	02/09/2019	3	SMP 2 Tigabinanga	Hibah	(Sertifikat AAL792388)	1986
316	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2007	6472	Desa Kutabangun Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	20/04/2020	5	SMP 3 Tigabinanga	Hibah	Sertipikat AAP797506	2007
317	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1971	4742	Jl. Kutabuluh Desa Kutabuluh Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	23/11/2020	3	SMP N 1 Kutabuluh	Hibah	(Sertipikat AAR840128)	1971
318	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1980	11520	Jl. Kabanjahe-Merek Desa Sukadame Kec.Tigapanah	Hak Pakai	26/11/2020	1	SMPN 1 TIGAPANAH	Hibah	(Sertipikat AAR840501) Plank	1980
319	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1993	11828	Desa Suka Kec. Tigapanah	Hak Pakai	30/04/2019	1	SMP 2 TIGAPANAH	Hibah	(Sertipikat AAJ194134)	1993
320	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1995	7641	Jl. Desa Kubu Desa Singa Kec. Tigapanah	Hak Pakai	07/08/2019	2	SMP NEGERI 3 TIGAPANAH	Hibah	(Sertifikat AAJ194147) Plank	1995
321	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	15/04/1971	10980	Jl. Sigenderang No. 1 Desa Juhar Ginting Kec. Juhar (SERTIFIKAT AAW 037669)	Hak Pakai	26/01/2022	3	SMP 1 JUHAR	Hibah	(SERTIFIKAT AAW 037669)	1971
322	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1978	12660	Jl. Pernantin Daerah Tigasiempat Desa Pernantin Kec. Juhar	Hak Pakai	03/07/2019	2	SMP 2 JUHAR	Hibah	(Sertifikat AAJ194122)	1978
323	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1992	7599	Jl. Keriahen Desa Keriahen Kec. Juhar	Hak Pakai	09/04/2020	1	SMP 3 JUHAR	Hibah	(Sertipikat AAP797345)	1992
324	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1983	14680	Jl. Merek-Seribudolok Desa Merek Kec. Merek	Hak Pakai	26/11/2020	2	SMP 1 MEREK	Hibah	(Sertipikat AAR840495)	1983
325	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1994	6000	Desa Pancur Batu Kec Merek	Hak Pakai	02/01/1900	28/12/2006	SMP NEGERI SATU ATAP 2 MEREK	Hibah		1994
326	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1982	9324	Jl. Medan-Kutacane Desa Laupakam Kec. Mardingding	Hak Pakai	15/09/2020	2	SMP 1 MARDINGDING	Hibah	(Sertipikat AAR830234)	1982
327	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1990	13810	Jl. Rakoetta S. Brahmana Desa Mardingding Kec. Mardingding	Hak Pakai	15/09/2020	4	SMP 2 MARDINGDING	Hibah	(Sertipikat AAR830238)	1990

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
328	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2003	10210	Desa Lausolu Kec. Mardinding	Hak Pakai	03/11/2020	3	SMP 3 MARDINGDING	Hibah	(Sertipikat AAR840125)	2003
329	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/03/2020	9000	Desa Kutambelin Kecamatan Laubaleng	Hak Pakai	14/11/2023	ABJ558260	SMP Negeri 2 Laubaleng	Pembelian	Surat Dibawah Tangan (Notaris) Notaris Nomor 02/PDPSDBT/II/2 020 tanggal 18 Pebruari 2020 Perihal Hibah (Berita Acara Kurang Catat Aset Tetap Tanah Nomor 420/ 7129 /Sek.1/2021) Sertifikat ABJ558260	2020
330	Rumah Sakit Umum Kabanjahe	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Rumah Sakit	29/12/2017	36300	Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo / Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kab Karo	Hak Pakai	10/03/2020	4 / 5	RSU Kabanjahe	Pembelian	(Sertifikat AAP797264) / (Sertifikat AAP797265)	2017
331	Dinas Perpustakaan dan Arsip	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	22/09/1959	3951	Jalan Pahlawan Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe (Sertifikat BH 834105)	Hak Pakai	13/07/2010	BH 834105	Gedung Nasional/Gedung Kantor	Hibah		1959
332	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyan du	31/12/2008	534	Desa Naman Kec. Namanteran	Hak Pakai	09/04/2020	2	Puskesmas Naman	Hibah	AAP797373	2008
333	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyan du	31/12/2005	186	Desa Sukatepu Kec. Namanteran	Hak Pakai	11/04/2023	3	Pustu Sukatepu	Hibah	ABJ461362	2005
334	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyan du	31/12/1990	363	Desa Kutambelin Kec. Namanteran	Hak Pakai	23/10/2023	3	Pustu Kutambelin	Hibah	ABJ 526904	1990
335	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyan du	31/12/2005	410	Desa Kutagugung Kec. Namanteran	Hak Pakai	26/10/2023	5	Pustu Kutagugung	Hibah	ABJ556854	2005
336	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyan du	31/12/2005	186	Desa Ndeskati Kec. Namanteran	Hak Pakai	31/05/2023	2	Pustu Ndeskati	Hibah	ABJ461694	2005
337	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyan du	31/12/2005	248	Desa Sukandebi Kec. Namanteran	Hak Pakai	08/06/2023	5	Pustu Sukandebi	Hibah	ABJ461729	2005
338	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyan du	31/12/2005	232	Desa Kebayaken Kec. Namanteran	Hak Pakai	31/05/2023	1	Pustu Kebayaken	Hibah	ABJ461693	2005
339	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyan du	31/12/2005	307	Desa Kutarayat Kec. Namanteran	Hak Pakai	30/05/2023	4	Pustu Kutarayat	Hibah	ABJ461631	2005
340	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyan du	31/10/1994	225	Desa Kacinambun Kec. Tigapanah	Hak Pakai	23/10/2023	8	Pustu. Kacinambun	Hibah	ABJ 526890	1994
341	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyan du	31/10/1994	227	Desa Lauriman Kec. Tigapanah	Hak Pakai	23/10/2023	4	Pustu Desa Lau Riman	Hibah	ABJ 526910	1994

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
342	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	06/12/2006	101	Desa Bukit Kec. Dolatrayat	Hak Pakai	09/09/2020	2	Pustu Bukit	Hibah	AAR830214	2006
343	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	05/12/2007	104	Jl. Desa Sugihen Desa Sugihen Kec. Dolatrayat	Hak Pakai	11/04/2023	2	Pustu Sugihen	Hibah	ABJ461360	2007
344	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	04/12/1996	248	Desa Sampun Kec. Dolatrayat	Hak Pakai	15/09/2020	2	Pustu Sampun	Hibah	AAR830246	1996
345	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/1993	343	Desa Kubucolia Kec. Dolatrayat	Hak Pakai	14/04/2023	5	Pustu Kubu Colia	Hibah	ABJ461364	1993
346	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	07/12/2005	117	Desa Merdeka Kec. Merdeka	Hak Pakai	23/10/2023	6	Pusk.Merdeka	Hibah	ABJ 526896	2005
347	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/2004	112	Desa Gongsol Kec. Merdeka	Hak Pakai	15/10/2020	2	Pustu Desa Gongsol	Hibah	AAR830245	2004
348	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	12/08/1991	213	Desa Sadaperarih Kec. Merdeka	Hak Pakai	23/10/2020	2	Pustu Sada perarih	Hibah	AAR840119	1991
349	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	05/12/1984	254	Desa Cinta Rakyat Kec. Merdeka	Hak Pakai	15/10/2020	2	Pustu Cintarayat Jumaraja	Hibah	AAR830248	1984
350	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1993	244	Desa Kutagerat Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	20/03/2019	1	Pustu .Desa Kutagerat	Hibah	AAJ194126	1993
351	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1993	226	Desa Laukapor Kec. Tigabinanga (Akte Jual Beli Nomor : 24/T.B./IV/1993 Tanggal : 10 April 1993)	Hak Pakai	15/02/2024	2	Pustu DESA LAU KAPUR	Hibah	ABN542258	1993
352	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2000	265	Desa Kutabangun II Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	20/03/2020	2	Pustu.Kutabangun II	Hibah	Sertifikat No. 2 Tgl 20-03-2020	2000
353	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1991	200	Desa Sukajulu Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	09/04/2020	1	Pustu Desa Sukajulu	Hibah	(Surat Penyerahan Tanah Pertapakan Tanggal : 18 Maret 1991)	1991
354	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1993	176	Desa Pertumbuken Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	20/03/2019	1	Pustu Desa Pertumbuken	Hibah	AAJ194123	1993
355	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1990	127	Desa Kutagaluh Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	20/03/2019	1	Pustu. Kutagaluh	Hibah	AAJ194145	1990
356	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1990	220	Desa Kutabangun Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	20/03/2019	2	Pustu. Kutabangun I	Hibah	AAJ194123	1990
357	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2005	323	Desa Kutaraja Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	20/03/2019	1	Pustu Desa Kutaraja	Hibah	AAJ194115	2005
358	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1991	276	Desa Limang Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	09/08/2023	2	Pustu Desa Limang	Hibah	ABJ499056	1991
359	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1990	162	Desa Simolap Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	09/05/2019	2	Pustu Desa Simolap	Hibah	AAJ194124	1990

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
360	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2000	49	Desa Kem-kem Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	09/04/2020	No. 1	Pustu Desa Kem-kem	Hibah	sertifikat no No. 1 Tgl 09-04-2020	2000
361	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2000	324	Desa Perbesi Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	20/03/2019	2	Pustu Desa Perbesi	Hibah	AAJ194142	2000
362	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1990	252	Desa Buluh Pancur Kec. Juhar	Hak Pakai	04/09/2020	2	Pustu Buluh Pancur	Hibah	AAP797382	1990
363	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	25/08/1991	159	Desa Laukidupen Kec. Juhar	Hak Pakai	23/10/2020	1	Pustu Laukidupen	Hibah	AAR840123	1991
364	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	25/08/1991	291	Desa Laulingga Kec. Juhar	Hak Pakai	05/02/2025	02.06.000003511.0	Pustu Laulingga	Hibah	Keputusan Nomor 8/HP/BPN-12.06/II/2025	1991
365	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1993	200	Desa Naga Kec. Juhar (Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah)	Hak Pakai	09/04/2020	2	Pustu Desa Naga	Hibah	AAP7973653	1993
366	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2005	187	Desa Sigenderang Kec. Juhar	Hak Pakai	20/06/2019	1	Pustu Desa Sigenderang	Hibah	AAJ194120	2005
367	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1995	159	Desa Nageri Kec. Juhar	Hak Pakai	10/05/2019	2	Pustu Desa Nageri	Hibah	AAJ194121	1995
368	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1990	199	Desa Batu Mamak Kec. Juhar	Hak Pakai	23/10/2020	1	Pustu Desa Batu Mamak	Hibah	AAR840131	1990
369	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1980	208	Desa Kutagugung Kec. Juhar	Hak Pakai	26/11/2020	2	Pustu Desa Kutagugung	Hibah	AAR840499	1980
370	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/1995	382	Dusun Gunung Pamah Desa Kinangkong Kec. Laubaleng	Hak Pakai	19/06/2020	4	Pustu Gunung Pamah	Hibah	AAR829414	1995
371	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/1997	322	Desa Kutambelin Kec. Laubaleng	Hak Pakai	31/05/2024	2	Pustu Kuta Mbelin	Hibah	ABN569230	1997
372	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/2005	181	Desa Lauperadep Kec. Laubaleng	Hak Pakai	15/02/2024	3	Pustu Lauperadep	Hibah	ABN542255	2005
373	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/1993	439	Desa Kinangkong Kec. Laubaleng	Hak Pakai	28/03/2024	3	Pustu Kinangkong	Hibah	ABN568816	1993
374	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	07/03/1991	212	Dusun Baturongkam Desa Mbal-mbal Petarum Kec. Laubaleng	Hak Pakai	06/09/2024	02.000000505.0	Pustu Batu Rongkam	Hibah	Hak Pakai Keputusan No. 29/HP/BPN-12.06/IX/2024	1991
375	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/2000	252	Desa Buluh Pancur Kec. Laubaleng	Hak Pakai	09/04/2020	2	Pustu Buluh Pancur	Hibah	AAP797382	2000
376	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/1982	178	Desa Durin Rugun Kec. Laubaleng	Hak Pakai	09/04/2020	1	Pustu Durin Rugun	Hibah	AAP797348	1982
377	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/1994	167	Desa Lau peranggunen Kec. Laubaleng	Hak Pakai	09/04/2020	1	Pustu Lau Peranggunen	Hibah	AAP797342	1994

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
378	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/2000	384	Desa Lingga Muda Kec. Laubaleng	Hak Pakai	09/09/2020	2	Pustu Lingga Muda	Hibah	AAP797374	2000
379	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/11/2000	212	Dusun Kampung Jawa Desa Perbulan Kec. Laubaleng	Hak Pakai	09/04/2020	No. 2 Tgl 09-04-2020	Pustu Kampung Jawa Perbulan	Hibah	AAP797385	2000
380	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	10/12/1991	1446	Desa Mardingding Kec. Mardingding	Hak Pakai	17/10/2024	02.06.000001081.0	Pusk.Mardingding	Hibah	Hak Pakai Keputusan No. 27/HP/BPN-12.06/IX/2024	1991
381	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	05/12/1985	200	Desa Kutapengkih Kec. Mardingding	Hak Pakai	09/04/2020	1	Pustu Desa Kuta Pengkih	Hibah	AAP797346	1985
382	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/10/1974	240	Dusun Tambunan Desa Rumamis Kec. Barusjahe	Hak Pakai	07/06/2023	3	Pustu Dusun Tambunan	Hibah	ABJ461728	1974
383	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	29/10/1993	139	Desa Sinaman Kec. Barusjahe	Hak Pakai	23/10/2020	4	Pustu Sinaman	Hibah	AAR840121	1993
384	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/10/1991	418	Desa Serdang Kec. Barusjahe	Hak Pakai	15/09/2020	3	Pustu Serdang	Hibah	AAR830243	1991
385	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	29/10/1991	322	Desa Pertumbuken Kec. Barusjahe	Hak Pakai	23/10/2020	2	Pustu Pertumbuken	Hibah	AAR840122	1991
386	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/10/1985	134	Dusun Jumapadang Desa Sarimanis Kec. Barusjahe	Hak Pakai	09/09/2020	3	Pustu Jumapadang	Hibah	AAR830216	1985
387	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	26/08/1991	324	Desa Bulanjahe Kec. Barusjahe	Hak Pakai	26/11/2020	3	Pustu Bulanjahe	Hibah	AAR840503	1991
388	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	26/08/1991	213	Dusun Rumahrih Desa Persadanta Kec. Barusjahe	Hak Pakai	23/10/2020	2	Pustu Rumahrih	Hibah	AAR839854	1991
389	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	26/08/1991	263,2	Desa Tanjung Barus Kec. Barusjahe	Hak Pakai	09/09/2020	3	Pustu Tanjungbarus	Hibah	AAR830220 - luas tanah sebelumnya 207 m2, dinkes menghibahkan tanah seluas 43,8 m2 untuk pelebaran jalan ke gereja gbkp tanjung barus dan gereja gbkp tanjung barus menghibahkan tanah seluas 100 m2 untuk rehabilitasi pustu tanjung barus	1991
390	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/10/1997	277	Desa Bulanjulu Kec. Barusjahe	Hak Pakai	26/11/2020	3	Pustu Bulanjulu	Hibah	AAR840502	1997
391	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	26/08/1991	195	Desa Semangat Kec. Barusjahe	Hak Pakai	23/10/2020	1	Pustu Semangat	Hibah	AAR840120	1991
392	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	30/10/2002	221	Desa Talimbaru Kec. Barusjahe	Hak Pakai	23/10/2020	4	Pustu Talimbaru	Hibah	AAR840132	2002

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
393	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/10/1991	156	Dusun Siberteng Desa Sikab Kec. Barusjahe	Hak Pakai	21/09/2020	1	Pustu Siberteng	Hibah	AAR8339853	1991
394	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	30/11/1979	2225	Desa Barusjahe Kec. Barusjahe	Hak Pakai	10/03/2017	3	Puskesmas Barusjahe	Hibah	BX 409656	1979
395	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	26/08/1991	156	Dusun Kabung Desa Sikab Kec. Barusjahe	Hak Pakai	21/09/2020	2	Pustu Kabung	Hibah	AAR839853	1991
396	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	26/08/1994	201	Dusun Ujung Bandar Desa Persadanta Kec. Barusjahe	Hak Pakai	23/10/2020	1	Pustu Persadanta	Hibah	AAR840118	1994
397	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	26/08/1991	143	Desa Penampen Kec. Barusjahe	Hak Pakai	23/10/2020	2	Pustu Penampen	Hibah	AAR840127	1991
398	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/10/1962	253	Desa Sukanalu Kec. Barusjahe	Hak Pakai	26/11/2020	2	Pustu Sukanalu	Hibah	AAR840505	1962
399	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2005	2552	Desa Munte Kec. Munte	Hak Pakai	09/04/2020	12	Puskesmas Munte	Hibah	AAP797377	2005
400	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2007	237	Desa Gurubanua Kec.Munte	Hak Pakai	15/02/2024	5	Pusk.Desa Guru Banua	Hibah	ABN542257	2007
401	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1986	577	Desa Kineppen Kec. Munte	Hak Pakai	13/03/2019	3	Pustu Kineppen	Hibah	AAJ194151	1986
402	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1991	207	Desa Barung Kersap Kec. Munte	Hak Pakai	23/10/2023	6	Pusk. Barungkersap	Hibah	ABJ 526885	1991
403	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1993	324	Desa Nageri Kec. Munte	Hak Pakai	19/10/2023	2	Pustu Nageri	Hibah	ABJ526856	1993
404	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01/12/2006	200	Desa Sukarame Kec. Munte	Hak Pakai	22/12/2022	4	Pustu Sukarame	Hibah	ABJ446578	2006
405	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2005	515	Desa Sarimunte Kec. Munte	Hak Pakai	09/05/2019	1	Pusk. Sarimunte	Hibah	AAJ194153	2005
406	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1994	71	Desa Kutasuah Kec. Munte	Hak Pakai	30/05/2023	1	Pustu Kutasuah	Hibah	ABJ461633	1994
407	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01/12/1993	400	Desa Bandar Meriah Kec. Munte	Hak Pakai	20/03/2019	2	Pustu Bandar Meriah	Hibah	AAJ194152	1993
408	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1995	269	Desa Kabantua Kec. Munte	Hak Pakai	26/12/2022	4	Pustu Kabantua	Hibah	ABJ446609	1995
409	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1991	217	Desa Gunung Manumpak Kec. Munte	Hak Pakai	13/03/2019	1	Pustu Gunung manumpak	Hibah	AAJ194154	1991
410	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1995	363	Desa Parimbalang Kec. Munte	Hak Pakai	13/12/2023	1	Pustu Parimbalang	Hibah	ABJ558688	1995
411	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1992	244	Desa Kutagerat Kec. Munte	Hak Pakai	20/03/2019	AAJ194126	Pustu kuta Gerat	Hibah	AAJ194126	1992

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
412	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2007	774	Desa Kutambaru Kec. Munte	Hak Pakai	26/12/2022	5	Pustu Kutambaru	Hibah	ABJ446608	2007
413	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1991	199	Desa Sarinembah Kec. Munte	Hak Pakai	13/03/2019	1	Pustu Sarinembah	Hibah	AAJ194130	1991
414	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	26/12/1975	1981	Desa Kutabuluh Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	09/04/2020	2	Pusk. Kutabuluh	Hibah	sertifikat No. 2 Tgl 9-04-2020	1975
415	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	21/12/1970	220	Desa Laubuluh Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	20/05/2019	1	Pustu Laubuluh	Hibah	AAJ194133	1970
416	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	24/12/1993	161	Desa Gunung Meriah Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	06/09/2024	02.06.000000564.0	Pustu Gunung Meriah	Hibah	Hak Pakai Keputusan No. 27/HP/BPN-12.06/IX/2024	1993
417	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	22/12/2008	60	Desa Pola Tebu Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	09/04/2020	1	Pustu Pola Tebu	Hibah	Sertifikat No. 1 Tgl 09-04-2020	2008
418	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	18/02/2007	121	Desa Liang Merdeka Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	31/05/2024	1	Pustu Liang Merdeka	Hibah	ABN569228	2007
419	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	18/02/2008	224	Desa Negeri Jahe 2 Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	31/05/2024	1	Pustu Negeri Jahe 2	Hibah	ABN569224	2008
420	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	19/12/2005	117	Desa Kutabuluh Gugung Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	20/03/2019	3	Pustu Kutabuluh	Hibah	AAJ194136	2005
421	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	20/12/1991	147	Desa Buah Raya Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	30/04/2020	1	Pustu Desa Buah Raya	Hibah	Sertifikat No. 1 Tgl 30-04-2020	1991
422	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	20/02/1995	294	Desa Jinabun Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	20/03/2019	2	Pustu Jinabun	Hibah	AAJ194131	1995
423	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	19/02/1991	164	Desa Tanjung Merahe Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	31/05/2024	1	Pustu Tanjung Merahe	Hibah	ABN569229	1991
424	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	10/12/1980	45	Ketepul Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	19/12/2023	86	Pustu Ketepul	Hibah	ABJ558719	1980
425	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	14/12/2004	200	Jl. Selamat Ketaren Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	30/06/2022	54	Puskesmas Kabanjahe	Hibah	ABE367252 untuk kantor dinas kesehatan dan puskesmas	2004
426	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	06/12/2005	162	Desa Kandibata Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	22/12/2022	3	Pustu Kandibata	Hibah	ABJ446588	2005
427	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	10/12/1980	239	Desa Samura Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	13/12/2023	21	Pustu Samura	Hibah	ABJ558686	1980
428	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	13/12/1990	4009	Jl. Merek-Sidikalang Desa Merek Kec. Merek	Hak Pakai	10/03/2017	1	Puskesmas Merek	Hibah	BX 409657	1990
429	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	11/12/2000	187	Desa Dokan Kec. Merek	Hak Pakai	23/10/2023	3	Pustu Dokan	Hibah	ABJ 526905	2000
430	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	06/12/1996	229	Desa Sukamandi Kec. Merek	Hak Pakai	23/10/2023	2	Pustu Sukamandi	Hibah	ABJ 526894	1996

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
431	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	09/12/1996	86	Desa Pancurbatu Kec. Merek	Hak Pakai	04/09/2023	4	Pustu Pancurbatu	Hibah	ABJ524751	1996
432	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	15/12/1993	300	Desa Sibolangit Kec. Merek	Hak Pakai	13/12/2023	1	Pustu Sibolangit	Hibah	ABJ558687	1993
433	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	12/12/2000	61	Desa Tongging Kec. Merek	Hak Pakai	23/10/2023	9	Pustu Tongging	Hibah	ABJ 526907	2000
434	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	11/12/1993	400	Desa Pangambatan Kec. Merek	Hak Pakai	14/11/2023	9	Pustu Pangambatan	Hibah	ABJ558259	1993
435	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	22/02/2021	400	Desa Pancur Batu Dusun Aekpopo	Hak Pakai	20/09/2023	5	Pustu Dusun Aekpopo	Hibah	ABJ525415	2021
436	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	29/11/1985	75	Kel. Laugumba Kec. Berastagi	Hak Pakai	23/10/2023	5	Pustu Lau Gumba	Hibah	ABJ 526886	1985
437	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	29/10/1990	1554	Komplek Perumahan Korpri Desa Gurusinga Kec. Berastagi	Hak Pakai	10/03/2017	2	Puskesmas Korpri	Hibah	BX 409649	1990
438	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/08/2006	171	Desa Kaban Kec. Berastagi	Hak Pakai	14/11/2023	1	Pustu Kaban	Hibah	ABJ558261	2006
439	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/07/2021	56	Desa Gurusinga	Hak Pakai	22/12/2022	14	Pustu Gurusinga	Hibah	ABJ446579	2021
440	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	21/12/1991	219	Desa Sirumbia Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	26/12/2022	2	Pustu Desa Sirumbia	Hibah	ABJ446601	1991
441	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	24/12/1997	239	Desa Jeraya Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	19/10/2023	3	Pustu Desa Jeraya	Hibah	ABJ526854	1997
442	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	19/12/2005	3082	Jl. Ndokumsiroga Desa Ndokumsiroga Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	10/03/2017	6	Puskesmas Simpang Empat	Hibah	BX 409671	2005
443	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	20/12/1991	174	Desa Tigapancur Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	23/10/2023	2	Pustu Desa Tigapancur	Hibah	ABJ 526889	1991
444	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	19/12/1991	290	Desa Nangbelawan Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	04/08/2022	3	Pustu Nangbelawan	Hibah	ABE367922	1991
445	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	19/12/1991	330	Desa Kutatengah Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	23/10/2023	2	Pustu Kutatengah	Hibah	ABJ 526911	1991
446	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	18/12/1993	90	Desa Torong Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	14/04/2023	4	Pustu Torong	Hibah	ABJ461361	1993
447	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	24/12/1991	375	Desa Lingga Julu Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	04/08/2022	4	Pustu Desa Lingga Julu	Hibah	ABE367566	1991
448	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	30/09/1991	509	Desa Batukarang Kec. Payung	Hak Pakai	15/09/2020	AAR830237	Pusk.Desa Batukarang	Hibah	AAR830237	1991
449	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1993	187	Desa Ujung Payung Kec. Payung	Hak Pakai	15/09/2020	1	Pustu Ujung Payung	Hibah	AAR830244	1993

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
450	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1996	268	Desa Selandi Lama Kec. Payung	Hak Pakai	09/09/2020	1	Pusk.Selandi Lama	Hibah	AAR830212	1996
451	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2006	169	Desa Cimbang Kec. Payung	Hak Pakai	09/09/2020	1	Pustu Cimbang	Hibah	AAR830213	2006
452	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	09/12/1970	2581	Desa Tiganderket Kec. Tiganderket	Hak Pakai	10/03/2017	5	Puskesmas Tiganderket	Hibah	BX 409647	1970
453	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	11/12/1991	169	Desa Sukatendel Kec. Tiganderket	Hak Pakai	23/10/2023	3	Pustu Desa Sukatendel	Hibah	ABJ 526908	1991
454	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	09/12/1998	212	Desa Penampen Kec. Tiganderket	Hak Pakai	23/10/2023	2	Pustu Penampen	Hibah	ABJ 526899	1998
455	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	09/12/1998	149	Desa Gunung Merlawan Kec. Tiganderket	Hak Pakai	15/09/2020	1	Pustu Desa Gunung Merlawan	Hibah	AAR830236	1998
456	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	07/12/2005	97,5	Desa Tanjung Pulo Kec. Tiganderket	Hak Pakai	23/10/2023	2	Pustu Desa Tanjung Pulo	Hibah	ABJ 526898	2005
457	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	04/12/1996	169	Desa Kutagaluh Kec. Tiganderket	Hak Pakai	15/09/2020	1	Pustu Desa Kutagaluh	Hibah	AAR830241	1996
458	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	07/12/2005	107	Desa Kutakepar Kec. Tiganderket	Hak Pakai	09/09/2020	1	Pustu Kuta Kepar	Hibah	AAR830217	2005
459	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	07/12/2005	129	Desa Susuk Kec. Tiganderket	Hak Pakai	23/10/2023	7	Pustu Desa Susuk	Hibah	ABJ 526897	2005
460	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	03/12/2003	208	Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket	Hak Pakai	09/09/2020	3	Pustu Desa Jandi Meriah	Hibah	AAR830218	2003
461	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	06/12/2006	144	Desa Narigunung II Kec. Tiganderket	Hak Pakai	19/10/2023	2	Pustu Desa Nari Gunung II	Hibah	ABJ 526853	2006
462	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	05/12/1995	156	Desa Tanjung Mbelang Kec. Tiganderket	Hak Pakai	23/10/2023	4	Pustu Desa Tanjung Mbelang	Hibah	ABJ 526891	1995
463	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/1993	208	Desa Narigunung I Kec. Tiganderket	Hak Pakai	09/09/2020	1	Pustu Desa Nari Gunung I	Hibah	AAR830222	1993
464	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	27/12/1991	136	Desa Ajijulu Kec. Tigapanah	Hak Pakai	09/09/2020	2	Pusk.Ajijulu	Hibah	AAR830221	1991
465	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	26/12/1991	189	Desa Ajibuhara Kec. Tigapanah	Hak Pakai	31/05/2024	3	Pustu Ajibuhara	Hibah	ABN569223	1991
466	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	27/12/1993	700	Desa Suka Sipilihen Kec. Tigapanah	Hak Pakai	23/10/2023	2	Pustu Suka Sipilihen	Hibah	ABJ 526892	1993
467	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	30/12/1995	175	Desa Bertah Kec. Tigapanah	Hak Pakai	15/09/2020	2	Pustu Bertah	Hibah	AAR830235	1995
468	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	29/12/1997	210	Desa Kutajulu Kec. Tigapanah	Hak Pakai	08/11/2023	1	Pustu Kuta Julu	Hibah	ABJ558025	1997
469	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	29/12/1985	469	Desa Kubu Simbelang Kec. Tigapanah	Hak Pakai	08/11/2023	5	Pustu Kubu Simbelang	Hibah	ABJ558022	1985

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
470	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	27/12/1991	583	Desa Ajijahe Kec. Tigapanah	Hak Pakai	09/09/2020	2	Pustu Ajijahe	Hibah	AAR830215	1991
471	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	29/12/1993	321	Desa Bunuraya Kec. Tigapanah	Hak Pakai	17/12/2020	2	Pustu Bunuraya	Hibah	AAR840711	1993
472	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	30/12/1993	900	Desa Manuk Mulia Kec. Tigapanah	Hak Pakai	23/10/2023	4	Pustu Manuk Mulia	Hibah		1993
473	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	27/12/1994	383	Desa Salit Kec. Tigapanah	Hak Pakai	14/12/2023	6	Pustu Salit	Hibah	ABJ558692	1994
474	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	25/08/1990	254	Desa Seberaya Kec. Tigapanah	Hak Pakai	23/10/2020	1	Pustu Seberaya	Hibah	AAR840129	1990
475	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	25/08/1989	2298	Jl. Kabanjahe-Merek Desa Tigapanah Kec. Tigapanah	Hak Pakai	23/10/2023	14	Puskesmas Tigapanah	Hibah	ABJ 526888	1989
476	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Poliklinik	28/12/2007	100	Desa Mulawari Kec. Tigapanah	Hak Pakai	23/10/2023	6	Pustu Mulawari	Hibah	ABJ 526900	2007
477	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Industri	20/12/2004	200	Jl. Selamat Ketaren Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	30/06/2022	54	Pusk.Kabanjahe	Hibah	ABE367252	2004
478	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Industri	31/07/1980	208	Jl. Tiganderket-Tj.Merawa Desa Tiganderket Kec. Tiganderket	Hak Pakai	10/03/2017	BX 409674	Pos Kesehatan Hewan dan IB	Pembelian		1980
479	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Industri	31/07/1980	332	Jl. Pasar Baru Gg. Merek Kel. Tambak Laumulgap II Kec. Berastagi	Hak Pakai	10/03/2017	BX 409666	Rumah Potong Hewan	Pembelian		1980
480	Kecamatan Tigapanah	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA	Tanah Bangunan Olah Raga	23/08/2018	9275	Jalan Sukanalu Desa Tigapanah Kec. Tigapanah.	Hak Pakai	13/03/2019	AAJ 194119	Lapangan	Pembelian		2018
481	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA	Tanah Bangunan Olah Raga	22/09/1991	29092	Jln. Samura Kabanjahe	Hak Pakai	16/08/2012	11	Stadion Bola	Pembelian		1991
482	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TANAH PERSIL	TANAH PERSIL LAIN-LAIN	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	03/01/2018	1733	Desa Tongging Kecamatan Merek	Hak Pakai	25/01/2019	AAH 935349	Tanah bangunan Taman	Pembelian	AAH935349	2018
483	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TANAH PERSIL	TANAH PERSIL LAIN-LAIN	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	03/01/2018	1532	Desa Tongging Kecamatan Merek	Hak Pakai	25/01/2019	AAH 935352	Tanah bangunan taman	Pembelian	AAH 935352	2018
484	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TANAH PERSIL	TANAH PERSIL LAIN-LAIN	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	03/01/2018	970	Desa Tongging Kecamatan Merek	Hak Pakai	25/01/2019	AAH 935350	Tanah bangunan taman	Pembelian	AAH 935350	2018
485	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	TANAH NON PERSIL	TANAH BASAH	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	31/07/1980	14930	Desa Singgamanik Kec. Munte	Hak Pakai	20/03/2019	2	Kantor Balai Benih Ikan Lokal dan Kolam Ikan dan K	Pembelian		1980
486	Dinas Pendidikan	TANAH NON PERSIL	TANAH KERING	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	31/12/1998	7396	Jl. Jamin Ginting Gg. Brahmana Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	16/12/1998	28	SMP NEGERI 4 KABANJAHE	Pembelian	(Sertipikat AM559273)	1998

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
487	Dinas Pendidikan	TANAH NON PERSIL	TANAH KERING	Tanah Kosong Yang Tidak Digunakan	31/12/1987	1962	Jl. Kolam Renang Kel. Gundaling I Kec. Berastagi (SERTIFIKAT AAV 963042)	Hak Pakai	08/09/2021	22	SMP NEGERI 2 BERASTAGI (Lapangan olah raga bawah)	Hibah	(SERTIFIKAT AAV 963042)	1987
488	Dinas Lingkungan Hidup	TANAH NON PERSIL	TANAH HUTAN	Tanah Hutan Produksi	18/07/1994	4228	Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi	Hak Pakai	09/04/2020	5	Lahan Pertanian	Pembelian		1994
489	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	TANAH NON PERSIL	TANAH HUTAN	Tanah Hutan Wisata	31/12/1960	24060	Desa Merdeka, Kec. Merdeka	Hak Pakai	09/06/2021	3	Taman Wisata dan Rekreasi Bukit Gundaling	Pembelian		1960
490	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	TANAH NON PERSIL	TANAH HUTAN	Tanah Hutan Wisata	31/12/1960	32048	Taman Mejuah-juah Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Pasar dan Open Stage	Hak Pakai	11/01/2016	4	Taman Wisata dan Rekreasi, Kantor Disbudpar	Pembelian		1960
491	Dinas Pertanian	TANAH NON PERSIL	TANAH PADANG ALANG-ALANG/RUMPUT	Tanah Padang Alang-Alang	31/07/1980	5751	Desa Salit Kec. Tigapanah	Hak Pakai	30/12/2021	AAW037444	Tanah Pertanian Desa Salit	Pembelian		1980
492	Dinas Pertanian	TANAH NON PERSIL	TANAH PERTANIAN	Tanah Usaha	31/12/2013	9964	Jl. Perjalangan Kawat Desa Guru Benua Kec. Munte	Hak Pakai	09/04/2020	AAP797375	lahan pertanian	Pembelian		2013
493	Dinas Pertanian	TANAH NON PERSIL	TANAH PERTANIAN	Tanah Usaha	30/09/1999	240200	Desa Negara Kec. Merek Tanah	Hak Pakai	28/11/2022	AAW016023	Peternakan	Pembelian		1999
494	Dinas Pertanian	TANAH NON PERSIL	TANAH PERTANIAN	Tanah Usaha	12/04/2021	37080	Desa Lau Solu Kecamatan Mardinding	Hak Pakai	09/04/2020	AAW037670	lahan pertanian	Pembelian		2021
495	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	TANAH NON PERSIL	TANAH PERTANIAN	Tanah Usaha	30/09/1999	50000	Desa Negara Kecamatan Merek	Hak Pakai	28/11/2024	2	BANGUNAN BLK	Pembelian		1999
496	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	TANAH NON PERSIL	TANAH PERTANIAN	Tanah Usaha	30/12/2020	5260	Jl. Jamin Ginting Desa Raya Kec.Berastagi	Hak Pakai	02/08/2023	14	pembangunan PLUT	Pembelian		2020
497	Dinas Pertanian	TANAH NON PERSIL	TANAH NON PERSIL LAINNYA	Tanah Peternakan Lainnya	31/07/1981	354	Jl. Tigapanah-Seberaya Desa Tigapanah Kec. Tigapanah	Hak Pakai	10/03/2017	BX 409648	Kantor Pos Kesehatan Hewan dan IB Tigapanah	Pembelian		1981
498	Dinas Lingkungan Hidup	LAPANGAN	TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	16/11/2016	50011	Desa Mulia Rayat Kecamatan Merek(Dokan) (Sertipikat BX 409682)	Hak Pakai	19/10/2017	1	Lahan Pertanian	Pembelian		2016
499	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2017	5600	Jalan Komplek Konen Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	24	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840691	2017
500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Jl. Kampung Baru	Hak Pakai	17/12/2020	8	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840698	2007
501	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	450	Gg. Ginting Sinterem - Jl. Selamat Ketaren Kec. kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	15	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840696	2007
502	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1674	Lingkar Pasar Lau Gendek Kec. Dolat Rayat	Hak Pakai	26/01/2022	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037627	2007
503	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	158	Gg. Lalupa - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	09/06/2021	43	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961267	2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
504	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	2126	Jalan Simp. Bertah-Bertah Kec. Tigapanah	Hak Pakai	26/01/2022	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037675	2010
505	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1188	Jl.Lingkar Kesain Mbelang Desa Singa Kec. Tigapanah	Hak Pakai	29/05/2023	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461650	2010
506	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	303	Jl.Kuburan Tionghoa Berastagi	Hak Pakai	26/06/2023	10	Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
507	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1726	Jl.Pekuburan Desa Rumah Berastagi Kec.Berastagi	Hak Pakai	26/06/2023	13	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ498788	2009
508	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	4,306	Desa Sukanalu Kec. Barusjahe	Hak Pakai	06/03/2025	28/HP/BPN-12.06/III/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
509	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	627	Gg. Teladan Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	8	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961178	2007
510	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	11360	Peceren-Peceren Kec. Berastagi	Hak Pakai	18/01/2022	7	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037540	2009
511	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1051	Gg. Rukun Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	7	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961195	2007
512	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	602	Lingkar Pasar Tigajumpa Kec. Barusjahe	Hak Pakai	05/02/2025	11/HP/BPN-12,06/II/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
513	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1851	Gg. Terang Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	9	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961192	2007
514	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	547	Gg. Sibayak Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	14	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961251	2007
515	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1996	22910	Jalan Bunga Baru I Bunga Baru Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	18/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037560	1996
516	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	2,632	(Gg. Aman, Gg. Arihta, Gg. Brahmana, Gg. Sada Nioga, Gg. Karya Darma, Gg. Sempurna) Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	31/05/2024	89	Jalan Kabupaten	Pembelian		2014
517	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	24700	Tigapanah- Sukanalu Kec. Tigapanah	Hak Pakai	30/12/2021	9	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037462	2007
518	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	634	Lorong Ikuten Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	17	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961183	2007
519	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	425	Gg. Sempakata Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	11	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961190	2007
520	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1668	Gg. Tambah Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	12	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961189	2007
521	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	26427	Sp. Surbakti - Beganding Kec. Sp.Empat	Hak Pakai	26/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037655	2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
522	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/1996	11,904	Bertah-Buluh Naman Kec.Munte	Hak Pakai	08/11/2023	4	Jalan Kabupaten	Pembelian		1996
523	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1996	26249	Pernantin - Juhar Kec.Juhar	Hak Pakai	22/11/2022	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABH721533	1996
524	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	11960	Sp. Nang Belawan - Nang Belawan Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	26/01/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
525	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	16370	Sp. Beganding - Beganding Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	26/01/2022	5	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037648	2007
526	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20,985	Beganding - Ujung Payung Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	07/04/2022	2/6	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
527	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	26422	Perteguhen - Jeraya - Pintu Besi Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	30/12/2021	1/2/1/3	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
528	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	36600	Tongkoh-Jaranguda Kec. Dolat Rakyat/Merdeka	Hak Pakai	07/04/2022	8	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW055044	2007
529	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15543	Sp. Lingga - Lingga - Lingkar Lingga Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	04/04/2022	6	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037633	2007
530	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20386	Cinta Rayat-Sada Perarih Kec. Merdeka	Hak Pakai	18/01/2022	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037516	2007
531	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	730	Jl. Kejora II Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	9	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961177	2007
532	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	595	Kaliaga-Berastagi Kec. Berastagi	Hak Pakai	04/04/2023	26	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461342	2007
533	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10290	Jl. Perwira Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	11	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961194	2007
534	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	18650	Cinta Rayat - Ujung Teran Kec. Merdeka	Hak Pakai	30/12/2021	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037507	2007
535	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	30353	Ujung Teran-Deram-Sukandebi Kec. Merdeka	Hak Pakai	30/12/2021	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037464	2007
536	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	438	Jl. Kejora Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	19	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961181	2007
537	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	931	Jl. Kejora I Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	18	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961182	2007
538	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Jl. Kartini - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	21	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840685	2007
539	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	383	Jl. Bengkel - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/08/2022	63	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABE367917	2007
540	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3375	Jl. Trimurti Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961253	2007
541	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	4717	Sp. Raya - Raya Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	11	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961265	2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
542	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	18753	Jl. Gundaling Kec. Berastagi	Hak Pakai	31/05/2023	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461692	2007
543	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	26210	Sp. Gurusinga - Kuta gadung Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	11	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961256	2007
544	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5771	Sp. Jarangnguda - Jarangnguda Kec. Berastagi/Merdeka	Hak Pakai	19/10/2022	9	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABH699830	2007
545	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2088	Jl. Surya Indah Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	16	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961184	2007
546	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	458	Jl. RSU - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	08/11/2023	46	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ558026	2007
547	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	35030	Payung - Sp. Tiga Batu Karang Kec. Payung	Hak Pakai	18/01/2022	5	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037534	2007
548	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	4000	Jl. Siki - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	37	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840706	2007
549	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	556	Jl. Lau Pinggan - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	69	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446590	2007
550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2282	Kacaribu - NangBelawan Kec. Kabanjahe/Simpang Empat	Hak Pakai	14/02/2025	'19/HP/BPN-12.06/II/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
551	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	27000	Sp. Kaban - Perum.Korpri Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	9	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961258	2007
552	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25000	Sp. Penampen - Penampen Kec. Barusjahe	Hak Pakai	08/12/2021	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW036756	2007
553	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Gg. Kalihara - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/04/2023	28	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461338	2007
554	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Jl. Irian - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/04/2023	24	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461331	2007
555	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1996	2118	Lingkar Desa Kec.Munte	Hak Pakai	06/03/2025	'66/HP/BPN-12.06/III/2025 & 35/HP/BPN-12.06/III/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		1996
556	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1996	32500	Sp.Pertumbungen - Sp.Sarimunte Kec. Munte	Hak Pakai	12/01/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037543	1996
557	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10500	Lau Buluh-Kutabuluh Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	08/12/2021	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW036758	2007
558	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2015	2283	Gg. Tengguli Jalan Kotacane Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/10/2023	6	Jalan Kabupaten	Pembelian		2015
559	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	4500	Pembangunan Jalan UKA Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	8	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840681	2013
560	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2013	1640	Gg. Terboyo Stadion Samura Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/09/2024	26/HP/BPN-12.06/IX/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A0632491	2013

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
561	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	17000	Sp.Bungabaru II - Gn.Manumpak Kec.Tigabinanga/Munthe	Hak Pakai	01/11/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABH700039	2007
562	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	39000	Kuta Buluh - Tanjung Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	12/01/2022	8	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037549	2007
563	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Jl.Gang 88 Kabanjahe	Hak Pakai	26/12/2022	72	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446603	2010
564	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Jl.Gang Merga Silima Sp.Ujung Aji Desa Rumah Berastagi	Hak Pakai	26/06/2023	12	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ498787	2010
565	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2013	1500	Jalan Gg. Pendidikan - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/04/2023	26	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461336	2013
566	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1250	Jl.UKA Gang Merpati Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	10	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840707	2010
567	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	550	Jalan Gang Bahagia Kabanjahe	Hak Pakai	13/12/2023	21	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ558689	2010
568	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	3021	Jl.Gang Madu Kabanjahe	Hak Pakai	26/06/2023	19	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ498792	2010
569	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1500	Jl.UKA Gang Rajawali Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	11	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840679	2010
570	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	258	Jl.Gang Kelinci I dan II Kabanjahe	Hak Pakai	26/01/2022	47	Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
571	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	750	Jl.Samura Gang Karona Kabanjahe	Hak Pakai	04/04/2023	83	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461340	2010
572	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1750	Jl.Samura Gang Tambun Kabanjahe	Hak Pakai	04/04/2023	81	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461339	2010
573	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	3500	Gang.Pemda Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	17	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840746	2010
574	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	3500	Gang Sempakata Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/04/2023	27	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461337	2010
575	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Jl.Gang Metodis Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	38	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840729	2010
576	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	2777	Jl.Lau Pinggan Lorong I.II.IV Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	18/67/71/75	Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
577	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1600	Jl.Gang Permai Kabanjahe	Hak Pakai	26/12/2022	77	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446610	2010
578	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	582	Jl. Kejora III Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	13	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961187	2007
579	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	1250	Jl. Perdagangan Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	13	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961249	2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
580	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	500	Jl.Gang Sada Nioga Kabanjahe	Hak Pakai	25/08/2022	23	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABE367924	2010
581	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	30000	Jl.Simp.Ketaren - Ketaren Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	7	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840708	2010
582	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	3300	Jl. Mesjid Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	5	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961252	2007
583	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	3400	Jl. Perniagaan Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	15	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961250	2007
584	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1313	Jl.Cik Ditiro Kabanjahe	Hak Pakai	12/09/2024	30/HP/BPN-12.06/IX/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A1973484	2010
585	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	5064	Jl.Tropis Kabanjahe	Hak Pakai	14/02/2025	'20/HP/BPN-12.06/II/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
586	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	1100	Jl. Trimurti II Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961254	2007
587	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	1100	Jl. Trimurti I Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961255	2007
588	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	3500	Jl.Abdi Kejora Kec.Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	10	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961180	2009
589	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1000	Jl.Sp.Sarinembah - Sarinembah Kec. Munte	Hak Pakai	23/12/2021	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037111	2009
590	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	2475	Jl. Penghasilan Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	8	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961244	2007
591	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Karya - Jl. Kotacane Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/01/2022	8	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037668	2007
592	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	1375	Jl. Pembangunan Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	10	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961246	2007
593	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	2280	Jl. Penghubung Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	9	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961245	2007
594	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	27491	Sp. Lau Simomo - Gurubenua Kec. Kabanjahe/Munte	Hak Pakai	31/05/2023	4/6/2	Jalan Kabupaten	Pembelian	tgl 01/07/2023, tgl 90/08/2023	2007
595	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	405	Gg. Kesatuan - Jl. Sudirman Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	28	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840693	2007
596	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	350	Gg. Berahmana I - Jl. Sudirman Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	29	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840741	2007
597	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	6000	Sp. Suka Tepu - Suka Tepu Kec. Namanteran	Hak Pakai	24/03/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037907	2007
598	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	11000	Guru Singa - Sp. Kaban Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	7	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961260	2007
599	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	450	Gg. Milala - Jl. Sudirman Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	22	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840695	2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	700	Gg. Sahabat - Jl. Sudirman Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	09/02/2022	35	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037632	2007
601	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	522	Gg. Maju - Gg. Ketaren - Jl. Letjen Jamin Ginting Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/09/2024	22/HP/BPN-12.06/IX/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A0632490	2007
602	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/1996	34,291	Sp. Buah Raya - Buah Raya Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	08/12/2021	2/6	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW036761	1996
603	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	765	Gg. Sepuluh - Jl. Let. Rata Perangin-angin Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	18	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840684	2007
604	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	450	Gg. Gloria - Jl. Let. Rata Perangin-angin Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	19	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840692	2007
605	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	750	Gg. Melati III - Jl. Kapten Bangsi Sembiring Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	12	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446594	2007
606	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	617	Gg. Melati IV - Jl. Kapten Bangsi Sembiring Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	19	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446585	2007
607	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	270	Gg. Berahmana II - Jl. Sudirman Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	13	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840687	2007
608	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	225	Gg. BRI - Jl. Sudirman Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/01/2022	38	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037635	2007
609	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Melati VII - Jl. Kapten Bangsi Sembiring Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	15	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446595	2007
610	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Pesona - Jl. Kerayatan Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/12/2022	76	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446607	2007
611	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	360	Gg. Lau Meciho - Jl. Let. Rata Perangin-angin Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	30	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840742	2007
612	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2000	Gg. Melati II - Jl. Kapten Bangsi Sembiring Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	14	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446597	2007
613	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	550	Gg. Semangat - Jl. Katepul Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/01/2022	49	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037642	2007
614	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	350	Gg. Melati V - Jl. Kapten Bangsi Sembiring Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	18	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446584	2007
615	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	351	Gg. Melati VI - Jl. Kapten Bangsi Sembiring Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	16	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446592	2007
616	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Nuri - Jl. UKA Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	12	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840728	2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
617	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	300	Gg. Gelatik - Jl. UKA Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	15	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840722	2007
618	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1627	Gg. Sehat - Jl. Letjen Jamin Ginting Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/09/2024	32/HP/BPN-12.06/IX/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A1905204	2007
619	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Adipura - Jl. Kotacane Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/01/2022	9	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037667	2007
620	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Pembangunan - Jl. Katepul Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	25/08/2022	65	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABE367919	2007
621	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Gg. Jalak - Jl. UKA Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	9	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840680	2007
622	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2006	200	Gg. Merak - Jl. UKA Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	13	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840727	2006
623	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1760	Gg. Keluarga - Jl. Letjen Jamin Ginting Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/09/2024	33/HP/BPN-12.06/IX/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A1905206	2007
624	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Hidatul - Jl. Samura Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	30/03/2023	15	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461341	2007
625	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Cemara - Jl. Samura Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	29/05/2023	16	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461644	2007
626	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2503	Lorong III - Komplek Marga Silima Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/09/2024	24/HP/BPN-12.06/IX/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A0632492	2007
627	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Gg. Keluarga - Jl. Samura Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/04/2023	79	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461323	2007
628	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2600	Gg. Pinem - Jl. Samura Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	29/05/2023	17	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461645	2007
629	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	258	Gg. Kelinci - Jl. Mariam Ginting Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/01/2022	47	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037631	2007
630	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1250	Gg. UPT - Jl. Letjen Jamin Ginting Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/09/2024	21/HP/BPN-12.06/IX/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A0632489	2007
631	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	639	Gg. Lau Bahing - Jl. Letjen Jamin Ginting Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/09/2024	25/HP/BPN-12.06/IX/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A063248	2007
632	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	800	Gg. Cenderawasih - Jl. Samura Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	34	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840704	2007
633	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	565	Gg. Harapan	Hak Pakai	08/06/2021	10	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961191	2007
634	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	675	Gg. Sederhana II - Jl. Irian Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	16/06/2023	27	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ498620	2007
635	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	350	Gg. Nuri - Jl. Samura Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	36	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840703	2007
636	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2692	Gg. Mawar - Jl. Veteran Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	03/10/2024	38/HP/BPN-12.06/X/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A0632882	2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
637	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1750	Gg. Sinar	Hak Pakai	08/06/2021	8	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961193	2007
638	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Gg. Serasi	Hak Pakai	09/06/2021	13	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961263	2007
639	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3500	Sp. Ndokum Siroga - Ndokum Siroga	Hak Pakai	18/01/2022	12	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037518	2007
640	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3600	Gg. Sederhana I - Jl. Irian Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	30/03/2023	26	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461333	2007
641	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Rumah Buluh - Jl. Kotacane	Hak Pakai	23/12/2022	21	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446586	2007
642	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5000	Sp. Kutabale - Kutabale	Hak Pakai	23/12/2021	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037413	2007
643	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	24,248	Laugendek - Melas	Hak Pakai	18/01/2022	6/3	Jalan Kabupaten	Pembelian	tgl 30/12/2021	2007
644	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25500	Bertah - Biaknampe	Hak Pakai	18/01/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037557	2007
645	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	22,443	Sp. Mulawari - Mulawari	Hak Pakai	18/01/2022	2/3/4	Jalan Kabupaten	Pembelian	tgl 30/12/2021, tgl 18/01/2022	2007
646	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	16800	Sp. Samura - Samura	Hak Pakai	17/12/2020	14	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840712	2007
647	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	11860	Sp. Kinepen - Bandar Meriah	Hak Pakai	23/10/2023	5	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
648	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	17500	Sp. Gunung Manumpak - Manumpak	Hak Pakai	19/10/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABH699798	2007
649	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1,043	Lingkar Pasar Munte	Hak Pakai	02/02/2025	23/HP/BPN-12.06/II/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
650	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	17500	Sp. Kutagerat - Barungkersap	Hak Pakai	07/04/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW055064	2007
651	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	17000	Batumamak - Sukababo Kec. Juhar	Hak Pakai	04/08/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABE367920	2007
652	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	16380	Sp. Puncak 2000(2) - Puncak 2000 Kec. Tigapanah	Hak Pakai	23/09/2023	7	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ525667	2007
653	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2459	Samura - Berhala Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/06/2023	10	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
654	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20508	Buahranggang - Suka Kec. Tigapanah	Hak Pakai	05/01/2025	13/HP/BPN-12.06/II/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
655	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1500	Gg.Sangap Encari Kec.Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	39	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446591	2009
656	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	2500	Gg.Pertibi Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	36	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446599	2009

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
657	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	3449	Jl.Tiga Jumpa - Paribun	Hak Pakai	05/02/2025	16/HP/BPN-12,06/II/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
658	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	4950	Jl.Sp.Rumah Berastagi - Rumah Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	8	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961242	2009
659	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	3000	Lingkungan Desa Gajah Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	30/08/2023	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ499414	2009
660	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	15504	Sukadame-Sukanalu Kec. Barusjahe	Hak Pakai	14/02/2025	'21/HP/BPN-12.06/II/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
661	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1000	Gg.Kesehatan Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	14	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840683	2009
662	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	5000	Jl.Singa-Kubu Simbelang Kec.Tiganapah	Hak Pakai	22/06/2023	8	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ498686	2009
663	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1500	Perum Telkom Desa Ketaren Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	14	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840745	2009
664	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	750	Jl.Losd Desa Ujung Aji Kec.Berastagi	Hak Pakai	26/06/2023	10	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ498785	2009
665	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	4407	Gg.Bersama I dan II Kec Kabanjahe	Hak Pakai	03/10/2024	39/HP/BPN-12.06/X/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A0632883	2009
666	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	4000	Barusjahe-Barusjahe Kec. Barusjahe	Hak Pakai	26/01/2022	7	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037662	2009
667	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	820	Gg.Purba Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	14/02/2025	'18/HP/BPN-12.06/II/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
668	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1000	Jl.Samudra Gg.Madrasah Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	29/05/2023	18	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461643	2009
669	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	4000	Kerakyatan Ujung Sanatorium Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	35	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840705	2009
670	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	2500	Jl.Gang Makmur Kec.Berastagi	Hak Pakai	26/06/2023	11	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ498786	2009
671	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	7500	Jl.Merdeka - Jaranguda Kec. Merdeka	Hak Pakai	09/08/2023	5	Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
672	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	567	Jl.Gang Sempurna Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/09/2024	34/HP/BPN-12.06/IX/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A1905205	2009
673	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	330	Jalan Kota Cane Gg Lau cimba Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	17	Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
674	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	500	Jl.Gang Tarigan Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/12/2022	74	Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
675	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	7800	Jl. Katepul - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	15/11/2022	66	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABH721357	2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
676	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	5000	Sp.Bulan Baru-Bulan Baru Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	21/12/2021	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037443	2009
677	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	18426	Jl.Bulan Julu-Pertumbuken Kec. Barusjahe	Hak Pakai	28/03/2022	5	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037916	2009
678	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5600	Jl. Sudirman - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	17	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840686	2007
679	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	4800	Jl. Kolam Renang Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	14	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961186	2009
680	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2400	Jl. Perwira - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	16	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840688	2007
681	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	13000	Sp.Singa-Singa Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	30/03/2023	25	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461332	2009
682	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3500	Jl. Kapt. Upah Tendi Sebayang - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	19	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840725	2007
683	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Gg. Bakti Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	31/05/2023	32	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461698	2007
684	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	6300	Jl. Pahlawan - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	09/02/2022	40	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037644	2007
685	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	8029	Barung Kersap Sp.Kabanjahe Kec. Munthe	Hak Pakai	23/12/2021	3	Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
686	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	7200	Jl. Selamat Ketaren - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	26	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840690	2007
687	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2008	5600	Jl. Kapt. Bom Ginting - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840709	2008
688	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	6400	Jl. Let. Rata Perangin - angin Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	25	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840689	2007
689	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Jl. Milala - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/04/2023	30	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461334	2007
690	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	6000	Jalan Nabung Surbakti Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	17	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840734	2009
691	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2000	Jl. Sekata - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/04/2023	80	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461324	2007
692	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Jl. Nusa Indah - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	41	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840739	2007
693	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2100	Jl. Pasar Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	12	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961248	2007
694	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Jl. Padang Mas Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	25	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840735	2007
695	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	62400	Lau Gendek - Kubu Colia Kec. Dolat Rakyat	Hak Pakai	26/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037628	2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
696	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1100	Jl. Bhayangkara - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	29/05/2023	31	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461634	2007
697	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	700	Jl. Stadion Lama - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	09/08/2023	44	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ499053	2007
698	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Jl. Sisingamangaraja - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	9	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840702	2007
699	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Jalan Gg. Aman - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/04/2023	29	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461335	2007
700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Jl. Kesehatan - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	40	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840740	2007
701	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	61600	Berastagi - Simpang Empat Kec. Berastagi/Simpang Empat	Hak Pakai	09/06/2021	11	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961270	2007
702	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1600	Jl. Pasar Buah Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	15	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961185	2007
703	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1400	Jl. Kristen - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	10	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840700	2007
704	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	29400	Desa Manuk Mulia - Lau Riman Kec. Tigapanah	Hak Pakai	29/05/2023	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461641	2007
705	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Jl. Muli Br Sebayang - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	18	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840732	2007
706	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5600	Jl. Mesjid- Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	5	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840744	2007
707	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1500	Jl.Gundaling Indah I dan II Kec.Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	12	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961188	2009
708	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	4200	Jl. Sukaraja Munte - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	11	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840701	2007
709	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	900	Jl. Bambu Runcing - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	24	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840736	2007
710	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	4800	Jl. Wagimin - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	16	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840737	2007
711	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	6400	Jl. Let. Mumah Purba - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	26	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840720	2007
712	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2800	Jl. Abdul Kadir - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	13	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840682	2007
713	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	21000	Jl.Sp.Melas - Melas	Hak Pakai	26/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037678	2009
714	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1290	Jl.Rumah Kuta Desa Singgamanik Kec. Munte	Hak Pakai	06/03/2025	69/HP/BPN-12.06/III/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		2009

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
715	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	25000	Sp. Lingga Julu-Lingga Julu - Gurusinga Kec. Simpang Empat	Hak Pakai	30/12/2021	13	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037506	2009
716	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	11000	Jl.Penampen - Siberteng Kec. Barusjahe	Hak Pakai	26/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037629	2010
717	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	26000	Jl.Doulu - Semangat Gunung	Hak Pakai	18/01/2022	1	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037544	2009
718	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	25000	Jl.Desa Payung	Hak Pakai	18/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037541	2009
719	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	6500	Jl.Sp.Basam - Basam Kec. Dolat Rayat	Hak Pakai	21/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037617	2009
720	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	1426	Pembangunan Jalan Gg. Rumah Mbelin Rs. Flora Kabanjahe Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/09/2024	23/HP/BPN-12.06/IX/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A0632488	2013
721	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1350	Jl.Puskesmas Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	21	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961264	2010
722	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1237	Gang.Persada Indah Kabanjahe	Hak Pakai	12/09/2024	31/HP/BPN-12.06/IX/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A1973483	2010
723	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Jl.Kotacane Gang.Gereja Kabanjahe	Hak Pakai	01/11/2022	11	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABH721354	2010
724	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	750	Gang Berahmana,Jl.Terang Indah III dan Lr.II Kabanjahe	Hak Pakai	31/05/2024	89	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABN569227	2010
725	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	34000	Kuta Mbelin - Kuta Gugung Kec.Juhar	Hak Pakai	19/10/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABH699793	2007
726	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1500	Jl.Pala Bangun Gang Murai Kabanjahe	Hak Pakai	26/12/2022	73	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446604	2010
727	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1300	Jalan Ke TPU Kabanjahe	Hak Pakai	14/02/2025	23/HP/BPN-12.06/II/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
728	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Sp.Sugihen - Suka Babo Kec. Juhar	Hak Pakai	19/10/2022	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABH699796	2007
729	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	14250	Tiga Binanga - Kuta Galuh Kec.Tigabinanga	Hak Pakai	12/01/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037538	2007
730	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	7500	Sp.Kuta raya - Kuta raya Kec.Tigabinanga	Hak Pakai	17/01/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037571	2007
731	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	7500	Sp.Gunung - Gunung Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	12/01/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037532	2007
732	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	9000	Sp.Perlamben - Perlamben Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	12/01/2022	1	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037535	2007
733	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	8500	Sp.Pergendangen - Pergendangen Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	12/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037530	2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
734	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	21600	Tiga Binanga - Kuta Mbelin Kec.Tigabinanga	Hak Pakai	18/01/2022	217	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037556	2007
735	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5500	Bertah - Kuta Suah Kec.Munte	Hak Pakai	31/05/2023	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461701	2007
736	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2012	25000	Jl Jalur Evakuasi Payung,Batukarang,Rimokayu,Kutasuah, Kec.Payung/Munte	Hak Pakai	31/05/2023	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461699 (Jalan Desa Kutasuah)	2012
737	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Barungkersap-Biak Nampe Kec. Munte	Hak Pakai	18/01/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037542	2007
738	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2011	7500	Jl. Sp. Suka Julu - Suka Julu Kec. Barusjahe	Hak Pakai	07/04/2022	7	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW055043	2011
739	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	35100	Munte - Munte Kec.Munte	Hak Pakai	17/01/2022	18	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037572	2007
740	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Nageri - Nageri Kec.Juhar	Hak Pakai	01/11/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABH699965	2007
741	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Negeri Kutasuah Kec. Munte	Hak Pakai	31/05/2023	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461700	2007
742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	26650	Sp.Ergaji - Sp.Sukamandi Kec. Merek	Hak Pakai	26/01/2022	1	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037674	2007
743	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	23540	Sp.Pertibitembe - Pertibitembe Kec.Merek	Hak Pakai	23/10/2023	3	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
744	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	35000	Sp.Tangkidik - Tiga jumpa Kec.Barusjahe	Hak Pakai	07/04/2022	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW055063	2007
745	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	13887	Sp.Talimbaru - Batas Kab.Simalungun Kec.Barusjahe	Hak Pakai	13/12/2023	5	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
746	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25000	Sukanalu - Sp.Kubucolia Kec. Barusjahe/Dolat rakyat	Hak Pakai	20/04/2022	5	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW055130	2007
747	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	9000	Serdang - Penampen Kec.Barusjahe	Hak Pakai	18/01/2022	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037529	2007
748	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	16000	Kabung - Tanjung Barus Kec. Barusjahe	Hak Pakai	26/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037672	2007
749	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	500	Gg. Lau Bawang Kel. Padang Mas Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	38	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446600	2013
750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	30000	Sp. Kabantua-Sukamaju Kec. Munte	Hak Pakai	26/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037640	2007
751	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	13500	Sp.Sukajulu - Sp.Kubucolia Kec.Barusjahe/Dolat Rakyat	Hak Pakai	26/01/2022	6	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037665	2007
752	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	28000	Munte - Sukababo Kec.Munte	Hak Pakai	23/12/2021	15	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037423	2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
753	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	13000	Pembangunan Jalan Barusjahe-Serdang Kec. Barusjahe	Hak Pakai	26/01/2022	5	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037664	2007
754	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	30,972	Tigajumpa - Bulanjahe Kec. Barusjahe	Hak Pakai	07/04/2022	4	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
755	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	13449	Penampen - Siberteng Kec. Barusjahe	Hak Pakai	24/03/2023	4	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
756	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	8000	Siberteng - Sp.Siberteng Kec. Barusjahe	Hak Pakai	24/03/2022	5	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037904	2007
757	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15466	Sp.Bandar Meriah - Biak nampe Kec. Munthe	Hak Pakai	29/05/2023	3	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
758	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	14000	Sukarame-Barung Kersap Kec. Munte	Hak Pakai	23/12/2021	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037107	2007
759	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	8500	Tigajumpa - Barusjahe Kec. Barusjahe	Hak Pakai	24/03/2022	10	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037908	2007
760	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	6400	Jalan Letnan Rata Perangin?angin Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	25	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840689	2014
761	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	5000	Bunuraya - Bunuraya Baru Kec. Tigapanah	Hak Pakai	29/05/2023	6	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461637	2014
762	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	9250	Sp.Sinaman - Batas Kab.Simalungun Kec. Barusjahe	Hak Pakai	13/12/2023	5	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ558682	2007
763	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	30800	Kutambelin - Juhar Kec. Juhar	Hak Pakai	04/08/2022	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABE367923	2014
764	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	2500	Pasar Roga ke Perumahan Korpri Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	6	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961261	2014
765	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2015	720	Jalan SMK ALQAROMAH Kec. Berastagi	Hak Pakai	26/06/2023	9	Jalan Kabupaten	Pembelian		2015
766	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	21450	Munte - Tanjung Beringin Kec. Munte	Hak Pakai	18/01/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037533	2007
767	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2015	255	Jalan SMA Negeri 1 Barusjahe Kec. Barusjahe	Hak Pakai	09/08/2023	8	Jalan Kabupaten	Pembelian		2015
768	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	45500	Tanjung Beringin - Kuta mbaru Kec. Munte	Hak Pakai	18/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037527	2007
769	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Gg. Darta Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	11	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961247	2007
770	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2872	Merdeka - Jaranguda Kec. Merdeka	Hak Pakai	09/08/2023	5	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
771	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	27000	Munte-Pertumbungen Kec. Munte	Hak Pakai	18/01/2022	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037528	2007
772	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	16380	Sp.Puncak2000(1) - Puncak 2000 Kec. Tigapanah	Hak Pakai	23/09/2023	7	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
773	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Sp.Sinaman - Suka Kec.Tigapanah	Hak Pakai	28/12/2021	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037411	2007
774	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	565	Gg. Harapan I Kec. Berastagi	Hak Pakai	08/06/2021	10	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
775	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2750	Gg. Dharma Bakti Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	14	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961262	2007
776	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	22800	Tiga Panah - Seberaya	Hak Pakai	18/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037554	2007
777	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	12500	Seberaya - Kubucolia Kec. Tigapanah/Dolat Rayat	Hak Pakai	29/05/2023	6	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461632	2007
778	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	19000	Kacinambun - Lauriman Kec.Tigapanah	Hak Pakai	26/06/2023	6	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ498793	2007
779	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	9000	Pembangunan Jalan Sp. Ajijahe-Ajijahe Kec. Tigapanah	Hak Pakai	26/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037634	2007
780	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	28600	Sp.Singa - Kutambelin Kec. Tigapanah	Hak Pakai	26/06/2023	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ498789	2007
781	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	7500	Singa - Lau Simomo Kec.Tigapanah/Kabanjahe	Hak Pakai	29/05/2023	6	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461646	2007
782	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	29250	Ujung Aji - Aji Mbelang Kec. Tigapanah	Hak Pakai	07/01/2022	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037515	2007
783	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	24200	Gongsol - Cinta Rayat Kec. Merdeka	Hak Pakai	23/12/2021	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037383	2007
784	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	11000	Suka Dame - Suka Kec. Tigapanah	Hak Pakai	07/04/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW055065	2007
785	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25500	Barung Kersap-Kuta Mbaru Kec.Munte	Hak Pakai	18/01/2022	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037555	2007
786	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	27300	Kutambelin - Kacinambun Kec. Tigapanah	Hak Pakai	04/04/2023	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461327	2007
787	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15000	Barong Kersap - Sp.Barong Kersap Kec. Tigapanah/ Munte	Hak Pakai	23/12/2021	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037106	2007
788	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	32100	Salit - Kubu Simbelang Kec. Tigapanah	Hak Pakai	07/04/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW055062	2007
789	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	9936	Bandar Tongging - Naga Tongging Kec. Merek	Hak Pakai	13/12/2023	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ558683	2007
790	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	9285	Selakar-Gunung Manumpak Kec.Munte	Hak Pakai	14/02/2025	'25/HP/BPN-12.06/II/2025 & 24/HP/BPN-12.06/II/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
791	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1995	16617	Munte - Buluhnaman Kec. Munte	Hak Pakai	06/03/2025	51/HP/BPN-12.06/III/2025, 24/HP/BPN-12.06/II/2025 57/HP/BPN-12.06/II/2025,	Jalan Kabupaten	Pembelian		1995
792	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1995	10000	Kuta Gugung - Batu Mamak Kec. Juhar	Hak Pakai	26/01/2022	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABE367921	1995
793	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	21600	Pembangunan Jalan Bunuraya Salit Kec. Tigapanah	Hak Pakai	28/12/2021	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037417	2007
794	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/1994	5500	Sp.Gunung saribu - Gunung saribu Kec. Munte	Hak Pakai	24/03/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037906	1994
795	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	32100	Salit - Aji Nembah Kec. Tigapanah/Merek	Hak Pakai	26/01/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037630	2007
796	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/1995	10000	Sp. Susuk - Susuk Kec. Tiganderket	Hak Pakai	08/12/2021	5	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW036763	1995
797	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1995	42000	Sp. Bukit - Sp. Bertah Kec. Dolat Rakyat	Hak Pakai	26/01/2022	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037641	1995
798	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	19000	Suka - Salit Kec. Tigapanah	Hak Pakai	30/12/2021	2	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037512	2007
799	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Kembang - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	25/08/2022	24	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABE367925	2007
800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/1994	19800	Sp. Jandi Meriah - Sp. Tiga Batu Karang Kec. Tiganderket/Payung	Hak Pakai	18/01/2022	6	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037537	1994
801	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	505	Gg. Pelita - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	31/05/2024	87	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABN569225	2007
802	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	973	Gg. Mariam Ginting - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	31/05/2024	88	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABN569226	2007
803	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1991	6993	Munte-Parimbalang Kec.Munte	Hak Pakai	06/03/2025	'32/HP/BPN-12.06/III/2025	Jalan Kabupaten	Pembelian		1991
804	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/1993	11949	Sp.Pertibilama - Pertibilama Kec. Merek	Hak Pakai	08/11/2023	5	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ558024	1993
805	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15400	Tiga Panah - Suka Kec. Tigapanah	Hak Pakai	24/03/2022	1	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037905	2007
806	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Gg. Rejeki - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/08/2022	64	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABE367918	2007
807	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Gg. Lima Merga - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	35	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446598	2007
808	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	209	Gg. Abadi - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	37	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
809	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	750	Gg. Karya Darma - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/01/2022	36	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037626	2007
810	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Gg. Aman - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/01/2022	45	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037645	2007
811	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	446	Gg. Beringin - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/10/2023	45	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
812	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. 45 - Kota Kec.Kabanjahe	Hak Pakai	26/01/2022	39	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037657	2007
813	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	333	Gg. Tarigan II - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/12/2022	74	Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
814	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2000	Gg. Rukun - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/04/2023	23	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461330	2007
815	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Subur - Kota Kec. Kabanjhae	Hak Pakai	04/04/2023	84	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461326	2007
816	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Gg. Mejuah juah - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/01/2022	48	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037646	2007
817	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Liberti - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	15	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840723	2007
818	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Silalahi - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	22	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840733	2007
819	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	33750	Bintang Meriah - Perbesi Kec. Kutabuluh/Tigabinanga	Hak Pakai	08/03/2022	4	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037836	2007
820	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	9500	Sp. Jinabun - Jinabun Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	08/12/2021	3	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW036764	2007
821	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	275	Gg. Pengadilan - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	03/10/2024	37/HP/BPN-12.06/X/2024	Jalan Kabupaten	Pembelian	A0632881	2007
822	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Gg. Usaha Kita - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/04/2023	22	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461329	2007
823	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Gg. Kesehatan - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	20	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840697	2007
824	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Gg. Melati - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	23	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840694	2007
825	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Damai - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	13	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446596	2007
826	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Purba - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	17/12/2020	12	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAR840699	2007
827	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2000	Gg. 86 - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	04/04/2023	82	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ461325	2007

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
828	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	11000	Tanjung - Bintang Meriah Kec. Kutabuluh	Hak Pakai	08/03/2022	5	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037837	2007
829	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	9100	Sp. Ujung Aji - Ujung Aji Kec. Berastagi	Hak Pakai	09/06/2021	9	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAV961243	2007
830	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1250	Gg. Merpati - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/01/2022	20	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037647	2007
831	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Singkat - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/01/2022	28	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037666	2007
832	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	394	Gg. Lau Cimba - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	20	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ446580	2007
833	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	4865	Bulanjahe-Pertumbuken Kec. Barusjahe	Hak Pakai	13/12/2023	5	Jalan Kabupaten	Pembelian	ABJ558690	2007
834	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Air Minum - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai	26/01/2022	19	Jalan Kabupaten	Pembelian	AAW037654	2007
835	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	02/03/2021	1938	DESA REGAJI PERUMAHAN VILLA REGAJI	Hak Pakai	20/09/2023	02.06.13.17.4.00004	PERUMAHAN VILLA REGAJI	Hibah	PERUMAHAN VILLA REGAJI	2021
836	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Khusus/ Komplek	02/03/2021	3091	Desa Samura Perumahan Nuansa Asri II Desa Samura Kecamatan Kabanjahe	Hak Pakai	20/09/2023	02.06.06.08.4.00020	Perumahan Nuansa Asri II Samura	Hibah	Desa Samura Perumahan Nuansa Asri II Desa Samura Kecamatan Kabanjahe	2021
837	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Khusus/ Komplek	04/03/2021	1579	Desa Kacaribu Perumahan Nuansa Asri I Kec Kabanjahe	Hak Pakai	20/09/2023	02.06.06.03.4.00005	Jalan Perumahan Nuansa Asri I	Pembelian		2021
838	Sekretariat Daerah	LAPANGAN	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH	Tanah Utk Bangunan Bersejarah Lain-lain	22/09/1945	7150	Jl. Jamin Ginting di belakang Komp. Polisi Militer Desa Raya Kecamatan Berastagi	Hak Pakai	17/01/2025	NIB : 02.06.000003325.0 / 02.06.000003324.0 / 02.06.000003323.0	Bangunan Rumah Adat Karo	Hibah		1945
839	Dinas Sosial	LAPANGAN	TANAH UNTUK MAKAM	Tanah Untuk Makam Pahlawan	02/12/2016	11030	Jln Veteran Kabanjahe	Hak Pakai	23/12/2022	25	Pemakaman	Hibah		2016
840	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	LAPANGAN	TANAH UNTUK MAKAM	Tanah Untuk Makam Umum	23/11/2017	50000	Desa Salit Jalan Salit Desa Kutakepar Kec. Tigapanah	Hak Pengelolaan	17/07/2020	2	Tempat Pemakaman Umum	Pembelian		2017
841	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	LAPANGAN	TANAH UNTUK MAKAM	Tanah Untuk Makam Umum	28/06/2018	33860	Kabanjahe Jl. Irian Kabanjahe	Hak Pengelolaan	19/06/2020	2/3	Tempat Pemakaman Umum	Pembelian		2018
842	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LAPANGAN	TANAH KAMPUNG	Tanah Kampung	06/12/1995	8126	Desa Perbulan Kec. Laubaleng	Hak Pakai	29/03/1995	2	Tanah Kas Desa	Pembelian		1995
843	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LAPANGAN	TANAH KAMPUNG	Tanah Kampung	06/12/1995	31904	Desa Kutambarupunti Kec. Tigabinanga	Hak Pakai	29/03/1995	2	Tanah Kas Desa	Pembelian		1995

No.	Nama Perangkat Daerah	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
844	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LAPANGAN	TANAH KAMPUNG	Tanah Kampung	06/12/1995	6697	Desa Perbulan Kec. Laubaleng	Hak Pakai	29/03/1995	1	Tanah Kas Desa	Pembelian		1995
845	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta	LAPANGAN	TANAH KAMPUNG	Tanah Kampung	17/12/2019	180	Desa Pangambatan Kecamatan Merek	Hak Pakai	19/01/2021	4	Rumah Adat	Hibah		2019

Rincian Aset Tanah yang Belum Bersertifikat
Tahun 2025

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
1	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	31/12/1991	300	Desa Suka Sipilihen Kecamatan Tigapanah	Hak Pakai			SD Negeri 047162 Suka	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	1991
2	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	31/12/1951	150	Desa Lingga Julu Kecamatan Simpang Empat	Hak Pakai			SD Negeri 040470 Lingga Julu	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	1951
3	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	31/12/1974	504	Desa Munte Pasar Baru Dusun 3 Kecamatan Munte	Hak Pakai			SD Negeri 040507 Munte	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	1974
4	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	31/12/1990	200	Desa Kuala Kecamatan Tigabinanga	Hak Pakai			SD Negeri 044862 Kuta Buara	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	1990
5	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	31/12/1990	120	Desa Kuala Kecamatan Tigabinanga	Hak Pakai			SD Negeri 044862 Kuta Buara	Pembelian	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	1990
6	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	29/12/1978	450	Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka	Hak Pakai			SD Negeri 044830 Cinta Rayat	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	1978
7	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	30/12/1977	100	Desa Sukajulu Kecamatan Tigabinanga	Hak Pakai			SD Negeri 044865 Kutambaru Punti	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	1977
8	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	29/12/1977	102	Desa Sukajulu Kecamatan Tigabinanga	Hak Pakai			SD Negeri 044865 Kutambaru Punti	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	1977
9	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	31/12/1970	21	Jl. Rumah Rayat Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Rumah Dinas Dokter	Hibah	EX.TELKOM	1970

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
10	Sekretariat Daerah	TANAH PERSIL	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	22/09/1996	1080	Jl. Letnan Rata Perangin-angin No. 12 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe	Hak Pakai		-	Rumah Dinas Sekda	Hibah	Tanah Rumah Dinas Sekda Kab. Karo (Akte Pernyataan Kepemilikan No. 308 Tgl. 22 November 2016)	1996
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	Tanah Bangunan Pasar	31/12/1960	4710	Jl. Kutabuluh Desa Kutabuluh Kec. Kutabuluh (Akte Pernyataan Kepemilikan No. 310 Tgl. 22 November 2016, Akte Pernyataan Kepemilikan No. 311 Tgl. 22 November 2016)					Hibah		1960
12	Kecamatan Mardingding	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	09/04/1996	2907	Jl. Rakoetta S. Brahmana No. 54 Desa Mardingding Kec. Mardinding	Hak Pakai			Kantor dan Rumah Camat Mardinding	Hibah		1996
13	Kecamatan Kabanjahe	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	09/08/2006	54	Jl. Perumahan Rakyat No. 23 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Kantor Lurah Gung Negeri	Hibah	Kantor Lurah Gung Negeri	2006
14	Kecamatan Juhar	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	28/12/1970	1600	Jalan Juhar - Tigabinanga No. 45 Kec. Juhar	Hak Pakai		.	Kantor Camat Juhar	Hibah		1970
15	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01/12/2012	1000	Jl. Gurukinayan Kecamatan Payung (Akte Pernyataan Kepemilikan no. 306 tanggal 22 Nopember 2016	Hak Pakai			Tanah BPP Gurub Kinayan Kec. Payung	Hibah		2012
16	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/07/1997	9163	Desa Tigapancur Kecamatan Simpang Empat (Berita Acara tanggal 17 Oktober 1977	Hak Pakai			Tanah BPP Tiga pancur	Hibah		1997
17	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10/03/2009	2934	Desa Sukatepu Kecamatan Namanteran (Akte Hibah Nomor : 25/11/2009 Tanggal 04 Nopember 2009	Hak Pakai			Tanah BPP Desa Sukatepu Kecamatan Namanteran	Hibah		2009
18	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/2005	480	Kec. Juhar	Hak Pakai			UPTD JUHAR	Hibah		2005
19	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31/12/2012	240	Jl. Veteran Gg. Bakti Kabanjahe	Hak Pakai			Cabdis Kabanjahe Dinas Pendidikan	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	2012

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	07/10/1980	1000	Jl. Singarimbun Desa Tiganderket Kec. Tiganderket (Akte Pernyataan Kepemilikan No. 28 Tgl. 05 Desember 2015)	Hak Pakai			Pasar Tiganderket	Pembelian		1980
21	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/07/1998	336	Jl. Sudirman Komplek Konen No. 8A, Kel. gung Leto, Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Kantor Sekretariat Kwartir Cabang Karo	Penyerahan		1998
22	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1999	2000	Desa Doulu Kec. Berastagi (Surat Keterangan Nomor : 134.SK/DLIV/2013 Tanggal : 04 April 2013)	Hak Pakai			SD. 046411 Doulu	Hibah	(Surat Keterangan Nomor : 134.SK/DLIV/2013 Tanggal : 04 April 2013) Plank	1999
23	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1983	5000	Perum Korpri Desa Gurusinga Kec. Berastagi	Hak Pakai			SDN 047161 Korpri	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	1983
24	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1975	724	Jl. Lingkungan Desa Seberaya Kec. Tigapanah	Hak Pakai			Tanah SD 043937 Seberaya	Pembelian		1975
25	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	29/12/1989	10000	Desa Lau Simomo Kecamatan Kabanjahe	Hak Pakai			SD Negeri 040466 Lau Simomo	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	1989
26	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1948	2516	Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			SDN No. 040450 Kabanjahe	Hibah		1948
27	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1972	2734	Asrama Batalion 125 Simbisa Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			SD 040451 Kabanjahe	Hibah		1972
28	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1978	4675	Komplek Yon 125 Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			SD 040444 Kabanjahe	Hibah		1978
29	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1987	2000	Desa Kandibata Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			SD. 044827 Kandibata	Hibah	(Surat Keterangan No.422.8/SDI/87)Plank	1987
30	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1991	1500	Desa Suka Mbayak Kecamatan Tigapanah	Hak Pakai			SD Negeri 047162 Suka	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	1991
31	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1997	3500	Kel. Mbal-mbal Petarum Kec. Laubaleng	Hak Pakai			SD. 048475 Galunggung	Hibah		1997

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
32	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2005	6140	Desa Perbulan Kec. Laubaleng	Hak Pakai			SD. 047180 Perbulan	Hibah		2005
33	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	11/10/2019	5000	Desa Kutatengah Kecamatan Simpang Empat	Hak Pakai			SD Negeri 040475 Tigaserangkai	Hibah	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Nomor 58 (limapuluh delapan) tanggal 11 Oktober 2019 (Berita Acara Kurang Catat Aset Tetap Tanah Nomor 420/ 7129 /Sek.1/2021)	2019
34	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2008	6400	Dusun Janji Matogu Desa Laupakam Kec. Mardingding (Surat Keterangan Nomor : 470/90/SK/2013 Tanggal : 04 Maret 2013)	Hak Pakai			SSDN 047182 Laupakam	Hibah	(Surat Keterangan Nomor : 470/90/SK/2013 Tanggal : 04 Maret 2013)	2008
35	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1976	4288	Jl. Nagerijahe Desa Gunung Meriah Kec. Kutabuluh	Hak Pakai			SDN 044845 Payanderket	Hibah		1976
36	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1984	2400	Desa Polatebu Kec. Kutabuluh	Hak Pakai			SD. 044845 Negerijahe	Hibah		1984
37	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1975	2024	Desa Kutamale Kec. Kutabuluh	Hak Pakai			SD. 044847 Kutamale	Hibah		1975
38	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1987	1615,5	Desa Tanjung Merahe Kec. Kutabuluh (Surat Keterangan Nomor : 065/SDS/056.10/P.8 7 Tanggal : 07 Pebruari 1987)	Hak Pakai			SDN.046414 Tj. Merahe	Hibah	(Surat Keterangan Nomor : 065/SDS/056.10/P .87 Tanggal : 07 Pebruari 1987)	1987
39	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1982	2073	Desa Ujung Deleng Kec. Kutabuluh (Surat Keterangan Nomor : 471/70/UD/2013 Tanggal : Maret 2013)	Hak Pakai			SD. 047177 Ujung Deleng	Hibah		1982
40	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	30/09/1999	4500	Desa Rih Tengah Kec. Kutabuluh	Hak Pakai			SD NEGERI 046414 TANJUNG MERAHE	Hibah		1999

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
41	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1972	5433,75	Desa Tanjung Beringin Kec. Munte	Hak Pakai			SD. 040513 Bungancole	Hibah		1972
42	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2012	2000	Desa Kuta Gerat Kecamatan Munte	Hak Pakai			SD Negeri 040577 Kuta Gerat	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	2012
43	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	29/12/2005	1000	Desa Kidupen Kec. Juhar	Hak Pakai			SD. 040565 KIDUPEN	Hibah		2005
44	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1945	2225	Desa Laulingga Kec. Juhar	Hak Pakai			SD. 040566 LAU LINGGA	Hibah		1945
45	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2012	1500	Desa Naga Kecamatan Juhar	Hak Pakai			SD Negeri 044859 Ketawaren	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	2012
46	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	30/12/1977	2250	Desa Situnggaling Kec. Merek	Hak Pakai			SD. 043936 MEREK SITUNGGALING	Hibah		1977
47	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/2011	1500	Jl. Tiganderket Kec. Tiganderket (Akte Pernyataan Kepemilikan No. 64 Tgl. 13 Desember 2016)	Hak Pakai			TK NEGERI	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 64 Tgl. 13 Desember 2016)	2011
48	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1982	3000	Dusun II Tongkoh Desa Dolatrayat Kec. Dolatrayat (Surat Keterangan Nomor : 642.2/569/DR/2013 Tanggal : 08 Oktober 2013)	Hak Pakai			SD. 047171 BASAM	Hibah	(Surat Keterangan Nomor : 642.2/569/DR/2013 Tanggal : 08 Oktober 2013) (Plank)	1982
49	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1974	5900	Jl. Berastepu-Gamber Komp. Tiga Serangkai Desa Gamber Kec. Simpang Empat (Surat Keterangan Nomor : 041/SK/III/2013 Tanggal : 27 Maret 2013)	Hak Pakai			SMP 1 Simpangempat	Hibah	(Fotocopy Surat Penyerahan Hak) Plank	1974
50	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1990	10732	Desa Sigarang-garang Kec. Namanteran (Akte Hibah Nomor : 49/PPAT/VII/1990 Tanggal : 17 Juli 1990)	Hak Pakai			SMPN 1 Namanteran	Hibah	(Akte Hibah Nomor : 49/PPAT/VII/1990 Tanggal : 17 Juli 1990) (Plank)	1990

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
51	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	30/12/2016	20000	Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran	Hak Pakai			SMP NEGERI 1 NAMAN TERAN	Hibah	Kurang Catat sesuai Hasil Inventarisasi Aset 2023	2016
52	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1963	2750	Jl. Juhar-Tigabinanga Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga (Surat Keterangan Nomor : 593/246/PRG/2013) Tanggal : 19 Agustus 2013)	Hak Pakai			SMP 1 TIGA BINANGA	Hibah	(Surat Keterangan Nomor : 593/246/PRG/2013) Tanggal : 19 Agustus 2013)	1963
53	Dinas Pendidikan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	31/12/1967	67,5	Jl. Juhar-Tigabinanga Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			SMP 1 TIGABINANGA	Hibah		1967
54	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2005	200	Desa Bekerah (Zona Relokasi) Kec. Namanteran	Hak Pakai			Pustu Bekerah	Hibah	(Berita Acara Penyerahan Pertapakan Gedung Puskesmas Pembantu Bekerah Nomor : 146/SKV/1991 Tanggal : 08 Mei 1991)	2005
55	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2005	80	Desa Sigarang-garang Kec. Namanteran	Hak Pakai			Pustu Sigarang-garang	Hibah	Pustu Desa Sigarang-garang	2005
56	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2005	194	Desa Gung Pinto Kec. Namanteran	Hak Pakai			Pustu Gung Pinto	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 130 Tgl. 09 November 2016)	2005
57	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1995	75	Desa Kutatonggal Kec. Namanteran	Hak Pakai			Pustu Kutatonggal	Hibah	Pustu Desa Kutatonggal	1995
58	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1992	375	Desa Sukanalu Teran Kec. Namanteran	Hak Pakai			Pustu Sukanalu	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 126 Tgl. 09 November 2016)	1992
59	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	26/08/2005	259	Dusun Dalanjahe Desa Kutarayat Kec. Namanteran	Hak Pakai			Pustu Dalanjahe	Hibah	Pustu Dusun Dalanjahe	2005
60	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/10/1985	386	Desa Singa Kec. Tigapanah	Hak Pakai			Puskesmas Singa	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 67 Tgl. 03 Agustus 2016)	1985

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
61	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	07/12/2005	1975	Desa Dolatrayat Kec. Dolatrayat	Hak Pakai			Puskesmas Dolatrayat	Hibah	Puskesmas Dolat Rayat	2005
62	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	05/12/2007	131	Desa Semangat Gunung Kec. Merdeka	Hak Pakai			Pustu Desa Semangat Gunung	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 119 Tgl. 08 November 2016)	2007
63	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2000	200	Desa Kutambarupunti Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Pustu Desa Kutambarupunti	Hibah	Pustu Desa Kutambarupunti	2000
64	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1937	600	Jl. Besar Tigabinanga Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Pusk.Tigabinanga	Hibah	SWADAYA	1937
65	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1980	300	Jl. Kutacane-Tigabinanga Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Pusk. Atas Tigabinanga	Hibah	Puskesmas Atas Tigabinanga	1980
66	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	26/08/1996	150	Desa Kutabuara Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Pustu Kutabuara	Hibah	Pustu Desa Kutabuara	1996
67	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2004	105	Desa Kuala Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Pustu Desa Kuala	Hibah	Pustu Desa Kuala	2004
68	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2008	300	Desa Gunung Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Pustu Desa Gunung	Hibah	Pustu Desa Gunung	2008
69	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1996	199	Desa Batumamak Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Pustu Batumamak	Hibah	Pustu Desa Batu Mamak	1996
70	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2000	299	Desa Bunga Baru Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Pustu Desa Bunga Baru	Hibah	ABN542268	2000
71	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/2000	287	Desa Pergendangen Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Pustu Desa Pergendangen	Hibah	Pustu Desa Pergendangen	2000
72	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1980	450	Desa Simpang Keriahen Kec. Juhar	Hak Pakai			Pustu Desa Simpang Keriahen	Hibah	Pustu Desa Simpang Keriahen	1980
73	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1996	189	Desa Mbetung Kec. Juhar	Hak Pakai			Pustu Desa Mbetung	Hibah	(Berita Acara Serah Terima Tanah Pertapakan Tanggal : 24 April 1996)	1996

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
74	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1991	143	Desa Kidupen Kec. Juhar	Hak Pakai			Pustu Desa Kidupen	Hibah	(Surat Penyerahan Tanah-Tapak Tanggal : 05 Maret 1991)	1991
75	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1975	2280	Jl. Juhar-Tigabinanga Desa Juhar Perangin-angin Kec. Juhar	Hak Pakai			Puskesmas Juhar	Hibah	SWADAYA (Akte Pernyataan Kepemilikan No. 142 Tgl. 23 Juni 2016)	1975
76	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1991	280	Desa Sugihen Kec. Juhar	Hak Pakai			Pustu Desa Sugihen	Hibah	(Surat Penyerahan Tapak Tanggal : 28 Februari 1991)	1991
77	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1980	90	Desa Sukababo Kec. Juhar	Hak Pakai			Pustu Desa Sukababo	Hibah	Pustu Desa Sukababo	1980
78	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1990	360	Desa Ketawaren Kec. Juhar	Hak Pakai			Pustu Desa Ketawaren	Hibah	Pustu Desa Ketawaren	1990
79	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1990	50	Desa Pernantin Kec. Juhar	Hak Pakai			Pustu Pernanyinn	Hibah	Pustu Desa Pernantin	1990
80	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/05/2019	45	Desa Gunung Juhar	Hak Pakai			Pustu Gunung Juhar	Hibah	Surat Pernyataan Hibah No.. 470/02/GJ/2019 Tgl 31 Mei 2019	2019
81	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	11/12/2007	200	Desa Payambelang Kec. Laubaleng	Hak Pakai			Pustu Paya Mbelang	Hibah	Pustu Desa Payambelang	2007
82	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/2009	390	Dusun R. Galonggong Desa Mbal-mbal Petarum Kec. Laubaleng	Hak Pakai			Pustu. R. Galonggong	Hibah	Pustu dusun R.Galonggong	2009
83	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/2008	250	Desa Pintu Angin Kec. Laubaleng	Hak Pakai			Pustu Pintu Angin	Hibah	Pustu Desa Pintu Angin	2008
84	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	05/12/2000	2731	Desa Laubaleng Kec. Laubaleng	Hak Pakai			Puskesmas Laubaleng	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 146 Tgl. 24 Juni 2016)	2000

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
85	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	11/03/1991	200	Desa Rampahtampu Kec. Laubaleng (Surat Penyerahan Tanah Tapak Tanggal : 11 Maret 1991)	Hak Pakai			Pustu Desa Rampahtampu	Pembelian	Koreksi Pencatatan dari Puskesmas Mardinding (Surat Penyerahan Tanah Tapak Tanggal : 11 Maret 1991)	1991
86	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/1991	300	Desa Laupakam Kec. Mardingding	Hak Pakai			Pustu Desa Lau pakam	Hibah	(Surat Penyerahan Tanggal : 08 Mei 1996)	1991
87	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	26/08/1991	800	Daerah Tigajumpa Desa Barusjahe Kec. Barusjahe	Hak Pakai			Pusk. Tigajumpa	Hibah	Pustu Tigajumpa	1991
88	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1979	365	Desa Singgamanik Kec. Munte	Hak Pakai			Pustu. Singgamanik	Hibah	Pustu Desa Singgamanik Kec.Munte	1979
89	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1990	152	Desa Tanjung Beringin Kec. Munte	Hak Pakai			Pustu Tanjung Beringin	Hibah	Pustu Desa Tanjung Beringin	1990
90	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	23/02/1976	165	Desa Bintang Meriah Kec. Kutabuluh	Hak Pakai		.	Pustu Bintang Meriah	Hibah	Surat Penyerahan Hak/Hibah dari Kepala Desa Bintang Meriah tertanggal 01 April 2024	1976
91	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	23/12/1985	160	Desa Kutamale Kec. Kutabuluh	Hak Pakai			Pustu Kutamale	Hibah	(Akte Tukar Menukar No. 147 Tgl. 29 Maret 2016)	1985
92	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	21/02/1994	200	Desa Mburidi Kec. Kutabuluh	Hak Pakai			Pustu Mburidi	Hibah	Pustu Desa Mburidi	1994
93	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	24/12/1979	224	Desa Negeri Jahe 1 Kec. Kutabuluh	Hak Pakai			Pustu Negeri Jahe I	Hibah	Pustu Desa Negeri Jahe I	1979
94	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	10/12/1980	200	Desa Rumah Kabanjahe Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Pustu Rumah Kabanjahe	Hibah	Pustu Rumka Kec.Kabanjahe	1980
95	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	10/12/1980	400	Desa Lausimomo Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Pustu Lau Simomo	Hibah	Pustu Lau Simomo Kec.Kabanjahe	1980
96	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	12/12/2000	126	Desa Garingging Kec. Merek	Hak Pakai			Pustu Garingging	Hibah	Pustu Desa Garingging	2000

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
97	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	12/12/2000	50	Jl. Desa Bandar Tongging Desa Bandar Tongging Kec. Merek	Hak Pakai			Pustu Bandar Tongging	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 366 Tgl. 30 November 2016)	2000
98	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	12/12/2000	78	Desa Negeri Tongging Kec. Merek	Hak Pakai			Pustu Negeri Tongging	Hibah	Pustu Desa Negeri Tongging	2000
99	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	09/12/1991	300	Desa Ajinembah Kec. Merek	Hak Pakai			Pustu Ajinembah	Hibah	(Berita Acara Tanggal : 15 Mei 1991)	1991
100	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	09/12/1993	231	Dusun Aek Hotang Desa Pangambatan Kec. Merek	Hak Pakai			Pustu Aek Hotang	Hibah	Pustu Dusun aek Hotang Desa Pangambatan	1993
101	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	09/12/1993	15	Desa Mulia Rayat Kec. Merek	Hak Pakai			Pustu Mulia Rayat	Hibah	Pustu Desa Mulia Rayat	1993
102	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	11/12/1984	988	Desa Partibi Lama Kec. Merek	Hak Pakai			Pustu Partibi Lama	Hibah	(Surat Keterangan Tanggal : 20 Juni 1985)	1984
103	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	18/12/2007	40	Desa Regaji Kec. Merek	Hak Pakai			Pustu Regaji	Hibah	Pustu Desa Regaji	2007
104	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	30/11/1991	150	Dusun Doulu Kuta Desa Doulu Kec. Berastagi	Hak Pakai			Pustu Doulu Kuta	Hibah	Tanah Pertapakan Rumah Dinas	1991
105	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	29/11/1985	747,15	Jl. Veteran Kel. Gundaling I Kec. Berastagi (Akte Pernyataan Kepemilikan No. 141 Tgl. 23 Juni 2016)	Hak Pakai			Pusk.Berastagi	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 141 Tgl. 23 Juni 2016)	1985
106	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	18/12/1991	217	Desa Bulanbaru Kec. Simpang Empat	Hak Pakai			Pustu Desa Bulanbaru	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 133 Tgl. 09 November 2016)	1991
107	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	22/12/1991	300	Desa Lingga Kec. Simpang Empat	Hak Pakai			Pustu Desa Lingga	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 127 Tgl. 09 November 2016)	1991
108	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	19/02/1993	116	Desa Beganding Kec. Simpang Empat	Hak Pakai		.	Pustu Desa Beganding	Hibah	Pustu Desa Beganding Kec.Simpang Empat	1993

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
109	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	22/12/1993	300	Desa Gamber Kec. Simpang Empat	Hak Pakai			Pustu Gamber	Hibah	Pustu Desa Gamber Kec.Simpang Empat	1993
110	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	22/12/1993	300	Desa Berastepu Kec. Simpang Empat	Hak Pakai			Pustu Berastepu	Hibah	(Berita Acara Serah Terima Pertapakan Tanggal : 03 April 1993)	1993
111	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	31/12/1976	200	Desa Payung Kec. Payung	Hak Pakai			Pusk.Payung	Hibah	Puskesmas Payung	1976
112	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	25/08/1991	90	Desa Gurukinayan Kec. Payung	Hak Pakai			Pustu Gurukinayan	Hibah	Pustu Desa GurukinayanKec.Payung	1991
113	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	30/09/1998	300	Desa Suka Meriah Kec. Payung	Hak Pakai			Pustu Sukameriah	Hibah	Pustu Desa Sukameriah Kec.Payung	1998
114	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	15/05/2023	1500	Desa Batukarang Kec. Payung	Hak Pakai			Puskesmas Batukarang	Hibah	Pembangunan Puskesmas di Desa Batukarang Kec. Payung	2023
115	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	09/12/1998	200	Desa Mardingding Kec. Tiganderket (Surat Penyerahan Tanggal : 10 April 1991)	Hak Pakai			Pusk.Mardingding	Hibah	(Surat Penyerahan Tanggal : 10 April 1991)	1998
116	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	06/12/2006	60	Desa Perbaji Kec. Tiganderket	Hak Pakai			Pustu Desa Perbaji	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 114 Tgl. 08 November 2016)	2006
117	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	06/09/2006	75	Desa Tanjung Merawa Kec. Tiganderket	Hak Pakai			Pustu Tanjung Merawa	Hibah	Pustu Desa Tanjung Merawa	2006
118	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	11/12/1991	550	Desa Kutambaru Kec. Tiganderket	Hak Pakai			Pustu Kutambaru	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 99 Tgl. 07 November 2016)	1991
119	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	08/12/1993	42	Desa Susuk Kec. Tiganderket	Hak Pakai			Pustu Susuk	Hibah	Pustu Desa Susuk Kec.Tiganderket	1993
120	Dinas Kesehatan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	09/12/2007	75	Desa Temburun Kec. Tiganderket	Hak Pakai			Pustu Temburun	Hibah	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 115 Tgl. 08 November 2016)	2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
121	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kandang Hewan	30/12/2013	12000	Jl. Desa Suka Desa Tigapanah Kec. Tigapanah (Akte Hibah Nomor : 109/12/1983 Tanggal : 26 Desember 1983)	Hak Pakai			Pasar Hewan	Hibah		2013
122	Dinas Pertanian	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kandang Hewan	30/12/2009	16500	Desa Sukarame Kec. Munte	Hak Pakai			Pasar Hewan	Hibah		2009
123	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	31/12/1981	600	Desa Doulu Pasar Kec. Berastagi	Hak Pakai		-/--	Pos Jaga	Hibah		1981
124	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TANAH PERSIL	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	21/05/1982	600	Jl. Kabanjahe-Sidikalang Desa Merek Kec. Merek (Berita Acara Penerimaan/Pembayaran Uang Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak atas Tanah Tanggal : 10 September 1976)	Hak Pakai		-	Pos Pengutipan Retribusi	Pembelian		1982
125	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	TANAH PERSIL	TANAH PERSIL LAIN-LAIN	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	11/09/2025	20000	Desa Kutambelin, Kec. Lau Baleng	Hak Pakai			Taman Wisata dan Rekreasi	Hibah	Lahan Monumen Patung Jokowi	2025
126	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	TANAH NON PERSIL	TANAH BASAH	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	31/07/1976	8103	Desa Bandar Purba Kec. Mardingding	Hak Pakai		-	Lahan Pertanian	Pembelian	Akta Notaris Nomor 136 Tanggal 25 November 2020	1976
127	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	TANAH NON PERSIL	TANAH BASAH	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	29/12/2023	5264	Desa Bandar Purba Kec. Mardingding	Hak Pakai			Lahan Pertanian	Pembelian	Akta Notaris Nomor 137 Tanggal 25 November 2020	2023
128	Dinas Pertanian	TANAH NON PERSIL	TANAH HUTAN	Tanah Hutan Produksi	31/12/2009	41106	Desa Simolap Kecamatan Tigabinanga	Hak Pakai			Tanah BPP Desa Simolap	Pembelian		2009
129	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TANAH NON PERSIL	TANAH HUTAN	Tanah Hutan Wisata	01/08/2024	86000	Jalan Besar Merek-Kabanjahe Desa Merek RT. /RW Merek	Hak Pakai		-	Ruang Terbuka Hijau	Surat Keterangan	Tanah Arboretum Merek	2024
130	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TANAH NON PERSIL	TANAH HUTAN	Tanah Hutan Wisata	28/05/2024	105000	Jalan Rakutta Berahmana Desa Sarinembah Kecamatan Munte	Hak Pakai		-	Ruang Terbuka Hijau	Surat Keterangan	Tanah Arboretum Munte	2024
131	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	TANAH NON PERSIL	TANAH HUTAN	Tanah Hutan Wisata	31/12/1960	30000	Camping Ground Danau Laukawar Kec. Namanteran	Hak Pakai			Taman Wisata dan Rekreasi	Pembelian	Taman Wisata dan Rekreasi Danau Lau Kawar	1960

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
132	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	TANAH NON PERSIL	TANAH HUTAN	Tanah Hutan Wisata	31/12/1960	50000	Air Terjun Sipiso-piso Desa Pangambatan Kec. Merek	Hak Pakai			Taman Wisata dan Rekreasi	Pembelian	(Akte Pernyataan Kepemilikan No. 66 Tgl. 03 Agustus 2016)	1960
133	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	TANAH NON PERSIL	TANAH HUTAN	Tanah Hutan Wisata	31/12/1960	70000	Dusun Laudebuk-debuk Desa Doulu Kec. Berastagi	Hak Pakai			Taman Wisata dan Rekreasi	Pembelian	Tempat Wisata Pemandian	1960
134	Dinas Pertanian	TANAH NON PERSIL	TANAH PERTANIAN	Tanah Usaha	31/12/1973	6820000	Desa Mbal-mbal Petarum Kec. Laubaleng (Surat Nomor : 6/III/1973 Tanggal : 06 Maret 1973)	Hak Pakai			Pengembalaan Ternak Hewan	Hibah		1973
135	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	TANAH NON PERSIL	TANAH PERTANIAN	Tanah Usaha	16/02/2012	61100	Agropolitan Siosar Kecamatan Merek	Hak Pakai			Perumahan, Fasum, dan Fasos	Pembelian	Perumahan, Fasum, dan Fasos (Lokasi Areal Penggunaan Lain), (Penyerahan tanah berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor S.216/VII_KUH/2012 tanggal 16 Februari 2012)	2012
136	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TANAH NON PERSIL	TANAH PERTANIAN	Tanah Usaha	13/10/2017	4655600	Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek	Hak Pakai			Lahan Usaha Tani (LUT)	Penyerahan	Lahan Usaha Tani, (Penyerahan tanah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017)	2017

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
137	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TANAH NON PERSIL	TANAH PERTANIAN	Tanah Usaha	13/10/2017	145500	Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek	Hak Pakai			Pembangunan Pusat Olah Raga (Sports Center)	Penyerahan	Pembangunan Pusat Olah Raga (Sports Center), (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 360/423/BPBD/2021 tanggal 08 Desember 2021)	2017
138	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TANAH NON PERSIL	TANAH PERTANIAN	Tanah Usaha	16/02/2012	2938900	Agropolitan Siosar Kecamatan Merek	Hak Pakai			Perumahan, Fasum, dan Fasos	Penyerahan	Perumahan, Fasum, dan Fasos (Lokasi Areal Penggunaan Lain), (Penyerahan tanah berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor S.216/VII_KUH/2012 tanggal 16 Februari 2012)	2012
139	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	LAPANGAN	TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	24/11/2017	21110	Desa Dokan Jalan Dokan Desa Dokan Kec.Merek	Hak Pengelolaan			Tempat Pembuangan Sampah	Pembelian		2017
140	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1250	Jl. SD				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
141	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2015	1000	Jalan ke Workshop PU Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2015
142	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Penalemen - Kota Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
143	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/1993	12800	Berastagi - Gongsol Kec. Berastagi	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		1993
144	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Jalan Pekuburan Berastagi Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
145	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2500	Puncak Sibayak II - Sembakan (Bts Kab. Langkat)				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
146	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2011	1000	Jl. Ds. Perlamben - Ds. Pergendangen Kec. Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2011
147	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2012	25000	Jalan Lingkar Juhar Kec. Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2012
148	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1000	Desa Suka Kec. Merdeka				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
149	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2015	1000	Gg. 40 Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2015
150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2015	1000	Desa Kemkem Kec. Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2015
151	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	3000	Jl.Sentra Pertanian Desa Pergendangen Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
152	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Jl.Biak Nampe - Pernantin				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
153	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Bayang - Kota Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
154	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1500	Jl.Juma Bangun Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
155	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2011	1000	Jl. Lingkar Desa Berastepu Kec. Payung				Jalan Kabupaten	Pembelian		2011
156	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1000	Jl.Lingkar Kec.Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
157	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	400	Jl.Lorong Ikuten Kec.Berastagi	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
158	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	1000	Jalan Gg. Rahmat Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Jl.Gang Kesuma Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
161	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Lau Baleng - Kuta Pengkih Kec. Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
162	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Lau pesira - Lau Pakam Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
163	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	2500	Jl.Perladangan Kuta Babo Kec.Payung				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
164	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25000	Mbal-mbal Nodi-Paya Mbelang Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
165	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2500	Kebayaken - Sp. Perladangan Kec. Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
166	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	13500	Jl.Simp.Kemkem - Kemkem Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
167	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Laubelang - Lau solu Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
168	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5000	Jl. Netap - Kota Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
169	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2100	Gg. Merak Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
170	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	LauBaleng - Desa Kutapengkih Kec. Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
171	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Perjalangan Desa Munte Kec.Munte				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
172	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2012	3500	Gg.Laugumba Kec.Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2012
173	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2500	Gg. Ropah Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
174	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	13500	Sp. Pertibi Tembe - Perti Timbe Kec. Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
175	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1996	26400	Limang - Negerijahe Kec. Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		1996
176	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	2500	Jalan Jamin Ginting Gg. Sehat, Gg. Sumber Mufakat dan jalan Gereja Advent Desa Sumbul Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2014
177	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1996	15950	Sp.Naga - Naga Kec. Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		1996
178	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1996	25000	Buluh Pancur - Lau Lingga Kec. Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		1996
179	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1996	22500	Juhar - Sp.Jandi Kec. Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		1996
180	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1996	35000	Deleng Babo- Jandi Kec.Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		1996
181	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Gamber - Bakerah Kec. Sp.Empat/Namantera n				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
182	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1996	34100	Perbesi - Limang Kec.Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		1996
183	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	33750	Kacaribu- Mogajaya Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
184	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	12500	Bakerah - Uruk Tuhan Kec. Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
185	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1996	30800	Lau Lingga - Batas Kab.dairi Kec.Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		1996
186	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1996	14000	Ketawaren - Lau Kidupen Kec.Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		1996
187	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Sp. Lau Kawar - Lau Kawar Kec. Naman Teran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
188	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15000	Naman - Ndeskati Kec. Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
189	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	30000	Sp. Gamber - Sp. Kuta Tonggal Kec. Namanteran	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
190	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	7500	Lingkar Luar Danau Lau Kawar Kec. Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
191	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15000	Kuta rayat - Kebayaken Kec. Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
192	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15000	Sp. Sugihen-sugihen Kec. Dolat Rayat				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
193	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25000	Sp. Lingga Julu - Guru Singa Kec. Simpang Empat/Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
194	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	22500	Jarang Nguda - Puncak Sibayak II Kec. Merdeka				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
195	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	4500	Jl. Sempurna Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
196	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10500	Simpang Gung Pinto-Gung Pinto Kec. Naman Teran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
197	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	17500	Suka Nalu - Bakerah Kec. Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
198	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	9500	Guru Singa - Deleng Kutu Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
199	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	13500	Semangat Gunung - Puncak Sibayak Kec. Berastagi/Merdeka				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Desa Peceren - Lingkungan Desa Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
201	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2500	Jl. Abadi Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
202	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3300	Jl. Komp. Pasar kabanjahe - Kota Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
203	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	12100	Sp. Gurukinayan - Gurukinayan Kec. Payung				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
204	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	35000	Ujung Deleng - Tanjung Merahe Kec. Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
205	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	16500	Guru Kinayan - Perbaji Kec. Payung/Tiganderket				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
206	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	27000	Jalan Jurusan Sibintun-Tiga Kicat Kec. Simpang Empat	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
207	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	50000	Kuta Male - Amburidi Kec. Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
208	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5000	Sp. Kutabuluh Gugung-Kutabuluh Gugung Kec. Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
209	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	6500	Payung - Sp. Gurukinayan Kec. Payung				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
210	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	26000	Payung - Tiga Nderket Kec. Payung/Tiganderket				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
211	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Ujung Deleng - Sp. Kuta Male Kec. Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
212	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	11000	Tanjung Merahe - Sp. Tanjung Merahe Kec. Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
213	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	55250	Tiga Nderket - Tanjung Kec. Tiganderket/Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
214	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	6000	Mardinding (Kampung) Kec. Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
215	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25000	Lau Buluh Kutamale Kec. Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
216	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	3500	Sumbul - Sp. Ajijahe Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2014

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
217	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2015	500	Sp. Lau sidebuk - debuk - Lau sidebuk - debuk Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2015
218	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Negerijahe-Gunung Meriah Kec. Kutabuluh	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
219	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25000	Polatebu - Gunung Meriah Kec. Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
220	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2016	17000	Sp. Kutambelin - Kutambelin Kec. Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2016
221	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2013	10000	Jalan Gg. Pelita Kec. Berastagi	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
222	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	1500	Sp. Kaban - Kaban Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2014
223	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Jl.UKA Gang.Pertama Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
224	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2015	1000	Sp. Tanjung Mbelang - Tanjung Mbelang Kec. Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2015
225	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2015	5500	Kutambaru - Genting Kec. Tiganderket				Jalan Kabupaten	Pembelian		2015
226	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2012	4000	Lingkar Mardinding Kec. Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2012
227	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	2500	Jl.Juma Kerak kerak Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
228	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Jl.Jamin Ginting Gang Pelawi Kec.Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
229	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2013	4000	Jalan Sumbul - Lau Daling Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
230	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	2531	Jl.Gang Karona Desa Ketaren Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
231	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1585	Jl.Desa Ketaren Gg.Buah Lor.I Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
232	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	10750	Jl.Gang Berhala II - Berhala Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
233	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	2000	Jl.Udara Gang Rukun Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
234	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1500	Jl.Gang Cendrawasih Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
235	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	2500	Jl.Lingkar Desa Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
236	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	15000	Jl.Mulia Rayat - Ajinembah Kec. Merek	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
237	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Jl.Gang Sada Perarih Desa Ketaren Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
238	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	7200	Jl.Gang Selamat Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
239	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	5000	Jl.Simp.Sampun - Sampun Kec. Dolat Rayat	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
240	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	7500	Kacaribu - Sp. Kacaribu Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
241	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	35000	Mbal-mbal -Nodi-Paya Mbelang Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
242	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	1000	Gg. Kenanga Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
243	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	360	Gg. Bersama - Jl. Nabung Surbakti Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
244	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2007	27950	Rumah Kabanjahe-Kaban Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
245	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2014	"Gg. Gelombang - Jl. Letjen Jamin Gintings "	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
246	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/1996	8000	Sp. Nari gunung - Nari Gunung Kec. Tiganderket				Jalan Kabupaten	Pembelian		1996
247	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3000	Gg. Pasar Baru - Jl. Kapten Bangsi Sembiring Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
248	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1000	Lr. Melati - Jl. Kerayatan Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
249	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2250	Gg. Karo Indah - Mogajaya Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1750	Gg. Mutiara - Jl. Kotacane Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
251	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Tertib - Jl. Katepul Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
252	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	4500	Lorong I - Komplek Marga Silima Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
253	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg.HKI - Jl. Kotacane Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
254	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	550	Gg. Flamboyan - Jl. Katepul Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
255	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2350	Gg. Terus Jaya - Jl. Samura Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
256	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1350	Gg. Isanawiyah - Jl. Samura Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
257	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	350	Gg. Palding - Jl. Letjen Jamin Ginting Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
258	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	750	Lorong II - Komplek Marga Silima Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
259	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2500	Gg. Masa - Jl. Mariam Ginting Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
260	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Sinabung - Jl. Pala Bangun Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
261	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1100	Gg. Merak - Jl. Samura Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
262	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	450	Gg. Milala - Jl. Veteran Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
264	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	26000	Lepar Samura - Ajijahe Kec. Tigapanah	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
265	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1750	Gg. Keluarga - Jl. Mariam Ginting Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
266	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Gg. Bangun Purba - Jl. Mariam Ginting Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
267	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	4950	Sp. Rumah Kabanjahe - Rumah Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
268	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2500	Lingkar Pasar Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
269	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	4000	Lingkar Kota Kecamatan Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
270	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3500	Dalam Kota Kecamatan Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
271	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Jl. Asrama				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
272	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	12500	Bertah - Negeri				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
273	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Lingkar Sitopsi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
274	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	27500	Urug Tuhan - Lau Kawar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
275	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Lingkar Pasar Tongging				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
276	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2000	Lingkar Dokum Siroga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
277	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	4000	Lingkar Kota Kecamatan Merdeka				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
278	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	26650	Tongging - Bts. Kabupaten Dairi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
279	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	22500	Payambelang - Bts. Prop. Aceh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
280	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	7500	Lau Kawar - Kel. Danau Lau Kawar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
281	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Lingkar Pasar Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
282	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	6000	Lingkar Kota Kecamatan Payung				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
283	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3750	Sp. Pertumbuken - Pertumbuken Kec. Barusjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
284	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	4000	Lingkar Kota Kecamatan Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
285	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	17000	Sp. Mardingding - Mardingding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
286	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Rimo Bunga - Serpang				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
287	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	35000	Serdang - Rumah Liang (Bts. Kab. Deli Serdang)				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
288	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5250	Lingkar Kota Kecamatan Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
289	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2500	Lingkar Pasar Tiganderket				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
290	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	30000	Juhar - Deleng Babo - Kidupen				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
291	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	16500	Semangat - Bts. Kab. Simalungun				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
292	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3000	Sp. Kutagugung - Kutagugung Kec. Juhar	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
293	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	37000	Lau Mandin - Baturongkam				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
294	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	42000	Kubambaru Punti - Kutambelin				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
295	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Lepar Samura - Sp. Bertah Kec. Tigapanah	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
296	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	34000	Kutarih - Mbalmbal Petarum				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
297	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	4500	Sp. Rimokayu - Rimokayu Kec. Payung	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
298	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5000	Bertah - Kutajulu Kec. Tigapanah	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
299	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	23500	Lepar Samura - Ajijahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	2500	Jl.Usaha Tani Desa Perjalangen Kec.Munte				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
301	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	5000	Jl.SMP dan SD Negeri Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
302	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	44100	Lau Mandin - Aek Nauli - Bts Prop. Aceh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
303	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	13500	Sp. Pernantin - Tiga Siempat Kec. Juhar	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
304	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3000	Desa Mulia Rayat Kec. Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
305	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Sibolangit - Batas Kab. Simalungun				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
306	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	4500	Jl.Rumah Darat desa Rimokayu Kec.Payung				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
307	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	5000	Jl.Usaha Tani Juma Tenukil-UrukGedang Kec.Tiga Binanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
308	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	12500	Bandar Purba - Janji Matogu				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
309	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	2500	Jl.Sikap-kap Kec.Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
310	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	2500	Jl.Usaha Tani Desa Suka Nalu Kec.Naman Teran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
311	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1000	Jalan Lingkar Desa Surbakti Kec. Simpang Empat	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
312	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	12500	Seberaya Kubucolia Kec. Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
313	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	2500	Jl.Lingkar Desa Simacem Kec.Naman Teran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
315	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	5000	Jl.Usahatani Juma Jahen Desa Barujulu				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
316	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	24000	Jalan Lingkar Laudah Samura Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
317	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	500	Sp. SMU Negeri-SMU Negeri Payung Kec. Payung				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
318	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	2500	Jl.Perladangan Sibatu-batu Desa Tanjung Barus Kec.Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
319	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	500	SMP N Sp. Empat Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
320	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	5000	Jl.Sp.Kebayaken - Perladangan Kec.Naman Teran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
321	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	2500	Perladangan Batu Sembeka Desa Kutambaru Kec. Munte				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
322	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1500	Jl. SMA Sibintun Kec. Simpang Empat				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
323	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	750	Jalan Gang Piso Surit Kec.Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
324	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	9000	Lingkungan Luar Danau Lau Kawar Kec. Naman Teran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
325	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	2500	Jl.Mesjid Desa Semangat Kec.Merdeka				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
326	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	2500	Jl.Perladangan - Juma Deleng Kec.Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
327	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	5000	Jl.Gang Wed Lau Baleng Kec.Lau baleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
328	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	6000	Jl.Lingkar Desa Suka Julu Kec. Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
329	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	500	Jl Losd Desa Selandi - Selandi Kec. Payung				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
330	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1000	Jl. Tiga Kerenda ke Puskesmas Kec. Kuta Buluh	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
331	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	1500	Jl.Gang Pijer Podi Kec.Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
332	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	500	Gang. Asam Kelurahan Lau Mulgap Kec. Berastagi	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
333	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	2500	Jl.Kacinambun ke Peternakan Kec.Tiga Panah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
334	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	44100	Jalan Lau Mandin-Lau Garut Kec. Mardinding	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
335	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	3000	Gg.Adven Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
336	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	5000	Juma Dalin Tengah Desa Suka Lulu Kec. Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
337	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	10000	Gg. Lima Marga Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
338	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	6500	Jalan Kutambelin - Gung Pinto Kec. Naman Teran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
339	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2009	1000	Jl.Gang Pertanian Kec.Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
340	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	500	Gereja Katolik Jl.Irian Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
341	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	3847	Gg.Lau Kawar Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
342	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	4000	Sp.Singgarang-garang Kec. Naman Teran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
343	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1500	Lingkar Losd Tigapanah Kec. Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
344	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1500	Gg.Meliala Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
345	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	33000	Juhar Lau Lingga Kec. Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
346	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	40950	Sukanalu-Ds Sinaman Kec. Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
347	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	5000	Lau mulgap-Sp Banjar Kec. Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
348	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1500	Desa Peapira Kec. Merek	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
349	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	12000	Terminal - Kota Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
350	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	7251	Gg.Garuda Perum Samudra Indah Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
351	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1400	Lokasi Terminal Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
352	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2008	15000	Sp.Pengambaten - Pengambaten Kec. Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2008
353	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3850	Jl. Sanatorium - Kota Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
354	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	26000	Tongkoh - Sp. Tanjung Barus Kec. Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
355	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	750	Jl.Gang RIzki Kec.Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
356	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	28800	Laudah - Samura Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
357	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	2500	Jl.Tani Raya Buah Leoh Desa Kuta Buara Kec.Tiga Binanga	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
358	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	2500	Jl.Usaha Tani Lau Kesumpat Kec. Mardinding	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
359	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15000	Parsaroan - Gurdong Kec. Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25000	Gurdong - Lau Meciho Kec. Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
361	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	2500	Jl.Usaha Tani Juma Butar Desa Cinta Rayat Kec.Merdeka				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
362	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	2500	Jl Usaha Tani Juma Perlajangen Kec.Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
363	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15000	Kuta Pengkih - Kuta Kendit Kec.Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
364	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Aek Nauli - Lau Garut Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
365	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1000	Jl.Kamboja Kel.Lau Mulgap I Kec.Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
366	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	500	Jl.Simp.Pertumbunge n Kec. Munte	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
367	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	buluh pancur - Cerumbu Kec. Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
368	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	38500	Cerumbu - Kuta Pengkih Kec. Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
369	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	7500	Sp.Lau Timah - Batu Rongkam Kec. Mardingding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
370	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15000	Lau Garut - Batu Rongkam Kec. Mardingding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
371	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	60000	Rimo Bunga - Mardingding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
372	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	7500	Buluh Pancur - Rambah tampu Kec.Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
373	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15000	Lau Kesumpat - Aek Nauli Kec.Mardingding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
374	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	4000	Lingkar Pasar Mardinding Kec.Mardingding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
375	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	48000	Sp.Payambelang - Payambelang				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
376	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Sp.Galonggong - Pintu Angin Kec. Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
377	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Sp.Lau Timah - Aek Nauli -Bts Prop.Aceh Kec. Mardingding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
378	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15000	Lau kesupat - Aek Nauli Kec. Mardingding	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
379	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	30000	Tanjung Gunung - Lau Perira Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
380	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Sp. Lau Paradep - Lau Paradep Kec. Lau Baleng	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
381	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	27500	Batu Rongkam - Mbalmbal Petarum Kec. Mardingding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
382	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Cerumbu - Rimo Bunga Kec. Mardingding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
383	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25000	Bintang Meriah - Buah Raya Kec. Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
384	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	26250	Lau Pakam - Janji Matogu Kec. Mardingding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
385	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	35000	Jl.Negerijahe - Ujung Deleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
386	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	5000	Jl. Lingkungan Desa Sukanalu Kec. Tigapanah	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
387	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	16500	Janji Matogu - Parsaroan Kec. Mardingding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
388	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Parsaroan - Aek nauli Kec. Mardingding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
389	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	25000	Jl Jurusan Kidupen - Kemkem Kec.Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
390	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Pintu Angin - Kuta Ganjang Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
391	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	12500	Sp.Linggamuda - Lingga Muda Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
392	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25000	Namosuro - Batas Dairi Kec. Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
393	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	10000	Sp.Kuta Gerat - Kuta Gerat Kec. Munte	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
394	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	10000	Jl.Sp.Peceren - Peceren Kec. Berastagi	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
395	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	12100	Jl.Simp.Gurukinayan - Sp.Empat				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
396	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	3500	Jl.Simp.Batu Karang - Losd Desa Batu Karang Kec. Payung	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
397	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	10000	Jl.Sp.Perbaji - Selandi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
398	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	6500	Jl.Bunuraya Baru - Suka Kec. Tigapanah	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
399	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	25000	Jl.Tongging - Sikodon - kodon Kec. Merek	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	15000	Jl.Naman Teran - Kuta Mbelin				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
401	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1500	Jl.SMU Negeri Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
402	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Jl.Persawahan Desa Aji Julu Kec. Tigapanah	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
403	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	3000	Pembangunan Jalan ke Desa Temburun Kec. Tiganderket				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
404	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	10000	Pembangunan Jalan Sp. Tanjung Merawa-Tanjung Merawa Kec. Tiganderket				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
405	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2009	1000	Jl.Sp.Ujung Bandar - Ujung Bandar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2009
406	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	6000	Jl.Poros Desa Pergendangen - Perlamben Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
407	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	2500	Pembangunan Jalan Juma Pagarbatu - Desa Pancur Batu Kec. Merek (Annual Fee)				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
408	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	16500	Pembangunan Jalan Semangat-Rumamis Kec. Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
409	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	22500	Jl.Jaranguda - Puncak Sibayak II				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
410	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	3686	Jl.Sp.Sumbul - Sumbul	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
411	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	1500	Pembangunan Jalan ke Perkuburan Berhala Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
412	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	44000	Pembangunan Jalan Lau Pakam - Parsaoran Kec. Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
413	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	2500	Lingkar Tigabinanga (Tahap I) Kec. Tigabinanga	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2013

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
414	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	2500	Pembangunan Jalan Simp. Cekdam-Buluh Lubang Desa Gurubenua Kec. Munte				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
415	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	5000	Pembangunan Jalan Munte-Gunung Manumpak Sep. 1 km x 3 m Kec. Munte				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
416	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	2500	Pembangunan Periodik Jalan Ruam - Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
417	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	7500	Pembangunan Jalan Deleng Siabu-abu Desa Perbulan Kec. Lau Baleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
418	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	55000	Rih Tengah - Tanjung Merahe Kec.Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
419	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2012	5000	Jln.Benuraya-Benuraya Baru Kec.Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2012
420	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	1500	Pembanguan Jalan Gg. Bersama Tigapanah Kec. Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
421	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	500	Pembangunan Jalan ke HKBP Tigapanah Kec. Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
422	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2012	15000	Jl.Lausolu Baturongkap Kec. Mardinding	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2012
423	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	1500	Pengaspalan Jl di Desa Tongging kec.Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
424	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	2500	Jl.Lingkar Desa Rumah Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
425	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	7500	Jl.Paya Cike Lau Baleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
426	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2013	450	Peningkatan Jalan Gg.Pengadilan Lama Kabanjahe Kec.Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2013
428	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5000	KutaMbelin - Samperaya Kec.Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
429	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Rambah Tampu - Batu Rongkam Kec.Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
430	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	16800	Jl.Gang Samura Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
431	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2012	1000	Jl.Di Perumahan Vetran Jl.Sumber Mupakat Kec,Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2012
432	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2012	25000	Jl.Sp lauTimah Ke Lau Garut Pintu Angin Kec.Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2012
433	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1500	Jl.SMP Penampen Kec. Barusjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
434	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Jl.Desa Paribun Kec. Barusjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
435	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	2500	Jl.Perjuman Ingan Tanjung Desa Kandibata Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
436	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Sp.Kinangkong - Tanjung Bale Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
437	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Kuta Mbelin - Kuta Pengkih Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
438	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Gang Reformasi Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
439	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2011	15000	Jalan Jalur Evakuasi Desa Sukanalu Teran-Desa Bekerah Kec. Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2011
440	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2011	5000	Bunuraya Baru-Suka Kec. Tigapanah	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2011
441	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Jl.Gang Simalem Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
442	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	750	Jl.Sp.Losd Tapak Kuda - SD Inpres Tapak Kuda Kec. Tiganderket	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
443	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	500	Jalan Ke Geraja katolik Tiga Binanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
444	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Juhar - Batu Mamak Kec.Juhar	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
445	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	8250	Lau Baleng - Lau renun/Batas Kab.Dairi Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
447	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	22500	Kidupen - Jandi Kec. Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
448	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5000	SMP dan SD Negeri Juhar Kec.juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
449	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	6500	Lingkar Desa Kidupen Kec. Juhar	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
450	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2010	1000	Jl.Ke Komplek Kesusteran Tigabinanga	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2010
451	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15000	Negeri - Bekilang Kec. Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
452	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	21000	Kuta mbaru punti - Batu Mamak Kec.Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
453	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	7500	juma tenukil-uruk Kec.Tiga Binanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
454	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	19800	Mbalmbal petarum - Perbulan Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
455	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	50000	Gg.Wed Lau Baleng Kec.Lau Baleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
456	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	13500	Dalam Kota Tiga Binanga Kec.Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
457	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	35500	Jalan Kutagerat Batumamak Kutambaru Punti Kec. Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
458	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Kidupen - Kidupen Kec. Tigabinanga/Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
459	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	12500	Sp.Lau Kapur - Lau Kapur Kec. Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
460	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Sp.namosuro - Namosuro Kec. Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
461	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25000	Kelabangen - Ketawaren Kec. Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
462	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2011	6000	Jl. Desa Merdeka - Desa Jaranguda Kec. Merdeka				Jalan Kabupaten	Pembelian		2011
463	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	13500	Sp.Kem-kem - Kem-kem Kec. Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
464	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2012	5000	Pembangunan Jalan Gurubenua-Ujung Suka Kec. Munte				Jalan Kabupaten	Pembelian		2012
465	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2011	4000	Jl. Aek Popo - Aek Bolon Kec. Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2011
466	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	31000	Kutabangun-Sukajulu Kec. Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
467	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	16500	Sp.Kuta Buara - Kuta Buara Kec. Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
468	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2011	5000	Jl. Gang Wed ke Lau Baleng Kuta Kec. Lau Baleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2011
469	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	13000	Simbelang - Perbesi Kec. Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
470	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2011	11500	Jl. Desa Rumah Berastagi - Desa Peceren Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2011
471	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2012	3000	Jl.Desa Tigapancur-Desa Sigerpang Kec. Simpang Empat	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2012
472	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2011	10000	Jl. Ds. Kutarayat - Ds. Kutambelin Kec. Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2011
473	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2011	15000	Jl. Lau Solu - Batu Rongkam Kec. Mardingding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2011
474	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	21450	Sukajulu - Kutambaru Punti Kec.Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
475	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15000	Sukamandi - Perjalangen				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
476	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/2011	5000	Jl. Desa Merdeka - Desa Semangat Kec. Merdeka				Jalan Kabupaten	Pembelian		2011
477	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	49000	Singgamanik - Bintang Meriah Kec. Munte/Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
478	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	11500	Sp. Nagara - Nagar Kec.Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
481	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	45000	Basam - Sicikecike Kec. Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
482	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2500	Lingkar-Sarinembah Kec.Munte				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
483	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	30000	Ajinembah - Nagara Kec. Merek	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
484	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	29250	Pembangunan Jalan Tongging Sibolangit - Peapira				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
485	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	35000	Serdang - Batas Kab.Deli Serdang Kec. Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
486	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5000	Sp.Tanjung Barus - Tanjung Barus Kec. Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
487	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	1500	Kampung Baru Desa Cintarayat Lama Kec. Merdeka				Jalan Kabupaten	Pembelian		2014
488	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	8500	Jalan Jurusan Sp. Semangat-Semangat Kec. Tigapanah	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
489	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	15000	Pembangunan Jalan Dokan - Tambunan Kec. Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2014
490	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	29250	Sukanalu - Tigajumpa Kec. Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
492	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	19800	Pembangunan Jalan Sp. Bulanjahe-Bulanjulu Kec. Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
493	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	46150	Tigajumpa - Sp. Tanjung Barus Kec. Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2014
494	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5500	Samura- Lepar Samura Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
495	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	7500	Guru Benua - Kabantua Kec. Munte				Jalan Kabupaten	Pembelian		2014
496	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3850	Sp.Samura dan Sp.Sanatorium Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
497	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	13650	Bulanjahe - Sinaman Kec. Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
499	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	38500	Kutambaru - Sp.Pernantin Kec. Munte/Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2015	11500	Desa Perbesi - Desa Benjire Kec. Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2015
501	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	5000	Lau Baleng - Kuta Rih Kec. Lau Baleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2014
502	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	1250	Jalan Ke Kantor Vulkanologi Kec. Simpang Empat				Jalan Kabupaten	Pembelian		2014
503	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2015	3000	Jalan Kuburan Simpang Losd Jadibata ke Losd Sigerat Lembu Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kec. Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2015
504	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	1500	Sp. Renun - Bayang-bayang Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2014
505	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	30000	Desa Simacem Kecamatan Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
506	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2014	15000	Jalan Desa Sada Perarih - Torong Kec. Simpang Empat				Jalan Kabupaten	Pembelian		2014
508	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	26400	Limang - Negeri Jahe Kec. Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
509	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	5000	Usaha Tani Juma Julun Kec. Barusjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
510	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2015	1000	Jalan Pengambatan - Lokasi Paralayang Kec. Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2015
511	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	05/01/2015	1500	Jalan Stadion Muka Kuning Kec. Lau Baleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2015
512	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	33000	Kacinambun-Sukababo Kec. Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
514	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25500	Puncak 2000 - Lauriman Kec. Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
515	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	25000	Puncak 2000 - Sukamaju Kec. Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
516	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1995	6768	Jalan Irian Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		1995
517	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2016	4400	Kutambelin Kebayaken Kec. Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2016
518	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	16500	Kuta Buara Kec. Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
519	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3500	Panorama Tongging - Aek Hotang Kec. Merek	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
520	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Bandar Purba - Aek Nauli Kec. Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
521	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	40500	Nagara - Siosar Kec. Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
522	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	10000	Sp. Ke Desa Arimas Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
523	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	33000	Pembangunan Jalan Kacinambun - Sukamaju Kec. Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
524	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	9500	Regaji - Suka Kec.Merek/Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
525	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	36300	Limang- Kuta kerat Kec. Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
526	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3000	Desa Mulia Rayat Kec. Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
528	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	8250	Lau Baleng - Lau Renun Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
529	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Situnggaling - Puncak Sipisopiso Kec.Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
530	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	22550	Aji Mbelang - Seberaya Kec. Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
531	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	13500	Suka Dame - Suka nalu Kec.Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
532	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	7000	Sembah Bala II dan III Kec. Mardinding				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
533	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Nagara - Pertibilama Kec. Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
534	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/1995	12000	Sp. Kuta Galoh - Kuta Galoh Kec. Tiganderket				Jalan Kabupaten	Pembelian		1995
535	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	17000	Sp. Mardinding-Mardinding Kec. Mardinding	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
536	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1995	6500	Lau Babo Ke Mesjid Kidupen Kec.Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		1995
537	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1995	12500	Pernantin - Buluh Pancur Kec. Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		1995
538	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Barusjahe-Bts. Deliserdang Kec. Barusjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
539	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	7500	Sp. Sirumbia-Sirumbia Kec. Simp. Empat/Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
541	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	32500	Pertibilama - Siosar Kec. Merek	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
542	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1995	20000	Susuk - Kuta Kepar Kec. Tiganderket				Jalan Kabupaten	Pembelian		1995
543	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	21000	Juhar- Batumamak Kec. Juhar				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
544	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1995	7500	Lau pesira - Lau Pakam Kec. Laubaleng				Jalan Kabupaten	Pembelian		1995
545	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1990	30000	Bakerah - Gurukinayan Kec. Namanteran/Payung				Jalan Kabupaten	Pembelian		1990

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
546	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1995	20000	Penampen - Kuta Kepar Kec. Tiganderket				Jalan Kabupaten	Pembelian		1995
547	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/1995	63000	Situnggaling - Tongging Kec.Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		1995
548	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/1994	7500	Sp. Kutambaru - Kuta Mbaru Kec. Tiganderket				Jalan Kabupaten	Pembelian		1994
549	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15000	Pancurbatu - Pertibitembe Kec.Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	46000	Pembangunan Jalan Amburidi Rih Tengah Kec. Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
551	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	03/01/1994	19200	Kandibata - Beganding Kec. Kabanjahe/Simpang Empat				Jalan Kabupaten	Pembelian		1994
552	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Sadanioga - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
553	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1400	Open Stage Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
554	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	35000	Buah Raya - Limang Kec. Kutabuluh/Tigabinanga				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
555	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Gg. PancaKarsa - Kota Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
556	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	500	Gg. Siki - Kota Kec Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
557	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	7242	Gg. Saudara - Kota Kec. Kabanjahe	Hak Pakai			Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
558	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	15000	Simp. Pancur Batu - Pancur Batu Kec. Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
559	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	2000	Gg. Dharma - Kota Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
560	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Gg. Sangap encari - Kota Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
561	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	30000	Sapu Ijuk - Sp. Kuta Male Kec. Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
562	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	20000	Sirumbia - Lingga Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007

No.	Nm_Unit	Nm_Aset3	Nm_Aset4	Nm_Aset5	Tgl_Perolehan	Luas_M2	Alamat	Hak_ Tanah	Sertifikat_ Tanggal	Sertifikat_ Nomor	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan	Tahun_ perolehan
563	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	30000	Sp. Rih Tengah - Rih Tengah Kec. Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
564	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	30000	Sp. Sapu Ijuk - Buah Raya Kec. Kutabuluh				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
565	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2017	6000	Jalan Kutagugung - Kutarayat Kec. Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2017
566	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2017	4000	Jalan ke SMP Negeri 1 Desa Kutarayat Kec. Namanteran				Jalan Kabupaten	Pembelian		2017
567	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1500	Gg. 88/89 - Kota Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
568	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3000	Sp. Rumah Berastagi-Rumah Berastagi Kec. Berastagi				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
569	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	3500	Terminal Merek Kec. Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
570	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2018	6500	Pembangunan Infrastruktur Jalan Masuk SMPN 2 Merek Satu Atap Kec. Merek				Jalan Kabupaten	Pembelian		2018
571	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2007	1750	Gg. Tambun - Kota Kec. Kabanjahe				Jalan Kabupaten	Pembelian		2007
572	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	02/01/2018	8400	Pembukaan Jalan Mulawari - Tigapanah Kec. Tigapanah				Jalan Kabupaten	Pembelian		2018
573	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	04/01/2016	2400	Jalan Sumkara Sumbul				Jalan Kabupaten	Pembelian		2016
574	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	10/06/2025	537,65	Perumahan Montana Residence Tahap I Simpang Gunung Desa Pergendangen Kec,Tigabinanga	Hak Pakai		-	Perumahan Montana Residence Tahap I Simpang Gunung Desa Pergendangen Kec,Tigabinanga	Hibah		2025
575	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	LAPANGAN	TANAH UNTUK JALAN	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	10/06/2025	1317,76	Perumahan Genting Ersinalsal Jl.Kabanjahe-Tigabinanga Desa Singgamanik Kec. Munte	Hak Pakai		-	Perumahan Genting Ersinalsal Jl.Kabanjahe-Tigabinanga Desa Singgamanik Kec. Munte	Hibah		2025

Rincian Aset Tanah Bermasalah Karena Masih Dikuasai Oleh Pihak Lain
Tahun 2025

No	OPD Pengguna	Tahun Perolehan	Nama Aset	Lokasi/ Alamat	Luas (M2)	Nilai (Rp)	Kronologis	Keterangan	Kronologis Penyelesaian
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1960	Tanah Bangunan Pasar (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	Jl. Kutabuluh Desa Kutabuluh Kec.Kutabuluh (Akte Pernyataan Kepemilikan No. 310 Tgl. 22 November 2016, Akte Pernyataan Kepemilikan No. 311 Tgl. 22 November 2016)	4710	500.000.000,00	Sudah dilakukan pendekatan dengan Kepala Desa tetapi Kepala Desa tidak mau menandatangani karena adanya masyarakat yang mengakui sebagai tanahnya.	Kepala Desa tidak mau menandatangai Berita Acara Pengukuran	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1980	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	Jl. Singarimbun Desa Tiganderket Kec. Tiganderket (Akte Pernyataan Kepemilikan No. 28 Tgl. 05 Desember 2015)	1000	150.000.001,00	Kepala Desa tidak Mau tanda tangan	Kepala Desa tidak mau menandatangai Berita Acara Pengukuran	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1981	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Desa Doulu Pasar Kec.Berastagi	600	500.000.000,00	Kepala Desa tidak Mau tanda tangan	Kepala Desa tidak mau menandatangai Berita Acara Pengukuran	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1982	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Jl. Kabanjahe-Sidikalang Desa Merek Kec. Merek	600	80.000.000,00	Sudah dilakukan pendekatan dengan Kepala Desa tetapi Kepala Desa mengatakan Harus mengosongkan terlebih dahulu Pos Penjaga tersebut karena telah ditempati oleh masyarakat	Aset dikuasai oleh pihak ketiga	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
5	Dinas Pertanian	2012	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Gurukinayan Kecamatan Payung (Akte Pernyataan Kepemilikan no. 306 tanggal 22 Nopember 2016	1000	64.000.000,00	surat penguasaan fisik tanah telah ditandatangani kepala desa tapi karena masih zona merah belum bisa ditindaklanjuti proses penerbitan sertifikat ke Kantor BPN	Kepemilikan tanah belum jelas	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
6	Dinas Pertanian	2009	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Desa Sukatepu Kecamatan Namanteran (Akte Hibah Nomor : 25/11/2009 Tanggal 04 Nopember 2009	2934	3.500.000,00	Telah dilakukan pendekatan dengan pihak yang menghibahkan tanah tetapi belum ada kesepakatan	Kepemilikan tanah belum jelas	dalam proses SKK dengan Kejaksaan

No	OPD Pengguna	Tahun Perolehan	Nama Aset	Lokasi/ Alamat	Luas (M2)	Nilai (Rp)	Kronologis	Keterangan	Kronologis Penyelesaian
7	Dinas Pertanian	2013	Tanah Bangunan Kandang Hewan	Jl. Desa Suka Desa Tigapanah Kec.Tigapanah (Akte Hibah Nomor : 109/12/1983 Tanggal : 26 Desember 1983)	12.000,00	324.000.000,00	Telah dilakukan koordinasi dengan Camat Tigapanah dan segera akan dilakukan pematokan dan pengukuran tanah	Kepemilikan tanah belum jelas	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
8	Dinas Pertanian	2009	Tanah Bangunan Kandang Hewan	Desa Sukarame Kec.Munte	16.500,00	351.000.000,00	1. Pasar Hewan tutup karena tidak adanya pedagang ternak malakukan transaksi; 2) Tanah digarap oleh oknum yang mengaku ahli waris; 3) Telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Sukarame; 4) Melaksanakan pertemuan/rapat pembahasan pengoperasian kembali Pasar Hewan Sukarame pada tanggal 24 Mei 2017 di ruang rapat asisten Setda Kab.Karo; 5) Rapat tindaklanjut Permasalahan Pasar Hewan Sukarame pada tanggal 14 Juni 2017 di ruang rapat Bupati Karo; 6) Rapat pembahasan pengamanan aset tanah pasar hewan Sukarame pada tanggal 16 Maret 2018 di ruang rapat Bupati Karo; 7) Rapat tindaklanjut pengamanan aset tanah pasar hewan sukarame tanggal 28 Maret 2018 di ruang Rapat Bupati; 8) Bersama Tim Kejaksaan Negeri Karo melakukan cek lapangan pada tanggal 17 Desember 2020	Aset dikuasai oleh pihak ketiga	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
9	Dinas Pertanian	2009	Tanah Hutan Produksi	Desa Simolap Kecamatan Tigabinanga	41106	69.700.000,00	Telah dilakukan pendekatan dengan kepala desa ukuran tanah yang tidak sesuai dengan yang tercatat di KIB	Kepala Desa tidak mau menandatangai Berita Acara Pengukuran	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1960	Tanah Hutan Wisata	Camping Ground Danau Laukawar Kec.Namanteran	30.000,00	1.440.000.000,00	Tanah merupakan kawasan kehutanan.	Masuk Kawasan Hutan	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1960	Tanah Hutan Wisata	Air Terjun Sipiso-piso Desa Pangambatan Kec. Merek (Akte Pernyataan Kepemilikan No. 66 Tgl.03 Agustus 2016)	50.000,00	12.000.000.000,00	Surat Keterangan Tanah luasnya sebesar 50.000 m2 saat pengukuran PJ Kepala Desa luasnya menjadi 17.000 m2 karena sebagian bidang tanah dikuasai masyarakat	Perubahan luasan saat pengukuran	dalam proses SKK dengan Kejaksaan

No	OPD Pengguna	Tahun Perolehan	Nama Aset	Lokasi/ Alamat	Luas (M2)	Nilai (Rp)	Kronologis	Keterangan	Kronologis Penyelesaian
12	Dinas Pendidikan	1990	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Desa Sigarang-garang Kec. Namanteran (Akte Hibah Nomor : 49/PPAT/VII/1990 Tanggal : 17 Juli 1990)	10732	386.352.000,00	• Tidak dapat diusulkan sertifikat karena pada saat selesai pengukuran oleh BPN tahun 2020 Kepala sekolah selaku perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tidak dapat melengkapi surat Keterangan Kepala Desa dan surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui Kepala Desa dengan alasan Kepala Desa tidak berkenan untuk menandatangani surat tersebut dengan alasan yang kurang jelas • Kondisi di lapangan tanah sekolah tersebut telah ditempati oleh beberapa masyarakat desa (Zona Merah)	Aset dikuasai oleh pihak ketiga	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
13	Cabang Dinas Kutabuluh	1999	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Desa Rih Tengah Kec. Kutabuluh	4500	98.124.000,00	Menurut Kepala Desa bahwa urusan dari penghibah tanah belum selesai, karena ahli waris masih keberatan apabila lahan tersebut di sertifikatkan	Diklaim Ahli Waris	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
14	Cab Dinas Munte	1972	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Desa Tanjung Beringin Kec. Munte	5434	146.711.250,00	Usul sertifikat bermasalah karena ada oknum yang keberatan tanah sekolah tersebut disertifikatkan, sehingga Kepala Desa tidak berani untuk menandatangani surat keterangan dan penguasaan fisik tanah sekolah, atau jika sudah ditandatangani dan saat akan melakukan pengukuran tanah menurut Kepala Desa dan Kepala Sekolah oknum tersebut akan berusaha menghalangi kegiatan pengukuran tersebut karena kondisi di lapangan saat ini tanah sekolah tersebut sudah dipergunakan/ditanami oleh oknum dimaksud.	Kepala Desa tidak mau menandatangai Berita Acara Pengukuran	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
15	Cab Dinas Berastagi	1983	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Perumahan Korpri Desa Gurusinga SDN0471161 Korpri Kec.Berastagi	5000	640.000.000,00	Masyarakat yang menempati lahan dan gedung eks SDN 0471161 Korpri tersebut keberatan jika tanah sekolah diusulkan untuk disertifikatkan dikarenakan selama ini telah dikuasai masyarakat		dalam proses SKK dengan Kejaksaan

No	OPD Pengguna	Tahun Perolehan	Nama Aset	Lokasi/ Alamat	Luas (M2)	Nilai (Rp)	Kronologis	Keterangan	Kronologis Penyelesaian
16	Pusk Kabanjahe	1980	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Desa Rumah Kabanjahe Kec. Kabanjahe	200	12.800.000,00	Kepala Desa Minta Ukur Ulang	Kepala Desa tidak mau menandatangai Berita Acara Pengukuran	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
17	Pusk Kabanjahe	1980	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Desa Lausimomo Kec. Kabanjahe	400	8.000.000,00	tanah provinsi	Tanah merupakan bagian tanah propinsi (RSU Lau Simomo)	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
18	Pusk. Simpang Empat	1991	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Desa Lingga Kec. Simpang Empat (Akte Pernyataan Kepemilikan No. 127 Tgl. 09 November 2016)	300	3.600.000,00	Salah satu masyarakat an.Pemilik Tanah meminta tanah pustu 2 m	Kepemilikan tanah belum jelas	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
19	Pusk.Payung	1976	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Desa Payung Kec. Payung	200	9.600.000,00	Sudah dilakukan koordinasi kepada kepala desa , tetapi kepala desa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Aset Desa dan menyarankan agar dibangun kembali Puskesmas tepat berada dibelakang jambur. Tapi menurut Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, lokasi dan luas tanah yang disarankan tersebut tidak memenuhi syarat pembangunan Puskesmas. oleh sebab itu Dinas Kesehatan sudah menindaklanjuti rencana pembangunan Puskesmas Baru di Desa Batukarang, Kec. Payung	Kepala Desa tidak mau menandatangai Berita Acara Pengukuran	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
20	Pusk. Merek	2000	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Desa Garingging Krc. Merek	126	12.978.000,00	Kepala minta diukur ulang	Kepala Desa Tidak mau tanda tangan dan minta diukur ulang	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
21	Pusk.Munte	1979	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Desa Singgamanik Kec. Munte	366	4.050.000,00	Kepala Desa Tidak mau tanda tangan karena tidak ada alas hak	Kepala Desa tidak mau menandatangai Berita Acara Pengukuran	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
22	Pusk. Kutabuluh	1976	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Desa Bintang Meriah Kec. Kutabuluh (Akte Tukar Menukar No. 146 Tgl. 29 Maret 2016)	54	11.320.000,00	Masalah tukar Menukar Tanah belum selesai /gu	Kepemilikan tanah belum jelas	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
23	Pusk.Barusjahe	1991	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Daerah Tigajumpa Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe	800	10.000.000,00	Ahli waris tanah masih bermasalah sehingga kepala desa tidak mau menandatangani surat penguasaan fisik		dalam proses SKK dengan Kejaksaan

No	OPD Pengguna	Tahun Perolehan	Nama Aset	Lokasi/ Alamat	Luas (M2)	Nilai (Rp)	Kronologis	Keterangan	Kronologis Penyelesaian
24	Kantor Camat Kabanjahe	2006	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Perumahan Rakyat No.23 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe	54	19.090.000,00	Saksi sebelah menyebalah tidak mau menandatangani kelengkapan berkas	Saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pengukuran	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
25	Kantor Camat Juhar	1970	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kec. Juhar	1600	3.920.000,00	Saksi sebelah menyebalah tidak mau menandatangani kelengkapan berkas	Saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pengukuran	dalam proses SKK dengan Kejaksaan
26	PUTR	2015	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Jalan ke Workshop PU Kec. Berastagi	1000	7.150.000,00	Kepala Desa tidak mau tanda tangan	Kepala Desa tidak mau menandatangai Berita Acara Pengukuran	
27	PUTR	2007	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Guru Singa - Deleng Kutu Kec. Berastagi	9500	67.925.000,00	Saksi sebelah menyebelah tidak mau menandatangani kelengkapan berkas	Saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pengukuran	
28	PUTR	2014	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan ke Kantor Vulkanologi Kec.	125000	80.000.000,00	menurut keterangan Kades Jalan ini milik BMKG	Kepala Desa tidak mau menandatangai Berita Acara Pengukuran	
29	Sekretariat Daerah	1972	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	Jl. Kartini Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe	3,317	700.000.000,00	Pemerintah Kabupaten Karo sedang terlibat dalam proses hukum terkait sengketa aset tanah yang tercatat pada Kartu Invetaris Barang Milik Pemkab Karo pada Bagian Umum Setda Kab. Karo yang beralamat Jl. Kartini Kabanjahe seluas 3.317 M2 dengan Nilai Perolehan sebesar Rp. 700.000.000,00. Aset Tanah tersebut merupakan eks Rumah Dinas Bupati Karo yang lazim disebut Pesanggraha yang di kuasai oleh Ahli Waris Mantan Bupati Bpk. Alm. Tampak Sebayang. Proses Hukum perkara tersebut sudah di ranah Pengadilan dengan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2025/PN antara Haryanest Sebayang, dkk sebagai Para Penggugat lawan Pemerintah Kabupaten Karo (Bupati Karo) dkk sebagai Tergugat	Sudah Sertipikat	Dalam Proses Hukum di Pengadilan
30	Sekretariat Daerah	1972	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	Jl. Kartini Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe	2,747	300.000.000,00	Tanah merupakan eks Rumah Dinas Sekda yang dikuasai oleh Ahli Waris Mantas Sekda Bpk. Alm Ingan Manik	Sudah Sertipikat	Dalam Proses SKK dengan Kejaksaan

Rincian Dokumen dan Langkah-Langkah yang Telah Ditempuh Pemkab. Karo Guna Penyelamatan Aset Eks Rumah Bupati Karo yang Beralamat di Jl. Kartini, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe

NO.	URAIAN	TUJUAN	NOMOR	TANGGAL	HAL
1	Keputusan Bupati Karo	Anggota Tim	028/90/DPPKAD/2009	16 April 2009	Pembentukan Tim Penilaian dan Pemuktakhiran Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2009
2	Nm_Unit	Pemkab. Karo dan BPKP Perwakilan Provsu		09 Juni 2009	Kerangka Acuan Kerja Pendampingan Aplikasi Simda Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2009
3	Keputusan Bupati Karo	Anggota Tim	028/177/DP2KAD/2009	26 Juni 2009	Pembentukan TimInventarisasi Barang/Kekayaan Barang Milik Daerah (IKBMD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2009
4	Kartu Inventaris Barang (KIB)	-	-	-	Pencatatan Aset ke KIB atas aset Tanah Bangunan yang beralamat di Jl. Kartini Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe
5	Keputusan Bupati Karo	Anggota Tim	028/206/DPPKAD/2011	04 Oktober 2011	Pembentukan Tim Proses Kepemilikan Barang Milik Daerah Tanah dan/atau Bangunan untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karo
6	Perjanjian Kerjasama	Pemkab. Karo dan Kantor Pertanahan Kab. Karo	119/163/DPPKAD/2015 dan Nomor 712.I/300-12.06/4/2015	27 Mei 2015	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Kantor Pertanahan Kab. Karo tentang Percepatan Penyelesaian Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karo
7	Perjanjian Kerjasama	Pemkab. Karo dan Kejaksaan Negeri Karo	119/363/Otda/2020 dan B-3072/1.2.19/6P.1/09/20	01 Oktober 2020	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Kejaksaan Negeri Karo
8	Surat Bupati Karo	Ahli Waris Alm. Tampak Sebayang (Mantan Bupati Karo)	032/1512/BU/2020	05 Agustus 2020	Permintaan Alas Hak
9	Surat Bupati Karo	Ahli Waris Alm. Tampak Sebayang (Mantan Bupati Karo)	032/1758/BU/2020	16 September 2020	Permintaan Alas Hak
10	Surat Pernyataan All Dian Palapa Purba, SE	Lurah Gung Leto		29 September 2020	Mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Lurah Gung Leto.
11	Keputusan Bupati Karo	Tim Penertiban dan Pengamanan BMD	900/264/BKAD/2022	6 Juli 2022	Pembentukan Tim Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Tahun Anggaran 2022
12	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Karo dan Kejaksaan Negeri Karo	Pemkab. Karo dan Kejaksaan Negeri Karo	119/291/PEM/2022 dan Nomor B/1267/L.2.19/Gp.3/07/2022	22 Juli 2022	SKK tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara , serta Peningkatan Pendapatan Aseli Daerah dan Pengamanan Aset
13	Surat Sekretaris Daerah Kab. Karo	Kepala OPD terkait	005/2106/BKAD/2022	16 September 2022	Undangan Rapat yang dilaksanakan pada Hari Senin, 19 September 2022 dengan agenda Rapat tentang Pembahasan Aset Tanah Bagian Umum Setda Kab. Karo antara lain eks Rumah dinas Bupati dan eks Rumah dinas Sekda yang tercatat pada Bagian Umum Setda Kab. Karo
14	Keputusan Bupati Karo	Anggota Tim	900/499/BKAD/2022	20 Oktober 2022	Pembentukan Tim Manajemen Aset Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022
15	Surat Bupati Karo	Lurah Gung Leto	593/3298/BU/2022	26 Oktober 2022	Pembatalan Surat Keterangan (ditujukan kepada Lurah Gung Leto).
16	Keputusan Bupati Karo	Tim Penertiban dan Pengamanan BMD dan Tim Kantor BPN Karo	900/0301/BKAD/2023	10 Februari 2023	Pembentukan Tim Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah berupa Tanah Tahun Anggaran 2023 dengan Tim Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.
17	Surat Lurah Gung Leto	Bupati Karo	500.17/0349/GL/2023	29 Mei 2023	Pembatalan Surat Keterangan
18	Surat Bupati Karo	Lurah Gung Leto	800/1663/BU/2023	14 Juni 2023	Pembatalan Surat Keterangan
19	Surat Lurah Gung Leto	Ahli Waris Alm. Tampak Sebayang	300/0504/GL/2023	14 Juli 2023	Pembatalan/Mencabut Surat Keterangan Lurah Gung Leto Nomor 593/0276/GL/2019
20	Surat Kuasa Khusus Bupati Karo dengan Kepala Kejaksaan Negeri Karo	Pemkab. Karo dengan Kepala Kejari Karo	900/1805/BKAD/2023	25 Juli 2023	Pemberian Kuasa untuk melakuka Proses Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Karo yaitu Tanah Eks Rumah Dinas Bupati
21	Surat Somasi	Bapak J.Ras Ralo Sebayang	B.2143/L.2.19/Gp.3/ 1/2	13 Nopember 2023	Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Karo mengeluarkan Somasi
22	Keputusan Bupati Karo	Anggota Tim Penertiban dan Pengamanan BMD berupa Tanah	900/1242/BKAD/2023	29 Desember 2023	Pembentukan Tim Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Tanah

NO.	URAIAN	TUJUAN	NOMOR	TANGGAL	HAL
23	Surat Wakil Bupati Karo	Kepala OPD terkait	005/0243/BKAD/2024	18 Januari 2024	Undangan Rapat yang dilaksanakan pada Hari Jumat, 19 Januari 2024 dengan agenda Rapat tentang Aset Tanah Bagian Umum Setda Kab. Karo antara lain eks Rumah dinas Bupati dan eks Rumah dinas Sekda yang tercatat pada Bagian Umum Setda Kab. Karo
24	Surat Sekretaris Daerah Kab. Karo	Sekretaris Daerah Provsu	900/0347/BKAD/2024	26 Januari 2024	Konfirmasi dan permintaan dokumen aset tanah Pemerintah Kabupaten Karo
25	Surat Sekretaris Daerah Kab. Karo	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karo	900/0346/BKAD/2024	26 Januari 2024	Konfirmasi dan permintaan dokumen pendukung aset tanah Pemerintah Kabupaten Karo
26	Surat Sekretaris Daerah Kab. Karo	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu	900/0742/BKAD/2024	7 Maret 2024	Konfirmasi dan permintaan dokumen pendukung aset tanah Pemerintah Kabupaten Karo
27	Surat Kepala BKAD Kab. Karo	Pimpinan Redaksi Harian SIB Medan	900/1010/BKAD/2024	21 Mei 2024	Permintaan Hardcopy Rilis Berita terkait Eks Rumh Dinas Sekda dan Eks Rumah Dinas Bupati Karo
28	Surat Kepala BKAD Kab. Karo	Pimpinan Redaksi Harian Waspada Medan	900/1011/BKAD/2024	21 Mei 2024	Permintaan Hardcopy Rilis Berita terkait Eks Rumh Dinas Sekda dan Eks Rumah Dinas Bupati Karo
29	Surat Bupati Karo	Kepala Kejaksaan, Kepala Perangkat Daeah terkait	005/1706/BKAD/2024	5 Juli 2024	Undangan Rapat (Pembahasan atas Aset Tanah bermasalah sesuai dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan Kejaksaan yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 10 Juli 2024 pada Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Bupati Karo atas Acara Pembahasan atas Aset Tanah Bermasalahsesuai dengan SKK dengan Kejaksaan.
30	Surat Pernyataan Bpk. Drs. Ngadep Tarigan (Mantan Pejabat di Pemkab. Karo)		-	16 Juli 2024	Surat Pernyataan terkait Tanah Milik Pemkab. Karo
31	Surat Pernyataan Bpk.Daftar Karo-Karo (Mantan Pejabat di Pemkab. Karo)		-	17 Juli 2024	Surat Pernyataan terkait Tanah Milik Pemkab. Karo
32	Surat Pernyataan Bpk. Sabar Perangin-angin (Mantan Pejabat di Pemkab. Karo)		-	26 Juli 2024	Surat Pernyataan terkait Tanah Milik Pemkab. Karo
33	Surat Sekretaris Daerah Kab. Karo	Lurah Gung Leto Kec. Kabanjahe	630-11/2189/BU/2024	20 Agustus 2024	Permohonan Penerbitan Surat Penguasaan Fisik dan Surat Keterangan Tanah
34	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Karo dan Kejaksaan Negeri Karo	Pemkab. Karo dan Kejaksaan Negeri Karo	119/647/PEM/2024 dan Nomor 2085/L.2.19/65.3/09/2024	19 September 2024	tentang Penanganan maslah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pengamanan Aset Daerah dan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah
35	Surat Bupati Karo	Kepala Kejari, PD, Saksi-saksi	005/2575/BKAD/2024	30 September 2024	Undangan Rapat (Pembahasan atas tanah eks Rumah Dinas Bupati dan Eks Rumah Dinas Sekda) yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 02 Oktober 2024 di Ruang Rapat Kantor Kejaksaan.
36	Surat Bupati Karo	Kapolres, Kejari, Kepala Perangkat Daerah terkait	005/2619/BKAD/2024	3 Oktober 2024	Undangan Rapat (Pembahasan atas pelaksanaan pengukuran tanah eks Rumah Dinas Bupati dan eks Rumah Dinas Sekda) yang dilaksanakan pada Hari Jumat 04 Oktober 2024 Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Bupati Karo atas Pembahasan atas pelaksanaan pengukuran tanah eks Rumah Dinas Bupati dan Eks Rumah Dinas Sekda
37	Surat Bupati Karo	OPD Terkait	005/2634/BU/2024	04 Oktober 2024	Undangan Pengukuran Tanah
38	Surat Bupati Karo	Kepala Kejaksaan Negeri Karo	005/2635/BU/2024	04 Oktober 2024	Undangan
39	Surat Bupati Karo	Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo	300/2636/BU/2024	04 Oktober 2024	Permohonan Bantuan Pengamanan
40	Dokumentasi Pengukuran				Dokumentasi Pengukuran Aset Eks Rumah Dinas Bupati
41	Berkas Permohonan Sertipikat	Kantor Pertanahan Kab. Karo	-	07 Oktober 2024	Penyampaian Permohonan, berkas penguasaan fisik dan kelengkapan terkait persyaratan penerbitan sertipikat atas Aset Eks Rumah Dinas Bupati
42	Sertipikat Hak Pakai	-	42/HP/BPN-12.06/X/2024	28 Oktober 2024	Setipikat Hak Pakai atas Bidang Tanah seluas 3,317 M2
43	Keputusan Bupati Karo		900/1077/BKAD/2024	08 November 2024	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024
44	Nomor Objek Pajak (NOP	-	12.09.080.006.005.0135.0		NOP Aset Pemkab. Karo atas Eks Rumah Bupati di Jln. Kartini Kabanjahe
45	Surat Bupati Karo	Forkopimda dan Perangkat Daerah	130/0378/PEM/2025	31 Januari 2025	Silaturahmi Forkopimda (sekaligus Penyerahan Sertipikat Rumah Dinas Eks Bupati
46	Surat Sekretaris Daerah Kab. Karo	OPD Terkait	005/0938/BKAD/2025	25 Maret 2025	Undangan Rapat terkait Pembahasan atas Surat dari Kartika & Rouly Law Firm
47	Surat Sekretaris Daerah Kab. Karo	OPD Terkait	005/1024/BKAD/2025	11 April 2025	Undangan Rapat terkai Audensi atas Rumah Dinas eks Bupati Karo

NO.	URAIAN	TUJUAN	NOMOR	TANGGAL	HAL
48	Surat Relas Panggilan kepada Tergugat	Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Karo	61./Pdt.G/2025/PN Kbj	05 Mei 2025	Surat Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 61/Pdt.G/2025/PN Kbj Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe atas Pemanggilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo sebagai Tergugat II untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara perdata antara Haryanest Sebayang, dkk sebagai Para Penggugat lawan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo (Bupati Karo) dkk atas objek perkara yaitu aset tanah eks Rumah Dinas Bupati Karo di Jln. Kartini Kabanjahe Kabanjahe akan diselenggarakan Pada Hari Kamis, Tanggal 08 Mei 2025 bertempat di Pengadilan Negeri Kabanjahe
	Surat Kepala BKAD Kab. Karo	Bupati karo Cq Sekretaris Daerah Kab. Karo	900/1010/BKAD/2025	15 Mei 2025	Permohonan Bantuan Hukum
48	Surat Relas Panggilan kepada Tergugat	Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Karo	43./Pdt.G/2026/PN Kbj	12 Maret 2026	Surat Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 43/Pdt.G/2026/PN Kbj Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe atas Pemanggilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo sebagai Tergugat III untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara perdata antara Haryanest Sebayang, dkk sebagai Para Penggugat lawan Dr. Drs. Eddi Surianta, M.Pd dkk atas objek perkara yaitu aset tanah eks Rumah Dinas Bupati Karo di Jln. Kartini Kabanjahe Kabanjahe akan diselenggarakan Pada Hari senin, Tanggal 30 Maret 2026 bertempat di Pengadilan Negeri Kabanjahe
49	Surat Kepala BKAD Kab. Karo	Bupati karo Cq Sekretaris Daerah Kab. Karo	900/820/BKAD/2026	17 Maret 2026	Permohonan Bantuan Hukum

Langkah-Langkah yang Telah Dilakukan atas Pengamanan Aset Arboretum di Desa Merek Kecamatan Merek Pada Pemerintah Kabupaten Karo

NO	SURAT	TUJUAN	NOMOR	TANGGAL	HAL
1	Nm_Unit	Bupati Karo	500.4/154/MRK/2024	5 Maret 2024	Laporan Kejadian Perambahan Hutan di Desa Merek Kec.Merek
2	Bupati Karo	Kepala Kepolisian	900/0712/BKAD/2024	5 Maret 2024	Laporan Kejadian Penebangan Pohon di Desa Merek Kec. Merek
3	Wakil Bupati Karo	Para Asisten, Kepala BKAD, Kepala Bappeda, Kadis PUTR, Kepala BPBD, Camat Merek, Kabag Hukum dan Kakan BPN	005/0707/BKAD/2024	5 Maret 2025	Undangan Rapat (Pengamanan Aset Pemerintah Daerah sesuai SK. 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara
	Sekretariat Daerah	Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan	900.0819/BKAD/2025	11 Maret 2025	Konfirmasi Kawasan Arboretum Merek
4	Bupati Karo	Kepala Kepolisian	900/0799/BKAD/2024	19 Maret 2024	Permohonan Penyelidikan atas Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Bukti Hak Milik
5	Wakil Bupati Karo	- Pimpinan DPRD Kab.Karo - SKPD Terkait - Kepala KPN Kab.Karo - Kepala Kesatuan Pengelolaan Huta - Kepala Desa Merek - Simson - Banua - Jhon Melvin G.Munte - Jhoni F Sastra Munte - Rostiani Br Payung - Hongma Br Munte	900/0869BKAD/2024	22 Maret 2024	Undangan Rapat tentang Pembahasan Kawasan Arboretum menjadi Area Penggunaan Lain (APL) yang berada di Desa Merek Kec. Merek pada tanggal 25 Maret 2024
6	Wakil Bupati Karo	OPD Terkait	900/0869/BKAD/2024	22 Maret 2024	Undangan Rapat (Pembahasan Kawasan Arboretum menjadi Area Penggunaaan Lain (APL) yang berada di Desa Merek Kec. Merek
7	Bupati Karo	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	900/0886/BKAD/2024	25 Maret 2024	Permohonan pengalihan status dan kewenangan Kawasan Merek
8	Bupati Karo	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta)	900/1063/BKAD/2024	23 April 2024	Permohonan Status Kewenangan Pengelolaan

NO	SURAT	TUJUAN	NOMOR	TANGGAL	HAL
9	Bupati Karo	Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Karo dan Kepala Kesatuan Pengeloloaan Hutan Wilayah XV Kabanjahe	900/251/BKAD/2024	2 Mei 2024	Keputusan Bupati Karo tentang Pembentukan Tim Pengamanan Aset Khusus Kawasan Arboretum di Desa Merek Kecamatan Merek dan Kawasan Hutan Arboretum di Desa Sarinembah Kecamatan Munte
10	Bupati Karo	Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah XV Kabanjahe, Ir. Juki Tarigan, Ir. Timotius, Ginting, Ir. Sucipto Ginting, Ir. Martin Sitepu	005/1853/BKAD/2024	16 Juli 2024	Undangan Rapat Rabu tanggal 17 Juli 2024 tentang Pembahasan atas Aset Tanah Arboretum di Desa Merek
11	Surat Tugas Sekda		800.1.11.1/1217/ST/20	23 Juli 2024	Melakukan pengamanan Aset dilokasi kawasan Arboretum Desa Merek Kec. Merek tanggal 23 s.d 24 Juli 2024
12	Bupati Karo	Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan	900/1956/BKAD/202	24 Juli 2024	Permohonan Pemberitahuan SIPUHH An .PHAT Riki Sanjaya
13	Bupati Karo	Anggota Tim	900/511/BKAD/2024	30 Juli 2024	Surat Keputusan (SK) Bupati Karo tentang penetapan Kawasan Arboretum Desa Merek Kecamatan Merek dan Kawasan Arboretum Desa Sarinembah Kecamatan Munte merupakan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Karo
14	Bupati Karo	Kepala Desa Merek	900/2032/BKAD/2024	31 Juli 2024	Perintah Audit Investigasi khusus atas Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Bukti Hak Milik Yaitu:
					Surat Keterangan An. Hongma Br Munte (± 20.000 M2)
					Surat Pernyataan An. Hongma Br Munte (± 20.000 M2)
					Surat Pernyataan An. Banua Simson Munte (± 17.813 M2)
					Surat Pernyataan An. Jhony Melvin G. Munthe (± 19.436 M2)
					Surat Pernyataan An. Jhony F.Sastra Munthe (± 17.289 M2)
					Surat pernyataan An. Rostiani Br Payung (± 16.041 M2)
15	Bupati Karo	SKPD Terkait/Kepala Kejaksaan/Kepala kepolisian KPN/Kepala KPH Wil XV di Kabanjahe	900/2038/BKAD/2024	01 Agustus 2024	Undangan Rapat Tgl 01 Agustus 2024 Pembahasan Pengamanan atas Aset Tanah Kawasan Arboretum di Desa Merek
16	Wakil Bupati Karo	SKPD Terkait/Kepala Kejaksaan/Kepala kepolisian KPN/Kepala KPH Wil XV di Kabanjahe	005/2255/BKAD/2024	30 Agustus 2024	Undangan Rapat Tgl 02 September 2024 Pembahasan Pengamanan atas Aset Tanah Kawasan Arboretum di Desa Merek
17	Bupati Karo	Kepala Desa Merek Kecamatan Merek	700/1159/Itkab/2024	29 Oktober 2024	Laporan Audit Investigatif terkait dugaaan pembuatan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Bukti Hak Milik Yang DiterbitkanOleh Kepala Desa Merek Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
18	Surat Kepala Bphl Wil Ii	Kepala BKAD Kab. Karo cq. Sekretaris Daerah Kab. Karo	S.192/BPHL.II/PEPHPHL/PHL.4.1/B/3/2025	5 Maret 2025	Konfirmasi Kepastian Pemkab. Karo atas Kegiatan PHAT Riki Sanjaya
19	Surat Sekretaris Daerah Kab. Karo	Kepala BPHL Wilayah II Medan	900/0819/BKAD/2025	11 Maret 2025	Konfirmasi Kawasan Arboretum Merek

NO	SURAT	TUJUAN	NOMOR	TANGGAL	HAL
20	Surat Camat Merek	Kepala BKAD, Kakan Pertanahan, Kakan KPH XV Kabanjahe, Kades Merek dan Kades Garingging	500.4/177/MRK/2025	15 April 2025	Undangan Rapat Koordinasi terkait Hutan Arboretum Merek
21	Surat Kepala Bkad Kab. Karo		900/911/BKAD/2025	29 April 2025	Pemberitahuan (Untuk tidak memproses sertipikat pada Objek Tanah di Kawasan Arboretum selain an. Pemkab)
22	Surat Sekretaris Daerah Kab. Karo	Kepala Desa Merek dan Kepala Desa Garingging	900/1368/BKAD/2025	16 Mei 2025	Instruksi untuk Pencabutan Plank di Tanah Milik Pemkab. Karo
23	Surat Sekretaris Daerah Kab. Karo	OPD Terkait	900/1438/BKAD/2025	22 Mei 2025	Undangan Rapat (Pembahasan Terkait Lahan Kawasan Hutan Arboretum di Desa Merek Kecamatan Merek yag merupakan Aset Milik emerintah Kabupaten Karoseluas 8,60 Ha yang penggunaannya sampai saat ini sebagai Ruang Terbuka Hijau)
24	Surat Camat Merek	OPD Terkait	005/167/MRK/2026	20 Februari 2026	Tanggal 23 Februari 2026 dilaksanakan Rapat di Ruang Rapat Kantor Camat Merek sesuai dengan Surat Undangan Camat Merek Nomor 005/167/MRK/2026 tanggal 20 Februari 2026 terkait Rapat Pembahasan Hutan Arboretum Kec. Merek dimana Rapat dihadiri Camat Merek, Kabid P BMD pada BKAD Kab. Karo beserta Masyarakat Garingging dan Rapat ditunda berhubung Kepala Desa Merek tidak hadirsesuai undangan dan akan dijadwalkan Kembali
25	surat Bupati Karo	Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo	900/0610/BKAD/2026	27 Februari 2026	Konfirmasi terkait tindaklanjut atas Laporan Kejadian Penebangan Pohon di Desa Merek Kec. Mwrek dan Permohonan Penyelidikan atas Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Bukti Hak Milik
26	Surat An. Bupati Karo	Perangkat Daerah	180/0632/ Hukum/2026	02 Maret 2026	Rapat terkait tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 03 Maret 2026 bertempat di Ruang Rapat Matang Sitepu Kantor Bupati Karo sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Daerah Nomor 180/0632/Hukum/2026 tanggal 02 Maret 2026

Rincian Perumahan PSU Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Nama Perumahan	Nama Pemohon	Alamat Perumahan	Tahun IMB dan atau PBG	IJIN		Sudah di Survey	Progres Pembangunan	Titik Koordinat	Keterangan	Tahun Penyerahan
					IMB	Siteplan					
1	PERUMAHAN NUANSA ASRI I	MAGDALENA BR SUKATENDEL	JALAN LINGKAR DESA KACARIBU KECAMATAN KABANJAHE	2017 (ukuran bangunan 2376 m2)	√	√	√	Diatas 80%	3.086666, 98.457500	Sudah Sertifikat	2021
2	PERUMAHAN NUANSA ASRI II	MAGDALENA BR SUKATENDEL	JALAN SAMURA KECAMATAN KABANJAHE	2017 (ukuran bangunan 1908 m2)	√	√	√	Diatas 80%	3.107131, 98.513456	Sudah Sertifikat	2021
3	PERUMAHAN VILLA REGAJI	JACK RICARDO PERANGIN-ANGIN	DESA REGAJI KEC. MEREK	2018 (ukuran bangunan 2646 m2)	√	√	√	Diatas 80%	3.037152, 98.533686	Sudah Sertifikat	2021
4	PERUMAHAN MONTANA RESIDENCE I	FRANSIUS SITEPU	JL. JUHAR GG. PEMBANGUNAN DESA PERGENDANGAN KEC. TIGABINANGA	2020 (ukuran bangunan 936 m2)	√	√	√	Diatas 80%	3.063865, 98.254701	Persyaratan Pembuatan Sertifikat ke BPN sudah diserahkan ke BKAD	2025
5	PERUMAHAN GENTING ERSINALSAL	DAULAT SEMBIRING (BERTINDAK UNTUK DAN AN. PERUMAHAN GENTING ERSINALSAL)	JL. KABANJAHE-TIGABINANGA DESA SINGGAMANIK KEC. MUNTE	2018 (ukuran bangunan 2520 m2)	√	Gambar	√	Diatas 80%	3.097952, 98.345193	Menunggu Gambar Ukur dari BPN (GU)	2025
6	PERUMAHAN PARADISO VILLAGE ASRI I	RUSMIANI BR MANULANG (PERUMAHAN PARADISO VILLAGE ASRI I)	DESA GURUSINGA KEC. BERASTAGI	2018 (ukuran bangunan 1548 m2)	√	√	√	Diatas 80%	3.162762, 98.502281	Sudah diverifikasi dan perlu pembahasan	Belum Diserahkan
7	PERUMAHAN PARADISO VILLAGE ASRI 3	TIAN CAHYANA BR SITOMPUL (PARADISO VILLAGE ASRI 3)	DESA LINGGA KEC. SIMPANG EMPAT	2019 (ukuran bangunan 1,01 m2)	√	√	√	Diatas 80%	3.119564, 98.472560	Sudah diverifikasi dan perlu pembahasan	Belum Diserahkan
8	PERUMAHAN PARADISO VILLAGE ASRI 2	TIAN CAHYANA BR SITOMPUL (PARADISO VILLAGE ASRI 2)	JL. UDARA DESA NDOKUM SIROGA KEC. SIMPANG EMPAT	2019 (ukuran bangunan 1980 m2)	√	√	√	Diatas 80%	3.149248, 98.472575	Sudah diverifikasi dan perlu pembahasan	Belum Diserahkan
9	PERUMAHAN CITRA TOGI 2	TIAN CAHYANA BR SITOMPUL (BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERUMAHAN CITRA TOGI 2)	JL. KORPRI DESA GURUSINGA KEC. BERASTAGI	2019 (ukuran bangunan 648 m2)	√	√	√	100%	3.163882, 98.497613	Sudah diverifikasi dan perlu pembahasan	Belum Diserahkan

No	Nama Perumahan	Nama Pemohon	Alamat Perumahan	Tahun IMB dan atau PBG	IJIN		Sudah di Survey	Progres Pembangunan	Titik Koordinat	Keterangan	Tahun Penyerahan
					IMB	Siteplan					
10	PERUMAHAN CLUSTER NAMU RAYA	TIAN CAHYANA BR SITOMPUL (BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERUMAHAN CLUSTER NAMU RAYA)	Jl. Namu Raya Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo Prov. Sumatera Utara	2024 (Ukuran Bangunan 36 m2 x 10 unit = 360 m2 (1 Lantai))	√	√	√	Diatas 80%	3.111278, 98.513970	Sudah diverifikasi. PSU sudah dibangun, tetapi belum ada penghuni perumahan	Belum Diserahkan
11	PERUMAHAN ROYAL LINGGA	TIAN CAHYANA BR SITOMPUL (BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERUMAHAN ROYAL LINGGA)	Desa Lingga Kec. Simpang Empat Kab. Karo Prov. Sumatera Utara	2024 (Ukuran Bangunan 36 m2 x 12 unit = 432 m2 (1 Lantai))	√	√	√	Diatas 80%	3.125091, 98.478878	PSU sudah dibangun dan ada perubahan siteplan	Belum Diserahkan
12	PERUMAHAN LUWAK MAS	TIAN CAHYANA BR SITOMPUL (PERUMAHAN LUWAK MAS)	Desa Pengambaten Kec. Merek Kab. Karo Prov. Sumatera Utara	2024 (Ukuran Bangunan 36 m2 x 13 unit = 468 m2 (1 Lantai))	-	√	√	Diatas 80%	2.935487, 98.500543	PSU sudah dibangun, tetapi belum ada penghuni perumahan	Belum Diserahkan
13	PERUMAHAN KARO BHAYANGKARA RESIDENCE	VERA MORINA BR GINTING (PERUMAHAN KARO BHAYANGKARA RESIDENCE)	JL. JAMIN GINTING DESA SAMURA KEC. KABANJAHE	2021 (Perubahan Ijin Perumahan) ukuran bangunan 7668 m2)	√	√	√	Dibawah 80 % (Perubahan Siteplan)	3.115995, 98.517950	Progres dibawah 80 % (Perubahan Siteplan)	Belum Diserahkan
14	PERUMAHAN JE KHESAIN	JULIUS KETAREN, SE (BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT. JEKA BANTA RAYA MANDIRI) / PERUMAHAN JE KHESAIN	JL. JAMIN GINTING DESA RAYA KEC. BERASTAGI	2019 (ukuran bangunan 5117 ; 1088 m2 lantai 1; 2256 ; 1156 m2 lantai 2)	√	Gambar	√	Dibawah 80%	3.144741, 98.505790	PSU Perumahan dikelola sendiri oleh Pihak Manajemen dan tidak diserahkan kepada Pemda	Belum Diserahkan
15	PERUMAHAN AJINEMBAH ASRI	PERBAHANEN GINTING (BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERUMAHAN AJINEMBAH ASRI)	DESA AJUNEMBAH KEC. MEREK	2020 (ukuran bangunan 1368 ; 300 m2)	;-	-	√	Dibawah 80%	3.017858, 98.505220	Rumah ada 4 unit ukuran 8m x 6m dan 1 unit ukuran 11m x 6m	Belum Diserahkan
16	PERUMAHAN MONTANA RESIDENCE 2	ERNAWATI BR SEBAYANG (PERUMAHAN MONTANA RESIDENCE 2)	Kuala, Kel/Desa Kuala, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo, Prov Sumatera Utara	2023 (Ukuran Bangunan 36 m2 x 38 unit = 1368 m2 (1 Lantai))	√	gambar	√	Diatas 80%	3.063656, 98.254724	PSU belum dibangun	Belum Diserahkan
17	VILLA ZOREY WILSON	PT. ZOREY BELLEZA LAND (VILLA ZOREY WILSON)	Jalan Jamin Ginting Villa Zorey Wilson Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo Prov. Sumatera Utara	2023 (Ukuran Bangunan 72 m2 x 59 unit = 4248 m2 (1 Lantai))	√	gambar	√	Dibawah 80%	3.143927, 98.508733	Ada 2 rumah contoh dibangun tetapi belum laku sehingga saat ini yang dijual adalah persil tanah	Belum Diserahkan

No	Nama Perumahan	Nama Pemohon	Alamat Perumahan	Tahun IMB dan atau PBG	IJIN		Sudah di Survey	Progres Pembangunan	Titik Koordinat	Keterangan	Tahun Penyerahan
					IMB	Siteplan					
18		ANDY PRAYITNA	Jl. Tebu Manis Desa Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kab. Karo Prov. Sumatera Utara	2023 (Tipe 140 Ukuran Bangunan 112 m2 x 3 unit = 336 m2 (1 lantai))	-	gambar	√	Dibawah 80%	3.196636°, 98.536141	Dibawah 80%	Belum Diserahkan
19		ANDY PRAYITNA	Jl. Tebu Manis Desa Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kab. Karo Prov. Sumatera Utara	2023 (Tipe 196 Ukuran Bangunan 140 m2 x 34 unit = 4760 m2 (1 lantai)	-	gambar	√	Dibawah 80%	3.196636°, 98.536141	Dibawah 80%	Belum Diserahkan
20	VILLAGE RANI MAS	PT SARDOL JAYA PERKASA (VILLAGE RANI MAS)	Jl. Besar Merek - Sidikalang Desa Dokan Kec. Merek Kab. Karo Prov. Sumatera Utara	2023 (Ukuran Bangunan 36 m2 x 70 unit = 2520 m2 (1 lantai))	-	gambar	√	Dibawah 80%	2.945501, 98.517278	PSU belum dibangun	Belum Diserahkan
21	PERUMAHAN GRIYA SERIKAT DAME (GSD)	PT. DAMANIK AMERTA JAYA (PERUMAHAN DAMANIK) / PERUMAHAN GRIYA SERIKAT DAME (GSD)	Desa Situnggaling Kec. Merek Kab. Karo Prov. Sumatera Utara	2024 (Ukuran Bangunan 36 m2 x 68 unit = 2448 m2 (1 Lantai))	√	√	√	Dibawah 80%	2.931234, 98.499754	Pengembang sudah menyurati Pemda untuk Penyerahan PSU Perumahan (Proses Penilaian Persyaratan Administrasi dan jika persyaratan administrasi telah dilengkapi akan dilakukan Verifikasi Lapangan pada Januari 2026).	Belum Diserahkan
22	PERUMAHAN BINTANG PERSADA ULUNA	PT. BINTANG PERSADA ULUNA (PERUMAHAN BINTANG PERSADA ULUNA)	Jl. Raya Merek - Sidikalang Kel. Pancur Batu Kec. Merek Kab. Karo Prov. Sumatera Utara	2024 (Ukuran Bangunan 36 m2 x 75 unit = 2700 m2 (1 Lantai)	-	√	√	Dibawah 80%	2.931363, 98.499754	Rumah dan PSU yang dibangun masih dibawah 80%	Belum Diserahkan
23	PERUMAHAN LINGGATA RESIDEN	EVALINA BR GINTING (PERUMAHAN LINGGATA RESIDEN)	Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo Prov. Sumatera Utara	2024 (Ukuran Bangunan 50 m2 x 16 unit = 800 m2 (1 Lantai))	-	√	√	Dibawah 80%	3.175163, 98.515881	Baru dibangun 4 unit dan belum laku dan masih kosong (PSU belum dibangun)	Belum Diserahkan
24	PERUMAHAN MEREK / VILLA SIPISO-PISO ASRI	MUKTAR SALEH SITEPU (PERUMAHAN MEREK / VILLA SIPISO-PISO ASRI)	Desa Pengambaten Kec. Merek Kab. Karo Prov. Sumatera Utara	2024 (Ukuran Bangunan 54 m2 x 10 unit = 540 m2 (1 Lantai))	-	√	√	Dibawah 80%	2.919854, 98.523669	Rumah dan PSU yang dibangun masih dibawah 80%	Belum Diserahkan
25	YUS BITANTA	YUS BITANTA	DESA SUKA KEC. TIGAPANAH	2018 (ukuran bangunan 1008 m2)	-	-		Dibawah 80%	3°04'26.4"N 98°31'32.	Perumahan tidak jadi dibangun (PSU belum dibangun)	Belum Diserahkan

No	Nama Perumahan	Nama Pemohon	Alamat Perumahan	Tahun IMB dan atau PBG	IJIN		Sudah di Survey	Progres Pembangunan	Titik Koordinat	Keterangan	Tahun Penyerahan
					IMB	Siteplan					
26	PERUMAHAN RANI MAS	SUSANTI BR GINTING (PERUMAHAN RANI MAS)	JL. JAMIN GINTING DESA SUMBER MUFAKAT KEC. KABANJAHE	2018 (ukuran bangunan 468 m2)	-	-		Dibawah 80%	3.115611, 98.516749	Pailit, Kelanjutan Pembangunan sudah diserahkan kepada pihak lain	Belum Diserahkan
27	PERUMAHAN GRIYA ULIH LATIH NUSANTARA	ODIYANTA SITEPU, SE (PERUMAHAN GRIYA ULIH LATIH NUSANTARA)	JL. JAMIN GINTING DESA SUMBER MUFAKAT KEC. KABANJAHE	2018 (ukuran bangunan 10.404 m2)	√	-		Dibawah 80%	3.144121, 98.505403	Rumah dan PSU yang dibangun masih dibawah 80%	Belum Diserahkan
28	PERUMAHAN GREEN RESIDENCE	SYAMSUL BAHRI (PERUMAHAN GREEN RESIDENCE)	JL. DESA GURUSINGA DESA GURUSINGA KEC. BERASTAGI	2018 (ukuran bangunan 2268 m2)	-	-		Diatas 80%	3.158238, 98.497627	Pembuangan air ke jurang, tetapi parit menuju jurang dimensinya kecil sehingga parit menuju pembuangan tidak sanggup menampung air mengakibatkan air meluap ke jalan umum, belum ada gorong-gorong menuju jurang, sehingga air terhenti di jalan, kondisi PSU saat ini sudah mulai rusak	Belum Diserahkan
29	PERUMAHAN MULAWARI INDAH	MAGDALENA NANI BR BARUS (PERUMAHAN MULAWARI INDAH)	JL. LINGKAR DESA MULAWARI KEC. TIGAPANAH	2018 (ukuran bangunan 1512 m2)	√	-		Diatas 80%	3.086017, 98.520565	PSU sudah dibangun	Belum Diserahkan
30	PERUMAHAN GRAND SAKURA	JUNERI (BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERUMAHAN GRAND SAKURA)	JL. JAMIN GINTING GG. MELAS KEL. SEMPAJAYA KEC. BERASTAGI	2019 (ukuran bangunan 1980 m2)	-	-		Dibawah 80%	3.196272, 98.527405	Belum disurvey	Belum Diserahkan
31	PERUMAHAN GREEN RESIDENCE SIMPANG UJUNG AJI	SYAMSUL BAHRI (PERUMAHAN GREEN RESIDENCE SIMPANG UJUNG AJI)	DESA RUMAH BERASTAGI KEC. BERASTAGI	2019 (ukuran bangunan 432 m2)	-	-		Diatas 80%	3.169059, 98.515092	Rabat beton masih 30%, sisanya jalan telford (PSU sudah dibangun dan sudah mulai rusak sehingga perlu Pembahasan)	Belum Diserahkan

No	Nama Perumahan	Nama Pemohon	Alamat Perumahan	Tahun IMB dan atau PBG	IJIN		Sudah di Survey	Progres Pembangunan	Titik Koordinat	Keterangan	Tahun Penyerahan
					IMB	Siteplan					
32	SYAMSUL BAHRI (PERUMAHAN GREEN RESIDENCE TAHAP III)	SYAMSUL BAHRI (PERUMAHAN GREEN RESIDENCE TAHAP III)	JL. DESA GURUSINGA DESA GURUSINGA KEC. BERASTAGI	2019 (ukuran bangunan 468 m2)	-	-		Diatas 80%	3.159791, 98.499891	Pembuangan air ke jurang, tetapi parit menuju jurang dimensinya kecil sehingga parit menuju pembuangan tidak sanggup menampung air mengakibatkan air meluap ke jalan umum, belum ada gorong-gorong menuju jurang, sehingga air terhenti di jalan, kondisi PSU saat ini sudah mulai rusak	Belum Diserahkan
33	PERUMAHAN PONDOK LAGUNA BERASTAGI	OMBUR RAJAGUKGUK	DESA SEMPAJAYA KEC. BERASTAGI	2019 (ukuran bangunan 1473 m2)	√	-		Sudah 100%	3.198097, 98.528972	PSU sudah dibangun	Belum Diserahkan
34	PERUMAHAN ARIH ERSADA	OSAKA HENDRA GINTING (PERUMAHAN ARIH ERSADA)	JL. LINGKAR DESA GURUSINGA KEC. BERASTAGI	2019 (ukuran bangunan 1008 m2)	√	-		Diatas 80%	3.156563, 98.494859	PSU sudah dibangun	Belum Diserahkan
35		HORMAT PURBA	JL. KOTACANE DESA KACARIBU KEC. KABANJAHE	2019 (ukuran bangunan 1908 m2)	-	-				Lokasi Perumahan belum diketahui	Belum Diserahkan
36		ENTA WITA BR BANGUN, S. Si, Apt	DESA RUMAH BERASTAGI KEC. BERASTAGI	2020 (ukuran bangunan 1080 m2)	-	-				Lokasi Perumahan belum diketahui	Belum Diserahkan
37	PERUMAHAN GREEN CITY RESIDENCE 7	MEGI (BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERUMAHAN GREEN CITY RESIDENCE 7)	DESA KACARIBU KEC. KABANJAHE	2020 (ukuran bangunan 3600 m2)	√	-			3.090911, 98.453006	Belum disurvey	Belum Diserahkan

No	Nama Perumahan	Nama Pemohon	Alamat Perumahan	Tahun IMB dan atau PBG	IJIN		Sudah di Survey	Progres Pembangunan	Titik Koordinat	Keterangan	Tahun Penyerahan
					IMB	Siteplan					
38	PERUMAHAN GREEN RESIDENCE TAHAP I	SYAMSUL BAHRI (PERUMAHAN GREEN RESIDENCE TAHAP I)	DESA GURUSINGA KECAMATAN BERASTAGI	2017 (ukuran bangunan 1332 m2)	-	-			3.159855, 98.499955	Pembuangan air ke jurang, tetapi parit menuju jurang dimensinya kecil sehingga parit menuju pembuangan tidak sanggup menampung air mengakibatkan air meluap ke jalan umum, belum ada gorong-gorong menuju jurang, sehingga air terhenti di jalan, kondisi PSU saat ini sudah mulai rusak	Belum Diserahkan
39		SABAR GANDA L. SITORUS	DESA SITUNGGALING KECAMATAN MEREK	2017 (ukuran bangunan 4320 m2)	-	-		Diatas 80%	2°56'15"N, 98°31'53"E	Rumah tidak dijual saat ini rumah hanya disewakan	Belum Diserahkan
40	GREEN ONASIS RESIDENCE	SERI REJEKINTA SUCH AS ONASIS TARIGAN (BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA GREEN ONASIS RESIDENCE)	JALAN DESA NANG BELAWAN DESA LINGGA KECAMATAN SIMPANG EMPAT	2018 (ukuran bangunan 1230 m2)	-	-			3.100979, 98.461261	Belum disurvey	Belum Diserahkan
41	SYAMSUL BAHRI (PERUMAHAN GREEN RESIDENCE SIMPANG UJUNG AJI)	SYAMSUL BAHRI (PERUMAHAN GREEN RESIDENCE SIMPANG UJUNG AJI)	JALAN UJUNG AJI SIMPANG UJUNG AJI DESA RUMAH BERASTAGI KEC. BERASTAGI	2018 (ukuran bangunan 3024 m2)	-	-			3.169059, 98.515092	PSU sudah dibangun dan perlu Pembahasan	Belum Diserahkan
42	PERUMAHAN BUAH RANGGANG	ODIYANTA SITEPU, ST (PERUMAHAN BUAH RANGGANG)	JALAN JUMA BUAH RANGGANG DESA BUNURAYA KEC. MEREK	2018 (ukuran bangunan RTT = 1728, KO =570 dan 600 m2)	-	gambar			3.088506, 98.508405	PSU sudah dibangun	Belum Diserahkan
43	CLUSTER GREEN LAGUNA	OMBUR RAJAGUKGUK (BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERUMAHAN CLUSTER GREEN LAGUNA)	DUSUN IV DESA SEMPAJAYA KECAMATAN BERASTAGI	2021 (ukuran bangunan 4020 m2)	√	gambar		Sudah 100%	3.198097, 98.528972	Belum disurvey	Belum Diserahkan

No	Nama Perumahan	Nama Pemohon	Alamat Perumahan	Tahun IMB dan atau PBG	IJIN		Sudah di Survey	Progres Pembangunan	Titik Koordinat	Keterangan	Tahun Penyerahan
					IMB	Siteplan					
44	PERUMAHAN JARANGUDA RESIDENCE	A. ROBERT TARIGAN (PERUMAHAN JARANGUDA RESIDENCE)	JALAN JARANGUDA - TONGKOH DESA JARANGUDA KECAMATAN MERDEKA	2021 (ukuran bangunan 1440 m2)	-	-			3.205314, 98.502575	Belum disurvey	Belum Diserahkan
45	EIFFEL OF BERASTAGI	VINTSEN WIJAYA (EIFFEL OF BERASTAGI)	Desa Melas, Kel/Desa Melas, Kec. Dolat Rayat, Kab. Karo, Prov Sumatera Utara	2022 (ukuran bangunan 76.75 x 37 unit = 2812 m2 (1 Lantai))	-	√		Diatas 80%	3.197006, 98.532980	Bangunan Sederhana (Villa), Belum disurvey	Belum Diserahkan
46	PERUMAHAN PINTU ASRI	KRISTINA BR BRAHMANA (PERUMAHAN PINTU ASRI)	Desa Kacaribu Kec. Kabanjahe Kab. Karo Prov. Sumatera Utara	2023 (Ukuran Bangunan 60 m2 x 21 unit = 1260 m2 (1 lantai))	-	gambar		Diatas 80%	3°05'16.6"N 98°27'39.	Belum disurvey	Belum Diserahkan
47	ULINA RESIDENCE 3	RONI PASKAH SEMBIRING DEPARI	Jl. Kotacane Kelurahan Kacaribu	2024 (60 m2 x 16 unit = 960 m2) (1 Lantai)	-	-		Diatas 80%	3.089964, 98.453703	Sudah dibangun 1 rumah contoh tetapi belum laku, pembangunan saat ini terhenti	Belum Diserahkan
48	PERUMAHAN KARO BHAYANGKARA RESIDENCE	VERA MORINA BR GINTING	JL. JAMIN GINTING GG. GARUDA DESA SAMURA KEC. KABANJAHE	2019 (ukuran bangunan 7,81 m2)	-	gambar	√	Diatas 80%	3.115995, 98.517950	Siteplan direvisi tahun 2021 dengan ijin perubahan siteplan, PSU belum dibangun	Belum Diserahkan
49	PERUMAHAN DOKTER	DR. ARJUNA WIJAYA, SP. P (BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN KARO)	JL. KIRAS BANGUN DESA RUMAH KABANJAHE KEC. KABANJAHE	2019 (ukuran bangunan 369 m2)	-	-		Diatas 80%	3.113900°, 98.475732	Perumahan Dokter (Milik Pemda)	Belum Diserahkan
50	KOMPLEK PERTOKOAN KOTA MAS BERASTAGI	OMBUR RAJAGUKGUK	JALAN TRANS BERASTAGI DESA DOLAT RAYAT KEC. DOLAT RAYAT	2018 (ukuran bangunan 1056 ; 1625 m2 lantai 1, 1625 ; 250 lantai 2)	√	gambar		Dibawah 80%	3.201410, 98.534483	Yang masih dibangun adalah ruko	Belum Diserahkan

Rincian Bidang Tanah Dalam Proses Usulan Permohonan Untuk Penerbitan Sertifikat
Tahun 2025

NO	OPD	NAMA ASET	KECAMATAN	TAHAPAN PENGUKURAN	TERBITNYA GAMBAR UKUR (GU) BPN	BERKAS DARI PERANGKAT DAERAH/PENGGUNA BARANG	BERKAS DARI PERANGKAT DAERAH	PROSES BERKAS MAP BIRU_ MELENGKAPI BERKAS GU	TERBITNYA PETA BIDANG (PBT) DARI BPN	BERKAS MAP KUNING_MELENGKAPI KELENGKAPAN BERKAS PBT	TERBITNYA SK DARI BPN	PENGURUSAN NJOP KE BAPENDA	PENGURUSAN BPHTB NIHIL KE BAPENDA	BERKAS MAP PINK_MELENGKAPI KELENGKAPAN BERKAS ASLI DAN SK KE BPN
1	Dinas Kesehatan	Pustu Beganding	Simpang Empat	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	7 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 04 Nop 2025		PBT SUDAH TERBIT UTK DI LENGAKPI MAP KUNING dan Map Kuning sudah disampaikan ke BPN tanggal 23 Januari 2026, dan ada perbaikan berkas tgl 05 Februari 2026	sudah	sudah		
2	Dinas Kesehatan	Pustu Bintang Meriah	Kutabuluh	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	7 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 19 Nop 2025		PBT SUDAH TERBIT UTK DI LENGAKPI MAP KUNING dan Map Kuning sudah disampaikan ke BPN tanggal 23 Januari 2026, dan ada perbaikan berkas tgl 05 Februari 2026	sudah	sudah		
3	Dinas Kesehatan	Pustu Gung Pinto	Namanteran	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	7 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 04 Nop 2025		PBT SUDAH TERBIT UTK DI LENGAKPI MAP KUNING dan Map Kuning sudah disampaikan ke BPN tanggal 23 Desember 2025	SK Kakan Pertanahan tentang Pemberian Hak Pakai selama dipergunakan an pemkab. Karo sudah terbit dan menunggu NJOP	Dlm Pengurusan		
4	Dinas Kesehatan	Pustu Tanjung Beringin	Munte	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	7 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 19 Nop 2025	sudah terbit	PBT SUDAH TERBIT UTK DI LENGAKPI MAP KUNING dan Map Kuning sudah disampaikan ke BPN tanggal 23 Januari 2026, dan ada perbaikan berkas tgl 05 Februari 2026	sudah	sudah		
5	Dinas Pendidikan	SDN 040470 Lingga Julu	Simpang Empat	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	19 Nop 2025	19 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 19 Nop 2025		PBT sudah terbit dan sudah dilengkapi dan Berkas Map Kuning sudah disampaikan ke BPN tgl 23 Januari 2026	sudah	sudah		
6	Dinas Pendidikan	SDN 047161 Suka Desa Suka Mbayak	Tigapanah	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	19 Nop 2025	19 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 19 Nop 2025		PBT sudah keluar dan sudah dilengkapi berkas serta Map Kuning sudah disampaikan ke BPN tgl 23 Januari 2026, ada perbaikan berkas tgl 05 Februari 2026	sudah	sudah		
7	Dinas Pendidikan	SDN 047162 Suka Desa Suka Pilihen	Tigapanah	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	19 Nop 2025	19 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 19 Nop 2025		PBT sudah keluar dan sudah dilengkapi berkas serta Map Kuning sudah disampaikan ke BPN tgl 23 Januari 2026, ada perbaikan berkas tgl 05 Februari 2026	sudah	sudah		
8	Dinas Pendidikan	SDN 040475 Tiga Serangkai Desa Kuta Tengah	Simpang Empat	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	19 Nop 2025	19 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 19 Nop 2025						
9	Dinas Kesehatan	Pustu Bintang Meriah	Kutabuluh	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	7 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 19 Nop 2025						
10	Dinas Kesehatan	Pustu Lau Pakam	Mardingding	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	blm ada	blm ada	Map Biru sudah disampaikan tgl 09 Januari 20	Belum	Belum	Belum	Proses Pengurusan		
11	Dinas Kesehatan	Pustu Ketawaren	Juhar	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	blm ada	blm ada							
12	Dinas Kesehatan	Pustu Rambe Mbelang Lau Pakam	Mardingding	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	sudah ada	sudah ada	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 09 Januari 2026						
13	Dinas Kesehatan	Pustu Nagara	Merek	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	19 Des 2025	19 Des 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 23 Januari 2026						
14	Dinas Kesehatan	Pustu Rambah Tampu	Laubaleng	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	19 Des 2025	19 Des 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 23 Januari 2026						
15	Dinas Kesehatan	Pustu Kuta Buara	Tigabinanga	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	7 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 15 Desember 2025 dan Perbaikan 18 Des 2025	Belum	Belum	Belum	Progres Pengurusan		
16	Dinas Kesehatan	Pustu Batu Mamak	Tigabinanga	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	7 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 15 Desember 2025 dan Perbaikan tgl 18 Des 2025	Belum	Belum	Belum	Progres Pengurusan		
17	Dinas Kesehatan	Rumah Dinas di Pustu Tigabinanga	Tigabinanga	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	blm ada	blm ada	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 09 Januari 2026	Belum	Belum	Belum	Progres Pengurusan		
18	Dinas Kesehatan	Rumah Dinas di Pustu Tigabinanga	Tigabinanga	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	sudah disampaikan	sudah disampaikan	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 09 Januari 2026	Belum	Belum	Belum	Proses Pengurusan		Belum
19	Dinas Kesehatan	Polindes Susuk	tiganderket	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	blm ada	blm ada							
20	Dinas Kesehatan	Pustu Pergendangen	Tigabinanga	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	blm ada	blm ada							
21	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tigabinanga	Tigabinanga	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	blm ada	blm ada							

NO	OPD	NAMA ASET	KECAMATAN	TAHAPAN PENGUKURAN	TERBITNYA GAMBAR UKUR (GU) BPN	BERKAS DARI PERANGKAT DAERAH/PENGGUNA BARANG	BERKAS DARI PERANGKAT DAERAH	PROSES BERKAS MAP BIRU_ MELENGKAPI BERKAS GU	TERBITNYA PETA BIDANG (PBT) DARI BPN	BERKAS MAP KUNING_MELENGKAPI KELENGKAPAN BERKAS PBT	TERBITNYA SK DARI BPN	PENGURUSAN NJOP KE BAPENDA	PENGURUSAN BPHTB NIHIL KE BAPENDA	BERKAS MAP PINK_MELENGKAPI KELENGKAPAN BERKAS ASLI DAN SK KE BPN
22	Dinas Kesehatan	Puskesmas Laubaleng	Laubaleng	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	7 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 18 Des 2025						
23	Dinas Kesehatan	Rumah Dinas Laubaleng	Laubaleng	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	19 Des 2025	19 Des 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 23 Januari 2026						
24	Dinas Kesehatan	Pustu Semangat Gunung	Merdeka	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	19 Des 2025	19 Des 2025	Berkas Map Biru sudah disampaikan ke BPN tanggal 23 Januari 2026						
25	Dinas Kesehatan	Rumah Dinas di Gundaling Berastagi 3	Berastagi	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	blm ada	blm ada							
26	Dinas Kesehatan	Rumah Dinas di Gundaling Berastagi 2	Berastagi	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	blm ada	blm ada							
27	Dinas Kesehatan	Rumah Dinas di Gundaling Berastagi 1	Berastagi	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	blm ada	blm ada							
28	Dinas Kesehatan	Pustu Berastagi Desa Gundaling	Berastagi	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	blm ada	blm ada							
29	Dinas Kesehatan	Pustu Sukababo	Juhar	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	Sudah ada	sudah ada							
30	Dinas Kesehatan	Polindes Susuk	Juhar	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada									
31	Dinas Kesehatan	Puskesmas Juhar Desa Juhar Perangin-angin	Juhar	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	blm ada	blm ada							
32	Dinas Kesehatan	Pustu Mbetong	Juhar	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	sudah disampaikan Januari		Disampaikan ke BPN tgl 23 Januari 2026						
33	Dinas Kesehatan	Pustu Kidupen	Juhar	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	sudah ada	sudah ada	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 04 Nop 2025						
34	Dinas Kesehatan	Pustu Sugihen	Juhar	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	blm ada	blm ada							
35	Dinas Kesehatan	Pustu Batukarang	Payung	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	7 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 04 Nop 2025		ada kekurangan berbatasan pemasangan tanda batas sebelah menyebelah ada banyak dan kurang di ttgn dan harus semua ttgn sudah selesai dan perbaikan pada tanggal 19 Des 2025 diantar ke BPN Perbaikan		Proses Pengurusan		
36	Dinas Kesehatan	Pustu Bandar Tongging	Merek	Selesai	GU Blm ada	7 Nop 2025	7 Nop 2025							
37	Dinas Kesehatan	Pustu Rambah Gelonggong	Laubaleng	Selesai	GU Blm ada	19 Des 2025	19 Des 2025							
38	Dinas Kesehatan	Pustu Nageri Tongging	Merek	Selesai	GU Blm ada	19 Des 2025	19 Des 2025							
39	Dinas Kesehatan	Pustu Partibi Lama	Merek	Selesai	GU Blm ada	19 Des 2025	19 Des 2025							
40	Dinas Kesehatan	Pustu Regaji	Merek	Selesai	GU Blm ada	19 Des 2025	19 Des 2025							
41	Dinas Kesehatan	Pustu Air Mas Perbulan	Laubaleng	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	blm ada	blm ada							
42	Dinas Kesehatan	Pustu Lau Solu		Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	7 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 15 Desember 2025 dan Perbaikan tgl 18 Des 2025	Belum	Belum	Belum	Proses Pengurusan		
43	Dinas Kesehatan	Pustu Lau Mulgap	Mardingding	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	7 Nop 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 15 Des 2025						
44	Dinas Pertanian	BPP Simolap	Tigabinanga	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	15 Des 2025	15 Des 2025	Berkas Dikembalikan BPN berhubung ada masalah intern yang harus diselesaikan						
45	BKAD	Kawasan Arboretum Desa Sar	Munte	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	17 Des 2025	17 Des 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 18 Des 2025				sudah ada		
46	BKAD	Kawasan Arboretum Desa Sar	Munte	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	17 Des 2025	17 Des 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tgl 18 Des 2025				sudah ada		
47	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga serta Pariwisata	Kawasan Juma Jokowi	Laubaleng	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	17 Des 2025	17 Des 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tanggal 04 Februari 2026				sudah ada		
48	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga serta Pariwisata	Kawasan Juma Jokowi	Laubaleng	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	17 Des 2025	17 Des 2025	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tanggal 04 Februari 2026				sudah ada		
49	Dinas Kesehatan	Pustu Singgamanik	Munte	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	sudah ada	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tanggal 04 Februari 2026						
50	Dinas Kesehatan	Pustu Gunung Juhar	Juhar	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	sudah ada	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tanggal 04 Februari 2026						
51	Dinas Kesehatan	Pustu Kutambaru Punti	Tigabinanga	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	sudah ada	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tanggal 04 Februari 2026						
52	Dinas Kesehatan	Pustu Bulan Baru	Simpang Empat	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	7 Nop 2025	sudah ada	Map Biru sudah disampaikan ke BPN tanggal 04 Februari 2026						
53	Dinas Perkim	Perumahan Montana untuk J	Tigabinanga	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	sudah ada	sudah ada	Map Biru sudah disampaikan dan perbaikan dilakukan tgl 22 Desember 2025						
54	Bagian Umum Setda Kab. Karo	Rumah Dinas Sekda Kab. Karo	Kabanjahe	Selesai	Gambar Ukur (GU) BPN ada	sudah ada	sudah ada	Map Biru sudah disampaikan dan perbaikan dilakukan tgl 22 Desember 2025						

Rincian Peralatan Dan Mesin Per Sub Rincian Objek
Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tractor	22.210.000,00	22.210.000,00	0,00
2	Grader	11.757.695.472,00	11.757.695.472,00	0,00
3	Excavator	9.379.534.069,00	9.379.534.069,00	0,00
4	Hauler	1.771.623.760,00	1.771.623.760,00	0,00
5	Asphalt Equipment	715.000.000,00	715.000.000,00	0,00
6	Compacting Equipment	2.336.500.000,00	2.336.500.000,00	0,00
7	Alat Pengangkat	11.000.000,00	76.846.000,00	(65.846.000,00)
8	Mesin Proses	671.847.000,00	671.847.000,00	0,00
9	Alat Penarik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10	Compressor	12.600.000,00	10.600.000,00	2.000.000,00
11	Electric Generating Set	2.530.824.707,00	1.739.311.465,00	791.513.242,00
12	Pompa	1.837.828.670,00	1.763.239.900,00	74.588.770,00
13	Mesin Bor	47.952.300,00	47.952.300,00	0,00
14	Unit Pemeliharaan Lapangan	11.330.000,00	11.330.000,00	0,00
15	Perlengkapan Kebakaran Hutan	619.721.500,00	610.102.000,00	9.619.500,00
16	Peralatan SAR Mountenering	14.580.000,00	14.580.000,00	0,00
17	Alat Bantu Lainnya	0,00	13.918.000,00	(13.918.000,00)
18	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	24.615.323.151,00	20.935.205.149,00	3.680.118.002,00
19	Kendaraan Bermotor Penumpang	17.077.807.608,00	16.685.631.035,00	392.176.573,00
20	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	12.944.732.105,00	13.379.632.105,00	(434.900.000,00)
21	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.061.563.504,00	5.190.162.774,00	(128.599.270,00)
22	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.227.393.741,00	1.884.182.550,00	343.211.191,00
23	Kendaraan Bermotor Khusus	51.724.780.014,00	47.902.190.514,00	3.822.589.500,00
24	Alat Angkutan Kereta Rel	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00
25	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.262.241.650,00	3.677.828.650,00	(415.587.000,00)
26	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	2.777.600,00	0,00	2.777.600,00
27	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
28	Perkakas Bengkel Listrik	306.402.000,00	314.283.250,00	(7.881.250,00)
29	Perkakas Bengkel Service	33.856.000,00	43.157.500,00	(9.301.500,00)
30	Perkakas Bengkel Kayu	40.346.600,00	38.254.600,00	2.092.000,00
31	Peralatan Las	10.400.000,00	6.900.000,00	3.500.000,00
32	Perkakas Pabrik Es	38.509.004,00	63.779.004,00	(25.270.000,00)
33	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0,00	99.227.000,00	(99.227.000,00)
34	Perkakas Bengkel Service	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
35	Perkakas Pengangkat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
36	Perkakas Standard (Standard Tools)	7.715.000,00	3.800.000,00	3.915.000,00
37	Perkakas Bengkel Kerja	71.847.100,00	71.847.100,00	0,00
38	Peralatan Tukang Besi	27.278.400,00	27.278.400,00	0,00
39	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
40	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1.345.846.311,00	1.349.064.086,00	(3.217.775,00)
41	Alat Ukur Universal	1.908.601.179,00	1.870.003.500,00	38.597.679,00
42	Alat Ukur/Tes Klinis Lain	2.106.478.000,00	2.106.478.000,00	0,00
43	Universal Tester	0,00	18.100.000,00	(18.100.000,00)
44	Alat Ukur/Pembanding	202.526.000,00	202.526.000,00	0,00
45	Alat Ukur Lain-Lain	43.631.210,00	43.631.210,00	0,00
46	Alat Timbangan/Biara	261.731.880,00	231.933.680,00	29.798.200,00
47	Specific Set	77.860.788,00	87.480.288,00	(9.619.500,00)
48	Alat Pengukur Keadaan Alam	122.982.600,00	122.982.600,00	0,00
49	Alat Ukur Lainnya	838.130.424,00	650.313.786,00	187.816.638,00
50	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	145.181.500,00	52.249.800,00	92.931.700,00
51	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	73.367.300,00	65.929.500,00	7.437.800,00
52	Alat Panen	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00
53	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	136.931.000,00	136.931.000,00	0,00
54	Alat Laboratorium Pertanian	1.731.903.919,00	1.818.002.977,00	(86.099.058,00)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
55	Alat Processing	17.694.100,00	17.694.100,00	0,00
56	Alat Pasca Panen	740.630.000,00	740.630.000,00	0,00
57	Alat-Alat Peternakan	442.513.596,00	442.513.596,00	0,00
58	Mesin Ketik	147.111.150,00	149.911.150,00	(2.800.000,00)
59	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	55.766.500,00	62.806.500,00	(7.040.000,00)
60	Alat Reproduksi (Penggandaan)	61.010.000,00	61.010.000,00	0,00
61	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	13.254.883.137,00	11.850.286.544,00	1.404.596.593,00
62	Alat Kantor Lainnya	16.598.035.009,50	17.027.772.277,50	(429.737.268,00)
63	Mebel	61.941.972.988,04	51.916.057.876,04	10.025.915.112,00
64	Alat Pengukur Waktu	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00
65	Alat Pembersih	745.051.465,00	218.347.445,00	526.704.020,00
66	Alat Pendingin	1.316.167.006,00	1.229.256.490,00	86.910.516,00
67	Alat Dapur	752.546.068,00	592.820.330,00	159.725.738,00
68	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.771.691.455,00	21.224.988.400,00	1.546.703.055,00
69	Alat Pemadam Kebakaran	982.065.123,00	979.512.939,00	2.552.184,00
70	Meja Kerja Pejabat	1.407.703.297,00	1.347.041.207,00	60.662.090,00
71	Meja Rapat Pejabat	237.969.000,00	436.648.200,00	(198.679.200,00)
72	Kursi Kerja Pejabat	816.768.860,00	863.116.260,00	(46.347.400,00)
73	Kursi Rapat Pejabat	315.930.000,00	491.930.000,00	(176.000.000,00)
74	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.375.250,00	1.375.250,00	0,00
75	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	517.107.250,00	499.961.750,00	17.145.500,00
76	Lemari dan Arsip Pejabat	1.007.288.067,00	1.085.070.099,00	(77.782.032,00)
77	Peralatan Studio Audio	904.456.096,00	755.643.496,00	148.812.600,00
78	Peralatan Studio Video dan Film	3.863.928.563,00	3.099.258.185,00	764.670.378,00
79	Peralatan Studio Gambar	250.718.970,00	301.528.970,00	(50.810.000,00)
80	Peralatan Cetak	135.831.800,00	129.831.800,00	6.000.000,00
81	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	435.852.600,00	427.952.600,00	7.900.000,00
82	Alat Komunikasi Telephone	741.792.839,00	954.352.839,00	(212.560.000,00)
83	Alat Komunikasi Radio SSB	364.920.500,00	364.920.500,00	0,00
84	Alat Komunikasi Radio HF/FM	27.000.000,00	37.800.000,00	(10.800.000,00)
85	Alat Komunikasi Radio VHF	20.175.000,00	5.175.000,00	15.000.000,00
86	Alat Komunikasi Sosial	286.763.400,00	511.971.900,00	(225.208.500,00)
87	Alat-Alat Sandi	0,00	4.810.000,00	(4.810.000,00)
88	Alat Komunikasi Khusus	2.397.212,00	2.397.212,00	0,00
89	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	14.500.000,00	58.260.000,00	(43.760.000,00)
90	Peralatan Pemancar UHF	230.450.000,00	250.950.000,00	(20.500.000,00)
91	Peralatan Antena MF/MW	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
92	Peralatan Antena VHF/FM	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
93	Peralatan Antena UHF	13.800.000,00	26.800.000,00	(13.000.000,00)
94	Peralatan Antena SHF/Parabola	13.437.980,00	24.027.980,00	(10.590.000,00)
95	Switcher Antena	6.500.000,00	18.470.000,00	(11.970.000,00)
96	Switcher/Menara Antena	543.620.500,00	538.810.500,00	4.810.000,00
97	Humidity Control	21.168.000,00	21.168.000,00	0,00
98	Program Input Equipment	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
99	Peralatan Antena Penerima VHF	103.420.000,00	108.220.000,00	(4.800.000,00)
100	Sumber Tenaga	733.665.329,00	240.722.399,00	492.942.930,00
101	Distance Measuring Equipment (DME)	116.150.000,00	95.150.000,00	21.000.000,00
102	Alat Kedokteran Umum	32.581.655.699,11	44.130.709.356,11	(11.549.053.657,00)
103	Alat Kedokteran Gigi	2.450.483.053,00	2.257.345.053,00	193.138.000,00
104	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	223.223.000,00	223.223.000,00	0,00
105	Alat Kedokteran Bedah	7.291.667.730,00	6.306.373.829,00	985.293.901,00
106	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	4.231.345.766,00	3.592.642.321,00	638.703.445,00
107	Alat Kedokteran THT	638.146.792,00	455.849.082,00	182.297.710,00
108	Alat Kedokteran Mata	696.032.476,00	689.762.476,00	6.270.000,00
109	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	11.268.101.746,00	10.367.593.509,00	900.508.237,00
110	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	500.000,00	500.000,00	0,00
111	Alat Kedokteran Anak	2.085.742.885,00	1.659.745.748,00	425.997.137,00
112	Alat Kedokteran Poliklinik	159.376.585,00	633.332.585,00	(473.956.000,00)
113	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.035.398.342,00	1.835.420.002,00	1.199.978.340,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
114	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	2.820.444.586,00	884.169.260,00	1.936.275.326,00
115	Alat Kedokteran Jantung	4.056.225.842,00	3.161.108.380,00	895.117.462,00
116	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.428.096.578,00	243.895.000,00	3.184.201.578,00
117	Alat Kedokteran Transfusi Darah	589.418.640,00	0,00	589.418.640,00
118	Alat Kedokteran Nuklir	139.213.568,00	139.213.568,00	0,00
119	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	594.252.648,00	357.252.800,00	236.999.848,00
120	Alat Kedokteran Gawat Darurat	6.961.398.930,00	6.447.401.059,00	513.997.871,00
121	Alat Kedokteran Jiwa	1.366.788.470,00	1.366.788.470,00	0,00
122	Alat Kedokteran ICCU	126.373.029,00	0,00	126.373.029,00
123	Alat Kedokteran Bedah Jantung	27.307.709,00	2.249.709,00	25.058.000,00
124	Alat Kedokteran Lainnya	374.923.704,00	374.923.704,00	0,00
125	Alat Kesehatan Matra Udara	97.325.000,00	97.325.000,00	0,00
126	Alat Kesehatan Olahraga	48.237.012,00	48.237.012,00	0,00
127	Alat Kesehatan Umum Lainnya	759.618.406,00	751.882.406,00	7.736.000,00
128	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	119.068.736,00	119.068.736,00	0,00
129	Alat Laboratorium Model Hidrolika	4.999.970,00	4.999.970,00	0,00
130	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	48.375.000,00	48.375.000,00	0,00
131	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
132	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00
133	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
134	Alat Laboratorium Cocok Tanam	65.272.727,00	65.272.727,00	0,00
135	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	375.225.000,00	375.225.000,00	0,00
136	Alat Laboratorium Umum	3.514.443.227,00	2.722.158.943,00	792.284.284,00
137	Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.451.704.334,00	1.389.821.634,00	61.882.700,00
138	Alat Laboratorium Kimia	356.626.500,00	360.476.500,00	(3.850.000,00)
139	Alat Laboratorium Patologi	1.242.634.669,00	988.448.424,00	254.186.245,00
140	Alat Laboratorium Hematologi	405.807.890,00	319.708.832,00	86.099.058,00
141	Alat Laboratorium Film	116.215.300,00	264.615.300,00	(148.400.000,00)
142	Alat Laboratorium Makanan	228.176.874,00	180.825.086,00	47.351.788,00
143	Alat Laboratorium Farmasi	275.179.560,00	275.179.560,00	0,00
144	Alat Laboratorium Fisika	47.973.931,00	47.973.931,00	0,00
145	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	5.190.000,00	15.840.000,00	(10.650.000,00)
146	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00
147	Alat Laboratorium Uji Tekstil	181.500.000,00	0,00	181.500.000,00
148	Alat Laboratorium Pertanian	252.912.783,00	290.112.783,00	(37.200.000,00)
149	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	28.575.000,00	28.575.000,00	0,00
150	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	4.717.500,00	4.717.500,00	0,00
151	Alat Laboratorium Biologi Perairan	12.777.648,00	12.777.648,00	0,00
152	Alat Laboratorium Biologi	119.738.388,00	119.738.388,00	0,00
153	Alat Laboratorium Geofisika	50.940.000,00	50.940.000,00	0,00
154	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	98.100.000,00	98.100.000,00	0,00
155	Laboratorium Kearsipan	32.624.760,00	32.624.760,00	0,00
156	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00
157	Alat Laboratorium Lain	222.014.250,00	232.310.750,00	(10.296.500,00)
158	General Laboratory Tool	49.405.940,00	49.405.940,00	0,00
159	Laboratory Safety Equipment	600.000,00	600.000,00	0,00
160	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	964.614.829,00	964.614.829,00	0,00
161	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	1.446.610.543,00	1.446.610.543,00	0,00
162	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	56.446.500,00	56.446.500,00	0,00
163	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	105.724.710,00	82.967.600,00	22.757.110,00
164	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00
165	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	56.050.000,00	56.050.000,00	0,00
166	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	451.953.925,00	442.253.925,00	9.700.000,00
167	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
168	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	3.025.366.679,00	2.623.952.279,00	401.414.400,00
169	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	8.274.337.151,00	8.041.033.438,00	233.303.713,00
170	Radiation Detector	0,00	20.300.000,00	(20.300.000,00)
171	System/Power Supply	0,00	3.928.571,00	(3.928.571,00)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
172	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)
173	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00
174	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
175	Laboratorium Lingkungan	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00
176	Data Accquisition and Analyzing System	200.474.000,00	200.474.000,00	0,00
177	Peralatan Umum	1.717.929.331,00	1.631.349.331,00	86.580.000,00
178	Pemesinan:Mechanical Workshop	79.919.400,00	79.919.400,00	0,00
179	MOB	1.533.000,00	1.533.000,00	0,00
180	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	58.370.000,00	58.370.000,00	0,00
181	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00
182	Anti Lapis Baja	0,00	17.490.000,00	(17.490.000,00)
183	Senjata Lain-Lain	150.990.000,00	150.990.000,00	0,00
184	Alat Keamanan	233.035.862,00	507.404.222,00	(274.368.360,00)
185	Non Senjata Api	20.998.360,00	60.319.789,00	(39.321.429,00)
186	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00
187	Alat Dalmas/Alat Dakhura	17.490.000,00	0,00	17.490.000,00
188	Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	47.732.900,00	11.225.000,00	36.507.900,00
189	Alsus Reserse	42.187.000,00	42.187.000,00	0,00
190	Alsus Fotografi Kepolisian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
191	Komputer Jaringan	1.070.726.528,00	1.138.651.928,00	(67.925.400,00)
192	Personal Computer	77.108.064.348,02	69.012.553.745,02	8.095.510.603,00
193	Komputer Unit Lainnya	300.675.000,00	378.473.000,00	(77.798.000,00)
194	Peralatan Mainframe	856.617.700,00	1.392.517.500,00	(535.899.800,00)
195	Peralatan Mini Computer	125.534.560,00	149.134.560,00	(23.600.000,00)
196	Peralatan Personal Computer	11.214.316.680,00	9.616.125.578,00	1.598.191.102,00
197	Peralatan Jaringan	7.822.977.427,00	7.179.464.326,00	643.513.101,00
198	Peralatan Komputer Lainnya	591.962.486,00	2.198.102.186,00	(1.606.139.700,00)
199	Elektronik/Electric	131.158.802,00	131.158.802,00	0,00
200	Sumur Pemboran	8.218.435.543,00	4.596.900.300,00	3.621.535.243,00
201	Sumur Lainnya	0,00	172.866.000,00	(172.866.000,00)
202	Alat Pengolahan Air	59.940.000,00	59.940.000,00	0,00
203	Baju Pengaman	16.158.990,00	16.158.990,00	0,00
204	Alat Penolong	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00
205	Alat Pendukung Pencarian	432.592.200,00	1.085.101.200,00	(652.509.000,00)
206	Alat Kerja Bawah Air	15.274.800,00	15.274.800,00	0,00
207	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	0,00	28.780.000,00	(28.780.000,00)
208	Alat Ukur Peralatan Faslektrik	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
209	Transport and Storage Equipment for Liquid	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
210	Solid Material Handling Equipment	55.946.000,00	0,00	55.946.000,00
211	Rambu Tidak Bersuar	6.627.238.939,00	6.318.687.970,00	308.550.969,00
212	Peralatan Permainan	113.595.000,00	94.100.000,00	19.495.000,00
213	Peralatan Senam	75.296.000,00	111.046.000,00	(35.750.000,00)
214	Peralatan Olahraga Air	116.223.300,00	116.223.300,00	0,00
215	Peralatan Olahraga Udara	145.842.400,00	145.842.400,00	0,00
216	Peralatan Olahraga Lainnya	2.460.531.333,00	2.460.531.333,00	0,00
Jumlah		**521.656.762.585,67**	**486.891.796.904,67**	**34.764.965.681,00**

Rincian Peralatan Dan Mesin Perangkat Daerah
Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sekretariat DPRD	9.411.459.675,00	10.912.090.274,00	(1.500.630.599,00)
2	Sekretariat Daerah	30.443.414.390,00	26.452.492.135,00	3.990.922.255,00
3	Kecamatan Kabanjahe	1.170.249.428,00	1.138.695.428,00	31.554.000,00
4	Kecamatan Berastagi	1.262.785.075,00	1.020.769.336,00	242.015.739,00
5	Kecamatan Simpang Empat	845.312.225,00	772.912.225,00	72.400.000,00
6	Kecamatan Payung	921.334.687,00	897.934.687,00	23.400.000,00
7	Kecamatan Tiganderket	615.972.003,00	551.388.003,00	64.584.000,00
8	Kecamatan Munte	970.373.926,00	926.873.928,00	43.499.998,00
9	Kecamatan Tiga Binanga	933.270.984,00	739.870.984,00	193.400.000,00
10	Kecamatan Juhar	653.565.808,00	630.767.588,00	22.798.220,00
11	Kecamatan Lau Baleng	514.234.560,00	432.898.628,00	81.335.932,00
12	Kecamatan Barusjahe	792.230.628,00	752.735.628,00	39.495.000,00
13	Kecamatan Tiga Panah	740.523.102,00	686.823.102,00	53.700.000,00
14	Kecamatan Kutabuluh	983.974.628,00	897.955.128,00	86.019.500,00
15	Kecamatan Merek	686.177.725,00	669.899.825,00	16.277.900,00
16	Kecamatan Mardinding	825.150.534,00	587.180.384,00	237.970.150,00
17	Kecamatan Merdeka	676.756.685,00	653.356.685,00	23.400.000,00
18	Kecamatan Namanteran	912.261.528,00	885.737.528,00	26.524.000,00
19	Kecamatan Dolat Rayat	532.564.501,00	509.164.501,00	23.400.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	32.410.815.026,02	32.102.682.526,02	308.132.500,00
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2.052.542.628,00	2.285.272.528,00	(232.729.900,00)
22	Dinas Perhubungan	19.981.346.967,00	18.642.132.995,00	1.339.213.972,00
23	Dinas Kesehatan	65.997.628.752,61	64.292.359.960,61	1.705.268.792,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah	73.860.309.971,04	72.889.913.051,04	970.396.920,00
25	Dinas Pendidikan	138.821.857.795,00	122.620.872.038,00	16.200.985.757,00
26	Dinas Sosial	1.284.715.050,00	1.183.652.500,00	101.062.550,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	3.514.985.005,00	3.163.312.705,00	351.672.300,00
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.223.779.076,00	1.655.668.576,00	568.110.500,00
29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.009.716.326,00	3.323.895.326,00	685.821.000,00
30	Dinas Pertanian	8.696.710.976,00	8.220.126.937,00	476.584.039,00
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.142.559.917,00	1.981.402.385,00	161.157.532,00
32	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.586.341.615,00	1.516.567.065,00	69.774.550,00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.546.282.863,00	4.267.142.263,00	279.140.600,00
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.796.194.885,00	9.197.280.939,00	598.913.946,00
35	Badan Pendapatan Daerah	4.071.521.908,00	3.783.833.623,00	287.688.285,00
36	Inspektorat Daerah	2.748.142.281,00	2.573.819.781,00	174.322.500,00
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.319.087.401,00	1.953.413.400,00	365.674.001,00
38	Dinas Lingkungan Hidup	29.024.667.455,00	28.025.129.264,00	999.538.191,00
39	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	7.541.916.978,00	7.287.362.058,00	254.554.920,00
40	Badan Kesauan Bangsa dan Politik	1.150.754.381,00	1.006.391.531,00	144.362.850,00
41	Satuan Polisi Pamong Praja	24.203.497.249,00	19.085.929.705,00	5.117.567.544,00
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.709.424.603,00	6.154.065.758,00	(444.641.155,00)
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.508.839.748,00	1.062.473.750,00	446.365.998,00
44	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.561.288.537,00	4.341.456.915,00	219.831.622,00
45	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.257.165.680,00	11.662.788.108,00	(405.622.428,00)
46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.743.057.420,00	2.493.305.220,00	249.752.200,00
Jumlah		**521.656.762.585,67**	**486.891.796.904,67**	**34.764.965.681,00**

Rincian Mutasi Tambah Nilai Peralatan dan Mesin
Pada LRA APBD (Barang Pakai Habis)
Tahun 2025

	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	4.877.577.011,00
2	Sekretariat Daerah	5.285.239.683,00
3	Kecamatan Kabanjahe	19.364.000,00
4	Kecamatan Berastagi	218.615.739,00
5	Kecamatan Simpang Empat	49.000.000,00
6	Kecamatan Tiganderket	41.184.000,00
7	Kecamatan Munte	20.099.998,00
8	Kecamatan Juhar	22.798.220,00
9	Kecamatan Lau Baleng	57.935.932,00
10	Kecamatan Barusjahe	16.095.000,00
11	Kecamatan Tiga Panah	30.300.000,00
12	Kecamatan Kutabuluh	62.619.500,00
13	Kecamatan Merek	16.277.900,00
14	Kecamatan Mardinding	65.070.150,00
15	Kecamatan Namanteran	18.044.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	308.132.500,00
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	87.150.000,00
18	Dinas Perhubungan	1.832.784.010,00
19	Dinas Kesehatan	621.521.401,00
20	Rumah Sakit Umum Daerah	687.536.100,00
21	Dinas Pendidikan	13.065.942.030,00
22	Dinas Sosial	117.265.950,00
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	328.149.300,00
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	237.634.100,00
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	352.061.000,00
26	Dinas Pertanian	394.305.039,00
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	189.932.102,00
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	259.140.600,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	117.139.536,00
30	Badan Pendapatan Daerah	238.917.638,00
31	Inspektorat Daerah	174.322.500,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	353.434.901,00
33	Dinas Lingkungan Hidup	1.587.301.499,00
34	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	482.945.980,00
35	Badan Kesauan Bangsa dan Politik	144.362.850,00
36	Satuan Polisi Pamong Praja	2.031.049.794,00
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	284.896.760,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	214.835.998,00
39	Dinas Perpustakaan dan Arsip	54.688.000,00
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	881.760.972,00
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	257.986.200,00
	Jumlah	**36.105.417.893,00**

Rincian Mutasi Tambah Peralatan Dan Mesin
Karena Reklasifikasi Dari KIB D (Jalan, Jaringan Dan Irigasi)
Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	74.030.000,00
2	Kecamatan Kabanjahe	23.400.000,00
3	Kecamatan Berastagi	23.400.000,00
4	Kecamatan Simpang Empat	23.400.000,00
5	Kecamatan Payung	23.400.000,00
6	Kecamatan Tiganderket	23.400.000,00
7	Kecamatan Munte	23.400.000,00
8	Kecamatan Tiga Binanga	193.400.000,00
9	Kecamatan Lau Baleng	23.400.000,00
10	Kecamatan Barusjahe	23.400.000,00
11	Kecamatan Tiga Panah	23.400.000,00
12	Kecamatan Kutabuluh	23.400.000,00
13	Kecamatan Mardinding	172.900.000,00
14	Kecamatan Merdeka	23.400.000,00
15	Kecamatan Namanteran	23.400.000,00
16	Kecamatan Dolat Rayat	23.400.000,00
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	149.674.600,00
18	Dinas Perhubungan	444.680.430,00
19	Dinas Kesehatan	78.720.800,00
20	Dinas Sosial	5.400.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	25.000.000,00
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	370.000.000,00
23	Dinas Pertanian	183.228.000,00
24	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	69.774.550,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	1.250.067.000,00
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.041.000,00
Jumlah		**3.399.116.380,00**

Rincian Penambahan dan Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin
Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal		**486.891.796.904,67**
Koreksi Tambah Saldo Awal		**46.417.120,00**
Koreksi Kurang Saldo Awal		**46.417.120,00**
Mutasi Tambah		***58.279.852.618,00***
1	LRA APBD	36.105.417.893,00
2	LRA BLUD	699.284.432,00
3	LRA BOSP	5.341.533.333,00
4	LRA BOP	73.281.000,00
5	Reklas dari KIB C (Gedung dan Bangunan)	344.584.693,00
6	JKN	500.120.937,00
7	Mutasi antar Perangkat Daerah	3.213.244.750,00
8	Mutasi antar Perangkat Daerah (Penghapusan/Rusak Berat)	4.101.807.000,00
9	Hibah dari Kementrian	624.216.573,00
10	Jasa Konsultan Perencanaan	40.447.778,00
11	Jasa Konsultan Pengawasan	54.220.000,00
12	Hibah dari Pemprov DKI Jakarta	1.796.623.000,00
13	Hibah PT Inalum 2025	190.093.692,00
14	Hibah PT Inalum 2024	200.000.000,00
15	Koreksi dari Biaya Pemeliharaan	51.770.647,00
16	Kurang Catat	4.800.000,00
17	Reklasifikasi dari KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi)	3.399.116.380,00
18	Kapitalisasi Biaya Umum yang Diperhitungkan Menambah Nilai Perolehan	41.544.960,00
19	Koreksi dari Belanja Aset tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	11.766.000,00
20	Koreksi dari Persediaan	1.485.979.550,00
Mutasi Kurang		***23.514.886.937,00***
1	Mutasi antar Perangkat Daerah	3.193.244.750,00
2	Mutasi antar Perangkat Daerah (Penghapusan/Rusak Berat)	4.101.807.000,00
3	Ekstrakomptabel (APBD)	1.773.846.494,00
4	Ekstrakomptabel (BOP)	7.384.000,00
5	Ekstrakomptabel (BOSP)	1.046.512.975,00
6	Reklasifikasi ke KIB B (Ekstrakomptabel)	5.400.000,00
7	Reklasifikasi ke KIB C (Gedung dan Bangunan)	335.595.192,00
8	Utang 2024 (Jasa Konsultan Pengawasan)	3.180.000,00
9	Koreksi Kesalahan Pencatatan Aset	30.920.000,00
10	Reklasifikasi ke KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi)	1.669.547.743,00
11	Reklasifikasi ke KIB E (Aset Tetap Lainnya)	21.193.704,00
12	Utang Pihak Ketiga (BK Prov)	97.152.500,00
13	Penghapusan 2025	4.101.807.000,00
14	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	479.357.128,00
15	Perubahan Kondisi Barang (Rusak Berat)	6.306.008.733,00
16	Koreksi ke Aset Tak Berwujud	48.000.000,00
17	Diserahkan ke Masyarakat	11.210.000,00
18	Koreksi ke Persediaan	281.039.718,00
19	Koreksi ke Jasa	1.680.000,00
Saldo Akhir		**521.656.762.585,67**

Rincian Revitalisasi Peralatan dan Mesin
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
Tahun 2025

No.	Nama Sekolah	Kelompok Aset	Nama Barang	Kondisi	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
Taman Kanak-Kanak (TK)							
1	TK Barung Kersap	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Rak Sepatu	Baik dan Cukup	2	1.571.250,00	3.142.500,00
			Lemari Kertas Kerja	Baik dan Cukup	3	4.979.794,05	14.939.382,15
			Lemari Kertas Kerja UKS	Baik dan Cukup	1	4.979.794,05	4.979.794,05
			Lemari P3K	Baik dan Cukup	1	6.064.679,33	6.064.679,33
			Rak Penyimpanan Gudang	Baik dan Cukup	2	1.543.491,25	3.086.982,50
		Meubelair	Meja Belajar	Baik dan Cukup	8	4.713.750,00	37.710.000,00
			Rak Buku	Baik dan Cukup	4	2.618.750,00	10.475.000,00
			Rak Display	Baik dan Cukup	4	3.142.500,00	12.570.000,00
			Meja Pendidik	Baik dan Cukup	2	1.543.491,25	3.086.982,50
			Kursi Pendidik	Baik dan Cukup	2	1.067.098,00	2.134.196,00
			Bangku Belajar Pelastik	Baik dan Cukup	32	35.569,96	1.138.238,64
			Meja Kerja Administrasi dan Kepala Sekolah	Baik dan Cukup	3	1.543.491,25	4.630.473,75
			Bangku Kerja Administrasi dan Kepala Sekolah	Baik dan Cukup	3	7.706.824,13	23.120.472,38
			Sofa dan Meja Tamu	Baik dan Cukup	1	15.712.500,00	15.712.500,00
			Lemari Arsip	Baik dan Cukup	1	7.232.558,03	7.232.558,03
			Meja konsultasi UKS	Baik dan Cukup	1	1.543.491,25	1.543.491,25
			Kursi Konsultansi UKS	Baik dan Cukup	2	1.067.098,73	2.134.197,45
			Ranjang	Baik dan Cukup	1	5.866.000,00	5.866.000,00
			Bangku Jaga	Baik dan Cukup	1	1.571.250,00	1.571.250,00
			Meja Jaga	Baik dan Cukup	1	1.067.098,73	1.067.098,73
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Karpet	Baik dan Cukup	2	1.086.257,50	2.172.515,00
			Karpet aula	Baik dan Cukup	1	1.086.257,50	1.086.257,50
			Ayunan APE Luar	Baik dan Cukup	1	4.794.722,00	4.794.722,00
			Seluncuran APE Luar	Baik dan Cukup	2	2.906.813,00	5.813.626,00
			Terowongan APE Luar	Baik dan Cukup	1	2.906.813,00	2.906.813,00
			Jungkat-jungkit APE Luar	Baik dan Cukup	2	3.632.940,00	7.265.880,00
			Alat Gelantung APE Luar	Baik dan Cukup	1	4.794.722,00	4.794.722,00
			Tangga Majemuk APE Luar	Baik dan Cukup	1	4.940.010,00	4.940.010,00
			Jaring Laba-Laba APE Luar	Baik dan Cukup	1	5.143.539,00	5.143.539,00
			Sepeda Anak APE Luar	Baik dan Cukup	2	2.906.813,00	5.813.626,00
			Balok Susun APE Dalam	Baik dan Cukup	2	1.222.118,00	2.444.236,00
			Majze PAUD APE Dalam	Baik dan Cukup	2	1.251.029,00	2.502.058,00
			Miniatur Binatang APE Dalam	Baik dan Cukup	2	906.088,00	1.812.176,00
			Balok Rongga PAUD (Kayu) APE Dalam	Baik dan Cukup	2	2.444.969,00	4.889.938,00
			Set Bermaian Peran/ Panggung Boneka Paud APE Dalam	Baik dan Cukup	2	1.309.165,00	2.618.330,00
			APE Bermuatan Pendidikan Karakter/ Budi Pekerti APE Dalam	Baik dan Cukup	2	2.558.204,00	5.116.408,00
			Papan Geometri APE Dalam	Baik dan Cukup	2	2.672.172,00	5.344.344,00
			Bola Berbagai Ukuran APE Dalam	Baik dan Cukup	4	80.154,00	320.616,00
			Set Alat Musik APE Dalam	Baik dan Cukup	2	1.185.979,00	2.371.958,00
			Replika Huruf dan Angka APE Dalam	Baik dan Cukup	2	3.218.967,00	6.437.934,00
			Replika Rambu Lalu lintas APE Dalam	Baik dan Cukup	2	3.586.640,00	7.173.280,00
			APE Berbasis tema PAUD APE Dalam	Baik dan Cukup	2	4.586.793,00	9.173.586,00
			Kaca Pembesar APE Dalam	Baik dan Cukup	2	1.091.390,00	2.182.780,00
			Balok Susun PAUD APE Dalam	Baik dan Cukup	2	1.222.118,00	2.444.236,00
			Papan Lukis APE Dalam	Baik dan Cukup	2	641.074,00	1.282.148,00
		Jumlah					**263.051.535,24**
2	TK Kuta Kendit	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Rak Sepatu	Baik dan Cukup	4	1.571.400,00	6.285.600,00
			Lemari Kertas Kerja R. administrasi	Baik dan Cukup	3	4.980.269,00	14.940.807,00
			Lemari P3K UKS	Baik dan Cukup	1	6.065.258,00	6.065.258,00
			Lemari Kertas Kerja UKS	Baik dan Cukup	1	4.980.269,00	4.980.269,00
			Rak Penyimpanan Gudang	Baik dan Cukup	2	2.619.000,00	5.238.000,00
			Lemari Kertas	Baik dan Cukup	1	4.980.269,00	4.980.269,00
		Meubelair	Meja Belajar	Baik dan Cukup	8	4.714.200,00	37.713.600,00
			Rak Buku	Baik dan Cukup	4	2.619.000,00	10.476.000,00
			Rak Display	Baik dan Cukup	4	3.142.800,00	12.571.200,00

No.	Nama Sekolah	Kelompok Aset	Nama Barang	Kondisi	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
			Meja Pendidik	Baik dan Cukup	2	1.543.639,00	3.087.278,00
			Kursi Pendidik	Baik dan Cukup	2	1.067.200,00	2.134.400,00
			Bangku Belajar Pelastik	Baik dan Cukup	32	35.573,00	1.138.336,00
			Meja Kerja R. Administrasi	Baik dan Cukup	3	1.543.639,00	4.630.917,00
			Bangku Kerja R. Administrasi	Baik dan Cukup	3	7.707.559,86	23.122.679,58
			Sofa dan Meja Tamu	Baik dan Cukup	1	15.714.000,00	15.714.000,00
			Lemari Arsip R. Administrasi	Baik dan Cukup	1	7.233.248,48	7.233.248,48
			Meja konsultasi UKS	Baik dan Cukup	1	1.543.638,00	1.543.638,00
			Kursi Konsultasi UKS	Baik dan Cukup	2	1.067.200,00	2.134.400,00
			Ranjang+Kasur UKS	Baik dan Cukup	1	5.866.560,00	5.866.560,00
			Bangku Jaga	Baik dan Cukup	3	1.067.200,00	3.201.600,00
			Meja Jaga	Baik dan Cukup	1	1.543.638,60	1.543.638,60
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Karpet	Baik dan Cukup	2	1.086.969,00	2.173.938,00
			Karpet Aula	Baik dan Cukup	1	1.086.969,00	1.086.969,00
		Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	Ayunan Ape Luar	Baik dan Cukup	1	4.794.865,00	4.794.865,00
			Seluncuran Ape Luar	Baik dan Cukup	2	4.794.865,00	9.589.730,00
			Terowongan Ape Luar	Baik dan Cukup	1	2.907.090,00	2.907.090,00
			Jungkat-jungkit Ape Luar	Baik dan Cukup	2	3.633.286,00	7.266.572,00
			Alat Gelantung Ape Luar	Baik dan Cukup	1	4.795.179,00	4.795.179,00
			Tangga Majemuk Ape Luar	Baik dan Cukup	1	4.940.482,00	4.940.482,00
			Jaring Laba-Laba Ape Luar	Baik dan Cukup	1	5.144.030,00	5.144.030,00
			Sepeda Anak Ape Luar	Baik dan Cukup	2	2.907.090,00	5.814.180,00
			Balok Susun Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	1.222.235,00	2.444.470,00
			Majze PAUD Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	1.251.149,00	2.502.298,00
			Miniatur Binatang Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	906.174,00	1.812.348,00
			Balok Rongga PAUD (Kayu) Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	2.445.203,00	4.890.406,00
			Set Bermaian Peran/ Panggung Boneka Paud Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	1.309.290,00	2.618.580,00
			APE Bermuatan Pendidikan Karakter/ Budi Pekerti Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	2.558.449,00	5.116.898,00
			Papan Geometri Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	2.672.428,00	5.344.856,00
			Bola Berbagai Ukuran Ape Dalam	Baik dan Cukup	4	80.162,00	320.648,00
			Set Alat Musik Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	1.186.093,00	2.372.186,00
			Replika Huruf dan Angka Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	3.219.275,00	6.438.550,00
			Replika Rambu Lalu lintas Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	3.586.982,00	7.173.964,00
			APE Berbasis tema PAUD Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	4.587.240,00	9.174.480,00
			Kaca Pembesar Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	1.091.494,00	2.182.988,00
			Balok Susun PAUD Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	1.222.235,00	2.444.470,00
			Papan Lukis Ape Dalam	Baik dan Cukup	2	641.236,00	1.282.472,00
		Jumlah					**279.234.347,66**
Sekolah Menengah Pertama (SMP)							
1	SMP Negeri 3 Mardingding	Alat Kantor Lainnya	Papan Tulis Gantung	Baik dan Cukup	1	1.936.190,58	1.936.190,58
		Meubelair	Meja Guru	Baik dan Cukup	1	1.909.299,04	1.909.299,04
			Meja Siswa	Baik dan Cukup	16	1.989.973,65	31.839.578,44
			Kursi Guru	Baik dan Cukup	1	752.963,00	752.963,00
			Kursi Siswa	Baik dan Cukup	32	317.320,12	10.154.243,93
		Jumlah					**46.592.275,00**
2	SMP Negeri 3 Tiga Binanga	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Lemari Obat	Baik dan Cukup	1	4.151.719,41	4.151.719,41
		Alat Kantor Lainnya	Papan Tulis Gantung	Baik dan Cukup	2	1.956.717,36	3.913.434,72
		Meubelair	Meja Guru	Baik dan Cukup	3	1.929.540,73	5.788.622,19
			Meja Siswa	Baik dan Cukup	64	1.005.535,31	64.354.259,83
			Kursi Guru	Baik dan Cukup	5	760.945,64	3.804.728,20
			Kursi Siswa	Baik dan Cukup	64	320.684,23	20.523.790,97
			Kursi Putar	Baik dan Cukup	1	2.716.738,99	2.716.738,99
			Ranjang Periksa Pasien + matras + tangga	Baik dan Cukup	1	3.469.531,64	3.469.531,64
		Jumlah					**108.722.825,96**
		Total					**697.600.983,86**

Rincian Satuan Pendidikan Penerima *Interactive Flat Panel* (IFP)
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
Tahun 2025

No	Jenjang	NPSN	Nama Sekolah	Kelurahan/Desa	Kecamatan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1	PAUD	10261908	TK Swasta Sint Xaverius	Gung Leto	Kabanjahe
2	PAUD	10261935	TK Negeri Pembina Kabanjahe	Gung Leto	Kabanjahe
3	PAUD	69767671	KB Anugrah	Situnggaling	Merek
4	PAUD	10261942	TK Swasta Methodist Kabanjahe	Gung Leto	Kabanjahe
5	PAUD	10261913	TK Masehi GBKP Berastagi	Gundaling I	Berastagi
6	PAUD	69991187	TK Al-Fatih	Jaranguda	Merdeka
7	PAUD	10261909	TK Swasta Kartika I-66	Padang Mas	Kabanjahe
8	PAUD	69910837	TK Harapan Bangsa	Lambar	Tigapanah
9	PAUD	69895646	TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Kabanjahe	Sumber Mufakat	Kabanjahe
10	PAUD	69973656	KB Berbina Kids	Buluh Pancur	Laubaleng
11	PAUD	10261962	TK Negeri Pembina Barusjahe	Barusjahe	Barusjahe
12	PAUD	69943355	PAUD Filadelfia	Semangat	Merdeka
13	PAUD	69767664	KB Tiranus	Gundaling II	Berastagi
14	PAUD	69945334	PAUD Kabeta Sensoria	Ketaren	Kabanjahe
15	PAUD	69908692	TK GBKP Gabriel Suka	Suka	Tigapanah
16	PAUD	69950512	PAUD Harapan Nusa	Laubaleng	Laubaleng
17	PAUD	10261952	TK Swasta Methodist Berastagi	Gundaling I	Berastagi
18	PAUD	10261912	TK Santa Maria	Gundaling I	Berastagi
19	PAUD	10261906	TK Swasta Kemala Bayangkari	Kampung Dalam	Kabanjahe
20	PAUD	10261929	TK GBKP Gloria II Cinta Rakyat	Cinta Rayat	Merdeka
21	PAUD	69910926	PAUD Alfrenta	Nageri	Juhar
22	PAUD	69892497	TK Negeri Satu Atap Munte	Munte	Munte
23	PAUD	10261943	TK Swasta Ora- Et Labora Kabanjahe	Gung Leto	Kabanjahe
24	PAUD	10261921	TK GBKP Imanuel Tiga Binanga	Tigabinanga	Tigabinanga
25	PAUD	69889062	TK Negeri Satu Atap Gajah	Kutatengah	Simpangempat
26	PAUD	10261905	TK Sint Yoseph Tiga Binanga	Tigabinanga	Tigabinanga
27	PAUD	70042108	TK Permata Bunda	Nagalingga	Merek
28	PAUD	69767643	KB Ingan Malem	Kandibata	Kabanjahe
29	PAUD	69767673	KB Bharlind 2	Barusjahe	Barusjahe
30	PAUD	69893920	TK Swasta Jobel Sipituhuta	Situnggaling	Merek
31	PAUD	69910843	PAUD Terpadu Star Kids	Sumber Mufakat	Kabanjahe
32	PAUD	69953280	PAUD Sola Gracia	Singa	Tigapanah
33	PAUD	69979711	TK John Wesley Methodist School	Mardingding	Mardingding
34	PAUD	69960815	TK Sion Gurusinga	Gurusinga	Berastagi
35	PAUD	69767635	KB Manuella	Batukarang	Payung
36	PAUD	69916980	PAUD Anugrah Suka Ceria	Lau Pakam	Mardingding
37	PAUD	69829161	PAUD Yerikho HKBP Kabanjahe	Lau Cimba	Kabanjahe
38	PAUD	69893063	TK Swasta Rasta Sari Juhar	Juhar Perangin-Angin	Juhar
39	PAUD	69767670	KB Genesis	Pertibi Lama	Merek
40	PAUD	69830416	TK Swasta GBKP Solagratia Kids Tanjung Barus	Tanjung Barus	Barusjahe
41	PAUD	69895655	TK Swasta Dewi Sartika	Padang Mas	Kabanjahe
42	PAUD	69767666	KB Intan	Singa	Tigapanah
43	PAUD	69893283	TK Swasta Ora Et Labora Simpang Kaban	Sumber Mufakat	Kabanjahe
44	PAUD	69982463	TK Harapan Bunda	Gung Negeri	Kabanjahe
45	PAUD	70000782	TK Harapan Negeri	Sukadame	Tigapanah
46	PAUD	10261916	TK Advent Barusjulu	Barusjulu	Barusjahe
47	PAUD	70039866	TK Cemerlang	Lau Cimba	Kabanjahe
48	PAUD	69899349	PAUD Kasih Karunia	Kidupen	Juhar
49	PAUD	10261957	TK Tunas Bangsa Elim Terpadu	Gundaling I	Berastagi
50	PAUD	69912035	PAUD Prestasi Utama	Kinangkong	Laubaleng
51	PAUD	69933255	TK Negeri Satu Atap Lau Simomo	Lausimomo	Kabanjahe
52	PAUD	69985948	KB Pelita Kasih	Pertibi Lama	Merek
53	PAUD	69893091	TK Swasta Kemuliaan Sion Juhar	Juhar Ginting	Juhar
54	PAUD	69943446	PAUD Aini Syahrum	Kuta Bangun	Tigabinanga
55	PAUD	69959158	TK Betlehem	Batukarang	Payung
56	PAUD	69916982	TK GBKP Taman Mawar Sharon	Singgamanik	Munte
57	PAUD	10261914	TK Trinity Berastagi	Gurusinga	Berastagi
58	PAUD	10261920	TK Getsemane Perbesi	Perbesi	Tigabinanga
59	PAUD	69975493	KB Cahaya Kasih	Gunung Meriah	Kutabuluh

No	Jenjang	NPSN	Nama Sekolah	Kelurahan/Desa	Kecamatan
60	PAUD	69910846	PAUD Sayang Bunda Papa	Rih Tengah	Kutabuluh
61	PAUD	69991199	TK Nurul Falah	Rumah Berastagi	Berastagi
62	PAUD	10261927	TK Pancur Siwah Batukarang	Batukarang	Payung
63	PAUD	10261958	TK Wijayanta Tigapanah	Tigapanah	Tigapanah
64	PAUD	69966298	KB EKKLESIA	Pancur Batu	Merek
65	PAUD	69916758	TK SWASTA MAHKOTA	Pancur Batu	Merek
66	PAUD	69965200	TK GBKP BAHTERA NUH	Bintang Meriah	Kutabuluh
67	PAUD	70003219	KB ELIESER	Lingga	Simpangempat
68	PAUD	70039544	KB Army Dolat Rayat	Dolat Rayat	Dolat Rayat
69	PAUD	69916790	PAUD JEVINUS SCHOOL	Lau Solu	Mardingding
70	PAUD	10261915	TK SYALOOM GBKP BUNURAYA	Bunuraya	Tigapanah
71	PAUD	10261955	TK GALILEA GBKP RAYA BERASTAGI	Raya	Berastagi
72	PAUD	70039606	TK Anugrah Rumtase	Semangat	Barusjahe
73	PAUD	10261964	TK NEGERI PEMBINA JUHAR	Sigenderang	Juhar
74	PAUD	70046983	TK MODERN ISLAMIC	Tiganderket	Tiganderket
75	PAUD	69942710	TK SWASTA MISIONER	Seberaya	Tigapanah
76	PAUD	69911130	PAUD BEZALEEL	Kutambelin	Laubaleng
77	PAUD	69910987	PAUD BRERI KIDS	Selandi	Payung
78	PAUD	10261959	TK NEGERI SATU ATAP AJIBUHARA	Ajibuhara	Tigapanah
79	PAUD	69912568	PAUD RAHAYU CHANDRA BETHANIA	Ketaren	Kabanjahe
80	PAUD	10261950	TK SWASTA EKLESIA GBKP KABANJAHE	Kampung Dalam	Kabanjahe
Sekolah Dasar (SD)					
1	SD	10202077	SD SWASTA ADVENT BARUS JULU	Barusjulu	Barusjahe
2	SD	10202141	SD NEGERI 043946 SUKANALU	Sukanalu	Barusjahe
3	SD	10202165	SD NEGERI 040522 TAMBUNAN	Rumamis	Barusjahe
4	SD	10202182	SD NEGERI 040517 TIGAJUMPA	Sukajulu	Barusjahe
5	SD	10202180	SD NEGERI 040515 TIGAJUMPA	Sukajulu	Barusjahe
6	SD	10202153	SD NEGERI 043947 TANJUNG BARUS	Tanjung Barus	Barusjahe
7	SD	10202166	SD NEGERI 040523 SUKANALU	Sukanalu	Barusjahe
8	SD	10201897	SD NEGERI 044839 BULANJAHE	Bulan Jahe	Barusjahe
9	SD	10202181	SD NEGERI 040516 TIGAJUMPA	Sukajulu	Barusjahe
10	SD	10202173	SD NEGERI 040519 TANJUNG BARUS	Tanjung Barus	Barusjahe
11	SD	10202164	SD NEGERI 040521 SINAMAN	Sinaman	Barusjahe
12	SD	10202174	SD NEGERI 040518 PERTUMBUKEN	Pertumbuken	Barusjahe
13	SD	10259048	SD NEGERI 040526 BARUSJAHE	Barusjahe	Barusjahe
14	SD	10201938	SD NEGERI 045964 BULUH BELANGKE	Sikap	Barusjahe
15	SD	10202167	SD NEGERI 040525 PENAMPEN B	Penampen	Barusjahe
16	SD	10201909	SD NEGERI 044840 TALIMBARU	Talimbaru	Barusjahe
17	SD	10202172	SD NEGERI 040520 TANJUNG BARUS	Persadanta	Barusjahe
18	SD	10201924	SD NEGERI 046419 SERDANG	Serdang	Barusjahe
19	SD	10202161	SD NEGERI 044838 TANGKIDIK	Tengkidik	Barusjahe
20	SD	10220343	SD NEGERI 047170 BULAN JULU	Bulan Julu	Barusjahe
21	SD	10259050	SD SWASTA LETNAN JENDRAL JAMIN GINTING	Gundaling II	Berastagi
22	SD	10220328	SD NEGERI 040456 BERASTAGI	Raya	Berastagi
23	SD	10220327	SD NEGERI 040455 BERASTAGI	Rumah Berastagi	Berastagi
24	SD	10202078	SD SWASTA ALWASLIYAH BERASTAGI	Tambak Lau Mulgap I	Berastagi
25	SD	10220329	SD NEGERI 040458 BERASTAGI	Gundaling II	Berastagi
26	SD	10201939	SD NEGERI 046573 BERASTAGI	Rumah Berastagi	Berastagi
27	SD	10258532	SD NEGERI 040460 BERASTAGI	Rumah Berastagi	Berastagi
28	SD	10220529	SD NEGERI 040462 BERASTAGI	Gundaling II	Berastagi
29	SD	10259045	SD NEGERI BERTINGKAT BERASTAGI	Raya	Berastagi
30	SD	10202043	SD NEGERI 040454 PECEREN	Peceren	Berastagi
31	SD	10202152	SD NEGERI 044825 GUNDALING I BERASTAGI	Gundaling I	Berastagi
32	SD	10220422	SD SWASTA TRINITY BERASTAGI	Gundaling II	Berastagi
33	SD	10201930	SD NEGERI 045965 PECEREN	Sempajaya	Berastagi
34	SD	69987100	SD SWASTA KRISTEN MUTIARA MURNI KARYA	Lau Gumba	Berastagi
35	SD	10202546	SD NEGERI 046411 DOULU	Doulu	Berastagi
36	SD	69772553	SD SWASTA ELIM KAIROS SMART BERASTAGI	Gundaling I	Berastagi
37	SD	10201861	SD NEGERI 047160 BERASTAGI	Gundaling I	Berastagi
38	SD	10202044	SD NEGERI 040457 BERASTAGI	Gundaling I	Berastagi
39	SD	10202046	SD NEGERI 040461 BERASTAGI	Gundaling I	Berastagi
40	SD	10202095	SD SWASTA MASEHI BERASTAGI	Gundaling I	Berastagi
41	SD	10202110	SD SWASTA METHODIST BERASTAGI	Gundaling I	Berastagi
42	SD	10202045	SD NEGERI 040459 BERASTAGI	Gundaling I	Berastagi
43	SD	10220432	SD NEGERI 045952 GURUSINGA	Gurusinga	Berastagi

No	Jenjang	NPSN	Nama Sekolah	Kelurahan/Desa	Kecamatan
44	SD	69950506	SD SWASTA GEMILANG BERASTAGI	Rumah Berastagi	Berastagi
45	SD	69966315	SD SWASTA TAHFIZH QURAN KARIMAH	Sempajaya	Berastagi
46	SD	10202199	SD NEGERI 040538 SAMPUN	Sampun	Dolat Rayat
47	SD	10201908	SD NEGERI 044849 KUBUCOLIA	Kubucolia	Dolat Rayat
48	SD	10220335	SD NEGERI 044852 BUKIT	Bukit	Dolat Rayat
49	SD	10201926	SD NEGERI 046422 DOLAT RAYAT	Dolat Rayat	Dolat Rayat
50	SD	10201857	SD NEGERI 047171 BASAM TONGKOH	Dolat Rayat	Dolat Rayat
51	SD	10220332	SD NEGERI 040544 DOLAT RAYAT	Dolat Rayat	Dolat Rayat
52	SD	10202193	SD NEGERI 040557 JUHAR	Juhar Ginting	Juhar
53	SD	10202192	SD NEGERI 040556 JUHAR	Juhar Ginting	Juhar
54	SD	10202140	SD NEGERI 043945 PERNANTIN	Pernantin	Juhar
55	SD	10202194	SD NEGERI 040559 BIAKNAMPE	Nageri	Juhar
56	SD	10202139	SD NEGERI 043944 JUHAR	Juhar Ginting	Juhar
57	SD	10202131	SD NEGERI 040564 KERIAHEN	Keriahen	Juhar
58	SD	10202162	SD NEGERI 040562 KUTAGUGUNG	Kutagugung	Juhar
59	SD	10202118	SD NEGERI 040563 SUGIHEN	Sugihen	Juhar
60	SD	10201901	SD NEGERI 044858 SUKABABO	Sukababo	Juhar
61	SD	10202132	SD NEGERI 040565 KIDUPEN	Kidupen	Juhar
62	SD	10201902	SD NEGERI 044859 KETAWAREN	Ketawaren	Juhar
63	SD	10202133	SD NEGERI 040566 LAULINGGA	Lau Lingga	Juhar
64	SD	10201903	SD NEGERI 044860 JANDI	Jandi	Juhar
65	SD	10202112	SD SWASTA METHODIST KABANJAHE	Gung Negeri	Kabanjahe
66	SD	10220439	SD NEGERI PERCONTOHAN KABANJAHE	Gung Negeri	Kabanjahe
67	SD	10202104	SD NEGERI 040448 KABANJAHE	Gung Leto	Kabanjahe
68	SD	10202030	SD NEGERI 040451 KABANJAHE	Padang Mas	Kabanjahe
69	SD	10220418	SD SWASTA BETESDA KABANJAHE	Gung Negeri	Kabanjahe
70	SD	10202099	SD NEGERI 040443 KABANJAHE	Ketaren	Kabanjahe
71	SD	10202117	SD NEGERI 040449 KABANJAHE	Padang Mas	Kabanjahe
72	SD	10202128	SD NEGERI 043934 KABANJAHE	Kacaribu	Kabanjahe
73	SD	10201874	SD NEGERI 048232 KABANJAHE	Ketaren	Kabanjahe
74	SD	10202101	SD NEGERI 040445 KABANJAHE	Gung Leto	Kabanjahe
75	SD	10202047	SD NEGERI 040463 SUMBUL	Sumber Mufakat	Kabanjahe
76	SD	10202042	SD NEGERI 040452 KABANJAHE	Kampung Dalam	Kabanjahe
77	SD	10202113	SD SWASTA MUHAMMADIYAH 43 KABANJAHE	Lau Cimba	Kabanjahe
78	SD	10202048	SD NEGERI 040464 KANDIBATA	Kandibata	Kabanjahe
79	SD	10202073	SD NEGERI 040450 KABANJAHE	Ketaren	Kabanjahe
80	SD	10202096	SD SWASTA MASEHI 4 KABANJAHE	Kampung Dalam	Kabanjahe
81	SD	10201884	SD NEGERI 048072 KABANJAHE	Padang Mas	Kabanjahe
82	SD	10202049	SD NEGERI 040466 LAUSIMOMO	Lausimomo	Kabanjahe
83	SD	10202108	SD SWASTA MASEHI 1 KABANJAHE	Padang Mas	Kabanjahe
84	SD	10202119	SD NEGERI 043935 SIMPANG KATEPUL	Gung Negeri	Kabanjahe
85	SD	10202109	SD SWASTA MASEHI 3 KABANJAHE	Padang Mas	Kabanjahe
86	SD	10202150	SD NEGERI 044828 KABAN	Kaban	Kabanjahe
87	SD	10202079	SD SWASTA ADVENT SUMBUL	Sumber Mufakat	Kabanjahe
88	SD	69980378	SD SWASTA RAHAYU CHANDRA BETHANIA SCHOOL	Ketaren	Kabanjahe
89	SD	10201870	SD NEGERI 047159 KETAREN	Ketaren	Kabanjahe
90	SD	10202160	SD NEGERI 044824 RUMAH KABANJAHE	Rumah Kabanjahe	Kabanjahe
91	SD	10220430	SD NEGERI 044826 SAMURA	Samura	Kabanjahe
92	SD	10202100	SD NEGERI 040444 KABANJAHE	Padang Mas	Kabanjahe
93	SD	10202102	SD NEGERI 040446 KABANJAHE	Kampung Dalam	Kabanjahe
94	SD	10202103	SD NEGERI 040447 KABANJAHE	Padang Mas	Kabanjahe
95	SD	10202107	SD SWASTA SINT. YOSEPH KABANJAHE	Gung Leto	Kabanjahe
96	SD	10202114	SD SWASTA SANTO XAVERIUS 1 KABANJAHE	Lau Cimba	Kabanjahe
97	SD	69815397	SD SWASTA ORA ET LABORA SIMPANG KABAN	Sumber Mufakat	Kabanjahe
98	SD	69892470	SD SWASTA WESLEY SUMBUL	Sumber Mufakat	Kabanjahe
99	SD	10201914	SD NEGERI 044845 PAYANDERKET	Negeri Jahe	Kutabuluh
100	SD	10202056	SD NEGERI 040501 BINTANG MERIAH	Bintang Meriah	Kutabuluh
101	SD	10202054	SD NEGERI 040499 KUTABULUH	Kuta Buluh	Kutabuluh
102	SD	10201920	SD NEGERI 046414 TANJUNG MERAHE	Tanjung Merahe	Kutabuluh
103	SD	10201873	SD NEGERI 047177 UJUNG DELENG	Ujung Deleng	Kutabuluh
104	SD	10202055	SD NEGERI 040500 JINABUN	Jinabun	Kutabuluh
105	SD	10201916	SD NEGERI 044847 KUTA MALE	Kuta Male	Kutabuluh
106	SD	10202155	SD NEGERI 043949 LAUBULUH	Lau Buluh	Kutabuluh
107	SD	10202154	SD NEGERI 043948 SIABANG ABANG	Siabang Abang	Kutabuluh
108	SD	10201915	SD NEGERI 044846 BUAH RAYA	Buah Raya	Kutabuluh

No	Jenjang	NPSN	Nama Sekolah	Kelurahan/Desa	Kecamatan
109	SD	10220420	SD SWASTA HARAPAN MBURIDI	Mburidi	Kutabuluh
110	SD	10201862	SD NEGERI 046575 KUTABULUH GUGUNG	Kuta Buluh Gugung	Kutabuluh
111	SD	10202188	SD NEGERI 040552 SAMPERAYA	Kutambelin	Laubaleng
112	SD	10202195	SD NEGERI 040549 PERBULAN	Perbulan	Laubaleng
113	SD	10202081	SD SWASTA KATOLIK 3 LAUBALENG	Laubaleng	Laubaleng
114	SD	10202196	SD NEGERI 040548 LAU BALENG	Laubaleng	Laubaleng
115	SD	10259052	SD NEGERI 044627 BULUH PANCUR	Buluh Pancur	Laubaleng
116	SD	10201879	SD NEGERI 048475 GALUNGGUNG	Kutambelin	Laubaleng
117	SD	10201937	SD NEGERI 045963 PERBULAN	Perbulan	Laubaleng
118	SD	10201935	SD NEGERI 045961 BATU RONGKAM	Batu Rongkam	Laubaleng
119	SD	10201883	SD NEGERI 048099 PAYAMBELANG	Mbal-Mbal Petarum	Laubaleng
120	SD	10202204	SD NEGERI 040546 KINANGKONG	Kinangkong	Laubaleng
121	SD	10202205	SD NEGERI 040547 LAUBALENG	Laubaleng	Laubaleng
122	SD	10202126	SD NEGERI 043942 MBAL MBAL PETARUM	Mbal-Mbal Petarum	Laubaleng
123	SD	10201936	SD NEGERI 045962 BULUH PANCUR	Buluh Pancur	Laubaleng
124	SD	10202203	SD NEGERI 040545 DURIN RUGUN	Durin Rugun	Laubaleng
125	SD	10202190	SD NEGERI 040554 LINGGA MUDA	Lingga Muda	Laubaleng
126	SD	10202080	SD SWASTA HKBP BATURONGKAM	Batu Rongkam	Laubaleng
127	SD	10202186	SD NEGERI 040550 MARDINGDING	Kuta Pengkih	Mardingding
128	SD	10201891	SD NEGERI 047732 KUTA KENDIT POLA TEBU	Kuta Pengkih	Mardingding
129	SD	10201869	SD NEGERI 046583 LAUGARUT	Lau Garut	Mardingding
130	SD	10202094	SD SWASTA KATOLIK 2 SUMBEIKAN	Bandar Purba	Mardingding
131	SD	10202127	SD NEGERI 043943 LAUMULGAP	Lau Mulgap	Mardingding
132	SD	10201882	SD NEGERI 048100 PKMT KUTA KENDIT	Kuta Pengkih	Mardingding
133	SD	10201868	SD NEGERI 046582 LAUSOLU	Lau Solu	Mardingding
134	SD	10201900	SD NEGERI 044857 MARDINGDING	Mardingding	Mardingding
135	SD	10202187	SD NEGERI 040551 LAUPAKAM	Lau Pakam	Mardingding
136	SD	69990042	SD SWASTA JOHN WESLEY METHODIST SCHOOL	Lau Kasumpat	Mardingding
137	SD	10201934	SD NEGERI 045960 LAUKASUMPAT	Lau Kasumpat	Mardingding
138	SD	10201887	SD NEGERI 047181 SEMBAHBALA	Lau Mulgap	Mardingding
139	SD	10201867	SD NEGERI 046581 TANJUNG PAMAH	Tanjung Pamah	Mardingding
140	SD	10202082	SD SWASTA RAMBE MBELANG I	Lau Pakam	Mardingding
141	SD	10201899	SD NEGERI 044856 LAU PENGULU	Lau Pengulu	Mardingding
142	SD	10201898	SD NEGERI 044855 PARSAORAN	Lau Pakam	Mardingding
143	SD	10220421	SD SWASTA RIMO BUNGA	Rimo Bunga	Mardingding
144	SD	10201866	SD NEGERI 046580 AEK NAULI	Mardingding	Mardingding
145	SD	10202189	SD NEGERI 040553 BANDAR PURBA	Bandar Purba	Mardingding
146	SD	69947384	SD SWASTA TALITAKUM	Lau Pakam	Mardingding
147	SD	10202038	SD NEGERI 040481 CINTA RAKYAT	Cinta Rayat	Merdeka
148	SD	10201896	SD NEGERI 046574 SADAPERARIH	Sada Perarih	Merdeka
149	SD	69980497	SD SWASTA FILADELFIA SCHOOL	Semangat	Merdeka
150	SD	10202039	SD NEGERI 040471 KAMPUNG MERDEKA	Merdeka	Merdeka
151	SD	10201932	SD NEGERI 045955 UJUNG TERAN	Ujung Teran	Merdeka
152	SD	10202143	SD NEGERI 044830 CINTA RAKYAT	Cinta Rayat	Merdeka
153	SD	10202120	SD NEGERI 043936 MEREK SITUNGGALING	Merek	Merek
154	SD	10202197	SD NEGERI 040536 PARTIBI LAMA	Pertibi Lama	Merek
155	SD	10202171	SD NEGERI 040531 DOKAN	Dokan	Merek
156	SD	10202198	SD NEGERI 040537 RAWANG	Pancur Batu	Merek
157	SD	70013930	SD SWASTA ANUGRAH	Negeri Tongging	Merek
158	SD	69787420	SD NEGERI 040578 AEK HOTANG	Pengambaten	Merek
159	SD	10201853	SD NEGERI 047165 SIMPANG NAGARA	Garingging	Merek
160	SD	10202185	SD NEGERI 040535 PANGAMBATAN	Pengambaten	Merek
161	SD	10202183	SD NEGERI 040533 MEREK	Garingging	Merek
162	SD	10201906	SD NEGERI 044854 TONGGING	Tongging	Merek
163	SD	10201907	SD NEGERI 044851 AJINEMBAH	Ajinembah	Merek
164	SD	10201895	SD NEGERI PERTIBI TEMBE	Pertibi Tembe	Merek
165	SD	10202200	SD NEGERI 040540 SIBOLANGIT	Sibolangit	Merek
166	SD	10201856	SD NEGERI 047169 REGAJI	Regaji	Merek
167	SD	10220342	SD NEGERI 047167 KODON-KODON	Kodon-Kodon	Merek
168	SD	10201863	SD NEGERI 046577 MUNTE	Munte	Munte
169	SD	10202179	SD NEGERI 040514 KINEPPEN	Kineppen	Munte
170	SD	10202175	SD NEGERI 040510 KUTAMBARU	Kutambaru	Munte
171	SD	10201928	SD NEGERI 046413 BARUNGKERSAP	Barung Kersap	Munte
172	SD	10202163	SD NEGERI 040508 SARINEMBAH	Sarinembah	Munte
173	SD	10201913	SD NEGERI 044844 GURUBENUA	Gurubenua	Munte

No	Jenjang	NPSN	Nama Sekolah	Kelurahan/Desa	Kecamatan
174	SD	10202158	SD NEGERI 043952 SUKARAMAI	Sukarame	Munte
175	SD	10201911	SD NEGERI 044842 BERTAH	Sarinembah	Munte
176	SD	69772552	SD NEGERI 040577 KUTAGERAT	Kutagerat	Munte
177	SD	10202159	SD NEGERI 043953 SINGGAMANIK	Singgamanik	Munte
178	SD	10202178	SD NEGERI 040513 BUNGANCOLE	Tanjung Beringin	Munte
179	SD	10202177	SD NEGERI 040512 SARIMUNTE	Sarimunte	Munte
180	SD	10201912	SD NEGERI 044843 PERTUMBUNGEN	Pertumbungen	Munte
181	SD	10201919	SD NEGERI 045953 SELAKKAR	Selakkar	Munte
182	SD	10201929	SD NEGERI 046412 NAGERI	Nageri	Munte
183	SD	10202059	SD NEGERI 040505 MUNTE	Munte	Munte
184	SD	10201910	SD NEGERI 044841 KUTAMBARU	Kutambaru	Munte
185	SD	10202060	SD NEGERI 040506 MUNTE	Munte	Munte
186	SD	10201859	SD NEGERI 047174 KUTARAYAT	Kuta Rayat	Naman Teran
187	SD	10202035	SD NEGERI 040478 SIGARANG-GARANG	Sigarang Garang	Naman Teran
188	SD	10202037	SD NEGERI 040480 SUKANDEBI	Suka Ndebi	Naman Teran
189	SD	10201923	SD NEGERI 046417 NAMAN	Naman	Naman Teran
190	SD	10201871	SD NEGERI 047175 SIMACEM BEKERAH	Simacem	Naman Teran
191	SD	10201878	SD NEGERI 048472 KUTAMBELIN	Kuta Mbelin	Naman Teran
192	SD	10202144	SD NEGERI 044831 GUNG PINTO	Gung Pinto	Naman Teran
193	SD	10220437	SD NEGERI 048473 NDESKATI	Ndeskati	Naman Teran
194	SD	10202050	SD NEGERI 040483 PAYUNG	Payung	Payung
195	SD	10201921	SD NEGERI 046415 BATUKARANG	Batukarang	Payung
196	SD	10202069	SD NEGERI 040492 BATUKARANG	Batukarang	Payung
197	SD	10202068	SD NEGERI 040491 BATUKARANG	Batukarang	Payung
198	SD	10202051	SD NEGERI 040484 PAYUNG	Payung	Payung
199	SD	10220435	SD NEGERI 047173 CIMBANG UJUNG	Cimbang	Payung
200	SD	10202147	SD NEGERI 044834 RIMOKAYU	Rimokayu	Payung
201	SD	10202067	SD NEGERI 040490 BATUKARANG	Batukarang	Payung
202	SD	10202052	SD NEGERI 040485 GURUKINAYAN	Guru Kinayan	Payung
203	SD	10202064	SD NEGERI 040486 GURUKINAYAN	Guru Kinayan	Payung
204	SD	10258530	SD NEGERI 040482 GAJAH	Gajah	Simpangempat
205	SD	10202041	SD NEGERI 040467 LINGGA	Lingga	Simpangempat
206	SD	10202031	SD NEGERI 040472 BEGANDING	Beganding	Simpangempat
207	SD	10202157	SD NEGERI 043951 SURBAKTI	Surbakti	Simpangempat
208	SD	10202040	SD NEGERI 040470 LINGGA JULU	Lingga Julu	Simpangempat
209	SD	10220423	SD NEGERI 040469 SURBAKTI	Surbakti	Simpangempat
210	SD	10201931	SD NEGERI 045954 NANGBELAWAN	Nangbelawan	Simpangempat
211	SD	10202145	SD NEGERI 044832 LINGGA	Lingga	Simpangempat
212	SD	10202032	SD NEGERI 040473 BEGANDING	Beganding	Simpangempat
213	SD	10202036	SD NEGERI 040479 PERTEGUHEN	Perteguhen	Simpangempat
214	SD	10202034	SD NEGERI 040475 TIGA SERANGKAI	Kutatengah	Simpangempat
215	SD	10201872	SD NEGERI 047176 SIRUMBIA	Sirumbia	Simpangempat
216	SD	10202136	SD NEGERI 040570 TIGABINANGA	Tigabinanga	Tigabinanga
217	SD	10202105	SD SWASTA SINT. YOSEPH TIGABINANGA	Tigabinanga	Tigabinanga
218	SD	10202124	SD NEGERI 043940 PERBESI	Perbesi	Tigabinanga
219	SD	10202130	SD NEGERI 040575 KUTABANGUN	Kuta Bangun	Tigabinanga
220	SD	10201905	SD NEGERI 044863 LIMANG	Limang	Tigabinanga
221	SD	10201927	SD NEGERI 046423 PERBESI SIMBELANG	Perbesi	Tigabinanga
222	SD	10201918	SD NEGERI 044865 KUTAMBARU PUNTI	Kutambaru Punti	Tigabinanga
223	SD	10202137	SD NEGERI 040572 TIGABINANGA	Tigabinanga	Tigabinanga
224	SD	10201864	SD NEGERI 046578 KUTABANGUN	Kuta Bangun	Tigabinanga
225	SD	10202134	SD NEGERI 040568 TIGABINANGA	Tigabinanga	Tigabinanga
226	SD	10201875	SD NEGERI 048233 TIGABINANGA	Tigabinanga	Tigabinanga
227	SD	10202129	SD NEGERI 040576 TIGABINANGA	Tigabinanga	Tigabinanga
228	SD	10201894	SD NEGERI 048002 KEMKEM	Kem Kem	Tigabinanga
229	SD	10220438	SD NEGERI 048474 BATU MAMAK	BATUMAMAK	Tigabinanga
230	SD	10202138	SD NEGERI 040574 BUNGABARU	Bunga Baru	Tigabinanga
231	SD	10201886	SD NEGERI 047179 KUTA GERAT	Kuta Gerat	Tigabinanga
232	SD	10202125	SD NEGERI 043941 LAU KAPUR	Lau Kapur	Tigabinanga
233	SD	10201917	SD NEGERI 044864 GUNUNG	Gunung	Tigabinanga
234	SD	10259049	SD NEGERI 044861 PERGENDANGEN	Pergendangen	Tigabinanga
235	SD	10202106	SD SWASTA SIRAJULHUDA TIGABINANGA	Tigabinanga	Tigabinanga
236	SD	10202065	SD NEGERI 040487 TIGANDERKET	Tiganderket	Tiganderket
237	SD	10202063	SD NEGERI 040495 JANDIMERIAH	Jandi Meriah	Tiganderket
238	SD	10259047	SD NEGERI 040489 TANJUNG MERAWA	Tanjung Merawa	Tiganderket

No	Jenjang	NPSN	Nama Sekolah	Kelurahan/Desa	Kecamatan
239	SD	10202062	SD NEGERI 040496 TANJUNG	Tanjung Mbelang	Tiganderket
240	SD	10202071	SD NEGERI 040494 SUSUK	Susuk	Tiganderket
241	SD	10202146	SD NEGERI 044833 NARI GUNUNG	Nari Gunung Satu	Tiganderket
242	SD	69966387	SD SWASTA ADVENT LAU RAKIT	Kuta Galuh	Tiganderket
243	SD	10202070	SD NEGERI 040493 SUKATENDEL	Suka Tendel	Tiganderket
244	SD	10202066	SD NEGERI 040488 TIGANDERKET	Tiganderket	Tiganderket
245	SD	10202061	SD NEGERI 040497 PENAMPEN	Penampen	Tiganderket
246	SD	10220431	SD NEGERI 044835 KUTAMBARU	Kuta Mbaru	Tiganderket
247	SD	10202122	SD NEGERI 043939 KUTAGALUH	Kuta Galuh	Tiganderket
248	SD	10201933	SD NEGERI 045958 MARDINGDING	Mardingding	Tiganderket
249	SD	10202057	SD NEGERI 040503 PERBAJI	Perbaji	Tiganderket
250	SD	10201892	SD NEGERI 048000 KUTAKEPAR	Kuta Kepar	Tiganderket
251	SD	10202168	SD NEGERI 040527 TIGAPANAH	Tigapanah	Tigapanah
252	SD	10202170	SD NEGERI 040529 AJIBUHARA	Ajibuhara	Tigapanah
253	SD	10201855	SD NEGERI 047168 KACINAMBUN	Kacinambun	Tigapanah
254	SD	10201854	SD NEGERI 047166 SUKADAME	Sukadame	Tigapanah
255	SD	10202169	SD NEGERI 040528 SUKADAME	Sukadame	Tigapanah
256	SD	10201860	SD NEGERI 047162 SUKA	Suka	Tigapanah
257	SD	10201852	SD NEGERI 047164 SEBERAYA	Seberaya	Tigapanah
258	SD	10220349	SD NEGERI 046420 SINGA	Singa	Tigapanah
259	SD	10202202	SD NEGERI 040542 SUKA	Suka	Tigapanah
260	SD	10220331	SD NEGERI 040539 SEBERAYA	Seberaya	Tigapanah
261	SD	10220334	SD NEGERI 044850 KUTAKEPAR SALIT	Kuta Kepar	Tigapanah
262	SD	10202201	SD NEGERI 040541 SUKA	Suka	Tigapanah
263	SD	10220323	SD NEGERI 045956 SUKAMAJU	Sukamaju	Tigapanah
264	SD	10259055	SD NEGERI 044848 AJIJAHE	Ajijahe	Tigapanah
265	SD	10220346	SD NEGERI 048098 KUTAMBELIN	Kuta Mbelin	Tigapanah
266	SD	10220336	SD NEGERI 044853 SIMPANG MULAWARI	Mulawari	Tigapanah
267	SD	10220324	SD SWASTA ADVENT AJIJAHE	Ajijahe	Tigapanah
268	SD	10220337	SD NEGERI 045957 SUKA	Suka	Tigapanah
269	SD	10201925	SD NEGERI 046421 KUBU SIMBELANG	Kubu Simbelang	Tigapanah
270	SD	10202184	SD NEGERI 040534 MANUK MULIA	Manuk Mulia	Tigapanah
271	SD	10201876	SD NEGERI 048291 TIGAPANAH	Tigapanah	Tigapanah
272	SD	10201851	SD NEGERI 047163 AJIJULU	Ajijulu	Tigapanah
273	SD	10220325	SD SWASTA WIJAYANTA TIGAPANAH	Tigapanah	Tigapanah
274	SD	10220330	SD NEGERI 040530 BUNURAYA	Bunuraya	Tigapanah
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
1	SMP	10201943	SMP NEGERI 1 BARUSJAHE	Sukajulu	Barusjahe
2	SMP	10201966	SMP NEGERI 3 BARUSJAHE	Sukanalu	Barusjahe
3	SMP	10201978	SMP NEGERI 2 BARUSJAHE	Sinaman	Barusjahe
4	SMP	10202020	SMP SWASTA ADVENT BARUS JULU	Barusjulu	Barusjahe
5	SMP	10261156	SMP NEGERI SATU ATAP 4 BARUSJAHE	Penampen	Barusjahe
6	SMP	69772645	SMP SWASTA AL-WASHLIYAH NO 42 BERASTAGI	Rumah Berastagi	Berastagi
7	SMP	10201944	SMP NEGERI 1 BERASTAGI	Gundaling I	Berastagi
8	SMP	10201954	SMP SWASTA MASEHI BERASTAGI	Gundaling I	Berastagi
9	SMP	10201956	SMP SWASTA METHODIST BERASTAGI	Gundaling I	Berastagi
10	SMP	10201967	SMP NEGERI 3 BERASTAGI	Raya	Berastagi
11	SMP	10201979	SMP NEGERI 2 BERASTAGI	Gundaling I	Berastagi
12	SMP	10202013	SMP SWASTA BERSAMA BERASTAGI	Rumah Berastagi	Berastagi
13	SMP	10220443	SMP SWASTA LETNAN JENDRAL JAMIN GINTING	Gundaling Ii	Berastagi
14	SMP	69787056	SMP SWASTA TRINITY BERASTAGI	Gundaling Ii	Berastagi
15	SMP	70051339	SMP SWASTA ELIM KAIROS SMART BERASTAGI	Gundaling I	Berastagi
16	SMP	70046691	SMP TAHFIDZ QURAN KARIMAH	Sempajaya	Berastagi
17	SMP	10259556	SMP NEGERI SATU ATAP 1 DOLAT RAYAT	Sampun	Dolat Rayat
18	SMP	10201945	SMP NEGERI 1 JUHAR	Juhar Ginting	Juhar
19	SMP	10201968	SMP NEGERI 3 JUHAR	Keriahen	Juhar
20	SMP	10201980	SMP NEGERI 2 JUHAR	Pernantin	Juhar
21	SMP	10201942	SMP SWASTA SANTA MARIA KABANJAHE	Samura	Kabanjahe
22	SMP	10201946	SMP NEGERI 1 KABANJAHE	Gung Negeri	Kabanjahe
23	SMP	10201950	SMP SWASTA SANTO XAVERIUS 2 KABANJAHE	Lau Cimba	Kabanjahe
24	SMP	10201951	SMP SWASTA SANTO XAVERIUS 1 KABANJAHE	Gung Negeri	Kabanjahe
25	SMP	10201952	SMP SWASTA BHAYANGKARI 2 KABANJAHE	Kampung Dalam	Kabanjahe
26	SMP	10201953	SMP SWASTA MARIA GORETTI KABANJAHE	Gung Leto	Kabanjahe
27	SMP	10201957	SMP SWASTA METHODIST KABANJAHE	Gung Negeri	Kabanjahe
28	SMP	10201958	SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 43 KABANJAHE	Sumber Mufakat	Kabanjahe

No	Jenjang	NPSN	Nama Sekolah	Kelurahan/Desa	Kecamatan
29	SMP	10201969	SMP NEGERI 3 KABANJAHE	Kandibata	Kabanjahe
30	SMP	10201981	SMP NEGERI 2 KABANJAHE	Ketaren	Kabanjahe
31	SMP	10202009	SMP SWASTA ADVENT SUMBUL	Sumber Mufakat	Kabanjahe
32	SMP	10202017	SMP SWASTA GBKP KABANJAHE	Gung Leto	Kabanjahe
33	SMP	10202029	SMP SWASTA IMMANUEL KABANJAHE	Gung Negeri	Kabanjahe
34	SMP	70014706	SMP SWASTA ORA ET LABORA SIMPANG KABAN	Sumber Mufakat	Kabanjahe
35	SMP	69964300	SMP NEGERI 4 KABANJAHE	Gung Negeri	Kabanjahe
36	SMP	70052993	SMP Swasta Rahayu Chandra Bethania School	Ketaren	Kabanjahe
37	SMP	69990055	SMP SWASTA YPK WESLEY SUMBUL KABANJAHE	Sumber Mufakat	Kabanjahe
38	SMP	10201947	SMP NEGERI 1 KUTABULUH	Kuta Buluh	Kutabuluh
39	SMP	10261743	SMP NEGERI SATU ATAP 5 KUTABULUH	Negeri Jahe	Kutabuluh
40	SMP	10259554	SMP NEGERI SATU ATAP 2 KUTABULUH	Ujung Deleng	Kutabuluh
41	SMP	10201948	SMP NEGERI 1 LAUBALENG	Laubaleng	Laubaleng
42	SMP	10201959	SMP SWASTA MUSYAWARAH PERBULAN	Perbulan	Laubaleng
43	SMP	10202016	SMP SWASTA RK BUDI MURNI LAUBALENG	Laubaleng	Laubaleng
44	SMP	70011754	SMP NEGERI 2 LAUBALENG	Kutambelin	Laubaleng
45	SMP	10260926	SMP SWASTA JERUSALEM ARABIA	Lau Pakam	Mardingding
46	SMP	10201960	SMP NEGERI 1 MARDINGDING	Lau Pakam	Mardingding
47	SMP	10201973	SMP NEGERI 2 MARDINGDING	Mardingding	Mardingding
48	SMP	10202014	SMP SWASTA BUDI MURNI PINTU ANGIN	Kuta Pengkih	Mardingding
49	SMP	10220350	SMP NEGERI 3 MARDINGDING	Lau Solu	Mardingding
50	SMP	10259715	SMP NEGERI SATU ATAP 2 MEREK	Pancur Batu	Merek
51	SMP	10201940	SMP SWASTA KARYA TONGGING	Tongging	Merek
52	SMP	10201961	SMP NEGERI 1 MEREK	Merek	Merek
53	SMP	10201962	SMP NEGERI 1 MUNTE	Munte	Munte
54	SMP	10201972	SMP NEGERI 2 MUNTE	Sarinembah	Munte
55	SMP	10202010	SMP SWASTA ANJANG SANA	Kutambaru	Munte
56	SMP	10201949	SMP SWASTA SIEMPAT TERAN NAMAN	Naman	Naman Teran
57	SMP	10201970	SMP NEGERI 1 NAMAN TERAN	Kuta Rayat	Naman Teran
58	SMP	10201974	SMP NEGERI 1 PAYUNG	Batukarang	Payung
59	SMP	10259621	SMP NEGERI SATU ATAP 2 PAYUNG	Payung	Payung
60	SMP	10201963	SMP NEGERI 2 SIMPANGEMPAT	Sirumbia	Simpangempat
61	SMP	10201975	SMP NEGERI 1 SIMPANGEMPAT	Lingga	Simpangempat
62	SMP	10201964	SMP NEGERI 2 TIGABINANGA	Perbesi	Tigabinanga
63	SMP	10201976	SMP NEGERI 1 TIGABINANGA	Tigabinanga	Tigabinanga
64	SMP	10202011	SMP SWASTA ASISI TIGABINANGA	Tigabinanga	Tigabinanga
65	SMP	10220351	SMP NEGERI 3 TIGABINANGA	Kuta Bangun	Tigabinanga
66	SMP	10201971	SMP NEGERI 1 TIGANDERKET	Tiganderket	Tiganderket
67	SMP	10202018	SMP SWASTA ADVENT LAU RAKIT	Kuta Galuh	Tiganderket
68	SMP	10201965	SMP NEGERI 2 TIGAPANAH	Suka	Tigapanah
69	SMP	10201977	SMP NEGERI 1 TIGAPANAH	Sukadame	Tigapanah
70	SMP	10201982	SMP NEGERI 3 TIGAPANAH	Singa	Tigapanah
71	SMP	70015863	SMP SWASTA WIJAYANTA TIGAPANAH	Tigapanah	Tigapanah

Rincian Gedung dan Bangunan per Sub Rincian Objek
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor	151.941.249.664,64	138.299.975.425,36	13.641.274.239,28
2	Bangunan Gudang	8.205.154.326,00	8.200.154.326,00	5.000.000,00
3	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	675.770.000,00	675.770.000,00	0,00
4	Bangunan Gedung Instalasi	1.933.505.469,00	1.743.505.469,00	190.000.000,00
5	Bangunan Gedung Laboratorium	25.425.810.115,48	18.652.024.895,48	6.773.785.220,00
6	Bangunan Kesehatan	96.996.573.274,09	106.513.192.085,12	(9.516.618.811,03)
7	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	742.675.000,00	742.675.000,00	0,00
8	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.199.715.197,00	5.937.419.918,00	262.295.279,00
9	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	266.547.707.414,58	256.938.533.874,58	9.609.173.540,00
10	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.424.777.100,00	3.203.110.053,00	221.667.047,00
11	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	34.713.716.313,00	34.697.490.224,00	16.226.089,00
12	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.364.774.957,00	753.213.000,00	611.561.957,00
13	Bangunan Gedung Garasi/Pool	7.581.739.923,00	7.051.976.131,00	529.763.792,00
14	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	659.272.899,54	591.400.150,54	67.872.749,00
15	Bangunan Gedung Perpustakaan	25.007.659.369,12	24.269.242.039,12	738.417.330,00
16	Bangunan Industri	11.737.420.862,00	11.737.420.862,00	0,00
17	Bangunan Peternakan/Perikanan	1.660.710.030,00	1.660.710.030,00	0,00
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	159.216.079.921,00	158.417.753.225,00	798.326.696,00
19	Bangunan Fasilitas Umum	3.546.340.210,00	3.378.014.155,00	168.326.055,00
20	Bangunan Parkir	211.048.850,00	0,00	211.048.850,00
21	Taman	1.028.749.000,00	1.028.749.000,00	0,00
22	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	215.056.000,00	215.056.000,00	0,00
23	Rumah Negara Golongan I	10.337.893.595,49	4.736.705.280,49	5.601.188.315,00
24	Rumah Negara Golongan II	922.583.414,00	5.617.416.454,00	(4.694.833.040,00)
25	Rumah Negara Golongan III	22.107.563.700,00	15.226.759.175,00	6.880.804.525,00
26	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00
27	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.196.473.100,00	7.121.513.632,00	(5.925.040.532,00)
28	Tugu	3.310.084.130,00	3.141.234.130,00	168.850.000,00
29	Bangunan Peninggalan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
30	Bangunan Menara Telekomunikasi	644.400.000,00	644.400.000,00	0,00
31	Tugu/Tanda Batas Administrasi	941.015.436,00	759.725.436,00	181.290.000,00
32	Pagar	63.482.908.170,76	61.789.391.981,84	1.693.516.188,92
33	Tugu/Tanda Batas Lainnya	99.937.560,00	0,00	99.937.560,00
Jumlah		**912.129.065.001,70**	**883.795.231.952,53**	**28.333.833.049,17**

Rincian Gedung dan Bangunan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan 2024

No.	Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sekretariat DPRD	14.186.576.323,49	13.593.881.553,49	592.694.770,00
2	Sekretariat Daerah	48.211.849.368,00	46.296.050.343,00	1.915.799.025,00
3	Kecamatan Kabanjahe	1.921.590.226,00	1.740.300.226,00	181.290.000,00
4	Kecamatan Berastagi	2.326.148.136,00	2.326.148.136,00	0,00
5	Kecamatan Simpang Empat	1.493.850.800,00	1.463.880.000,00	29.970.800,00
6	Kecamatan Payung	355.925.000,00	355.925.000,00	0,00
7	Kecamatan Tiganderket	864.310.000,00	864.310.000,00	0,00
8	Kecamatan Munte	1.563.600.000,00	1.563.600.000,00	0,00
9	Kecamatan Tiga Binanga	1.632.385.000,00	1.632.385.000,00	0,00
10	Kecamatan Juhar	283.300.000,00	283.300.000,00	0,00
11	Kecamatan Lau Baleng	1.429.860.000,00	1.429.860.000,00	0,00
12	Kecamatan Barusjahe	833.530.200,00	833.530.200,00	0,00
13	Kecamatan Tiga Panah	1.644.870.100,00	1.578.058.100,00	66.812.000,00
14	Kecamatan Kutabuluh	1.661.612.800,00	1.661.612.800,00	0,00
15	Kecamatan Merek	2.007.351.012,00	2.007.351.012,00	0,00
16	Kecamatan Mardinding	1.270.221.533,00	1.270.221.533,00	0,00
17	Kecamatan Merdeka	518.880.740,00	518.880.740,00	0,00
18	Kecamatan Namanteran	629.816.650,00	629.816.650,00	0,00
19	Kecamatan Dolat Rayat	647.630.000,00	647.630.000,00	0,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14.854.170.690,00	14.854.170.690,00	0,00
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.381.731.805,00	1.232.007.605,00	149.724.200,00
22	Dinas Perhubungan	4.858.794.459,00	4.297.383.900,00	561.410.559,00
23	Dinas Kesehatan	90.080.604.329,97	105.200.542.114,00	(15.119.937.784,03)
24	Rumah Sakit Umum Daerah	9.703.608.834,00	9.645.655.900,00	57.952.934,00
25	Dinas Pendidikan	433.405.210.931,53	408.425.436.950,53	24.979.773.981,00
26	Dinas Sosial	293.823.748,00	293.823.748,00	0,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	3.427.873.400,00	3.309.568.400,00	118.305.000,00
28	Dinas Pertanian	19.849.824.777,54	19.707.752.029,54	142.072.748,00
29	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.168.285.346,00	3.168.285.346,00	0,00
30	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	914.334.360,00	864.955.760,00	49.378.600,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	181.645.521.373,00	180.469.792.918,00	1.175.728.455,00
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.102.871.843,97	2.513.420.371,97	589.451.472,00
33	Dinas Lingkungan Hidup	7.885.376.972,00	6.127.079.699,00	1.758.297.273,00
34	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	41.216.735.469,00	39.519.018.797,00	1.697.716.672,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja	820.536.000,00	820.536.000,00	0,00
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.035.534.999,00	955.535.000,00	79.999.999,00
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	10.205.317.775,20	897.925.430,00	9.307.392.345,20
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	795.600.000,00	795.600.000,00	0,00
Jumlah		**912.129.065.001,70**	**883.795.231.952,53**	**28.333.833.049,17**

Rincian Penambahan Dan Pengurangan Nilai Gedung Dan Bangunan
Tahun 2025

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**883.795.231.952,53**
Mutasi Tambah		***71.130.161.523,00***
1	LRA APBD	46.986.998.560,00
2	Mutasi antar Perangkat Daerah	2.425.099.609,00
3	Kurang Catat	56.305.000,00
4	Kapitalisasi Biaya Umum yang Diperhitungkan Menambah Nilai Perolehan	297.408.216,00
5	Mutasi antar Perangkat daerah (Penghapusan Rusak Berat)	1.548.260.000,00
6	Reklasifikasi dari KIB B (Peralatan dan Mesin)	315.595.192,00
7	Biaya Pemeliharaan	15.847.161.065,00
8	Revitalisasi	80.097.000,00
9	Jasa Konsultan Perencanaan	790.099.501,00
10	Jasa Konsultan Pengawasan	1.577.060.181,00
11	Koreksi Kurang Catat atas Temuan BPK 2024	822.273.000,00
12	Reklasifikasi dari KIB D	186.224.199,00
13	Koreksi dari Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	197.580.000,00
Mutasi Kurang		***42.796.328.473,83***
1	Mutasi antar Perangkat Daerah	2.425.099.609,00
2	Mutasi antar Perangkat Daerah (Penghapusan/Rusak Berat)	1.548.260.000,00
3	Penghapusan	1.548.260.000,00
4	Koreksi Pengurangan Revitalisasi	80.097.000,00
5	Ekstrakompabel	9.950.120,00
6	Reklas ke KIB B (Peralatan dan Mesin)	344.584.693,00
7	Reklas ke KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi)	6.575.937.759,00
8	Utang Pihak Ketiga	793.316.000,00
9	TGR 2025	68.712.919,83
10	Reklasifikasi ke KDP	29.125.350.373,00
11	Utang 2024 Jasa Konsultan Perencanaan	120.080.000,00
12	Utang 2024 Jasa Konsultan Pengawasan	156.680.000,00
Saldo Akhir		**912.129.065.001,70**

Rincian Revitalisasi Gedung Dan Bangunan
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
Tahun 2025

No.	Nama Sekolah	Kelompok Aset	Nama Barang	Kondisi	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total
Taman Kanak-Kanak (TK)							
1	TK Barung Kersap	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pekerjaan Fisik Unit Sekolah Baru dan Infrastruktur halaman	Baik dan Cukup	1	1.488.222.723,97	1.488.222.723,97
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Kitchen set	Baik dan Cukup	1	6.264.050,00	6.264.050,00
Jumlah							**1.494.486.773,97**
2	TK Kuta Kendit	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pekerjaan Fisik Unit Sekolah Baru dan Infrastruktur halaman	Baik dan Cukup	1	1.491.236.941,19	1.491.236.941,19
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Kitchen set	Baik dan Cukup	1	6.264.648,00	6.264.648,00
Jumlah							**1.497.501.589,19**
3	TK Negeri Pembina Tiganderket	Bangunan Kesehatan	Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	Baik dan Cukup	1	80.097.000,00	80.097.000,00
Jumlah							**80.097.000,00**
Sekolah Dasar (SD)							
1	SD Negeri 040444 Kabanjahe	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Toilet	Baik dan Cukup	1	252.051.696,00	252.051.696,00
Jumlah							**252.051.696,00**
2	SD Negeri 047168 Kacinambun	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Toilet	Baik dan Cukup	1	126.025.848,00	126.025.848,00
Jumlah							**126.025.848,00**
Sekolah Menengah Pertama (SMP)							
1	SMP Negeri 3 Mardingding	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas	Baik dan Cukup	1	187.272.075,03	187.272.075,03
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Toilet	Baik dan Cukup	1	236.135.650,00	236.135.650,00
Jumlah							**423.407.725,03**
2	SMP Negeri 3 Tiga Binanga	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas	Baik dan Cukup	1	167.996.863,37	167.996.863,37
		Bangunan Kesehatan	Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	Baik dan Cukup	1	200.338.009,78	200.338.009,78
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Toilet	Baik dan Cukup	1	202.942.301,00	202.942.301,00
Jumlah							**571.277.174,16**
3	SMP Negeri 1 Simpang Empat	Bangunan Kesehatan	Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	Baik dan Cukup	1	163.000.000,00	163.000.000,00
Jumlah							**163.000.000,00**
Total							**4.607.847.806,34**

Rincian Jalan, Jaringan Dan Irigasi Per Sub Rincian Objek
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jalan Kabupaten	1.639.654.660.520,72	1.442.178.126.097,31	197.476.534.423,41
2	Jalan Kota	0,00	1.310.312.422,00	(1.310.312.422,00)
3	Jalan Khusus	118.251.095.627,00	116.441.020.550,00	1.810.075.077,00
4	Jalan Lainnya	16.407.624.213,76	11.880.269.999,00	4.527.354.214,76
5	Jembatan pada Jalan Nasional	89.300.000,00	89.300.000,00	0,00
6	Jembatan pada Jalan Kabupaten	106.514.817.255,00	95.552.685.031,00	10.962.132.224,00
7	Jembatan pada Jalan Desa	17.550.344.391,00	17.542.359.391,00	7.985.000,00
8	Bangunan Waduk Irigasi	0,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)
9	Bangunan Pengambilan Irigasi	251.284.574.414,68	248.351.506.017,00	2.933.068.397,68
10	Bangunan Pembawa Irigasi	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
11	Bangunan Pengaman Irigasi	604.762.777,00	604.762.777,00	0,00
12	Bangunan Pelengkap Irigasi	11.197.281.181,00	11.197.281.181,00	0,00
13	Bangunan Pembawa Pasang Surut	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00
14	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	15.186.955.289,00	15.186.955.289,00	0,00
15	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	883.256.029,00	883.256.029,00	0,00
16	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	68.962.641.331,90	62.413.227.661,00	6.549.413.670,90
17	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	31.205.431.950,30	27.098.801.650,30	4.106.630.300,00
18	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	12.847.770.211,00	13.180.498.211,00	(332.728.000,00)
19	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	860.018.396,00	860.018.396,00	0,00
20	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	393.293.626,34	280.693.160,00	112.600.466,34
21	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	4.444.361.125,00	4.743.759.925,00	(299.398.800,00)
22	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	206.578.281,00	206.578.281,00	0,00
23	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	18.978.710.735,00	19.052.740.735,00	(74.030.000,00)
24	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	8.074.198.571,00	8.074.198.571,00	0,00
25	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	59.480.000,00	59.480.000,00	0,00
26	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	47.785.454.445,49	44.833.358.915,49	2.952.095.530,00
27	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	381.307.532,00	0,00	381.307.532,00
28	Bangunan Pembawa Air Kotor	30.735.469.626,75	25.191.884.819,00	5.543.584.807,75
29	Bangunan Pembuang Air Kotor	492.906.640,57	273.790.000,00	219.116.640,57
30	Bangunan Pelengkap Air Kotor	8.358.195.863,00	8.484.954.863,00	(126.759.000,00)
31	Instalasi Air Sumber/Mata Air	6.879.171.969,00	6.879.171.969,00	0,00
32	Instalasi Air Tanah Dalam	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)
33	Instalasi Air Tanah Dangkal	0,00	78.720.800,00	(78.720.800,00)
34	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	20.061.753.174,00	21.311.820.174,00	(1.250.067.000,00)
35	Instalasi Air Buangan Domestik	643.972.506,00	643.972.506,00	0,00
36	Bangunan Penampung Sampah	575.604.458,00	575.604.458,00	0,00
37	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	784.000,00	784.000,00	0,00
38	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	102.750.000,00	102.750.000,00	0,00
39	Instalasi Gardu Listrik Induk	430.727.400,00	420.927.400,00	9.800.000,00
40	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	290.808.572,00	548.208.572,00	(257.400.000,00)
41	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	4.718.000,00	31.518.000,00	(26.800.000,00)
42	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	24.882.000,00	24.882.000,00	0,00
43	Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	1.186.825.138,00	1.186.825.138,00	0,00
44	Jaringan Induk Distribusi	2.808.254.860,00	2.795.795.240,00	12.459.620,00
45	Jaringan Cabang Distribusi	2.777.140.000,00	2.777.140.000,00	0,00
46	Jaringan Sambungan ke Rumah	1.147.262.000,00	1.147.262.000,00	0,00
47	Jaringan Transmisi	124.918.660,00	124.918.660,00	0,00
48	Jaringan Distribusi	18.224.985.472,00	15.437.014.530,00	2.787.970.942,00
49	Jaringan Listrik Lainnya	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)
50	Jaringan Telepon di atas Tanah	52.990.000,00	53.281.000,00	(291.000,00)
51	Jaringan Telepon di bawah Tanah	0,00	47.750.000,00	(47.750.000,00)
52	Jaringan dengan Media Udara	10.120.000,00	10.120.000,00	0,00
53	Jaringan Pipa Distribusi	2.515.048.997,00	2.515.048.997,00	0,00
Jumlah		**2.469.292.002.239,51**	**2.232.811.830.415,10**	**236.480.171.824,41**

Rincian Jalan, Jaringan Dan Irigasi Perangkat Daerah
Tahun 2025 Dan 2024

No.	Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sekretariat DPRD	3.785.000,00	77.815.000,00	(74.030.000,00)
2	Sekretariat Daerah	217.382.892,00	217.382.892,00	0,00
3	Kecamatan Kabanjahe	14.262.425.655,00	11.772.779.999,00	2.489.645.656,00
4	Kecamatan Berastagi	12.867.132.548,00	9.912.694.548,00	2.954.438.000,00
5	Kecamatan Simpang Empat	0,00	23.400.000,00	(23.400.000,00)
6	Kecamatan Payung	0,00	23.400.000,00	(23.400.000,00)
7	Kecamatan Tiganderket	298.820.000,00	322.220.000,00	(23.400.000,00)
8	Kecamatan Munte	149.100.000,00	172.500.000,00	(23.400.000,00)
9	Kecamatan Tiga Binanga	3.974.069.408,00	2.698.383.336,00	1.275.686.072,00
10	Kecamatan Lau Baleng	125.200.000,00	148.600.000,00	(23.400.000,00)
11	Kecamatan Barusjahe	198.980.000,00	222.380.000,00	(23.400.000,00)
12	Kecamatan Tiga Panah	108.900.000,00	132.800.000,00	(23.900.000,00)
13	Kecamatan Kutabuluh	27.500.000,00	23.400.000,00	4.100.000,00
14	Kecamatan Mardinding	199.020.000,00	371.920.000,00	(172.900.000,00)
15	Kecamatan Merdeka	0,00	23.400.000,00	(23.400.000,00)
16	Kecamatan Namanteran	199.800.000,00	223.200.000,00	(23.400.000,00)
17	Kecamatan Dolat Rayat	0,00	23.400.000,00	(23.400.000,00)
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.312.052.550.646,04	2.093.529.011.592,61	218.523.539.053,43
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	5.778.159.808,17	3.650.955.300,00	2.127.204.508,17
20	Dinas Perhubungan	12.700.473.522,00	9.527.542.960,00	3.172.930.562,00
21	Dinas Kesehatan	2.507.379.678,00	1.016.545.938,00	1.490.833.740,00
22	Dinas Pendidikan	37.064.250.665,49	34.294.082.208,49	2.770.168.457,00
23	Dinas Sosial	0,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	370.000.000,00	(370.000.000,00)
26	Dinas Pertanian	268.242.600,00	451.470.600,00	(183.228.000,00)
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	19.068.000,00	19.068.000,00	0,00
28	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	69.774.550,00	(69.774.550,00)
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.383.470.143,00	5.413.470.143,00	(30.000.000,00)
30	Dinas Lingkungan Hidup	2.608.347.664,00	2.608.347.664,00	0,00
31	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	10.444.215.163,00	7.417.259.763,00	3.026.955.400,00
32	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.250.067.000,00	(1.250.067.000,00)
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.166.894.990,00	46.677.017.921,00	489.877.069,00
34	Dinas Perpustakaan dan Arsip	617.733.856,81	0,00	617.733.856,81
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.600.000,00	95.641.000,00	(48.041.000,00)
36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Jumlah		**2.469.292.002.239,51**	**2.232.811.830.415,10**	**236.480.171.824,41**

Rincian Mutasi Pengurangan Jalan, Jaringan Dan Irigasi
Karena Reklasifikasi Ke KIB B Peralatan Dan Mesin
Tahun Anggaran 2025

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	74.030.000,00
2	Kecamatan Kabanjahe	23.400.000,00
3	Kecamatan Berastagi	23.400.000,00
4	Kecamatan Simpang Empat	23.400.000,00
5	Kecamatan Payung	23.400.000,00
6	Kecamatan Tiganderket	23.400.000,00
7	Kecamatan Munte	23.400.000,00
8	Kecamatan Tiga Binanga	193.400.000,00
9	Kecamatan Lau Baleng	23.400.000,00
10	Kecamatan Barusjahe	23.400.000,00
11	Kecamatan Tiga Panah	23.400.000,00
12	Kecamatan Kutabuluh	23.400.000,00
13	Kecamatan Mardinding	172.900.000,00
14	Kecamatan Merdeka	23.400.000,00
15	Kecamatan Namanteran	23.400.000,00
16	Kecamatan Dolat Rayat	23.400.000,00
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	149.674.600,00
18	Dinas Perhubungan	444.680.430,00
19	Dinas Kesehatan	78.720.800,00
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	25.000.000,00
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	370.000.000,00
22	Dinas Pertanian	183.228.000,00
23	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	69.774.550,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja	1.250.067.000,00
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.041.000,00
Jumlah		**3.393.716.380,00**

Rincian Penambahan Pengurangan Nilai Jalan, Jaringan Dan Irigasi
Tahun 2025

Uraian		(Rp)
Saldo Awal		**2.232.811.830.415,10**
Mutasi Tambah		***244.136.753.122,28***
1	LRA APBD	47.329.012.466,00
2	Hibah Kementrian	180.399.036.102,00
3	Mutasi antar Perangkat Daerah	398.194.494,00
4	Kurang Catat	1.350.700.000,00
5	Koreksi dari Belanja Pemeliharaan	258.218.100,00
6	Jasa Konsultan Perencanaan	332.738.607,00
7	Jasa Konsultan Pengawasan	469.096.362,00
8	Koreksi dari Persediaan	487.394.494,00
9	Reklasifikasi dari KIB B (Peralatan dan Mesin)	1.669.547.743,00
10	Reklasifikasi dari KIB C (Gedung dan Bangunan)	6.575.937.759,00
11	Koreksi dari Aset Non Operasional	758.376.430,00
12	Koreksi Kurang Catat Temuan BPK Tahun 2024	289.536.000,00
13	Koreksi dari KDP 2024	1.306.980.147,11
14	Hibah dari Pengembang	33.970.711,80
15	Koreksi Kurang Catat atas Pemeriksaan BPK Tahun 2025	572.378.096,37
16	Kapitalisasi Biaya Umum yang Diperhitungkan Menambah Nilai Perolehan	1.905.635.610,00
Mutasi Kurang		***7.656.581.297,87***
1	Mutasi antar Perangkat Daerah	398.194.494,00
2	Reklasifikasi ke KIB B (Peralatan dan Mesin)	3.393.716.380,00
3	Reklasifikasi ke KIB C (Gedung dan Bangunan)	186.224.199,00
4	Utang 2024 (Jasa Konsultan Perencanaan)	28.000.000,00
5	Utang 2024 (Jasa Konsultan Pengawasan)	23.600.000,00
6	Reklasifikasi ke KIB B (Ekstrakomptabel)	5.400.000,00
7	Utang Pihak Ketiga	3.294.642.039,00
8	Pengembalian TGR 2025	188.354.185,87
9	Diserahkan ke Masyarakat	130.000.000,00
10	Koreksi ke Barang dan Jasa	8.450.000,00
Saldo Akhir		**2.469.292.002.239,51**

Rincian PSU Jalan, Jaringan dan Irigasi yang sudah diserahkan pada Dinas Perumahan, Permukiman serta Pertanahan Tahun 2025

No	Tahun	Uraian	Luasan (m²)	Nilai	Keterangan
1	2021	Perumahan Villa Regaji	1.211,00	420.000.000,00	Jalan Paving Block
2	2021	Perumahan Villa Regaji	230,00	35.000.000,00	Saluran Drainase (Pipa)
Jumlah			***1.441,00***	***455.000.000,00***	
3	2021	Perumahan Nuansa Asri I	585,00	58.000.000,00	Jalan Lapen I
4	2021	Perumahan Nuansa Asri I	672,00	67.000.000,00	Jalan Lapen II
5	2021	Perumahan Nuansa Asri I	166,50	16.700.000,00	Jalan Lapen III
6	2021	Perumahan Nuansa Asri I	351,00	69.000.000,00	Saluran Drainase
7	2021	Perumahan Nuansa Asri I	11,00	22.000.000,00	Gorong-gorong
Jumlah			***1.785,50***	***232.700.000,00***	
8	2021	Perumahan Nuansa Asri II	980,00	97.000.000,00	Jalan Lapen
9	2021	Perumahan Nuansa Asri II	110,00	67.000.000,00	Jalan Telford
10	2021	Perumahan Nuansa Asri II	1.141,62	368.000.000,00	Jalan Paving Block
11	2021	Perumahan Nuansa Asri II	535,50	105.000.000,00	Saluran Drainase
12	2021	Perumahan Nuansa Asri II	13,00	26.000.000,00	Gorong-gorong
Jumlah			***2.780,12***	***663.000.000,00***	
13	2025	Perumahan Montana Residence I	415,00	91.474.861,08	Rabat Beton
14	2025	Perumahan Montana Residence I	7,63	6.645.556,32	Gorong-Gorong
15	2025	Perumahan Montana Residence I	109,20	53.426.500,92	Saluran Drainase
16	2025	Perumahan Montana Residence I	30.85	35.451.511,80	Bak Resapan
Jumlah			***531,83***	***186.998.430,12***	
17	2025	Perumahan Genting Ersinalsal	1.187,44	489.808.230,44	Paving Block
18	2025	Perumahan Genting Ersinalsal	126,15	73.331.347,21	Saluran Drainase
19	2025	Perumahan Genting Ersinalsal	20,08	20.360.509,33	Saluran Drainase
Jumlah			***1.333,67***	***583.500.086,98***	
Total			**7.872,12**	**2.121.198.517,10**	

Rincian Aset Tetap Lainnya Per Sub Rincian Objek
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Buku Umum	69.279.993.599,00	67.002.377.447,00	2.277.616.152,00
2	Buku Filsafat	33.969.600,00	23.008.000,00	10.961.600,00
3	Buku Agama	4.431.091.682,00	3.632.280.516,00	798.811.166,00
4	Buku Ilmu Sosial	5.501.390.523,00	5.271.866.923,00	229.523.600,00
5	Buku Ilmu Bahasa	10.538.577.902,00	8.805.721.372,00	1.732.856.530,00
6	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	14.256.855.536,00	11.746.757.666,00	2.510.097.870,00
7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	6.126.053.530,00	5.967.308.130,00	158.745.400,00
8	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	6.237.743.846,00	4.604.388.646,00	1.633.355.200,00
9	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	37.115.200,00	37.115.200,00	0,00
10	Serial	117.046.000,00	117.046.000,00	0,00
11	Buku Laporan	137.832.500,00	134.757.800,00	3.074.700,00
12	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	360.085.592,00	360.085.592,00	0,00
13	Bahan Kartografi	742.365.520,00	742.365.520,00	0,00
14	Naskah (Manuskrip)/Asli	243.719.900,00	243.719.900,00	0,00
15	Lukisan dan Ukiran	74.172.300,00	74.172.300,00	0,00
16	Karya Musik	45.500,00	45.500,00	0,00
17	Karya Grafika (Graphic Material)	1.541.630,00	1.541.630,00	0,00
18	Three Dimensional Artifacts and Realita	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00
19	Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya	15.233.299,00	15.233.299,00	0,00
20	Tarscalt	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
21	Alat Musik	93.718.935,00	93.718.935,00	0,00
22	Lukisan	39.254.200,00	39.254.200,00	0,00
23	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	63.705.000,00	63.705.000,00	0,00
24	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	17.001.000,00	17.001.000,00	0,00
25	Ikan Budidaya	106.415.000,00	106.415.000,00	0,00
26	Tanaman	38.347.920,00	38.347.920,00	0,00
27	Aset Tetap Dalam Renovasi	2.345.990.505,00	2.260.696.345,00	85.294.160,00
Jumlah		**120.854.286.219,00**	**111.413.949.841,00**	**9.440.336.378,00**

Lampiran 74

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Perangkat Daerah
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Awal	Mutasi			Saldo Akhir
				Bertambah		Berkurang	
				Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Reklasifikasi/ Penghapusan/TGR	
1	Dinas Kesehatan	KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	29.125.350.373,00	0,00	52.701.735,96	29.072.648.637,04
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	KDP Jalan-Jalan Kabupaten	1.306.980.147,11	0,00	0,00	1.306.980.147,11	0,00
Total Konstruksi Dalam Pengerjaan			**1.306.980.147,11**	**29.125.350.373,00**	**0,00**	**1.359.681.883,07**	**29.072.648.637,04**

Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per Sub Rincian Objek
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	(22.210.000,00)	(22.210.000,00)	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	(10.571.378.472,00)	(10.175.939.472,00)	(395.439.000,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	(9.379.534.069,00)	(8.891.276.665,30)	(488.257.403,70)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	(1.594.461.384,00)	(1.417.299.008,00)	(177.162.376,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	(643.500.000,00)	(572.000.000,00)	(71.500.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	(2.325.700.000,00)	(2.323.900.000,00)	(1.800.000,00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	(9.900.000,00)	(57.004.200,00)	47.104.200,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	(290.503.800,00)	(223.619.100,00)	(66.884.700,00)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)	0,00
10	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	(9.985.714,29)	(9.400.000,00)	(585.714,29)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(2.477.596.356,72)	(1.691.277.179,29)	(786.319.177,43)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(1.770.410.009,98)	(1.718.517.985,78)	(51.892.024,20)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	(47.952.300,00)	(41.101.971,42)	(6.850.328,58)
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	(11.330.000,00)	(10.525.714,34)	(804.285,66)
15	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	(546.803.428,58)	(451.400.714,45)	(95.402.714,13)
16	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	(4.165.714,26)	(2.082.857,13)	(2.082.857,13)
17	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	(1.988.285,71)	1.988.285,71
18	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(17.715.029.863,54)	(17.741.042.291,88)	26.012.428,34
19	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(16.721.112.423,43)	(16.551.345.320,72)	(169.767.102,71)
20	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(11.039.884.755,00)	(10.457.345.880,03)	(582.538.874,97)
21	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(4.885.250.161,16)	(4.928.853.459,65)	43.603.298,49
22	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(1.147.483.970,14)	(1.120.607.550,04)	(26.876.420,10)
23	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(46.298.686.406,85)	(43.033.503.800,16)	(3.265.182.606,69)
24	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	(12.750.000,00)	0,00	(12.750.000,00)
25	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(3.263.630.450,00)	(3.563.328.650,00)	299.698.200,00
26	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	(3.650.000,00)	(100.227.000,00)	96.577.000,00
27	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(304.964.000,00)	0,00	(304.964.000,00)
28	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(23.488.600,00)	(24.551.150,00)	1.062.550,00
29	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(24.021.140,00)	(18.710.480,00)	(5.310.660,00)
30	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	(10.400.000,00)	(6.600.000,00)	(3.800.000,00)
31	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(32.906.304,00)	(55.918.404,00)	23.012.100,00
32	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0,00	(2.385.000,00)	2.385.000,00
33	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	0,00	(280.628.800,00)	280.628.800,00
34	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(4.000.000,00)	0,00	(4.000.000,00)
35	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	(1.250.000,00)	(1.250.000,00)	0,00
36	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(6.532.000,00)	(3.800.000,00)	(2.732.000,00)
37	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	(71.847.100,00)	(71.847.100,00)	0,00
38	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	(27.278.400,00)	(27.278.400,00)	0,00
39	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	(13.100.000,00)	(12.200.000,00)	(900.000,00)
40	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	(603.141.024,40)	(358.245.182,20)	(244.895.842,20)
41	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(1.907.801.579,00)	(1.861.029.100,00)	(46.772.479,00)
42	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	(2.106.478.000,00)	(2.106.478.000,00)	0,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
43	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	0,00	(12.760.000,00)	12.760.000,00
44	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(143.199.600,00)	(113.536.400,00)	(29.663.200,00)
45	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(43.631.210,00)	(43.631.210,00)	0,00
46	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(228.311.600,00)	(215.744.480,00)	(12.567.120,00)
47	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Specific Set	(77.860.788,00)	(87.480.288,00)	9.619.500,00
48	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	(70.345.380,00)	(48.388.860,00)	(21.956.520,00)
49	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(630.961.709,20)	(615.381.626,80)	(15.580.082,40)
50	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(49.720.375,00)	(38.187.000,00)	(11.533.375,00)
51	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(62.112.150,00)	(56.875.200,00)	(5.236.950,00)
52	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen	(9.375.000,00)	(9.375.000,00)	0,00
53	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(134.231.000,00)	(131.531.000,00)	(2.700.000,00)
54	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	(1.725.023.919,00)	(1.803.153.352,00)	78.129.433,00
55	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	(17.694.100,00)	(15.637.825,00)	(2.056.275,00)
56	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	(740.630.000,00)	(740.630.000,00)	0,00
57	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	(442.513.596,00)	(414.764.121,00)	(27.749.475,00)
58	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(147.111.150,00)	(149.911.150,00)	2.800.000,00
59	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(54.426.500,00)	(60.796.500,00)	6.370.000,00
60	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(61.010.000,00)	(61.010.000,00)	0,00
61	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(10.623.172.425,40)	(9.432.542.230,20)	(1.190.630.195,20)
62	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(13.184.302.518,10)	(14.146.758.594,10)	962.456.076,00
63	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(45.384.401.576,24)	(38.598.960.006,64)	(6.785.441.569,60)
64	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(2.990.000,00)	(2.990.000,00)	0,00
65	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(564.469.609,00)	(157.990.056,00)	(406.479.553,00)
66	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(1.150.828.366,60)	(1.118.327.850,40)	(32.500.516,20)
67	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(557.215.209,60)	(532.027.306,00)	(25.187.903,60)
68	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(19.822.335.718,20)	(17.859.492.395,00)	(1.962.843.323,20)
69	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(888.603.500,80)	(832.006.662,00)	(56.596.838,80)
70	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(1.176.498.825,00)	(1.245.581.207,00)	69.082.382,00
71	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(205.071.400,00)	(418.269.200,00)	213.197.800,00
72	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(577.596.160,00)	(636.306.150,00)	58.709.990,00
73	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(313.655.000,00)	(487.380.000,00)	173.725.000,00
74	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(1.375.250,00)	(1.375.250,00)	0,00
75	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(320.752.690,00)	(434.756.630,00)	114.003.940,00
76	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(993.934.075,60)	(1.068.304.078,80)	74.370.003,20
77	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(736.089.907,60)	(544.729.788,40)	(191.360.119,20)
78	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(3.373.387.366,60)	(2.542.012.965,00)	(831.374.401,60)
79	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	(244.738.970,00)	(269.129.650,00)	24.390.680,00
80	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(131.031.800,00)	(128.451.800,00)	(2.580.000,00)
81	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(424.812.600,00)	(422.672.600,00)	(2.140.000,00)
82	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(525.439.388,60)	(784.680.863,40)	259.241.474,80
83	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(364.920.500,00)	(364.920.500,00)	0,00
84	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	(27.000.000,00)	(37.800.000,00)	10.800.000,00
85	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	(18.105.000,00)	(2.070.000,00)	(16.035.000,00)
86	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(286.763.400,00)	(511.971.900,00)	225.208.500,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
87	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	0,00	(4.810.000,00)	4.810.000,00
88	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	(2.397.212,00)	(2.397.212,00)	0,00
89	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	(14.500.000,00)	(29.804.000,00)	15.304.000,00
90	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	(230.450.000,00)	(250.950.000,00)	20.500.000,00
91	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	(37.150.000,00)	(34.950.000,00)	(2.200.000,00)
92	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	0,00	(1.500.000,00)	1.500.000,00
93	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	(13.800.000,00)	(26.800.000,00)	13.000.000,00
94	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	(9.213.980,00)	(18.647.980,00)	9.434.000,00
95	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	(70.600.000,00)	(82.420.000,00)	11.820.000,00
96	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	(472.961.500,00)	(466.959.700,00)	(6.001.800,00)
97	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	(16.934.400,00)	(14.817.600,00)	(2.116.800,00)
98	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	(12.000.000,00)	(12.000.000,00)	0,00
99	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	(103.420.000,00)	(108.220.000,00)	4.800.000,00
100	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	(138.966.472,60)	(90.984.939,70)	(47.981.532,90)
101	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)	(44.316.666,67)	(25.373.333,33)	(18.943.333,34)
102	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(30.987.520.874,71)	(41.248.276.158,31)	10.260.755.283,60
103	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	(2.294.493.693,80)	(2.249.378.414,20)	(45.115.279,60)
104	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	(223.223.000,00)	(223.223.000,00)	0,00
105	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	(7.288.315.730,00)	(6.087.074.284,40)	(1.201.241.445,60)
106	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	(3.977.793.275,40)	(3.177.185.425,00)	(800.607.850,40)
107	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	(617.133.992,00)	(418.193.082,00)	(198.940.910,00)
108	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	(696.032.476,00)	(662.014.980,80)	(34.017.495,20)
109	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(10.370.714.146,00)	(8.796.361.973,80)	(1.574.352.172,20)
110	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	(500.000,00)	(500.000,00)	0,00
111	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	(1.429.074.485,60)	(673.128.199,00)	(755.946.286,60)
112	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	(159.376.585,00)	(443.750.185,00)	284.373.600,00
113	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(2.781.346.742,00)	(1.509.642.502,00)	(1.271.704.240,00)
114	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	(2.820.444.586,00)	(884.169.260,00)	(1.936.275.326,00)
115	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	(3.774.769.290,00)	(2.665.213.552,00)	(1.109.555.738,00)
116	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	(3.428.096.578,00)	(224.145.000,00)	(3.203.951.578,00)
117	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	(534.674.340,00)	0,00	(534.674.340,00)
118	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	(84.423.840,80)	(57.028.977,20)	(27.394.863,60)
119	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	(594.252.648,00)	(357.252.800,00)	(236.999.848,00)
120	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	(6.073.118.158,80)	(6.119.499.057,40)	46.380.898,60
121	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	(1.366.788.470,00)	(1.366.788.470,00)	0,00
122	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	(126.373.029,00)	0,00	(126.373.029,00)
123	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	(26.517.825,40)	(1.009.883,60)	(25.507.941,80)
124	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	(374.923.704,00)	(374.923.704,00)	0,00
125	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara	(97.325.000,00)	(97.325.000,00)	0,00
126	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	(48.237.012,00)	(48.237.012,00)	0,00
127	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	(759.618.406,00)	(746.226.406,00)	(13.392.000,00)
128	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(119.068.736,00)	(119.068.736,00)	0,00
129	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	(4.999.970,00)	(4.999.970,00)	0,00
130	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi	(33.045.000,00)	(27.935.000,00)	(5.110.000,00)
131	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(18.000.000,00)	(13.500.000,00)	(4.500.000,00)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
132	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	(20.800.000,00)	(20.800.000,00)	0,00
133	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	(45.000.000,00)	(45.000.000,00)	0,00
134	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	(60.863.636,16)	(56.454.545,28)	(4.409.090,88)
135	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	(375.225.000,00)	(356.790.625,00)	(18.434.375,00)
136	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(3.383.466.985,75)	(2.504.284.168,00)	(879.182.817,75)
137	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(1.408.270.968,75)	(1.369.437.317,48)	(38.833.651,27)
138	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(356.626.500,00)	(359.032.750,00)	2.406.250,00
139	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	(1.242.634.669,00)	(988.448.424,00)	(254.186.245,00)
140	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	(389.098.597,50)	(319.460.082,00)	(69.638.515,50)
141	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(115.827.800,00)	(208.190.300,00)	92.362.500,00
142	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	(195.654.429,00)	(180.825.086,00)	(14.829.343,00)
143	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	(210.134.670,00)	(275.179.560,00)	65.044.890,00
144	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	(47.973.931,00)	(47.973.931,00)	0,00
145	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	(3.892.500,00)	(8.568.750,00)	4.676.250,00
146	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	(1.362.500,00)	(681.250,00)	(681.250,00)
147	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil	(90.750.000,00)	0,00	(90.750.000,00)
148	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(183.154.033,00)	(196.250.945,50)	13.096.912,50
149	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	(28.575.000,00)	(28.575.000,00)	0,00
150	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	(2.358.750,00)	(1.769.062,50)	(589.687,50)
151	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	(12.777.648,00)	(12.777.648,00)	0,00
152	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	(119.738.388,00)	(119.738.388,00)	0,00
153	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	(38.205.000,00)	(31.837.500,00)	(6.367.500,00)
154	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	(92.700.000,00)	(90.075.000,00)	(2.625.000,00)
155	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	(32.624.760,00)	(32.260.760,00)	(364.000,00)
156	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	(748.125,00)	(498.750,00)	(249.375,00)
157	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(221.264.250,00)	(229.567.000,00)	8.302.750,00
158	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	(937.500,00)	937.500,00
159	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	(36.231.022,67)	(32.937.293,33)	(3.293.729,34)
160	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	(400.000,00)	(360.000,00)	(40.000,00)
161	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	(958.074.829,00)	(956.394.829,00)	(1.680.000,00)
162	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	(1.412.656.877,00)	(1.403.878.662,50)	(8.778.214,50)
163	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	(54.444.500,00)	(54.158.500,00)	(286.000,00)
164	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	(74.921.991,00)	(68.776.870,00)	(6.145.121,00)
165	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	(16.850.000,00)	(16.850.000,00)	0,00
166	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	(49.800.000,00)	(44.750.000,00)	(5.050.000,00)
167	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	(442.396.925,00)	(441.315.925,00)	(1.081.000,00)
168	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	0,00
169	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	(1.907.060.209,00)	(1.716.169.826,40)	(190.890.382,60)
170	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	(6.681.377.287,10)	(6.322.368.474,10)	(359.008.813,00)
171	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector	0,00	(6.766.666,66)	6.766.666,66

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
172	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	0,00	(2.619.047,32)	2.619.047,32
173	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan	0,00	(1.600.000,00)	1.600.000,00
174	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	(25.900.000,00)	(25.900.000,00)	0,00
175	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	(7.350.000,00)	(7.214.285,71)	(135.714,29)
176	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	(126.500.000,00)	(126.500.000,00)	0,00
177	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System	(173.744.133,33)	(160.379.200,00)	(13.364.933,33)
178	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	(1.418.934.753,01)	(1.304.406.131,46)	(114.528.621,55)
179	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop	(69.263.480,00)	(63.935.520,00)	(5.327.960,00)
180	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB	(1.328.600,00)	(1.226.400,00)	(102.200,00)
181	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	(58.370.000,00)	(58.370.000,00)	0,00
182	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	(504.400,00)	0,00	(504.400,00)
183	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Anti Lapis Baja	0,00	(12.243.000,00)	12.243.000,00
184	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	(150.990.000,00)	(150.990.000,00)	0,00
185	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(192.759.534,60)	(411.515.756,40)	218.756.221,80
186	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Non Senjata Api	(31.123.360,00)	(70.444.789,00)	39.321.429,00
187	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	(35.800.000,00)	(17.900.000,00)	(17.900.000,00)
188	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dakhura	(17.490.000,00)	0,00	(17.490.000,00)
189	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	(10.226.975,00)	(1.100.000,00)	(9.126.975,00)
190	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Reserse	(42.187.000,00)	(42.187.000,00)	0,00
191	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Fotografi Kepolisian	(2.100.000,00)	(1.350.000,00)	(750.000,00)
192	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(1.070.726.528,00)	(1.138.651.928,00)	67.925.400,00
193	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(66.893.139.888,54)	(59.256.946.742,52)	(7.636.193.146,02)
194	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(300.675.000,00)	(344.924.000,00)	44.249.000,00
195	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(854.326.450,01)	(1.355.213.500,00)	500.887.049,99
196	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(125.534.560,00)	(149.134.560,00)	23.600.000,00
197	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(9.740.677.849,00)	(8.237.069.281,50)	(1.503.608.567,50)
198	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(7.299.010.088,00)	(6.438.714.321,00)	(860.295.767,00)
199	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(571.337.486,00)	(2.081.779.554,25)	1.510.442.068,25
200	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric	(64.323.991,02)	(51.208.110,78)	(13.115.880,24)
201	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran	(1.842.636.510,10)	(606.557.830,00)	(1.236.078.680,10)
202	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	(15.984.000,00)	(11.988.000,00)	(3.996.000,00)
203	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman	(12.927.192,00)	(9.695.394,00)	(3.231.798,00)
204	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong	(44.750.000,00)	(31.250.000,00)	(13.500.000,00)
205	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	(432.592.200,00)	(912.260.700,00)	479.668.500,00
206	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	(15.274.800,00)	(15.274.800,00)	0,00
207	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	0,00	(17.286.000,00)	17.286.000,00
208	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik	(700.000,00)	0,00	(700.000,00)
209	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	(5.925.000,00)	(4.937.500,00)	(987.500,00)
210	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	(55.946.000,00)	0,00	(55.946.000,00)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
211	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(5.774.412.890,31)	(5.472.493.740,91)	(301.919.149,40)
212	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	(101.875.000,02)	(86.383.333,32)	(15.491.666,70)
213	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	(66.962.666,69)	(101.760.666,63)	34.797.999,94
214	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	(116.223.300,00)	(116.223.300,00)	0,00
215	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara	(145.842.400,00)	(145.842.400,00)	0,00
216	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	(2.460.531.333,00)	(2.457.574.999,67)	(2.956.333,33)
Jumlah		**(445.438.527.737,23)**	**(416.959.899.397,80)**	**(28.478.628.339,43)**

Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin Perangkat Daerah
Tahun 2025 Dan 2024

No	Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sekretariat DPRD	(4.915.925.506,71)	(9.093.129.706,69)	4.177.204.199,98
2	Sekretariat Daerah	(24.388.874.399,26)	(23.356.610.825,89)	(1.032.263.573,37)
3	Kecamatan Kabanjahe	(1.125.476.188,00)	(1.047.920.108,00)	(77.556.080,00)
4	Kecamatan Berastagi	(1.036.827.848,10)	(905.912.271,20)	(130.915.576,90)
5	Kecamatan Simpang Empat	(795.766.111,40)	(744.331.664,60)	(51.434.446,80)
6	Kecamatan Payung	(913.525.555,20)	(864.166.423,40)	(49.359.131,80)
7	Kecamatan Tiganderket	(576.138.453,00)	(522.182.803,00)	(53.955.650,00)
8	Kecamatan Munte	(919.607.627,50)	(854.089.728,00)	(65.517.899,50)
9	Kecamatan Tiga Binanga	(772.995.984,00)	(717.570.984,00)	(55.425.000,00)
10	Kecamatan Juhar	(621.077.320,00)	(592.870.764,00)	(28.206.556,00)
11	Kecamatan Lau Baleng	(469.531.768,39)	(427.473.628,00)	(42.058.140,39)
12	Kecamatan Barusjahe	(771.099.378,00)	(713.023.128,00)	(58.076.250,00)
13	Kecamatan Tiga Panah	(675.670.621,30)	(596.816.250,60)	(78.854.370,70)
14	Kecamatan Kutabuluh	(875.300.717,29)	(783.623.199,41)	(91.677.517,88)
15	Kecamatan Merek	(657.441.800,00)	(630.557.775,00)	(26.884.025,00)
16	Kecamatan Mardinding	(680.474.618,80)	(575.017.657,60)	(105.456.961,20)
17	Kecamatan Merdeka	(669.072.760,00)	(629.515.085,00)	(39.557.675,00)
18	Kecamatan Namanteran	(750.776.342,40)	(702.124.206,80)	(48.652.135,60)
19	Kecamatan Dolat Rayat	(519.356.501,00)	(461.523.501,00)	(57.833.000,00)
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(30.935.923.107,19)	(29.598.762.484,68)	(1.337.160.622,51)
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	(1.783.211.395,21)	(1.984.607.726,32)	201.396.331,11
22	Dinas Perhubungan	(18.243.004.660,31)	(17.285.567.736,63)	(957.436.923,68)
23	Dinas Kesehatan	(59.575.412.960,16)	(56.499.852.079,44)	(3.075.560.880,72)
24	Rumah Sakit Umum Daerah	(70.788.655.171,55)	(68.241.918.593,29)	(2.546.736.578,26)
25	Dinas Pendidikan	(105.970.683.890,56)	(92.872.343.598,30)	(13.098.340.292,26)
26	Dinas Sosial	(1.207.303.460,00)	(1.172.354.500,00)	(34.948.960,00)
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	(3.089.271.511,47)	(2.835.469.050,25)	(253.802.461,22)
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(2.023.339.349,56)	(1.592.303.901,70)	(431.035.447,86)
29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(3.376.977.226,00)	(2.654.351.526,00)	(722.625.700,00)
30	Dinas Pertanian	(8.150.590.955,31)	(7.766.614.078,44)	(383.976.876,87)
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	(1.946.628.421,34)	(1.862.946.628,49)	(83.681.792,85)
32	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(1.449.572.020,72)	(1.246.238.909,13)	(203.333.111,59)
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(3.678.006.536,15)	(3.238.947.245,21)	(439.059.290,94)
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(8.494.742.735,07)	(7.701.350.501,60)	(793.392.233,47)
35	Badan Pendapatan Daerah	(3.611.884.244,10)	(3.252.250.166,75)	(359.634.077,35)
36	Inspektorat Daerah	(2.361.197.085,51)	(2.125.706.782,89)	(235.490.302,62)
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(1.883.271.555,20)	(1.651.975.750,00)	(231.295.805,20)
38	Dinas Lingkungan Hidup	(23.189.553.929,87)	(21.978.066.246,93)	(1.211.487.682,94)
39	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	(6.553.714.552,35)	(6.280.525.534,72)	(273.189.017,63)
40	Badan Kesauan Bangsa dan Politik	(909.357.393,50)	(780.266.731,00)	(129.090.662,50)
41	Satuan Polisi Pamong Praja	(21.752.145.507,88)	(17.984.532.545,05)	(3.767.612.962,83)
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(4.675.190.391,42)	(4.879.912.555,87)	204.722.164,45
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(1.317.484.599,60)	(989.329.200,00)	(328.155.399,60)
44	Dinas Perpustakaan dan Arsip	(4.087.807.788,07)	(3.725.427.835,83)	(362.379.952,24)
45	Dinas Komunikasi dan Informatika	(9.824.518.243,78)	(10.288.049.109,09)	463.530.865,31
46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.424.139.545,00)	(2.251.768.670,00)	(172.370.875,00)
	Jumlah	**(445.438.527.737,23)**	**(416.959.899.397,80)**	**(28.478.628.339,43)**

Koreksi Tambah Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi
Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	(51.821.000,00)
2	Sekretariat Daerah	(3.190.000,00)
3	Kecamatan Kabanjahe	(15.210.000,00)
4	Kecamatan Berastagi	(19.554.000,00)
5	Kecamatan Simpang Empat	(15.210.000,00)
6	Kecamatan Payung	(15.210.000,00)
7	Kecamatan Tiganderket	(15.210.000,00)
8	Kecamatan Munte	(15.326.000,00)
9	Kecamatan Tiga Binanga	(15.210.000,00)
10	Kecamatan Lau Baleng	(15.210.000,00)
11	Kecamatan Barusjahe	(15.210.000,00)
12	Kecamatan Tiga Panah	(15.210.000,00)
13	Kecamatan Kutabuluh	(15.210.000,00)
14	Kecamatan Mardingding	(45.110.000,00)
15	Kecamatan Merdeka	(15.210.000,00)
16	Kecamatan Namanteran	(15.210.000,00)
17	Kecamatan Dolat Rayat	(15.210.000,00)
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	(59.869.840,00)
19	Dinas Perhubungan	(352.500,00)
20	Dinas Kesehatan	(35.765.100,64)
21	RSU Daerah	(61.268.955,12)
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	(32.127.083,34)
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(240.500.000,00)
24	Dinas Pertanian	(66.476.000,00)
25	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(44.655.712,00)
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(25.200.000,00)
27	Inspektorat Daerah	(186.385.714,29)
28	Dinas Lingkungan Hidup	(243.457.142,86)
29	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	(220.000,00)
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(23.600.000,00)
31	Satuan Polisi Pamong Praja	(849.493.900,00)
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.846.000,00)
33	Dinas Komunikasi dan Informtika	(27.127.600,00)
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.886.000,00)
Jumlah		**(2.219.752.548,25)**

Rincian Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	(22.209.000,00)
2	Kecamatan Kabanjahe	(8.190.000,00)
3	Kecamatan Berastagi	(8.190.000,00)
4	Kecamatan Simpang Empat	(8.190.000,00)
5	Kecamatan Payung	(8.190.000,00)
6	Kecamatan Tiganderket	(8.190.000,00)
7	Kecamatan Munte	(8.190.000,00)
8	Kecamatan Tiga Binanga	(8.190.000,00)
9	Kecamatan Lau Baleng	(8.190.000,00)
10	Kecamatan Barusjahe	(8.190.000,00)
11	Kecamatan Tiga Panah	(8.190.000,00)
12	Kecamatan Kutabuluh	(8.190.000,00)
13	Kecamatan Mardinding	(23.140.000,00)
14	Kecamatan Merdeka	(8.190.000,00)
15	Kecamatan Namanteran	(8.190.000,00)
16	Kecamatan Dolat Rayat	(8.190.000,00)
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	(29.934.920,00)
18	Dinas Kesehatan	(7.872.080,00)
19	Dinas Sosial	(1.775.000,00)
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	(5.000.000,00)
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(129.500.000,00)
22	Dinas Pertanian	(30.538.000,00)
23	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(11.163.928,00)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(4.800.000,00)
25	Satuan Polisi Pamong Praja	(344.220.100,00)
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	(36.001.650,00)
Jumlah		**(760.814.678,00)**

Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per Sub Rincian Objek
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(36.651.417.291,62)	(34.179.658.731,80)	(2.471.758.559,82)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(2.355.223.026,24)	(2.185.165.226,01)	(170.057.800,23)
3	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	(260.602.500,00)	(247.210.000,00)	(13.392.500,00)
4	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(362.901.379,32)	(324.710.873,94)	(38.190.505,38)
5	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(1.959.599.987,70)	(1.452.791.926,31)	(506.808.061,39)
6	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(20.362.529.661,66)	(18.781.029.634,73)	(1.581.500.026,93)
7	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(207.848.595,14)	(192.549.139,98)	(15.299.455,16)
8	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(1.882.488.954,02)	(1.837.645.742,69)	(44.843.211,33)
9	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(90.601.208.902,20)	(84.991.246.705,51)	(5.609.962.196,69)
10	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(878.014.527,33)	(784.418.923,62)	(93.595.603,71)
11	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(6.463.422.395,26)	(6.214.803.134,18)	(248.619.261,08)
12	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(372.821.047,97)	(196.369.352,73)	(176.451.695,24)
13	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(2.125.650.595,99)	(1.974.103.023,33)	(151.547.572,66)
14	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	(161.088.974,05)	(150.921.955,17)	(10.167.018,88)
15	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	(6.552.384.427,52)	(6.056.213.299,66)	(496.171.127,86)
16	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	(994.281.513,26)	(760.474.496,02)	(233.807.017,24)
17	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	(404.462.784,43)	(375.247.732,21)	(29.215.052,22)
18	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(54.885.801.514,24)	(51.999.139.481,64)	(2.886.662.032,60)
19	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(303.558.050,46)	(232.631.246,26)	(70.926.804,20)
20	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(4.220.977,00)	0,00	(4.220.977,00)
21	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(178.959.660,00)	(158.384.680,00)	(20.574.980,00)
22	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(95.919.350,10)	(85.612.473,60)	(10.306.876,50)
23	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(2.826.518.207,97)	(418.745.508,77)	(2.407.772.699,20)
24	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(281.508.554,62)	(2.463.359.136,26)	2.181.850.581,64
25	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(11.643.060.969,92)	(11.087.465.621,59)	(555.595.348,33)
26	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(11.904.081,62)	(11.277.551,01)	(626.530,61)
27	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	(425.421.430,62)	(388.185.861,26)	(37.235.569,36)
28	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(701.268.726,00)	(604.800.702,27)	(96.468.023,73)
29	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	(2.800.000,00)	(2.400.000,00)	(400.000,00)
30	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	(340.100.000,00)	(322.200.000,00)	(17.900.000,00)
31	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(142.746.497,44)	(123.926.188,72)	(18.820.308,72)
32	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(9.876.272.721,29)	(8.377.460.952,59)	(1.498.811.768,70)
Jumlah		**(254.316.007.304,99)**	**(236.980.149.301,86)**	**(17.335.858.003,13)**

Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan 2024

No.	Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sekretariat DPRD	3.733.738.100,44	4.204.407.890,01	0,00
2	Sekretariat Daerah	16.244.733.956,93	15.210.122.940,27	0,00
3	Kecamatan Kabanjahe	226.485.213,56	189.876.769,04	0,00
4	Kecamatan Berastagi	415.626.952,03	369.553.726,11	0,00
5	Kecamatan Simpang Empat	391.063.140,47	358.214.971,42	0,00
6	Kecamatan Payung	56.054.253,45	49.390.459,08	0,00
7	Kecamatan Tiganderket	192.287.948,87	174.909.496,35	0,00
8	Kecamatan Munte	587.423.518,76	554.989.506,42	32.434.012,34
9	Kecamatan Tiga Binanga	645.766.550,00	613.705.100,00	0,00
10	Kecamatan Juhar	43.373.040,80	38.041.330,60	0,00
11	Kecamatan Lau Baleng	274.984.619,06	245.372.429,81	0,00
12	Kecamatan Barusjahe	215.440.301,42	201.302.009,43	0,00
13	Kecamatan Tiga Panah	441.224.908,49	408.076.205,43	0,00
14	Kecamatan Kutabuluh	382.957.786,28	347.678.942,49	0,00
15	Kecamatan Merek	416.473.587,32	379.136.956,94	0,00
16	Kecamatan Mardinding	238.508.751,09	226.805.802,38	0,00
17	Kecamatan Merdeka	38.341.170,45	28.242.668,98	0,00
18	Kecamatan Namanteran	90.040.820,79	78.228.690,34	0,00
19	Kecamatan Dolat Rayat	179.344.914,28	165.154.457,14	0,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.264.203.294,23	2.970.230.576,93	0,00
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	110.530.056,33	89.646.608,40	0,00
22	Dinas Perhubungan	1.209.076.522,38	1.112.044.260,00	0,00
23	Dinas Kesehatan	19.924.157.491,38	18.484.214.848,85	0,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah	3.568.046.617,30	3.372.516.985,82	0,00
25	Dinas Pendidikan	126.617.764.907,05	117.374.649.227,78	0,00
26	Dinas Sosial	23.505.899,84	17.629.424,88	0,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	805.177.492,08	739.034.075,41	0,00
28	Dinas Pertanian	5.186.084.425,00	4.775.629.872,42	0,00
29	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	875.527.149,09	815.836.372,63	0,00
30	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	264.702.672,42	246.906.777,61	17.795.894,81
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	58.474.095.314,20	55.279.037.544,05	3.195.057.770,15
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	131.170.414,69	70.523.446,75	0,00
33	Dinas Lingkungan Hidup	1.565.257.530,88	1.411.435.039,49	0,00
34	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	6.128.783.204,32	5.285.860.442,27	0,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja	245.469.226,27	228.437.241,73	0,00
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	339.019.698,71	316.761.040,78	0,00
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	368.342.450,07	166.438.780,83	0,00
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	401.223.404,26	380.106.382,99	0,00
Jumlah		**254.316.007.304,99**	**236.980.149.301,86**	**17.335.858.003,13**

Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per Sub Rincian Objek
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(1.142.866.390.599,91)	(1.050.429.024.682,02)	(92.437.365.917,89)
2	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	0,00	(615.682.211,00)	615.682.211,00
3	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(96.530.821.036,36)	(90.404.270.473,79)	(6.126.550.562,57)
4	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(8.682.231.983,17)	(6.668.352.999,60)	(2.013.878.983,57)
5	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	(7.144.000,00)	(5.358.000,00)	(1.786.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	(32.837.625.911,78)	(30.583.142.982,45)	(2.254.482.929,33)
7	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	(2.631.028.693,62)	(2.279.781.174,88)	(351.247.518,74)
8	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	(54.000,02)	54.000,02
9	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	(45.242.918.009,49)	(40.698.161.943,72)	(4.544.756.065,77)
10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	(382.400,00)	(358.500,00)	(23.900,00)
11	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	(169.333.577,56)	(157.238.322,02)	(12.095.255,54)
12	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	(2.724.560.496,99)	(2.502.357.902,00)	(222.202.594,99)
13	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	(3.664.000,00)	(3.312.000,00)	(352.000,00)
14	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	(4.785.900.771,10)	(4.274.920.468,52)	(510.980.302,58)
15	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	(460.474.164,24)	(425.410.915,08)	(35.063.249,16)
16	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(42.583.185.689,46)	(36.798.581.461,45)	(5.784.604.228,01)
17	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	(19.435.846.749,50)	(16.729.703.114,01)	(2.706.143.635,49)
18	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	(2.568.137.154,43)	(2.185.366.147,37)	(382.771.007,06)
19	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	(259.205.411,88)	(230.538.131,96)	(28.667.279,92)
20	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	(71.356.649,05)	(56.531.053,35)	(14.825.595,70)
21	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	(1.208.890.388,21)	(1.120.616.735,65)	(88.273.652,56)
22	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	(80.435.086,65)	(65.737.941,35)	(14.697.145,30)
23	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	(5.353.225.600,07)	(4.902.882.814,50)	(450.342.785,57)
24	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	(3.516.291.929,67)	(3.312.307.228,03)	(203.984.701,64)
25	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	(26.766.000,00)	(25.279.000,00)	(1.487.000,00)
26	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(9.333.684.236,94)	(8.047.605.844,06)	(1.286.078.392,88)
27	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	(5.136.528.924,74)	(4.380.444.197,15)	(756.084.727,59)
28	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	(138.272.414,06)	(109.516.000,00)	(28.756.414,06)
29	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	(1.224.920.361,57)	(1.016.064.914,99)	(208.855.446,58)
30	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	(2.542.787.829,95)	(2.317.926.075,42)	(224.861.754,53)
31	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	0,00	(5.000.000,00)	5.000.000,00
32	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	0,00	(7.872.080,00)	7.872.080,00
33	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(7.867.551.981,17)	(7.549.344.614,19)	(318.207.366,98)
34	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	(175.891.884,54)	(157.085.229,40)	(18.806.655,14)
35	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	(345.362.674,80)	(287.802.229,00)	(57.560.445,80)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
36	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	(254.800,00)	(235.200,00)	(19.600,00)
37	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	(33.393.750,00)	(30.825.000,00)	(2.568.750,00)
38	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	(31.046.585,00)	(44.848.400,00)	13.801.815,00
39	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(100.345.000,20)	(183.164.785,90)	82.819.785,70
40	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(1.681.500,00)	(10.926.947,37)	9.245.447,37
41	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	(13.685.100,00)	(12.441.000,00)	(1.244.100,00)
42	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	(480.547.541,40)	(421.206.284,50)	(59.341.256,90)
43	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	(765.841.036,67)	(677.112.665,34)	(88.728.371,33)
44	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	(760.530.000,00)	(667.958.666,70)	(92.571.333,30)
45	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	(573.631.000,00)	(535.388.933,30)	(38.242.066,70)
46	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(43.406.531,00)	(40.283.564,50)	(3.122.966,50)
47	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(3.286.580.768,47)	(2.960.802.771,28)	(325.777.997,19)
48	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	(25.170.500,00)	(22.710.150,00)	(2.460.350,00)
49	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah	0,00	(35.812.500,00)	35.812.500,00
50	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	(2.530.000,00)	(2.024.000,00)	(506.000,00)
51	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	(472.751.566,37)	(388.916.599,81)	(83.834.966,56)
Jumlah		**(1.445.402.212.290,02)**	**(1.324.388.288.855,68)**	**(121.013.923.434,34)**

Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan 2024

No	Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	(Kenaikan)/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sekretariat DPRD	1.419.375,00	23.533.750,00	22.114.375,00
2	Sekretariat Daerah	81.059.062,20	75.002.439,90	(6.056.622,30)
3	Kecamatan Kabanjahe	8.087.289.239,42	6.751.539.999,60	(1.335.749.239,82)
4	Kecamatan Berastagi	3.945.287.327,80	2.972.796.105,90	(972.491.221,90)
5	Kecamatan Simpang Empat	(0,00)	8.190.000,00	8.190.000,00
6	Kecamatan Payung	(0,00)	8.190.000,00	8.190.000,00
7	Kecamatan Tiganderket	94.723.000,00	80.472.500,00	(14.250.500,00)
8	Kecamatan Munte	89.460.000,00	82.740.000,00	(6.720.000,00)
9	Kecamatan Tiga Binanga	1.552.776.856,00	726.141.005,87	(826.635.850,13)
10	Kecamatan Lau Baleng	26.340.000,02	30.323.333,35	3.983.333,33
11	Kecamatan Barusjahe	119.388.000,00	107.680.000,00	(11.708.000,00)
12	Kecamatan Tiga Panah	16.335.000,00	21.977.500,00	5.642.500,00
13	Kecamatan Kutabuluh	2.750.000,00	8.190.000,00	5.440.000,00
14	Kecamatan Mardinding	119.412.000,00	122.650.000,00	3.238.000,00
15	Kecamatan Merdeka	(0,00)	8.190.000,00	8.190.000,00
16	Kecamatan Namanteran	79.920.000,00	68.130.000,00	(11.790.000,00)
17	Kecamatan Dolat Rayat	(0,00)	8.190.000,00	8.190.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.395.071.445.146,66	1.283.701.328.848,66	(111.370.116.298,00)
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.308.456.949,95	657.193.560,00	(651.263.389,95)
20	Dinas Perhubungan	2.352.932.582,56	2.034.888.554,23	(318.044.028,33)
21	Dinas Kesehatan	438.358.348,40	242.328.364,50	(196.029.983,90)
22	Dinas Pendidikan	5.714.782.383,45	4.562.370.086,06	(1.152.412.297,39)
23	Dinas Sosial	(0,00)	1.775.000,00	1.775.000,00
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	(0,00)	5.000.000,00	5.000.000,00
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(0,00)	129.500.000,00	129.500.000,00
26	Dinas Pertanian	56.530.993,34	78.582.928,34	22.051.935,00
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.534.000,00	9.032.210,53	(501.789,47)
28	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(0,00)	11.163.928,00	11.163.928,00
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.999.515.733,28	2.615.847.850,03	(383.667.883,25)
30	Dinas Lingkungan Hidup	1.280.264.457,99	1.143.902.587,80	(136.361.870,19)
31	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	3.417.847.133,09	2.477.487.214,60	(940.359.918,49)
32	Satuan Polisi Pamong Praja	(0,00)	344.220.100,00	344.220.100,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.455.561.315,18	15.215.944.338,31	(3.239.616.976,87)
34	Dinas Perpustakaan dan Arsip	61.773.385,68	(0,00)	(61.773.385,68)
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.850.000,00	52.661.650,00	34.811.650,00
36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.200.000,00	1.125.000,00	(75.000,00)
Jumlah		**1.445.402.212.290,02**	**1.324.388.288.855,68**	**121.013.923.434,34**

Rincian Reklasifikasi Ke Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	22.209.000,00
2	Kecamatan Kabanjahe	8.190.000,00
3	Kecamatan Berastagi	8.190.000,00
4	Kecamatan Simpang Empat	8.190.000,00
5	Kecamatan Payung	8.190.000,00
6	Kecamatan Tiganderket	8.190.000,00
7	Kecamatan Munte	8.190.000,00
8	Kecamatan Tiga Binanga	8.190.000,00
9	Kecamatan Lau Baleng	8.190.000,00
10	Kecamatan Barusjahe	8.190.000,00
11	Kecamatan Tiga Panah	8.190.000,00
12	Kecamatan Kutabuluh	8.190.000,00
13	Kecamatan Mardinding	23.140.000,00
14	Kecamatan Merdeka	8.190.000,00
15	Kecamatan Namanteran	8.190.000,00
16	Kecamatan Dolat Rayat	8.190.000,00
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	29.934.920,00
18	Dinas Kesehatan	7.872.080,00
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	5.000.000,00
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	129.500.000,00
21	Dinas Pertanian	30.538.000,00
22	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.163.928,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.800.000,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	344.220.100,00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	36.001.650,00
Jumlah		**759.039.678,00**

Lampiran 84

Rincian Aset Lainnya Perangkat Daerah
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
		Tagihan Jangka Panjang :	**3.012.794.783,00**	**0,00**	**0,00**	**3.012.794.783,00**
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	218.081.790,00	0,00	0,00	218.081.790,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara - Reklas Kas BLUD atas kerugian Kas dan Pajak yang Belum Disetor TA 2019	2.604.782.693,00	0,00	0,00	2.604.782.693,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara-Reklas Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 atas S3TU yang Tidak Disetor TA 2017	189.930.300,00	0,00	0,00	189.930.300,00
		Aset Tidak Berwujud :	**279.798.200,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**327.798.200,00**
1	Dinas Pendidikan	Software	221.318.200,00	0,00	0,00	221.318.200,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Software	4.580.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Software	53.900.000,00	0,00	0,00	53.900.000,00
4	Dinas Perhubungan	Software	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
		Aset Lain-Lain :	**127.559.117.616,37**	**6.306.008.733,00**	**6.837.804.098,91**	**127.027.322.250,46**
1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	6.291.160.000,00	0,00	0,00	6.291.160.000,00
2	Kecamatan Tigabinanga	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	758.376.430,00	0,00	758.376.430,00	0,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	8.760.659.132,00	0,00	0,00	8.760.659.132,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	362.045.061,03	0,00	63.695.696,03	298.349.365,00
5	Dinas Pendidikan	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	85.491.974,77	0,00	70.491.974,77	15.000.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	1.092.576.028,11	0,00	994.452.028,11	98.124.000,00
7	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	557.500,00	0,00	0,00	557.500,00
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aset Rusak Berat/Usang	210.239.920,00	0,00	0,00	210.239.920,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Aset Rusak Berat/Usang	202.757.781,00	30.574.570,00	0,00	233.332.351,00
10	Dinas Pendidikan	Aset Rusak Berat/Usang	51.117.922.171,50	0,00	0,00	51.117.922.171,50

No	Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
11	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	Aset Rusak Berat/Usang	603.678.101,00	0,00	0,00	603.678.101,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Aset Rusak Berat/Usang	841.510.850,00	0,00	392.290.000,00	449.220.850,00
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	868.669.011,00	0,00	0,00	868.669.011,00
14	Dinas Kesehatan	Aset Rusak Berat/Usang	11.153.752.645,00	0,00	883.230.000,00	10.270.522.645,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aset Rusak Berat/Usang	3.515.160.000,00	0,00	2.465.000.000,00	1.050.160.000,00
16	Dinas Perhubungan	Aset Rusak Berat/Usang	4.133.985.684,00	0,00	0,00	4.133.985.684,00
17	Kecamatan Berastagi	Aset Rusak Berat/Usang	318.945.503,00	0,00	0,00	318.945.503,00
18	Sekretariat DPRD	Aset Rusak Berat/Usang	254.047.950,00	4.486.370.998,00	0,00	4.740.418.948,00
19	Rumah Sakit Umum Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	16.952.803.470,96	0,00	220.000.000,00	16.732.803.470,96
20	Dinas Lingkungan Hidup	Aset Rusak Berat/Usang	435.505.800,00	0,00	0,00	435.505.800,00
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Rusak Berat/Usang	791.928.080,00	36.240.000,00	0,00	828.168.080,00
22	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Aset Rusak Berat/Usang	97.995.200,00	0,00	0,00	97.995.200,00
23	Kecamatan Tiga Binanga	Aset Rusak Berat/Usang	249.472.000,00	0,00	0,00	249.472.000,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	4.643.823.486,00	773.673.765,00	305.068.150,00	5.112.429.101,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset Rusak Berat/Usang	131.679.820,00	0,00	131.679.820,00	0,00
26	Badan Pendapatan Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	380.412.615,00	0,00	0,00	380.412.615,00
27	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Aset Rusak Berat/Usang	323.114.600,00	0,00	0,00	323.114.600,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset Rusak Berat/Usang	281.575.000,00	979.149.400,00	0,00	1.260.724.400,00
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Rusak Berat/Usang	833.703.025,00	0,00		833.703.025,00
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	Aset Rusak Berat/Usang	1.590.031.659,00	0,00	553.520.000,00	1.036.511.659,00
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aset Rusak Berat/Usang	267.971.378,00	0,00	0,00	267.971.378,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Aset Rusak Berat/Usang	923.341.015,00	0,00	0,00	923.341.015,00
33	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Aset Rusak Berat/Usang	1.875.309.832,00	0,00	0,00	1.875.309.832,00
34	Dinas Pertanian	Aset Rusak Berat/Usang	1.199.231.101,00	0,00	0,00	1.199.231.101,00
35	Dinas Sosial	Aset Rusak Berat/Usang	306.111.500,00	0,00	0,00	306.111.500,00
36	Inspektorat	Aset Rusak Berat/Usang	218.688.300,00	0,00	0,00	218.688.300,00
37	Kecamatan Barusjahe	Aset Rusak Berat/Usang	108.020.000,00	0,00	0,00	108.020.000,00
38	Kecamatan Dolat Rayat	Aset Rusak Berat/Usang	117.494.906,00	0,00	0,00	117.494.906,00
39	Kecamatan Juhar	Aset Rusak Berat/Usang	252.138.000,00	0,00	0,00	252.138.000,00
40	Kecamatan Kabanjahe	Aset Rusak Berat/Usang	91.350.000,00	0,00	0,00	91.350.000,00
41	Kecamatan Kutabuluh	Aset Rusak Berat/Usang	245.040.000,00	0,00	0,00	245.040.000,00
42	Kecamatan Lau Baleng	Aset Rusak Berat/Usang	279.356.000,00	0,00	0,00	279.356.000,00
43	Kecamatan Mardinding	Aset Rusak Berat/Usang	265.683.500,00	0,00	0,00	265.683.500,00
44	Kecamatan Merdeka	Aset Rusak Berat/Usang	333.203.250,00	0,00	0,00	333.203.250,00
45	Kecamatan Merek	Aset Rusak Berat/Usang	225.122.225,00	0,00	0,00	225.122.225,00
46	Kecamatan Munte	Aset Rusak Berat/Usang	120.250.005,00	0,00	0,00	120.250.005,00
47	Kecamatan Namanteran	Aset Rusak Berat/Usang	112.156.800,00	0,00	0,00	112.156.800,00

No	Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
48	Kecamatan Payung	Aset Rusak Berat/Usang	21.095.000,00	0,00	0,00	21.095.000,00
49	Kecamatan Simpang Empat	Aset Rusak Berat/Usang	123.659.700,00	0,00	0,00	123.659.700,00
50	Kecamatan Tiganderket	Aset Rusak Berat/Usang	156.544.244,00	0,00	0,00	156.544.244,00
51	Kecamatan Tiga Panah	Aset Rusak Berat/Usang	84.516.300,00	0,00	0,00	84.516.300,00
52	Satuan Polisi Pamong Praja	Aset Rusak Berat/Usang	2.003.456.210,00	0,00	0,00	2.003.456.210,00
53	Sekretariat Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	945.797.852,00	0,00	0,00	945.797.852,00
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud :	**(146.849.280,00)**	**(85.539.820,00)**	**0,00**	**(232.389.100,00)**
1	Dinas Pendidikan	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	(88.827.280,00)	(37.081.820,00)	0,00	(125.909.100,00)
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	(53.900.000,00)	0,00	0,00	(53.900.000,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	(4.122.000,00)	(458.000,00)	0,00	(4.580.000,00)
4	Dinas Perhubungan	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	0,00	(48.000.000,00)	0,00	(48.000.000,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya :	**(95.410.691.999,37)**	**(6.155.248.597,32)**	**(5.047.516.541,43)**	**(96.518.424.055,26)**
1	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(393.690.586,93)	0,00	0,00	(393.690.586,93)
2	Dinas Kesehatan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(8.774.901.213,25)	0,00	(883.230.000,00)	(7.891.671.213,25)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(3.203.850.000,00)	0,00	(2.465.000.000,00)	(738.850.000,00)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(816.009.116,00)	0,00	0,00	(816.009.116,00)
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(813.406.650,00)	0,00	(392.290.000,00)	(421.116.650,00)
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(207.439.800,00)	0,00	0,00	(207.439.800,00)
7	Kecamatan Berastagi	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(292.640.053,00)	0,00	0,00	(292.640.053,00)
8	Sekretariat DPRD	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(254.047.950,00)	(4.337.482.886,00)	0,00	(4.591.530.836,00)
9	Rumah Sakit Umum Daerah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(16.653.191.693,56)	0,00	(220.000.000,00)	(16.433.191.693,56)
10	Dinas Lingkungan Hidup	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(527.641.685,72)	0,00	(96.728.571,43)	(430.913.114,29)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(787.413.080,00)	(36.240.000,00)	0,00	(823.653.080,00)
12	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(97.995.200,00)	0,00	0,00	(97.995.200,00)
13	Kecamatan Tiga Binanga	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(247.872.200,00)	0,00	0,00	(247.872.200,00)
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(4.578.404.986,00)	(772.364.241,32)	(305.068.150,00)	(5.045.701.077,32)

No	Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(179.539.742,13)	(30.012.070,00)	0,00	(209.551.812,13)
16	Dinas Perhubungan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(3.840.064.477,72)	0,00	0,00	(3.840.064.477,72)
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(131.679.820,00)	0,00	(131.679.820,00)	0,00
18	Badan Pendapatan Daerah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(374.589.007,50)	0,00	0,00	(374.589.007,50)
19	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(323.114.600,00)	0,00	0,00	(323.114.600,00)
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(273.890.000,00)	(979.149.400,00)	0,00	(1.253.039.400,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(819.996.525,00)	0,00	0,00	(819.996.525,00)
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(1.590.031.659,00)	0,00	(553.520.000,00)	(1.036.511.659,00)
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(267.321.278,00)	0,00	0,00	(267.321.278,00)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(877.210.269,60)	0,00	0,00	(877.210.269,60)
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(307.250.000,00)	0,00	0,00	(307.250.000,00)
26	Dinas Pertanian	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(1.171.944.737,55)	0,00	0,00	(1.171.944.737,55)
27	Dinas Sosial	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(306.111.500,00)	0,00	0,00	(306.111.500,00)
28	Inspektorat	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(218.688.300,00)	0,00	0,00	(218.688.300,00)
29	Kecamatan Barusjahe	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(108.020.000,00)	0,00	0,00	(108.020.000,00)
30	Kecamatan Dolat Rayat	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(117.494.906,00)	0,00	0,00	(117.494.906,00)
31	Kecamatan Juhar	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(236.343.000,00)	0,00	0,00	(236.343.000,00)
32	Kecamatan Kabanjahe	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(91.350.000,00)	0,00	0,00	(91.350.000,00)
33	Kecamatan Kutabuluh	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(242.940.000,00)	0,00	0,00	(242.940.000,00)
34	Kecamatan Lau Baleng	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(279.016.000,00)	0,00	0,00	(279.016.000,00)
35	Kecamatan Mardinding	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(265.683.500,00)	0,00	0,00	(265.683.500,00)
36	Kecamatan Merdeka	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(333.203.250,00)	0,00	0,00	(333.203.250,00)
37	Kecamatan Merek	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(209.327.225,00)	0,00	0,00	(209.327.225,00)

No	Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
38	Kecamatan Munte	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(119.950.005,00)	0,00	0,00	(119.950.005,00)
39	Kecamatan Namanteran	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(112.156.800,00)	0,00	0,00	(112.156.800,00)
40	Kecamatan Payung	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(19.395.000,00)	0,00	0,00	(19.395.000,00)
41	Kecamatan Simpang Empat	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(114.759.700,00)	0,00	0,00	(114.759.700,00)
42	Kecamatan Tiganderket	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(156.544.244,00)	0,00	0,00	(156.544.244,00)
43	Kecamatan Tiga Panah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(83.685.300,00)	0,00	0,00	(83.685.300,00)
44	Satuan Polisi Pamong Praja	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(1.997.188.147,50)	0,00	0,00	(1.997.188.147,50)
45	Sekretariat Daerah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(944.473.852,00)	0,00	0,00	(944.473.852,00)
46	Dinas Pendidikan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(41.649.224.938,91)	0,00	0,00	(41.649.224.938,91)
		Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) :	**73.268.000,00**	**0,00**	**73.268.000,00**	**0,00**
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	73.268.000,00	0,00	73.268.000,00	0,00
Total Aset Lainnya			**35.367.437.320,00**	**113.220.315,68**	**1.863.555.557,48**	**33.617.102.078,20**

Rincian Aset Rusak Berat/Usang Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan 2024

No	Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sekretariat DPRD	4.740.418.948,00	254.047.950,00	4.486.370.998,00
2	Sekretariat Daerah	945.797.852,00	945.797.852,00	0,00
3	Kecamatan Kabanjahe	91.350.000,00	91.350.000,00	0,00
4	Kecamatan Berastagi	318.945.503,00	318.945.503,00	0,00
5	Kecamatan Simpang Empat	123.659.700,00	123.659.700,00	0,00
6	Kecamatan Payung	21.095.000,00	21.095.000,00	0,00
7	Kecamatan Tiganderket	156.544.244,00	156.544.244,00	0,00
8	Kecamatan Munte	120.250.005,00	120.250.005,00	0,00
9	Kecamatan Tigabinanga	249.472.000,00	249.472.000,00	0,00
10	Kecamatan Juhar	252.138.000,00	252.138.000,00	0,00
11	Kecamatan Laubaleng	279.356.000,00	279.356.000,00	0,00
12	Kecamatan Barusjahe	108.020.000,00	108.020.000,00	0,00
13	Kecamatan Tigapanah	84.516.300,00	84.516.300,00	0,00
14	Kecamatan Kutabuluh	245.040.000,00	245.040.000,00	0,00
15	Kecamatan Merek	225.122.225,00	225.122.225,00	0,00
16	Kecamatan Mardingding	265.683.500,00	265.683.500,00	0,00
17	Kecamatan Merdeka	333.203.250,00	333.203.250,00	0,00
18	Kecamatan Namanteran	112.156.800,00	112.156.800,00	0,00
19	Kecamatan Dolatrayat	117.494.906,00	117.494.906,00	0,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.050.160.000,00	3.515.160.000,00	(2.465.000.000,00)
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	97.995.200,00	97.995.200,00	0,00
22	Dinas Perhubungan	4.133.985.684,00	4.133.985.684,00	0,00
23	Dinas Kesehatan	10.270.522.645,00	11.153.752.645,00	(883.230.000,00)
24	RSU Kabanjahe	16.732.803.470,96	16.952.803.470,96	(220.000.000,00)
25	Dinas Pendidikan	51.117.922.171,50	51.117.922.171,50	0,00
26	Dinas Sosial	306.111.500,00	306.111.500,00	0,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	1.036.511.659,00	1.590.031.659,00	(553.520.000,00)
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	833.703.025,00	833.703.025,00	0,00
29	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	828.168.080,00	791.928.080,00	36.240.000,00
30	Dinas Pertanian	1.199.231.101,00	1.199.231.101,00	0,00
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	233.332.351,00	202.757.781,00	30.574.570,00
32	Dinas Ketenagakerjaan, Koprasi dan Usaha Kecil Menengah	323.114.600,00	323.114.600,00	0,00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	923.341.015,00	923.341.015,00	0,00
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	868.669.011,00	868.669.011,00	0,00
35	Badan Pendapatan Daerah	380.412.615,00	380.412.615,00	0,00
36	Inspektorat	218.688.300,00	218.688.300,00	0,00
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	449.220.850,00	841.510.850,00	(392.290.000,00)
38	Dinas Lingkungan Hidup	435.505.800,00	435.505.800,00	0,00
39	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	603.678.101,00	603.678.101,00	0,00
40	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	0,00	131.679.820,00	(131.679.820,00)
41	Satuan Polisi Pamong Peraja	2.003.456.210,00	2.003.456.210,00	0,00
42	Badan Penangulangan Bencana Daerah	5.112.429.101,00	4.643.823.486,00	468.605.615,00
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	210.239.920,00	210.239.920,00	0,00
44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.875.309.832,00	1.875.309.832,00	0,00
45	Dinas Komunikasi dan Informasi	1.260.724.400,00	281.575.000,00	979.149.400,00
46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	267.971.378,00	267.971.378,00	0,00
	Jumlah	**111.563.472.253,46**	**110.208.251.490,46**	**1.355.220.763,00**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rusak Berat) Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan 2024

No	Perangkat Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Sekretariat DPRD	4.591.530.836,00	254.047.950,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	944.473.852,00	944.473.852,00	0,00
3	Kecamatan Kabanjahe	91.350.000,00	91.350.000,00	0,00
4	Kecamatan Berastagi	292.640.053,00	292.640.053,00	0,00
5	Kecamatan Simpang Empat	114.759.700,00	114.759.700,00	0,00
6	Kecamatan Payung	19.395.000,00	19.395.000,00	0,00
7	Kecamatan Tiganderket	156.544.244,00	156.544.244,00	0,00
8	Kecamatan Munte	119.950.005,00	119.950.005,00	0,00
9	Kecamatan Tigabinanga	247.872.200,00	247.872.200,00	0,00
10	Kecamatan Juhar	236.343.000,00	236.343.000,00	0,00
11	Kecamatan Laubaleng	279.016.000,00	279.016.000,00	0,00
12	Kecamatan Barusjahe	108.020.000,00	108.020.000,00	0,00
13	Kecamatan Tigapanah	83.685.300,00	83.685.300,00	0,00
14	Kecamatan Kutabuluh	242.940.000,00	242.940.000,00	0,00
15	Kecamatan Merek	209.327.225,00	209.327.225,00	0,00
16	Kecamatan Mardingding	265.683.500,00	265.683.500,00	0,00
17	Kecamatan Merdeka	333.203.250,00	333.203.250,00	0,00
18	Kecamatan Namanteran	112.156.800,00	112.156.800,00	0,00
19	Kecamatan Dolatrayat	117.494.906,00	117.494.906,00	0,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	738.850.000,00	3.203.850.000,00	(2.465.000.000,00)
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	97.995.200,00	97.995.200,00	0,00
22	Dinas Perhubungan	3.840.064.477,72	3.840.064.477,72	0,00
23	Dinas Kesehatan	7.891.671.213,25	8.774.901.213,25	(883.230.000,00)
24	RSU Kabanjahe	16.433.191.693,56	16.653.191.693,56	(220.000.000,00)
25	Dinas Pendidikan	41.649.224.938,91	41.649.224.938,91	0,00
26	Dinas Sosial	306.111.500,00	306.111.500,00	0,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan keliarga Berencana	1.036.511.659,00	1.590.031.659,00	(553.520.000,00)
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	819.996.525,00	819.996.525,00	0,00
29	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	823.653.080,00	787.413.080,00	36.240.000,00
30	Dinas Pertanian	1.171.944.737,55	1.171.944.737,55	0,00
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	209.551.812,13	179.539.742,13	30.012.070,00
32	Dinas Ketenagakerjaan, Koprasi dan Usaha Kecil Menengah	323.114.600,00	323.114.600,00	0,00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	877.210.269,60	877.210.269,60	0,00
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	816.009.116,00	816.009.116,00	0,00
35	Badan Pendapatan Daerah	374.589.007,50	374.589.007,50	0,00
36	Inspektorat	218.688.300,00	218.688.300,00	0,00
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	421.116.650,00	813.406.650,00	(392.290.000,00)
38	Dinas Lingkungan Hidup	430.913.114,29	527.641.685,72	(96.728.571,43)
39	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	393.690.586,93	393.690.586,93	0,00
40	Badan Kesbang,Politik dan Linmas	0,00	131.679.820,00	(131.679.820,00)
41	Satuan Polisi Pamong Peraja	1.997.188.147,50	1.997.188.147,50	0,00
42	Badan Penangulangan Bencana Daerah	5.045.701.077,32	4.578.404.986,00	467.296.091,32
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	207.439.800,00	207.439.800,00	0,00
44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	307.250.000,00	307.250.000,00	0,00
45	Dinas Komunikasi dan Informasi	1.253.039.400,00	273.890.000,00	979.149.400,00
46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	267.321.278,00	267.321.278,00	0,00
	Jumlah	**96.518.424.055,26**	**95.410.691.999,37**	**1.107.732.055,89**

Lampiran 87

Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Tahun 2025

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Koreksi Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah (Rp)	Penerima	Jumlah (Rp)	Pemberi					
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	12	13
1		**Rumah Sakit Umum**										
	I	**Utang PFK**										
	1	Utang PPh Pasal 21	20.996.813,00	0,00	-	0,00	-	20.996.813,00	2018	20.996.813,00	0,00	Kewajiban mantan Bendahara 2018
	2	Utang PPh Pasal 22	10.334.422,00	0,00	-	0,00	-	10.334.422,00	2018	10.334.422,00	0,00	Kewajiban mantan Bendahara 2018
	3	Utang PPN Pusat	46.648.013,00	0,00	-	0,00	-	46.648.013,00	2018	46.648.013,00	0,00	Kewajiban mantan Bendahara 2018
		TOTAL	**77.979.248,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**77.979.248,00**		**77.979.248,00**	**0,00**	**-**

Lampiran 88

Rincian Utang Belanja Perangkat Daerah
Tahun 2025

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah (Rp)	Penerima	Jumlah (Rp)	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12		13
1		**Dinas Pendidikan**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	761.122.824,00	761.122.824,00	BPJS	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	-	11.152.416.900,00	-	11.152.416.900,00	2025	0,00	11.152.416.900,00	0,00	0,00	-
	3	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK	0,00	0,00	-	4.107.568.800,00	-	4.107.568.800,00	2025	0,00	4.107.568.800,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Pegawai	**761.122.824,00**	**761.122.824,00**	**-**	**15.259.985.700,00**	**-**	**15.259.985.700,00**		**0,00**	**15.259.985.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	II	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa Pembangunan Pagar SMPN 3 Tiga Binanga dan SMPN 1 Tiganderket	13.300.000,00	13.300.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Tahun 2025	28.000.000,00	28.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Perencanaan Pembangunan Toilet	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4	Pengawasan Sumur BOR Ajinembah	3.180.000,00	3.180.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Jasa konsultasi Pengawasan Lanjutan - Pengawasan Pagar	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Jasa Konsultasi Perencanaan Lanjutan	16.900.000,00	16.900.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7	Jasa Konsultasi Pengawasan - Pengawasan Toilet	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Jasa Konsultasi Pengawasan - Pembangunan Toilet (DAU SG SILPA)	16.600.000,00	16.600.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	Jasa Pengawasan - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	Jasa Konsultasi Perencanaan - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3.750.000,00	3.750.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	11	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Perpustakaan SDN 040533 Merek	3.180.000,00	3.180.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	12	Belanja Jasa Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 046419 Serdang	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	13	Belanja Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.300.000,00	3.300.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	14	Belanja Jasa Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 046419 Serdang	4.550.000,00	4.550.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	15	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan - Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	57.280.000,00	57.280.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	16	Jasa Konsultasi Pengawasan - Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	76.450.000,00	76.450.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	17	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	-	29.100.000,00	-	29.100.000,00	2023	0,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	**275.490.000,00**	**275.490.000,00**	**-**	**29.100.000,00**	**-**	**29.100.000,00**		**0,00**	**29.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	III	**Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**												

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah (Rp)	Penerima	Jumlah (Rp)	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12		13
	1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pembangunan Area Bermain TK Pembina Juhar	71.800.000,00	71.800.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU SDN 047171 Basam Tongkoh	143.000.000,00	143.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Pembangunan Area Bermain TK Negeri Satu Atap Lausimomo	44.400.000,00	44.400.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Pembangunan Area Bermain TK Negeri Satu Atap Kuta Bangun	44.400.000,00	44.400.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pembangunan Toilet SD N 040570 Tigabinanga	132.850.000,00	132.850.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pembangunan Toilet SDN 040452 Kabanjahe	99.596.000,00	99.596.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembangunan Toilet SD Negeri 040552 Samperaya	124.400.000,00	124.400.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembangunan Toilet SD Negeri 040553 Bandar Purba	132.870.000,00	132.870.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**793.316.000,00**	**793.316.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		TOTAL 1	**1.829.928.824,00**	**1.829.928.824,00**	**-**	**15.289.085.700,00**	**-**	**15.289.085.700,00**		**0,00**	**15.289.085.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2		**Dinas Kesehatan**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang 4 % BPJS Kesehatan Tambahan penghasilan PPPK Bulan Oktober,November,Desember Thn 2024	5.095.960,00	0,00	-	0,00	-	5.095.960,00	2024	0,00	5.095.960,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Tunjangan Anak dan Istri pada Gaji PPPK Bulan Desember 2024	549.064,00	0,00	-	0,00	-	549.064,00	2024	0,00	549.064,00	0,00	0,00	-
	3	Utang Kekurangan BPJS pada Gaji PPPK Bulan Desember 2024	4.223.909,00	0,00	-	0,00	-	4.223.909,00	2024	0,00	4.223.909,00	0,00	0,00	-
	4	Utang Kekurangan Tunjangan Beras pada Gaji PPPK Thn 2024	1.231.140,00	0,00	-	0,00	-	1.231.140,00	2024	0,00	1.231.140,00	0,00	0,00	-
	5	Utang Gaji Terusan an.Jeni Br Tarigan pada Bulan Desember 2024	4.799.270,00	4.799.270,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Utang Gaji PNS Untuk bulan Desember 2025 (Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Jabatan Fungsional Umum, Tunjangan BPJS 4%, Pembulatan Gaji, JKK dan JKM)	0,00	0,00	-	83.880.724,00	-	83.880.724,00	2025	0,00	83.880.724,00	0,00	0,00	-
	7	Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK bulan Desember 2025	0,00	0,00	-	9.256.000,00	-	9.256.000,00	2025	0,00	9.256.000,00	0,00	0,00	-

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah (Rp)	Penerima	Jumlah (Rp)	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12		13
	8	Utang Iuran BPJS 4% pada Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Oktober,November dan Desember 2025 Khusus PPPK	0,00	0,00	-	7.256.216,00	-	7.256.216,00	2025	0,00	7.256.216,00	0,00	0,00	-
	9	Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Pada Puskesmas Munthe bulan Desember 2025	0,00	0,00	-	800.000,00	-	800.000,00	2025	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-
	10	Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Pada Puskesmas Munthe bulan Desember 2025	0,00	0,00	-	900.000,00	-	900.000,00	2025	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-
	11	Utang gaji terusan an.Melta br Sinulingga bulan November s/d Desember 2025	0,00	0,00	-	13.828.904,00	-	13.828.904,00	2025	0,00	13.828.904,00	0,00	0,00	-
	12	Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS an.Dr Blandina Purnama Ria Br Tarigan bulan Desember 2025	0,00	0,00	-	2.900.000,00	-	2.900.000,00	2025	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Pegawai	**15.899.343,00**	**4.799.270,00**	**-**	**118.821.844,00**	**-**	**129.921.917,00**		**0,00**	**129.921.917,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	II	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	9.900.000,00	9.900.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	14.850.000,00	14.850.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	17.090.000,00	17.090.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	750.000,00	750.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024	5.997.000,00	5.997.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024	6.984.700,00	6.984.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	700,00	0,00	Jumlah lebih dalam permintaan pembayaran utang belanja perjalanan
	11	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024	3.760.000,00	3.760.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	12	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	13	Utang Belanja Makan/Minuman Tahun 2024	1.440.000,00	1.440.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	14	Utang Belanja Narasumber Tahun 2024	4.400.000,00	4.400.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	15	Utang Jasa Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Tahun 2024	430.000,00	430.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	16	Utang Pajak Kendaraan Bermotor TA.2024	8.584.500,00	8.584.500,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	17	Utang Pengadaan Stiker Investaris Barang	1.209.600,00	1.209.600,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	18	Kurang Bayar Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4% th 2023	45.307.295,00	45.307.295,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	19	Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4% tahun 2024	375.000.000,00	354.952.882,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	20.047.118,00	0,00	Jumlah lebih dalam permintaan utang belanja jasa kesehatan 4 % Thn 2024
	20	Utang Bantuan Iuran PBPU dan BP Kelas 3 Mandiri Aktif th 2023	3.200.400,00	3.200.400,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah (Rp)	Penerima	Jumlah (Rp)	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12		13
	21	Utang belanja alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Cofy Rutin) untuk bulan Juni s/d Desember 2025	0,00	0,00	-	5.734.400,00	-	5.734.400,00	2025	0,00	5.734.400,00	0,00	0,00	-
	22	Utang Jasa Tenaga Kesehatan Retrisbusi Pasien Umum Puskesmas Bulan September s/d Desember 2025	0,00	0,00	-	329.270.000,00	-	329.270.000,00	2025	0,00	329.270.000,00	0,00	0,00	-
	23	Utang Jasa Tenaga Kesehatan Persalinan Normal (Non Kapitasi) Puskesmas Bulan September s/d Desember 2025	0,00	0,00	-	249.720.000,00	-	249.720.000,00	2025	0,00	249.720.000,00	0,00	0,00	-
	24	Utang biaya belanja Pembayaran Rekening Listrik DINKES untuk tagihan bulan Oktober dan Desember 2025 an.Mardin Purba	0,00	0,00	-	6.457.594,00	-	6.457.594,00	2025	0,00	6.457.594,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	**531.903.495,00**	**511.855.677,00**	**-**	**591.181.994,00**	**-**	**591.181.994,00**		**0,00**	**591.181.994,00**	**20.047.818,00**	**0,00**	**-**
		TOTAL 2	**547.802.838,00**	**516.654.947,00**	**-**	**710.003.838,00**	**-**	**721.103.911,00**		**0,00**	**721.103.911,00**	**20.047.818,00**	**0,00**	**-**
3		**Rumah Sakit Umum**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Honorarium Dokter spesialis Non ASN	45.000.000,00	45.000.000,00	-	38.000.000,00	-	38.000.000,00	2024	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	-
	2	Honorarium Tim Satuan pengawas Internal BLUD	48.000.000,00	48.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Jasa Pelayanan BPJS untuk klaiman pending/susulan 2024	478.273.822,00	435.956.621,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	42.317.201,00	0,00	Koreksi karena jasa dibayar berdasarkan klaim yang diterima
	4	Jasa Pelayanan TB MDR dan TB RO Tahun 2024	26.021.000,00	26.021.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Jasa Pelayanan Obat Kronis Bulan Juni s.d Desember 2024	410.907.451,00	410.907.451,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Jasa Pelayanan pasien BPJS bulan Oktobber s.d Desember 2024 dan klaim pendingan	1.840.955.631,00	1.840.955.631,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7	Jasa Pelayanan Pasien Umum Bulan Oktober dan Desember 2024	220.075.000,00	220.075.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Iuran BPJS Kesehatan 4% dari Penerima Jasa Pelayanan bulan Juni-Desember 2024	74.170.080,00	68.075.494,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	6.094.586,00	0,00	Dibayar sesuai hasil rekon dengan BPJS Kesehatan Rp68.075.494,00 dan sisanya Rp6.094.586,00 di
	9	Kekurangan Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember	1.300.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	Tidak dapat dibayar, karena hasil produktivitas kerja tidak tercantum penambahan PLT
	10	Jasa Pelayanan Pasien BPJS Bulan November s.d Desember 2025	0,00	0,00	-	1.801.581.972,00	-	1.801.581.972,00	2025	0,00	1.801.581.972,00	0,00	0,00	
	11	Jasa Pelayanan BPJS untuk klaiman pending/susulan 2025	0,00	0,00	-	628.165.144,00	-	628.165.144,00	2025	0,00	628.165.144,00	0,00	0,00	Koreksi karena jasa dibayar berdasarkan klaim yang diterima
	12	Belanja Pegawai BLUD - Jasa Pelayanan Pasien Umum Bulan Oktober dan Desember 2025	0,00	0,00	-	259.121.500,00	-	259.121.500,00	2025	0,00	259.121.500,00	0,00	0,00	
	13	Belanja Pegawai BLUD - Iuran Jaminan Kesehtaan 4% dari Komponen Penerimaan Jasa Pelayanan Bulan September-Desember 2025	0,00	0,00	-	39.270.042,00	-	39.270.042,00	2025	0,00	39.270.042,00	0,00	0,00	
	14	Iuran Jaminan Kesehatan 4% dari Komponen Penerimaan Gaji dan TPP ASN	0,00	0,00	-	82.943.460,00	-	82.943.460,00	2025	0,00	82.943.460,00	0,00	0,00	

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah (Rp)	Penerima	Jumlah (Rp)	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12		13
	15	Belanja Tunjangan fungsional umum PPPK	0,00	0,00	-	0,00	-	1.635.000,00	2025	0,00	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	Penambahan hutang karena belum tercatat pada laporan keuangan unaudited
	16	Belanja Tunjangan fungsional PNS	0,00	0,00	-	0,00	-	7.000.000,00	2025	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	Penambahan hutang karena belum tercatat pada laporan keuangan unaudited
		Jumlah Utang Belanja Pegawai	**3.144.702.984,00**	**3.094.991.197,00**	**-**	**2.849.082.118,00**	**-**	**2.857.717.118,00**		**0,00**	**2.857.717.118,00**	**49.711.787,00**	**8.635.000,00**	**-**
	II	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Belanja obat-obatan/ BHP	685.015.280,00	0,00	-	0,00	-	685.015.280,00	2022	0,00	685.015.280,00	0,00	0,00	BHP dari kemenkes untuk Covid
	2	Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.039.650.510,00	5.037.090.632,00	Perusahaan	5.093.918.792,00	-	5.050.596.066,33	2024, 2025	0,00	5.050.596.066,33	2.559.878,00	(43.322.725,67)	lebih catat pada belanja perjalanan dinas dan belanja obat-obatan sebesar Rp2.559.878,00 dan lebih catat setelah konfirmasi dengan perusahaan sebesar
	3	Belanja Jasa Kantor-Jasa tenaga kesehatan untuk pelayanan pasien tidak mampu dan terlantar bulan November dan Desember 2024	50.967.000,00	50.967.000,00	-	0,00	-	0,00	2024		0,00	0,00	0,00	
		Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	**5.775.632.790,00**	**5.088.057.632,00**	**-**	**5.093.918.792,00**	**-**	**5.735.611.346,33**		**0,00**	**5.735.611.346,33**	**2.559.878,00**	**(43.322.725,67)**	**-**
	III	**Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin**												
	1	Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	476.102.053,00	476.102.053,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Belanja Modal Komputer	3.255.075,00	3.255.075,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Jumlah Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**479.357.128,00**	**479.357.128,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		TOTAL 3	**9.399.692.902,00**	**8.662.405.957,00**	**-**	**7.943.000.910,00**	**-**	**8.593.328.464,33**		**0,00**	**8.593.328.464,33**	**52.271.665,00**	**(34.687.725,67)**	**-**
4		**Satuan Polisi Pamong Praja**												
	I	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	0,00	-	2.150.924,00	PLN	2.150.924,00	2025	0,00	2.150.924,00	0,00	0,00	
	2	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	889.390,00	889.390,00	Nensita Br Tarigan	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 4	**889.390,00**	**889.390,00**	**-**	**2.150.924,00**	**-**	**2.150.924,00**		**0,00**	**2.150.924,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
5		**Kecamatan Barusjahe**												
	I	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	263.500,00	263.500,00	PDAM Tirta Malem	790.500,00	-	790.500,00	2025	0,00	790.500,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 5	**263.500,00**	**263.500,00**	**-**	**790.500,00**	**-**	**790.500,00**		**0,00**	**790.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
6		**Dinas Perhubungan**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	4.672.800,00	4.672.800,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	7.588.300,00	-	7.588.300,00	2025	0,00	7.588.300,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	560.736,00	560.736,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	647.402,00	-	647.402,00	2025	0,00	647.402,00	0,00	0,00	-
	3	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	2.025.000,00	2.025.000,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	980.000,00	-	980.000,00	2025	0,00	980.000,00	0,00	0,00	-
	4	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	0,00		185.000,00		185.000,00	2025	0,00	185.000,00	0,00	0,00	
	5	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00		2.700.000,00		2.700.000,00	2025	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
	6	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	217.260,00	217.260,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	362.100,00	-	362.100,00	2025	0,00	362.100,00	0,00	0,00	-

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah (Rp)	Penerima	Jumlah (Rp)	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12		13
	7	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	75.207,00	75.207,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	34.179,00	-	34.179,00	2025	0,00	34.179,00	0,00	0,00	-
	8	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	72,00	72,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	161,00	-	161,00	2025	0,00	161,00	0,00	0,00	-
	9	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	290.341,00	290.341,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	376.028,00	-	376.028,00	2025	0,00	376.028,00	0,00	0,00	-
	10	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.215,00	11.215,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	18.212,00	-	18.212,00	2025	0,00	18.212,00	0,00	0,00	-
	11	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	33.644,00	33.644,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	54.636,00	-	54.636,00	2025	0,00	54.636,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Pegawai	**7.886.275,00**	**7.886.275,00**		**12.946.018,00**	**-**	**12.946.018,00**		**0,00**	**12.946.018,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	II	**Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**												
	1	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	650.702.800,00	650.702.800,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	**650.702.800,00**	**650.702.800,00**	**-**	**0,00**	**-**	0,00		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		TOTAL 6	**658.589.075,00**	**658.589.075,00**	-	**12.946.018,00**	-	**12.946.018,00**		**0,00**	**12.946.018,00**	**0,00**	**0,00**	-
7		**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**												
	I	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat												
	1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sukandebi Kec. Naman Teran (DAK Penugasan)	492.601.998,00	492.601.998,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	**492.601.998,00**	**492.601.998,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	II	**Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**												
	a.	**Utang Belanja Modal Bangunan Air**												
	1	Pembangunan Saluran Drainase Gg. Pendidikan Kota Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo	199.100.000,00	199.100.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Pembangunan Drainase Desa Kacinambun Kec. Tiga Panah Kab. Karo	492.840.000,00	492.840.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Pembangunan Saluran Drainase Desa Bintang Meriah Kec. Kuta Buluh Kab. Karo	199.460.000,00	199.460.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4	Pembangunan Saluran Drainase Desa Buluh Naman Kec. Munte Kab. Karo	199.000.000,00	199.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Pembangunan Saluran Drainase Desa Kubu Colia Kec. Dolat Rayat Kab. Karo	199.400.000,00	199.400.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Pembangunan Saluran Drainase Desa Rumah Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo	199.250.000,00	199.250.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7	Pembangunan Saluran Drainase Desa Ujung Payung Kec. Payung Kab. Karo	199.380.000,00	199.380.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Revitalisasi Saluran Drainase Jl. Pahlawan Kec. Kabanjahe	394.050.000,00	394.050.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	**2.082.480.000,00**	**2.082.480.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	b.	**Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi**												-
	1	Rehabilitasi Jaringan Irigas DI Payung-Batukarang Kec.Payung Kab.Karo	388.799.962,00	388.799.962,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Rehabilitasi Jaringan Irigas di Belinun Kec. Juhar Kab.Karo	199.700.000,00	199.700.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	**588.499.962,00**	**588.499.962,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah (Rp)	Penerima	Jumlah (Rp)	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12		13
		Jumlah Utang Belanja Modal Bangunan Air	**2.670.979.962,00**	**2.670.979.962,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	c.	**Belanja Modal Jalan Kabupaten**												
	1	Pembangunan Tembok penahan tanah pada ruas jalan Kapten Pala Bangun Kec. Kabanjahe	1.906.475,75	1.906.475,75	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jembatan Pada Ruas Jalan Panorama Tongging -Aek Hotang Kec. Merek	4.886.337,36	4.886.337,36	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Belanja Modal Jalan Kabupaten	**6.792.813,11**	**6.792.813,11**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Jumlah Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	**2.677.772.775,11**	**2.677.772.775,11**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		TOTAL 7	**3.170.374.773,11**	**3.170.374.773,11**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
8		**Kecamatan Merek**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Gaji Pokok PNS	8.022.300,00	8.022.300,00	Deking Munte Saragih dan Alfonsus Romi Ginting (Pegawai Kantor Camat Merek)	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Tunjangan Keluarga PNS	802.230,00	802.230,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Tunjangan Jabatan PNS	540.000,00	540.000,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4	Tunjangan Fungsional Umum PNS	185.000,00	185.000,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Tunjangan Beras PNS	289.680,00	289.680,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Pembulatan Gaji PNS	48,00	48,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	381.981,00	381.981,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	19.254,00	19.254,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	Iuran Jaminan Kematian PNS	57.761,00	57.761,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 8	**10.298.254,00**	**10.298.254,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
9		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2.164.722,00	2.164.722,00	Agustina Br Sinuhaji, S.Pi	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 9	**2.164.722,00**	**2.164.722,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
10		**Kecamatan Naman Teran**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	15.088.900,00	15.088.900,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	1.272.288,00	1.272.288,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	490.000,00	490.000,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	540.000,00	540.000,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	796.620,00	796.620,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.083,00	14.083,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	100,00	100,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	695.647,00	695.647,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	36.212,00	36.212,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah (Rp)	Penerima	Jumlah (Rp)	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12		13
	10	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	108.639,00	108.639,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 10	**19.042.489,00**	**19.042.489,00**		**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
11		**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**												
	I	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	887.961.058,50	887.961.058,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,50	0,00	Pembayaran utang Tahun 2024 karna belanja barang dan jasa masuk ke persediaan di 2025 ketika pembayaran
		TOTAL 11	**887.961.058,50**	**887.961.058,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**-**
12		**Dinas Pertanian**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	16.319.128,00	16.319.128,00	BPJS Kesehatan	799.580,00	-	799.580,00	2024	0,00	799.580,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	-	8.206.700,00	-	8.206.700,00	2025	0,00	8.206.700,00	0,00	0,00	-
	3	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00	-	27.566.167,00	-	27.566.167,00	2025	0,00	27.566.167,00	0,00	0,00	-
	4	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	-	540.000,00	-	540.000,00	2025	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-
	5	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00	-	2.760.000,00	-	2.760.000,00	2025	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	-
	6	Utang Belanja Tunjangan Beras ASSN-Tunjangan Beras PPPK	0,00	0,00	-	434.520,00	-	434.520,00	2025	0,00	434.520,00	0,00	0,00	-
	7	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	0,00	0,00	-	384,00	-	384,00	2025	0,00	384,00	0,00	0,00	-
	8	Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,00	0,00	-	44.473,00	-	44.473,00	2025	0,00	44.473,00	0,00	0,00	-
	9	Utang Belanja Iurana Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK	0,00	0,00	-	133.413,00	-	133.413,00	2025	0,00	133.413,00	0,00	0,00	-
	10	Utang Belanja Tambahan Pengahsilan Berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	0,00	-	41.763.740,00	-	41.763.740,00	2025	0,00	41.763.740,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Pegawai	**16.319.128,00**	**16.319.128,00**	**-**	**82.248.977,00**	**-**	**82.248.977,00**		**0,00**	**82.248.977,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	II	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	0,00	0,00	-	2.983.100,00	-	2.983.100,00	2025	0,00	2.983.100,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	11.058.861,00	11.058.861,00	PLN	3.520.000,00	-	3.520.000,00	2024	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	**11.058.861,00**	**11.058.861,00**	**-**	**6.503.100,00**	**-**	**6.503.100,00**		**0,00**	**6.503.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		TOTAL 12	**27.377.989,00**	**27.377.989,00**	**-**	**88.752.077,00**	**-**	**88.752.077,00**		**0,00**	**88.752.077,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
13		**Kecamatan Merdeka**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	14.230.600,00	14.230.600,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.275.000,00	1.275.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 13	**15.505.600,00**	**15.505.600,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
14		**Kecamatan Tiganderket**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan Pegawai Kantor Camat Tiganderket a.n Terbit Singarimbun, SH, dkk	2.519.629,00	2.519.629,00	Terbit Singarimbun, SH, dkk	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah (Rp)	Penerima	Jumlah (Rp)	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12		13
	2	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS an. Anita dkk	0,00	0,00	-	283.135,00	-	283.135,00	2025	0,00	283.135,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 14	**2.519.629,00**	**2.519.629,00**	**-**	**283.135,00**	**-**	**283.135,00**		**0,00**	**283.135,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
15	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB**													
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	-	52.641.400,00	-	52.641.400,00	2025	0,00	52.641.400,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	0,00	-	2.590.000,00	-	2.590.000,00	2025	0,00	2.590.000,00	0,00	0,00	-
	3	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	0,00	-	1.013.880,00	-	1.013.880,00	2025	0,00	1.013.880,00	0,00	0,00	-
	4	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	-	1.120,00	-	1.120,00	2025	0,00	1.120,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 15	**0,00**	**0,00**	**-**	**56.246.400,00**	**-**	**56.246.400,00**		**0,00**	**56.246.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		TOTAL UTANG	**16.572.411.043,61**	**15.803.976.207,11**	**-**	**24.103.259.502,00**	**-**	**24.764.687.129,33**		**0,00**	**24.764.687.129,33**	**72.319.483,50**	**(34.687.725,67)**	**-**

Rincian Utang Belanja Pegawai per Sub Rincian Objek
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	144.541.004,00	51.498.221,00	93.042.783,00
2	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	27.566.167,00	0,00	27.566.167,00
3	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	7.731.062,00	2.635.254,00	5.095.808,00
4	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	549.064,00	549.064,00	0,00
5	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	8.000.000,00	3.055.000,00	4.945.000,00
6	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
7	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0,00	540.000,00
8	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.960.000,00	2.000.000,00	960.000,00
9	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.095.000,00	0,00	7.095.000,00
10	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	4.779.720,00	1.303.560,00	3.476.160,00
11	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	1.665.660,00	1.231.140,00	434.520,00
12	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	568.624,00	89.290,00	479.334,00
13	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	2.173,00	220,00	1.953,00
14	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	384,00	0,00	384,00
15	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.649.765,00	762.490.793,00	(680.841.028,00)
16	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.463.965,00	25.638.997,00	(3.175.032,00)
17	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	167.672,00	66.681,00	100.991,00
18	Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	44.473,00	0,00	44.473,00
19	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	503.021,00	200.044,00	302.977,00
20	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK	133.413,00	0,00	133.413,00
21	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.700.000,00	1.300.000,00	2.400.000,00
22	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	51.563.740,00	0,00	51.563.740,00
23	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	11.152.416.900,00	0,00	11.152.416.900,00
24	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK	4.107.568.800,00	0,00	4.107.568.800,00
25	Utang Belanja Pegawai BLUD	2.766.138.658,00	3.143.402.984,00	(377.264.326,00)
Jumlah		**18.399.349.265,00**	**3.995.461.248,00**	**14.403.888.017,00**

Perbandingan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LRA dengan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO
Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Berjalan	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4=(2+3)
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
3	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00
5	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
6	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
7	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00
8	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00
9	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
10	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00
11	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00
12	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
13	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00
14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
16	Beban TPG PNSD	0,00	11.152.416.900,00	11.152.416.900,00
17	Beban Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
18	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
19	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
20	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
21	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00
22	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00
23	Beban TPG PPPK	0,00	4.107.568.800,00	4.107.568.800,00
Jumlah		**0,00**	**15.259.985.700,00**	**15.259.985.700,00**

Perbandingan Belanja Barang Pakai Habis dengan Beban Barang Pakai Habis
Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Persediaan Tahun Berjalan	Utang Belanja Barang Pakai Habis Tahun sebelumnya	kapitalisasi	Koreksi dari Perabot Kantor ke persediaan	Koreksi JKN	koreksi dari Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran utang Perkimtan	Total Mutasi Kurang	Utang Belanja Barang Pakai Habis Tahun Berjalan	Persediaan Tahun Sebelumnya	Kapitalisasi	Non Kapitalisasi	Koreksi Utang Belanja Barang Pakai Habis PERKIMTAN	Penerimaan dari Provinsi	Koreksi Belanja Modal ke Persediaan	Koreksi Beban Barang dan Jasa JKN ke Beban Pakai habis	Koreksi Beban Barang dan Jasa BOSP ke Beban Pakai habis	Mutasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Persediaan	Bertambah dari Belanja Kursus	Bertambah dari Natura	Mutasi dari Perabot Kantor	Mutasi dari Belanja Kursus	Koreksi Nilai BahasCetak Tahun 2024 Dinas Perhubungan	Reklas atas Beban Tenaga Kesehatan pada DINKES	Total Mutasi Tambah	LO Tahun 2025
		(Rp)								(Rp)																	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = ∑ (4 s.d 10)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28 = ∑ (11 sd 27)	29 = 1-11+28
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	702.635.000,00	0,00	0,00	30.749.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.749.600,00	0,00	866.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00	2.873.000,00	1.829.733.973,00								1.841.423.573,00	2.513.308.973,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	36.896.400,00	89.956.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.956.156,00	0,00	150.022.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.827.769,00	403.772.877,00	347.925.795,00							935.549.192,00	882.489.436,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.208.265.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.606.931,00	4.572.000,00	26.550.108,00							283.729.039,00	4.491.994.134,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	43.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	3.785.000,00								3.863.000,00	46.977.000,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	207.373.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	80.685.195,00								81.615.195,00	288.988.955,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	12.784.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.315.000,00	2.499.000,00	46.529.000,00							63.343.000,00	76.127.050,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	296.355.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.355.190,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.876.762.910,00	172.760.286,00	0,00	145.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.010.286,00	0,00	736.797.386,00	0,00	50.177.400,00	0,00	0,00	0,00	50.682.038,00	92.986.920,00							2.455.422.396,00	3.386.066.140,00	6.944.818.764,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	99.898.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.273.000,00									83.273.000,00	183.171.682,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.000,00									2.119.000,00	2.119.000,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.120,00	345.000,00								1.346.120,00	1.346.120,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.063.000,00								2.063.000,00	2.607.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	95.793.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00	9.488.036,00								11.183.036,00	106.976.689,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	474.893.018,00	6.021.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418.500,00									9.418.500,00	478.289.768,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.529.616.973,00	39.623.372,00	0,00	16.840.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.463.532,00	0,00	74.705.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.425.845,00	4.099.725.980,00	180.491.339,00							4.617.348.358,00	6.090.501.799,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.017.218.718,00	46.212.875,00	0,00	4.528.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.741.509,00	0,00	57.135.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.138.136,00	737.647.482,00	30.074.760,00							1.022.995.718,00	1.989.472.927,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.916.856.537,00	162.161.088,00	1.209.600,00	39.519.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.890.538,00	5.734.400,00	187.942.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.494.660,00	2.586.472.910,00	167.241.330,00					22.661.248,00	12.904.650,00	3.139.451.228,00	6.853.417.227,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	105.228.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696.000,00	51.367.000,00								65.803.000,00	169.731.000,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	3.000.000,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.119.810.396,00	796.840.470,00	0,00	19.765.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.605.765,00	0,00	800.636.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.425.257,00	581.816.174,00								1.467.877.731,00	1.771.082.362,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	526.065.554,00	63.142.392,00	0,00	0,00	7.700.254,00	0,00	0,00	0,00	70.842.646,00	0,00	8.397.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.779.938,00	1.677.754.714,00	111.855.300,00							1.915.787.318,00	2.371.010.226,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	845.785.529,00	16.838.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.838.800,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.634.197,00	278.192.600,00	16.893.342,00							348.205.139,00	1.177.151.868,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	158.666.158,00	76.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.560.000,00	0,00	76.560.000,00	0,00	50.771.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00								139.931.600,00	222.037.758,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	449.518.987,00	6.501.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501.400,00	0,00	4.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.824.286,00								897.251.286,00	1.340.268.873,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	460.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.511.000,00								74.511.000,00	535.001.000,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.627.094.981,00	39.075.108,00	0,00	308.252.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.328.058,00	0,00	1.304.821.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.051.949,00	11.504.680,00								1.579.377.710,00	4.859.144.633,00
27	Beban Obat-Obatan-Obat	7.002.849.878,00	9.341.911.562,00	0,00	0,00	0,00	255.004.805,00	0,00	0,00	9.596.916.367,00	0,00	10.204.617.096,00	0,00	0,00	0,00	7.057.685.333,00	0,00		51.642.178,00	6.160.331.387,00							23.474.275.994,00	20.880.209.505,00
28	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	51.293.471,00	2.133.814.674,60	685.015.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.818.829.954,60	685.015.280,00	2.577.916.846,00	0,00	0,00	0,00	399.279.979,00	0,00	18.870.773,00		3.402.493.520,00							7.083.576.398,00	4.316.039.914,40
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.018.280.878,00	3.308.784.305,00	887.961.058,50	494.194.494,00	0,00	0,00	10.104.441.112,00	688.341.058,50	15.483.722.028,00	0,00	14.572.062.757,50	0,00	0,00	0,50	94.117.123,00	0,00		160.368.513,00			38.960.000,00	4.846.920,00	2.853.334,00			14.873.208.648,00	18.407.767.498,00
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.866.301.998,00	0,00	492.601.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.601.998,00	0,00	2.189.342.209,00	259.588.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00										2.448.931.159,00	6.822.631.159,00
31	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	252.075.007,00	723.862.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.862.356,00	0,00	536.677.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										536.677.887,00	64.890.538,00
32	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	26.791.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	26.791.800,00
33	Beban Natura dan Pakan-Natura	35.347.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.075.000,00	0,00	35.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.945.000,00		193.200,00						7.138.200,00	7.410.738,00
34	Beban Natura dan Pakan-Pakan	163.285.723,00	3.838.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838.250,00	0,00	1.793.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										1.793.500,00	161.240.973,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Persediaan Tahun Berjalan	Utang Belanja Barang Pakai Habis Tahun sebelumnya	kapitalisasi	Koreksi dari Perabot Kantor ke persediaan	Koreksi JKN	koreksi dari Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran utang Perkimtan	Total Mutasi Kurang	Utang Belanja Barang Pakai Habis Tahun Berjalan	Persediaan Tahun Sebelumnya	Kapitalisasi	Non Kapitalisasi	Koreksi Utang Belanja Barang Pakai Habis PERKIMTAN	Penerimaan dari Provinsi	Koreksi Belanja Modal ke Persediaan	Koreksi Beban Barang dan Jasa JKN ke Beban Pakai habis	Koreksi Beban Barang dan Jasa BOSP ke Beban Pakai habis	Mutasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Persediaan	Bertambah dari Belanja Kurusu	Bertambah dari Natura	Mutasi dari Perabot Kantor	Mutasi dari Belanja Kurusu	Koreksi Nilai BahanCetak Tahun 2024 Dinas Perhubungan	Reklas atas Beban Tenaga Kesehatan pada DINKES	Total Mutasi Tambah	LO Tahun 2025
		(Rp)								(Rp)																	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = ∑ (4 s.d 10)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28 = ∑ (11 sd 27)	29 = 1-11+28
35	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.415.767.477,00	0,00	1.440.000,00	19.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297.000,00	1.329.663.301,00	14.942.000,00						1.024.146.452,00	2.374.048.753,00	13.768.990.230,00
36	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.526.958.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.732.000,00								5.732.000,00	2.532.690.468,00
37	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	170.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	170.996.000,00
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		619.347.400,00								619.347.400,00	619.347.400,00
39	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	27.499.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.154.435,00		372.712.122,00							661.866.557,00	689.366.538,00
40	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	841.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	841.467.000,00
41	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	103.541.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	103.541.600,00
42	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	286.999.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	286.999.957,00
43	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.756.249.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	1.756.249.037,00
44	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	272.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	272.569.000,00
45	Beban Pakaian Adat Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00									1.400.000,00	1.400.000,00
46	Beban Pakaian Batik Tradisional	176.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	176.120.000,00
47	Beban Pakaian Olahraga	163.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	163.282.000,00
48	Beban Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00									3.000.000,00	3.000.000,00
Jumlah		**72.972.344.404,00**	**17.029.204.844,60**	**2.068.227.936,50**	**1.078.486.983,00**	**7.700.254,00**	**255.004.805,00**	**10.139.516.112,00**	**688.341.058,50**	**31.266.481.993,60**	**690.749.680,00**	**33.486.946.343,50**	**259.588.950,00**	**100.949.000,00**	**0,50**	**7.551.082.435,00**	**7.950.000,00**	**1.919.187.548,00**	**15.608.046.219,00**	**10.878.040.003,00**	**193.200,00**	**38.960.000,00**	**4.846.920,00**	**2.853.334,00**	**22.661.248,00**	**3.492.473.498,00**	**74.064.528.379,00**	**115.770.390.789,40**

Lampiran 92

Perbandingan Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dengan Beban Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Ekstrakomptabel	Mutasi Antar Aset Tetap	Koreksi Mutasi antar Aset Tetap	Belanja Modal Non Kapitalisasi	Koreksi atas pencatatan ekstrakomtabel dari alat kantor lainnya pada DPA	Reklas Antar Aset Tetap	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(3+4+5+6+7+8-9)
1	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	0,00	391.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.060,00
2	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.600,00
3	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	1.233.600,00	0,00	821.400,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00
4	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11.766.000,00	22.377.000,00	31.375.000,00	0,00	0,00	5.960.192,00	33.366.000,00	38.112.192,00
6	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	609.419.320,00	1.226.358.982,00	0,00	0,00	0,00	42.126.000,00	1.793.652.302,00
7	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	0,00	6.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520.000,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Ekstrakomptabel	Mutasi Antar Aset Tetap	Koreksi Mutasi antar Aset Tetap	Belanja Modal Non Kapitalisasi	Koreksi atas pencatatan ekstrakomtabel dari alat kantor lainnya pada DPA	Reklas Antar Aset Tetap	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(3+4+5+6+7+8-9)
8	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
9	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	26.790.212,00	44.463.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.253.312,00
10	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	148.076.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.076.355,00
11	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	124.000.000,00	0,00	2.935.950,00	0,00	0,00	0,00	124.000.000,00	2.935.950,00
13	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	0,00	0,00	3.720.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.200,00
14	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	98.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.354.000,00
15	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	258.325.613,00	2.208.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00	258.325.613,00
16	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	87.801.000,00	0,00	0,00	420.690,00	0,00	0,00	87.801.000,00	420.690,00
17	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Ekstrakomptabel	Mutasi Antar Aset Tetap	Koreksi Mutasi antar Aset Tetap	Belanja Modal Non Kapitalisasi	Koreksi atas pencatatan ekstrakomtabel dari alat kantor lainnya pada DPA	Reklas Antar Aset Tetap	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(3+4+5+6+7+8-9)
18	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	4.654.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654.195,00
19	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0,00	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.000,00
20	Beban Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950.120,00	0,00	0,00	9.950.120,00
21	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Jumlah	**223.567.000,00**	**1.180.131.160,00**	**1.319.093.027,00**	**1.242.090,00**	**9.950.120,00**	**5.960.192,00**	**289.501.000,00**	**2.450.442.589,00**

Perbandingan Belanja Jasa Kantor dengan Beban Jasa Kantor
Tahun 2025

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Jasa Kantor Tahun Berjalan	Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor	Utang Belanja Jasa Kantor Tahun Sebelumnya	Kapitalisasi	Reklas atas Beban Tenaga Kesehatan pada DINKES	Koreksi ke Persediaan (Bahan Pakai Habis)	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(2+3+4-5-6-7-8)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.860.219.700,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	2.856.619.700,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.319.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.480.000,00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	124.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.270.000,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.187.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.232.000,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	113.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400.000,00
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	22.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320.000,00
8	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	925.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	921.000.000,00
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.113.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.900.000,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Jasa Kantor Tahun Berjalan	Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor	Utang Belanja Jasa Kantor Tahun Sebelumnya	Kapitalisasi	Reklas atas Beban Tenaga Kesehatan pada DINKES	Koreksi ke Persediaan (Bahan Pakai Habis)	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(2+3+4-5-6-7-8)
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	85.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	33.542.523.775,00	578.990.000,00	20.047.118,00	471.274.295,00	0,00	8.730.853.803,00	2.698.765.340,00	22.240.667.455,00
13	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	260.463.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.463.699,00
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.712.443.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.443.518,00
15	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.059.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059.385.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	659.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.520.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	192.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.775.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	409.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.624.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	155.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.900.000,00
20	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	123.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.970.000,00
21	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	196.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.700.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.039.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.910.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	3.326.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.950.000,00
24	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.114.854.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114.854.250,00
25	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.326.305.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.305.532,00
26	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	6.857.158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857.158.400,00
27	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.006.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.455.000,00
28	Beban Jasa Tenaga Supir	969.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.175.000,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Jasa Kantor Tahun Berjalan	Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor	Utang Belanja Jasa Kantor Tahun Sebelumnya	Kapitalisasi	Reklas atas Beban Tenaga Kesehatan pada DINKES	Koreksi ke Persediaan (Bahan Pakai Habis)	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(2+3+4-5-6-7-8)
29	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	153.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.050.000,00
30	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	124.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.479.000,00
31	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	153.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.960.000,00
32	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.245.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.910.000,00
33	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	149.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.550.000,00
34	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
35	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	352.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.125.000,00
36	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	19.966.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.966.500,00
37	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	381.446.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.446.839,00
38	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
39	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	14.679.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679.089,00
40	Beban Jasa Kalibrasi	62.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.322.000,00
41	Beban Jasa Pengolahan Sampah	6.663.912.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663.912.450,00
42	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	178.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000.000,00
43	Beban Tagihan Telepon	133.030.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.030.008,00
44	Beban Tagihan Air	106.630.224,00	3.773.600,00	0,00	263.500,00	0,00	0,00	0,00	110.140.324,00
45	Beban Tagihan Listrik	1.623.158.843,00	12.128.518,00	0,00	11.058.861,00	0,00	0,00	0,00	1.624.228.500,00
46	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	146.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.539.000,00
47	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.523.117.743,00	0,00	0,00	889.390,00	0,00	0,00	0,00	2.522.228.353,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Jasa Kantor Tahun Berjalan	Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor	Utang Belanja Jasa Kantor Tahun Sebelumnya	Kapitalisasi	Reklas atas Beban Tenaga Kesehatan pada DINKES	Koreksi ke Persediaan (Bahan Pakai Habis)	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(2+3+4-5-6-7-8)
48	Beban Paket/Pengiriman	50.477.100,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	50.047.100,00
49	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	418.932.052,00	0,00	0,00	8.584.500,00	197.580.000,00	0,00	0,00	212.767.552,00
50	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	10.591.480.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591.480.248,00
51	Beban Lembur	636.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000.000,00
52	Beban Medical Check Up	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000.000,00
53	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	5.316.770.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316.770.613,00
54	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	762.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.074.000,00
55	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	90.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.560.000,00
56	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	786.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.620.000,00
57	Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	163.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.640.000,00
58	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	564.134.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.134.280,00

No	Uraian	LRA Tahun 2025	Utang Belanja Jasa Kantor Tahun Berjalan	Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor	Utang Belanja Jasa Kantor Tahun Sebelumnya	Kapitalisasi	Reklas atas Beban Tenaga Kesehatan pada DINKES	Koreksi ke Persediaan (Bahan Pakai Habis)	LO Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(2+3+4-5-6-7-8)
59	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	193.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.495.000,00
60	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	440.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.280.000,00
Jumlah		**106.000.774.863,00**	**594.892.118,00**	**20.047.118,00**	**496.900.546,00**	**201.180.000,00**	**8.730.853.803,00**	**2.698.765.340,00**	**94.488.014.410,00**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%Naik/ Turun
1	*Beban Penyusutan Alat Besar*	*1.334.055.281,13*	*1.350.654.951,07*	*(16.599.669,94)*	*(1,23)*
	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	395.439.000,00	395.439.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	488.257.403,70	488.257.403,70	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	177.162.376,00	177.162.376,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	1.100.000,00	7.684.600,00	(6.584.600,00)	(85,69)
	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	66.884.700,00	66.884.700,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Bantu-Compressor	585.714,29	300.000,00	285.714,29	95,24
	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	15.698.177,43	28.751.857,17	(13.053.679,74)	(45,40)
	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	17.358.795,63	13.177.542,90	4.181.252,73	31,73
	Beban Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	6.850.328,58	6.850.328,57	0,01	0,00
	Beban Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	804.285,66	1.618.571,44	(814.285,78)	(50,31)
	Beban Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	88.531.642,71	87.157.428,45	1.374.214,26	1,58
	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	2.082.857,13	2.082.857,13	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	1.988.285,71	(1.988.285,71)	(100,00)
2	*Beban Penyusutan Alat Angkutan*	*6.350.862.538,92*	*5.537.926.273,57*	*812.936.265,35*	*14,68*
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.722.347.571,66	1.180.906.428,64	541.441.143,02	45,85
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	223.459.579,42	280.867.142,87	(57.407.563,45)	(20,44)
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	768.924.589,27	940.868.223,85	(171.943.634,58)	(18,27)
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	84.995.971,51	120.895.500,22	(35.899.528,71)	(29,69)
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	294.860.706,10	210.098.935,74	84.761.770,36	40,34
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	3.090.385.320,96	2.689.790.042,25	400.595.278,71	14,89
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	165.888.800,00	114.500.000,00	51.388.800,00	44,88
3	*Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur*	*422.684.264,60*	*531.470.670,20*	*(108.786.405,60)*	*(20,47)*
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	1.727.900,00	4.315.750,00	(2.587.850,00)	(59,96)
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	3.839.660,00	3.724.160,00	115.500,00	3,10
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	650.000,00	300.000,00	350.000,00	116,67
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	1.330.900,00	4.777.900,40	(3.447.000,40)	(72,14)
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	30.640.200,00	31.428.325,00	(788.125,00)	(2,51)
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	1.183.000,00	400.000,00	783.000,00	195,75
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	247.765.162,20	248.408.717,20	(643.555,00)	(0,26)
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	9.834.800,00	137.857.100,00	(128.022.300,00)	(92,87)
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	0,00	3.620.000,00	(3.620.000,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	34.076.000,00	30.363.200,00	3.712.800,00	12,23

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%Naik/ Turun
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	7.435.040,00	5.888.200,00	1.546.840,00	26,27
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Specific Set	0,00	8.152.762,80	(8.152.762,80)	(100,00)
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	21.956.520,00	24.596.520,00	(2.640.000,00)	(10,73)
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	61.080.082,40	26.473.034,80	34.607.047,60	130,73
4	*Beban Penyusutan Alat Pertanian*	*100.463.287,50*	*102.641.962,50*	*(2.178.675,00)*	*(2,12)*
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	32.070.375,00	4.500.000,00	27.570.375,00	612,68
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.236.950,00	4.455.700,00	781.250,00	17,53
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	2.700.000,00	8.675.000,00	(5.975.000,00)	(68,88)
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	30.650.212,50	42.697.487,50	(12.047.275,00)	(28,22)
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	2.056.275,00	4.423.525,00	(2.367.250,00)	(53,52)
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	27.749.475,00	37.890.250,00	(10.140.775,00)	(26,76)
5	*Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga*	*12.095.595.425,40*	*10.094.759.359,41*	*2.000.836.065,99*	*19,82*
	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.187.059.779,20	1.015.675.752,80	171.384.026,40	16,87
	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.682.247.026,00	1.494.142.209,40	188.104.816,60	12,59
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	6.848.888.977,60	5.267.084.138,00	1.581.804.839,60	30,03
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	135.638.153,00	30.816.189,00	104.821.964,00	340,15
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	79.242.512,20	64.302.233,80	14.940.278,40	23,23
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	68.391.353,60	72.659.614,00	(4.268.260,40)	(5,87)
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.763.872.932,20	1.822.460.405,61	(58.587.473,41)	(3,21)
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	56.596.838,80	72.784.402,00	(16.187.563,20)	(22,24)
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	93.852.618,00	59.690.000,00	34.162.618,00	57,23
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	7.274.400,00	8.049.000,00	(774.600,00)	(9,62)
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	80.045.450,00	86.532.530,00	(6.487.080,00)	(7,50)
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	2.275.000,00	33.925.000,00	(31.650.000,00)	(93,29)
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	77.253.060,00	37.944.560,00	39.308.500,00	103,59
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	12.287.324,80	23.023.324,80	(10.736.000,00)	(46,63)
6	*Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar*	*619.026.187,24*	*570.559.161,63*	*48.467.025,61*	8,49
	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	108.496.919,20	109.996.319,20	(1.499.400,00)	(1,36)
	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	304.051.956,60	269.419.850,00	34.632.106,60	12,85
	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	16.619.320,00	50.513.794,00	(33.894.474,00)	(67,10)
	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	2.580.000,00	1.380.000,00	1.200.000,00	86,96
	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	3.640.000,00	8.920.000,00	(5.280.000,00)	(59,19)
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	92.578.525,20	81.870.525,20	10.708.000,00	13,08
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	2.900.000,00	11.652.000,00	(8.752.000,00)	(75,11)
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	2.200.000,00	4.000.000,00	(1.800.000,00)	(45,00)
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%Naik/ Turun
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	1.191.800,00	1.191.800,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	2.116.800,00	2.116.800,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	72.566.532,90	20.813.739,90	51.752.793,00	248,65
	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)	7.743.333,34	6.343.333,33	1.400.000,01	22,07
7	*Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan*	*3.885.339.279,40*	*5.781.101.299,20*	*(1.895.762.019,80)*	*(32,79)*
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.237.402.491,00	3.526.624.547,00	(2.289.222.056,00)	(64,91)
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	40.716.479,60	2.728.879,60	37.987.600,00	1.392,06
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	505.663.223,60	319.993.646,60	185.669.577,00	58,02
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	161.904.405,40	161.904.405,40	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	16.912.448,00	16.643.200,00	269.248,00	1,62
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	27.747.495,20	27.747.495,20	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	681.976.435,20	678.838.935,20	3.137.500,00	0,46
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	329.949.149,60	329.949.149,60	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	0,00	94.791.200,00	(94.791.200,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	260.509.100,00	166.117.500,00	94.391.600,00	56,82
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	214.438.276,00	214.438.276,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	19.750.000,00	23.590.000,00	(3.840.000,00)	(16,28)
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	54.744.300,00	0,00	54.744.300,00	100,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	27.394.863,60	27.394.863,60	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	300.124.670,40	184.233.259,20	115.891.411,20	62,90
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	449.941,80	449.941,80	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.656.000,00	5.656.000,00	0,00	0,00
8	*Beban Penyusutan Alat Laboratorium*	*1.009.985.316,25*	*1.183.651.496,75*	*(173.666.180,50)*	*(14,67)*
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	2.433.200,00	(2.433.200,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/ Geologi	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	4.409.090,88	4.409.090,88	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	18.434.375,00	18.434.375,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	127.698.533,75	105.179.875,00	22.518.658,75	21,41
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	28.699.870,13	6.293.338,88	22.406.531,25	356,04
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	0,00	481.250,00	(481.250,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	15.410.780,63	0,00	15.410.780,63	100,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	8.603.396,25	248.750,00	8.354.646,25	3.358,65
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	387.500,00	19.201.912,50	(18.814.412,50)	(97,98)
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	16.261.222,50	0,00	16.261.222,50	100,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	32.522.445,00	0,00	32.522.445,00	100,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	648.750,00	1.980.000,00	(1.331.250,00)	(67,23)
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	681.250,00	681.250,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%Naik/ Turun
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil	22.687.500,00	0,00	22.687.500,00	100,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	1.422.500,00	562.500,00	860.000,00	152,89
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	589.687,50	589.687,50	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	6.367.500,00	6.367.500,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	2.625.000,00	7.362.500,00	(4.737.500,00)	(64,35)
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	249.375,00	249.375,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	493.750,00	14.513.687,50	(14.019.937,50)	(96,60)
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	187.500,00	(187.500,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-General Laboratory Tool	3.293.729,34	3.293.729,33	0,01	0,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Laboratory Safety Equipment	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	1.680.000,00	36.878.669,20	(35.198.669,20)	(95,44)
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	8.778.214,50	59.267.738,80	(50.489.524,30)	(85,19)
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	8.125.121,00	6.379.410,00	1.745.711,00	27,36
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	5.050.000,00	5.400.000,00	(350.000,00)	(6,48)
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	1.081.000,00	13.958.817,40	(12.877.817,40)	(92,26)
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	190.890.382,60	186.147.493,40	4.742.889,20	2,55
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	359.008.813,00	543.287.177,60	(184.278.364,60)	(33,92)
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector	0,00	1.353.333,33	(1.353.333,33)	(100,00)
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	0,00	261.904,73	(261.904,73)	(100,00)
	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan	0,00	160.000,00	(160.000,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	135.714,29	135.714,26	0,03	0,00
	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System	13.364.933,33	13.364.933,34	(0,01)	(0,00)
	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	114.528.621,55	108.756.623,10	5.771.998,45	5,31
	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop	5.327.960,00	5.327.960,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	126.100,00	0,00	126.100,00	100,00
9	*Beban Penyusutan*	*38.997.061,20*	*54.325.922,20*	*(15.328.861,00)*	(28,22)
	Beban Penyusutan Senjata Api-Anti Lapis Baja	0,00	1.749.000,00	(1.749.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%Naik/ Turun
	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	11.220.086,20	33.926.922,20	(22.706.836,00)	(66,93)
	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	9.126.975,00	0,00	9.126.975,00	100,00
	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Fotografi Kepolisian	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
10	*Beban Penyusutan Komputer*	*8.810.085.912,28*	*10.456.272.583,00*	*(1.646.186.670,72)*	*(15,74)*
	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	7.184.844.296,02	8.695.940.100,25	(1.511.095.804,23)	(17,38)
	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	11.650.000,00	22.599.500,00	(10.949.500,00)	(48,45)
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	4.652.750,01	23.658.000,00	(19.005.249,99)	(80,33)
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	32.137.500,00	(32.137.500,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.076.523.217,50	1.010.627.801,50	65.895.416,00	6,52
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	506.940.767,00	568.682.479,75	(61.741.712,75)	(10,86)
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	25.474.881,75	97.627.201,50	(72.152.319,75)	(73,91)
11	*Beban Penyusutan Alat Eksplorasi*	*13.115.880,24*	*13.115.880,18*	*0,06*	*0,00*
	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric	13.115.880,24	13.115.880,18	0,06	0,00
12	*Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian*	*818.436.554,30*	*480.972.630,00*	*337.463.924,30*	*70,16*
	Beban Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran	814.440.554,30	463.506.630,00	350.933.924,30	75,71
	Beban Penyusutan Sumur-Sumur Lainnya	0,00	13.470.000,00	(13.470.000,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	3.996.000,00	3.996.000,00	0,00	0,00
13	*Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja*	*190.272.298,00*	*231.450.298,00*	*(41.178.000,00)*	*(17,79)*
	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman	3.231.798,00	3.231.798,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	172.840.500,00	211.840.500,00	(39.000.000,00)	(18,41)
	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	0,00	2.878.000,00	(2.878.000,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
14	*Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi*	*6.578.250,00*	*987.500,00*	*5.590.750,00*	*566,15*
	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid	987.500,00	987.500,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	5.590.750,00	0,00	5.590.750,00	100,00
15	*Beban Penyusutan Rambu-Rambu*	*301.919.149,40*	*396.741.616,03*	*(94.822.466,63)*	*(23,90)*
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	301.919.149,40	396.741.616,03	(94.822.466,63)	(23,90)
16	*Beban Penyusutan Peralatan Olahraga*	*20.985.000,09*	*16.924.999,97*	*4.060.000,12*	*23,99*
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	8.276.666,70	6.856.666,66	1.420.000,04	20,71
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	9.752.000,06	7.111.999,97	2.640.000,09	37,12
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	2.956.333,33	2.956.333,34	(0,01)	(0,00)
Jumlah		**36.018.401.685,95**	**36.803.556.603,71**	**(785.154.917,76)**	**(2,13)**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%Naik/ Turun
1	*Beban Penyusutan Bangunan Gedung*	*17.209.003.718,30*	*17.217.692.458,86*	*(8.688.740,56)*	*(0,05)*
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.070.678.171,24	2.897.288.556,21	173.389.615,03	5,98
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	170.057.800,23	169.951.417,20	106.383,03	0,06
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	13.392.500,00	13.392.500,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	38.190.505,38	34.870.109,38	3.320.396,00	9,52
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	506.808.061,39	371.332.357,02	135.475.704,37	36,48
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.944.761.597,93	2.143.804.846,81	(199.043.248,88)	(9,28)
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	15.299.455,16	15.299.455,14	0,02	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	131.243.211,33	126.883.309,30	4.359.902,03	3,44
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.449.836.691,24	5.659.508.289,56	(209.671.598,32)	(3,70)
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	93.595.603,71	79.741.413,25	13.854.190,46	17,37
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	682.132.061,08	681.476.963,38	655.097,70	0,10
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	31.113.680,96	18.882.441,82	12.231.239,14	64,78
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	151.547.572,66	143.264.811,62	8.282.761,04	5,78
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	10.167.018,88	10.010.868,08	156.150,80	1,56
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	496.171.127,86	481.156.778,77	15.014.349,09	3,12
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	233.807.017,24	233.807.017,24	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/ Perikanan	29.215.052,22	29.215.052,22	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	543.574.838,65	3.174.079.610,56	(2.630.504.771,91)	(82,87)
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	70.926.804,20	67.560.283,10	3.366.521,10	4,98
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	4.220.977,00	0,00	4.220.977,00	100,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	20.574.980,00	20.574.980,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.660.801.279,07	4.223.232,80	2.656.578.046,27	62.903,90
	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	271.624.966,90	89.383.963,46	182.241.003,44	203,89
	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	18.106.712,74	158.631.621,93	(140.524.909,19)	(88,59)
	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	516.672.231,26	563.952.544,04	(47.280.312,78)	100,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	626.530,61	626.530,61	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	33.857.269,36	28.773.505,36	5.083.764,00	17,67
2	*Beban Penyusutan Monumen*	*66.475.023,73*	*63.098.023,73*	*3.377.000,00*	*5,35*
	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Tugu	66.075.023,73	62.698.023,73	3.377.000,00	5,39
	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Bangunan Peninggalan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%Naik/ Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	*Beban Penyusutan Bangunan Menara*	*17.900.000,00*	*17.900.000,00*	*0,00*	*0,00*
	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00
4	*Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti*	*1.288.882.048,56*	*1.249.070.335,54*	*39.811.713,02*	*3,19*
	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	18.820.308,72	15.194.508,72	3.625.800,00	23,86
	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	1.270.061.739,84	1.233.875.826,82	36.185.913,02	2,93
Jumlah		**18.582.260.790,59**	**18.547.760.818,13**	**34.499.972,46**	**0,19**

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%Naik/ Turun
1	*Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan*	*101.741.487.281,30*	*88.825.409.978,22*	*12.916.077.303,08*	*14,54*
	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	91.921.173.706,89	76.944.482.570,84	14.976.691.136,05	19,46
	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kota	0,00	129.040.742,20	(129.040.742,20)	(100,00)
	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	5.572.034.704,97	8.175.803.093,71	(2.603.768.388,74)	(31,85)
	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	1.640.762.421,37	1.188.026.999,90	452.735.421,47	100,00
	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	1.786.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.254.482.929,33	2.035.204.530,09	219.278.399,24	10,77
	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	351.247.518,74	351.066.041,48	181.477,26	100,00
2	*Beban Penyusutan Bangunan Air*	*17.290.090.790,59*	*16.172.651.870,83*	*1.117.438.919,76*	*6,91*
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	54.000,02	(54.000,02)	(100,00)
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	4.560.665.993,77	4.537.669.260,25	22.996.733,52	0,51
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	12.095.255,54	12.095.255,54	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	222.202.594,98	222.202.594,98	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	510.980.302,58	510.980.302,60	(0,02)	(0,00)
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	35.063.249,16	35.063.249,16	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5.762.451.174,73	6.315.049.604,54	(552.598.429,81)	(8,75)
	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.706.143.635,49	1.286.219.415,20	1.419.924.220,29	110,40
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	428.259.007,06	439.349.940,37	(11.090.933,31)	(2,52)
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	28.667.279,92	28.667.279,87	0,05	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	18.351.771,18	9.356.438,67	8.995.332,51	96,14
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	148.153.412,56	158.133.372,60	(9.979.960,04)	(6,31)
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	14.697.145,30	5.164.457,03	9.532.688,27	184,58
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	457.559.285,57	454.412.535,60	3.146.749,97	0,69
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	203.984.701,64	203.984.701,64	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	1.487.000,00	1.487.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.185.256.492,88	1.115.648.985,44	69.607.507,44	6,24
	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	756.084.727,59	621.037.380,74	135.047.346,85	21,75
	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	28.756.414,06	6.844.750,00	21.911.664,06	320,12
	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	208.855.446,58	208.855.446,58	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%Naik/ Turun
3	*Beban Penyusutan Instalasi*	*1.044.987.981,28*	*1.098.364.241,34*	*(53.376.260,06)*	*(4,86)*
	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	224.861.754,53	224.861.754,52	0,01	0,00
	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	0,00	833.333,34	(833.333,34)	(100,00)
	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	0,00	2.624.026,66	(2.624.026,66)	(100,00)
	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	662.427.466,98	704.096.367,07	(41.668.900,09)	(5,92)
	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	18.806.655,14	18.806.655,12	0,02	0,00
	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	57.560.445,80	57.560.445,80	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2.568.750,00	2.568.750,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	10.768.185,00	11.523.185,00	(755.000,00)	(6,55)
	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	7.270.214,30	13.120.214,30	(5.850.000,00)	(44,59)
	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	119.552,63	1.764.552,63	(1.645.000,00)	(93,22)
	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	1.244.100,00	1.244.100,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	59.341.256,90	59.341.256,90	0,00	0,00
4	*Beban Penyusutan Jaringan*	*765.708.201,57*	*698.709.490,24*	*66.998.711,33*	*9,59*
	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	88.728.371,32	88.728.371,33	(0,01)	(0,00)
	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	92.571.333,30	92.571.333,34	(0,04)	(0,00)
	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	38.242.066,70	38.242.066,66	0,04	0,00
	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	3.122.966,50	3.122.966,50	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	456.052.997,19	386.311.170,84	69.741.826,35	18,05
	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	341.065,00	(341.065,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	2.649.500,00	2.664.050,00	(14.550,00)	(0,55)
	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon dibawah Tanah	0,00	2.387.500,00	(2.387.500,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	83.834.966,56	83.834.966,57	(0,01)	(0,00)
	Jumlah	**120.842.274.254,74**	**106.795.135.580,63**	**14.047.138.674,11**	**13,15**

Lain-Lain Ekuitas pada LPE
Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
1	Kas Dana BOSP	310.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(139.777.300,00)
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	2.776.759.000,00
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	6.349.491.000,00
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.115.149.000,00
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	413.432.000,00
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	92.413.000,00
8	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	3.808.476.000,00
9	Penyisihan Piutang PBBP2	158.339.000,10
10	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios	58.060.350,00
11	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	213.291,72
12	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	139.340.508,22
13	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	193.587.084,93
14	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.058.714.954,36
15	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	13.429.029,67
16	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok	17.453.908,33
17	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	21.802.819,11
18	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	586.585.000,00
19	Tanah Pertanian	(2.928.000.000,00)
20	Kendaraan Bermotor Penumpang	624.216.573,00
21	Alat Kantor Lainnya	(12.900.000,00)
22	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(30.920.000,00)
23	Peralatan Jaringan	(202.871.000,00)
24	Peralatan Komputer Lainnya	(164.480.000,00)
25	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	433.353.000,00
26	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	388.920.000,00
27	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	56.305.000,00
28	Jalan Kabupaten	(63.318.963,89)
29	Jalan Lainnya	1.093.700.000,00
30	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	257.000.000,00
31	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	289.536.000,00
32	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(3.400.000,00)
33	Jaringan Distribusi	(2.000.000,00)
34	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(468.650.000,00)
35	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(25.200.000,00)
36	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	2.748.428,58
37	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(178.347.523,29)
38	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,01
39	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(14.285.714,00)
40	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.122.485.714,27
41	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	(1.980.000,00)
42	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(50.000.000,00)
43	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(800.000,00)
44	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(1.774.500,00)
45	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	(442.650,00)
46	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(350.250,00)
47	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(461.000,00)

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
48	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(26.787.725,72)
49	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.500.000,00
50	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(812.309.107,14)
51	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.775.550,00
52	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(13.533.333,34)
53	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.200.000,00
54	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(7.150.000,00)
55	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)	9.800.000,00
56	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(3.044.392,60)
57	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	4.628.100,00
58	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	640.000,00
59	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	(6.190.546,80)
60	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	14.025.000,00
61	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	51.748.918,86
62	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	15.410.780,63
63	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	25.063.938,75
64	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	48.783.667,50
65	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	97.567.335,00
66	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil	40.837.500,00
67	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dakhura	(5.247.000,00)
68	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(65.844.000,00)
69	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(12.712.250,00)
70	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	62.772.250,00
71	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	188.455.650,00
72	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	164.480.000,00
73	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran	(291.210.342,64)
74	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	(10.071.050,00)
75	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	(2.886.000,00)
76	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	753.120.411,43
77	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	363.261.571,00
78	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(190.518.505,45)
79	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(112.476.464,00)
80	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	(3.378.300,00)
81	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	35.209.821,32
82	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(455.025.857,60)
83	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	105.323.620,24
84	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(14.901.502,24)
85	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(115.814.400,00)
86	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1.175.000,00
87	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	775.000,00
88	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(1.128.639.698,91)
89	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(15.000.000,00)
90	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	96.728.571,43
91	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	(1.314.350,00)
92	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.300.000,00
93	Utang Belanja Pegawai BLUD	48.411.787,00
94	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,50
95	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	20.047.118,00

No.	Uraian	Tahun 2025
		(Rp)
96	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	(29.100.000,00)
97	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.559.878,00
Jumlah		**15.616.308.404,34**

Lampiran VIII

Daftar Rekapitulasi Piutang Pendapatan Daerah

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL	KOREKSI	SALDO AWAL PIUTANG SETELAH KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	7	8	9	10=(7+8-9)
		Piutang Pendapatan :						
		Piutang Pajak Daerah	**44.590.446.703,48**	**0,00**	**44.590.446.703,48**	**3.899.731.925,00**	**1.455.542.470,00**	**47.034.636.158,48**
1	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Hotel - Losmen	19.845.000,00	0,00	19.845.000,00	0,00	0,00	19.845.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Restoran - Rumah Makan dan Sejenisnya	388.508.162,00	0,00	388.508.162,00	0,00	0,00	388.508.162,00
3	Badan Pendapatan Daerah	Piutang PBBP2	44.182.093.541,48	0,00	44.182.093.541,48	3.899.731.925,00	1.455.542.470,00	46.626.282.996,48
		Piutang Retribusi Daerah	**6.326.814.327,00**	**(139.777.300,00)**	**6.187.037.027,00**	**3.298.079.144,00**	**4.146.480.603,00**	**5.338.635.568,00**
1	Rumah Sakit Umum Daerah	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	5.552.223.277,00	(139.777.300,00)	5.412.445.977,00	3.298.079.144,00	4.039.185.803,00	4.671.339.318,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Piutang Retribusi Kios	774.591.050,00	0,00	774.591.050,00	0,00	107.294.800,00	667.296.250,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**42.658.343,61**	**0,00**	**42.658.343,61**	**309.768.841,66**	**42.658.343,61**	**309.768.841,66**
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	42.658.343,61	0,00	42.658.343,61	0,00	42.658.343,61	0,00
2	Dinas Kesehatan	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	63.231.610,99	0,00	63.231.610,99
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	181.031.337,68	0,00	181.031.337,68
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	65.505.892,99	0,00	65.505.892,99
		Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.366.344.000,00**	**14.555.720.000,00**	**15.922.064.000,00**	**1.498.288.800,00**	**588.220.000,00**	**16.832.132.800,00**
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PPh Pasal 21	0,00	6.349.491.000,00	6.349.491.000,00	1.000.402.900,00	0,00	7.349.893.900,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PPh Pasal 25/29	11.883.000,00	1.115.149.000,00	1.127.032.000,00	67.989.800,00	5.116.000,00	1.189.905.800,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Dana Transfer Umum - DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	599.438.000,00	2.776.759.000,00	3.376.197.000,00	429.896.100,00	258.062.000,00	3.548.031.100,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Dana Transfer Umum - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	102.953.000,00	413.432.000,00	516.385.000,00	0,00	44.322.000,00	472.063.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL	KOREKSI	SALDO AWAL PIUTANG SETELAH KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	7	8	9	10=(7+8-9)
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Batubara - Royalty	631.196.000,00	3.805.759.000,00	4.436.955.000,00	0,00	271.734.000,00	4.165.221.000,00
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	20.874.000,00	92.413.000,00	113.287.000,00	0,00	8.986.000,00	104.301.000,00
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Piutang Transfer Antar Daerah	**62.420.747.682,00**	**0,00**	**62.420.747.682,00**	**44.961.811.670,00**	**86.227.369.949,00**	**21.155.189.403,00**
		Piutang Bagi Hasil	**58.060.183.861,00**	**0,00**	**58.060.183.861,00**	**44.961.811.670,00**	**81.866.806.128,00**	**21.155.189.403,00**
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.106.468.014,00	0,00	18.106.468.014,00	58.773.978,00	18.106.468.014,00	58.773.978,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.264.087.427,00	0,00	11.264.087.427,00	100.612.039,00	11.264.087.427,00	100.612.039,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.965.796.800,00	0,00	26.965.796.800,00	19.209.780.406,00	27.515.796.800,00	18.659.780.406,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.723.831.620,00	0,00	1.723.831.620,00	2.336.022.980,00	1.723.831.620,00	2.336.022.980,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	23.256.622.267,00	23.256.622.267,00	0,00
		Piutang Bantuan Keuangan	**4.360.563.821,00**	**0,00**	**4.360.563.821,00**	**0,00**	**4.360.563.821,00**	**0,00**
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	4.360.563.821,00	0,00	4.360.563.821,00	0,00	4.360.563.821,00	0,00
Jumlah Piutang Pendapatan Daerah			**114.747.011.056,09**	**14.415.942.700,00**	**129.162.953.756,09**	**53.967.680.380,66**	**92.460.271.365,61**	**90.670.362.771,14**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran IX

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan Daerah

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Piutang					Jumlah Piutang	Kualitas Penyisihan Piutang				Koreksi	Jumlah Penyisihan Piutang	Jumlah Piutang Bersih
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
		Umur Piutang Kurang dari 1 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang 1 s.d. 2 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang 2 s.d. 5 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang di atas 5 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo		Umur Piutang Kurang dari 1 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang 1 s.d. 2 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang 2 s.d. 5 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang di atas 5 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo			
							(0.50%)	(10%)	(50%)	(100%)			
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6+)	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11-12)	14=(7-13)
	Piutang Pendapatan :												
1	**Piutang Pajak Daerah**	**3.899.731.925,00**	**6.328.752.402,00**	**7.215.582.052,00**	**29.590.569.779,48**	**47.034.636.158,48**	**19.498.659,63**	**632.875.240,20**	**3.607.791.026,00**	**29.590.569.779,48**	**0,00**	**33.850.734.705,31**	**13.183.901.453,18**
	Piutang Pajak Hotel - Losmen	0,00	0,00	0,00	19.845.000,00	19.845.000,00	0,00	0,00	0,00	19.845.000,00	0,00	19.845.000,00	0,00
	Piutang Pajak Restoran - Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	388.508.162,00	388.508.162,00	0,00	0,00	0,00	388.508.162,00	0,00	388.508.162,00	0,00
	Piutang PBBP2	3.899.731.925,00	6.328.752.402,00	7.215.582.052,00	29.182.216.617,48	46.626.282.996,48	19.498.659,63	632.875.240,20	3.607.791.026,00	29.182.216.617,48	0,00	33.442.381.543,31	13.183.901.453,18
2	**Piutang Retribusi Daerah**	**3.298.079.144,00**	**0,00**	**278.103.357,00**	**1.762.453.067,00**	**5.338.635.568,00**	**16.490.395,72**	**0,00**	**139.051.678,50**	**1.762.453.067,00**	**0,00**	**1.917.995.141,22**	**3.420.640.426,78**
	Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.298.079.144,00	0,00	278.103.357,00	1.095.156.817,00	4.671.339.318,00	16.490.395,72	0,00	139.051.678,50	1.095.156.817,00	0,00	1.250.698.891,22	3.420.640.426,78
	Piutang Retribusi Jasa Umum - Kios	0,00	0,00	0,00	667.296.250,00	667.296.250,00	0,00	0,00	0,00	667.296.250,00	0,00	667.296.250,00	0,00
3	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**309.768.841,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.768.841,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.260.157.252,00**	**0,00**	**3.260.157.252,00**	**(3.260.157.252,00)**
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	309.768.841,66	0,00	0,00	0,00	309.768.841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.157.252,00	0,00	3.260.157.252,00	(3.260.157.252,00)
4	**Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.498.288.800,00**	**15.333.844.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.832.132.800,00**	**7.491.444,00**	**1.533.384.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540.875.844,00**	**15.291.256.956,00**
	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PBB	429.896.100,00	3.118.135.000,00	0,00	0,00	3.548.031.100,00	2.149.480,50	311.813.500,00	0,00	0,00	0,00	313.962.980,50	3.234.068.119,50
	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PPh Pasal 21	1.000.402.900,00	6.349.491.000,00	0,00	0,00	7.349.893.900,00	5.002.014,50	634.949.100,00	0,00	0,00	0,00	639.951.114,50	6.709.942.785,50
	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PPh Pasal 25/29	67.989.800,00	1.121.916.000,00	0,00	0,00	1.189.905.800,00	339.949,00	112.191.600,00	0,00	0,00	0,00	112.531.549,00	1.077.374.251,00
	Piutang Dana Transfer Umum - DBH CHT	0,00	472.063.000,00	0,00	0,00	472.063.000,00	0,00	47.206.300,00	0,00	0,00	0,00	47.206.300,00	424.856.700,00
	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00	104.301.000,00	0,00	0,00	104.301.000,00	0,00	10.430.100,00	0,00	0,00	0,00	10.430.100,00	93.870.900,00
	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Mineral dan Batubara - Landrent	0,00	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00	0,00	271.700,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	2.445.300,00
	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalty	0,00	4.165.221.000,00	0,00	0,00	4.165.221.000,00	0,00	416.522.100,00	0,00	0,00	0,00	416.522.100,00	3.748.698.900,00
5	**Piutang Transfer Antar Daerah**	**21.155.189.403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.155.189.403,00**	**105.775.947,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.775.947,02**	**21.049.413.455,98**
5.1	**Piutang Bagi Hasil Pajak**	**21.155.189.403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.155.189.403,00**	**105.775.947,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.775.947,02**	**21.049.413.455,98**
	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	58.773.978,00	0,00	0,00	0,00	58.773.978,00	293.869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	293.869,89	58.480.108,11
	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	100.612.039,00	0,00	0,00	0,00	100.612.039,00	503.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	503.060,20	100.108.978,80

No.	Jenis Piutang					Jumlah Piutang	Kualitas Penyisihan Piutang				Koreksi	Jumlah Penyisihan Piutang	Jumlah Piutang Bersih
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
		Umur Piutang Kurang dari 1 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang 1 s.d. 2 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang 2 s.d. 5 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang di atas 5 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo		Umur Piutang Kurang dari 1 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang 1 s.d. 2 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang 2 s.d. 5 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang di atas 5 Tahun Sejak Tanggal Jatuh Tempo			
							(0.50%)	(10%)	(50%)	(100%)			
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6+)	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11-12)	14=(7-13)
	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.659.780.406,00	0,00	0,00	0,00	18.659.780.406,00	93.298.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93.298.902,03	18.566.481.503,97
	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.336.022.980,00	0,00	0,00	0,00	2.336.022.980,00	11.680.114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680.114,90	2.324.342.865,10
	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Penyisihan Piutang Pendapatan	**30.161.058.113,66**	**21.662.596.402,00**	**7.493.685.409,00**	**31.353.022.846,48**	**90.670.362.771,14**	**149.256.446,37**	**2.166.259.640,20**	**3.746.842.704,50**	**34.613.180.098,48**	**0,00**	**40.675.538.889,55**	**49.685.055.039,94**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran X

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.260.157.252,00	3.260.157.252,00	0,00
TOTAL REKAPITULASI		**3.260.157.252,00**	**3.260.157.252,00**	**0,00**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran XI

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah	Jumlah Modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7+8)	10=(6-9)	11	12	13=(9-12)
1	1988-1989	PT. BANK SUMUT	Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2021	Tahun 2001		761.200.000,00	0,00	761.200.000,00	(761.200.000,00)	0,00	0,00	761.200.000,00
				Tahun 2002		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	0,00	0,00	100.000.000,00
				Tahun 2004		784.620.000,00	0,00	784.620.000,00	(784.620.000,00)	0,00	0,00	784.620.000,00
				Tahun 2006		1.159.170.000,00	0,00	1.159.170.000,00	(1.159.170.000,00)	0,00	0,00	1.159.170.000,00
				Tahun 2009		1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	0,00	0,00	1.000.000.000,00
				Tahun 2010		2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	0,00	0,00	2.000.000.000,00
				Tahun 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.206.725,00	0,00	0,00
				Tahun 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.519.665,00	0,00	0,00
				Tahun 2016		747.340.000,00	0,00	747.340.000,00	(747.340.000,00)	1.858.953.256,00	0,00	747.340.000,00
				Tahun 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.046.097,00	0,00	0,00
				Tahun 2018		2.237.666.289,00	0,00	2.237.666.289,00	(2.237.666.289,00)	1.534.225.787,00	0,00	2.237.666.289,00
				Tahun 2019		894.965.042,00	0,00	894.965.042,00	(894.965.042,00)	1.997.104.560,00	0,00	894.965.042,00
				Tahun 2020		529.665.775,00	0,00	529.665.775,00	(529.665.775,00)	1.474.370.878,00	0,00	529.665.775,00
				Tahun 2021	15.000.000.000,00	862.945.120,00	0,00	862.945.120,00	14.137.054.880,00	1.774.059.339,00	0,00	862.945.120,00
				Pembulatan		7.774,00	0,00	7.774,00	(7.774,00)	0,00	0,00	7.774,00
				Tahun 2022		0,00		0,00	0,00	2.528.115.366,00	0,00	0,00
				Tahun 2023		0,00		0,00	0,00	2.624.980.943,00	0,00	0,00
				Tahun 2024		0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	(2.800.000.000,00)	3.446.458.482,00	0,00	2.800.000.000,00
				Total	**15.000.000.000,00**	**11.077.580.000,00**	**2.800.000.000,00**	**13.877.580.000,00**	**1.122.420.000,00**	**22.034.041.098,00**	**0,00**	**13.877.580.000,00**
2	1988-1989	PDAM Tirtamalem	Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2023	Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH					**15.000.000.000,00**	**11.077.580.000,00**	**2.800.000.000,00**	**13.877.580.000,00**	**1.122.420.000,00**	**22.034.041.098,00**	**0,00**	**13.877.580.000,00**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran XII

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
	ASET TETAP	**2.377.774.897.237,07**	**228.080.850.982,29**	**(60.267.323.274,68)**	**2.545.588.424.944,68**
	Tanah :	**639.883.445.532,00**	**1.395.962.062,00**	**(3.539.000.000,00)**	**637.740.407.594,00**
1	Sekretariat DPRD	1.993.617.090,00	0,00	0,00	1.993.617.090,00
2	Sekretariat Daerah	21.459.408.000,00	0,00	0,00	21.459.408.000,00
3	Kecamatan Kabanjahe	12.844.090.000,00	0,00	0,00	12.844.090.000,00
4	Kecamatan Berastagi	324.145.000,00	0,00	0,00	324.145.000,00
5	Kecamatan Simpang Empat	500.160.000,00	0,00	0,00	500.160.000,00
6	Kecamatan Payung	98.784.000,00	0,00	0,00	98.784.000,00
7	Kecamatan Tiganderket	246.000.000,00	0,00	0,00	246.000.000,00
8	Kecamatan Munte	192.528.000,00	0,00	0,00	192.528.000,00
9	Kecamatan Tiga Binanga	287.081.000,00	0,00	0,00	287.081.000,00
10	Kecamatan Juhar	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00
11	Kecamatan Lau Baleng	71.680.000,00	0,00	0,00	71.680.000,00
12	Kecamatan Barusjahe	673.200.000,00	0,00	0,00	673.200.000,00
13	Kecamatan Tiga Panah	215.400.000,00	0,00	0,00	215.400.000,00
14	Kecamatan Kutabuluh	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00
15	Kecamatan Merek	618.000.000,00	0,00	0,00	618.000.000,00
16	Kecamatan Mardingding	131.400.000,00	0,00	0,00	131.400.000,00
17	Kecamatan Merdeka	134.209.000,00	0,00	0,00	134.209.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	308.095.566.500,00	0,00	0,00	308.095.566.500,00
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	7.430.717.222,00	164.377.062,00	0,00	7.595.094.284,00
20	Dinas Perhubungan	2.978.850.000,00	0,00	0,00	2.978.850.000,00
21	Dinas Kesehatan	6.918.014.488,00	586.585.000,00	0,00	7.504.599.488,00
22	Rumah Sakit Umum Daerah	6.143.757.325,00	0,00	0,00	6.143.757.325,00
23	Dinas Pendidikan	92.321.511.326,00	0,00	0,00	92.321.511.326,00
24	Dinas Sosial	6.721.963.000,00	0,00	0,00	6.721.963.000,00
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	842.400.000,00	0,00	0,00	842.400.000,00
26	Dinas Pertanian	26.397.699.000,00	0,00	0,00	26.397.699.000,00
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	419.256.000,00	0,00	0,00	419.256.000,00
28	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.656.312.000,00	0,00	0,00	3.656.312.000,00
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35.458.652.941,00	0,00	0,00	35.458.652.941,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.537.150.000,00	0,00	0,00	9.537.150.000,00
31	Dinas Lingkungan Hidup	5.033.752.640,00	0,00	(408.000.000,00)	4.625.752.640,00
32	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	46.520.401.000,00	339.500.000,00	(305.500.000,00)	46.554.401.000,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.005.500.000,00	305.500.000,00	(2.825.500.000,00)	36.485.500.000,00
34	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.449.920.000,00	0,00	0,00	2.449.920.000,00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	86.400.000,00	0,00	0,00	86.400.000,00
	Peralatan dan Mesin :	**486.891.796.904,67**	**58.279.852.618,00**	**(23.514.886.937,00)**	**521.656.762.585,67**
1	Sekretariat DPRD	10.912.090.274,00	4.951.607.011,00	(6.452.237.610,00)	9.411.459.675,00
2	Sekretariat Daerah	26.452.492.135,00	6.407.041.933,00	(2.416.119.678,00)	30.443.414.390,00
3	Kecamatan Kabanjahe	1.138.695.428,00	42.764.000,00	(11.210.000,00)	1.170.249.428,00
4	Kecamatan Berastagi	1.020.769.336,00	242.015.739,00	0,00	1.262.785.075,00
5	Kecamatan Simpang Empat	772.912.225,00	72.400.000,00	0,00	845.312.225,00
6	Kecamatan Payung	897.934.687,00	23.400.000,00	0,00	921.334.687,00
7	Kecamatan Tiganderket	551.388.003,00	64.584.000,00	0,00	615.972.003,00
8	Kecamatan Munte	926.873.928,00	43.499.998,00	0,00	970.373.926,00
9	Kecamatan Tiga Binanga	739.870.984,00	193.400.000,00	0,00	933.270.984,00
10	Kecamatan Juhar	630.767.588,00	22.798.220,00	0,00	653.565.808,00
11	Kecamatan Lau Baleng	432.898.628,00	81.335.932,00	0,00	514.234.560,00
12	Kecamatan Barusjahe	752.735.628,00	39.495.000,00	0,00	792.230.628,00
13	Kecamatan Tiga Panah	686.823.102,00	53.700.000,00	0,00	740.523.102,00

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
14	Kecamatan Kutabuluh	897.955.128,00	86.019.500,00	0,00	983.974.628,00
15	Kecamatan Merek	669.899.825,00	16.277.900,00	0,00	686.177.725,00
16	Kecamatan Mardingding	587.180.384,00	237.970.150,00	0,00	825.150.534,00
17	Kecamatan Merdeka	653.356.685,00	23.400.000,00	0,00	676.756.685,00
18	Kecamatan Naman Teran	885.737.528,00	41.444.000,00	(14.920.000,00)	912.261.528,00
19	Kecamatan Dolat Rayat	509.164.501,00	23.400.000,00	0,00	532.564.501,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	32.102.682.526,02	308.132.500,00	0,00	32.410.815.026,02
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2.285.272.528,00	236.824.600,00	(469.554.500,00)	2.052.542.628,00
22	Dinas Perhubungan	18.642.132.995,00	2.922.001.973,00	(1.582.788.001,00)	19.981.346.967,00
23	Dinas Kesehatan	64.292.359.960,61	2.128.904.017,00	(423.635.225,00)	65.997.628.752,61
24	Rumah Sakit Umum Daerah	72.889.913.051,04	1.510.820.532,00	(540.423.612,00)	73.860.309.971,04
25	Dinas Pendidikan	122.620.872.038,00	18.639.815.141,00	(2.438.829.384,00)	138.821.857.795,00
26	Dinas Sosial	1.183.652.500,00	125.443.550,00	(24.381.000,00)	1.284.715.050,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	3.163.312.705,00	359.949.300,00	(8.277.000,00)	3.514.985.005,00
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.655.668.576,00	569.344.100,00	(1.233.600,00)	2.223.779.076,00
29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.323.895.326,00	722.061.000,00	(36.240.000,00)	4.009.716.326,00
30	Dinas Pertanian	8.220.126.937,00	577.533.039,00	(100.949.000,00)	8.696.710.976,00
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.981.402.385,00	191.732.102,00	(30.574.570,00)	2.142.559.917,00
32	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.516.567.065,00	69.774.550,00	0,00	1.586.341.615,00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.267.142.263,00	334.090.600,00	(54.950.000,00)	4.546.282.863,00
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.197.280.939,00	5.694.263.036,00	(5.095.349.090,00)	9.796.194.885,00
35	Badan Pendapatan Daerah	3.783.833.623,00	287.688.285,00	0,00	4.071.521.908,00
36	Inspektorat Daerah	2.573.819.781,00	174.322.500,00	0,00	2.748.142.281,00
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.953.413.400,00	365.674.001,00	0,00	2.319.087.401,00
38	Dinas Lingkungan Hidup	28.025.129.264,00	1.977.395.191,00	(977.857.000,00)	29.024.667.455,00
39	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	7.287.362.058,00	482.945.980,00	(228.391.060,00)	7.541.916.978,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.006.391.531,00	144.362.850,00	0,00	1.150.754.381,00
41	Satuan Polisi Pamong Praja	19.085.929.705,00	5.350.139.794,00	(232.572.250,00)	24.203.497.249,00
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.154.065.758,00	329.032.610,00	(773.673.765,00)	5.709.424.603,00
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.062.473.750,00	658.325.998,00	(211.960.000,00)	1.508.839.748,00
44	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.341.456.915,00	229.191.814,00	(9.360.192,00)	4.561.288.537,00
45	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.662.788.108,00	953.777.972,00	(1.359.400.400,00)	11.257.165.680,00
46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.493.305.220,00	269.752.200,00	(20.000.000,00)	2.743.057.420,00
	Gedung dan Bangunan :	**883.795.231.952,53**	**71.130.161.523,00**	**(42.796.328.473,83)**	**912.129.065.001,70**
1	Sekretariat DPRD	13.593.881.553,49	592.694.770,00	0,00	14.186.576.323,49
2	Sekretariat Daerah	46.296.050.343,00	1.915.799.025,00	0,00	48.211.849.368,00
3	Kecamatan Kabanjahe	1.740.300.226,00	181.290.000,00	0,00	1.921.590.226,00
4	Kecamatan Berastagi	2.326.148.136,00	0,00	0,00	2.326.148.136,00
5	Kecamatan Simpang Empat	1.463.880.000,00	29.970.800,00	0,00	1.493.850.800,00
6	Kecamatan Payung	355.925.000,00	0,00	0,00	355.925.000,00
7	Kecamatan Tiganderket	864.310.000,00	0,00	0,00	864.310.000,00
8	Kecamatan Munte	1.563.600.000,00	0,00	0,00	1.563.600.000,00
9	Kecamatan Tiga Binanga	1.632.385.000,00	9.950.120,00	(9.950.120,00)	1.632.385.000,00
10	Kecamatan Juhar	283.300.000,00	0,00	0,00	283.300.000,00
11	Kecamatan Lau Baleng	1.429.860.000,00	0,00	0,00	1.429.860.000,00
12	Kecamatan Barusjahe	833.530.200,00	0,00	0,00	833.530.200,00
13	Kecamatan Tiga Panah	1.578.058.100,00	66.812.000,00	0,00	1.644.870.100,00
14	Kecamatan Kutabuluh	1.661.612.800,00	0,00	0,00	1.661.612.800,00
15	Kecamatan Merek	2.007.351.012,00	0,00	0,00	2.007.351.012,00
16	Kecamatan Mardingding	1.270.221.533,00	0,00	0,00	1.270.221.533,00
17	Kecamatan Merdeka	518.880.740,00	0,00	0,00	518.880.740,00
18	Kecamatan Naman Teran	629.816.650,00	0,00	0,00	629.816.650,00
19	Kecamatan Dolat Rayat	647.630.000,00	0,00	0,00	647.630.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14.854.170.690,00	0,00	0,00	14.854.170.690,00
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.232.007.605,00	149.724.200,00	0,00	1.381.731.805,00
22	Dinas Perhubungan	4.297.383.900,00	1.050.924.471,00	(489.513.912,00)	4.858.794.459,00
23	Dinas Kesehatan	105.200.542.114,00	15.680.324.883,00	(30.800.262.667,03)	90.080.604.329,97

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
24	Rumah Sakit Umum Daerah	9.645.655.900,00	57.952.934,00	0,00	9.703.608.834,00
25	Dinas Pendidikan	408.425.436.950,53	28.405.670.181,00	(3.425.896.200,00)	433.405.210.931,53
26	Dinas Sosial	293.823.748,00	0,00	0,00	293.823.748,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	3.309.568.400,00	118.305.000,00	0,00	3.427.873.400,00
28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	74.199.999,00	(74.199.999,00)	
29	Dinas Pertanian	19.707.752.029,54	142.072.748,00	0,00	19.849.824.777,54
30	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.168.285.346,00	0,00	0,00	3.168.285.346,00
31	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	864.955.760,00	49.378.600,00	0,00	914.334.360,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	180.469.792.918,00	4.393.285.728,00	(3.217.557.273,00)	181.645.521.373,00
33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.513.420.371,97	2.137.711.472,00	(1.548.260.000,00)	3.102.871.843,97
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Penelitian dan Pengembangan	0,00	100.740.000,00	(100.740.000,00)	
35	Dinas Lingkungan Hidup	6.127.079.699,00	1.758.297.273,00	0,00	7.885.376.972,00
36	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	39.519.018.797,00	3.777.572.986,00	(2.079.856.314,00)	41.216.735.469,00
37	Satuan Polisi Pamong Praja	820.536.000,00	0,00	0,00	820.536.000,00
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	955.535.000,00	79.999.999,00	0,00	1.035.534.999,00
39	Dinas Perpustakaan dan Arsip	897.925.430,00	10.165.135.909,00	(857.743.563,80)	10.205.317.775,20
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	795.600.000,00	192.348.425,00	(192.348.425,00)	795.600.000,00
	Jalan, Jaringan dan Irigasi :	**2.232.811.830.415,10**	**244.136.753.122,28**	**(7.656.581.297,87)**	**2.469.292.002.239,51**
1	Sekretariat DPRD	77.815.000,00	0,00	(74.030.000,00)	3.785.000,00
2	Sekretariat Daerah	217.382.892,00	0,00	0,00	217.382.892,00
3	Kecamatan Kabanjahe	11.772.779.999,00	2.650.995.656,00	(161.350.000,00)	14.262.425.655,00
4	Kecamatan Berastagi	9.912.694.548,00	2.977.838.000,00	(23.400.000,00)	12.867.132.548,00
5	Kecamatan Simpang Empat	23.400.000,00	0,00	(23.400.000,00)	0,00
6	Kecamatan Payung	23.400.000,00	0,00	(23.400.000,00)	0,00
7	Kecamatan Tiganderket	322.220.000,00	0,00	(23.400.000,00)	298.820.000,00
8	Kecamatan Munte	172.500.000,00	0,00	(23.400.000,00)	149.100.000,00
9	Kecamatan Tiga Binanga	2.698.383.336,00	1.469.086.072,00	(193.400.000,00)	3.974.069.408,00
10	Kecamatan Lau Baleng	148.600.000,00	0,00	(23.400.000,00)	125.200.000,00
11	Kecamatan Barusjahe	222.380.000,00	0,00	(23.400.000,00)	198.980.000,00
12	Kecamatan Tiga Panah	132.800.000,00	0,00	(23.900.000,00)	108.900.000,00
13	Kecamatan Kutabuluh	23.400.000,00	27.500.000,00	(23.400.000,00)	27.500.000,00
14	Kecamatan Mardingding	371.920.000,00	0,00	(172.900.000,00)	199.020.000,00
15	Kecamatan Merdeka	23.400.000,00	0,00	(23.400.000,00)	0,00
16	Kecamatan Naman Teran	223.200.000,00	0,00	(23.400.000,00)	199.800.000,00
17	Kecamatan Dolat Rayat	23.400.000,00	0,00	(23.400.000,00)	0,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.093.529.011.592,61	221.843.856.624,11	(3.320.317.570,68)	2.312.052.550.646,04
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	3.650.955.300,00	2.426.603.308,17	(299.398.800,00)	5.778.159.808,17
20	Dinas Perhubungan	9.527.542.960,00	4.207.661.291,00	(1.034.730.729,00)	12.700.473.522,00
21	Dinas Kesehatan	1.016.545.938,00	1.569.554.540,00	(78.720.800,00)	2.507.379.678,00
22	Dinas Pendidikan	34.294.082.208,49	2.821.768.457,00	(51.600.000,00)	37.064.250.665,49
23	Dinas Sosial	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0,00
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	370.000.000,00	0,00	(370.000.000,00)	0,00
26	Dinas Pertanian	451.470.600,00	0,00	(183.228.000,00)	268.242.600,00
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	19.068.000,00		0,00	19.068.000,00
28	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	69.774.550,00	0,00	(69.774.550,00)	0,00
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.413.470.143,00	0,00	(30.000.000,00)	5.383.470.143,00
30	Dinas Lingkungan Hidup	2.608.347.664,00	0,00	0,00	2.608.347.664,00
31	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	7.417.259.763,00	3.026.955.400,00	0,00	10.444.215.163,00
32	Satuan Polisi Pamong Praja	1.250.067.000,00	0,00	(1.250.067.000,00)	0,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46.677.017.921,00	489.877.069,00	0,00	47.166.894.990,00
34	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	625.056.705,00	(7.322.848,19)	
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	95.641.000,00	0,00	(48.041.000,00)	47.600.000,00
36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Aset Tetap Lainnya :	**111.413.949.841,00**	**9.440.336.378,00**	**0,00**	**120.854.286.219,00**
1	Sekretariat DPRD	105.650.220,00	0,00	0,00	105.650.220,00

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
2	Sekretariat Daerah	254.478.375,00	0,00	0,00	254.478.375,00
3	Kecamatan Kabanjahe	13.921.000,00	0,00	0,00	13.921.000,00
4	Kecamatan Munte	19.950.000,00	0,00	0,00	19.950.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.260.696.345,00	85.294.160,00	0,00	2.345.990.505,00
6	Dinas Kesehatan	4.268.000,00	0,00	0,00	4.268.000,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah	7.375.000,00	0,00	0,00	7.375.000,00
8	Dinas Pendidikan	106.277.034.949,00	9.163.692.218,00	0,00	115.440.727.167,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.900.900,00	0,00	0,00	3.900.900,00
10	Dinas Pertanian	22.015.400,00	0,00	0,00	22.015.400,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	113.480.000,00	0,00	0,00	113.480.000,00
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
13	Inspektorat Daerah	43.158.935,00	0,00	0,00	43.158.935,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	549.562.800,00	0,00	0,00	549.562.800,00
15	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	152.636.135,00	0,00	0,00	152.636.135,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.005.000,00	0,00	0,00	49.005.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.533.506.782,00	191.350.000,00	0,00	1.724.856.782,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Konstruksi Dalam Pekerjaan :	**1.306.980.147,11**	**29.125.350.373,00**	**(1.359.681.883,07)**	**29.072.648.637,04**
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.306.980.147,11	0,00	(1.306.980.147,11)	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	29.125.350.373,00	(52.701.735,96)	29.072.648.637,04
	Akumulasi Penyusutan :	**1.978.328.337.555,34**	**185.427.565.093,99**	**(18.599.155.317,09)**	**2.145.156.747.332,24**
1	Sekretariat DPRD	13.321.071.346,70	1.804.109.647,17	(6.474.098.011,72)	8.651.082.982,15
2	Sekretariat Daerah	38.641.736.206,06	4.078.801.998,04	(2.005.870.785,71)	40.714.667.418,39
3	Kecamatan Kabanjahe	7.989.336.876,64	1.458.103.764,34	(8.190.000,00)	9.439.250.640,98
4	Kecamatan Berastagi	4.248.262.103,21	1.159.547.334,72	(10.067.310,00)	5.397.742.127,93
5	Kecamatan Simpang Empat	1.110.736.636,02	84.282.615,85	(8.190.000,00)	1.186.829.251,87
6	Kecamatan Payung	921.746.882,48	56.022.926,17	(8.190.000,00)	969.579.808,65
7	Kecamatan Tiganderket	777.564.799,35	93.774.602,52	(8.190.000,00)	863.149.401,87
8	Kecamatan Munte	1.491.819.234,42	112.861.911,84	(8.190.000,00)	1.596.491.146,26
9	Kecamatan Tigabinanga	2.057.417.089,87	922.312.300,13	(8.190.000,00)	2.971.539.390,00
10	Kecamatan Juhar	630.912.094,60	33.538.266,20	0,00	664.450.360,80
11	Kecamatan Laubaleng	703.169.391,16	75.876.996,31	(8.190.000,00)	770.856.387,47
12	Kecamatan Barusjahe	1.022.005.137,43	92.112.541,99	(8.190.000,00)	1.105.927.679,42
13	Kecamatan Tiga Panah	1.026.869.956,03	114.725.573,76	(8.365.000,00)	1.133.230.529,79
14	Kecamatan Kutabuluh	1.139.492.141,90	129.706.361,67	(8.190.000,00)	1.261.008.503,57
15	Kecamatan Merek	1.009.694.731,94	64.220.655,38	0,00	1.073.915.387,32
16	Kecamatan Mardingding	924.473.459,98	148.811.731,23	(34.889.821,32)	1.038.395.369,89
17	Kecamatan Merdeka	665.947.753,98	49.656.176,47	(8.190.000,00)	707.413.930,45
18	Kecamatan Naman Teran	848.482.897,14	95.364.266,05	(23.110.000,00)	920.737.163,19
19	Kecamatan Dolat Rayat	634.867.958,14	72.023.457,14	(8.190.000,00)	698.701.415,28
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.316.270.321.910,27	113.019.617.807,19	(18.368.169,38)	1.429.271.571.548,08
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2.731.447.894,74	1.176.489.052,77	(705.738.546,00)	3.202.198.401,51
22	Dinas Perhubungan	20.432.500.550,86	1.420.865.714,39	(48.352.500,00)	21.805.013.765,25
23	Dinas Kesehatan	75.226.395.292,79	7.697.835.251,21	(2.986.301.744,06)	79.937.928.799,94
24	Rumah Sakit Umum Daerah	71.614.435.579,11	2.828.296.310,73	(86.030.100,99)	74.356.701.788,85
25	Dinas Pendidikan	214.809.362.912,14	23.493.868.268,92	0,00	238.303.231.181,06
26	Dinas Sosial	1.191.758.924,88	42.600.434,96	(3.550.000,00)	1.230.809.359,84
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	3.579.503.125,66	327.445.877,89	(12.500.000,00)	3.894.449.003,55
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.592.303.901,70	431.035.447,86	0,00	2.023.339.349,56
29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.783.851.526,00	758.865.700,00	(165.740.000,00)	3.376.977.226,00
30	Dinas Pertanian	12.620.826.879,20	802.917.494,45	(30.538.000,00)	13.393.206.373,65
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.687.815.211,65	173.886.428,78	(30.012.070,00)	2.831.689.570,43
32	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.504.309.614,74	221.129.006,40	(11.163.928,00)	1.714.274.693,14
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	61.133.832.639,29	4.466.097.744,34	(448.312.800,00)	65.151.617.583,63
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.771.873.948,33	1.846.339.201,42	(992.300.000,01)	8.625.913.149,74
35	Badan Pendapatan Daerah	3.252.250.166,75	359.634.077,35	0,00	3.611.884.244,10

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
36	Inspektorat Daerah	2.125.706.782,89	421.876.016,91	(186.385.714,29)	2.361.197.085,51
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Penelitian dan Pengembangan	1.651.975.750,00	231.295.805,20	0,00	1.883.271.555,20
38	Dinas Lingkungan Hidup	24.533.403.874,22	2.479.529.044,52	(977.857.000,00)	26.035.075.918,74
39	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	14.043.873.191,59	2.288.863.248,17	(232.391.550,00)	16.100.344.889,76
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	780.266.731,00	152.690.662,50	(23.600.000,00)	909.357.393,50
41	Satuan Polisi Pamong Praja	18.557.189.886,78	4.018.621.625,95	(578.196.778,58)	21.997.614.734,15
42	Badan Penangulangan Bencana Daerah	20.412.617.934,96	3.831.902.711,67	(774.749.241,32)	23.469.771.405,31
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	989.329.200,00	540.115.399,60	(211.960.000,00)	1.317.484.599,60
44	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.891.866.616,66	631.203.655,76	(5.295.945,71)	4.517.774.326,71
45	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.720.817.142,08	926.244.103,07	(1.403.320.300,00)	10.243.740.945,15
46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.252.893.670,00	192.445.875,00	(20.000.000,00)	2.425.339.545,00
TOTAL		**2.377.774.897.237,07**	**228.080.850.982,29**	**(60.267.323.274,68)**	**2.545.588.424.944,68**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran XIII

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	639.883.445.532,00	1.395.962.062,00	3.539.000.000,00	637.740.407.594,00
2	Peralatan dan Mesin	486.891.796.904,67	58.279.852.618,00	23.514.886.937,00	521.656.762.585,67
3	Gedung dan Bangunan	883.795.231.952,53	71.130.161.523,00	42.796.328.473,83	912.129.065.001,70
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.232.811.830.415,10	244.136.753.122,28	7.656.581.297,87	2.469.292.002.239,51
5	Aset Tetap Lainnya	111.413.949.841,00	9.440.336.378,00	-	120.854.286.219,00
6	Konstruksi Dalam Pekerjaan	1.306.980.147,11	29.125.350.373,00	1.359.681.883,07	29.072.648.637,04
7	Akumulasi Penyusutan	1.978.328.337.555,34	185.427.565.093,99	(18.599.155.317,09)	2.145.156.747.332,24
TOTAL ASET TETAP		**2.377.774.897.237,07**	**228.080.850.982,29**	**60.267.323.274,68**	**2.545.588.424.944,68**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran XIV

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI								SALDO AKHIR
			BERTAMBAH			BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	PERALATAN DAN MESIN	REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	
I	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**										
1	KDP Jalan-Jalan Kabupaten	1.306.980.147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.980.147,11	0,00
	Jumlah	**1.306.980.147,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.306.980.147,11**	**0,00**
II	**Dinas Kesehatan**										
1	KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	29.125.350.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.701.735,96	29.072.648.637,04
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**29.125.350.373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.701.735,96**	**29.072.648.637,04**
	TOTAL I+II+III	**1.306.980.147,11**	**0,00**	**29.125.350.373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.359.681.883,07**	**29.072.648.637,04**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran XV

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
		Tagihan Jangka Panjang :	**3.012.794.783,00**	**0,00**	**0,00**	**3.012.794.783,00**
1	Sekretariat DPRD	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	218.081.790,00	0,00	0,00	218.081.790,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara - Reklas Kas BLUD atas kerugian Kas dan Pajak yang Belum Disetor TA 2019	2.604.782.693,00	0,00	0,00	2.604.782.693,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara-Reklas Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 atas S3TU yang Tidak Disetor TA 2017	189.930.300,00	0,00	0,00	189.930.300,00
		Aset Tidak Berwujud :	**279.798.200,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**327.798.200,00**
1	Dinas Pendidikan	Software	221.318.200,00	0,00	0,00	221.318.200,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Software	4.580.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Software	53.900.000,00	0,00	0,00	53.900.000,00
4	Dinas Perhubungan	Software	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
		Aset Lain-Lain :	**127.559.117.616,37**	**6.306.008.733,00**	**6.837.804.098,91**	**127.027.322.250,46**
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	6.291.160.000,00	0,00	0,00	6.291.160.000,00
2	Kecamatan Tiga Binanga	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	758.376.430,00	0,00	758.376.430,00	0,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	8.760.659.132,00	0,00	0,00	8.760.659.132,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	362.045.061,03	0,00	63.695.696,03	298.349.365,00
5	Dinas Pendidikan	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	85.491.974,77	0,00	70.491.974,77	15.000.000,00

No	Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	1.092.576.028,11	0,00	994.452.028,11	98.124.000,00
7	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Non Operasional	557.500,00	0,00	0,00	557.500,00
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aset Rusak Berat/Usang	210.239.920,00	0,00	0,00	210.239.920,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Aset Rusak Berat/Usang	202.757.781,00	30.574.570,00	0,00	233.332.351,00
10	Dinas Pendidikan	Aset Rusak Berat/Usang	51.117.922.171,50	0,00	0,00	51.117.922.171,50
11	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	Aset Rusak Berat/Usang	603.678.101,00	0,00	0,00	603.678.101,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Aset Rusak Berat/Usang	841.510.850,00	0,00	392.290.000,00	449.220.850,00
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	868.669.011,00	0,00	0,00	868.669.011,00
14	Dinas Kesehatan	Aset Rusak Berat/Usang	11.153.752.645,00	0,00	883.230.000,00	10.270.522.645,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aset Rusak Berat/Usang	3.515.160.000,00	0,00	2.465.000.000,00	1.050.160.000,00
16	Dinas Perhubungan	Aset Rusak Berat/Usang	4.133.985.684,00	0,00	0,00	4.133.985.684,00
17	Kecamatan Berastagi	Aset Rusak Berat/Usang	318.945.503,00	0,00	0,00	318.945.503,00
18	Sekretariat DPRD	Aset Rusak Berat/Usang	254.047.950,00	4.486.370.998,00	0,00	4.740.418.948,00
19	Rumah Sakit Umum Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	16.952.803.470,96	0,00	220.000.000,00	16.732.803.470,96
20	Dinas Lingkungan Hidup	Aset Rusak Berat/Usang	435.505.800,00	0,00	0,00	435.505.800,00
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Rusak Berat/Usang	791.928.080,00	36.240.000,00	0,00	828.168.080,00
22	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Aset Rusak Berat/Usang	97.995.200,00	0,00	0,00	97.995.200,00
23	Kecamatan Tiga Binanga	Aset Rusak Berat/Usang	249.472.000,00	0,00	0,00	249.472.000,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	4.643.823.486,00	773.673.765,00	305.068.150,00	5.112.429.101,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset Rusak Berat/Usang	131.679.820,00	0,00	131.679.820,00	0,00
26	Badan Pendapatan Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	380.412.615,00	0,00	0,00	380.412.615,00
27	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Aset Rusak Berat/Usang	323.114.600,00	0,00	0,00	323.114.600,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset Rusak Berat/Usang	281.575.000,00	979.149.400,00	0,00	1.260.724.400,00
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Rusak Berat/Usang	833.703.025,00	0,00		833.703.025,00

No	Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	Aset Rusak Berat/Usang	1.590.031.659,00	0,00	553.520.000,00	1.036.511.659,00
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aset Rusak Berat/Usang	267.971.378,00	0,00	0,00	267.971.378,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Aset Rusak Berat/Usang	923.341.015,00	0,00	0,00	923.341.015,00
33	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Aset Rusak Berat/Usang	1.875.309.832,00	0,00	0,00	1.875.309.832,00
34	Dinas Pertanian	Aset Rusak Berat/Usang	1.199.231.101,00	0,00	0,00	1.199.231.101,00
35	Dinas Sosial	Aset Rusak Berat/Usang	306.111.500,00	0,00	0,00	306.111.500,00
36	Inspektorat Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	218.688.300,00	0,00	0,00	218.688.300,00
37	Kecamatan Barusjahe	Aset Rusak Berat/Usang	108.020.000,00	0,00	0,00	108.020.000,00
38	Kecamatan Dolat Rayat	Aset Rusak Berat/Usang	117.494.906,00	0,00	0,00	117.494.906,00
39	Kecamatan Juhar	Aset Rusak Berat/Usang	252.138.000,00	0,00	0,00	252.138.000,00
40	Kecamatan Kabanjahe	Aset Rusak Berat/Usang	91.350.000,00	0,00	0,00	91.350.000,00
41	Kecamatan Kutabuluh	Aset Rusak Berat/Usang	245.040.000,00	0,00	0,00	245.040.000,00
42	Kecamatan Lau Baleng	Aset Rusak Berat/Usang	279.356.000,00	0,00	0,00	279.356.000,00
43	Kecamatan Mardinding	Aset Rusak Berat/Usang	265.683.500,00	0,00	0,00	265.683.500,00
44	Kecamatan Merdeka	Aset Rusak Berat/Usang	333.203.250,00	0,00	0,00	333.203.250,00
45	Kecamatan Merek	Aset Rusak Berat/Usang	225.122.225,00	0,00	0,00	225.122.225,00
46	Kecamatan Munte	Aset Rusak Berat/Usang	120.250.005,00	0,00	0,00	120.250.005,00
47	Kecamatan Naman Teran	Aset Rusak Berat/Usang	112.156.800,00	0,00	0,00	112.156.800,00
48	Kecamatan Payung	Aset Rusak Berat/Usang	21.095.000,00	0,00	0,00	21.095.000,00
49	Kecamatan Simpang Empat	Aset Rusak Berat/Usang	123.659.700,00	0,00	0,00	123.659.700,00
50	Kecamatan Tiganderket	Aset Rusak Berat/Usang	156.544.244,00	0,00	0,00	156.544.244,00
51	Kecamatan Tiga Panah	Aset Rusak Berat/Usang	84.516.300,00	0,00	0,00	84.516.300,00
52	Satuan Polisi Pamong Praja	Aset Rusak Berat/Usang	2.003.456.210,00	0,00	0,00	2.003.456.210,00
53	Sekretariat Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	945.797.852,00	0,00	0,00	945.797.852,00

No	Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud :	**(146.849.280,00)**	**(85.539.820,00)**	**0,00**	**(232.389.100,00)**
1	Dinas Pendidikan	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	(88.827.280,00)	(37.081.820,00)	0,00	(125.909.100,00)
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	(53.900.000,00)	0,00	0,00	(53.900.000,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	(4.122.000,00)	(458.000,00)	0,00	(4.580.000,00)
4	Dinas Perhubungan	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	0,00	(48.000.000,00)	0,00	(48.000.000,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya :	**(95.410.691.999,37)**	**(6.155.248.597,32)**	**(5.047.516.541,43)**	**(96.518.424.055,26)**
1	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(393.690.586,93)	0,00	0,00	(393.690.586,93)
2	Dinas Kesehatan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(8.774.901.213,25)	0,00	(883.230.000,00)	(7.891.671.213,25)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(3.203.850.000,00)	0,00	(2.465.000.000,00)	(738.850.000,00)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(816.009.116,00)	0,00	0,00	(816.009.116,00)
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(813.406.650,00)	0,00	(392.290.000,00)	(421.116.650,00)
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(207.439.800,00)	0,00	0,00	(207.439.800,00)
7	Kecamatan Berastagi	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(292.640.053,00)	0,00	0,00	(292.640.053,00)
8	Sekretariat DPRD	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(254.047.950,00)	(4.337.482.886,00)	0,00	(4.591.530.836,00)
9	Rumah Sakit Umum Daerah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(16.653.191.693,56)	0,00	(220.000.000,00)	(16.433.191.693,56)
10	Dinas Lingkungan Hidup	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(527.641.685,72)	0,00	(96.728.571,43)	(430.913.114,29)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(787.413.080,00)	(36.240.000,00)	0,00	(823.653.080,00)
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(97.995.200,00)	0,00	0,00	(97.995.200,00)
13	Kecamatan Tiga Binanga	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(247.872.200,00)	0,00	0,00	(247.872.200,00)
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(4.578.404.986,00)	(772.364.241,32)	(305.068.150,00)	(5.045.701.077,32)
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(179.539.742,13)	(30.012.070,00)	0,00	(209.551.812,13)
16	Dinas Perhubungan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(3.840.064.477,72)	0,00	0,00	(3.840.064.477,72)

No	Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(131.679.820,00)	0,00	(131.679.820,00)	0,00
18	Badan Pendapatan Daerah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(374.589.007,50)	0,00	0,00	(374.589.007,50)
19	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(323.114.600,00)	0,00	0,00	(323.114.600,00)
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(273.890.000,00)	(979.149.400,00)	0,00	(1.253.039.400,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(819.996.525,00)	0,00	0,00	(819.996.525,00)
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(1.590.031.659,00)	0,00	(553.520.000,00)	(1.036.511.659,00)
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(267.321.278,00)	0,00	0,00	(267.321.278,00)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(877.210.269,60)	0,00	0,00	(877.210.269,60)
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(307.250.000,00)	0,00	0,00	(307.250.000,00)
26	Dinas Pertanian	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(1.171.944.737,55)	0,00	0,00	(1.171.944.737,55)
27	Dinas Sosial	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(306.111.500,00)	0,00	0,00	(306.111.500,00)
28	Inspektorat Daerah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(218.688.300,00)	0,00	0,00	(218.688.300,00)
29	Kecamatan Barusjahe	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(108.020.000,00)	0,00	0,00	(108.020.000,00)
30	Kecamatan Dolat Rayat	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(117.494.906,00)	0,00	0,00	(117.494.906,00)
31	Kecamatan Juhar	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(236.343.000,00)	0,00	0,00	(236.343.000,00)
32	Kecamatan Kabanjahe	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(91.350.000,00)	0,00	0,00	(91.350.000,00)
33	Kecamatan Kutabuluh	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(242.940.000,00)	0,00	0,00	(242.940.000,00)
34	Kecamatan Lau Baleng	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(279.016.000,00)	0,00	0,00	(279.016.000,00)
35	Kecamatan Mardinding	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(265.683.500,00)	0,00	0,00	(265.683.500,00)
36	Kecamatan Merdeka	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(333.203.250,00)	0,00	0,00	(333.203.250,00)
37	Kecamatan Merek	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(209.327.225,00)	0,00	0,00	(209.327.225,00)

No	Perangkat Daerah	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
38	Kecamatan Munte	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(119.950.005,00)	0,00	0,00	(119.950.005,00)
39	Kecamatan Naman Teran	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(112.156.800,00)	0,00	0,00	(112.156.800,00)
40	Kecamatan Payung	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(19.395.000,00)	0,00	0,00	(19.395.000,00)
41	Kecamatan Simpang Empat	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(114.759.700,00)	0,00	0,00	(114.759.700,00)
42	Kecamatan Tiganderket	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(156.544.244,00)	0,00	0,00	(156.544.244,00)
43	Kecamatan Tiga Panah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(83.685.300,00)	0,00	0,00	(83.685.300,00)
44	Satuan Polisi Pamong Praja	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(1.997.188.147,50)	0,00	0,00	(1.997.188.147,50)
45	Sekretariat Daerah	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(944.473.852,00)	0,00	0,00	(944.473.852,00)
46	Dinas Pendidikan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(41.649.224.938,91)	0,00	0,00	(41.649.224.938,91)
		Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) :	**73.268.000,00**	**0,00**	**73.268.000,00**	**0,00**
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	73.268.000,00	0,00	73.268.000,00	0,00
Total Aset Lainnya			**35.367.437.320,00**	**113.220.315,68**	**1.863.555.557,48**	**33.617.102.078,20**

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran XVI

Daftar Dana Cadangan Daerah

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran XVII

Daftar Kewajiban Jangka Pendek

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah	Penerima	Jumlah	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12	13	14
1		**Dinas Pendidikan**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	761.122.824,00	761.122.824,00	BPJS	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	-	11.152.416.900,00	-	11.152.416.900,00	2025	0,00	11.152.416.900,00	0,00	0,00	-
	3	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK	0,00	0,00	-	4.107.568.800,00	-	4.107.568.800,00	2025	0,00	4.107.568.800,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Pegawai	**761.122.824,00**	**761.122.824,00**	**-**	**15.259.985.700,00**	**-**	**15.259.985.700,00**		**0,00**	**15.259.985.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	II	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa Pembangunan Pagar SMPN 3 Tiga Binanga dan SMPN 1 Tiganderket	13.300.000,00	13.300.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Tahun 2025	28.000.000,00	28.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Perencanaan Pembangunan Toilet	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4	Pengawasan Sumur BOR Ajinembah	3.180.000,00	3.180.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Jasa konsultasi Pengawasan Lanjutan - Pengawasan Pagar	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Jasa Konsultasi Perencanaan Lanjutan	16.900.000,00	16.900.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7	Jasa Konsultasi Pengawasan - Pengawasan Toilet	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Jasa Konsultasi Pengawasan - Pembangunan Toilet (DAU SG SILPA)	16.600.000,00	16.600.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	Jasa Pengawasan - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	Jasa Konsultasi Perencanaan - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3.750.000,00	3.750.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	11	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Perpustakaan SDN 040533 Merek	3.180.000,00	3.180.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	12	Belanja Jasa Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 046419 Serdang	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	13	Belanja Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.300.000,00	3.300.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	14	Belanja Jasa Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 046419 Serdang	4.550.000,00	4.550.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	15	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan - Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	57.280.000,00	57.280.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	16	Jasa Konsultasi Pengawasan - Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	76.450.000,00	76.450.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	17	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	-	29.100.000,00	-	29.100.000,00	2023	0,00	29.100.000,00	0,00	0,00	

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah	Penerima	Jumlah	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12	13	14
		Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	**275.490.000,00**	**275.490.000,00**	**-**	**29.100.000,00**	**-**	**29.100.000,00**		**0,00**	**29.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	III	**Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**												
	1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pembangunan Area Bermain TK Pembina Juhar	71.800.000,00	71.800.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU SDN 047171 Basam Tongkoh	143.000.000,00	143.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Pembangunan Area Bermain TK Negeri Satu Atap Lausimomo	44.400.000,00	44.400.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Pembangunan Area Bermain TK Negeri Satu Atap Kuta Bangun	44.400.000,00	44.400.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pembangunan Toilet SD N 040570 Tigabinanga	132.850.000,00	132.850.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pembangunan Toilet SDN 040452 Kabanjahe	99.596.000,00	99.596.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembangunan Toilet SD Negeri 040552 Samperaya	124.400.000,00	124.400.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembangunan Toilet SD Negeri 040553 Bandar Purba	132.870.000,00	132.870.000,00	-	0,00	-	0,00	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**793.316.000,00**	**793.316.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		TOTAL 1	**1.829.928.824,00**	**1.829.928.824,00**	**-**	**15.289.085.700,00**	**-**	**15.289.085.700,00**		**0,00**	**15.289.085.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2	**Dinas Kesehatan**													
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang 4 % BPJS Kesehatan Tambahan penghasilan PPPK Bulan Oktober.November.Desember Thn 2024	5.095.960,00	0,00	-	0,00	-	5.095.960,00	2024	0,00	5.095.960,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Tunjangan Anak dan Istri pada Gaji PPPK Bulan Desember 2024	549.064,00	0,00	-	0,00	-	549.064,00	2024	0,00	549.064,00	0,00	0,00	-
	3	Utang Kekurangan BPJS pada Gaji PPPK Bulan Desember 2024	4.223.909,00	0,00	-	0,00	-	4.223.909,00	2024	0,00	4.223.909,00	0,00	0,00	-
	4	Utang Kekurangan Tunjangan Beras pada Gaji PPPK Thn 2024	1.231.140,00	0,00	-	0,00	-	1.231.140,00	2024	0,00	1.231.140,00	0,00	0,00	-
	5	Utang Gaji Terusan an.Jeni Br Tarigan pada Bulan Desember 2024	4.799.270,00	4.799.270,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Utang Gaji PNS Untuk bulan Desember 2025 (Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Jabatan Fungsional Umum, Tunjangan BPJS 4%, Pembulatan Gaji, JKK dan JKM)	0,00	0,00	-	83.880.724,00	-	83.880.724,00	2025	0,00	83.880.724,00	0,00	0,00	-
	7	Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK bulan Desember 2025	0,00	0,00	-	9.256.000,00	-	9.256.000,00	2025	0,00	9.256.000,00	0,00	0,00	-

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah	Penerima	Jumlah	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12	13	14
	8	Utang Iuran BPJS 4% pada Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Oktober,November dan Desember 2025 Khusus PPPK	0,00	0,00	-	7.256.216,00	-	7.256.216,00	2025	0,00	7.256.216,00	0,00	0,00	-
	9	Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Pada Puskesmas Munthe bulan Desember 2025	0,00	0,00	-	800.000,00	-	800.000,00	2025	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-
	10	Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Pada Puskesmas Munthe bulan Desember 2025	0,00	0,00	-	900.000,00	-	900.000,00	2025	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-
	11	Utang gaji terusan an.Melta br Sinulingga bulan November s/d Desember 2025	0,00	0,00	-	13.828.904,00	-	13.828.904,00	2025	0,00	13.828.904,00	0,00	0,00	-
	12	Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS an.Dr Blandina Purnama Ria Br Tarigan bulan Desember 2025	0,00	0,00	-	2.900.000,00	-	2.900.000,00	2025	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Pegawai	**15.899.343,00**	**4.799.270,00**	**-**	**118.821.844,00**	**-**	**129.921.917,00**		**0,00**	**129.921.917,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	II	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	9.900.000,00	9.900.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	14.850.000,00	14.850.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	17.090.000,00	17.090.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	750.000,00	750.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024	5.997.000,00	5.997.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024	6.984.700,00	6.984.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	700,00	0,00	Jumlah lebih dalam permintaan pembayaran utang belanja perjalanan Dinas thn 2024
	11	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024	3.760.000,00	3.760.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	12	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	13	Utang Belanja Makan/Minuman Tahun 2024	1.440.000,00	1.440.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	14	Utang Belanja Narasumber Tahun 2024	4.400.000,00	4.400.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	15	Utang Jasa Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Tahun 2024	430.000,00	430.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	16	Utang Pajak Kendaraan Bermotor TA.2024	8.584.500,00	8.584.500,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	17	Utang Pengadaan Stiker Investaris Barang	1.209.600,00	1.209.600,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	18	Kurang Bayar Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4% th 2023	45.307.295,00	45.307.295,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	19	Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4% tahun 2024	375.000.000,00	354.952.882,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	20.047.118,00	0,00	Jumlah lebih dalam permintaan utang belanja jasa kesehatan 4 % Thn 2024

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah	Penerima	Jumlah	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12	13	14
	20	Utang Bantuan Iuran PBPU dan BP Kelas 3 Mandiri Aktif th 2023	3.200.400,00	3.200.400,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	21	Utang belanja alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Cofy Rutin) untuk bulan Juni s/d Desember 2025	0,00	0,00	-	5.734.400,00	-	5.734.400,00	2025	0,00	5.734.400,00	0,00	0,00	-
	22	Utang Jasa Tenaga Kesehatan Retrisbusi Pasien Umum Puskesmas Bulan September s/d Desember 2025	0,00	0,00	-	329.270.000,00	-	329.270.000,00	2025	0,00	329.270.000,00	0,00	0,00	-
	23	Utang Jasa Tenaga Kesehatan Persalinan Normal (Non Kapitasi) Puskesmas Bulan September s/d Desember 2025	0,00	0,00	-	249.720.000,00	-	249.720.000,00	2025	0,00	249.720.000,00	0,00	0,00	-
	24	Utang biaya belanja Pembayaran Rekening Listrik DINKES untuk tagihan bulan Oktober dan Desember 2025 an.Mardin Purba	0,00	0,00	-	6.457.594,00	-	6.457.594,00	2025	0,00	6.457.594,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	**531.903.495,00**	**511.855.677,00**	**-**	**591.181.994,00**	**-**	**591.181.994,00**		**0,00**	**591.181.994,00**	**20.047.818,00**	**0,00**	**-**
		TOTAL 2	**547.802.838,00**	**516.654.947,00**	**-**	**710.003.838,00**	**-**	**721.103.911,00**		**0,00**	**721.103.911,00**	**20.047.818,00**	**0,00**	**-**
3	**Rumah Sakit Umum**													
	I	Utang PFK												
	1	Utang PPh Pasal 21	20.996.813,00	0,00	-	0,00	-	20.996.813,00	2018	20.996.813,00	0,00	0,00	0,00	Kewajiban mantan Bendahara 2018
	2	Utang PPh Pasal 22	10.334.422,00	0,00	-	0,00	-	10.334.422,00	2018	10.334.422,00	0,00	0,00	0,00	Kewajiban mantan Bendahara 2018
	3	Utang PPN Pusat	46.648.013,00	0,00	-	0,00	-	46.648.013,00	2018	46.648.013,00	0,00	0,00	0,00	Kewajiban mantan Bendahara 2018
		Jumlah Utang PFK	**77.979.248,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**77.979.248,00**		**77.979.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Honorarium Dokter spesialis Non ASN	45.000.000,00	45.000.000,00	-	38.000.000,00	-	38.000.000,00	2024	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	-
	2	Honorarium Tim Satuan pengawas Internal BLUD	48.000.000,00	48.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Jasa Pelayanan BPJS untuk klaiman pending/susulan 2024	478.273.822,00	435.956.621,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	42.317.201,00	0,00	Koreksi karena jasa dibayar berdasarkan klaim yang diterima
	4	Jasa Pelayanan TB MDR dan TB RO Tahun 2024	26.021.000,00	26.021.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Jasa Pelayanan Obat Kronis Bulan Juni s.d Desember 2024	410.907.451,00	410.907.451,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Jasa Pelayanan pasien BPJS bulan Oktobber s.d Desember 2024 dan klaim pendingan	1.840.955.631,00	1.840.955.631,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7	Jasa Pelayanan Pasien Umum Bulan Oktober dan Desember 2024	220.075.000,00	220.075.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Iuran BPJS Kesehatan 4% dari Penerima Jasa Pelayanan bulan Juni-Desember 2024	74.170.080,00	68.075.494,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	6.094.586,00	0,00	Dibayar sesuai hasil rekon dengan BPJS Kesehatan Rp68.075.494,00 dan sisanya Rp6.094.586,00 di koreksi ke ekuitas

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah	Penerima	Jumlah	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12	13	14
	9	Kekurangan Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember	1.300.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	Tidak dapat dibayar, karena hasil produktivitas kerja tidak tercantum penambahan PLT
	10	Jasa Pelayanan Pasien BPJS Bulan November s.d Desember 2025	0,00	0,00	-	1.801.581.972,00	-	1.801.581.972,00	2025	0,00	1.801.581.972,00	0,00	0,00	
	11	Jasa Pelayanan BPJS untuk klaiman pending/susulan 2025	0,00	0,00	-	628.165.144,00	-	628.165.144,00	2025	0,00	628.165.144,00	0,00	0,00	Koreksi karena jasa dibayar berdasarkan klaim yang diterima
	12	Belanja Pegawai BLUD - Jasa Pelayanan Pasien Umum Bulan Oktober dan Desember 2025	0,00	0,00	-	259.121.500,00	-	259.121.500,00	2025	0,00	259.121.500,00	0,00	0,00	
	13	Belanja Pegawai BLUD - Iuran Jaminan Kesehtaan 4% dari Komponen Penerimaan Jasa Pelayanan Bulan September-Desember 2025	0,00	0,00	-	39.270.042,00	-	39.270.042,00	2025	0,00	39.270.042,00	0,00	0,00	
	14	Iuran Jaminan Kesehatan 4% dari Komponen Penerimaan Gaji dan TPP ASN	0,00	0,00	-	82.943.460,00	-	82.943.460,00	2025	0,00	82.943.460,00	0,00	0,00	
	15	Belanja Tunjangan fungsional umum PPPK	0,00	0,00	-	0,00	-	1.635.000,00	2025	0,00	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	Penambahan hutang karena belum tercatat pada laporan keuangan unaudited
	16	Belanja Tunjangan fungsional PNS	0,00	0,00	-	0,00	-	7.000.000,00	2025	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	Penambahan hutang karena belum tercatat pada laporan keuangan unaudited
		Jumlah Utang Belanja Pegawai	**3.144.702.984,00**	**3.094.991.197,00**	**-**	**2.849.082.118,00**	**-**	**2.857.717.118,00**		**0,00**	**2.857.717.118,00**	**49.711.787,00**	**8.635.000,00**	**-**
	II	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Belanja obat-obatan/ BHP	685.015.280,00	0,00	-	0,00	-	685.015.280,00	2022	0,00	685.015.280,00	0,00	0,00	BHP dari kemenkes untuk Covid
	2	Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.039.650.510,00	5.037.090.632,00	Perusahaan	5.093.918.792,00	-	5.050.596.066,33	2024, 2025	0,00	5.050.596.066,33	2.559.878,00	(43.322.725,67)	lebih catat pada belanja perjalanan dinas dan belanja obat-obatan sebesar Rp2.559.878,00 dan lebih catat setelah konfirmasi dengan perusahaan sebesar minus Rp43.322.725,67
	3	Belanja Jasa Kantor-Jasa tenaga kesehatan untuk pelayanan pasien tidak mampu dan terlantar bulan November dan Desember 2024	50.967.000,00	50.967.000,00	-	0,00	-	0,00	2024		0,00	0,00	0,00	
		Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	**5.775.632.790,00**	**5.088.057.632,00**	**-**	**5.093.918.792,00**	**-**	**5.735.611.346,33**		**0,00**	**5.735.611.346,33**	**2.559.878,00**	**(43.322.725,67)**	**-**
	III	**Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin**												
	1	Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	476.102.053,00	476.102.053,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Belanja Modal Komputer	3.255.075,00	3.255.075,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Jumlah Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**479.357.128,00**	**479.357.128,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah	Penerima	Jumlah	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12	13	14
		TOTAL 3	**9.477.672.150,00**	**8.662.405.957,00**	**-**	**7.943.000.910,00**	**-**	**8.671.307.712,33**		**77.979.248,00**	**8.593.328.464,33**	**52.271.665,00**	**(34.687.725,67)**	**-**
4	**Satuan Polisi Pamong Praja**													
	I	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	0,00	-	2.150.924,00	PLN	2.150.924,00	2025	0,00	2.150.924,00	0,00	0,00	
	2	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	889.390,00	889.390,00	Nensita Br Tarigan	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 4	**889.390,00**	**889.390,00**	**-**	**2.150.924,00**	**-**	**2.150.924,00**		**0,00**	**2.150.924,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
5	**Kecamatan Barusjahe**													
	I	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	263.500,00	263.500,00	PDAM Tirta Malem	790.500,00	-	790.500,00	2025	0,00	790.500,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 5	**263.500,00**	**263.500,00**	**-**	**790.500,00**	**-**	**790.500,00**		**0,00**	**790.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
6	**Dinas Perhubungan**													
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	4.672.800,00	4.672.800,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	7.588.300,00	-	7.588.300,00	2025	0,00	7.588.300,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	560.736,00	560.736,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	647.402,00	-	647.402,00	2025	0,00	647.402,00	0,00	0,00	-
	3	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	2.025.000,00	2.025.000,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	980.000,00	-	980.000,00	2025	0,00	980.000,00	0,00	0,00	-
	4	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	0,00		185.000,00		185.000,00	2025	0,00	185.000,00	0,00	0,00	
	5	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00		2.700.000,00		2.700.000,00	2025	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
	6	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	217.260,00	217.260,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	362.100,00	-	362.100,00	2025	0,00	362.100,00	0,00	0,00	-
	7	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	75.207,00	75.207,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	34.179,00	-	34.179,00	2025	0,00	34.179,00	0,00	0,00	-
	8	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	72,00	72,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	161,00	-	161,00	2025	0,00	161,00	0,00	0,00	-
	9	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	290.341,00	290.341,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	376.028,00	-	376.028,00	2025	0,00	376.028,00	0,00	0,00	-
	10	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.215,00	11.215,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	18.212,00	-	18.212,00	2025	0,00	18.212,00	0,00	0,00	-
	11	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	33.644,00	33.644,00	Frolin A. Perangin-Angin, S.H, M.Si	54.636,00	-	54.636,00	2025	0,00	54.636,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Pegawai	**7.886.275,00**	**7.886.275,00**		**12.946.018,00**	**-**	**12.946.018,00**		**0,00**	**12.946.018,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	II	**Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**												
	1	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	650.702.800,00	650.702.800,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	**650.702.800,00**	**650.702.800,00**	**-**	**0,00**	**-**	0,00		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		TOTAL 6	**658.589.075,00**	**658.589.075,00**	**-**	**12.946.018,00**	**-**	**12.946.018,00**		**0,00**	**12.946.018,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
7	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**													
	I	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat												

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah	Penerima	Jumlah	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12	13	14
	1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sukandebi Kec. Naman Teran (DAK Penugasan)	492.601.998,00	492.601.998,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	**492.601.998,00**	**492.601.998,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	II	**Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**												
	a.	**Utang Belanja Modal Bangunan Air**												
	1	Pembangunan Saluran Drainase Gg. Pendidikan Kota Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo	199.100.000,00	199.100.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Pembangunan Drainase Desa Kacinambun Kec. Tiga Panah Kab. Karo	492.840.000,00	492.840.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Pembangunan Saluran Drainase Desa Bintang Meriah Kec. Kuta Buluh Kab. Karo	199.460.000,00	199.460.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4	Pembangunan Saluran Drainase Desa Buluh Naman Kec. Munte Kab. Karo	199.000.000,00	199.000.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Pembangunan Saluran Drainase Desa Kubu Colia Kec. Dolat Rayat Kab. Karo	199.400.000,00	199.400.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Pembangunan Saluran Drainase Desa Rumah Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo	199.250.000,00	199.250.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7	Pembangunan Saluran Drainase Desa Ujung Payung Kec. Payung Kab. Karo	199.380.000,00	199.380.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Revitalisasi Saluran Drainase Jl. Pahlawan Kec. Kabanjahe	394.050.000,00	394.050.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	**2.082.480.000,00**	**2.082.480.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	b.	**Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi**												-
	1	Rehabilitasi Jaringan Irigas DI Payung-Batukarang Kec.Payung Kab.Karo	388.799.962,00	388.799.962,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Rehabilitasi Jaringan Irigas di Belinun Kec. Juhar Kab.Karo	199.700.000,00	199.700.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	**588.499.962,00**	**588.499.962,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		Jumlah Utang Belanja Modal Bangunan Air	**2.670.979.962,00**	**2.670.979.962,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	c.	**Belanja Modal Jalan Kabupaten**												
	1	Pembangunan Tembok penahan tanah pada ruas jalan Kapten Pala Bangun Kec. Kabanjahe	1.906.475,75	1.906.475,75	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jembatan Pada Ruas Jalan Panorama Tongging -Aek Hotang Kec. Merek	4.886.337,36	4.886.337,36	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Belanja Modal Jalan Kabupaten	**6.792.813,11**	**6.792.813,11**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		Jumlah Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	**2.677.772.775,11**	**2.677.772.775,11**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		TOTAL 7	**3.170.374.773,11**	**3.170.374.773,11**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
8	**Kecamatan Merek**													
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Gaji Pokok PNS	8.022.300,00	8.022.300,00	Deking Munte Saragih dan Alfonsus Romi Ginting (Pegawai Kantor Camat Merek)	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Tunjangan Keluarga PNS	802.230,00	802.230,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Tunjangan Jabatan PNS	540.000,00	540.000,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4	Tunjangan Fungsional Umum PNS	185.000,00	185.000,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Tunjangan Beras PNS	289.680,00	289.680,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Pembulatan Gaji PNS	48,00	48,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah	Penerima	Jumlah	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12	13	14
	7	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	381.981,00	381.981,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	19.254,00	19.254,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	Iuran Jaminan Kematian PNS	57.761,00	57.761,00		0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 8	**10.298.254,00**	**10.298.254,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
9		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2.164.722,00	2.164.722,00	Agustina Br Sinuhaji, S.Pi	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 9	**2.164.722,00**	**2.164.722,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
10		**Kecamatan Naman Teran**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	15.088.900,00	15.088.900,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	1.272.288,00	1.272.288,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	490.000,00	490.000,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	540.000,00	540.000,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	796.620,00	796.620,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.083,00	14.083,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	100,00	100,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	695.647,00	695.647,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	36.212,00	36.212,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	108.639,00	108.639,00	Pegawai Kec. Naman Teran	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 10	**19.042.489,00**	**19.042.489,00**		**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
11		**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**												
	I	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	887.961.058,50	887.961.058,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,50	0,00	Pembayaran utang Tahun 2024 karna belanja barang dan jasa masuk ke persediaan di 2025 ketika pembayaran SPJ nya tidak boleh ada koma dibelakang
		TOTAL 11	**887.961.058,50**	**887.961.058,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**-**
12		**Dinas Pertanian**												
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	16.319.128,00	16.319.128,00	BPJS Kesehatan	799.580,00	-	799.580,00	2024	0,00	799.580,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	-	8.206.700,00	-	8.206.700,00	2025	0,00	8.206.700,00	0,00	0,00	-

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah	Penerima	Jumlah	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12	13	14
	3	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00	-	27.566.167,00	-	27.566.167,00	2025	0,00	27.566.167,00	0,00	0,00	-
	4	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	-	540.000,00	-	540.000,00	2025	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-
	5	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00	-	2.760.000,00	-	2.760.000,00	2025	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	-
	6	Utang Belanja Tunjangan Beras ASSN-Tunjangan Beras PPPK	0,00	0,00	-	434.520,00	-	434.520,00	2025	0,00	434.520,00	0,00	0,00	-
	7	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	0,00	0,00	-	384,00	-	384,00	2025	0,00	384,00	0,00	0,00	-
	8	Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,00	0,00	-	44.473,00	-	44.473,00	2025	0,00	44.473,00	0,00	0,00	-
	9	Utang Belanja Iurana Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK	0,00	0,00	-	133.413,00	-	133.413,00	2025	0,00	133.413,00	0,00	0,00	-
	10	Utang Belanja Tambahan Pengahsilan Berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	0,00	-	41.763.740,00	-	41.763.740,00	2025	0,00	41.763.740,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Pegawai	**16.319.128,00**	**16.319.128,00**	**-**	**82.248.977,00**	**-**	**82.248.977,00**		**0,00**	**82.248.977,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	II	**Utang Belanja Barang dan Jasa**												
	1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	0,00	0,00	-	2.983.100,00	-	2.983.100,00	2025	0,00	2.983.100,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	11.058.861,00	11.058.861,00	PLN	3.520.000,00	-	3.520.000,00	2024	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	-
		Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	**11.058.861,00**	**11.058.861,00**	**-**	**6.503.100,00**	**-**	**6.503.100,00**		**0,00**	**6.503.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		TOTAL 12	**27.377.989,00**	**27.377.989,00**	**-**	**88.752.077,00**	**-**	**88.752.077,00**		**0,00**	**88.752.077,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
13	**Kecamatan Merdeka**													
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	14.230.600,00	14.230.600,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.275.000,00	1.275.000,00	-	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 13	**15.505.600,00**	**15.505.600,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
14	**Kecamatan Tiganderket**													
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan Pegawai Kantor Camat Tiganderket a.n Terbit Singarimbun, SH, dkk	2.519.629,00	2.519.629,00	Terbit Singarimbun, SH, dkk	0,00	-	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS an. Anita dkk	0,00	0,00	-	283.135,00	-	283.135,00	2025	0,00	283.135,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 14	**2.519.629,00**	**2.519.629,00**	**-**	**283.135,00**	**-**	**283.135,00**		**0,00**	**283.135,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
15	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB**													
	I	**Utang Belanja Pegawai**												
	1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	-	52.641.400,00	-	52.641.400,00	2025	0,00	52.641.400,00	0,00	0,00	-
	2	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	0,00	-	2.590.000,00	-	2.590.000,00	2025	0,00	2.590.000,00	0,00	0,00	-
	3	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	0,00	-	1.013.880,00	-	1.013.880,00	2025	0,00	1.013.880,00	0,00	0,00	-

No		Perangkat Daerah / Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Pembayaran Utang Tahun 2025		Penambahan Utang Tahun 2025		Saldo Akhir	Tahun Utang	Utang PFK	Utang Belanja	Koreksi kurang Utang	Koreksi Tambah Utang	Keterangan Koreksi Utang
				Jumlah	Penerima	Jumlah	Pemberi							
1		2	3	4	5	6	7	8=(3-4+6-12)	9	10	11	12	13	14
	4	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	-	1.120,00	-	1.120,00	2025	0,00	1.120,00	0,00	0,00	-
		TOTAL 15	**0,00**	**0,00**	-	**56.246.400,00**	-	**56.246.400,00**		**0,00**	**56.246.400,00**	**0,00**	**0,00**	-
16		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**												
	1	Pendapatan Diterima Dimuka	**0,00**	**0,00**	-	1.314.350,00	PT Trikreasindo Mandiri Sentosa	1.314.350,00	2025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		TOTAL 16				**1.314.350,00**								
		TOTAL UTANG	**16.650.390.291,61**	**15.803.976.207,11**	-	**24.104.573.852,00**	-	**24.843.980.727,33**		**77.979.248,00**	**24.764.687.129,33**	**72.319.483,50**	**(34.687.725,67)**	-

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO

ANTONIUS GINTING

Lampiran XVIII

Daftar Kewajiban Jangka Panjang

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		KOREKSI UTANG	SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
			N I H I L			

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran XIX

Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2025 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N I H I L					

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Lampiran XX.1

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

LAMPIRAN XX.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)	9	10	11=(9+10)	12	13	14	15	16	17	18=(12+13+14+15 +16+17)	19	20=(18X19)
1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Malem Kabupaten Karo	0,00	0,00	4.337.169.782,00	1.486.042.682,00	8.875.394.526,00	14.698.606.990,00	12.316.792.522,00	0,00	12.316.792.522,00	5.618.103.349,00	0,00	47.657.802.540,00	0,00	(49.168.653.613,00)	(1.725.437.809,00)	2.381.814.467,00	100,00%	2.381.814.467,00

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO

ANTONIUS GINTING

Lampiran XX.2

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Malem Kabupaten Karo	0,00	0,00	9.647.174.900,00	11.429.891.413,00	(1.782.716.513,00)	58.051.242,00	(772.538,00)	(1.725.437.809,00)

Kabanjahe, 24 September 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING